



Setelah G20 tahun 2022, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN pada 2023. Kepemimpinan global dan regional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang mampu menjadi jembatan bagi kemajuan dunia. Sejalan dengan itu, kepemimpinan Indonesia patut didukung oleh segenap masyarakat Indonesia melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah penerbitan gagasan masyarakat Indonesia untuk mendukung kepemimpinan tersebut.

Buku ini berisi kumpulan gagasan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang terkait berbagai topik dalam ASEAN yang sangat menarik. Bagian pertama tentang diplomasi Indonesia menjelaskan soal bagaimana menghadapi ketidakpastian global, 'built for trust, not for conflict', peran strategis diplomasi Inonesia, melindungi ASEAN dari kejahatan transnasional, dan mengelola lingkungan berkelanjutan di ASEAN.

Bagian kedua tentang ekonomi berisi tulisan terkait penguatan ekonomi regional yang fast-growing, inklusif, dan berkelanjutan, kemudian terkait IKN Nusantara, hi-tech, dan transformasi digital, serta 'a journey to wonderful destinations', gagasan terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif dan bagaimana menguatkan UMKM dalam ekosistem digital.

Bagian ketiga tentang pendidikan berisi tulisan tentang imajinasi baru pembelajaran pasca learning loss sebab Covid-19, pendidikan karakter untuk perdamaian global, dan bagaimana peran guru dan dosen untuk meningkatkan pendidikan di regional ASEAN. Bagian ini juga dilengkapi dengan peran bahasa dalam integrasi ASEAN.

Bagian keempat terkait moderasi beragama menyajikan tulisan terkait Islam dan religiositas di ASEAN, otoritas religius dan dialog antar agama di ASEAN, ASEAN sebagai pusat ekonomi syariah global, serta kearifan lokal untuk memajukan ASEAN, dan bagaimana melahirkan 'bintang muda' di ASEAN.

Sedangkan bagian kelima terkait dengan kesehatan dan literasi yang berisi tulisan tentang sehat dan berdaya perempuan ASEAN, tantangan kesehatan ASEAN pasca-pandemi, menumbuhkan literasi di ASEAN, serta kolaborasi pegiat literasi menguatkan identitas ASEAN, dan bagaimana membangun karakter kompetitif manusia ASEAN.



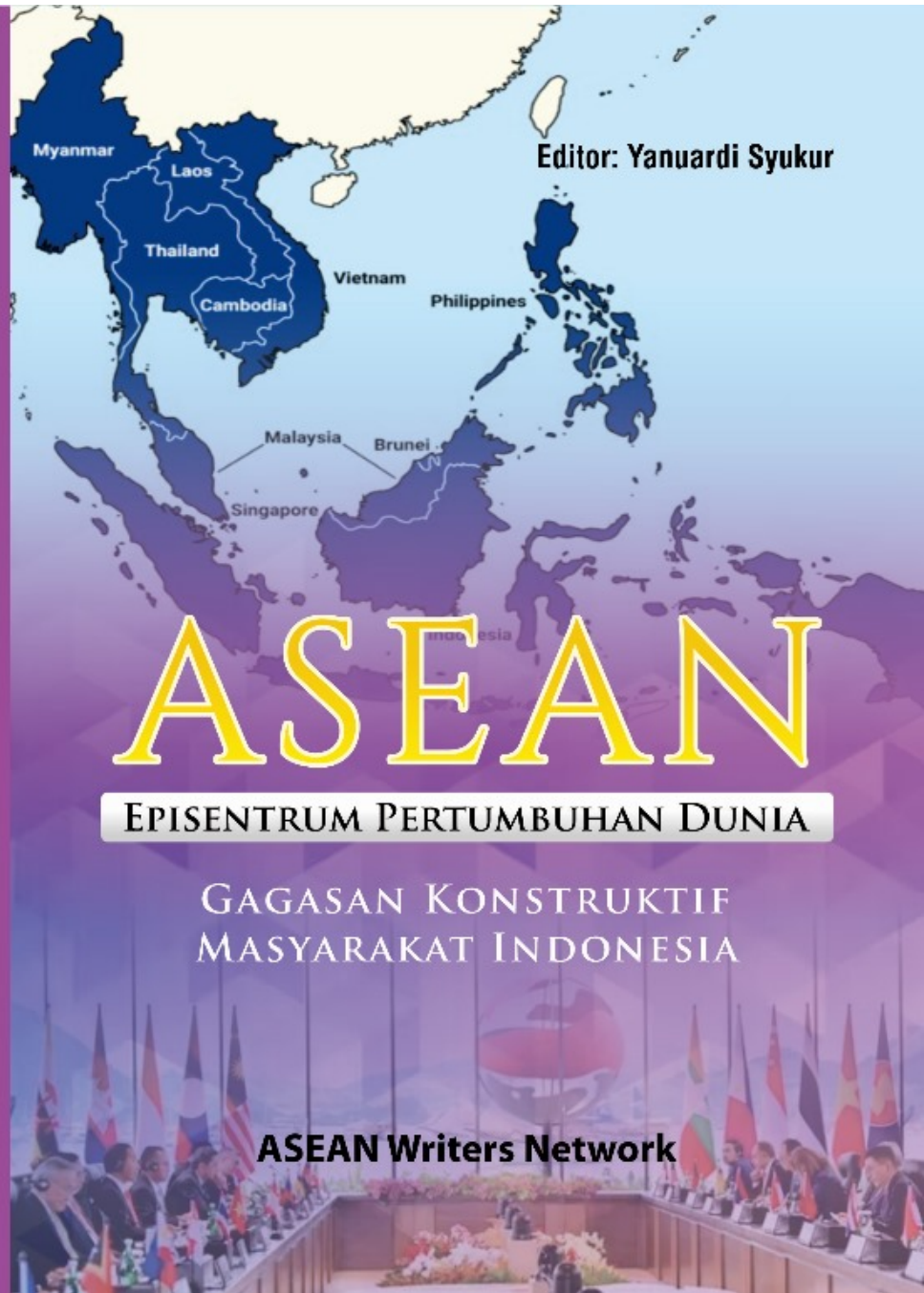
ISBN: 978-623-8430-27-2



EPISENTRUM PERTUMBUHAN DUNIA

ASEAN

GAGASAN
KONSTRUKTIF
MASYARAKAT
INDONESIA



ASEAN

EPISENTRUM PERTUMBUHAN DUNIA

GAGASAN KONSTRUKTIF
MASYARAKAT INDONESIA

Writers:

Hidayat Doe - Melyana Ratana Pugu - Marwan - Sitta Rosdaniah - Rizki Putra Dewantoro - Inggar Saputra
Hasbullah Masudin Yamin DH - Rhidian Yasminta Wasaraka - Dedeh Kurniasih - Al Chaidar Abdurrahman Puteh
Rizki Muhammad Ramdhan - Rakyana Adibrata - Vanda Sakina Damayanti - Achmad Ubaedillah - Emil Radhiansyah
Aloysius Selwas Taborat - Siti Mutmainnah - Iqbal Suliansyah - Muhammad Ibrahim Hamdani - Siti Dwi Arini Putrianti
Roslan Samad - Ryantori - Kholidah Tamami - Mohammad Afifuddin - Khariroh - Muhamad Nasir Pariusamahu
IGN Agung Wiryanata - Nurjanni Astiyanti - Nur Khamim - Afita Nur Hayati - Munawir Aziz - Nenny Rianarizkiwati - Arlen Ara Guci
Sri Sembadra Alya - Suprianto Haseng - Wisnu Adihartono - Siti Amalia - Amal Hasan - Guntur S. Mahardika - Yenni Nur'Aini
Sutiono Gunadi - Lili Dahliani - Eny Dyah Yuniwati - Desy Sulistiyorini - Ngesti Budi Lestari - Muhammad Muhdi Attaufiq
Agung Setiyo Wibowo - Mohamad Hery Saipudin - Mansur Juned - Senja Maghfiroh - Lady Hafidaty Rahma Kautsar
Munawar Khalil N. - Taufiq Amrullah - Apriliana - Nurilah Hanum - Suharti - Junef Ismailiyanto - Wening Purbatin Palupi Soenjoto
Muhammad Rasyid Ridho - Nufzatusaniah - Yuga Pratama - Nurismalatri - Imas Damayanti Lovita - Syahrul Salam
Momy A. Hunowu - Efril Ruliandi Silalahi - Amelia Basarda - Winwin Yadiati - Kaisar Akhir - Bunyan Saptomo - Ardian Nengkoda
Anas Romzy Hibrida - Gita Erlangga K. - Patria Yunita - Ardi Prasetyo - Irma Gusmayanti - Nugraha Pratama
Aula Andika Fikrullah Al Balad - Nugraha Pratama - Eriska Meiyanis - Marlon S.C. Kansil - Ismawan Amir - Agus Sugiharto
Edrida Pulungan - Prety Diawati - Mustika Dewi - Azman Ridha Zain - Hayu S. Prabowo - Abdul Luky Shofiu Azmi
Pizaro Gozali Idrus - Zaky Al Hamzah - Supriyanto - Arrizal Muhaemin Yunus - Arif Yudistira - Agus Ramdani - Reza Fajri - Tri Astari
Wijaya Kusumah - Slamet Wibowo - Retno Puspitasary - Suciati dan Bramastia - Pratiwi Amelia - Ahmed A. O. Shbair
Asriyati Nadjamuddin - Supangat Rohani - Rohmadi - Indar Cahyanto - Susi Fauziah - Mu'minatun - Bambang Kariyawan Ys
Fathnuryati Hidayah - Budiarto Suselmen - Muhammad Ihsanul Arief - Juni Hidayati - Syamsudin Kadir - I. S. Agustiani Agoestian
Zetty Azizatun Ni'mah - Umar Juma Sau - A. Khoirun Nasihin - Fahrudin Achmad - Abustan - Afrianti - Astuti - Dede Mulyanah
Indriani Saraswati - Suryani Tajuddin - Chrisma Juita Nainggolan - Zubir - Puji Wahyuningasih - Romi Mesra
Raiders Salomon Marpaung - Feri Rustandi - Sixson Roberto Simangunsong - Heru Dwi Herbowo - Efitri Yeni - Irianis Rasyidin
Tutus Indah Aryuni - Ahmad Faizuddin - Anisah Setyaningrum - Mariati Aprilia Harahap - Nuim Hidayat - Zikria Desi Anggraini
Ade Solihat - Nanda Khairiyah - Fathu Khairiddin - Sudarnoto Abdul Hakim - Ahmad Baedowi - Ainur Alam Budi Utomo
Ismail Suardi Wекke - Tatang Hidayat - Muhammad Irfanudin Kurniawan - Ariesza Permata - Mhd Alfahjri Sukri - Imam Shamsi Ali
Bunyan Saptomo - Hadiyan - Subandriyah - Harun Faizal - Nur Hidayah - Nurjannah S. - Daryanto Setiawan
Effati Juliana Hasibuan - Ridwan - Adilham - Sayyid Muhammad Yusuf Aidid - Iwan Kuswandi - Nyoman Astawa - Roy Darmawan
Evi Andriani - Dwi Yuniarti - Ritmanto Saleh - Siti Munawarah - Yanti Heriyawati - Afri Wita - Erawati Heru Wardhani
Aan Rukmana - Widwi Astuti - Arciv Arianto - Dionisius Agus Puguh Santosa - Roswita M Aboe - Azzura Ainurri Sabila
Dhiah Ashri - Adnan Arafani - Anisah Syahidah dan Afifah Azizah - Fikri Ihsani - Audra Jovani - Okta Meryana Dewi - Hesty Sari Wijati
Anifatul Kiftiyah - Retno Endrastuti - Ernita Prima Noviyani - Irma Jayatmi - Astrid Novita Haryanto - Bahtiar H. Suhesta
Pricillia Winata - Amalia Irfani - Veni Hadju - Fery Setiawan - Arif Rahman Nurdianto - Rano I Sudra - Beryana Evridawati
M. Sadli Umasangaji - Jesy Fatimah - Rindu - Dandi Birdy - Diah Mahmudah - Ratih Arruum Listiyandini - Anshar Saud
Reno Yonora - Anita Restu Puji Raharjeng - Ernawati Lilys - Sari Wulandari - Anda Juanda - Mas Ayu Sri Wachju Embun Waty
Berti Nurul Khajati - Dian Novrini - Maria Antonia Rahartati Bambang Haryo - Heddy Mochtariza - Sri Margawati - Lucy Yolanda
Rahmiwati Marsinun - Rohimah - Mukhzamilah - Edi Wiyono - Iswadi Syahrial Nupin - Nur Indrawati Pary - Nopiar Rahman
Muhardis - Noralia Purwa Yunita - Billy Antoro - Sry Eka Handayani - Adrinal Tanjung - Bagus Aulia Iskandar
Muhammad Lukman Ashari - Rahman Tanjung - Kamarudin - Muta'addibah Ashri

ASEAN Writers Network

ASEAN

EPISENTRUM PERTUMBUHAN DUNIA

**GAGASAN KONSTRUKTIF
MASYARAKAT INDONESIA**

Editor: Yanuardi Syukur



ASEAN

Episentrum Pertumbuhan Dunia

Gagasan Konstruktif Masyarakat Indonesia

©2023, Yanuardi Syukur, Aan Rukmana, Abdul Luky Shofiul Azmi, et.all.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xxii + 938 halaman; 17,5 cm x 25 cm

ISBN: 978-623-8435-27-2

Cetakan Pertama, Desember 2023

Editor : Yanuardi Syukur

Tata Letak Isi : Rasyid Hidayat

Desain Sampul : Ahmad Hanin Lathif

Diterbitkan oleh:

MATA KATA INSPIRASI

(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)

Gampingan RT 003, Dusun Munggang,

Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul

Email: matakatainspirasi@gmail.com

www.matakatainspirasi.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Catatan Editor	xv
Prolog	
ASEAN: Polikrisis dan Kolaborasi	xvii
<i>Yanuardi Syukur</i>	
Bagian Pertama	
<i>Built For Trust, Not For Conflict:</i>	
Ketidakpastian Global Dan Diplomasi Indonesia Menyelesaikan Konflik	
Regional ASEAN	1
BAB 1	
Menghadapi Ketidakpastian Global: Tantangan ASEAN dalam Menguatkan Stabilitas	
Politik-Kemampuan Regional	2
• ASEAN di Tengah Pertarungan Geopolitik AS-China - <i>Hidayat Doe</i>	3
• Konsep ASEAN <i>Outlook on Indo-Pacific</i> dan Kepentingan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan - <i>Melyana Ratana Pugu</i>	5
• Tantangan ASEAN dan Modalitas Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) - <i>Marwan</i>	10
• Forum ASEAN dan Indo-Pasifik 2023, Penguatan Kerja sama <i>flagship</i> Masa Depan - <i>Sitta Rosdaniah</i>	15
• Resiliensi Regional di Tengah Tantangan Multidimensi - <i>Rizki Putra Dewantoro</i>	17
• Tantangan Politik dan Keamanan Indonesia dalam Kepemimpinan ASEAN 2023 - <i>Inggar Saputra</i>	21
• Unifikasi Ketahanan ASEAN Menuju <i>One ASEAN Identity</i> - <i>Hasbullah Masudin Yamin DH</i>	23
• Merangkul Pasifik, Membangun Kekuatan Bersama - <i>Rhidian Yasminta Wasaraka</i>	27
• ASEAN Economic Community 2025, Antara Keinginan dan Kenyataan - <i>Dedeh Kurniasih</i>	31
• Nomocracy for ASEAN: Introducing a New Multistage Representative Election System <i>Al Chaidar Abdurrahman Puteh</i>	34
• Terobosan ASEAN Menuju Kesejahteraan Bersama - <i>Rizki Muhammad Ramdhan</i>	44
• Penanggulangan Terorisme di Indonesia dan Dampaknya di Level ASEAN - <i>Rakyan Adibrata</i>	46
• Peran Indonesia untuk Perdamaian Dunia - <i>Vanda Sakina Damayanti</i>	48
BAB 2	
<i>Built for Trust, Not for Conflict: Praktik Baik Resolusi Konflik Regional ASEAN</i>	50
• Faktor Islam dalam Diplomasi Indonesia terhadap Konflik dan Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar <i>Achmad Ubaedillah</i>	51

• Efektivitas SPC ASEAN dalam menyelesaikan Problematika Kudeta Militer di Myanmar - <i>Emil Radhiansyah</i> ..	54
• Can sanctions work on Myanmar's Junta? An international legal appraisal - <i>Aloysius Selwas Taborat</i>	62
• Kebersamaan dalam Kemanusiaan: Upaya ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Myanmar - <i>Siti Mutmainnah</i> .	65
• ASEAN dan Isu Laut China Selatan - <i>Iqbal Suliansyah</i>	68
• ASEAN, China dan Konflik Perbatasan di Laut China Selatan - <i>Muhammad Ibrahim Hamdani</i>	71
• Pentingnya Penerapan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Batas Negara - <i>Siti Dwi Arini Putrianti</i>	74
• Dasasila Bandung 1955: Multilateralisme dan Pilar Kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN - <i>Roslan Samad</i>	76

BAB 3

Peran Strategis Diplomasi Indonesia: Pertumbuhan Nasional dan Jembatan Kemajuan ASEAN.....	81
• Diplomasi Perjuangan dan ASEAN dalam Politik Luar Negeri Orde Baru - <i>Ryantori</i>	82
• Peran Indonesia Sebagai Satu-satunya Negara ASEAN di G20 - <i>Kholidah Tamami</i>	86
• ASEAN dan Hikayat ASLIA Tan Malaka - <i>Mohammad Afifuddin</i>	97
• Memantapkan Kerja sama Sinergis Persekutuan Negara-Negara Asia Tenggara - <i>Khariroh</i>	100
• Diplomasi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Resmi ASEAN - <i>Muhamad Nasir Pariusamahu</i>	101
• Gastrodiplomacy: Branding Indonesia di ASEAN - <i>IGN Agung Wiryanata</i>	105
• Guru SILN sebagai <i>Soft Power Diplomacy</i> Indonesia-ASEAN - <i>Nurjanni Astiyanti</i>	109
• Membangun Koneksi ASEAN melalui Budaya dan Wisata Halal - <i>Nur Khamim</i>	111
• Merawat Harmoni di ASEAN - <i>Afta Nur Hayati</i>	114
• NU, ASEAN dan Strategi Diplomasi - <i>Munawir Aziz</i>	117

BAB 4

Melindungi ASEAN dari Kejahatan Transnasional	120
• Implementasi Hak Asasi Manusia: Hak atas Pelindungan Data Pribadi di ASEAN - <i>Nenny Rianarizkiwati</i> ...	121
• Isu <i>Human Trafficking</i> Hubungan Indonesia-Malaysia - <i>Arlen Ara Guci</i>	125
• Problematika dan Upaya Pemberantasan Narkoba di Negara ASEAN - <i>Sri Sembadra Alya</i>	129
• Korupsi Lintas Negara, Mampukah Indonesia Sebagai Chairmanship ASEAN 2023 Memberantasnya? - <i>Suprianto Haseng</i>	133
• Telaah ASEAN dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pekerja Migran/Pekerja Rumah Tangga - <i>Wisnu Adihartono</i>	138
• Membangun Keamanan Digital di ASEAN - <i>Siti Amalia</i>	142
• Mengembangkan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) yang Ramah untuk ASEAN - <i>Amal Hasan</i>	146

BAB 5

Mengelola Lingkungan Berkelanjutan di ASEAN	148
• Ketahanan Pangan ASEAN di Tengah Krisis Global - <i>Guntur S. Mahardika</i>	149
• Infrastruktur Hijau ASEAN: Kontribusi Nyata ASEAN dalam Mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> - <i>Yenni Nur Aini</i>	152
• ASEAN Melestarikan Lingkungan Berkelanjutan - <i>Sutiono Gunadi</i>	157
• Multiperspektif Perkebunan Ramah Lingkungan di ASEAN - <i>Lili Dahliani dan Eny Dyah Yuniwati</i>	160

• Land Husbandry Pertanian: Teknologi Biochar untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Ramah Lingkungan di ASEAN - <i>Eny Dyah Yuniwati</i>	165
• Zero Waste & Circular Economic Approach: Perekonomian ASEAN yang Bertumbuh Selaras dengan Lingkungan dan Masyarakat yang Sehat - <i>Desy Sulistiyorini</i>	170
• Kerjasama Memajukan ASEAN - <i>Ngesti Budi Lestari</i>	175
• Komitmen ASEAN dalam Mengimplementasikan <i>Net Zero Emmissions</i> dalam Merespon Perubahan Iklim - <i>Muhammad Muhi Attaufiq</i>	177
• Polusi Kabut Asap Indonesia dalam Perspektif Keamanan ASEAN - <i>Agung Setiyo Wibowo</i>	182
• Upaya ASEAN Mewujudkan <i>Zero Carbon</i> di Tengah Covid-19 - <i>Mohamad Hery Saipudin dan Mansur Juned</i>	187
• Krisis Bahan Pangan di Tahun 2045 Mendatang - <i>Senja Maghfiroh</i>	191
• Adaptasi Pertanian Beberapa Negara ASEAN dalam Menghadapi Perubahan Iklim - <i>Lady Hafidaty Rahma Kautsar</i>	193
• Penguatan Cadangan Pangan Regional Melalui APTERR - <i>Munawar Khalil N</i>	197

Bagian Kedua

ASEAN Episentrum Pertumbuhan Global:

Penguatan Ekonomi Regional yang Cepat, Inklusif dan Berkelanjutan	203
--	------------

BAB 6

ASEAN sebagai “Episentrum Pertumbuhan”:

Penguatan Ekonomi Regional yang Fast-Growing, Inklusif dan Berkelanjutan.....	204
• Kawasan ASEAN, Subjek atau Objek Pertumbuhan Dunia? - <i>Taufiq Amrullah</i>	205
• Mencukupi Kebutuhan Pangan Negara ASEAN: Peluang dan Tantangan - <i>Apriliana</i>	207
• Menghadapi Resesi Ekonomi - <i>Nurilah Hanum</i>	212
• Peranan ASEAN dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 - <i>Suharti</i>	215
• Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pilar Kemajuan dan Kemakmuran Asia Tenggara - <i>Junef Ismailiyanto</i>	220
• Antara Surga dan Neraka: Gambaran Perkembangan Kemakmuran Negara-Negara Berkembang di ASEAN - <i>Wening Purbatin Palupi Soenjoto</i>	230
• Ketetuaan Indonesia ASEAN 2023 dan Komitmen Implementasi Ekonomi Sirkular Regional - <i>Muhammad Rasyid Ridho</i>	235
• Ketahanan Manusia untuk Meningkatkan Ekonomi ASEAN di Masa Covid-19 - <i>Nufzatutsaniah, Yuga Pratama, Nurismalatri</i>	240
• <i>Psychological Well-Being</i> dalam Membangun Kesiapan <i>Future Work</i> Masyarakat ASEAN - <i>Imas Damayanti Lovita</i>	246
• Stabilitas Ekonomi Pasca Covid-19: Ketahanan dan Respon ASEAN Melalui <i>ASEAN Plus Three</i> - <i>Syahrul Salam</i>	250
• Produksi Jagung ASEAN dan Pemihakan pada Petani Kecil - <i>Momy A. Hunowu</i>	254
• Gerakan Credit Union: Manifestasi Kemandirian Ekonomi ASEAN - <i>Efrial Ruliandi Silalahi</i>	259
• Menatap Masa Depan Baru: Peran RCEP dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di ASEAN - <i>Amelia Basarda</i>	263
• Integrated Reporting, Alternatif Pengkomunikasian Informasi Korporasi di ASEAN - <i>Winwin Yadiati</i>	265
• Mewujudkan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan Melalui Pemuda Ekonomi Biru 4.0 - <i>Kaisar Akhir</i>	267

BAB 7

IKN Nusantara, Hi-Tech, dan Transformasi Digital Indonesia	269
• Pemindahan IKN dan Relevansinya bagi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN - <i>Bunyan Saptomo</i>	270
• Infrastruktur Sekolah Sehat dan Ramah Lingkungan IKN Sebagai Hub ASEAN - <i>Ardian Nengkoda</i>	273
• Kontribusi Nyata Indonesia dalam mewujudkan Ekonomi Biru ASEAN - <i>Anas Romzy Hibrida</i>	279
• Perkembangan IPTEK dan Sains di ASEAN - <i>Gita Erlangga K.</i>	284
• Adoption of Technological Advancement in ASEAN Moslem Countries: Case Study in Indonesia - <i>Patria Yunita</i>	287
• Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN - <i>Ardi Prasetyo</i>	295
• ASEAN Power Grid: Kerja sama Interkoneksi Listrik di Asia Tenggara untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Regional - <i>Irma Gusmayanti</i>	298
• Demokrasi Siber dan Kedaulatan Siber di Asia Tenggara dalam Membangun Masyarakat Digital ASEAN 2025 - <i>Mansur Juned dan Nugraha Pratama</i>	303
• G20, Momentum Tranformasi Digital - <i>Aula Andika Fikrullah Al Balad</i>	307
• Literasi Digital Sebagai Fondasi Masyarakat Digital ASEAN 2025 - <i>Nugraha Pratama dan Eriska Meiyanis</i> .	310
• Digitalisasi ASEAN: Transformasi Menjelang Paradigma Hiper-realitas - <i>Marlon S.C. Kansil</i>	315

BAB 8

A Journey to Wonderful Destinations:

Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk ASEAN.....	319
• Strategi Marketing Brand di ASEAN Pasca Pandemi Covid-19 - <i>Ismawan Amir</i>	320
• Peluang Ekonomi Kreatif di ASEAN: Studi Musik Dangdut Koplo (D-Kop) di Indonesia - <i>Agus Sugiharto</i>	323
• Inovasi Pengembangan Pariwisata ASEAN Masa Pandemi Covid-19: Kolaborasi Bersama Menuju Destinasi Tunggal ASEAN - <i>Edrida Pulungan</i>	327
• Ikon <i>Green Tourism Village</i> dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Daya Ekonomi Kreatif - <i>Prety Diawati</i>	332
• Strategi Kuliner Nusantara Merambah Pasar ASEAN - <i>Mustika Dewi</i>	340
• Peranan Penting Indonesia Bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di ASEAN - <i>Azman Ridha Zain</i>	343

BAB 9

Penguatan UMKM dalam Ekosistem Digital	349
• Transformasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM ASEAN - <i>Hayu S. Prabowo</i>	350
• Penguatan Small Medium Enterprise di ASEAN dalam Ekosistem Digital - <i>Abdul Luky Shofiful Azmi</i>	354
• Dari <i>Mobile First</i> ke <i>Mobile Only</i> : Prospek Ekonomi Digital ASEAN dan Strategi Bagi UMKM Indonesia - <i>Pizaro Gozali Idrus</i>	360
• Kolaborasi Menjadi Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN - <i>Zaky Al Hamzah</i>	364
• Transformasi Digital dalam Pemulihan Ekonomi ASEAN - <i>Supriyanto</i>	369

Bagian Ketiga

Membangun Sistem Pendidikan ASEAN Berkualitas 373

BAB 10

Imajinasi Baru Pembelajaran Pasca Learning Loss Covid-19 374

- *Metaverse di Dunia Pendidikan ASEAN - Arrizal Muhaemin Yunus* 375
- *Kerja sama Pendidikan dan Momentum Kepemimpinan Indonesia 2023 - Arif Yudistira* 380
- *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri (Solusi Lulusan LKP Tembus Pasar ASEAN) - Agus Ramdani* 384
- *Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah 3T ASEAN - Reza Fajri* 389
- *Transformasi Kurikulum Pendidikan Dasar di Negara Asean - Tri Astari* 391
- *Labschool sebagai Center for Excellence di Indonesia dan ASEAN - Wijaya Kusumah* 398
- *Mewujudkan Pendidikan Bermartabat untuk Siswa Inklusi di Sekolah Umum ASEAN - Slamet Wibowo* ... 401
- *Pengaruh Industri 4.0 Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia-ASEAN - Retno Puspitasary* 404
- *Model Pembelajaran SOLE Berbasis Sains di ASEAN - Suciati dan Bramastia* 409
- *Post Pandemic Covid-19 as Trigger for ASEAN Higher Educational Transformation - Pratiwi Amelia and Ahmed A. O. Shbair* 414
- *Kebijakan Pendidikan Negara-Negara ASEAN dalam Mendukung Pengasuhan Anak dalam Keluarga - Asriyati Nadjamuddin* 419

BAB 11

Pendidikan Karakter untuk Perdamaian Global 425

- *Pendidikan Karakter untuk Masa Depan Kawasan ASEAN - Supangat Rohani* 426
- *Model Pendidikan Multikultural Negara ASEAN - Rohmadi* 430
- *Memajukan Pendidikan dan Penanaman Karakter di Indonesia dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN... - Indar Cahyanto* 439
- *Global Citizenship Education (GCED) sebagai Pendidikan Transformatif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kawasan ASEAN - Susi Fauziah* 445
- *Kompetensi Cyber Pedagogik Guru dan Literasi Digital di ASEAN - Mu'minatin* 450
- *Menumbuhkan Keharmonisan Bangsa Serumpun Melalui Festival dan Platform Sastra Digital ASEAN - Bambang Kariyawan Ys* 453
- *Mencegah Kekerasan terhadap Anak di ASEAN - Fathnuryati Hidayah* 457
- *Membumikan Nilai Kebhinekaan dan Mereduksi Intoleransi di ASEAN - Budiarto Suselmen* 462
- *Rethinking Peace Building Di Kawasan ASEAN - Muhammad Ihsanul Arief* 465
- *Indahnya Pluralitas Masyarakat Indonesia - Juni Hidayati* 469
- *Mewujudkan Perdamaian Global; Dari ASEAN untuk Dunia - Syamsudin Kadir* 473
- *Merajut Perdamaian Melalui Budaya ASEAN - I. S. Agustiani Agoestian* 477
- *Harmonisasi Keberagaman untuk ASEAN Bebas Konflik - Zetty Azizaton Ni'mah* 481
- *ASEAN Sebagai Motor Perdamaian Dunia - Umar Juma Sau* 486
- *Menyemai Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural di Kawasan ASEAN - A. Khoirun Nasihin* . 487

BAB 12

Peran Guru dan Dosen dalam Pendidikan ASEAN.....	489
• Urgensi Peningkatan Pertukaran Guru Antar negara ASEAN - <i>Fahrudin Achmad</i>	490
• ASEAN Memperkokoh Eksistensi Bangsa - <i>Abustan</i>	493
• Peranan Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah 3T di ASEAN - <i>Afrianti</i>	497
• Peran Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di ASEAN - <i>Astuti</i>	501
• Literasi Digital Guru dan Praktik Baik di ASEAN - <i>Dede Mulyanah</i>	505
• Peran Guru ASEAN di Era Society 5.0 - <i>Indriani Saraswati</i>	507
• Peran Rulit Guru Sulteng dalam Mengobarkan Semangat Berliterasi di ASEAN - <i>Suryani Tajuddin</i>	509
• Indonesia Memajukan Pendidikan ASEAN - <i>Chrisma Juita Nainggolan</i>	514
• Pertukaran Guru ASEAN: Sebuah Inisiatif Belajar Lebih Luas - <i>Zubir</i>	516
• Guru dan Tantangan Mengajar di Era Keterbukaan - <i>Puji Wahyuningasih</i>	518
• Peran Dosen Ilmu Sosial dalam Resiliensi Pendidikan Indonesia-ASEAN Pasca Pandemi Covid-19 - <i>Romi Mesra</i> ..	520
• Reformasi Pendidikan Tinggi Indonesia dan ASEAN - <i>Raiders Salomon Marpaung</i>	526
• Berkah Pandemi Covid-19, Transformasi Pendidikan Berbasis Digital - <i>Feri Rustandi</i>	531
• Pentingnya Pendidikan Tinggi dan Vokasi di ASEAN - <i>Sixson Roberto Simangunsong</i>	535
• Peran ASEAN dalam Memajukan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional - <i>Heru Dwi Herbowo</i>	538

BAB 13

Peran Bahasa dalam Integrasi ASEAN.....	542
• Bahasa Melayu Mempersatukan ASEAN - <i>Efitri Yeni</i>	543
• Mempelajari Bahasa Asing sebagai Bekal Interaksi Global - <i>Irianis Rasyidin</i>	546
• Bebas Aktif Pendidikan Bahasa Antar Negara ASEAN yang Bermartabat - <i>Tutus Indah Aryuni</i>	547
• Kontestasi Ideologis Bahasa Lokal dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris di Negara-Negara ASEAN - <i>Ahmad Faizuddin</i>	551
• Tantangan Pengajar Indonesia dalam Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Inggris sebagai <i>Lingua Franca</i> Negara-negara ASEAN - <i>Anisah Setyaningrum</i>	558
• Pentingnya Bahasa Arab Dalam Ijtihad di Kawasan Asia Tenggara - <i>Mariati Aprilia Harahap</i>	561
• Nasib Bahasa Indonesia - <i>Nuim Hidayat</i>	564
• Dukungan terhadap Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Kolektif ASEAN - <i>Zikria Desi Anggraini</i>	566

Bagian Keempat

Moderasi Beragama:

Dinamika Keagamaan, Otoritas Religius, dan Kearifan Lokal Memajukan ASEAN	569
--	------------

BAB 14

Islam dan Religiusitas di ASEAN	570
• Warna Islam Asia Tenggara - <i>Ade Solihat</i>	571
• Paradigma Islam Nusantara dan Corak Islam ASEAN - <i>Nanda Khairiyah</i>	576

• Penyebaran Islam di ASEAN - <i>Fathu Khairiddin</i>	580
• Islamofobia di Asia Tenggara: Ancaman dan Penanggulangannya - <i>Sudarnoto Abdul Hakim</i>	586
• Peran Religiusitas dan Moderasi Beragama Masyarakat ASEAN Pada Tahun Resesi - <i>Ahmad Baedowi</i>	591
• Teologi Moderasi Dalam Islam dan Internalisasinya Pada Generasi Muda Muslim Indonesia - <i>Ainur Alam Budi Utomo</i>	595
• Pendidikan Islam Asia Tenggara: Ragam Bentuk dan Transformasi Kelembagaan - <i>Ismail Suardi Wekke</i> ...	600
• Pesantren dan Masa Depan Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia Untuk ASEAN - <i>Tatang Hidayat</i>	604
• Sumbangan Pesantren kepada ASEAN dan Dunia: Pengalaman Pesantren Darunnajah - <i>Muhammad Irfanudin Kurniawan</i>	609
• Hadrah Music Education as a Youth Faith Improvement - <i>Ariesza Permata</i>	612
• Pendekatan Agama, Solusi Atasi Terorisme Atas Nama Agama di ASEAN - <i>Mhd Alfahjri Sukri</i>	617

BAB 15

Otoritas Religius dan Dialog Antar Agama di ASEAN	622
• Umat dan Kepemimpinan Dunia Global - <i>Imam Shamsi Ali</i>	623
• Urgensi Forum Lintas Agama Bagi Perdamaian di ASEAN - <i>Bunyan Saptomo</i>	625
• Urgensi Dialog antar Iman di Kawasan ASEAN - <i>Hadiyan</i>	629
• Dialog Antarumat Beragama di ASEAN - <i>Daryanto Setiawan dan Effiati Juliana Hasibuan</i>	632
• Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023 - <i>Ridwan</i>	637
• Tokoh Agama sebagai Pelopor Perdamaian ASEAN - <i>Adilham</i>	639
• Peran Dakwah Wasathiyah (Moderat) <i>Habib Umar bin Hafidz di Asia Tenggara</i> - Sayyid Muhammad Yusuf Aidid 644	
• Indonesia dan ASEAN dalam Relasi Ulama - <i>Iwan Kuswandi</i>	650

BAB 16

ASEAN sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global	655
• ASEAN Halal Food: Penjamin Produk Halal Indonesia - <i>Subandriyah</i>	656
• ASEAN dan Sistem Keuangan Islam - <i>Harun Faizal</i>	661
• ASEAN sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global: Analisa SWOT - <i>Nur Hidayah</i>	664
• Sertifikasi Halal Pro Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kerja sama Industri Halal di ASEAN - <i>Nurjannah S.</i>	668

BAB 17

Kearifan Lokal Memajukan ASEAN	673
• Panggilan Perdamaian dari Bali - <i>Nyoman Astawa</i>	674
• Kesamaan Budaya Sebagai Modal Kuat Kegemilangan ASEAN - <i>Roy Darmawan</i>	679
• Festival Film ASEAN dan Integrasi Budaya - <i>Evi Andriani</i>	681

• Kebaya Warisan ASEAN untuk Dunia - <i>Dwi Yuniarti</i>	684
• Mars dan Himne dalam Budaya Indonesia - <i>Ritmanto Saleh</i>	686
• Globalisasi dan Kearifan Lokal - <i>Siti Munawarah</i>	690
• Dewi Laut sebagai Kearifan Lokal Maritim Asia - <i>Yanti Heriyawati dan Afri Wita</i>	693
• Cerita Rakyat Sebagai Media Silaturahmi Kultural Negara-Negara ASEAN - <i>Erawati Heru Wardhani</i>	697
• Prospek Masa Depan Masyarakat ASEAN - <i>Aan Rukmana</i>	701
• Wayang Kulit Indonesia di Kancah ASEAN - <i>Widwi Astuti</i>	704

BAB 18

Melahirkan Bintang Muda di ASEAN	706
• Pemberdayaan Pemuda ASEAN: Bersinergi Menuju Masa Depan Berkilau - <i>Arciv Arianto</i>	707
• Sinergitas ASEAN dan Kepanduan Asia-Pasifik - <i>Dionisius Agus Puguh Santosa</i>	708
• Pertukaran Pemuda ASEAN - <i>Roswita M Aboe</i>	713
• Peran Generasi Muda untuk Mendukung Literasi di ASEAN - <i>Azzura Ainurri Sabila</i>	717
• Menyiapkan Generasi ASEAN Berkarakter Mulia - <i>Dhiah Ashri</i>	721
• Mempersiapkan Generasi Terbaik Pewaris ASEAN - <i>Adnan Arafani</i>	724
• Peran Pesantren Menyiapkan Calon Pemimpin Global - <i>Anisah Syahidah dan Afifah Azizah</i>	726
• Menjadi Santri Go International - <i>Fikri Ihsani</i>	729

Bagian Kelima

Menuju ASEAN Sehat & Literat: Potret Perempuan, Kesehatan, dan Literasi	731
--	------------

BAB 19

Sehat dan Berdaya Perempuan ASEAN	732
• Partisipasi Politik Perempuan dan Komitmen Kesetaraan Gender Negara-Negara ASEAN - <i>Audra Jovani</i> ..	733
• Komitmen ASEAN Dalam Pemberdayaan Perempuan Digitalisasi Ekonomi Inklusif Pasca Covid-19 - <i>Okta Meryana Dewi</i>	737
• Pekka Tangguh Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Bagi ASEAN - <i>Hesty Sari Wijati</i>	741
• Women Empowerment dalam Membangun Ekonomi Digital - <i>Anifatul Kiftiyah</i>	745
• Penguatan Resiliensi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Aksesibilitas Layanan Kesehatan Mental Ibu - <i>Retno Endrastuti</i>	749
• Pentingnya Kesehatan Psikologis Ibu Hamil Menghadapi Persalinan - <i>Ernita Prima Noviyani</i>	753
• Peran Bidan dalam Transformasi Kesehatan Ibu dan Anak Pasca Pandemi Covid 19 di Negara ASEAN - <i>Irma Jayatmi</i>	758
• Ketahanan Keluarga membangun Ketahanan Kesehatan Global - <i>Astrid Novita Haryanto</i>	763
• Membendung LGBT di ASEAN melalui ASEAN Family Network - <i>Bahtiar H. Suhesta</i>	768
• Menumbuhkan Sikap Toleransi di Kawasan ASEAN melalui Pendidikan Keluarga - <i>Pricillia Winata</i>	774
• ASEAN dan Tugas Perlindungan Hak Politik Perempuan - <i>Amalia Irfani</i>	777

BAB 20

Tantangan Kesehatan ASEAN Pasca-Pandemi	779
• Stunting Pada Anak dan Tinggi Badan Rata-Rata Orang Dewasa: Mengapa Orang Indonesia Paling Pendek? - <i>Veni Hadju</i>	780
• Penyebaran COVID-19 Variant Omicron sebagai The 5 th <i>Variant of Concerns</i> (VOC) di ASEAN dan Prospek ke depannya - <i>Fery Setiawan</i>	782
• Tantangan Dunia dalam Menghadapi Langya Virus Pemicu <i>Outbreak</i> Baru dan <i>Current Health Concerns</i> - <i>Arif Rahman Nurdianto</i>	790
• Menggagas Interoperabilitas dan Interkoneksi Rekam Medis Elektronik di ASEAN - <i>Rano I Sudra</i>	795
• Menurunkan Stunting di ASEAN - <i>Beryana Evridawati</i>	800
• Tinggi Badan Orang Asia Tenggara dan Isu Stunting di Indonesia - <i>M. Sadli Umasangaji</i>	804
• Transformasi Layanan Kesehatan Digital Kawasan ASEAN - <i>Jesy Fatimah</i>	809
• Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Industri Rokok di Negara ASEAN - <i>Rindu</i>	812
• Stop Stigma Kesehatan Mental! - <i>Dandi Birdy dan Diah Mahmudah</i>	816
• Layanan Kesehatan Mental Berbasis Internet untuk Generasi Muda di Negara Berkembang - <i>Ratih Arruum Listiyandini</i>	821
• Misi U.S. – ASEAN dan ASEAN Health Cluster 3 Penguatan Sistem Kesehatan dan Akses Terhadap Perawatan - <i>Anshar Saud</i>	823
• Kebangkitan Sosioekonomi Negara ASEAN Pasca Pandemi - <i>Reno Yonora</i>	827
• Budidaya Tanaman Lokal sebagai Upaya Menekan Laju Penyakit Diabetes Mellitus di ASEAN - <i>Anita Restu Puji Raharjeng</i>	830

BAB 21

Menumbuhkan Literasi di ASEAN	833
• Membangkitkan Literasi di Negara ASEAN - <i>Ernawati Lilys</i>	834
• Negeri Literat Impian - <i>Sari Wulandari</i>	837
• Melek Literasi Di Tataran Negara ASEAN - <i>Anda Juanda</i>	840
• Pantun Membawa Sejuta Rasa ASEAN - <i>Mas Ayu Sri Wachju Embun Waty</i>	844
• Mendukung ASEAN Melalui Cerita Anak - <i>Berti Nurul Khajati</i>	847
• Menggiatkan Literasi pada Sekolah SEAMEO - <i>Dian Novrini</i>	852
• Peran Pesan dalam Penerjemahan - <i>Maria Antonia Rahartati Bambang Haryo</i>	856
• Road Blog to E-Book Attribute, Salah Satu Upaya Literasi Ramah Lingkungan - <i>Heddy Mochtariza</i>	861
• Peran Sastra di Era Globalisasi - <i>Sri Margawati</i>	864
• Sumbangsih Sastra bagi ASEAN - <i>Lucy Yolanda</i>	867
• Pesona Pantun di Mata Dunia - <i>Rahmiwati Marsinun</i>	870
• Literasi Mengenal Negara ASEAN untuk Sekolah Dasar - <i>Rohimah</i>	874
• Literasi Lintas Budaya ASEAN yang Tak Bertepi - <i>Mukhzamilah</i>	877

BAB 22

Kolaborasi Pegiat Literasi Menguatkan Identitas ASEAN	879
• Optimalisasi Peran CONSAL dalam Penguatan Pustakawan ASEAN - <i>Edi Wiyono</i>	880
• Pentingnya Pembentukan Forum Pegiat Literasi ASEAN - <i>Iswadi Syahrial Nupin</i>	883
• Menggagas Sinergi dan Kolaborasi Aktif Pustakawan dan Pegiat Literasi ASEAN - <i>Nur Indrawati Pary</i>	888
• Peran Pustakawan (Sekolah) ASEAN di Era Informasi dan Global - <i>Nopiar Rahman</i>	891
• <i>Sastrawan ASEAN Goes to School: Model Penguatan Narasi Identitas - Muhardis</i>	894
• APEL 8, Wujud Aksi Nyata Gerakan Literasi Sekolah - <i>Noralia Purwa Yunita</i>	899
• Kolaborasi Literasi Tingkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat ASEAN - <i>Billy Antoro</i>	904
• Meningkatkan Literasi Pendidikan Melalui Taman Bacaan Masyarakat di Asia Tenggara - <i>Sry Eka Handayani</i>	907

BAB 23

Membangun Karakter Kompetitif Manusia ASEAN	911
• Reformasi Birokrasi, Daya Saing dan Kompetisi Antarnegara ASEAN - <i>Adrinal Tanjung</i>	912
• Budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja - <i>Bagus Aulia Iskandar</i>	915
• Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Era Informasi Bebas - <i>Muhammad Lukman Ashari</i>	919
• Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkup ASEAN Melalui Program Magang - <i>Rahman Tanjung</i>	925
• Urgensi Pendidikan Karakter di ASEAN - <i>Kamarudin</i>	930
• Meningkatkan Pengetahuan, Jaringan, dan Keterlibatan Global - <i>Muta'addibah Ashri</i>	934
Profil ASEAN Writers Network	936
Profil Editor	937

CATATAN EDITOR

Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kontribusi masyarakat Indonesia melalui tulisan terkait isu-isu internasional kontemporer. Selain itu, kolaborasi tulisan juga bertujuan agar masyarakat kembali membaca, merenung, dan memikirkan suatu fenomena serta mencoba mencari jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang muncul sangatlah ditentukan oleh sejauh mana bacaan, perhatian, pengalaman, dan juga kedalaman kontemplasi sang penulis terhadap isu tersebut.

Apa yang disebut sebagai 'dalam', tidak semata dilihat dari panjang-pendeknya sebuah tulisan, akan tetapi dari sejauh mana sang penulis dapat mencermati dan mengelaborasi isu-isu terkait dengan melihat segenap potensinya-penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Terlepas dari 'kedalaman relatif' tersebut, semua kontribusi gagasan dalam buku mendapatkan apresiasi dan kesempatan yang sama untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Kami berpandangan bahwa semua tulisan yang ada dalam buku ini adalah positif, menarik, dan patut untuk dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai publikasi.

Inisiatif penyusunan buku ini tidak terlepas dari inisiatif sebelumnya, yakni buku yang disusun dalam rangka menyukseskan presidensi G20. Buku dwi-bahasa (8 jilid, masing-masing 4 jilid) tersebut berjudul *Pulih Bersama Bangkit Perkasa & Recover Together Recover Stronger* (Perpusnas Press, 2022), dan diluncurkan di Perpusnas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta (Senin, 13/10/2022). Peluncuran buku dihadiri oleh Kepala Perpusnas RI, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga serta para penulis.

Selain peluncuran, konten buku tersebut juga didiseminasi melalui *International Conference on Indonesia and Global Affairs* (ICIGA) yang berlangsung di beberapa lokasi seperti Gedung BRIN, Gedung ITS Tower, Universitas Paramadina, Gedung DPRD DKI Jakarta, dan sebuah hotel di Bendungan Hilir, Jakarta: Eightin. Buku juga disebarkan ke berbagai institusi, salah satunya ke *Library of Congress*, perpustakaan terbesar di dunia di Washington, D.C.

Setelah G20, Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Inisiatif untuk membuat buku pada event Indonesia sebagai *chairman* ASEAN pun muncul. Awalnya, lebih 500 calon penulis bergabung dalam Grup Whatsapp, dari Indonesia dan negara tetangga. Namun, hingga tenggat waktu, hanya lebih 180 penulis yang berhasil mengirimkan karyanya. Angka tersebut menurut kami sangat luar biasa, sebab sejauh ini belum ada inisiatif masyarakat sipil untuk menyukseskan ASEAN yang menerbitkan kumpulan tulisan sebanyak itu. Begitu juga dengan inisiatif sebelumnya, belum ditemukan adanya inisiatif masyarakat sipil yang mengumpulkan ratusan penulis untuk berkontribusi gagasan dalam satu buku. Kedua buku tersebut bersifat khas dan menjadi 'kebaruan' dalam keterlibatan masyarakat terhadap event internasional melalui tulisan.

Sebagai inisiator dan editor, kami mencermati tulisan yang ada yang menunjukkan keragaman. Keragaman tersebut disebabkan oleh sejauh mana keterlibatan penulis dalam isu tersebut, serta sejauh mana pula bacaan, renungan, dan jam terbang penulis isu-isu ASEAN. Di antara tulisan ada yang tidak banyak diedit, sebab kontennya telah kaya dan mendalam, akan tetapi yang lainnya ada yang diedit pada judul, pendahuluan, isi, referensi, hingga biodata penulis. Ada konten yang terlalu sarat informasi, olehnya itu beberapa bagian dipindahkan ke catatan kaki; ada yang dipangkas karena terlalu panjang, serta ada yang ditulis ulang agar gagasan utamanya dapat ditangkap oleh pembaca. Perbaikan *typo* adalah keniscayaan, sebab tak jarang ada tulisan yang disingkat (seperti 'yg' diganti *yang*), serta pembenahan agar struktur tulisan lebih mantap.

Menjelang finalisasi, kami sempat menghubungi beberapa orang peminat untuk mengirimkan naskahnya. Semata-mata agar kesempatan untuk bergabung dalam 'kafilah penulis' ratusan orang ini betul-betul menjelma. Hal itu kami lakukan sebab hadirnya semangat kebangsaan untuk gotong-royong, yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Terkadang, kita memang perlu berkompromi sebab ada banyak orang yang berminat akan tetapi belum sempat menuntaskan tulisannya pada tenggat yang ditentukan. Kesadaran fleksibel seperti ini kami dapatkan

setelah melalui serangkaian pengalaman menjadi inisiator, editor, dan ketua tim. Bahwa, kebersamaan itu baik, bahkan penting. Serta, itu *Indonesia banget*.

Terkait dengan referensi, pada awalnya panduan penulisan meminta agar tiap penulis mencantumkan referensi. Ada yang mencantukannya dengan lengkap, menggunakan *reference manager*, namun ada yang tidak sempat mencantukannya. Untuk buku ilmiah, referensi itu mutlak ada. Namun, untuk buku ‘gagasan masyarakat’--yang sangat beragam--dibutuhkan sekali lagi kompromi. Olehnya itu, kami tetap memasukkan tulisan yang tanpa referensi dengan asumsi bahwa tulisan tersebut sangat mungkin adalah gagasan awal, gagasan lepas, gagasan orisinal, atau gagasan sementara, yang suatu saat nanti dapat dikembangkan dalam berbagai tulisan lainnya. Kami menyadari bahwa tulisan para pemimpin bangsa, terutama yang di media massa, lebih banyak analisis dan kontemplasi, dan tidak begitu berpusing dengan referensi. Semangat tersebut kami tetap jaga, namun kami tetap berharap agar seiring waktu referensi dapat dimasukkan dalam tulisan selanjutnya.

Atas terbitnya buku ini, dari lubuk hati terdalam kami mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi bagi buku ini. Menuangkan gagasan dalam tulisan memang tidak mudah, akan tetapi semua akan jadi mudah jika kita telah memulai langkah pertama. Kami berharap agar silaturahmi gagasan ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam berbagai jenis silaturahmi lainnya untuk sama-sama belajar, bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi Indonesia dan masyarakat dunia. Terkhusus, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada keluargaku yang mendukung hingga berbagai inisiatif ini dapat berjalan dengan baik.

Kami berharap semangat untuk bersinergi dan berkontribusi dalam tulisan dapat terus kita jaga, rawat, dan kembangkan hingga pada tingkat yang bermakna. Semua kita pada saatnya harus mengambil inisiatif untuk menciptakan sesuatu, *at least* berkontribusi untuk hadirnya sesuatu. Inisiatif untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, adalah salah satu kecerdasan manusia yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Tumbuhnya peradaban dunia di Barat atau di Timur, semata-mata karena ada inisiatif, inovasi, serta kolaborasi masyarakat untuk menciptakan peradaban tersebut.

Pemikir Aljazair Malik Bennabi (1905–1973) menyebut ada tiga faktor kelahiran peradaban, yakni manusia, tanah, dan waktu. Jika dapat ditambahkan, satu faktor lagi adalah kerja sama atau kolaborasi. Sekumpulan manusia tidak akan memberikan arti jika tidak ada kerja sama di dalamnya. Kerja sama itulah yang menjadi *spirit* kita dalam sila Persatuan Indonesia sebagaimana yang telah diejawantahkan oleh para pemuda pada 1928, kemerdekaan 1945 hingga saat ini. Keberanian para pemuda di masa lalu adalah inspirasi yang patut kita jaga untuk kontribusi kita bagi bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Pak Natsir dan seterusnya adalah para penulis yang tulisan (serta aktivisme) mereka berdampak bagi kebangsaan kita.

Pembagian 5 bagian 23 bab semata-mata didasari oleh kecenderungan tulisan. Setelah membaca tulisan masuk di email aseanwriters@gmail.com, kami kemudian memetakan tulisan-tulisan tersebut. Bisa jadi ada irisan yang sama antara satu dan lainnya, sebab terkadang satu tulisan membahas beberapa aspek sekaligus atau karena sifatnya yang umum jadi dapat dimasukkan di bagian mana yang kita anggap penting. Pembagian siapa di depan dan siapa di belakang semata-mata karena faktor waktu, yakni siapa yang cepat dibaca itulah yang lebih cepat dimasukkan; tapi pada beberapa tulisan memang dipertimbangkan mana yang paling pas untuk berada di bagian depan. Siapa yang depan dan siapa yang di belakang dapat juga dimaknai sebagai satu tulisan pamungkas dari bab tersebut.

Buku ini adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi kita semua. Tidak sempurna tentu saja, akan tetapi langkah pertama telah dijalani. Besar harapan agar langkah selanjutnya dapat semakin baik, berdampak, dan bermakna. Selamat membaca.

Brisbane, 19 November 2023

Yanuardi Syukur

PROLOG

ASEAN: Polikrisis dan Kolaborasi

Yanuardi Syukur

Saat ini kita hidup di tengah polikrisis—sebuah dunia yang dipenuhi *catastrophic events* seperti perang, ketidakpastian ekonomi, inflasi, resesi, krisis iklim, dan lain sebagainya. Pada panel Annual Assembly *World Economic Forum* (Davos, 22–26 Mei 2022), Profesor Sejarah Universitas Columbia, Adam Tooze menjelaskan polikrisis sebagai sebuah ‘kebingungan kolektif’ secara bersamaan, “Jika Anda merasa bingung, dan seolah-olah segala sesuatu berdampak pada Anda semua pada saat yang sama, ini bukanlah pengalaman pribadi; ini sebenarnya adalah pengalaman kolektif.” Apa yang disebut oleh penulis buku *Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World* dan *Shutdown: How Covid Shook the World’s Economic* tersebut, relevan dengan penjelasan *The Global Risks Report 2023*, bahwa saat ini terjadi peningkatan krisis dimana-mana, dan ‘akumulasi krisis’ tersebut menjadi tidaklah sesederhana yang dapat dibayangkan.

Secara global, *The Global Risks Report 2023* melihat adanya interkoneksi antarkrisis yang ada seperti krisis biaya hidup, konfrontasi geoekonomi, bencana alam dan cuaca ekstrem, erosi kohesi sosial, konflik antarnegara, kriminalitas dunia maya, hingga penggunaan senjata pemusnah massal—untuk menyebut prediksi krisis global dua tahun depan (WEC, 2023). Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (10–11 Mei 2023), ASEAN telah menghasilkan 125 poin terkait pembangunan komunitas, pertumbuhan ekonomi, pandangan tentang Indo-Pasifik, integrasi, konektivitas, dan lain sebagainya (asean.org, 2023), dan diharapkan pada KTT ke-43 di Jakarta Convention Center, Jakarta (5–7 September 2023) kesepakatan sebelumnya dapat diimplementasikan lebih konkret. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari ‘ASEAN way’ untuk menanggapi polikrisis berbasis pada tiga pilar kerja sama ASEAN: politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Tulisan ini akan mengelaborasi beberapa polikrisis yang berkelindan antara unsur global dan regional kawasan ASEAN.

Menjaga Stabilitas di Tengah Gejolak

“Geoeconomic confrontation” atau perang geoekonomi dimasukkan *The Global Risks Report 2023* sebagai salah satu problem global dua tahun ke depan. Perang tersebut tidak hanya antara negara besar (sebutlah Amerika versus China) tapi juga antara negara aliansi dan non-aliansi (sebutlah antara Jerman dengan Rusia). Untuk mengamankan pasokan energinya, Jerman misalnya menyita saham perusahaan energi Rusia di Jerman, Rosneft yang berkontribusi sekitar 12% kapasitas kilang minyak negara tersebut (dw.com, 16 September 2022). Fakta ini menjelaskan bahwa perang geoekonomi antara negara besar berdampak pula pada politik ekstra-teritorial negara-negara lainnya. Posisi geografis terlihat berkelindan dengan dinamika ekonomi dan politik dalam satu tarikan nafas.

The Global Risks Report 2023 memprediksi: jika perang geoekonomi ini menjadi trend maka risikonya akan tercipta lingkaran ketidakpercayaan antar negara. Selanjutnya, berpotensi pada penghentian saling ketergantungan, tersendatnya pertumbuhan ekonomi, dan mendorong eskalasi perang yang lebih luas. Laporan *The Global Risks Report 2023* menulis bahwa dalam 10 tahun ke depan konfrontasi antarnegara tetap terkait ekonomi, akan tetapi fenomena kenaikan anggaran militer pada beberapa negara dan penyebaran teknologi canggih terbaru dapat mendorong negara-negara untuk terlibat dalam perlombaan senjata yang jika tidak terkelola akan berdampak pada konflik terbuka.

Di skala ASEAN, para kepala negara telah melihat ‘potensi instabilitas’ tersebut, maka sejak 1979 mereka telah menandatangani traktat *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan kerja sama. Sampai saat ini, negara-negara ASEAN yang terletak di persimpangan strategis yang penting—berbatasan dengan dua kekuatan ekonomi terpadat di dunia (China dan India)—tetap menjadi apa yang disebut Professor Ishtiaq Pasha Mahmood dari National University of Singapore sebagai “titik fokus bagi kekuatan regional

dan global” (Mahmood, 2018). Maka, sengketa Laut China Selatan antara China dengan negara pengklaim (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) dapat diminimalisir. Sengketa tersebut tidak hanya soal perbatasan tapi juga bermakna perang geoekonomi sekaligus ‘mekanisme pertahanan’ China sebagai antisipasi jika terjadi konflik terbuka di Pasifik, sebuah siasat mengantisipasi masa depan.

Pada ASEAN Summit di Labuan Bajo, sebenarnya para kepala negara ASEAN telah menyampaikan kekhawatiran mereka—diantaranya soal reklamasi daratan dan insiden turunannya, termasuk kerusakan lingkungan laut yang mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, serta berpotensi merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. ASEAN kemudian menegaskan perlunya rasa saling percaya dan keyakinan, serta sikap menahan diri dari aktivitas yang berpotensi memperumit atau meningkatkan perselisihan yang berpengaruh pada perdamaian dan stabilitas.

ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), sebuah *platform* kerja sama antar-Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis. ADMM telah diperluas melalui ADMM-Plus dan melibatkan 8 negara mitra wicara yakni Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Korea, Selandia Baru, India, dan Rusia dengan grup pakar dalam tujuh ranah penting: penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, medis militer, pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi pemelihara perdamaian, penanggulangan ranjau darat dan keamanan siber.

Soal konflik, ‘ASEAN way’ lebih cenderung pada dialog damai dan berkelanjutan. Termasuk untuk soal ketegangan di Semenanjung Korea yang perlu disikapi serius upaya ‘denuklirisasi’ demi perdamaian dan stabilitas abadi. Soal Timur Tengah, misalnya konflik Israel-Palestina yang tidak kunjung selesai (sejak deklarasi negara Israel 1948), ASEAN menegaskan perlunya ‘solusi yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan’ untuk mencapai perdamaian dan stabilitas dengan mendukung penuh hak sah rakyat Palestina atas negara Palestina dengan terwujudnya dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai dan aman berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Soal Ukraina, ASEAN menegaskan pentingnya rasa hormat terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial. Dalam hal ini, menurut ASEAN, kepatuhan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional adalah penting, selain menyerukan penghentian permusuhan dan penciptaan lingkungan yang memungkinkan untuk resolusi damai. Situasi perang yang tidak selesai tersebut (sejak Putin mengumumkan ‘operasi militer khusus’ ke Ukraina, 24 Februari 2022) juga berdampak negatif terhadap ASEAN dan oleh karena itu pimpinan negara-negara ASEAN berkomitmen mengurangi dampaknya dan memastikan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan kawasan dan dunia.

Selain Ukraina, satu soal lagi yang tidak mudah diselesaikan adalah Myanmar, bahkan menjadi ‘beban keketuaan Indonesia di ASEAN.’ ASEAN tetap berfokus pada Konsensus Lima Poin dalam mendukung Myanmar keluar dari krisis politik. Secara ringkas, *five point consensus* tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. ASEAN juga mendukung keterlibatan ketua ASEAN—dalam hal ini Indonesia pada 2023—yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menemukan solusi damai dan abadi melalui dialog nasional yang inklusif.

Episentrum Pertumbuhan Ekonomi

Kesepakatan kepala negara ASEAN di Labuan Bajo menegaskan untuk memperkuat ASEAN sebagai organisasi yang kuat-gesit, dilengkapi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat-efektif dalam mengatasi berbagai tantangan, dan untuk menjadikan ASEAN tetap relevan bagi rakyatnya, kawasan, dan dunia, sambil terus berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan kemakmuran kawasan. Data menunjukkan bahwa saat ini ekonomi ASEAN terus tumbuh membaik dan potensial sebagai pusat pertumbuhan dunia. Hal ini didukung pula dengan jumlah populasi di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 660 juta jiwa pada 2021 atau 8,4% dari total penduduk global. ASEAN juga memiliki peran penting dalam perdagangan global.

Memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi industri pariwisata menjadikan kawasan ASEAN sebagai destinasi investasi. Mengutip Aseanstats.org, ASEAN tercatat memiliki total produk domestik bruto (PDB) sebesar US\$ 3,3 triliun pada 2021, sebuah nilai yang menjadikannya berada di posisi kelima dibandingkan negara-negara ekonomi terkuat seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Jerman. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi ASEAN juga cukup baik yaitu sebesar 4%-5% per tahun. Nilai ini di atas rata-rata global yang sebesar 2,5%-3% (Dihni, 2023).

Saat ini, kita lihat berbagai perusahaan rintisan (*startup*) tumbuh di berbagai negara. Indonesia bahkan disebut sebagai “tanah yang subur untuk pertumbuhan startup.” Indonesia menduduki posisi lima dunia dengan 2.193 startup pada 2019 setelah AS, India, Inggris, dan Kanada. Tak hanya unggul kuantitas, kualitas *startup* di Indonesia pun kian tangguh dengan munculnya empat unicorn (valuasi lebih dari 1 juta dollar AS) dan satu decacorn (valuasi lebih dari 10 juta dollar AS). Valuasi pasar unicorn dan decacorn itu juga mendominasi dunia startup Asia Tenggara. Beberapa di antaranya Gojek (11 miliar dollar AS), Tokopedia (7 miliar dollar AS), Traveloka (4,5 miliar dollar AS), OVO (2,9 miliar dollar AS), dan Bukalapak (12 miliar dollar AS) (Kominfo, 2020).

Berdasarkan data *Startup Ranking*, jumlah startup di Asia Tenggara tercatat sebanyak 4.603 startup hingga 26 Mei 2023. Indonesia menjadi yang terbanyak dengan jumlah startup mencapai 2.479 perusahaan. Singapura berada di urutan kedua dengan 1.098 startup. Setelahnya ada Filipina dengan jumlah startup sebanyak 330 perusahaan. Malaysia memiliki 315 startup, Thailand dan Vietnam masing-masing sebanyak 171 perusahaan dan 134 perusahaan. Jumlah startup di Myanmar sebanyak 48 perusahaan, dan startup Kamboja sebanyak 16 perusahaan. Ada pula sembilan startup di Brunei Darussalam. Sementara, Laos dan Timor Leste secara berurutan punya dua startup dan satu startup. Sementara secara global, Indonesia menempati posisi keenam hingga 26 Mei 2023. Amerika Serikat masih berada di posisi pertama dengan 77.554 startup. Data ini menunjukkan bahwa semangat bertumbuh berkembang signifikan di kawasan ASEAN.

Mencegah Erosi Kohesi Sosial dan Polarisasi Masyarakat

Rilis *The Global Risks Report 2023* menulis bahwa erosi kohesi sosial dan polarisasi masyarakat dalam dua tahun ke depan akan semakin meningkat. Erosi tersebut disebabkan oleh hilangnya atau menipisnya modal sosial dan keretakan komunitas yang berimplikasi pada turunnya stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan individu dan kolektif. Kesenjangan yang makin parah dapat mengakibatkan gejolak politik, apalagi jika di dalamnya ada kelindan faktor erosi dan polarisasi itu dengan berbagai isu kesenjangan berbasis etnis, agama, bahkan karena pemilihan umum. Kesenjangan tersebut juga diperparah sebenarnya dengan meningkatnya rasa frustrasi warga masyarakat atas berbagai hal—terutama kebutuhan dasar sehari-hari.

Kerja sama kepemudaan dilakukan ASEAN sebab sepertiga populasi ASEAN terdiri dari pemuda. Populasi pemuda di kawasan ASEAN diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2038 dengan jumlah kurang lebih 220 juta orang. Sebagai pemimpin di masa depan, pembuat perubahan, inovator dan pemberi pengaruh di kawasan, pemuda ASEAN adalah aset dan harapan masa depan yang perlu diberi kesempatan yang berarti untuk memberikan pengaruh kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pengembangan pemuda di kawasan ASEAN dilaksanakan melalui pertukaran pemuda, program kepemimpinan, kerelawanan, serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sosial. ASEAN berupaya mempersiapkan generasi mudanya untuk menjadi generasi yang “FUTURE-READY”—siap di masa depan—melalui pengembangan keterampilan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai event ASEAN dan dunia.

Narasi terkait identitas ASEAN sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran juga ditumbuhkan. Melalui budaya dan kesenian, ASEAN berkomitmen untuk memajukan budaya sebagai landasan penting untuk membangun Komunitas ASEAN. Sektor budaya bekerja sama dengan berbagai mitra wicara (*dialogue partner*) dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan mengapresiasi berbagai kekayaan sejarah, budaya, seni, tradisi, dan nilai-nilai kawasan ASEAN. Setnas ASEAN (2023) menulis, berdasarkan Rencana Strategis Kebudayaan dan Seni 2016-2025, prioritas utama ASEAN pada sektor budaya meliputi dua hal: pendalaman pola pikir dan identitas ASEAN (untuk meningkatkan apresiasi terhadap sejarah, budaya, seni, tradisi, dan nilai-nilai ASEAN) dan mempromosikan keragaman budaya ASEAN (untuk mendorong pemahaman antarbudaya). ASEAN juga memanfaatkan budaya untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk untuk kreativitas, inovasi dan penciptaan mata

pencaharian dan bagaimana mempromosikan kerja sama regional untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan budaya dan warisan.

Selain itu, Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY/ASCC) merupakan bagian dari tiga pilar penting ASEAN yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup melalui serangkaian kegiatan yang berfokus pada masyarakat (PEOPLE-CENTERED AND PEOPLE-ORIENTED APPROACH), ramah lingkungan (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY), serta berkelanjutan (SUSTAINABLE). Sebagai kesatuan masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Di antara caranya adalah dengan memperkuat daya saing kawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN bahkan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, serta lingkungan hidup (setnasasean.id, 2023). Masyarakat, sebagai tambahan, perlu memiliki semacam kesadaran global untuk berdialog secara kontinu dan bermakna, melakukan sinergi lintas komunitas dan bangsa, serta kesediaan untuk hidup bersama dalam kebudayaan global (Ikeda, 2001).

Untuk mewujudkan integrasi masyarakat ASEAN maka dibutuhkan “rasa ke-kita-an (WE FEELING)” terhadap ASEAN. Di samping itu, masyarakat ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi. Dengan demikian, mengutip Setnas ASEAN (2023), masyarakat ASEAN dapat lebih mengenal keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, dan mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. ASEAN memiliki Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 sebagai pedoman bagi negara anggota ASEAN dalam mewujudkan masyarakat ASEAN yang melibatkan dan bermanfaat bagi masyarakatnya, inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis (setnasasean.id, 2023).

Strategi Taktis *Extraordinary*: Jalan Maju, Jalan Kolaborasi

Polikrisis global perlu didekati secara kolaboratif. Para keketuaan ASEAN 2023, kata ‘kolaborasi’ menjadi sesuatu yang penting untuk menghasilkan terobosan untuk menyelesaikan polikrisis global, regional, dan nasional di negara masing-masing. Presiden RI Joko Widodo kerap menyampaikan kata ‘kolaborasi, kerja sama, dan sinergi’ sebagai jalan menyelesaikan masalah. Kita telah melewati pandemi Covid-19 secara kolaboratif, namun seperti kata Presiden Jokowi, “tantangan ke depan masih sangat berat”, olehnya itu membutuhkan kerja sama menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dunia dan menyelesaikan berbagai krisis.

Presiden Joko Widodo melihat bahwa dunia kita sekarang ‘sedang tidak baik-baik saja’. Maka, menurut Jokowi, “ASEAN memerlukan strategi taktis yang luar biasa untuk menghadapi tantangan global saat ini, sekaligus mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan atau *epicentrum of growth*,” sebagaimana yang disampaikan saat membuka ASEAN Business Investment Summit Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta (1 September 2023). “Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, strategi ASEAN tidak bisa juga hanya biasa-biasa saja, *enggak bisa*. ASEAN butuh strategi taktis yang *extraordinary*, jadi strateginya bukan strategi besar, tapi strategis taktis yang *extraordinary*,” ujar Presiden. Strategi taktis yang *extraordinary* tersebut membutuhkan terobosan. Untuk itu, berbagai upaya mencari terobosan sangat dibutuhkan. Sejalan dengan itu pula, upaya tersebut membutuhkan banyak gagasan inovatif-aplikatif yang *extraordinary* dari lintas pemangku kepentingan dan lintas komponen masyarakat untuk menyelesaikan polikrisis yang melanda dunia pada umumnya dan ASEAN pada khususnya.

Kata kunci kolaborasi adalah sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah ASEAN yang tidak mudah. Di zaman yang tidak pasti ini, nyaris tidak mungkin satu masalah dapat diselesaikan oleh satu atau dua negara, sebaliknya membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintasnegara. Maka, kolaborasi menjadi sangat penting. Apa yang disajikan dalam buku *ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia* ini adalah bagian dari semangat kolaborasi gagasan konstruktif dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah nasional, regional, bahkan global. Sebab, satu hal selalu terkait dengan hal lainnya di zaman sekarang. *

Referensi

- ASEAN (2023). "Chairman's statement of the 42nd ASEAN summit Labuan Bajo, Indonesia", <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/FINAL-Chairmans-Statement-42nd-ASEAN-Summit-1.pdf> (akses 2 September 2023)
- Dihni, Vika Azkiya (2023). "Ekonomi ASEAN Nomor 5 Terbesar di Dunia," <https://katadata.co.id/sortatobing/infografik/646194a92030d/ekonomi-asean-nomor-5-terbesar-di-dunia> (akses 1 September 2023)
- DW (2022). "Germany takes control of Rosneft subsidiary," <https://www.dw.com/en/germany-takes-control-of-russias-rosneft-subsidiary/a-63145437> (akses 2 September 2023)
- Ikeda, Daisaku (2001). *Demi Perdamaian, 7 Jalan Menuju Keharmonisan Global* (For the Sake of Peace—terj.). Jakarta: BIP
- Muharni, Netty (2023). "Keselarasan prioritas ekonomi ASEAN 2023 dalam konteks sentralitas, stabilitas dan kesejahteraan di ASEAN". Jakarta: Kemenko Perekonomian
- Setkab (2023). "Inilah agenda KTT ke-43 ASEAN 2023 Jakarta", <https://setkab.go.id/inilah-agenda-ktt-ke-43-asean-2023-jakarta/> (akses 2 September 2023)
- Setkab (2023). "Wujudkan ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan, Presiden Jokowi: Butuh Strategi Taktis," Luar Biasa, <https://setkab.go.id/wujudkan-asean-sebagai-pusat-pertumbuhan-presiden-jokowi-butuh-strategi-taktis-luar-biasa/> (akses 2 September 2023)
- Setnas ASEAN (2023). "Pilar Sosial-Budaya," <https://setnasasean.id/pilar-sosial-budaya> (akses 2 September 2023)
- Mahmood, Ishtiaq Pasha (2018). "7 key challenge for the future of ASEAN – and how to solve them," <https://www.weforum.org/agenda/2018/08/7-challenges-to-business-in-the-asean-region-and-how-to-solve-them/> (akses 1 September 2023)
- Kominfo (2020). "Di WEF 2020, Menkominfo Pamerkan Pesatnya Perkembangan Startup Indonesia," https://www.kominfo.go.id/content/detail/23975/di-wef-2020-menkominfo-pamerkan-pesatnya-perkembangan-startup-indonesia/0/sorotan_media (akses 1 September 2023)
- Mustajab, Ridhwan Mustajab (2023). "Ada 4.603 Startup di Asean per 26 Mei 2023, Indonesia Terbanyak," <https://dataindonesia.id/digital/detail/ada-4603-startup-di-asean-per-26-mei-2023-indonesia-terbanyak> (akses 1 September 2023)
- Presiden RI (2023). "Presiden Jokowi Dorong Penguatan Kolaborasi ASEAN dan Dunia Usaha," <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-dorong-penguatan-kolaborasi-asean-dan-dunia-usaha/> (akses 1 September 2023)
- WEF (2023). "Global risk report 2023", <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/digest> (akses 2 September 2023)

Bagian Pertama
Built For Trust, Not For Conflict:
Ketidakpastian Global
Dan Diplomasi Indonesia
Menyelesaikan Konflik Regional
ASEAN

BAB 1

**Menghadapi Ketidakpastian Global:
Tantangan ASEAN dalam Memperkuat
Stabilitas Politik-Kelangkaan Regional**

ASEAN di Tengah Pertarungan Geopolitik AS-China

Hidayat Doe

Asia Tenggara adalah kawasan yang cukup stabil, aman, dan damai. Namun kestabilan, keamanan dan perdamaian kawasan Asia Tenggara tersebut bisa merosot karena pertarungan geopolitik AS versus China. Pertarungan geopolitik AS-China itu terasa sekali, bukan saja dalam konteks global, tetapi secara regional rivalitas keduanya sangat kental. Suasana persaingan geopolitik itu seakan mengembalikan kita pada kondisi perang dingin 1950-1989 saat AS dan Uni Soviet bersaing berebut pengaruh dan hegemoni.

Kedua rivalitas tersebut tentu berbeda, tetapi keduanya memiliki kemiripan. Akan tetapi, dalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan dinamika rivalitas AS-China yang menjadi fenomena global kekinian, dan bagaimana pengaruh serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN, apa respons ASEAN sebagai organisasi regional, dan bagaimana prospek keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara di masa depan.

Sebagai pemenang perang dingin, Amerika Serikat (AS) adalah negara *superpower* yang belum tergantikan posisi dan kekuatan hegemoniknya. Dalam konteks politik dan keamanan, kekuatan AS masih sangat dominan. Selama tiga dekade lebih, AS memegang tampuk kekuasaan global. Kekuasaan politik yang dimiliki AS tidak terlepas dari posisinya sebagai pemenang perang dingin dengan dukungan kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi informasi.

Akan tetapi, sebagai negara adidaya, posisi AS kini mulai tergoyahkan seiring dengan kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan kemajuan teknologi informasi yang dimiliki. Kebangkitan China tersebut menjadi ancaman bagi dominasi AS dalam politik internasional. Apalagi, China telah merancang sebuah program ambisius bernama *Belt and Road Initiative* (BRI) yang awalnya bernama *One Belt One Road* (OBOR). Program pembangunan infrastruktur global ala jalur sutra modern ini melintasi benua Asia, Eropa dan Afrika yang melibatkan 150 negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Laos.

Besarnya peran China dalam proyek pembangunan infrastruktur global itu memperlihatkan posisi China dalam struktur hubungan internasional sebagai negara adidaya yang mampu menyaingi kekuatan politik AS, bahkan di masa depan China berpotensi menggantikan posisi AS sebagai *superpower* utama dunia. Pergeseran dominasi global tersebut nampaknya tinggal persoalan waktu, suatu saat China akan menggeser posisi AS. Hanya saja, untuk menggeser dominasi AS tidak semudah itu. AS tentu saja akan meng-counter pengaruh China. AS tidak akan diam menyaksikan dominasi China di berbagai kawasan, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu isu yang menjadi arena pertarungan AS dan China adalah soal sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam kawasan ini, China mengklaim hampir seluruh areal LCS dengan istilah peta sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) miliknya. Meskipun klaim itu tidak diakui dalam hukum laut Internasional (UNCLOS), China tidak peduli. Klaim tak berdasar tersebut ditentang oleh negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Sengketa di LCS kemudian menciptakan konflik antara negara-negara ASEAN dan China. Untuk membendung pengaruh dan dominasi China di LCS, AS ikut bermain dalam dinamika konflik tersebut dengan menempatkan pangkalan militernya di Filipina yang menjadi sekutu dekatnya di kawasan ASEAN. Tidak hanya itu, kapal induk AS di sekitar kawasan LCS ikut berpatroli untuk memastikan keamanan jalur navigasi internasional di kawasan tersebut. Kehadiran dan keterlibatan AS di LCS tampaknya cukup efektif untuk membendung agresivitas China di perairan tersebut.

Ketegangan di kawasan Laut China Selatan ini agak mengerikan karena secara tidak langsung telah menyeret AS dan China dalam pusaran konflik. Sewaktu-sewaktu perang besar bisa pecah di kawasan tersebut. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab kapal induk AS dan China dalam beberapa kesempatan pernah berhadap-hadapan, baik pada saat berpatroli maupun sedang latihan militer di perairan Laut China Selatan. Kedua negara sama-sama pamer

kekuatan militer. Baik AS maupun China seperti sudah bersiap-siap untuk berperang. Aksi militerisasi di LCS tersebut memicu ketidakstabilan politik dan keamanan di kawasan. Sebagai organisasi regional, ASEAN mencoba meredam dan mengelola situasi konflik di LCS dengan mengusung aturan tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*) di kawasan. Dokumen CoC itu kini sedang dibahas dan dinegosiasikan oleh ASEAN dan China. Panduan tata perilaku itu diharapkan bisa mencegah ancaman terjadinya perang di kawasan tersebut.

Negara-negara di ASEAN sadar betul bahwa ketegangan di LCS tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kehadiran aturan tata perilaku diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan kawasan regional yang selama ini dinikmati bersama. Meskipun kehadiran CoC itu tidak menyelesaikan secara tuntas konflik yang terjadi di LCS, namun paling tidak, perang di kawasan tersebut bisa dihindari. ASEAN dan dunia telah banyak belajar dari sejarah bagaimana dampak perang bagi kemanusiaan. Korban jiwa, pengungsi, krisis energi, krisis pangan, dan ancaman resesi ekonomi adalah dampak yang ditimbulkan jika sebuah perang meletus, sebagaimana yang akhir-akhir ini kita saksikan di Ukraina karena invasi Rusia di negara tersebut. Fenomena Ukraina tentu tidak kita harapkan terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN harus bersatu menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan ini sebagai syarat kemajuan dan kemakmuran masa depan negara-negara ASEAN.*

HIDAYAT DOE adalah alumni Hubungan Internasional dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar dan Pascasarjana Ilmu Politik di kampus yang sama. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi PK Identitas Unhas dan menjadi guru anak-anak Indonesia di Sabah-Malaysia. Saat ini menetap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah seorang co-founder Rumah Produktif Indonesia.

Konsep ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* dan Kepentingan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan

Melyana Ratana Pugu

*"Kaki seseorang harus ditanam di negaranya,
tetapi matanya harus mengamati dunia."*

- George Santayana

Pendahuluan

Kawasan Pasifik saat ini menjadi pusat perhatian negara-negara besar dalam kaitannya dengan meningkatkan pengaruh dan memperluas wilayah kekuasaan dari negara-negara adidaya. Sebut saja Amerika Serikat, China, India, Jepang, telah menggunakan kawasan perairan Pasifik bagi aktivitas perdagangan dan juga militer. Mengapa kawasan Pasifik yang sejak perang dunia kedua menjadi ajang peperangan kini kembali menjadi wilayah seksi bagi aktivitas negara-negara adidaya. Secara geografis Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat luas, kaya perbedaan dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, dinamika dan keamanan yang tinggi. Dihuni negara-negara ekonomi kuat, negara industri maju, industri baru, dan rumah dari 40% penduduk dunia. Kawasan ini merepresentasikan 54% GDP dunia, 44% aktivitas perdagangan dunia, dan memiliki rute-rute perdagangan penting.

Dalam skema keamanan maka setiap negara memperkuat posisi negaranya dengan melakukan aliansi dengan negara lain sehingga negara tersebut merasa aman dari ancaman kekuatan negara yang lebih besar, seperti rivalitas antara China dan Amerika yang terjadi di wilayah Asia-Pasifik menyebabkan ketidak stabilan ekonomi di kawasan ini, mengingat wilayah ini merupakan kawasan yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian dan memperkuat keamanan.

Melihat kondisi ini maka ASEAN melalui inisiatif Indonesia membuat kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keamanan serta ekonomi di Asia-Pasifik. ASEAN menjadi pemimpin dalam kerangka tersebut dengan berdialog kepada rivalitas yang ada demi mewujudkan pemajuan dan kesejahteraan bersama. Menurut H.C. Palmer dan N. D. Perkins dalam bukunya *International Relations, Balance of Power* ialah: "Perimbangan kekuatan mengasumsikan bahwa perubahan aliansi dan tekanan yang menyeimbangkan agar tidak ada satu kekuatan atau gabungan kekuatan yang dibiarkan berkembang semakin kuat hingga mengancam keamanan yang lainnya." Palmer dan Perkins meyakini bahwa besarnya kekuatan suatu negara menjadikannya sebagai ancaman untuk negara lain. Oleh karena itu akibat dari merasa terancam dari kekuatan dari negara tersebut, negara yang terancam kemudian membuat aliansi dengan negara lain untuk menyeimbangkan kekuatannya.

Terlihat jelas bahwa ASEAN sebagai kekuatan di kawasan Asia Tenggara yang terhubung dengan kawasan Pasifik perlu menjaga keseimbangan kekuatan dengan membentuk konsep Indo-Pasifik sehingga mampu menyeimbangkan atau setidaknya menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap aman dan damai walaupun di dalamnya ada negara-negara adikuasa seperti China dan Amerika Serikat. Keberadaan negara-negara berkekuatan besar yang terletak di kawasan Asia-Pasifik menjadi faktor utama yang menyebabkan iklim keamanan kawasan Asia-Pasifik selalu fluktuatif, karena sering bersinggungannya kepentingan antar negara-negara besar dan hal ini menjadi salah satu perhatian Asean untuk membentuk ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Secara etimologi, istilah Indo-Pasifik ada sejak tahun 2007 menggantikan istilah Asia-Pasifik dimana Kawasan Indo-Pasifik meliputi Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Asia Daratan, Jepang, Asia Tenggara dan Benua Australia, yang meliputi negara-negara maju seperti China, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.

ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan Indonesia

Apa peran Indonesia dalam pembentukan konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) bahwa dalam catatan berbagai sumber disebutkan bahwa Indonesia adalah negara anggota Asean yang pertama kali mengusulkan konsep AOIP sebagai salah satu arah kebijakan Asean dalam rangka memperkuat posisi ASEAN di wilayah Indo-Pasifik dan disetujui oleh semua negara anggota ASEAN yang beranggotakan 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Dengan disepakatinya konsep AOIP ini maka tentu saja telah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik.

Konsep Indo-Pasifik yang dibawa Indonesia mengusung semangat inklusif, yang berarti melibatkan seluruh pihak secara setara, baik AS, Tiongkok, maupun negara lainnya di kawasan. Prinsip Indo-Pasifik yang ditawarkan oleh Indonesia dalam perkembangannya mendapatkan sambutan hangat dari seluruh negara ASEAN. Selain semangat inklusif yang telah dijabarkan sebelumnya, prinsip Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI ini juga mengedepankan prinsip menghargai kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang menjadi pembeda utama. Ditambah dengan prinsip pelengkap (*complementarity*) bagi sejumlah kerja sama yang telah ada, konsep Indo-Pasifik ala Nusantara dipandang sangat sesuai dengan perkembangan dinamika internasional saat ini dengan tidak memihak kepada salah satu blok dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan negara anggota ASEAN yang terletak di antara kedua Samudera tersebut menjadi sangat penting, terlebih bagi Indonesia yang secara geografis terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bidang kerja sama yang disepakati dalam Indo Pasifik Outlook tercatat mencakup empat bidang, yakni kerja sama maritim, konektivitas, perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB, dan kerja sama ekonomi. Di antara bidang kerja sama yang lain, disepakatinya bidang kerja sama maritim untuk masuk ke dalam Indo-Pacific Outlook merupakan hal yang paling utama bagi Indonesia. Teritorial Indonesia yang sebagian besarnya merupakan kawasan maritim dan kemajuan Pemerintah Indonesia dalam menangani bidang kemaritiman dapat menjadi aset berharga bagi kerja sama kawasan.

Kepentingan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan

Pasifik Selatan merupakan kawasan menjadi ladang kontestasi beberapa kekuatan besar, baik dari dalam maupun luar kawasan. terdapat delapan negara yang menjadi kekuatan eksternal, baik yang lama maupun baru di Pasifik Selatan, yakni Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, Jepang, Rusia, India, Taiwan, dan Indonesia. Keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan telah menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Suharto, terutama pada tahun 1980-an. Hal ini dibuktikan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tahun 1973, 1978, dan 1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (Usman, 1994). Selain itu, Leifer (1983) menambahkan bahwa lingkaran konsentris dalam implementasi politik luar negeri Indonesia turut menyertakan wilayah Pasifik Selatan sebagai salah satu wilayah kunci yang dipertimbangkan.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menetapkan dalam visi Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2045. Presiden Joko Widodo sangat aktif membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor industri dan komunitas bisnis. Dalam Rapat Terbatas Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan pada hari Jumat, 4 Mei 2018, Presiden Widodo berpandangan bahwa sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi politik dan ekonomi untuk kepentingan nasional di kawasan tersebut. Kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan tidak hanya akan membawa dampak positif bagi *branding* Indonesia di Pasifik Selatan, namun juga ikut dalam membantu menciptakan kawasan yang stabil dan sejahtera.

Bagaimana Indonesia sesungguhnya dalam konteks politik luar negeri memandang negara-negara Pasifik terutama negara Pasifik Selatan? Bahwa secara geografis Indonesia memiliki hubungan sebagai negara tetangga terdekat dengan kawasan ini dimana wilayah Timur Indonesia yang jaraknya terdekat dengan negara-negara pasifik¹ memiliki peluang

1 Negara-negara Pasifik Selatan yang dimaksud adalah 12 negara kepulauan anggota organisasi internasional Pacific Island Forum (PIF) yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu: Fiji (sejak 1974), Papua Nugini (sejak 1975),

kerja sama yang belum dieksplorasi secara maksimal. Negara-negara Pasifik Selatan nampaknya belum dipandang sebagai pasar prospektif oleh pelaku bisnis dalam negeri karena jumlah penduduknya yang sedikit dan ketergantungan yang besar terhadap bantuan asing. Perekonomian negara-negara Pasifik relatif kecil bila dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Selain Papua Nugini (PNG) dengan populasi 8,08 juta dan PDB USD 20.213 juta, tidak ada negara di kawasan ini yang memiliki populasi lebih dari 1 juta. Bahkan, Fiji, sebagai negara terbesar kedua, memiliki jumlah penduduk sebanyak 898.760 orang dan PDB USD 4,70 juta.

Sebagian besar negara kepulauan Pasifik Selatan juga memiliki defisit perdagangan, yang umumnya ditutup dengan dana bantuan dan pinjaman dari negara lain. Mayoritas negara-negara dimaksud hanya memiliki sedikit industri manufaktur domestik, sehingga kebutuhan konsumsi mereka bergantung pada produk impor. Negara-negara kepulauan Pasifik Selatan juga melakukan perdagangan, namun masih sangat terbatas, mengingat sebagian besar menghasilkan komoditas primer yang belum diproses sama sekali. Di Fiji terdapat industri pemurnian gula dan air kemasan "Fiji Water"; di PNG dan Kepulauan Solomon ada pengalengan ikan, sedangkan di Kepulauan Marshall telah dilakukan pengolahan tuna di Kepulauan Marshall. Ketergantungan pada sumber daya alam juga dapat dilihat dari pemanfaatannya sebagai situs pariwisata unggulan setempat. Selama ini, Australia dan Selandia Baru adalah mitra tradisional negara-negara kepulauan Pasifik Selatan karena kedekatan geografis dan pengaruh besar mereka di kawasan.

Hubungan Indonesia-Papua New Guinea, Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Papua New Guinea telah terjalin sejak tahun 1975, Papua New Guinea merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia di kawasan Pasifik. Secara letak geografis, Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan Papua (Indonesia) memiliki kedekatan hubungan politik dan ekonomi, termasuk dalam bidang perdagangan. Dalam neraca perdagangan Indonesia-Papua New Guinea di tahun 2019 tercatat surplus perdagangan Indonesia sebesar US\$ 93 ribu dari komoditas non-migas. Neraca perdagangan Indonesia dengan Papua Nugini mengalami surplus US\$ 105,64 juta pada 2020. Nilai neraca perdagangan ini naik 12,48% dibandingkan neraca tahun sebelumnya yang tercatat US\$ 93,92 juta.

Positifnya neraca perdagangan ini, menurut data Trademap, disokong oleh nilai ekspor Indonesia yang mampu menembus angka US\$ 139,01 juta. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kegiatan impor Indonesia dari Papua Nugini yang tercatat US\$ 33,37 juta. Kegiatan ekspor Indonesia ke Papua Nugini, dalam satu tahun terakhir dalam tren turun. Tahun sebelumnya nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 153,28 juta. Adapun untuk impor, menurut data Trademap terjadi penurunan 43,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka US\$ 59,36 juta. Berdasarkan jenis produk, terdapat 10 produk utama andalan ekspor Indonesia ke Papua Nugini yang terbukti mampu mencatatkan surplus selama 2020. Total nilai ekspor produk utama ini mencapai US\$ 87,95 juta.

Hubungan Indonesia-Vanuatu, Hubungan perdagangan Indonesia dengan Vanuatu dapat dikatakan berjalan dengan sangat minim. Nilai perdagangan kedua negara hanya mencapai US\$ 4 ribu pada tahun 2019 dengan nilai surplus perdagangan Indonesia dengan Vanuatu sekitar US\$ 3 ribu. Namun hubungan politik dan perdagangan kedua negara menjadi terhambat akibat sikap politik Vanuatu yang sering kali dianggap mengancam posisi kedaulatan Indonesia, terutama mengenai permasalahan HAM Papua. Neraca perdagangan Indonesia dengan Vanuatu mengalami defisit US\$ 10,03 juta pada 2020. Defisitnya neraca perdagangan ini semakin jatuh -380,77% dibandingkan neraca tahun sebelumnya yang tercatat US\$ 3,57 juta.

Makin anjloknya neraca perdagangan Indonesia ke negara ini terjadi karena nilai ekspor Indonesia ke Vanuatu hanya sebesar US\$ 4,19 juta sedangkan nilai impornya mencapai US\$ 14,22 juta. Adapun untuk tiga produk utama yang paling banyak diimpor dari negara ini yaitu Kapal, perahu, dan struktur mengambang, Ikan dan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya dan Produk susu; telur burung; madu alami; Produk yang dapat dimakan dari hewan asal, bukan di tempat lain. Sedangkan untuk ekspor Indonesia ke Vanuatu, dalam satu tahun terakhir dalam tren turun. Tahun sebelumnya nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 4,25 juta. Berdasarkan jenis produk, terdapat 10 produk utama andalan ekspor Indonesia ke Vanuatu yang terbukti mampu mencatatkan surplus selama 2020. Total nilai ekspor produk utama ini mencapai US\$ 3,65 juta.

Kepulauan Solomon (sejak 1983), Vanuatu (sejak 1995), Tonga (sejak 1994), Samoa (sejak 1978), Kepulauan Marshall (sejak 1993), Mikronesia (sejak 1991), Palau (2007), Tuvalu (sejak 2012), Nauru (sejak 2012), dan Kiribati (sejak 2013).

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Fiji, Neraca perdagangan Indonesia dengan Fiji mengalami surplus US\$ 20,3 juta pada 2020. Namun demikian, angka surplus neraca perdagangan ini menurun -19,68% dibandingkan neraca tahun sebelumnya yang tercatat US\$ 25,28 juta. Semakin turunnya neraca perdagangan ini, menurut data Trademap, disokong oleh nilai ekspor Indonesia yang mampu menembus angka US\$ 20,91 juta. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kegiatan impor Indonesia dari Fiji yang tercatat US\$ 0,61 juta. Kegiatan ekspor Indonesia ke Fiji, dalam satu tahun terakhir dalam tren turun. Tahun sebelumnya nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 26,19 juta. Adapun untuk impor, menurut data Trademap terjadi penurunan 32,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka US\$ 0,91 juta. Berdasarkan jenis produk, terdapat 10 produk utama andalan ekspor Indonesia ke Fiji yang terbukti mampu mencatatkan surplus selama 2020.

Total nilai ekspor produk utama ini mencapai US\$ 14,99 juta. Daftar 10 produk utama ekspor Indonesia ke Fiji : Tembakau dan pengganti tembakau yang diproduksi; Sabun, agen aktif permukaan organik, persiapan cuci, persiapan pelumas, buatan; Mesin dan peralatan listrik dan bagian-bagiannya; Perekam dan reproduksi suara, televisi; Persiapan sereal, tepung, pati atau susu; Produk pastrycook; Kendaraan selain stok kereta api atau trem, dan suku cadang dan aksesorinya; Lemak dan minyak nabati atau minyak dan produk belahannya; Lemak yang dapat dimakan; satwa; Kertas dan kertas kertas; Artikel kertas bubur kertas, kertas atau kertas karton; Garam; sulfur; Bumi dan Batu; Bahan plesteran, jeruk nipis dan semen; Persiapan yang dapat dimakan lain-lain; Plastik dan artikelnya.

Dalam uraian di atas terlihat bahwa hubungan Indonesia dalam perdagangan dengan negara Pasifik mendatangkan keuntungan walaupun tidak terlalu besar namun merupakan prospek dalam kaitannya dengan memperluas pengaruh dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik terutama Pasifik Selatan sehingga menjaga stabilitas dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia di Fora internasional melalui dukungan yang diterima dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Kesimpulan

Konsep *ASEAN Outlook on Indo-Pasifik* menjadi langkah awal Indonesia dalam rangka memperkuat stabilitas dan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dan terutama meningkatkan hubungan kerja sama secara inklusif dengan negara-negara Pasifik Selatan sehingga terus terbangun hubungan bertetangga baik dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang luarannya adalah memberikan manfaat bagi kedaulatan Indonesia maupun kesejahteraan masyarakat di kawasan ini.*

Referensi

- Agus Dwi Darmawan (2022). Neraca Perdagangan Indonesia dengan Papua Nugini Surplus US\$ 105,64 Juta, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/20/neraca-perdagangan-indonesia-dengan-papua-nugini-surplus-us-105-64-juta> diakses tanggal 3 Desember 2022.
- Agus Dwi Darmawan (2022). Neraca Perdagangan Indonesia ke Vanuatu Tahun 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/defisit-neraca-perdagangan-indonesia-vanuatu-semakin-melebar-pada-2020> diakses tanggal 3 Desember 2022.
- Agus Dwi Darmawan (2022). Neraca Perdagangan Indonesia dengan Fiji Surplus US\$ 20,3 Juta, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/03/neraca-perdagangan-indonesia-dengan-fiji-surplus-us-20-3-juta> diakses tanggal 3 Desember 2022.
- Dian Syahputra (2020). Analisis ASEAN Outlook on Indo-Pasific Menjaga Perdamaian di Wilayah Indo-Pasific, <https://www.kompasiana.com/diansyahputra2344/5e2880a6d541df6d47693792/analisis-asean-outlook-on-indo-pasific-dalam-menjaga-perdamaian-di-wilayah-indo-pasific> diakses pada 1 Desember 2022.
- Tantowi Yahya (2019). Arti Penting ASEAN Outlook on Indo Pacific bagi Indonesia, <https://kumparan.com/tantowi-yahya/arti-penting-asean-outlook-on-indo-pacific-bagi-indonesia-1sXMNQs9MGy/full> diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Bilal A Firesa (2022). Keterlibatan di Kawasan Pasifik Selatan: Peningkatan Diplomasi dan Kepentingan Indonesia, <https://kontekstual.com/keterlibatan-di-kawasan-pasifik-selatan-peningkatan-diplomasi-dan-kepentingan->

Tantangan ASEAN dan Modalitas Indonesia dalam Mengimplementasikan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*

Marwan

Kehadiran AOIP

Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan yang cukup dinamis. Pasalnya, aktor yang terlibat dalam persaingan di kawasan ini terdiri dari beberapa negara besar (*major powers*) yang memiliki pengaruh ekonomi, politik dan militer yang cukup kuat. Mereka hadir dengan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep Indo-Pasifik yang diciptakan oleh para aktor tersebut dengan tafsir dan kepentingannya masing-masing. Amerika memiliki konsep Indo-Pasifik yang dinamai dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Jepang juga menggunakan nomenklatur yang digunakan Amerika.

China juga memiliki konsep pembangunan internasionalnya di kawasan ini, meskipun tidak hanya berlaku untuk Indo-Pasifik melainkan juga di kawasan lain, yang disebut dengan *Belt Road Initiative (BRI)*. Ekspansi China secara ekonomi dan politik dalam konsep BRI inilah juga menjadi pemicu semakin tingginya tensi kawasan ini. Negara-negara Barat melihat kebangkitan China sebagai tantangan bahkan ancaman yang harus diantisipasi dalam percaturan geopolitik global bahkan kehadiran China tersebut mendorong barat dan sekutunya melahirkan berbagai konsep Indo-Pasifik (Shah, 2021).

Variasi konsep Indo-Pasifik oleh berbagai aktor tersebut—seperti telah disinggung sebelumnya—memiliki kepentingan masing-masing. Meskipun dalam penjabarannya menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut akan mendorong konektivitas dan kerja sama yang inklusif, stabilitas dan kemakmuran kawasan, akan tetapi pada praktiknya, ada rivalitas dibanding membangun kemitraan (*partnership*). Secara eksplisit tampak dalam pembentukan aliansi *The Quadrilateral Security Dialogue (Quad)* yang terdiri dari Jepang, Australia, India dan Amerika yang ingin membendung pengaruh China di kawasan (Paikv & Park, 2021).

Aliansi lain juga adalah AUKUS yang mencakup tiga negara yakni Amerika, Inggris dan Australia. Tiga negara barat ini juga secara terang-terangan hadir dalam aliansi pertahanan keamanan yang untuk merespon kebangkitan China (Choong & Storey, 2021; Li, 2022). Realitas ini melahirkan keraguan akan masa depan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan makmur. Dan jika situasi ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka bisa mengarah pada konflik terbuka. Tentunya hal ini tidak kita inginkan.

Sebagai aktor penting di kawasan, ASEAN ikut merespon persaingan geopolitik tersebut. Terlebih, ASEAN akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari persaingan geopolitik itu. Di sisi lain, ASEAN memiliki sumber daya yang strategis yang menjadi magnet berbagai aktor global yang tengah berkompetisi. Menurut *Hong Kong Trade Development Council* (2022), ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia, serta jumlah penduduk 660 miliar yang bisa menjadi potensi pasar yang besar. Posisi strategis lain adalah secara institusi, ASEAN juga tidak memihak kepada satu kekuatan blok politik.

Selain dapat menghilangkan marwah organisasi kawasan ini sebagai organisasi yang independen, keberpihakan ASEAN pada satu aktor global juga dapat menjebak ASEAN sebagai medan proxy bagi negara-negara besar. Oleh karena itu, ASEAN melalui prakarsa Indonesia hadir dengan konsepnya yang dikenal dengan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)* (Kemlu, 2019). Indonesia ingin ASEAN dapat menciptakan kondisi Indo-Pasifik yang stabil berdasarkan hukum internasional, kerja sama yang inklusif, dan mengedepankan dialog dan kemitraan, bukan persaingan apalagi ketegangan. Konsep ini menjadi penegasan ASEAN sebagai aktor signifikan yang dapat memainkan peran penting di

kawasan Indo-Pasifik. AOIP juga sebagai implementasi sentralitas ASEAN dalam berhadapan dan berinteraksi dengan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik (Anwar, 2020).

Secara garis besar, AOIP memiliki tiga agenda kerja sama yakni kerja sama maritim, konektivitas dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 (ASEAN, n.d). Ketiga agenda ini bagi ASEAN tidak bisa dijalankan sendiri. Kompleksitas persoalan global mau tidak mau mengharuskan ASEAN perlu membangun kemitraan dengan negara lain bahkan dengan entitas non negara (*non-state actor*). Hal ini juga termaktub dalam tujuan ke-17 dalam SDGs yang menjadi salah satu agenda AOIP yakni kebutuhan untuk bermitra sehingga kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera dapat diwujudkan.

Tantangan ASEAN: Solidaritas, Ekonomi dan Keamanan

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tiga tantangan ASEAN dalam upaya mengimplementasikan AOIP. Tiga aspek tantangan tersebut yakni solidaritas, ekonomi dan keamanan.

Solidaritas

ASEAN tidak mudah mengimplementasikan agenda AOIP. Butuh konsolidasi yang kuat agar agenda AOIP dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sayangnya, ASEAN masih sering berkutut dalam persoalan domestik yang tak kunjung selesai. Contohnya adalah krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Di bawah rezim junta militer hingga saat ini krisis tersebut belum dapat diselesaikan dan membuat junta semakin tersudutkan dan dikucilkan. Bahkan dalam beberapa pertemuan negara-negara ASEAN, perwakilan junta tidak diundang (Kompas, 2021; Detik, 2022). Di tingkat internasional juga Myanmar semakin dikucilkan akibat prakarsa dari ASEAN seperti keberhasilan Dewan Keamanan PBB tahun 2022 untuk mempertegas dukungannya terhadap langkah ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar dengan menekankan agar junta militer melaksanakan peta jalan yang telah dibuat ASEAN (Security Council Report, 2022). Sebagaimana diketahui akibat kudeta militer terhadap pemerintahan sipil di Myanmar, kebebasan sipil dibungkan serta banyak pelanggaran HAM terjadi. Demikian juga dengan kondisi etnis Rohingya di Myanmar yang oleh PBB disebut dengan tragedi pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*) semakin tidak mendapat titik jelas (UN News, 2018). Kondisi ini berdampak pada gerak langkah ASEAN dalam mewujudkan AOIP.

Tantangan ASEAN lain adalah ASEAN sering tidak satu suara dalam merespon persaingan geopolitik kawasan terutama antara China dan Amerika. Anggota ASEAN memiliki pandangan dan respon yang berbeda dalam melihat kompetisi dua kekuatan besar tersebut. Apalagi setiap negara ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda yang juga ikut menentukan kebijakan luar negerinya. Hal tersebut dalam dilihat bagaimana Myanmar yang dikucilkan oleh Amerika dan negara barat lain sehingga membuat negara ini lebih kuat membangun hubungan dengan China sebagai rival Amerika. Singapura dan Filipina juga merespon persaingan dua aktor internasional tersebut dengan mendukung Amerika. Langkah kedua negara anggota ASEAN tersebut bisa dilihat dalam dukungannya terhadap AUKUS (CNN Indonesia, 2021). Apalagi di Singapura dan Filipina terdapat pangkalan militer Amerika. Indikasi lain tentang dukungan Singapura pada blok politik barat juga dapat dilihat dalam langkah Singapura yang mengikuti barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dalam perang Rusia-Ukraina. Singapura adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang mengikuti kemauan barat tersebut.

Kurang terkonsolidasinya ASEAN juga disebabkan karena adanya ketergantungan ekonomi – selain kerja sama dan ketergantungan pertahanan dan keamanan seperti Singapura dan Filipina dengan Amerika-ASEAN dan terutama beberapa anggota ASEAN terhadap aktor global lain seperti China. Salah satu langkah yang dilakukan China adalah melakukan liberalisasi kerja sama ekonomi terhadap ASEAN sehingga meningkatkan ketergantungan ASEAN pada China dan sekaligus mereduksi pengaruh barat (Amerika) di ASEAN (Priangani & Hattu, 2020). Dampak ekonomi ini dapat dilihat dalam respon ASEAN yang dinilai kurang tegas terhadap konflik laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa anggota ASEAN lain. Selain itu, beberapa anggota ASEAN lain juga tidak tegas pada China karena memiliki ketergantungan ekonomi tersebut.

Tidak solidnya ASEAN dalam berinteraksi disebabkan oleh konsep organisasi ini yang bersifat *intra-state*. Dalam konsep ini, ASEAN tidak dipandang sebagai organisasi yang membawahi anggotanya dan tidak dapat memaksa anggotanya untuk melakukan hal yang diinginkan. Artinya ASEAN sebagai institusi tidak memiliki otoritas yang lebih tinggi atas anggotanya. Berbeda dengan Uni Eropa bersifat *supra-state* dimana Uni Eropa memiliki otoritas yang tinggi

terhadap anggotanya. Kondisi ini berdampak pada sifat ASEAN yang non-intervensi. ASEAN tidak bisa mencampuri lebih jauh persoalan domestik anggotanya meskipun dapat bertentangan dengan agenda AOIP. Dalam persoalan Myanmar, meskipun ASEAN telah mengeluarkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut namun pemerintah junta militer Myanmar tidak mengimplementasikannya (Antara, 2022). Karena tidak adanya mekanisme intervensi yang kuat maka keputusan ASEAN bisa dilanggar oleh anggotanya. Tentunya ini akan berdampak implementasi AOIP nantinya.

Ekonomi

Menurut Soni (2019), dominasi ekonomi terhadap kawasan Indo-Pasifik tidak akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dominasi ekonomi ini umumnya didukung atau sejalan dengan perkembangan militer, terutama terbaca dalam persaingan China dan Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Sebenarnya, situasi ini dapat dilihat dari konsep Indo-Pasifik dan kebijakan turunannya yang dihadirkan oleh aktor besar tersebut dimana mereka ingin merebut pengaruh yang lebih besar di kawasan.

Selain itu, kapasitas ekonomi setiap negara di Indo-Pasifik yang berbeda-beda juga akan menjadi tantangan dalam mewujudkan AOIP (He & Feng, 2020). Hal ini akan diperburuk jika model pembangunan Indo-Pasifik ke depannya lebih mengedepankan persaingan bukan dengan membangun kemitraan/kerja sama. Apalagi negara-negara konektivitas ekonomi di kawasan Indo-Pasifik tidak terintegrasi dengan baik (Herindrasti, 2019). Salah satu penyebabnya tidak bisa dilepas dari sejarah kolonialisme yang pernah terjadi pada negara-negara di kawasan ini – terutama di sebagian besar negara ASEAN – yang bagaimanapun memiliki dampak sampai hari ini. Beragamnya kapasitas ekonomi di negara-negara Indo-Pasifik² ini akan ikut menghambat konektivitas dan pelaksanaan SDGs sesuai dengan agenda AOIP.

Keamanan

Masalah keamanan juga menjadi kendala dalam implementasi AOIP. Persaingan geopolitik di Indo-Pasifik juga mendorong militerisasi di kawasan ini. Hal itu dapat dilihat dalam pembentukan aliansi pertahanan keamanan AUKUS dan juga QUAD. Kondisi ini melahirkan *security dilemma* dimana peningkatan kapasitas militer dan keamanan negara lain membuat negara lain merasa tidak aman (Wuthnow, 2019). Konsekuensinya, negara lain terdorong untuk meningkatkan kapasitas militernya sehingga kondisi kawasan akan dalam bayang-bayang ketegangan dan ancaman. Hal yang ditakutkan adalah terjadinya proliferasi nuklir karena salah satu agenda AUKUS adalah melengkapi Australia dengan kapal selam nuklir. Selain itu masalah lainnya adalah ketegangan di semenanjung Korea yang juga terkait dengan nuklir. Konflik China-Taiwan juga serta Konflik yang melibatkan langsung anggota ASEAN yakni Konflik Laut China Selatan.

Sementara itu, ASEAN tidak memiliki aliansi militer yang tegas seperti halnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam menghadapi ancaman internalnya. Justru yang terjadi adalah di beberapa negara anggota ASEAN memiliki kerja sama militer sendiri yang sudah terbangun dengan negara non-ASEAN seperti yang dilakukan oleh Filipina dan Amerika. Kondisi ini justru akan mendegradasi solidaritas pertahanan keamanan ASEAN. Sementara telah diketahui bersama bahwa Amerika merupakan salah satu aktor yang tengah berkompetisi dengan China dalam merebut hegemoni di kawasan Indo-Pasifik. Tidak adanya aliansi militer sesama anggota ASEAN membuat organisasi ini kurang memiliki posisi tawar dalam berhadapan dengan perkembangan persaingan militer di kawasan Indo-Pasifik.

Selain ancaman keamanan tradisional, ancaman non-tradisional juga merupakan hal yang harus direspon secara serius. ASEAN bersama berbagai pihak harus dapat mengatasi masalah keamanan tersebut seperti keberadaan organisasi teror yang mengatasnamakan agama, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan berbagai kejahatan transnasional lainnya. Jika perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik tidak mampu dipertahankan dan diciptakan maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran bersama.

2 Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi menengah ke bawah sering lebih memprioritaskan agenda domestik dari pada agenda AOIP terutama dalam mengimplementasikan agenda clean energy. Sebagai contoh, penggunaan energi fosil akan tetap besar apabila tidak adanya kemampuan finansial dalam bertransformasi ke energi terbarukan. Masalah energi ini semakin diperparah oleh perang Rusia-Ukraina dan dampak pandemi Covid-19 yang telah menciptakan krisis energi sehingga mendorong penggunaan fosil semakin meningkat seperti yang dilakukan oleh China (SCPM, 2020).

Modalitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023

Tahun 2023 Indonesia kembali memegang keketuaan ASEAN. Status ini menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi ASEAN baik di level domestik maupun dengan eksternalnya, terutama dalam implementasi AOIP. Jika dilihat dari kapasitas yang dimilikinya, Indonesia memiliki modal yang cukup besar. Di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan negara terbesar dari segi ekonomi, jumlah penduduk bahkan politik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dengan kapasitas tersebut Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi masalah yang ada terutama memperkuat institusi ASEAN.

Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat institusi ASEAN sebagai organisasi kawasan yang disegani. ASEAN harus mampu mengkonsolidasikan kekuatannya sembari menjadi motor penggerak pelaksanaan AOIP. Langkah Indonesia selama ini dengan terus mendorong ASEAN untuk menyelesaikan persoalan Myanmar patut diapresiasi. ASEAN sebisa mungkin menaati keunikan norma-norma yang berlaku di ASEAN dan juga internasional dalam mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar.

Di level global, Indonesia juga memiliki modalitas untuk mewujudkan cita-cita AOIP. Salah satu modalitas tersebut adalah Indonesia³ menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang masuk dalam G20, organisasi yang menghimpun 19 negara dan Uni Eropa yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal lain yang dimiliki Indonesia adalah prinsip kebijakan luar negerinya yang “bebas aktif” sehingga dapat bersahabat dengan siapa saja tanpa harus menjadi bagian dari blok politiknya. Diharapkan melalui keketuaan Indonesia, ASEAN dapat menjaga keseimbangan kekuatan-kekuatan global dalam pelaksanaan AOIP. Apalagi selama ini ASEAN selalu membuka diri untuk berdialog dan bekerja sama dengan pihak-pihak eksternalnya. Dari semua itu, ASEAN dapat menciptakan iklim konektivitas, kerja sama maritim yang inklusif dan damai, dan SDGs 2030 untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan perdamaian global.*

Referensi

- AntaraneWS (13 Oktober 2022) Menlu: Isu Myanmar masih menjadi tantangan internal ASEAN tahun depan. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://www.antaraneWS.com/berita/3177065/menlu-isu-myanmar-masih-menjadi-tantangan-internal-asean-tahun-depan>
- Anwar, D.F (2020) Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, *International Affairs*, 96(1), 111-129
- ASEAN (n.d) ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
- Choong, W., & Storey, I. (2021). *Southeast Asian responses to AUKUS: Arms racing, non-proliferation and regional stability. Perspective*. Singapore.
- CNN Indonesia (23 November 2021) Deret Negara ASEAN yang Dukung Vs Tolak AUKUS Seperti China. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211122150656-106-724474/deret-negara-asean-yang-dukung-vs-tolak-aukus-seperti-china>.
- Detik (5 Oktober 2022) Pemimpin Junta Myanmar Tak Diundang ke KTT ASEAN di Kamboja” Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://news.detik.com/internasional/d-6330982/pemimpin-junta-myanmar-tak-diundang-ke-ktt-asean-di-kamboja>.
- He, K., & Feng, H. (2020). The institutionalization of the Indo-Pacific: Problems and prospects. *International Affairs*, 96(1), 149-168.
- Herindrasti, S. (2019). Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 43-51.

3 Pengalaman Indonesia saat menjadi ketua G20 tahun 2022 harus mendapat apresiasi. Indonesia mampu menjembatani negara-negara besar dalam perhelatan bergengsi itu sehingga kegiatan itu berjalan dengan sukses. Padahal saat kegiatan internasional ini berlangsung, sedang terjadi ketegangan antara beberapa kekuatan global anggota G20 tersebut seperti ketegangan antara Rusia dan Barat yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan hubungan antara China dan Barat (terutama Amerika) atas isu Taiwan dan perang dagang.

- Hong Kong Trade Development Council (2022) ASEAN: Market Profil. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://research.hktdc.com/en/article/Mzk5MzcxNjEz>
- Kemlu (25 Juni 2019) ASEAN Sepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ke-34 ASEAN. Di akses pada 31 Desember 2022 melalui <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/1153/asean-sepakati-asean-outlook-on-indo-pacific-pada-ktt-ke-34-asean>
- Kompas (23 Oktober 2021). Tidak Diundang dalam KTT ASEAN, Junta Militer Myanmar Tak Terima. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/23/180244270/tidak-diundang-dalam-ktt-asean-junta-militer-myanmar-tak-terima?page=all>.
- Li, M. (2022). ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific. *China International Strategy Review*, 1-20.
- Paik, W., & Park, J. J. (2021). The Quad's search for non-military roles and China's strategic response: Minilateralism, infrastructure investment, and regional balancing. *Journal of Contemporary China*, 30(127), 36-52.
- Priangani, A., & Hattu, J. A. R. (2020). Strategi RRC dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan. *Jurnal Academia Praja*, 3(01), 113-133.
- SCMP (21 Juli 2020) China's coronavirus recovery drives boom in coal plants, casting doubt over commitments to cut fossil fuels, diakses pada 31 Desember 2022 melalui <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3094098/chinas-coronavirus-recovery-drives-boom-coal-plants-casting>
- Security Council Report (21 Desember 2022) Myanmar: Vote on Draft Resolution. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/12/myanmar-vote-on-draft-resolution.php>
- Shah, A. R. (2021). Revisiting China Threat: The US' Securitization of the 'Belt and Road Initiative'. *Chinese Political Science Review*, 1-21.
- Soni, I. (2019). Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 282-310.
- UN News (6 Maret 2018) 'No other conclusion,' ethnic cleansing of Rohingyas in Myanmar continues—senior UN rights official. Diakses pada 31 Desember 2022, melalui <https://news.un.org/en/story/2018/03/1004232>
- UN News (6 Maret 2018) 'No other conclusion,' ethnic cleansing of Rohingyas in Myanmar continues — senior UN rights official. Diakses pada 31 Desember 2022
- Wuthnow, J. (2019). Contested strategies: China, the United States, and the Indo-Pacific security dilemma. *China International Strategy Review*, 1(1), 99-110.

MARWAN menamatkan pendidikan sarjananya pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin. Melalui beasiswa LPDP RI, pada tahun 2022 dia berhasil menyelesaikan studi magisternya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dia akrab dengan dunia tulis menulis sejak menjadi mahasiswa S1. Tulisan-tulisannya sering dimuat di media online maupun cetak. Dia juga seorang cerpenis dan *ghost writer*. Buku terbarunya (sebagai editor dan salah satu penulis) adalah *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*. Saat ini, dia aktif di Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia dan dapat dihubungi melalui marwanuphy@gmail.com. IG: marwanupi.

Forum ASEAN dan Indo-Pasifik 2023, Penguatan Kerja sama *flagship* Masa Depan

Sitta Rosdaniah

ASEAN dan Indo Pasifik

Secara strategis, Indo-Pasifik dipandang sebagai sebuah rangkaian kontinum melintasi dua samudra, ruang yang saling berhubungan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang dihubungkan oleh saluran perdagangan utama, yaitu Selat Malaka. Kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia merupakan kawasan yang paling dinamis di dunia, serta pusat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade. Akibatnya, wilayah-wilayah ini terus mengalami pergeseran geopolitik dan geostrategis, yang tentunya menciptakan peluang sekaligus tantangan.

Dengan letaknya yang terpusat di jantung Indo-Pasifik, negara-negara ASEAN berkepentingan untuk meningkatkan peran bersama-sama dengan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik dalam pengembangan arsitektur ekonomi dan keamanan serta memastikan bahwa dinamika tersebut akan terus berlanjut kondusif untuk perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara seperti juga di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Negara-negara ASEAN memiliki pandangan fungsional terhadap kawasan Indo-Pasifik, dengan mendasarkan strateginya pada empat aspek, yaitu kerja sama maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi.

Indonesia sejak lama menyampaikan visi tentang “Indo-Pasifik *ala* ASEAN.” Istilah ini telah resmi diadopsi pada KTT ASEAN ke-34, setidaknya menurut pandangan negara-negara ASEAN tentang Indo-Pasifik yang menggabungkan visi Indonesia dan dengan mengangkat dua kata kunci, yaitu “inklusivitas” dan “sentralitas ASEAN.” Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kerja sama di Indo-Pasifik harus terbuka untuk semua negara di kawasan, dan juga menunjukkan terpusatnya peran ASEAN.

Dengan latar belakang tersebut, para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk menempatkan penguatan arsitektur regional yang berpusat pada ASEAN melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pada tahun 2019. Pandangan ini tidak ditujukan untuk menciptakan mekanisme baru atau menggantikan yang sudah ada, melainkan untuk meningkatkan proses pembangunan Komunitas ASEAN menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang timbul dari kondisi regional untuk masa depan lingkungan global di Kawasan Indo-Pasifik.

Konsisten dengan peran ASEAN dalam mengembangkan dan membentuk arsitektur regional di Asia Tenggara dan sekitarnya, dan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang diharapkan oleh ASEAN terdiri dari elemen-elemen utama sebagai berikut: Perspektif yang memandang kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia tidak saja saling berdekatan secara ruang territorial, tetapi sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling berhubungan erat, dengan ASEAN memegang peranan sentral dan strategis; Kawasan Indo-Pasifik yang diwarnai dengan dialog dan kerja sama, bukan persaingan; Kawasan Indo-Pasifik yang penuh dengan pembangunan dan kesejahteraan bagi semua; Pentingnya domain dan perspektif maritim dalam perkembangan arsitektur regional.

Forum ASEAN dan Indo Pasifik Tahun 2023

Terinspirasi oleh *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, dan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan visi ASEAN dan Indo-Pasifik, sebagai bagian dari Ketetapan Indonesia di ASEAN, diselenggarakan Forum ASEAN dan Indo-Pasifik atau ASEAN and Indo Pacific Forum (AIPF) sebagai platform untuk mendorong dialog konstruktif di mana ASEAN adalah masa depan dan pusat pertumbuhan, yang memainkan peran penting di kawasan Indo-Pasifik. AIPF bertujuan untuk memperkuat arsitektur regional yang inklusif, mendorong kolaborasi, memperkuat kerja sama yang

saling menguntungkan, dan memanfaatkan peluang di wilayah Indo-Pasifik. AIPF merupakan sebuah *flagship event* dari KTT ASEAN yang baru digelar untuk pertama kalinya di Jakarta pada tanggal 5-6 September 2023.

AIPF yang diselenggarakan bersamaan dengan KTT Asia Timur ini dilakukan dalam rangka mendorong dialog dan kerja sama antar negara-negara ASEAN dan Indo-Pasifik yang diyakini memainkan peran penting dalam 65% pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam penyelenggaraannya, AIPF telah menjadi platform inklusif bagi sektor publik, BUMN, dan swasta dari negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, mengidentifikasi potensi proyek yang nyata, dan menghasilkan kerja sama yang konkret dalam mempromosikan kolaborasi di Indo-Pasifik. Adapun tujuan AIPF adalah:

1. Membumikan strategi sekaligus menjadi bentuk implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang dicanangkan dan diadopsi oleh negara-negara ASEAN pada 2019.
2. Membangun paradigma kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang inklusif dan kolaboratif.
3. Memelihara dan menumbuhkan kerja sama serta dialog yang mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

ASEAN merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang didukung oleh pasar dan populasi produktif di mana Indo-Pasifik berkontribusi pada lebih dari 60% PDB dunia. ASEAN diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Indo-Pasifik di masa depan yang sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023: *Epicentrum of Growth*. AIPF mengusung tiga agenda prioritas dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif.

Tantangan Implementasi inisiasi Forum ASEAN Indo-Pasifik ke depan

Keterkaitan dan saling ketergantungan pada jalur Indo-Pasifik merupakan hasil dari meningkatnya kekuatan globalisasi, perdagangan serta mobilitas jalur laut yang paling penting di dunia pada negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hal ini memicu tingginya berbagai kebutuhan, termasuk energi, sehingga Indo-Pasifik dinilai sebagai pusat dunia dalam hal politik dan ekonomi. Konsep Indo-Pasifik gaya ASEAN adalah menjaga hubungan dengan negara-negara besar, tanpa bergabung dengan salah satu pihak, dalam konteks apabila terjadi konfrontasi yang semakin meningkat antara negara-negara besar.

Dalam implementasinya ASEAN menghadapi tantangan yang besar dalam menjaga hubungan dengan negara-negara Indo-Pasifik guna mempertahankan arsitektur sistem regional yang dipimpin oleh ASEAN yang stabil, yang akan dimanfaatkan untuk menstabilkan hubungan antara negara-negara besar di Indo-Pasifik yang lebih luas, sekaligus mendorong pembangunan dan kerja sama sosio-ekonomi, membawa stabilitas dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik, dan khususnya ASEAN. Agar lokasi geografis ASEAN yang strategis dapat berfungsi sebagai posisi politik yang strategis, ASEAN harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. ASEAN yang kuat, mandiri, dan bersatu menolak semua tekanan eksternal dapat berfungsi sebagai landasan netral yang sangat penting dalam melakukan mediasi konflik Indo-Pasifik, dengan demikian menjamin kelangsungan hidup ASEAN untuk mendorong perdamaian dan keamanan serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.*

SITTA ROSDANIAH menamatkan Studi S1 di Teknik Industri ITS Surabaya diselesaikan pada tahun 1995, dengan beasiswa dari Yayasan Toyota Astra serta Yayasan Bhakti Persatuan. Studi S2 dalam MSc in Business Economics, di University of Strathclyde, UK dengan beasiswa the British Chevening Award tahun 1999-2000. Studi S3 dengan gelar PhD in Economic Public Policy di Australian National University, Australia dengan beasiswa Australian Leadership Award tahun 2007-2011. Sitta mengikuti Executive Education in Finance di Harvard Business School, USA tahun 2015. Sitta menerima penghargaan *Woman Achievement Appreciation in industry sector* dari *French & Mediterranean Women Association* tahun 2019. Sitta berkarir di Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, serta mengajar di Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya & London School of Public Relation (LSPR).

Resiliensi Regional di Tengah Tantangan Multidimensi

Rizki Putra Dewantoro

Pendahuluan

Resiliensi regional atau ketahanan suatu kawasan memiliki peran sentral dalam menumbuhkan kesejahteraan. Termasuk di kawasan Asia Tenggara tempat bersemainya beragam kebudayaan luhur Nusantara mulai dari daerah kepulauan di Indonesia, Semenanjung Malaya, hingga membentang di perbatasan Asia Timur ke Asia Selatan. Harmoni sebuah kawasan dapat memperkuat resiliensi terhadap ancaman yang bisa saja muncul dari dalam maupun luar lingkup regional di dunia yang sudah tak mengenal lagi batas teritorial.

Wujud harmoni tersebut terpancar saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang menghubungi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim setelah ditetapkannya sebagai pemenang Pemilihan Umum Malaysia 2022. Presiden Jokowi melalui sambungan telepon mengucapkan selamat atas nama pemerintah sekaligus rakyat Indonesia kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10 tersebut. Hal ini bukan hanya menunjukkan keakraban antara kedua pemimpin, melainkan sebuah langkah yang menggembirakan antara dua negeri serumpun. Presiden Jokowi pun memuji sosok Anwar Ibrahim yang begitu dikenal luas dan dihormati di Indonesia.

Gayung bersambut, PM Anwar Ibrahim merasa tersanjung dan terhormat atas tahniah dari Presiden Jokowi. PM Anwar Ibrahim menegaskan Indonesia merupakan sahabat sejati⁴ Malaysia dan dirinya mengharapkan hubungan yang baik dalam berbagai bidang seperti perdagangan, bisnis, investasi, pendidikan, budaya dan bidang lainnya. Termasuk berbagai isu terbatas seperti persoalan pekerja dapat diperbaiki dan diluruskan dengan cara yang bersih.

Diskusi: Peluang dan Tantangan ASEAN

Indonesia dan Malaysia adalah negara bertetangga yang menjadi garda depan dan aktor utama kawasan regional Asia Tenggara. Dalam bidang ekonomi, Malaysia memimpin ekonomi ASEAN pada Kuartal III 2022 (Kusnandar, 2022). Dibandingkan dengan kuartal III tahun lalu (*year on year*), Department of Statistics Malaysia (DSM) melaporkan ekonomi Malaysia tumbuh 14,2% pada kuartal III 2022. Peningkatan luar biasa ini disebabkan tingginya permintaan ekspor dan konsumsi domestik negara yang beribukota di Kuala Lumpur tersebut. Indonesia berada di urutan keempat dengan nilai pertumbuhan 5,72 persen setelah Vietnam 13,67 persen dan Filipina 7,6 persen.

Kini, ASEAN meliputi 11 negara dengan jumlah penduduk sekitar 661 juta jiwa berdasarkan data pada tahun 2020 (ASEAN Statistical, 2021) ditambah Timor Leste dengan 1,2 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar ditambah pertumbuhan ekonomi yang cukup mencerahkan, ASEAN kian menjadi kawasan yang dilirik masyarakat global. Termasuk berbagai potensi yang dimiliki negara-negara anggotanya baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), kekayaan budaya, hingga perkembangan teknologi.

Indonesia didapuk memegang posisi penting dalam forum internasional ASEAN *Chairmanship* (Keketuaan ASEAN) pada 2023. Secara simbolis Presiden Jokowi menerima palu keketuaan ASEAN dari PM Kamboja Hun Sen dalam KTT ASEAN

4 Hubungan baik Indonesia dan Negeri Jiran merupakan angin segar bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia bagian dari the Founding Fathers Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan nama resmi The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bersama tiga negara lainnya yaitu Filipina, Singapura dan Thailand. ASEAN didirikan di Ibukota Thailand, Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui ASEAN Declaration (Bangkok Declaration). Menyusul negara-negara lainnya masuk ASEAN Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos serta Myanmar (1997), Kamboja (1999), dan terakhir Timor Leste (2022) menjadi anggota ASEAN ke-11.

2022 di Phnom Penh. Keketuaan Indonesia ini dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dengan mengangkat tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*.” Ternyata bukan kali ini saja Indonesia memegang keketuaan ASEAN, sebelumnya Indonesia pernah menjadi ketua pada masa awal yaitu tahun 1976, 2003, dan 2011. Dengan modal pengalaman tersebut, Indonesia diharapkan mampu memandu kawasan agar dapat menjadi lebih baik dan pulih serta menjadi episentrum pusat pertumbuhan.

Namun, keketuaan Indonesia di ASEAN dihadapkan dengan berbagai tantangan ancaman resesi global di tahun 2023. Situasi ke depan diprediksi masih belum kondusif dan tidak mudah, dari sisi geopolitik maupun ekonomi beragam tantangan multidimensi dapat menerpa dunia dan kawasan. Konflik di laut Cina Selatan serta krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar adalah beberapa ‘pekerjaan rumah’ ASEAN. Belum lagi tantangan dari luar seperti gejolak ekonomi global, perebutan hegemoni dan perang dagang AS-Tiongkok hingga dinamika kawasan Indo-Pasifik yang sarat kepentingan.

Maka, tepat pernyataan Presiden Jokowi ketika menerima tongkat keketuaan bahwa ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai serta menjadi jangkar bagi stabilitas global. Selain itu, dalam segi ekonomi diharapkan ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Strateginya yaitu dengan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaannya agar dapat menghadapi berbagai kesulitan yang menerjang. Hal ini tentu bisa diatasi dengan semangat kerja sama dan melaksanakan Piagam ASEAN dengan sungguh-sungguh.

Optimisme Indonesia berdasar kepada fakta bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN senantiasa berada di atas rata-rata dunia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam taklimat media menyebut pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 5,2 persen lebih tinggi dari pertumbuhan global yang hanya bisa mencapai 3,3 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi ASEAN turun menjadi 4,6 persen, hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya bisa mencapai 2,6 persen (Kusnandar, 2022).

ASEAN memiliki tiga pilar kerja sama yang terdiri dari kerja sama politik – keamanan, pilar kerja sama ekonomi, dan pilar kerja sama sosial-budaya. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Tahun 2020-2024, pengembangan pilar kerja sama politik keamanan yaitu dengan terus memajukan prakarsa Indonesia dalam memperkuat arsitektur keamanan di kawasan. Langkah yang dilakukan ialah mendorong sentralitas ASEAN melalui implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, kemudian penguatan diplomasi maritim dan politik keamanan yang kuat sampai penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Semua ini ditempuh dalam rangka tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.

Pilar ekonomi ASEAN dilakukan dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, Sumber Daya Energi dan Mineral (SDEM), konektivitas, serta investasi. Implementasinya dalam bentuk digitalisasi ekonomi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pengembangan jejaring *startup* di kawasan, pemajuan diplomasi ekonomi dan maritim Indonesia di ASEAN, hingga mendorong stimulasi resiliensi ekonomi dengan terus membuka perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur, relaksasi kredit di sektor keuangan dan perbankan, memulihkan kepercayaan pasar, serta perlindungan terhadap pekerja.

Terkait rawannya gesekan antar masyarakat terutama di lingkup budaya Melayu yang kerap terdapat kesamaan, perlu adanya perhatian lebih dalam peningkatan pendidikan, kerja sama lintas budaya, serta peningkatan kesepahaman terkait kekayaan budaya antar negara dalam pilar sosial budaya. Hal ini dilakukan agar kedua pihak tetap mampu saling menghormati meski ada yang mengklaim sebuah kekayaan budaya milik satu negara tertentu. Pembahasan mengenai sosial budaya ini tampaknya belum ada dalam Renstra Ditjen Kerja Sama ASEAN maupun rencana Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Dalam pilar sosial budaya, agenda yang digulirkan yaitu peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berbagai program *people-to-people* di ASEAN dapat berjalan kembali.

Selain tiga pilar kerja sama tersebut, ASEAN perlu memperkuat ketahanan terhadap bencana. Catatan dari *World Risk Report 2022* menunjukkan tiga negara ASEAN masuk 10 besar dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi. Filipina berada di urutan teratas dengan indeks 46,82, Indonesia berada di urutan ketiga dengan indeks 41,46, dan Myanmar menempati urutan keenam dengan indeks 35,49. Perubahan iklim dan konsekuensinya mengubah persyaratan dalam manajemen kebencanaan. *World Risk Report 2022* memuat konsep yang telah direvisi pertama kali

sejak diterbitkan pada tahun 2011, yang mana masih didasarkan pada interaksi antara paparan dan kerentanan (Atwii, et. al., 2022).

Penilaian *World Risk Report* berlandaskan anggapan umum bahwa munculnya bencana tidak hanya bergantung pada seberapa parah bahaya bencana alam melanda masyarakat, tetapi juga pada seberapa rentan masyarakat terhadap pengaruhnya. Indeks *World Risk Report* merupakan hasil dari akar paparan ditambah kerentanan terhadap bencana. Paparan (*exposure*) meliputi jumlah dan bagian dari populasi dengan tingkat intensitas gempa bumi, tsunami, topan, banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut. Sementara itu, kerentanan (*vulnerability*) terdiri dari kerawanan, kurangnya kapasitas mengatasi bencana dan kurangnya kapasitas adaptif yang lebih menitikberatkan pada masyarakatnya.

Berkaca dari kerentanan tersebut, terbitlah publikasi *ASEAN Disaster Resilience Outlook* (ADRO) yang menilai prospek untuk mewujudkan visi ASEAN 2025 tentang penanggulangan bencana. Upaya ASEAN ini adalah bentuk antisipatif dan mempersiapkan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi risiko bencana. ASEAN sudah saatnya membangun dan memperkuat ketahanan bencana dalam menghadapi transformasi teknologi, meningkatkan sumber pendanaan melalui pembiayaan inovatif, mobilisasi sumber daya, penyampaian komunikasi yang lebih efektif, menjalin kemitraan yang lebih beragam serta menekankan langkah-langkah antisipatif. Sama halnya dengan yang telah dimulai Indonesia saat KTT G20 Indonesia yang menyiapkan *Pandemic Fund* dalam mengantisipasi jika terjadi lagi pandemi di masa yang akan datang.

Era digital yang berbasis perkembangan teknologi juga dapat lebih ditingkatkan lagi. Tingkat kemajuan teknologi masyarakat ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Thailand termasuk yang cukup maju. Apalagi bidang teknologi yang melaju pesat telah mengubah setiap aspek interaksi sosial. Terkini, hadirnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dapat mendorong kesempatan emas bagi masyarakat di ASEAN sebagai upaya inovatif dan produktif secara intelektual di dunia digital (Amirrachman, 2021). AI direkomendasikan untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), membantu pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Berbagai tantangan dan hambatan dapat dipetakan dan diartikan kepada masyarakat ASEAN secara luas. Termasuk warga bisa ikut terlibat dengan adanya pengembangan inovasi dalam kerja sama berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan budaya.

Konklusi: ASEAN Tangguh

The smiling ASEAN sebagai watak masyarakat orang Asia yang ramah perlu lebih ditanamkan lagi di ruang lingkup yang lebih luas. Penguatan diplomasi, pendekatan yang berorientasi kepada solusi berbagai permasalahan kawasan “dapat diperbaiki dan diluruskan dengan cara yang bersih” seperti diungkapkan Dato’ Anwar Ibrahim. Adanya konflik dan perang hanya akan menjerembab sebuah negara kepada jurang ketertinggalan dan kesengsaraan. Contoh nyata yang patut menjadi perhatian ASEAN adalah krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Adanya permasalahan tersebut berimbas kepada ekonomi yang mengalami kontraksi minus 18% pada 2021.

Jakarta sebagai pusat ASEAN yang merupakan berdirinya The ASEAN Secretariat dapat dijalankan secara optimal. Secara infrastruktur Gedung Sekretariat ASEAN yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan itu memiliki ruang-ruang pertemuan yang memadai dan sangat layak digunakan untuk berbagai pertemuan ASEAN. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN lebih dari 300 pertemuan bakal terselenggara di Indonesia pada tahun 2023. Pertemuan tingkat teknis dapat dilaksanakan di gedung tersebut, namun pertemuan tingkat menteri ke atas dapat diselenggarakan berbagai daerah seperti Medan, Bali, Balikpapan, Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Surakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi destinasi wisata dan berkontribusi meningkatkan potensi devisa negara baik di pusat maupun daerah.

Ibarat pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”, beragam tantangan multidimensi yang dihadapi ASEAN dapat dilalui dengan kebersamaan dan kolaborasi. Inspirasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” sangat dinantikan dalam membentuk ASEAN yang tangguh. Langkah arif secara kekeluargaan seperti Indonesia dan Malaysia begitu membahagiakan dalam mewujudkan visi luas “Masyarakat yang damai, stabil, dan tangguh dengan peningkatan kapasitas untuk menanggapi tantangan secara efektif, dan ASEAN sebagai kawasan yang berwawasan ke luar di tengah komunitas bangsa-bangsa global”, sebagaimana dinyatakan dalam *ASEAN Community Vision 2025*.*

Referensi

- Amirrachman, Alpha (2021). *Skecthes of Asia's Society: People, Culture, Education and Technology*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Atwii, Franziska, Sandvik, Kristin Bergtora et. al. (2022). "WorldRiskReport 2022 Focus: Digitalization," *Relief Web*, 8 September 2022, <https://reliefweb.int/report/world/worldriskreport-2022-focus-digitalization> (diunduh pada 2 Desember 2022)
- Kementerian Luar Negeri RI (2022). "Press Briefing Serah Terima Keketuaan ASEAN" 23 November 2022, https://kemlu.go.id/portal/id/read/4194/siaran_pers/press-briefing-serah-terima-keketuaan-asean (diunduh pada 1 Desember 2022)
- Kusnandar, Viva Budy (2022). "Malaysia Pimpin Pertumbuhan Ekonomi ASEAN pada Kuartal III 2022," *Kata Data*, 14 November 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/malaysia-pimpin-pertumbuhan-ekonomi-asean-pada-kuartal-iii-2022> (diunduh pada 30 November 2022)
- Sekretariat ASEAN (2021). "ASEAN Statistical Yearbook 2021," *The ASEAN Secretariat Jakarta*, Desember 2021, <https://www.aseanstats.org/publication/asyb-2021/> (diunduh pada 30 November 2022)
- Sekretariat Kabinet RI (2022). "Indonesia Assumes ASEAN Chairmanship in 2023," 13 November 2022, <https://setkab.go.id/en/indonesia-assumes-asean-chairmanship-in-2023/> (diunduh pada 1 Desember 2022)

RIZKI PUTRA DEWANTORO adalah alumni Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Perajut pena majalah Suara Muhammadiyah dan online suaramuhammadiyah.id. Bukunya yang telah terbit adalah *Indulgensia Bunda* (2010). Ia juga menjadi contributor buku *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Buku pertamanya, *Laskar Pena* (2020) berisi pengalaman sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Rizki turut menggiatkan literasi Iqro Movement dengan meminati gerakan peduli lingkungan dan sosial. Bidang kepenulisan ditekuninya sebagai bagian dari tugas dan ibadah. Kini penulis tinggal bersama keluarga kecilnya di Sleman, Yogyakarta. Ia dapat disapa di akun Instagram / Twitter @rizki_pd dan email: rizkipd@gmail.com.

Tantangan Politik dan Keamanan Indonesia dalam Kepemimpinan ASEAN 2023

Inggar Saputra

Perkembangan Geopolitik ASEAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ASEAN dan Uni Eropa terus menjadi sorotan masyarakat internasional. Ini mengingat kedua persekutuan regional ini sedang dilanda gelombang konflik yang melibatkan negara anggotanya. Di Eropa sedang berlangsung perang besar Rusia dan Ukraina sebagai dampak keinginan Ukraina masuk sebagai anggota Uni Eropa. Keinginan Ukraina dipandang mengganggu stabilitas dan mengancam kepentingan nasional Rusia. Sehingga perang menjadi jalan terakhir kedua negara yang berdampak kepada stabilitas ekonomi, politik, pangan dan energi dalam skala global.

Di tengah perang Rusia dan Ukraina, kondisi negara Asia Tenggara tidak jauh berbeda dilanda konflik internal anggotanya. Secara umum, ada beberapa persoalan ASEAN terkait politik dan keamanan. *Pertama*, perkembangan situasi politik yang melibatkan dua negara *superpower* dunia yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Saat ini rivalitas di antara kedua negara ini sangat menentukan sejauhmana perkembangan lingkungan strategis negara di dunia maupun persekutuan regional seperti ASEAN. Gelombang yang ditimbulkan keduanya, seperti konflik Laut China Selatan, perlombaan senjata perang modern dan pergerakan politik sensitif AS terkait dukungan kepada Taiwan yang dipersoalkan RRT berdampak kepada suasana sosial politik dan keamanan di Asia Tenggara.

Kedua, situasi krisis politik di Myanmar sebagai dampak adanya “kudeta” militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang “menyingkirkan” kekuasaan Aung San Suu Kyi (pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi). Sebagaimana diketahui, proses demokrasi Myanmar mengalami gelombang panas akibat kudeta militer yang merampas kebebasan warga. Jenderal yang berkuasa bersikap tirani dalam melemahkan protes dan kritik kelompok oposisi. Padahal mereka berkuasa dengan cara yang merusak demokrasi dan mengabaikan kebebasan bersuara masyarakat sipil. Saat ini militer berkuasa dan mengendalikan pemerintahan, sementara Aung San ditahan dan pendukungnya dikecam sebagai pemberontak.

Ketiga, ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan sebagian besar negara di Asia Tenggara termasuk negara besar AS, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok. Saat ini semua negara yang terlibat konflik berusaha waspada dan meningkatkan kesiagaan terhadap wilayah masing-masing terkait kepentingan nasional setiap negara di Laut China Selatan. Meski sudah ada intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai adanya pelanggaran kedaulatan terhadap garis batas laut yang dilakukan RRT, faktanya suhu panas Laut China Selatan belum kunjung usai. Apalagi ada beberapa kali upaya AS dan RRT yang berusaha melakukan provokasi kepada lawan politiknya dengan mengerahkan armada militer baik darat, laut dan udara terhadap wilayah yang sensitif ini.

Keempat, dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap politik, ekonomi dan keamanan global termasuk negara di Asia Tenggara. Secara ekonomi Rusia sebagai penghasil gas terbesar dan Ukraina yang memproduksi gandum sangat dibutuhkan negara Asia Tenggara. Ketika kendali ekonomi terganggu akibat perang, tentu berdampak kepada kehidupan ekonomi negara di Asia Tenggara. Aspek politik, militer dan keamanan tentunya terkait bagaimana perang kedua negara melibatkan negara besar dan berpotensi “menyeret” negara di kawasan Asia Tenggara. Tanpa upaya diplomatik yang lebih kencang dan serius, maka pergolakan diantara kedua negara yang disebabkan isu sensitif Ukraina bergabung ke NATO yang ditolak Rusia akan berdampak luas kepada geopolitik negara di seluruh dunia termasuk Asia Tenggara.

Kepemimpinan Indonesia dan Kedamaian Dunia

Ketika gelombang Asia Tenggara dan berbagai dinamikanya belum kunjung selesai, pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan memimpin ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara. Secara resmi, pemerintah Indonesia menerima estafet kekuasaan dari Kamboja untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Menyambut amanat tersebut, Presiden Jokowi

menyatakan Indonesia siap bergerak menjaga kestabilan dan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Dengan mengusung “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”, Indonesia mendorong keadilan, kemanusiaan dan demokrasi sebagai warna ASEAN sehingga menjadi jangkar stabilitas dunia (Setneg, 2022).

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023 menjadi catatan kepemimpinan keempat, setelah tahun sebelumnya pada 1967, 2003 dan 2011 terjadi hal yang sama. Tentu saja kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan tantangan ekonomi, sosial, budaya dan tak kalah pentingnya pertahanan-keamanan kawasan regional ini. Melalui estafet kepemimpinan ASEAN, Indonesia ditantang mampu menjawab perkembangan isu global seperti pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan keamanan regional akibat konflik internal masing-masing anggotanya. Ada harapan besar bahwa Indonesia mampu membawa ASEAN beradaptasi secara cepat di tengah perubahan tren global untuk kemudian memanfaatkannya dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan dan domestik (Kemenkeu, 2022).

Kepemimpinan Indonesia dalam mendorong perdamaian, stabilitas dan kemakmuran agar tercipta kawasan yang inklusif memang sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak. Ini mengingat kawasan ini sedang dilanda *trust deficit* sehingga Indonesia perlu menjadi *honest broker* (Kemlu, 2022). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan politik bebas aktif, yang dapat didorong kepada negara anggota ASEAN agar menerapkan politik serupa melalui mekanisme negara netral dan tidak berpihak blok manapun dalam menyikapi situasi internasional yang memanas. Lebih jauh, konsepsi ini harus berusaha diyakinkan Indonesia melalui langkah nyata seperti mengadakan kunjungan kerja kepada negara anggota ASEAN yang bermasalah, serta mengupayakan agar tercipta dialog kepada kubu yang bertikai di negara yang bermasalah tersebut.

Untuk merespons persoalan politik dan keamanan internasional, seperti kasus dinamika perebutan pengaruh di Laut China Selatan, Indonesia bisa memanfaatkan posisi sebagai Ketua ASEAN 2023 agar negara yang bertikai mengutamakan perundingan dan menahan ego untuk tidak saling memprovokasi dan perang senjata di wilayah tersebut. Bagaimanapun potensi alam yang menjadi pemicu konflik harus diselesaikan dengan konsep musyawarah mencapai mufakat. Perdamaian harus lebih dikedepankan dengan mencari titik temu sehingga masing-masing negara tidak disibukkan polarisasi antar kekuatan militer sehingga potensi konflik lebih dapat diredam. Konteks pemanfaatan posisi ketua ASEAN menjadi kunci agar Indonesia dan negara ASEAN lainnya menjadi juru damai dan penengah konflik sekarang dan masa mendatang. *

Referensi

Setneg, 13 November 2022. “Indonesia terima keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja”, https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_terima_keketuaan_asean_2023_dari_kamboja

Kemenkeu, 6 Desember 2022. “Siaran Pers,” https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1639458579_sp-107pdf.pdf

INGGAR SAPUTRA adalah dosen di Universitas Jakarta dan aktivis gerakan literasi di Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia. Aktif menulis berbagai buku, artikel jurnal dan riset terkait pendidikan, wawasan kebangsaan, sosial-budaya dan politik global. Sejak muda sudah aktif menulis di media massa, ikut berbagai kegiatan kolaborasi kepenulisan, terlibat dalam kegiatan peningkatan minat baca masyarakat dan menggagas gerakan literasi sosial “1 Hari 1 Tulisan.” Di tengah kesibukannya, sudah menulis beberapa buku antara lain *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan* (Nusa Litera Inspirasi, 2018), *Rumus Canggih Menulis di Media Massa* (Nusa Litera Inspirasi, 2018), *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022) dan *ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia* (Mata Kata, 2023). Untuk korespondensi bisa menghubungi email inggarsaputra88@gmail.com.

Unifikasi Ketahanan ASEAN Menuju *One ASEAN Identity*

Hasbullah Masudin Yamin DH

Economic progress in capitalist society, means turmoil.

- Joseph A. Schumpeter

Pendahuluan

Memulai tulisan ini mari kita mulai dengan ayat Al-Qur'an untuk menggambarkan bagaimana membangun hubungan antarnegara ASEAN. Ayat tersebut termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi: "... Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Ayat ini menjadi sangat relevan jika ditarik lebih jauh berkenaan dengan relasi dan komunikasi antarbangsa atau negara sebagai tanggung jawab bersama membangun *common interest* antarnegara ASEAN dengan satu narasi: *One ASEAN Identity*.

Berbagai prediksi menyebutkan bahwa penduduk Asia-Afrika menjadi dominan dalam percaturan global. Populasi ASEAN sendiri berada sekitar 600 juta lebih. Besarnya jumlah penduduk merupakan salah satu bonus demografi yang menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan, namun demikian akan sangat mengancam suatu negara, kawasan bahkan ancaman global jika besarnya penduduk tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan⁵. Jika kedua hal ini tidak bisa bersinergi dalam satu kesatuan pembangunan maka akan menjadi ancaman global. Jika ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa masalah baru yakni migrasi penduduk secara massif (dari negara miskin /konflik ke negara maju dan aman), atau kemungkinan lain yang lebih ekstrem yaitu upaya sistemik berupa perang melawan populasi dengan pengurangan dan/atau pembatasan pertumbuhan penduduk (perang mengurangi pertumbuhan manusia).

Politik kawasan menjadi salah satu tema menarik untuk didiskusikan, selain karena adanya perbedaan juga adanya semangat kebersamaan. Namun ketika menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian semangat kebersamaan inilah yang utama untuk diperjuangkan agar keharmonisan peradaban manusia dan kelangsungan lingkungan menjadi suatu kekuatan.

Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar serta memiliki kekayaan Sumber Daya Alam di antara negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berperan penting merumuskan kebijakan sebagai pengejawantahan dari pada Deklarasi Bangkok untuk melakukan unifikasi ketahanan ASEAN sebagai satu kekuatan untuk menghadapi tantangan global. Momentum Indonesia Chairmanship ASEAN 2023 dapat dijadikan sebagai titik balik merubah pola kerja sama ASEAN yang inklusif.

Kerja Sama ASEAN, Sebuah Paradoks

Kolaborasi dan ekspansi, dua kata inilah yang tepat untuk membangkitkan semangat kebersamaan negara-negara ASEAN untuk membangun ketahanan regional melalui pendekatan kolaboratif dalam upaya akselerasi dan eksplorasi sumber daya ASEAN guna membangun ketahanan kawasan dan ekspansi pasar menuju persaingan global.

5 Pertumbuhan ekonomi bisa saja hanya berpusat pada kekuatan ekonomi tertentu tanpa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat bawah.

Deklarasi Bangkok menjadi awal dari perjalanan ‘himpunan’ negara kawasan Asia Tenggara. Kurang lebih 55 tahun usia ASEAN, ASEAN telah membangun komunikasi aktif dalam mewujudkan semangat kerja sama sesama negara kawasan. Politik kawasan belakangan ini menjadi perhatian khusus seiring dengan persaingan global yang tak menentu penuh tantangan. Setidaknya sejak berdirinya, asosiasi ini telah menanamkan pondasi ‘suci’ yang menjadi tujuan bersama. Tujuan berdirinya ASEAN sebagaimana termaktub dalam deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tata tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara serta agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.
3. Peningkatan kerja sama yang aktif serta saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga teknik.
4. Saling bantu-membantu, baik itu dalam bidang pelatihan dan juga dalam bidang pendidikan, professional, administrasi, dan teknik.
5. Membina dan menjalin yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota.
6. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota.
7. Memelihara kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan diadakannya kerja sama yang lebih erat lagi satu sama lainnya.

Aktualisasi dari ketujuh poin deklarasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pendirian lembaga atau institusi⁶ baru guna memperkuat kerja sama. Dari berbagai jenis kerja sama ASEAN tersebut, ada dua hipotesa awal yang menimbulkan antitesa. Antitesa ini terjadi paradoks dalam logika awal dari kerja sama tersebut khususnya berkenaan dengan kerja sama bidang ekonomi. Ada dua terminologi mendasar mengapa terjadi kesalahan logika dalam membangun kerja sama: *pertama*, bahwa seluruh kerja sama—khususnya bidang ekonomi dan perdagangan—berangkat pada satu nafas yakni *free trade* dan *kedua*, *integrasi*, bahwa semangat dari berbagai komunitas kerja sama ASEAN adalah integrasi kawasan di berbagai bidang. Ada kontraproduktif terhadap terminologi *free trade* dan *integrasi*⁷.

Jika kerja sama antar ASEAN masih mengamalkan ‘pasar bebas’ maka akan menimbulkan persingan ‘saling gigit’ antar sesama. pasar bebas hanya akan melahirkan kompetisi tidak sehat sebab akan terjadi arus barang impor dengan persaingan harga yang signifikan tergantung pada biaya produksi masing-masing negara. Negara yang mampu menekan biaya produksi maka akan memainkan pasar bebas regional. Dampak lain dari mekanisme pasar bebas adalah masuknya investasi asing dengan menghadirkan perusahaan asing yang berdampak pada persaingan dan banjirnya tenaga kerja.

6 Beberapa bentuk kerja sama antar sesama negara ASEAN diantaranya adalah: (1). AFTA (ASEAN Free Trade Area) dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor impor serta meningkatkan investasi bagi negara-negara ASEAN; (2). AEC (ASEAN Economic Community). bertujuan membawa kawasan Asia Tenggara menuju pasar tunggal dan basis produksi; (3). CEP AFTA (Common Effective Preferential Tariff-AFTA); (4). ASEAN Political Community; (5). ASEAN Socio-Culture Community.

7 Di saat kita membangun semangat integrasi melalui kerja sama di berbagai bidang, pada saat yang sama kita menganut pola pasar bebas. Pasar bebas berangkat dari pola persaingan, dimana persaingan akan memunculkan sikap saling ‘sikut’. Sedangkan integrasi melahirkan sikap saling rangkul. Inilah bagi penulis jika kita memulai dengan narasi yang salah maka gagasan dan kebijakan pun akan tidak tepat pula.

Kondisi Indonesia—yang memiliki sumber daya alam melimpah tapi tidak diikuti sumber daya manusia dan modernisasi alat produksi—rentan akan menjadi ‘korban’ terhadap pola kerja sama dimaksud. Indonesia hanya akan menjadi penyumbang bahan produksi (bahan mentah) bukan menjadi pemain pasar ekonomi regional. Oleh karena itu, agar bentuk kerja sama kawasan harus melepaskan diri dari mekanisme pasar bebas—yang cenderung pada liberalisasi ekonomi yang menghendaki persaingan terbuka—antarnegara kawasan. Kita menyadari bahwa ASEAN tidak luput dari pergaulan global yang cenderung akan kapitalisasi dan liberalisasi sistem kehidupan. Namun hal demikian dapat ‘dilawan’ jika ASEAN memiliki mekanisme tersendiri dalam membangun pola kerja sama. Membangun kekuatan internal untuk menghadapi kekuatan eksternal merupakan suatu prinsip yang harus dimulai.

Jika ASEAN masih mengikuti pola kapitalisasi dan liberalisasi sebagaimana dunia luar maka apapun bentuk kerja sama yang dibangun akan kalah bersaing dengan dunia di kawasan lain sebab kita masih mengikuti pola permainan yang sama. ASEAN tidak boleh mengikuti alur pola kerja sama dengan negara atau politik kawasan lain, ASEAN harus mampu melahirkan model dan mekanisme ekonomi baru yang mewarnai persaingan global. ASEAN harus menjadi mercusuar dan kiblat ekonomi dan politik dunia.

From Community to Commodity

Menyadari bahwa pola kerja sama masih menganut hukum pasar bebas, maka Indonesia Chairmanship ASEAN 2023 perlu mengagas pola relasi, komunikasi dan kolaborasi baru nan intens guna membangun ketahanan ASEAN diberbagai sektor kerja sama. Ketahanan dimaksud penulis adalah sebuah komunitas menciptakan komoditas sebagai identitas ASEAN. Identitas inilah yang menjadi modal ASEAN melakukan ekspansi global.

Melihat dari *blue print* Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terdapat 3 (tiga) poin untuk menggambarkan semangat dan upaya membangun ketahanan ASEAN. Menurut Ratnaningsih, tiga semangat tersebut adalah *Single market and production base* (pasar tunggal dan basis produksi internasional), *equitable economic development* (pembangunan ekonomi yang setara), *integration into global Economy* (integrasi dalam ekonomi global) (Ratnaningsih, 2015: 26).

Namun demikian, *blue print* MEA tersebut perlu diberikan kritikan sebab tidak mungkin adanya kesetaraan ekonomi jika masih berkiblat pada mekanisme pasar bebas. ASEAN akan sulit bersaing dalam sebuah komunitas global jika mengekor pada mekanisme pasar global. Sehingga, guna menghadapi pasar global, ASEAN perlu memperkuat ekonomi kawasan dengan membentuk komunitas ekonomi dengan konsep kerja yang jelas yakni unifikasi bahan dan hasil produksi (komoditi). Misalnya dalam membangun ketahanan pangan seperti unifikasi produksi pangan, selain membangun kerja sama teknologi pertanian guna menggenjot produksi pangan, politik pangan pun perlu memiliki lembaga seperti Bulog (badan urusan logistik milik Indonesia) yang berfungsi mengumpulkan, mendistribusikan kebutuhan pangan ASEAN, sehingga sesama negara ASEAN tidak menjadi importir pangan dari negara lain, pemenuhan kebutuhan ASEAN adalah prioritas.

Kita tidak ingin sekedar membangun komunitas tanpa unifikasi komoditi ASEAN. Kasus baja misalnya, bahwa proyeksi permintaan baja ASEAN di tahun 2030 mencapai 40 % terhadap permintaan global. Sedangkan tahun 2022 menurut *World Steel Association* permintaan baja ASEAN mencapai 72,6 juta metrik ton (naik 4,8%). Di sisi lain, ASEAN masih menjadi net importir baja, suatu yang paradoks.

Oleh karena itu, unifikasi komoditi ASEAN bertujuan membentuk komoditi bersama guna memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat ASEAN serta menjadi modal ekspansi pasar global dan yang terpenting adalah ASEAN harus menciptakan mekanisme pasar baru baik sebagai pedoman kerja sama ASEAN maupun menjadi lokomotif perubahan mekanisme pasar global. Indonesia pernah menjadi ‘promotor’ perlawanan kolonialisme yang bertindak sebagai *pioneer* Konferensi Asia-Afrika, maka momentum Chairmanship Indonesia 2023, Indonesia dapat membangun sejarah baru dalam politik kawasan ASEAN dari *Community to Commodity*, dari mekanisme pasar bebas menjadi pasar kolaboratif (gotong royong).*

Referensi

Hidayanti, Ratna Ningsih, ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas, Deepublish: 2015

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221118161305-17-389354/asean-diproeksi-jadi-wilayah-strategis-industri-baja-global>, akses tanggal 23/11/2022

HASBULLAH MASUDIN YAMIN lahir di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ia menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Inpres Atulaleng, kemudian melanjutkan MTs dan MA di Pondok Pesantren Al Hikmah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pendidikan tingginya diselesaikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA). Ia dapat dihubungi di ponsel 085333456780 dan email: haszbollahmasudin@gmail.com.

Merangkul Pasifik, Membangun Kekuatan Bersama

Rhidian Yasminta Wasaraka

Masuknya Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN dan upaya serta harapan besar dari Papua New Guinea untuk dapat segera bergabung dalam organisasi regional yang didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina 8 Agustus 1967, telah membuktikan bahwa perluasan hubungan dan kerja sama menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Hal ini selaras dengan apa yang sering disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi dalam banyak pertemuan termasuk dalam kunjungannya ke Fiji dan Kepulauan Salomon September 2022 lalu: “..untuk membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik baik di taratan bilateral maupun regional maupun dalam forum global” dan “...saat presidensi Indonesia di G20 Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang negara-negara kepulauan kecil.”

Maksud Indonesia untuk memperkuat kerja sama kawasan Indo-Pasifik ini bukan tanpa alasan, sebab inilah kawasan yang merupakan rumah bagi 3/5 penduduk bumi, dengan GDP pada tahun 2019 mencapai 52 triliun dolar AS, bahkan S&P Global Market Intelligence memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik akan mencapai 3,5% di tengah isu resesi dunia tahun 2023 mendatang.

Sebuah Sejarah Panjang

Sejarah menunjukkan adanya hubungan antara kawasan Asia dan Pasifik sejak lama. Jejak genetika yang melahirkan sub ras Melanesia sebenarnya adalah bukti kuat adanya interaksi ras Melanosiod dan ras Mongolid dari Asia tenggara sejak 40.000 tahun yang lalu. Belum lagi jika kita bicara perdagangan rempah-rempah, bulu burung cenderawasih yang menjadi trend mode di Eropa pada periode akhir abad ke-19 dan juga tembikar seperti guci dan piring porselen dari China yang masih sampai kini digunakan sebagai mas kawin di beberapa suku di Papua. Maka, tentulah menjadi sebuah jejak panjang yang mampu menerangkan hal tersebut.

Dokumen paling tua *Negarakertagama* karya empu Prapanca dari Kerajaan Majapahit menuliskan tentang daerah yang bernama Wwnin (Onin) yang kemungkinan besar adalah nama suatu wilayah di sebelah barat daya kepala burung yang merujuk pada daerah Fakfak dan Semenanjung Bomberai. Yang menarik lagi, terdapat juga tempat di Kaimana Papua barat yang dinamakan Tanjung batu kerbau, sebuah nama yang aneh karena kerbau—sampai saat ini—tidak pernah hidup di Kaimana. Ini menjelaskan bahwa interaksi antara Jawa dan daerah bagian kepala burung Papua sudah lama terjalin. Kall Muler menyebutkan dalam bukunya bahwa para pedangang dari Seram laut telah menjelajah hingga daerah Trans Fly—Papua New Guinea barang yang diperdagangkan diantaranya porselin dan gading gajah, gong dan tekstil yang didapat dari hubungan perdagangan dengan wilayah Asia, sebagai gantinya mereka membawa mutiara, kopra, kulit penyau dan kayu masohi.

Akan tetapi, hal ini tidak selamanya mulus. Perbudakan dan penjarahan menjadi pemicu konflik paling awal dari hubungan ini. Sejarah mencatat, pada tahun 1856 sekitar 50 pedang dari Gorong tewas dalam konflik di pesisir barat pulau Papua. Dan, sejujurnya permusuhan ini bukan semata ditujukan kepada para pedangang asal Seram Laut semata, namun semua yang berasal dari luar, termasuk para pedangang dari Eropa.

Perbedaan Cara Pandang sebagai Akar Konflik

Interaksi ini bukan berarti tak terjadi konflik sama sekali. Namun, ada baiknya kita melihat apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut dan yang patut kita ambil hikmahnya adalah bagaimana interaksi antar budaya pada masa lalu bisa berlangsung langgeng dan saling menguntungkan? Hal ini penting untuk dipahami agar gaung kerja sama antar kawasan ini bukan hanya menjadi berita gembira bagi para politisi, diplomat, aparat keamanan dan pengusaha

saja tapi juga masyarakat adat yang sejatinya adalah masyarakat diakar rumput yang akan merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan yang diambil oleh negara.

Kita tentu maklum bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk bumi, perubahan gaya hidup, dan semakin menipisnya cadangan bahan mentah dan sumber daya alam, menyebabkan dorongan kuat manusia dari berbagai belahan bumi untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru bukan hanya untuk bertahan hidup, akan tetapi mencapai sebuah kejayaan. Dan ini tentu saja sebagian besar sumber daya alam yang masih tersisa di bumi kebanyakan akan berada di kawasan Pasifik sebab kawasan ini memang relatif baru ditemukan sekitar abad ke-19, hingga masih belum terlalu lama dieksploitasi, dan walaupun dieksploitasi hanyalah dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan lokal semata. Hal lain adalah jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penguasaan teknologi modern yang minim hingga tak terlalu banyak pesaing. Namun di sisi lain memiliki kawasan yang sangat luas.

Meningkatnya ekspansi para migran ini kemudian melahirkan konflik dengan suku pribumi yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Konflik ini lahir dari perbedaan terhadap cara pandang terhadap ruang, relasi manusia-alam, orientasi kepemilikan dan budaya masing-masing pihak.

Dalam dimensi ruang misalnya. Ketika kita bicara tentang hak hidup maka tentu kita kan bicara tentang ruang hidup, ruang hidup dalam hal ini adalah tanah. Bagi investor, *tanah adalah aset* yang harus dimiliki secara jelas—sah berbadan hukum, dikelola secara maksimal dan bila perlu harus dipagari. Berpindahnya kepemilikan tanah melalui proses jual beli dengan cara apapun berarti memutus segala hubungan hak dan kewajiban dari pemilik sebelumnya, hingga tanah menjadi hal yang seratus persen dimiliki secara mutlak.

Berbeda dengan masyarakat adat, bagi mereka, *tanah adalah ibu*—adalah sesuatu yang suci dan dianggap sakral. Pengelolaan tanah tidak bisa dilakukan secara sembarangan namun harus menghormati hukum alam sebagai hukum tertua yang mereka kenal. Tanah juga tidak dimiliki secara personal dan pengelolaannya haruslah komunal. Pembelian tanah hanya melepaskan tanah itu sendiri dalam arti pengelolaan ekonomi semata atau hak makan. Sampai di sini, terjadi konflik karena pihak perusahaan merasa masyarakat adat melanggar perjanjian kepemilikan sedangkan masyarakat adat merasa bahwa walaupun tanah telah dibeli akan tetapi hal itu tidak serta merta memutus ikatan mereka secara kultural dan spiritual.

Dalam dimensi relasi waktu menjadi lain cerita. Para migran yang datang dengan semangat mengumpulkan kekayaan akan memandang waktu dalam hitungan ekonomi, efisiensi dan uang. Akan tetapi, pada masyarakat adat yang merasa hidup mereka baik-baik saja selama ini memandang waktu sebagai sebuah momentum untuk membangun relasi sosial dengan kerabat dengan alam. Hingga yang timbul berikutnya adalah stigma bahwa pribumi pemalas oleh para migran sedangkan para migran dianggap rakus dan tergesa-gesa oleh para pribumi.

Mencari Jalan Keluar

Sebagian dari kita saat ini yang terbiasa dengan program dan ide pemberdayaan masyarakat mungkin bertanya-tanya, apakah kita akan membiarkan mereka dengan kondisi yang ada sementara ada sumber daya alam yang melimpah di sekitar mereka. Untuk itu, saya ingin kita menarik nafas sejenak dan mencoba mengganti cara pandang kita dengan mengganti kacamata kita.

Adalah hal yang menarik ketika dunia sibuk membahas soal konflik Rusia-Ukraina namun menteri pertahanan Fiji justru menggaungkan isu perubahan iklim yang telah bertahun-tahun menghantam negaranya menciptakan pengungsian ribuan orang dan menghancurkan sistem ekonomi mereka dan menjauhkan mereka dari impian tentang kesejahteraan. Pidato Menteri Pertahanan Inia Seruiratu ini tentu saja menjadi antitesis bagi apa yang dimaksud dengan kesejahteraan bagi sebagian besar orang. Tawaran kerja sama dengan China—yang merupakan raksasa ekonomi dunia—mentok dan menemui jalan buntu. Negara-negara ini seolah menampik kesempatan menjadi kaya dalam pandangan orang lain namun hancur secara budaya dan alam. Bagi mereka hutan, laut dan alam jauh lebih penting untuk menjamin eksistensi dan impian kesejahteraan mereka. Sebab, jika bicara tentang mengendalikan perubahan iklim, maka program zero karbon dan moratorium dalam kehutanan merupakan sebuah keharusan, sebab tidak ada jalan lain untuk mengendalikan iklim selain hutan yang terjaga dan lestari. Dan sejauh ini tidak ada satupun sistem kehutanan

di dunia ini yang telah terbukti ampun menjaga kelestariannya selama berabad-abad selain sistem pengelolaan hutan dan alam yang diterapkan masyarakat adat.

Lalu bagaimana jalan keluar dari situasi ini? Jawabannya adalah dengan melakukan pendekatan komunikasi antar budaya yang menempatkan interaksi antar manusia dalam dimensi kesejajaran dirasa lebih menyentuh dan menjadi alternatif pola pendekatan dibandingkan strategi pendekatan secara ekonomi maupun keamanan.

Hal ini disebabkan oleh karena dalam komunikasi antar budaya mengakui perbedaan budaya sebagai sebuah kekayaan dan bukan sesuatu yang harus ditakuti, pendekatan komunikasi antar budaya menekankan adanya penghormatan dan kesejajaran dalam proses komunikasi. Komunikasi antar budaya menekankan pentingnya rasa percaya antara pihak-pihak yang berkomunikasi, percaya bahwa pihak yang diajak bicara tak memiliki agenda tersembunyi selain yang sudah dipaparkan. Hal ini tentu bukan hal yang mudah sebab menyangkut reputasi dan persepsi. Keduanya berasal dari pengalaman di masa lalu. Hingga memilih siapa yang bisa menjadi pionir untuk membuka jalan adalah hal yang penting. dalam hal ini Indonesia dengan reputasi baiknya di kancah percaturan politik dunia dengan prinsip politik bebas aktif dan startegi merangkul dan bukan merangkai menjadi hal positif pertama.

Hal lain adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang juga memiliki wilayah laut di kawasan Pasifik, termasuk juga terdapat kesamaan budaya dengan beberapa negara Melanesia hingga Indonesia bisa diterima pada forum *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023 semakin menambah nilai plus.

Soal keadilan, tidak ada negara atau orang di dunia ini yang suka jika dicurangi, maka mengembangkan hubungan yang adil adalah sebuah keharusan. Keadilan ini nantinya akan berhubungan erat dengan cara pandang dalam kesetaraan. Kita diharapkan mampu melihat dan menyadari bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik dan masuk akal menurut orang lain. Masyarakat adat di kawasan Pasifik—yang menghormati alam sebagai ibu dan sosok yang sacral—sebaiknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan berbau klenik. Sebaliknya kita yang merasa tahu segalanya harus bisa belajar mengenal mereka dan bertanya bagaimana bisa mengelola alam dengan bijak dan memadukan dengan teknologi yang mungkin kita kuasai. Seperti kata pepatah 'di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung', maka seperti itulah tiap bangsa ingin budayanya diperlakukan.

Simpulan

Kita mungkin tidak akan menyelesaikan diskusi ini sampai di sini, karena masih banyak tanya yang harus dan ingin dijawab. Namun kita bisa memulai dengan mempercayai bahwa jika Tuhan saja tidak melihat dan menilai manusia berdasarkan tampilan luar maka mengapa kita kemudian menempatkan parameter kita kepada orang lain dan bangsa lain. Menegal mereka mungkin akan memakan waktu seumur hidup kita akan tetapi jika kita mau menempatkan sebuah hubungan dalam dimensi saling dan bukan saing maka merangkul adalah kata yang tepat dan bukan merangkai, sebab merangkai akan menempatkan sesuatu itu dalam dimensi siapa di depan dan siapa di belakang, mana yang utama dan mana yang bukan. Bila ini benar-benar bisa diterapkan tentu menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai, sejahtera dan berkeadilan bukan lagi hanya sebuah impian.*

Referensi

- Liliweri Allo (2003). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS
- Liliweri Allo (2003). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Predana Media Group
- Mulyana, Deddy & Rakhmat, Jalaluddin (2000). *Komunikasi antar budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy (2004). *Komunikasi Efektif*. Bandung: Rosda Karya
- Muller, Kal (2008). *Mengenal Papua*. Daisy Wold Books
- Paparan dan Notulensi Forum MSG, <https://drive.esdm.go.id/wl/?id=L2FXoKESxksTrEcxfjq7dEOJ7tpijPBp>
- Sutardi, Edi & Rospita, Ita (2007). *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: Setia Purnama Inves

Berita

<https://ipdefenseforum.com/id/2022/10/ancaman-keamanan/>

https://kemlu.go.id/ptri-asean/en/pages/asean_plus_three/978/etc-menu

<https://www.antaraneews.com/berita/2934189/fiji-ancaman-di-asia-pasifik-bukan-konflik-tapi-perubahan-iklim>

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/13/235900979/sejarah-perjuangan-timor-leste-menjadi-anggota-asean?page=all>

<https://news.detik.com/kolom/d-4477622/diplomasi-indonesia-merangkul-indo-pasifik>

RHIDIAN YASMINTA WASARAKA adalah antropolog muda dari Papua. Perempuan berdarah Papua-Jawa ini merupakan salah satu dari tiga orang di dunia yang secara tekun meneliti kebudayaan suku Korowai, suku yang dikenal dunia dengan julukan manusia rumah pohon sejak 2003-sekarang. Hasil risetnya ia tuangkan dalam buku *Perempuan Perkasa-Belajar, Praktik kesetaraan dalam budaya suku Korowai* yang didanai Ford Foundation dan Media Cipta Ekspresi. Buku tersebut didedikasikan untuk membela, meluruskan salah kaprah dan misinformasi yang selama ini beredar di media. Dian juga seorang fotografer profesional yang telah menyumbangkan hasil karyanya demi kemanusiaan dan pendidikan di Papua. Karyanya pernah dipamerkan di Eropa dan diterbitkan di majalah nasional. Ia juga mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Papua dan dapat dihubungi di email: dian.yasminw2@gmail.com.

ASEAN Economic Community 2025, Antara Keinginan dan Kenyataan

Dedeh Kurniasih

ASEAN memiliki satu gagasan penting yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community*. Inti gagasan ini adalah integrasi ekonomi ASEAN yang lebih jauh sebagai perpanjangan logis dari proyek integrasi ekonomi regional yang telah dimulai ASEAN dengan keputusan bersejarah pada 1992; ketika itu, ASEAN membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, telah menjadi mimpi bersama negara-negara ASEAN. Para pemimpin negara ASEAN menyatakan keinginan untuk menjadikan wilayah ASEAN yang aman, dan memiliki tingkat dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. Selain itu, ada upaya untuk pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.

Untuk itu, pemrakarsa AEC telah menetapkan empat karakteristik utama. Pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Keempat, kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Pada KTT ke-14 ASEAN tahun 2009, di Cha An Hua Hin, Thailand, disepakati Peta Jalan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009-2011. Menjelang tahun 2015, untuk memastikan mimpi AEC 2015, melalui Bandar Seri Begawan Declaration on The ASEAN Community's Post 2015 Vision dalam KTT ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan, 9-10 Oktober 2013, negara-negara ASEAN membuat kesepakatan lagi. Mereka kini berkomitmen merumuskan visi ASEAN *Community* pasca 2015.

Ada empat usulan Indonesia yang ingin dijadikan dasar ASEAN Community's Post 2015. *Pertama*, konsolidasi internal masyarakat ASEAN. *Kedua*, menciptakan arsitektur regional untuk memastikan kestabilan, perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. *Ketiga*, kontribusi ASEAN untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan global dengan memanfaatkan Bali Concord III dan Plan of Action sebagai *common platform*. *Keempat*, mengidentifikasi ASEAN Development Goals (ADGs). Negara-negara ASEAN menyambut baik prakarsa Indonesia mengenai dua *aspirational goals* sebagai elemen ADGs, yaitu menggandakan PDB ASEAN dari USD 2,2 triliun menjadi USD 4,4 triliun dan memangkas separuh persentase kemiskinan di kawasan ASEAN dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030.

Pada tahun 2014 pemimpin ASEAN mengesahkan Nay Pyi Taw *Declaration on ASEAN Community's Post 2015 Vision* pada tanggal 12 November. Selain itu, juga ada keputusan membentuk *High Level Task Force*. Gugus tugas ini untuk membantu tugas dan kerja ASEAN *Coordinating Council Working Group (ACCWG) on ASEAN Community Post 2015*. Pada akhir Desember 2015, disepakatilah ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama, yang dijadikan dokumen pengganti Peta Jalan menuju Masyarakat ASEAN (2009-2015) yang berakhir pada 31 Desember 2015. Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Kuala Lumpur yang ditetapkan dalam KTT ke-27 ASEAN. Pada saat yang sama, juga disepakati Cetak Biru ketiga Pilar Masyarakat ASEAN 2025.

Visi Masyarakat ASEAN 2025, diharapkan dapat mengkonsolidasikan pembangunan Masyarakat ASEAN dan memperdalam integrasi yang telah berlangsung selama ini kedalam tahap yang lebih konkret. Selain itu, visi ASEAN ini juga dijadikan pelengkap Agenda 2030 PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. Pasalnya, dalam visi masyarakat ASEAN 2025, termuat keinginan untuk meningkatkan standar hidup rakyat di negara-negara anggota ASEAN.

Keamanan Kawasan

Tujuan utama dari MEA 2025 adalah untuk memfasilitasi kelancaran pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di ASEAN. Fasilitasi ini diperlukan untuk memperluas jejaring perdagangan dan produksi ASEAN, serta menciptakan pasar yang lebih terpadu bagi perusahaan dan konsumennya.

Dalam teori *Regional Security Complex* (RSC) Barry Buzan dan Ole Waever disebutkan, RSC sebagai suatu kelompok negara yang keamanan negara anggotanya menjadi bersatu dan tidak terpisah satu sama lain (Buzan, 1998). Untuk itu, Buzan dan Waever (Buzan B. & Waever, 2003) ketika mengembangkan teori RSC, melihat tentang peta kekuatan negara-negara di dunia sebagai titik tolak penting dalam melihat kerja sama regional. Itu sebabnya dalam kerja sama ASEAN ini, juga perlu dilihat diferensiasi kekuatan negara. Mulai dari historis sebuah negara, dinamika keamanan regional yang membentuk kekuatan regional, hingga persoalan keamanan yang tidak lagi berfokus pada negara dan persaingan politik-militer. Soal keamanan, cakupan sudah meluas pada faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Secara umum, bisa dikatakan kondisi keamanan regional Kawasan ASEAN cukup terkendali. Keadaan ini dilihat dari hampir tidak ada ketegangan antar negara anggota ASEAN, dan juga hanya ada sedikit ketegangan di dalam negeri anggota ASEAN. Apalagi, sejak tahun 1979, lima kepala negara pendiri ASEAN sudah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*). Melalui traktat ini, stabilitas politik dan keamanan ASEAN dapat terjaga, karena di dalamnya mengatur tentang mekanisme penyelesaian konflik antar negara-negara ASEAN secara damai. TAC ini diamandemen tahun 1987, untuk membuka akses negara-negara di kawasan lain. Sampai tahun 2014, terdapat 32 negara, termasuk 10 negara ASEAN yang mengaksesi TAC.

Selain itu, secara lebih konkrit lagi, koordinasi kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*). Setidaknya, dalam setahun Dewan ini akan melakukan pertemuan dua kali. Pertemuan pertama mereka dilakukan di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Riak kecil yang masih mengganjal terkait keamanan kawasan ASEAN adalah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah yang cukup strategis ini berbatasan langsung enam negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Enam negara ASEAN itu adalah Brunei Darussalam, Filipina Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Ada beberapa bagian di wilayah ini yang memiliki yurisdiksi tumpang tindih, antara *claimant states* Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT. Kondisi ini membuat potensi konflik di wilayah ini bisa terbuka kapan saja.

Namun, sudah ada upaya untuk memastikan konflik itu tidak meledak, diantaranya dengan pertemuan antar menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Pertemuan pada 22 Juli 1992 itu, menghasilkan *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Isinya antara lain, perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*; perlindungan atas lingkungan laut; koordinasi *search and rescue*; upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.

Upaya lanjutan dilakukan pada tahun 2002. ASEAN bersama RRT menandatangani *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC)*. Kesepakatan itu ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Deklarasi intinya adalah komitmen negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk mematuhi prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut Tiongkok Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Kesepakatan ini, jadi dasar ASEAN dan RRT mencegah konflik terbuka dengan semangat kerja sama dan saling percaya. Kerja sama itu diperkuat lagi dengan kesepakatan *Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea)*.

Selain persoalan Laut Tiongkok Selatan, juga masih ada persoalan internal di beberapa negara-negara ASEAN yang bisa menjadi sumber ketegangan dalam negara, dan berpotensi merembet jadi problem keamanan kawasan. Diantaranya kasus Moro di Filipina Selatan. Kasus Muslim Rohingya di Myanmar. Kasus Muslim di Kamboja. Kasus Muslim di Thailand Selatan. Keempat kasus ini, belum sepenuhnya padam. Letupan kecil masih sering terjadi, dan memicu sejumlah solidaritas hingga di sejumlah negara ASEAN lainnya, termasuk di Indonesia.

Sedangkan problem internal politik di negara-negara ASEAN, bisa dikatakan terkendali. Proses demokrasi yang terjadi, seringkali meningkatkan suhu politik dalam negeri. Namun, riaknya tidak banyak terpengaruh hingga kawasan. Terakhir, kemelut politik di Malaysia yang terjadi dalam dua tahun terakhir, sudah memperlihatkan titik terang pada akhir November 2022. Kestabilan itu mulai terlihat ketika Pimpinan tertinggi UMNO sepakat dengan keputusan Raja Malaysia untuk membentuk pemerintahan persatuan. Langkah ini membawa Ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim selangkah lebih dekat ke jabatan perdana menteri. Sebuah posisi yang sudah diincar Anwar Ibrahim selama hampir 25 tahun. Ketegangan politik internal dalam negeri justru mulai meningkat di Indonesia. Peningkatan suhu politik

ini, terkait dengan penyelenggara pemilu pada Februari tahun 2024. Pemilu itu, akan memilih presiden dan anggota legislatif tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Sementara, pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN.

Problem lain adalah serangan Covid-19 yang menghantam dunia, sedikit banyak telah mengganggu sejumlah agenda yang sudah disepakati negara-negara ASEAN. Meskipun, *deadline* masih menyisakan waktu sekitar dua tahun lagi, namun MEA 2025 tampaknya masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Apakah MEA 2025 bisa diwujudkan? Mengingat 23 Rencana Aksi Strategis yang sudah ditetapkan, belum banyak yang bisa dikerjakan. Itu sebabnya, pada pertemuan the 42nd High-Level Tasks Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) pada Agustus 2022 di Siem Reap, Kamboja, telah Menyusun Visi Pasca 2025. Visi ini diakui sebagai respon krisis multidimensi yang terjadi. *The Perfect Storm (Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodities, dan Cost Living)*, telah menjadi fokus perhatian negara-negara ASEAN ke depan. Saat ini, *core element* Visi Pasca 2025 yang strategis sedang disusun dengan fokus pada kualitas untuk mencapai MEA.

Kesimpulan

Upaya merealisasikan MEA 2025, yang menjadi tekad negara-negara ASEAN terus diupayakan. Namun, waktu yang tersisa dua tahun lagi itu, tampaknya menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Hal ini mengingat, 23 Rencana Aksi Strategi yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2015, masih banyak yang belum bisa direalisasikan. Meskipun, kondisi keamanan dan politik kawasan ASEAN cukup kondusif untuk menjalankan Rencana Aksi Strategis tersebut. Itu sebabnya, negara-negara ASEAN sudah mulai menyiapkan langkah baru untuk mewujudkan MEA, dengan Visi Pasca 2025. Prosesnya masih berlangsung, dan ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh Indonesia yang mendapat kesempatan memimpin ASEAN tahun 2023.*

Referensi

- ASEAN Studies Center (2008). *ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Burgess, S. (2021). *Regional Security Complexes and African Foreign Policies*. Journal of Indo-Pacific Affairs.
- Buzan, B. O. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder, Colorado, and London, England.
- Buzan, B. &. (2003). *Regions and Powers*. New York: Cambridge University Press.
- Denis Hew Wei-Yen, Rahul Sen (2004). *Towards an ASEAN Economic Community: Challenges and Prospects*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Denis Hew Wei-Yen, editor (2005). *Roadmap to an ASEAN Economic Community*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015). *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*, Jakarta.
- , Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan ASEAN. 17 Maret 2015. https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean, diakses pada 6 Desember 2022.
- , *ASEAN Economic Community 2025*, <https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/>, diakses pada 6 Desember 2022.
- Natalegawa, Marty (2018). *Does ASEAN Matter? A View from Within*. Singapore, ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Roberts, Christopher (2010). *ASEAN'S Myanmar Crisis: Challenges to the Pursuit of a Security Community*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.

DEDEH KURNIASIH adalah lulusan S1 Jurusan Program Studi Sastra Belanda Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia (1996) dan S2 Program Kajian Wilayah Eropa di Sekolah Kajian dan Stratejik Global Universitas Indonesia (2022). Ia pernah menjadi jurnalis pada Group Kompas Gramedia (1997-2014), konsultan konten media untuk aplikasi pada salah satu proyek UNICEF (2015), selanjutnya bergabung di program Kampanye Gizi di IMA World Health (2016). Saat ini, ia masih aktif sebagai Redaktur Pelaksana di Majalah Alumni Universitas Indonesia dan penulis untuk portal media Menara62.com.

Nomocracy for ASEAN: Introducing a New Multistage Representative Election System

Al Chaidar Abdurrahman Puteh

Introduction

Nomocracy, or the rule of law, is a fundamental principle of democracy that ensures the equal protection of rights and freedoms for all citizens. However, in the context of ASEAN, a regional organization of 10 Southeast Asian countries, nomocracy faces many challenges due to the diversity of political systems, cultures, religions, and ethnicities among its members. How can ASEAN achieve a more harmonious and integrated community that respects the rule of law and the will of the people? In this article, we propose a new multistage representative election system that aims to enhance the legitimacy, accountability, and responsiveness of ASEAN's decision-making process. We argue that this system would foster a more participatory and inclusive democracy in ASEAN, while also preserving its diversity and sovereignty.

Nomocracy is a form of government that is based on the rule of law, rather than the rule of men. It is a system that aims to protect the rights and freedoms of individuals and groups, while ensuring accountability and transparency of public officials. Nomocracy has been proposed as an alternative system for the future, especially in regions that face challenges such as political instability, corruption, ethnic diversity, and social inequality. One such region is ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, which comprises 10 member states with different cultures, religions, languages, and histories. In this article, we introduce a new multistage representative election system that is designed to promote nomocracy in ASEAN. We explain the principles and mechanisms of this system, and how it can address some of the common problems that plague the current electoral systems in the region. We also discuss the benefits and challenges of implementing this system, and provide some recommendations for future research and action.

Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been explored by various scholars and thinkers in the context of Islamic political thought. Nomocracy implies that the law is derived from a divine source and that it is applied equally and fairly to all members of society. Nomocracy also entails that the law is not subject to the whims and interests of human rulers, but rather reflects the will and guidance of God. In this article, we will examine the possibility of nomocracy as an alternative system for the future of ASEAN, a regional organization that consists of 10 Southeast Asian countries with diverse cultures, religions and political systems. We will also introduce a new multistage representative election system that aims to promote nomocracy in ASEAN by ensuring the participation and representation of various segments of society in the decision-making process.

One of the main challenges that ASEAN faces is how to balance the principles of unity and diversity among its member states. ASEAN has adopted the motto "One Vision, One Identity, One Community" to express its aspiration to become a more integrated and cohesive regional entity. However, this does not mean that ASEAN should ignore or suppress the differences and pluralism that exist within and among its member states. On the contrary, ASEAN should respect and celebrate the diversity of its people and cultures, while also fostering a sense of common identity and solidarity based on shared values and interests. This is where nomocracy can play a role in providing a framework for ASEAN to achieve both unity and diversity.

As Wibowo et al. (2023) argue, nomocracy can be seen as a form of Islamic democracy that is compatible with the values and principles of Islam, as well as with the realities and aspirations of contemporary Muslim societies. They compare and contrast the perspectives of Indonesia, Spain and Russia on nomocracy, and highlight the similarities and differences among them. They conclude that nomocracy can offer a viable option for Muslim countries to develop their

own models of governance that are based on Islamic law, but also responsive to the needs and demands of their people. Similarly, Peterson (2023) analyzes the vision of the Islamic state proposed by Fazlur Rahman, a prominent Muslim scholar who advocated for Islamic nomocracy. Peterson explains how Rahman's concept of nomocracy combines the notions of divine sovereignty, human agency, historical context and ethical rationality. He also evaluates the strengths and weaknesses of Rahman's approach, and suggests some ways to improve it.

Based on these studies, we can infer that nomocracy is not a monolithic or rigid system, but rather a flexible and dynamic one that can accommodate various interpretations and applications. Therefore, we propose that nomocracy can be adapted to suit the specific conditions and circumstances of ASEAN, taking into account its diversity and complexity. We also propose that nomocracy can be implemented through a new multistage representative election system that we call "Nomocracy for ASEAN". This system is designed to ensure that the elected representatives reflect the views and interests of different segments of society, such as religious groups, ethnic groups, women, youth, civil society organizations, etc. The system also aims to enhance the accountability and transparency of the representatives by subjecting them to periodic reviews and evaluations by their constituents.

The multistage representative election system consists of four stages: nomination, selection, election and evaluation. In the first stage, nomination, each segment of society can nominate candidates who represent their views and interests. The candidates must meet certain criteria, such as being citizens of ASEAN member states, having relevant qualifications and experience, adhering to Islamic law and values, etc. In the second stage, selection, a committee composed of experts and scholars from different fields will review the nominations and select a shortlist of candidates based on their merits and suitability. The committee will also conduct interviews with the candidates to assess their knowledge and skills. In the third stage, election, the shortlisted candidates will be presented to the public for voting. The voting process will be conducted through online platforms or mobile applications that are secure and transparent. The voters will be able to access information about the candidates' profiles, platforms and visions. The candidates who receive the most votes will be elected as representatives for their respective segments of society. In the fourth stage, evaluation, the elected representatives will be held accountable for their performance and actions by their constituents. The constituents will be able to provide feedback and ratings to their representatives through online platforms or mobile applications. The representatives who receive low ratings or negative feedback will be subject to sanctions or removal from office.

We believe that this multistage representative election system can promote nomocracy in ASEAN by ensuring that the representatives are chosen by the people, for the people and from among the people. The system can also foster a culture of participation, consultation, deliberation and accountability among all stakeholders in ASEAN. By implementing this system, we hope that ASEAN can become a model of Islamic nomocracy for other regions and countries in the world.

The main objective of this article is to propose a new model of representative democracy for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), based on the concept of nomocracy, or the rule of law. Nomocracy is a form of government that emphasizes the supremacy of the constitution and the protection of individual rights and freedoms. The article argues that nomocracy is a suitable and desirable alternative to the existing forms of democracy in ASEAN, which are often characterized by majoritarianism, populism, corruption, and human rights violations.

The article also introduces a new multistage election system that aims to enhance the quality and legitimacy of representation in ASEAN, by ensuring that the elected representatives reflect the diversity and preferences of the people, and by promoting accountability and transparency in the electoral process. The article is divided into four sections: the first section provides a brief overview of the current state of democracy in ASEAN; the second section explains the concept and principles of nomocracy; the third section presents the details and advantages of the proposed multistage election system; and the fourth section concludes with some implications and recommendations for the future of democracy in ASEAN.

The research aims to propose a new multistage representative election system for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which is based on the concept of nomocracy, or the rule of law. The research argues that the current election system in ASEAN is inadequate and ineffective, as it does not reflect the diversity and complexity of the region, nor does it ensure the accountability and legitimacy of the elected representatives. The research suggests that a nomocratic election system, which consists of four stages: nomination, primary, runoff, and general, would better serve the interests and aspirations of the ASEAN people, as well as enhance the regional integration and cooperation.

The research also examines the challenges and opportunities of implementing such a system in ASEAN, and provides some recommendations and guidelines for its adoption and adaptation.

Literature Review

Nomocracy

Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been discussed and debated by various scholars and thinkers. Nomocracy is based on the idea that the law should be general, abstract, and universal, and that it should limit the arbitrary power of the government and protect individual freedom. Nomocracy is contrasted with teleocracy, or the rule of ends, which is based on the idea that the law should be specific, concrete, and particular, and that it should serve the collective goals of the society and the state. Nomocracy and teleocracy represent two different visions of the role of law and politics in human affairs.

In this article, we will explore the possibility of nomocracy as an alternative system for the future, especially in the context of ASEAN, a regional organization of Southeast Asian countries. We will introduce a new multistage representative election system that aims to promote nomocracy in ASEAN. We will argue that this system can enhance the legitimacy, accountability, and diversity of political representation in ASEAN, while also respecting the sovereignty, autonomy, and diversity of its member states.

We elaborate on the works of several authors who have contributed to the theory and practice of nomocracy. Moroni (2012) provides a comprehensive overview of the historical and philosophical foundations of nomocracy, as well as its implications for planning and governance. He argues that nomocracy is not only a legal principle, but also a social and ethical one, that can foster a culture of civility, tolerance, and cooperation among different groups and individuals. Cheung (2014) examines the views of Hayek, one of the most influential proponents of nomocracy in the 20th century. He critically assesses Hayek's arguments for nomocracy as a superior form of social order than teleocracy, and also points out some of the limitations and challenges of Hayek's approach. HS et al. (2020) analyze the relationship between Islamic nomocracy and Pancasila democracy in Indonesia, one of the founding members of ASEAN. They show how these two concepts can be compatible and complementary, and how they can support the development of a pluralistic and democratic society in Indonesia.

Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been explored by various scholars and practitioners in different contexts and domains. In this article, we aim to introduce a new multistage representative election system based on nomocracy for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional organization that comprises 10 member states with diverse political, economic, and cultural backgrounds. We argue that nomocracy can offer a viable alternative to the current system of teleocracy, or the rule of ends, which is often driven by the interests and agendas of the elites, corporations, or external powers. We draw on the theoretical and empirical insights from Moroni (2010), Li and Liu (2022), and Wibowo et al. (2023) to illustrate how nomocracy can enhance the legitimacy, accountability, and responsiveness of the ASEAN governance structure and foster greater participation, deliberation, and cooperation among its citizens and stakeholders.

Moroni (2010) defines nomocracy as "a system of governance based on general abstract rules that are equally binding for both rulers and ruled" (p. 138). He contrasts nomocracy with teleocracy, which he describes as "a system of governance based on specific substantive ends that are hierarchically ordered and imposed by some authority" (p. 138). He argues that nomocracy is preferable to teleocracy because it respects the autonomy and diversity of individuals and communities, promotes spontaneous order and social learning, and reduces the risks of tyranny and corruption. He also suggests some practical implications of nomocracy for land-use regulation, such as the adoption of a minimal legal framework, the decentralization of decision-making power, and the encouragement of voluntary agreements and self-regulation.

Li and Liu (2022) compare two cases of participatory urban redevelopment in China: Shenzhen, a modern metropolis that exemplifies teleocracy, and Kashgar, an ancient city that preserves nomocracy. They find that Shenzhen's top-down and goal-oriented approach has resulted in rapid economic growth but also social exclusion, environmental degradation, and cultural erosion. On the other hand, Kashgar's bottom-up and rule-based approach has maintained its historical and

cultural heritage but also faced challenges of adaptation, innovation, and integration. They conclude that nomocracy versus teleocracy is not a binary choice but a continuum that requires context-specific balancing and adjustment.

Wibowo et al. (2023) explore the concept of Islamic nomocracy from the perspectives of Indonesia, Spain, and Russia. They define Islamic nomocracy as “a system of governance that upholds the principles of justice, equality, and human dignity based on the divine law (sharia) and human reason (ijtihad)” (p. 92). They examine how Islamic nomocracy has been implemented in different historical and geographical settings, highlighting its achievements and challenges in terms of political representation, social welfare, and interfaith dialogue. They also propose some recommendations for improving Islamic nomocracy in the contemporary world, such as strengthening civil society, enhancing education, and fostering dialogue.

ASEAN

One of the most important and challenging issues in the contemporary world is how to achieve a fair and effective system of governance that can accommodate the diversity and complexity of human societies. Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been proposed as a possible alternative to democracy, especially in regions where democratic institutions are weak or unstable. Nomocracy emphasizes the supremacy of law over arbitrary power, the protection of individual rights and freedoms, and the participation of citizens in the formulation and implementation of laws. In this article, we will explore the possibility of nomocracy as a viable system for the future of ASEAN, a regional organization that consists of 10 Southeast Asian countries with different political, economic, social and cultural backgrounds. We will also introduce a new multistage representative election system that aims to enhance the legitimacy and accountability of nomocratic governance in ASEAN.

To begin with, we will review the existing literature on ASEAN integration, focusing on its political and socio-cultural dimensions. Kim (2011) provides a comprehensive theoretical framework for analyzing ASEAN integration, based on three main approaches: functionalism, neo-functionalism and constructivism. He argues that ASEAN integration is driven by both rational and ideational factors, such as security, economic cooperation, identity formation and norm diffusion. Kim (2014) further develops his integration theory by applying it to the case of ASEAN, examining its historical evolution, institutional development and future prospects. He identifies four stages of ASEAN integration: association, cooperation, community and union. He also discusses the challenges and opportunities for ASEAN in achieving its vision of a political-security community, an economic community and a socio-cultural community by 2015.

The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) is one of the three pillars of ASEAN integration, along with the ASEAN Political-Security Community (APSC) and the ASEAN Economic Community (AEC). The ASCC aims to promote social development, human rights, cultural diversity, environmental sustainability and regional identity among ASEAN member states. However, the ASCC also faces many difficulties and dilemmas in realizing its goals, such as the lack of institutional capacity, political will, public awareness and civil society participation. Several scholars have assessed the progress and problems of the ASCC from various perspectives. Amador (2011) evaluates the institutional prospects of the ASCC by applying a governance approach that considers four dimensions: effectiveness, legitimacy, accountability and coherence. He finds that the ASCC has made some achievements in terms of effectiveness and coherence, but still lacks legitimacy and accountability. He suggests that the ASCC should strengthen its legal framework, enhance its monitoring and evaluation mechanisms, increase its transparency and inclusiveness, and foster its linkages with other ASEAN pillars and external partners.

Vu (2013) analyzes the case of Vietnam’s involvement in the ASCC, focusing on its prospects, challenges and opportunities. She argues that Vietnam has shown its commitment and contribution to the ASCC by implementing various policies and programs related to social welfare, human development, cultural preservation and environmental protection. However, she also points out that Vietnam faces many obstacles in fulfilling its obligations and expectations in the ASCC, such as the gap between rhetoric and reality, the lack of resources and capacity, the influence of domestic politics and interests, and the complexity of regional dynamics and diversity. She recommends that Vietnam should adopt a more proactive and strategic approach to the ASCC by enhancing its domestic reforms, improving its regional coordination and cooperation, promoting its public diplomacy and engagement with civil society organizations (CSOs), and balancing its national interests with regional values.

ASEAN Community in the Near Future

In this article, we aim to introduce a new multistage representative election system based on nomocracy for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional organization that consists of 10 member states with diverse political, economic, and cultural backgrounds. We argue that nomocracy can offer a viable alternative to the existing systems of democracy or authoritarianism in ASEAN, as it can balance the interests and rights of the people, the state, and the law. Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been explored by various scholars and thinkers in different contexts and regions.

To support our argument, we will review the literature on nomocracy from different perspectives and disciplines. Chang (2008) provides a historical overview of the development and evolution of Chinese nomocracy, from its ancient origins to its contemporary challenges. He examines the achievements and problems of Chinese nomocracy in the past 30 years, and proposes some suggestions for its future improvement. Peterson (2023) analyzes the vision of the Islamic state proposed by Fazlur Rahman, a prominent Muslim scholar and reformer. He shows how Rahman's concept of Islamic nomocracy can reconcile the traditional sources of Islamic law with modern realities and needs. Slaev (2018) applies the theory of nomocracy to the field of planning and urban development. He demonstrates how nomocracy can be a useful method of analysis and management of private, common, and mixed property rights in real-world situations.

Notes on Methodology

This article aims to propose a new multistage representative election system for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which is based on the concept of nomocracy, or the rule of law. The article adopts a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative data collection and analysis, to examine the current challenges and opportunities for enhancing democratic governance in the region. The article also draws on document analysis as a qualitative research method, to review the existing literature and official documents on ASEAN's political and legal framework, as well as the principles and practices of nomocracy. Furthermore, the article employs observation as a complex research method, to gain insights into the perspectives and experiences of various stakeholders, such as political leaders, civil society actors, and ordinary citizens, regarding the proposed election system.

According to Baker (2006), observation can be used to "describe settings, activities, people, and the meanings of what is observed from the perspective of those being observed" (p. 173). Bowen (2009) defines document analysis as "a systematic procedure for reviewing or evaluating documents—both printed and electronic (computer-based and Internet-transmitted) material" (p. 27). Borrego et al. (2009) suggest that mixed-methods research can "provide stronger evidence for a conclusion through convergence and corroboration of findings" (p. 55).

Results

Result 1

One of the most important challenges facing the ASEAN region is how to achieve a more democratic and participatory governance system that can accommodate the diversity and complexity of its member states. Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been proposed as a possible alternative to the current intergovernmental and consensus-based approach of ASEAN integration. Nomocracy emphasizes the establishment of a legal framework that can regulate the relations among different actors and institutions, and ensure the protection of human rights and the promotion of social justice. In this article, we introduce a new multistage representative election system that can facilitate the implementation of nomocracy in ASEAN. We argue that this system can enhance the legitimacy, accountability and responsiveness of the ASEAN decision-making process, as well as foster a sense of regional identity and solidarity among its citizens.

The idea of nomocracy is not new in the literature on ASEAN integration. Kim (2011, 2014) has developed a theoretical framework that analyzes the evolution of ASEAN from a security community to a legal community, and identifies the conditions and factors that can enable or constrain this transition. Kim argues that nomocracy can provide a more effective and sustainable way of addressing the common challenges and opportunities that ASEAN faces in the 21st century, such as economic development, environmental protection, human security, and regional stability. However,

Kim also acknowledges the difficulties and obstacles that nomocracy faces in ASEAN, such as the lack of political will, institutional capacity, and public support.

Result 2

One of the main challenges that nomocracy faces in ASEAN is how to create a more inclusive and representative governance system that can reflect the interests and aspirations of its diverse and heterogeneous population. The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) is one of the three pillars of ASEAN integration that aims to promote a people-centered and people-oriented ASEAN, where social development and human dignity are prioritized. However, as several studies have shown (Amador 2011; Vu 2013; Intal et al. 2015; Busapathumrong 2012; Quayle 2018; Baviera and Maramis 2017; Indrawan 2016), the ASCC has faced many challenges and limitations in achieving its goals, such as the lack of institutional coherence, political commitment, civil society participation, and public awareness.

In this article, we propose a new multistage representative election system that can address some of these challenges and enhance the prospects of nomocracy in ASEAN. The system consists of four stages: (1) national elections for representatives to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA); (2) AIPA elections for representatives to the ASEAN Summit; (3) ASEAN Summit elections for representatives to the ASEAN Commission; and (4) ASEAN Commission elections for representatives to the ASEAN Court of Justice. The system aims to create a more democratic and participatory governance structure that can balance the interests of states and citizens, as well as ensure the rule of law and human rights in ASEAN.

Result 3

Nomocracy is a form of government that respects and upholds the law as the supreme authority, and ensures that all public officials and citizens are subject to the same legal standards and procedures. The article adopts a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative data collection and analysis, to examine the current challenges and opportunities for enhancing democratic governance in the region. The article also draws on document analysis as a qualitative research method, to review the existing literature and official documents on ASEAN's political and legal framework, as well as the principles and practices of nomocracy. Furthermore, the article employs observation as a complex research method, to gain insights into the perspectives and experiences of various stakeholders, such as political leaders, civil society actors, and ordinary citizens, regarding the proposed election system.

Discussion

Discussion 1

In this paper, we aim to explore the possibility of nomocracy, a system of government based on the rule of law, as an alternative system for the future of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). We will introduce a new multistage representative election system, called "Nomocracy for ASEAN", that can potentially enhance the political integration and democratic legitimacy of ASEAN. To do so, we will review the relevant literature on ASEAN integration, especially the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), which is one of the three pillars of the ASEAN Community.

According to Kim (2011; 2014), ASEAN integration is a complex and dynamic process that involves multiple actors, levels, and dimensions. He proposes a theoretical framework that combines neofunctionalism, intergovernmentalism, and constructivism to explain the drivers and obstacles of ASEAN integration. He argues that ASEAN integration is driven by functional spillover, regional identity, and external pressure, but also constrained by sovereignty concerns, institutional weakness, and diversity. He suggests that ASEAN needs to balance between deepening and widening integration, as well as between community-building and community-sharing.

Amador (2011) assesses the institutional prospects of the ASCC, which aims to foster a sense of belonging and solidarity among the ASEAN peoples. He identifies four challenges that the ASCC faces: (1) lack of clarity and coherence in its vision and objectives; (2) lack of effective coordination and implementation mechanisms; (3) lack of participation and ownership by the stakeholders; and (4) lack of monitoring and evaluation systems. He recommends that the ASCC

should adopt a more strategic approach, strengthen its institutional capacity, enhance its stakeholder engagement, and develop its performance indicators.

Vu (2013) examines the prospects, challenges, and opportunities of Vietnam's participation in the ASCC. She argues that Vietnam has shown its commitment and contribution to the ASCC through various initiatives and programs. However, she also points out some difficulties that Vietnam faces, such as low public awareness, limited resources, weak coordination, and divergent interests. She suggests that Vietnam should improve its domestic governance, increase its regional cooperation, and promote its public diplomacy to achieve the ASCC goals.

Intal et al. (2015) propose a framework for framing the ASCC post-2015, based on a survey of experts and stakeholders. They identify four key elements that should guide the ASCC vision: (1) human development; (2) social welfare and protection; (3) social justice and rights; and (4) environmental sustainability. They also suggest some priority areas and actions for each element, as well as some cross-cutting issues and enablers.

Busapathumrong (2012) analyzes the challenges and trends towards the integration of humanities and social sciences research with the emphasis on the ASCC Blueprint in the ASEAN community. She argues that humanities and social sciences research can play a vital role in enhancing the understanding and appreciation of the diversity and commonality of ASEAN cultures and societies. She also highlights some gaps and opportunities for humanities and social sciences research in ASEAN, such as interdisciplinary collaboration, regional networking, policy relevance, and public engagement.

Quayle (2018) explores the implications of Indonesia's role in the ASCC for regional great-power management. She argues that Indonesia's leadership in promoting the ASCC reflects its aspiration to be a benign hegemon in Southeast Asia. However, she also notes that Indonesia's approach to the ASCC is contingent on its domestic politics and external relations. She cautions that Indonesia's involvement in the ASCC may not necessarily translate into effective regional governance or conflict prevention.

Baviera and Maramis (2017) provide a collection of essays that reflect on the political-security and socio-cultural aspects of building ASEAN community. They cover various topics such as regional architecture, maritime security, human rights, disaster management, education, media, arts, and sports. They emphasize the need for ASEAN to address both traditional and non-traditional security challenges, as well as to foster a people-centered and inclusive community.

Indrawan (2016) investigates the role of civil society organizations (CSOs) in conflict prevention within the framework of the ASCC. He argues that CSOs can contribute to conflict prevention by promoting dialogue, trust-building, advocacy, education, empowerment, and social cohesion. He also discusses some challenges that CSOs face in engaging with ASEAN institutions and processes. He recommends that CSOs should strengthen their capacity, network, legitimacy, and visibility to enhance their role in conflict prevention.

Discussion 2

One of the most important challenges facing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is how to achieve a deeper and more meaningful integration among its diverse member states. While the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Political-Security Community (APSC) have received much attention and progress, the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) remains less developed and less understood. The ASCC aims to promote a sense of identity, solidarity, and harmony among the peoples of ASEAN, as well as to enhance their well-being, quality of life, and human rights. However, the ASCC also faces many obstacles and dilemmas, such as the diversity of cultures, religions, and political systems, the lack of public awareness and participation, and the gap between rhetoric and reality.

One possible way to address these challenges is to explore the concept of nomocracy, which is a system of governance based on the rule of law, rather than the rule of men. Nomocracy emphasizes the importance of constitutionalism, democracy, human rights, and the separation of powers. Nomocracy also advocates for a multistage representative election system, which allows for more representation and accountability of different groups and interests in society. This article aims to introduce and examine the possibility of nomocracy as an alternative system for ASEAN integration, especially in relation to the ASCC. It will review the existing literature on ASEAN integration and nomocracy, and propose

a framework for applying nomocracy to the ASEAN context. The article will also discuss the potential benefits and challenges of nomocracy for ASEAN, as well as some policy recommendations for its implementation.

The literature on ASEAN integration can be divided into two main approaches: functionalism and constructivism. Functionalism argues that integration is driven by economic interests and cooperation among states, while constructivism emphasizes the role of norms, values, and identities in shaping integration. Kim (2011) provides a comprehensive overview of these two approaches and their implications for ASEAN. He argues that functionalism is more suitable for explaining the AEC and the APSC, while constructivism is more relevant for understanding the ASCC. He also suggests that ASEAN needs to balance these two approaches and adopt a hybrid model of integration that combines rationality and normativity.

Kim (2014) further develops his hybrid model of integration by applying it to the three pillars of ASEAN. He identifies four dimensions of integration: scope, level, speed, and mode. He then analyzes how these dimensions vary across the AEC, the APSC, and the ASCC. He finds that the AEC has a wide scope, a high level, a fast speed, and a supranational mode of integration; the APSC has a narrow scope, a low level, a slow speed, and an intergovernmental mode of integration; and the ASCC has a medium scope, a medium level, a medium speed, and a transnational mode of integration. He concludes that ASEAN needs to harmonize these different dimensions and modes of integration in order to achieve coherence and consistency.

Discussion 3

Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been explored by various scholars and thinkers in different contexts and regions. In this article, we aim to introduce a new multistage representative election system based on nomocracy for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional organization that consists of 10 member states with diverse political, economic, and cultural backgrounds. We argue that nomocracy can offer a viable alternative to the existing systems of democracy or authoritarianism in ASEAN, as it can balance the interests and rights of the people, the state, and the law.

To support our argument, we review the literature on nomocracy from different perspectives and disciplines. Chang (2008) provides a historical overview of the development and evolution of Chinese nomocracy, from its ancient origins to its contemporary challenges. He examines the achievements and problems of Chinese nomocracy in the past 30 years, and proposes some suggestions for its future improvement. Peterson (2023) analyzes the vision of the Islamic state proposed by Fazlur Rahman, a prominent Muslim scholar and reformer. He shows how Rahman's concept of Islamic nomocracy can reconcile the traditional sources of Islamic law with modern realities and needs. Slaev (2018) applies the theory of nomocracy to the field of planning and urban development. He demonstrates how nomocracy can be a useful method of analysis and management of private, common, and mixed property rights in real-world situations.

We also compare and contrast nomocracy with democracy and authoritarianism, two dominant political systems in ASEAN and beyond. We will highlight the advantages and disadvantages of each system, and explain how nomocracy can overcome some of the limitations and challenges that they face. We will illustrate our points with examples from ASEAN countries and other regions that have adopted or experimented with nomocracy in various forms and degrees.

Concluding Remarks

In this paper, we aim to explore the possibility of nomocracy, a system of government based on the rule of law, as an alternative system for the future of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). We will introduce a new multistage representative election system, called "Nomocracy for ASEAN", that can potentially enhance the political integration and democratic legitimacy of ASEAN. To do so, we will review the relevant literature on ASEAN integration, especially the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), which is one of the three pillars of the ASEAN Community.

Nomocracy is a concept that derives from the Greek words *nomos* (law) and *kratos* (power). It refers to a system of government where the authority and legitimacy of the rulers are derived from the law, rather than from personal charisma, tradition, or divine right. In a nomocratic system, the law is supreme and applies equally to everyone, including the rulers. The law is also transparent and predictable, and can be changed only through a democratic process. Nomocracy is often contrasted with tyranny, where the rulers are above the law and can act arbitrarily.

Nomocracy for ASEAN is a proposal for a new multistage representative election system that aims to create a more integrated and democratic ASEAN. The main idea is to elect representatives from each ASEAN member state to form a regional parliament, which would then elect an executive council and a president. The regional parliament would have legislative powers over common policies and issues that affect ASEAN as a whole, such as trade, security, human rights, and environment. The executive council would have executive powers to implement and coordinate these policies and issues. The president would have symbolic and diplomatic powers to represent ASEAN in the international arena.

The proposed election system would consist of four stages: (1) direct election of national representatives by the citizens of each member state; (2) indirect election of regional representatives by the national representatives; (3) indirect election of executive council members by the regional representatives; and (4) indirect election of president by the executive council members. The election system would ensure that each member state has equal representation in the regional parliament, while also taking into account the population size and diversity of each member state. The election system would also ensure that the regional parliament, the executive council, and the president are accountable to each other and to the citizens of ASEAN.

We have reviewed the relevant literature on ASEAN integration, especially the ASCC, to provide the background and rationale for our proposal. We will also compare and contrast our proposal with other existing or proposed models of regional integration, such as the European Union, the African Union, and the East Asian Community. We will discuss the advantages and disadvantages of our proposal, as well as the challenges and opportunities for its implementation.

Nomocracy, or the rule of law, is a concept that has been explored by various scholars and thinkers in the context of Islamic political thought. Nomocracy implies that the law is derived from a divine source and that it is applied equally and fairly to all members of society. Nomocracy also entails that the law is not subject to the whims and interests of human rulers, but rather reflects the will and guidance of God. In this article, we will examine the possibility of nomocracy as an alternative system for the future of ASEAN, a regional organization that consists of 10 Southeast Asian countries with diverse cultures, religions and political systems. We will also introduce a new multistage representative election system that aims to promote nomocracy in ASEAN by ensuring the participation and representation of various segments of society in the decision-making process.

One of the main challenges that ASEAN faces is how to balance the principles of unity and diversity among its member states. ASEAN has adopted the motto "One Vision, One Identity, One Community" to express its aspiration to become a more integrated and cohesive regional entity. However, this does not mean that ASEAN should ignore or suppress the differences and pluralism that exist within and among its member states. On the contrary, ASEAN should respect and celebrate the diversity of its people and cultures, while also fostering a sense of common identity and solidarity based on shared values and interests. This is where nomocracy can play a role in providing a framework for ASEAN to achieve both unity and diversity.

As Wibowo et al. (2023) argue, nomocracy can be seen as a form of Islamic democracy that is compatible with the values and principles of Islam, as well as with the realities and aspirations of contemporary Muslim societies. They compare and contrast the perspectives of Indonesia, Spain and Russia on nomocracy, and highlight the similarities and differences among them. They conclude that nomocracy can offer a viable option for Muslim countries to develop their own models of governance that are based on Islamic law, but also responsive to the needs and demands of their people. Similarly, Peterson (2023) analyzes the vision of the Islamic state proposed by Fazlur Rahman, a prominent Muslim scholar who advocated for Islamic nomocracy. Peterson explains how Rahman's concept of nomocracy combines the notions of divine sovereignty, human agency, historical context and ethical rationality. He also evaluates the strengths and weaknesses of Rahman's approach, and suggests some ways to improve it.

Based on these studies, we can infer that nomocracy is not a monolithic or rigid system, but rather a flexible and dynamic one that can accommodate various interpretations and applications. Therefore, we propose that nomocracy can be adapted to suit the specific conditions and circumstances of ASEAN, taking into account its diversity and complexity. We also propose that nomocracy can be implemented through a new multistage representative election system that we call "Nomocracy for ASEAN". This system is designed to ensure that the elected representatives reflect the views and interests of different segments of society, such as religious groups, ethnic groups, women, youth, civil society organizations, etc. The system also aims to enhance the accountability and transparency of the representatives by subjecting them

to periodic reviews and evaluations by their constituents. In the following sections, we will explain in detail how this system works and why it can benefit ASEAN in terms of promoting nomocracy.*

References

- Amador, Julio S. "ASEAN Socio-Cultural Community: An assessment of its institutional prospects." Available at SSRN 1803830 (2011).
- Baviera, Aileen, and Larry Maramis. *Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2017.
- Busapathumrong, Pattamaporn. "Challenges and trends towards the integration of humanities and social sciences research with the emphasis on ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint in the ASEAN community." *Research on Humanities and Social Sciences* 2.5 (2012): 10-19.
- Chang, Ji-wen. "History, status quo and future of Chinese nomocracy: Comments on Chinese nomocracy in recent 30 years." *US-China Law Review* 5 (2008): 1.
- Cheung, Chor Y. "Hayek on Nomocracy and Teleocracy: A Critical Assessment." *Cosmos+ Taxis* 1.2 (2014): 24-33.
- HS, Dedi Eko Riyadi, et al. "Analysis Study of Islamic Nomocracy and Pancasila Democracy in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7.10 (2020): 745-753.
- Indrawan, Jerry. "ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in Conflict Prevention: The Role of Civil Society Organizations (CSOs)." *Journal of ASEAN Studies* 4.2 (2016): 142-155.
- Intal Jr, Ponciano, et al. "Framing the ASEAN Socio-Cultural Community Post-2015." *Books* (2015).
- Kim, Min-hyung. "Integration theory and ASEAN integration." *Pacific Focus* 29.3 (2014): 374-394.
- Kim, Min-hyung. "Theorizing ASEAN integration." *Asian Perspective* 35.3 (2011): 407-435.
- Li, Xiang, and Tianyang Liu. "Nomocracy versus teleocracy: Comparing participatory urban redevelopment in Shenzhen and Kashgar." *Journal of Urban Affairs* (2022): 1-21.
- Moroni, Stefano. "Rethinking the theory and practice of land-use regulation: Towards nomocracy." *Planning Theory* 9.2 (2010): 137-155.
- Moroni, Stefano. "Why nomocracy." *Progress in Planning* 77.2 (2012): 46-59.
- Peterson, Ben. "Visions of the Islamic State: Fazlur Rahman and Islamic Nomocracy." *Islamic Studies* 62.2 (2023): 161.
- Quayle, Linda. "Indonesia, the ASEAN socio-cultural community, and the contingent profile of regional 'great-power management.'" *The Pacific Review* 31.2 (2018): 131-150.
- Slaev, Aleksandar D. "The theory of nomocracy as a useful method of analysis and managing private, common, as well as mixed real-world property rights." *Planning Theory* 17.2 (2018): 301-304.
- Vu, Hoa Thi Hai. "Vietnam and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC): Prospects, Challenges and Opportunities." (2013).
- Wibowo, Sugeng, et al. "Islamic nomocracy: from the perspectives of Indonesia, Spain and Russia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.1 (2023): 91-111.

AL CHAIDAR ABDURRAHMAN PUTEH was born in Lhokseumawe, Aceh, on 22 November 1969. His research mainly on terrorism, fundamentalism and radicalism of Islam in Southeast Asia. Graduated from Department of Anthropology from University of Indonesia in 1996 and now a doctorate at the same department. He has written books on Aceh, *Darul Islam and terrorism in Indonesia: Aceh Bersimbah Darah* (1998); *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia* (1999); *Wacana Negara Islam dalam Gerakan-Gerakan Pembentukan Negara di Asia Tenggara, Studi Tentang Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (2001); *Islamism and Fundamentalism* (2016); *From Shariatism to Terrorism* (with Herdi Sahrasad and Blake Respini, 2017); *Satu Guru, Tiga Ideologi* (with Herdi Sahrasad, 2017). He also wrote articles on radicalism and terrorism issues published on several journals.

Terobosan ASEAN

Menuju Kesejahteraan Bersama

Rizki Muhammad Ramdhan

ASEAN adalah rumah bagi lebih dari 670 juta orang dan terkenal dengan keindahan alam, kekayaan sumber daya alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan. Kawasan dengan sebelas negara ini memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan geografi yang luar biasa dan memainkan peran utama dalam mendorong kerja sama regional, perdamaian, dan pembangunan ekonomi. Tentu sebagaimana tujuan awal dibentuk, ASEAN berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, serta mempromosikan kerja sama yang erat antara negara-negara anggotanya.

ASEAN telah menjadi pionir dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama di Kawasan Asia Tenggara dan memainkan peran kunci dalam mengatasi berbagai tantangan dan mengejar peluang di kawasan yang penuh potensi ini. Beberapa peran utama ASEAN yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut:

Pertama, ASEAN telah berperan dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, prinsip-prinsip ASEAN seperti “konsultasi dan kesepakatan” telah menjadi landasan bagi penyelesaian konflik dan penghindaran pertikaian di antara negara-negara anggota.

Kedua, kerja sama ekonomi melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN telah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang besar. Hal ini telah membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di antara negara-negara anggota.

Ketiga, pemberdayaan sosial dan pembangunan, ASEAN telah mendorong program-program untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Hal ini mencakup upaya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ASEAN terlibat dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, mengakui pentingnya pelestarian alam demi kesejahteraan bersama.

Kelima, diplomasi dan hubungan internasional, ASEAN telah menjadi wadah penting bagi dialog politik dan kerja sama regional, memfasilitasi hubungan dengan mitra regional dan internasional, membantu mencapai tujuan bersama yang lebih besar. ASEAN terus beradaptasi dengan perkembangan global dan regional untuk memastikan bahwa peran dan relevansinya tetap terjaga. Dalam konteks kawasan yang terus berubah, ASEAN adalah pilar penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama di Asia Tenggara.

ASEAN telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif yang berfokus pada kesejahteraan bersama dalam upaya untuk mempromosikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di Asia Tenggara seperti *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)* yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk di kawasan ini melalui upaya dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan lingkungan sosial.

Inisiatif seperti *ASEAN Plus Three University Network* mendukung pertukaran pendidikan tinggi di antara negara-negara anggota. Selain itu, *ASCC* memandang pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari pembangunan sosial. Selanjutnya *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)*, yang mendorong pengembangan energi bersih, efisien, dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan energi yang andal bagi Masyarakat, serta berusaha mengurangi dampak negatif lingkungan dari penggunaan energi dan perubahan iklim.

Berbagai inisiatif dan kebijakan tersebut mencerminkan komitmen ASEAN dalam mencapai kesejahteraan bersama di Asia Tenggara. Melalui kerja sama dan koordinasi, ASEAN berupaya untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan makmur, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan sosial tersebar secara merata di seluruh populasi.

Beberapa negara di ASEAN telah mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka melalui berbagai upaya pembangunan ekonomi dan sosial. Singapura telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pro-investasi dan pembangunan infrastruktur yang canggih, investasi dalam pendidikan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, penekanan pada inovasi dan penelitian dan pengembangan, serta kebijakan perumahan yang sukses untuk memberikan rumah bagi penduduknya.

Malaysia pun telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pengurangan kemiskinan yang berarti. Diantara faktor keberhasilannya adalah program pembangunan ekonomi yang berfokus pada sektor manufaktur dan teknologi, kebijakan inklusi sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan, investasi dalam pendidikan tinggi dan pelatihan pekerja, serta diversifikasi ekonomi melalui sektor ekonomi yang berbeda.

Vietnam pun tidak ketinggalan, mereka telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan ini mencakup reformasi ekonomi yang memungkinkan sektor swasta berkembang, peningkatan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan dasar, investasi asing langsung yang signifikan dalam sektor manufaktur dan ekspor, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.

Selanjutnya, Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan akses ke layanan sosial. Keberhasilan ini mencakup reformasi kebijakan ekonomi dan upaya pengendalian inflasi, peningkatan akses ke pendidikan dasar dan tingkat pengurangan buta aksara, investasi dalam infrastruktur transportasi dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Tak ketinggalan dengan Thailand yang telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi melalui investasi dalam sektor pariwisata, manufaktur, dan layanan. Keberhasilan ini mencakup peningkatan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengembangan sektor pariwisata yang menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja, program perlindungan sosial yang mendukung masyarakat miskin, serta investasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Tingkat keberhasilan ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, investasi dalam manusia, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, pencapaian ini menjadi kompas bagi negara-negara lain dalam mencapai kesejahteraan bersama.*

RIZKI MUHAMMAD RAMDHAN adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura, Ambon. Sebelum menjadi dosen, selama 7 tahun ia bertugas sebagai Tim Staf Ahli Mendikbud bidang Pembangunan Karakter dan Tim Staf Ahli Mendikbud bidang regulasi. Selain mengajar, ia juga sebagai penulis beberapa buku, editor buku dan jurnal ilmiah, juga sering menulis berbagai artikel di beberapa media cetak. Saat ini ia aktif di Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia (AP3SI). Rizki dapat dihubungi melalui e-mail rimura1924@gmail.com atau akun Instagram [@rizkimuhammadramdhan](https://www.instagram.com/rizkimuhammadramdhan).

Penanggulangan Terorisme di Indonesia dan Dampaknya di Level ASEAN

Rakyan Adibrata

Pada 20-23 Agustus 2023 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus koordinator pertemuan AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) ke-17 di Labuhan Bajo, NTT. Pertemuan tersebut membahas 10 isu prioritas kejahatan transnasional yaitu terorisme, *cyber crime*, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁸

Khusus penanganan terorisme Indonesia, telah banyak program dilaksanakan, mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya dari hulu, sosialisasi terhadap wawasan kebangsaan yang sering dilakukan oleh BNPT dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian program Moderasi Beragama yang dijadikan program utama Kementerian Agama dalam melakukan pencegahan pemahaman radikal. Hingga terbitnya perpres No 7 tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme).

Pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan BNPT adalah penguatan kapasitas aparaturnegara. Perubahan tren bahwa pelaku terorisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau kelompok radikal dengan jenis kelamin pria. Tetapi juga menyasar ASN (aparatur sipil negara), perempuan dan anak. Di kelompok perempuan muncul "narasi" bahwa perempuan bisa terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Narasi yang lain adalah faktor "ketaatan" kepada suami. Misalnya dalam kasus Dita Oerpianto bersama istri dan keempat anaknya melakukan bom bunuh diri di gereja di Surabaya.⁹ Keterlibatan perempuan yang lain adalah Lukman dan istrinya melakukan bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar (2021). Sebelumnya, pada 2019 terjadi aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Rullie Rian Zeke dan Ulfa Handayani Saleh. WNI tersebut terafiliasi dengan ISIS dan melakukan bom bunuh diri di gereja Katolik Jolo.

Dinamika keterlibatan perempuan dan anak dalam aksi terorisme menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Misalnya ada sekitar 400 WNI yang terdiri dari perempuan dan anak yang masih berada di kamp pengungsian Al- roj dan Al Hol di Suriah.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pernah menangkap seorang terduga teroris di kawasan Bekasi bernama Dananjaya Erbening alias DE alias Ibnu Mardi yang bekerja sebagai karyawan KAI (Kereta Api Indonesia). DE bergabung dengan jaringan ISIS. DE juga memiliki 17 pujuk senjata. Dia aktif melakukan propaganda di media sosial seperti telegram dengan nama akun BEL4J4R PEDUL1 MUH4J1R. Lewat media social DE melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan APM oleh YUSHA.¹⁰

Keterlibatan ASN dalam jaringan terorisme tidak hanya terjadi dengan DE. Misalnya pegawai dinas pertanian Kabupaten Tangerang Selatan atas Tobiiin. Pada 2022 di Lampung, Densus 88 pernah menangkap ASN yang berprofesi sebagai guru. ASN tersebut mengajar di sebuah sekolah dasar di Sampang madura yang bergabung dengan jaringan Jama'ah Islamiyah.

8 <https://news.republika.co.id/berita/rzq6s1463/kapolri-pimpin-pertemuan-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ke17>

9 <https://tirtoid.com/keluarga-dita-oeprianto-potret-bomber-surabaya-di-mata-tetangga-cKrD>

10 <https://www.rbg.id/nasional/9449833037/profil-dananjaya-erbening-karyawan-bumn-pt-kai-terduga-teroris-di-bekasi-berencana-serang-pemilu-2024>

Deradikalisasi, Rehabilitasi dan Reintegrasi

Menurut Boy Rafli Amar, mantan kepala BNPT,¹¹ per Januari 2022 jumlah narapidana terorisme sekitar 1.031 orang: sekitar 575 berada di Rutan, sedangkan 456 berada di LP.¹² Jumlah yang masih sangat tinggi, selain jumlah narapidana teroris yang terafiliasi dengan ISIS. Densus 88 juga sangat aktif melakukan penindakan bagi mereka yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah.

Dalam konteks RAN PE ditingkat daerah (RAD) mengacu Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia No. 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu dan penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tidak hanya perlindungan secara hukum (UU) tetapi penanganan atau pembinaan juga relatif baru. Maka, lembaga terkait tidak secara spesifik mempunyai aturan main berbentuk SOP misalnya. Pada tataran pembinaan (reintegrasi) yang dilakukan di level daerah secara umum masih mengacu pada UU pekerja migran. Selama ini pembinaan di daerah ditangani oleh dinas sosial dan secara nasional dilakukan oleh kementerian sosial.

Dalam konteks RAN-PE, Provinsi Jawa Tengah, misalnya membentuk kelompok kerja (Pokja) Tim Terpadu Deradikalisasi sebagai bentuk pengejawantahan terhadap Peraturan Presiden No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tidak hanya *stakeholder* yang terlibat, tetapi juga CSO ikut terlibat dalam RAD tersebut, acuan lain tentu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri No. 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu dan penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹³

Ancaman Terorisme mengalami penurunan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia menyatakan indeks serangan terorisme di Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 56 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹⁴

Ancaman yang sifatnya fisik masih akan dilakukan oleh kelompok JAD, Hal ini terungkap setelah Densus 88 menangkap karyawan BUMN Dananjaya Erbening dimana DE akan melakukan *amaliyah* (aksi teror) menjelang pemilu tahun 2024. Seperti halnya ancaman terorisme yang terjadi menjelang pilpres tahun 2019. Pelakunya adalah kelompok JAD. Ancaman lain datang dari Jama'ah Islamiyah. Ancamannya berbentuk "narasi-narasi" yang bermuatan politik identitas.

Walaupun tidak ada instruksi resmi dari Jama'ah Islamiyah karena ketiadaan amir Ji, tetapi pesan-pesan dengan berbentuk narasi akan muncul dari tokoh-tokoh yang mempunyai afiliasi dengan Jama'ah Islamiyah. Ancaman Ji dan JAD berbeda bentuk, akan tetapi sama dalam membawa narasi seputar isu-isu agama. *

RAKYAN ADIBRATA saat ini menjabat sebagai *Country Director* pada *International Association for Counterterrorism and Security Professional* (IACSP) Indonesia dan aktif sebagai Wakil Sekretaris di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI Pusat.

11 Boy Rafli resmi digantikan Rycko Amelza Dahniel pada 23 April 2023.

12 <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bnpt-total-tahanan-dan-napi-terorisme-sebanyak-1-031-orang/>

13 Timdu sebagai mandat dari SE (surat edaran) Kemendagri mengerjakan pada program Deradikalisasi. Sedangkan RAD-PE sebagai mandat dari Peraturan Presiden No 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengerjakan pilar 1 RAN PE meliputi pencegahan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Termasuk di dalamnya penanganan deportan dan returnis. Tidak hanya mereka (masyarakat) yang terindikasi radikal atau yang pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme (mantan narapidana terorisme). Dalam konteks RAN-PE tidak semua daerah membuat tim khusus atau program terkait pencegahan, kontra radikalisme dan deradikalisasi. Karena masih-masing daerah mempunyai karakter masing-masing. Misalnya potensi radikalisme yang rendah. Wilayah yang secara kultur mempunyai potensi radikalisme tinggi sosialisasi terhadap RAN PE sangat urgent. Seperti yang dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo. Dimana difasilitasi oleh Timdu Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri Timdu pencegahan konflik social melebur pelaksanaannya dalam program RAD-PE Jawa Tengah di bawah Kesbangpol Jawa Tengah.

14 <https://news.republika.co.id/berita/ruuiw9377/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen>

Peran Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Vanda Sakina Damayanti

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Kutipan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama di atas terasa menjadi sangat bermakna bagi kami rakyat biasa yang pernah mengalami langsung situasi terjebak perang di negeri orang. Suatu hal yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi di kehidupan kami pada Februari 2022 silam, bahkan di era modern abad ke-21. Kemerdekaan, kebebasan, dan keselamatan menjadi hal yang mahal saat kami berusaha menyelamatkan diri dari kisruh invasi negara yang sedang kami tinggali.

Sebagai bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita patut bersyukur dapat menikmati kondisi aman dan nyaman karena masih terjaganya kita dari kemungkinan terciptanya konflik besar dalam negeri atau antar negara lain. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari usaha bangsa dan negara kita sendiri untuk menerapkan dengan sadar menjaga prinsip-prinsip mengutamakan perdamaian yang selalu dikedepankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Budaya musyawarah dan tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat kita pun turut berperan serta dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat yang tentunya pada akhirnya akan berdampak pada kestabilan negara kita.

Melihat konflik geopolitik dunia yang akhir-akhir ini semakin memanas dan khususnya bagi saya sebagai saksi dan korban perang di Ukraina. Menurut saya, perdamaian dunia kini adalah hal yang paling krusial dan penting untuk kita jaga bersama. Bagaimanapun sikap dan kesadaran masing-masing individu untuk tetap menjaga perdamaian dunia sangat berpengaruh dan penting untuk mengurangi krisis kemanusiaan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia di dunia semakin meluas. Tak kalah penting adalah sosialisasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kestabilan suatu bangsa dan negara perlu lebih ditingkatkan di masyarakat agar bangsa tidak mudah dipecah belah oleh hal-hal sensitif suatu hari nanti.

Pelajaran yang saya petik dari melihat bagaimana suatu konflik peperangan akibat perpecahan perbedaan sudut pandang dalam berpikir dan kurang adanya kesadaran akan suatu komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dunia dari negara yang merasa lebih besar dan berkuasa dibanding yang lain mampu membuat luluh lantah dan memporak-porandakan suatu negara. Peperangan hanya akan membuat kehancuran sedemikian masifnya, serta hanya membuat kesengsaraan dan kenestapaan pada korban-korban sipil yang terdampak. Tidak ada yang diuntungkan dalam konflik peperangan antar negara bahkan peperangan antar sesama dalam negeri suatu bangsa. Selalunya adalah rakyat sipil yang tidak mengerti apapun yang menjadi korban dan menjadi yang paling terdampak.

Indonesia adalah contoh negara yang berhasil dan mampu berjuang menyatukan perbedaan dan menjaga perdamaian dalam negeri sejak awal kemerdekaan. Begitu pula dalam membantu mengatasi perpecahan dan menjaga perdamaian dalam konflik dunia, Indonesia tidak pernah absen menyuarakan dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam hal ini bisa kita lihat sangat aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB, serta aktif berkontribusi dalam rapat Resolusi PBB. Dalam konteks internasional, partisipasi dalam MPP tersebut merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Sedangkan dalam konteks nasional keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan operasi internasional.

Keberhasilan Indonesia sebagai negara yang mampu membawa citra baik sebagai salah satu negara yang berperan aktif dan berkontribusi menjaga perdamaian dunia tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip yang dianut bangsa dan

negara kita sejak lama. Prinsip-prinsip yang tercipta sebagai salah satu perwujudan hasil dari bentuk komitmen yang selalu kita junjung dan ikuti tentunya adalah ideologi dan prinsip dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kita miliki. Berdasarkan prinsip itulah yang sebenarnya menjadikan fondasi suatu negara menjadi kuat dan justru akan menginspirasi bangsa dan negara lain untuk sadar serta mampu bersama-sama menjaga perdamaian dunia saat ini dan di masa depan. Indonesia telah membuktikan kematangan akan kesadarannya untuk berkontribusi dengan aksinya atas pentingnya perdamaian dunia menjadi lebih terjaga.

Selain Indonesia berperan aktif menyuarakan perdamaian lewat MPP PBB, Indonesia juga tergabung dalam ASEAN. ASEAN merupakan perserikatan atau organisasi antarbangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Dimana anggota ASEAN yang tergabung itu adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, dan Indonesia.

Dalam perserikatan dan organisasi ASEAN ini, Indonesia justru merupakan negara yang berperan sangat penting di dalamnya, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya ASEAN. Dan oleh karena itu juga Indonesia justru mempunyai tempat dan peranan penting dalam menjaga perdamaian antarbangsa dan negara di wilayah Asia Tenggara. Salah satu perwujudan dan keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian saat ini adalah saat membantu konflik di Kamboja dan Vietnam. Dalam konflik tersebut Indonesia memang ditunjuk sebagai pihak penengah konflik antar kedua negara tersebut.

Ada pula kasus-kasus lain yang telah diselesaikan yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation (MNFL) berkonflik. Pada akhirnya kedua belah pihak berhasil menyetujui perjanjian damai yang saat itu keduanya dipertemukan di Indonesia. Tentu masih banyak lagi kontribusi Indonesia dalam ASEAN yang telah terwujud. Terkini, KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 yang diselenggarakan tahun 2023 sukses diadakan di Indonesia. Acara tersebut tahun ini diselenggarakan pertama kali di Labuan Bajo, NTT bulan Mei dan Jakarta pada September lalu. Ada beberapa hal yang dibahas dan telah disepakati para anggota ASEAN yang hadir seperti keberlanjutan program yang telah dicapai, bagaimana menghadapi tantangan zaman, pertumbuhan ekonomi hingga menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang aman dan sejahtera.

Pada bahasan poin yang terakhir di atas, poin tersebut bertujuan menjadikan kawasan Indo Pasifik sebagai kawasan yang aman dan sejahtera tentunya berkaitan untuk menjaga kestabilan kawasan dari konflik geopolitik yang saat ini semakin panas di belahan dunia lain. ASEAN sadar bahwa kini dunia khususnya wilayah Asia Tenggara harus semakin mampu memperlambat hubungan antar sesama negara yang tergabung dalam segi ekonomi, pertahanan, teknologi, sosial budaya dan masih banyak lagi. Hal ini penting menjadi perhatian khusus agar semakin terciptanya perdamaian antarbangsa dan negara yang lebih erat, kuat dan kompak. Jangan sampai kondisi konflik geopolitik dunia yang kini terjadi di Ukraina, Timur Tengah hingga Afrika, berdampak buruk pada kawasan Asia Tenggara.

Harapan kita semua sebagai warga negara Indonesia adalah bahwa kestabilan negara kita terutama wilayah Asia Tenggara akan tetap terjaga selalu, guna membantu mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini bisa dilakukan dengan posisi Indonesia yang berperan dalam berbagai organisasi Internasional dengan selalu berusaha menempatkan diri dalam posisi diplomasi strategis agar tetap dapat menyuarakan dan berkontribusi langsung menjaga kestabilan dan perdamaian dunia saat ini hingga di masa depan. Pencapaian tersebut pula yang nantinya akan terus mampu mengedukasi rakyat Indonesia bahkan rakyat dari negara-negara anggota ASEAN lain dengan sendirinya. Rakyat pun nantinya menjadi semakin sadar akan pentingnya mengaplikasikan prinsip-prinsip perdamaian yang digagas dan diusahakan masing-masing negara anggota untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa juga untuk selalu dilakukan berdampingan dengan tetap mengikuti perkembangan zaman saat ini hingga bisa berjalan selaras dan selalu melahirkan solusi dalam setiap masalah yang ada.*

VANDA SAKINA DAMAYANTI lahir di Jakarta, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum pada tahun 2008. Kemudian tinggal dan menetap di luar Indonesia, tepatnya di Malaysia dan Ukraina (2010-2022). Ketika perang Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022, Vanda beserta keluarga dan 80+ WNI lainnya ikut dalam proses evakuasi untuk kembali ke tanah air. Sampai dengan hari ini, Vanda dan keluarga menetap di Jakarta dan aktif menyuarakan perdamaian khususnya dalam konflik invasi Rusia-Ukraina.

BAB 2

***Built for Trust, Not for Conflict:* Praktik Baik Resolusi Konflik Regional ASEAN**

Faktor Islam dalam Diplomasi Indonesia terhadap Konflik dan Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar

Achmad Ubaedillah

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat aktif penyelesaian konflik Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Dalam catatan historis Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang kerap terlibat konflik horizontal dengan etnis Rakhine yang beragama Buddha. Selain itu, etnis Rohingya juga telah lama memperoleh perlakuan dan kebijakan diskriminatif dari junta militer Myanmar. Salah satu pemicu terjadinya konflik tersebut ialah pengesahan dan pemberlakuan Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Kompleksitas faktor pemicu konflik telah menjadikan persoalan Rohingya menjadi berlarut-larut dan berevolusi menjadi krisis kemanusiaan. Pada masa kontemporer, konflik Rohingya kembali berkejolak pada kisaran tahun 2012-2017. Konflik dalam kurun waktu tersebut banyak dipicu oleh isu sensitif lokal, perlawanan *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA), gerakan politik nasionalis Buddha dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat telah terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya sejak tahun 2014. Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir memberikan dan meresmikan bantuan 4 unit Rumah Sakit di Rakhine State, Myanmar sebagai wujud dukungan konkret pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap etnis minoritas muslim Rohingya.

Pada tahun 2015, dalam rangka menyikapi kedatangan arus pengungsi Rohingya di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dari tiga negara tersebut di Putra Jaya, Malaysia guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dari kesepakatan yang dihasilkan, Indonesia menyatakan kesediannya untuk menampung pengungsi Rohingya di wilayah Aceh selama 1 tahun dibawah supervisi serta pengawasan *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Sedangkan, pada tahun berikutnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyerahkan 10 kontainer bantuan kemanusiaan untuk di salurkan kepada warga Rohingya di Sitwee dan Rakhine, Myanmar. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan 34 ton beras yang dikirim dengan menggunakan 4 pesawat Hercules TNI AU dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma menuju pemukiman Rohingya di Myanmar.

Dari sisi domestik, masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan penganut Islam juga melakukan berbagai seruan dan aksi dalam mendukung penyelesaian konflik Rohingya. Pada November 2016, aksi yang diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Rohingya (SOLIDER) meminta Presiden Joko Widodo untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya. Demonstrasi bertajuk "*Aksi Bela Rohingya*" juga dilakukan oleh 5000 orang di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Massa melakukan pembakaran bendera Myanmar, menuntut pemerintah untuk mengusir Dubes Myanmar dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar karena dianggap telah melakukan pembantaian terhadap etnis minoritas muslim Rohingya.

Sementara itu, seruan bernada kecaman juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut sepakat meminta pemerintah Indonesia, Myanmar, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera menghentikan konflik yang telah menyebabkan etnis minoritas muslim Rohingya menderita. Isu Rohingya telah menyentuh emosi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada pemerintah agar turut aktif membantu sesama muslim. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi Myanmar untuk melaksanakan *interfaith dialogue* sebagai bagian dari upaya

saling belajar dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang toleran, kohesif dan damai. *The 1st Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue (IMID)* yang mengusung tema “*The Role of Leaders in Promoting Tolerance, Mutual Understanding and Harmony in Social Development*” yang dihelat oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan *Institute for Peace and Democracy* dan beberapa instansi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

Seiring eskalasi dan reaksi atas konflik yang terus meningkat pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan upaya diplomasi ke Myanmar guna menemui Konsuler Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Indonesia dan menawarkan formula 4+1 sebagai solusi atas penyelesaian konflik Rohingya. Formula 4+1 terdiri dari; pengembalian stabilitas dan keamanan; upaya menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan tindak kekerasan; perlindungan terhadap semua orang tanpa memandang suku dan agama; pembukaan akses terhadap bantuan kemanusiaan; dan pelaksanaan amanat Komisi Penasehat untuk Rakhine State dibawah pimpinan Koffi Annan.

Untuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Konsuler Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan mewujudkan upaya pemberian bantuan kemanusiaan yang lebih terkoordinasi, pemerintah Indonesia memfasilitasi pembentukan *International Humanitarian Assistance (IHA)* atau Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang melibatkan 11 ormas Islam dan organisasi filantropi berbasis Islam seperti Lembaga Penanggulangan dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*, Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat Human Initiative (PKPU Human Initiative), Rumah Zakat, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Wahdah, Daarut Tauhid, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (LAZIS DDII), Lembaga Amil Zakat Bersaka Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LAZNAS LMI) dan *Social Trust Fund (STF)* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 2018, disela-sela kunjungan kerjanya ke kawasan Asia Selatan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan diri untuk mengunjungi pengungsian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya bahkan menggunakan terminologi “saudara muslim” untuk menyebut para pengungsi Rohingya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menampilkan wajah Indonesia sebagai negara *middle power* dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap permasalahan yang terjadi di dunia Islam.

Indonesia juga aktif memberikan dukungan diplomasi terhadap konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya melalui OKI. Pada tahun 2015, Indonesia berhasil menggalang dana US\$ 50 juta dari negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI, dana tersebut kemudian digunakan untuk bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Selanjutnya, pada tahun 2017, dalam pertemuan tingkat Menteri OKI, Indonesia meminta negara-negara OKI untuk memperhatikan nasib etnis minoritas muslim Rohingya dan mendukung penyelesaian konflik menggunakan pendekatan konstruktif (*constructive engagement*). Pada tahun 2018, Indonesia membawa isu Rohingya ke dalam Konferensi Tingkat Tinggi (OKI) OKI ke-45 yang menghasilkan Resolusi Nomor 59/4-POL *on the Establishment of An OIC ad Hoc Ministerial Committee on Accountability for Human Rights Violations against the Rohingyas*. Dengan adanya resolusi tersebut, negara-negara muslim diharapkan dapat solid bekerjasama dalam mencari bukti terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang menimpa etnis minoritas muslim Rohingya.

Berdasarkan paparan di atas, dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya dipengaruhi oleh faktor Islam. Bersandar pada pendekatan konstruktivisme yang mengakui pluralitas aktor dalam hubungan internasional, faktor Islam tercermin dari berbagai upaya mayoritas umat Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, SOLIDER dan lain-lain dalam mendesak pemerintah untuk turut membantu penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya. Atas dasar itu, pemerintah pada akhirnya melibatkan secara langsung ormas Islam maupun organisasi filantropi berbasis Islam dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan. Disamping itu, Indonesia juga semakin aktif membawa isu Rohingya dalam agenda diplomasinya di forum internasional seperti OKI.

Selanjutnya, ditinjau dari konsep identitas, lebih jelasnya sumber pembentukan identitas dari level domestik, dapat diketengahkan bahwa alasan yang melatarbelakangi mayoritas umat Islam di Indonesia vokal menyuarakan penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya karena disebabkan oleh adanya kesamaan identitas yakni Islam,

mengingat salah satu pemicu konflik Rohingya ialah konflik berdimensi agama yang melibatkan etnis minoritas muslim Rohingya, etnis mayoritas Buddha Rohingya serta otoritas Myanmar yang mayoritas merupakan penganut Buddha. *

Referensi

- Alfajri, Ahmad (2018). "Democracy and Indonesia's Foreign Policy, Case Study: Rohingya Crisis 2012-2017" dalam *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 129
- Bainus, Arry (2016). "Debating National Interest Vis-a-Vis Refugees: Indonesia's Rohingya Case" dalam *The Challenges of Social Sciences in A Changing World* (Yogyakarta: UMY)
- Brooten, Lisa (2017). "Producing the News: Reporting on Myanmar's Rohingya Crisis" dalam *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 47, No. 3
- Indonesia and the Rohingya Crisis*, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Report No.46 (2018), 5-7
- Jati, Irawan (2017). "Comparative Study of the Role of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis" dalam *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 1
- Rosyidin, Mohamad (2019). *Indonesia: Menuju Kekuatan Global Abad 21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia
- Yusuf, Imtiyaz (2018). "Three Faces of The Rohingya Crisis: Religious Nationalism, Asian Islamophobia and Deligitimizing Citizenship" dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 25, No. 3

Media Online

- Agus Yulianto "Indonesia Dorong Myanmar Selenggarakan Dialog Antaragama" [database on-line], diakses melalui <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/08/ohuk7u396-indonesia-dorong-myanmar-selenggarakan-dialog-antaragama> pada 28 Juni 2020
- Oki Budhi, "Unjuk Rasa Solidaritas Rohingya di Bandung dan Jakarta" [database on-line], diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38088925> pada 24 Maret 2019
- Reiny Dwinanda "Retno Marsudi Receives Myanmar Delegation for Interfaith Dialogue" [database on-line], diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/17/05/22/oqd1xd414-retno-marsudi-receives-myanmar-delegation-for-interfaith-dialogue> pada 28 Juni 2020

Wawancara

- Wawancara dengan AM Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Periode 2014-2019, di Jakarta, 5 Juli 2019
- Wawancara dengan Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Jakarta dan Pakar Dunia Islam, di Ciputat, 29 Juli 2019

ACHMAD UBAEDILLAH adalah pengajar di Universitas Islam Negeri, Jakarta. Aktif menulis di berbagai media. Ia juga aktif sebagai pengurus Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI. Saat ini bertugas sebagai Dubes Indonesia untuk Brunei Darussalam.

Efektivitas 5PC ASEAN dalam menyelesaikan Problematika Kudeta Militer di Myanmar

Emil Radhiansyah

Kudeta Militer Myanmar

Dunia internasional dan masyarakat Asia Tenggara pada senin 1 Februari 2021 lalu, dikejutkan oleh aksi kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil Myanmar. Militer menangkapi para pemimpin sipil yang berasal dari National League for Democracy (NLD) seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta lainnya. Melalui pimpinan tertinggi militer, Jenderal Aung Ming Hlaing menyatakan bahwa kudeta tersebut terjadi karena para pemimpin sipil dianggap tidak berhasil menyelenggarakan bentuk pemerintahan yang transparan yang diukur dari pemilihan umum (pemilu) 8 November 2020.

Militer menganggap telah terjadi kecurangan dan menyatakan menemukan 8,6 juta kecurangan pemilu dari 314 wilayah (Sicca, 2021). Union Election Commission (UEC/ Komisi Pemilihan Umum) menyanggah tuduhan militer dengan menyatakan bahwa pemilihan berlangsung secara transparan dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang kredibel yang berasal dari pemantau dan organisasi masyarakat sipil, kandidat pemilu, media, serta staf pemilu. Namun demikian UEC mengakui tengah melakukan penyelidikan atas 287 keluhan yang disampaikan. Dalam pemilu tersebut NLD mendapatkan 258 suara untuk House of Representative (Majelis Rendah) dan 138 suara untuk House of Nationalities (Majelis Tinggi) (Utomo, 2021).



Gambar 1. Peta Myanmar

Sumber: (Drury, 2021)

Aksi kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar bukanlah hal yang baru. Pasca kemerdekaan Myanmar (dulu Burma) yang baru berumur berusia 14 tahun tepatnya tahun 1962, di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win, Tatmadaw (nama resmi militer Myanmar) melakukan kudeta terhadap pemimpin nasional Aung San dengan alasan bahwa

kepemimpinan sipil tidak terampil. Kekuasaan di bawah militer sempat berganti beberapa kali yaitu setelah Jenderal Ne Win mundur di tahun 1988 dan digantikan oleh Jenderal Than Swe hingga 2011. Di bawah kepemimpinan Junta, militer memperkuat pengaruh politiknya dengan mendapatkan 25% kursi pada kedua majelis (Sicca, 2021), ini tentu saja dilakukan untuk memberikan akses militer untuk mengontrol berjalannya sistem pemerintahan dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Publik Myanmar sendiri tidak tinggal diam menghadapi penguasaan militer atas kehidupan bernegara masyarakat. Demonstrasi terbesar pernah terjadi pada tahun 1990 pun para Biksu Budha melakukan aksi protes terhadap rezim yang menolak untuk menyerahkan pemerintahan pada Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilu bersama partai NLD dan tahun 2007 yang dikenal dengan *saffron revolution* dimana ribuan biksu melakukan aksi demonstrasi terhadap rezim militer atas kebijakan menghilangkan subsidi bahan bakar minyak. Para Biksu Budha pun menolak untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada militer sejak saat itu hingga adanya permintaan maaf secara resmi yang disampaikan oleh pihak militer kepada Biksu Budha (Lipes & Thu, 2017).

Aksi kudeta militer pada tahun 2021 pun mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat Myanmar. Walaupun panglima tertinggi Angkatan bersenjata mengumumkan situasi darurat dengan melarang perkumpulan leboh dari lima orang dan berjanji untuk segera melaksanakan pemilu untuk mengembalikan suasana pemerintahan kepada sipil, namun secara beruntun masyarakat Myanmar turun ke jalan menyeru penolakan atas kudeta, meminta militer untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan memukul-mukul peralatan dapur sebagai simbol penolakan massal (*mass disobedience*) untuk tunduk terhadap kepemimpinan militer. Menanggapi aksi tersebut, aparat keamanan Myanmar bergerak cepat untuk meredakan suasana, namun dengan pola penanganan secara represif. Dengan cepat eskalasi meningkat dimana aparat keamanan menembakkan peluru kepada demonstran hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Upaya Mengakhiri Kudeta Militer Myanmar:

Pandangan Masyarakat Internasional dan ASEAN terhadap Kudeta di Myanmar

Kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil telah melalui masa hampir dua tahun, namun tidak menunjukkan adanya perubahan membaiknya situasi pada negara tersebut. Pada Maret 2021 Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyatakan lebih dari 3000 orang telah ditahan aparat keamanan dan lebih dari 300 orang tewas karena afiliasi politik ataupun pro terhadap kelompok yang dianggap telah mencurangi pemilu tahun 2020 melalui Gerakan demonstrasi yang dilancarkan sejak diumumkannya pengambil alihan kekuasaan (Satria, 2021). Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat lebih dari 15.000 penduduk Myanmar melarikan diri dari tempat tinggalnya dan mencari perlindungan ke India sebagai akibat meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi. Pemerintahan sipil Myanmar dalam pelarian yang menyebut dirinya sebagai National Unity Government (NUG) telah menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap junta militer. NUG mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 junta militer telah melakukan pembunuhan terhadap lebih dari 3000 warga sipil, sementara badan urusan pengungsi PBB UNHCR mencatat sekitar 986.500 orang telah meninggalkan Myanmar dan Institut Strategi dan Kebijakan Myanmar menyatakan lebih dari 36.000 rumah dan Gedung hancur selama konflik berlangsung (Aung, 2022).

Negara-Negara Barat dan Organisasi Internasional memberikan reaksi pada situasi yang terjadi di Myanmar sebagai berikut.

Negara	Kepala Negara/ Pemerintahan	Pernyataan
Inggris	Perdana Menteri - Boris Johnson	<i>I condemn the coup and unlawful imprisonment of civilians, including Aung San Suu Kyi, in Myanmar. The vote of the people must be respected and civilian leaders released.</i> (Johnson, 2021)

Negara	Kepala Negara/ Pemerintahan	Pernyataan
Amerika Serikat	Menteri Luar Negeri - Antony Blinken	<i>"We call on Burmese military leaders to release all government officials and civil society leaders and respect the will of the people of Burma as expressed in democratic elections on November 8."</i> <i>"The United States stands with the people of Burma in their aspirations for democracy, freedom, peace, and development. The military must reverse these actions immediately"</i>
Jepang	Menteri Luar Negeri - Toshimitsu Motegi	<i>The Japanese government has up to now strongly supported the democratic process in Myanmar, and opposes any reversal of that process</i>
Perserikatan Bangsa Bangsa	Sekretaris Jendral PBB – Antonio Guters	<i>These developments represent a serious blow to democratic reforms</i>
Uni Eropa	Presiden Dewan Eropa – Charles Michel	<i>The outcome of the elections has to be respected and democratic process needs to be restored</i>
India	Menteri Luar Negeri	<i>"India has always been steadfast in its support to the process of democratic transition in Myanmar"</i> <i>"We believe that the rule of law and the democratic process must be upheld. We are monitoring the situation closely."</i>
China	Juru Bicara Kementerian Luar Negeri – Wang Wenbin	<i>"China is a friendly neighbour of Myanmar's. We hope that all sides in Myanmar can appropriately handle their differences under the constitution and legal framework and safeguard political and social stability."</i>
Australia	Menteri Luar Negeri - Marise Payne	<i>Australia condemns the use of violence against civilians and other serious human rights violations (Coade, 2022)</i>

Tabel 1: Pernyataan Negara-Negara Barat dan Organisasi Internasional atas Kudeta Militer di Myanmar.

Sumber: (AAP, 2021)

Melalui pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan internasional telah mengancam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah junta militer dan memintanya untuk mematuhi hukum internasional mengenai penyelesaian secara damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara gamlang PBB, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Australia menyampaikan bahwa nilai demokrasi adalah hal terpenting untuk dihormati oleh Junta Militer dan bukannya dengan tindak kudeta dan kekerasan. Bahkan India dan China yang merupakan negara dekat dengan Myanmar memberikan pesan yang cukup jelas terhadap Junta Militer dengan menghendaki adanya proses transisi stabil sesuai dengan perundangan.

Sementara pandangan asia tenggara terhadap situasi yang terjadi di Myanmar sepertinya tidak memberikan reaksi yang cukup keras terhadap Myanmar. Pernyataan negara-negara asia tenggara relative lebih lunak. Indonesia, Malaysia dan Singapura menyatakan keprihatinan atas situasi yang terjadi di Myanmar dan mengharapkan semua pihak yang bertikai untuk menahan diri untuk mencegah berkembangnya konflik, ketiga negara menaruh perhatian atas situasi keamanan, perkembangan ekonomi dan pemerintahan yang baik (BBC News Indonesia, 2021). Sementara Thailand, Kamboja dan Filipina memandang apa yang terjadi merupakan masalah internal Myanmar, walaupun kemudian Thailand pada pernyataan melalui website Kementerian Luar Negeri-nya pada 11 Maret 2021 menyatakan mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Brunei Darussalam:

“Thailand reiterates the statements made by Brunei Darussalam as ASEAN Chair on 1 February 2021 and 2 March 2021, which called on all sides in Myanmar to exercise utmost restraint as well as flexibility. We call for de-escalation of the situation and release of detainees. We also urge all parties concerned to seek a peaceful solution for Myanmar and its people through dialogue via any constructive channels.” (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, 2022).

Efektivitas ASEAN 5 Point Consensus

Menyikapi perkembangan situasi di Myanmar, ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN termasuk pimpinan junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada 24 April 2021. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan lima kesepakatan yang disetujui oleh Hlaing sebagai berikut:

1. Penghentian dengan segera bentuk kekerasan di Myanmar (*the immediate cessation of violence in Myanmar*)
2. Adanya dialog konstruktif diantara para pihak untuk mencapai sebuah solusi damai demi kepentingan masyarakat (*constructive dialogue among all parties concerned to seek a peaceful solution in the interests of the people*)
3. Mediasi yang difasilitasi oleh perwakilan ASEAN; dengan asistensi dari Sekretaris Jendral (*mediation to be facilitated by an envoy of ASEAN's chair, with the assistance of the secretary-general*)
4. Bantuan kemanusiaan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (*humanitarian assistance provided by ASEAN's AHA Centre*)
5. Kunjungan Delegasi dan Utusan Khusus ASEAN untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan di Myanmar (*a visit by the special envoy and delegation to Myanmar to meet all parties concerned*)

Melalui 5 poin kesepakatan tersebut ASEAN mengharapkan adanya perkembangan positif dalam rangka mengurangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar, serta menjembatani pertemuan para pihak untuk memulai kembali pembicaraan mengenai masa depan Myanmar. Namun demikian, Matthew Smith pengamat dari Regional Rights Advocacy Group Fortify Rights menyatakan bahwa adalah sebuah kesalahan bila ASEAN hanya mengundang sang Jenderal tanpa mengundang juga kelompok berkepentingan NUG, yang dapat menjadi ketimpangan dalam pengambilan kesepakatan bersama (Daniel, 2021). Menurutnya Kesepakatan pada konsensus tersebut tidak mengikat junta untuk menghentikan tindakan yang telah berjalan. Apa yang disampaikan oleh Smith mungkin ada benarnya, sebab pasca disepakatinya konsensus tersebut, tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar justru semakin menjadi terhadap masyarakat yang menentang militer. Penyelidik PBB, Thomas Andrew memperingatkan mengenai peningkatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar (Schlein, 2022), penangkapan dan tindak kekerasan aparat keamanan yang dilakukan semakin massif dan represif menasar kepada siapa saja yang menentang Junta, serta konfrontasi bersenjata terjadi antara Tatmadaw dan pasukan bentukan pro demokrasi.

Perkembangan sikap negara-negara Asia Tenggara ditunjukkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang dilaksanakan pada 26 oktober 2021 lalu, dengan alih-alih mengundang pimpinan junta militer, ASEAN mengundang perwakilan kelompok non politik dalam pertemuan tersebut. Namun demikian setelah hampir dua tahun berlalunya pemerintahan junta pasca kudeta militer, belum terlihat jelas arah kepemimpinan di Myanmar sebagaimana yang dijanjikan oleh Jenderal Hlaing yang akan melaksanakan pemilu secepatnya dan kesepakatan yang dihasilkan belum dapat berjalan sepenuhnya. Sementara tampuk kepemimpinan ASEAN telah berganti dari Kamboja kepada Indonesia dan sekali lagi pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pimpinan junta militer Myanmar. Dalam KTT yang dilaksanakan di Pnom Penh, Kamboja pada 11 November 2022 lalu melalui ASEAN Addressing Challenges Together (A.C.T) mengafirmasi bahwa Myanmar adalah bagian tidak terpisahkan dari ASEAN dan tetap memasukkan 5 Point Consensus sebagai referensi valid untuk diimplementasikan dan tetap mengharapkan penyelesaian yang damai atas permasalahan yang terjadi di Myanmar (ASEAN Secretariat, 2022). Namun demikian ASEAN tetap menyatakan kekecewaan atas rendahnya perkembangan situasi yang terjadi di Myanmar sebagai akibat rendahnya komitmen pemerintah di Nay Pyi Taw untuk mewujudkan kelima kesepakatan tersebut.

Melalui pernyataan tersebut apakah mungkin dapat dinyatakan bahwa lima poin consensus tersebut telah gagal diimplementasikan oleh ASEAN. Dalam artikel yang ditulis oleh Yusa Djuyandi dkk (2022, p. 628), menyatakan bahwa hambatan ASEAN dalam mendorong penerapan konsensus bukanlah pada prinsip dasar ASEAN mengenai *non-interference*. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat dijunjung oleh negara-negara anggota ASEAN untuk tidak saling ikut campur atas urusan domestik masing-masing negara anggota. Lebih lanjut dalam Piagam ASEAN disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, prinsip demokrasi, konsitusi dan pemerintahan yang baik. Menurut Djuyandi, justru struktur pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh ASEAN sebagai hambatan utama, hal ini didasarkan pada prinsip pengambilan keputusan yang melibatkan persetujuan semua anggota.

Dalam hal ini ASEAN terkesan lamban untuk mencapai sebuah kata mufakat di awal terjadinya krisis politik di Myanmar, yang terlihat dari adanya keengganan beberapa negara anggota ASEAN untuk mendesak segera dilakukannya perbaikan kebijakan dan kondisi di Myanmar dengan anggapan bahwa peristiwa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah proses politik dalam negeri yang harus dihormati (Djuyandi, Sudirman, & Darmawan, 2022). Keengganan untuk membahas lebih lanjut dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 24 April 2021 pun terlihat, sejatinya KTT dihadiri oleh Kepala Pemerintahan dan Presiden dari negara-negara anggota ASEAN, namun Thailand hanya mengirimkan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri untuk mewakili Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha (Sunariyah, 2021), sementara Filipina dan Laos diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri (Wahyuni, 2021).

Amanda Huan dan Ralf Emmers (2016) dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal *Global, Peace & Security*, menyatakan bahwa dalam mengukur keberhasilan sebuah *preventive Diplomacy* dimana di dalamnya terkandung upaya pencegahan berkembangnya sebuah bentuk perselisihan dan konflik antar dan intra negara, perlu untuk melihat pada peran ketertarikan negara besar (*great powers*) terhadap konflik, aktor yang menjadi rujukan dalam pencegahan, sifat kesepakatan yang dicari. Peter Wallenstein menyatakan perlunya melibatkan *great powers* dalam perselisihan dan konflik yang terjadi, hal ini untuk mencegah meluasnya konflik yang terjadi serta mempercepat datangnya solusi. Namun menurut Wallenstein, hal ini hanya memungkinkan bila *great powers* memiliki pandangan yang sama mengenai kedudukannya pada konflik yang terjadi, terutama dalam pengambilan keputusan pada Dewan Keamanan PBB. Namun bila melibatkan *great powers* namun diantaranya tidak memiliki kesamaan pandangan sebagai akibat perbedaan kepentingan dan perselisihan diantaranya, maka hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai (Huan & Emmers, 2016).

Menilik kembali kelima kesepakatan yang telah dicapai, memang tidak melibatkan pihak-pihak di luar ASEAN, namun demikian Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Inggris menaruh perhatian yang serius terhadap perkembangan situasi yang terjadi di Myanmar dan bersikap menunggu hasil positif dari kesepakatan yang diusahakan oleh ASEAN, telah menerapkan sanksi-sanksi terhadap militer Myanmar. PBB melalui Komisi Tinggi untuk Pengungsi, Michelle Bachelet, menyatakan ketidakefektifan respon internasional termasuk upaya yang dilakukan oleh ASEAN melalui consensus yang dicapai dan Dewan Keamanan Internasional PBB, terhadap masalah Myanmar dan menginginkan adanya pendekatan yang lebih jelas (Human Rights Watch, 2022).

Mengutip kembali pendapat Wallenstein mengenai pelibatan *great powers*, apa yang disampaikan oleh Bachelet menjadi hal yang logis. Konteks hubungan yang terjadi diantara *great powers* mengalami perselisihan diantara negara-negara tersebut pada kancah internasional, sebutlah Perang Rusia-Ukraina menyebabkan adanya pandangan yang cukup ekstrem dari koalisi barat terhadap Rusia dan sebaliknya, serta memanasnya situasi Laut China Selatan dalam kasus Taiwan membuat hubungan Amerika Serikat dan China tidak berada dalam kondisi stabil. Hal ini terlihat dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB yang dicapai pada 21 Desember dengan sikap abstain dari China, Rusia dan India terhadap 12 suara lainnya (Strangio, 2022).

Sementara aktor yang menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik seperti Indonesia, Singapura, Filipina dan Malaysia masih belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti, bahkan perwakilan ASEAN untuk masalah Myanmar ditolak untuk mengunjungi Myanmar, dimana pemerintahan Junta Militer menolak agenda pertemuan dengan Aung San Suu Kyi dan kelompok perlawanan NUG. Justru Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menjadi satu-satunya pemimpin di antara negara-negara asia tenggara yang diterima mengunjungi Myanmar di bawah pemerintahan Junta Militer yang diikuti dengan pertemuan antara Min Aung Hlaing dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, walaupun demikian Hlaing tetap menyatakan bahwa tidak ada kompromi dan negosiasi terhadap kelompok penentang

pemerintahan yang telah dilabeli sebagai kelompok teroris oleh junta militer (Human Rights Watch, 2022). Adapun hal yang dinyatakan oleh Hlaing telah menjadi preseden bahwa lima poin dalam konsensus tidak dapat dicapai, serta merujuk pada pernyataan Matthew Smith sebelumnya mengenai tidak adanya keterlibatan aktor kepentingan dari kelompok yang menentang junta di Myanmar tidak membuat konsensus akan dipatuhi oleh pemerintahan junta militer.

Sementara dari sisi pemerintahan Junta Militer, menolak bahwa implementasi ke-5 poin dalam konsensus 24 April 2021 telah gagal. Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh ASEAN tidak berdasarkan situasi yang sebenarnya terjadi di Myanmar, serta ASEAN tidak melibatkan pemerintahan Myanmar secara konstruktif upaya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dalam memenuhi ketentuan pada konsensus (Khmer Times, 2022). Penolakan Myanmar atas penilaian ASEAN di didasarkan pada pertemuan dengan Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhon, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan delegasi Pemerintah Kamboja dalam kunjungannya ke Myanmar pada 20-23 Maret 2022 lalu, dimana dalam pertemuan tersebut fase pembicaraan mengenai proses penyaluran bantuan kemanusiaan ASEAN yang berlangsung antara Ko Ko Hlaing, Menteri untuk Kerja sama Internasional dan Ketua Satuan Kerja Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN kepada Myanmar (Sochan, 2022). Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, menyatakan komitmen Myanmar terhadap kelima kesepakatan konsensus, namun dalam upaya implementasi yang sedang berjalan, pemerintahan Myanmar mengancam pilihan ASEAN untuk berinteraksi dengan kelompok yang menurut pemerintah Myanmar tidak sah secara hukum mewakili suara Myanmar dalam pertemuan politik ASEAN.

Myanmar memandang proses implementasi konsensus yang telah disepakati tidak dapat dibatasi dalam rentang waktu tertentu, dan harus didasarkan kepada "*Myanmar Owned and Myanmar Led-Process*" (Sochan, 2022). Dalam pandangan penulis terhadap pendapat ini bahwa pada saat Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan persetujuannya atas kelima poin dalam konsensus maka proses yang berjalan dalam pelaksanaannya adalah cara-cara yang menurut pemerintah Myanmar layak untuk dijalankan berdasarkan peraturan dan perundangan yang diakui oleh pemerintahan junta militer, hal ini akan berlangsung hingga dirasa situasi menjadi stabil. Selain itu, sebagai anggota dari ASEAN, Myanmar merasa berhak untuk diperlakukan sebagai entitas negara yang kedudukannya sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki hak untuk dihormati dan diajak serta dalam proses dialog dan konsultasi pada setiap lini di organisasi regional tersebut, seperti yang tercantum pada Bab 3 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa setiap negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama (ASEAN, 2007).

Atas tidak adanya undangan terhadap pimpinan Myanmar dalam beberapa kali pertemuan tingkat tinggi, Myanmar mengungkapkan kekecewaannya kepada Indonesia dengan menyebut Indonesia sebagai "Anjing Peliharaan Amerika Serikat", sebuah sindiran yang cukup bermakna sarkasme (Binekasri, 2022). Lebih lanjut mengenai konsensus pada poin 1 dan 2 sepertinya disampaikan dengan cukup jelas oleh Jenderal Hlaing dalam pidatonya pada hari Angkatan Bersenjata bahwa tidak ada kompromi dan negosiasi dengan kelompok NUG dan Sayap Militernya, hal ini berarti tindak kekerasan dalam rangka penegakan kedaulatan hukum Myanmar akan tetap berlangsung terhadap kelompok ini, sementara dialog konstruktif tidak akan ditujukan kepada Aung San Suu Kyi dan kelompok pengusungnya baik di NUG ataupun NLD.

Kesimpulan

Kudeta yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 merupakan peristiwa yang tidak akan dapat dilupakan oleh masyarakat internasional. Situasi stabil di kawasan terutama dengan prinsip penerapan situasi demokrasi di negara-negara asia tenggara yang merupakan anggota ASEAN, secara drastis berubah menjadi memanas, terutama bagi rakyat Myanmar yang menentang terjadinya kudeta dan menghendaki kembalinya situasi pemerintahan sipil. Sementara negara-negara anggota ASEAN terbelah menjadi dua polar keyakinan dalam memberikan respon yang tepat terhadap situasi Myanmar, yaitu polar yang menginginkan adanya aksi nyata ASEAN sebagai sebuah organisasi regional terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar dan polar yang menganggap situasi tersebut merupakan bagian dari proses politik internal yang terjadi di Myanmar.

Terbentuknya polarisasi ini menyebabkan lambannya proses pengambilan keputusan secara kolektif di dalam tubuh ASEAN yang menganut proses pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada terwakilinya seluruh suara anggota. Tercapainya konsensus bersama yang dituangkan kedalam lima poin kesepakatan, diharapkan dapat segera

diimplementasikan dan segera mendapatkan hasil. Namun pasca disetujuinya kesepakatan ini, Myanmar tidak kunjung menunjukkan adanya perubahan sikap dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Penolakan terhadap Utusan Khusus ASEAN pada tahun 2021 telah mengundang kekecewaan ASEAN terhadap Myanmar, namun demikian dalam pertemuan ASEAN di Phnomh Penh Kamboja, ASEAN tetap menyatakan bahwa Myanmar tetap merupakan bagian dari ASEAN dan tetap berpegang pada konsensus sebagai hal yang valid untuk dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan dinamika perselisihan politik di Myanmar.

Namun demikian, terdapat dua pandangan terhadap efektivitas konsensus, yaitu yang melihatnya tidak berjalan efektif yang berarti mengarah kepada gagalnya penerapan konsensus dan yang melihatnya sebagai suatu proses yang telah berjalan. Kedua pandangan tersebut tidak dapat disimpulkan sebelah mata. Keduanya memiliki poin-poin kebenaran, pada satu pihak yang diusung oleh pandangan umum masyarakat internasional yang menganut pemahaman demokrasi dan kebebasan, sementara di pihak lain melihat secara sempit dari sudut pandang penegakan kedaulatan wilayah hukumnya. Kedua pandangan ini memerlukan jembatan yang kokoh untuk dihubungkan untuk menyelamatkan masyarakat Myanmar yang terus menerus menjadi korban kedua pandangan ini. Oleh karenanya dalam hal ini ASEAN diharapkan untuk terus membangun sebuah pendekatan yang konstruktif terhadap Myanmar. Melalui kepemimpinan Indonesia di ASEAN, tentunya terdapat tugas yang berat bagi Indonesia untuk meyakinkan pemimpin Myanmar untuk melihat solusi dan bukannya persoalan. *

Referensi

- AAP. (2021, Februari 01). *News: Conflict and War*. Retrieved Desember 06, 2022, from thewest.com.au: <https://thewest.com.au/news/conflict/world-reacts-to-myanmar-coup-ng-s-2047672>
- ASEAN. (2007, November 20).
- ASEAN Secretariat. (2022, November 11). *home: statements*. Retrieved Desember 06, 2022, from asean.org: <https://asean.org/asean-leaders-review-and-decision-on-the-implementation-of-five-point-consensus/>
- Aung, H. (2022, November 29). *eastasiaforum.org*. Retrieved Desember 06, 2022, from eastasiaforum.org: <https://www.eastasiaforum.org/2022/11/29/time-for-asean-to-recognise-myanmars-shadow-government/>
- BBC News Indonesia. (2021, Februari 05). *Indonesia: Dunia*. Retrieved Desember 06, 2022, from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55887214>
- Binekasri, R. (2022, Oktober 30). *CNBC Indonesia: News: Berita*. Retrieved Desember 29, 2022, from cncindonesia.com: <https://www.cncindonesia.com/news/20221030071611-4-383565/karena-ini-myanmar-ngamuk-sebut-ri-cs-anjing-peliharaan-as>
- Coade, M. (2022, Februari 02). *Home: Jurisdiction: Federal*. Retrieved Desember 06, 2022, from themandarin.com.au: <https://www.themandarin.com.au/180088-payne-calls-for-end-to-myanmars-attack/>
- Daniel, T. (2021, April 25). *Home: Topics: Foreign Policy and Security Studies*. Retrieved Desember 06, 2022, from isis.org.my: <https://www.isis.org.my/2021/04/25/is-aseans-myanmar-five-point-consensus-workable-and-what-is-next/>
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Darmawan, W. B. (2022). Myanmar and the Dilemma of Asean Interventions that Do Not Find the Bright Spot. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(1), 618-633. doi:DOI: 10.2478/bjlp-2022-00042
- Drury, F. (2021, Februari 02). *BBC News: Global*. Retrieved Desember 06, 2022, from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55901439#:~:text=Militer%20Myanmar%20mengambil%20alih%20kekuasaan%20pada%20Senin%20%2801%2F02%29%2C,sebelum%20beralih%20menuju%20pemerintahan%20demokratis%20pada%20tahun%202011.>
- Huan, A., & Emmers, R. (2016, December 05). What explains the success of preventive diplomacy in Southeast Asia? *Global Change, Peace & Security*, 1-17. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14781158.2016.1259214
- Human Rights Watch. (2022, April 22). *News: hrw.org*. Retrieved Desember 29, 2022, from hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>

- Johnson, B. (2021, Februari 01). Retrieved Desember 06, 2022, from https://twitter.com/BorisJohnson/status/1356143343600885761?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356143343600885761%7Ctwgr%5Eef893a3b32abcf46b607dc07eafed3bcb5078f6c%7Ctwcon%5Es1_&ef_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Fdua-5588
- Khmer Times. (2022, November 13). *National: Khmer Times*. Retrieved Desember 29, 2022, from <https://www.khmertimeskh.com/501183676/myanmar-objects-aseans-review-on-5pc-and-its-engagement-with-the-countrys-unlawful-organisations/>
- Lipes, J., & Thu, K. (2017). *Activist Monk Gambira Looks Back to the Safron Revolution*. Radio Free Asia, Yangoon. Retrieved Desember 06, 2022, from <https://www.rfa.org/english/news/special/saffron/gambira.html>
- Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. (2022, November 30). *home:news:topstories*. Retrieved Desember 06, 2022, from [mfa.go.th: https://www.mfa.go.th/en/content/thailandstatementonmyanmar11mar2021-2?cate=5d5bcb4e15e39c306000683c](https://www.mfa.go.th/en/content/thailandstatementonmyanmar11mar2021-2?cate=5d5bcb4e15e39c306000683c)
- Satria, L. (2021, Maret 26). *Home: News: Internasional*. Retrieved Desember 06, 2022, from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/qkqkbc377/lebih-dari-300-orang-tewas-dalam-demonstrasi-di-myanmar](https://www.republika.co.id/berita/qkqkbc377/lebih-dari-300-orang-tewas-dalam-demonstrasi-di-myanmar)
- Schlein, L. (2022, Juni 30). *East Asia: VOANews.com*. Retrieved Desember 27, 2022, from [voanews.com: https://www.voanews.com/a/un-investigator-warns-of-increased-violence-in-myanmar/6639588.html](https://www.voanews.com/a/un-investigator-warns-of-increased-violence-in-myanmar/6639588.html)
- Sicca, S. P. (2021, Januari 30). *Global: Kompas.com*. Retrieved Desember 04, 2022, from [kompas.com: https://www.kompas.com/global/read/2021/01/30/135022870/kudeta-militer-myanmar-ini-rentetannya-dari-hasil-pemilu-yang-dituduh?page=all#page2](https://www.kompas.com/global/read/2021/01/30/135022870/kudeta-militer-myanmar-ini-rentetannya-dari-hasil-pemilu-yang-dituduh?page=all#page2)
- Sochan. (2022, Maret 22). *National: Politics: Phnom Penh Post*. Retrieved Desember 29, 2022, from [phnompenhpost.com: https://phnompenhpost.com/national-politics/sac-foreign-affairs-chief-5pc-be-led-myanmar](https://phnompenhpost.com/national-politics/sac-foreign-affairs-chief-5pc-be-led-myanmar)
- Strangio, S. (2022, Desember 22). *ASEAN Beat: Diplomacy: Southeast Asia*. Retrieved Desember 29, 2022, from [thediplomat.com: https://thediplomat.com/2022/12/un-security-council-adopts-rare-resolution-on-myanmar/](https://thediplomat.com/2022/12/un-security-council-adopts-rare-resolution-on-myanmar/)
- Sunariyah (Ed.). (2021, April 21). *Home: News: World: IDN Times*. Retrieved Desember 29, 2022, from [idntimes.com: https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/ktt-asean-bahas-myanmar-digelar-24-april-pm-thailand-tidak-hadir?page=all](https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/ktt-asean-bahas-myanmar-digelar-24-april-pm-thailand-tidak-hadir?page=all)
- Utomo, A. P. (2021, Februari 01). *Global: Kompas.com*. Retrieved Desember 06, 2022, from [kompas.com: https://www.kompas.com/global/read/2021/02/01/120228770/kudeta-militer-terjadi-di-myanmar-ini-fakta-yang-berhasil-terhimpun?page=all#page2](https://www.kompas.com/global/read/2021/02/01/120228770/kudeta-militer-terjadi-di-myanmar-ini-fakta-yang-berhasil-terhimpun?page=all#page2)
- Wahyuni, N. C. (2021, April 24). *Home: News: Berita Satu*. Retrieved Desember 29, 2022, from [beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/764895/ktt-asean-digelar-siang-ini](https://www.beritasatu.com/news/764895/ktt-asean-digelar-siang-ini)

EMIL RADHIANSYAH adalah dosen pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina dan merupakan alumni Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) 2019. Ia mengajar terkait budaya dan negara Asia Tenggara, regionalisme Asia Tenggara, studi keamanan Asia Tenggara, teori hubungan internasional dan pengantar ilmu hubungan internasional. Emil bergabung dalam kelompok *China Policy Group* FPCI, menjadi delegasi kunjungan ke China pada 2017, dan tertarik mengamati perkembangan Kebijakan Luar Negeri Republik Rakyat China. Emil juga aktif di Rumah Produktif Indonesia.

Can sanctions work on Myanmar's Junta?

An international legal appraisal

Aloysius Selwas Taborat

Apart from the South China Sea, Myanmar's domestic political crisis continues to become a constant political-security challenge to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The Myanmar's situation has been center front for ASEAN for over two decades.

No wonder, ASEAN faces a seemingly perennial impulses both from within and outside the region. Impulses that question ASEAN's relevance and legitimacy as an organization. Yet, such impulses were also a testament to the growing expectations and aspirations for ASEAN.

Over the years there have been myriad of political as well as non-political recipe extended by the Association or its individual members to assist Myanmar in resolving their domestic crisis. Sometimes the recipe is even imposed by the Association.

Externally, Myanmar continue to suffer from unilateral sanctions by countries or organization outside Southeast Asia. To name a few, from the United States (US), United Kingdom (UK), Australia, Canada, and the European Union (EU). Their sanctions range from arm embargoes, trade embargoes, asset freezing, travel bans, to investment bans. The perceived goal for these sanctions is evident. It is to deter and constraint Myanmar's military from furthering the actions deemed as illegal by the sanctioning entities.

While this is not the first time Myanmar is subjected to foreign sanctions, will such sanctions make any difference? Writing in the *Strait Times*, Bilahari Kausikan, former Permanent Secretary at the Ministry of Foreign Affairs of Singapore offers a realistic perspective. He argued that the Tatmadaw (Myanmar's military) has been in self-isolation for too long that any new sanctions would not bog them down. In one way or another, sanctions can hurt Myanmar's military. But whether it could eventually bring the intended impact will have to wait for some time.

One thing for sure, since millennia the use of sanctions as foreign policy instrument has been a critical insignia of inter-state relations.

Sanctions and statecraft

Sanctions is an instrument of statecraft. It is a modern-day phenomenon as much as an ancient practice. Sanctions is used to subdue another into the will of the imposing party. Be it for political and economic gains or to serve noble causes. Some considered sanctions as a prelude to the use of force. In contemporary setting, sanctions have undergone critical and rapid transformation since the advent of Cold War until the aftermath of the 9/11 Attack.

Traditionally, sanctions are more robust and taking the form of trade embargos from one country against another. The current generation of sanctions are typically referred to as 'smart sanctions'. For they are getting specialized, targeted, and involving financial measures such as anti-money laundering (AML) or countering the financing of terrorism (CFT), as well as imposition of travel restriction, trade in arms or in selective commodities such as chemical, biological, metals or others (Lopez, 2013).

There is also the practice of secondary sanction. It is widely exercised by the United States through the harnessing power of the US Dollar. When enforced, any third parties that are not subject to US jurisdiction but have commercial relations or interests with the sanctioned country, individual or entities, could be cut off from accessing US financial system if they failed to adhere to US sanctions.

Critique against sanctions

Despite of such avant-garde transformation, the use of sanctions never escape criticism. The Peterson Institute of International Economics revealed in its 2009 study that from almost 174 sanctions that it investigated, only one-third reached their policy objective.

James Dobbins, Senior Fellow at RAND Corporation argued that economic sanctions and carpet bombing have a lot in common. They are indiscriminate, tend to damage disproportionately the most vulnerable and often the most innocent elements of society and they seldom have the desired effect unless followed up with military aggression (Dobbins, 2019).

Multilateral sanctions, especially those imposed by the United Nations Security Council (UNSC), also get their fair share of criticism. For any sanctions to get through, would require the Permanent Five (P5, holders of veto power) or P5's concurrent affirmative voting. Meaning, it is unlikely that France, US, UK, China or Russia will ever allow sanctions to be authorized against them, nor against their allies or interests. P5 often use this power to leverage against friends and foes alike. But at times, UN members also take benefit from P5's veto power upon any perceived or proposed sanctions against them in the Council.

Legitimacy of sanctions

Legitimacy of sanctions attracts deliberation from the United Nations General Assembly (UNGA), the only global plenary forum where 193 countries are represented. It ponders on the question of unilateral sanctions. That is sanctions which are not issued by the UNSC and deemed to contravene international law.

The results of UNGA's deliberation on the subject is resolutions such as "Human rights and unilateral coercive measures" and "Unilateral economic measures as means of political and economic coercion against developing countries". Often times, these resolutions are not adopted by consensus, but they indeed represent UNGA's views and calls for states to revoke, desist and eliminate the use of unilateral sanctions.

These resolutions stemmed from the worldviews that only the UNSC can apply sanctions to maintain international peace and security and that such competence is limited and exceptional, only to be used as a last resort. This idea is crystalized in Article 41 of the UN Charter. It follows that states' obligation are none other than to carry disposition of the UNSC's sanctions.

On the other hand, proponents of unilateral sanctions also have legitimate standing. They argue that they never abolish themselves from the authority to legislate and enforce sanctions independently of the UNSC. What the latter has is merely a residual attribution of competence from its member states. In fact the United States, proponent of unilateral sanctions, reasoned that "... the [Unilateral coercive measures] resolution inappropriately challenges the sovereign right of States to conduct their economic relations freely and to protect legitimate national interests, including taking certain related actions in response to national security concerns." It is apparent that both sides of the worldviews were anchored on starkly different rationales. But they are both offer sound arguments.

Article 41 places the primacy and necessity of maintaining international peace and security and states are expected to follow through by enabling the Council's decisions. On the other side, the rendering of unilateral sanctions is justifiable and legitimate in that they are dictated by national security concerns, both as an expression of natural rights and an inalienable dimension of sovereignty.

As noted by the UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures, the current trend favors proponents of unilateral sanctions. In her 2020 Report, the Rapporteur mentioned that nearly 40 per-cent of the sanctions introduced today are unilaterally imposed by states and regional organizations. Noticeably, those sanctions are beyond the confine of Article 41, meaning that they seek to pursue the improvement of democracy, protection of human rights and other identical objectives. Rather than just addressing the threats or breach of peace, acts of aggression, or countering the violations of *erga omnes* obligations, which are typical traditional security threats.

The rapid proliferation of the so-called "Magnitsky sanctions" is also a testament to that development. To mention a few, UK and the European Union (EU) have recently embarked on their respective new global human rights sanctions regimes aimed at addressing human rights violations and strengthening democracy abroad. In such a light, the Myanmar

crisis gave a befitting momentum for UK's posturing where it is issuing sanctions independently of the EU sanctions regime in post-Brexit scene.

Indonesia's practice

The imposition of unilateral sanctions is not unique to the experience of Western European countries or the US alone. In the past, Indonesia has at least two prime instances where it exercised unilateral sanctions. First, when Indonesia launched political, economic and military pressures against the Netherlands over West Irian (*Irian Barat*) dispute between 1957 - 1962. Second, when Indonesia embarked on the *Ganyang Malaysia* or "Crush Malaysia" campaign (1963 – 1966) against the formation of the Federation of Malaysia.

Assessment provided by the Institute for International Economics in its study titled "Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy" (Hufbauer and Schott, 1985), Indonesia's sanctions was successful in West Irian dispute but failed in *Ganyang Malaysia* campaign. It succeeded because it achieved the premier policy objective, that was the restoration of West Irian into Indonesia's sovereignty. But it did not work on the *Ganyang* campaign since the Federation of Malaysia was successfully established. Indonesia's policy of halting trade with Singapore resulted in Indonesia's massive losses for its supply-chain was reliant on Singapore's ports. Indonesia had all the commodities that the world needed, but it was cut off from world trade. Externally, Indonesia's economic degradation was further severed by US sanctions against Indonesia. Indonesia was not really prepared at the time.

Two instances that yielded different results, yet important lessons of statecraft for Indonesia.

Efficacy of sanctions against Myanmar

Will sanctions as they have evolved today be effective in situation like Myanmar? For Bilahari Kausikan, sanctions "... will only made those imposing them feel good about themselves rather than do any good. Sanctions hurt ordinary Myanmar citizens and drove the military into China's arms". Indeed, while he has a legitimate point, at the very least sanctions will make the life of targeted officials harder. But whether it will shake their behavior will still have to be tested.

The vigor of today's human rights sanctions regime is the determination of the imposing countries to make the most of their advanced financial system such as banks, companies, or currency as well as the hubs or network they have as leverage. Hence, perhaps one would only need to genuinely follow the money in order to make sanctions as foreign policy instrument effective. *

ALOYSIUS SELWAS TABORAT is an Indonesian diplomat. This article is his personal views and not of the Ministry. He is a Legal Counsel and Coordinator for Politics of International Law Affairs at the Directorate of Legal and Treaty on Political and Security Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. He served as Second Secretary (Political) at the Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations in New York (2018 – 2021). During which he was a member of the Indonesian Delegation when Indonesia served as a Non-Permanent Member of the United Nations Security Council 2019 – 2020. He obtained his Bachelor of Law in Transnational Law from Faculty of Law, University of Indonesia, and a Master of Laws degree from Washington College of law, American University specializing in United States National Security Law. Throughout his career, he always been in the political and security field and have been representing Indonesia in various bilateral, regional, and multilateral negotiations. He can be contacted through selwastaborat@gmail.com or selwas.taborat@kemlu.go.id.

Kebersamaan dalam Kemanusiaan: Upaya ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Myanmar

Siti Mutmainnah

Pendahuluan

Kemanusiaan telah menjadi suatu pembahasan yang cukup penting dalam kebersamaan negara-negara di dunia yang mencintai perdamaian, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara yang menganut asas non-intervensi ini akan menjadi sebuah tantangan bagi pegiat kemanusiaan dalam mengatasi permasalahan genosida dan beberapa kejahatan kemanusiaan. Contoh kasus persoalan yang terjadi antara Pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya yang telah berlangsung sekira 80 tahun ini menjadi perhatian dari banyak negara di seluruh dunia (Pristiandaru, 2021).

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas Islam yang bermukim di provinsi Arakan, kawasan Barat Laut Myanmar. Pasca kemerdekaan Myanmar, Rohingya memegang peranan penting dalam pemerintahan Jenderal Aung San di Myanmar. Dalam buku *Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer* (2013) karya M.C Ricklefs dkk, dijelaskan bahwa perlakuan diskriminatif pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya mulai muncul pada masa kepemimpinan Jenderal Ne Win. Pada tahun 1962, Ne Win melakukan kudeta dan berhasil menduduki jabatan presiden Myanmar. Ne Win menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang didukung oleh Partai Program Sosialis Myanmar (Kompas, 2021).

Latar belakang diskriminasi terhadap etnis Rohingya tidak hanya berasal dari sentimen agama, namun juga kepentingan politik dan ekonomi. Latar belakang krisis Rohingya di Myanmar adalah sebagai berikut: Etnis Rohingya memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan etnis minoritas lain; Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Selain itu, etnis Burma di Myanmar tidak ingin bersaing dengan Rohingnya di bidang perekonomian dan adanya kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya.

Myanmar merupakan negara yang terus dilanda konflik internal. Sejak merdeka dari Inggris pada 1948, negara yang dulunya bernama Burma ini langsung didera serangkaian pemberontakan di beberapa wilayah. Mayoritas konflik tersebut sebenarnya berbasis etnik. Beberapa etnik membentuk kelompok bersenjata dan memerangi militer Myanmar, alias Tatmadaw. The Transnational Institute melaporkan bahwa Myanmar adalah salah satu negara dengan jumlah kelompok etnik paling beragam di dunia. Kelompok etnik minoritas telah lama terpinggirkan dan ditolak hak-hak dasarnya. Perang saudara yang terus berlangsung selama puluhan tahun justru semakin membuat kelompok etnik ini menderita.

Motif yang melatarbelakangi kelompok-kelompok etnik bersenjata memerangi pemerintah Myanmar beragam. Ada yang menuntut kemerdekaan, perluasan otonomi, atau menuntut dibentuknya negara federasi. Majalah *Time* bahkan menyebut konflik Myanmar merupakan perang saudara terlama di dunia. Tercatat, ada belasan kelompok bersenjata di Myanmar yang mengobarkan perang terhadap pemerintah Myanmar (Kompas, 2020).

Kepercayaan Myanmar terhadap Indonesia

Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, menjadi salah satu negara yang dipercaya oleh Myanmar untuk memimpin proses perdamaian pada konflik yang terjadi di Myanmar. Tentu saja Indonesia tidak sendirian dalam proses perdamaian ini, tekad membantu Myanmar pertama kali diumumkan dalam pernyataan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Jakarta.

Instruksi langsung dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Namun rencana kunjungan ke ibu kota Myanmar, Naypyitaw, diurungkan sesudah muncul penolakan keras dari gerakan demokrasi lantaran langkah

itu dikhawatirkan akan memberikan legitimasi kepada penguasa baru pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing. "Indonesia memilih tidak tinggal diam. Berpangku tangan bukanlah pilihan," kata Retno Marsudi sesudah pertemuan itu. Di luar bingkai ASEAN, Retno Marsudi mengatakan telah pula menjalin komunikasi dengan China, Australia, India, Jepang, Inggris serta utusan khusus sekjen PBB.

Menurut para analis, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat, dan ada sejumlah alasan mengapa Indonesia menjadi semacam tumpuan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Faktor pertama, Indonesia mempunyai pengalaman dalam mewujudkan transisi demokrasi dari rezim otoriter hingga mampu menggelar pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah dengan sistem satu orang satu suara. "Indonesia mempunyai perjalanan yang unik di mana transisi demokrasinya, kita sering mengkritiknya di dalam negeri, tetapi negara-negara lain menyaksikan bahwa Indonesia relatif sukses melakukan proses transisi demokrasi dari pilpres langsung, pilkada dan sebagainya, dan tidak ada guncangan termasuk misalnya dari militer," kata Dr. Priyambudi Sulistiyanto, dosen senior pada Flinders University, Adelaide, Australia.

Faktor kedua, Indonesia menjadi apa yang oleh Priyambudi diistilahkan "jangkar" dalam lingkup Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sebab sekitar 50% penduduk ASEAN tinggal di Indonesia. Kedudukan Indonesia sebagai jangkar ini lebih lanjut didukung oleh doktrin kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif.

Sedangkan faktor ketiga, Indonesia adalah *natural leader*, kata Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan. Ini antara lain dibuktikan dengan gerak cepat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan *shuttle diplomacy* ke Brunei, Singapura, dan terbaru ke Thailand untuk menggalang diplomasi ASEAN sesudah kudeta Myanmar pada 1 Februari. "Indonesia dari dulu sudah menginginkan Myanmar demokratis. Indonesialah yang mempertahankan Myanmar ketika masuk ASEAN dengan wajah tidak demokratisnya dan banyak sekali negara yang mencibir 'kok ada negara seperti ini dibolehkan masuk?'" Tapi Indonesia percaya bahwa keadaan itu bisa diubah dengan memberinya ruang. Ketika Myanmar masuk ke ASEAN Indonesia memastikan Myanmar ini diterima dan kemudian berubah menjadi demokratis," jelas I Ketut Putra Erawan.

Dalam proses menuju demokratisasi itu, lembaganya (IPD) turut dilibatkan memberikan pelatihan kepada kader-kader dari Myanmar baik dari partai oposisi maupun partai berkuasa. Faktor keempat, persahabatan Indonesia-Myanmar bukanlah seumur jagung, bahkan negara yang dulu dikenal dengan nama Burma tersebut tercatat sebagai salah satu yang mengulurkan tangan usai proklamasi kemerdekaan. Negara itu menyediakan landasannya bagi pesawat pertama Indonesia dari India ketika landasan lain ditutup karena diduduki Belanda (Bonassir, 2021).

Konklusi

Kepercayaan yang diberikan Myanmar kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingnya diharapkan dapat mendorong ASEAN agar lebih memperhatikan persoalan hak asasi manusia yang melampaui batas-batas negara, kata seorang pegiat. Selama ini ASEAN tidak mampu berbuat banyak ketika muncul persoalan kemanusiaan yang terjadi di dalam batas negara masing-masing anggota, karena organisasi negara-negara Asia Tenggara itu menganut prinsip nonintervensi. Dan sejauh ini ASEAN belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. "Problem di kawasan ASEAN, kita terjebak pada semangat komunal kedaulatan, semangat komunal nonintervensi yang menghambat kita untuk mendorong kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia," kata Wakil koordinator KontraS, Puri Kencana Putri (Affan, 2017). Prinsip nonintervensi, yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967, memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara masing-masing.

Indonesia tidak tinggal diam dalam permasalahan ini. Berbagai upaya terus dilakukan salah satunya melalui tujuh pernyataan Presiden Joko Widodo mewakili Indonesia pada 5 tahun lalu, yakni: Menyelesaikan aksi kekerasan di Rakhine State, Myanmar; Berkomitmen untuk membantu penyelesaian krisis tersebut; Mendorong seluruh pihak untuk menghentikan aksi kekerasan di Rakhine State; Menampung korban pengungsi; Memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban; Melakukan diplomasi ke dunia Internasional guna mendorong Pemerintah Myanmar guna menghentikan aksinya. Selain di Myanmar, Indonesia juga mengoordinasikan bantuan kemanusiaan di Bangladesh (Finaka, 2017).

Langkah terbaru Indonesia dalam upaya perdamaian terkait Rohingya disampaikan dalam pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat pada Kamis 22 September 2022. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno membahas soal situasi warga Rohingya yang tak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk. Dia menyebutkan sebanyak 1,1 juta warga Rohingya terperangkap di tempat pengungsian di Cox's Bazaar Bangladesh dan mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia dan radikalisme.

Menurut Retno, upaya untuk mengatasi masalah warga Rohingya itu dipersulit oleh situasi di Myanmar yang juga tidak mudah karena tidak ada kemajuan dalam penerapan 5 konsensus yang disepakati pemimpin ASEAN dan Myanmar. Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukkan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak (Antara, 2022).

Selayaknya sahabat yang membantu sahabatnya yang sedang dalam kesulitan. Kebersamaan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya hanya membantu sifatnya atas nama kepedulian akan kedamaian dengan memperhatikan hak asasi manusia. Akan tetapi penyelesaian yang menyeluruh hanya dapat dilakukan oleh negara yang berkonflik, sebab asas non intervensi yang menjadi asas ASEAN harus tetap dihormati para anggotanya.*

Referensi

- Prabowo Gama (2020). *Krisis Rohingya di Myanmar*. Indonesia: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar?page=all#:~:text=Latar%20belakang%20konflik&text=Etnis%20Rohingya%20memiliki%20status%20yang,etnis%20Rakhine%20terhadap%20etnis%20Rohingya> (diunduh pada 7 Desember 2020)
- Pristiandu, Danur Lambang (2021). *Konflik Myanmar, negara dengan perang saudara terlama di dunia*. (<https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/151746470/konflik-myanmar-negara-dengan-perang-saudara-terlama-di-dunia?page=all>) (diunduh pada 7 Desember 2022).
- Affan, Heyder (2017). *Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?*. Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293> (diunduh pada 7 Desember 2022)
- Andreas W Finaka DKK (2017). *Tujuh Pernyataan Presiden untuk Rohingya*. Indonesia: 2007 <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/7-pernyataan-presidennuntuk-rohingya>
- Sinaga, Yuni Arisandi dkk (2022). *Menlu RI singgung Warga Rohingya pada pertemuan MIKTA Jakarta*. <https://www.antaranews.com/berita/3134569/menlu-ri-singgung-nasib-warga-rohingya-dalam-pertemuan-mikta> (diunduh pada 7 Desember 2022)
- Widiarsi, Agustina (2017). *Bahas Rohingya Menteri RETNO ke Myanmar temui Aung San Suu Kyi. Jakarta* <https://nasional.tempo.co/read/905637/bahas-rohingya-menteri-retno-ke-myanmar-temui-aung-san-suu-kyi> (diunduh pada 7 Desember 2022)
- Bonasir, Rohmatin (2021). *"Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia diharapkan membantu mengatasi krisis politik 'sahabat lama'?"* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076> (diunduh pada 7 Desember 2022)

SITI MUTMAINNAH biasa dipanggil Yusiti, adalah seorang ibu rumah tangga yang mengabdikan ilmunya pada Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2003, kemudian aktif menjadi tenaga pengajar pada Rumah Belajar Qur'an Istiqomah di lingkungan rumahnya, selain itu kegiatan sebagai Ketua Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Talang Kelapa tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap ikut serta aktif pada kegiatan kemasyarakatan pada Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin (KKDB), Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kabupaten Banyuasin, serta berkontribusi sebagai penulis pada Rumah Produktif Indonesia (RPI).

ASEAN dan Isu Laut China Selatan

Iqbal Suliansyah

Kapal penjelajah rudal Amerika Serikat (AS), USS Chancellorsville, pada November 2022 diusir oleh pasukan militer China karena masuk ke perairan dekat Laut China Selatan. Aksi kapal AS tersebut dinilai China sebagai bukti upaya hegemoni AS menguasai dan militerisasi Laut China Selatan. Kenyataannya, China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, sehingga menjadi faktor terus memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Penolakan AS atas klaim teritorial China terlihat jelas dengan frekuensi kapal perang milik AS yang terus meningkat.

Tiongkok juga telah membuat banyak gesekan akibat atas klaim Laut China Selatan. Dalam bidang militer, Tiongkok sedang berhadapan dengan negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Vietnam, Filipina dan Indonesia serta negara di kawasan Asia timur yaitu Jepang. Periode ketiga kepemimpinan Xi Jinping terlihat semakin berambisi mewujudkan kedigdayaan negara sehingga cenderung berkontribusi negatif kepada stabilitas internasional tidak terkecuali ASEAN, namun merujuk Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, ada kabar baik untuk negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kebijakan luar negeri Tiongkok mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai lawan namun memandang negara-negara lain yang sedang berkembang sebagai negara sahabat yang penting yaitu misalnya kerja sama ekonomi dan pembangunan tentu dapat digunakan untuk kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Kebijakan tersebut meski dimaknai positif, namun tidak boleh mengenyampingkan isu besar terkait sengketa di Laut China Selatan.

Kebangkitan Tiongkok dan Perdamaian Dunia

Ramalan kebangkitan Tiongkok sebagai penguasa maritim tentu perlahan mulai terbukti. Sebelumnya kekuatan maritim didominasi oleh macan Asia, yaitu Korea dan Jepang. Belum lagi pergeseran bidang ekonomi diyakini akan dimenangkan oleh negara-negara geopolitik dan geomaritim yang hebat dan kuat. Guru besar Universitas Pertahanan Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M pada gelaran *Jakarta Geopolitical Forum* meyakini ramalan para pakar berkaitan dengan tahun 2030, dunia akan dikuasai oleh Tiongkok. Indikasi nyata terlihat armada Tiongkok yang hebat dan kuat.

Indonesia yang disebut-sebut juga akan menjadi negara hebat dari geomaritim bersaing dengan Tiongkok, India dan Amerika Serikat tentu harus serius meningkatkan kemampuan diplomasi melalui budaya maritim sehingga Indonesia layak bersanding dengan negara lain sebagai kekuatan maritim dunia. Indonesia sudah saatnya mendorong pemahaman pemanfaatan sumber daya maritim, diplomasi maritim bahkan pertanian maritim untuk menjadi contoh kepada negara-negara lain di ASEAN.

Mengutip pemberitaan media, Tiongkok dengan percaya diri menunjukkan sistem pertahanan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya harus menjadi perhatian dan kesadaran bersama akan konsen dan seriusnya Tiongkok menguatkan armada tempur khususnya armada laut. Awalnya Xi Jinping akan terus melanjutkan proses modernisasi Angkatan Bersenjata China hingga 2035, namun berubah menjadi lebih cepat yakni tahun 2027.

Terlihat jelas semangat Xi Jinping berkaitan dengan modernisasi alutsista. Kapal induk terbaru Tiongkok baru saja resmi pada Juni 2022. Diperkirakan jumlah kapal Angkatan Laut Tiongkok setara dengan Angkatan Laut Amerika. Komitmen Xi Jinping mempertahankan keamanan dan kedaulatan Tiongkok seperti tidak terbelenggu. Pentagon dalam laporannya menegaskan Tiongkok dalam dua tahun terus meningkatkan kekuatan militernya diantaranya telah memiliki lebih dari 400 hulu ledak nuklir.

Isu Laut Tiongkok Selatan jelas berkaitan dengan penegakan Hukum Perjanjian Laut PP atau dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Mengutip pernyataan Menlu RI, Retno Marsudi keberadaan

Laut China Selatan yang berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Indonesia dan Cina memiliki potensi konflik yang tinggi. Tahun 2022 juga sempat dihebohkan dengan kunjungan Kamala Harris yang merupakan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Filipina. Akibatnya saling tuding terjadi antara Beijing dan Manila.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, tidak boleh berhenti menganggap sebagai kehormatan dan kebanggaan belaka namun harus diwujudkan dengan menunaikan tugas-tugas yang tidak ringan. Presiden Jokowi, dalam harapannya setelah Indonesia ditunjuk sebagai ketua, ASEAN layak menjadi jangkar stabilitas dunia, dengan mewujudkan kawasan yang stabil dan damai. Presiden Jokowi yakin pada 2045, ASEAN menjadi lebih, adaptif, responsif dan berdaya saing.

Tugas besar ASEAN di tengah persaingan bahkan rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok juga harus menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Sikap saling tuduh AS dan Tiongkok terus terjadi ditambah patroli bahkan latihan militer terus meningkat hingga saat ini. Kerja sama maritim di Asia Tenggara harus dikampanyekan selalu, mengingat dampak krisis yang melanda dan pandemi Covid-19 tentu merubah dari fokus pengembangan militer dan alutsista menjadi fokus sosio-ekonomi.

Fokusnya negara-negara di dunia termasuk di Asia Tenggara kepada sosio-ekonomi tentu menunjukkan kondisi penghematan dan akan berdampak kepada kekuatan maritim ASEAN. Reserarch Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, Dr. Collin Koh Swee dalam *Jakarta Geopolitical Forum* ke-6 di sesi "Maritime Defense and Security in Dynamic Uncertainties" mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi kapal perang angkatan laut di Asia Tenggara yang rata-rata berusia tua. Menurut Dr. Collin, kapal perang angkatan laut ASEAN rata-rata diproduksi akhir tahun 1990-an, sehingga dibutuhkan perawatan yang baik. Solusi yang terbaik diantaranya adalah kerja sama angkatan laut di ASEAN. Sebagai contoh, seperti *Sulu sea trilateral cooperative arrangement* dan *Malacca strait patrol* di ASEAN harus terus ditingkatkan.

Konklusi: Indonesia membangun Semangat Maritim ASEAN

Pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) bulan Desember 2022 ini bisa menjadi momentum semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jenderal TNI Andika Perkasa akan segera pensiun dan digantikan oleh KSAL Jenderal Yudo Margono. Meski hanya menjabat setahun, Jenderal Yudo Margono memiliki tugas besar menyiapkan roadmap pertahanan masa depan, baik untuk matra darat, udara bahkan laut.

Terkait poros maritim dunia, Presiden Jokowi pernah memaparkan lima pilar utama. Pilar pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, pilar kedua yaitu berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Pilar selanjutnya adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan pilar terakhir adalah membangun kekuatan pertahanan maritim.

Komitmen mewujudkan cita-cita tersebut tentu menjadi inspirasi bagi negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan kekuatan mengarungi dua samudera harus didukung dari negara-negara ASEAN. Indonesia yang telah berhasil menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membuktikan keseriusan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hadirnya 17 kepala negara dan konferensi bertaraf internasional tersebut sebagai ajang komunikasi dan diplomasi guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Optimisme dan semangat ASEAN terlihat jelas diantaranya dari pernyataan Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Shahril Sufian Hamdan yang mengharapkan Indonesia serius memimpin negara-negara Asia Tenggara demi menjaga keamanan Laut China Selatan. Keyakinan Shahril harus disambut dengan kedewasaan dan kemampuan Indonesia dalam memimpin dan mengambil tindakan tegas atas klaim Tiongkok berkaitan dengan Laut China Selatan.

Menilik sejarah, ASEAN menjalankan sebuah prinsip yang dikenal dengan ASEAN Way. Prinsip ASEAN WAY diyakini sebagai prinsip atau instrumen yang selama ini berperan menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan dengan mengedepankan cara-cara baik yaitu non intervensi dan non kekerasan serta pertemuan informal menyelesaikan berbagai permasalahan. Konon ini juga menjadi penghambat penyelesaian konflik Laut China Selatan. Meski tentu ada

sisi positif karena mengutamakan dialog guna meredam tumbuhnya eskalasi konflik yang ujungnya akan mengancam keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Peradaban maritim, sehingga terbentuknya kekuatan ekonomi, sosial, politik yang mampu bersaing harus dibuktikan oleh Indonesia dan menjadi motor penggerak negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia telah menjadi perlintasan strategis, sehingga kesadaran akan pemahaman geopolitik dan geomaritim harus terus ditingkatkan. Berbagai modal tersebut menjadi nilai tawar Indonesia dalam melakukan diplomasi di berbagai sektor baik keamanan, perikanan dan kelautan yang menguntungkan dengan negara-negara ASEAN.

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang mumpuni harus terus menjadi perhatian negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan *sea power* atau *maritime power* di masa depan. Saatnya angkatan laut tidak hanya terfokus kepada *Maritime Instrument*, *Maritime Capability* dan *Maritime Technology* belaka, namun saat bicara *time capacity* untuk era *supply chain* dan era *connectivity*, tiga hal yaitu *maritime*, *digital* dan *space* harus terintegrasi. Mengutip pernyataan Presiden Jokowi berkaitan dengan reformasi TNI untuk menguatkan pertahanan di Indonesia yaitu *Military Reform*, *Defense Modernization*, *Defense Transformation*, dan *Indonesia Defense Power*. Sehingga Indonesia dengan perencanaan jangka panjang mampu mengimbangi bahkan melampaui Tiongkok demi tercapainya kekuatan regional nantinya.*

Referensi

- <https://dunia.tempo.co/amp/1662358/laut-cina-selatan-rawan-konflik-retno-marsudi-butuh-paradigma-damai> (diunduh 5 Desember 2022).
- Babb, Carla (2022). "China Lipatgandakan Hulu Ledak Nuklir dalam 2 Tahun" VOA Indonesia, 2 Desember 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/china-lipatgandakan-hulu-ledak-nuklir-dalam-2-tahun/6858315.html> (diunduh 4 Desember 2022).
- Dhf (2022). "Malaysia Dorong Indonesia Pimpin ASEAN Jaga Laut China Selatan" CNN Indonesia, 2 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220702011743-106-816321/malaysia-dorong-indonesia-pimpin-asean-jaga-laut-china-selatan> (diunduh 4 Desember 2022)
- Rabbani, Rafly Syauqi (2022) Efektivitas ASEAN Way dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan "25 Oktober 2022, https://kumparan.com/rafly-syauqi-rabbani/1z7LOYTKxD3?shareID=d6xdmxZsrSkB&utm_source=App&utm_medium=wa (diunduh 5 Desember 2022).
- Saputra, Andi (2022) "Pengamat Minta RI Waspada Dampak Modernisasi Armada Militer China" 25 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6425908/pengamat-minta-ri-waspada-dampak-modernisasi-armada-militer-china> (diunduh 4 Desember 2022)

IQBAL SULIANSYAH lahir di Lhokseumawe, 21 Maret 1987, anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikannya diselesaikan di Jurusan Teknik Mesin Universitas Malikussaleh, Aceh. Ia adalah founder Lolipop Suka Community dan aktif di Rumah Produktif Indonesia. Iqbal pernah aktif sebagai *broadcaster* dan *reporter* selama 9 tahun di Radio Republik Indonesia. Ia aktif menulis berbagai isu pertahanan dan keamanan di media nasional. Ia adalah alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Angkatan I Lemhannas tahun 2022 yang aktif pada kegiatan amal SERBU (Sebar Nasi Bungkus) di kota Langsa, Provinsi Aceh. Ia dapat dihubungi di email: iqbalsuliansyah@gmail.com.

ASEAN, China dan Konflik Perbatasan di Laut China Selatan

Muhammad Ibrahim Hamdani

Asia Tenggara berpotensi konflik yang cukup besar. Salah satu faktornya adalah konflik perbatasan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan China dengan sejumlah negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Negara Brunei Darussalam, Republik Sosialis Vietnam, dan Republik Filipina. Faktor pemicu konflik lainnya adalah fakta riil tentang terlibat aktifnya sejumlah negara anggota ASEAN dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)¹⁵.

Klaim sepihak Tiongkok terhadap 90 persen wilayah LCS, khususnya melalui *nine dash line* (sembilan garis putus-putus), telah menyebabkan Indonesia menggunakan istilah Laut Natuna Utara¹⁶. Klaim Tiongkok terhadap *nine dash line* di kawasan LCS juga menyebabkan Filipina mengganti nama LCS di wilayah ZEE-nya menjadi Laut Filipina Barat atau *Karagatang Kanlurang Pilipinas* (WPS)¹⁷. Masalah utamanya, klaim *nine dash line* ini bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982)¹⁸.

Lebih lanjut, Kepulauan Spratly (atau Kepulauan Nansha) di kawasan LCS telah menjadi salah satu sumber sengketa kedaulatan dan konflik perbatasan antar negara ASEAN, bahkan menjadi klaim teritorial sepihak oleh Tiongkok dan Taiwan. Berdasarkan peta yang diterbitkan oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) pada 1 Januari 1995, 'pendudukan' terhadap pulau-pulau karang dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Malaysia menduduki sejumlah karang atau *reef* di Kepulauan Spratly seperti *Louisa Reef* (Karang Louisa), Karang Swallow, Karang Dallas, Karang Ardasier, Karang Mariveles, Karang Erica, dan *Investigator Shoal* (Beting Penyidik). Vietnam menduduki sejumlah pulau, beting dan karang di Kepulauan Spratly, yakni *Vanguard Bank* (Bank Pelopor), Bank Grainger, *Prince Consort Bank* (Bank Permaisuri Pangeran), Beting Oriena, *Amboyna Cay*, Karang Barque Canada, Karang Ladd, Beting Kingston, Pulau Spratly, Karang Barat, Karang Tengah, Karang Timur, Karang Pearson, Karang Alison, Karang Cornwallis Selatan, Karang Merpati, Karang Collins (*Johnson Reef North*), Pulau Sin Cawe, Karang Lansdowne, Karang-Karang Johnson, Pulau Sin Cowe Timur, Karang Petley, Karang Eldad, Karang Subi, Karang Selatan,

- 15 Amerika Serikat telah memberikan status *Major non-NATO ally* (MNNA) atau Sekutu non-NATO Besar terhadap Kerajaan Thailand dan Republik Filipina pada 2003. Jadi keterlibatan Filipina dalam konflik perbatasan di LCS dapat memicu peran aktif AS di kawasan LCS. Alasannya ialah untuk mendukung dan melindungi kedaulatan Filipina di kawasan LCS, sebagai sekutu non-NATO Besar. Dalam konteks ini, peran dan fungsi Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 tentu menghadapi tantangan besar dalam memelihara perdamaian regional dan global di kawasan LCS.
- 16 Laut Natuna Utara merupakan perairan dangkal di sebelah utara Kabupaten Natuna, yang terletak di antara Kepulauan Natuna, Laut Natuna, dan Tanjung Ca Mau di sebelah selatan Delta Mekong di Vietnam (Allard, Tom dan Bernadette Christina Munthe, *Reuters*, 14 Juli 2017). Sejak Juli 2027, Indonesia mengganti nama wilayah utara ZEE Indonesia di LCS menjadi Laut Natuna Utara akibat klaim sepihak RRC melalui *nine dash line* yang meliputi wilayah utara ZEE Indonesia di LCS (*The Maritime Executive*, 16 Juli 2017). Pergantian nama ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- 17 Laut Filipina Barat terletak di belahan timur LCS yang meliputi kawasan ZEE Filipina. Pergantian nama ini terjadi pada awal 2011 di masa pemerintahan Presiden Republik Filipina, Benigno Aquino III (*Agence France-Presse* (AFP) di Manila, *South China Morning Post*, 12 September 2012).
- 18 UNCLOS 1982 telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan UNCLOS 1982, sebagai Negara Kepulauan, Filipina dan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi kekayaan alam, termasuk cadangan energi, yang berada di dalam ZEE sejauh 200 mil dari batas teritorial negara.

Pulau Namyit, Cay Barat Daya (*Southwest Cay*), dan Karang Penemuan Besar (*Discovery Great Reef*). Filipina menduduki Karang Commodore, Karang Thomas Kedua, Pulau Nanshan, Pulau Datar (Flat Island), Pulau York Barat, Karang Irving, Bank Loaita, *Lankiam Cay*, Loaita Nan, Karang-Karang Thitu, Pulau Thitu, Cay Selatan (*Northeast Cay*), *Sandy Cay* dan *Mischief Reef*. Sedangkan Tiongkok menduduki Karang Cuarteron, Karang Johnson Selatan, Karang Salib Berapi (*Fieri Cross Reef*), Karang Chigua, Karang Subi, dan Karang Gaven di Kepulauan Spratly. Adapun Taiwan telah menduduki Pulau Itu Aba dan Bank Tizard.”

Klaim kedaulatan wilayah dan perbatasan teritorial serta ZEE yang saling tumpang tindih di Kepulauan Spratly, baik di antara sesama negara ASEAN maupun oleh Tiongkok dan Taiwan, menyebabkan pentingnya negara-negara yang bersengketa di LCS untuk mengedepankan paradigma damai. Itu sebabnya Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN telah memulai proses negosiasi kerangka *Code of Conduct* (CoC) (atau kode etik) untuk menyelesaikan permasalahan di LCS secara damai dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 menjadi sangat penting untuk menyinergikan sikap bersama ASEAN terhadap konflik perbatasan dan kedaulatan wilayah di LCS. Misalnya terkait sikap bersama ASEAN untuk menolak gagasan *nine dash line*, penghormatan setiap negara terhadap UNCLOS 1982, serta penyelesaian kerangka CoC dalam permasalahan LCS.

Terkait proses penyelesaian permasalahan LCS secara damai, 10 negara ASEAN dan Tiongkok telah menyepakati pembacaan pertama (*first reading*) tentang isi CoC LCS pada Rabu, 24 Juli 2019, di Penang, Malaysia¹⁹. Dua tahun sebelumnya—tepatnya pada Jumat, 9 Mei 2017—10 negara ASEAN dan RRC juga menyepakati Kerangka Kode Etik tentang Sengketa LCS dalam pertemuan di Kota Guiyang, Provinsi Guizhou, Tiongkok. Salah satu poin penting dalam Kerangka Kode Etik ini ialah “Semua pihak menjunjung tinggi penerapan Kerangka CoC dalam aturan masing-masing negara untuk mengendalikan perselisihan dan memperdalam kerja sama maritim praktis.” Poin penting berikutnya ialah: “Semua pihak terkait sepakat mempromosikan konsultasi mengenai Kode Etik dan bersama-sama menjaga perdamaian serta stabilitas LCS.” Informasi ini dibenarkan oleh Kemenlu Tiongkok (Riva Dessthanian Suastha, *CNN Indonesia*, Jumat, 19 Mei 2017).

Namun eskalasi konflik antar negara, saling klaim wilayah teritorial, ZEE dan sengketa kedaulatan antar negara-negara ASEAN dengan Tiongkok dan Taiwan di kawasan LCS justru semakin meningkat. Itu sebabnya pada Rabu, 24 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, meminta agar seluruh negara anggota ASEAN untuk solid dan kompak dalam menolak klaim sepihak Tiongkok soal *nine dash line* tersebut. Menurutnya, ASEAN juga harus solid dalam mematuhi dan menghormati UNCLOS 1982 sebagai acuan hukum internasional dalam menyikapi konflik di LCS, termasuk mekanisme yang diatur dalam *Permanent Court of Arbitration* (PCA) atau Mahkamah Arbitrase Antarbangsa. Menlu Retno berkata:

“Mengenai *nine dash line*, Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN penting untuk menunjukkan soliditas mengenai penghormatan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, termasuk lagi mekanisme yang diatur di dalam PCA.” (Rakhmat Nur Hakim, *Kompas*, Rabu, 24 Juni 2020).

Sikap tegas Indonesia dalam menolak klaim *nine dash line*, bahkan dengan mendaftarkan Laut Natuna Utara ke PBB, akan tetapi tidak menghilangkan paradigma damai Indonesia di kawasan LCS. Paradigma Damai merupakan pengejawantahan dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Terkait hal ini, Menlu menyatakan bahwa ASEAN selalu bertujuan menyelesaikan sengketa kedaulatan dan saling tumpang-tindih klaim wilayah antar negara dengan cara damai, tanpa konfrontasi militer, termasuk di kawasan LCS. Karena itu, ketegangan geopolitik yang meningkat di ranah maritim seperti di kawasan LCS, dapat membuat penegakan aturan-aturan tentang UNCLOS menjadi lebih menantang. Menurut Menlu Retno saat menjadi narasumber dalam Konferensi ASEAN Mengenai 40 Tahun UNCLOS:

19 Informasi ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu saat itu, Jose Antonio Morato Tavares. Menurutnya, kesepakatan ini merupakan kemajuan signifikan terkait penyelesaian Kode Etik LCS karena telah dibahas selama hampir dua dekade lamanya oleh 10 negara ASEAN dan China (*CNN Indonesia*, Jumat, 26 Juli 2019).

“UNCLOS adalah alat kunci untuk mencapai tujuan ini. Namun, penerapannya yang efektif membutuhkan paradigma yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai,” ujarnya pada” (Daniel Ahmad, *Tempo*, Selasa, 29 November 2022).

Menlu Retno juga menggaungkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa laut harus dilihat sebagai faktor yang mempersatukan, bukan memecah-belah. Dalam konteks LCS, maksud Presiden Jokowi ialah mempersatukan negara-negara ASEAN dalam menolak klaim *nine dash line* Tiongkok, sekaligus memelihara kekompakan dan soliditas ASEAN untuk mengedepankan paradigma damai dalam menyelesaikan konflik di kawasan LCS. Konsepsi Presiden Indonesia ini menjadi semakin penting dengan fakta riil mengenai hadirnya sejumlah kapal perang milik pemerintah AS di kawasan LCS.

Pada Selasa, 29 November 2022, Tentara Pembebasan Rakyat (*People’s Liberation Army/ PLA*) RRC telah mengusir sebuah kapal perang²⁰ milik Angkatan Laut AS (*United States US Navy*), yakni *United States Steamship* (USS) *Chancellors Ville*, dari perairan di dekat Kepulauan Spratly. Sebelumnya pada Rabu, 13 Juli 2022, Angkatan Laut PLA RRC telah mengusir kapal perang jenis penghancur (*destroyer*) milik *US Navy* yang bernama USS *Benfold*. Tepatnya ketika kapal perang USS *Benfold* berlayar di dekat Kepulauan Paracel²¹.

Kehadiran kapal perang AS di kawasan LCS versus klaim *nine dash line* Tiongkok ini tentu semakin meningkatkan eskalasi konflik di kawasan LCS. Karena itu, negara-negara ASEAN harus bersatu padu dan solid dalam memelihara stabilitas perdamaian di kawasan LCS sehingga tidak terjadi konfrontasi militer dan konflik terbuka antara AS versus Tiongkok. Apalagi kehadiran militer AS di kawasan LCS bertujuan untuk melindungi negara sekutu seperti Filipina. Dalam konteks ini, kepemimpinan Indonesia—sebagai Ketua ASEAN 2023—sangat diuji oleh situasi riil di Laut China Selatan.*

MUHAMMAD IBRAHIM HAMDANI adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rumah Produktif Indonesia. Ia juga aktif sebagai Peneliti dan Bendahara Center for Strategic Policy Studies Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (CSPS SKSG UI), Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute) dan host Program ‘Khazanah Timur Tengah’ di Tawaf TV.

20 Kapal ini merupakan jenis kapal jelajah rudal. “Tindakan militer AS secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan China,” tegas Juru Bicara Komando Zona Selatan pada PLA RRC, Tian Junli, seperti dikutip dari *Associated Press* (AP) (Novi Christiastuti, *Detik*, 29 November 2022).

21 Menurut Komando Pangkalan Selatan PLA RRC, kapal perang AS itu telah memasuki perairan RRC secara ilegal dan dengan sengaja memprovokasi ketegangan di kawasan LCS. Tindakan kapal perang AS sangat melanggar kedaulatan keamanan Tiongkok. Namun pernyataan berbeda diungkapkan oleh *US Navy* bahwa China telah keliru dalam menggambarkan operasi maritim AS yang sah, bahkan menganggap klaim maritim Tiongkok berlebihan. “Klaim maritim Tiongkok tidak sah karena mengorbankan tetangganya di Asia Tenggara, di LCS,” ujar *US Navy*. Menurut *US Navy*, AS telah secara teratur melakukan Operasi Kebebasan Navigasi di LCS. Mereka menyatakan bahwa hak dan kebebasan navigasi di LCS dekat Pulau Paracel konsisten dengan hukum internasional (*CNN Indonesia*, Rabu, 13 Juli 2022).

Pentingnya Penerapan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Batas Negara

Siti Dwi Arini Putrianti

Ada dua pertanyaan menarik: Benarkah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara telah menjadi tuntunan wajib bagi masyarakat Indonesia? Bagaimana dengan warga Indonesia yang tinggal di batas negara? Lihatlah bagaimana peranan penerapan 4 pilar tersebut di daerah-daerah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sebut saja Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, provinsi yang baru saja dimekarkan.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipahami secara benar oleh seluruh warga Indonesia. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Lantas bagaimana kita bisa menilai bahwa 4 pilar ini benar-benar telah diamalkan oleh seluruh warga?

Untuk melihat penerapannya, mari kita simak satu persatu pilar tersebut. Pilar pertama yaitu Pancasila. Kita tentu ingat kapan kita pertama kali mendengar Pancasila dikumandangkan, yaitu saat upacara bendera setiap senin yang wajib kita laksanakan saat di bangku sekolah dasar. Dan *ceremony* itu terus berlanjut hingga ke sekolah menengah atas. Saya pernah menghadiri satu seminar yang membahas tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pembicara anggota DPR RI ibu Dra. Hj. Oelfah A. Syahrullah Harmanto dan dipandu oleh Amalia Yaksa Parijata, M.Si.

Sang pemandu acara berceles bahwa ia memiliki teman berkebangsaan Jerman yang mengatakan, "*Pancasila is the great idea where he ever found*", karena Pancasila memiliki makna yang sangat dalam. Bahkan, dalam mencari jodoh seseorang bisa menjadikan Pancasila sebagai salah satu syarat, sebab jika seseorang mengamalkan nilai dari kelima sila di Pancasila, maka ia akan menjadi pasangan yang bertuhan, toleran, adil, dan bijaksana; dan tentu saja akan mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi.

Lantas bagaimana pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, tentu bukan hanya sebagai pajangan saja di kelas. Tetapi benar-benar mampu dimaknai oleh siswa-siswa. Sama halnya dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 juga kali pertama kita dengar saat di upacara bendera. Satu kalimat yang saya ingat dari kutipan UUD 1945 yaitu setiap kita warga negara memiliki kewajiban untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peranan saya sebagai pendidik tentu sangat relevan.

Adapun pilar ketiga adalah NKRI. Kalimat yang tertulis di salah satu tugu yang menjadi simbol perbatasan yang ada di daerah Sebatik yaitu NKRI adalah harga mati. Jika hal ini disadari betul makna oleh seluruh warga maka sampai kapanpun akan terus berupaya menjaga keutuhan Indonesia.

Apakah NKRI benar-benar bisa dijaga keutuhannya? Bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan seperti di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Saat melihat berita di salah satu siaran televisi tentang rumah salah satu warga yang berada di dua negara dimana ruang tamunya Indonesia sedangkan dapurinya sudah masuk Malaysia saya tidak percaya. Tetapi setelah melihat langsung rumahnya, saya takjub dan bertanya-tanya tentang status kewarganegaraan sang empunya rumah. Ternyata setelah ditelusuri, pemilik rumah tersebut masih warga negara Indonesia.

Masih berkaitan dengan NKRI, di Pulau Sebatik ini khususnya tempat saya tinggal di Kecamatan Sebatik Tengah, kebanyakan masyarakatnya bekerja di Tawau, Malaysia sebagai buruh di pabrik kelapa sawit. Sungguh miris sekali. Tidak hanya sumber daya alam kita yang dikeruk, tetapi juga sumber daya manusia kita diberdayakan. Pilar keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pilar ini tidak hanya bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua tetapi nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar mampu direalisasikan warga negara dengan baik.

Di daerah Nunukan yang notabeneanya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat Indonesia di luar Pulau Kalimantan. Di Pulau Sebatik saja akan banyak kita temui warga yang berasal dari suku Jawa, suku Bugis- Makassar. Tentunya penerapan nilai pilar keempat Bhinneka Tunggal Ika sangat penting. Agar warga Indonesia benar-benar membuka pergaulan pada hal-hal di luar adat kebiasaan warganya. Bukankah perbedaan itu indah? Pelangi saja jika tidak beragam warna tentu tidak akan indah dipandang. Begitu pulal dengan Indonesia yang beragam.

Perhatian Pemerintah

Pemerintah harusnya lebih *concern* terhadap daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga—tidak hanya mengenai status kewarganegaraan tetapi juga bidang ekonomi yang sekiranya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bukan cerita baru lagi jika banyak warga Indonesia yang dulunya tinggal di daerah Indonesia tetapi karena merasakan penghidupan yang layak di Malaysia, mereka lebih memilih untuk pindah kewarganegaraan tidak hanya soal pekerjaan di negara tetangga tetapi juga soal *prestige* mereka hidup di luar negeri.

Jika kita memasuki kawasan Pulau Sebatik, terkhusus Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan, akan banyak kita jumpai perahu *speed boat* yang mengangkut hasil bumi seperti kelapa sawit dan pisang yang semuanya akan dijual di Malaysia untuk mereka olah di pabrik-pabrik milik Malaysia. Terparahnya lagi, buruh-buruh yang bekerja di pabrik tersebut adalah orang-orang Indonesia. Hal ini tentu sangat menyayat hati sebagai warga Indonesia.

Benarkah pemerintah tidak memberi ruang untuk masyarakat mengelola hasil pertanian yang dimiliki warga? Pernahkah pemerintah memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan hasil pertanian agar bernilai jual tinggi. Dari beberapa warga yang pernah saya temui, kebanyakan dari mereka beralasan pabrik menjual hasil pertaniannya ke Malaysia dikarenakan di daerah setempat dalam hal ini Pulau Sebatik tidak memiliki pabrik yang mumpuni hanya untuk sekadar mengolah kelapa sawit. Tidak hanya itu, alasan warga juga sumber daya manusia dengan sistem yang ada membuat mereka tidak tahu bagaimana mengolah hasil bumi tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

Lantas sampai kapan hal ini akan terjadi. Jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah, bisa jadi beberapa tahun ke depan warga negara kita akan dijajah tidak hanya fisik mereka tetapi harta yang mereka punya akan dirampas dan dibayar dengan harga yang sangat murah. Pulau Kalimantan—kawaasan ‘surga kelapa sawit’—akan tetapi warganya tidak sejahtera, bahkan terkesan terjajah. Tidak hanya masalah mata uang yang bukan lagi rupiah, tetapi juga produk makanan dan kebutuhan sehari-hari—yang bukan lagi dari Indonesia. Jika sudah menyangkut perut, masihkah penting bagi mereka status kewarganegaraan Indonesia? Masihkah mereka peduli pada “NKRI harga mati” atau bahkan mereka bisa jadi lupa. *

SITI DWI ARINI PUTRIANTI adalah alumnus pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar. Semasa kuliah aktif di ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). setelah wisuda dari kampus Unismuh Makassar tahun 2013, Ia mengikuti program Sekolah Guru Indonesia (SGI) Dompot Dhuafa. Ia lalu ditugaskan mengajar di daerah perbatasan yaitu Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Selama setahun, ia mengajar di SDN 006 Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.

Dasasila Bandung 1955: Multilateralisme dan Pilar Kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN

Roslan Samad

Perjalanan Konflik dan Perdamaian di Asia

Pada 8 Agustus 1967, lima pemimpin menteri luar negeri—Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand—bertemu, di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand dan menandatangani berdirinya ASEAN. Lima menteri luar negeri tersebut: Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Mereka selanjutnya dianggap sebagai ‘bapak pendiri’ dari organisasi antar pemerintah paling sukses di dunia berkembang saat ini.

Dokumen ASEAN tersebut adalah dokumen singkat dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi lima artikel: mendeklarasikan pembentukan ASEAN dan menjabarkan maksud dan tujuan terkait kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan lainnya. Selain itu, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supermasi hukum dan ketaatan pada prinsip Piagam PBB.

Indonesia—yang terlibat dalam pembentukan ASEAN—memiliki dua fase dalam perumusan geopolitik, saat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika mengalami masa-masa sulit menghadapi krisis situasi ekonomi politik global kala itu (1945-1950-an). Rumusan geopolitik yang pertama, saat Indonesia harus berperan dalam dipolmasi antara pihak sekutu AS dan Inggris versus Jepang, atas pentingnya diberikan hak dan ketentuan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk bebas dari campur tangan oleh pihak manapun dalam menentukan jalannya sebuah negara yang merdeka.

Atas prakarsa inilah, dapat dimaklumi oleh pihak sekutu dan Jepang atas pernyataan mengenai perlunya diberikan hak bagi Indonesia untuk merdeka, dan akhirnya dapat diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Rumusan geopolitik fase pertama ini, terletak pada ketepatan dalam memainkan kebijakan politik luar negeri di dalam orbit negara-negara yang menduduki secara penuh atas teritorial wilayah Indonesia, serta turut pula melakukan hubungan kerja sama yang cenderung tidak berpihak pada ketentuan hak dan demokrasi sebuah bangsa. Dengan begitu peran Indonesia dapat di dukung oleh negara-negara sekutu dan juga penghormatan atas upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang. Pada fase kedua, Indonesia kembali merumuskan kebijakan geopolitik, yang kita kenal dengan Dasasila Bandung melalui KTT antara Asia dan Afrika pada tahun 1955.

Konflik dan Pergeseran Geopolitik ke Kawasan Asia

Pada awal abad ke-21, konflik dan pergeseran geopolitik ke kawasan Asia telah—setelah ketegangan di Timur Tengah—mulailah bergeser ke Asia. Padahal jika dilihat secara gambaran umum, konflik di Timur Tengah hampir mirip dengan fase peristiwa Asia dan Afrika saat itu, namun yang membedakannya hanya pada orientasi konfliknya, yakni benturan Sunni dan Syiah, radikalisme, dan kudeta rezim. Sebenarnya, ada kesempatan dan peluang besar dalam retorika diplomasi serta bagaimana memainkan peran geopolitik untuk perdamaian kawasan, tapi upaya tersebut belum sampai pada kekompakan dan solidaritas oleh negara-negara Teluk yang ada di Timur Tengah.

Perdagangan bebas dan juga risiko pergeseran geopolitik dapat dipastikan mengancam kedaulatan dan keamanan negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara, jika tidak secepat mungkin mengambil peran dalam kerja sama multilateralisme berbasis kawasan. Adapun hal-hal yang bisa dilihat sebagai latar belakang yang mengitari atas mekanisme proteksionisme adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya teknologi baru yang digunakan oleh kalangan sipil maupun militer.
2. Intensifnya problem geopolitik kawasan yang semakin meningkat pada level konfrontatif.

3. Proyeksi lembaga-lembaga kreditur keuangan yang tidak kompatibel dengan mekanisme hubungan investasi perbankan internasional.
4. Meningkatnya pelanggaran hak-hak sipil dalam penggunaan teknologi yang tidak sepadan dengan ketentuan penggunaannya, baik dari segi transaksi perdagangan maupun hubungan informasi dan sosial.

Asia kelak akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan sekarang. China akan menjadi negara dengan perekonomian besar di dunia bila dilihat dari paritas daya beli (PPP, *purchasing power parity*). Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan: pada 2020, Asia akan menyumbang 43% perekonomian dunia, naik dari 35% pada 2005 (*Economist Intelligence Unit, Foresight 2020: Economist, Industry, and Corporate Trends, 2006*). Kawasan ini tidak akan lebih penting atau lebih kaya daripada barat, tetapi pasti lebih penting daripada sekarang yang sedang terjadi saat ini adalah suatu penyeimbangan kembali, bukan revolusi. Penduduk Asia akan 400 juta lebih banyak dari pada sekarang. India akan nyaris menjadi negara terpadat di dunia dan Mumbay akan menjadi kota terpadat di dunia. Perekonomian Vietnam akan seperti perekonomian Guangdong. Korea Utara dan Selatan mungkin akan menyatu kembali.

Asia akan menjadi rumah bagi separuh reaktor nuklir dunia. China akan menjadi negara dengan penutur bahasa Inggris terbanyak di dunia. Di China, penggunaan bahasa Mandarin akan membengkak setidaknya 50%. China akan memiliki angkatan laut yang kuat serta menjadi pengeksport utama persenjataan canggih. Seratus juta wisatawan China akan mengalir keluar dari China setiap tahun. Perusahaan-perusahaan multinasional India berskala besar akan merambah perekonomian dunia lebih dari sekarang yang mereka lakukan. Afrika akan porak-poranda oleh ketegangan etnis, tapi kali ini antara rakyat Afrika dan para migran China, bukan India (Michael Backman, 2008).

Prediksi di atas akan menjadi suatu pekerjaan dalam rumah ASEAN sejak kini untuk masa depan. Negara-negara ASEAN dapat memperhitungkannya sebagai suatu *entry point* dalam ruang lingkup jalur perdagangan antara Asia dan Eropa maupun AS. Negara-negara Asia Tenggara masih memiliki ketergantungan yang mendua, dengan membawa China dan AS dalam roda hubungan perdagangan regional maupun bilateral, dan itu merupakan WTO dan OBOR untuk mendorong iklim ekonomi saling menguntungkan. Keharusan bagi ASEAN adalah sudah saatnya membawa semua kepentingan manapun ke dalam orbit ASEAN.

Satu hal yang jelas: nilai perdagangan China dengan ASEAN meningkat dari USD 54,8 miliar pada 2002 menjadi 443,6 miliar pada 2013 atau dalam jangka waktu 10 tahun mereka mampu menaikkan delapan kali lipat. Sementara pada periode yang sama, nilai investasi China di kawasan tersebut meningkat sebesar 100 miliar. Perkiraan nilai investasi dan perdagangan China niscaya akan terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan beroperasinya *free trade agreement* di ASEAN dan di berbagai kawasan lain dalam payung *World Trade Organization*-WTO (M. Arif Pranoto & Hendrajit, 2016).

Problem kawasan di Asia (maupun Asia Tenggara), jika belum dapat dicari resolusi terbaiknya, maka bisa saja akan seperti negara-negara Timur Tengah yang dihantam Arab Spring. Pada penghujung 2010 hingga 2011, Afrika dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan *jasmine revolution* atau revolusi melati²², suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang harus meninggalkan jabatannya dan melarikan diri, yakni mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan mantan Presiden Mesir Husni Mubarak.

Paradigma geopolitik seolah-olah memandang Asia sebagai medan rekonsiliasi diplomasi ekonomi menuju masa depan multilateralisme, di tengah-tengah konflik militer Rusia-Ukraina, konflik perdagangan AS-Tiongkok, Konflik Laut China Selatan, dan Krisis di Selat Taiwan dan bencana Covid-19. Kendatipun, dikatakan inilah abad Asia, sepatutnya hal-hal yang harus dipenuhi seiring dengan berjalannya kerja sama transnasional, agar dapat mengurangi risiko dan bencana di masa depan oleh negara-negara ASEAN.

22 Bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum, dan simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan kasih sayang. Negara-negara yang bergolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah “tangkal” berada satu di Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu persatu kuncup itu mulai bermekaran mengeluarkan “baunya yang harum” yaitu peristiwa terjadinya revolusi (Apriadi Tamburaka, 2011), dan itu selaras dengan konflik yang bermula di kawasan Asia hari ini.

Dasasila Bandung 1955: Multilateralisme dan Masa Depan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah dan muncul masalah baru. Penajajahan yang dialami oleh negara-negara di Asia Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Walaupun sejak tahun 1945 banyak negara, terutama Asia, kemudian memperoleh kemerdekaannya²³, namun masih banyak negara lain yang berjuang bagi kemerdekaannya seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Kongo, dan wilayah Afrika lainya. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak menghadapi masalah sisa penjajahan seperti daerah Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Selain itu konflik antar kelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecamuk akibat politik *divide et Impera*.

Lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (kapitalis) dan Blok Timur yang dipimpin Uni-Soviet (komunis), semakin memanaskan situasi dunia. Perang Dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka, seperti Jazirah Korea dan Indo-China. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Hal tersebut menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya Perang Dunia. Walaupun pada masa itu telah ada badan Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi menangani masalah dunia, namun pada kenyataannya badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut, sementara akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar di derita oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Pada awal tahun 1954, perdana Menteri Ceylon, Sir Kotelawala, mengundang para perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia Soekarno, menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo, untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia-Afrika pada pertemuan Kolombo tersebut. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Adapun konsensus itu dituangkan dalam komite akhir, yang isinya adalah mengenai :

1. Kerja sama ekonomi
2. Kerja sama kebudayaan
3. Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri
4. Masalah rakyat jajahan
5. Masalah-masalah lain
6. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Deklarasi yang tercantum pada komite tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung²⁴, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Dasasila Bandung yang dilaksanakan pada tahun 1955, merupakan rumusan *blue print* geopolitik fase kedua bagi Indonesia

23 Misalnya kemerdekaan negara-negara sebagai berikut: Indonesia (17 Agustus 1945), Republik Demokrasi Vietnam (2 Desember 1945), Filipina (4 Juli 1946), Pakistan (14 Agustus 1947), India (15 Agustus 1947), Birma (4 Januari 1948), Ceylon (4 Februari 1948), dan Republik Rakyat Tiongkok (1 Oktober 1949)

24 Isi Dasasila Bandung adalah sebagai berikut: (1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), (2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, (3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil, (4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam masalah dalam negeri negara lain, (5) Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB, (6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain, (7) Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara, (8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan

setelah fase kemerdekaan Agustus 1945. Dari *blueprint* geopolitik tersebut, Indonesia sampai hari ini belum secara terang-terangan kembali memberikan warisan geopolitik setelah 1955, disebabkan situasi politik internasional yang belum secara keseluruhan diskemakan oleh Indonesia dan juga negara-negara Asia maupun Afrika untuk menyelaraskan komitmen Non Blok dalam pengertian perdamaian multilateral.

Geopolitik Perdamaian

Semangat KAA Bandung 1955, Indonesia memainkan peran penting kepeloporan dalam meredakan persaingan global yang semakin meruncing antara AS, China dan Rusia, di kawasan ini. Sehingga situasi perang dingin jilid 2 yang melanda berbagai kawasan saat ini, tidak akan memicu perang terbuka di antara negara-negara adikuasa tersebut—seperti pergolakan yang semakin memanas di Semenanjung Korea maupun Laut China Selatan.

Apalagi dengan pembatalan sepihak perjanjian senjata nuklir jarak menengah (INF) antara AS dan Rusia yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada 2019 lalu, bisa memicu eskalasi konflik, poliferasi dan perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia-Pasifik bakal semakin menajam (*Theglobal-review*, 2020). Meskipun forum KAA luar dari pada urusan ASEAN, namun keterpihakan perdamaian oleh negara-negara anggota tetap menjadi sumber utama. Maka sarana-sarana dalam orientasi Dasasila Bandung masih dapat di jadikan untuk *output* dalam membangun kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pada bulan April 2022, PBB membentuk Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Finance. Kelompok ini melacak tiga krisis utama yaitu inflasi pangan, inflasi bahan bakar, dan kesulitan keuangan. Pengarahan kedua mereka, dirilis pada 8 Juni 2022, mencatat bahwa, setelah dua tahun pandemi Covid-19: ekonomi dunia dibiarkan dalam keadaan rapuh. Saat ini, 60 persen pekerja memiliki pendapatan yang riil yang lebih rendah daripada sebelum pandemi; 60 persen dari negara-negara termiskin berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi; negara berkembang kehilangan \$1,2 triliun per tahun untuk mengisi kesenjangan perlindungan sosial; dan \$4,3 triliun dibutuhkan per-tahun-lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—SDGs (*thetricontinental.org*, 2022).

Multilateralisme—yang bangkit beriringan dengan dunia pasca Covid-19—menunjukkan bahwa dunia telah bermusyawarah terkait perlunya forum global baru yang terlepas dari G20. Sebuah multilateralisme yang membentuk jalan baru bagi semua forum regional yang bebas tanpa ada ancaman apapun. Dasasila Bandung dapat dijadikan sebagai resolusi untuk menyumbangkan gagasan-gagasan geopolitik kawasan regional. Dasasila Bandung yang hakikatnya adalah tujuan awal multilateralisme, tetapi belum seutuhnya terimplementasi. Untuk itu dengan menjemput agenda ASEAN selanjutnya, tentunya Dasasila Bandung masih relevan.*

Referensi

About asean the founding of asean. <https://asean.org/> (diakses pada 8 Desember 2022).

Backman Michael (2008). *Asia Future Shock: Gejolak, Peluang, Kegoncangan, Ancaman Masa Depan Asia*. Jakarta: Ufuk Press.

Hendrajit & M. Arif Pranoto (2016). *Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru*. Jakarta: Global Future Institut.

KAA dan Dasasila Bandung 1955 Sebagai Senjata Geopolitik Masih Relevan. <https://www.theglobal-review.com/2020/07/03> (diakses pada 8 Desember 2022)

Museum Konperensi Asia-Afrika, *Sejarah Konferensi Asia Afrika-Kondisi Dunia Internasional Sebelum Konferensi Asia Afrika*. <https://www.asiaafrcmuseum.org> (diakses pada 8 Desember 2022).

News letter issue global ekonomi crisis. <https://thetricontinental.org/2022/06/23> (diakses pada 8 Desember 2022).

Tamburaka, Apriadi (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, Yogyakarta: Narasi.

pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB, (9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama dan (10) Menghormati hukum dan berbagai kewajiban internasional.

ROSLAN SAMAD adalah mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ia merupakan pegiat geopolitik global dari sejak 2015-sekarang. Ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak 2015 dan saat ini menjadi Pengurus Koordinator Wilayah Cabang-PKC di Bidang Kemaritiman dan Pembangunan Ekonomi Kepulauan. Ia juga aktif pada *Geostrategi Study Club* di Bandung (sejak 2019) dan terlibat dalam diskusi strategis Lab45 yang diagendakan Lemhannas. Roslan juga aktif dalam pembahasan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia dan kawasan IKN dalam Forum ALKI-II. Saat ini, ia aktif menulis seri kajian geopolitik terkait 'Asia pasifik dan Jalur Sutra Abad ke-21'.

BAB 3

**Peran Strategis Diplomasi Indonesia:
Pertumbuhan Nasional dan Jembatan Kemajuan
ASEAN**

Diplomasi Perjuangan dan ASEAN dalam Politik Luar Negeri Orde Baru

Ryantori

Diplomasi Perjuangan

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia (PLNI) pada masa Orde Baru diawali dengan tahap penyelamatan akibat dampak negatif pelaksanaan politik luar negeri pada masa orde lama. Tahap penyelamatan tersebut berlangsung selama enam bulan pertama yaitu dalam kurun waktu Juli-Desember 1966. Di dalam tahap penyelamatan tersebut terdapat dua unsur pokok di dalam pelaksanaannya, yaitu unsur pendobrakan terhadap keadaan terisolasi dari pergaulan dunia akibat pelaksanaan PLNI masa Orde Lama yang bersifat 'poros-porosan' dan unsur eksplorasi dan persiapan ke arah normalisasi hubungan dengan dunia luar.

Untuk dapat menjalankan hal tersebut dengan baik maka diperlukan sebuah bentuk diplomasi yang tangguh. Soeharto, selaku presiden RI ketika itu, mencanangkan sebuah gagasan mengenai perlunya diplomasi perjuangan— yaitu suatu gaya diplomasi yang dibekali keteguhan prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap dan gigih dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan—pada rapat kerja yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri pada bulan Maret 1977.

Diplomasi perjuangan adalah keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan aspirasi, cita-cita, dan kepentingan nasional. Diplomasi perjuangan mengharuskan para diplomat agar tidak hanya mengikatkan diri pada berbagai kebiasaan resmi, dan keprotokolan saja, melainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan berbagai cara yang efektif.

Untuk itu diperlukan sebuah bentuk diplomasi yang aktif. Semuanya itu bersumber pada kepercayaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain dalam perwujudan operasionalnya, PLNI perlu selalu dan terus-menerus menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terkadang sangat mendasar yang terjadi di lingkungan internasional.

Ciri-ciri khusus diplomasi perjuangan:

1. Harus mendukung secara aktif pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
2. Membina persahabatan dengan sebanyak mungkin bangsa di dunia.
3. Ditujukan untuk kepentingan nasional.

Tujuan pokok PLNI pada masa Orde Baru adalah menegaskan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan di dunia melalui pembangunan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan, dan kerja sama internasional tanpa membedakan sistem politik, ekonomi, sosial budaya masing-masing negara. Hal ini didasarkan pada dua dasar pokok, yaitu

1. Kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis.
2. Kenyataan-kenyataan yang terdapat di dunia internasional agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Indonesia dalam penciptaan tatanan masyarakat, bangsa, dan dunia yang baru.

Sasaran umum PLNI tercantum di dalam setiap program kerja kabinet terutama dalam kabinet pembangunan. Dalam Kabinet Pembangunan I sampai III, politik luar negeri bukan merupakan prioritas utama karena hal ini didasari oleh pelaksanaan politik yang *low profile* serta lebih mengutamakan restrukturisasi politik dan ekonomi dalam negeri atau dengan kata lain bersifat realistis dan pragmatis.

Dalam krida ke-4 Pelita VI dinyatakan bahwa sasaran umum dari PLNI adalah melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam hubungan bilateral, regional, dan global untuk kepentingan nasional. Sasaran khusus dari PLNI tidak terlepas dari GBHN yang menjadi landasan operasional PLNI, yaitu: Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antarbangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diartikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh prinsip-prinsip bebas aktif. Hubungan luar negeri dikembangkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun global sesuai dengan kepentingan nasional.

Selain itu, peranan Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah dunia khususnya yang mengancam perdamaian dunia dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan terus ditingkatkan melalui tahapan dan langkah yang konstruktif dan konsisten yang dilandasi oleh semangat Dasa Sila Bandung. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan yang menghambat pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasinya. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarbangsa terus diperluas dan ditingkatkan.

Perjuangan menegakkan tatanan dunia baru, termasuk tata ekonomi dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan terus ditingkatkan melalui upaya penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap serta kerja sama diantara negara berkembang melalui forum internasional seperti PBB, ASEAN, GNB, OKI, dll serta meningkatkan peran Indonesia dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi, dan demokratisasi PBB. Langkah bersama antarnegara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri maju terhadap ekspor dari negara-negara berkembang dan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik antarnegara berkembang terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi dan tata informasi dan komunikasi dunia baru. Kerja sama antarnegara anggota ASEAN baik antarpemerintah maupun antarmasyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial-budaya, iptek terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara anggota serta memperkuat ketahanan regional menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas senjata nuklir. Lebih jauh dari itu, hubungan dan kerja sama di kawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan.

Posisi ASEAN di dalam PLNI

Berdasarkan kepentingan nasional, maka politik luar negeri Indonesia harus menunjang usaha pembangunan ekonomi sebagai prioritas dalam rangka pembangunan nasional secara total. Untuk mencapai peningkatan taraf kehidupan bangsa Indonesia perlu diwujudkan kestabilan dan keamanan politik dan ekonomi bersamaan dengan kerja sama yang efektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara-negara tetangga, serta negara-negara lainnya. Pelaksanaan PLNI yang demikian diharapkan akan dapat meningkatkan ketahanan nasional sebuah negara.

Konsep ketahanan nasional tidak hanya menitikberatkan pada politik kekuatan (*power politics*) yang sangat bergantung pada kekuatan militer sendiri, melainkan lebih mengedepankan pentingnya konsultasi dan saling menghormati dalam hubungan antarnegara dengan menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan (*the renunciation of threat or the use of force*). Oleh karena itulah di dalam pelaksanaan politik luar negerinya Indonesia mengenal apa yang disebut sebagai *concentric circles* yang merupakan sebuah alat bantu untuk melihat skala prioritas dalam melakukan hubungan dengan luar negeri berdasarkan kedekatan wilayah. Berdasarkan *concentric circles* tersebut maka wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah terdekat dan terpenting yang Indonesia harus terlebih dahulu dekati agar konsep ketahanan nasional tadi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada masa Orde baru hingga saat ini, ASEAN memiliki posisi yang strategis di dalam politik luar negeri Indonesia.

ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Sebelumnya di kawasan ini juga ada pengelompokan sejenis seperti ASA (the Association of Southeast Asia) dan MAPHILINDO (MALaysia, PHILipina dan INDOnesia). ASA didirikan pada bulan Juli 1961 terdiri dari Malaysia, Philipina dan Thailand untuk memulai kerja sama yang aktif dan saling menguntungkan terhadap masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama dalam konteks ekonomi,

sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, dan masalah administrasi. Pada tahun 1963, pada saat memuncaknya konflik antara Philipina-Malaysia-Indonesia mengenai Sabah, kepala pemerintahan dari ketiga negara sepakat untuk bertemu di Manila dan setuju untuk bekerjasama dalam konteks keamanan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya dalam kerangka MAPHILINDO.

Setelah kejatuhan Soekarno, rezim orde baru di Indonesia, khususnya menteri luar negeri Adam Malik mempunyai kesempatan terbaik untuk mengambil kesempatan yang besar dalam penciptaan kesepakatan yang lebih luas di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia salah satunya ditujukan sebagai sebuah langkah penting dalam strategi untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia sejak 1966-1967 adalah penekanan yang diberikan untuk mengangkat kerja sama kawasan dengan para tetangganya, yang diformalkan dengan pembentukan ASEAN.

Pembentukan ASEAN merupakan sebuah kesuksesan dalam hal perubahan visi Soeharto yang pada bulan Agustus 1966 telah mengemukakan visi "Asia Tenggara yang bekerjasama" (*a co-operating Southeast Asia*) yang akan menjadi basis terkuat untuk menghadapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan darimanapun mereka datang. Pada tanggal 4 April 1966 Menlu Adam Malik menadaskan bahwa politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain selama kerja sama tersebut tidak membahayakan kepentingan Indonesia.

Kebijakan PLNI mengenai ASEAN pertama-tama dilandaskan atas TAP MPRS no. XII/MPRS/1965 yang di dalamnya terkandung tujuan untuk membentuk persahabatan dengan semua negara di dunia dan terutama dengan negara-negara Asia dengan pedoman perjuangan politik luar negeri yang diantaranya didasarkan atas prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia dan kerja sama regional.

Dalam rangka perumusan politik luar negeri RI untuk tahun 1970-an, ASEAN diharapkan akan dapat memberikan sumbangan dalam perwujudan stabilitas yang menyeluruh di dalam wilayah Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya. Untuk kurun waktu 1970-an—1980-an rumusan kebijakan PLNI yang terkait dengan ASEAN adalah sebagai berikut: Dalam hal perkiraan perkembangan Asia Pasifik kurun waktu 1970-an—1980-an, kedudukan ASEAN ikut menentukan kestabilan Asia Pasifik. Untuk menjamin ketenangan di negara-negara Asia Pasifik perlu dikembangkan daya tahannya terhadap pengaruh negara-negara raksasa antara lain dengan cara mempergiat kerja sama regional, baik melalui ASEAN maupun dalam lingkup yang lebih luas.

ASEAN menganut prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara-negara anggotanya. Namun, ASEAN dapat berperan untuk membantu membendung konflik yang melibatkan antar anggotanya seperti krisis Sabah antara Malaysia dengan Filipina dan krisis Indonesia dengan Singapura akibat digantungnya dua anggota Marinir Indonesia di Singapura akibat dituduh sebagai mata-mata pada tahun 1968.

Berikut ini adalah beberapa pernyataan yang dapat dipakai sebagai penegas pentingnya ASEAN di dalam politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru:

1. Adam Malik selaku Wapres dan Menlu RI pada sidang Menlu ASEAN IV di Manila, Maret 1971, menyatakan bahwa ASEAN adalah soko guru (*corner stone*) PLNI dalam artian ASEAN merupakan suatu organisasi yang fleksibel yang dapat meningkatkan kerja sama ekonomi negara-negara di Asia tanpa memandang perbedaan sistem politik mereka.
2. Pada 16 Agustus 1971, Soeharto selaku presiden RI ketika itu menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa perlu dilanjutkan kegiatan-kegiatan di dalam ASEAN sebagai suatu bentuk kerja sama yang nyata dalam rangka menciptakan stabilitas regional dan ketahanan nasional negara-negara anggotanya.
3. Di dalam pedoman PLNI mengenai ASEAN, TAP no. IV/MPR/1973 tentang GBHN masalah hubungan luar negeri telah menetapkan bahwa dalam rangka terus melaksanakan PLNI yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, maka perlu diambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang memungkinkan memungkinkan negara-negara di kawasan tersebut untuk menentukan hari depannya sendiri melalui peningkatan ketahanan nasional mereka masing-masing dan dengan memperkuat wadah dan kerja sama antarnegara anggota PBB di kawasan Asia Tenggara.

4. Pada 6 Agustus 1981, Soeharto menyatakan bahwa salah satu tujuan penting PLNI adalah terus memperkokoh ASEAN. Melalui kerja sama, setiap negara anggotanya dapat meningkatkan ketahanan nasional masing-masing yang secara keseluruhan akan memperkuat ketahanan regional. Melalui ketahanan regional tersebut dapat diwujudkan masa depan wilayah menjadi wilayah yang damai, bebas, dan netral.

Dinamika di ASEAN dan penerapan PLNI

Pada tahun 1986, terjadi ketegangan antara Singapura dengan Malaysia akibat kunjungan Presiden Israel Chaim Herzog. Malaysia memprotes kunjungan tersebut dengan memanggil pulang duta besarnya dari Singapura. Namun Singapura menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk mengundang setiap kepala negara untuk berkunjung, tetapi Lee Kuan Yew mengakui bahwa ia tahu PM Malaysia akan bereaksi.

Segera setelah kejadian itu, Soeharto berkunjung ke Malaysia, setelah pertemuan itu itu, Soeharto melakukan perjalanan dengan mobil, tidak dengan pesawat ke Singapura, dan ditemui oleh PM Lee di jalan lintasan. Hal ini diartikan oleh beberapa pengamat sebagai cara Indonesia menunjukkan kepemimpinan regional. Menurut Chang Heng Chee, itu merupakan tindakan simbolik menyatukan kedua negara.

Ketika Cory Aquino menjadi presiden, Filipina memerlukan dukungan negara-negara ASEAN lainnya, dan atas alasan tersebut, diusulkan agar pertemuan ASEAN ketiga diadakan di Manila. Keamanan adalah suatu persoalan di Manila saat itu, meskipun demikian Presiden Soeharto memutuskan untuk hadir dengan mengabaikan rekomendasi dari para penasihatnya. Menunjukkan rasa hormat terhadap sikap kepemimpinan dari peranan Indonesia ini, pertemuan ASEAN ke III berhasil dilaksanakan pada Desember 1987. Hal itu adalah dorongan untuk solidaritas ASEAN dan dipandang sebagai jaminan terhadap stabilitas regional. Peristiwa ini mengkokohkan kepemimpinan Soeharto diantara para pemimpin ASEAN. Indonesia pulalah yang merancang agenda pertemuan berikutnya ASEAN ke-IV tahun 1992.

Pada masa Orde Baru, Politik Luar Negeri Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat mengingat kepentingan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Soeharto yang salah satunya ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh setidaknya di level Asia Tenggara. Penggunaan instrumen diplomasi perjuangan membuat kepentingan tersebut mendapatkan momentumnya yang terus bergulir menuju bentuknya yang terbaru.*

Referensi

- Anwar, Dewi Fortuna (1994). *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Jakarta: Sinar Harapan
- Kusumaatmadja, Mochtar (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: CV. H. Masagung
- Suryadinata, Leo (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES

RYANTORI adalah dosen Hubungan Internasional pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan aktif sebagai Direktur Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) serta anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Padjadjaran. Bisa dikontak di ryantori4@dsn.moestopo.ac.id atau WA 085216131132.

Peran Indonesia Sebagai Satu-satunya Negara ASEAN di G20

Kholidah Tamami

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari perjalanan sejarah panjang. Mulai dari awal adanya istilah 'Nusantara', pergantian sistem pemerintahan sampai menjadi NKRI hingga hiruk-pikuk pergantian pemimpin membuat Indonesia sudah tangguh menghadapi segala macam bentuk perubahan negara dan dunia. Namun di balik tangguhannya Indonesia dalam menghadapi perubahan, dahulu banyak kerikil yang menghalangi Indonesia untuk merdeka, yang mana salah satu kerikil tersebut adalah masa penjajahan.

Gigihnya Indonesia dalam memerdekakan diri memberikan pelajaran bahwa penjajahan merupakan suatu bentuk kolonialisme yang biadab. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), seluruh manusia dilahirkan merdeka (United Nations General Assembly, 1948:1) sehingga penjajahan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah kolonialisme yang kejam membuat Indonesia bangkit lebih kuat. Dari pengalaman dahulu, Indonesia berkaca bahwa kolonialisme dapat meruntuhkan citra diri bangsa dan mengekang negara hingga tidak bisa berkembang. Sejumlah alasan tersebut lantas mendorong Indonesia untuk berusaha aktif dalam mendamaikan dunia serta memecahkan masalah global lewat forum-forum internasional.

Banyak studi sebelumnya yang turut membuktikan keaktifan Indonesia dalam memberantas konflik serta masalah global dalam forum-forum internasional. Salah satu julukan yang diberikan negara lain untuk Indonesia adalah 'Mafia Asia', mengingat Indonesia sangat aktif menyelesaikan permasalahan serta konflik internasional di Asia, atau bahkan di luar Asia sekalipun. Ikut serta Indonesia dalam mengurangi konflik terbukti dari terbentuknya banyak perjanjian, deklarasi, hingga pertemuan antar negara. Selain itu, Indonesia juga berprinsip kepada politik luar negeri bebas-aktif, yang mana memudahkan Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional.

Salah satu langkah besar Indonesia dalam menjembatani konflik internasional adalah menjadi pelopor Gerakan Anti-Blok dan mengadakan KTT Asia-Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga aktif dalam organisasi regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari berbagai kesempatan tersebut, Indonesia terus berusaha menjaga perdamaian dunia sekaligus permasalahan global. Namun seiring pergantian zaman, permasalahan global semakin beragam. Kolonialisme sudah bukan menjadi permasalahan utama, melainkan semakin kompleks menjadi permasalahan ekonomi, perubahan iklim global, hingga perlindungan atas batas-batas negara dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Demi mengatasi permasalahan kompleks tersebut, Indonesia ikut serta dalam G20 sebagai salah satu anggota. G20 merupakan sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mengatasi isu-isu global, khususnya isu ekonomi dunia. Sebutan G20 didasari oleh anggotanya yang berjumlah 20 negara sekaligus perwakilan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB). Selain membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi global dengan negara lain, hadirnya Indonesia dalam G20 merupakan sebuah prestasi karena G20 secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia (Sherpa G20 Indonesia, 2019).

Hadirnya Indonesia dalam G20 mempunyai peran yang penting terhadap kawasan Asia Tenggara, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN dalam forum internasional ini. Tentu dengan mewakili negara ASEAN dalam G20, banyak tantangan, keuntungan, serta amanah yang diemban oleh Indonesia, baik itu terhadap ASEAN maupun dunia. Selain itu, akan ada banyak pihak yang menaruh ekspektasi terhadap Indonesia dan memperhatikan langkah-langkah Indonesia di kancah internasional. Namun kembali lagi kepada tujuan utama G20, Indonesia akan terus berusaha melaksanakan tugasnya dalam mengatasi masalah ekonomi dunia.

Pada tahun 2022 ini, Indonesia memegang presidensi G20, di mana Indonesia mengemban amanah untuk memimpin forum internasional bergengsi tersebut selama satu tahun penuh. Pemerintah tentu memanfaatkan momentum Presidensi G20 secara maksimal dengan mengupayakan perbaikan ekonomi global serta permasalahan dunia lainnya. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai presidensi Indonesia dalam forum G20, dengan menganalisis, tantangan, keuntungan, hasil, sekaligus peran Indonesia sebagai satu-satunya anggota ASEAN dalam KTT G20 tahun 2022.

G20 dan ASEAN

G20 merupakan sebuah kelompok internasional yang beranggotakan 20 negara (*Group of Twenty* atau Kelompok Dua Puluh) serta perwakilan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB) yang berfokus pada ekonomi dunia. Posisi G20 dinilai strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia (Sherpa G20 Indonesia, 2019). G20 juga dapat didefinisikan sebagai sebuah komite internasional untuk mengelola isu-isu ekonomi global. Sejarah pembentukan G20 tidak bisa dilepaskan dari G7 dan G8. Ketiganya lahir ketika dunia mengalami krisis dalam bidang ekonomi. Dimulai dari G7 (*Group of Seven* atau Kelompok Tujuh) yang muncul sebagai respons terhadap krisis nilai tukar ganda dan minyak pada awal tahun 1970-an. Anggotanya adalah Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan AS (dalam bentuk pertamanya sebagai G6). Selanjutnya, Kanada menjadi anggota pada tahun 1976, membentuk G7; Rusia diterima sebagai anggota penuh pada tahun 1998, sehingga mengubah grup tersebut menjadi G8. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral serta negara anggota G7/G8 telah bertemu secara rutin sejak 1986 (Hajnal, 2019:11).

Adalah Paul Martin, Menteri Keuangan G7, yang memiliki ide tentang awal mula pembentukan G20. Martin mengadvokasi perubahan forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi forum tingkat pemimpin dunia. Hal ini dapat dilihat pada laporan KTT G8 Cologne tentang penguatan arsitektur keuangan internasional. Urgensi terhadap pembentukan forum pemimpin dunia dengan jumlah negara yang lebih banyak yang berfokus pada isu ekonomi dimotivasi oleh krisis keuangan Asia/Amerika Latin dan pengakuan bahwa negara-negara ekonomi berkembang yang paling penting harus disertakan sebagai mitra penuh dalam tata kelola ekonomi global. Sudah jelas bahwa negara-negara G8 saja tidak dapat mengatasi masalah ekonomi dan keuangan tanpa partisipasi penuh dari ekonomi penting lainnya secara sistemik. Mantan Perdana Menteri Kanada dan sebelumnya, Menteri Keuangan Paul Martin, bersama dengan mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers, mendorong perluasan forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi 20 anggota²⁵.

Kemudian diadakan pertemuan persiapan Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 di Vancouver pada November 1999, yang berlanjut pada pertemuan perdana Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 diselenggarakan di Berlin pada 15-16 Desember 1999. Tuan rumah bersama adalah Menteri Keuangan Hans Eichel dari Jerman dan Paul Martin dari Kanada. Menurut Nancy Alexander dari Heinrich Böll Foundation, Larry Summers, Martin dan Eichel bersama-sama memilih keanggotaan G20 (Hajnal, 2019:15). Sejarah resmi sembilan tahun pertama, diterbitkan oleh G20 (*The Group of Twenty*, 2007), mendokumentasikan dan menjelaskan latar belakang sejarah, pendirian, struktur, tujuan, program kerja dan evolusi forum G20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan membahas hubungan G20 dengan lembaga dan kelompok internasional lainnya, khususnya Kementerian Keuangan G7.

G20 kemudian dipandang sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerja sama multilateral yang ada. Jumlahnya yang lebih besar, sekalipun tidak terlalu besar dibandingkan G7, memberikan peluang bagi dialog-dialog yang lebih luwes dengan hasil nyata yang lebih cepat, jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (192 negara) yang terkesan sangat lambat dalam penanganan isu-isu krusial yang dihadapi dunia. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pertemuan-pertemuan rutin pun digelar sejak pertemuan pertama G20 di Berlin, Jerman.

25 Selain negara-negara G8, anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Republik Korea dan Turki, dan Uni Eropa sebagai anggota kedua puluh. Jumlah dan komposisi ini telah dan terus dilihat sebagai keseimbangan antara keterwakilan dan efisiensi. Forum baru tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan G7 dan Gubernur Bank Sentral dalam komunikasi bersama mereka pada bulan September 1999 (Hajnal, 2019:14).

KTT G20 pertama diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010) dan Seoul (November 2010). Ketiga KTT pertama berfokus utama pada upaya darurat dalam merespon krisis finansial. Koordinasi makro dilakukan untuk mengelola toxic asset dan rekapitalisasi perbankan dan stimulus fiskal sebesar 2% PDB (Hermawan dkk., 2011:7). G20 berkeyakinan dapat membawa manfaat yang bukan hanya dapat dinikmati oleh kedua puluh anggotanya, tetapi juga sekitar 170 negara lain yang tidak tergabung dalam G20. Keyakinannya adalah kalau 19 negara plus Uni Eropa berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan dan seimbang, perekonomian dunia akan menjadi kuat, berkelanjutan dan stabil.

Untuk mencapai sasaran tersebut, G20 melakukan dua pendekatan sekaligus: *Pertama*, kelompok ini merangkul negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. *Kedua*, kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global. Pendekatan kedua menjamin keberlangsungan tata pengaturan finansial global yang lebih kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam G20. Bank Dunia dan IMF adalah lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods yang sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dan pembangunan dunia (Hermawan dkk., 2011:2-3). Pertemuan G20 diadakan setiap tahunnya, dan Indonesia memegang presidensi G20 tahun 2022.

Sedangkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967. Lima pemimpin negara yakni Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand duduk bersama di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand dan menandatangani sebuah dokumen. Berdasarkan dokumen itu, *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lahir. Lima Menteri Luar Negeri yang menandatangani adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Dokumen yang mereka tandatangi akan dikenal sebagai *ASEAN Declaration* atau Deklarasi ASEAN (Flores & Abad, 1997).

Deklarasi ASEAN adalah dokumen singkat berisi lima artikel. Ini mendeklarasikan pembentukan ASEAN serta menjabarkan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan ini adalah tentang kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan lainnya, dan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan ketaatan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditetapkan bahwa ASEAN akan terbuka untuk partisipasi semua negara di kawasan Asia Tenggara yang menganut maksud, prinsip, dan tujuannya.

Terulis juga bahwa ASEAN sebagai perwakilan “kehendak kolektif bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk mengikatkan diri mereka bersama dalam persahabatan dan kerja sama dan, melalui upaya dan pengorbanan bersama, mengamankan rakyat mereka dan untuk keturunan berkat perdamaian, kebebasan dan kemakmuran” (Flores & Abad, 1997). ASEAN didirikan pada pertengahan perang dingin. Ketakutan yang tumbuh di tengah dominasi dan penyebaran komunisme yang cepat pada akhirnya menyebabkan negara-negara tersebut membentuk bentuk kerja sama yang tidak hanya memberikan tingkat jaminan tertentu di antara negara-negara untuk menghindari konflik, tetapi juga dapat digunakan sebagai jalan untuk melawan kemungkinan ancaman asing (Putra, 2015:190).

Terlepas dari prinsip utama ASEAN yang tidak mengintervensi dan menjunjung tinggi kedaulatan negara, dominasi kehadiran Indonesia mampu mengarahkan organisasi tersebut untuk merumuskan 2 prinsip utama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan serta melawan serangan asing. ancaman. Prinsip pertama yang dibentuk dengan Indonesia sebagai penggerak adalah Zona Asia untuk Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) pada tanggal 27 November 1971, menegaskan kembali komitmen anggota untuk menjamin stabilitas dan keamanan dari campur tangan eksternal dalam bentuk apapun (ASEAN, 1971).

Dengan perluasan keanggotaan ASEAN menjadi total 11 negara, kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada iklim dinamika politik yang sangat luas. Dalam mendefinisikan peran penting peran kepemimpinan Indonesia dalam dinamika kontemporer ASEAN, penting untuk terlebih dahulu memahami premis kepemimpinan di ASEAN sebagai sebuah konsep. ASEAN tentu saja merupakan bagian dari prioritas lingkaran dalam pertama kebijakan luar negeri Indonesia (awal abad ke-21), dan cara Indonesia dalam mengerahkan pengaruh dan dominasi dalam lembaga tersebut adalah melalui langkah-langkah yang mencerminkan keberhasilan demokratisasi mereka, dan bagaimana ASEAN dapat digunakan untuk

memajukan Indonesia. pengaruh di luar organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui 2 ukuran yang berbeda, antara lain peran Indonesia dalam pengelolaan konflik yang melibatkan negara-negara ASEAN, dan Indonesia sebagai arsitektur institusi dan norma ASEAN (Putra, 2015:191).

Keterkaitan antara G20 dan ASEAN yang dimotori oleh Indonesia dapat dilihat pada tahun-tahun sebelumnya. Meski tidak mengklaim diri mewakili ASEAN di G20, Indonesia selama ini secara substantif konsisten menjunjung tinggi aspirasi negara-negara anggota ASEAN. Pada masa kepresidenan SBY, terlihat bagaimana Indonesia memainkan peran kunci dalam menegosiasikan penyertaan Ketua ASEAN untuk menghadiri KTT G20, yang pada akhirnya mendorong ASEAN untuk membentuk 'Kelompok Kontak ASEAN G20', di mana 10 menteri keuangan ASEAN akan mengadakan pertemuan rutin sebelum KTT G20 untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN (Hermawan dkk., 2011:80-84). Sebagai satu-satunya ASEAN negara di sebuah klub eksklusif dunia yakni G20, Jim O'neill ekonom dunia meramalkan bagaimana Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi utama di abad ke-21, sehingga memasukkan Indonesia ke dalam N11 (*Next Eleven*), daftar negara-negara yang berpotensi tinggi menjadi ekonomi utama dunia (Putra, 2015:194).

Presidensi G20 2022 Indonesia

Demi menemukan solusi permasalahan perekonomian global yang lambat laun menjadi urgensi untuk segera diatasi, negara-negara dengan ekonomi paling berpengaruh di dunia membuat sebuah forum kerja sama multilateral yang familiar dengan sebutan G20. Permasalahan ekonomi dunia disadari menjadi urgensi yang harus ditanggapi lebih serius saat pemimpin G20 mengubah tingkat diskusinya dari pertemuan antar menteri hingga ke taraf yang lebih tinggi, yaitu pertemuan antar kepala negara atau kepala pemerintahan (Hermawan dkk., 2011:3). Selain itu, pemimpin G20 turut menyadari bahwa permasalahan ekonomi dunia tidak bisa diatasi hanya oleh satu negara saja. Perlu adanya sebuah forum internasional yang dapat digunakan guna membahas kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya.

Untuk itu, negara anggota G20 menjadikan G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi (*premier forum for economic cooperation*) (Hermawan dkk., 2011:3). Diharapkan dari terbentuknya kerja sama ekonomi tersebut, negara-negara G20 dapat berkomitmen dalam bahumembahu menciptakan pertumbuhan global, memperkuat tata kelola global pada semua masalah ekonomi internasional utama, serta mengurangi permasalahan ekonomi dan krisis di dunia. Meski awalnya G20 memiliki tujuan utama dalam memperbaiki isu ekonomi secara makro, namun agenda pembahasan semakin bertambah dengan adanya diskusi terkait perubahan iklim, perdagangan, pertanian, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, lingkungan, energi, dan antikorupsi (G20 Secretariat, 2022).

Adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia dapat bergabung menjadi anggota G20, yang bisa ikut andil memberikan kontribusi ekonomi secara langsung bersama negara-negara ekonomi raksasa lainnya. Terlebih lagi, sebuah kehormatan bagi Indonesia dapat memegang PRESIDENSI G20 tersebut selama satu tahun penuh, terhitung dari tanggal 1 Desember 2021 dan diakhiri dengan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 (Irsalina, 2021). Maka apabila presidensi G20 diemban sebuah negara selama satu tahun penuh, serah terima presidensi G20 pun turut dilakukan setiap satu tahun sekali²⁶.

Presidensi, atau emban tanggung jawab tinggi Indonesia sebagai pemimpin G20 pada tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai langkah besar yang telah selesai terlaksana. Sebab dengan memegang kendali atas presidensi G20 2022, Indonesia berhasil membuktikan eksistensi pertumbuhan ekonomi negara yang setara dengan anggota G20 lainnya. G20 juga disebut sebagai forum internasional yang paling berpengaruh di kancah dunia, sehingga kontribusi Indonesia turut memberikan peran nyata yang dapat diimplementasikan guna mengatasi permasalahan krisis di dunia (Bank Indonesia, 2021).

26 Sebelum Indonesia, negara yang mengemban tugas menjadi pemimpin G20 adalah Italia, yang mana negara Italia telah melakukan serah terima presidensi G20 kepada Indonesia sejak tanggal 31 Oktober 2021, bersamaan dengan digelarnya KTT G20 keenam belas pada tanggal 30-31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Sama halnya dengan presidensi selanjutnya, Presiden Indonesia Joko Widodo turut melakukan serah terima presidensi secara langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Selama satu tahun berikutnya, India memegang presidensi G20, terhitung dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023 (G20 Secretariat, 2022).

Apabila ditarik kembali pada skala regional, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang hadir mewakili ASEAN menjadi anggota G20. Hal ini dapat dikatakan menjadi sebuah pencapaian tinggi, mengingat beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Kamboja juga mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat dengan persentase penawaran sektor jasa dan sektor barang paling tinggi di ASEAN (Guna & Setiawina, 2022:188). Berbagai analisis dilakukan untuk menjawab Indonesia yang menjadi satu-satunya negara ASEAN di forum G20, namun alasan paling signifikan untuk menjelaskan hal tersebut adalah jumlah pendapatan nasional atau GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia yang relatif lebih besar, sekaligus Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan negara ASEAN lain (Salim, 2014:99). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak forum G20 pun sudah menunjukkan potensi besar di kawasan Asia, yang kerap dijuluki sebagai '*emerging economy*' (Dzulfaroh, 2022). Selain itu, Indonesia turut aktif dalam berbagai organisasi perdagangan regional maupun lembaga internasional, sehingga semakin menguatkan argumen tersebut. Kinerja ekonomi Indonesia dalam sepuluh terakhir menunjukkan hasil yang cemerlang, di mana Indonesia dapat menekan lajur inflasi, pertumbuhan ekonomi yang kuat serta kinerja lembaga keuangan yang cenderung membaik (Salim, 2014:99).

Kendati Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN di G20, negara ASEAN lain turut mendukung Indonesia sebagai anggota organisasi regional. KTT G20 2022 di Bali pun turut mengundang negara ASEAN lain sebagai tamu undangan, di antaranya Ketua ASEAN sekaligus Perdana Menteri Kamboja Hun Sen serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. *Summit* G20 juga mengundang ASEAN sebagai perwakilan kelompok regional di Asia, di mana kesempatan ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan dari negara ASEAN, sekaligus membuktikan ASEAN sebagai organisasi regional yang terintegrasi, baik secara ekonomi maupun politik dalam konstelasi dunia (Salim, 2014:106). Tujuan ini selaras dengan posisi Indonesia sebagai representasi ASEAN dan negara berkembang lainnya dalam menyuarakan pendapat (Putra, 2015:194). Hal ini bahkan telah ditekankan dalam pidato Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada 22 September 2021, bahwa nantinya, presidensi Indonesia di forum G20 akan fokus mengambil langkah yang dapat menguntungkan seluruh negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik (Al-Fadhat, 2022:618). Berkat kesungguhan Indonesia dalam presidensi G20 2022, ASEAN pun mempercayai Indonesia sebagai mediator untuk organisasi regional tersebut dalam forum G20 (Salim, 2014:104), yang mana Indonesia dapat berpegang teguh pada asas musyawarah dan mufakat agar mempermudah tugasnya dalam menjembatani perbedaan dalam negara ASEAN maupun anggota G20 (Irsalina, 2021).

Indonesia sebagai perwakilan ASEAN dalam forum G20 turut memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Selama menjadi anggota G20, Indonesia melibatkan ASEAN dalam sejumlah forum internasional dan membuktikan pengaruhnya secara tidak langsung pada tingkat regional (Salim, 2014:104). Indonesia beserta negara ASEAN lain bekerjasama dalam mengusung beragam konsep, ide, hingga perjanjian yang menyinggung kebijakan ekonomi global, perdagangan, hingga isu lingkungan dan kerja sama bilateral. Beberapa perjanjian tersebut adalah KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin Thailand, KTT ASEAN Jakarta 2011, ASEAN Plus Three (APT) atau ASEAN+3 pada 3 Juni 2009 di Bangkok guna merespons isu ekonomi global dan krisis finansial, pertemuan khusus antar kepala negara ASEAN di Manila 1999, dan pertemuan Troika di Brussels, 12 November 2009 (Salim, 2014:105). Apabila ditarik kembali, hal ini selaras dengan tujuan G20 itu sendiri, di mana forum internasional tersebut diciptakan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi.

Menjadi pemangku presidensi G20 membuat Indonesia dihadapkan oleh beragam tanggung jawab untuk mengatasi problematika ekonomi dunia, sebagaimana tujuan dari pembentukan G20 itu sendiri. Dari sekian banyak usaha yang dilakukan untuk menghadapi isu ekonomi global, Indonesia mengusung tiga prioritas isu utama dalam presidensi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022, di antaranya adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022). Apabila dijabarkan lebih jauh, terdapat prioritas jalur keuangan yang diagendakan Indonesia selama memegang Presidensi G20 2022, di antaranya *Exit Strategy to Support Recovery* (upaya G20 untuk meminimalisir efek limpahan (*spillover*) *exit policy* dari negara ekonomi maju terhadap negara yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi), *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth* (mengurangi efek berkepanjangan akibat krisis ekonomi dengan menggalakkan berbagai upaya penyembuhan ekonomi), *Payment System in Digital Era* (memperkuat sistem pembayaran antar negara sekaligus mengembangkan CBDC (*Central Bank Digital Currency*)), *Sustainable Finance* (iklim finansial makro ekonomi yang berkelanjutan, serta mengupayakan ekonomi rendah karbon dan keuangan yang stabil), *Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance* (menggiatkan keuangan

inklusif dan produktivitas ekonomi untuk golongan tertentu seperti UMKM, pemuda, serta wanita) serta *International Taxation* atau perpajakan internasional (Bank Indonesia, 2021).

Sebagaimana partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional lainnya, presidensi G20 Indonesia tentu memunculkan keuntungan sekaligus tantangan tersendiri. Dengan menjabat presidensi G20 2022, Indonesia mulai dipandang sebagai negara yang mempunyai pengaruh kuat di kancah internasional (Salim, 2014:99). Pengaruh yang bertumbuh semakin kuat dari Indonesia lantas menjadikannya sebagai keuntungan bagi kondisi ekonomi dan politik global Indonesia (Putra, 2015:194). Tidak hanya itu, peran Indonesia dalam G20 turut mengukuhkan posisi Indonesia dalam iklim politik, mengingat selain menjabat presidensi G20 2022, Indonesia juga merupakan anggota yang berpengaruh dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta pelopor dari Gerakan Non-Blok atau GNB (*Non-Aligned Movement*) (Putra, 2015:194). Bersamaan dengan itu, Indonesia sebagai anggota dan pemangku presidensi G20 2022 turut mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam membantu negara berkembang lain dalam menangani permasalahan ekonomi global, termasuk negara ASEAN lain yang mana mayoritas anggota ASEAN merupakan negara berkembang.

Dalam beberapa pernyataan dan analisis, Indonesia turut mendapatkan keuntungan ekonomi dalam Presidensi G20 2022. Beberapa yang paling signifikan adalah terdapat peluang meningkatnya konsumsi domestik dalam negeri hingga 1,7 triliun rupiah, adanya proyeksi kontribusi terhadap PDB Indonesia hingga Rp7,4 triliun, bertambahnya wisatawan luar negeri yang diproyeksikan mencapai 3,6 juta orang, serta terciptanya 700 ribu lapangan kerja (Komisi XI, 2022). Banyaknya peluang ini tentu menambah keuntungan yang didapatkan Indonesia saat memangku Presidensi G20 2022.

Tentu selain keuntungan, terdapat pula tantangan yang menjadi sorotan kala Indonesia menjabat presidensi G20 2022 sekaligus menjadi anggotanya. Terdapat diskusi yang menyatakan bahwa negosiasi antara negara G20 masih rawan melibatkan konflik kepentingan dan kontestasi, yang mana hal tersebut dinilai tidak dapat dihindari (Morillas & Quero, 2019:12), mengingat anggota G20 memegang 80% GDP dunia. Hal ini semakin pelik dengan adanya 'perselisihan' antar negara berkekuatan besar, salah satunya perang dagang antara Washington dan Beijing dan konflik Laut China Selatan dalam lima tahun terakhir (Al-Fadhat, 2022:618).

Hubungan antar negara besar semakin runyam akibat invasi Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 silam yang memunculkan 'sikap dingin' antar negara lewat embargo dan sanksi ekonomi lainnya. Di sinilah Indonesia hadir dan berusaha menjembatani hubungan antar negara G20 yang memiliki kekuatan besar. Apabila dalam peta regional ASEAN, Indonesia yang aktif menjadi anggota G20 turut membuat banyak pihak akan 'mengawasi' dan 'menaruh harapan' bagi Indonesia untuk dapat mewakili ASEAN dalam forum internasional lainnya (Putra, 2015:193). Di satu sisi, Indonesia mewakili ASEAN merupakan sebuah pencapaian baik. Namun, hal tersebut membuat Indonesia harus meyakinkan negara-negara tetangganya bahwa meroketnya reputasi Indonesia di kancah internasional bukanlah sebuah ancaman bagi mereka.

Pengaruh G20 2022 ke ASEAN

Sesuai dengan awal pembentukan G20, Indonesia sebagai anggota forum terus berusaha memberantas permasalahan dunia, terutama di bidang ekonomi. Presidensi G20 Indonesia menghasilkan sejumlah pertemuan, perjanjian, deklarasi, kerjasama yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dalam perannya ketika memangku presidensi G20 2022, Indonesia secara nyata memberikan pandangannya serta berkontribusi untuk memperbaiki iklim ekonomi dunia.

G20 mampu memperlihatkan peran nyata untuk mengatasi isu global sebagaimana tujuan awalnya. Krisis keuangan global pada tahun 2008 silam misalnya, yang dapat ditangani dengan sukses (Bank Indonesia, 2021). Setelah melalui krisis tahun 1930-an (*Great Depression*), anggota G20 mulai berkaca dan percaya bahwa krisis keuangan global 2008 harus diupayakan bersama-sama secara global (Brilianto, 2013:1). G20 hadir menjadi forum untuk wadah berdiskusi secara intensif, yang mana dari diskusi tersebut, anggota G20 menyadari bahwa dibutuhkan kebijakan fiskal untuk menstabilkan pasar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi (Brilianto, 2013:2).

Untuk mendorong laju ekonomi yang tengah layu, G20 berhasil meningkatkan kapasitas pinjaman IMF dan *development bank* lain. Upaya ini dinilai efektif membantu perekonomian dunia dan menginisiasi reformasi di bidang finansial (Bank Indonesia, 2021). Selain itu, G20 berhasil menugaskan OECD untuk merumuskan rekomendasi yang diperlukan guna memberantas pihak yang menghindari pajak. Demi mengaktualisasi hal tersebut, pada 2012, G20 mengupayakan sebuah agenda yang disebut *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan berhasil difinalisasikan pada

2015. Melalui agenda tersebut, G20 bersama 139 negara dan yurisdiksi turut andil dalam memberantas penghindaran pajak (Bank Indonesia, 2021). G20 turut membentuk *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh *International Monetary Fund* (IMF) guna membantu pembiayaan negara miskin dan rentan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Pada 2016, G20 juga mengkaji isu perdagangan dan pembangunan internasional, yakni penerapan prinsip tentang investasi internasional.

Dapat dikatakan bahwa isu kesehatan global dan pandemi Covid-19 merupakan hal penting yang harus ditangani, dan G20 berhasil menanggapi dengan serius. Guna menangani pandemi Covid-19, G20 berinisiatif untuk menangguk pembayar utang luar negeri untuk negara dengan penghasilan rendah, pengurangan bea dan pajak impor, terutama untuk alat kesehatan seperti vaksin, alat medis, disinfektan, obat-obatan serta *hand sanitizer* (Bank Indonesia, 2021). Berdasarkan KTT Riyadh tahun 2020, forum internasional ini juga menyuntikkan dana penanganan Covid-19 sebesar lebih dari 5 triliun USD. Terdapat juga kontribusi G20 terhadap isu iklim, yang menghasilkan sejumlah perjanjian seperti *Paris Agreement on Climate Change* tahun 2015 serta *The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Bank Indonesia, 2021).

Berbicara mengenai G20, puncak hasil dari seluruh presidensi yang diemban negara setiap tahunnya adalah KTT atau *Summit*. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, presidensi G20 Indonesia juga diakhiri dengan KTT yang dilaksanakan di Bali tanggal 15-16 November 2022. KTT Bali 2022 dinilai sukses, karena anggota G20 berhasil merumuskan sebuah deklarasi, dan Indonesia turut mendapatkan pujian atas presidensi G20 yang dinilai sukses (Nurgaheny, 2022). KTT Bali 2022 berhasil mengesahkan *G20 Bali Leaders' Declaration* atau Deklarasi Pimpinan G20. Sesuai dengan ucapan Presiden Indonesia Joko Widodo, *G20 Bali Leaders' Declaration* adalah deklarasi yang pertama kali diwujudkan semenjak Februari 2022 (Nurgaheny, 2022). Deklarasi dengan total 52 paragraf ini membahas beragam aspek ekonomi maupun non-ekonomi, seperti perdamaian dunia, ketahanan pangan dan energi, stabilitas pasar, inovasi teknologi untuk pertanian hingga perlindungan lautan dunia.

Banyak poin yang menjadi pembahasan utama *G20 Bali Leaders' Declaration*. Salah satu pembahasan yang paling disorot adalah bahasan terkait perang di Ukraina, yang mana Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai pembahasan yang paling diperdebatkan dan alot (Nurgaheny, 2022). Berdasarkan poin-poin dalam Deklarasi Pimpinan G20, perang di Ukraina berdampak kepada iklim ekonomi global yang masih rentan karena pandemi, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, serta melumpuhkan keamanan dunia karena menimbulkan banyak korban (G20, 2022). Terdapat pula hasil konkret yang dihasilkan dari G20 Bali, seperti terbentuknya *pandemic fund* hingga 1,5 miliar USD, hingga daftar kerja sama antara anggota G20 dengan negara undangan untuk melaksanakannya secara lebih dekat dengan rakyat (Nurgaheny, 2022).

Sesainya Presidensi G20 Indonesia membuat pemerintah segera mengeksekusi program yang telah disahkan selama masa presidensi berlangsung. Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, ada 140 agenda bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar USD serta 226 agenda bersifat multilateral dengan nilai sebesar 238 miliar USD (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Untuk mewujudkan daftar hasil presidensi G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo secara langsung menunjuk penanggungjawab untuk masing-masing bagian, seperti politik, investasi hingga non-investasi (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) agar hasil Deklarasi Pimpinan G20 dapat direalisasikan secara detail dan teratur.

Dalam Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi jelas berperan penting dalam kancah internasional, baik dalam wadah G20 maupun ASEAN. Untuk mencapai tujuan bersama G20. Presidensi G20 Indonesia melibatkan banyak pihak di dalam agenda pertemuan dan rapatnya. Ketua ASEAN diundang ke dalam pertemuan G20, begitu pula pertemuan tingkat menteri. Dengan undangan ini, diharapkan perwakilan ASEAN mampu memberikan perspektifnya mewakili negara-negara Asia Tenggara dalam diskusi G20.

Dalam publikasi resmi salah satu *working group* di G20 tahun 2022 yakni laporan *Climate Sustainability Working Group* (CSWG) *G20 2022* yang berjudul *Stocktaking Economic, Social, and Environmental Impacts of Sustainable Recovery, Including Impacts on NDC Implementation* dapat dilihat beberapa pengaruh kegiatan G20 terhadap negara-negara ASEAN. Laporan ini membahas tentang bagaimana negara anggota G20 meningkatkan upaya pemulihan mereka untuk terus mengupayakan pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif dari dampak negatif pandemi Covid-19. Terdapat

beberapa lembaga yang turut serta menyusun laporan ini, yakni *Cambridge Econometrics*, *the Global Green Growth Institute (GGGI)*, *the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, *the International Renewable Energy Agency (IRENA)*, *the United Nations Children's Fund (UNICEF)*, dan *the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy*.

Pada halaman 17, ditulis tentang bagaimana Komunitas Sosial Budaya ASEAN, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, meluncurkan *ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)* untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan regional dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. ACRF mengoordinasikan respons pemulihan kawasan melalui pendekatan lintas sektoral dan lintas pilar yang memaksimalkan sinergi integrasi pasar ASEAN, menghindari duplikasi upaya pemulihan di kawasan dan memastikan semua upaya pemulihan berorientasi jangka panjang. Kemudian pada halaman 31 juga terdapat tentang taksonomi ASEAN. Taksonomi ASEAN adalah taksonomi keuangan berkelanjutan dengan fokus awal pada tujuan lingkungan. Ini terdiri dari dua bagian. Basisnya adalah Kerangka Dasar (FF) yang bertumpu pada empat tujuan lingkungan dan dua kriteria penting untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi dalam 3 tingkatan.

Pengaruh G20 terhadap ASEAN selanjutnya bisa dilihat dalam laporan *G20 Bali Update on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and G20 Development Commitments* yang ditulis oleh *Development Working Group (DWG) G20*. Laporan ini dinarasikan untuk menampilkan tindakan dan komitmen kolektif yang menyoroti pentingnya kolaborasi dan kerja sama; tindakan khusus sektor yang akan mendorong pemulihan yang lebih kuat dan membangun ketahanan; pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan; dan dukungan khusus G20 untuk negara berkembang dalam hal pemulihan COVID-19 dan pencapaian SDGs. Pada halaman 48, terdapat keterangan mengenai *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)* atau Dana Infrastruktur ASEAN. Mulai Maret 2022, AIF telah berkomitmen sebesar \$517 juta untuk 11 proyek di Asia Tenggara di seluruh sektor energi, perkotaan, air, dan transportasi, dengan total ukuran proyek sekitar \$3 miliar. ADB berkomitmen \$2,5 miliar untuk proyek-proyek ini. Dari 2019 hingga 2022, 29 proyek telah diidentifikasi dan disusun, dan bantuan teknis telah diberikan untuk memungkinkan negara menerbitkan obligasi hijau negara.

Dalam bagian lampiran rilis resmi *G20 Bali Declaration* juga dituliskan mengenai daftar kegiatan tindakan, proyek, dan inisiatif konkret berikut yang ditujukan untuk memajukan kolaborasi internasional dalam payung proyek resmi G20. Terdapat beberapa proyek yang berkaitan dengan ASEAN maupun negara Asia Tenggara, yakni sebagai berikut:

1. Australian Expert Technical Assistance Program – Regional Support and Safety Monitoring (AETAP-RSSM). Program ini bertujuan untuk mendukung upaya negara-negara Pasifik dan Asia Tenggara dalam memberikan program imunisasi COVID-19 yang aman, efektif, dan merata (dilaksanakan 2021-2022).
2. Cyber and Critical Tech Cooperation Program: Safety by Design in Southeast Asia. Program ini menganjurkan Safety by Design sebagai pendekatan model untuk keamanan online bagi pemerintah, industri, dan organisasi di seluruh ekosistem digital Asia Tenggara, untuk membantu menonjolkan ekonomi digital yang lebih inklusif. Kolaborasi konkret senilai AUD 1,69 juta (dilaksanakan 2021-2024).
3. Keterampilan digital dan peluang pengembangan keterampilan dalam konteks digitalisasi pasar tenaga kerja negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan keterampilan kelas dunia di antara guru dan master pelatihan kejuruan sebagai praktisi terbaik yang memperkenalkan teknologi baru ke dalam sistem pengembangan keterampilan dan untuk mengembangkan pendidikan singkat program dalam informasi dan komunikasi dan keterampilan digital untuk berbagai kelompok usia warga negara Asia Tenggara.
4. US-Singapore Third Country Training Programme. TCTP adalah kemitraan antara Singapura dan AS untuk mendukung upaya pembangunan komunitas ASEAN melalui program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan kawasan. Di bawah TCTP, Singapura dan AS telah bersama-sama mengadakan kursus ekonomi digital untuk memperkuat pemahaman negara-negara Asia Tenggara tentang lanskap peraturan untuk ekonomi digital di tingkat regional dan global, agar mereka dapat memaksimalkan peluang. Singapura dan AS juga telah menjadi tuan rumah bersama TCTP tentang energi terbarukan untuk mendukung pejabat energi dari Asia Tenggara dalam meningkatkan upaya transisi energi dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penyebaran energi terbarukan, dan memperdalam pemahaman tentang penerapan berbagai teknologi energi.
5. Energy Transition Partnership (ETP). ETP merupakan platform multi-stakeholder yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara dan mewujudkan target kesepakatan Paris tentang perubahan iklim dengan

menyatukan para donor pemerintah, filantropi, dan Pemerintah Asia Tenggara. Ini meningkatkan koordinasi dan dialog untuk mempercepat transisi energi dengan mengatasi hambatan terhadap energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan.

6. Women Together, merupakan inisiatif Asia Tenggara yang mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan dan hak-hak perempuan dan anak perempuan dengan fokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender. Women Together akan melengkapi program kesetaraan gender yang ada dan kemitraan bilateral di Pasifik dan Asia Tenggara.
7. Ship to Shore Rights South East Asia (SEA). Ini merupakan proyek multi-negara yang berupaya mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan aman serta pekerjaan yang layak bagi semua pekerja migran di sektor perikanan dan pemrosesan makanan laut di Asia Tenggara. Bantuan teknis menuju ekonomi biru yang berkelanjutan melalui pekerjaan yang layak dalam rantai pasokan perikanan dan makanan laut. Kerjasama untuk mengembangkan MOU untuk perlindungan nelayan migran. Periode proyek: 1 Agustus 2020 hingga 31 Juli 2024.
8. Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA). Program ini bertujuan untuk membantu negara-negara Asia Tengah dan Tenggara terpilih untuk meningkatkan investasi infrastruktur energi, transportasi, dan industri, dan mengalihkannya ke proyek infrastruktur yang konsisten dengan jalur pembangunan rendah emisi, tangguh, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peran Indonesia di dalam G20 dan ASEAN tidak berhenti pada kegiatan Presidensi G20 saja. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan pembahasan tiga isu utama Konferensi Tingkat Tinggi G20 ketika memegang tampuk keketuaan ASEAN tahun depan. Posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN akan efektif per 1 Januari 2023 mendatang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan keberlanjutan pembahasan isu-isu G20 tersebut demi mendorong percepatan pemulihan global pasca pandemi. Hal itu sejalan dengan tema G20 yakni *Recover Together, Recover Stronger*. Tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).

Kesimpulan

Hadirnya Indonesia dalam G20 mempunyai peran yang penting terhadap kawasan Asia Tenggara, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN dalam forum internasional ini. Indonesia memiliki peran penting di ASEAN dan G20. ASEAN atau *Association of South East Asian Nations* merupakan organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara dan memiliki 11 anggota. Sedangkan G20 atau *Group of Twenty* adalah kelompok internasional beranggotakan 20 negara yang memiliki fokus pada isu ekonomi dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang hadir mewakili ASEAN di anggota G20. Berbagai analisis dilakukan untuk menjawab Indonesia yang menjadi satu-satunya negara ASEAN di forum G20, namun alasan paling signifikan untuk menjelaskan hal tersebut adalah jumlah pendapatan nasional atau GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia yang relatif lebih besar, sekaligus Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan negara ASEAN lain.

Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, peran serta partisipasi ASEAN sebagai organisasi regional tidak dilupakan. KTT G20 2022 di Bali turut mengundang negara ASEAN lain sebagai tamu undangan, yakni Ketua ASEAN sekaligus Perdana Menteri Kamboja Hun Sen serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. *Summit* G20 juga mengundang ASEAN sebagai perwakilan kelompok regional di Asia. Hasil G20 2022 adalah *G20 Bali Leader's Declaration* yang membahas beragam aspek ekonomi maupun non-ekonomi, seperti perdamaian dunia, ketahanan pangan dan energi, stabilitas pasar, inovasi teknologi untuk pertanian hingga perlindungan lautan dunia.

Selain itu, ASEAN dan negara Asia Tenggara juga merupakan wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai proyek resmi di bawah payung G20 dalam bidang kesehatan, teknologi, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga kesetaraan gender seperti proyek *Cyber and Critical Tech Cooperation Program: Safety by Design in Southeast Asia*, *Energy Transition Partnership*, *Women Together*, *Ship to Shore Rights South East Asia*, dll. Gaung G20 juga akan dibawa Indonesia dalam menjalankan jabatan sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023, dengan membawa tema G20 yakni *Recover Together, Recover Stronger* dalam tiga isu utama yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. *

Referensi

- Al-Fadhat, F. (2022, April 29). Indonesia's G20 Presidency: Neoliberal Policy and Authoritarian Tendencies. *Australian Journal of International Affairs*, 76(6), 617-623. www.tandfonline.com. <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2070598>
- Bank Indonesia. (2021). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Bank Indonesia. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx>
- Brilianto, H. (2013). G20 dan Penanganan Krisis Global 2008. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/G20_dan_penanganan_krisis_glo_bal_2008.pdf
- Cambridge Econometrics, Global Green Growth Institute, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, he International Renewable Energy Agency
- United Nations Children's Fund, & Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. (2022). *Climate Sustainability Working Group (CSWG) G20 2022 Official Report: Stocktaking Economic, Social, and Environmental Impacts of Sustainable Recovery, Including Impacts on NDC Implementation*.
- Development Working Group (DWG) G20 2022. (2022). *G20 Bali Update on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and G20 Development Commitments*.
- Dzulfaroh, A. N. (2022, November 15). Mewakili Asia Tenggara, Mengapa Indonesia Bisa Menjadi Anggota G20? *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/15/110500365/mewakili-asia-tenggara-mengapa-indonesia-bisa-menjadi-anggota-g20?page=all>
- Flores, J. M., & Abad, J. (1997). *The Founding of ASEAN*. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/the-founding-of-asean/>
- G20. (2022). G20 Bali Leader's Declaration. https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration.pdf
- G20 Secretariat. (2022). *About G20*. G20.org. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.g20.org/en/about-g20/#overview>
- Guna, I. W. A. A., & Setiawina, N. D. (2022). The Impact of International Trade Disclosure in The Service Sector on ASEAN Economic Growth. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 6(2), 186-191. 2378-703X
- Hajnal, P. I. (2019). *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Hermawan, Y., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G., & Tanaga, S. (2011). *Proyek Riset G-20: Peran Indonesia dalam G-20: Latar belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia*. Friedrich Ebert Stiftung. 978-602-8866-03-3
- Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H., & Tanaga, S. (2011). *Peran Indonesia Dalam G-20*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, November 28). "Gawe" Besar Selesai, Pemerintah Tindaklanjuti Hasil KTT G20 Secara Detail. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved December 6, 2022, from <https://setkab.go.id/pemerintah-tindaklanjuti-hasil-ktt-g20-secara-detail/>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, November 28). *Presiden Minta Hasil KTT G20 Segera Ditindaklanjuti*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved December 4, 2022, from <https://setkab.go.id/presiden-minta-hasil-presidensi-g20indonesia-segera-ditindaklanjuti/>
- Irsalina, N. (2021). *Kenali Presidensi G20 Indonesia*. DISKOMINFO KOTA BOGOR. Retrieved December 6, 2022, from <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/741>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, November 16). *Hasil Konkret Presidensi G20 Indonesia Bantu Ketersediaan Pembiayaan Bagi Negara Rentan dan Miskin*. Kementerian Keuangan. Retrieved December 4, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Presidensi-G20-Bantu-Ketersediaan-Pembiayaan>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022, November 10). *Indonesia Bawa Tiga Isu Prioritas G20 pada Ketetuaannya di ASEAN 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved November 30, 2022, from <https://>

www.kominfo.go.id/content/detail/45572/indonesia-bawa-tiga-isu-prioritas-g20-pada-keketuaannya-di-asean-2023/0/artikel_gpr

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022, November 10). *Indonesia Bawa Tiga Isu Prioritas G20 pada Keketuaannya di ASEAN 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved December 4, 2022, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/45572/indonesia-bawa-tiga-isu-prioritas-g20-pada-keketuaannya-di-asean-2023/0/artikel_gpr
- KOMISI XI. (2022, November 9). *Jelang KTT G20, Puteri Komarudin Ungkap Peran KTT Dalam Pemulihan Ekonomi*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41649/t/Jelang+KTT+G20%2C+Puteri+Komar+u+din+Ungkap+Peran+KTT+Dalam+Pemulih+an+Ekonomi>
- Morillas, P., & Quero, J. (2019, March 15). The G20 in face of politicization: Avoiding or embracing contestation? *SOCIAL COHESION, GLOBAL GOVERNANCE AND THE FUTURE OF POLITICS*. Retrieved December 4, 2022, from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65387066/t20_japan_tf6_13_g20_face_politicization_avoiding_embracing_contestation-libre.pdf?1610293265=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_G20_in_face_of_politicization_Avoidi.pdf&Expires=1670303947&
- Nurgaheny, D. E. (2022, November 17). *Hasil KTT G20: Leaders Declaration, Dana Pandemi hingga Komitmen Lindungi Laut Dunia*. Kompas.com. Retrieved December 4, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/07411601/hasil-ktt-g20leaders-declarat+ion-dana-pandemi-hingga-komitmen-lindungi-laut>
- Putra, B. A. (2015, August). Indonesia's Leadership Role in Asean : History and Future Prospects. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 1(2), 188-197.
- Salim, Z. (2014, May 21). Indonesia in the G20: Benefits And Challenges Amidst National Interests and Priorities. *ResearchGate*. Retrieved December 2, 2022, from https://www.researchgate.net/profile/Zamroni-Salim/publication/233885641_Indonesia_in_the_G20_Benefits_And_Challenges_Amidst_National_Interests_and_Priorities/links/0fcfd50c93508e8f0d000000/Indonesia-in-the-G20-Benefits-And-Challenges-Amidst-National-Inter
- Sherpa G20 Indonesia. (2019). *Sejarah Singkat G20*. G20 Indonesia. Retrieved November 30, 2022, from <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/sejarah-singkat-g20>
- United Nations General Assembly. (1948, December 10). Universal Declaration of Human Rights. *Universal Declaration of Human Rights*, 1. http://www.multiculturalaustralia.edu.au/doc/unhrights_1.pdf

KHOLIDAH TAMAMI adalah PhD candidate dari Baku State University Azerbaijan. Menamatkan pendidikan di Pascasarjana Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah UI. Ia aktif sebagai jurnalis, pengajar, dan aktivis ILUNI UI.

ASEAN dan Hikayat ASLIA Tan Malaka

Mohammad Afifuddin

Setiap ada diskursus baru dalam jagad wacana di negeri kita, niscaya selalu diikuti hadirnya buku-buku dengan tema serupa. Sesungguhnya fenomena ini bukanlah hal ganjil. Inilah aksioma. Dalam perspektif ekonomi-bisnis, misalnya, dalil aksiomatik yang berlaku adalah: ada permintaan, ada penawaran. Salah satu contoh dari aksioma di atas adalah menguatnya isu tentang Komunitas ASEAN sejak tahun 2015 dan terbitnya beragam buku yang menyertainya.

Komunitas ASEAN digagas dengan tujuan supaya ASEAN memiliki institusi supranasional. Sehingga hubungan antara negara anggota tidak hanya sebatas pada institusi formal gabungan antara beberapa negara berdasarkan ikatan kepentingan, melainkan bisa terintegrasi dalam sistem aturan yang terpusat dalam pemerintah regional atau institusi supranasional. Gagasan itu merujuk pada apa yang telah terjadi dengan masyarakat Uni Eropa. Argumen yang dikemukakan adalah, hadirnya globalisasi yang berimplikasi pada meningkatnya eskalasi persaingan ekonomi-politik mengharuskan suatu negara berkelompok untuk memperkuat kembali regionalismenya agar SURVIVE dalam kontestasi ekonomi-politik internasional.

Seiring meluasnya diseminasi ide dan implementasi tentang Komunitas ASEAN, saat itu pula buku-buku mengenai komunitas ASEAN bermunculan. Sekedar contoh, beberapa buku (dari sekian banyak buku) yang bertemakan *ASEAN Community* adalah, "**Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015**" yang ditulis keroyokan oleh Philip Kotler, Den Huan Hooi, serta pakar *marketing* Indonesia Hermawan Kartajaya. Berkisah tentang bagaimana pola marketing ideal untuk menyongsong Komunitas ASEAN 2015, buku ini pertama kali diterbitkan oleh McGraw-Hill Education Asia pada tahun 2006. Kemudian ada pula buku berjudul *Know Your ASEAN* (Silkworm Books, 2008) yang berisi kumpulan tanya-jawab secara sederhana mengenai apa itu Komunitas ASEAN.

Selanjutnya muncul pula buku dengan tajuk, "*ASEAN Economic Community: Content and Roadmap*", sebuah monograf yang dieditori oleh Nguyen Hong Son dan diterbitkan *Hanoi Social Sciences Publishing House* tahun 2009. Lalu ada juga buku bertitel, "**Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order**" hasil gubahan Amitav Acharya, dan dipublikasikan oleh penerbit Routledge pada bulan Agustus 2009.

Tak mau kalah, para peneliti kita di LIPI (sekarang BRIN) juga merilis buku, "*Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*." Sebuah riset tentang ASEAN dalam perspektif ekonomi-politik yang diterbitkan Pustaka Pelajar dan P2P LIPI (2011). Sampel terakhir adalah buku berjudul, "*Achieving ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries & Businesses*" diterbitkan oleh *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) tahun 2012. Buku ini memberikan pandangan tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN menghadapi *ASEAN Community 2015*.

Catatan terhadap buku-buku di atas, maupun buku-buku lainnya tentang Komunitas ASEAN adalah, mayoritas buku-buku tersebut lebih berorientasi kepada isu Komunitas ASEAN yang dilihat dari *forecasting* (perkiraan) bisnis atau analisis politik internasional tanpa berpretensi mengikuti alur historis yang holistik mengenai *asbabun nuzul* (genealogi) ide federasi/asosiasi berbasis regionalisme tersebut. Dengan demikian bisa dianalogikan buku-buku tersebut mirip (sekali lagi, mirip, bukan sama persis) dengan gaya-gaya buku psikologi populer, di mana buku-buku tersebut hanya mengedepankan perspektif *self-help*, *how to* dan *do it yourself* yang menjamur seiring tumbuhnya "industri nasihat" di Indonesia. Kondisi ini memprihatinkan karena isu Komunitas ASEAN juga memerlukan tilikan historis.

“Membaca” Australia

Ketika dinamika Indonesia dan ASEAN telah dijelaskan di atas, lantas bagaimana dengan Australia? Dari sekian banyak dinamika dengan negeri kanguru tersebut, mungkin kita bisa menengok pada manuver Edward Snowden. Seandainya saja Tan Malaka masih hidup, entah apa yang ada di benaknya ketika membaca laporan Edward Snowden, bekas agen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Tahun 2013 Snowden membuat gempar dunia internasional karena membocorkan laporan tentang aktivitas intelijen Amerika Serikat dan/atau Australia yang menyadap telepon para pemimpin negara lain, termasuk Indonesia. Percakapan telepon Presiden SBY, Wakil Presiden, Ibu Negara, hingga beberapa Menteri ternyata pernah dimata-matai badan intelijen Australia.

Saat menyimak kontroversi seputar penyadapan yang dilakukan Australia, sama sekali tidak ada intensi untuk meresapi terlalu dalam kisah Zacky Anwar Makarim, mantan Direktur A Badan Intelijen ABRI yang pada periode 1991-1995 pernah mengejar Glend Merd Smith dan Peter John Waters, dua intelijen Australia di Plaza Indonesia karena yang bersangkutan sedang melakukan negosiasi pertukaran data rahasia negara dengan salah seorang oknum anggota ABRI (*Tempo*, 2-8/12/13). Pun tidak ada ketertarikan lebih jauh untuk mengikuti cerita tentang strategi *persona non grata* Ali Alatas kepada Australia terkait “kelancangan” dua agen *Secret Intelligence Service*, Australia tersebut. Ali Alatas memaksa Australia agar memulangkan dua agen itu, atau Indonesia yang akan mengusir mereka dengan paksa (*Tempo*, 2-8/12/13).

Kenapa cerita perseteruan intelijen Indonesia-Australia itu kurang menarik? Karena memori saya sekali lagi tertambat pada sebuah nama, yakni Tan Malaka. Memang Tan Malaka tidak sempat melihat atau terlibat dalam dinamika politik bilateral antara Indonesia dan Australia. Namun Tan Malaka adalah salah satu bapak Republik yang pernah menawarkan konsep dan pemikiran menarik tentang bagaimana cara memperlakukan “tetangga usil” itu. Tentu saja, jangan dibayangkan konsep tersebut tertuang dalam poin-poin normatif, teknokratis dan “naif” seperti yang selama ini sering dilakukan para diplomat kita dalam menyusun strategi diplomatiknya.

Gagasan tentang bagaimana seharusnya formasi relasional Indonesia dan Australia di masa depan dituangkan Tan Malaka dalam tulisan berjudul “*Aslia Bergabung*” (1943): sebuah visi ekonomi-politik brilian tentang posisi Indonesia dalam jagat peredaran ekonomi-politik internasional saat itu.

ASLIA Bergabung

Secara historis, bangsa ini pernah melahirkan pemikir besar yang sudah menawarkan gagasan tentang konsep konfederasi, asosiasi atau komunitas berbasis regionalisme di Asia Tenggara dan sekitarnya jauh sebelum Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Koman (Thailand), Narsisco Ramos (Filipina) dan S. Rajaratnam (Singapura) bersepakat mendirikan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 di Bangkok.

Sang pemikir besar itu adalah Datuk Ibrahim Tan Malaka. Jika selama ini kebanyakan kita mengenal karya besar Tan Malaka sebatas *Parlemen atau Soviet* (1921), *Si Semarang dan Onderwijs* (1921), *Naar de Republiek Indonesia* (1925), *Massa Actie* (1926), *Manifesto Bangkok* (1927), *Madilog* (1943), *Muslihat* (1945), *Thesis* (1946), *Islam dalam Tinjauan Madilog* (1948), *Pandangan Hidup* (1948), *Kuhandel di Kaliurang* (1948), dan *Gerpolek* (1948), sebenarnya Tan Malaka juga punya karya penting lain yang diberinya judul *Aslia Bergabung* (1943).

Tan Malaka menyebut Aslia adalah akronim dari Federasi Asia dan Australia: gabungan dari permulaan kata Asia dan suku kata terakhir Australia. Jika Plato memimpikan Atlantis sebagai acuan utopis peradaban modern, maka Tan Malaka bermimpi Aslia sebagai simbol peradaban modernnya. Karena itu Aslia sebagai bentuk postkapitalis dianggap Tan memiliki level yang lebih *advance* jika dibandingkan konsep “Indonesia” di zaman besi dulu. Adapun jangkauan Aslia yang dimaksud Tan meliputi Birma, Thailand, Annam, Philipina, Semenanjung Malaya, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, Sunda Kecil dan berujung pada Australia Panas. Yang dimaksud “Australia panas” adalah Australia bagian utara yang luas wilayahnya sepertiga dari keseluruhan benua Australia.

Kenapa waktu itu Tan Malaka punya visi tentang Aslia bersatu? Karena seluruh wilayah Aslia dipengaruhi iklim yang sama, yakni iklim panas, gerakan angin moeson, dan penduduknya yang berhubungan terus dari abad ke abad. “Dalam hakikatnya (mereka) beralat-perkakas, berekonomi, bersosial, berpolitik dan berjiwa (paham keamanan dan perasaan) dan berhasrat atau berimpian yang tidak berbeda satu sama lainnya,” kata Tan dalam *Madilog*. Bagi Tan jika

sukses menggabungkan Aslia, niscaya Aslia akan menjadi salah satu dari delapan wilayah “gabungan raksasa” yang ada dunia, yakni Amerika Utara, Amerika Selatan, Tiongkok, Indo-Iran, Afrika, Eropa Barat, dan Soviet-Rusia.

Konsep Aslia pertama kali dikumandangkan Tan Malaka dalam *magnum opus*-nya, *Madilog*. Meskipun sebenarnya Tan sudah menyiapkan buku *Aslia Bergabung* (1943) untuk menjabarkan konsep Aslia itu. Sayangnya, naskah utuh dari buku tersebut hilang sehingga tidak sempat dipublikasikan secara massal. Bagi sejarawan Hilmar Farid (2013), gagasan tentang Aslia adalah cara Tan untuk menempatkan “unit analisis” geopolitik maupun geekonominya di tengah dinamika perkembangan dunia waktu itu. Dengan kata lain, gagasan Aslia muncul sebagai resultante dari perkembangan ekonomi-politik dunia di dekade 1940-an.

Oleh karena itu, jika ada yang berasumsi bahwa ide tentang Komunitas ASEAN baru lahir dari forum *Bali Concord II* tahun 2003, asumsi tersebut harus disanggah. Sebab sejatinya benih pendirian Komunitas ASEAN sudah ditanam dalam buku *Aslia Bergabung* tahun 1943. Meski tidak persis sama, namun Tan Malaka sudah punya visi bahwa Asia (setidaknya ASEAN) memang harus bersatu.

Aslia Hilang

Sayangnya teks Aslia itu hilang. Hilangnya naskah itu sejatinya hanya simbol dari hilangnya aspek lain yang lebih besar, yakni hilangnya apresiasi kita pada Bapak Republik. Membahas gagasan Aslia Bergabung di era sekarang mungkin sudah kehilangan relevansinya. Namun bukan itu poin pentingnya. Yang urgen untuk kita maknai adalah bangsa ini sebenarnya punya banyak sekali pemikir-pemikir besar yang pernah menelurkan gagasan-gagasan brilian, namun mutiara pemikiran mereka terkubur dalam konstruksi sejarah palsu ala Orde Baru.

Sekedar contoh, dalam konteks politik internasional, selain Tan Malaka ada juga nama Hatta dan Sjahrir. Hatta mungkin lebih beruntung, karena tulisannya “mendayung diantara dua karang” menjadi basis politik bebas aktif. Meskipun prinsip itu sekarang dimaknai “naif” oleh SBY dengan slogan, “*zero enemy, thousand friends*.” Sedangkan gagasan Aslia Bergabung atau Nasionalisme ala Sjahrir terpengaruh dari periwayatan historis bangsa ini. Menghayati Aslia adalah salah satu cara untuk merevitalisasi hikayat yang telah berkarat. Bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk dicerna dengan dewasa. Bagi bangsa yang sedang krisis cendekiawan-negarawan, mendedah ulang makna pemikiran besar di masa lampau adalah suatu keharusan.*

MOHAMMAD AFIFUDDIN adalah Dosen Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Lahir dan besar di kota Gresik. Usai lulus dari SMA NU 1 Gresik, melanjutkan studi S1 pada Prog. Studi Sosiologi FISIP Universitas Jember (Lulus 2010). Setelah lulus, penulis berkarir sebagai jurnalis di harian *Jawa Pos*, Surabaya, sebelum undur diri untuk melanjutkan studi S2 di program Pascasarjana Sosiologi FISIPOL UGM tahun 2011. Selama studi di UGM, pernah terlibat beberapa penelitian ketika menjadi peneliti di *Institute of Governance and Public Affairs* (IGPA) MAP FISIPOL UGM. Puluhan tulisan pendeknya (opini koran) pernah terbit di harian *Kompas*, *The Jakarta Post*, *Koran Tempo*, *Jawa Pos*, *Republika*, *Seputar Indonesia*, dan berbagai media cetak/online lainnya. Beberapa karyanya seperti “*Nahdlatulogi ala Mbah Muchith*” telah terpublikasikan sebagai *chapter book* dalam buku “*Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*” (Penerbit Buku Kompas, 2010); “*Kaum Muda Tanpa Kaum*” (ditulis bersama Ach. Faidy Sujai’ie, 2011); Menjadi kontributor buku, “*Usaha Kecil Menengah dalam Pusaran Masyarakat Ekonomi ASEAN: Peluang, Tantangan dan Kesiapan*” yang diterbitkan ASEAN Studies Center FISIPOL UGM (2015); dan menulis “*Kontribusi Generasi Pasca-Indonesia bagi Perdamaian Dunia*” yang menjadi salah satu *chapter* dalam buku “*Pulih Bersama Bangkit Perkasa: Gagasan Optimis dari Indonesia untuk Kebangkitan Dunia Pasca Pandemi Covid-19*” (2022) yang diterbitkan Perpustakaan Press. Tahun lalu menerbitkan buku berjudul “*Berebut Emas di Bukit Giri: Politik Kebijakan Industri Perhiasan Emas Tradisional Berbasis UMKM*” (Jejak Pustaka, 2022). Saat ini sedang menyiapkan penerbitan naskah buku berjudul “*PARTITOKRASI: Sehimpun Esai Sosiologi Politik*” (2023).

Memantapkan Kerja sama Sinergis Persekutuan Negara-Negara Asia Tenggara

Khariroh

ASEAN dibentuk atas kesepakatan lima negara pendiri, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina pada 8 Agustus 1967. Pada masa-masa awalnya mungkin tidak begitu diperhitungkan dalam kancah geopolitik internasional, namun setelah 55 tahun berlangsung—sekarang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia), dunia mengakui bahwa kawasan Asia Tenggara adalah kawasan paling damai dan stabil di bumi.

Kondisi sedemikian itu, bisa dicapai karena negara-negara anggota Asean sejak dasa warsa awal berdirinya terus menjaga komitmen untuk menegakkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 1971 di Kuala Lumpur telah dideklarasikan bahwa Asia Tenggara adalah *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Dan pada KTT pertama ASEAN di Bali 23-24 Februari 1976, ZOPFAN resmi diterima anggota ASEAN sebagai kerangka bagi kerja sama politik untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral dari campur tangan pihak luar di Asia Tenggara.

Selanjutnya, pada 15 Desember 1995 di Bangkok, negara-negara anggota Asean menandatangani Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*South East Asia Nuclear Weapon Free-Zone*) sebagai komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan damai yang bebas nuklir dan senjata pemusnah massal. ASEAN juga telah bersepakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang meliputi: pemberantasan terorisme, perdagangan narkoba/obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata, perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional.

Meskipun musti tetap diakui bahwa masih ada beberapa faktor penghambat dalam kerjasama Asean, seperti: (1) Perbedaan Ideologi yang dianut masing-masing negara anggota, (2) Konflik dalam negeri dan ketegangan insidental bilateral, (3) Kebijakan protektif yang diberlakukan oleh beberapa negara anggota: serta (4) Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, akan tetapi prinsip: *negosiasi, diplomasi, perundingan, dan penyelesaian konflik/persengketaan secara damai* (harus) tetap dipegang, dirawat, dan ditegakkan. Sebab, itulah kunci utama yang akan terus menjamin kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan paling damai dan menjanjikan di bumi sebagaimana diamankan pada lambang/logo ASEAN yang terdiri dari (4) warna, yaitu: merah melambangkan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan kemakmuran, dan biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, serta ilustrasi batang padi terikat melambangkan anggota Asean yang bersatu membangun kekuatan dalam kebersamaan.

Ke depan—sebagai refleksi dan catatan penting, negara-negara Asean musti makin mengonkritkan ikatan persekutuan (mutual understanding) yang sudah terjalin menjadi bentuk-bentuk kerjasama sinergis (*synergic network*) dalam spirit kebersamaan untuk baku-bantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anggotanya (*the specific and common goals*) dengan mengembangkan kebersamaan menjadi solidaritas Asia Tenggara yang dilampiri jiwa persahabatan antar-negara sebagai bagian dari umat manusia. Hal ini harus disadari, sebab oleh persamaan letak geografis, kawasan negara-negara Asia Tenggara rawan menghadapi kebencanaan alam. Apabila kerjasama sinergis dan sikap kebersamaan ini bisa kokoh dibangun, maka semua negara Asia tenggara dapat *survive*, bersatu, kuat, damai, dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan bersama. *

KHARIROH adalah Guru Bahasa Indonesia MTs NU Alhidayah Kendal, Jawa Tengah bernama pena 'Kharir Hatta'. Ia dapat dihubungi di email: khariroh1@gmail.com dan WA: 089668995646.

Diplomasi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Resmi ASEAN

Muhamad Nasir Pariusamahu

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain memiliki harta alam yang banyak juga memiliki kekayaan budaya, suku, ras dan bahasa. Kekayaan Indonesia inilah yang menjadi sebuah poin utama guna menginternasionalisikannya dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat dunia. Salah satu hal yang telah diusahakan adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Sejak Kongres Bahasa Indonesia (KBI) V tahun 1998 topik ini mulai digaungkan, namun redup dalam beberapa KBI, dan mulai muncul lagi dalam dua kali KBI secara berturut—turut yaitu KBI X (2013) dan KBI XI (2018).

Sejalan dengan ide besar tersebut, Dr. Sailal Arimi, staf pengajar Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM menyatakan, "Aktualisasi bahasa Indonesia di panggung internasional ini bisa dilihat dari sekurang-kurangnya empat perspektif, yaitu historisitas, legalitas, statistik, dan vitalitas sosiolinguistik. Dari perspektif historisitas, bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu Riau yang embrionya diusulkan pada 1926 lalu ditetapkan oleh pemuda Indonesia dari berbagai wilayah Nusantara menjadi butir terpokok dari 2 butir lain Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu, "Kami putera puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." (www.ugm.ac.id, 19/05/2022).

Penyampaian beliau tentu menjadi sebuah inspirasi bersama dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN, dengan memanfaatkan momen keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Selain itu, ajakan ini juga disampaikan oleh Mendikbudristek, Nadim Makarim dalam laman resmi www.kemdikbud.go.id pada tanggal 4 April 2022 bahwa masyarakat dan pemerintah bahu membahu terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia.

Peluang Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Resmi ASEAN

Pertanyaan pemantik, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi ASEAN? Sekian banyak pertanyaan dengan topik sama. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa meyakinkan hal tersebut kepada saudara—saudara kita di dunia, yang bisa kita mulai dalam lingkup kecil kawasan Asia Tenggara ini.

Tentu dengan mempertimbangkan aspek historis, hukum dan linguistik menjadi dasar pijak kita agar terus membumikannya dalam komunikasi antarmasyarakat yang berada dalam kawasan ini. Apalagi dengan adanya usulan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN oleh PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada tanggal 1/4/2022 lewat siaran pers, membuat pemerintah dalam hal adalah Mendikbudristek "naik pitam" untuk lebih getol memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu.

Ada alasan kuat sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, adanya Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, suku dan budaya menjadi alasan prioritas mengapa bahasa Indonesia harus bisa menjadi bahasa pergaulan antarmasyarakat dunia. Maka itu, hadirnya BIPA sebagai jembatan komunikasi perlu diapresiasi. BIPA sendiri bertujuan untuk menyebarluaskan Bahasa Indonesia, menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. BIPA juga dapat berperan sebagai penunjang keberhasilan diplomasi kebahasaan Indonesia di dunia Internasional.

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VI tahun 1993, cita—cita tersebut telah digaungkan. Alhasil dari sebuah cita—cita panjang tersebut sampai kini jumlah pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika, Asia Tenggara dan Asia Pasifik (Aspasaf). Dari ketersediaan jumlah lembaga penyelenggaraan BIPA, sudah ada 428 lembaga penyelenggara BIPA yang digiatkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kemdikbudristek serta secara mandiri pegiat—pegiat BIPA di seluruh dunia. Upaya—upaya tersebut mencapai hasil yang baik dengan adanya antusias pembelajar bahasa Indonesia di 47 negara.

Kedua, Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah dan serapan asing. Berkaitan dengan ini, maka rujukannya ada pada kamus. Keberadaan kamus sangat penting dalam mengetahui jumlah kosakata suatu bahasa, transformasi ide dan pengetahuan, serta ekspresi sikap penuturnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-4 (2008), telah memuat lebih dari 90.000 lema. Jumlah lema meningkat dalam setiap edisi. Mari kita bandingkan, edisi satu 62.100 (1988), edisi dua 68.000 (1991), edisi ketiga 78.000 (2001), dan edisi keempat 90.000 (2008). Peningkatan dari segi jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami dinamisasi sesuai arus perubahan zaman. Bisa berarti bahasa Indonesia terbuka dengan berbagai bahasa yang ada di seluruh dunia.

Ditambah terbitnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, tesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu pun sudah diterbitkan, antara lain Glosarium Kedokteran, Glosarium Biologi, Glosarium Fisika, Glosarium Kimia, Glosarium Matematika, Glosarium Pendidikan, dan Glosarium Perikanan. Atas penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Fakta tersebut dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional, apalagi ASEAN.

Ketiga, kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Berkembang opini bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, sesungguhnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat ketuannya tahun depan harus mampu menyeimbangkan opini tersebut bahkan bisa membangun opini baru terhadap warga ASEAN untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.

Perlu diingat bahwa saat ini bahasa Indonesia telah menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia baik di Eropa, Amerika, Australia dan berbagai kampus ternama di Asia. Bila merujuk pada pembahasan poin 2 di atas bahwa bahasa Indonesia telah dituturkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara serta bahasa Indonesia telah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi sedangkan bahasa Melayu tidak.

Kedudukan bahasa Indonesia tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang awal mulanya bahasa Indonesia diikrarkan saat sumpah pemuda tahun 1928 yang salah satu ikrarnya berbunyi, "kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Lintasan sejarah tersebut menjadi langkah awal Bergeraknya nafas bahasa persatuan dalam mewujudkan cita—cita Indonesia kelak.

Keempat, Bahasa Indonesia telah disiapkan secara yuridis formal. Setelah kita mengilhami periodisasi bahasa Indonesia, dan kenapa ada sebuah keinginan kuat pemuda saat itu untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, padahal ada berbagai ragam bahasa daerah, bahkan juga ada bahasa Melayu. Di kemudian hari maka terjawab teka—teki tersebut bahwa sebenarnya bahasa Indonesia salah satu kunci persatuan bangsa selain tanah air dan bangsa. Setelah bertahun—tahun berlalu, pasca kemerdekaan bahasa Indonesia diperkuat dengan Undang—undang dan peraturan—peraturan hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 36 Undang—undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

Kemudian status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang—Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Lebih terperinci kebijakan bahasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan

Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

Konklusi

Memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang dinamis, terbuka dan pasti tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Kita pahami bahwa pemerintah akan berupaya terus dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa dan sastra ke seluruh dunia. Dalam konteks perluasan bahasa, kita tidak boleh kalah dengan Inggris, Arab, Cina bahkan Rusia, apalagi Korea dengan K-Drama, dan K-Pop.*

Referensi

- Agung. 2022. *Promosikan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kedua ASEAN*. [Online]. Diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22515-promosikan-bahasa-indonesia-sebagai-bahasa-kedua-asean> pada tanggal 7 Desember 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2022. *Kongres Bahasa Indonesia: Bermufakat Tentang ke Indonesian dalam Bahasa Persatuan*. [Online]. Diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3673/kongres-bahasa-indonesia--bermufakat-tentang-ke-indonesiaan-dalam-bahasa-persatuan> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. *Capain Keberhasilan BIPA Tingkatkan Fungsi Bahasa Indonesia di Kancah Dunia*. [Online]. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/capaian-keberhasilan-bipa-tingkatkan-fungsi-bahasa-indonesia-di-kancah-dunia> pada tanggal 3 Desember 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. *Mendikbudristek: Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi ASEAN Dikedepankan*. [Online]. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/mendikbudristek-bahasa-indonesia-sebagai-bahasa-resmi-asean-dikedepankan> pada tanggal 5 Desember 2022
- Kompas.com. 2022. *10 Alasan Bahasa Indonesia Pantas Jadi Bahas Resmi ASEAN*. [Online]. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2022/04/05/132958571/10-alasan-bahasa-indonesia-pantas-jadi-bahasa-resmi-asean?page=all> pada tanggal 5 Desember 2022.
- Kompas.com. 2022. *Indonesia Resmi Jadi Ketua ASEAN 2023. Apa Tugasnya?* [Online]. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/13/203100665/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-tugasnya-?page=all> pada tanggal 7 Desember 2022.
- Tim detikcom.2022. *Terlalu Dini Klaim PM Malaysia Soal Jokowi Setuju Bahasa Melayu*. [Online]. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6012413/terlalu-dini-klaim-pm-malaysia-soal-jokowi-setuju-bahasa-melayu/2> pada tanggal 5 Desember 2022.
- Widodo, Supriyanto. 2022. *Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional*. [Online]. Diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/803/bahasa-indonesia-menuju-bahasa-internasional> pada tanggal 6 Desember 2022.
- Zulfikar, Achmad. 2013. *Bahasa Indonesia Sebagai Embrio Bahasa ASEAN: Peluang dan Tantangan Menuju ASEAN Community 2015*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Makalah dipresentasikan dalam Kongres Bahasa Indonesia X tahun 2013.

MUHAMAD NASIR PARIUSAMAHU (Nasir) dilahirkan tanggal 5 Desember 1992, di Dusun Parigi, Maluku Tengah, Maluku. Tamat SD-SMA di Kabupaten Maluku Tengah. Menyelesaikan studi S1- S2 di Universitas Pattimura Ambon. Beberapa karyanya telah dibukukan seperti *Ketika #hujan Bicara* (2017) *Memeluk Senja: Kumpulan Puisi Para Guru Indonesia* (2020), *Antologi Sio Baba* (2021) dan lainnya. Sejak diamanahkan menjadi Instruktur Literasi Nasional (2019) oleh Kantor Bahasa Maluku, kini Pengajar Praktik Program Guru Penggerak Maluku Tengah, Fasilitator Provinsi PKB Kemenag. Ia aktif di Rumah Produktif Indonesia Provinsi Maluku, Forum Lingkar Pena Maluku, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Maluku, IGI Maluku Tengah, guru di MTs Negeri 2 Maluku Tengah. Dia juga dianugerahkan Juara 1 Pembina *Madrasah Young Researcher Supercamp* Kemenag (2021) dan Juara Favorit Guru Berprestasi Nasional Kemenag (2022). Bagi yang berteman bisa lewat *fb*: Muhamad Nasir Pariusamahu, *blog*: <http://kintalsapanggal.blogspot.com>, *twitter*: @asma_ditha, *IG*: ghuru_nas *WA/HP/Telegram*: 085243139596. Dia ingin sekali menaikkan orang tuanya haji dengan hasil keringatnya.

Gastrodiplomacy: Branding Indonesia di ASEAN

IGN Agung Wiryanata

Pendahuluan

Hubungan satu negara dengan negara lain diawali dengan diplomasi sebagai alat satu negara untuk mencapai tujuan politis dan promosi negara di dunia internasional. Dalam teori hubungan internasional, istilah *people to people contact* menargetkan masyarakat sebagai komunitas internasional, yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan media diplomasi yang lebih lembut (*soft power*) dan kekeluargaan. Bentuk diplomasi seperti ini didefinisikan sebagai usaha dari satu atau lebih aktor internasional untuk mempengaruhi lingkungan internasional lewat hubungan langsung dengan publik luar negeri.

Hubungan antar individu yang bersifat kekeluargaan kini semakin mudah dan mampu melewati batas negara di seluruh dunia yang bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Diplomasi dapat dilakukan melalui diplomasi kebudayaan dengan tujuan mempengaruhi pendapat umum dalam upaya mendukung tercapainya kepentingan nasional. Salah satu cabang yang tumbuh dan berkembang secara kreatif dan dinamis adalah kuliner. Produk ini dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selain menampilkan corak budaya yang khas, juga telah berperan nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan Indonesia melalui kuliner khas Nusantara sebagai alat diplomasi. Diplomasi melalui makanan ini dikenal dengan istilah *gastro diplomacy*.

Linda Morgan menyampaikan bahwa *diplomatic gastronomy is style and power at the table* bahkan menyimpulkan bahwa *the power symbolism of diplomatic meals, creating the term diplomatic gastronomy to describe the prestige based power interactions that use food as a medium for interaction*. Sebagai salah satu contoh praktis, pada gelaran G20 yang puncaknya diadakan di Bali Presiden Jokowi mengadakan dua kali jamuan yaitu makan siang dan makan malam yang sangat santai dengan menyajikan masakan Nusantara, begitu juga dalam politik Indonesia sering kita lihat para politikus bertemu sambil menikmati hidangan nasi goreng, jajanan dan lain-lain yang disebut juga diskusi meja makan.

Branding Indonesia di ASEAN: Apa Itu Gastrodiplomacy?

Sebelum memahami *gastrodiplomacy* ada baiknya memahami apa sebenarnya gastronomi dan apa perbedaan dengan kuliner yang lebih sering kita dengar. Menurut Presiden Indonesian Gastronomy Association Indera Ketaren, gastronomi adalah sebuah ilmu mengenai hubungan makan dan seni budaya atau seni makan yang baik. Secara universal gastronomi adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari mengenai hubungan kuliner dengan berbagai komponen budaya dan sejarah dimana makanan yang fokusnya pada hidangan yang berkualitas prima (*gourmet*). Sedangkan kuliner adalah seni memasak yang baik. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa gastronomi adalah pemerhati, pecinta dan penikmat makanan dan menilai makanan dari sisi sejarah, budaya, falsafah, lanskap geografis dan metoda memasak.

Diplomasi gastronomi menjadi alat yang paling populer dalam diplomasi publik, hanya berbekal pisau, garpu, sendok dan bendera serta menggunakan restoran untuk mempromosikan kebudayaan dan makanan serta berbagi keberagaman yang unik setiap makanan berbagai negara. Mantan Menteri Luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahkan pernah menyatakan bahwa penggunaan makanan dalam berdiplomasi adalah cara yang sudah lama digunakan dalam praktik-praktik diplomasi. Selain itu di era tahun 2000, beberapa negara sudah melakukan *gastro diplomacy*. *Gastrodiplomacy* merupakan inisiatif awal diplomasi gastronomi yang diluncurkan pemerintah Thailand pada tahun 2002 untuk mendorong lebih banyak orang di seluruh dunia makan masakan Thailand. Contoh lain adalah Korea dengan diplomasi kimchi.

Tujuan utama dari *gastrodiplomacy* adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi suatu negara dengan melibatkan aspek promosi yang dilakukan untuk mendukung penyebaran pengaruh budaya suatu negara. *Gastrodiplomacy*

sendiri memanfaatkan budaya kuliner secara strategis untuk membangun citra, yang berkaitan dengan mempengaruhi persepsi publik asing terhadap budaya suatu bangsa dan agenda politik luar negeri. Diplomasi gastronomi berbeda dengan diplomasi kuliner. Jika kuliner lebih menekankan pada proses masak-memasak dan seni menikmati makanan, maka gastronomi mempelajari dimensi sejarah, filosofi, dan latar budaya dari makanan. Karena ada dimensi sejarah, filosofi, budaya, dan gastronomi dengan promosi budaya tak terhindarkan. Juga, karena mengandung elemen budaya, dalam khasanah diplomasi, gastronomi dimasukkan ke klaster diplomasi kebudayaan.

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN yang memiliki seni dan budaya kuliner yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang perlu dikembangkan dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan waktu. Kekayaan seni kuliner yang merupakan kearifan lokal patut dipertahankan bahkan perlu dikembangkan makanan daerah dengan semakin banyak ragam makanan yang muncul untuk menjadi ciri khas dari daerah. Kuliner tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang mampu menjadi asset bangsa. Sebagai salah satu aset budaya, upaya itu dapat dilakukan melalui revitalisasi dan proses transformasi melalui konsep *invented tradition* yang bernilai ekonomis dan daya jual untuk pariwisata dan budaya.

Gastrodiplomacy untuk Meningkatkan Branding Indonesia

Menurut Anna Lipscomb, dalam penelitiannya berjudul *CULINARY RELATIONS: GASTRODIPLOMACY IN THAILAND, SOUTH KOREA, AND TAIWAN* (2019), mengatakan bahwa karena *gastrodiplomacy* terkait dengan upaya membangun citra bangsa melalui makanan, ia berada dalam ranah perjuangan diplomasi kebudayaan suatu negara untuk menumbuhkan rasa saling pengertian antarbangsa. Hasil penelitiannya di tiga negara itu, ia menyimpulkan bahwa setiap negara berupaya mengoneksikan makanan khasnya dengan identitas nasional masing-masing (*NATIONAL IDENTITY*).

Melalui *gastrodiplomacy*, Indonesia yang memiliki beragam keunggulan, serta adanya peran pemerintah dan semua *stakeholders* bekerjasama dengan keras untuk mewujudkannya. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan *gastrodiplomacy* menjadi branding baru Indonesia yaitu :

Acara Diplomatik

Erik Goldstein mengatakan salah satu barometer penggunaan upacara diplomatik adalah melalui media makanan. Ketika kepala negara berkumpul dalam konteks bilateral atau multilateral, kegiatan inti dari acara-acara diplomatik yang penting adalah perjamuan makanan. Seringkali dalam beberapa acara diplomatik, kita terjebak untuk memberikan *western food* daripada makanan lokal. Sudah saatnya para menteri dan pejabat tinggi di negara kita, mulai menyajikan makanan lokal kepada tamu-tamu asing untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui makanan.

Diplomasi *soft power* yang dilakukan tidak sebatas pada promosi keragaman budaya, keindahan alam, dan lezatnya makanan. Untuk memproyeksikan citra Indonesia dalam perspektif yang lebih luas dan strategis, diplomasi kebudayaan dilakukan dalam narasi baru, yakni mencitrakan Indonesia yang demokratis, moderat, toleran, dan sangat beragam seni dan budayanya. Hal inilah yang menjadi acuan untuk *gastrodiplomacy* Indonesia. *Gastrodiplomacy* Indonesia sebaiknya menarasikan makanan yang memiliki nilai simbolis yang memproyeksikan identitas nasional dan karakter bangsa. Misalnya, rendang yang sudah mendunia, nasi tumpeng dan gado-gado. Jika *gastrodiplomacy* diletakkan dalam bingkai narasi baru diplomasi kebudayaan, makna simbolis dan filosofi makanan itu harus dinarasikan kepada *audiens*. Nasi tumpeng yang bentuknya kerucut menunjuk ke atas menyimbolkan doa kita kepada Maha Pencipta akan sampai kepada-Nya. Ini simbol bangsa Indonesia yang religius.

Kerucut nasi kuningnya yang dikelilingi berbagai lauk-pauk warna-warni menunjukkan bangsa Indonesia yang beragam dalam etnik, suku, dan agama. Warna lauk pauk memberi keindahan dan lezatnya bagi kebinekaan Indonesia. Begitu juga gado-gado yang berisikan beragam sayuran warna-warni jika sudah disatukan saus kacang akan terasa lebih lezat ketimbang dinikmati secara terpisah. Gado-gado juga berkarakter fleksibel dan moderat.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki potensi kuliner untuk mencapai brand image kuliner diluar negeri. Beberapa masakan Indonesia terpilih dalam daftar *World's 50 Best Foods versi CNN* antara lain: rendang, nasi goreng, soto ayam, bahkan rendang menduduki posisi pertama di tahun 2011 dan 2017. Rendang bagi masyarakat Minang, memiliki filosofi yang sangat kuat. Orang Minang percaya bahwa saat memasak rendang ada tiga makna filosofis yang ada di baliknya, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan. Saat memasak rendang, seseorang membutuhkan kesabaran dan

kegigihan dalam mengaduk, serta kebijaksanaan dalam mengatur suhu api. Selain itu, kebijaksanaan juga diperlukan dalam memilih bahan-bahan seperti daging, cabai, dan rempah-rempah lain untuk mencapai cita rasa yang diinginkan. Tidak hanya itu, aspek kesabaran dan pengalaman juga dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan dalam membuat rendang.

Indonesia, seperti yang kita ketahui, begitu kaya akan budaya, bahasa, dan tentu saja kuliner, seharusnya dapat menjadikan *gastrodiplomacy* sebagai peluang untuk memperluas penyebaran budaya ke kancah global. Masih menjadi pekerjaan rumah agar Indonesia bisa mencapai tujuan *Nation Branding* yang berusaha dibentuk melalui jalur diplomasi gastronomi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan aksi diplomasi minimal di ASEAN, Indonesia dapat berperan menangani konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN dengan menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik, sembari menikmati hidangan Nusantara.

Pariwisata

Liz Sharples dalam *Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets* menyampaikan *the growth of culinary tourism is seen as an outcome of a trend where people spend much less time cooking, but choose to pursue their interest in food as a part of a leisure experience such as watching cooking shows, dining out and the like*. Adanya perkembangan trend wisata gastronomi atau yang lebih populer dikenal sebagai wisata kuliner yang pada saat ini didorong oleh kearifan dan budaya lokal.

Salah satu upaya untuk menarik wisatawan melalui wisata gastronomi adalah dengan menggelar pagelaran atau festival budaya. Beberapa contoh penyelenggaraan kegiatan yang mendukung *gastrodiplomacy* antara lain Ubud writers and reader festival yang sebagian acaranya menampilkan kuliner, Bali culture Night, dan festival lainnya. Kegiatan dan festival tersebut dikenal sebagai ajang gastronomi yang banyak sekali menarik minat wisatawan mancanegara. Selain festival, beragam program liburan yang di promosikan oleh pihak tour travel untuk mengunjungi suatu tempat hanya untuk mencicipi makanan yang sudah dikenal wisatawan melalui program televisi. Kegiatan seperti ini sudah digagas oleh komunitas Jakarta Food Traveler yang sering mengadakan kegiatan berkeliling Jakarta hanya untuk mencicipi kuliner khas daerah tersebut.

Kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition) yang biasanya berlangsung selama 2-4 hari yang diikuti oleh peserta nasional dan internasional, biasanya akan disajikan makan bersama. Sebaiknya hotel dapat menampilkan masakan Indonesia dalam satu hari. Kegiatan Berbeda dengan arus utama diplomasi, dapat juga dilakukan model diplomasi yang berbeda, yaitu diplomasi Glokalisasi Gastronomi yaitu bukan kuliner Nusantara yang dibawa ke luar tetapi warga dunia yang datang ke Indonesia dengan memperkenalkan kuliner Indonesia. Hal ini sudah dilakukan dalam hidangan makanan peserta G20 di Bali sebagai contoh *gastrodiplomasi* di rumah sendiri, namun memberikan keuntungan dan pengaruh *mind-set* yang tinggi karena wisatawan melakukannya dengan sadar bahkan membayar seperti aktivitas *cooking class*.

Pengembangan UMKM Informal

Berbagai jenis makanan yang ditawarkan lebih banyak dikelola oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang keliling, usaha kaki lima, usaha dalam rumah tempat tinggal dan sebagainya. Diakui atau tidak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan baik pagi, siang dan malam dari makanan kaki lima dan menjadi tulang punggung penggerak roda ekonomi Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah terpadu terhadap pelaku UMKM di Indonesia dengan mengangkat dan mengukuhkan harkat martabat makanan jalanan dan usaha industri makanan rumah tangga sebagai bagian dari wajah gastronomi Indonesia. Peran pemerintah dan swasta perlu membantu UMKM agar menjadi pengusaha makanan yang tangguh dalam menghadapi globalisasi.

Salah satu jalannya adalah membangun citra produk makanan jalanan dan usaha industri makanan rumah tangga secara menyeluruh dan konsisten baik di Indonesia maupun di luar negeri. Thailand, Vietnam dan Malaysia telah mendorong pengembangan makanan kaki lima agar lebih go internasional, melalui penayangan di *channel* televisi berbayar yang menayangkan makanan. Selain itu perlu upaya untuk memberikan fasilitas bagi para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan serta memberikan pelatihan menjadi *entrepreneurship, food higienic, marketing* dan lain-lain, secara otomatis akan menggerakkan roda perekonomian bangsa dengan perluasan tenaga kerja dan kedaulatan pangan.

Saat ini banyak negara yang menggarap *nation branding*, untuk itu sudah saatnya Indonesia terus untuk meningkatkan melalui diplomasi seni, kebudayaan dan kuliner atau gastronomi. Kecenderungan pola hubungan internasional yang lebih mendorong *people to people contact* sebaiknya dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki keunggulan sumber daya alam dengan kekayaan rempah-rempah yang berlimpah maupun sumber daya manusia.

Salah satu *event* besar yang sangat mendunia yang diselenggarakan di Indonesia adalah G20 yang menampilkan masakan Nusantara seperti rendang daging sapi, ikan cod kukus dan asparagus dalam saus kunyit Bali, diikuti dengan mousse coklat ala Aceh serta sate, sirlion wayu, nasi sayur, tempe dan kerupuk. Pengembangan gastronomi diperlukan upaya bersama meliputi semua pihak baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat agar Indonesia dapat menjadi *champion* dalam *gastro diplomacy*.*

Referensi

- Agung Wiryanata, IGN (2021). *Pengantar Akuntansi Hotel*. Denpasar: Udayana University Press.
- Darma Putra, I Nyoman dan Pitana I Gede. (2010). *Pariwisata Pro Rakyat: Meretas Jalan Mengetaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Yulliana, Engga Ayu, et al. (2021). *Makanan sebagai alat Soft Power: Studi Perbandingan Gastrodiplomasi Jepang dan Korea Selatan*. Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- L'Etang, Jacquie. (2006). Public relations and sport in promotional culture. *Public relations review*.
- Setiawan, Rudi. (2016). *Memaknai Kuliner Tradisional di Nusantara: Sebuah Tinjauan Etis*. Respons: Jurnal Etika Sosial.
- Rockower, Paul S. (2012). *Recipes for gastrodiplomacy*. Place Branding and Public Diplomacy.
- Lipscomb, Anna. (2019). *Culinary Relations: Gastrodiplomacy in Thailand, South Korea, and Taiwan*. The Yale Review of International Studies.
- Zhang, Juyan. (2015). The food of the worlds: Mapping and comparing contemporary gastrodiplomacy campaigns." *International Journal of Communication*.
- Once Again. Indonesia's RENDANG and Nasi GORENG Crowned World's Best Foods." Indonesia Travel, www.indonesia.travel/id/en/news/once-again-indonesia-s-rendang-and-nasi-goreng-crowned-world-s-best-foods.
- Developer, Mediaindonesia.com. "Gastrodiplomasi Dan Dipomasi Kebudayaan. Media Indonesia, 3 Aug. 2020, mediaindonesia.com/opini/333731/gastrodiplomasi-dan-diplomasi-kebudayaan.
- Tazaki, Kazue. (2006). Green-tuff landslide areas are beneficial for rice nutrition in Japan. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*.

IGN AGUNG WIRYANATA lahir di Bonbiyu Blahbatuh Gianyar bulan Februari 1972, dan mengikuti pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gianyar. Tahun 1996 menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Udayana dan juga memperoleh Akuntan. Tahun 2012 menamatkan S2 Magister Akuntansi di Universitas Udayana. Tahun 2015 mendapatkan Carteered Accountan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Pernah juga mengikuti *Short Course* di William Angliss Institute Melbourne Australia tahun 2013, dan di Republic Polytechnic Singapura tahun 2017. Pernah bekerja sebagai Administrasi Keuangan Proyek PT. Teknik Umum Pulau Bintan (1997) dan lainnya. Bukunya yang telah terbit adalah: *Manajemen Keuangan Hospitaliti* (Rajawali press, 2008), *book chapter Homestay Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan* (STP, 2012), *Pengantar Akuntansi Hotel* (Udayana Press, 2021), *Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kinerja keuangan* (Poltekpar Bali Press, 2022) dan buku G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa (Perpusnas Press, 2022). Tertarik meneliti tentang Akuntansi Hotel, Desa Wisata, Homestay dan Kuliner Nusantara. Ia dapat dihubungi di email: agungwiryana1972@gmail.com.

Guru SILN sebagai *Soft Power Diplomacy* Indonesia-ASEAN

Nurjanni Astiyanti

*"A teacher affects eternity: he can never tell
where his influence stops"*

--Adams (1907)

ASEAN 2025

Deklarasi ASEAN Community pada KTT ke-27 tahun 2015 merupakan tonggak penting sejarah ASEAN dalam perhelatan global. Para pemimpin ASEAN pada saat itu bersepakat menarik gerbong transformasi organisasi regional ASEAN menuju komunitas yang solid untuk mewujudkan visi ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* (Melangkah Maju Bersama). Cetak biru ASEAN 2025 tersebut merupakan referensi bagi konsolidasi dan pembangunan Masyarakat ASEAN selama satu dekade (2016-2025) untuk terus mendorong pemahaman dan penguatan identitas serta penghormatan terhadap keberagaman ASEAN.

Indonesia bersama negara anggota lainnya berkomitmen tinggi untuk melaksanakan Cetak Biru ASEAN 2025 yang menjadi bagian dari kepentingan nasional dan kepentingan bersama ASEAN. Fokus utama capaian ASEAN 2025 ditekankan pada pembangunan manusia dan kesejahteraan Masyarakat ASEAN melalui pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu instrumen *soft power diplomacy* yang amat strategis.

Terkait dengan praktik diplomasi, *soft power* seringkali dikaitkan dengan *public diplomacy*. Istilah *soft power* pertama kali dilontarkan Profesor Josep Nye dari Harvard University pada tahun 1990-an. Ia menggambarkan *soft power* sebagai suatu kemampuan untuk memesona dan mengkooptasi daripada memaksa dan menggunakan kekuatan ekonomi dan politik sebagai alat persuasi (Nye, 2009). Karena sifatnya yang non-koersif, penggunaan *soft power* memungkinkan terjadinya persuasi dan mendorong pihak lain untuk bekerjasama.

Seturut Nye, *soft power* berakar dari budaya suatu bangsa, nilai-nilai politik, citra negara dan kebijakan luar negerinya. Indonesia sebagai negara yang berlimpah aset dan potensi pertumbuhan yang besar, dilansir menempati posisi ke-47 dari 120 negara dalam *Global Soft Power Index tahun 2022* (Banuara, 2022). Ranking tersebut menandakan Indonesia masih perlu lebih banyak bekerja mengelola komunikasi dan mengintegrasikan aspek *soft power* yang dimiliki untuk masuk barisan kompetitor global.

Sementara itu, *public diplomacy* adalah upaya komunikasi yang disengaja yang memanfaatkan *soft power* dengan memaparkan informasi dan beragam aspek *soft power* suatu bangsa yang dianggap positif oleh khalayak asing (Rugh, 2016). Meskipun sudah diterapkan sejak masa silam, konsep *public diplomacy* diperkenalkan dalam literatur akademik oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 dan kemudian menjadi populer seiring munculnya terma *soft power* dari Josep Nye.

Berbeda dengan diplomasi tradisional, *public diplomacy* mengacu pada keseluruhan proses komunikasi langsung antara publik dengan para pengambil keputusan negara lain untuk menginformasikan dan mempersuasi publik dari negara lain tersebut sehingga terbangun struktur kelembagaan jangka panjang dan permanen melalui elemen-elemen seperti budaya, pendidikan dan bantuan kemanusiaan (Çelik, 2022). Dengan lain kata, jika diplomasi klasik terjalin antara aparatus pemerintah (*government-to-government*, G2G), maka *public diplomacy* terbangun antara aparatus pemerintah dengan publik negara lain (*government-to-public*, G2P).

Pendidikan merupakan salah satu bidang esensial dalam *public diplomacy*. Studi terkini menunjukkan bahwa *public diplomacy* tengah bertransisi dari kebijakan yang berorientasi-kekuatan menuju kebijakan yang berorientasi-nilai dan difokuskan pada ekspresi dan transfer kebudayaan. Oleh karena itulah, ragam *cultural diplomacy* mulai lebih marak digunakan daripada *public diplomacy*.

Seluruh aktivitas *cultural diplomacy* merupakan kajian dalam *public diplomacy*, namun tidak semua praktik *public diplomacy* dapat dipandang sebagai *cultural diplomacy*. Dalam budaya terkandung nilai-nilai sejarah, pemikiran, perasaan, gagasan, seni, dan identitas yang membawa eksistensi suatu masyarakat dan membentuk keseluruhan yang bermakna. *Cultural diplomacy* merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan untuk promosi, presentasi, dan pembangunan citra positif negara dan reputasi internasional melalui kegiatan budaya (Ham, 2002; Wang, 2006).

Dalam hal ini, pendidikan dan relasi yang berorientasi-budaya memiliki efek dan area penerapan yang lebih luas di kalangan masyarakat dibandingkan relasi-relasi politik, komersial maupun militer (Çelik, 2022). Melalui aktivitas pendidikan internasional, negara memiliki peluang untuk membesarkan anak bangsa di luar negeri sebagai *decision-makers of tomorrow*. Negara juga dapat memenangkan kemurnian dan kepercayaan mereka serta mengembangkan hubungan jangka panjang dan penuh ketulusan antara beragam bangsa. Salah satunya melalui pendirian Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di berbagai negara ASEAN maupun cakupan global lebih luas. Secara spesifik, peran guru SILN bukan hanya sebagai profesional penyedia layanan pendidikan berkualitas internasional dan berorientasi-budaya, namun juga merangkap sebagai duta *cultural diplomacy* negara.

Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri. Secara fundamental, pendidikan Indonesia di Luar Negeri diselenggarakan untuk (a) mendukung misi perwakilan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman di bidang pendidikan bagi WNI di luar negeri; (b) memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan (c) memperkuat dan mengembangkan persatuan, kesatuan dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, secara kelembagaan, SILN merupakan lembaga penyedia pendidikan layanan khusus semisal perlindungan, pemenuhan hak dasar dan diplomasi kebudayaan. Seorang guru SILN memerangi 3 dosa besar pendidikan yakni perundungan (*bully*), kekerasan seksual, dan intoleransi. Guru SILN mengimplementasikan merdeka belajar sejak dulu, yakni *student-oriented* bukan *student-centered* dan diferensiasi pembelajaran: proses, konten, dan produk pendidikan. *

Referensi

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri*. Berita Negara Republik Indonesia No. 1343. [Online]. Tersedia di: <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/229525-384412-54390-28483891-601104935.pdf>

NURJANNI ASTIYANTI adalah guru bimbingan konseling lebih dari 10 tahun di SMKN 1 Soreang, Kabupaten Bandung dan SMKN 1 Kota Sukabumi. Menamatkan pendidikan master di Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia merupakan Alumni Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) dan saat ini tengah mengajar di Sekolah Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia.

Membangun Koneksi ASEAN melalui Budaya dan Wisata Halal

Nur Khamim

Pengantar

Hubungan interaksi antarnegara semakin tahun semakin dinamis. Pasang surut perkembangan diwarnai oleh kondisi masing-masing negara. Namun komunikasi terus terjalin seiring dengan perkembangan media sosial yang tanpa batas demografis maupun geografis. Seiring dengan kesejahteraan masing-masing negara, maka tuntutan kebutuhan primer standar telah tercukupi, maka meningkatlah kebutuhan sekunder yang dituntut terpenuhi pula. Yakni meningkatnya hobi maupun *life style* manusia modern, antara lain berupa hasrat untuk jalan-jalan ataupun bepergian ke lain lokasi untuk menikmati keindahan alam.

Di antara mereka adalah warga negara ASEAN, yang secara demografis memiliki kemiripan pri kehidupan dan tradisi. Karena sesama serumpun melayu, sebagaimana sejarah yang melatarbelakangi maupun komunikasi yang terjalin sejak zaman nenek moyang masa lalu. ASEAN, sebagai entitas asosiasi negara-negara Asia Tenggara tentu berharap adanya solidaritas dan kerjasama antar warga negaranya untuk dapat berinteraksi dalam segala bidang. Baik ekonomi, maupun sosial budaya. Untuk membangun konektivitas tersebut budaya maupun wisata bisa menjadi andalan utama negara negara ASEAN. Termasuk di dalamnya wisata halal yang kini menjadi trend masa kini.

Koneksi ASEAN dengan budaya

Selama ini dunia diplomatik telah memanfaatkan budaya sebagai sarana diplomatik antar negara. Terlebih lagi bagi Indonesia sebagai satu negara terbesar ASEAN, dimana Budaya Indonesia merupakan perpaduan budaya besar dunia Eropa, China, India dan Arab. Nusantara Indonesia merupakan kawasan internasional, dimana telah terjadi persilangan jalur perdagangan menuju dan keluar Nusantara.

Peran Indonesia modern setelah Kemerdekaan 17 Agustus di dunia internasional cukup kuat. Konferensi Asia-Afrika, Pendiri Gerakan Non Blok, Kerjasama Selatan Selatan, Organisasi Konferensi Islam dan ASEAN dan tuan rumah G20. Posisi Indonesia sangat berpengaruh terhadap negara belahan dunia lainnya. Maka sudah saatnya, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya untuk bersama sama membangun citra Indonesia sebagai negara "maju." Membangun hubungan budaya yang kuat dengan ASEAN sebagai pusat budaya dunia saat ini. Mempromosikan budaya Indonesia dan kearifan budaya lokal Indonesia sebagai sumbangsih untuk dunia. Termasuk mempromosikan potensi investasi, perdagangan dan pariwisata Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan membangun jaringan kerjasama ASEAN untuk pengembangan potensi daerah se-ASEAN.

Model Aksi Diplomasi Budaya

Model aksi yang bisa dilakukan adalah ekpose budaya, pariwisata dan potensi daerah sesuai momentum negara masing-masing. Termasuk pengedaan seminar budaya ASEAN dan pertunjukan di kampus se-ASEAN. Dengan aneka kunjungan budaya ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di ASEAN diikuti dengan *stay* di pedesaan dan kota-kota di ASEAN. Bisa juga kunjungan ke komunitas akar rumput di ASEAN, dilanjutkan dengan pertemuan antar komunitas dan kemungkinan penjajagan pendirian Gedung Pusat Budaya ASEAN.

Dengan kemudiaman media sosial saat ini, dimungkinkan membangun citra ASEAN sebagai tahapan menuju negara maju dengan mengekspose kemajuan pembangunan ASEAN dewasa ini. Yakni dengan bersama sama membentuk persepsi masyarakat ASEAN secara umum tentang negara masing-masing. Membangun komunikasi dan interaksi baik kalangan pemerintah, komunitas bisnis, lembaga swadaya masyarakat maupun anggota masyarakat secara umum. Saling berinteraksi dan diskusi para *stake holders* untuk merealisasikan Pusat Budaya ASEAN. Bila Indonesia punya Taman Mini Indonesia Indah, dimungkinkan juga ada Taman ASEAN ceria, bersama keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri maupun Kedutaan Besar masing masing negara ASEAN.

Wisata Halal ASEAN

Salah satu upaya mempererat interaksi dan konektivitas antar Negara ASEAN adalah dengan jembatan budaya via pariwisata halal. Khusus pariwisata halal di Indonesia berhasil naik peringkat sehingga berada di posisi kedua dalam The Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022. Adapun posisi Indonesia berada satu tingkat di bawah Malaysia. Sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bahwa sejumlah strategi agar bisa menjadikan pariwisata halal peringkat sebagai yang terbaik. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan negara ASEAN yang dapat mendukung pengembangan pariwisata halal tersebut.

Sebagai model, Masjid Istiqlal dikembangkan sebagai Wisata Halal 6 Fakta Masjid Istiqlal Jakarta, masjid terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, juga akan mengembangkan desa wisata yang memiliki *concern* (perhatian) terhadap wisata religi. Seperti pariwisata umum, strategi yang dibentuk untuk pariwisata halal tidak lagi hanya mengedepankan kuantitas. Kualitas pariwisata yaitu pariwisata tidak hanya berpaku pada jumlah wisatawan, tetapi kepada *length of stay* (durasi kunjungan) dan *spending* (pengeluaran) yang lebih besar. Masih banyak hal yang harus dikerjakan dan diperbaiki, agar bisa mengubah daya tarik produk wisata yang berorientasi terhadap *experience* atau pengalaman. Harus dimiliki Wisata Halal di ASEAN. Oleh karena itu, perlu upaya untuk terus berkoordinasi dengan para pengelola destinasi wisata maupun pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Yakni koordinasi dengan pengelolaan destinasi agar lebih kreatif dan serius dalam menghadirkan wisata halal yang lebih berkualitas.

ASEAN Perlu Kembangkan Regulasi Wisata Halal

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat dibandingkan dengan sektor-sektor penting lainnya, seperti konstruksi retail, kesehatan, pertanian, jasa keuangan dan komunikasi. Sebagaimana dikemukakan pada buku Pariwisata Halal Indonesia (MUI, 2020), bahwa pariwisata adalah sumber pendapatan dan pekerjaan yang besar bagi negara-negara yang menerima lebih banyak wisatawan, dan ini berdampak signifikan pada ekonomi utama dunia. Karena alasan tersebut, banyak negara telah meningkatkan investasi mereka di industri pariwisata, termasuk beberapa kampanye dan strategi untuk menyoroti destinasi utama mereka. Keadaan pariwisata saat ini telah menguntungkan semua benua di dunia, tumbuh dalam jumlah wisatawan tahun demi tahun. Singkatnya, pariwisata telah menjadi pilar mendasar bagi pertumbuhan ekonomi semua negara, yang menyumbang sebagian dari PDB dunia.

Sementara itu, berbicara pada konteks *local wisdom*. Pariwisata itu kalau kita lihat transformasinya adalah soal menjual pengalaman, dan turis mencari itu. ASEAN belum memiliki dasar hukum mengenai pariwisata halal, begitu juga dengan Indonesia yang belum mampu menyusun UU Pariwisata Halal. Negara destinasi wisata halal populer di ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, bisa belajar dari Thailand. Dengan populasi Muslim hanya lima persen, dengan 3.600 masjid, Thailand cukup menjanjikan. Bahkan pertumbuhan pariwisata halalnya cukup pesat. Indonesia dan Malaysia punya kompetitor yang cukup serius di tingkat ASEAN. Negara itu telah mengembangkan aplikasi khusus Muslim Friendly Tourism untuk membantu wisatawan berkunjung. Thailand juga serius dalam sertifikasi halal dan mengembangkan aplikasi *halal check-in* Thailand, yang terintegrasi dengan hotel, restoran dan layanan lain.

ASEAN perlu secara regional mengembangkan regulasi terkait wisata halal. Sedangkan Indonesia, yang mengalami kemandegan dalam membicarakan Undang-Undang Pariwisata Halal, harus bergerak ke depan. UU tersebut penting sebagai induk regulasi bagi daerah-daerah yang ingin mengembangkan pariwisata halal. Tentu saja, setiap daerah yang mengembangkan tren wisata ini, harus mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga kehadirannya justru memberi nilai tambah, bukan persoalan baru. Indonesia, sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, jangan sampai terjadi *capital flight*. Wisatawan pergi ke berbagai macam negara, padahal sebenarnya mereka bisa menghabiskan uang itu di negara sendiri. Wisata halal tidak terbatas hanya soal muslim. Di Jepang, ada tempat karaoke juga menyediakan mushola, strategi untuk menggaet pasar Muslim dan memanfaatkan tren wisata halal.

Di mana kontribusi dan peran ASEAN, ketika sumber daya alamnya terdapat potensi alam yang mengundang takjub dunia. Dimana alam tropis sangat berpengaruh terhadap kesuburan alam nan indah mempesona. Sehingga turis maupun wisatawan dunia berhasrat untuk berkunjung ke wilayah ASEAN. Terbukti dengan meningkatnya minat wisatawan yang berkunjung ke negara negara ASEAN. Tentu negara negara ASEAB tidak mau ketinggalan untuk terus memajukan dan

memoles wilayahnya untuk senantiasa dijaga, dirawat maupun dimodifikasi sedemikian rupa, agar para wisatawan betah maupun hasrat berkunjung ke area wisata tersebut.

Demikian juga bagi pemerintah, tentu tidak akan kehilangan momentum untuk terus tidak kehilangan inovasinya menangkap potensi wisata tersebut. Industri pariwisata halal di ASEAN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Negara-negara ASEAN mulai menyadari potensi dari pariwisata halal baik secara sosial budaya dan ekonomi. Negara semacam Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand senantiasa meningkatkan berbagai sektor guna mendukung pariwisata halal di masing-masing negara. Berbagai lembaga standardisasi halal, pembangunan fasilitas ibadah bagi Muslim dan fasilitas penunjang lainnya, serta pemeliharaan berbagai objek pariwisata Islam dan promosi baik di dalam maupun luar negeri adalah beberapa langkah yang umumnya dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

ASEAN sebagai negara dengan mayoritas rumpun melayu adalah mayoritas Muslim terbanyak di dunia, tentunya memiliki potensi pasar yang bagus di bidang pariwisata halal untuk dioptimalkan. Optimalisasi ini dibuktikan dengan posisi Indonesia yang menempati urutan atas dalam bidang pariwisata halal dari berbagai lembaga riset. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa Indonesia telah berhasil secara maksimal dalam mengembangkan pariwisata halal. Perlu rintisan literasi tentang perkembangan ASEAN mengelola regulasi perkembangan pariwisata halal di berbagai kawasan.

Hadirnya nuansa baru dalam khazanah ilmu ekonomi syariah dan industri halal, lanskap pariwisata halal yang sangat berkembang pesat di dunia, tidak hanya di negara Muslim namun juga negara non-Muslim. Pariwisata halal di ASEAN, sebagai salah satu regional kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bagaimana perkembangan serta hukum pariwisata halal di berbagai negara ASEAN, hingga potensi dan hambatan industri tersebut. Semoga, semakin banyak masyarakat ASEAN yang menyadari potensi pariwisata syariah dan dapat bersinergi dalam pengembangan industri pariwisata halal untuk mendukung ketahanan kawasan ASEAN.

Budaya sebagai jembatan untuk meningkatkan maupun mendorong solidaritas antar masyarakat dan Negara ASEAN. Diplomasi kebudayaan sebagai *soft power* untuk membela kepentingan nasional dan meningkatkan posisinya di arena internasional. Kemampuan bahasa asing dan memahami banyak tradisi. Identitas ASEAN disebut *unity in diversity* atau ASEAN Way dengan dua ciri khas yaitu tidak campur tangan (*non interference*) dan konsensus peraturan, tetapi fleksibilitas dalam perlakuan ASEAN Way, yang mengandung enam isi yakni negara-negara ASEAN berdaulat dan setara, tidak menggunakan kekerasan dan menyelesaikan konflik secara damai, tidak campur tangan, tidak beserta konflik bilateral yang bukan diselesaikan antara anggota, Diplomati tanpa pengetahuan dari pihak ketiga, dan saling menghormati dan bersimpati.

Beberapa kekuatan utama diplomasi budaya adalah: Diplomasi komunikasi dua arah, dialog diarahkan pada rasa saling percaya dan meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya, karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya. Dalam waktu panjang, sehingga menjadi solusi efektif terhadap pihak yang bertikai. ASEAN *social cultural community*, *blue print*-nya memuat tema inti atau *core element* (memuat 6 karakteristik, 32 element, dan 348 tindakan, yang terdiri dari Pembangunan manusia (7 element, 60 tindakan); Kesejahteraan dan perlindungan sosial (7 elemen, 94 tindakan); Keadilan sosial dan hak hak (3 elemen, 28 tindakan); Penjaminan kelestarian lingkungan (11 elemen, 98 tindakan); Pembangunan identitas ASEAN (4 elemen, 50 tindakan) dan Pengurangan kesenjangan pembangunan (8 tindakan).*

NUR KHAMIM adalah pengurus MUI bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, yang telah membikin beberapa program yakni lomba film pendek antar pesantren se Indonesia. Turut memprakarsai pembuatan film *Buya Hamka*, yang berdurasi 7 jam (dibuat 3 sekuel), lomba cerita pendek se Indonesia. Juga mendorong terbitnya ensiklopedi budaya Islam di Nusantara. Bergelut di Lembaga IPINDO (Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia), yang bergerak dalam *Ipindo Training Center* dan *Ipindo Riset Center*. Ia aktif dalam training dan riset untuk pengembangan desa bekerjasama dengan Bina Pemerintahan Desa Kemendagri maupun BRIN. Khamim juga dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah dan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah & S2 Sosiologi UI.

Merawat Harmoni di ASEAN

Afita Nur Hayati

Pendahuluan

ASEAN dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 1967 dengan fokus utama untuk mendorong perdamaian dan keamanan kawasan. Perhimpunan ini ditandai dengan sebuah penandatanganan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok. Setelah 17 tahun dibentuk, pada tahun 1984, Brunei Darussalam baru bergabung, sedangkan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, dan Vietnam bergabung antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Timor Leste bergabung setelah lebih dari sepuluh tahun pengajuannya untuk menjadi anggota ASEAN. Hal ini menurut pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Faudzan Farhana dalam www.voaindonesia.com karena ASEAN mensyaratkan empat hal bagi negara di kawasan Asia Tenggara yang akan bergabung, yaitu kedekatan geografis, disetujui semua anggota, terikat atau tunduk pada piagam ASEAN, dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk memenuhi komitmen-komitmen ASEAN. Komitmen baru bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat.

Bahasa kerja resmi ASEAN yang disebutkan pada piagam ASEAN adalah bahasa Inggris dengan tetap menghormati bahasa yang berbeda dari masyarakat ASEAN (Kirkpatrick, 2012). Bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia karena tidak ada satupun negara yang bisa menghindar dari pusaran dinamika dunia, baik dinamika politik, budaya, keamanan termasuk ekonomi (Handayani, 2016). Pada tahun 1997 dilakukan penandatanganan ASEAN Vision sebagai cikal bakal terbentuknya ASEAN Community dengan visi yang penting bagi kawasan. Komunitas keamanan membutuhkan pola hubungan yang mengedepankan multilateralisme sedangkan anggota ASEAN masih berada pada sense of community yang bersifat bilateral. Situasi kawasan yang berpotensi merusak hubungan antara negara-negara ASEAN diantaranya adalah kebangkitan Tiongkok, kemajuan militer India dan Korea Selatan (Sari, 2019).

Kerja sama ekonomi di ASEAN dimulai secara sederhana pada tahun 1977 dan integrasi ekonomi dimulai dari tahun 1993 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keempat dengan dikembangkannya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN dalam upaya memperdalam integrasi ekonomi sudah mulai disepakati pada pertemuan di Cebu tahun 2007 (Oktavia & Verico, 2020). Kawasan ekonomi ASEAN memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia karena Asia memiliki luas wilayah terbesar di dunia selain juga jumlah penduduk terbesar. Jika pada 2010-2014 disebutkan pada salah satu kesimpulan penelitian bahwa perdagangan intra ASEAN berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN (Siregar et al., 2018), maka pada penelitian lain disebutkan bahwa kesuksesan ASEAN terbesar adalah mempromosikan integrasi ekonomi diantara para anggota (Maizland & Albert, 2021).

Keputusan penting di ASEAN, biasanya dicapai melalui konsultasi dan konsensus yang dipandu oleh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri dan penyelesaian konflik secara damai. Beberapa ahli melihat pendekatan pengambilan keputusan ini sebagai kelemahan utama bagi organisasi (Maizland & Albert, 2021). "Norma konsensus dan non-interferensi ini semakin ketinggalan zaman, dan telah menghambat pengaruh ASEAN dalam berbagai masalah mulai dari berurusan dengan China dan krisis di negara-negara ASEAN tertentu padahal sejarah akan terus mencatat dan merekam jejak ASEAN.

Harmoni dalam Community, Regionalisme Tak Alami

Globalisasi menumbuhkan sikap terbuka, toleran, dan berwawasan luas, mendorong diri untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan dan mengembangkan hubungan baik dalam berbagai sektor. Selain itu, globalisasi juga bisa meningkatkan kesenjangan sosial, munculnya sikap individualis, dan menjadikan masyarakat bersifat imitatif, mengurangi semangat nasionalisme karena bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang negara lain yang bisa jadi membuat kita iri dan berusaha membanding-bandingkan.

Bagi perjalanan karier seorang individu yang berusia 57 tahun di sektor privat maupun publik, sangat mungkin telah berada pada level tertinggi. Walau sudah mendekati masa pensiun, kinerja tak boleh kendor. Demikian halnya dengan kerjasama negara-negara ASEAN. Perjalanan tahun ke-57 dan seterusnya diharapkan sudah berada di level matang dan dewasa. Proses konstruksi sosial yang dibentuk dan dipahami oleh anggotanya bahwa kepentingan regional lebih penting daripada kepentingan pribadi harus terus diusahakan, baik bentuk maupun batasannya.

Tidak bisa terjadi alami begitu saja. Tujuannya adalah terwujudnya kolaborasi antar negara dalam satu kawasan yang tidak menimbulkan gejolak atau anomali karena perbedaan latar belakang antar negara anggota ASEAN bisa saja memicu konflik dan meretakkan hubungan. Era regionalisme di kawasan Asia Tenggara terwujud melalui ASEAN *Community* (Harini & Haqqi, 2017). Masyarakat dalam kawasan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan diarahkan untuk integratif secara bertahap dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai ekonomis meningkat dan kesejahteraan mengalami perubahan.

Dalam penyelesaian sengketa, ASEAN menggunakan mekanisme yang bersifat informal yaitu ASEAN-Way, sebuah cara atau jalur diskusi yang dipilih untuk meyakinkan semua pihak. ASEAN Way adalah sebuah kesadaran tentang norma yang sudah dimulai di tahun 1990an (Yukawa, 2018). Ini menjadi salah satu bentuk nyata dari Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971 tentang kawasan damai, bebas dan netral serta perjanjian persahabatan dan kerja sama. ASEAN Way menurut Sefriani (Wijaya & Pratiwi, 2018) bisa menjadi *boomerang* bagi ASEAN sendiri karena masih banyak yang menganggap ASEAN adalah organisasi yang tidak responsif dalam penyelesaian sengketa.

Komunitas Antar Negara:

Dari Relationship Development Menuju Relationship Maintenance

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang pernah diperebutkan dan dijajah oleh negara berkekuatan besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol (Keling et al., 2011). Persamaan latar belakang berdirinya sebuah bangsa, menjadikan ASEAN *Community* bisa memainkan peran yang lebih penting. Pada saat didirikan tahun 1967, ASEAN hanya menjadi ajang pertemuan para menteri luar negeri secara pribadi untuk membangun hubungan. Dalam perkembangannya, ASEAN menunjukkan berbagai perubahan.

Untuk membangun hubungan diperlukan sebuah kondisi kongruen, penghargaan yang positif tanpa ada yang dipersyaratkan, dan pemahaman yang empatik. Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah lima di awal dan sepuluh sampai dengan tahun 2021. Selain itu dalam membangun sebuah hubungan antarpribadi maupun kelompok perlu dipertimbangkan biaya dan penghargaan dari proses interaksi yang berlangsung. Fase membangun hubungan telah dilewati sepuluh anggota ASEAN dan akan dimulai lagi dengan masuknya Timor Leste menjadi anggota kesembelas.

Kini bangunan kongruen bernama ASEAN itu sudah berada pada hubungan yang *lost lasting* dan harus dirawat keberadaannya. Kuncinya adalah *trust*, *commitment*, dan terbuka karena hubungan yang telah berlangsung lama harus didasari suka dan pemahaman bahwa kita semua yang berada dalam satu kawasan, sedang berada pada hubungan yang bersifat *equal* atau sama, setara, tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Oleh karenanya, kontrol satu sama lain secara timbal balik tidak perlu dimaknai sebagai relasi kuasa tetapi lebih karena untuk menjaga keberlanjutan hubungan.

Konklusi: Manusia Universal

Bangsa Indonesia telah dikenal sejak lama sebagai bangsa cinta damai, berasal dari generasi yang mencintai kedamaian sebagai salah satu nilai dasar universal yang harus dimiliki dalam kehidupan. Karena dengan mencintai kedamaian akan lahir harmoni, toleransi, kebersamaan, kepedulian baik di lingkungan pendidikan, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Mulai dari komunitas terkecil sampai dengan komunitas di tingkat global. Oleh karena itu, menjadi manusia universal yang telah memiliki karakteristik nilai-nilai yang bersifat universal akan terwujud, tumbuh subur, dan berkembang adalah sebuah keniscayaan. Sinergi dan komitmen yang bersifat terus menerus dari lembaga pendidikan, rumah, dan masyarakat menjadi mutlak diperlukan sehingga terwujud masyarakat global yang damai.*

Referensi

- Farida, E. (2012). Peluang Dan Tantangan Asean Menuju Komunitas Asean 2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 478–486.
- Ha, V. K. H. (2016). Peran Diplomasi Budaya Dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN: Kasus Vietnam. *Khazanah Pendidikan*, X(1), 1–14.
- Handayani, S. (2016). Pentingnya Kemampuan Berbahasa Inggris Dalam Menyongsong ASEAN Community 2015. *Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah*, 3(1), 102–106.
- Harini, S., & Haqqi, H. (2017). Pelaksanaan Citizen Diplomacy Sebagai Upaya Penguatan Identitas Bangsa di Era ASEAN Community. *Ejurnal.Unisri.Ac.Id*, 1(1). <http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rfsu/article/viewFile/1546/1364>
- Keling, M. F., Som, H. M., Saludin, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. eim. (2011). The development of ASEAN from historical approach. *Asian Social Science*, 7(7), 169–189. <https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p169>
- Kirkpatrick, A. (2012). English in ASEAN: Implications for regional multilingualism. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 33(4), 331–344. <https://doi.org/10.1080/01434632.2012.661433>
- Maizland, L., & Albert, E. (2021). *What Is ASEAN? The Bloc 's History*. 1–11.
- Oktavia, I., & Verico, K. (2020). The Awakening of Investment Creation: a Case Study From South-East Asia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(2), 177–194. <https://doi.org/10.30908/bilp.v14i2.438>
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia Dalam Implementasi Asean Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 4(01), 24–65. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.100>
- Siregar, D., Rujiman, & Tarmizi, H. (2018). Analisis Pengaruh Perdagangan Intra Dan Ekstra Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota Asean. *Quantitative Economics Journal*, 7(2), 88–98. <https://doi.org/10.24114/qej.v7i2.17554>
- Wijaya, I. B. E. R., & Pratiwi, P. W. A. (2018). Peranan ASEAN Dalam Penyelesaian Kasus Penghinaan Terhadap Simbol-Symbol Negara Di Kawasan Asia Tenggara. *Kertha Negara*, 6(4), 1–17.
- Yukawa, T. (2018). The ASEAN Way as a symbol: an analysis of discourses on the ASEAN Norms. *Pacific Review*, 31(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1371211>

AFITA NUR HAYATI adalah Anggota Dewan Manajerial Bidang Pendidikan Pengurus Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia (2022-2025). Aktif di organisasi sosial kemasyarakatan Nasyiatul Aisyiyah (2004-2022). Ia merupakan ASN pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (2009-sekarang) dan menjadi lebih produktif saat pandemi dengan menulis lebih dari 21 buku antologi bersama Komunitas Menulis Bersama Azkiya (MESRA) dan Omah Pentigraf Azkiya (OPA) di tahun 2021. Opinions juga bisa ditemukan di beberapa media online, selain menulis di beberapa jurnal dan prosiding serta birruannisa.blogspot.com. Ia dapat dihubungi di email: afitanurhayati@rpi.or.id.

NU, ASEAN dan Strategi Diplomasi²⁷

Munawir Aziz

Pada abad kedua berdirinya, Nahdlatul Ulama mengukuhkan pijakan untuk merajut koneksi global dengan menyiapkan strategi diplomasi yang berdampak secara internasional. Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi yang didirikan oleh para kiai pesantren, sejatinya telah menyusun imajinasi untuk bergerak dan berdampak secara global. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansuri dan kiai-kiai pendiri organisasi ini, menyusun langkah gerak organisasi dengan simpul perdamaian dunia, tidak hanya bergerak dalam ruang lingkup negara Indonesia, namun punya jejaring, konektivitas serta pengaruh dalam tataran internasional.

Menyelami imajinasi warga Nahdlatul Ulama seperti menata *puzzle-puzzle* gerakan Islam (*harakah Islamiyah*) yang relevan dengan semangat zaman. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, yang mewarisi ajaran dakwah Wali Sanga, mampu mentransformasi ajaran Islam menjadi sesuai dengan kearifan lokal dan konteks zaman. Nilai-nilai Islam menjadi relevan dengan napas zaman dan perkembangan budaya warga setempat. Maka, berbagai strategi budaya menjadi bagian dari cara dakwah para kiai pesantren, yang tentu saja *in-line* dengan strategi dakwah Nabi Muhammad yang mewariskan dakwah santun, dan sesuai dengan konteks sosiologis warga setempat.

Islam menjadi agama yang mampu hadir dalam relung kehidupan warga, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh ketetapan hukum agama. Demikianlah cara dakwah para kiai Nahdlatul Ulama, yang berpendar dan berdenyar dalam ritus keagamaan seratus tahun organisasi ini menancap kuat di bumi Nusantara.

Kita bisa melihat, meski memiliki garis keturunan langsung dengan Baginda Nabi Muhammad, para kiai pesantren justru menanggalkan identitas etnik dengan berdakwah secara sublim pada tradisi masyarakat di negeri ini. Kiai-kiai pesantren tidak ribut berdebat untuk saling menegasikan silsilah keluarga, namun sibuk berdakwah untuk mengentaskan kebodohan dengan mengajar santri-santri dan warga setempat.

Pembelajaran pesantren berpijak pada usaha untuk menghilangkan kedunguan, menyalakan lilin-lilin cahaya pengetahuan di otak dan nurani para pengikutnya. Pembelajaran yang mencerahkan inilah yang kemudian menuntun para santri untuk menjadi manusia yang bermanfaat, dengan segala profesi dan *skill-set* yang disiapkan. Para santri berpegang pada kaidah khairunnas anfauhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk sesama.

Pola dakwah kiai-kiai pesantren dan pendekatan *ala* Nahdlatul Ulama inilah yang sejatinya merupakan pendekatan lembut untuk mengubah manusia Indonesia. Kiai-kiai pesantren bergerak pada trajektori pengetahuan, untuk mendukung sepenuhnya misi agama yang bermanfaat untuk semesta, untuk semua makhluk yang ada di bumi manusia. Jika kita telisik, ada banyak ajaran-ajaran kiai NU yang relevan dengan semangat zaman.

Diplomasi sebagai urat nadi

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama telah punya proyeksi untuk melakukan kerja diplomatik dengan membentuk Komite Hijaz, pada kisaran 1926. Utusan khusus yang diketuai oleh Kiai Wahab Chasbullah ini melakukan lobi kepada Raja Ibnu Saud untuk kebaikan masa depan umat Islam. Komite Hijaz merupakan wajah kecerdikan para kiai untuk mengeksekusi strategi diplomasi. Sejatinya, komite ini tidak hanya kepanitian kecil, ataupun kerja kehumasan saja. Namun, jika dimaknai secara mendalam, Komite Hijaz mencerminkan strategi diplomasi Nahdlatul Ulama, yang sudah fasih dikerjakan oleh para kiai pesantren, jauh sebelum Indonesia merdeka.

27 Tulisan ini pernah diterbitkan di Media Indonesia, 5 Agustus 2023.

Kerja-kerja diplomatik Nahdlatul Ulama telah tertulis sejarah, menjadi bagian dari urat nadi pergerakan organisasi ini. Selain upaya terus-menerus menjadi tulang punggung perumusan fondasi bangsa Indonesia, perjuangan kemerdekaan, dan penggerak utama melawan kolonialisme, Nahdlatul Ulama juga telah membuktikan betapa para kiai juga punya kecakapan tinggi dalam diplomasi internasional.

Selepas generasi Kiai Wahab Chasbullah, kerja-kerja diplomatik ini kemudian diteruskan oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama, dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Kiai Wahid Hasyim, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Said Aqil Siroj, dan kemudian Kiai Yahya C Staquf, dan beberapa kiai lain, memainkan peran penting dalam seratus tahun kerja diplomatik Nahdlatul Ulama. Artinya, melihat peran Nahdlatul Ulama sekarang ini dalam dunia internasional, tentu saja harus menelaah seratus tahun perjalanan organisasi ini, dengan pelbagai peran di level internasional, dan jaringan yang dibangun oleh para aktornya.

Sudah seharusnya para santri sekarang ini juga bergerak bersama memainkan kerja-kerja diplomatik pada levelnya masing-masing, mengingat teladan dari para kiai yang telah menulis sejarah dengan kerja dan karya pada seabad Nahdlatul Ulama.

Di bawah komando KH Yahya Staquf, Nahdlatul Ulama memainkan peran lebih berdampak dengan program-program yang terukur, komunikasi internasional yang tertata, jaringan yang lebih terkoneksi, serta gagasan strategis yang berpengaruh pada perbincangan politik lintas negara. Forum R20 sebagai side-event G20 di Bali (November 2022), Halaqah Internasional Fiqh Peradaban (Februari 2023), dan yang mutakhir, yakni forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference yang dihelat pada Agustus 2023.

Ketua Umum PBNU KH Yahya C Staquf menyampaikan bahwa forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (ASEAN IIDC) resmi diadopsi sebagai agenda KTT ASEAN. Hasil rumusan dari para pemuka agama di forum ASEAN IIDC diproyeksikan menjadi kebijakan strategis di ruang publik pada level ASEAN maupun juga di tingkat pemerintahan masing-masing. Forum ini lebih berdampak secara politik, karena mempertemukan pemuka agama dan pemimpin politik di ASEAN serta negara-negara partner, untuk memetakan problem yang dihadapi seraya menata langkah untuk mencari solusi bersama.

Isu-isu mendasar di ASEAN, terutama tragedi Rohingnya di Myanmar, konflik Moro Filipina, hingga relasi Kamboja-Thailand, Kamboja-Vietnam, serta ketegangan di Laut China Selatan dan tensi politik-keamanan di Indo-Pasifik mewarnai forum diskusi di KTT ASEAN, serta berdampak pada perbincangan antara pemuka agama dan pemimpin politik di forum ASEAN IIDC. Lalu, seberapa memungkinkan agama menjadi instrumen yang berdampak penting pada ranah diplomasi global?

Agama sebagai diplomasi?

Jika selama ini pendekatan diplomasi internasional hanya menggunakan kekuatan militer dan ekonomi, Kiai Yahya Staquf mendorong gagasan dengan mengajak para pemuka agama untuk bergerak bersama usaha mencari solusi atas permasalahan-permasalahan global. Dalam konteks ini, agama menjadi bagian dari *soft-power* untuk kerja diplomatik.

Konsep *soft-power* dalam strategi diplomasi global dipopulerkan pada akhir 1980-an oleh ilmuwan politik Joseph Samuel Nye (mantan dekan Harvard Kennedy School, Amerika Serikat). Dalam konsepnya, Joseph S. Nye mengartikulasikan bahwa *soft power* itu kemampuan untuk mempengaruhi para aktor dalam ranah internasional dengan aktivitas-aktivitas yang berpijak pada solidaritas dan kebudayaan, daripada menggunakan pendekatan kekerasan dan militer.

Pendekatan kebudayaan ini menjadi jalur lain dari strategi diplomasi internasional, yang semula didominasi oleh kekuatan militer dalam percaturan politik. Negara-negara yang punya kekuatan militer yang akan mendominasi peta politik global.

Selain pendekatan kebudayaan dan solidaritas global, Jeffrey Haynes (London Metropolitan University) menambah konsep *soft power* dengan memasukkan instrumen agama. Bahwa, agama dan pemuka agama juga memainkan pengaruh besar dalam interaksi antarmanusia di muka bumi, serta berdampak pada kebijakan-kebijakan strategis masing-masing negara.

Konflik Israel-Palestina, konflik Uighur di Xinjiang China, serta peta konflik berbasis agama di Asia Tenggara, juga memerlukan solusi lain dari peta jalan diplomasi berbasis militer yang selama ini dijalankan. Jika selama ini pemuka agama berada di wilayah pinggiran dalam konteks politik internasional, perlu ada strategi untuk mendorong para pemuka agama berada pada jalur yang tepat dengan gagasan yang pas, agar bisa masuk dalam negosiasi-negosiasi dalam kerja diplomasi di level internasional.

Ketika diskusi langsung dengan Kiai Yahya C Staquf dan Haji Holland C Taylor (Center for Shared Civilizational Values), juga berbincang dengan para pemuka agama semisal Prof. Thomas K. Johnson (US), Rabbi Silvia Chemen (Argentina), dan beberapa aktivis lain di forum R-20 di Bali November 2022 lalu, saya menemukan ada optimisme dan semangat yang terpancar untuk mengusung agama menjadi pilar penting diplomasi internasional, untuk mencari solusi bersama atas masalah-masalah global yang selama ini belum terpecahkan.

Tentu, tidak mudah bagi para pemuka agama untuk memainkan peran yang berdampak secara substansial dalam relasi diplomatik antarnegara. Masing-masing komunitas agama yang bergerak pada level ini juga perlu untuk membereskan masalah-masalah internal yang dihadapi masing-masing, sebelum menyiapkan nafas panjang untuk kerja-kerja diplomatik di level internasional.

Nahdlatul Ulama, di bawah kepemimpinan Kiai Yahya C Staquf, sudah memetakan jalan dan melangkah pada trajektori yang tepat. Perlu dukungan dari pelbagai pihak dan energi dari kader-kader muda Nahdliyyin, juga diaspora santri yang tersebar di 35 negara jaringan PCINU, untuk mendukung gerakan besar ini secara simultan dan terkonsolidasi.*

MUNAWIR AZIZ adalah seorang peneliti, jurnalis dan *media strategist*. Ia juga aktif sebagai Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, serta membantu agenda-agenda internasional dan *partnership* Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia juga bekerja sebagai Media Strategist di KBRI London (2021-2022) dan kontributor LKBN Antara di London dan Eropa. Munawir Aziz sedang intensif mengikuti *training* di bidang *social data science*, *digital diplomacy* dan kebijakan publik. Ia pernah menjadi peneliti tamu di Goethe Frankfurt University, Jerman serta riset di beberapa kampus di Eropa. Pada 2022-2023, ia menjadi delegasi Australia-Indonesia Muslim Exchange (AIMEP) dan *awardee* Short Course Australian Government di bidang Diplomasi Publik dalam tema Indo-Pacific di Griffith University Australia (2023). Ia dapat dihubungi di email moenawir.aziz@gmail.com

BAB 4

Melindungi ASEAN dari Kejahatan Transnasional

Implementasi Hak Asasi Manusia: Hak atas Pelindungan Data Pribadi di ASEAN

Nenny Rianarizkiwati

"Privacy is the Right to be let alone"

--Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, 1890

Evolusi Hak Atas Pelindungan Data Pribadi

Sejarah panjang pengakuan hak asasi manusia memunculkan berbagai hak baru sebagai usaha penghormatan individu terhadap individu lainnya dalam menjalankan aktivitas. Asal usul hak asasi manusia dapat dikaji melalui teori hak kodrati dan teori positivis. Teori hak kodrati menganggap bahwa manusia sebagai subjek hak, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Teori hak kodrati menganggap tidak perlu ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, baik dari pemerintah atau dari sistem hukum, karena hak tersebut bersifat universal. Hal yang berbeda diungkapkan oleh teori positivis. Hak asasi manusia haruslah berasal dari suatu tempat yang seharusnya diciptakan dan diberikan oleh hukum tertulis. Hak merupakan hasil dari suatu hukum, sehingga tidak ada hak yang muncul lebih dulu tanpa adanya hukum. Penggabungan dari kedua sudut pandang asal usul hak asasi manusia pada perkembangan terkini yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan diakui oleh negara melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara.

Penganut teori positivis universalis merujuk pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai dokumen hukum pertama yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948 untuk mengakui hak asasi manusia. Dokumen tersebut menginspirasi organisasi negara dan negara-negara lain untuk menyusun dokumen serupa, antara lain the European Convention on Human Rights (1950), the American Convention on Human Rights (1969), the African Charter on Human and People's Rights (1981), Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), dan the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Human Right Declaration (2012). Hak hidup merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus diakui oleh setiap orang.

Hak asasi manusia memuat antara lain hak atas privasi dan hak atas informasi yang merupakan embrio lahirnya hak atas pelindungan data pribadi. Pasal 12 UDHR menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh diganggu privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, termasuk martabat dan reputasinya. Pengertian hak atas privasi adalah hak terhadap otonomi pribadi, termasuk hak seseorang berikut proberti seseorang tersebut yang bebas dari pengamatan publik. Hak atas privasi menitikberatkan pada penghormatan hak individu untuk membiarkan orang lain dapat menikmati hidupnya sendiri. Pasal 19 UDHR menyatakan bahwa hak setiap orang atas informasi yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tersebut melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak atas informasi merupakan kebebasan berekspresi yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengetahui suatu informasi sebagai kelanjutan dari pelaksanaan demokrasi.

Implementasi hak atas informasi berisikan dengan hak atas pribadi apabila dikaitkan dengan pencarian informasi pribadi seseorang. Hal ini memunculkan hak atas privasi informasi yang meliputi penyusunan norma yang mengatur tentang pengumpulan dan pengelolaan dari informasi pribadi, antara lain seperti informasi keuangan dan kesehatan seseorang. Evolusi dari pengakuan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya hak atas privasi dan hak atas informasi, membentuk hak atas informasi pribadi yang mengakui hak atas pelindungan data pribadi sebagai hak setiap orang yang harus dilindungi berdasarkan hukum.

Pengakuan ASEAN terhadap Hak Atas Pelindungan Data Pribadi

Instrumen Hukum Pelindungan Data Pribadi

Pengakuan hak asasi manusia dalam dokumen hukum regional ASEAN dimulai saat penandatanganan ASEAN Charter pada tahun 2007. Pasal 1 angka 7 ASEAN Charter menyatakan: *“to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN.”* Pengaturan dalam ASEAN Charter ditindaklanjuti dengan terbitnya the ASEAN Human Right Declaration (AHRD) pada tahun 2012. Hak atas pelindungan data pribadi diakui dalam Poin 21 AHRD sebagai berikut: *“every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person’s honour and reputation.* Hal penting yang dimuat dalam AHRD yaitu (1) menyatakan kesamaan di depan hukum bagi setiap orang dengan menyatakan preferensi kata ganti *“his”* dan *“her”* secara bersamaan, dan (2) menyatakan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi yang harus dilindungi oleh negara.

Pengaturan lebih rinci tentang pelindungan data pribadi di ASEAN dituangkan melalui ASEAN Framework on Personal Data Protection. Framework ini merupakan kesepakatan antar para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN untuk menintegrasikan kerja sama bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai dukungan terciptanya lingkungan ekonomi digital di ASEAN. Pelindungan data pribadi menjadi subjek yang penting dalam hal pengembangan perdagangan dan pertukaran informasi di ASEAN.

Prinsip Pelindungan Data Pribadi

ASEAN Framework on Personal Data Protection memberikan arahan tentang prinsip pelindungan data pribadi. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi dari pemrosesan yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan data pribadi. Negara anggota ASEAN diharapkan untuk mempertimbangkan dan menerapkan prinsip tersebut dalam regulasi nasional masing-masing.

Terdapat 7 (tujuh) prinsip pelindungan data pribadi dalam ASEAN Framework sebagai berikut:

1. Persetujuan, pemberitahuan, dan tujuan. Prinsip ini menyatakan bahwa organisasi hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, dan menyebarluaskan data pribadi jika subjek data pribadi telah memberikan persetujuan terhadap pemrosesan data pribadinya.
2. Akurasi data pribadi. Data pribadi harus akurat dan lengkap sesuai tujuan penggunaan dan penyebarluasan.
3. Jaminan Keamanan. Data pribadi harus dilindungi secara tepat terhadap kehilangan dan akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah.
4. Akses dan Koreksi. Subjek data pribadi dapat melakukan akses dan koreksi terhadap data pribadinya untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian, kecuali dalam keadaan tertentu organisasi tidak mengizinkan akses dan koreksi tersebut.
5. Transfer Data. Transfer/penyerahan data pribadi ke negara lain dimungkinkan apabila sudah ada persetujuan dari subjek data pribadi dan ada jaminan pelindungan data pribadi dari organisasi penerima data pribadi.
6. Retensi. Prinsip ini mewajibkan organisasi pengumpul data pribadi menghapus data pribadi yang berada di bawah kekuasaannya apabila sudah tidak diperlukan untuk keperluan hukum dan usaha.
7. Akuntabilitas. Organisasi harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah dalam mengelola data pribadi sesuai prinsip yang ada.

Prinsip pelindungan data pribadi yang diatur dalam ASEAN Framework menjadi panduan bagi masing-masing negara anggota ASEAN untuk menyusun regulasi pelindungan data pribadi agar dapat melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi setiap orang, baik yang datanya diproses di dalam negeri ataupun ketika dilakukan transfer data di lingkungan negara anggota ASEAN.

Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Regulasi terkait Pelindungan Data Pribadi

ASEAN terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota. Sampai tahun 2022, tercatat 5 (lima) negara anggota sudah memiliki Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Substansi regulasi terkait pelindungan data pribadi secara umum berisi tentang pengertian data pribadi, hak subjek data pribadi, prinsip pemrosesan, kewajiban pengendali dan/atau pemroses, dan sanksi administratif atau ketentuan pidana bagi pelanggaran atau kejahatan terhadap data pribadi. Pengertian data pribadi, disarikan dari regulasi terkait pelindungan data pribadi merupakan data yang melekat pada seseorang dan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengidentifikasi seseorang.

Malaysia merupakan negara pertama di ASEAN yang menetapkan Personal Data Protection Act 2010. Prinsip pelindungan data pribadi di Malaysia terdiri atas 7 (tujuh) prinsip, yaitu terdapat izin pemrosesan dari subjek data pribadi, pemberitahuan dan pilihan, penyampaian sesuai izin subjek data pribadi, jaminan keamanan, retensi penyimpanan, integritas data, dan akses data pribadi. Singapura menetapkan Personal Data Protection Act 2012 yang kemudian diubah pada 2020. Pelindungan data pribadi di Singapura meliputi 8 (delapan) prinsip, yaitu terdapat izin pemrosesan dari subjek data pribadi, pembatasan tujuan dan cakupan, akses data pribadi, koreksi data pribadi, akurasi data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, retensi penyimpanan, transfer data pribadi ke luar yurisdiksi Singapura.

Filipina mengatur pelindungan data pribadi melalui Data Privacy Act 2012. Pelindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) prinsip, yaitu transparansi, tujuan yang legal, dan proporsional. Transparansi berarti subjek data pribadi memahami maksud, tujuan, dan keberlanjutan pengolahan data pribadinya. Tujuan yang legal berarti pengolahan data sesuai dengan peraturan, moralitas, dan kebijakan publik. Proporsional berarti pengolahan data harus memadai, relevan, sesuai, dan tidak berlebihan, sebagaimana dinyatakan dalam tujuan. Thailand menetapkan Personal Data Protection Act 2019 untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, ataupun penyeberluasan data pribadi.

Prinsip pelindungan data pribadi tersirat pada Ketentuan Umum. Prinsip izin pemrosesan dari subjek data pribadi (termasuk izin terhadap data pribadi anak), hak subjek data pribadi mencabut izin pemrosesan, memberikan informasi atas tujuan pemrosesan, dan melakukan pemrosesan sesuai tujuan pemrosesan. Indonesia menetapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Oktober 2022. Prinsip pemrosesan data pribadi terdiri atas 8 (delapan) prinsip, yaitu pengumpulan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, sesuai tujuan, menjamin hak subjek data pribadi, akurasi, jaminan keamanan, pemberitahuan tujuan, aktivitas, dan kegagalan pelindungan data pribadi, retensi penyimpanan, dan akuntabel.

Penerapan prinsip pelindungan data pribadi merupakan hal yang krusial dalam pemrosesan data pribadi. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pengendali dan prosesor data pribadi dan menjamin pemenuhan hak subjek data pribadi. Variasi prinsip pelindungan data pribadi di berbagai negara tidak mengurangi kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi untuk memenuhi hak subjek data pribadi.

Penutup

Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi informasi merupakan pengakuan hak asasi manusia. Hak atas perlindungan data pribadi menjadi hak asasi manusia yang berlaku secara universal melalui hukum positif di masing-masing negara. Regulasi perlindungan data pribadi di masing-masing negara yang lebih rinci dari ASEAN Framework dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara tanpa mengurangi prinsip yang secara umum menjadi pedoman dalam pemrosesan data pribadi.

Saat ini separuh Negara Anggota ASEAN telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari tulisan ini. Negara Anggota ASEAN lainnya yang belum memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos, Viet Nam diharapkan dapat menyusul negara anggota lainnya untuk membentuk regulasi tersebut.

Kerja sama regional antar Negara Anggota ASEAN bertujuan untuk mewujudkan ekonomi digital yang aman, berkelanjutan, dan transformatif. Pelindungan data pribadi berkontribusi pada promosi dan pertumbuhan perdagangan dan arus informasi di dalam dan di antara negara anggota dalam ekonomi digital. ASEAN Framework on Personal Data

Protection merupakan kesepakatan Negara Anggota ASEAN untuk membentuk kerangka kerja yang koheren dan komprehensif untuk perlindungan data pribadi di masing-masing negara.*

Referensi

Buku

Hart, H.L.A., *Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

Garner, Bryan A., et. al., eds., *Black's Law Dictionary Tenth Edition* (Danvers: Thomson Reuters, 2009).

Locke, John, *Two Treaties of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 14th reprint 1988).

Office of the High Commissioner United Nations for Human Rights (OHC UN HR), *The Core International Human Rights Treaties* (New York and Geneva: United Nations Publication, 2014).

Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariate), *the Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (2015).

Sujatmoko, Andrey, "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM" (Makalah disampaikan pada kegiatan PUSHAM UII Yogyakarta dan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009).

Jurnal

Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy," *Harvard Law Review* 4 (5) (1890).

Banisar, David dan Davies, Simon, "Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Development" *Journal of Computer and Information Law* 18 (1999).

Internet

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), *the ASEAN Human Right Declaration* (2012). Diunduh dari http://aichr.org/?dl_name=ASEAN-Human-Rights-Declaration.pdf pada 17 November 2022.

ASEAN Member State, diakses melalui <https://asean.org/about-asean> pada 17 November 2022.

ASEAN Secretariate, *ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministers Meeting (Telmin): Framework on Personal Data Protection*. Diunduh dari www.asean.org/storage/2012/05/10-ASEAN-Fraework-on-PDP.pdf pada 17 November 2022.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses pada 17 November 2022.

Peraturan

Filipina, *Data Privacy Act of 2012* (2012).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Malaysia, *Personal Data Protection Act 2010* (2010).

Singapura, *Personal Data Protection Act 2012* (2012).

Thailand, *Personal Data Protection Act* (2019).

NENNY RIANARIZKIWATI menamatkan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 dari Melbourne Law School, The University of Melbourne, dan S3 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Ia juga aktif mengajar sebagai dosen mata kuliah Hukum Teknologi dan Informatika di Universitas Pancasila sejak 2019. Karya tulis yang dihasilkan antara lain dalam bentuk jurnal yaitu *The Right to be Forgotten: Rising Awareness on the Right to Privacy in Indonesia* (2021) dan buku *Hak atas Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi* (2020) yang diangkat dari intisari penelitian Penulis saat menyelesaikan studi S3. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: mrsswaghara@gmail.com.

Isu Human Trafficking Hubungan Indonesia-Malaysia

Arlen Ara Guci

Pendahuluan

Angka kasus perdagangan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Data Robinopsnal Bareskrim Polri mencatat peningkatan kasus dalam tujuh bulan terakhir baik di dalam maupun luar negeri. Pada Januari 2022, kepolisian menindak empat kasus TPPO. Pada Juli 2022, penindakan kasus meningkat hingga 600 persen. Hingga tujuh bulan terakhir di tahun 2022, Polri menindak 57 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diantaranya adalah sebagai berikut:

Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan penyelundupan puluhan calon pekerja migran Indonesia (PMI). Mereka hendak diseberangkan dari perairan pulau dan dipekerjakan di Malaysia secara ilegal. Kasus serupa juga terjadi di Lampung pada Februari 2022. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Ditreskrimum Polda Lampung menangkap pelaku perdagangan manusia di wilayah Bandar Lampung. Kejadian serupa juga terjadi di Sukabumi. Empat gadis asal Sukabumi menjadi korban perdagangan manusia. Kemudian di Langkat, Januari 2022²⁸. Pada Maret 2022, polisi telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadi Terbit Rencana Peranginangin. Mereka dikenakan pasal pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti diatur dalam Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Sebelumnya, pada Desember 2021, Polresta Tangerang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian menemukan tempat penampungan tenaga kerja ilegal. Tempat kerja ilegal tersebut berlokasi di Perumahan Pamong Klaster A2/11 nomor 30, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, dan Kabupaten Tangerang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi. Dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020; 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual. Catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3 persen pada 2020.

Meski angka kasus perdagangan manusia ini menunjukkan angkanya terus bertambah dan badan atau instansi terkait sudah melakukan upaya mencegah kasus ini agar tak kian marak, namun sama sekali tak mengurangi jumlah angka kasus yang terjadi. Apalagi menghentikan aktivitas ini sama sekali yang jika dibiarkan bukan hanya merusak korban secara fisik dan psikis secara permanen, bahkan dapat mengganggu hubungan bilateral antar negara.

Perdagangan Orang

Kevin Bales menyebutkan *Human Trafficking* yang dikeluarkan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, yaitu: Tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penulian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan bayaran atau keuntungan kepada seseorang yang mengendalikan korban yang

28 Migrant Care melaporkan temuan kerangkeng manusia di rumah milik bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM. Diduga, mantan bupati tersebut melakukan praktik perdagangan manusia. Kerangkeng manusia itu digunakan sebagai fasilitas rehabilitasi dan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba. Namun, *Migrant Care* menemukan indikasi perbudakan modern. Kerangkeng manusia yang disebut sebagai fasilitas rehabilitasi itu hanya sebagai kedok atas perbudakan yang diduga dilakukan Terbit Rencana Peranginangin terhadap buruh perkebunan kelapa sawit.

dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi, termasuk dengan prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau aktivitas lainnya serta pengambilan organ tubuh. Maka, persetujuan korban dianggap tidak relevan dimana terdapat cara-cara ilegal yang dipergunakan dalam aktivitas ini, tetapi pembelahan hukum pidana tetap dipertahankan (*Protocol Art. 3.b, Convention Article 11.6*). Menurutnya, akar dari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara diakibatkan adanya keinginan dari oknum yang terlibat dalam kegiatan kejahatan transnasional ini, adanya tekanan ekonomi, ketidakstabilan dan masa transisi politik, dan faktor-faktor lainnya yang meliputi sosial budaya (Bales, 2007).

Perdagangan manusia tidak memandang negara maju atau berkembang. Capobianco dalam tesis *Theory of Human Trafficking Applied to Case of Japan*, mencatat bagaimana korban-korban yang terjatuh dalam aktivitas perdagangan manusia tidak dapat begitu saja pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Sebab sistem yang digunakan oknum-oknum ini berupa hutang dengan biaya cukup tinggi. Para korban tersebut tidak dapat lepas dari pekerjaan mereka dikarenakan mereka diharuskan untuk melunaskan hutang-hutang tersebut kepada oknum yang terlibat.

Korban perdagangan juga tidak memandang gender. Kaum wanita juga dapat menjadi korban perdagangan manusia dikirim ke berbagai negara, salah satu contohnya Malaysia, yang merupakan negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak, seperti pekerja paksa seks dan eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, pengantin pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing ditipu dengan perkawinan.

Malaysia tidak luput dari kasus perdagangan manusia secara internasional maupun domestik. Tak sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia sendiri. Meski negara tersebut ikut meratifikasi protokol Palermo pada tanggal 26 Februari 2009 (United Nations, 2019) dan menempati Tier 2 watch list, yang berarti peraturan serta regulasi mengenai perdagangan manusia sudah dibuat oleh pemerintah Malaysia, namun masih sangat kurang efektif dan masih banyak peraturan juga regulasi yang belum memenuhi standarisasi minimum berdasarkan protokol Palermo. Melalui saran yang ada di dalam *Trafficking in Persons Report* tahun 2015, Malaysia diharuskan memberikan perlindungan yang lebih terhadap korban-korban dari perdagangan manusia dan juga diharapkan dapat memperkuat inspeksi buruh agar dapat mengidentifikasi aktivitas kerja paksa yang terjadi.

Di Malaysia sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat. WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar, di samping Vietnam, Data *Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific* dari tahun 2014 hingga 2017 mencatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Penindakan terhadap perdagangan orang, diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, penyekapan, penipuan, hingga penjeratan utang. Tujuan intimidasi itu agar calon korban bersedia bekerja di bawah kendali orang lain dan bersedia dieksploitasi. Selama proses hukum berjalan terhadap pelaku TPPO, saksi dan korban mendapat perlindungan negara sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Para saksi dan korban berhak meminta identitas mereka dirahasiakan.

Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya TPPO. Salahsatunya dengan menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memperkuat pencegahan TPPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, maka pemerintah menyiapkan *beleid* pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN PP TPPO).

Amerika Serikat (AS) sudah memasukkan Indonesia dalam daftar pengawasan tingkat 2 terkait perdagangan manusia. Dalam rilis laporan tahunan perdagangan manusia 2022, Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken menyatakan pemerintah Indonesia perlu mewaspadai TPPO. Sebab, penindakan terhadap kasus perdagangan orang masih di atas

angka ratusan. Pada 2021, Polri melaporkan menindak 23 kasus TPPO yang terjadi di dalam negeri. Namun, TPPO lintas negara justru lebih banyak, yaitu 159 kasus dengan penyelesaian 111 kasus.

Amerika Serikat juga merilis laporan tahunan yang menyebutkan Malaysia berada di posisi ketiga dalam kasus perdagangan manusia. Posisi ini menjadi yang terburuk dibanding dua peringkat di atasnya. Artinya pemerintah Malaysia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan dalam menyelesaikannya, bahkan tak memperlihatkan hal mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 pada kapasitas anti perdagangan orang di negara itu. Padahal, sebelumnya Malaysia ditempatkan di Daftar Pantau Tingkat 2 dari 2018 hingga 2020 sebelum turun ke Tingkat 3, tingkat terendah, tahun lalu dan saat ini.

Upah yang lebih baik pun menjadi alasan warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Alasan itu pula yang dimanfaatkan oknum penyalur tenaga kerja untuk mengirimkan pencari kerja ke luar negeri, meskipun tidak disertai dengan keahlian khusus. Sehingga tak jarang, pekerja migran asal Indonesia pun harus menjadi buruh kasar atau bahkan pekerja seksual di luar negeri. Bahkan beberapa pekerja migran ilegal itu mendapat kekerasan fisik, psikis, hingga seksual selama bekerja.

Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (Amandemen) 2022 (UU A1644) telah disetujui oleh pemerintah pada 19 Januari 2022 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara pada 25 Januari 2022. Secara keseluruhan terdapat 17 ketentuan yang diubah dengan penyempurnaan meliputi perubahan sebagai berikut: (a) Amandemen interpretasi perdagangan orang dan penghapusan interpretasi paksaan; (b) Peningkatan hukuman penjara dan hukuman cambuk; (c) Ketentuan pelanggaran yang lebih serius termasuk melibatkan pegawai negeri; (d) Penciptaan kekuasaan Menteri dalam menunjukan pejabat publik sebagai penegak hukum berdasarkan UU 670; (e) Peningkatan keanggotaan organisasi lain dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Council* (MAPO); dan (f) Perluasan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) dalam pengelolaan dan penertiban petugas pelindung dan penampungan korban perdagangan orang.

Konklusi

Kasus perdagangan manusia di Malaysia dari Indonesia tidak hanya dikarenakan kondisi domestik Indonesia seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja (pengangguran), upah yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi dan tingkat korupsi. Namun terdapat faktor eksternal selain dari yang sudah disebutkan di atas. Menurut penulis meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia faktor penyumbang lainnya, yakni kekerasan dalam rumah tangga dan perkembangan dunia informasi dan teknologi, seperti medsos. Kemudian, para korban berani membuka diri atas apa yang terjadi serta sosialisasi.

Dalam pemberantasan kejahatan kemanusiaan ini, pemerintah juga dituntut berperan aktif agar praktik perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mampu mengangkat harga diri manusia yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan. Berikut adalah upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan mengatasi *human trafficking*: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Selain itu, terkait perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO). Pemerintah juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002). Kemudian, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).

Pemberantasan dan pengurangan *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan *trafficking*. Tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku *trafficking* dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan, dan yang tak kalah pentingnya dengan sosialisasi isu tentang perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat, sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan maksimal.*

Referensi

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV Remadja Karya
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT.Alumni.
- Ihroni Tapi Omas, 2005, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Ameerpro.
- Rachmad Syafaat, 2002, *Dagang Manusia: Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Rachmat Rejeki, 1998, *Bisnis Mafia Perdagangan Anak*, Surabaya: Media Press.
- Sumardi Mulyanto, 1982, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali.
- Adityo Putro Prakoso (2011), *Masalah perdagangan orang yang sering dijumpai di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- Jurnal Transformasi Global (2020); *Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*, Universitas Brawijaya
- Rostanti, Q. (2017, Agustus 8). *Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang*. <https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknya-perdagangan-orang>
- Tim Litbang MPI (2022, April 4) *Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia, Salah Satunya Dilakukan Bupati*. <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/03/337/2572518/4-kasus-perdagangan-manusia-di-indonesia-salah-satunya-dilakukan-bupati?page=2> enin 04 April 2022
- CNN Indonesia (2022, Januari 7) *Belasan Korban Perdagangan Orang di Malaysia Mengadu ke Komnas HAM*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220107130957-12-743804/belasan-korban-perdagangan-orang-di-malaysia-mengadu-ke-komnas-ham>.

ARLEN ARA GUCCI tertarik dengan dunia kepenulisan sejak di bangku sekolah menengah. Perkenalannya dengan penulis kenamaan masa kuliah di Yogyakarta kian membangkitkan semangatnya untuk berkarya. Karya-karyanya dimuat di beberapa surat kabar, majalah, tabloid, media online serta website, diantaranya *Republika*, *Haluan*, *Singgalang*, *Padang Ekspres*, *Batam Pos*, *Sabili*, *Ummi*, *Annida*, *Muslimah*, *Alia*, *Alkisah*, *MQ Tabloid*, *Publik*, *Tasbih*, *Serambi Minang*, *Swadaya*, *Haluan Riau*, *Seputar Riau.com*, dan *Detik.com*. Pengalaman berkesan menulis adalah sebagai Juara Hiburan LMCPI Annida, Profil di Leksikon Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Antologi Cerpen Tsunami Harian Umum Republika serta Juara dua Essay tema "Migas untuk Kesejahteraan" (SKK Migas-AJI). Beberapa bukunya yang telah terbit: *Surat dari Tepi Barat* (Kumpulan Cerpen), *Jangan Percaya Airmata Bunda* (Kumpulan Cerpen), *Tarian Dari Langit*, *Purnama di atas Lovina*, *Perjalanan Sunyi*, *Panggil Aku Ibu*, *Sembilan Kuntum Edelweis*, *Mengetuk Cintamu* (Antologi Cerpen), *Buku Sakti Menulis Fiksi* (Tim Annida dkk), *Mentari Tak Pernah Sendiri* (Helvy Tiana Rosa dkk) dan *Buya Hamka* (bersama Yanuardi Syukur).

Problemantika dan Upaya Pemberantasan Narkoba di Negara ASEAN

Sri Sembadra Alya

"Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk di konsumsi walau tidak memabukkan.

--Majmu'Al Fatawa, 34:204

Pendahuluan

Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika perlu didukung semua pihak agar dapat mewujudkan sumber daya manusia seutuhnya di ASEAN. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang kian marak. Perkaranya tidak hanya kompleks dan multidimensi, tapi sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya para generasi muda. Betapa mirisnya dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan di setiap negara. Akan banyak hal yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika semacam ini.

Berbagai cara dan upaya telah digunakan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan oleh berbagai lembaga dan badan Negara serta aparat penegak hukum, namun ternyata bukannya makin hilang dari peredaran tapi justru merajalela. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, obat-obatan tersebut mampu menimbulkan efek kecanduan bagi para pemakainya. Tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan psikologis pemakainya, serta bisa menyeret kita ke dalam hukum.

Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2016. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa Indonesia harus bisa memerangi barang haram tersebut. "Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Dimanapun ada narkoba di Indonesia saya perintahkan seluruh sumber daya Indonesia untuk hadir memberantasnya," kata Jokowi di lapangan parkir, jalan Cengkeh, Taman Sari, Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu, 26 Juni 2016.

Menarik jika memperhatikan pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan saat masih menjabat Menkopolkam, mengatakan ancaman narkoba lebih berbahaya daripada teroris. Musababnya, 30-50 orang Indonesia tewas akibat penyalahgunaan narkoba setiap hari. "Sekarang narkoba sudah masuk ke semuanya. Angkatan yang sudah mau bintang saja kena narkoba," kata beliau dalam kuliah umum di Balai Sidang Universitas Indonesia, April 2016. Selain itu, beliau juga meminta semua pihak memerangi narkoba tanpa pandang bulu. Bahkan memberi instruksi menggulung pengguna narkoba yang berlingung dibalik pangkat orang tuanya.

"Siapa pun orang tuanya kalau menggunakan narkoba bulldoser, bilang Menkopulhukam yang memerintah. Tidak ada urusan siapa dibaliknya," ujar beliau. Sementara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Hukum dan kerja sama BNN, Drs. Puji Sarwono menghadiri Preparatory ASEAN, Senior Official Meeting on Drug Matters, (Prep-ASOD) dari gedung Tan Sutrisna, Rabu (13/10). Selain Deputi Hukum dan kerja sama, hadir pula dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Indonesia yaitu Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi (Kapuslitdatin) BNN, Drs. Agus Irianto, S.H., M.S.i, M.H., Ph.D., dan perwakilan dari Direktorat Polkam ASEAN kementerian Luar Negeri, Abdul Gofur dan Muhammad Aris Yusnandar.

Rapat yang diikuti seluruh Negara anggota ASEAN tersebut dihelat secara virtual dengan beberapa agenda, diantaranya laporan paruh pertama implementasi ASEAN Work Plan terkait keamanan masyarakat terhadap narkoba 2016-2025 yang disampaikan oleh Indonesia, laporan perkembangan rencana kerja sama ASEAN dalam mengatasi produksi dan peredaran narkotika di Golden Triangle 2020-2022 yang disampaikan oleh Thailand, persiapan peluncuran

ASEAN Drug Monitoring (ADM) report 2020, dan lain sebagainya. Drs. Agus Irianto dalam laporan Mid Term Review implementasi ASEAN Work Plan Securing Communities Against Illicit Drug Communities 2016-2025 memaparkan tentang perkembangan dan pencapaian tujuan section yang terdapat dalam ASEAN Work section yang terdapat dalam ASEAN Work Plan 2016-2025.

Ketujuh *section* tersebut yaitu komponen narkoba secara umum, pendidikan pencegahan, penegakan hukum, pengobatan dan rehabilitasi, penelitian, alternatif, *development* dan kerja sama ekstra regional. Dalam kesimpulan paparannya, Kapuslitadin BNN menyebutkan bahwa kecuali *section* pendidikan pencegahan, enam dari ketujuh *section* tersebut masih sangat membutuhkan penguatan sehingga dapat berjalan dengan lebih optimal.

Indonesia berharap ASEAN berkomitmen pada pendekatan *zero tolerance* terhadap narkoba meskipun terdapat langkah-langkah untuk melemahkan kontrol Internasional tanpa disertai dengan ilmiah yang relevan, dapat diverifikasi, dan dapat dipercaya. Hal tersebut disampaikan deputi hukum dan kerja sama menanggapi usulan Thailand untuk menghapus sebuah paragraf di dalam *draft Chairman's Statement* yang menunjukkan sikap *zero tolerance* ASEAN terhadap narkoba. Menurut Puji Sarwono, keberadaan pernyataan komitmen tersebut justru menunjukkan kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN. Indonesia mendapat dukungan dari Singapura, Malaysia dan Brunei agar kalimat tersebut dapat masuk dalam *Chairman's Statement* tersebut.

Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba

Dalam mengantisipasi kian maraknya peredaran dan penyelundupan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI yang menjadi salah satu anggota ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) semakin meningkatkan intensitasnya dalam menjalin kerjasama dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam rangka tukar menukar informasi dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Lalu apa langkah kita jika semua upaya telah dilakukan? Mungkinkah kita sepakat dengan pemberantasan narkoba seperti yang dilakukan negeri Jiran Filipina, Presiden Rodrigo Duterte instruksikan perintah tembak di tempat? Yang jelas apa yang dilakukan Presiden Rodrigo itu ternyata efektif. Baru sebulan berkuasa 400 tersangka pededar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar karena baku tembak dengan polisi. Selebihnya dari 4.400 orang tersangka ditahan. Bahkan pengguna, pededar, dan badan narkoba di negeri itu ketakutan hingga diperkirakan sebanyak 500,000 pededar dan pengguna menyerahkan diri kepada polisi.

Saatnya untuk berbuat baik. Marilah kita semua sebagai warga negara se-ASEAN bergotong-royong dan bekerja sama dalam pemberantasan narkoba yang gerakannya sudah masif dan menggurita. Tidak perlu takut untuk mengatakan benar untuk menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Di setiap negara harus diselamatkan dari kehancuran akibat narkoba. Karena itu pemerintah harus tegas dan serius mengatasi persoalan maraknya peredaran narkoba di tanah air. Perlu kebijakan yang jelas dan tindakan yang tegas terhadap para penjahat narkoba, sehingga negeri tidak lagi darurat narkoba. Untuk memberikan efek jera tersangka harus diberi hukuman berat, hukuman mati, memaksimalkan upaya pencegahan dan mengeksekusi seluruh tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Di Indonesia, hukuman bagi pecandu dan pededar narkoba diatur dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pecandu dan pededar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Dengan hukuman Pidana bagi pecandu dan pededar narkoba diharapkan para audiens dapat mewujudkan pencegahan berkembangnya pecandu dan pengguna narkoba di kalangan pelajar, generasi muda, maupun masyarakat dewasa, khususnya seluruh Asia tenggara.

Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda dan Masyarakat

Kian maraknya pengedaran dan pecandu narkotika dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dikemudian hari. Sebagai penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga tidak mampu berfikir jernih. Efek dampak penggunaan narkoba bisa dalam berbagai bentuk antara lain adalah sebagai berikut: Menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran; Menghilangkan rasa; Mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan Menimbulkan ketergantungan /adiktif (kecanduan).

Bahaya narkoba untuk kesehatan yang terberat adalah efek ketergantungan obatnya itu sendiri, karena keinginan untuk selalu memakainya secara berulang. Di Indonesia itu sendiri, pecandu narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan merokok inilah pergaulan terus meningkat dan bergabung ke dalam lingkungan orang-orang pecandu narkoba. Awalnya mencoba hingga akhirnya mengalami ketergantungan.

Dampak negatifnya adalah perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian, Mudah tersinggung, cepat marah sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang di sekitarnya. Sering menguap, mengantuk dan malas sehingga mengganggu produktivitas. Serta suka mencuri untuk membeli narkoba bila telah kehabisan uang. Dampak efek negatif secara umum adalah menjadi depresan. Para pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri; Halusinogen.

Para pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada); stimulan. Akibatnya adalah mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu, karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan adiktif (kecanduan) Pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuh akan ada pada kondisi kritis (sakaw).

Konklusi: Pemberantasan Narkoba

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam menjatuhkan diri di (Gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR. Bukhari 5778 dan Muslim 109). Hadis tersebut menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba meliputi upaya pencegahan dan pengurangan permintaan gelap akan narkoba, pengawasan terhadap faktor persediaan, tindakan terhadap peredaran gelap serta perawatan dan rehabilitasi. Upaya promotif, bisa juga disebut program preventif atau program pembinaan. Program ini ditujukan untuk masyarakat awam tentang narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba. Program kuratif, yaitu upaya mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba sekaligus menghentikannya. Upaya rehabilitasi, yaitu pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif, agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Upaya represif, yaitu program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, kita sebagai warga negara diseluruh negara ASEAN, selaku orang yang masih sadar dan peduli, pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak generasi penerus bangsa. Pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan, karena salah satu penyebab terjerumusnya mereka adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang diserap sehingga terjerumus ke dalam lingkaran narkotika.*

Referensi

<https://bnn.go.id>> Indonesia-tegaskan komitmennya untuk mencapai ASEAN Drug Free pada pertemuan prep-ASOD. (14/10/2021)

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>. (6/12/2022)

<http://muslim.okezone.com.com>red> (25/6/2020)

Majalah Medika Bakti Tulungagung edisi 10/TH.II./2016

SRI SEMBADRA ALYA, 51 tahun, tinggal di dusun Jaran guyang, Desa Batangsaren, kecamatan Kauman, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Mempelajari menulis secara otodidak, Penulis cerkak antara lain “Pepadange lilin ing tengah wengi” (Majalah Jayabaya 2000-an). Bergabung dengan ASEAN Women Writers Association (AWWA). Naskahnya terpilih dan terbit di majalah Akbar Singapura dalam bahasa Mandarin dengan judul Meraih mimpi di negeri Formosa, Puisi Sketsa Wajah Ibu (AWWA 2017). Ia juga menulis skenario film drama dengan judul Karmamu oleh Sumur Production Jakarta, menghasilkan karya kurang lebih 10 buku antologi, antara lain *Menjadi generasi Pemutus* (Anugerah Utama Raharja 2016), *Aku Sakit bukan Penyakit* (Sinar Gamedia), *Thailand Personal Recout of Thaindo* (Pustaka Senja 2018), *Kisah Cinta Jagat Lelembut* (CV. Khadijah 2020), *Padamu Aku Bercerita*, *Ensiklopedi Penulis Indonesia* (Fam Publisig 2017), dan novel *Peta-Peta Cinta* (Fam Publisig 2020). Ia juga pernah menulis novel *Mengukir Angin di Piramida* (2023) dan pada tahun 2023 ia meraih juara 2 lomba menulis cerpen Mistery di Worvid Internasional Magazine dan Juara 5 menulis puisi di Worvid Internasional Magazine.

Korupsi Lintas Negara, Mampukah Indonesia Sebagai Chairmanship ASEAN 2023 Memberantasnya?

Suprianto Haseng

Pendahuluan

Menurut data Laporan Transparency International (Mahdi, 2022) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara ASEAN dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indonesia memiliki nilai sebesar 38 pada 2021. Skor tersebut meningkat satu poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai angka 37. IPK Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kelima di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dengan IPK sebesar 39. Singapura masih menjadi negara dengan IPK paling besar di Asia Tenggara, yakni 85. Skor IPK Negeri Singapura tidak berubah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Malaysia berada di peringkat kedua dengan IPK sebesar 48. Kemudian, Timor Leste menempati posisi ketiga dengan IPK sebesar 41. Adapun, Thailand dan Filipina berada di bawah Indonesia dengan IPK masing-masing 35 dan 33. Laos berada di posisi kedelapan dengan skor IPK sebesar 30. IPK menggunakan skala 0-100. Skor 0 menandakan bahwa suatu negara sangat korup. Sebaliknya, skor 100 dalam IPK menunjukkan negara bersih dari korupsi.

Dari berbagai skor IPK ini menandakan bahwa negara-negara ASEAN juga belum mampu memberantas korupsi yang tengah menggerogoti negaranya. Kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan menjadi musuh negara yang harus diberantas. Namun, itu semua tergantung pada penegakan hukum masing-masing negara ASEAN. Sayangnya, tidak semua negara mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Korupsi, termasuk mekanisme pencucian uang yang dilakukan memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, baik secara finansial maupun non finansial. Hasil korupsi disembunyikan dalam sistem keuangan dunia melalui mekanisme kompleks yang tersembunyi di berbagai yurisdiksi. Perbedaan sistem hukum antarnegara, sistem perbankan dan praktik manajemen kasus seringkali menjadi kendala besar yang signifikan bagi pelaksanaan penegakan hukum dan pemulihan aset yang dilakukan oleh KPK di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah lama menghadapi masalah pencucian uang atau *money laundering*. Saat ini, hasil korupsi tidak hanya didaur ulang di dalam negeri, tetapi juga dicuci sedemikian rupa dengan dibawa kabur ke luar negeri. Akibatnya, pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit diberantas karena kendala persoalan eksternal. Untuk mengungkap aliran dana korupsi saja, pihak berwenang harus berurusan dengan rumitnya berbagai peraturan asing yang sangat menghormati privasi. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas ASEAN dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi skala Internasional. Diterimanya Indonesia sebagai *Chairmanship* ASEAN 2023 (Moegiarsa, 2022) timbul suatu pertanyaan yang cukup menantang bagi Indonesia yaitu mampukah Indonesia memimpin ASEAN dalam memberantas persoalan korupsi yang telah lama menggurita, terstruktur dan mengglobal?

Korupsi Permasalahan Global yang Kompleks

Masalah korupsi tidak lagi terbatas pada masalah nasional tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan global. Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Di setiap hari antikorupsi, penting bagi kita untuk membangun ketahanan bersama melawan korupsi. Karena korupsi merupakan masalah global dan harus menjadi musuh bersama untuk diberantas dengan memberikan hukuman yang paling berat. Hukuman berat, karena baik koruptor maupun teroris merupakan saudara kembar yang telah mengotori, melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merampas paksa hak dan rasa keadilan masyarakat.

Kasus koruptor kabur ke luar negeri sepertinya sudah menjadi sebuah gaya baru bagi pelaku koruptor. Tidak sedikit para koruptor melarikan diri ke luar negeri untuk bersembunyi dari jeratan hukum Indonesia. Sayangnya, negara kita belum mampu mendeteksi keberadaan mereka. Anggap saja kasus Harun Masiku yang hingga hari ini belum diketahui dimana letak keberadaannya. Kuat disinyalir bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* atau ICW setidaknya ada lebih 40-an buronan korupsi yang berhasil kabur ke luar negeri (Noroyono, 2020) Sejumlah nama-nama buronan tersebut, sudah ada berstatus hukum terpidana korupsi. Dari kejadian ini setidaknya ada dua konsekuensi: Pertama, korupsi bukan lagi hanya masalah nasional tetapi sudah menjadi fenomena global. Kedua, diperlukan kerangka kerja sama yang lebih kuat untuk memberantas korupsi di tingkat internasional atau regional.

Korupsi dan Pencucian Uang atau *Money Laundering*

Korupsi dan pencucian uang sangat menarik untuk kita bahas. Karena kedua istilah ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Lantas apa hubungan antara korupsi dan *Money Laundering*? Tujuan nasional Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi masyarakat dari berbagai pelaku kejahatan, pemerintah juga berkewajiban melindungi kerugian masyarakat akibat kejahatan, baik kerugian langsung maupun tidak langsung.

Salah satu kejahatan yang paling sering merugikan masyarakat dalam skala yang cukup besar adalah korupsi, dimana pelakunya sering berusaha menyembunyikan kekayaannya melalui pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana biasa, melainkan merupakan tindak pidana yang terorganisir dan sistematis yang memerlukan keseriusan dan pemikiran jauh ke depan untuk memberantasnya.

Pencucian uang atau *money laundering* dapat penulis bahasakan sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang harta kekayaan yang dihasilkan secara pidana melalui berbagai transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dana atau harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Umumnya pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari kejahatan dengan berbagai cara agar aparat penegak hukum tidak dapat dengan mudah melacak harta kekayaan hasil kejahatan tersebut sehingga dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan legal maupun ilegal.

Selain merampas hak sosial dan ekonomi yang sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat sulit melacak hasil korupsi karena pencucian uang sering dilakukan oleh oknum yang korup. Pencucian uang sering dilakukan dengan memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Pencucian uang atau *money laundering* merupakan bentuk kejahatan khusus yang saling terhubung dengan berbagai jenis kejahatan lainnya. Pencucian uang juga dianggap sebagai tindak kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat kita lihat bersama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* merupakan suatu bentuk kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan keutuhan sistem perekonomian dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Pemberantasan korupsi sudah lama menjadi pusat perhatian dunia dan ditekankan sejak Sidang Umum PBB yang sangat menyadari bahwa dampak korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan daya rusak yang sangat besar karena

dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global, tidak hanya perekonomian nasional, berdampak buruk juga pada masyarakat dan pada sendi-sendi kehidupan manusia.

Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat melintasi berbagai negara, baik dari segi pelaku, aliran uang, dan akibat yang ditimbulkan. Kemudian, pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yang bertujuan untuk mencegah korupsi di seluruh dunia melalui kerjasama internasional untuk mengambil tindakan pemberantasan korupsi di seluruh dunia yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada tanggal 18 Desember 2003 (Qorib, 2011). UNCAC memberikan sejumlah pedoman pemberantasan korupsi, termasuk tindakan preventif, perumusan tindak pidana korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerja sama internasional, dan mekanisme penyitaan aset, terutama yang bersifat lintas batas²⁹.

UNCAC memiliki *point of interest* seperti pemulihan aset atau kerjasama teknis dan bantuan, yang memberikan ruang untuk kerja sama teknis antarnegara. UNCAC juga menyediakan serangkaian standar seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang memungkinkan sebagian besar masyarakat sipil untuk terlibat. Namun, konvensi ini masih belum cukup untuk mencegah, misalnya pencucian uang dan penyimpanan uang di bank-bank asing. Alasannya sederhana yakni peraturan perbankan berbeda-beda di berbagai negara dan berada di bawah yurisdiksi kedaulatan negara tersebut. Hambatan ini juga tercermin dalam penekanan pada “melindungi kedaulatan,” prinsip dasar UNCAC. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari karena standar kerja sama internasional yang menghormati kedaulatan negara, namun seringkali menimbulkan masalah karena tidak jarang banyak negara melindungi pengungsi dari korupsi domestik.

Komunitas ASEAN

Pertanyaannya, sebagai kerangka kerja sama regional untuk Asia Tenggara, apakah ASEAN bisa dan mampu menutupi kelemahan UNCAC yang ada? Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia sebagai *chairmanship* ASEAN ke depan. Sebagai informasi, ASEAN telah mengatasi masalah korupsi ini bahkan sebelum adanya UNCAC melalui ASEAN Declaration on Transnational Crime yang ditandatangani di Filipina (1997) (ASEAN Declaration on Transnational Crime, 1997). Dalam isi deklarasi tersebut, masalah korupsi dan penyuapan memang dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional. Namun, tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini terbatas pada membuat rekomendasi pada pertemuan kelompok ahli dan mendorong setiap negara anggota ASEAN untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini membuat ASEAN Declaration on Transnational Crime hanya merupakan konsensus regional, yang pada akhirnya diserahkan kepada masing-masing negara untuk melaksanakannya.

ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)

ASEAN-PAC, sebelumnya bernama SEA-PAC, didirikan di Jakarta pada 15 Desember 2004 oleh 4 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Kemudian selanjutnya negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos dan Myanmar resmi bergabung dan menjadi ASEAN-PAC. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama antikorupsi di Asia Tenggara dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan memberantas korupsi (Ernowo, 2022).

Bagaimana seharusnya Indonesia berperan? Sejalan dengan semangat antikorupsi di forum internasional, Indonesia telah menjadikan antikorupsi sebagai isu penting yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam Nawacita 2014 Di dalam Nawacita tersebut, cita keempat secara jelas menyebutkan: “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Dalam RPJM 2020-2024, persoalan pemberantasan korupsi diterjemahkan juga dengan penguatan stabilitas politik keamanan dan penegakan hukum melalui terwujudnya negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang merupakan pilar dalam pencegahan korupsi.

29 Di tingkat internasional, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi pada tahun 2003. Ini merupakan dokumen terpenting dalam pelaksanaan kerja sama internasional antikorupsi. Konvensi ini telah membantu mengatasi masalah korupsi sebagai masalah global, namun masih belum menjadi kerangka politik internasional yang komprehensif dan cukup kuat untuk memberantas jaringan korupsi di seluruh dunia.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga antikorupsi independen yang didirikan pada tahun 2003 oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggapan terhadap masalah korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. KPK juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK melakukan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, sesuai dengan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK).

Kerjasama internasional KPK dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kerjasama pencegahan, peningkatan kapasitas, dan kerjasama dalam hal Penindakan. Kerjasama di bidang pencegahan dilakukan untuk saling bertukar informasi tentang metode, pendekatan, dan praktik-praktik baik pencegahan korupsi. Kerjasama yang berkaitan dengan *capacity building*, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia, dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyelenggaraan seminar atau konferensi internasional, program pelatihan bersama, dan program pelatihan pemagangan di lembaga antikorupsi negara lain.

Selain itu, di bidang penindakan juga terjalin kerjasama pertukaran data dan informasi terkait dengan pemrosesan perkara, pertukaran informasi mengenai cara-cara yang digunakan oleh oknum koruptor, penggunaan teknologi informasi dan berbagai cara baru lainnya, seperti forensik digital, forensik akuntansi dan bantuan sarana hukum lainnya untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi (KPK, 2020). Pada Tahun 2018, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi, juga telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) (Sugiarto, 2022) Stranas-PK adalah upaya komprehensif pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia sebagai bentuk membangun komitmen bersama (bertanggungjawab) dengan mengutamakan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu orang.

Dalam hampir semua kasus korupsi yang melibatkan aliran uang besar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa aliran tindak pidana korupsi mengalir ke luar negeri dan disembunyikan. Dalam beberapa kasus, suap bahkan mengalir dari rekening perusahaan asing di luar negeri ke rekening pejabat Indonesia di luar negeri, sehingga tidak diketahui oleh penyedia jasa keuangan Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini menegaskan bahwa KPK tidak bisa sendirian dalam memberantas korupsi, dan hanya mengandalkan kerjasama dalam negeri.

Kerjasama internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu sebagai Chairmanship of ASEAN 2023 Indonesia harus *all out* dalam memperjuangkan berbagai bentuk kerjasama internasional dalam upaya perang melawan korupsi secara global. Kolaborasi dan sinergi bersama dengan komitmen membawa perubahan ASEAN bersih dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau *money laundering*.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi menjadi perhatian mendesak yang harus dilaksanakan bersama dengan komunitas ASEAN. Sebagai Chairmanship ASEAN 2023, Indonesia harus mampu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat ASEAN. Para koruptor yang secara sah mengalihkan harta kekayaannya ke luar negeri, baik dengan melarikan diri maupun dengan menitipkan harta kekayaannya, harus diadili secara terbuka dan bertanggungjawab. Seluruh aset dari hasil kejahatan korupsinya harus disita. Untuk sukses memberantas korupsi yang sudah merampas hak dan merebut paksa kesejahteraan, negara-negara anggota ASEAN harus sepakat dan berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan korupsi melalui upaya kerjasama multilateral.*

Referensi

- ASEAN Declaration on Transnational Crime*. (1997, December 2020). Retrieved from <https://asean.org>: <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf>
- Ernowo, P. Y. (2022, November 25). *Dalam Forum ASEAN-PAC, Indonesia Tegaskan Komitmen Dukung Pemberantasan Korupsi Lintas Negara*. Retrieved from Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik->

hukum/688899/dalam-forum-asean-pac-indonesia-tegaskan-komitmen-dukung-pemberantasan-korupsi-lintas-negara?video=

- KPK. (2020). *Praktik Terbaik Kerja Sama Internasional KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.
- Mahdi, M. I. (2022, January 27). *DataIndonesia.id*. Retrieved from Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 di Asean pada 2021: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021>
- Moegiarmo, S. (2022, November 13). *Angkat Tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia Resmi Menjadi Ketua ASEAN 2023*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4719/angkat-tema-asean-matters-epicentrum-of-growth-indonesia-resmi-menjadi-ketua-asean-2023>
- Noroyono, B. (2020, Juli 11). *ICW: Masih Ada 40-an Koruptor yang Kabur ke Luar Negeri*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qdazew335/icw-masih-ada-40an-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri>
- Qorib, F. (2011, April 20). *Rapor Biru' Implementasi UNCAC Indonesia*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia-lt4daeb43d3eee3>
- Sugiarto, E. C. (2022, April 12). *G20 dan Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from Kemensetneg: https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi

SUPRIANTO HASENG lahir di Madai Kunak Sabah Malaysia 28 tahun silam. Lulusan Ilmu Administrasi Publik tahun 2020 di Universitas Terbuka, Jakarta ini aktif di berbagai kegiatan sosial, pendidikan, seni dan budaya. Yanto pernah mendapatkan penghargaan sebagai *Wonderful Performance ASEAN Workshop Outreach Programme* di Bangkok Thailand (2017). Pernah juga sebagai delegasi dalam konferensi Internasional tentang budaya dan pariwisata di United Nation Convention Center, Bangkok. Pada 2018, bersama Pustaka Bergerak Indonesia, Yanto mendapatkan penghargaan sebagai *Literacy Promotor Awards oleh IKAPI*. Ia juga pernah memenangkan Sayembara Menulis Nasional ASN Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (2019). Selain tercatat sebagai Relawan Pendidikan BAZNAS pada lembaga beasiswa BAZNAS RI, Yanto adalah seorang Penyuluh Antikorupsi Pertama sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Telaah ASEAN dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pekerja Migran/Pekerja Rumah Tangga

Wisnu Adihartono

Pendahuluan

Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah tenaga kerja migran atau *migrant workers* di seluruh dunia pada tahun 2005 mencapai 190,6 juta orang atau sekitar 3% dari keseluruhan populasi dunia. Dorongan untuk bekerja di luar negeri disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah: (1) Perubahan dalam struktur ekonomi dari pertanian menuju industri, (2) Urbanisasi yang menumbuhkan sektor informal di kota-kota dunia, termasuk wilayah ASEAN, (3) Peningkatan kemiskinan di desa dan kesenjangan, (4) Adanya kompetisi global dan regional sebagai penarik untuk bekerja di luar negeri, dan (5) Efek dari krisis ekonomi yang berkelanjutan di negara asal, seperti Indonesia, yang menyebabkan kebangkrutan industri kecil di perkotaan dan perdesaan.

Di antara semua pekerja migran/pekerja rumah tangga di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, pekerja rumah tangga migran terdiri dari sembilan belas persen migran (ILO, 2015). Di Asia Tenggara dan Pasifik, 83 persen pekerja rumah tangga adalah perempuan, sementara tujuh belas persen adalah laki-laki (ILO, 2016). Di Asia dan Pasifik secara lebih luas, jumlah pekerja rumah tangga telah meningkat dari waktu ke waktu, tumbuh sebesar 58 persen dari tahun 1995 hingga 2010 (ILO, 2013). Anak-anak migran juga dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga namun jumlahnya tidak dipantau secara sistematis. Perkiraan global ILO tentang pekerja anak menunjukkan bahwa 6,3 juta anak berusia lima hingga empat belas tahun terlibat dalam pekerjaan rumah tangga pada tahun 2012 (Etienne, Diallo, & Mehran, 2014).

Di dalam ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling banyak memiliki aturan dan regulasi, setelah Filipina, di mana Brunei Darussalam memiliki 8 regulasi, Kamboja 14 regulasi dan 9 perjanjian bilateral, Indonesia 70 regulasi dan 1 perjanjian bilateral, Laos 10 regulasi dan 4 perjanjian bilateral, Malaysia 17 regulasi, Myanmar 9 regulasi dan 2 kerja sama bilateral, Filipina 90 regulasi, Singapura 29 regulasi, Thailand 25 regulasi, dan Vietnam 39 regulasi (ASEAN Secretariat, 2012). ASEAN telah memiliki peta jalan yang bertujuan mendukung tegaknya peraturan mengenai buruh migran. Salah satu kekurangan Indonesia dalam diplomasi dan pembuatan aturan mengenai buruh migran adalah tidak diikutsertakannya serikat pekerja dan agen tenaga kerja dalam pembuatan kebijakan publik. Padahal salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh migran adalah menjadikan serikat pekerja dan aktor gerakan perempuan sebagai *insider* atau aktor pembuat kebijakan. Bagaimana ASEAN melihat isu bagi para pekerja rumah tangga yang notabene isu pekerja rumah tangga adalah isu yang dapat digolongkan sebagai isu yang pribadi?

Pekerja Migran/Pekerja Rumah Tangga dan Isu Kekerasan

Pekerjaan rumah tangga adalah bagian dari perawatan yang lebih luas. Mereka membersihkan rumah, memasak, merawat anak-anak, merawat anggota keluarga yang lanjut usia, dan melakukan tugas-tugas penting lainnya untuk majikan mereka. Terlepas dari peran penting mereka, mereka adalah salah satu pekerja yang paling dieksploitasi dan dilecehkan di dunia. Mereka sering bekerja 14 sampai 18 jam sehari, tujuh hari seminggu, dengan upah jauh di bawah upah minimum. Banyak dari mereka yang menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual. Anak-anak dan pekerja rumah tangga migran sering kali merupakan kelompok yang paling rentan. Sebuah perjanjian internasional yaitu Konvensi Pekerja Rumah Tangga yang diadopsi pada Juni 2011 memberikan standar global untuk melindungi pekerja rumah tangga. Pekerjaan yang mereka berikan sangat padat karena terdapat aktivitas tatap muka, sering kali membutuhkan kontak langsung, dan "pekerjaan emosional" yang tidak dapat digantikan dengan teknologi.

Di kawasan ASEAN, sebagian besar perawatan bersifat informal. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya kekerasan (verbal dan non-verbal) yang dialami oleh para pekerja migran/pekerja rumah tangga. Selama rentang waktu antara tahun 2004-2010 telah terjadi 12.216 kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia dengan korban 97%

perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Rumah tangga memiliki pengertian yaitu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak, mertua, dan orang lain yang menempati satu rumah oleh karena itu pekerja rumah tangga dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan bagian dari keluarga di mana apabila pekerja rumah tangga tersebut mengalami kekerasan oleh anggota rumah tangga lain maka kekerasan tersebut akan masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pekerja rumah tangga, menurut Konvensi Perburuhan Internasional Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga memiliki definisi yaitu setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga tidak permanen dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah maka ia bukan merupakan pekerja rumah tangga (Daud, 2020).

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur Perlindungan pekerja rumah tangga. Sebab utamanya adalah belum dibahasnya Rancangan Undang-Undang pekerja rumah tangga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun sudah diajukan ke Parlemen semenjak 13 tahun lalu. Oleh karena belum adanya peraturan yang mengikat maka pekerja rumah tangga belum diakui sebagai pekerja dan tidak ada yang memandatkan bahwa pekerja rumah tangga berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta tidak memiliki wadah hukum dan tidak dijamin perlindungannya oleh hukum (Noerdin, 2006).

ASEAN, Pekerja Migran/Pekerja Rumah Tangga, dan Hak Asasi Manusia

Insiden dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh pekerja migran/pekerja rumah tangga Indonesia di negara-negara anggota ASEAN merupakan tantangan besar untuk Komunitas ASEAN oleh karena itu pada tanggal 23 Oktober 2009 dibentuklah Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) yang memiliki empat belas mandat dan fungsi yang diantaranya adalah pemajuan dan perlindungan setiap hak manusia, melakukan aksi dan dialog kooperatif, bersifat informatif dan konsultatif, melaksanakan studi tematik, dan penyusunan laporan tahunan. Salah satu mandat AICHR adalah untuk melaksanakan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 18 hingga 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja (Kalyanamitra, 2013).

Meski demikian, penanganan pelanggaran HAM di ASEAN tidaklah mudah. Kehadiran AICHR bukan berarti pelanggaran HAM otomatis dapat teratasi dikarenakan AICHR lambat dalam menyelesaikan masalah HAM di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi selain kelemahan yang lambat menyelesaikan masalah HAM, pendirian AICHR merupakan langkah progresif menuju ASEAN dalam mewujudkan tujuannya yaitu memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan dengan aturan hukum yang baik, dan memajukan dan melindungi HAM. Kekerasan terhadap pekerja migran/pekerja rumah tangga di negara-negara anggota ASEAN merupakan salah satu isu HAM yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, para Menteri Luar Negeri di sepuluh negara ASEAN sepakat untuk membentuk Komite tentang Implementasi Deklarasi ASEAN dan tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007³⁰.

Akan tetapi, komite tersebut diperkirakan akan membuat kemajuan yang lambat apabila tidak ada komitmen para pemimpin ASEAN untuk mengimplementasikan deklarasi Cebu tentang perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran/pekerja rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam di dalam kawasan ASEAN diperlukan untuk mendukung kerja komite pekerja migran/pekerja rumah tangga ASEAN. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga harus serius menangani masalah pekerja migran/pekerja rumah tangga. Untuk Indonesia telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan *International Organization for Migration* (IOM) yang mendapat dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja dan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati kesetaraan gender dan pemberdayaan

30 Tujuan dari pembentukan komite ini adalah untuk mempromosikan kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja migran/pekerja rumah tangga, mendorong mitra dialog ASEAN dan negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip dan memperluas dukungan dan bantuan untuk pelaksanaan langkah-langkah yang terkandung dalam deklarasi, dan mempromosikan harmonisasi antara negara pengirim dan mekanisme yang melindungi dan memajukan hak dari pekerja migran/pekerja rumah tangga (ASEAN, tidak ada tahun).

perempuan. Tujuan dari program kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah untuk mempromosikan praktik perekrutan tenaga kerja di luar negeri. Contoh konkrit dari permasalahan ini adalah isu di mana terjadi kekerasan pada pekerja migran/pekerja rumah tangga di Malaysia. Ikatan Advokat Indonesia telah menjalin kerja sama dengan asosiasi pengacara di Malaysia untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi pekerja yang dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Selain itu, Yayasan Perempuan DIVA dan LSM yang berada di Batam telah aktif berkolaborasi dengan sebuah LSM di Singapura. *Singapore HOME* membantu pekerja migran yang bermasalah ketika mereka di deportasi dari Singapura ke Batam dengan menampung pekerja migran/pekerja rumah tangga pada *shelter* DIVA (Manajit&Na, 2011).

Konklusi

Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran/pekerja rumah tangga ke luar negeri, terutama di Asia Tenggara membuat pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa aturan atau undang-undang untuk melindungi hak-hak pekerja migran/pekerja rumah tangga saat bekerja di luar negeri. ASEAN telah memproduksi berbagai regulasi tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia terutama untuk melindungi hak-hak pekerja migran/pekerja rumah tangga. Akan tetapi, instrumen ASEAN untuk perlindungan pekerja migran/pekerja rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dikenakan pada negara-negara anggota ASEAN karena mereka dapat dihalangi oleh prinsip non-intervensi.

Selain itu, tidak adanya mekanisme di ASEAN terkait penerapan sanksi terhadap anggota negara yang melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, kelemahan perangkat hukum di tingkat nasional dan tingkat daerah tidak boleh menghalangi pelaksanaannya hak asasi manusia untuk melindungi pekerja migran/pekerja rumah tangga di luar negeri. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat keterlibatan publik ASEAN dalam mempromosikan perlindungan pekerja migran/pekerja rumah tangga. Pendekatan ini harus dipromosikan secara aktif untuk mengisi kesenjangan dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen ASEAN yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran/pekerja rumah tangga di dalam atau di luar negeri.

Referensi

- ASEAN Secretariat. (2012). *Repository Matrix of Legislations and Policies on Migrant Workers of ASEAN Member States*. December
- ASEAN, "Statement of the Establishment of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers", <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/statement-of-the-establishment-of-the-asean-committee-on-the-implementation-of-the-asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers>. (diunduh 1 November 2022)
- Azmy, Ana Sabhana. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Daud, Erita Rosa Larasari. (2020). "Pekerja Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5
- Etienne, A.; Diallo, Y.; Mehran, F. (2014). *Global estimation of child labour trends: 2008 to 2012*. Geneva: ILO
- International Labour Organization. (2013). *Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection*. Geneva
- International Labour Organization. (2015). *ILO global estimates on migrant workers: Results and methodology: Special focus on migrant domestic workers*. Geneva
- International Labour Organization. (2016). *Migrant domestic workers across the world: Global and regional estimates*. Geneva
- Kalyanamitra. (2013). "Mekanisme HAM di ASEAN: Peluang Penegakan HAM di Tingkat Regional", <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/02/mekanisme-ham-di-asean-peluang-penegakan-ham-di-tingkat-regional/>. (diunduh 5 November 2022)

Manajit, Suchita; Na, Mai Thi Thanh Nga. (2011). *Migrant Workers Rights to Social Protection in ASEAN (Case Studies of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand)*. Pamplona: Friedrich-Ebert Stiftung

Noerdin, Edriana. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*. Women Research Institute.

WISNU ADIHARTONO adalah sosiolog dan peneliti dalam bidang sosiologi keseharian, studi migrasi, studi diaspora, studi keluarga, studi kelompok minoritas, mikro sosiologi, dan penelitian kualitatif. Ia memperoleh PhD dari École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Perancis. Saat ini ia bekerja di Jakarta. Ia banyak menulis untuk jurnal-jurnal ilmiah dan laman internet. Ia telah menulis buku *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda* (editor: Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Astriningsih) Penerbit Kanisius, Yogyakarta (2015) dan *Migration et Soutien Familial: Le Cas des Gays Indonésiens à Paris* oleh Penerbit Generis Publishing, September 2020. Ia dapat dihubungi di: wisnuadihartono@aol.com atau wisnuadi.reksodirdjo@gmail.com.

Membangun Keamanan Digital di ASEAN

Siti Amalia

Fakta Dampak Negatif Teknologi

Teknologi membuat hidup kita lebih mudah, lebih cepat, lebih dekat. Namun teknologi memiliki banyak dampak negatif bagi mereka yang tidak mengetahui cara menggunakan teknologi ini dengan baik. Dampak negatif dari teknologi adalah *bullying*, *cybercrime* dan *hoax*. Saat ini *bullying* telah menjadi masalah yang semakin parah di ASEAN. Di Thailand, sekitar 92% anak sekolah telah mengalami pelecehan fisik atau psikologis oleh teman sebaya setidaknya satu kali, sementara 13% mengalami depresi klinis akibat intimidasi, menurut survei terbaru oleh Jaringan Advokat Hukum untuk Anak dan Remaja.

Perundungan sangat bervariasi, mulai dari pelecehan fisik hingga pelecehan verbal dan pelecehan online. 62% responden mengatakan mereka mengalami tamparan di kepala dari teman sekolah; 43% bahwa pelaku intimidasi mengolok-olok nama orang tua mereka; dan 42% dipermalukan dengan julukan yang menghina. Akhirnya, hampir 30% melaporkan telah mengalami beberapa bentuk pelecehan atau pelecehan melalui media sosial (*THAILAND Bullying Warning: 92% of Thai Youth Are Affected*, n.d.).

Tidak hanya Thailand, Malaysia melaporkan kasus yang sama. Malaysia menempati peringkat kedua di Asia pada tahun 2020 untuk *cyberbullying* di kalangan anak muda, menurut laporan United Nations Children's Fund (Unicef) - menunjukkan bahwa *cyberbullying* menjadi masalah yang semakin menonjol di negara tersebut (*Malaysia Is 2nd in Asia for Youth Cyberbullying*, 2022). Seperlima anak muda Vietnam diintimidasi secara online tetapi sebagian besar tidak tahu bagaimana menemukan bantuan profesional untuk ini, survei UNICEF telah menemukan (*Vietnam youths struggle with cyberbullying, no help forthcoming*, 2019).

Tujuh puluh persen responden muda Vietnam mengatakan kepada survei Kekerasan terhadap Anak-anak, mereka tidak mengetahui adanya saluran bantuan atau layanan jika terjadi *cyberbullying*. Sebanyak 170.000 orang berusia 13 hingga 24 tahun disurvei di 30 negara. Ini termasuk 1.788 di Vietnam, di mana 21 persen mengatakan mereka telah menjadi korban intimidasi online. Angka di negara tetangga jauh lebih tinggi, termasuk 45 persen di Indonesia dan 30 persen di Malaysia.

Menurut survei CNA, 3 dari 4 anak muda telah menjadi korban *cyberbullying* di Singapura (*What is cyberbullying in Singapore: 5 ways to deal with a cyber bully | Incontact*, 2020). Fakta yang lebih mengkhawatirkan tentang statistik *cyberbullying* ini adalah hanya 3% dari mereka yang disurvei yang memberi tahu orang tua mereka. Sebagian besar korban menganggap *cyberbullying* sebagai bagian tak terhindarkan dari kehadiran online mereka dan tidak ingin berbagi sisi ini dengan orang tua mereka, karena merasa dipermalukan atau menjadi korban.

Cyberbullying dapat mempengaruhi korban dalam jangka panjang. Misalnya di Kamboja, penggunaan internet tumbuh di kalangan anak muda, dengan hampir satu dari 20 anak di bawah 15 tahun diperkirakan online. Namun, siswa yang lebih tua lebih berisiko, kata kelompok itu. Penindasan semacam itu dapat berdampak seumur hidup. Korban *cyberbullying* lebih cenderung menggunakan alkohol dan obat-obatan serta membolos sekolah daripada siswa lain. Mereka juga lebih mungkin menerima nilai buruk dan mengalami harga diri rendah serta masalah kesehatan. Dalam situasi ekstrim, *cyberbullying* telah menyebabkan bunuh diri (*Unicef Calls for 'Concrete Action' on Online Bullying in Cambodia*, 2019).

Penindasan dunia maya adalah kejahatan. Itu dapat mengganggu kehidupan seseorang, mental, emosional, fisik, dan kedamaian. Di Filipina, *cyber bullying* dikategorikan sebagai top 5 *cybercrime*. Lima kejahatan dunia maya teratas selama periode 7 bulan tahun 2020 adalah penipuan online, fitnah online, pencurian identitas terkait komputer, voyeurisme anti-foto dan video, dan akses ilegal ke akun online orang lain (*Online Scams, Libel Cases Top PNP's Cybercrime*

List from March to September, 2020). Cyber bullying adalah kejahatan dan membuat seseorang terluka atau mati, mengapa masalah ini masih ada dan menjadi kasus yang lebih besar hingga saat ini?

Diskusi: Bagaimana Penanganannya?

Untuk menangani masalah tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah intimidasi dengan menggunakan teknologi digital. Itu dapat terjadi di media sosial, platform perpesanan, platform game, dan ponsel (*Cyberbullying: What is it and how to stop it*, 2021). Ini adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk: menyebarkan kebohongan tentang atau memposting foto memalukan seseorang di media sosial mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform perpesanan menyamar sebagai seseorang dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. *Bullying* baik itu secara langsung atau tatap muka dan *cyberbullying* sering terjadi bersamaan. Tapi *cyberbullying* meninggalkan jejak digital – sebuah catatan yang terbukti berguna dan memberikan bukti untuk membantu menghentikan penyalahgunaan.

Cybercrime dapat didefinisikan sebagai penggunaan ilegal dari perangkat komunikasi apa pun untuk melakukan atau memfasilitasi dalam melakukan tindakan ilegal apa pun (*What Is Cyber Crime? Types, Examples, and Prevention*, n.d.). Kejahatan dunia maya dijelaskan sebagai jenis kejahatan yang menargetkan atau menggunakan komputer atau sekelompok komputer di bawah satu jaringan untuk tujuan merugikan. Kejahatan dunia maya dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer. Mereka dapat menargetkan individu, kelompok bisnis, atau bahkan pemerintah. Penyelidik cenderung menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki perangkat yang diduga digunakan atau menjadi sasaran kejahatan dunia maya.

Di Indonesia, terdapat 274,9 juta orang, dan 345,3 juta memiliki koneksi seluler. Sehingga banyak orang yang memiliki handphone lebih dari satu. Dalam data tersebut, 170 juta orang adalah pengguna media sosial (Kemp, 2021). Angka ini sangat menantang. Berdasarkan data tersebut, pemerintah harus mengatasi dampak negatif dari media sosial. Karena ponsel telah menjadi hal utama saat ini, cara menggunakan media sosial juga menjadi masalah kita. Interaksi antara internet dan media sosial meningkatkan gaya hidup masyarakat. Misalnya kita harus pergi ke mall jika ingin membeli sesuatu. Sekarang kita tinggal buka aplikasi, kita pilih apapun yang kita mau dan bayar dengan pembayaran online, dan diantar ke rumah kita. Sangat mudah untuk melihat properti baru atau gaya baru orang lain di media sosial, dan menirunya. Semudah mengomentari media sosial orang lain. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa melihat postingan orang lain itu seperti menjadi tamu di rumah orang tersebut. Kita harus sopan, jujur, dan menjaga adab berbicara. Ketidaktahuan etika ini menjadi salah satu pemicu terjadinya cyber bullying.

Ada kondisi yang dapat memicu pencurian data dan memicu intimidasi dunia maya dan kejahatan dunia maya. Jadi kami membutuhkan keamanan digital untuk siswa. Siswa yang mengetahui tentang keamanan digital dapat mengontrol penggunaan teknologi dan media sosial. Pertama, ketidaktahuan menjaga kerahasiaan nama pengguna dan kata sandi. Sebagian dari kita mudah membuat akun dengan kata sandi yang bisa diketahui. Setelah itu kita dengan mudah membaginya dengan teman dekat. Peretas mencoba membuka akun kita dengan kata sandi acak atau mereka menggunakan aplikasi untuk membobol akun kita. Setelah mereka menghapus akun kita, mereka memposting aib kita, atau menghubungi teman dan keluarga kita untuk meminjam sejumlah uang atas nama kita.

Kedua, mencari tahu apa yang bisa dibagikan di media sosial. Beberapa siswa tidak mengetahui item privasi yang tidak dapat dibagikan di media sosial. Nomor telepon, alamat, keluarga, nama keluarga kita, email dan kata sandi, tempat yang baru saja kita kunjungi, semua hal itu bersifat privasi. Semua orang bisa melihat tempat-tempat yang kita kunjungi, dan tahu bahwa kita tidak di rumah. Sedihnya, mereka mencoba memasuki rumah dan merampok barang-barang berharga.

Kita juga harus mengontrol apa yang kita bagikan di media sosial. Jika kita sedang marah, hindari memposting sesuatu tentang kemarahan kita. Segala sesuatu yang kita posting, jelajahi, buka, meskipun mengirimkan sesuatu melalui email, ada jejak digital yang tidak dapat dihapus selamanya, disimpan di server, dan dapat dibuka suatu saat nanti. Jika kita membagikan hoax, atau sesuatu yang tidak berhubungan dengan kehidupan nyata kita, informasi palsu, atau sesuatu yang tidak berguna, hal itu dapat memicu *cyberbullying*. Jika kita sedang senang atau menerima sesuatu, hindari memposting ke media sosial. Ada begitu banyak orang di media sosial sehingga kami tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka mengenai postingan kita.

Ketiga, aturan jika menggunakan komputer bersama. Komputer bersama bukan milik kita. Mereka digunakan bersama dengan orang lain. Jadi kita harus melindungi akun dan kata sandi kita saat kita menggunakan komputer bersama. Ada beberapa aturan saat kita menggunakan komputer bersama. Buka *browser* sebagai mode tamu. Telusuri dan buka konten yang sesuai. Setelah digunakan, hapus riwayat penelusuran di komputer bersama. Langkah-langkah ini dapat meminimalkan peretas yang membobol akun kita dan mengambil keuntungan dari akun kita.

Keempat, bagaimana cara menyapa teman baru di internet, batasan informasi apa saja yang harus dibagikan kepada teman baru, dan bagaimana seharusnya siswa kita mengetahui kondisi tersebut. Itu bisa memulai pencurian data dan intimidasi juga. Ketika kita memiliki akun media sosial, kita setuju untuk dilihat, dikuntit, dihubungi, dikomentari, dibenci, *di-like* oleh orang lain. Orang lain di seluruh dunia dapat mengirimkan pesan kepada kita. Mereka menyapa, mencari teman baru, dan mereka tahu foto-foto kita dari media sosial kita. Kita bisa melihat-lihat foto teman baru kita, tapi siapa yang bisa menjamin foto itu asli. Beberapa siswa kita mungkin percaya bahwa teman baru yang menghubungi mereka di media sosial adalah orang yang baik, mereka melakukan apa saja sebagai teman dekat atau sahabat. Bila sudah dekat dan percaya akhirnya mau mengirimkan apapun termasuk mengirimi mereka gambar-gambar porno yang mereka inginkan. Pada trik selanjutnya mereka meminta sejumlah uang atau mereka akan membagikan gambar porno tersebut ke publik.

Kelima, waspada saat kita harus menggunakan wifi publik. Kita sebaiknya lebih memilih untuk menggunakan data internet kita di ruang publik. Namun, sebagian dari kita memiliki koneksi internet yang terbatas dan terpaksa menggunakan wifi publik. Wifi publik dapat diretas oleh peretas. Mereka bisa mencuri data kita, masuk ke rekening bank dan media sosial kita. Jadi, mungkin kita kehilangan data internet kita saat kita menggunakannya di ruang publik, tapi kita menyimpan data kita dari peretas.

Merupakan tanggung jawab kami untuk membagikan apa itu keamanan digital kepada siswa kami. Mereka menggunakan ponsel dan media sosial tetapi kebanyakan mereka tidak tahu apa aturan di media sosial. Ketidaktahuan ini memicu *cyberbullying* dan *cybercrime*. Sebagai guru, sekolah dapat membuat pekan keamanan digital untuk kegiatan berbagi pengetahuan keamanan digital. Dalam pekan ini sekolah dapat:

- Undang pembicara dari kementerian informasi dan teknologi atau seseorang yang ahli dalam keamanan digital.
- Membuat *role play* tentang cara menghentikan dan mencegah *bullying*.
- Buat kompetisi poster Canva tentang keamanan digital.
- Bercerita tentang pengalaman masa lalu tentang intimidasi dan kejahatan dunia maya.
- Menonton film tentang keamanan digital, intimidasi, atau kejahatan dunia maya.
- Buat padlet dan setiap siswa dapat melaporkan intimidasi secara anonim.
- Buat Diskusi Kelompok Terfokus tentang cara memerangi kejahatan dunia maya.

Di tingkat ASEAN, sekolah dengan kementerian informasi dan teknologi ASEAN dapat berkolaborasi untuk membuat webinar dan berbagi tentang cara mencegah *cyberbullying*, *cybercrime*, dan hoax di sekolah mereka. Para korban dapat menuliskan pengalamannya ke dalam buku antologi antar negara ASEAN. Pada level selanjutnya, kunjungan sekolah antar negara ASEAN dapat membangun hubungan terbaik dan mempertajam bahasa Inggris bagi siswa ASEAN.

Jika kita menjadi korban kejahatan dunia maya, kita dapat melaporkannya ke polisi terdekat. Karena setiap negara di ASEAN bekerja sama untuk keamanan siber, yang salah satu bidangnya adalah meningkatkan kesadaran tentang tantangan keamanan siber (*Cyber Security*, n.d.), negara-negara ASEAN juga terbuka untuk keamanan siber. Misalnya, Lao mengizinkan Lao Computer Emergency Team (Lao CERT) untuk menerima pengaduan dari orang-orang yang difitnah oleh pengguna media sosial lainnya (*New Initiative Launched To Address Cyberbullies*, 2020), Brunei mendirikan Cyber Security Brunei (CSB). CSB adalah badan keamanan siber nasional Negara Brunei Darussalam, berfungsi sebagai administrator yang memantau dan mengoordinasikan upaya nasional dalam mengatasi ancaman keamanan siber dan kejahatan siber (*About*, n.d.).

Kesimpulan: Keamanan Digital adalah suatu keharusan

Cyberbullying, cybercrime, hoax adalah efek negatif dari teknologi. Sebagai seorang guru, kami bertemu ratusan siswa setiap hari. Kami memiliki waktu untuk berbagi tentang literasi digital di waktu motivasi siswa, dalam pengarahan

siswa, atau di kelas kami setelah waktu mengajar. Keamanan digital adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap orang saat ini. Sebelum kami membagikan ilmu ini kepada siswa kami telah belajar terlebih dahulu tentang keamanan digital dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.*

Referensi

- About.* (n.d.). Cyber Security Brunei. Retrieved December 7, 2022, from <https://www.csb.gov.bn/about>
- Cyberbullying: What is it and how to stop it.* (2021, May 27). UNICEF. Retrieved December 7, 2022, from <https://www.unicef.org/laos/stories/cyberbullying-what-it-and-how-stop-it>
- Cyber Security.* (n.d.). ASEAN. Retrieved December 7, 2022, from <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/cyber-security/>
- Kemp, S. (2021, February 11). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal – Global Digital Insights.* DataReportal. Retrieved December 6, 2022, from <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Malaysia is 2nd in Asia for youth cyberbullying.* (2022, January 14). The Star. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/01/14/malaysia-is-2nd-in-asia-for-youth-cyberbullying>
- New Initiative Launched To Address Cyberbullies.* (2020, September 9). J&C Group. Retrieved December 7, 2022, from <https://jclao.com/new-initiative-launched-to-address-cyberbullies/>
- Online scams, libel cases top PNP's cybercrime list from March to September.* (2020, October 27). CNN Philippines. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.cnnphilippines.com/news/2020/10/27/Online-scams-libel-cases-top-PNP-s-cybercrime-list-.html>
- THAILAND Bullying warning: 92% of Thai youth are affected.* (n.d.). AsiaNews. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.asianews.it/news-en/Bullying-warning-92-of-Thai-youth-are-affected-49000.html>
- Unicef Calls for 'Concrete Action' on Online Bullying in Cambodia.* (2019, February 6). VoA Cambodia. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.voacambodia.com/a/unicef-calls-for-concrete-action-on-online-bullying-in-cambodia/4775248.html>
- Vietnam youths struggle with cyberbullying, no help forthcoming.* (2019, September 9). VnExpress International. Retrieved December 7, 2022, from <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-youths-struggle-with-cyberbullying-no-help-forthcoming-3978866.html>
- What Is Cyberbullying in Singapore: 5 Ways To Deal With A Cyber Bully | Incontact.* (2020, November 13). Incontact counselling services. Retrieved December 6, 2022, from <https://incontact.com.sg/cyber-bullying/>
- What is Cyber Crime? Types, Examples, and Prevention.* (n.d.). CyberTalents. Retrieved December 7, 2022, from <https://cybertalents.com/blog/what-is-cyber-crime-types-examples-and-prevention>

SITI AMALIA berasal dari Kota Bogor Jawa Barat. Mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Solo Jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta jurusan Manajemen Pendidikan. Penyuka kucing dan warna ungu ini mempunyai hobi membaca, menulis, jalan kaki dan berenang. Pernah mendapatkan beasiswa *teacher training* dari Provinsi Jawa Barat ke Adelaide Australia (2013), juara 1 Olimpiade Sains Nasional Guru Matematika SMP Tingkat Kota Bogor (2013) dan lainnya. Buku yang ditulis sampai sebanyak 25 buah. Saat ini selain sebagai guru matematika, ia juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMPN 17 Kota Bogor. Ia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor periode 2021-2026 dan pemimpin redaksi jurnal *Metakognisi* IGI Kota Bogor. Bidang minat yang didalaminya adalah *Educational Leadership, School Managerial, Literacy, High Order Thinking Skills (HOTS), Best Practice, Action Research, Qualitative Research*, Google, dan Canva. Ia dapat dihubungi di amelya1397@gmail.com.

Mengembangkan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) yang Ramah untuk ASEAN

Amal Hasan

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di ASEAN. AI dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sebagai berikut:

- Layanan publik AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
- Bisnis: AI dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi bisnis, seperti pengembangan produk baru, pemasaran, dan manajemen rantai pasokan.
- Pendidikan: AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti personalisasi pembelajaran dan penilaian.
- Kesehatan: AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, seperti deteksi penyakit dan perawatan medis.

Menurut laporan McKinsey Global Institute, AI memiliki potensi untuk menambahkan US\$12 triliun ke ekonomi ASEAN pada tahun 2030. Potensi ini setara dengan 10% PDB ASEAN di tahun 2030. Namun, AI juga memiliki beberapa tantangan dan risiko. Untuk mengatasi tantangan dan risiko ini, ASEAN sedang mengembangkan regulasi AI yang ramah bisnis.

Tantangan dan Risiko

Sebagaimana umumnya teknologi, AI pun memiliki potensi untuk digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk. Adapun tantangan dan risiko itu antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, Bias. Tantangan utama AI adalah bias. AI dapat memberikan hasil yang bias jika data yang digunakan untuk melatihnya tidak representatif dari populasi yang dilayani. Misalnya, jika sistem AI dilatih pada data yang hanya mencakup orang kulit putih, sistem tersebut mungkin akan menghasilkan hasil yang bias terhadap orang kulit hitam. Sebuah studi oleh MIT Media Lab menemukan bahwa sistem AI yang digunakan untuk menilai kredit lebih cenderung menolak permohonan pinjaman dari orang kulit hitam. Demikian pula studi yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University menemukan bahwa sistem AI yang digunakan untuk mendeteksi kanker lebih cenderung salah mendiagnosis kanker pada wanita.

Kedua, Diskriminasi. AI juga dapat digunakan untuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti ras, gender, atau agama. Misalnya, sistem AI yang digunakan untuk mempekerjakan karyawan mungkin akan lebih menyukai kandidat dari kelompok tertentu, atau AI dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku yang dianggap tidak pantas, seperti perilaku yang dapat diinterpretasikan sebagai ujaran kebencian.

Ketiga, Penyalahgunaan. AI juga dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya, seperti penyebaran informasi yang salah atau propaganda. Dalam dunia bisnis AI dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi secara massif untuk tujuan yang tidak etis, memanipulasi data hingga penyebaran informasi atau propaganda yang salah.

Prinsip Dasar Regulasi AI ASEAN

Prinsip dasar regulasi AI mencakup setidaknya empat aspek yaitu transparansi, kesetaraan, privasi dan keamanan.

Prinsip transparansi memastikan bahwa sistem AI dapat dipahami oleh manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem AI tidak menghasilkan hasil yang bias atau diskriminatif.

Prinsip kesetaraan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem AI digunakan secara non-diskriminatif. Memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan sistem AI.

Prinsip privasi melindungi data pribadi yang digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem AI, setidaknya untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan.

Sedangkan prinsip keamanan untuk memastikan bahwa sistem AI aman dari serangan siber atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi AI ASEAN diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan penggunaan AI di ASEAN, sambil memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan etis.

Berikut adalah tabel perbandingan regulasi AI ASEAN dan AI Uni-Eropa yang menarik sebagai informasi untuk kita semua:

Aspek	Regulasi AI ASEAN	Regulasi AI Uni-Eropa
Prinsip dasar	Transparansi, kesetaraan, privasi, dan keamanan	Transparansi, kesetaraan, akuntabilitas, keselamatan, dan privasi
Tujuan	Menjamin penggunaan AI secara bertanggung jawab dan etis	Mencegah penyalahgunaan AI dan melindungi hak asasi manusia
Aplikasi	Akan mencakup ketentuan khusus untuk berbagai aplikasi AI	Akan mencakup ketentuan khusus untuk aplikasi AI yang dianggap berisiko tinggi
Pendekatan	Fleksibel dan adaptif	Terstruktur dan ketat
Pemangku kepentingan	Mencakup partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan	Lebih didominasi oleh pemerintah
Ketentuan khusus	Lebih spesifik untuk aplikasi AI di ASEAN	Lebih umum

Penutup

Regulasi AI ASEAN merupakan langkah penting dalam upaya ASEAN untuk memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. ASEAN akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa regulasi AI ASEAN dapat diimplementasikan secara efektif.

Tulisan ini juga sekaligus sebagai rekomendasi agar ASEAN dapat mengembangkan regulasi AI yang ramah bisnis dan dapat membantu memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis. *

AMAL HASAN adalah praktisi teknologi informasi dan pendidikan dari Maros, Sulawesi Selatan. Lahir di Pangkep tanggal 12 Januari 1973 dan mengenyam pendidikan di dari SD hingga perguruan tinggi di kota Makassar. Walaupun sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Unhas angkatan 1992, namun bukan nasibnya untuk menjadi seorang dokter. Setelah gagal menyelesaikan kuliah di fakultas kedokteran, justru keserjanaannya diraih dari bidang ilmu statistik dari Universitas Terbuka. Ia mulai mengenal komputer sejak sekitar tahun 1989, dan sejak itu terus mengikuti perkembangan teknologi komputer. Dengan memadukan antara teknologi informasi dan profesinya sebagai tenaga pendidikan, ia menjadi seorang Edutech Trainer bersertifikat Google dan memfokuskan pengabdianya di Sekolah Putri Darul Istiqamah (SPIDI) di Kabupaten Maros. Dalam kapasitasnya sebagai *Leader of Google Educator* untuk wilayah Sulawesi Selatan, ia berhasil mengantarkan SPIDI menjadi Google References School (GRS) ketiga di Indonesia, yaitu sebuah sekolah yang menerapkan teknologi berstandar internasional dari Google.

BAB 5

Mengelola Lingkungan Berkelanjutan di ASEAN

Ketahanan Pangan ASEAN di Tengah Krisis Global

Guntur S. Mahardika

I su pangan (*food*) menjadi salah satu agenda penting yang menjadi perhatian para pemimpin bangsa di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. ASEAN yang mayoritas penduduknya didominasi Indonesia ini menjadi wilayah strategis. Berada di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis yang mampu menghasilkan produksi pertanian berlimpah pada setiap musim. Kawasan ini juga menjadi paru-paru dunia dengan hamparan hutan yang berada di Kalimantan, Indonesia dan kawasan sekitarnya. Dan, secara geografis ASEAN sangat strategis di Kawasan Asia – Pasifik yang menghubungkan Asia Timur hingga Australasia di dekat laut Pasifik (Oceania).

Ditambah lagi, kawasan Asia Tenggara memiliki hamparan lautan yang luas yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat selain pertanian darat. Saat ini, air juga menjadi komoditas strategis karena penyusutan kandungan air tahan dan kebutuhan air dalam kehidupan yang cukup besar dalam produksi makanan dan kehidupan manusia.

Maka, Badan Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization, FAO) menjadi air sebagai tema peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2023. “Water is Life, Water Is food. Leave No One Behind”. Air adalah kehidupan, air adalah makanan. Jangan tinggalkan siapa pun. Food and Agriculture Organization (FAO) United Nation mencanangkan Hari Pangan Sedunia sejak 1979. Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masa depan pangan, manusia, dan planet (bumi).

Tantangan negara-negara ASEAN saat ini adalah sebagaimana yang dialami hampir seluruh negara di muka bumi ini. Khususnya, tantangan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada krisis negara-negara di dunia. Tidak hanya krisis Kesehatan, tapi menjadi krisis multidimensi: Krisis pangan, krisis air, krisis energi, krisis keuangan, krisis sosial, dan krisis geopolitik. Situasi ini yang membuat beratnya upaya pemulihan (*recovery*) pasca pandemi Covid-19.

Pandemi telah meluluhlantakkan tatanan ekonomi global. Produksi, tata niaga dan jalur logistik antar negara terganggu, bahkan sempat terhenti. Akibatnya, porak poranda suplai logistik menyebabkan banyak negara kesulitan pangan (dan bahan konsumsi pokok). Negara-negara produsen pangan memprioritaskan kepentingan pangan nasionalnya, Mereka memperkuat cadangan dalam negerinya, menghentikan ekspor. Sementara negara-negara yang ketergantungan pangannya pada negara lain memiliki masalah besar. Mereka terancam kesulitan pangan, bahkan kelaparan.

Global Report on Food Crisis (GRFC) Badan Pangan Dunia menemukan bahwa 258 juta orang di 58 negara dan wilayah menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau lebih buruk pada tahun 2022. Jumlah ini naik dari 193 juta orang tahun sebelumnya. Keparahan kerawanan pangan itu meningkat menjadi 22,7 persen. Kondisi ini berlanjut sampai 2023, sehingga ancaman kelaparan dan kemiskinan semakin luas.

Setidaknya ada tiga faktor utama yang sangat menekan banyak negara yang berujung pada peningkatan kemiskinan dan kelaparan. Pertama adalah economic shock (guncangan ekonomi) termasuk dampak pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina mengguncang ekonomi global dan menekan negara-negara miskin. Kedua, conflict/insecurity (konflik/ketidakamanan) yang terjadi di sejumlah negara telah meingkatkan kemiskinan. Ketiga, weather/climate extremes (cuaca/iklim ekstrem) menjadi pendorong utama kerawanan pangan akut. Ekstrem ini termasuk kekeringan berkelanjutan di sejumlah negara.

Situasi ini juga tentu mempengaruhi kondisi Kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, beruntung negara-negara di Kawasan ASEAN merupakan produsen pangan, bahkan sebagian mampu mengekspor pangannya. Indonesia, merupakan negara produsen beras terbesar ketiga di dunia setelah India dan China.

Meski mengalami penurunan produksi padi di Indonesia pasca pandemi Covid-19, namun produksi padi nasional Indonesia masih tinggi. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang dipublikasi 16 Oktober 2023, luas panen padi tahun ini diperkirakan 10,20 juta hektar dengan produksi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG).

Areal luas panen ini mengalami penurunan 255,79 ribu hektar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 10,45 juta hektar. Produksi padi tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 2,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 54,75 juta ton. Begitu juga produksi beras yang pada tahun ini diperkirakan mencapai 30,90 juta ton menurun 2,05 persen (645,09 ribu ton) dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 31,54 juta ton.

Bila merujuk data Global Food Security Index (GFSI) negara ASEAN yang paling kuat ketahanan pangannya adalah Singapura. Namun, tampaknya peringkat itu perlu dikoreksi, karena nyatanya Singapura di tengah pandemi dan pasca pandemi Covid-19 justru menjadi negara yang paling rentan terhadap kecukupan pangan. Negara-negara eksportir pangan ke Singapura seperti India dan Brazil menghentikan suplainya karena mementingkan cadangan pangan nasionalnya masing-masing.

Indonesia, pada GFSI tahun 2022 berada pada level 60,2. Meski indeks ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun indeks tersebut masih di bawah rata-rata index ketahanan pangan global pada level 62,2 dan rata-rata ketahanan pangan Asia Pasifik pada level 63,4. Indonesia berada pada peringkat 63 dari 113 negara. Sementara negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara, relatif stabil tingkat ketahanan pangannya. Bahkan, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sudah mengekspor berasnya ke negara tetangganya, termasuk Indonesia untuk cadangan pangan nasional.

Tabel.
Indeks Ketahanan Pangan ASEAN

PERINGKAT	NEGARA	SKOR
1	Singapura	73,1
2	Malaysia	69,9
3	Vietnam	67,9
4	Indonesia	60,2
5	Thailand	60,1
6	Filipina	59,3
7	Myanmar	57,6
8	Kamboja	55,7
9	Laos	53,1

Sumber: GFSI, *The Economist*. www.economist.com

Mengukur ketahanan pangan dilihat dari empat kategori yang menjadi dasar indeks. Pertama adalah ketersediaan pasokan pangan (*availability*); kedua, keterjangkauan harga pangan (*affordability*); ketiga, kualitas nutrisi (*quality and safety*); keempat, keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaption*).

Dulu sebelum pandemi Covid-19, kebutuhan suplai pangan dapat dipenuhi melalui impor dari berbagai negara. Namun, dalam kondisi Covid-19 yang memporakporandakan sektor produksi, distribusi, dan logistik antar negara

mendorong banyak negara untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Tidak bisa lagi tergantung pada suplai pangan dari negeri lain, yang sewaktu-waktu dapat menghentikan pasokannya.

Di antara negara-negara ASEAN sebenarnya Indonesia seharusnya paling siap menghadapi tantangan krisis pangan saat ini dan ke depan. Negara yang berpenduduk 278 juta jiwa ini memiliki lahan yang subur dan laut luas, yang di atas lahannya tumbuh ribuan varietas pangan dan pertanian serta beragam ikan dan sumber daya maritim. Indonesia kaya akan keragaman hayati (*bio diversity*).

Indonesia negara yang memiliki anugerah kekayaan alam yang luar biasa. Keragaman hayati (*bio diversity*) Indonesia merupakan kekuatan besar bangsa ini bila dikelola dengan baik. Pembangunan Indonesia yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, saatnya dievaluasi dan *shifting* pada kekuatan keragaman hayati yang dikelola berkelanjutan dengan pengembangan sains dan teknologi.

Negeri ini juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Saat di banyak negara terjadi kondisi kekurangan generasi mudanya, Indonesia memiliki bonus demografi dengan usia produktif yang tinggi dan mayoritas adalah generasi milenial serta generasi X. Di satu sisi ini merupakan kekuatan, namun apabila tidak dikelola dengan baik bonus demografi akan menjadi bom waktu, khususnya pengangguran yang akan meningkat.

Saat ini momentum bagi Indonesia melahirkan momentum kedua kebangkitan nasional. Saatnya mengoreksi kebijakan-kebijakan nasional yang tidak bertumpu pada peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peran Indonesia tidak hanya dibutuhkan masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi harapan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australasia. Indonesia juga dapat memimpin kerjasama ketahanan pangan Kawasan ASEAN dan sekitarnya. Negeri ini sangat strategis, dengan sejumlah kekayaan hayati, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Menyongsong Indonesia Emas 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia. Bangkit Indonesia! *

GUNTUR S. MAHARDIKA adalah Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI), Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) CSGS Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Infrastruktur Hijau ASEAN: Kontribusi Nyata ASEAN dalam Mencapai *Sustainable Development Goals*

Yenni Nur 'Aini

Tantangan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Pembangunan di berbagai sektor yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya populasi yang bermuara pada aktivitas manusia dan perkembangan peradaban, semakin dibutuhkan. Namun, dampak dari pembangunan tidak bisa dielakkan. Di wilayah perkotaan misalnya, dipenuhi lahan terbangun yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) menjadi kawasan perkantoran, permukiman, perdagangan, pelabuhan, lapangan udara, dan sarana prasarana kota lainnya. Bertambahnya kawasan terbangun di perkotaan mempengaruhi kenyamanan warga dalam menikmati hidup yang berkualitas, akibat telah berkurangnya vegetasi dan tutupan lahan (Sumaryana, 2022), kepadatan bangunan yang kian tinggi, dan tingginya suhu permukaan di perkotaan dan perdesaan (Oke et al, 2017).

Kerusakan lingkungan terutama terjadi di mayoritas negara yang sedang giat-giatnya membangun. Dalam berbagai studi ditemukan bahwa ruang hijau di negara-negara Asia mulai menurun dikarenakan pertumbuhan populasi yang luar biasa pesat (Natuhara, 2018). Kerusakan lingkungan hidup di negara ASEAN seperti di Indonesia kian meningkat, ditandai dengan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya bencana alam, dan penurunan kualitas air, yang dipengaruhi antara lain karena alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan eksploitasi alam secara besar-besaran (Caro et al, 2021).

Dari fenomena tersebut terlihat ada 2 sisi mata uang yang menjadi tantangan pembangunan suatu negara. Di satu sisi, pengembangan wilayah yang bertujuan mencapai pertumbuhan dan pemerataan perlu dilakukan secara masif, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, lingkungan hidup menjadi elemen paling terdampak dari pembangunan yang mempengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri bila tidak dirancang dengan cermat untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan. Kedua isu ini menjadi sangat krusial karena adanya kebutuhan antara satu sisi dengan lainnya, pun berdampak terhadap satu dengan lainnya. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, khususnya akibat dari pembangunan, harus diantisipasi oleh para penyelenggara pembangunan dengan memperhatikan secara lebih serius langkah-langkah mencapai pembangunan yang lebih tanggap terhadap isu lingkungan dengan tetap membangun namun meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Peran Penting ASEAN di Kancah Global

Biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), emisi karbon, banjir, air bersih, merupakan isu lingkungan terdepan saat ini bagi mayoritas negara-negara dunia, dikarenakan dampaknya berskala global dan berjangka panjang. Berbagai kesepakatan dan konvensi telah dilakukan antarnegara guna melindungi lingkungan yang juga secara otomatis akan berpengaruh pada kualitas hidup manusia secara luas. Peran ASEAN menjadi penting dalam isu ini karena kawasan Asia Tenggara merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia (asiatoday.id), diantaranya terdapat 25 *hotspot* biodiversitas global, dan 3 dari 17 negara megabiodiversitas merupakan negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina) yang mempunyai potensi berkelanjutan yang sangat besar (Rintelen et al, 2017).

Indonesia pun menjadi salah satu negara ASEAN yang berkomitmen dalam mengelola keanekaragaman hayati menuju visi 2050 "*Living in Harmony with Nature*" pada *Convention on Biological Diversity (CBD)* pada bulan Oktober 2021 di Kunming, China. Beberapa kesepakatan pada Deklarasi Kunming adalah melakukan dekarbonisasi rantai suplai industri, mengakui perlindungan biodiversitas sebagai sebuah layanan ekonomi, serta mengajak pemerintah berperan

lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Pengarusutamaan biodiversitas di seluruh aspek pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai visi 2050 Deklarasi Kunming.

Fakta lain adalah emisi CO₂ yang dihasilkan ASEAN tergolong tinggi akibat pembangunan dan aktivitas penduduk yang masif di negara-negara ASEAN (Khusna, 2020). Dalam merespon isu global tersebut, pemerintah negara-negara ASEAN pada tahun 2018 sepakat menerapkan konsep pertumbuhan hijau, dengan mengacu pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *Paris Agreement*. Di dalam *Paris Agreement*, para pemimpin dunia termasuk Indonesia, membuat kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari segala aspek untuk mengatasi perubahan iklim serta mengurangi dampak negatifnya, dengan membangun infrastruktur hijau yang merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, Indonesia melakukan upaya konservasi lingkungan dalam lingkup pembangunan infrastruktur sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nation Convention on Biodiversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), dan disusunnya *BAPI (Biodiversity Action Plan for Indonesia)* pada tahun 1993 yang kemudian direvisi menjadi *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* tahun 2003-2020 sebagai panduan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang telah disempurnakan dengan dikeluarkannya IBSAP tahun 2015-2020.

Keseriusan Indonesia akan pelestarian lingkungan ditunjukkan pula dengan sedang disusunnya Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden ini tidak terlepas dari banyaknya kejadian yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia akibat pembangunan (PUPR, 2021). Di lingkungan negara-negara ASEAN, Indonesia turut berpartisipasi dalam pertemuan *ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN)* ke-33 yang berlangsung di Kamboja, 5 Oktober 2022 dimana kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup ini bertujuan agar terwujud masyarakat ASEAN yang inklusif, dinamis, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa prioritas strategis yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya air. Hal ini selaras dengan deklarasi PBB periode tahun 2021-2030 yang dinyatakan sebagai Dekade Restorasi Ekosistem. Pada dekade inilah peran seluruh negara, khususnya negara-negara ASEAN, untuk memperbaiki degradasi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih jauh lagi.

Infrastruktur Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

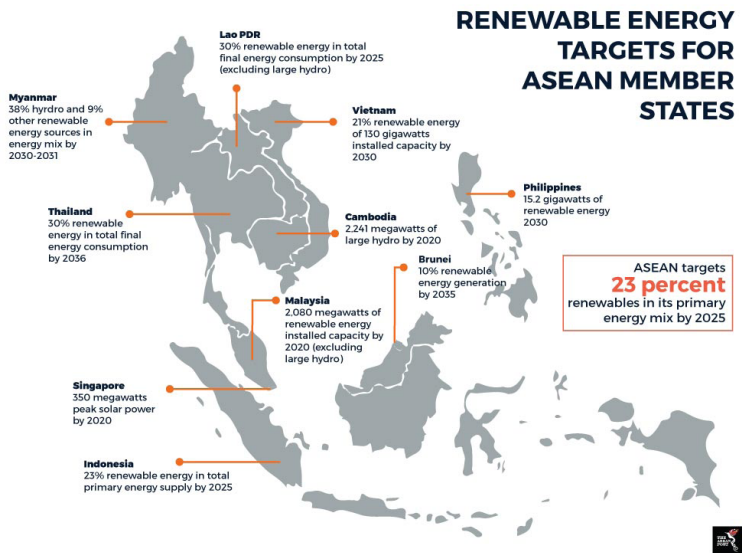
Infrastruktur Hijau (*Green Infrastructure*) adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan yang telah banyak digunakan oleh para pemerhati sumber daya alam dalam rangka menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dengan tujuan menjaga proses-proses, nilai (Setiyono dan Sidiq, 2018), dan fungsi dari ekosistem alami yang bermanfaat bagi manusia (*Benedict and McMahon, 2021*). Konsep infrastruktur hijau adalah membentuk lingkungan dengan proses alami yang terjaga, meliputi manajemen air hujan, manajemen kualitas air, hingga pada mitigasi banjir (Setiyono dan Sidiq, 2018). Arah dari penerapan infrastruktur hijau adalah untuk mendukung *communities development* dengan meningkatkan kondisi lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau (EPA, 2013).

Salah satu elemen penting dari penerapan infrastruktur hijau adalah menjaga keberlangsungan siklus sumber daya air secara alami, mengingat pemanfaatan air bersih terutama di lingkungan perkotaan telah meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Pengurangan polusi juga merupakan bagian dari upaya mencapai lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat pun menjadi unsur vital dalam tercapainya pengembangan infrastruktur hijau ini. Pengembangan infrastruktur hijau dilakukan dengan melibatkan berbagai fungsi peraturan dan kebijakan perencanaan ruang suatu kawasan berbasis lingkungan alami melalui mekanisme teknis pada infrastruktur yang ada. Hal ini dapat diterapkan dengan membentuk kawasan perkotaan yang dapat menjaga keberlangsungan sumber daya air secara mandiri yaitu dengan mengintegrasikan manajemen air kedalam infrastruktur sehari-hari.

Dari sektor jalan dan jembatan, dikenal istilah *Green Road* yang merupakan suatu konsep pembangunan jalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hijau yang menekankan pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, inovasi penggunaan material lokal, kesetaraan akses antar pengguna, dan konservasi lingkungan alamiah. Prinsip hijau tersebut juga dikenal dengan prinsip pembangunan konstruksi berkelanjutan (Lawalata, 2013).

Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*), kestabilan ekosistem yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur hijau tentunya akan mengurangi dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan secara signifikan. Dalam pembangunan infrastruktur hijau terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) ekosistem di wilayah yang akan terkena pembangunan, (2) infrastruktur yang dibangun dengan tujuan melindungi ekosistem. Poin pertama, sangat penting melihat ekosistem yang akan terkena dampak, sehingga tercipta konsep membangun dengan tetap mempertahankan ekosistem tersebut, bagaimana mendesain proyek pembangunan yang pro lingkungan, misalnya dengan memilih lokasi yang tepat, merancang infrastruktur dengan desain sirkularitas air sehingga kualitas dan kuantitas air terjaga dan kembali pada sumbernya, atau melakukan pembaruan terhadap ekosistem yang terdampak, agar fungsi dari ekosistem tetap berkesinambungan. Kemudian yang kedua, membangun infrastruktur dengan tujuan melindungi ekosistem, yang dapat berarti menyediakan secara khusus infrastruktur pelindung lingkungan hidup agar terhindar dari ancaman dan bahaya yang mungkin dapat merusak wilayah tersebut.

Dalam perjalanan membangun infrastruktur, negara-negara ASEAN sedikit banyak telah menerapkan prinsip hijau berkelanjutan tersebut. Sebagai contoh pembangunan jalan Tol Trans Sumatra, Indonesia, yang menambahkan infrastruktur lain, yaitu terowongan satwa pada ruas Tol Pekanbaru – Dumai untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa, khususnya satwa gajah pada kawasan tersebut. Latar belakang dari pembangunan terowongan gajah ini adalah karena sebagian kawasan yang dibangun jalan tol tersebut merupakan kawasan konservasi dimana banyak fauna yang tinggal di area tersebut, terutama gajah. Pembangunan jalan tol yang melewati kawasan konservasi perlu menambahkan infrastruktur lain yang dapat mendukung kelestarian habitat di lokasi pembangunan sehingga tidak mengganggu keberadaan satwa yang ada, dan agar satwa tetap dapat melintas bila ingin berpindah ke wilayah lain. Contoh yang sama ditemukan pada pembangunan jalan yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan National Park, Sumatra, Indonesia, dibangun pula lintasan untuk gajah, badak, rusa, dan lain-lain. Di kawasan tersebut dibangun pula lintasan kera pada segmen jalan yang melintasi di dalam Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, Sulawesi. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keberadaan makhluk hidup lain seperti ini merupakan salah satu penerapan infrastruktur hijau di Indonesia.



Sumber: The ASEAN Post

Anggota ASEAN lain, yaitu Malaysia juga telah lama berperan sebagai *leading country* untuk infrastruktur hijau (Kawanishi et al, 2011) dengan mendesain jalan raya yang ramah satwa, khususnya harimau, yang melintasi Taman Negara National Park dengan luas 4.343 km² yang merupakan kawasan konservasi terbesar di Malaysia. Malaysia membangun jembatan penyeberangan (*eco-bridges*) bagi harimau (*Sungai Yu Tiger Corridor*) sepanjang 370 meter melintasi Sungai Yu, Peninsular, Malaysia yang bertujuan melindungi populasi satwa dari dampak pembangunan infrastruktur jalan raya.

Selain itu, ASEAN berkomitmen untuk mengurangi *carbon footprints* (jejak karbon), diantaranya Thailand berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 20% di tahun 2030, Malaysia 45%, dan Indonesia menetapkan target 29%. Kamboja telah lama menempatkan perhatian terhadap pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam dokumen *Strategic Green Development Plan* untuk periode 2012-2030. Upaya Kamboja dalam mengurangi emisi karbon dalam pembangunannya terbilang sukses karena hanya 0,44 metrik ton karbondioksida per kapita yang dihasilkan di tahun 2014, yang menjadikan Kamboja sebagai negara dengan emisi karbon terendah diantara anggota ASEAN (data. worldbank.org). Berkaca dari keberhasilan tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat melakukan pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon yang terdiri dari inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon, dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Contoh tersebut hanya sebagian kecil dari sekian banyak kontribusi negara-negara ASEAN yang berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan di tengah maraknya pembangunan di ASEAN.

ASEAN Pemegang Peran Penting Pembangunan Berkelanjutan

Dengan populasi yang terus bertambah, tantangan pembangunan, dan status sebagai negara yang penuh dengan keanekaragaman hayati, menjadikan negara-negara ASEAN mempunyai efek mendunia terhadap perubahan iklim, sumber daya alam, dan kelangsungan hidup manusia secara luas. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur hijau yang dilakukan ASEAN berkontribusi cukup signifikan bagi pengurangan emisi karbon, peningkatan kadar oksigen dan air bersih, yang menandakan bahwa ASEAN memegang peran krusial untuk terus berinovasi dalam mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Kiprah ASEAN dalam upaya pembangunan hijau ini akan terus berlanjut dan menjadi dasar bagi Visi Hijau ASEAN paska 2025 (menpan.go.id). Langkah-langkah positif untuk mencapai *Sustainable Development Goals* perlu terus ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur hijau yang dilakukan ASEAN mencapai hasil yang signifikan bagi dunia. Perlu upaya lebih, integrasi dan kerjasama antar sektor, antarlembaga, antarpelaku pembangunan, tak terkecuali masyarakat lokal, agar pembangunan hijau memberikan hasil yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain di dunia ini. *Let's heal the world, make it a better place...**

Referensi

- Benedict, M., & McMahon, E. (2002). *Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century*. Renewable Resources Journal, 12-17.
- Caro, T. R. et al. (2022). *An Inconvenient Misconception: Climate Change Is Not The Principal Driver of Biodiversity Loss*. Wiley, 1-6.
- Kawanishi, K., Aik, Y. C., John, E., Gumal, M., & Sukor, S. (2021). *Malaysia, A Leading Country for Green Infrastructure*. Gland: IUCN.
- Khusna, V. (2020). *Dekomposisi Emisi Karbon Dioksida (Co2) Di ASEAN-8 Berdasarkan Kaya Identity*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lawalata, G. M. (2013). *Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan*. Jurnal Transportasi, 115-124.
- Natuhara, Y. (2018). *Green Infrastructure: Innovative Use of Indigenous Ecosystems and Knowledge*. Springer, 187-192.
- Oke, T. R., Mills, G., Christen, A., & Voogt, J. A. (2017). *Urban Climates*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Setiyono, & Sidiq, A. (2018). *Konsep Infrastruktur Hijau Pada Area Khatulistiwa Park Kota Pontianak*. Jurnal Ketahanan Pangan, 159-164.
- Sumaryana, H., Buchori, I., & Sejati, A. W. (2022). *Dampak Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Suhu Permukaan di Perkotaan Temanggung: Menuju Realisasi Program Infrastruktur Hijau*. Majalah Geografi Indonesia, pp. 68-76.
- Von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). *A Review of Biodiversity-Related Issues and Challenges in Megadiverse Indonesia and Other Southeast Asian Countries*. RIO, 1-16.
- Widiastuti, H., & Aminulwahyu, A. (2021). *Rancangan Instruksi Presiden Tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. In B. P. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Buku Telaahan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PUPR Berdasarkan Pengembangan Wilayah (pp. 47-54). Jakarta: Kementerian PUPR.
- data.worldbank.org. 2020. *CO2 Emissions (Metric Tons per Capita) - Cambodia*
- <https://theaseanpost.com/article/aseans-role-realising-paris-agreement> The ASEAN Post Team. 12 January 2019.
- <https://asiatoday.id/read/asean-jadi-pusat-keanekaragaman-hayati-di-dunia-strategis-bagi-investasi-kesehatan>. *ASEAN Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati di Dunia, Strategis Bagi Investasi Kesehatan*. Redaksi Asiatoday. April 8, 2021
- menpan.go.id. *ASEAN Sepakat Kerja Sama Netralitas Karbon dan Agenda Ekonomi Berkelanjutan*. 10 November 2022.
- US Environmental Protection Agency. 2013. *Annual Performance Report*.

YENNI NUR'AINI bekerja untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2005. Saat ini ia bertugas di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, sebagai Perencana Ahli Madya. Pendidikannya ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan beasiswa Double Degree dari Bappenas – Neso untuk melanjutkan studi di ITB dan University of Groningen, Belanda, jurusan Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan. Beberapa artikel dan bukunya lebih banyak mengulas tentang infrastruktur PUPR, diantaranya *Mengukur Outcome Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman: Tantangan, Metode, dan Strategi* (PU, 2013), *Permasalahan dan Kebutuhan Teknologi Sumber Daya Air* (Pustaka Sinar Harapan, 2017), *Inovasi Infrastruktur Sumber Daya Air; Sebuah Pengantar Pengembangan Teknologi Mitigasi Bencana di Indonesia* (Pustaka Sinar Harapan, 2019), *Dampak Program FLPP Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Indonesia* (Jurnal SIGNIFIKAN, 2022), *Transformasi Digital Layanan Perumahan: Pemulihan Ekonomi-Sosial Tak Berbatas Ruang dan Waktu* – Artikel dalam buku *G20: Pulih Bersama, Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022), dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui email: yenni.nuraini@pu.go.id.

ASEAN Melestarikan Lingkungan Berkelanjutan

Sutiono Gunadi

Lingkungan hidup harus dilestarikan. Banyak orang yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungannya, sehingga lingkungan hidup menjadi tercemar dan rusak. Diperlukan memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya. Terkait dalam kerja sama negara-negara ASEAN diperlukan kolaborasi yang intens untuk saling berbagi pengalaman dan teknologi guna menyelamatkan lingkungan khususnya di ASEAN yang nantinya akan diperluas hingga berskala dunia.

Masalah lingkungan selalu menjadi topik bahasan yang seksi, baik terkait pada pemanasan global maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perlakuan yang salah pada proses menjaga kelestarian lingkungan guna menjaga kehidupan manusia maupun keaneka ragaman hayati. Pengawasan dan proses pencegahan kerusakan lingkungan di Indonesia dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Di lingkup ASEAN pada umumnya ditangani oleh Ministry of Environment.

Selama ini Ministry of Environment kebanyakan memiliki program masing-masing, sebaiknya terjadi suatu kerja sama yang baik, agar masing-masing negara saling membantu dengan berbagi pengalaman, agar program yang dinilai baik, dapat ditularkan secara langsung ke negara-negara lain, sehingga program yang dilakukan tidak lagi bersifat coba-coba lagi. Namun dapat langsung menjalankan program yang dinilai baik, sehingga dipastikan memiliki hasil baik untuk dijalankan di semua negara.

Pada umumnya hal yang harus diawasi dan dilakukan aksi nyata adalah sebagai berikut. *Pertama*, polusi udara akibat gas buang dari kendaraan berbasis fosil. Saat ini kebanyakan diatasi dengan mulai mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil, dan digantikan dengan kendaraan berbasis listrik, seperti mobil listrik, bis listrik, sepeda motor listrik, dan lain-lain. Pembuatan baterai listrik yang pada umumnya membutuhkan bahan baku nikel, Indonesia sebagai negara yang kaya nikel dapat memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN lainnya.

Kedua, polusi udara akibat gas buang industri. Cerobong asap dari industri harus dipantau dengan benar agar gas buang yang dibuang ke udara tidak mencemari lingkungan. Harus dipikirkan teknik penyaringan yang tepat, agar pembuangan gas buang industri tidak mencemari lingkungan. Negara ASEAN yang memiliki teknologi terbaik dapat berbagi kepada negara ASEAN lainnya.

Ketiga, polusi air pada sungai, laut dan danau. Pembuangan air limbah dari industri wajib diolah terlebih dulu, agar memenuhi baku mutu agar tidak mencemari lingkungan yang dapat meracuni binatang yang mengonsumsi air sungai, laut dan danau termasuk manusia. Negara ASEAN harus memikirkan bersama teknologi pengolahan air limbah agar dapat dibuang ke lingkungan, seperti sungai, laut dan danau. Air limbah yang belum memenuhi baku mutu, sebaiknya jangan dibuang ke lingkungan, namun dipakai di lingkungan industri untuk keperluan terbatas seperti untuk menggelontor kotoran pada WC atau untuk menyiram tanaman. Perlu meningkatkan kesadaran industri untuk tidak membuang air limbah sembarangan, meski ada biaya yang harus dikeluarkan, namun tetap harus dibuang setelah diolah. Diperlukan sanksi yang keras bagi industri yang melanggar.

Keempat, limbah elektronik. Banyak limbah elektronik yang berasal dari pemakaian peralatan elektronik dibuang seperti halnya sampah biasa. Padahal sudah diketahui bahwa limbah elektronik mengandung logam berat yang dapat menimbulkan penyakit dari sekedar penyakit kulit hingga penyakit berat, seperti kanker. Ketidaktahuan masyarakat, sering melakukan pemanasan untuk mendapatkan tembaga dan emas dari limbah elektronik padahal aksi ini dapat membahayakan dirinya sendiri dan lingkungannya. Bahkan limbah elektronik seperti bola lampu harus diolah dengan teknologi khusus untuk menyerap gas yang ada di dalamnya. Bila gas ini bocor ke lingkungan justru berbahaya bagi

lingkungan. Diperlukan juga peran serta industri elektronik untuk melakukan program seperti penarikan barang bekas untuk diganjar dengan diskon dengan mendirikan sentra-sentra penampungan yang mudah dijangkau, misal mall atau perkantoran.

Kelima, sampah rumah tangga. Volume sampah rumah tangga ini makin hari makin bertambah sehubungan peningkatan jumlah penduduk serta kesejahteraan penduduk. Bahkan beberapa kota besar, panik karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) lahannya tidak mampu untuk menampung sampah yang diambil dari rumah-rumah masyarakat. Cara pembuangan sampapun sebaiknya sudah dipilah terlebih dulu untuk mempermudah pemrosesannya, antara sampah organik dan sampah anorganik. Setelah dipilah, cara pengangkutannya juga harus pada hari yang berbeda, jangan sampai sebuah mobil pengangkut sampah kemudian mencampur kedua jenis sampah yang telah dipisahkan. Sampah organik bisa diolah lebih mudah untuk digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Sedangkan sampah anorganik harus diolah lebih khusus dengan teknologi yang dapat menghasilkan listrik.

Sebuah perusahaan dari Kanada telah memasang peralatan di Australia dan Malaysia dan telah berhasil menghasilkan tenaga listrik yang berguna bagi masyarakat sekitar. Masalah utama adalah mencari lahan untuk penumpukan bahan baku yang mengeluarkan bau yang sangat mengganggu lingkungan. Australia yang banyak memiliki lahan luas dan jauh dari pemukiman masyarakat dapat dengan mudah mengoperasikannya. Malaysia meski berhasil menerapkannya namun sempat mengalami penolakan berupa demonstrasi dari penduduk.

Jadi, penerapan teknologi ini akan sulit mencari lokasi di Jawa yang padat penduduk, mungkin bisa dibuat di luar Jawa, namun perlu biaya tambahan untuk mengangkat sampah dari Jawa ke luar Jawa. Melihat keberhasilan Malaysia, sekitarnya dapat berbagi kepada negara ASEAN lainnya guna menyelesaikan masalah sampah. Dari mulai cara pengemasan sampah, pemilahan, hingga prosesnya untuk menghasilkan keluaran atau *output* yang bermanfaat. Juga diperlukan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, karena dapat mengakibatkan penyakit bagi masyarakat.

Keenam, limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis, seperti rumah sakit atau klinik, ini juga terus bertambah. Problem utamanya adalah diperlukan pengangkutan khusus dan penyimpanan khusus dengan sistem pendingin. Diperlukan berbagi pengalaman dari negara ASEAN yang sudah berhasil menerapkan teknologi dengan baik untuk berbagi pada negara lainnya.

Ketujuh, penanaman pohon. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk selalu melakukan penanaman pohon di jalan-jalan guna meningkatkan penyerapan gas buang dari kendaraan.

Kedelapan, pemanfaatan limbah untuk pabrik semen. Diperlukan pemahaman teknologi, untuk mengubah semua tempat pembakaran (kiln) pada pabrik semen agar dapat menerima limbah sebagai bahan baku semen guna mensubstitusikan pemakaian batu gunung.

Kesembilan, limbah padat. Memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran industri untuk tidak sekedar menanam atau menimbun limbah padatnya, tetapi harus mengolahnya terlebih dulu.

Kesepuluh, limbah plastik. Limbah plastik adalah limbah yang paling sulit terurai bila dibiarkan berada di tanah. Harus melibatkan industri untuk bersedia mengumpulkan limbah plastik secara benar. Salah satunya adalah oleh tenaga volunteer yang bersedia berkreasi mengubah limbah plastik menjadi tas, dan barang-barang lain yang bermanfaat. Juga perlu mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar-pasar, dengan menciptakan kantong dari bahan lain yang mudah terurai bila berada di tanah.

Selain sepuluh problem utama dalam mengatasi lingkungan, juga perlu penanganan khusus dalam mengatasi masalah efek rumah kaca. Negara-negara ASEAN harus saling berbagi pengalaman untuk saling membantu guna menyelamatkan lingkungan dari kepunahan. Salah satu program pemantauan yang baik yang telah diterapkan di Indonesia adalah program PROPER, yakni sebuah program untuk menilai ketaatan suatu industri dalam melaksanakan pengelolaan limbah.

BatProgram PROPER memberikan label Emas, Hijau dan Biru bagi industri yang telah mengelola lingkungannya dengan baik. Sedangkan yang harus mendapat peringatan diganjar label merah, sedangkan yang belum taat diganjar label hitam. Industri yang berlabel hitam dapat dikenakan sanksi hukum bahkan hingga perusahaannya ditutup. Industri yang berlabel emas dan hijau akan mendapatkan insentif seperti untuk pengembangan. Juga penerapan bagi industri

yang mau dibuka harus lulus AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) sangat baik bagi persiapan dunia industri. Bila di negara-negara ASEAN lainnya belum ada program seperti ini dapat mengadopsi dari program yang telah dijalankan di Indonesia.

Konklusi

Setelah mengetahui jenis-jenis persoalan yang menyebabkan lingkungan hidup terganggu, negara-negara ASEAN harus rela berbagi pengalaman atau kisah suksesnya kepada negara ASEAN lainnya. Kolaborasi ini dapat dimulai dengan mengadakan konferensi tingkat tinggi berskala ASEAN, memetakan solusi yang sudah diterapkan dengan baik untuk menjadi *role model* bagi negara-negara lainnya. Setelah diadopsi cara penanganan maupun teknologinya, lalu dievaluasi masalah yang muncul, dan dicarikan solusi untuk mengatasi semua permasalahan.

Menerapkan setiap solusi secara nyata dan terus menerus mencari solusi terbaik agar benar-benar mampu menyelesaikan masalah. Role model yang berhasil terus dijalankan hingga benar-benar mengatasi masalah, sedangkan bila *role model* belum mampu mengatasi masalah harus dicarikan solusi lainnya hingga masalah dapat diselesaikan. Karena tiap negara memiliki problemnya masing-masing yang saling berbeda.

Dengan semangat kebersamaan ASEAN, semoga setiap permasalahan dapat dicarikan solusinya secara tepat, sehingga benar-benar tercipta lingkungan hidup yang tertata rapi dan berkelanjutan. Setiap negara harus berperan serta, agar setiap masalah lingkungan hidup di ASEAN dapat terselesaikan dengan baik. Baik masalah lingkungan hidupnya maupun masalah dengan masyarakat sekitarnya.

Lingkungan hidup yang baik di ASEAN tentu akan memberikan sumbangan bagi kelestarian lingkungan hidup dunia. Menyelesaikan masalah dalam lingkungan yang lebih kecil tentu lebih mudah. Masalah lingkungan hidup dunia kita berharap semoga dapat diselesaikan sebagian melalui negara-negara ASEAN, agar ASEAN dipandang sebagai kawasan internasional yang sangat peduli lingkungan.*

Referensi

- Rusdiyanto, "Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi", Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6No.2, Desember 2015 Hal.315-317
- Evi Purnama Wati, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan" Jurnal Bina Hukum Lingkungan vol.3 no 2 (2013)
- Agung Budi Prasetyo dkk, "Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Good Governance", SASI vol.27 no.1 (2021)

SUTIONO GUNADI lahir di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Bekerja di industri Teknologi Informasi selama 20 tahun lebih, sempat menjadi Sekjend DPP Apkomindo, Ketua Asosiasi Open Source Indonesia, Ketua Bidang Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Selama 11 tahun bekerja di industri lingkungan hidup, sempat menjabat Wakil Ketua Kompartemen Lingkungan Hidup KADIN. Setelah purna tugas menjadi *full time* blogger, penulis buku dan artikel serta *content creator*. Ia dapat dihubungi melalui email: sutiono2000@yahoo.com atau WA 0811145193. Ia menetap di Tangerang Selatan.

Multiperspektif Perkebunan Ramah Lingkungan di ASEAN

Lili Dahliani dan Eny Dyah Yuniwati

Pendahuluan

Komoditas perkebunan adalah segala sesuatu yang berasal dari hasil perkebunan yang masih merupakan bahan mentah dan dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional. Lingkup yang dibahas dalam tulisan ini terbatas pada beberapa komoditas perkebunan utama, yakni kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu dan teh. Komoditas Perkebunan tersebut merupakan sebagian dari komoditas ekspor yang memberikan devisa bagi Indonesia.

Menurut UU No 39 tahun 2014, perkebunan memiliki arti dari beberapa dimensi, sebagai berikut. Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 (UU No 39 tahun 2014) tentang perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Tanaman perkebunan utama dikenal: kelapa sawit, karet, tebu, kakao, kopi, dan teh (Tyasmoro, 2021). Menurut UU No 39 tersebut Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan dengan hasil perkebunan berupa semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Produk perkebunan berupa bahan mentah (*raw material*) pabrik pengolahan dihasilkan di areal kebun *On-farm*, sedangkan hasil pengolahannya dilakukan oleh bagian *off-farm* (Dahliani, 2019). Pengolahan hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Nilai tambah komoditas perkebunan yang menghasilkan nilai ekonomi berhubungan dengan pohon industri komoditas perkebunan tersebut. Hal ini dijelaskan lebih rinci pada sub bab nilai ekonomi versus Pohon Industri Tanaman Perkebunan.

Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Pelaku usaha perkebunan dalam mendapatkan nilai ekonomi saat ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu petani/pekebun, perusahaan milik Negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), dan badan usaha milik swasta: nasional maupun asing. Menurut UU n0 39 tadi bahwa Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berkantor pusat di Jakarta. ASEAN yang beranggotakan 10 negara: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam serta 2 negara sebagai pengamat, Timor Leste dan Papua Nugini, bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara (<https://www.google.com/search>).

Beberapa tujuan pembangunan perkebunan adalah. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara serta sebagai penyedia lapangan kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut antara perkebunan dan ASEAN memiliki tujuan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat (<https://ditjenbun.pertanian>).

go.id/tujuan-dan-sasaran-pembangunan-perkebunan/#:). Kerja sama ekonomi ASEAN diwadahi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economy Community (AEC).

MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Jangka waktu implementasi kesepakatan MEA tersebut berlaku pada tahun 2016–2025 dengan 5 cetak biru. Salah satu nya yang berhubungan dengan perkebunan adalah peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, yaitu menyangkut pangan, pertanian dan kehutanan. Saat ini, tahun 2022 berarti masih tersisa 3 tahun lagi untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut terutama dalam mewujudkan salah satu manfaat MEA adalah mampu mempersempit kesenjangan sosial penduduk di sebuah negara. MEA mempermudah alur perdagangan secara internasional. Indonesia merasakan sekali manfaat dari hal tersebut yaitu dengan semakin stabilnya ekonomi negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perkebunan di kawasan ASEAN terkait dengan isu lingkungan dimana perkebunan mengubah lingkungan dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) tinggi menjadi areal dengan tanaman monokultur. Hal ini perlu diminimalkan jika tidak mampu untuk meniadakannya. Mengingat kontribusi perkebunan terhadap perekonomian negara-negara ASEAN sebagaimana dipaparkan dalam bab Diskusi berikut, maka kerjasama antar Negara ASEAN dalam keberlanjutan lingkungan adalah suatu keniscayaan.

Produsen Dunia Komoditas Perkebunan

Data menunjukkan bahwa beberapa Negara ASEAN merupakan produsen dari beberapa komoditas perkebunan utama, seperti: kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu, dan teh seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

No	Komoditas	Negara ASEAN
1.	Kelapa Sawit	Indonesia, Malaysia, Thailand
2.	Karet	Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philipina
3.	Kopi	Vietnam, Indonesia
4.	Kakao	Indonesia
5.	Tebu	Thailand, Indonesia
6.	Teh	Vietnam, Indonesia, Myanmar

Sumber: beberapa sumber referensi

Berdasarkan Tabel di atas Indonesia merupakan salah satu Negara ASEAN yang merupakan produsen semua komoditas utama perkebunan: kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu, maupun teh, bahkan untuk tanaman kelapa sawit, Indonesia merupakan produsen pertama di ASEAN juga dunia. Thailand dan Vietnam merupakan Negara yang menjadi produsen 3 komoditas. Kelapa sawit, Karet, dan Tebu merupakan komoditas yang dihasilkan Negara Thailand dan komoditas karet, Thailand merupakan pertama di ASEAN bahkan di dunia, sedangkan Vietnam merupakan produsen komoditas karet, kopi dan teh. Indonesia, Malaysia, Thailand merupakan tiga Negara terbesar produsen kelapa sawit. Luas areal kebun kelapa sawit Indonesia lebih dari 10 juta hektar dengan 43,5 juta ton kelapa sawit tiap tahunnya. Malaysia diketahui menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 4,21 persen dari tahun 2021 dan menghasilkan sebanyak 19,8 juta ton kelapa sawit.

Thailand merupakan produsen karet terbesar di dunia, 4.3 juta ton diikuti oleh Indonesia, Vietnam, dan Malaysia masing-masing dengan produksi 3.1 juta ton dan 947 ribu ton serta 826 ribu ton. Vietnam adalah produsen komoditas kopi terbesar kedua di dunia. Di ASEAN Negara ini merupakan produsen terbesar. Indonesia juga merupakan Negara produsen kopi ketiga terbesar dunia setelah Vietnam. Produsen kakao, ketiga terbesar dunia diduduki oleh Indonesia setelah Pantai Gading dan Ghana. Komoditas tebu dunia, posisi Thailand dan Indonesia berada pada peringkat 5

(Thailand) dan 9 (Indonesia). Vietnam, Indonesia dan Myanmar merupakan produsen komoditas the dunia berturut-turut peringkat 5, 7, dan 9. Berdasarkan kontribusi sebagai produsen beberapa komoditas perkebunan peringkat dunia, maka dalam rangka memenuhi kerjasama ASEAN dalam mewujudkan *sustainability* lingkungan perlu dikembangkan perkebunan ramah lingkungan agar keanekaragaman hayati dapat terpelihara.

Pacu Pengembangan Perkebunan Ramah Lingkungan

Pembangunan pertanian dalam arti luas merupakan program prioritas pengembangan perkebunan pemerintah daerah. Namun, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan harus tetap diperhatikan selama proses penerapan di perkebunan, baik pada perkebunan sawit, karet, kopi, kakao, tebu dan teh. Pelaku usaha perkebunan harus terus di motivasi untuk melakukan kegiatan agar tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan mengutamakan upaya ramah lingkungan. Perkebunan kelapa sawit yang selama ini merupakan komoditi unggulan sub sektor perkebunan namun di nilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Bahkan akibat kerusakan tersebut akhirnya produk produk kelapa sawit mengalami penurunan harga di pasaran dunia. Karena itu diperlukan upaya upaya berkelanjutan yang harus di lakukan oleh pemerintah, guna melindungi kelapa sawit dan produk turunannya.

Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah melalui instansi teknis adalah penertiban perusahaan kelapa sawit agar menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan menerapkan ISPO di semua pelaku perkebunan, di harapkan mampu meningkatkan kualitas dan kualitas produksi serta hasil produknya pun berdaya saing tinggi. Perkebunan rakyat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas olahan kelapa sawit dan turunannya. Karenanya perlu sinergisitas yang saling menguntungkan antara plasma dan inti (Wiwik Widiati, 2021). Di sisi lain kelapa sawit dan produk turunannya merupakan komoditi yang nihil limbah (*zero waste*) karena limbah atau sisa pengolahan sawit dapat di gunakan untuk keperluan penyubur tanaman (pupuk organik) hingga pembangkit energi listrik alternatif. Sehingga tidak benar kalau ada anggapan kelapa sawit dan produk olahan turunannya menghasilkan limbah yang mampu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Padahal sebaliknya mampu memberikan dampak positif pada kegiatan perkebunan.

Salah satu bahan yang dapat untuk memperbaiki kerusakan lahan dan lingkungan, menstabilkan kesuburan tanah akibat degradasi tanah dan air, adalah PORE (Pupuk Organik Rendah Emisi) yang di formulasikan dari Biochar dan pupuk kandang. Biochar dibuat dari biomassa, jadi merupakan sumber daya yang terbaru. Biochar, mulai dari pembuatannya sampai pada pemanfaatannya memberi sejumlah manfaat yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Panas yang dihasilkan waktu pembuatan biochar (*pyrolysis*) dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik. Minyak yang dihasilkan pada proses pembuatan biochar dapat dijadikan minyak bakar; demikian pula asap cair yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari sebagai bahan pengawet makanan, koagulant getah karet, sampai insektisida bio. Hasil akhir pembakaran biomassa yang berupa bahan berwarna hitam (arang, biochar), dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan; mulai dari bahan bakar, bahan pembenah tanah, sampai media tanam untuk tanaman hias. Dengan proses *pyrolysis* dalam pembuatan biochar, serta adanya sifat tahan dekomposisi dan mineralisasi biochar mampu menurunkan laju emisi gas rumah kaca, dan dengan demikian dapat membantu meredam pemanasan global (Lehmann et al., 2003, Yuniwati, 2018).

Sebagai bahan organik, biochar kaya senyawa karbon, bersifat agak basa, dan mengandung beberapa unsur hara esensial, terutama K, dan P, sehingga diyakini pemanfaatan biochar untuk pertanian dapat memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah pertanian. Berbeda dengan bahan organik konvensional, senyawa karbon organik dalam biochar sebagian besar berbentuk "aromatik" yang resisten terhadap dekomposisi dan demineralisasi, dan sehingga para pakar berpendapat bahwa pemberian biochar cukup dilakukan sekali untuk beberapa musim tanam, bahkan untuk selamanya. Jika anggapan ini benar, maka biochar dapat mendorong pembangunan pertanian berlanjut, karena dengan fakta tersebut maka 3 kunci utama pembangunan berlanjut, yaitu; (1) keberlanjutan hasil hasil pembangunan, (2) pemanfaatan sumberdaya terbarukan, dan (3) keuntungan ekonomis dapat diwujudkan. (Yuniwati ED., 2017)

Biochar juga mengandung beberapa unsur hara esensial. Memang, karena pembakaran, kandungan unsur Nitrogen dalam biochar mengalami penurunan dibandingkan dengan bahan bakunya. Tetapi, karena adanya penurunan volume sebagai akibat penambahan, konsentrasi beberapa unsur hara meningkat. Biochar pada umumnya mengandung P, K

dan beberapa unsur logam lainnya cukup tinggi. Dengan demikian maka dapat diharapkan pemberian biochar akan dapat meningkatkan kandungan hara di dalam tanah.

Konklusi

ASEAN sebagai negara produsen komoditas perkebunan bahkan beberapa diantaranya merupakan peringkat di dunia memiliki peluang untuk menjalin kerjasama dalam mengembangkan perkebunan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kondisi keanekaragaman hayati yang terjaga dengan multiperspektif perkebunan di Asean, yang menekankan pada: (1) keberlanjutan produktivitas, (2) kualitas lingkungan, (3) efisiensi pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan, (4) kelayakan ekonomis, dan (5) kualitas kehidupan, maka penggunaan teknologi biochar akan dapat mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan. Biochar dibuat dari biomassa, jadi merupakan sumberdaya yang terbaru.

Biochar, mulai dari pembuatannya sampai pada pemanfaatannya memberi sejumlah manfaat yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Panas yang dihasilkan waktu pembuatan biochar (*pyrolysis*) dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik. Minyak yang dihasilkan pada proses pembuatan biochar dapat dijadikan minyak bakar; demikian pula asap cair yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari sebagai bahan pengawet makanan, koagulant getah karet, sampai insektisida bio.

Hasil akhir pembakaran biomassa yang berupa bahan berwarna hitam (arang, biochar), dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan; mulai dari bahan bakar, bahan pembenah tanah, pembersih bahan pencemar sampai media tanam untuk tanaman hias. Dengan proses *pyrolysis* dalam pembuatan biochar, serta adanya sifat tahan dekomposisi dan mineralisasi biochar mampu menurunkan laju emisi gas rumah kaca, dan dengan demikian dapat membantu meredam pemanasan global (Yuniwati, ED, 2015).*

Referensi

- Yuniwati, E. D. (2018). Land Husbandry : The Effect Of Chicken Manure And Corn Cob Biochar On Soil Fertility And Crop Yield On. *Europian Journal of Advanced Research to Biological and Life Sciences*, 6(4), 11–19
- Yuniwati, E. D. (2017). LAND HUSBANDRY : THE ROLE OF BIOCHAR AS A SOIL ENHANCER IN CASSAVA CROPPING SYSTEM. *International Journal of Agriculture and Environmental Research*, 03(05), 3727–3735. Retrieved from www.ijaer.in
- Anonim. (2022). ktt g20 konferensi tingkat tinggi g20 bali 2022. Retrieved November 1, 2022, from <https://tenggalangbaru.id/artikel/2022/11/15/ktt-g20-konferensi-tingkat-tinggi-g20-bali-2022>
- Ding, Y., Liu, Y. X., Wu, W. X., Shi, D. Z., Yang, M., & Zhong, Z. K. (2010). Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. *Water, Air, and Soil Pollution*, 213(1–4), 47–55. <https://doi.org/10.1007/s11270-010-0366-4>
- Hamzah, A., Kusuma, Z., Utomo, W. H., & Guritno, B. (2011). Siam weed (*Chromolaena odorata* L.) for phytoremediation of artisanal gold mine tailings. *Journal of Tropical Agriculture*, 50, 88–91.
- Lehmann, J., Da Silva, J. P., Steiner, C., Nehls, T., Zech, W., & Glaser, B. (2003). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: Fertilizer, manure and charcoal amendments. *Plant and Soil*, 249(2), 343–357. <https://doi.org/10.1023/A:1022833116184>
- Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen fixation by common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) increases with bio-char additions. *Biology and Fertility of Soils*, 43(6), 699–708. <https://doi.org/10.1007/s00374-006-0152-z>
- Sukartono, Utomo, W. H., Kusuma, Z., & Nugroho, W. H. (2011). Soil fertility status, nutrient uptake, and maize (*Zea mays* L.) yield following biochar and cattle manure application on sandy soils of Lombok, Indonesia. *Journal of Tropical Agriculture*, 49, 47–52.
- Utomo, W. H., Soehono, L. A., & Guritno, B. (2011). Effect of biochar on the Release and Loss of Nitrogen from Urea Fertilization. *J. Agric. Food. Tech*, 1(7), 127–132.

Yuniwati, E. D., Utomo, W. H., & Howeler, R. H. (2015). Farmers 'Based Technology Development for Sustainable Cassava Production System. *International Journal Agriculture Research*, 10(2), 54–64. <https://doi.org/10.3923/ijar.2015.54.64>

Lehmann, J., Da Silva, J. P., Steiner, C., Nehls, T., Zech, W., & Glaser, B. (2003). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: Fertilizer, manure and charcoal amendments. *Plant and Soil*, 249(2), 343–357. <https://doi.org/10.1023/A:1022833116184>

LILI DAHLIANI saat ini bertugas sebagai dosen di program studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Sekolah Vokasi IPB University. Tugas sebagai dosen diawali pada tahun 1990 di Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta di jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan. Selain sebagai dosen, penulis juga adalah asesor kompetensi di bidang perkebunan juga auditor sekaligus asesor *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO) di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain memberikan kuliah, saat ini penulis adalah manajer sertifikasi, anggota komite teknis dan anggota komite ketidakberpihakan ISPO di lembaga sertifikasi. Lili menamatkan pendidikan pada program sarjana, pascasarjana dan doktoral di bidang ilmu pertanian.

ENY DYAHYUNIWATI adalah seorang *reviewer* penelitian bersertifikat nasional, *reviewer* pengabdian masyarakat nasional, *reviewer* jurnal pengabdian masyarakat dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Universitas Wisnuwardhana. Ia juga aktif sebagai Ketua Forum Layanan Ipstek bagi Masyarakat (Pengabdian Dosen) Flipmas Legowo, Jawa Timur. Ia juga aktif sebagai peneliti melalui Hibah Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Risetnya terkait dengan konservasi lahan Pertanian, teknologi konservasi lahan pertanian organik, agar terwujud pertanian organik yang ramah lingkungan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Eny dapat dihubungi di email: nieyuniwati@gmail.com.

Land Husbandry Pertanian: Teknologi Biochar untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Ramah Lingkungan di ASEAN

Eny Dyah Yuniwati

Pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya pembangunan pertanian yang bersifat fisik dan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, menimbulkan perubahan baik negatif maupun positif atau yang disebut efek terhadap ekosistem. Untuk meminimalkan dampak negatif di satu pihak dan meningkatkan dampak positif di pihak lain, pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan pertanian harus disadari dan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permanen.

Dari segi ekologis, pembangunan pertanian merupakan salah satu komponen utama pembangunan pertanian berkelanjutan yang dapat disederhanakan, yaitu. pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara cerdas dan efisien serta memperhatikan pemanfaatannya baik untuk masa kini maupun masa depan. untuk generasi. Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dikembangkan pada KTT G20 tahun 2022 di Bali (Anonim, 2022).

Pada dasarnya pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu strategi pemanfaatan ekosistem alam dengan cara tertentu agar fungsinya bagi kepentingan kehidupan manusia tidak terancam punah. Ini tidak hanya melayani kesejahteraan seluruh masyarakat, tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, diharapkan kita tidak hanya mampu melakukan pengelolaan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan (*do it right*), tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelolanya secara lebih komprehensif (*right*). Peran nyata KTT G20, dalam pembangunan berkelanjutan adalah penanganan krisis keuangan global, kebijakan pajak, kontribusi dalam penanganan pandemic Covid-19 dan isu-isu lainnya. Selain itu G 20 berkontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan isu-isu internasional.

Berbagai cara berpikir, strategi dan inovasi dikembangkan pada KTT G20, ada yang dilaksanakan, ada yang ditinggalkan atau belum dilaksanakan, sehingga dokumen tersebut diperbarui pada KTT G20 untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Konferensi tersebut menyepakati tema "Recover Together, Recover Stronger." Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bekerja bahu membahu dan saling mendukung untuk bersama-sama pulih dan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan, termasuk perdagangan, iklim dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2016, prinsip kolektif investasi internasional diperkenalkan. G20 juga mendukung gerakan politik yang pada akhirnya menghasilkan Perjanjian Iklim Paris 2015 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Memperbaiki Kerusakan Lingkungan

Karena dewasa ini lingkungan telah mengalami degradasi, maka salah satu kegiatan yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sesuai dengan prinsip pembangunan pertanian berlanjut, maka teknologi yang digunakan dalam pembangunan pertanian hendaknya (1) memperkecil penggunaan sumberdaya tidak terbarukan dengan jalan mengutamakan sumberdaya terbarukan, (2) tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (bahkan harus mampu memperbaiki kualitas dan daya dukung lingkungan), (3) secara ekonomis member keuntungan lebih, dan (d) biaya aplikasi terjangkau dan mudah diaplikasikan.

Memperhatikan persyaratan ini, nampaknya teknologi biochar memenuhi persyaratan ini. Biochar dibuat dari biomassa, jadi merupakan sumberdaya yang terbarui. Biochar, mulai dari pembuatannya sampai pada pemanfaatannya

memberi sejumlah manfaat yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Panas yang dihasilkan waktu pembuatan biochar (*pyrolysis*) dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik. Minyak yang dihasilkan pada proses pembuatan biochar dapat dijadikan minyak bakar; demikian pula asap cair yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari sebagai bahan pengawet makanan, koagulant getah karet, sampai insektisida bio. Hasil akhir pembakaran biomassa yang berupa bahan berwarna hitam (arang, biochar), dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan; mulai dari bahan bakar, bahan pembenah tanah, sampai media tanam untuk tanaman hias. Dengan proses *pyrolysis* dalam pembuatan biochar, serta adanya sifat tahan dekomposisi dan mineralisasi biochar mampu menurunkan laju emisi gas rumah kaca, dan dengan demikian dapat membantu meredam pemanasan global (Lehmann et al., 2003).

Biochar untuk Pertanian

Di ASEAN, salah satu daerah tropis basah seperti halnya di Indonesia, dekomposisi dan demineralisasi bahan organik berjalan sangat cepat (Lehmann et al., 2003; Sukartono et al., 2011) nutrient uptake, and maize yield in the sandy soils of semiarid Lombok, Indonesia during the rainy season of 2010-2011 and dry season of 2011. Three organic amendments (coconut shell biochar, CSB; cattle dung biochar, CDB; cattle manure, CM, and no organic amendments as control, C). Dengan demikian pemberian bahan organik harus diberikan secara berulang setiap musim tanam (Islami et al., 2011b; Sukartono et al., 2011) nutrient uptake, and maize yield in the sandy soils of semiarid Lombok, Indonesia during the rainy season of 2010-2011 and dry season of 2011. Three organic amendments (coconut shell biochar, CSB; cattle dung biochar, CDB; cattle manure, CM, and no organic amendments as control, C. Pada fihak lain, ketersediaan dan akses petani terhadap sumber bahan organik sangat terbatas. Disamping itu kompetisi penggunaan bahan organik untuk keperluan lain (a.l. industri, energi) sangat tinggi. Hal ini menyebabkan pemberian bahan organik sering kali tidak ekonomis dan petani kesulitan untuk melakukannya.

Pada akhir abad ke-20, setelah memperhatikan keberlanjutan tanah hitam (yang kemudian dikenal dengan "terra preta" para pakar mulai berpikir untuk menciptakan kondisi semacam "terra preta" dengan menggunakan bahan organik tahan perombakan sebagai sumber bahan organik tanah (Glasser et al., 2001). Bahan tersebut kemudian dikenal dengan nama "biochar", dan karena digunakan untuk pertanian, sering juga dinamakan "agrichar" (Rondon, et al; 2007; Yuniwati, 2018).

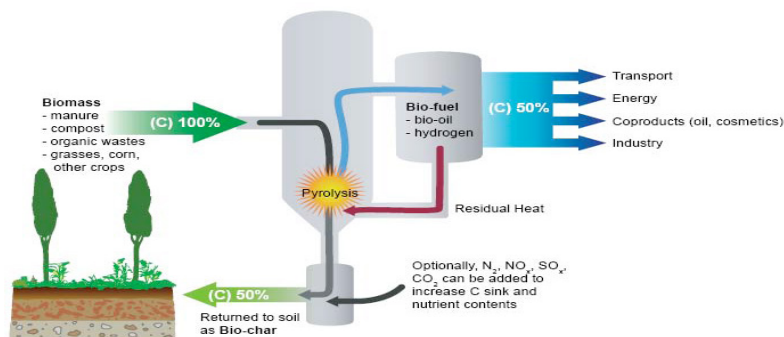
Biochar merupakan bahan berwarna hitam yang kaya karbon yang mempunyai rumus kimia $C_{12}H_{6.05}N_{0.3}O_{3.53}$ dengan kepadatan sekitar 467 kg/m³, rasio H/C 0,47 serta O/C < 0,0,30, dan nilai pemanasan 25,3 MJ/kg. Biochar resistant terhadap dekomposisi dan demineralisasi karena karbon di dalam biochar dalam bentuk senyawa aromatik di mana 6 atom oksigen terikat dalam bentuk cincin tanpa oksigen atau hidrogen. Resistensi biochar terhadap dekomposisi dan demineralisasi juga disebabkan terbentuknya senyawa "organo-mineral" di dalam biochar serta struktur amorf (Lehmann et al., 2003).

Sebagai bahan organik, biochar kaya senyawa karbon, bersifat agak basa, dan mengandung beberapa unsur hara esensial, terutama K, dan P, sehingga diyakini pemanfaatan biochar untuk pertanian dapat memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah pertanian. Berbeda dengan bahan organik konvensional, senyawa karbon organik dalam biochar sebagian besar berbentuk "aromatik" yang resisten terhadap dekomposisi dan demineralisasi, dan sehingga para pakar berpendapat bahwa pemberian biochar cukup dilakukan sekali untuk beberapa musim tanam, bahkan untuk selamanya. Jika anggapan ini benar, maka biochar dapat mendorong pembangunan pertanian berlanjut, karena dengan fakta tersebut maka 3 kunci utama pembangunan berlanjut, yaitu; (1) keberlanjutan hasil hasil pembangunan, (2) pemanfaatan sumberdaya terbarukan, dan (3) keuntungan ekonomis dapat diwujudkan (Yuniwati et al, 2015).

Biochar sebagai sumber energi

"Potensi energi Indonesia sebesar 885,2 juta gigajoule (GJ) per tahun potensi limbah biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik." Potensi energi dan potensi produksi biomassa di Indonesia, dari sumber biomassa: Peremajaan karet, Sisa Lodging, Limbah penggergajian kayu, Limbah kelapa sawit, Bagase tebu, Sekam padi, Limbah kelapa. Disamping energi, dengan teknik tertentu biomassa juga dapat menghasilkan bahan yang sangat berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan daya dukung tanah. Bahan tersebut sekarang dikenal dengan nama "Biochar". Jadi dengan demikian biochar sebenarnya merupakan produk samping yang berupa carbon

hitam yang diperoleh sebagai produk samping (padatan) dari pirolisis biomassa untuk menghasilkan energi bahan bakar. Pirolisis adalah proses termokimia dimana biomassa dikonversi melalui pemanasan dengan oksigen terbatas atau bahkan tanpa oksigen.



Gambar 1. Proses pembuatan biochar dengan teknologi Pirolisis (Lehmann et al., 2003).

Berbeda dengan bahan organik konvensional, senyawa carbon organik dalam biochar berbentuk aromatik, graphitic, sehingga tahan terhadap dekomposisi dan demineralisasi. Energi yang dihasilkan selama produksi biochar berupa energi panas, gas panas, dan minyak-bio. Energi panas dan gas panas selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Energi yang dihasilkan sekam padi setara dengan 0,25 lt minyak solar dan sekitar 20% biochar, dan energi yang dihasilkan dari tongkol jagung setara dengan 0,5 minyak solar dan 20% biochar.

Sebagai bahan organik, biochar juga mengandung beberapa unsur hara esensial. Memang, karena pembakaran, kandungan unsur Nitrogen dalam biochar mengalami penurunan dibandingkan dengan bahan bakunya. Tetapi, karena adanya penurunan volume sebagai akibat penambahan, konsentrasi beberapa unsur hara meningkat. Biochar pada umumnya mengandung P, K dan beberapa unsur logam lainnya cukup tinggi. Dengan demikian maka dapat diharapkan pemberian biochar akan dapat meningkatkan kandungan hara di dalam tanah (Yuniwati, 2017). Walaupun kandungan nitrogen dalam biochar rendah, ternyata pemberian biochar juga meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Karena kandungan N dalam biochar rendah, maka dapat dipastikan bahwa peningkatan kandungan nitrogen ini tentu saja bukan berasal dari biochar, dan mungkin peningkatan kandungan N tanah terjadi karena adanya penurunan kehilangan nitrogen dari pupuk yang diberikan. Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa pemberian biochar dapat menghambat kehilangan nitrogen melalui pencucian (Ding et al., 2010; Utomo et al., 2011).

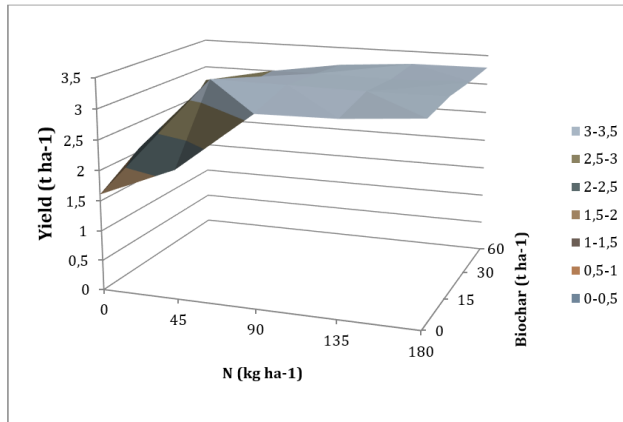
Penurunan kehilangan N melalui pencucian disamping disebabkan karena adanya kenaikan muatan negatif tanah (Tabel 2) menurut (Utomo et al., 2011) juga disebabkan karena biochar mampu mempertahankan N yang dibebaskan dari pupuk urea dalam bentuk $N-NH_4^+$. Dengan kondisi semacam ini, dan diikuti dengan tingginya muatan negatif pada tanah yang diberi biochar, maka $N-NH_4^+$ akan terjerap sehingga pencucian berkurang.

Pemberian biochar juga terbukti mampu memperbaiki beberapa sifat fisik tanah, antara lain menurunkan berat isi tanah, menurunkan kekuatan tanah dan kemampuan menyimpan air tersedia. Peningkatan kemampuan tanah untuk menyimpan air tersedia tidak diragukan lagi karena adanya perbaikan struktur tanah. Pemberian biochar juga terbukti mampu memperbaiki beberapa sifat fisik tanah, antara lain menurunkan Berat Isi tanah, menurunkan kekuatan tanah dan kemampuan menyimpan air tersedia. Peningkatan kemampuan tanah untuk menyimpan air tersedia tidak diragukan lagi karena adanya perbaikan struktur tanah. Dengan adanya penurunan kehilangan nitrogen dapat diharapkan pemberian biochar akan meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen. Dari hasil penelitiannya, (Utomo et al., 2011) mendapatkan model perhitungan kebutuhan nitrogen (pers. 1 dan Gambar 1)

$$Y = 1,691 + 0,0192 N + 0,0273 B - 0,000060 N^2 - 0,000205 B^2 - 0,000094 NB$$

Di mana Y adalah hasil biomasa (t/ha), N adalah dosis nitrogen (kg/ha), dan B adalah dosis biochar (t/ha).

Dengan model tersebut dapat diperhitungkan bahwa untuk menghasilkan 3,2 t/ha biomassa, pada tanah yang diberi biochar 15 t/ha hanya memerlukan 90 kg N/ha, sedangkan pada tanah yang tidak diberi biochar membutuhkan 160 Kg N/ha. Dengan demikian terjadi penghematan pemakaian pupuk lebih dari 70 %. Penghematan ini sangat besar artinya, bukan saja dari segi nilai ekonomis, tetapi juga dari penghematan sumber daya alam.



Gambar 2. Respon biomassa tanaman jagung terhadap pemberian N dan biochar

Kemampuan biochar untuk membersihkan bahan pencemar telah dibuktikan oleh (Hamzah, Kusuma, Utomo, & Guritno, 2011) Hasil penelitian yang dilakukan guna remediasi tailing tambang emas rakyat di Lombok membuktikan bahwa pemberian biochar mempercepat pembersihan Pb dan Hg dari limbah tailing.

Untuk dapat dilakukan analisis ekonomis penggunaan biochar pada pertanian diperlukan jangka waktu yang panjang. Penelitian biochar yang telah dilakukan masih terbatas jangka waktunya 3 sampai 5 tahun. Dengan demikian analisis ekonomis belum dapat dilakukan secara sempurna. Walau demikian dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sampai tahun ke 5 pengaruh positif biochar masih nampak, sedangkan pengaruh positif bahan organik konvensional hanya mampu bertahan dalam satu tahun. Dengan rendemen biochar sekitar 30%, maka dengan bertahannya sampai 5 tahun setelah pemberian biochar telah memberikan indikasi bahwa biochar lebih ekonomis dibandingkan dengan bahan organik konvensional. Keuntungan ekonomis juga diperoleh dari adanya penghematan penggunaan pupuk nitrogen seperti telah dibuktikan oleh (Utomo et al., 2011).

Konklusi

Dengan pengertian pertanian berkelanjutan yang menekankan pada: (1) keberlanjutan produktivitas, (2) kualitas lingkungan, (3) efisiensi pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan, (4) kelayakan ekonomis, dan (5) kualitas kehidupan, maka penggunaan teknologi biochar akan dapat mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan. Biochar dibuat dari biomassa, jadi merupakan sumber daya yang terbarui. Biochar, mulai dari pembuatannya sampai pada pemanfaatannya memberi sejumlah manfaat yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Panas yang dihasilkan waktu pembuatan biochar (*pyrolysis*) dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik. Minyak yang dihasilkan pada proses pembuatan biochar dapat dijadikan minyak bakar; demikian pula asap cair yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari sebagai bahan pengawet makanan, koagulant getah karet, sampai insektisida bio.

Hasil akhir pembakaran biomassa yang berupa bahan berwarna hitam (arang, biochar), dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan; mulai dari bahan bakar, bahan pembenah tanah, pembersih bahan pencemar sampai media tanam untuk tanaman hias. Dengan proses *pyrolysis* dalam pembuatan biochar, serta adanya sifat tahan dekomposisi dan mineralisasi biochar mampu menurunkan laju emisi gas rumah kaca, dan dengan demikian dapat membantu meredam

pemanasan global. Dengan demikian *Land Husbandry* (Pemeliharaan Lahan) Pertanian, dengan menggunakan Biochar untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan tema KTT G20 “*Recover Together Recover Stronger*”, yang berujung pada The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

Referensi

- Anonim. (2022). ktt g20 konferensi tingkat tinggi g20 bali 2022. Retrieved November 1, 2022, from <https://tenggalangbaru.id/artikel/2022/11/15/ktt-g20-konferensi-tingkat-tinggi-g20-bali-2022>
- Ding, Y., Liu, Y. X., Wu, W. X., Shi, D. Z., Yang, M., & Zhong, Z. K. (2010). Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. *Water, Air, and Soil Pollution*, 213(1–4), 47–55. <https://doi.org/10.1007/s11270-010-0366-4>
- Hamzah, A., Kusuma, Z., Utomo, W. H., & Guritno, B. (2011). Siam weed (*Chromolaena odorata* L.) for phytoremediation of artisanal gold mine tailings. *Journal of Tropical Agriculture*, 50, 88–91.
- Lehmann, J., Da Silva, J. P., Steiner, C., Nehls, T., Zech, W., & Glaser, B. (2003). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: Fertilizer, manure and charcoal amendments. *Plant and Soil*, 249(2), 343–357. <https://doi.org/10.1023/A:1022833116184>
- Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen fixation by common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) increases with bio-char additions. *Biology and Fertility of Soils*, 43(6), 699–708. <https://doi.org/10.1007/s00374-006-0152-z>
- Sukartono, Utomo, W. H., Kusuma, Z., & Nugroho, W. H. (2011). Soil fertility status, nutrient uptake, and maize (*Zea mays* L.) yield following biochar and cattle manure application on sandy soils of Lombok, Indonesia. *Journal of Tropical Agriculture*, 49, 47–52.
- Utomo, W. H., Soehono, L. A., & Guritno, B. (2011). Effect of biochar on the Release and Loss of Nitrogen from Urea Fertilization. *J. Agric. Food. Tech*, 1(7), 127–132.
- Yuniwati, E. D. (2017). LAND HUSBANDRY : THE ROLE OF BIOCHAR AS A SOIL ENHANCER IN CASSAVA CROPPING SYSTEM. *International Journal of Agriculture and Environmental Research*, 03(05), 3727–3735. Retrieved from www.ijaer.in
- Yuniwati, E. D. (2018). Land Husbandry : The Effect Of Chicken Manure And Corn Cob Biochar On Soil Fertility And Crop Yield On. *Europian Journal of Advanced Research to Biological and Life Sciences*, 6(4), 11–19.
- Yuniwati, E. D., Utomo, W. H., & Howeler, R. H. (2015). Farmers’ Based Technology Development for Sustainable Cassava Production System. *International Journal Agriculture Research*, 10(2), 54–64. <https://doi.org/10.3923/ijar.2015.54.64>

ENY DYAH YUNIWATI adalah seorang reviewer penelitian bersertifikat nasional, reviewer pengabdian masyarakat nasional, reviewer jurnal pengabdian masyarakat dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Universitas Wisnuwardhana. Ia juga aktif sebagai Ketua Forum Layanan Ipstek bagi Masyarakat (Pengabdian Dosen) Flipmas Legowo, Jawa Timur. Ia juga aktif sebagai peneliti melalui Hibah Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Risetnya terkait juga dengan konservasi lahan Pertanian, teknologi konservasi lahan pertanian organik, agar terwujud pertanian organik yang ramah lingkungan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Ia dapat dihubungi di email: nieyuniwati@gmail.com.

Zero Waste & Circular Economic Approach: Perekonomian ASEAN yang Bertumbuh Selaras dengan Lingkungan dan Masyarakat yang Sehat

Desy Sulistiyorini

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

--QS. Ar-Rum: 41-42

Nasib Sampah Kita

Berbicara tentang sampah, yang timbul di benak seseorang adalah: bau, merusak, pemandangan, sumber penyakit, penyebab banjir, dan serentetan *image* negatif yang muncul ketika dikaitkan dengan sampah. Sampah dengan sendirinya memang menjadi masalah – dengan volume sampah yang tidak dapat dimungkiri – kian hari bukannya kian berkurang, namun semakin bertambah dan menggunung di tempat pemrosesan akhir (TPA), bahkan hingga melebihi kapasitas TPA. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 mencatat volume sampah di Indonesia yang terdiri dari 154 Kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 18,2 juta ton/tahun. Sampah yang terkelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton/tahun atau 72,95% (Rahman et al., 2022).

Lantas timbul pertanyaan di benak sebagian orang, "bagaimanakah nanti nasib sampah kita?" "Kalau bicara bertahan sampai lama, mungkin dari tahun 2019 itu dalam kajian sudah dinyatakan bahwa sudah overkapasitas. Seharusnya sudah tidak bisa lagi membuang sampah ke TPA Cipayung" Jelas Ardan, Kepala UPT TPA Cipayung, Depok (Ihsanuddin, 2022). Data *Kompas*, 24/05/2022: "Kondisi TPST Bantargebang saat ini sudah terisi 39 juta ton (80 persen dari kapasitas). Data lainnya mengatakan, "Tinggi timbunan sampah capai 40 meter, setara gedung 16 lantai" (CNN Indonesia, 2022).

Terlepas dari permasalahan jumlah dan volume sampah yang semakin bertambah, sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mendatangkan masalah yang lain. Sampah dapat mencemari udara melalui debu-debu yang diterbangkan dari tempat pembuangan sampah serta menjadi sumber bau tidak sedap. Perlu diketahui juga bahwa sampah menghasilkan air lindi yang merupakan hasil dari pembusukan dan penguraian sampah yang berupa cairan. Pengelolaan sampah dengan pembuangan terbuka (*open dumping*) dan pengurugan (*landfilling*) secara konvensional dapat menimbulkan pencemaran tanah dan pencemaran air tanah oleh air lindi tersebut. Belum lagi apabila terdapat serangga dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus yang mengerumuni sampah, yang berpotensi menyebarkan penyakit tular vektor (*vector-borne diseases*). Pengelolaan sampah secara tidak benar yang lazim kita jumpai di lingkungan sekitar adalah dengan pembakaran terbuka (*open burning*) yang berdampak pada kesehatan warga sekitar.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang (World Health Organization, 2022). Meninjau definisi-definisi yang ada, perlu dikaji ulang terkait makna "sampah" yang hakiki. Apakah ia benar-benar

sesuatu yang “tidak berguna” yang patutnya kita buang ke lingkungan? Apa semua sampah kita bernasib sama, yaitu berakhir di pengurugan sampah di TPA?

Masyarakat saat ini yang didorong oleh aktivitas konsumsi dan produksi, menghasilkan sampah yang tak terkira jumlahnya setiap hari. Implikasi dari aktivitas konsumsi dan produksi adalah semakin menipisnya sumber daya alam yang digunakan untuk bahan baku produksi. Contohnya untuk berbagai macam logam yang diekstraksi dari alam, seperti cadmium (Cd), merkuri (Hg), dan telurium (Te) akan mengalami kekurangan pasokan secara global secara permanen dalam dua hingga tiga dekade mendatang. Yang mengherankan, tingkat daur ulang (recycling rate) untuk logam-logam tersebut masih sangat rendah (Zaman & Lehmann, 2011). Untuk menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, efisiensi sumber daya dan peningkatan ekonomi melalui pengelolaan yang baik, marilah beralih ke konsep zero waste dan circular economy.

Mengubah Paradigma Pengelolaan Sampah Kita:

Zero Waste, antara Gaya Hidup dan Efisiensi Sumber Daya

Di masa lampau, pengelolaan sampah dianggap menelan sejumlah besar biaya untuk pengurugan (*landfilling*) sebagai prosedur pengelolaan konvensional yang lazim digunakan. Metode *landfilling* ini memiliki tahapan dari ekstraksi sumber daya alam atau bahan mentah, proses produksi barang, penjualan hasil produksi, konsumsi, dan pembuangan (dengan cara diurug). Pengelolaan sampah dengan skema ini dapat menghasilkan sampah 1.47 milyar ton sampah per tahun secara global yang persoalan lain yang mungkin timbul. Dengan penerapan metode konvensional melalui pengurugan (*landfilling*) yang dikelola secara tidak efisien, di mana barang-barang yang dapat memiliki nilai tambah apabila digunakan ulang (*reuse*) dan didaur ulang (*recycle*) (Pietzsch et al., 2017). Selain masalah efisiensi, proses pengurugan sampah di beberapa negara berkembang di Asia berlokasi berdekatan dengan permukiman penduduk yang berisiko menimbulkan pencemaran pada tanah, air permukaan, dan air tanah (Kumar et al., 2021). Tanah dan air ditemukan telah tercemar dalam intensitas yang parah yang berisiko menyebabkan pajanan melalui rute pajanan kulit (*dermal exposure*) dan lewat saluran pencernaan melalui proses ingesti (tertelan) melalui rute pajanan (*oral exposure*).

Berangkat dari permasalahan penerapan pengelolaan sampah secara konvensional, timbul pergerakan (*movement*) menuju “zero waste”. *Zero Waste International Alliance* mendefinisikan *zero waste* sebagai konsep etis, ekonomis, efektif dan berpikiran maju dimana orang dapat mengubah gaya hidup dan kebiasaannya menjadi meniru siklus alami, di mana semua bahan atau material yang dibuang dirancang untuk menjadi sumber daya yang dapat bermanfaat bagi orang lain (Bogusz et al., 2021). Walaupun, pada prakteknya konsep yang benar-benar “zero waste” tidak memungkinkan namun konsep *zero waste* ini mengedepankan pada pengurangan sampah (*waste reduction*) melalui hierarki pengurangan sampah yang meliputi 1) eliminasi atau pencegahan sampah (*waste prevention*), 2) menggunakan ulang (*reuse*), 3) mendaur ulang (*recycle*), 4) pengomposan (*composting*), 5) insinerasi (*incineration*), dan 6) pengurugan (*landfilling*) (Veleva et al., 2017).

Dalam penerapan *zero waste*, perencanaan dan pembuat kebijakan memegang kunci dalam merancang pengelolaan sampah, yang berkontribusi dalam efisiensi sumberdaya dan emisi ke lingkungan sekitar yang berdampak pada kesehatan. Kebijakan pengelolaan sampah seharusnya mengacu pada pendekatan *zero waste*. Kebijakan terhadap sistem persampahan, mulai dari pemilahan sampah, pewadahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah didasarkan pada skema *zero waste*, melalui hierarki pengurangan sampah. Perlu adanya komitmen pada pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan *zero waste* berdasarkan hierarki pengurangan sampah. Pemerintah memegang peranan penting dalam penerapan *zero waste*, dengan menetapkan kebijakan yang mendukung *zero waste*, memfasilitasi sarana dan infrastruktur pendukung seperti misalnya penyediaan pewadahan sampah yang terpilah, sarana pengangkutan sampah yang terpilah, fasilitas daur ulang sampah, fasilitas insinerasi sampah, dan apabila sampah harus diurug maka harus dikelola secara saniter sehingga tidak mencemari lingkungan.

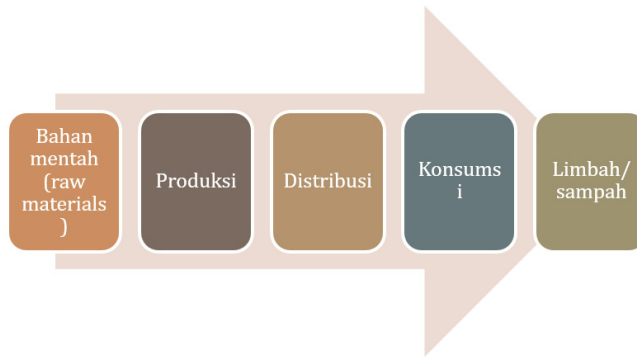
Secara individual, *zero waste* dapat diterapkan skala individu dan menyatu menjadi gaya hidup yang diterapkan secara personal. Diharapkan individu menjadi lebih bijak dalam mengelola sampah dan menjadikan *zero waste* sebagai gaya hidup (*life style*). Seseorang bisa memilih gaya hidup dengan menerapkan prinsip pengurangan sampah. Upaya pertama melalui eliminasi atau pencegahan sampah, di mana seseorang dapat mengurangi sampah misalnya dengan

menggunakan barang yang *reusable* dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai buang, melakukan pembelian dan stok barang sesuai kebutuhan untuk mencegah adanya kelebihan stok barang yang nantinya akan terbuang, dan melakukan pembelian barang dengan sistem *refill* dan tanpa *packaging* untuk mengurangi timbulan sampah kemasan (*packaging*).

Upaya kedua dengan cara menggunakan ulang (*reuse*) barang, dengan cara memakai ulang barang yang usang/ rusak (contoh sederhananya ember bekas yang bocor dapat digunakan ulang sebagai pot bunga) atau bisa juga dengan memperbaiki barang tersebut agar bisa dimanfaatkan kembali. Upaya ketiga adalah mendaur ulang sampah (*recycle*), misalnya dengan memanfaatkan sampah kebun atau sampah dapur organik menjadi media tanah kompos, yang dapat digunakan sendiri atau disuplai ke penjual. Selain itu individu juga diharapkan dapat aktif untuk mengerti dan memilah sampah untuk memudahkan program daur ulang sampah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Mengubah Paradigma dari *Linear Economy* ke *Circular Economy*

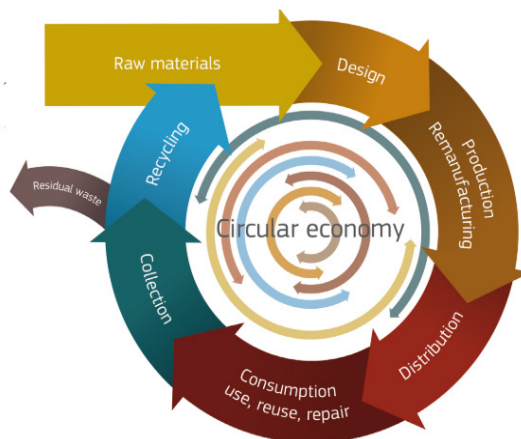
Dalam pengelolaan sampah dengan metode konvensional sampah sisa konsumsi dan produksi akan diangkat dan diurug di tempat pembuangan akhir. Dalam sistem tersebut, ekonomi berjalan secara linier atau yang disebut *linear economy*, di mana sumberdaya atau material yang diekstraksi dari alam kemudian diproduksi menjadi suatu produk barang lalu dikonsumsi, maka ia akan dibuang ke *landfilling* sistem untuk diurug. Dari sini selesailah siklus material tersebut di urugan sebagai 'kuburan', tempat akhir mereka – sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bisa dimanfaatkan lagi (lihat skema pada gambar 1).



Gambar 1 Konsep Linear Economy (European Commission, 2014)

Coba kita bandingkan bersama dengan konsep ekonomi sirkular atau *circular economy*. Ekonomi sirkular saat ini menjadi salah satu istilah yang paling banyak dibahas di kalangan ilmuwan ekonomi lingkungan dan menjadi fokus strategi Cakrawala Uni Eropa 2020. Elemen penentu intinya adalah “penggunaan restoratif” sumber daya. Bahan baku tidak selayaknya menjadi limbah yang dibuang begitu saja (Geisendorf & Pietrulla, 2017). Apabila kita melihat pada konsep ekonomi linear, bahan mentah (*raw materials*) yang diekstraksi dari alam berakhir di pengurugan, maka dalam ekonomi sirkular kita mencoba meminimalisir jumlah limbah atau sampah yang berakhir di pengurugan melalui berbagai macam upaya. Sebelum proses produksi, desain produk harus benar-benar dipertimbangkan untuk sedapat mungkin bisa digunakan ulang atau didaur ulang untuk meminimalisir potensi timbulan sampah. Setelah barang atau produk tersebut didistribusikan dan dikonsumsi, ada upaya dari produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan layanan perbaikan (*service*) bagi barang yang rusak serta mekanisme pengumpulan bekas kemasan (*packaging*) untuk selanjutnya digunakan ulang (*reuse*) atau didaur ulang (*recycle*) atau untuk barang yang tidak dapat didaur ulang secara langsung kita dapat ‘mendaur ulang’ energinya melalui mekanisme insinerasi yang menghasilkan energi listrik atau energi panas (*waste to energy concept*), yang dalam pemerintah harus menyediakan sarana untuk insinerasi sampah. Insinerasi sampah pun dapat menjadi salah satu alternatif untuk pembangkit listrik yang lebih *sustainable* dibandingkan dengan memanfaatkan bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Residual dari proses pembakaran atau insinerasi itulah yang selanjutnya dapat digunakan untuk material konstruksi bangunan atau jalan raya (lihat gambar

2). Dengan demikian terjadi proses daur material yang terus berputar dan efisiensi sumber daya alam, di mana tidak ada yang ‘terbuang sia-sia’ dan mendatangkan perputaran ekonomi melalui kegiatan daur ulang tersebut.



Gambar 2 Konsep Circular Economy

Zero Waste dan Circular Economy: Ekonomi Bertumbuh, Warga Sehat, dan Alam Lestari

Harapan kita bersama dengan menerapkan konsep *zero waste*, mendatangkan banyak manfaat bagi ekonomi, masyarakat, serta lingkungan. Paradigma bahwa sampah sebagai sumber masalah dan penyakit seyogyanya kita ubah – bahwa sampah apabila kita kelola dengan baik – akan mendatangkan benefit secara ekonomis yang berkesinambungan melalui konsep *zero waste* dan *circular economy*, serta mencegah terjadinya penyakit-penyakit dan gangguan kesehatan pada masyarakat menuju ekonomi yang bertumbuh selaras dengan lingkungan dan masyarakat yang sehat. Semoga!*

Referensi

- Bogusz, M., Matysik-pejas, R., Krasnodebski, A., & Dziekanski, P. (2021). The Concept of Zero Waste in the Context of Supporting. *Energies*, 14.
- CNN Indonesia. (2022). *Timbunan Sampah di Bantargebang 40 Meter, Setara Gedung 16 Lantai*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628123659-20-814459/timbunan-sampah-di-bantargebang-40-meter-setara-gedung-16-lantai>
- European Commission. (2014). *Towards a circular economy : A zero waste programme for Europe*. <https://www.oecd.org/env/outreach/EC-Circular-economy.pdf>
- Geisendorf, S., & Pietrulla, F. (2017). The circular economy and circular economic concepts — a literature analysis and redefinition. *Thunderbird International Business Review*, 1–12. <https://doi.org/10.1002/tie.21924>
- Ihsanuddin. (2022, May 24). *TPA Cipayung Melebihi Kapasitas sejak 2019, Tumpukan Sampah Menggunung dan Sempat Longsor*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/24/13524001/tpa-cipayung-melebihi-kapasitas-sejak-2019-tumpukan-sampah-menggunung-dan?page=all>
- Kumar, A., Cheela, V. R. S., Adamo, I. D., Iacovidou, E., Islam, M. R., Johnson, M., Miller, T. R., Parajuly, K., Parchomenko, A., Radhakrishan, L., Zhao, M., Zhang, C., & Li, J. (2021). Resources , Environment and Sustainability Zero waste approach towards a sustainable waste management. *Resources, Environment and Sustainability*, 3(January), 100014. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2021.100014>
- Pietzsch, N., Luis, J., Ribeiro, D., & Medeiros, J. F. De. (2017). Benefits, challenges and critical factors of success for Zero Waste : A systematic literature review. *Waste Management*, 67, 324–353. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.004>

- Rahman, V. N., Damayanti, D. S., & Puspikawati, S. I. (2022). Sanitasi : Jurnal Kesehatan Lingkungan. *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 15(2).
- Veleva, V., Bodkin, G., & Todorova, S. (2017). The need for better measurement and employee engagement to advance a circular economy : Lessons from Biogen ' s " zero waste " journey. *Journal of Cleaner Production*, 154, 517–529. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.177>
- World Health Organization. (2022). *Guidance on solid waste and health*. <https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment/solid-waste>
- Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2011). Challenges and Opportunities in Transforming a City into a "Zero Waste City." *Challenges*, 2, 73–93. <https://doi.org/10.3390/challe2040073>

DESY SULISTİYORINI adalah dosen pengajar dan peneliti di Universitas Indonesia Maju (sejak 2019-sekarang). Ia mengampu mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, Analisis Kualitas Lingkungan, Toksikologi Lingkungan, Pengelolaan Limbah Cair Domestik, Industri, dan B3, serta Pengelolaan Sampah Padat, Gas, dan Pengendalian Vektor. Di antara karya yang pernah terbit adalah sebuah buku berjudul *Industri Semen dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat* (Penerbit FKM UI, 2021) dan sebuah *book chapter* yang berjudul *Biomonitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using Plants: A Review* yang dimuat pada prosiding internasional pada *International Conference on Radioscience, Equatorial Atmospheric Science and Environment/INCREASE 2022* (Springer-Singapore, 2022) dan beberapa artikel ilmiah terkait bidang Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan pada jurnal internasional maupun jurnal nasional. Ia menamatkan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan S2 di bidang *Environmental Sanitation* dari *Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University Belgium*. Ia dapat dihubungi di email: desy.sulistiyorini@gmail.com.

Kerjasama Memajukan ASEAN

Ngesti Budi Lestari

ASEAN adalah organisasi negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Organisasi ASEAN ini terdiri dari 10 negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tulisan ini akan membahas tentang kerja sama dalam sumber daya.

Apa itu makna sumber daya alam (SDA)? SDA adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Sumber daya alam memiliki beberapa karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter tersebut sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam, berdasarkan sifat pembaharuan, dan juga berdasarkan penggunaannya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut pada kebutuhan manusia.

Oleh karena itu dalam pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berkelanjutan artinya pengolahan sumber daya alam jangan sampai terhenti perlu dilakukan secara terus-menerus. Setiap negara tentu memiliki beberapa sumber daya alam unggulan yang belum tentu dimiliki oleh negara lainya. Lantas apa saja sumber daya alam negara ASEAN?

Sumber Daya Alam ASEAN

Indonesia adalah negeri yang kekayaan dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya yang saat ini sedang berkembang yaitu gas alam, minyak mentah, tembakau, karet, rempah-rempah karet, kopi dan coklat. Malaysia memiliki berbagai sumber daya alam yang cukup populer, diantaranya terdapat sawit, minyak bumi, karet dan timah. Kekayaan alam yang besar ini membuat negara lainnya turut mengespornya untuk kebutuhan negara dan masyarakatnya. Singapura yang terletak berdekatan dengan Indonesia tidak memiliki sumber daya alam. Sebab negara patung singa ini mengandalkan sektor industri dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena Singapura yang sangat sempit dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Negara lainnya, Filipina, menyimpan berbagai sumber daya alam yang tak kalah melimpah. Sumber daya alam yang dimilikinya berupa hasil perkebunan seperti; pisang, jagung, nanas, tebu, beras, kopi, tembakau, dan serat. Tidak hanya itu saja untuk sektor tambangnya Filipina memiliki kekayaan alam emas, nikel, seng dan kobalt. Oleh karena itu tak heran Filipina disebut negara agrikultur. Thailand juga menyembunyikan kekayaan alam yang sangat melimpah ketimbang negara lainnya. Salah satu kekayaan alam yang ditonjolkan adalah pada sektor pangan yakni beras. Negara satu ini tercatat sebagai salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Sedangkan Brunei Darussalam menyimpan kekayaan alam yang memukau. Salah satu kekayaan yang sudah diketahui oleh banyak negara diseluruh dunia yakni sumber daya alam gas alam dan minyak bumi.

Sumber daya alam yang dihasilkan Vietam juga tak kalah menggiurkan. Vietman unggul pada sektor pertambangan seperti emas, batubara, besi dan kromium. Tidak hanya itu saja Vietnam juga memiliki sumber daya alam dari sektor perkebunan dan pertanian seperti; kelapa, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Negara lainnya, Laos, dikenal sebagai penghasil kopi, tembakau, ubi, tebu dan buah-buahan terbesar. Myanmar memiliki sumber daya alam yang sama dengan negara Thailand yakni penghasil beras terbesar dunia. Tidak hanya itu saja beberapa sektor pertambangan juga menjadi sumber daya alamnya seperti batu mulia, gas alam dan minyak. Kemudian, Kamboja memiliki beberapa kekayaan sumber daya alam, diantaranya terdapat tembaga, beras, karet sayur dan daging. Kekayaan tersebut bahkan diakui hingga di berbagai negara.

Pengelompokkan SDA berdasarkan kemungkinan pemulihannya, yaitu SDA yang dapat diperbarui (*renewable resources*), yakni SDA yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan punah, akibat ulang manusia dan penebangan liar. SDA yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) adalah SDA yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan atau ratusan juta tahun. Misalnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara. SDA yang tidak terbatas (*unlimited*), sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, meskipun dipakai dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah sinar matahari, arus air laut, dan udara.

Pengelompokkan SDA berdasarkan materi atau jenisnya, yaitu organik (hayati), SDA yang bahannya berupa jasad hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan SDA organik (hayati) meliputi kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian. Sedangkan anorganik (nonhayati) adalah SDA yang bahannya berupa benda mati, dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Kegiatan yang berhubungan dengan SDA anorganik (nonhayati) adalah pertambangan.

Faktor yang menyebabkan SDA di Indonesia melimpah adalah karena letak geologis yakni pertemuan lempeng sehingga memiliki banyak gunung berapi dan tambang mineral. Kemudian ketak astronomis, yakni daerahnya tropis, sehingga curah hujan dan temperatur udara tinggi, air melimpah dan tanah subur dan luas wilayah, yakni 1/3 berupa daratan, 2/3 berupa lautan, sehingga kekayaan laut dan darat melimpah. Indonesia adalah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari unsur tanah, laut, darat, dan udara.

Satu pertanyaan: Bagaimana kita sebagai anggota ASEAN mengolah dan meningkatkan potensi sumber daya alam yang kita miliki? Berikut adalah beberapa upaya agar potensi sumber daya alam yang ada di negara ASEAN bisa memberikan keuntungan bagi negara ASEAN. *Pertama*, mengadakan studi banding bagi sesama negara ASEAN tentang sumber daya alam yang memiliki potensi membawa keuntungan yang besar yang bisa diolah dan dikembangkan secara bersama-sama untuk kepentingan negara ASEAN. Mengadakan penelitian secara berkesinambungan untuk menggali dan mengolah sumber daya alam dengan menggunakan cara yang lebih efektif, efisien, dan menghasilkan hasil yang melimpah dengan kualitas yang baik dan diimbangi dengan menciptakan teknologi yang lebih canggih.

Kita juga dapat melakukan inovasi pengembangan sumber daya alam yang ada untuk dikembangkan dan diolah dengan cara yang menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi untuk kepentingan negara-negara ASEAN. Menetapkan standar harga beli dan harga jual sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara ASEAN melalui kesepakatan agar dapat menguntungkan bagi semua anggota.

Kita juga dapat mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Selain itu, kita dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga komoditi sumber daya alam di masing-masing negara ASEAN yang memiliki potensi lebih, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, maupun dari sektor pertambangan dan dari sektor lainnya. Kemudian, bekerja sama antar negara ASEAN dalam melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.*

NGESTI BUDI LESTARI merupakan seorang guru sekolah dasar di SDS Budi Mulia Dua Bintaro, Ciputat, Tangerang Selatan. Selain menjadi guru, dia juga menjadi seorang penulis. Saat ini sudah ada tiga buku yang telah ditulisnya. Antologi pertamanya berjudul *Rindu*, dengan tema tulisannya *Rindu pada kelasku sama dengan rinduku tuk bertemu dengan muridku*. Buku ini ditulis bersama dengan 19 Penulis yang berprofesi sebagai guru juga. Antologi Kedua berjudul *Several Different Story* dengan tema "*Manusia yang dicintai penduduk langit dan penduduk bumi*". Buku antologi ketiganya berjudul *Pulih Bersama Bangkit Perkasa*, buku yang diterbitkan dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris).

Komitmen ASEAN dalam Mengimplementasikan *Net Zero Emissions* dalam Merespon Perubahan Iklim

Muhammad Muhti Attaufiq

Pendahuluan

Berbicara mengenai arus globalisasi tentu tidak bisa lepas dari dampak perubahan iklim yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Pembahasan dan diskusi ini tentu sering kita lihat dalam berbagai kesempatan tidak hanya dalam diskusi tertutup bahkan dalam diskusi dalam warung kopi. Dampak yang sudah terasa dalam segala lini sehingga menjadi topik dalam berbagai media. Perubahan iklim berdampak secara sistemik seperti kondisi tanaman petani, tangkapan ikan nelayan hingga berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Secara tidak langsung dampak perubahan iklim akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan di muka bumi sehingga patut menjadi perhatian utama. Diskusi mengenai perubahan iklim tentu akan menghasilkan solusi konkrit termasuk dalam kajian pembangunan fisik yang berwawasan lingkungan sehingga ke depannya tidak menimbulkan dampak yang merusak.

Program *net zero emission* atau bebas emisi sebagai bagian tindakan konkrit menjadi titik pembahasan dalam tulisan ini. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah dunia yang dituangkan dalam berbagai perjanjian sebagai turunan dari *Paris Climate Agreement* pada tahun 2015. Dalam isinya program ini bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan dalam rangka menghentikan dampak pemanasan global. Keterlibatan hampir semua negara ASEAN menjadi bagian dari UNFCCC tahun 1992 dan Protokol Kyoto 1997. Hal ini juga tergambar dalam Paris Agreement 2015 serta dalam berbagai pertemuan regional ASEAN yang mengisyaratkan keinginan untuk terlibat dan menjadi pihak yang ingin berperan dalam *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC). Karena itu dorongan dari deklarasi ini telah menjadi petunjuk dasar bagi negara-negara anggota ASEAN untuk terlibat aktif dalam rezim perubahan iklim. Oleh karena itu sebagai bukti keseriusannya, negara di kawasan ASEAN menandatangani Piagam ASEAN 2007 sehingga secara khusus bisa menangani perubahan iklim. Bentuk perannya adalah tergabung dalam kelompok kerja ASEAN yang membahas mengenai Perubahan Iklim (*ASEAN Working Group on Climate Change, AWGCC*).

Komitmen *Net Zero Emissions* ASEAN

Isu perubahan iklim belum masuk dalam dokumen yang dihasilkan ASEAN. Baru pada pertemuan di Jakarta, Indonesia dicanangkan *Jakarta Declaration on Environment and Development* pada tanggal 18 September 1997. Pada bagian 11 Deklarasi Jakarta 1997 ini menyatakan "*to urge developed countries to commit targets of limitation and reduction of greenhouse gas emissions under the Berlin Mandate.*" Salah satu mandat Berlin 1995 sebagai bagian dari *Conference of the Parties* (COP) UNFCCC pertama yakni dengan tujuan agar negara-negara ASEAN ingin mengingatkan dan menegaskan kembali komitmen untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai komitmen dalam *Net Zero Emissions*.

Dalam pertemuannya di deklarasi Jakarta 1997, ASEAN mendorong lebih aktif anggotanya untuk menyikapi kondisi perubahan iklim yang semakin berkembang. Sebagai tindak lanjut pada KTT ASEAN-Asia Timur (*East Asia Summit, EAS*) ke-3 di Singapura tahun 2007 disepakati *Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment* dilanjutkan pada COP ke-13 UNFCCC di Bali, Indonesia, tahun 2007, posisi ASEAN dalam *ASEAN Declaration on the 13th session of the Conference of the Parties to the UNFCCC and the 3rd session of the CMP to the Kyoto Protocol*. Pertemuan di Singapura pada tahun 2009 yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting on Environment, AMME*)

disepakati melalui *Singapore Resolution on Environmental Sustainability and Climate Change* yang dibawa ke COP ke-15 UNFCCC di Kopenhagen³¹.

Menjelang COP ke-17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan melalui KTT ASEAN ke-19 para pemimpin ASEAN menyepakati bahwa diputuskan dalam *ASEAN Leaders' Statement on Climate Change to COP-17 to the UNFCCC and CMP-7 to the Kyoto Protocol*. Pada tahun di 2014 menjelang COP ke-20 UNFCCC bahwa posisi ASEAN disampaikan oleh Myanmar di dalam *Joint High Level Segment Conference of the Parties ke-20 dan Meeting of the Parties ke-10 Protocol Kyoto* di Lima, Peru, dengan menyatakan sikapnya melalui *ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014* dan setahun kemudian juga menerbitkan *ASEAN Joint Statement on Climate Change 2015*³².

Bagaimana dengan peran ASEAN di masa akan datang akan terlihat dari berbagai kebijakan pembangunan. Salah satunya dengan turunan kesepakatan piagam ASEAN sejak tahun 2007, yang meliputi semua kebijakan yang terjadi dalam keorganisasian ASEAN. Dengan adanya ASEAN Communities 2015 maka sebagai bagian dari tindaklanjutnya harus dilakukan dengan pengembangan kerangka menghadapi perubahan iklim yang semakin diperhatikan di masa mendatang. Sebagai komunitas yang telah memiliki *legal standing* yang kuat ASEAN harus bertindak secara keorganisasian dengan memperkuat kelembagaan yang ada maupun yang baru dibentuk. Dengan terbentuknya *ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)* akan mendorong peran dan posisi ASEAN di bidang perubahan iklim menjadi lebih baik.

Peran dan partisipasi ASEAN dalam perundingan terhadap perubahan iklim diharapkan meningkat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti. Sebagai penerapan atas Paris Agreement 2015 yang dimulai tahun 2020, maka ASEAN Community harus dipersiapkan dan mampu mengantisipasi berbagai bencana akibat perubahan iklim. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana bisa mempersiapkan kebijakan dalam menuju *Net Zero Emission* dalam pembangunan di negara ASEAN. Dampak dari bebasnya emisi dan berdampak bagi iklim di Asia Tenggara dan mempengaruhi keberlangsungan lingkungan. Tingkat kesadaran masyarakat ASEAN harus ditingkatkan terutama adanya perubahan iklim termasuk dalam patuh dalam berbagai kebijakan perubahan iklim.

Sebagai salah satu contoh kebijakan pemerintah Indonesia yang akan di dorong dalam pertemuan regional ASEAN sebagai tentu sebagai bagian implementasi dari misi Presiden Jokowi ketika menghadiri COP 26. Dalam pidatonya Presiden Jokowi menekankan pada lima aspek strategi diantaranya: *Pertama*, komunikasi fakta dan data tentang penanganan perubahan iklim yang telah pemerintah lakukan termasuk dalam hal penurunan laju deforestasi terendah dalam 20 tahun, penurunan kebakaran sebesar 22 persen pada 2020, rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar dan rehabilitasi. *Kedua*, mengkomunikasikan kebijakan dan mekanisme penanganan perubahan iklim. sehingga bisa menjadi rujukan dan pembelajaran bagi negara lain *Ketiga*, komunikasi tuntutan timbal balik dari negara maju atas kesuksesan yang telah dihasilkannya. *Keempat*, mengkomunikasikan target dan prioritas bahwa Indonesia sebagai motor penggerak dalam penanganan perubahan iklim. *Kelima*, mengkomunikasikan agenda kepemimpinan menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Itu merupakan ambisi yang bertanggungjawab karena mampu menempatkan Indonesia pada posisi geopolitik yang tepat, bukan hanya menguntungkan negara maju semata, tetapi juga Indonesia layak mendapatkan keuntungan besar dalam penanganan perubahan iklim.

31 Selanjutnya, dalam KTT ASEAN ke-15 negara-negara ASEAN kembali membuat pernyataan bersama untuk menyikapi perundingan di COP ke-15 UNFCCC melalui *ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP-15 to the UNFCCC and CMP-5 to the Kyoto Protocol*. Pertemuan selanjutnya dalam KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam tahun 2010 dicanangkan *ASEAN Leaders' Statement on Joint Response to Climate Change*.

32 Perubahan kebijakan dari negara-negara ASEAN kemudian disikapi pada agenda pembangunan Post-2015 atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang menjadi topik utama yakni perubahan iklim. Peran para pemimpin ASEAN melalui KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2015, dalam *Declaration on ASEAN Post 2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda 2015*. Dalam deklarasi ini ditegaskan mengenai dukungan ASEAN terhadap COP ke-21 UNFCCC yang akan diselenggarakan di Paris, Perancis.

Komitmen Penerapan

Komitmen ini tidak cukup hanya melalui pendidikan, pelatihan, kesadaran masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai deklarasi dan pertemuan UNFCCC tahun 1992, Protokol Kyoto tahun 1997 maupun Paris Agreement tahun 2015. Hal yang harus ditingkatkan yakni pengembangan riset dan penanganan perubahan iklim dalam setiap tahapan pembangunan dalam masyarakat. Daya dukung pendanaan yang kemudian diaplikasikan ke dalam pemberdayaan dengan teknologi sehingga memberikan peningkatan kapasitas, pengembangan sumberdaya manusia yang terus beradaptasi ke dalam pola mitigasi perubahan iklim harus dilakukan dalam tingkat ASEAN. Sebagai contoh dalam penerapan energi terbarukan yakni bagaimana ASEAN bisa mendorong kerjasama dan kolaborasi dalam menggali potensi energi terbarukan sehingga bisa dimaksimalkan oleh masing-masing negara dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan seperti menyediakan kebutuhan penyimpanan daya yang handal menggunakan baterai jika sistem yang dibuat *off-grid*, atau menyiapkan generator cadangan jika sistem yang dibuat bersifat on-grid.

Dengan letak geografi dan demografi kawasan ASEAN yang beragam potensi ini dapat dikembangkan dengan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan. Potensi kebermanfaatan dan nilai investasi yang besar dibutuhkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan sistem jaringan listrik seharusnya dapat memberikan kesempatan agar teknologi murah yang disesuaikan dengan potensi EBT masing-masing negara sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem ketenagalistrikan yang handal guna mencapai program *Net Zero Emissions*.

Berbagai kesempatan transisi menuju *Net Zero Emissions* juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti salah satunya tentang kebijakan penggunaan energi dan pembangunan infrastruktur fisik dari masing-masing negara ASEAN. Dalam kajian kebijakan energi yakni bagaimana penggunaan energi di masa depan menjadi dalam bagian sistem ketenagalistrikan menuju *Net Zero Emissions*. Transisi digunakan sebagai jawaban ketersediaan energi fosil yang semakin terbatas sehingga potensi energi terbarukan menjadi lebih besar. Selain itu pengembangan infrastruktur pendukung perlu dilakukan disamping juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi. Dalam mendukung program ini maka pembangunan infrastruktur pun sebagaimana gambaran pembangunan negara ASEAN harus berwawasan lingkungan dengan berdasarkan standarisasi Green Building.

Sebagai implementasi KTT ASEAN ke-27 yang menghasilkan *Declaration on ASEAN Post 2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda*, maka ASEAN harus terus mendorong agar negara-negara di kawasan ASEAN selalu terlibat aktif dalam menangani dampak perubahan iklim. Sebagai contoh adalah bagaimana memitigasi sumber daya alamnya agar bisa mendukung keberlanjutan dalam komitmen mendukung *Net Zero Emissions*. Selain itu juga proses melalui mitigasi dan adaptasi serta dukungan teknis dan keuangan harus didukung secara berkelanjutan dan kontinu. Dorongan ini akan sangat bermakna dimana peran negara-negara regional bisa memberikan dampak lebih baik dalam mencegah dampak perubahan iklim secara global. ASEAN sebagai organisasi regional diharapkan mampu menjadi pelindung dan penggerak bagi negara-negara anggotanya dan negara disekitarnya yakni Asia-Pasifik dan Oceania dalam menghadapi perubahan iklim global.

Perubahan iklim akan semakin kompleks sehingga memberikan dampak yang besar sehingga hasil dari COP ke-21 UNFCCC berupa Paris Agreement 2015 akan menjadi panduan atau pedoman dalam menangani perubahan iklim di masa mendatang. ASEAN harus terus mengkonsolidasikan program serta kegiatannya agar sesuai dengan Paris Agreement 2015 sebagai kesepakatan yang diakui secara global. Hal tersebut merupakan tantangan ASEAN dalam mengimplementasikan gagasan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga di masa depan ASEAN harus menunjukkan komitmen dan *power* dalam memberi sanksi kepada negara yang terbukti melakukan tindakan kerusakan lingkungan.

Kesimpulan

Dalam komitmen pembangunan seyogyanya harus terus memperhatikan aspek lingkungan hidup khususnya dalam rangka merespon perubahan iklim. Secara garis besar dunia internasional telah bersepakat dalam Protokol Kyoto 1997 hingga ke Paris Agreement 2015 sebagai hasil dari COP UNFCCC ke-21 untuk memberikan peluang untuk partisipasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang khususnya ASEAN diantaranya melalui penyampaian INDC dan sesuai prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992. Solusi yang paling memungkinkan

di masa depan yakni bagaimana menangani dampak perubahan iklim dalam komitmen *Net Zero Emissions* dalam pembangunan segala aspek.

ASEAN harus dapat melihat peluang dan manfaat yang disediakan berbagai perjanjian internasional yang ada. Ini dapat menjadi kampanye yang dapat dijadikan sebagai arus utama dalam pembangunan ASEAN agar lebih sejahtera dan mampu mengantisipasi serta menghindari dampak dan bencana dari adanya perubahan iklim. ASEAN harus melaksanakan dengan berbagai cara dalam komitmennya melaksanakan *Net Zero Emissions* untuk mengatasi perubahan iklim termasuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Paris Agreement 2015 di regional Asia Tenggara sehingga ASEAN akan terlihat manfaatnya bagi masyarakat Asia Tenggara. Sehingga kesepakatan yang dicapai dalam tingkat global diharapkan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dan dukungan global dalam menangani dampak perubahan iklim di tingkat regional Asia Tenggara, bahkan dapat memerankan di tingkat Asia dan Pasifik melalui mitra kerja sama. *

Referensi

- Amsir, Achmad Abdi, Roland A. Barkey dan Adi Suryadi Culla, Tanpa Tahun. "Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan Dalam Implementasi Program Clean Development Mechanism (CDM) Di Indonesia", diakses melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7198d7043cd814063377147d9ce25b01.Pdf>
- Burhanuddin, A., Magfirah, A. D., Guntur, N. O., Bubun, K. A. M., Rizqilah, M. D., & Apriliani, A. (2022). Peran ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 15-23.
- Blau, J. (2017). *The Paris Agreement: climate change, solidarity, and human rights*. Springer.
- Elliot, Lorraine. "Climate Change, Migration and Human Security in Southeast Asia." dalam Elliott, Lorraine, J. J. Ewing, B. Mayer, G. Hugo, B. P. Resurreccion, E. E. Sajor, dan T. Nurlambang. *Climate Change, Migration and Human Security in Southeast Asia*. (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2012)
- Eoudia, S. (2021). *Komitmen ASEAN dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Maljean-Dubois, Sandrine, Thomas Spencer, dan Matthieu Wemaere. "The Legal Form of the Paris Climate Agreement: A Comprehensive Assessment of Options." *CCLR* (2015): 68.
- Mustaqim, A. H. Pembangunan Berkelanjutan Atau Emisi Nol Persen: Komunikasi Perubahan Iklim Presiden Joko Widodo di COP26.
- Prasetyo, D., & Sasana, G. (2020). Analisis Kausalitas Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Sosial Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Asean Tahun 2008-2017. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(4).
- Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: dinamika diplomasi perubahan iklim global dan ASEAN menuju 2020. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(1), 76-94.
- Sheren, N. (2021). *Peran generasi muda ASEAN dalam mewujudkan komitmen ASEAN terhadap isu perubahan iklim dunia (2015-2020)= The role of ASEAN youth generation in fulfilling ASEAN commitment towards the global climate change issue* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Vu, H. T., Blomberg, M., Seo, H., Liu, Y., Shayesteh, F., & Do, H. V. (2021). Social media and environmental activism: Framing climate change on Facebook by global NGOs. *Science Communication*, 43(1), 91-115. <https://doi.org/10.1177/1075547020971644>
- Widodo, J. (2021). *Pidato Presiden Republik Indonesia Di KTT COP 26*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-di-ktt-cop-26/>. Diakses pada 5 Desember 2022.
- Yana, S., Yulisma, A., & Zulfikar, T. M. (2022). Manfaat Sosial Ekonomi Energi Terbarukan: Kasus Negara-negara ASEAN. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(1)

MUHAMMAD MUHDI ATTAUFIQ adalah Pengajar di Universitas Negeri Manado sejak 2018. Alumni dari Pendidikan Arsitektur UPI (2008) dan Universitas Sam Ratulangi (2012) juga berprofesi sebagai Arsitek Profesional dan juga sering mengikuti beberapa kegiatan organisasi relawan masyarakat. Keterlibatannya dalam organisasi relawan yakni bergerak di bidang Pendidikan dan Lingkungan diantaranya Kelas Inspirasi Gorontalo, Perpustakaan, Literasi Pustaka Gorontalo, dan berbagai kegiatan volunter lainnya. Tulisan karyanya yang telah dipublikasikan yakni buku bersama dengan penulis lainnya yakni *G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Ia dapat dihubungi di email: muhdi.attaufiq@gmail.com.

Polusi Kabut Asap Indonesia dalam Perspektif Keamanan ASEAN

Agung Setiyo Wibowo

Pendahuluan

Polusi kabut asap ialah salah satu isu serius yang menjadi perhatian ASEAN setidaknya dalam tiga dekade terakhir. Sebagai negara yang menjadi sumber polusi kabut asap dari kebakaran dan pembakaran hutan pada musim kemarau di Indonesia tidak pernah absen dari kritik negara-negara tetangganya. Kebakaran hutan terparah dalam sejarah Asia Tenggara terjadi pada kurun 1997-1988 ketika alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit di Pulau Sumatra dan Kalimantan mencapai puncaknya. Sejak tahun 1980-an kebakaran hutan yang menyebabkan polusi kabut asap lintas batas negara memang terus terjadi dengan intensitas yang berbeda-beda. Akibatnya dari peristiwa tersebut telah menyebabkan kerugian signifikan dalam ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

Dampak dari polusi kabut asap tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi telah meluas kepada masyarakat di negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia. Menyikapi hal itu baik pemerintah maupun masyarakat di dua negeri jiran memprotes Indonesia untuk bertanggungjawab menghentikan kebakaran dan pembakaran hutan Singapura dan Malaysia menempuh jalur diplomasi di tingkat regional dengan mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk menandatangani dan meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Meskipun perjanjian tersebut diklaim sebagai panutan dunia untuk mengatasi polusi kabut asap, tidak serta merta berjalan sebagaimana yang direncanakan karena Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam blok yang mau meratifikasi sampai tahun 2014. Sebagai negara yang memiliki cakupan hutan terluas sekaligus menjadi sumber polusi kabut asap utama di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan waktu 12 tahun untuk memutuskan perjanjian itu.

Lamanya waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk meratifikasi AATHP didorong oleh beragam faktor. Dari peliknya manajemen sumber daya alam, tata kelola lingkungan, dampak ekonomi hingga keamanan nasional. Faktanya efektifitas suatu perjanjian mensyaratkan kapasitas di tingkat lokal, provinsi maupun nasional untuk menerapkannya. Artikel ini berupaya menganalisis upaya pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actor* dalam mengatasi polusi kabut asap yang telah menjadi isu keamanan di lingkup ASEAN.

Polusi Kabut Asap Indonesia dan Dampaknya

Polusi udara dapat diartikan adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing tersebut di dalam udara dalam jumlah dan jangka waktu tertentu akan dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan (Amsyari, 2006:43).

Kabut asap merupakan salah satu contoh sumber polusi udara yang paling membahayakan. Dampak langsung dari polusi kabut asap antara lain ialah: 1) timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat; 2) berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan; 3) terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara; 4) timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga (Saraswati, 2013).

Polusi udara di Indonesia dan Asia Tenggara paling banyak dipicu oleh adanya *haze* yaitu fenomena di mana debu dan asap menyelimuti langit. *Haze* dalam konteks ini mencakup kabut, uap air, abu gunung berapi, salju, pasir dan debu. Dalam AATHP konsep polusi kabut asap lintas batas negara didefinisikan sebagai *transboundary haze pollution*. Dalam perjanjian ini *transboundary haze pollution* diartikan sebagai "*smoke resulting from land and /or forest fire with causes deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resource, and ecosystem and material*

property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment." Jadi, polusi kabut asap lintas batas negara yaitu pencemaran yang terjadi di suatu negara yang meluas ke negara lainnya.

Polusi kabut asap merupakan peristiwa tahunan yang biasanya terjadi pada musim kemarau di Indonesia. Polusi ini disebabkan oleh pembakaran hutan untuk lahan kelapa sawit di Pulau Sumatra dan Kalimantan, sedangkan sebagian kecil lainnya memang terjadi sebagai imbas kebakaran alami yang disebabkan oleh kekeringan. Menurut beragam sumber, kebakaran lahan gambut merupakan kontributor terbesar dari polusi kabut asap. Dalam sejarah Indonesia, kebakaran paling besar terjadi pada kurun 1997-1998. Kebakaran hutan dengan intensitas cukup besar juga terjadi pada tahun 2002, 2005, 2006, 2010 dan 2013 (BAPPENAS-ADB, 1999).

Pada kebakaran 1997/1998 dampak polusi kabut asap tidak hanya dirasakan oleh penduduk Sumatra, akan tetapi juga Singapura dan Malaysia. Kebakaran tersebut berasal dari Jambi, Riau dan Sumatra Selatan yang disebabkan oleh pembersihan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Ketika Soeharto membuka Proyek Padi Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah pada tahun 1997, dampak polusi kabut asap meluas ke Sarawak, Malaysia (Anderson, 2001).

Pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja untuk lahan perkebunan di Indonesia walaupun ilegal namun sulit dihentikan karena teknik tersebut paling mudah dan murah untuk pembersihan lahan. Tidak sedikit pihak yang menuduh keterlibatan perusahaan kelapa sawit raksasa dari Malaysia dan Singapura dalam fenomena tersebut. Walaupun banyak ditemukan petani lokal yang juga melakukan dengan cakupan yang lebih sempit.

Kerugian yang ditimbulkan oleh polusi kabut asap tidaklah sedikit. Menurut Tacconi (2003), Indonesia diperkirakan mengalami kerugian antara 1,7 hingga 2,7 miliar Dolar AS dari kebakaran hutan dan turunannya seperti erosi, hancurnya keanekaragaman hayati, dan seterusnya. Sedangkan dampak tidak langsung dari polusi kabut asap pada beberapa sektor diperkirakan mencapai 0,3 miliar Dolar AS di Indonesia, dan 0,4 miliar Dolar AS di Malaysia dan Singapura. Adapun dampak dari sisi emisi gas rumah kaca diperkirakan setidaknya mencapai 400 juta ton karbon.

Menurut dr. Nastiti Kaswandani, dampak polusi kabut asap paling rentan dialami oleh anak-anak dan manula. Anak-anak merupakan korban paling rentan mengingat saluran pernafasan mereka belum sempurna. Kuman yang dibawa oleh kabut asap dapat meningkatkan risiko pneumonia (radang paru). Sedangkan menurut dr. Agus Dwisusanto, kondisi udara yang buruk karena kabut asap jika berlangsung terus menerus akan dapat menurunkan fungsi paru (Anna, 2013).

Polusi kabut asap juga mengganggu pelaku industri dan konsumen transportasi udara. Beberapa penerbangan dari dan ke kota-kota di Sumatra, Malaysia, dan Singapura sering kali dibatalkan atau ditunda lantaran jarak pandang yang mengkhawatirkan. Gangguan penerbangan tersebut berdampak kerugian ekonomi yang cukup signifikan, khususnya di bidang pariwisata dan industri jasa terkait. Polusi kabut asap juga turut menyumbang kerusakan lingkungan dengan menyumbang konsentrasi CO₂ untuk pemanasan global.

Polusi Kabut Asap: Perspektif Keamanan Insani

Seiring dengan globalisasi, ancaman terhadap tatanan dunia makin berkembang. Ancaman yang semula hanya merupakan terminologi militer telah bergeser ke konsep yang lebih luas sebagaimana pendapat Brown, Ullman, Nye dan Lyn-Jones bahwa kajian keamanan internasional membutuhkan agenda yang lebih luas dibandingkan dengan keamanan militer (Buzan, 1991).

Menganalisis polusi kabut asap tidak dapat dipisahkan dari konsep keamanan insani dalam Laporan Pembangunan Manusia 1994 yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa keamanan insani mencakup tujuh ranah: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan masyarakat, keamanan politik dan keamanan kesehatan (UNDP, 1994). Berdasarkan konsep ini, polusi kabut asap dapat mengancam keamanan insani khususnya keamanan lingkungan.

Keamanan lingkungan mencerminkan kemampuan sebuah negara atau masyarakat untuk bertahan dalam kondisi kelangkaan aset lingkungan, risiko sebagai akibat perubahan lingkungan, dan konflik atau ketegangan yang diakibatkan oleh isu lingkungan. Menurut Thomas Homer-Dixon (1994), konflik lingkungan merupakan asal muasal bagi konflik sosial akut yang dapat meluas atau berkembang menjadi konflik di antara negara.

Menganalisis keamanan insani tidak dapat dilepaskan dari konsep sekuritisasi yang lahir dari *Copenhagen School*. Sekuritisasi menghadirkan pendekatan kajian keamanan di luar wacana negara dan militer dengan dua prosesnya. Pertama, mencitrakan isu tertentu sebagai ancaman ekstensial terhadap *referent object* yakni sesuatu yang dipandang terancam dan memiliki tuntutan sah untuk dilindungi. Kedua, melibatkan aktor yang membuat sekuritisasi isu dengan menyatakan bahwa ada *referent object* yang secara ekstensial terancam (Buzan, Waever and de Wilde, 1998).

Polusi kabut asap telah menjadi isu keamanan insani jika sudah ada pernyataan dari *securitizing actor* yang ditujukan kepada *audience*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2014 membentuk operasi tanggap darurat untuk mengatasi kabut asap di Indonesia khususnya di Riau akibat pembakaran lahan. Presiden SBY memahami keresahan dan kemarahan masyarakat, sehingga menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan POLRI untuk menanganinya. Dalam perkembangannya dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau dengan tiga operasi terpadu yaitu pemadaman api dan asap, perawatan dan pelayanan kesehatan bagi korban bencana, dan penegakan hukum (Kompas.com, 2014).

Polusi Kabut Asap Indonesia dan Pengaruhnya di ASEAN

Polusi kabut asap lintas batas negara bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip "*Sic utere tuo ut alienum non laedes*" menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain. Begitu juga dengan prinsip *good neighbourliness* yang menegaskan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak dapat diganggu oleh negara lain. Prinsip-prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan lainnya adalah *general prohibition to pollute principle, the prohibition of abuse of rights, the duty to prevent principle, the duty to inform principle, the duty to negotiate and cooperate principle, intergenerational equity principle* (Adji Samekto, 2009: 119).

Polusi kabut asap Indonesia mulai menjadi perhatian ASEAN pada tahun 1990-an. Pada September 1995 dibentuk *Haze Technical Task Force* (HTTF) di bawah naungan *ASEAN Senior Officials on the Environment* yang menempatkan Indonesia sebagai ketua. Upaya tersebut merupakan langkah awal untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi kabut asap lintas batas negara. Pada Juni 2002 ditandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) seiring dengan penyelenggaraan *ASEAN Ministerial Meeting on Haze* dan *World Conference and Exhibition on Land and Forest Fire Hazards* (Deplu, 2004).

Pada *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa:

Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengawasi polusi asap sebagai hasil dari tanah dan/atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, untuk meminimalkannya efek samping. Dimana ada ancaman serius atau tidak dapat diperbaiki kerusakan dari polusi asap lintas batas, bahkan tanpa penuh kepastian ilmiah, tindakan pencegahan harus diambil oleh pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 3 Ayat 3 di atas, pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara diwajibkan mengambil langkah pencegahan kebakaran hutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lintas batas negara serta melaksanakan amanat dari Pasal 3 Ayat 1 untuk tidak membahayakan kesehatan manusia atau meminimalisir dampak dari kebakaran hutan di Indonesia yang berupa kabut asap yang mana kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di dalam dan luar negeri. Sedangkan Pasal 3 Ayat 4 menegaskan bahwa, negara diharuskan mengelola dan menggunakan sumber daya hutan dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sampai tahun 2010, semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi AATHP kecuali Indonesia. Keengganan Indonesia untuk meratifikasi setidaknya dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, lemahnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengelola sekaligus merusak hutan. Bergulirnya otonomi daerah semakin meningkatkan kompleksitas pengelolaan hutan karena tumpang tindihnya aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kepentingan ekonomi. Besarnya kontribusi nasional dari hasil pengolahan kayu dan industri sawit membuat kepentingan nasional untuk pelestarian lingkungan terkalahkan.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terus mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi AATHP, khususnya Singapura dan Malaysia. Pada 16 September 2014 akhirnya Indonesia meratifikasi AATHP melalui rapat

paripurna di DPR. Keputusan pemerintah menandai dimulainya babak baru keseriusan Indonesia dalam upaya pencegahan dan kebakaran hutan di lingkup regional. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan hutan terluas berkomitmen untuk bekerjasama dalam kerangka ASEAN serta memanfaatkan bantuan internasional guna meningkatkan pengendalian kebakaran sebagai sumber utama polusi kabut asap (Kemlu, 2014).

Keputusan Indonesia untuk meratifikasi AATHP bukanlah tanpa perhitungan. Indonesia berharap mendapatkan sejumlah manfaat seperti (Kemenlh, 2014):

1. Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan;
2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan manusia, mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup;
3. Melindungi kekayaan sumber daya lahan dan hutan dari bencana kebakaran lahan dan/atau hutan;
4. Memberikan kontribusi positif terkait upaya pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas, seperti: a) penguatan regulasi dan kebijakan nasional, b) pemanfaatan sumber daya di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN, c) penguatan manajemen dan kemampuan teknis pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas.

Sikap Indonesia meratifikasi AATHP menunjukkan bahwa pemerintah telah menganggap serius bahwa polusi kabut asap merupakan salah satu isu keamanan nasional dan regional. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat kerugian yang ditimbulkan dari polusi kabut asap lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Keseriusan pemerintah ditunjukkan oleh kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai *securitizing actor* ke Provinsi Riau untuk mengkoordinasi Satgas Penanggulangan Kabut Asap yang dibentuk (Liputan6.com, 2014).

Konklusi

Polusi kabut asap merupakan salah satu permasalahan keamanan bagi Indonesia yang dampaknya meluas ke negara-negara tetangga. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan alami dan pembakaran hutan untuk perkebunan sawit ini menjadi ancaman ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Polusi kabut asap Indonesia yang telah mengancam keamanan negara-negara tetangga mendorong lahirnya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada Juni 2002. Pada September 2014 akhirnya Indonesia meratifikasi AATHP karena menyadari bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada keuntungan jika tidak meratifikasinya.*

Referensi

- BAPPENAS-ADB. (1999). *Causes, extent, impact and costs of 1997/1998 fires and drought. Final report, annex 1 and 2. Planning for fire prevention and drought management project.* Asian Development Bank TA 2999-INO. Jakarta: National Development Planning Agency (BAPPENAS), and Asian Development Bank.
- Buzan, Barry, Ole Waever & Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis.* London: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, Barry. (1991). *People, State and Fear.* London: Lynne Rinner Publisher, hlm.23.
- Fuad Amsyari. (2006). *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan.* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43.
- Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang Pertukaran Informasi dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kabut Asap.* (2004) Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm.3.
- Samekto, Adji. (2009). *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.* Bandung: Citra Aditya Bakti: hlm.119.
- Thomas F. Homer-Dixon. (1994). "Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases." *International Security, Vol. 19, No. 1, Peace and Conflict Studies Program, University of Toronto*, hlm. 5-40.
- Anna, Lusya Kus. "Bahaya Kabut Asap Paling Rentan Pada Anak." Diakses pada 16 November 2014 dari <http://health.kompas.com/read/2013/06/25/1428131/Bahaya.Kabut.Asap.Paling.Rentan.pada.Anak>.

- Saraswati, AA.Nanda."Transboundary Haze Pollution dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional diakses pada 16 November 2014 dari <http://www.scribd.com/doc/49016405/makalah-Hukum-Kebijakan-Lingkungan-Hendra-Nanda-Rachmi-Zulkifli>.
- Tacconi, L. (2003). Fires in Indonesia: Causes, costs and policy implications. Working paper no 38. Bogor: Center for International Forestry Research. Diakses pada 16 November 2014 dari <http://www.cifor.cgiar.org/fire/pdf/pdf23.pdf>.
- Anderson, I. (2001).NOAA/GIS training expert final report. Palembang: Forest Fire Prevention and Control Project. European Union and Ministry of Forestry of the Government of Indonesia. Diakses pada 16 November 2014 dari http://www.fire.uni-freiburg.de/se_asia/projects/ffpcp/FFPCP-21-NOAA-GIS-Training-Final-Report.pdf.
- "Human Development Report 1994". Diakses pada 16 November 2014 dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.
- "Presiden SBY Perintahkan BNPB Ambil Alih Penanganan Kabut Asap Riau". Diakses pada 16 November 2014 dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/14/2132171/Presiden.SBY.Perintahkan.BNPB.Ambil.Alih.Penanganan.Kabut.Asap.Riau>.
- "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution" diakses pada 16 November 2014 dari http://haze.asean.org/?wpfb_dl=32.
- "RI Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution". Diakses pada 16 November 2014 dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=503&l=id>.

AGUNG SETIYO WIBOWO adalah seorang konsultan, trainer & coach yang telah menerbitkan 30+ buku best-seller. Ratusan tulisannya telah menghiasi berbagai jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan media online. Co-founder & Chief Editor Kampusgw.com telah berbicara di puluhan kota di Asia Pasifik pada beragam topik seperti kepemimpinan, pendidikan, hubungan internasional hingga manajemen perubahan. Ia telah mendapatkan sejumlah penghargaan seperti Young Leaders for Indonesia, Global Change Maker, ASEAN Blogger Ambassador, Spirit of Majapahit Cultural Ambassador, Duta Wisata Bagus Kabupaten Magetan, Duta Paramadina dan seterusnya. Ia dapat dihubungi melalui grandsaint@gmail.com atau +62 852 3050 4735. Kunjungi www.agungwibowo.com untuk mengamati pemikiran-pemikiran terkininya.

Upaya ASEAN Mewujudkan Zero Carbon di Tengah Covid-19

Mohamad Hery Saipudin dan Mansur Juned

Pendahuluan

Ancaman keamanan lingkungan akibat perubahan iklim mendorong para pemimpin negara untuk bekerja sama. Di tingkat global, upaya kerja sama untuk mengurangi potensi kerusakan bumi dilakukan berdasarkan pertemuan tingkat tinggi anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menghasilkan Paris Agreement pada tahun 2015. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat tujuan untuk membatasi angka peningkatan suhu bumi agar tidak melampaui 1,5 - 2°C dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca hingga nol karbon (*zero carbon*). Pada konferensi lanjutan, yaitu Conference of the Parties ke-26 (COP26) yang diadakan pada 2021, menghasilkan empat mandat bagi negara peratifikasi untuk merealisasikan program nol karbon, yaitu: mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membatasi deforestasi, mempercepat peralihan transportasi ke kendaraan bertenaga listrik, dan mendorong investasi di sektor energi terbarukan (COP26 PRESIDENCY UK2022, 2022).

Keberhasilan cita-cita untuk mencapai target *zero carbon* pada 2050 bergantung pada komitmen dan dukungan masing-masing negara. Negara anggota ASEAN adalah peratifikasi Paris Agreement. Meskipun sebagian besar negara ASEAN bukan penghasil karbon terbesar, namun mereka tetap berkomitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam upaya penurunan emisi karbon (Safrina, 2021). Sejumlah negara anggota ASEAN sendiri telah mulai menerapkan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Pada implementasinya, penerapan kebijakan berbasis lingkungan di ASEAN dihadapkan pada tantangan dinamika global seperti Covid-19 dan perang Rusia dan Ukraina.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menjadi tantangan dalam upaya *zero carbon*. Kebijakan pembatasan aktivitas yang diterapkan oleh berbagai negara turut menghentikan kegiatan ekonomi. Setelah kebijakan pembatasan dilonggarkan, kegiatan ekonomi kembali meningkat seiring dengan berbagai upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Dampaknya, konsumsi energi ikut meningkat, terutama energi berbahan dasar fosil seperti minyak bumi dan batubara. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat dunia masih dilanda wabah Covid-19 juga menghambat pasokan minyak bumi dan gas bumi sehingga mendorong negara-negara untuk mempercepat peralihan bahan bakar untuk segera menggunakan energi terbarukan.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya negara-negara ASEAN dalam mewujudkan *zero carbon* di masa ketika Covid-19 masih menjangkit namun pemulihan ekonomi terus dilakukan. Di sisi lain, upaya pencapaian *zero carbon* ASEAN juga dihadapkan pada situasi yang menuntut percepatan peralihan energi ke energi terbarukan akibat krisis energi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang akan di analisa menggunakan *green theory*.

Pembahasan

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38, pada 26 Oktober 2021, menghasilkan ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-26). Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa ASEAN telah berhasil mengurangi pemakaian energi sebesar 21% serta mendapatkan 13,9% saham energi terbarukan dari total pasokan energi primer di ASEAN (ASEAN, 2021). Negara ASEAN sendiri tercatat telah mengambil sejumlah langkah untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) mereka masing-masing. NDC merupakan komitmen dari masing-masing anggota UNFCCC terhadap pelaksanaan Paris Agreement.

Negara-negara yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Malaysia berkomitmen untuk mewujudkan ambisinya sebagai negara *zero carbon* dengan target realisasi

paling cepat tercapai di tahun 2050. Selain itu, pemerintah Malaysia juga berencana untuk melestarikan hutan serta berupaya untuk menerapkan perspektif lingkungan dalam kebijakan yang diambil agar dapat mengurangi dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Prordten, 2022). Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, tengah menyusun rencana penerapan instrumen yang membebaskan tarif bagi setiap emisi karbon yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan produksi, baik barang maupun jasa. Peraturan mengenai biaya karbon tersebut disebut sebagai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berfungsi sebagai pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik NDC di tahun 2030 maupun *Net Zero* di tahun 2060 (Primadhyta, 2022).

Sedangkan Vietnam, memasang target agar masing-masing kementerian beserta bidang yang diampunya dapat ikut bertanggung jawab dalam mengurangi emisi rumah kaca di tahun 2030. Di samping itu, Vietnam juga berencana untuk menerapkan *carbon trading* (Barnes, 2022). *Carbon trading* atau perdagangan karbon adalah transaksi berupa jual-beli kredit karbon (*carbon credit*). Dalam transaksi ini, pembeli dapat menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon atau *credit carbon* sendiri merupakan hak yang diberikan kepada perusahaan untuk melepaskan emisi dari kegiatan produksinya. Penerapan *carbon trading* ini juga rencananya akan diterapkan di Indonesia dengan sistem sukarela.

Negara selanjutnya adalah Kamboja yang mengklaim bahwa negaranya menjadi pertama di Asia Tenggara yang mempublikasi dokumen kerangka kerja *zero carbon* di tahun 2050 kepada umum. Dokumen kerangka kerja tersebut berjudul Long-Term Strategy for Carbon Neutrality (LTS4CN) dan telah diserahkan kepada UNFCCC pada 30 Desember 2021. Kamboja juga berencana untuk mengurangi emisi karbonnya hingga 40% pada 2030. Upaya pengurangan karbon ini juga diiringi dengan target Kamboja untuk meningkatkan Produk Domestik bruto (PDB) nasionalnya hingga sekitar 3% pada 2050 (Ministry of Environment, 2022).

Negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Singapura, menargetkan pihaknya mampu mengurangi hingga 60 juta ton emisi karbon dioksida pada 2050. Rencana ini rupanya telah dirintis Singapura sejak 2009. Hasilnya, pada 2020 negara tersebut berhasil mencapai pengurangan emisi sebesar 52,8 juta karbon dioksida. Dalam upaya mencapai target emisinya, Singapura menerapkan kebijakan transisi rendah karbon (*low-carbon transition*) di bidang industri, ekonomi, serta sosial. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mendorong transformasi bisnis melalui pusat energi dan kimia berkelanjutan yang diselaraskan dengan industri serta hibah untuk efisiensi energi dan pengurangan emisi. Selain itu, Singapura juga berinvestasi di bidang teknologi rendah karbon dengan pemanfaatan dan penyimpanan karbon, hidrogen rendah karbon, serta sistem penyimpanan tenaga surya dan energi. Di bidang ekonomi, Singapura menerapkan perdagangan karbon dan jaringan listrik regional untuk energi hijau. Di bidang sosial, Singapura menerapkan praktik rendah karbon di masyarakat melalui fasilitas publik, budaya *walk-cycle-ride*, serta penggunaan kendaraan yang berenergi lebih bersih (National Climate Change Secretary, 2022).

Komitmen dari negara-negara ASEAN dalam mengembangkan rencana dan langkah mewujudkan Paris Agreement menunjukkan bahwa ASEAN adalah kawasan yang berusaha aktif dalam memajukan agenda global. Hal ini merupakan kebijakan yang positif mengingat ASEAN didominasi oleh negara berkembang yang bukan penghasil emisi yang signifikan. Kebijakan energi hijau ini, apabila merujuk pada sudut pandang *green theory*, merupakan sebuah kemajuan karena dapat menyertakan agenda nilai-nilai ekologis jangka panjang terkait fenomena emisi karbon. Menurut *green theory*, perbaikan lingkungan memerlukan perubahan perilaku dan moral manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Jika hal tersebut dapat dicapai, maka akan membuka peluang bagi inovasi teknologi dan perubahan yang transformatif pada politik global (Dyer, 2017). Meskipun demikian, penerapan kebijakan berbasis rendah emisi oleh negara-negara ASEAN masih mengambil sudut pandang antroposentris. Alasannya adalah karena kebijakan energi hijau tersebut masih mengambil pemahaman bahwa tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dilandaskan pada motif untuk menyelamatkan negara dari ancaman kemanusiaan. Contohnya adalah kebijakan transisi energi di Kamboja yang berorientasi untuk menaikkan PDB serta kebijakan perdagangan karbon yang tetap dapat dinegosiasikan besaran material finansialnya.

Rencana negara-negara ASEAN untuk mengadopsi target emisi dapat digabungkan dengan agenda pemulihan ekonomi dari COVID-19. Seluruh negara ASEAN masih memiliki pekerjaan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi mereka. Dalam upaya pemulihan ini, pemanfaatan energi terbarukan dapat turut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengkatalis praktik-praktik ekonomi hijau. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar fosil akibat perang

Rusia dan Ukraina juga turut mendorong peralihan energi ke sumber alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, pada praktiknya terdapat sejumlah kritik mengenai penerapan energi hijau tersebut menyangkut kesiapan sumber daya manusia, finansial, serta kapasitas sumber daya alam (Alfarizi, 2022).

Kesuksesan dari negara-negara ASEAN dalam mencapai penurunan emisi karbon dalam kurun waktu tahun 2030-2050 sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjalin relasi dengan masyarakat. Menurut *green theory*, aspek ini menjadi penting karena mereka menganggap perbaikan lingkungan seharusnya didasarkan pada pola pikir bahwa individu adalah aktor utama daripada negara (Tayyar & Bilal, 2019). Fenomena iklim itu sendiri juga merupakan imbas dan konsekuensi dari perilaku manusia secara kolektif, terutama bagi mereka yang menerapkan praktik politik dan ekonomi yang mengutamakan antroposentris. Manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintahan negara dan para elit politik yang telah mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak berkelanjutan. Dengan kata lain, tindakan mereka didasarkan atas kepentingan jangka pendek saja (Dyer, 2017).

Ratifikasi komitmen iklim yang dilakukan oleh ASEAN ini membutuhkan komitmen yang serius untuk menjaga agar implementasi kebijakan benar-benar diterapkan secara konsisten. Kunci utama yang menjadi agen perubahan (*agent of change*) dari kerja sama iklim yang dilakukan ASEAN serta NDC masing-masing negara lebih luas dari hanya sekedar negara. Perubahan perilaku terhadap lingkungan harus turut menyertakan partisipasi dari aktor-aktor non-negara, kelompok kecil di masyarakat, serta individu. Sedangkan di tingkat global, partisipasi aktif dari institusi pemerintahan dunia (*global governance*), seperti ASEAN secara komunitas, harus disertai dengan keberlanjutan implementasi kebijakan energi hijau.

Kesimpulan

ASEAN telah menunjukkan partisipasi aktifnya sebagai organisasi regional yang perhatian terhadap upaya pemulihan iklim. Status ASEAN yang didominasi oleh negara berkembang namun tetap berupaya aktif dalam transisi energi menunjukkan langkah nyata yang baik. Namun, keberhasilan dari kebijakan energi hijau ASEAN memerlukan kolaborasi dan kekompakan antar elemen, baik pemerintah, kelompok masyarakat, serta individu.*

Referensi

- Alfarizi, M. K. (2022). *Pelaku Usaha Bicara Kesiapan dan Tantangan Transisi Energi Terbarukan RI*. Retrieved from Tempo. co: <https://bisnis.tempo.co/read/1647153/pelaku-usaha-bicara-kesiapan-dan-tantangan-transisi-energi-terbarukan-ri>
- ASEAN. (2021). *ASEAN JOINT STATEMENT ON CLIMATE CHANGE TO THE 26th SESSION OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC COP26)*. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/10.-ASEAN-Joint-Statement-to-COP26.pdf>
- Barnes, M. (2022). COP27: Vietnam's Net Zero Commitment One Year On. Retrieved from vietnam-briefing.com/news/vietnam-net-zero.html/
- COP26 PRESIDENCY UK2022. (2022). *COP26 PRESIDENCY OUTCOMES*. Glasgow: COP26 PRESIDENCY. Retrieved from <https://ukcop26.wpenenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/COP26-Presidency-Outcomes.pdf>
- Dyer, H. C. (2017). Green Theory. In S. (ed) Mcglinchey, R. Walters, & C. Scheinpflug, *International Relations* (pp. 84-90). Bristol, England: E-International Relations.
- Ministry of Environment. (2022). Seeing the forest for the trees: Cambodia commits to achieving carbon neutrality by 2050. Retrieved from <https://www.prnewswire.com/news-releases/seeing-the-forest-for-the-trees-cambodia-commits-to-achieving-carbon-neutrality-by-2050-301458503.html>
- National Climate Change Secretary. (2022). Singapore Commits to Achieve Net Zero Emissions by 2050 and to a Revised 2030 Nationally Determined Contribution; Public Sector and Jurong Lake District to Lead The Way with Net Zero Targets. Retrieved from <https://www.nccs.gov.sg/media/press-releases/singapore-commits-to-achieve-net-zero/>

- Primadhyta, S. (2022). Indonesia Siapkan Nilai Ekonomi Karbon Jadi Pendanaan Alternatif. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220609082458-532-806745/indonesia-siapkan-nilai-ekonomi-karbon-jadi-pendanaan-alternatif>.
- Prordten, D. (2022). Malaysia committed to becoming carbon-neutral by 2050, says PM. Retrieved from <https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/06/05/malaysia-committed-to-becoming-carbon-neutral-by-2050-says-pm#:~:text=KUALA%20LUMPUR%3A%20Malaysia%20is%20committed,the%20Asia%20Zero%20Emission%20Community>.
- Safrina, R. (2021). *COP26: ASEAN's Commitment in The Energy Sector*. Retrieved from ASEAN CENTRE FOR ENERGY: <https://aseanenergy.org/cop26-aseans-commitment-in-the-energy-sector/>
- Tayyar, & Bilal, F. (2019). Green Theory in International Relations. In Tayyar, & Toprak, *Theories of International Relations* // (pp. 163-178). Eskişehir: ANADOLU UNIVERSITY PRESS.

MOHAMAD HERY SARIPUDIN adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Nairobi, Kenya dan Dosen tetap Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran.

MANSUR JUNED saat ini merupakan Dosen Hubungan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2018 ia menyelesaikan program doktoral pada Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Krisis Bahan Pangan di Tahun 2045 Mendatang

Senja Maghfiroh

Persoalan pangan menjadi permasalahan krusial global yang harus diwaspadai, dan salah satu negaranya adalah Indonesia. Melonjaknya harga bahan pangan, energi, pupuk ataupun cuaca yang tak menentu menjadi kekhawatiran secara global. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, termasuk dengan memperkuat berbagai strategi dan upaya dalam memperkuat potensi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Penurunan produksi beras dan peningkatan pertumbuhan penduduk serta tidak berimbang jumlah ketersediaan beras dan konsumsi per kapita berakibat pada meningkatnya impor bahan makanan terutama beras dan gandum. Impor pangan merupakan jalan pintas yang ditempuh saat terjadi kekurangan pangan dalam negeri, namun sebenarnya impor akan menghancurkan negara kita. Impor pangan secara berkelanjutan dan dalam jumlah yang semakin bertambah akan berakibat pada ketergantungan pangan kita pada negara lain, dan dalam jangka panjang akan menjadikan ketahanan bangsa menjadi rapuh.

Antisipasi Ancaman Krisis Pangan

Ancaman krisis pangan dunia harus segera diantisipasi dan diwaspadai terutama bagi negara yang tingkat impor pangannya tinggi, seperti Indonesia. Krisis pangan dunia yang dikhawatirkan akan terulang pada tahun 2012 akan berakibat langkanya pangan di pasar internasional dan setiap negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan negara dan sangat berhati-hati dalam mengeksport bahan pangannya.

Lihat saja Indonesia, sebagai negara agraris penghasil padi kini mulai mengimpor beras. Tidak hanya beras yang diimpor, mulai dari daging, kedelai, hingga garam kini mulai diimpor. Jika kondisi ini terus dibiarkan akan menyebabkan ketergantungan yang sulit dihindari. Tidak hanya itu, para petani, dan produsen yang ada dalam negeri tidak lagi memiliki ruang gerak yang luas dalam memproduksi hasil lahan mereka. Imbasnya akan bermuara pada rakyat kecil yang terus mengalami penderitaan. Ironis memang, negara yang memiliki letak yang strategis ditunjang dengan lahan yang subur harus mengimpor pangan dari negara lain. Tapi kenyataan itulah yang dihadapi Indonesia saat ini.

Asia Tenggara dikaruniai lahan yang subur dan dikelilingi oleh kekayaan maritim. Seharusnya tidak ada alasan untuk alasan kekurangan pangan. Tentu, ada masalah pengendalian jumlah penduduk, kesenjangan penghasilan antara perdesaan dan perkotaan, kesenjangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta produktivitas yang mungkin ikut mempengaruhi tingkat ketahanan pangan.

Namun perlu diakui bahwa hal-hal tersebut sebenarnya bukan penyebab ketiadaan ketahanan pangan. Faktor-faktor ini sekadar variabel antara (*intervening*) yang meningkatkan peluang bagi ketiadaan ketahanan pangan. Logikanya demikian: kesenjangan penghasilan, kesenjangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta produktivitas adalah *output* dari kesenjangan pembangunan di suatu negara, termasuk juga kurang meratanya investasi dan pengentasan kemiskinan. Jika ditelusuri lebih lanjut, tingkat potensi alam di tiap daerah tersebut ternyata beragam. Di satu sisi ada persamaan sebagai kantong-kantong kemiskinan, tetapi daerah tersebut belum tentu kekeringan dan rawan pangan; ada juga daerah-daerah penyangga kota besar yang notabene subur.

Lebih daripada itu, Simon Maxwell (1996) dan Robert Stringer (2000) telah menunjukkan fakta yang mengesankan yakni bahwa ketahanan pangan bukan berarti swasembada (*self-sufficiency*) produksi pangan. Ada banyak komunitas yang tidak bisa (atau tidak bisa lagi) memproduksi cukup pangan bagi dirinya karena berkurangnya air, orang yang mau bercocok tanam atau menjadi nelayan, lahan yang bisa ditanami, serta teknologi. Ada studi lain yang menunjukkan bahwa pangan belum tentu tersedia bagi individu-individu bila mereka tidak punya kontrol atas pendapatan dan sumberdaya dalam rumah tangga. Artinya, permasalahan ketahanan pangan juga berlaku di tataran manajemen penghasilan dalam rumah tangga.

Simon Maxwell (1996) mengutip studi Thomas (1991) yang menyoroti keluarga-keluarga di perkotaan Brazil di mana penghasilan (dan kemampuan membeli makanan) akan punya dampak duapuluh kali lipat bagi satu keluarga dan

keberlangsungan hidup anak jika dikendalikan oleh ibu. Selain itu ada juga studi yang menyoroti faktor perubahan iklim, degradasi tanah, dan kerusakan ekologi yang membuat kegiatan pertanian jauh lebih mahal dan rumit dibandingkan beberapa dekade lalu. Tanpa kalkulasi yang hati-hati tentang bagaimana kebijakan mengarah pada tindakan, maka *output* yang dihasilkan pun akan jauh dari memuaskan. Hal ini berlaku pula pada efektifitas kerangka dialog dan kerjasama bidang pengembangan masyarakat pedesaan dan pangan, seperti yang sejauh ini dikembangkan ASEAN.

Pengembangan Pangan Lokal

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan lokal yang beragam jenisnya. Masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 100 jenis tumbuhan dan biji-bijian, 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan, dan 250 jenis sayuran dan jamur. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan pangan lokal menghadapi tantangan sebagai berikut: (1) meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, (2) melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan, (3) meningkatkan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik (Radiansyah, 2014).

Indonesia merupakan negara penghasil ubi kayu yang terbesar kedua setelah Thailand. Hanya saja ubi kayu Indonesia lebih banyak dikonsumsi di dalam negeri. Ke depan Indonesia mempunyai peluang untuk mengembangkan produksi ubi kayu ini, termasuk produk olahan dan turunannya sehingga menjadi salah satu pangan lokal yang dapat dijadikan suatu industri pertanian yang berbasis ubi kayu. Selain ubi kayu, Indonesia juga mempunyai peluang untuk pengembangan sumber pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi suatu industri pertanian berbasis sumber pangan lokal seperti ubi jalar, sagu, pisang, sukun, dan kentang. Sumber pangan lokal tersebut dapat diolah menjadi tepung, yang selanjutnya dapat diolah menjadi beraneka ragam pangan lokal dengan nilai tambah dan nilai guna yang tinggi.

Masuknya Indonesia ke dalam pasar tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasionalnya. Agar Indonesia mendapatkan manfaat positif dari masuknya ke dalam pasar tunggal ASEAN, maka disarankan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kemandirian pangan nasional, (2) mengembangkan pangan lokal, (3) meningkatkan akses pasar, dan (4) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan.

Guna melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut diperlukan dukungan kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan pokok secara berkelanjutan; (2) mengembangkan industri pangan lokal dari hulu ke hilir, dan meningkatkan promosi produk pangan lokal di pasar domestik dan pasar internasional; (3) meningkatkan infrastruktur, sistem logistik, rantai pasok, serta meningkatkan kelembagaan dan peningkatan sistem informasi pasar; (4) menerapkan standarisasi kualitas dan keamanan pangan; (5) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan di kawasan; dan (6) memanfaatkan perdagangan pangan kawasan untuk penanganan masalah pangan manakala produksi pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.*

Referensi

- Dewi, G. P., & Ginting, A. M. (2012). *Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan*, 67. (diunduh pada 30 November 2022)
- Hermanto. (2015). *Ketahanan Pangan di Indonesia di Kawasan ASEAN*, 27. (diunduh pada 01 Desember 2022)
- Hermanto. (2015). *Ketahanan Pangan di Indonesia di Kawasan ASEAN*, 29-30. (diunduh pada 01 Desember 2022)
- Mudrieq, S. H. (2014). *Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia*, 1291. (diunduh pada 01 Desember 2022)
- Wisnu, D. (2015). *ASEAN dan Ketahanan Pangan*, 29-30. (diunduh pada 02 Desember 2022)

SENJA MAGHFIROH adalah seorang pengajar di salah satu Sekolah Dasar Negeri. Ia baru saja menyelesaikan Pendidikan S1 pada tahun 2019 di salah satu universitas di Jakarta. Senja adalah seorang yang gemar menulis dan fotografi. Ia dapat dihubungi di Instagram: Mghsenja dan Email: mghsenja@gmail.com.

Adaptasi Pertanian Beberapa Negara ASEAN dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Lady Hafidaty Rahma Kautsar

Perubahan Iklim dan Pertanian di ASEAN

Negara-negara ASEAN, terdiri dari 10 negara, antara lain Indonesia (1967), Malaysia (1967), Singapura (1967), Thailand (1967), Filipina (1967), Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Sedangkan untuk Timor Leste telah disepakati sebagai anggota ke-11 pada Tanggal 11 November 2022 dalam acara KTT ASEAN ke-40/41 di Phnom Penh, Kamboja (Rosa, 2022 dalam Detik.com). Berdasarkan letak geografis, mayoritas negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis, meskipun ada pula satu negara, seperti Myanmar yang memiliki iklim subtropis.

Pemanasan global—melalui peningkatan gas-gas rumah kaca (GRK) secara alami maupun dipercepat oleh aktivitas manusia, seperti dari emisi kendaraan bermotor (transportasi) maupun industri—mempunyai peran dalam proses perubahan dari siklus air lokal, regional maupun global, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan iklim. Indikator perubahan iklim diketahui para ahli melalui peningkatan muka air laut, peningkatan suhu maupun perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim. Sektor yang sangat terdampak pada perubahan iklim adalah sektor pertanian, sektor hulu dari produksi makanan maupun minuman untuk kebutuhan primer manusia. Pada sektor pertanian, terjadi peningkatan serangan hama dan penyakit, sehingga tidak jarang terjadi gagal panen (Naylor, dkk, 2007).

Krusialnya investigasi terhadap dampak perubahan iklim, perlu diatasi pula dengan strategi antisipasi, mitigasi maupun adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim (Subagyo, dkk, 2022). Antisipasi merupakan kajian perubahan iklim dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim. Adaptasi adalah tindakan penyesuaian sistem alam dan sistem sosial untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya antisipasi maupun adaptasi perlu diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan penyerap GRK.

Secara regional dan pembagian klasifikasi garis lintang, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik iklim yang mirip, yaitu iklim tropis. Berdasarkan hal tersebut, maka langkah baiknya apabila dilakukan strategi bersama dalam lingkup antisipasi, mitigasi dan adaptasi, terutama dalam sektor yang paling rentan yaitu sektor pertanian.

Adaptasi Perubahan Iklim di Beberapa Negara ASEAN

Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas, dampak perubahan iklim cukup terlihat pada pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim, antara lain pergeseran musim hujan dan pola hujan. Beberapa ahli menemukan arah perubahan pola hujan di bagian barat Indonesia, terutama di bagian utara Sumatra dan Kalimantan intensitas hujannya lebih rendah dengan periode yang lebih panjang. Sebaliknya di wilayah selatan Jawa dan Bali intensitas curah hujan cenderung meningkat dengan periode yang lebih singkat (Naylor, 2007). Tren perubahan secara spasial terjadi dimana curah hujan pada musim hujan lebih bervariasi dibandingkan dengan musim kemarau (Boer, dkk, 2009). Iklim ekstrim akibat fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Osilasi Atlantik atau Osilasi Pasifik semakin meningkat dan menguat. Timmerman, dkk (1999) dan Hansen, dkk (2006) menyebutkan bahwa pemanasan global meningkat frekuensi El-Nino dan fenomena La-Nina. Peningkatan siklus ENSO dari 3-7 tahun sekali menjadi 2-5 tahun sekali (Ratag, 2001).

Ancaman banjir dan kekeringan diperparah dengan perubahan pola hujan dan kejadian iklim ekstrim akibat perubahan iklim. Peningkatan intensitas banjir secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi karena meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman, misalnya serangan hama keong pada tanaman padi. Ada indikasi bahwa lahan sawah yang terkena banjir pada musim sebelumnya berpeluang lebih besar mengalami ledakan serangan hama wereng

coklat. Tingkat kerentanan lahan pertanian terhadap kekeringan cukup bervariasi antar wilayah, terutama lahan sawah di beberapa wilayah di Sumatra dan Jawa. Kekeringan meluas terjadi pada tahun-tahun El-Nino. Pada tahun 1989-2006 lebih dari 2.000 ha per kabupaten mengalami kekeringan, antara lain Pantai Utara Jawa Barat, terutama Kabupaten Indramayu, sebagai pantai utara Nanggroe Aceh Darusalam, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Lombok. Salah satu inovasi dan adaptasi Indonesia di bidang teknologi pertanian adalah melalui SI KATAM atau Sistem Informasi Kalender Tanam.

Di Malaysia, dikembangkan arah kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim yaitu melalui Kebijakan Agro Pangan Nasional 2021-2030 (RAN 2.0) dan Rencana Aksi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional 2021-2025. Adapun yang disorot pada kedua kebijakan meliputi tiga strategi, yaitu (1) meningkatkan penerapan teknologi dan pertanian cerdas iklim; (2) memperkuat data ketahanan pangan dan mengintensifkan penelitian, pengembangan, komersialisasi, serta (3) inovasi praktik alternatif potensial untuk produksi pangan (Dera, 2022 dalam *Sariagri.com*).

Malaysia pun merasakan cuaca yang tidak bisa diprediksi dan cuaca ekstrim. Pada bagian selatan Johor, pada awal tahun baru mengalami hujan deras menyebabkan banjir, dan membuat ribuan penduduk mengungsi. Banjir pun menghancurkan tanaman pada sektor pertanian. Para petani mengalami kebingungan karena bagaimana periode hujan lebat dan deras diikuti oleh cuaca yang lebih hangat dalam dua hingga tiga minggu terakhir, dengan curah hujan yang lebih rendah di seluruh negara bagian.

Penasihat perubahan iklim untuk Pusat Studi Pemerintahan dan Politik (Cent-GPS), Dr. Siew, menyatakan bahwa guna mengatasi hal tersebut Malaysia dapat melakukan Teknologi Pertanian Presisi, yang berarti menggunakan parameter yang tepat dari keasaman tanah, air dan sinar matahari untuk memaksimalkan hasil panen. Konsep pertanian vertikal dengan melibatkan gudang dan rumah kaca pun menjadi gagasan, alih-alih lahan terbuka yang terpapar unsur-unsurnya (Kautsar, 2022 dalam *Sariagri.com*). Langkah pemerintah Malaysia pun mengajukan permohonan dana sebesar US\$ 3 juta atau Rp42,7 miliar dari Green Climate Fund (GCF) milik PBB. Dana akan dipergunakan untuk pengembangan rencana nasional guna beradaptasi terhadap perubahan iklim yang menyebabkan 70.000 orang terlantar dan menewaskan sedikitnya 48 orang (Latiff, 2021).

Dalam mengatasi perubahan iklim, Singapore berkomitmen mendekabornasi sektor listriknya melalui optimalisasi energi terbarukan salah satunya energi surya. Singapura saat ini bergantung pada gas alam dalam menghasilkan 95% listriknya, dan akan memberikan hibah bagi perusahaan pembangkit listrik untuk mengadopsi teknologi yang lebih hemat energi dan hemat karbon. Peluncuran pada tahun 2021 adalah pertanian surya terapan terbesar di dunia (Bratadharma, 2021). Selain itu, Singapura melakukan pendekatan lebih maju dan berkelanjutan melalui *urban farming*, berupa penanaman tanaman pangan di lingkungan yang terkendali. Pada 5 Agustus 2022, National University of Singapore (NUS) secara resmi meluncurkan Research Centre on Sustainable Urban Farming (SurF). Pusat penelitian ini melakukan riset multidisiplin yang menggabungkan sains, teknik dan komputasi. Platform yang disediakan berfokus pada upaya multidisiplin, mempercepat penelitian dan inovasi ketahanan pangan Singapura³³.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Negara Thailand, petaninya sudah sadar akan perubahan iklim. Petani Thailand memilih mempergunakan varietas umur pendek, tahan hama dan penyakit. Antisipasi perubahan iklim lainnya adalah mempergunakan pupuk dan pestisida secara selektif antara musim kering dan musim hujan, baik jenis maupun dosis. Upaya tersebut menyebabkan usaha tani yang lebih efektif dan efisien. (BBP2TP, 2022)

33 Lingkup penelitian SurF meliputi pra-produksi, produksi, dan pascaproduksi pangan. Bidang-bidang yang beragam mencakup ilmu tanaman, genomika & pengeditan gen, mikrobioma, ilmu pangan, ilmu material dan polimer, teknologi sensor, ilmu data, dan keahlian kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Terdapat pula ruang kolaborasi dengan pelaku lain dalam industri ini (Kusuma, 2022 dalam *Greennetwork.id*). Berdasarkan penilaian lembaga independent The Good Food Institute, Singapura sekarang memiliki jaringan paling maju secara teknologi untuk memproduksi protein nabati manapun di Asia Tenggara. Hingga S\$144 juta disisihkan oleh pemerintah untuk penelitian dan pengembangan guna produksi pangan perkotaan yang berkelanjutan, pangan masa depan, seperti produksi protein berbasis bioteknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi keamanan pangan.

Pada 4 Desember 2022, Departemen Pertanian Negara Filipina memberikan izin komersialisasi MON810 (jagung BT) sebagai produk bioteknologi modern pertama yang diizinkan ditanam secara komersial. Jagung ini resisten terhadap hama penggerek batang. Melalui hal tersebut, Filipina menjadi negara pertama di ASEAN yang mengadopsi bioteknologi. Awalnya, terdapat perdebatan publik masyarakat dan di dalam pemerintah sendiri, serta diperparah dengan persepsi negatif terhadap perusahaan multinasional yang memasarkan benih bioteknologi. Guna menjawab kekhawatiran ini, Pemerintah Filipina menghimpun komunitas ilmuwan dan peneliti untuk menjawab kecemasan masyarakat

Keterbukaan pemerintah membantu menjembatani dialog melalui informasi, fakta dan data yang tepat. Kebijakan dan peraturan yang disusun juga memberikan kesempatan bioteknologi berkembang tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam proses evaluasi dan penilaian. Evaluasi mengacu pada organisasi dan peraturan internasional seperti Cartagena Protocol on Biosafety, Codex Alimentarius Commission (untuk keamanan pangan), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan UN Food and Agriculture Organization. Filipina dari negara pengimpor jagung kini menjadi negara pengeksport jagung bioteknologi.

Petani pun mengalami peningkatan produktivitas dengan penambahan penghasilan 10-15%. Perkembangan ini tidak terpisahkan dari dukungan pemerintah, pemain lokal dan pemain internasional. Banyak perusahaan riset berskala global dan terkemuka menempatkan Filipina sebagai pusat penelitian dan pengembangan untuk bioteknologi pertanian dan pangan. Selain itu, berkat kolaborasi dan dukungan semua pemain, ilmuwan lokal dan universitas di Filipina mulai mengembangkan berbagai produk bioteknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi pertanian setempat, seperti padi dengan fortifikasi vitamin A, tanaman terong bioteknologi, dan lain sebagainya (Anonim, 2015).

Kolaborasi dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Pertanian merupakan tombak dari kebutuhan primer manusia yaitu pangan. Adapun alam menumbuhkan pertanian sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin dapat meningkatkan hasil panen dalam menghadapi perubahan iklim itu sendiri, yaitu misalnya melalui merekayasa faktor-faktor yang terganggu akibat perubahan iklim—contoh melalui *Urban Farming* yang dilakukan Singapura. Selain itu bioteknologi dapat menjadi pilihan seperti yang dilakukan Filipina. Atau, mengupayakan agar petani sadar terhadap perubahan iklim, seperti yang dilakukan di Thailand, sehingga petani melakukan pilihan-pilihan faktor-faktor pertanian secara bijak (misalnya melalui memilih varietas umur pendek, tahan hama dan penyakit, selektif terhadap pupuk dan pestisida). Malaysia pun bergerak melalui Rencana Nasional guna beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta menuju pada Teknologi Pertanian Presisi. Indonesia sendiri tak mau tertinggal melalui SI KATAM, dan berbagai inovasi pertanian lainnya bergerak untuk beradaptasi mengatasi perubahan iklim di sektor pertanian.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina merupakan beberapa negara ASEAN yang cukup tanggap terhadap perubahan iklim di sektor pertanian. Berbagai adaptasi serta inovasi teknologi apabila dikolaborasikan akan menjadi kekuatan yang besar bagi bangsa ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta tantangan global. *

Referensi

- Anonim (2015). "Filipina dan Kisah Keberpilihan pada Inovasi di Bidang Pertanian", Kompas.com, 30 November 2015, <https://biz.kompas.com/read/2015/11/30/131311528/Filipina.dan.Kisah.Keberpilihan.pada.Inovasi.di.Bidang.Pertanian> (diunduh 7 Desember 2022)
- BBP2TP (2022). "Perjalanan Perwakilan Gugus Tugas Katam ke Thailand Bertukar Pengalaman Hadapi Perubahan Iklim", Litbang Pertanian, bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=331:perjalanan-perwakilan-gugus-tugas-katam-ke-thailand-bertukar-pengalaman-hadapi-perubahan-iklim-2&catid=102&Itemid=514&lang=en (diunduh 7 Desember 2022)
- Boer, R., A. Buono, Sumaryanto, E. Surmaini, A. Rakhman, W. Estiningtyas, K. Kartikasari, and Fitriyani (2009). Agriculture Sector. Technical Report on Vulnerability and Adaptation Assessment to Climate Change for Indonesia's Second National Communication. Ministry of Environment and United Nations Development Programme, Jakarta.

- Bratadharna, Angga (2021). "Atasi Perubahan Iklim, Singapura Siap Lanjutkan Dekarbonisasi di Pembangkit Listrik", medcom.id, 26 Oktober 2021, <https://www.medcom.id/ekonomi/global/GNG70jrN-atasi-perubahan-iklim-singapura-siap-lanjutkan-dekarbonisasi-di-pembangkit-listrik> (diunduh 7 Desember 2022)
- Dera (2022). "Atasi Perubahan Iklim, Malaysia Terapkan Pertanian Cerdas", Sariagri.com, 8 November 2022, <https://pertanian.sariagri.id/106019/atasi-perubahan-iklim-malaysia-terapkan-pertanian-cerdas> (diunduh 5 Desember 2022)
- Hansen, J., Sato, M., Ruedy, R., Lo, K., Lea, D.W., dan Medina-Elizade, M. (2006). Global Temperature Change. PNAS 103: 14288-14293.
- Kautsar, M (2022). "Banjir, Perubahan Iklim dan Jerit Para Petani di Malaysia," Sariagri.com, 28 Januari 2022, <https://pertanian.sariagri.id/87299/banjir-perubahan-iklim-dan-jerit-para-petani-di-malaysia> (diunduh 5 Desember 2022)
- Kusuma, Nazalea (2022). "Mengembangkan Urban Farming Berkelanjutan di Singapura", Greennetwork.id, 26 Agustus 2022, <https://greennetwork.id/unggulan/mengembangkan-urban-farming-berkelanjutan-di-singapura/> (diunduh 7 Desember 2022)
- Latiff, Rozanna (2021). "Usai Banjir, Malaysia Siapkan Rencana Beradaptasi dengan Perubahan Iklim", kontan.co.id, 27 Desember 2021, <https://insight.kontan.co.id/news/usai-banjir-malaysia-siapkan-rencana-beradaptasi-dengan-perubahan-iklim> (diunduh 6 Desember 2022)
- Naylor, R.L., D.S. Battisti., D.J. Vimont, W.P. Falcon, dan M.B. Burke (2007). Assessing Risk of Climate Variability and Climate Change for Indonesian Rice Agriculture. Proceeding of the National Academic of Science 114: 7752-7757, 7 <https://doi.org/10.1073/pnas.0701825104> (diunduh pada 5 Desember 2022)
- Ratag, M.A. (2001). Model Iklim Global dan Area Terbatas serta Aplikasinya di Indonesia. Paper disampaikan pada Seminar Sehari Peningkatan Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim. Bogor, 1 November 2001.
- Rosa, Nikita (2022). "Peta ASEAN Lengkap dengan Letak Geografis dan Astronomis", Detik.com, 26 Agustus 2022, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6254665/peta-asean-lengkap-dengan-letak-geografis-dan-astronomis> (diunduh pada 5 Desember 2022)
- Subagyono, K., Elza S., Woro E., Erni S. (2022). Strengthening Agricultural Resilience Against Climate through Climate Smart Agriculture (article: Causes of Climate Change and Its Impacts on Agriculture). The Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/17790/Buku%20MACS%20g20_compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y (diunduh pada 5 Desember 2022)
- Timmerman, A.J. Oberhuber, A. Bacher, M. Esch, M. Latif, and E. Roeckner (1999). Increased El Nino Frequency in a Climate Model Forced by Future Greenhouse Warming. Nature 398.

LADY HAFIDATY RAHMA KAUTSAR adalah alumni Jurusan Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, yang mendapatkan gelar Magister Sains pada tahun 2018. Pada tahun 2014 beliau meraih juara ketiga Mahasiswa Berprestasi FMIPA UI yang diadakan BEM FMIPA UI. Ia pernah bekerja di Lembaga Manajemen FEB UI (2015), *Climate Development Knowledge Network* (CDKN) (2016), LPEM FEB UI (2016-2018), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020) dan kini bekerja sebagai peneliti (PNS) di BBSDL, Kementerian Pertanian. Beberapa judul penelitiannya antara lain "Persebaran Daerah Rawan Longsor di Bojonegoro dengan Menggunakan Metode Overlay" (2018), "Menuju Perbaikan Rencana Pembangunan Ruang Indonesia" (2018), "Deforestation and the Sumatera Elephant Explore Area in Aceh Timur Regency" (2019), "Mangrove Ecosystem as A Blue Carbon Asset" (2019). Tulisannya juga dimuat di buku *Waste Management in Indonesia: Management of Organic Waste, Plastic Waste, Hazardous and Toxic Waste, Electronic Waste* di Amazon.com (2020) dan *Pemetaan Perubahan Lahan Sawah Provinsi Bali Menggunakan Citra Sentinel-2 Tahun 2018-2020* (2021). Lady dapat dihubungi pada email lhrkautsar@gmail.com.

Penguatan Cadangan Pangan Regional Melalui APTERR

Munawar Khalil N.

Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 yang dimulai dari Tiongkok hingga merambah seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pagebluk ini mengakibatkan bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi. Laporan Kompas (2023) memaparkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara di kawasan ini berkontraksi negatif. Hanya sedikit negara yang mengalami penurunan namun tidak sampai negatif yaitu Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos. Sementara di luar empat negara tersebut, pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN lainnya anjlok ke posisi di bawah nol persen, termasuk Indonesia.

Pelambatan ekonomi tersebut juga berdampak pada ketahanan pangan. Terjadi disrupsi rantai pasok akibat pemberlakuan *lockdown*. Banyak negara juga membatasi ekspor produk pangannya untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Dikutip dari koran-jakarta.com (13/09/2022) India yang merupakan negara pengekspor beras yang menyumbang 40 persen distribusi beras global membatasi ekspor berasnya sehingga memicu lonjakan harga beras hingga 5 persen di Asia yang juga berdampak ke Thailand dan Vietnam sebagai produsen beras.

Meletusnya perang Rusia – Ukraina pada awal tahun 2022 juga berdampak pada kenaikan harga pangan global. Diketahui, dua negara di kawasan Eropa tersebut merupakan 10 besar produsen gandum dunia dan menyumbang hampir 30 persen perdagangan gandum global. Perang berkepanjangan hingga saat ini berdampak pada terganggunya pasokan gandum di mana ASEAN menyumbang 15 persen impor gandum global, dan mayoritas diimpor dari Ukraina. Adapun Indonesia dan Filipina merupakan impotir gandum terbesar di kawasan ASEAN.

Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari berbagai bencana alam. Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin topan di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar telah menelan korban hingga ratusan ribu jiwa dan berdampak serius terhadap ketahanan pangan. Karena infrastruktur pertanian mengalami kerusakan, pada saat yang sama korban terdampak bencana harus memenuhi kebutuhan pangannya.

Dinamika dan tantangan global maupun regional tersebut menuntut komitmen setiap negara anggota ASEAN untuk saling bergandengan tangan dalam membangun ketahanan pangan bersama. Ancaman kelaparan dan meningkatnya kemiskinan sebagai dampak dari berbagai tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, bencana alam hingga perang. Ini harus disuarakan oleh ASEAN sebagai bagian dari solidaritas bersama. Salah satunya melalui kerangka kerja sama ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve atau Cadangan Beras Asean Plus Three (APTERR) dalam upaya menjaga ketahanan pangan lebih khususnya cadangan pangan regional. Menurut Hermanto (2014) cadangan pangan regional adalah cadangan pangan yang dikelola oleh suatu otoritas yang kompeten yang telah diberi mandat oleh sekelompok negara dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu, yang biasanya merupakan kerja sama antara lembaga pengelola cadangan pangan di masing-masing negara anggota.

APTERR, Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan Regional

Perjanjian APTERR ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN Plus Three pada Pertemuan ke-11 ASEAN Minister on Agriculture and Forestry Plus Three (AMAF+ 3) pada tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia. ASEAN bersama tiga negara Asia lainnya yaitu Jepang, Korea, dan Tiongkok. Tujuan utama dari APTERR adalah untuk memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan kekurangan gizi di antara negara anggota tanpa mendistorsi perdagangan normal.

Cadangan beras APTERR terdiri dari dua bentuk yang ditujukan untuk bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan lainnya, yaitu (1) cadangan yang disisihkan (*earmarked*) yang merupakan komitmen alokasi cadangan beras masing-masing anggota untuk memenuhi kebutuhan darurat negara anggota APTERR; dan (2) cadangan beras fisik (*stockpiled*) merupakan dana atau beras yang secara sukarela disumbangkan kepada APTERR untuk kebutuhan negara anggota (Apterr 2012).

Dikutip dari apterr.org jumlah cadangan beras ASEAN dalam bentuk *Earmarked Rice Stock* sebanyak 787.000 ton dengan rincian Thailand 15.000 ton, Vietnam dan Myanmar masing-masing 14.000 ton, Indonesia dan Filipina masing-masing 12.000 ton, Malaysia 6.000 ton, Singapura 5.000 ton, serta Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos masing-masing 3.000 ton. Sedangkan cadangan beras dari tiga negara Plus Three masing-masing Tiongkok 300.000 ton, Jepang 250.000 ton, dan Korea Selatan 150.000 ton.

Dalam konteks ketahanan pangan khususnya pemenuhan kebutuhan beras sebagai komoditas pangan yang paling banyak dikonsumsi, negara-negara anggota ASEAN dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Singapura dan Brunei Darussalam dimasukkan sebagai negara dengan kondisi ketahanan pangan paling kuat. Disusul Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam berada di kategori kedua tingkat ketahanan pangan. Sementara itu pada kategori ketiga yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar memiliki tingkat ketahanan pangan rendah (Purwanti A.2022). Bantuan yang diambil dari cadangan beras di APTERR banyak disalurkan ke negara-negara di kluster ketiga sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Jumlah bantuan APTERR tier 3 (*Stockpiled*)

Tahun	Program	Negara Pengirim	Negara Penerima	Jumlah (Ton)
2013	Program rehabilitasi korban Topan Pablo	Jepang	Filipina	230
2013	Kekeringan dan Banjir	Jepang	Laos	400
2014	Reaksi Darurat terhadap Topan Haiyan	Tiongkok	Filipina	800
		Thailand		5.000
		Malaysia		350
		Jepang		580
2015	Cadangan beras tersimpan	Jepang	Kamboja	210
			Filipina	240
2016	Cadangan beras tersimpan	Jepang	Filipina	225
			Laos	225
2017	Program rehabilitasi untuk korban Topan Ketsana	Laos	Myanmar	500
			Kamboja	250
2017	Cadangan beras tersimpan	Jepang	Myanmar	500
2020	Banjir, Kemarau dan Covid 19	Jepang	Kamboja	300
		Jepang	Myanmar	884
			Filipina	400
		Korea	Myanmar	600
	Konflik	Jepang	Myanmar	300
	Gunung meletus	Jepang	Filipin	425
	Gempa bumi	Korea	Filipina	600
	Angin Topan	Korea	Filipina	1.350

Tahun	Program	Negara Pengirim	Negara Penerima	Jumlah (Ton)
2021	Topan	Jepang	Filipina	300
	Banjir dan Longsor	Jepang	Laos	300
		Korea	Laos	700
	Covid-19	Korea	Kamboja	300
2023	Banjir dan Covid-19	Jepang	Kamboja	300
	Pengentasan kemiskinan	Jepang	Myanmar	300
	Banjir dan Tanah Longsor	Jepang	Laos	300
			Filipina	320
		Korea	Laos	700
		Filipina	400	
		Myanmar	600	

Sumber: Sekretariat APTERR

Kuantitas bantuan beras tersebut memang relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi total beras di ASEAN yang diperkirakan mencapai 196 juta ton (AFSIS 2022), namun dari segi kepentingan regional ini bisa mempererat hubungan antarnegara ASEAN Plus Three, dan membangun integrasi komunitas regional yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjunjung hak asasi manusia dan identitas bersama sebagaimana dicita-citakan dalam Visi ASEAN 2025.

ASEAN 2023 dan Signifikansi Indonesia

Setelah sukses dengan presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia kembali dipercaya dunia internasional untuk memegang keketuaan ASEAN 2023 yang berlangsung sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Hal ini menjadi momentum penting dan strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia dengan *population share* 40 % di ASEAN sebagai pemimpin dan mengorkestrasi kebangkitan bersama serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ini sesuai dengan visi keketuaan ASEAN Indonesia 2023 diarahkan untuk membangun ASEAN yang mampu berketahanan, adaptif, dan inklusif.

Keketuaan ASEAN mengusung tiga pilar penting yaitu *ASEAN Matters* di mana ASEAN harus bermakna untuk secara bersama-sama mewujudkan Visi Besar ASEAN 2045. Kedua, *Epicentrum of Growth*, memaksimalkan posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia, dan Ketiga, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, memperkuat kerja sama nyata di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang Asia Pasifik.

APTERR Sebagai bagian dari implementasi kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan regional yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam rencana kerja ASEAN Plus Three 2023-2027, salah satunya disepakati komitmen untuk memastikan ketahanan pangan di kawasan, khususnya pada periode pasca-pandemi, termasuk melalui implementasi perjanjian APTERR secara penuh dan efektif. Dalam kaitan tersebut, penting bagi Indonesia untuk menjawab beberapa tantangan dalam implementasi kerangka kerja sama dalam konteks cadangan pangan regional melalui mekanisme APTERR.

Pertama, kebijakan pangan khususnya beras tidaklah sama di negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan pangan di beberapa negara dengan produksi beras yang besar seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam berbeda dengan kebijakan ketahanan pangan di negara minus produksi beras seperti Singapura. Karena itu, alokasi cadangan beras untuk APTERR harus diatur melalui kesepakatan yang diterima semua negara anggota. Kerja sama ASEAN dalam konteks cadangan pangan bukanlah hal baru. Pada 1979 kerja sama pertama dibuat melalui *ASEAN Food Security Reserve* (ASFR) untuk

mengurangi dampak bencana alam terhadap ketahanan pangan. Namun karena dianggap belum optimal, maka kemudian berkembang menjadi kerja sama dengan tiga negara di wilayah Asia Timur yang kemudian melahirkan perjanjian kerja sama APTERR pada 2011. Keketuaan ASEAN harus menjawab tantangan ini sehingga mampu menghasilkan kebijakan dan mekanisme yang menguatkan komitmen setiap negara untuk menjaga ketahanan pangan di kawasan.

Kedua, mengingat tujuan pembentukan APTERR adalah memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan kekurangan gizi di antara negara anggota tanpa mendistorsi perdagangan normal, perlu membangun *early warning system* pada skala regional ASEAN, sehingga setiap negara mampu mengetahui secara cepat kondisi ketahanan pangan negaranya maupun negara anggota lainnya serta mempersiapkan antisipasinya, termasuk respon cepat dalam pengiriman bantuan beras APTERR. Hal ini sebetulnya sudah diupayakan melalui ASEAN Food Security Information System (AFSIS). Namun Keketuaan Indonesia dituntut untuk lebih kuat mendorong penguatan cakupan data sesuai tujuan dibentuknya APTERR. Data tersebut antara lain mencakup volatilitas harga pangan, ketersediaan produk pangan, situasi konsumsi pangan, dan status gizi masyarakat. Ini tentu berkonsekuensi pada dukungan teknologi dan alokasi anggaran yang memadai.

Ketiga, perlu memikirkan ulang terkait komoditas pangan alternatif selain beras yang potensial menjadi komoditas untuk bantuan pangan regional. Meskipun pada umumnya anggota ASEAN merupakan negara pengonsumsi beras, namun kawasan Asia Tenggara dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk di dalamnya keanekaragaman pangan sumber karbohidrat. Selain beras, terdapat beberapa komoditas pertanian utama yang diproduksi di kawasan ASEAN, yaitu jagung, tebu, kedelai, singkong, dan minyak sawit (AFSIS,2022). Sebagai contoh, total ketersediaan singkong tahun 2023 mencapai 97,4 juta ton, sedangkan konsumsi per tahun mencapai 48,4 juta ton. Artinya masih ada surplus mencapai 49 juta ton. Apabila dikelola dengan baik, surplus komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan cadangan pangan. *

Referensi

- Gianie. 2023 *Analisis Litbang Kompas: Mengakselerasi Perekonomian Negara-Negara Anggota ASEAN*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/31/analisis-litbang-kompas-mengakselerasi-perekonomian-negara-negara-asean> (diakses 16 Mei 2023)
- Purwanti, A. 2022. ASEAN Vision 2025: The Implementation of Cooperation on Food Security. *Global Focus* Vol. 2 No. 1 Pp 27-46.
- Fika Nurul Ulya. 2022 <https://money.kompas.com/read/2022/03/02/160300526/terimbas-perang-rusia-ukraina-harga-gandum-dunia-melonjak-ke-level-tertinggi?page=all>
- Amanda Kusumawardhani. 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220307/620/1507439/perang-rusia-ukraina-memanas-harga-gandum-meroket-jadi-us1294>
- Grain Central. 2019 <https://www.graincentral.com/markets/south-east-asia-becomes-biggest-world-wheat-market-usda/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. ASEANpedia2023. <https://linktr.ee/aseanpedia>
- Hermanto. 2014 Peran Cadangan Beras Darurat di Kawasan Asia Tenggara. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 32 No. 1, Juli 2014: 73 – 85
- APTERR 2012. Link: <https://www.apterr.org/how-we-work/apterr-stockpiles>
- ASEAN Secretariat Information Paper. 2023. Overview of ASEAN Plus Three Cooperation, link: <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/Overview-of-APT-Cooperation-5-May-2023-1.pdf>
- ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2023 – 2027. Link: <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/APT-Cooperation-Work-Plan-2023-2027.pdf>
- AFSIS. 2022. Global Food Crisis and Food Insecurity. Link: <https://aptfsis.org/publication>
- AFSIS 2022.a. AFSIS Annual Report 2022 and Future Work Plan_3. Link: <https://aptfsis.org/publication>
- AFSIS.2022.b. ASEAN Agricultural Commodity Outlook 29 Link: <https://aptfsis.org/publication>

MUNAWAR KHALIL N. bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Badan Pangan Nasional. Ia menulis beberapa artikel terkait ketahanan pangan di beberapa media. Tulisannya juga dimuat dalam buku *Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan* (2019) dan *Menggapai Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern* (2021). Pada Tahun 2022, ia juga turut serta sebagai kontributor dalam dua buku yang diterbitkan Perpusnas Press yaitu *G20 Recover Together Recover Stronger* dan *Sehimpun Mutiara Literasi*. Ia dapat dihubungi melalui Instagram: munawar_khalil_n atau email: khalilmunawar888@gmail.com

Bagian Kedua
ASEAN Episentrum
Pertumbuhan Global:
Penguatan Ekonomi Regional yang
Cepat, Inklusif dan Berkelanjutan

BAB 6

ASEAN sebagai “Episentrum Pertumbuhan”: Penguatan Ekonomi Regional yang Fast-Growing, Inklusif dan Berkelanjutan

Kawasan ASEAN, Subjek atau Objek Pertumbuhan Dunia?

Taufiq Amrullah

Apa yang kita pikirkan bila mendengar kata ASEAN? Sebuah imajinasi organisasi lama seremoni perkumpulan negara-negara, atau ekosistem kolaborasi kawasan Asia Tenggara yang sedang tumbuh bergeliat?

ASEAN sejatinya suatu kolaborasi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dapat berperan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia. Bergantung kesepakatan dan sinergi antar pemimpin di kawasan ini untuk bertumbuh bersama, membangun ekosistem kawasan yang kondusif dalam segala dimensi.

ASEAN dapat membangun tujuan bersama menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan progresif, bahkan dapat membangun sistem ekonomi intra kawasan. Dengan begitu, ASEAN tidak lagi menjadi konsumen ekonomi dunia dan objek pasar, tetapi menjadi produsen dan player penentu kemajuan ekonomi dunia.

Saat ini ASEAN masih menghadapi tantangan besar akibat dampak dari perekonomian global terjadi efek gelombang pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi masih tinggi, demikian pula suku bunga perbankan, ditambah lagi adanya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Selain tantangan ekonomi, ASEAN juga menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan kawasan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara simultan.

Pengaruh persaingan dominasi kekuatan negara superpower seperti Amerika Serikat dan China di kawasan seperti di Laut Natuna Utara (diklaim sebagai Laut China Selatan) bisa memicu rasa tidak aman dan menyebabkan ASEAN sebagai battle zone yang sangat membahayakan.

Kawasan ASEAN sesungguhnya memiliki peran strategis yang dapat diorkestrasi menjadi kekuatan dunia. Selain kekuatan ekonomi dan pertahanan keamanan, kekuatan sumber daya alam, sosial budaya, dan besarnya jumlah penduduk dapat memberi dampak positif bagi keseimbangan dan perkembangan ASEAN lebih progresif dan dinamis. ASEAN perlu mendorong terjadinya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dalam berbagai sektor.

Data dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI, menyebutkan bahwa, kekuatan ekonomi ASEAN masih akan terus berkembang. Akumulasi Produk domestik bruto (PDB) ASEAN berpotensi mencapai US\$ 20 triliun atau setara Rp 314.000 triliun (dengan kurs Rp 15.700).

Perekonomian ASEAN menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 4 - 5%. Kawasan ASEAN merupakan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, eksportir terbesar ke-4, dan pada 2022 lalu bahkan menjadi tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar ke-2 di dunia.

Perekonomian ASEAN mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital, terus mengalami peningkatan investasi, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5%.

Selanjutnya ekonomi ASEAN ini akan berkolaborasi dalam ekonomi digital dan pengembangan kerjasama ekonomi sektor swasta, tidak hanya sektor publik. Demikian visi pemerintah RI untuk skala ASEAN. Di tengah pertumbuhan ekonomi ASEAN yang signifikan menopang ekonomi dunia, Indonesia mempunyai tantangan untuk membangun kemandirian ekonomi domestik. Hingga kini Indonesia masih sangat bergantung dari impor pangan dunia.

Dalam 11 tahun terakhir, Indonesia telah mengimpor senilai US\$84,8 miliar atau setara Rp1,272 triliun enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako yaitu beras, susu, bawang, garam, daging dan gula dari pasar internasional. Ini sungguh ironi bila disandingkan dengan sejumlah data betapa Indonesia adalah negara agraris yang tanahnya subur dan luas.

Indonesia adalah negara ke 14 untuk luas daratan (1,811,569 km), negara dengan panjang garis pantai ketiga atas dunia (54,716 km), sebanyak 53% penduduknya adalah usia produktif, buruh tersedia dan UMR murah, musim yang aman dari cuaca ekstrim. Namun, berbagai potensi alam dan manusia itu masih gagal dimanfaatkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakatnya.

Tantangan ini harus dijawab Indonesia dengan memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan pangannya. Program Food estate atau lumbung pangan nasional belum memberikan dampak positif bagi kemandirian pangan Indonesia. Ke depan, dengan kebijakan pemerintahan yang baru pasca pemilu 2024, Indonesia harus mampu menjawab tantangan, bahkan menjadi lokomotif ASEAN dalam percaturan dunia.

Kolaborasi kawasan telah menjadi tren. Kolaborasi Uni Eropa, kolaborasi kawasan Afrika, kawasan Timur Tengah, dan kawasan Amerika Selatan, semua ingin membangun kekuatan kelompok di kawasan masing-masing. ASEAN sebagai kawasan penting harus mengambil langkah progresif, bukan hanya mendorong stabilitas dan keseimbangan kawasan semata. Tetapi berupaya membangun sinergi, menciptakan ekosistem dan kolaborasi yang kuat untuk terus bertumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia. Semoga yang terbaik untuk ASEAN.*

TAUFIQ AMRULLAH adalah Direktur Progress Indonesia, konsultan strategi dan kebijakan publik. Putra Bugis-Maspul kelahiran Enrekang Sulawesi Selatan. Alumni Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE Universitas Indonesia, dan S1 Universitas Hasanuddin Makassar. Berpengalaman dalam berbagai konsultasi dan pekerjaan profesional. Tenaga Ahli dan konsultan di DPR RI dan DPD RI, konsultan dan mitra Kemenko Ekonomi, KemenKopUKM, Kemenpora dan lainnya. Mantan Ketua Umum PP KAMMI dan Alumni International Visitor Leader Program (IVLP) di AS, dan Studi banding Politik dan Budaya di Eropa. Ia menulis buku *Menuju Muslim Negarawan, Pesan Kehidupan Ayah*, dan berbagai artikel dan berpartisipasi dalam berbagai kolaborasi penulisan.

Mencukupi Kebutuhan Pangan Negara ASEAN: Peluang dan Tantangan

Apriliana

ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Negara-negara anggota ASEAN telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Gabungan total produk domestik bruto (PDB) dari 10 negara anggota ASEAN menjadi dua kali lipat antara tahun 2008 dan 2019, dan total gabungan PDB ASEAN 2019 bernilai US\$3,2 triliun – menjadikan ASEAN sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia. Indikator sosial ekonomi dan kesehatan lainnya juga menunjukkan peningkatan: angka kematian balita di ASEAN menurun dari 47,9 pada tahun 2000 menjadi 27,7 pada tahun 2018; dan total harapan hidup meningkat dari sekitar 65 pada tahun 2000 menjadi 69,4 pada tahun 2019.

Selanjutnya, proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurun antara tahun 2005 dan 2018 di seluruh anggota ASEAN terutama di Kamboja, Thailand dan Republik Demokratik Rakyat Laos, dimana kemiskinan menurun masing-masing sebesar 19%, 17% dan 15%. Indonesia menghadapi tantangan penting sebagai Ketua ASEAN dalam menyongsong Visi Pasca 2025.

Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitik beratkan pada penanganan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan. Prioritas ekonomi yang diusung Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 akan fokus pada 3 (tiga) hal utama sebagai berikut:

1. Membangun pertumbuhan regional, konektivitas dan keunggulan baru yang dilakukan melalui fasilitasi sektor jasa, ketahanan sektor keuangan, ketahanan pangan sebagai antisipasi krisis serta optimalisasi perdagangan dan investasi;
2. Percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penguatan kerja sama kelancaran konektivitas digital, pembayaran dan keuangan digital, dan memberikan keamanan pertukaran data digital lintas batas, serta mendukung rantai pasok logistik;
3. Mendorong pembangunan infrastruktur hijau, mempercepat implementasi SDGs, dan meningkatkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih tangguh.

Beberapa gagasan prioritas yang akan diusung Indonesia yaitu penguatan ketahanan pangan yang komprehensif mencakup produksi, fasilitasi dan pembiayaan; keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan; perluasan kerja sama *Local Currency Settlement* sebagai landasan integrasi keuangan berbasis digital; dan pemanfaatan potensi ekonomi digital kawasan melalui percepatan negosiasi ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Selain itu *blue economy* juga akan diusulkan sebagai prioritas mempertimbangkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.

Mencukupi Kebutuhan Pangan Negara-negara ASEAN

Saat ini terdapat tiga kekuatan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik yaitu China, India dan ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus memastikan bahwa ASEAN berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan besar yang ada. Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berupaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia melalui penguatan komunitas ASEAN, pemberdayaan masyarakat, dan memainkan peranan penting kawasan regional dan global khususnya di Indo-Pasifik. Namun, permasalahan mendasar yang mesti dihadapi semua negara termasuk di ASEAN sesudah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan disrupsi pada *supply, demand* dan rantai pasok ditambah perang Ukraina-Rusia dan tensi di Laut China Selatan adalah persoalan pangan.

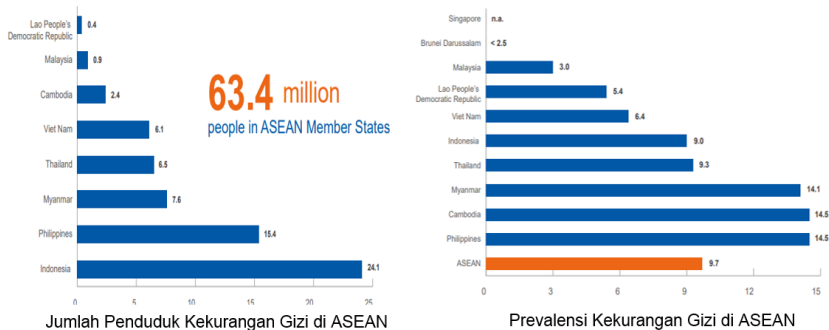
Sebenarnya, kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan sudah dimulai sejak tahun 1968 dengan kerja sama dalam produksi dan pasokan pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan, Pada tahun 1977, ruang lingkup kerja sama diperluas pada tahun 1977 untuk mencakup bidang pertanian dan kehutanan yang lebih luas. karena kebutuhan telah meningkat. Saat ini, bidang khusus di bawah kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan meliputi ketahanan pangan, keamanan pangan, makanan halal, tanaman pangan, peternakan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, koperasi pertanian, dan kerja sama bersama dalam skema promosi produk pertanian dan kehutanan.

Rencana Strategis Kerja Sama ASEAN dalam Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2016-2025 mendefinisikan visi dan tujuan untuk sektor pangan, pertanian, dan kehutanan. Hal ini dirumuskan dalam konteks global dan regional dan sebagai respons terhadap perubahan sosio-ekonomi dan demografis yang didorong oleh tiga pendorong utama: pertumbuhan ekonomi yang cepat, integrasi regional dan globalisasi, dan tekanan pada basis sumber daya alam termasuk perubahan iklim. Visi Kerja Sama ASEAN di sektor pertanian dan pangan adalah untuk menciptakan "Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (*Food, Agriculture, and Forestry*) yang kompetitif, inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan ekonomi global, berdasarkan pasar tunggal dan basis produksi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi serta kemakmuran di Komunitas ASEAN." Enam tujuan telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Memastikan pertumbuhan yang adil, berkelanjutan dan inklusif;
2. Mengentaskan kemiskinan dan memberantas kelaparan;
3. Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan dan gizi yang lebih baik;
4. Memperdalam integrasi regional;
5. Meningkatkan akses ke pasar global;
6. Meningkatkan ketahanan terhadap, dan berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan lainnya.

Namun pertanyaannya, adakah visi dan tujuan tersebut telah tercapai, sebelum dan terutama sejak pandemi Covid-19 terjadi? Data dari ASEAN *Food and Nutrition Security Report 2021* Vol. 1 menunjukkan prevalensi kekurangan gizi global menurun antara tahun 2005 dan 2015, tetapi tetap stagnan antara 8,7 dan 8,9 sejak 2015, sementara prevalensi kurang gizi di ASEAN menurun lebih dari 20% pada tahun 2000 menjadi sekitar 10% pada tahun 2012 dan stagnan. ASEAN adalah rumah bagi 63,4 juta orang yang kekurangan gizi. Sebagian besarnya tinggal di Indonesia (24,1 juta) dan Filipina (15,4 juta).

Proporsi penduduk yang kurang gizi bervariasi di seluruh negara anggota. Namun, di tiga negara yaitu Kamboja, Myanmar dan Filipina, lebih dari 10% penduduknya tidak cukup mengonsumsi energi makanan untuk hidup hidup sehat. Di Indonesia dan Thailand, 9% kekurangan gizi. Prevalensi lebih rendah di Vietnam, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam, sementara tidak ada data untuk Singapura. Hal yang cukup ironis mengingat ASEAN digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini dan masa depan.



Di sisi lain harga pangan dunia terus mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak pandemi, perang, dan perubahan iklim. Di kawasan ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand—yang merupakan *food net exporter*, inflasi

harga pangan telah meningkat ke level tertinggi dalam satu dekade, sebagian didorong oleh kenaikan harga daging, ikan, dan makanan laut, yang sebagian besar diimpor.

Di Malaysia, harga ayam dalam negeri (46% dari total konsumsi daging), naik karena harga bahan baku impor yang lebih tinggi, serta kekurangan tenaga kerja di peternakan unggas. Di Thailand, harga daging melonjak lebih dari 10% pada paruh pertama tahun 2022. Di Thailand, kekurangan daging babi domestik disebabkan oleh wabah demam babi Afrika di awal tahun. Di Filipina dimana ketergantungan impor pangan tinggi, inflasi harga pangan terjadi sebesar 4% pada paruh pertama tahun 2022.

Faktor lokal, seperti kekurangan gula (karena kondisi cuaca yang tidak menguntungkan serta penundaan impor) juga memperparah masalah pasokan makanan. Di Singapura, kenaikan biaya transportasi (akibat kenaikan harga energi) dan kenaikan biaya upah juga berkontribusi terhadap inflasi harga makanan, terutama di restoran dan *food centers*. Di Laos dan Myanmar, inflasi harga pangan melonjak tinggi, terutama karena melonjaknya harga makanan impor. Depresiasi yang besar dari mata uang mereka telah memperparah kenaikan inflasi harga makanan.

Sebaliknya di Vietnam, yang memiliki ketergantungan relatif rendah pada makanan impor, inflasi harga makanan sebagian besar telah terkendali. Pasokan domestik tanaman dan ternak telah melimpah, karena cuaca yang baik dan panen yang baik. Namun, biaya produksi yang lebih tinggi dari kenaikan harga bahan baku, dapat membebani industri peternakan. Beberapa negara terbesar ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand segera melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi pangan sebagai berikut³⁴:

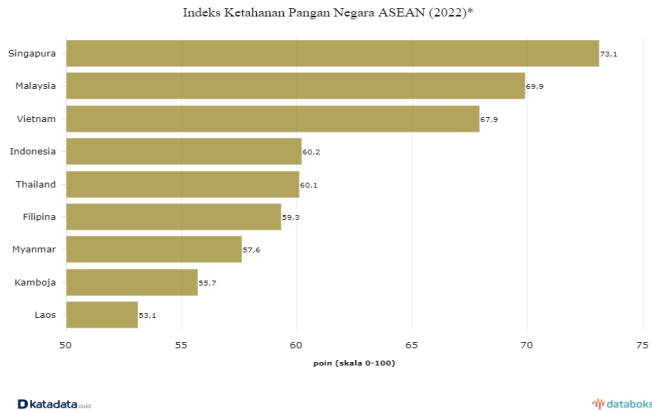
Economy	Policy Measure(s)
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> January–March 2022: Retail price caps for packaged cooking oil (IDR14,000 per liter for premium quality; IDR13,500 per liter for second-tier quality). March–April 2022: Increase in domestic market obligation (DMO), i.e., mandatory domestic sales of palm oil from 20 percent to 30 percent. Increase in palm oil export levy maximum rate from USD175 to USD375 per tonne. Price cap on bulk cooking oil (IDR14,000 per liter). April–May 2022: Ban on exports of crude palm oil and refined palm oil products. May 2022: Replacement of palm oil export ban with a 20 percent DMO and bulk cooking oil distribution program. July 2022: Government launch of new cooking oil product at subsidized price of IDR14,000 per liter. August 2022: Market operations to redistribute produce e.g., chili, onions, and eggs, from regions with excess to regions in need (part of Bank Indonesia’s National Movement for Food Inflation Control to help push food price inflation down to 5–6 percent by the end of 2022).
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> August 2021–June 2022: Price subsidies for bottled cooking oil. February 2022: Retail price ceilings for chicken and eggs (e.g., MYR8.90 per kilogram for standard whole chickens, increased to MYR9.40 per kilogram in July 2022; MYR0.43 each for Grade A chicken eggs, increased to MYR0.45 in July 2022). May 2022: Abolition of approved permits for some food imports (e.g., wheat, chicken, coconuts, and milk). June 2022: For some farmers, exports may resume from October after obtaining approval from local authorities. Ban on chicken exports (eased in mid-June, to allow the export of live “kampung” and black chickens). July 2022: Ban on exports of cooking oil in polybags. Retail price ceilings for bottled cooking oil.
The Philippines	<ul style="list-style-type: none"> June–December 2022: Tariff cuts on certain food imports e.g., rice, corn, and pork. August 2022: Government appeal to retailers to reduce the price of sugar to PHP70 per kilogram.
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> May 2022: Increase in import quota and reduction in import tariff rate for corn. June 2022–June 2023: Retention of price controls on essential goods including rice and sugar. Price monitoring of corn products to prevent a price surge.

Namun, apakah hal tersebut cukup? Tentu saja tidak, jika negara-negara ASEAN sebagai komunitas regional tidak saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangannya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial politik kawasan. *Global Food Security Index* (GFSI) 2022 negara ASEAN tampak pada gambar berikut³⁵. Indeks ketahanan pangan GFSI 2022 diukur berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi

34 https://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2022/09/AMRO-Analytical-Note_Feeding-Inflation-in-ASEAN3_The-Rising-Price-of-Food_14-September-2022_.pdf

35 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-tergolong-cukup-kuat-di-asean>

(*sustainability and adaptation*). Hasil penilaian seluruh indikator tersebut dinyatakan dalam skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, kondisi ketahanan pangan dinilai semakin baik.



Hanya tiga negara dari sembilan negara yang berhasil memiliki indeks ketahanan pangan di atas rata-rata indeks global sebesar 62,2 pada tahun 2022 yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di level 60,2, membaik dibanding dua tahun awal pandemi, tapi masih lebih rendah dibanding rata-rata global yang indeksnya 62,2, serta di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4. Singapura meraih skor sangat baik dalam hal *affordability*, yakni 93,2. Bukan hanya terbaik di ASEAN, skor ini juga menempatkan Singapura di peringkat ke-2 global dalam hal keterjangkauan harga pangan. Namun, Singapura mendapat skor buruk dalam indikator *sustainability and adaptation*, yakni 44,3. Angka ini bahkan lebih buruk dari Indonesia yang skor keberlanjutan dan adaptasinya 46,3.

Di indikator keberlanjutan dan adaptasi GFSI menilai kebijakan negara dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, pemeliharaan lingkungan, sampai manajemen kebencanaan yang dapat mempengaruhi keamanan pasokan pangan. Di indikator tersebut Indonesia dan Singapura sama-sama mendapat skor rendah karena pembiayaan mitigasi perubahan iklimnya dinilai masih kurang baik. Laju perubahan iklim tidak bisa ditahan tanpa adanya pengurangan emisi dari sektor pangan. Ketahanan pangan juga tak akan bisa terwujud tanpa adanya pencegahan perubahan iklim. Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama membangun sistem pangan yang kuat, yang dapat bertahan di tengah naiknya permintaan pangan, keterbatasan lahan, dan iklim yang memanas.

Kerja sama Kebijakan Regional ASEAN

Pertumbuhan ekonomi bisa memberikan dorongan substansial untuk ketahanan pangan, akan tetapi populasi termiskin seringkali tidak mendapat manfaat yang sama dari pertumbuhan itu. Memang, ketimpangan pendapatan telah meningkat di Asia selama 25 tahun terakhir. Di ASEAN, kelompok termiskin, berpendidikan paling rendah dan mereka yang berada di daerah pedesaan berbagi beban malnutrisi yang lebih besar dan mengonsumsi makanan berkualitas lebih rendah daripada golongan yang lebih kaya, berpendidikan lebih baik, dan perkotaan. Ketidakesetaraan, gizi buruk, kualitas makanan dan pendapatan juga terus terjadi di banyak negara anggota ASEAN sejak pandemi Covid-19. Mengakui dan mempromosikan kesetaraan harus menjadi komponen mendasar dari setiap rancangan kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi pada negara anggota ASEAN.

Alokasi sumber daya khususnya anggaran pemerintah negara anggota ASEAN harus menargetkan penduduk yang paling rentan atau sering terlewatkan dalam program ketahanan pangannya. Skema perlindungan sosial merupakan salah satu opsi kebijakan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan hambatan lain untuk kebutuhan pangan, misalnya dengan mensubsidi pendapatan rumah tangga dan meningkatkan akses ke layanan esensial.

Kebijakan pemenuhan pangan regional juga penting diarahkan pada perwujudan ketahanan pangan regional yang mencakup keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Pendekatan regional yang sistematis

dan berkesinambungan serta informasi kebijakan dan penetapan prioritas menjadi instrumental dalam pemenuhan kebutuhan pangan regional ASEAN. Semoga momentum ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia tidak menjadi paradoks dengan situasi ketahanan pangan negara-negara anggotanya. *

Referensi

https://asean.org/wp-content/uploads/2022/04/Digital_ASEAN_FNSR_Volume-1_21-4-2022_FINAL.pdf, diunduh pada 7 Desember 2022

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4691/ungkap-prioritas-ekonomi-yang-diusung-menko-airlangga-paparkan-kesiapan-indonesia-menjadi-ketua-asean-2023>, diakses pada 7 Desember 2022

<https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/>, diakses pada 7 Desember 2022

https://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2022/09/AMRO-Analytical-Note_Feeding-Inflation-in-ASEAN3_The-Rising-Price-of-Food_14-September-2022_.pdf, diunduh pada 7 Desember 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-tergolong-cukup-kuat-di-asean>, diakses pada 7 Desember 2022

APRILIANA adalah ASN yang sehari-hari bekerja sebagai Analis Kebijakan Madya dan Koordinator Pokja Perekonomian pada Biro Data dan Informasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Subbagian Keamanan Negara, dan Kepala Subbagian Program dan Anggaran di kantor yang sama. Berbagai produk kajian dan buku dengan topik yang menjadi perhatian Dewan Pertimbangan Presiden, baik tentang ekonomi, demokrasi, jaminan sosial hingga pengelolaan keamanan negara, menjadi bagian dari karya yang dihasilkan. Lulusan Program Pascasarjana SKSG Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta ini juga adalah penerima dua kali *Australian Awards Fellowship* di bidang reformasi birokrasi dan kebijakan strategis.

Menghadapi Resesi Ekonomi

Nurilah Hanum

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

--QS. Ar-Ra'd: 11

Pendahuluan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa tahun 2023 Indonesia mampu menjaga kestabilan pertumbuhan perekonomian meski ancaman resesi global terjadi. Tetapi, di sisi lain terjadi guncangan bertubi-tubi dan berkelanjutan seperti yang telah diprediksi IMF sebelumnya, ekonomi global akan gelap dan berisiko besar. Sebenarnya, krisis dan resesi itu dua hal yang berbeda. Jika resesi adalah perlambatan pertumbuhan perekonomian tetapi masih digolongkan sehat. Sedangkan krisis adalah keadaan perekonomian secara drastis dan sangat parah tidak dapat digolongkan sehat lagi.

Langkah yang harus dilakukan Indonesia agar mampu bertahan dan kuat menghadapi resesi adalah dengan merancang APBN. Mengalokasikan APBN secara tepat sasaran dan terstruktur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu menyetatkan APBN karena perekonomian akan terus-menerus mengalami fluktuasi dan ketidakpastian. Kita tidak dapat memprediksi kapan perekonomian akan mengalami kekuatan atau kelemahan. Untuk itu, perlu waspada dan mempersiapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Misal, adanya prediksi resesi 2023 yang akan terjadi tahun depan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua termasuk negara-negara ASEAN.

Pengertian resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi. Jangka waktunya berlangsung dalam beberapa bulan. Umumnya, penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga bulan lebih. Sedangkan krisis ekonomi adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis disuatu negara. Dengan kata lain, krisis ekonomi adalah kondisi ekonomi yang menurun lebih drastis dibandingkan dengan resesi ekonomi.

Apa yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia? Utang negara yang berlebihan, tingginya laju inflasi, dan macetnya perkembangan ekonomi. Dampaknya banyak perusahaan yang melakukan PHK pada karyawannya dan angka kemiskinanpun akan turut meningkat karena banyak orang yang tidak lagi mempunyai pendapatan.

Untuk mengantisipasi ekonomi global, kita perlu kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan masyarakat, kondisi perekonomian Indonesia mampu menahan laju inflasi dan melalui badai resesi di tahun 2023. Masyarakat diharapkan tidak panik untuk menarik dananya di bank-bank, tetap melakukan investasi dalam negeri guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor. Selain itu, menunda membeli barang impor dan mencintai produk domestik dan tidak membeli mata uang asing secara berlebihan karena akan berdampak meningkatkan inflasi.

Kita juga harus mempersiapkan dana darurat perlu dilakukan bersamaan dengan upaya pada dua hal lainnya. Upaya yang pertama yaitu mencari alternatif tambahan penghasilan selain dari gaji tetap seperti investasi yang cocok untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global adalah menggeser bobot dana investasi kita lebih banyak pada aset investasi yang tergolong aman. jenis investasi yang aman dilakukan yaitu deposito, emas, dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Cara di atas juga dapat dilakukan oleh negara-negara di ASEAN, mari peringgi kerja sama ekonomi di ASEAN.

Menghadapi Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi disuatu negara berlangsung secara negatif hingga pada angka dua kuartal berturut-turut. Kondisi ini umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh ketidakstabilan dari investasi,

pendapatan nasional, konsumsi, pengeluaran, hingga ekspor-impor. Pada kasus negara Indonesia, resesi mungkin saja terjadi ketika pertumbuhan di negara kita negatif. Apalagi sebab dampak dari Covid-19 masih sangat jelas dirasakan oleh kebanyakan masyarakat kita. Pendapatan nasional berkurang, hingga lebih banyak impor juga dapat menyebabkan resesi. Daya beli berkurang juga sangat dapat menyebabkan resesi terjadi di Indonesia.

Belakangan, prediksi mengenai tahun 2023 yang diwarnai dengan resesi global menjadi perbincangan. Prediksi ini berasal dari laporan International Monetary Fund (IMF) *Countering the Cost-of-Living Crisis* yang dirilis pada 11 Oktober 2022. Laporan tersebut memprediksi pertumbuhan global melambat dari 3,2 persen pada tahun 2022 menjadi 2,7 pada tahun 2023. Dilansir Tempo, sektor yang diprediksi paling terdampak adalah sektor keuangan dan sektor yang mengandalkan kegiatan ekspor. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prediksi tersebut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan. walau diprediksikan akan terjadi resesi ekonomi 2023, daripada ketakutan berlebihan, lebih baik kita bersiap.

Prediksi Resesi Global 2023, banyak lembaga internasional memprediksi potensi Indonesia mengalami krisis ekonomi di 2023 sangat rendah. Bahkan beberapa lembaga internasional memprediksi pusat ekonomi di 2023 ada di Asia, sedang sebagian besar kawasan lain menghadapi badai krisis. Prospek perekonomian secara global terus menurun akibat eskalasi risiko global seperti lonjakan inflasi, volatilitas harga komoditas, isu geopolitik, serta potensi resesi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, didukung konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Selain itu, secara keseluruhan kinerja APBN cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi.

Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai *shock absorber* agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan. Peran masyarakat dalam membantu penguatan perekonomian dan ketahanan ekonomi Indonesia sangat diharapkan. Inflasi diikuti oleh kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil bank sentral di negara lainnya.

Apa yang Harus Dipersiapkan?

Upaya yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi dengan adanya krisis ekonomi global dengan cara misalnya mengurangi utang negara, mencari pemasukan tambahan, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya secara berlanjut, tambah tabungan darurat, pisahkan dana tabungan, diversifikasikan investasi, lunasi utang, buat daftar anggaran pengeluaran, dan pertahankan jenis pekerjaan yang tetap dibutuhkan saat resesi.

Ketika krisis ekonomi secara global akan terjadi, sebaiknya kita harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, mempersiapkan dana cadangan agar tidak kesulitan ketika krisis datang, karena harga-harga bahan pokok akan naik secara massif dan kontinu. Kemudian membeli barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan tidak berlebihan, karena akan membuat boros dan keuangan membengkak. Tarik semua deposito yang ada, karena akan terkena pajak yang cukup besar dan alihkan dana keinvestasi seperti emas. Pastikan pekerjaan/usaha kita aman ketika kondisi krisis datang, yang membuat dapat di PHK atau tutup usaha (bangkrut).*

Referensi

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-0cXb8>

<https://insight.kontan.co.id/news/krisis-ekonomi-2023>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221017073308-17-380149/ekonom-top-dunia-sebut-krisis-2023-akan-lebih-nger-dari-2008>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221021084708-4-381485/pengakuan-sri-mulyani-krisis-2023-sangat-berat>

<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-10-25/separah-apa-risiko-resesi-2023-ini-peluang-cuan-investasi-menurut-budi-hikmat>

<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1226/ini-sektor-yang-untung-dan-rugi-apabila-terjadi-resesi-di-2023>

<https://www.merdeka.com/uang/imf-prediksi-ekonomi-dunia-gelap-di-2023-sri-mulyani-bukan-menakut-nakuti.html>

<https://emedia.dpr.go.id/article/ekonomi-2023-antara-optimistis-dan-realistis/>

NURILAH HANUM adalah guru dan dosen yang hobi menulis. Menjadi PNS di usia 22 tahun dan telah mengabdikan selama 30 tahun. Telah mendapat Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan sedang mengajukan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, Pernah menjadi guru teladan dan menjuarai lomba menulis puisi. Walau mengajar IPA terpadu dan sebagai Dosen Ekonomi Bisnis, namun punya kebiasaan menulis, beberapa tulisan yang sudah diterbitkan *Sabar dan syukur, Mengenal Fakta Sains untuk anak, Fakta unik tentang buah, Menjaga Pola makan, Kerjakan sesuatu bersama, dan kisah tentang Ibu, Ayo Semangat jangan menyerah/aku selalu mendengarkan penjelasan guru, merencanakan impian, suka duka menjadi guru terbitan Leguty Media*. Untuk korespondensi ia dapat melalui email: nurilahanum39@gmail.com.

Peranan ASEAN dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Suharti

Pendahuluan

ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok, 31 Juli 1967 melalui pembahasan dan perundingan-perundingan di tempat peristirahatan tepi pantai Bangsaan (Thailand) di Bangkok Thailand³⁶. Saat ini, keanggotaan ASEAN meliputi 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar, dan terakhir, Timor Leste dinyatakan sebagai negara anggota yang ke-11 (Kompas, 2022).

Dalam Piagam Bangkok tersebut termaktub berbagai visi besar seperti mengingat bahwa negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab pokok demi mantabnya stabilitas ekonomi dan sosial dari wilayah ini, dan demi terjaminnya perkembangan nasional masing-masing sesuai dengan cita-cita dan hasrat dari rakyat masing-masing. ASEAN ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan dari wilayah ini melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat persamaan, persekutuan, dan hidup di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara³⁷. ASEAN tidak hanya sebatas menjaga wilayah stabilitas kawasan, melainkan juga lebih dari itu, menjalankan integritas ekonomi serta dalam memperbaiki daya saing regional. ASEAN mendirikan sebuah kawasan bebas perdagangan bernama ASEAN Free Trade Area (AFTA)³⁸ melalui pengurangan tarif bertahap.

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab yang berawal dari wabah *pneumonia* di Kota Wuhan, Tiongkok pada Bulan Desember Tahun 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020 serta ke berbagai belahan dunia, wabah meluas ke-77 negara, termasuk di ASEAN, sehingga WHO menetapkan sebagai pandemi bulan Maret 2020, dari pencegahan hingga penelitian untuk mengatasi penularan akibat dari virus corona sudah dilakukan berbagai negara di dunia termasuk negara ASEAN, mulai dari pembatasan hingga pemberian vaksin³⁹.

-
- 36 Mereka yang hadir adalah Menteri Urusan Politik/ Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri / Malaysia (Tun Abdul Rozak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand, sehingga tercapai kesepakatan antara lima negara untuk memperluas ASA (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) menjadi ASEAN (H.M. Iwan Gayo, 2007).
 - 37 Semangat ASEAN juga adalah meningkatkan kerja sama secara aktif dan saling bantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Perkembangan pesat dari organisasi ASEAN menyebabkan perlu diangkat Sekretariat Jenderal yang mana pengangkatannya oleh Sidang Menteri ASEAN, secara bergilir menurut abjad, lama masa jabatan dua tahun, bertanggung jawab atas pelaksanaan semua fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan pada sidang Menteri ASEAN dan Komite Tetap, yang sekarang dikenal sebagai keketuaan, yang dijabat Indonesia tahun 2023.
 - 38 Perjanjian AFTA telah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kawasan Perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (ASEAN6) yang menandatangani Deklarasi Singapura pada 1992 secara luas telah berlaku sejak 2010. Empat negara anggota yang tergabung setelahnya yakni Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1995) diberikan masa transisi hingga 2015 untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Dengan berlakunya perjanjian AFTA secara menyeluruh, perdagangan dalam ASEAN telah bebas dari hambatan tarif.
 - 39 Penyebaran virus di lansir begitu cepat, jika tidak dilakukan pembatasan-pembatasan sosial manusia, agar penularannya tidak meluas diberbagai negara. Pengaruh pembatasan-pembatasan sosial tersebut berimbas ke kondisi perekonomian masyarakat dunia. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor Kesehatan, tetapi semua sektor. Salah satunya sektor ekonomi dan bisnis. Pertumbuhan ekonomi global dipastikan mengalami kelambatan, termasuk negara yang tergabung dalam ASEAN.

Beberapa negara yang bergabung dengan ASEAN harus mengalami resesi saat pandemi virus corona. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah di setiap negara yang mengharuskan masyarakat tidak membuat kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang menyebabkan proses perekonomian pun terhambat. Kebijakan tersebut dibuat agar penyebaran virus corona dapat teratasi dan pandemi cepat berakhir sehingga semua bisa melakukan aktivitas normal seperti dahulu (Azzahra, et. al, 2021).

Dampak negatif yang dirasakan pada bidang pertanian di beberapa negara di Asia Tenggara relatif sama, yakni terganggunya *supply chain* dan meningkatnya harga. Potensi terjadinya pengurangan karyawan (PHK) dikarenakan bahan baku berkurang yang menyebabkan produksi menurun (Hernawati et al, 2021). Hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja masa pandemi Covid-19 disebabkan karena menurunnya hasil penjualan produk sehingga sejumlah produsen menghentikan proses produksi (Indayani & Hartono, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian global termasuk ASEAN dengan mempengaruhi elemen-elemen penting baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari sisi pasokan, gangguan produksi terjadi karena penurunan Kesehatan tenaga kerja dan kematian dan terganggunya logistik akibat pembatasan-pembatasan mobilitas (karantina). Sementara dari sisi permintaan, gangguan terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian, kenaikan biaya dan penurunan pendapatan tenaga kerja yang secara simultan berpotensi mengurangi kemampuan daya beli, penutupan usaha, dan pemutusan hubungan kerja.

Dampak pandemi di ASEAN juga dapat dilihat dari penurunan beberapa indikator makroekonomi seperti kontraksi pada pertumbuhan PDB di hampir seluruh negara di kawasan, melemahnya kinerja perdagangan internasional, serta melemahnya tingkat kepercayaan konsumen. Di sektor moneter dan keuangan, pandemi juga menyebabkan kondisi pasar modal ekuitas di kawasan mengalami tekanan yang cukup besar dan terutama periode bulan Januari-Maret 2020. Sementara, tekanan sektor keuangan akibat aliran keluar modal asing juga menyebabkan tingkat yield obligasi pemerintah jangka pendek di beberapa negara di kawasan cenderung meningkat bulan Februari hingga Maret 2020 (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2020).

Peranan ASEAN dalam Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 menjadi isu global yang telah menimbulkan dampak yang besar hampir disegala bidang termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan, juga menimbulkan tekanan sosial ekonomi hampir diseluruh negara mengalami masalah dilematis antara menyelamatkan perekonomian negaranya atau keselamatan hidup warga negaranya. Namun, hal ini memberikan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang telah berdampak ke ASEAN, khususnya Indonesia. Negara kita pun harus menghadapi peningkatan jumlah pengangguran, kondisi kinerja yang menurun, aktivitas perekonomian yang melambat dan penyebaran virus yang masih terus meningkat (Chilman Arisman, 2020).

Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga saat mewakili Menteri Perdagangan RI pada pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam format retreat (AEM Retreat) ke-26 di Da Nang, Vietnam (10/3/2020) memaparkan bahwa kegiatan logistik, pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah virus corona. Jerry mengemukakan, hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan keluar negeri dan penutupan perbatasan bagi negara yang terjangkit virus tersebut. Sektor pariwisata ASEAN pun tak luput dari imbas kondisi di China mengingat 21,5 persen wisatawan mancanegara di kawasan ini berasal dari negara tersebut. Adapun tahun 2018, bisnis perjalanan berkontribusi sebesar 12,6 persen pada perekonomian ASEAN. Jerry menyatakan sebagai berikut:

“ASEAN perlu merespon dampak virus corona dengan selalu memperhatikan kondisi masyarakat. Saat ini, transparansi dan efektivitas menjadi penting untuk memastikan kepercayaan publik dan pelaku usaha. Indonesia dalam hal ini sebagai bagian dari ASEAN, mendorong upaya-upaya untuk meringankan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat, seperti mendorong upaya forum bertukar informasi penanganan virus corona dan mengkaji dampaknya terhadap perekonomian di kawasan ini (Kemendag, 2020).

Dampak bagi negara lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemerintah Singapura menyatakan negaranya mengalami defisit anggaran sebesar SGD 10,95 miliar atau 2,1% dari PDB. Sedangkan Malaysia, dampak virus corona memberi tekanan pada bidang ekspor dan melemahnya permintaan domestik, sehingga pertumbuhan PDB turun menjadi 4,0% dari 4,6% sebelumnya. Untuk meredakan perekonomian, Malaysia mengeluarkan paket stimulus fiskal sebesar MYR 20 miliar. Sedangkan Indonesia, melalui Bank Indonesia menurunkan cadangan USD (RRR) dari 8% menjadi 4%, serta menurunkan RRR sebesar poin (bps) untuk bank dengan klien yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor (Umar Tusin, 2020). Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang tadinya 0,4 di kuartal kedua pada tahun 2020, tahun lalu menjadi 2,6% di kuartal ketiga. Sehingga pertumbuhan rata-rata periode Januari sampai September adalah 2,1%. Pertumbuhan selama 2020 Vietnam menjadi 2,3% (Mona Shenny Ratna Amelia, 2021).

Dalam mengatasi dampak negatif Covid-19 bagi perekonomian, pemerintah negara-negara di ASEAN telah melakukan berbagai langkah kebijakan terkait moneter, fiskal, maupun keuangan yang ditujukan untuk menahan penyebaran virus, mendukung penyediaan dan memperkuat sistem perawatan kesehatan. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan dan permintaan, melindungi kelompok masyarakat dan perusahaan yang rentan dan mengalami gangguan pendapatan, serta membatasi gangguan rantai pasokan yang merugikan. Instrumen kebijakan stimulus fiskal berupa pemberian insentif perpajakan dan melalui belanja negara. Menargetkan kepada konsumen dan produsen yang menitikberatkan pada sektor yang terdampak langsung karena pelambatan ekonomi.

Sektor-sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan, UMKM, manufaktur dan pariwisata. Adapun tujuan dikeluarkan paket stimulus fiskal yakni untuk menghentikan dan mengatasi krisis kesehatan masyarakat dan stimulus untuk tujuan konsumsi (sisi permintaan). Selain itu, juga ada stimulus untuk tujuan produksi (sisi penawaran). Stimulus untuk tujuan konsumsi dan produksi pemberiannya bersifat tunai dan non-tunai pada sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pariwisata, manufaktur dan perdagangan retail tergantung pada seberapa besar sektor tersebut terdampak. Sedangkan stimulus produksi diarahkan untuk membantu UMKM yang terdampak.

Bentuk-bentuk kebijakan stimulus fiskal mencakup antara lain:

- o Pengalokasian dana untuk menghentikan dan mengatasi penyebaran virus
- o Pemberian bantuan tunai/non tunai dan subsidi bagi masyarakat rentan untuk mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli
- o Mengurangi beban perusahaan yang terdampak melalui pemberian insentif tunai berupa pengurangan dan penundaan pembayaran pajak, serta pembebasan biaya registrasi bisnis
- o Memberikan dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang terdampak
- o Pemberian insentif fiskal sementara untuk mendukung bisnis di sektor-sektor yang terkena penurunan tajam dalam perjalanan dan pariwisata seperti penerbangan, ritel, kuliner dan transportasi darat (Kemenkeu, 2020).

ASEAN Policy Brief 1 telah memberikan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota ASEAN, yakni menggerakkan semua piranti kebijakan makro, keuangan, dan struktural yang tersedia; mempertahankan kapasitas ekonomi produktif, memanfaatkan teknologi dan perdagangan digital, menjaga mata rantai pasokan tetap berjalan, memperkuat jaring pengaman dan juga meningkatkan respons terhadap pandemi Covid-19 di tingkat regional serta meningkatkan tekad memajukan integrasi regional. Sedangkan ASEAN Policy Brief 2 yang terbit Mei 2020, menunjukkan berbagai strategi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota ASEAN menghadapi dampak Covid-19 di bidang ekonomi⁴⁰.

Intervensi fiskal yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: *Pertama*, subsidi rumah tangga; *Kedua*, pembebasan atau moratorium, biaya, termasuk biaya sewa; *Ketiga*, moratorium atau

40 Tiga sektor besar yang dijadikan target kebijakan moneter dan fiskal yaitu industri penerbangan, kesehatan, dan pertanian. Bank sentral di negara-negara ASEAN telah menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga, dan pembelian aset sehingga mempertahankan stabilitas keuangan, pengurangan rasio cadangan, menjamin likuiditas dalam sistem, serta menurunkan biaya kredit. Penerapan stimulus fiskal yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas di sektor kesehatan serta meredakan dampak ekonomi yang lebih luas disektor yang paling terpukul, yaitu UMKM dan pariwisata.

restrukturisasi pinjaman bagi dunia usaha yang terkena dampak dari pandemi (Mona Shenny Ratna Amelia, 2021). Tiga negara ASEAN yang tergabung dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) menyatakan komitmen bersatu menghadapi dampak pandemi covid-19, dalam bentuk pemulihan ekonomi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi kolaborasi potensial ketiga negara dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan, dimana adanya ketergantungan akan interaksi perdagangan dan mobilitas antar negara (cnbc news, 2020).

Peraturan pembatasan sosial selama pandemi membuat masyarakat tak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian seperti sedia kala. Keterlibatan teknologi digital semakin meningkat, untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus memerlukan tatap muka langsung, dan *e-commerce* merupakan salah satunya. Penggunaan platform *e-commerce* pun kian populer di berbagai negara dalam rangka membangkitkan perekonomian global secara perlahan tapi pasti. Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, negara-negara ASEAN telah berencana melakukan integrasi digital untuk mendukung aktivitas perdagangan dalam kawasan tersebut sejak akhir tahun 2020.

Integrasi digital yang akan dilakukan berupa pertukaran data untuk memandu penyusunan kebijakan dan pelayanan publik, serta melalui penyediaan beragam solusi digital untuk tujuan membangun resiliensi dalam sektor ekonomi dimasa pandemi covid-19. Adanya integrasi digital di ASEAN diharapkan untuk mampu membantu memulihkan kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN dan meningkatkan GDP di tiap negara hingga USD 1 triliun pada tahun 2025 (Andriessa, Raevita, 2022).

Peranan ASEAN

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir, menilai integrasi ekonomi ASEAN dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Karenanya, ia mendorong untuk memperkuat komitmen dan kerja sama perdagangan bebas antarnegara ASEAN. Demikian ungkap Hafisz dalam Sidang Komisi Ekonomi dalam rangkaian sidang umum AIPA ke-42 yang diselenggarakan secara virtual dari Brunei Darussalam (24/8/2021):

“... Dari sisi ekonomi, kita melihat bahwa ASEAN merupakan satu region yang begitu besar, karena itu merupakan peran sentral penting untuk dimainkan. Salah satunya dengan membuat satu alur kerja ekonomi yang baik” (BKSAP,2021)

Terdapat tiga fungsi organisasi Internasional untuk melihat strategi ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan:

- o Pertama, ASEAN melakukan pertemuan untuk membahas terkait pandemi Covid-19 terutama dalam bidang ekonomi untuk melihat bagaimana respon tiap negara terhadap perekonomiannya dan kerja sama yang akan dilakukan sebagai upaya untuk menangani pandemi.
- o Kedua, ASEAN sebagai organisasi kawasan, melakukan fungsi operasional melalui kerja sama yang dilakukan setelah melakukan pertemuan antara anggota ASEAN ataupun negara mitra. Ini bertujuan untuk menjalankan kerja sama sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.
- o Ketiga, ASEAN menggunakan platform sebagai situs web sebagai respon yang diberikan selama pandemi untuk mengelola informasi seputar pandemi. Dengan situs web, ASEAN dapat terus menerus meng-*update* berita tentang Covid-19 terutama di bidang perekonomian (Anggraini, Meli, 2022).

Peranan ASEAN dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 semakin besar, setelah tahun 2021, berdasarkan PDB dari 10 negara ASEAN di tahun 2021 yang mencapai USD 3,36 triliun dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima didunia, capaian tersebut sejalan dengan visi ASEAN untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2030.

Sebagai upaya memperkuat perekonomian kawasan, ASEAN mengadakan kerja sama dengan Italia, sebagai mitra dagang sejak tahun 2017, dialog ekonomi digelar 5-6 Juli 2022 diselenggarakan oleh Associazione Itali ASEAN. Membahas kerja sama strategis pada transisi energi, ekonomi digital, revolusi industri, *smart manufacturing* dan perdagangan (Kementerian Koordinator bidang perekonomian RI, 2022).

Di Bali (30-31 Oktober 2022) telah diselenggarakan forum kerja sama KTT G20, forum multilateral yang dihadiri 19 negara utama antara lain Amerika Serikat, Jepang dan negara Uni Eropa, Indonesia (sebagai presidensi G20), merupakan kepercayaan besar dari negara-negara G20. Dengan bentuk kerja sama antara lain transisi digital, yang sejalan dengan kerja sama yang diusung ASEAN-AS, keketuaannya dipegang Indonesia. Hal ini menunjukkan sebagai bentuk bukti adanya pemulihan ekonomi, pasca pandemi di ASEAN.*

Referensi

- Gayo, H.M. Iwan (2007). *Buku Pintar Senior*. Jakarta: Pustaka Warga Negara.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/12/135000965/tambah-timor-leste-berikut-daftar-11-negara-anggota-asean> (diunduh 3 Desember 2022).
- <https://news.detik.com/berita/d6404404/keketuaan-asean-2023-tambah-daftar-peran-indonesia-di-kancah-dunia.2022> (diunduh 3 Desember 2022)
- Aulia Dewi, Azzahra, et. Al. (2021). "Pengaruh covid-19 terhadap perekonomian di negara ASEAN," Vol.5 No. 3, <http://ejournal.mandalanursa.org>, (diunduh 3 Desember 2022)
- Tusin, Umar. (2020). "Akibat corona, pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN semakin menantang," 17 Maret 2020, <http://Internasional.Kontan.co.id>, Jakarta. (diunduh 3 Desember 2022)
- Indayani & Hartono. (2020). "Pengaruh covid 19 terhadap perekonomian di negara ASEAN," 5 Juli 2021, <https://www.researchgate.net> (diunduh 3 Desember 2022)
- Arisman, Chilman. (2020). "dampak covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan secara psikologis di negara-negara ASEAN", 22 Jun 2020, <http://uma.ac.id> (diunduh 3 Desember 2022).
- Kemendag. (2020). "Hadapi Corona, Indonesia ajak negara ASEAN kaji dampak ekonomi ke kawasan," 11 maret 2020, <https://kemendag.go.id>. (diunduh 5 Desember 2022).
- Kemenkeu, pusat kebijakan regional dan bilateral.(2020). "Pandemi Covid 19 dan stimulus fiskal dinegara-negara ASEAN+3", <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian>. (diunduh 5 Desember 2022).
- Shenny, Mona Ratna Amelia. (2021). "Pengaruh pandemi covid-19 bagi perekonomian negara-negara di Asia Tenggara". 18 juni 2021. <https://kompasiana.com>, *kompasiana beyond blogging*, (diunduh 5 Desember 2022)
- cnbc news. (2020). "Tiga negara ASEAN bersatu hadapi dampak pandemi covid-19", 8 july 2020, <http://cnbcindonesia.com>, (diunduh 5 Desember 2022).
- Andriessa, Raevita. (2022). "Strategi pemulihan ekonomi berbagai negara semasa pandemi", 3 Mei 2022, <http://cwts.ugm.ac.id>. (diunduh 5 Desember 2022)
- BKSAP. (2021). "Integrasi ekonomi ASEAN bantu pemulihan Pasca Pandemi", 25 Agustus 2021. <http://dpr.go.id>, (diunduh 5 Desember 2022)
- Anggraini, Meli. (2022). "Strategi ASEAN dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di ASIA Tenggara" Universitas Andalas;Diploma thesis, <http://scholar.unand.ac.id> (diunduh 5 Desember 2022)
- Kementerian Koordinator bidang perekonomian RI. (2022). "Menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia, ASEAN eratkan kerja sama strategis dengan Italia", 7 Juli 2022, <https://ekon.go.id>, siaran pers; HM.4.6/355/SET.M.EKON.3/07/2022 (diunduh 5 Desember 2022).

SUHARTI adalah seorang guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan (sejak 2009-sekarang), dan aktif sebagai pengurus dan anggota di Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebuah perkumpulan para Guru Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas sejak 2016. Ia memulai menulis dengan menjadi kontributor naskah buku antologi *Guru dalam Jejak Pandemi* yang dikoordinir oleh Kumpulan Pengajar Penulis Jawa Barat tahu2020. Ia dapat dihubungi di email: suhartitiwanbta@gmail.com.

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pilar Kemajuan dan Kemakmuran Asia Tenggara

Junef Ismailiyanto

“Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.”

--Soekarno

MEA

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan kolaborasi dan integrasi sektor ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Tujuan yang disepakati adalah menciptakan pasar bersama dengan keluar masuk barang komoditi, jasa, tenaga kerja terlatih, investasi dan modal yang lebih bebas. Prioritas sektor integrasi untuk barang di antaranya produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, olahan karet, tekstil, otomotif dan produk kayu, sedangkan untuk jasa di antaranya: transportasi udara, pelayanan kesehatan, e-ASEAN, wisata dan logistik (Wangke H, 2014).

Integrasi ekonomi kawasan ini ingin mencapai daya saing yang meningkat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan kerja sama ekonomi, meningkatkan standar hidup dan meningkatkan pembangunan ekonomi kawasan. Selain stabilitas ekonomi, misi penting MEA ini juga menginginkan kehidupan berdampingan dalam ketentraman serta menciptakan perdamaian untuk seluruh negeri. Lebih lanjut capaian tujuan tersebut diharapkan dapat berdampak kepada terwujudnya kestabilan ekonomi dan kedamaian di kawasan.

MEA merupakan perwujudan tujuan integrasi ekonomi kawasan, di mana ASEAN merupakan pasar tunggal dan basis produk, dan capaian pembangunan ekonomi yang merata. Secara historis, ketika para pimpinan ASEAN menyepakati pembentukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 1992, sebagai implementasi dari visi ASEAN. Dalam perkembangannya, kemudian diperkuat dengan hasil dari Deklarasi ASEAN Concord II di Bali tahun 2003, yaitu salah satunya pembentukan komunitas ekonomi (AEC), yang akhirnya realisasinya dipercepat pada tahun 2015 (ASEAN, 2022).

Seiring perkembangan teknologi dan informasi: setiap orang dapat mengakses secara langsung segala informasi di penjuru dunia melalui *smartphone*, aktivitas ekonomi seperti jual beli barang dapat dilakukan dengan jangkauan yang luas, tanpa batas negara. Budaya baru ini menjadi relevan untuk mendorong bahwa integrasi dan kesatuan kawasan ini dapat diperkuat dengan kesatuan bersama masyarakat atau komunitas warga setiap negara kawasan. Dalam integrasi dan kolaborasi bersama negara-negara Asia Tenggara; MEA ini merupakan pergeseran; dari pendekatan negara ke negara kepada pendekatan antar komunitas atau masyarakat, oleh karena itu keterlibatan publik di seluruh kawasan akan dapat mempercepat tercapainya tujuan ASEAN, khususnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kawasan.

Blue Print AEC 2015 disepakati kemudian dilanjutkan dengan *Blue Print* AEC 2025. *Blue Print* AEC 2015 secara substantif telah dicapai, di antaranya dengan adanya penghapusan tarif dan retribusi perdagangan; memajukan agenda liberalisasi atau pasar bebas untuk perdagangan jasa dan memfasilitasi investasi; menyederhanakan regulasi dan platform pasar modal; memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil; mempromosikan pengembangan regional dalam kebijakan persaingan, perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual; mempromosikan konektivitas; mempersempit kesenjangan pembangunan; dan memperkuat hubungan ASEAN dengan pihak eksternalnya. Sedangkan *Blue Print* AEC 2025 mempunyai lima karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat, yaitu: (i) Ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif; (ii) ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; (iii) Peningkatan konektivitas dan

kerja sama sektoral; (iv) ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi rakyat, dan berpusat pada rakyat; dan (v) ASEAN Global (The ASEAN Secretariat, 2015).

Sebagai modal untuk mencapai tujuan di atas, kawasan ini memiliki sumber daya yang patut diperhitungkan, dari sisi sumber daya manusia; bila jumlah populasi di bumi saat ini (Desember 2022) tembus hingga 8 miliar (United Nation, 12/4/2022), maka kawasan ini menyumbang sekitar 677 juta jiwa atau sekitar 8% dari populasi bumi tersebut. Dari sisi kekayaan sumber daya alam; (seperti yang ditampilkan di Tabel 1) kawasan ini kaya akan minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lain seperti batubara, biji besi, emas, perak, tembaga, timah.

Alam yang tropis dengan tanah subur menghasilkan beragam hasil pertanian yang berlimpah seperti; kelapa sawit, karet, padi, dan rempah-rempah, teh, serta buah-buahan, hasil hutan seperti kayu dan produk olahannya, serta potensi sumber daya perikanan yang tidak sedikit karena sebagian besar negara Asia Tenggara ini merupakan negara maritim dengan sebagian besar wilayah laut yang dimilikinya.

Jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam ini menjadi modal dan sarana pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara dalam aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi baik antar negara dalam kawasan atau ke luar kawasan. Apalagi kawasan ini terhimpun dalam integrasi dan kolaborasi dalam ASEAN dan MEA menjadi sarana untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama serta menjadi kekuatan besar yang dapat bersaing secara global.

Tabel 1. Jumlah Populasi & Sumber Daya Alam ASEAN

NO	NEGARA	ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK (2022)	POTENSI SUMBER DAYA
1	Indonesia	275,773,800	Rempah-rempah, Kelapa Sawit, Batubara, Emas, Gas Alam
2	Filipina	113,102,314	Emas, Perak, Tembaga, Bijih Besi, Padi
3	Vietnam	99,452,599	Minyak Bumi, Gas Alam, Batubara
4	Thailand	70,222,561	Timbal, Padi dan Buah-buahan
5	Myanmar	55,294,979	Timah, Besi, Batu Permata
6	Malaysia	32,447,385	Timah, Karet, Kelapa Sawit, Minyak bumi & Gas Alam
7	Kamboja	16,718,965	Karet, Beras, Ikan, Sayur & Buah-buahan
8	Laos	7,338,000	Kayu Jati, Kayu Cendana
9	Singapura	5,850,342	Industri Elektronik, Sentra ekonomi & perdagangan
10	Timor Leste	1,318,445	Minyak Bumi dan Gas Alam
11	Brunei Darussalam	437,479	Minyak Bumi dan Gas Alam
	TOTAL	677,956,869	

Sumber: www.bps.go.id; www.un.org; www.worldometers.info; www.mycensus.gov.my; www.laosis.lsb.gov.la; www.commonwealthgovernance.org (data diolah).

Capaian yang sudah diraih ASEAN di antaranya keberadaan MEA yang mulai bergulir sejak 2003 menurut sekretariat ASEAN cukup membanggakan; paling tidak dalam 50 tahun terakhir, ASEAN telah mencapai kemajuan manusia dan pembangunan berkelanjutan, mengangkat jutaan nyawa dari kemiskinan dan meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan. Total PDB gabungan dari sepuluh negara ASEAN bernilai US\$3,2 triliun pada tahun 2019. Hal ini menempatkan ASEAN sebagai regional kawasan dengan ekonomi terbesar kelima di dunia (asean.org, 2021).

Tabel 2. GDP Per Kapita & Pertumbuhan tahunan (2019-2022)

Negara	GDP per capita (USD)				Economic Growth (GDP, annual variation in %)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
INDONESIA	4,194	3,922	4,291	4,691	5	-2.1	3.7	5.1
BRUNEI	30,135	27,068	31,727	42,393	3.9	2.4	-1.6	4.2
CAMBODIA	1,631	1,606	1,591	1,771	7.1	-3.1	3	5
LAOS	2,527	2,546	2,551	2,172	4.8	-0.5	2.3	3.8
MALAYSIA	11,091	10,351	11,371	13,107	4.3	3.4	3.1	6.2
MYANMAR	1,305	1,527	1,187	1,104	6.8	3.2	-5.9	1.3
PHILLIPINA	3,480	3,623	3,548	3,597	6	-9.5	5.7	6.9
SINGAPORE	65,390	60,727	72,794	79,426	0.7	5.4	7.6	3.8
THAILAND	8,021	7,167	7,233	7,630	2.4	-6.2	1.5	3.5
VIETNAM	2,722	3,520	3,694	4,162	7	2.9	2.6	6.7

Sumber: www.adb.org; www.focus-economics.com; www.dataworldbank.org; www.imf.org

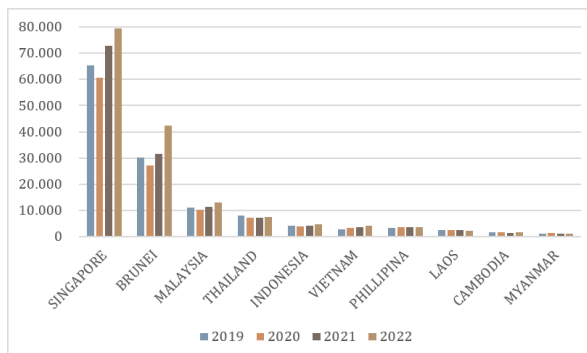
Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN dalam empat tahun terakhir dapat dibaca pada Tabel.2 di atas. Lebih banyak pergerakan angka yang ada di antaranya dipengaruhi secara dominan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia di awal tahun 2019 sampai hingga tahun 2021, di mana masyarakat diharuskan melakukan *lockdown* dan sebagian besar aktivitas dikerjakan dari rumah (*work from home*), sehingga memicu rendahnya aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022 ini pun masih ada beberapa kasus Covid-19 namun tidak signifikan mempengaruhi perkembangan ekonomi karena aktivitas masyarakat telah kembali normal walau dengan beberapa pembatasan yang diberlakukan. Walaupun demikian perkembangan naik turun angkanya tidak mencolok, ini menandakan masyarakat mampu melakukan recovery atas keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Masalah dan Kendala MEA

Telah menjadi kewajiban bila ada masalah sekaligus kendala yang terjadi dalam implementasi MEA ini, karena selalu ada proses untuk mewujudkan tujuan integrasi ekonomi ini. Masalah dan kendala yang ada di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, perbedaan kemampuan ekonomi. Dalam kesatuan proses integrasi ekonomi, faktor yang dapat mempercepat pencapaian tujuan adalah adanya pemerataan kemampuan, namun bila ada perbedaan kemampuan ekonomi maka hal ini akan menjadi kendala tersendiri, sebagaimana Luhulima dkk., (2019) yang menyatakan bahwa di antara penyebab sulitnya capaian pengembangan fasilitas konektivitas fisik adalah karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi, faktor lainnya adalah letak geografis dan tingkat pembangunan antar negara anggota.

Grafik 1. GDP per Kapita (USD)

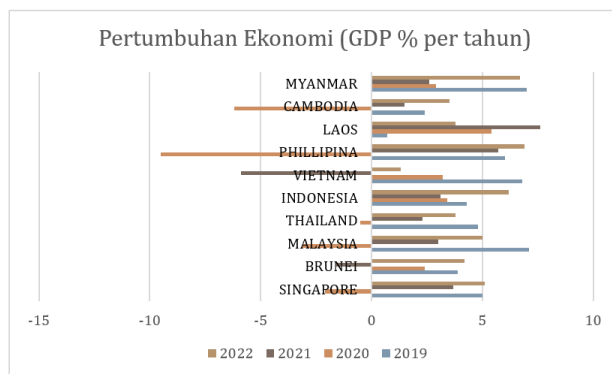


Sumber: data diolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2011) memperoleh hasil bahwa aliran perdagangan dan investasi dalam integrasi ekonomi ASEAN dan negara anggotanya dipengaruhi secara kuat dan positif oleh Indeks Integrasi Perdagangan, FDI (Foreign Direct Investment), populasi penduduk, keterbukaan ekonomi, suku bunga dan GDP. Bila kita lihat data pertumbuhan ekonomi (GDP growth Tabel 2) dapat kita lihat gambaran perbandingan aktivitas ekonomi yang terjadi di masing-masing negara anggota ASEAN tersebut.

Pada Grafik 1. Digambarkan capaian pertumbuhan ekonomi setiap negara ASEAN dan pergerakan angkanya yang merupakan gambaran perbedaan kemampuan ekonomi setiap negara ASEAN. Singapura, Brunei jauh memimpin mengingat dari sisi jumlah populasi dan luas negara nya juga tidak sebesar negara lainnya, sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung, namun indikator GDP per kapita ini bisa menjadi standar pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat negara masing-masing. Sementara negara lain mempunyai GDP yang relative beda secara signifikan dengan kedua negara tersebut. Hal ini menjadi tantangan untuk ASEAN dapat meningkatkannya kearah sentimen positif dengan meingkatkan kualitas integrasi yang lebih intensif antarnegara ASEAN.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi



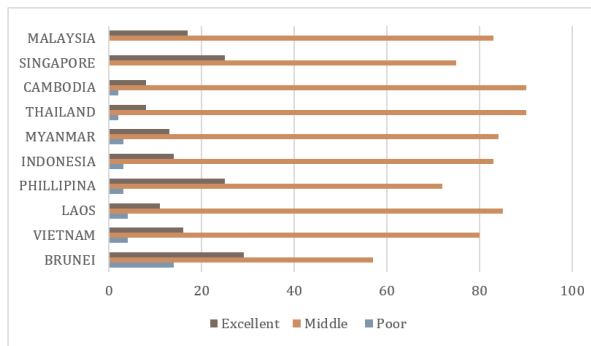
Sumber: data diolah.

Tampilan pertumbuhan ekonomi dari nilai perkembangan persentase GDP setiap tahun digambarkan dalam Grafik.2. di atas. Tampak bahwa sebagian besar negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus terjadi di tahun 2020 dan 2021, kondisi ini diperkirakan sebagai imbas dari pandemi Covid-19, walaupun demikian, pada tahun 2022 ini pertumbuhannya menunjukkan trend positif.

Kedua, tingkat pemahaman masyarakat yang kurang. Kendala lain yang dapat dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ASEAN. Sebagaimana yang dinyatakan Wangke (2014), bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Asia Tenggara masih di bawah 80%. Kondisi ini akan mengakibatkan kurangnya dukungan dan keterlibatan, tidak maksimalnya konektivitas antara anggota masyarakat di ASEAN. Padahal di antara sarana mencapai tujuan MEA adakah dengan konektivitas sesama masyarakat ASEAN dalam intensitas yang tinggi. Kondisi akan menjadi berbeda sebaliknya bila masyarakat Asia Tenggara mengetahui secara baik tentang MEA dan tujuan pentingnya.

Bila ditelusuri tingkat pemahaman masyarakat ini secara umum terkait dengan budaya membaca atau tingkat literasinya. Untuk dapat memahami sesuatu hal maka dapat dilakukan dengan membaca, selain mendapatkan informasi. Tingkat literasi masyarakat dapat diukur salah satunya dengan budaya membacanya. Terkait masalah kurang pahamnya masyarakat ASEAN terhadap MEA dan kepentingannya, dapat dilihat dengan tingkat literasi setiap negara Asia Tenggara melalui Grafik 3 berikut.

Grafik 3. Tingkat Literasi ASEAN Tahun 2020 (% dari populasi)



Sumber: www.statista.com (data diolah)

Grafik 3. di atas menunjukkan ada 3 level atas tingkat literasi masyarakat ASEAN sesuai dengan negara masing-masing. Level terendah adalah *poor* (rendah) artinya tingkat membaca atau menulis masyarakat rendah, *middle* (menengah) artinya tingkat baca tulisnya sedang, dan *excellent* (sangat baik) artinya tingkat baca tulis masyarakat tinggi. Data tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat ASEAN didominasi pada level menengah (*middle*) dengan rata-rata 79.9%, kemudian level *excellent* (sangat baik) dengan rata-rata 16.6%, sedangkan masyarakat dengan tingkat literasi *poor* (rendah) masih dimiliki mayoritas negara ASEAN kecuali Malaysia dan Singapura karena sudah tidak memiliki penduduk yang tingkat baca tulisnya rendah. Dari data ini sebagian besar negara perlu meningkatkan budaya literasi untuk mengatasi masyarakat yang masih *poor* tingkat literasinya. Ketika tingkat literasi masyarakat meningkat akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu hal.

Ketiga, dukungan dan keterlibatan perlu ditingkatkan. Kendala dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dari MEA ini di antara salah satu sebabnya adalah masalah point 2 di atas; yakni kurangnya pemahaman terkait MEA dan kepentingannya. Dukungan dan keterlibatan publik dalam MEA perlu dijadikan meningkat, hal ini karena masyarakatlah yang dapat melakukan akselerasi, menyebarkan informasi serta penerima manfaat agar MEA berhasil mencapai tujuannya (Luhulima dkk., 2019). Tidak hanya masyarakat umum namun seluruh *stakeholder* perlu untuk suksesi MEA ini. Semua pihak perlu mendapatkan kesamaan pemahaman sehingga dapat melakukan aksi dukungan dan keterlibatan yang terintegrasi, pemerintah masing-masing negara sebagai perwakilan keanggotaan ASEAN dalam hal ini sebagai fasilitator kepada masyarakat luas sangat berperan penting dan Sekretariat ASEAN sebagai pemangku kepentingan utama menjadi *general support* untuk penyelesaian masalah ini.

Sejak 1 Januari 2016 sudah dibentuk struktur baru di ASEAN yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pemantauan implementasi kebijakan-kebijakan ASEAN sampai kepada pemastian penyebaran informasi dan komunikasi tentang integrasi ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan pada *Overview of The AEC Monitoring, Asean.org*:

AEC monitoring comes under the purview of the ASEAN Secretariat's ASEAN Integration Monitoring Directorate (AIMD). Formerly named the Macroeconomic and Finance Surveillance Office (MFSO) and later the ASEAN Integration Monitoring Office (AIMO), the AIMD was regularized as part of the endorsed new structure of the ASEAN secretariat on 1 January 2016. (asean.org)

Dengan struktur baru yaitu adanya Dewan MEA; yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi ini sebenarnya menjadi perangkat untuk ASEAN untuk memberikan respon dan mendorong *feedback* atas monitoring evaluasi yang dilakukan, sehingga Langkah progresif menuju tercapainya tujuan MEA ini terkawal dengan baik.

Tantangan MEA

Banyak tantangan yang dihadapi oleh ASEAN untuk mewujudkan tujuan MEA. Dari kendala yang masalah yang diurai di paragraf sebelumnya maka sekaligus menjadi tantangan untuk masyarakat ASEAN agar dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi kendala. Tantangan tersebut di antaranya adalah:

Pertama, new normal pasca pandemi Covid-19 dan dampak krisis perang dan Kemanusiaan. Tantangan ekonomi bagi masyarakat ASEAN saat ini dan selanjutnya adalah berasal dari pasca pandemi Covid-19, ancaman krisis ekonomi global yang dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara (seperti contoh Indonesia) mempunyai utang yang semakin besar (Abidin Y. 2020). Sedangkan menurut Chong (2021) tiga faktor risiko yang dihadapi ekonomi ASEAN karena pandemi Covid-19 saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, pemulihan perdagangan yang lamban dan transmisi lintas negara.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang mendorong adanya krisis ekonomi dan berdampak kepada ekonomi global termasuk Asia Tenggara. Di antara dampak perang Rusia ini adalah naiknya harga BBM di negara-negara Asia Tenggara akibat naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM ini akan memicu kenaikan harga seluruh barang di pasar termasuk kenaikan harga pelayanan jasa, dan akan berdampak langsung ke masyarakat, yaitu menurunnya daya beli masyarakat, sehingga ekonomi mengalami kontraksi.

Seperti yang diteliti oleh Orhan (2022) bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina akan mempengaruhi ekonomi global melalui tiga saluran utama: sanksi keuangan, kenaikan harga komoditas, dan gangguan rantai pasokan. Konektivitas menjadi terkendala utamanya karena dampak perang ini di dunia aviasi. Beberapa dampak di sektor penerbangan internasional, seperti lalu lintas penumpang udara, lalu lintas kargo udara, harga bahan bakar jet, dan tarif penerbangan, juga terhadap perkembangan ekonomi yang lebih luas (Wicaksana dkk, 2022). Sehingga perdagangan yang menggunakan jasa penerbangan, kunjungan ke negara lain untuk aktivitas ekonomi juga akan terdampak langsung.

Kedua, kesiapan menjalankan MEA. Menjadi masalah krusial dalam menjalankan segala konsekuensi dari MEA ini adalah kesiapan setiap anggota ASEAN, hal ini dapat menjadi peluang namun juga sebaliknya menjadi masalah. Pasar bebas dan hilangnya hambatan perdagangan antar negara kawasan ini akan menjadikan setiap negara sebagai suasana kompetisi. Negara yang telah mempunyai kesiapan sumber daya, tenaga kerja unggul, investasi dan lain sebagainya; akan dapat berkompetisi dengan negara lain, namun bagi negara yang kurang siap, dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi bisa jadi akan dibanjiri produk-produk luar negaranya.

Dari data ASEANstats, November 2019 menunjukkan total nilai ekspor hingga 2018 adalah US\$ 404,9 miliar, yang didominasi sektor travel sebesar 35.9%, sedangkan total nilai impornya US\$ 373,8 miliar yang didominasi oleh sektor transportasi sebesar 31.3%. Sektor jasa juga merupakan penerima terbesar Penanaman Modal Asing (FDI) ke kawasan ini. Sedangkan data Trend Economy (2020); menunjukkan nilai ekspor barang dagangan dari ASEAN mencapai \$1,09 triliun pada tahun 2020, dan nilai impor mencapai \$999 milyar. Ekspor barang dagangan dari ASEAN meningkat sebesar 0,465% dibandingkan tahun 2019. Ekspor barang tumbuh sebesar \$5,08 miliar pada tahun 2020. Data keduanya menunjukkan trend kenaikan pada ekspor dan impor ASEAN, sehingga dari data ini negara-negara kawasan ini telah siap menjalankan MEA, bahkan bersaing di dunia global.

Ketiga, perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). Tantangan yang penting untuk MEA ke depan adalah perkembangan TIK. Karena hal ini berdampak kepada munculnya budaya baru yaitu aktivitas ekonomi digital; dengan munculnya bisnis start-up baru, platform-platform jual beli digital atau pasar *online* dengan adanya *ecommerce* dan lain-lain. Dalam *blue print* AEC 2025 pun sektor teknologi informasi dan komunikasi ini telah mendapat perhatian, karena TIK ini menjadi pendorong utama dalam transportasi ekonomi ASEAN.

Infrastruktur TIK yang kuat dengan konektivitas yang luas di ASEAN dapat memfasilitasi terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif dalam menarik dan mempromosikan perdagangan, investasi dan kewirausahaan. ASEAN perlu terus memprioritaskan upaya menjembatani kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua komunitas dan bisnis dapat memperoleh manfaat dari adopsi TIK (The ASEAN Secretariat, 2015). Dalam masalah ini ASEAN telah menetapkan dalam *blue print* ASEAN 2025 tersebut akan terus memprioritaskan upaya menjembatani kesenjangan digital yang terjadi dan memastikan bahwa semua komunitas dan bisnis dapat memperoleh manfaat dari adopsi TIK.

MEA menuju kemakmuran Asia Tenggara

Dengan beberapa permasalahan dan sekaligus tantangan yang dihadapi MEA di masa mendatang beberapa hal yang perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam suksesnya pencapaian tujuan MEA yaitu:

Penguatan Sekretariat ASEAN dan Dewan AEC. Secara umum aktivitas suatu tim atau institusi ditentukan oleh sekretariat yang dimilikinya. Sekretariat sebagai penggerak dan fasilitator dalam setiap organisasi. Hal ini seperti yang ditetapkan dalam The ASEAN Secretariat (2015) bahwa sekretariat memantau dan mengevaluasi Dewan MEA atau AEC Council, memanfaatkan segala sumberdaya internal serta keahlian pemangku kepentingan, serta mengambil peran dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Relawan MEA. Mengingat era yang dibangkitkan pada MEA ini adalah pendekatan kepada konektivitas antar masyarakat secara langsung, baik masyarakat produsen atau konsumen, maka perlu ada para *volunteer* yang menginisiasi dan melakukan penyebaran informasi terkait MEA ini sesuai dengan profesi yang ditekuni. Semakin banyak masyarakat yang terkoneksi dan mengambil manfaat dari MEA ini akan semakin tercipta suasana ketersambungan dalam integrasi sesama masyarakat ASEAN. Kebersamaan dalam kebutuhan kesatuan kepentingan ekonomi akan terbangun dengan sendirinya.

Meningkatkan Sosialisasi MEA kepada masyarakat luas. Program ini perlu dikuatkan dan ditanamkan kepada seluruh pemangku kepentingan MEA ini. Perlu diberikan pemahaman dan kesadaran akan kepentingan pencapaian tujuan MEA serta manfaatnya kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan meningkatkan budaya literasi kepada masyarakat ASEAN. Perlu ada kerja-kerja terintegrasi dalam menumbuhkan dan meningkatkan budaya membaca dan menulis dari seluruh *stakeholders* di setiap negara anggota ASEAN. Perkembangan teknologi saat ini dengan massifnya *smartphone* menjadi kebutuhan dan budaya setiap individu menjadi pendorong dekatnya sarana literasi ini, sehingga setiap orang menjadi mudah dalam meningkatkan budaya literasi secara digital. Seluruh program dan kepentingan MEA ini dapat sampai kepada masyarakat kawasan ini secara luas, sehingga hal ini akan menstimulasi dukungan dan keterlibatan seluruh manusia di Asia Tenggara.

Mencintai produk dalam negeri ASEAN. Asia Tenggara ini adalah kawasan yang terkenal dengan kekayaan alamnya, iklimnya yang tropis memicu keanekaragaman hayati dan didukung dengan alam yang subur. Hasil alamnya menjadi barang yang banyak dicari negara lain seperti rempah-rempah, karet, minyak sawit dan lain sebagainya. Sumber daya alam dan bahan tambang yang ada di kawasan ini pun juga menjadi incaran negara-negara besar lain, seperti logam mulia, timah, nikel, biji besi, batubara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Semua kekayaan ini menjadi modal utama bagi kawasan ini untuk menjadi bangsa yang besar.

Bila selama ini menjadi negara pengimpor produk jadi yang pada dasarnya bahan bakunya berasal dari dalam negeri, maka saatnya bangsa sendiri mulai dapat mengolah bahan dasar hingga menjadi produk akhir yang langsung dapat dikonsumsi atau digunakan oleh bangsa sendiri, sehingga tidak lagi ada ketergantungan dengan negara maju yang mengolah bahan dasar yang berasal dari kawasan ini. Memproduksi pesawat, kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, serta produk-produk elektronik yang dibutuhkan masyarakat sudah saatnya dapat diproduksi dari bahan dasar dan sumber daya dari kawasan secara mandiri. Mencintai dan menggunakan produk dari kawasan ini perlu menjadi kampanye yang massif oleh seluruh pemangku kepentingan MEA ini termasuk masyarakat luas, sehingga penggunaan dan konsumsi barang yang merupakan produksi dalam negeri kawasan ini dapat meningkat.

Meningkatkan kemampuan digital. Perkembangan teknologi yang pesat dengan inklusi teknologi merangsek ke perekonomian. Optimalisasi teknologi di semua sektor ekonomi akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang tidak lepas dengan *smartphone* terutama di perkotaan akan menjadi pendorong utama pesatnya pasar online, e-commerce, fintech dan lain-lain. Fintech atau *financial technology* yang merupakan sajian teknologi informasi dalam sektor keuangan ini muncul karena disrupsi teknologi; maraknya jual beli secara *online* melalui e-commerce mendorong transaksi secara *online* pula: orang menjual dan membeli barang sekaligus pembayaran melalui *smartphone* yang ada dalam genggamannya (Ismaliyanto, 2021). Oleh karena itu kemampuan jual beli online melalui *digital marketing* termasuk bekal pengelolaan yang terintegrasi dengan *fintech* menjadi materi dan pelatihan yang perlu diberikan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang mengisi 90% dunia usaha dan sebagai sektor yang perlu diprioritaskan pada MEA ke depan.

Mengambil peran di setiap adanya konflik kemanusiaan dan konflik antar negara yang terjadi. Konflik yang terjadi baik perang atau konflik kemanusiaan selalu saja membawa krisis yang berimbas langsung kepada masyarakat. Krisis politik, krisis kemanusiaan seperti kemiskinan dan kelaparan, sampai kepada krisis ekonomi, yang semuanya menyebabkan kesengsaraan dan kematian. Kekuatan ekonomi ASEAN saat ini menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Hasil *forecasting* di masa-masa yang akan datang, dari trend yang ada; kawasan ASEAN akan menjadi kekuatan empat besar secara global (Asean.org, 2021), (Wuryandari, 2019). Oleh karena itu ASEAN perlu mengambil peran penting pada setiap konflik dan krisis yang terjadi, apalagi yang berdampak langsung kepada seluruh masyarakat luas. Menjadi fasilitator perdamaian, menjadi negara penengah yang dapat mendamaikan perseteruan antar negara, menjadi *solution maker* atau *problem solver* atas semua konflik dan krisis sudah saatnya dapat diperankan oleh ASEAN.

Sebagai penutup warisan semangat motivasi kebangsaan dari pahlawan besar ini menjadi penguat kepercayaan diri sebuah bangsa. "*Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka*" (Soekarno). Menjadi bangsa yang merdeka merupakan syarat kemajuan dan kemakmurannya, merdeka dalam makna luas: tidak takut interferensi asing, tidak dijajah secara ekonomi oleh bangsa lain, apalagi bila bangsa mempunyai modal kekayaan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki. ASEAN adalah kumpulan negara-negara kaya akan sumber daya alam, ini cukup menjadi syarat kekuatan besar dunia. Dengan kolaborasi dan integrasi ekonomi melalui MEA maka *goals* kemajuan dan kemakmuran negara-negara Asia Tenggara ini akan terwujud.*

Referensi

- Abidin Y. (2020). *Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara*. Cet-1. UNAS Press. Jakarta.
- ASEAN (2021). ASEAN development trajectories reach new milestone. <https://asean.org/asean-development-trajectories-reach-new-milestone/>. (diakses 5 Desember 2022).
- ASEAN (2019). Trade in Services in ASEAN. <https://asean.org/our-communities/economic-community/services/>. (diakses 6 Desember 2022, 21.30).
- Asian Development Bank (2022). Economic Indicators for Cambodia. <https://www.adb.org/countries/cambodia/economy>. (diakses 4 Desember 2022, 15:09).
- BPS (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911>. (diakses 4 Desember 2022, 14:47).
- BPS (2022). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2020-2022. Data Series Sosial Kependudukan. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/mid-year-population.html>. (diakses 4 Desember 2022, 5:44).
- Commonwealthgovernance.org (2015). Economy of Asia. <https://www.commonwealthgovernance.org/countries/asia/>. (diakses 6 Desember 2022; 00:04).
- Chong TTL., Li X., dan Yip C. (2021). The Impac of Covid-19 on ASEAN. *Economic and Political Studies* Vol.9. No.2. p.166-185. Research Article. Renmin University of China. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/20954816.2020.1839166?>. (diakses 6 Desember 2022).
- CSPS (2021). Brunei Economic Outlook 2021. Centre for Strategic and Policy Studies Brunei Darussalam. (Diunduh 4 Desember 2022).
- FocusEconomic (2022). Economic Snapshot for ASEAN. <https://www.focus-economics.com/regions/asean>. (diakses 5 Desember 2022).
- Gatpolintan L. (2022). PH GDP grows 5.6% in 2021, on track to surpass pre-pandemic level. Phillipine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1166477>. (diakses 4 Desember 2022, 14:37).
- IMF (2022). World Economic and Financial Surveys: World Economic Outlook Database. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=516,522,536,544,548,518,566,576,578,537,582,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,&sy=2021&ey=2026&ssm=0&scsm=1&ssc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1. (diakses 4 Desember 2022, 05:53).
- Ismaliyanto J. (2021). *Fintech Wakaf Tunai: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Manfaatnya Dalam Maqashid Syariah*. Disertasi. Islamic Economic Finance – Universitas Trisakti. Jakarta.

- Lao Citizens and Demography (2022). Citizens Statistical Database. <https://laosis.lsb.gov.la/tblInfo/>. (diakses 4 Desember 2022. 10:34).
- Luhulima CPF., Farhana F., Khanisa, Sinaga L, dan Prayoga P. (2019). ASEAN ke Depan. Dalam Sinaga LC., Khanisa., Farhana F., & Prayoga P.(ed), *50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan ke Depan*. (pp.259-267). Lipi Press. Jakarta. (diunduh: 14 November 2022).
- MyCenDash (2022). Penduduk Malaysia. <https://www.mycensus.gov.my/>. (diakses 4 Desember 2022. 10.06).
- Orhan E. (2022). The Effects of the Russia - Ukraine War on Global Trade. *JITAL: Journal of International Trade, Logistics and Law*. Vol. 8, Num. 1, 2022, p.141-146. <http://jital.org/index.php/jital/article/view/277>. (diunduh 6 Desember 2022).
- Prakasa S.U.W, Wijayanti A., Hariri A., dan Yustitianingsih L. (2022). The Effect of Russia--Ukraine War on International Aviation Sectors. Conference Paper. INCLAR: 3rd International Conference on Law Reform. Volume 2022. *KnE Social Science*. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/12132>. (diunduh 6 Desember 2022).
- Ridwan (2011). Analisis Aliran Perdagangan dan Investasi dalam Integrasi Ekonomi ASEAN: Pendekatan Model Gravity. Disertasi. Institute Pertanian Bogor. Bogor.
- Statista.com (2022). ASEAN countries: Gross domestic product (GDP) per capita in current prices from 2017 to 2027(in U.S. dollars). <https://www.statista.com/statistics/804307/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-the-asean-countries/>. (diakses 6 Desember 2021; 5:24).
- Statista.com (2022). Perceived quality of digital literacy education among young people in ASEAN countries in 2020, by country. <https://www.statista.com/statistics/1248023/asean-digital-literacy-education-quality-by-country/>. (diakses 6 Desember 2022; 10:26).
- The ASEAN Secretariat (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Catalogue-in-Publication Data. ASEAN Secretariat. Jakarta. (diunduh: 16 Noember 2022).
- The World Bank (2022). GDP per capita (current US\$) - East Asia & Pacific, South Asia, Europe & Central Asia. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=Z4-8S-Z7>. (diakses 6 Desember 2022, 5:39).
- The World Bank (2022). GDP Growth (annual %) – East Asia. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>. (diakses 6 Desember 2022, 5:44).
- TrendEconomy.com (2022). ASEAN | Imports and Exports | World | ALL COMMODITIES | Value (US\$) and Value Growth, YoY (%) | 2013 – 2020. <https://trendeconomy.com/data/h2/ASEAN/TOTAL>. (diakses 6 Desember 2022, 18.30).
- United Nation (2022). Word Population to Reach 8 billion on 15 November 2022. Department of Economic and Social Affairs. <https://www.un.org/en/desa/world-population-reach-8-billion-15-november-2022>. (diakses 4 Desember 2022. 05:17).
- Wangke H (2014). Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Info Singkat Hubungan International. Vol.VI, No.10/11/P3DI/Mei/2014. P3DI-Setjen DPR RI.
- Worldometer (2022). Philippines Population. The current population of the Philippines is 113,102,314 as of Saturday, December 3, 2022, based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data. <https://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/>. (diakses 4 Desember 2022. 5:58).
- Worldometer (2022). Asian Countries by population (2022). Elaboration of data by United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. <https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/>. (diakses 4 Desember 2022. 9:32).
- Wuryandari G. (2019). Masa Depan ASEAN: Tantangan dan Peran Indonesia. Dalam Sinaga LC., Khanisa., Farhana F., & Prayoga P.(ed), *50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan ke Depan*. (pp.231-257). Lipi Press. Jakarta. (diunduh: 14 November 2022).

JUNEF ISMAILIYANTO adalah pembina Fajar Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di sektor sosial dan pendidikan. Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan dan Universitas Pancasila. Ia menulis disertasi terkait "Fintech Wakaf Tunai: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan manfaatnya dalam Maqashid Syariah", "*Cash Waqf Using Fintech and Its Determinans Based on Maqashid Sharia*". Ia juga menulis tesis tentang "Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Muslim dalam memilih bank syariah." Ia berkontribusi pada buku *Biarkan Gelisah Merubah Arah*, dan menjadi editor buku *Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Undang-Undang* dan buku *Sikap dan Kata Ahmad Zainuddin*. Ia dapat dihubungi di email: junefisma@gmail.com.

Antara Surga dan Neraka: Gambaran Perkembangan Kemakmuran Negara-Negara Berkembang di ASEAN

Wening Purbatin Palupi Soenjoto

Pendahuluan

“Surga dirindukan, namun neraka yang diciptakan.” Lalu siapa yang dipersalahkan? Begitu konflik pelik yang terjadi pada negara-negara berkembang di ASEAN. ASEAN merupakan rumah besar bagi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN juga merupakan perkumpulan negara-negara yang mayoritas negara-negara sedang berkembang. Keragaman budaya, bahasa dan etnik masing-masing negara menjadi kekhasan yang memiliki nilai jua.

Sumber daya alam menjadi surga yang dapat dieksplorasi maupun dimanipulasi. Jika “surga” yang dimiliki negara-negara ASEAN dieksplorasi dan manipulasi besar-besaran dengan alasan memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam mencapai kemakmuran sebuah negara, maka titik puas tak akan pernah ada batas maka akan menjadi masalah-masalah baru yang berdampak pada kehancuran laten dan dan menjadi “neraka” berkelanjutan jika penanganannya tidak mampu diantisipasi sejak dini.

Mengutip M. Manulang (1990), mengkaitkan definisi tentang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Maka konsep general yang muncul bahwa kemakmuran diawali dengan adanya gerakan ekonomi, dengan mempelajari ilmu ekonomi maka akan lebih memahami pula dalam mengambil tindakan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat hingga terjadi adanya kemakmuran.

Kemakmuran sangatlah bersifat subjektif bahkan tidak ada indikator yang tepat atau yang sama jika dibandingkan diantara masing-masing negara yang menyebutkan bahwa setiap negara berusaha memakmurkan rakyatnya. Memahami kata kemakmuran sebagai sebuah produk keberhasilan sebuah negara dimana kondisi semua negara dengan kemampuan penghuni negara dapat memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang maupun jasa. Setiap negara memiliki perbedaan dalam mengukur kemakmuran yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara dan indikator kemakmuran sangat berkaitan erat dengan pendapatan nasional sebuah negara.

Indikator kemakmuran sebuah negara dengan mengetahui pendapatan nasional yang terpenuhi sesuai dengan perkembangan negara yang mampu melakukan tingkat produksi lebih tinggi dibandingkan konsumsi sehingga pemerataan kebutuhan terpenuhi secara dalam negeri dan menekan tingkat impor produk dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara dihubungkan dengan semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, berarti bahwa produktivitas masyarakat semakin baik dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut semakin baik pula.

Negara-negara berkembang di ASEAN masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan pendapatan nasional untuk dapat meningkatkan kemakmuran negara. Banyak faktor yang mempengaruhi dari yang sifatnya struktural maupun fundamental. Bahkan beberapa negara terjebak konflik politik berkepanjangan yang berdampak pada kemakmuran negara. Kerancuan pertumbuhan dan perkembangan negarapun terjadi kala keterlibatan negara lain yang membantu dengan pola pemberian bantuan utang beraroma politik yang melilit tak terselesaikan hingga penjualan aset negara atau sumber daya yang dijual menjadi lingkaran setan tak berkesudahan dan rakyat pun jadi korban.

Pemenuhan Kebutuhan Versus Pemuasan Keinginan

Menilik tujuan berdirinya ASEAN yaitu mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Menelaah tujuan ASEAN mengenai pertumbuhan ekonomi dengan menilik

pengertian ilmu ekonomi menurut Abraham Maslow bahwa ilmu ekonomi sebagai sebuah alat yang dipakai untuk penyelesaian permasalahan perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif dan efisien. Maka muncul pertanyaan, apakah berdirinya ASEAN dengan usia 55 tahun (pada tahun 2022) dapat dikatakan sebuah media yang memang sudah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengatasi masalah-masalah perekonomian negara-negara ASEAN khususnya, secara efektif dan efisien. Ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa pelik dan tak sedikit waktu maupun proses dalam menyelesaikannya.

Berdirinya ASEAN ditenggarai dengan persamaan nasib dan cerita konflik yang dialami negara-negara di ASEAN dan tahun 1960an merupakan *dark era* yang menjadi momentum masalah paling puncak dan pelik yang dialami negara-negara di Asia secara internal maupun eksternal. Karena Asia Tenggara merupakan surga yang strategis yang diperrebutkan oleh blok barat dan timur dan juga mayoritas terdiri dari negara-negara berkembang maka secara keadaan sumber daya alamnya masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal dan membutuhkan campur tangan negara lain dalam pengelolannya sehingga rentan konflik kepentingan.

Negara berkembang merupakan istilah untuk menerangkan sebuah negara berdasarkan kesejahteraan yang bersifat material kesejahteraan material dalam level yang rendah. Disebabkan belum ada indikator yang tepat untuk mengukur keadaan negara berkembang yang dapat diakui secara internasional, karena tiap negara memiliki tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. ASEAN terdiri dari 11 negara yang tersebar di Asia Tenggara dan Timor Leste adalah negara ke-11 yang baru masuk pada 11 November 2022 lalu. Beberapa konsep tentang negara berkembang yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusianya yang masih minim ketrampilan sehingga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam sehingga masih membutuhkan keterlibatan negara lain dalam memenuhi kebutuhan negara. Konflik antara pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan yang harus difasilitasi buat rakyatnya.

Pertumbuhan ekonomi dinilai berdasarkan kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara berkaitan erat dengan kesejahteraan. Ada 9 negara berkembang di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam. dan ke 9 negara tersebut. Karakteristik permasalahan ekonomi di 9 negara berkembang ini pun dipengaruhi banyak faktor yang berbeda. Istilah negara berkembang jika dikaitkan dengan kemakmuran maka akan identik keadaan negara berkembang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonominya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara-negara berkembang adalah adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan ilmu ekonomi, kemakmuran dapat didefinisikan sebagai berikut.

Pertama, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Pengertian kebutuhan pokok adalah segala kebutuhan yang dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Negara berkembang masih lebih banyak melakukan konsumsi dibandingkan produksi karena secara pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam masih belum bisa diolah seoptimal mungkin. Faktor ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan akan dapat meningkat jika sebuah negara berkembang tidak mampu melakukan pengelolaan dan manajemen produksi dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok secara perlahan dan berkelanjutan.

Kedua, sumber daya alam dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Tata kelola sumber daya alam yang terjadi negara-negara berkembang masih mengalami kerancuan yang mengakibatkan kerusakan alam. Alih-alih dengan alasan pemenuhan kebutuhan rakyat namun justru eksplorasi alam hanya dapat dilakukan orang-orang yang punya wewenang dengan dalih kekuatan hukum negara dalam pengelolannya. Kerusakan hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, juga pada kerusakan habitat hewani dan tumbuhan. Dan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan alam membutuhkan dana untuk melestarikan maupun rekondisi keadaan alam yang rusak, walau kemungkinannya kecil dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, hilangnya hutan bakau di Myanmar akibat konversi hutan bakau menjadi lahan pertanian. Perusakan hutan di Indonesia menjadi lahan sawit dan pembangunan ibukota IKN pun berdampak kerusakan hutan. Hutan Bakau di Asia Tenggara mengalami laju deforestasi 3,58% -8,08% per tahun dari 2000 hingga 2012, lebih tinggi daripada yang ada di seluruh dunia. Hal lain yang perlu disampaikan adalah bahwa lebih dari 50% hilangnya hutan bakau belum teridentifikasi alih fungsinya.

Ketiga, setiap orang dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Mengutip definisi kata sehat menurut WHO bahwa sehat adalah keadaan sehat lahir batin tanpa kekurangan fisik. Namun kata sehat versi WHO banyak mengundang kritikan karena banyak orang yang memiliki kekurangan fisik namun sehat secara fisik dan masih mampu melakukan aktivitas layaknya manusia normal lainnya, walau dalam keterbatasan fisik yang kurang optimal. Pada 12 Oktober 2019, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN mendukung perlindungan perempuan dan anak. Pada piagam ASEAN pasal 14 yang tertuang menjadi badan hak azasi manusia yang bersifat konsultatif dinamakan AICHR, menjadi media konsultatif dalam melindungi para imigran. Walau tidak sepenuhnya mampu melindungi namun dapat menjadi mediator permasalahan dan perlindungan para imigran.

Keempat, setiap orang dapat memenuhi bermacam-macam kebutuhannya. Berbicara kebutuhan maka akan berbeda dengan keinginan karena kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Dengan menggunakan prinsip Talcott Parsons menjelaskan bahwa tindakan manusia selalu diarahkan pada tujuan. Tindakan itu terjadi pada kondisi yang memiliki unsur sudah pasti, sedangkan unsur yang lainnya digunakan sebagai alat mencapai tujuan tersebut. Kebutuhan merupakan hal yang pasti harus dipenuhi, kata harus mengandung makna adanya kekuatan tindakan untuk memenuhinya. Berbeda dengan keinginan, walau tak segera dipenuhi maka tidak menimbulkan hal yang berbahaya dan bisa ditunda untuk segera dipenuhi.

Kelima, terdapat keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Analisa: Realitanya negara-negara berkembang mengalami konflik antara pemenuhan kebutuhan maupun pemuasan keinginan. Dan keduanya masih tergantung negara lain. Namun yang terjadi tingkat konsumsi dalam pemuasan keinginan selalu makin meningkat. Berdampak pula pada inflasi karena peredaran uang makin tinggi pula dalam pemuasan keinginan. Sulit naiknya pendapatan nasional jika tidak diimbangi mengurangi pemenuhan kepuasan keinginan. Tanda era digital milenial digital saat ini dianggap sebagai era yang mempengaruhi pemuasan keinginan lebih kuat.

Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Eksplorasi dan manipulasi akan selalu terjadi dalam pembangunan di sebuah negara, terutama pada negara yang sedang berkembang. Dampak positif dan negatif pun tak terelakkan. Negara-negara berkembang di ASEAN memiliki latar belakang permasalahan yang nyaris sama dari mulai masalah politik hingga ekonomi. Masalah politik dan ekonomi merupakan masalah yang paling pelik dan sulit diselesaikan secara tuntas. Karena masalah politik akan berdampak pada perekonomian dan masalah perekonomian dapat dipengaruhi politik ataupun berdampak politik.

Dua isu ini sangat sensitif dan rentan justifikasi, baik bagi kelompok koalisi maupun oposisi. Setiap negara memiliki banyak kepentingan, untuk kepentingan pemerintahan maupun menjalankan pemerintahannya. Pemerintah berharap dapat memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Namun yang terjadi tanpa disadari membangun neraka-neraka berbentuk kerusakan alam dengan eksplorasi besar-besaran hasil bumi maupun hasil tambang. Pengolahan besar-besaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tak dapat diperbaharui dengan minimnya pertimbangan untuk masa depan generasi berikutnya. Negara-negara berkembang di ASEAN. Surga-surga yang diharapkan justru berbau politik hanya untuk kepentingan orang-orang yang berkepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat hingga berdampak pada rakyat justru malah neraka yang harus diperbaiki oleh rakyat agar tetap bertahan hidup. Pekerjaan rumah pelik yang akan turun temurun di setiap pergantian pimpinan negara.

Tak Akan Pernah Ada Negara Yang Sesungguhnya Makmur

Keadaan perekonomian sebuah negara dianggap menjadi barometer penilaian sebuah negara, seberapa makmurnya sebuah negara maka dapat dilihat dari tingkat perekonomiannya. Dari tingkat perekonomian pula sebuah negara dapat dinilai pertumbuhannya. Inflasi tinggi sedang mengancam perekonomian global, termasuk perekonomian negara-negara di Asia Tenggara.

Laos merupakan negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang paling terpukul oleh inflasi. Laju inflasi tahunan di Laos telah mencapai 23,6% (*year on year/yooy*) pada Juni 2022. Negara ASEAN dengan inflasi tertinggi berikutnya adalah Myanmar, yakni mencapai 11,39% (*yooy*) hingga Maret 2022. Diikuti Thailand dengan laju inflasi sebesar 7,66% (*yooy*) hingga Juni 2022. Kemudian inflasi Kamboja sebesar 7,2% (*yooy*) hingga Maret 2022, Filipina sebesar 6,1% (*yooy*) hingga Juni 2022, dan Singapura 5,6% (*yooy*) hingga Mei 2022. Sementara inflasi Indonesia masih

sebesar 4,35% (yoy) pada Juni 2022. Kemudian inflasi Brunei Darussalam 3,2% (yoy) per Maret 2022, Vietnam 3,37% (yoy) per Juni 2022, dan Malaysia 2,8% (yoy) per Juni 2022.

Dari data di atas maka dapat dianalisa bahwa negara maju seperti Singapura pun tak luput dari inflasi dan Brunei Darussalam yang dinilai sebagai negara terkaya diantara negara-negara ASEAN lainnya, tak terelakkan dengan hantaman dengan penyelesaian inflasi. Saat awal masa pandemi yang lalu seluruh dunia mengalami kepanikan psikologis secara global yang berdampak pula pada perekonomian. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, para tenaga kerja banyak yang diberhentikan. Perbaikan infrastrukural, mental hingga kesehatan sangat membutuhkan biaya besar-besaran. Tiada satupun negara di dunia ini yang sebenarnya sempurna makmur, karena penduduk bumi memiliki banyak keinginan yang tak pernah puas akan keterbatasan hal yang memuaskan.

Kemakmuran Membutuhkan Korban dan Pengorbanan

Singapura adalah negara yang menempati posisi sebagai negara terkaya di Asia Tenggara mendapatkan pemasukan dari industri elektronik, petrokimia, dan minyak buminya. Hal ini cukup unik, karena sebagian besar negara anggota ASEAN mengandalkan hasil pertanian sebagai sektor utama perekonomiannya. Negara-negara yang menjadikan pertanian sebagai sektor utama, seperti Laos dan Kamboja. Sedangkan sektor perikanan adalah sektor penyumbang perekonomian utama negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. PDB ASEAN yang hanya US\$ 95 miliar pada tahun 1970, telah menjadi US\$ 2,5 triliun pada tahun 2014. Kenaikan yang sangat signifikan, sekitar kenaikan 60% dari peningkatan PDB ASEAN hingga tahun 2020 ini.

Beranjak dari latar belakang yang sama dengan sejarah yang hampir mirip, menjadi alasan kuat dibentuknya ASEAN. Namun demikian, kemajuan dan perkembangan jangka panjang ASEAN tidak bisa diabaikan. Hingga 2022 ini ASEAN terus berusaha menjadi mediator dalam membantu dan memfasilitasi negara-negara ASEAN yang mampu mengoptimalkan kelebihan setiap negara Asia Tenggara untuk saling bergotong royong dan bukanlah saling menjadi kompetitor.

Dari fakta tersebut terlihat bahwa peran ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat signifikan. Semua negara pastilah memiliki kebijakan maupun peraturan yang diharapkan adanya keberpihakan bagi rakyatnya. Perbedaan kebijakan dan peraturan pun akan berubah-ubah jika kepemimpinan negaranya berganti. Dampak dari hal tersebut akan membawa dampak yang luas bagi rakyat dan rakyatlah yang paling terdahulu merasakan dampaknya. Keputusan yang diambil oleh pimpinan negara akan didukung oleh pihak koalisi dan ditentang oleh pihak oposisi. Mengamati konflik berkepanjangan di Myanmar, Indonesia yang mengalami ledakan bonus demografi yang tidak diimbangi adanya peluang kerja dan berdampak pengangguran besar-besaran.

Konklusi

Keberadaan dan peran ASEAN masih sangat jauh dari kata sempurna dan terus berusaha berbenah dilakukan sebagai bukti akan kerja keras ASEAN. Pembuktian peran dan tanggung jawab ASEAN sangat nyata untuk mengimplementasikan alasan berdirinya ASEAN. Kapabilitas dan kompetensi ASEAN pada 11 negara anggotanya serta kontribusinya pada kesejahteraan dalam pembentukan *trust building image* di kawasan global.

ASEAN mampu membangun citra yang terpercaya sebagai “rumah besar” yang dinaungi 11 negara di Asia Tenggara. Namun ASEAN pun harus mampu mengurangi adanya persaingan terselubung di antara negara-negara di bawah naungan ASEAN. Yang terjadi selama ini, antarnegara belum terlihat jelas hubungan bilateral yang saling simbiosis mutualisme.

Namun yang terlihat adalah saling bertarung layaknya kompetitor di rumah sendiri. ASEAN perlu mencari tahu langkah-langkah pemecahan masalah apa yang cocok untuk diimplementasikan dalam penyelesaian permasalahan dan masalah apa yang perlu diambil terlebih dahulu. Tanpa melupakan pola budaya masing-masing negara dalam penyelesaian konflik. Seperti konflik yang terjadi Myanmar, ASEAN masih belum mampu memediasikan konflik internal Myanmar yang berdampak eksternal perkembangan Myanmar dan dampak ketimpangan ini begitu mencolok yang terjadi diantara sesama negara ASEAN. Masih banyak pekerjaan rumah lainnya yang menguji eksistensi ASEAN dan hal ini menjadi tugas bersama yang harus bisa ditangani oleh 11 negara yang berada dalam naungan ASEAN.*

Referensi

Kuncoro, Mudrajad (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN.

Mankiw, N. Gregory (2003). *Pengantar Ekonomi*, ed.2, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

M. Manulang (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia

<https://kids.grid.id/read/473415917/daftar-pendapatan-perkapita-negara-asean-indonesia-posisi-berapa?page=all> (akses 14 November 2022, pukul 22.00 wib)

<https://news.unair.ac.id/2019/10/30/penyebab-deforestasi-hutan-bakau-di-asia-tenggara/?lang=id> (akses 17 November 2022, pukul 22.00 wib)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/inflasi-laos-tertinggi-di-asean-pada-juni-2022> (akses: 17 November, pukul 22.00 wib)

WENING PURBATIN PALUPI SOENJOTO lahir di Jakarta, 9 Agustus 1973. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Psikologi Undar Jombang Jawa Timur Indonesia (1997) dan Jurusan Ekonomi Undar Jombang Jawa Timur Indonesia (2016) dan memperoleh gelar magister di Pascasarjana JIMS Padang Sumatra Barat Indonesia, Magister Administrasi Bisnis (1999) dan Magister Sains di Jurusan Ekonomi Undar Jombang Jawa Timur (2015). Ia adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Jawa Timur Indonesia dan Istikom Jombang Jawa Timur Indonesia, sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ia menyukai hal-hal baru dan mencari pengalaman dari mana saja untuk lebih berkembang. Seorang tutor yang terlibat dalam program pemerintah untuk anak-anak yang siap bekerja. Menjadi reviewer, editor dan manajer di beberapa jurnal online nasional. Memiliki 33 artikel terpublikasi online di jurnal, 1 buku ilmiah, ia sering menulis cerita pendek di Wattpad.

Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 dan Komitmen Implementasi Ekonomi Sirkular Regional

Muhammad Rasyid Ridho

Pada penghujung 2022, Indonesia ditunjuk dalam keketuaan ASEAN untuk tahun 2023, melanjutkan kepemimpinan Kamboja pada tahun sebelumnya. Dengan mengangkat “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” Ada harapan agar ASEAN mampu menjadi kawasan pertumbuhan yang berkelanjutan, cepat dan juga inklusif, mengikutsertakan semangat adaptif, responsif dan kompetitif (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Tentunya diharapkan bahwa kepemimpinan Indonesia akan melanjutkan hal-hal yang telah dirumuskan sebagai *Priority Economic Deliverables* (PED) pada beberapa periode sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan dari berbagai PED tersebut adalah perihal integrasi ekonomi sirkular di ASEAN. Agenda terbilang masih baru muncul pada 2021 lalu, yakni pada masa kepemimpinan Brunei Darussalam, yang berhasil meluncurkan *Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community* (AEC), tepatnya pada *AEC Council Meeting* 18 Oktober 2021 (ASEAN, 2021). Kemudian pada kepemimpinan Kamboja, tema ini masih dimasukkan ke dalam 19 butir PED, dengan agenda pembentukan kelompok kerja pendukung agenda tersebut (JETRO, 2022). Dengan berulangnya ekonomi sirkular sebagai sebuah bahasan, maka sekiranya perlu untuk mengetahui secara garis besar apakah yang dimaksud oleh konsep ini, sejauh apa perkembangan di kawasan, dan pada aspek apa yang masih dibutuhkan perbaikan.

Sekilas Mengenai Ekonomi Sirkular

Konsep ekonomi sirkular adalah sesuatu yang baru agak asing di telinga kita. Boulding (1966) menyebut hal ini sebagai *sistem tertutup*, dalam arti masukan (input) yang diproses menjadi luaran (output) dan luaran tetap terintegrasi dalam sistem produksi, yakni menjadi bahan baku untuk masukan pada proses produksi selanjutnya. Dengan semangat yang sama seperti pendahulunya, Ellen MacArthur Foundation (2013) melakukan reartikulasi bahwa ekonomi sirkular adalah pendekatan ekonomi baru yang menginginkan untuk menggunakan segala aspek di dalam kegiatan produksi, sehingga mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan. Basis dalam ekonomi sirkular terdiri dari “merancang” atau merencanakan limbah agar dapat terpakai dalam siklus produksi selanjutnya, penggunaan energi terbarukan, dan diversifikasi ragam masukan yang mampu digunakan sebagai bahan baku komoditas (Ellen MacArthur Foundation, 2013).

Jika pernah mendengar istilah 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle), hal ini merupakan beberapa aspek yang ada di dalam ekonomi sirkular. Bisa dikatakan bahwa aspek ekonomi sirkular sangat beragam. Keberagaman ini berupaya diatasi oleh Aspek yang ada di dalam ekonomi sirkular cukup beragam. Reike et. al (2017) merangkum dari berbagai aspek ada 10 aspek berbasis R, yang terdiri dari: (1) Refuse (penolakan), (2) Reduce (mengurangi), Re-sell/Re-use (menggunakan kembali), (4) Re-pair (memperbaiki) (5) Re-furbish (memproduksi dengan komponen yang diperbaiki/bekas), (6) Re-manufacture (memproduksi ulang dengan komponen), (7) Re-purpose (alih fungsi), (8) Re-cycle (pemrosesan ulang limbah) (9) Recover (penciptaan energi dari limbah) dan (10) Re-mine (memulung pada situs-situs pembuangan).

Diseminasi ide mengenai ekonomi sirkular menjadi penting. Berbeda dengan ekonomi linear yang cenderung menghasilkan limbah, ekonomi sirkular berupaya untuk menggunakan kembali limbah sebagai pasokan masukan sehingga setidaknya mengurangi jumlah limbah yang benar-benar tidak dapat dipakai. Setidaknya, hal tersebut mampu

memberi jangka waktu yang lebih lama bagi pengurangan suatu sumber daya yang terbatas sembari mengembangkan atau mencari sumber daya yang dapat diperbarui.

Ekonomi sirkular juga menjadi kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebagaimana yang ditawarkan oleh *sustainable development goals* (SDGs). Hal ini juga penting karena melihat kenyataan yang ada di lapangan dalam konteks ASEAN, produksi limbah dari negara-negara anggota tergolong intens. Dari aspek *municipal solid waste*/limbah padat perkotaan (MSW), maka secara garis besar limbah organik dan plastik menempati posisi dominan pada negara-negara yang bersangkutan (Jain et.al, 2017). Negara dengan agregat MWP tertinggi adalah Indonesia yakni 64.000.000 ton/tahun dan untuk negara tertinggi dalam aktivitas produksi limbah per kapita adalah Singapura yakni sebesar 3.763 kg/hari (Jain et.al, 2017). Ekonomi sirkular mampu hadir sebagai kerangka yang komprehensif untuk menanggulangi isu ini.

Membandingkan Ekonomi Sirkular di ASEAN dengan Uni Eropa

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka ASEAN masih di dalam tahap merintis implementasi konsep ekonomi sirkular di kawasan. ASEAN mampu belajar dari Uni Eropa, yang merupakan institusi kawasan yang cukup maju dalam pengembangan sistem ini. Uni Eropa melalui Komisi Eropa mengadopsi ekonomi sirkular sebagai program kerja semenjak 2015 lalu.

Dari titik tersebut, Uni Eropa mengembangkan instrumen pendukung instrumen pendukung, di antaranya yang cukup representatif seperti pembentukan kerja sama strategis bahan mentah, pengawasan pada implementasi ekonomi sirkular, dan penggunaan *eco-label* (European Commission, t.thn.) di dalam berbagai instrumen ini terdapat regulasi yang lebih mendetail dan berlaku secara menyeluruh bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

Salah satu contoh adalah pada aspek kerja sama strategis bahan mentah sangat dipengaruhi oleh dokumen *raw material initiative* yang diadopsi oleh Komisi Eropa untuk memastikan bahwa pengadaan barang mentah berdasarkan pada prinsip keberlanjutan (Eur-Lex, 2008). Selain itu, berkaitan pada aspek pengawasan maka terdapat *database* secara agregat Uni Eropa atau dari masing-masing negara anggota mengenai sejauh apa indikator-indikator pelaksanaan ekonomi sirkular telah terpenuhi (Eurostat, t.thn.).

Pada konteks ASEAN maka tidak jauh dari beberapa upaya yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini. Beberapa tambahan berkaitan dengan PED dari kepemimpinan Kamboja pada 2022 lalu, yakni telah ada rencana yang hampir mirip seperti fasilitasi pertukaran informasi (baik pengetahuan dan praktik) antara pemerintah dan pelaku usaha, kolaborasi antar pemangku kepentingan tentang penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan, dan penyusunan rekomendasi dari perspektif sosial-ekonomi dan lingkungan (JETRO, 2022). Hal ini sebenarnya merupakan reiterasi dari strategi prioritas *framework 2021* lalu, yang terdiri dari (1) harmonisasi standar dan *mutual recognition*, (2) fasilitasi dan keterbukaan perdagangan, (3) digitalisasi dan inovasi teknologi, (4) pendanaan keberlanjutan dan investasi inovatif, dan (4) penggunaan energi dan sumber daya secara efisien (ASEAN, 2021).

Upaya ASEAN untuk menerapkan konsep ini ternyata telah didahului oleh *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States* yang dicetuskan pada 2021 lalu dalam menanggulangi limbah plastik di laut. Telah ada pemetaan mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan beserta lini masa perkiraan implementasi program tersebut. *Regional action plan* telah menunjukkan upaya untuk menunjukkan aksi bersama dalam kebijakan, riset, kesadaran publik, dan partisipasi sektor privat dalam penanggulangan plastik (ASEAN, 2021).

Fokus yang spesifik dalam penanganan isu yang juga bersinggungan dengan isu lingkungan memang penting, begitu pula kerangka yang lebih luas seperti *Framework 2021*. Akan tetapi, perlu payung yang mampu memadukan keduanya. *Framework 2021* masih mencantumkan prinsip-prinsip normatif dan belum diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Berbeda dengan *New Circular Economy Action Plan* Uni Eropa, yang menandai sektor dan komoditas apa saja yang akan terpengaruhi oleh ekonomi sirkular (seperti limbah organik dan makanan, barang-barang elektronik, plastik, otomotif, tekstil, dan bahan konstruksi) beserta linimasa target yang juga mencakup komoditas yang telah disebutkan (European Commission, t. thn).

ASEAN memerlukan pendekatan holistik dan target yang lebih beragam dengan linimasa yang berbeda-beda karena tidak hanya plastik saja yang menjadi sumber limbah sebagai imbas dari praktik ekonomi linear. Jika tidak

memungkinkan untuk merumuskan berbagai ragam *action plan* untuk berbagai komoditas/isu secara simultan, setidaknya ASEAN bisa menambah *regional action plan* baru mengenai pengelolaan limbah organik/makanan, semenjak isu ini menempati posisi yang signifikan di masing-masing negara anggota ASEAN. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri (baik perusahaan besar atau medium, kecil dan mikro), dan masyarakat dalam penanggulangan isu ini sangat dibutuhkan.

Memasukkan Ekonomi Sirkular pada Tata Kelola Rantai Pasok ASEAN

Adanya seperangkat regulasi yang definitif dan seragam mampu menjadi pendukung bagi industri dari skala apapun di kawasan apapun mampu melakukan *upgrading* di dalam rantai pasok global. *Upgrading* adalah upaya untuk sebuah perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan nilai komoditas yang diproduksi dan diperdagangkan, sehingga produsen mampu “naik tangga” dalam rantai pasok global (Gereffi dan Fernandez-Stark, 2016).

Ada berbagai cara yang disebutkan, yakni penggantian teknis produksi (product-processing), penggantian produk yang dihasilkan (product), menciptakan “rantai baru” dalam satu rantai pasok (functional), berpindah ke rantai pasok di sektor yang berbeda (inter-chain) (Gereffi dan Fernandez-Stark, 2016). Dalam konteks ini, sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan *upgrading* yang *eco-friendly* ketika ia telah mengintegrasikan proses-proses *upgrading* dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular.

Untuk memastikan proses tersebut, maka ASEAN bisa mengunjungi kembali salah satu aspek tata kelola rantai pasok ala Kaplinsky dan Morris (2000), yang terinspirasi dari tata kelola pemerintahan secara politis yakni aspek *legislatif, yudikatif, dan eksekutif*. Misalkan dari aspek legislatif, ASEAN mampu menjadi wadah negosiasi dan menunjukkan komitmennya dengan menaikkan level *regional action plan* menjadi sebuah perjanjian intra-ASEAN. Harmonisasi bukanlah isu baru di ASEAN dan ini dibuktikan dari kemampuan ASEAN untuk bersepakat pada komoditas elektronik, dari aspek keamanan dan kompatibilitas piranti di kawasan pada 1997 lalu (ASEAN, 2012). *Regional action plan* dan harmonisasi standar sebagai tujuan strategis bahasan dalam *Framework 2021* menjadi tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan proses integrasi kawasan ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Integrasi regional di dorong dengan intens, akan tetapi di saat yang sama masing-masing negara memiliki perbedaan dalam jenis regulasi yang mengatur plastik.

ASEAN juga bisa menerapkan aspek pengawasan dengan membentuk agensi khusus yang mengawasi seberapa patuhkah negara-negara ASEAN dengan kesepakatan tersebut dalam menjalankan aspek *yudikatif*-nya. *Regional action plan* pada isu plastik maritim telah menyebutkan hal ini, tetapi diharapkan ke depannya mekanisme berbasis kawasan dan lebih eksplisit ditunjukkan pada revisi *Framework 2021* atau usulan *regional action plan* mengenai limbah organik/makanan. Agensi khusus tersebut mampu memberikan data secara komprehensif dan memberikan “rapor” kepada negara ataupun pelaku usaha.

Sinergi--seperti yang disebutkan dalam *Framework 2021*--antara pemerintah nasional, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi aspek *eksekutif* yang dijalankan oleh berbagai aktor. Menerjemahkan hal tersebut ke tataran yang lebih praktis, masing-masing pemerintah nasional dengan pendekatan *top-down* di lingkup nasional dapat memfasilitasi kelompok kerja teknis untuk mendampingi para pelaku usaha. Sementara dari pendekatan yang sifatnya *bottom-up* dapat dibagi menjadi dua: pertama, pelaku usaha mampu membentuk asosiasi antar pengusaha sebagai media komunikasi dan fasilitasi negosiasi dengan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi sirkular. Sedangkan kedua, dari institusi riset dan universitas dapat mengisi aspek seperti potensi, penemuan, dan asesmen baik berbasis teknologi ataupun kebijakan. Bahkan, sinergi antar aktor ini sebisa mungkin tidak hanya terbatas pada lingkup nasional saja, tetapi juga antar pelaku usaha dan akademisi lintas ASEAN untuk mewujudkan penerapan ekonomi sirkular ASEAN secara inklusif, partisipatif, dan membumi. Perhatian ini tidak lepas dari pandangan yang menyatakan bahwa selama ini ASEAN sangat elitis dan berpusat pada negara, walaupun sebenarnya masyarakat menganggap ASEAN -khususnya MEA- mampu memberikan manfaat (Benny et. al, 2015). Dengan mendorong sinergi, maka tidak hanya memastikan kepentingan berbagai kalangan terakomodasi, tetapi juga bersesuaian dengan keinginan ASEAN untuk menjadi lebih *people-centered*, berbasis pada masyarakat (ASEAN, 2014).

Harapan dari Indonesia

Lagi-lagi, masih populernya ekonomi linear dikarenakan “murahnya”, proses yang dibutuhkan, semenjak sistem tersebut tidak menghitung eksternalitas berupa kerugian atau dampak negatif terhadap lingkungan. Lestarinya sistem ini juga ditunjang dengan ekosistem regulasi yang sekiranya masih belum komprehensif dalam itikad transisi menuju ekonomi sirkular. Malahan karena anggapan perpindahan sistem ini memakan biaya yang banyak (baik dari mata produsen ataupun konsumen, maka akan sulit kiranya jika tidak ada infrastruktur pendukung transisi. Dalam konteks ini, regulasi yang benar-benar matang dan pro-ekonomi sirkular sangat dibutuhkan.

Menyambut keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, harapannya adalah Indonesia tetap membawa semangat untuk melanjutkan agenda ekonomi sirkular yang sudah disampaikan oleh dua periode sebelumnya. Untuk menunjukkan itikad tersebut, maka *Indonesia perlu menunjukkan dirinya sebagai contoh terdepan dalam penerapan ekonomi sirkular*. Telah ada upaya dari pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, begitu pula negara-negara ASEAN lain yang memiliki kebijakan yang serupa. Perpres tersebut sayangnya terlihat masih mendorong penanggulangan pada arah hillir atau konsumsi saja, sehingga perlu merancang regulasi yang menasar pada produksi yang berkaitan dengan limbah industri sesuai dengan jenis komoditasnya.

Inisiasi dan implementasi ekonomi sirkular yang sifatnya *bottom-up* dan representatif sudah mulai tersebar di Indonesia (Hegeman, 2019; Purwanto dan Prasetyo, 2021; Perdana, 2021; Argo dan Rachmawati, 2021). Pemerintah nasional diharapkan mampu meluncurkan inisiasi *top-down* dengan menggagas wilayah khusus ekonomi sirkular. Walaupun masih ada kerancuan pada penunjukan dan otoritas wilayah mana yang menjadi pusat implementasi (kota, kabupaten, atau provinsi), pada hakikatnya yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai program tersebut hanya menjadi *gimmick* belaka, yakni hanya slogan tanpa diikuti dengan implementasi riil di wilayah yang ditunjuk (Arfani, komunikasi personal, 30 November 2022). Sembari menunjukkan itikad serius melalui dengan program konkret yang dijalankan, Indonesia juga beriringan mampu memberikan tawaran atau inisiasi kawasan dalam implementasi ekonomi sirkular dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Dengan melaksanakan hal tersebut, Indonesia mampu mengambil kesempatan tersebut sebagai pemimpin ASEAN yang menerapkan *leading by example*.*

Referensi

- Arfani, R.A. (30 November 2022). *Ekonomi Sirkular dalam Perdagangan Internasional* [Webinar]. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Argo, T. A., & Rachmawati, Y. (2021). The Prospect of Implementing Circular Economy of Solid Waste in Small Islands: A Case Study of Karimunjawa Islands District, Central Java-Indonesia. Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 799, No. 1, p. 012006). IOP Publishing. <https://doi.org/-1755/10.1088/012006/1/799/1315>
- ASEAN. (2012, Oktober 17). *Harmonization of Standards in ASEAN*. Dipetik November 30, 2022, dari <https://asean.org/harmonization-of-standards-in-asean/>
- ASEAN. (2014, November 12). *Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN Community's Post 2015 Vision*. Dipetik November 30, 2022, <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/25th-NPT-Declaration-on-Post-2015-Vision-as-of-11-Nov-2014.pdf>
- ASEAN. (2021, Oktober 21). *ASEAN adopts framework for Circular Economy*. Dipetik November 23, 2022, dari <https://asean.org/asean-adopts-framework-for-circular-economy/>
- ASEAN. (2021). *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States*. Jakarta: ASEAN. Dipetik Agustus 15, 2022, dari https://asean.org/wp-content/uploads/2021/05/FINAL_210524-ASEAN-Regional-Action-Plan_Ready-to-Publish_v2.pdf
- ASEAN. (2021, Oktober). *Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community*. Dipetik Agustus 13, 2022, dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/Brochure-Circular-Economy-Final.pdf>

- Benny, G., Moorthy, R., Daud, S., & Othman, Z. (2015). Perceived elitist and state-centric regional integration process: Impact on public opinions for the formation of ASEAN community. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2 S1), 203. <https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/5880/5665>
- Boulding, K. E. (1966). The Economics of the Coming Spaceship Earth. Dalam H. Jarrett, *Environmental Quality in a Growing Economy* (hal. 3-14). Baltimore: Resources for the Future/Johns Hopkins University Press. Dipetik November 28, 2022, dari http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/thoc/readings/boulding_spaceshipearth.pdf
- Eur-Lex. (2008, November 8). *52008DC0699 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The raw materials initiative : meeting our critical needs for growth and jobs in Europe*. Dipetik November 28, 2022, dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0699&from=EN>
- European Commission. (t.thn.). *Circular Economy*. Dipetik November 28, 2022, dari https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy_en#:~:text=The%20EU's%20transition%20to%20a,and%20to%20halt%20biodiversity%20loss.
- Eurostat. (t.thn.). *Policy Context - Circular Economy*. Dipetik November 28, 2022, dari <https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework>
- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2016). Global value chain analysis: a primer. Durham: The Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness. https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/12488/2016-07-28_GVC%20Primer%202016_2nd%20edition.pdf
- Hegeman, S. (2019). DISTRIK MELINGKAR: Circular housing in Indonesia. [Tesis, Delft University of Technology]. <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:47f57d0c-cd1e-4abf-8f85-85a14665eef6/datastream/OBJ1/download>
- Jain, A., Borongan, G., Kashyap, P., Thawn, N. S., Honda, S., & Memon, M. (2017). Summary report: waste management in ASEAN countries. *United Nations Environment Programme, Thailand*. Dipetik https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21134/waste_mgt_asean_summary.pdf?sequence=1&isAllowed=
- JETRO. (2022, Maret 18). *Cambodia's 2022 Priority Economic Deliverables (PEDs)*. Dipetik November 17, 2022, dari https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=33366651
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). *A handbook for value chain research*. Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies. https://www.marketlinks.org/sites/default/files/media/file/2020-11/manualparainvestigacion_0.pdf
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, November 13). *Angkat Tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia Resmi Menjadi Ketua ASEAN 2023*. Dipetik November 28, 2022, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4719/angkat-tema-asean-matters-epicentrum-of-growth-indonesia-resmi-menjadi-ketua-asean-2023>
- MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy. *Journal of Industrial Ecology*, 2(1), 23-44. https://www.werktrends.nl/app/uploads/2015/06/Rapport_McKinsey-Towards_A_Circular_Economy.pdf
- Perdana, B. E. G. (2021). Circular Economy of Used Cooking Oil in Indonesia: Current Practices and Development in Special Region of Yogyakarta. *Journal of World Trade Studies*, 6(1), 28-39. <https://doi.org/10.22146/jwts.v6i1.1541>
- Purwanto, E., & Prasetyo, T. (2021). Changing the Paradigm of a Linear Economy into a Circular Economy in Residential Waste Management. Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 945, No. 1, p. 012054). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/945/1/012054>

MUHAMMAD RASYID RIDHO lahir di Balikpapan, 19 Desember 1995. Ia adalah alumni dari Master of Arts (M.A.) Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada Desember 2021. Fokus penelitiannya terkait ekonomi politik global, Asia Tenggara, dan China. Kini ia adalah asisten peneliti junior pada Pusat Studi Perdagangan Dunia/Center of World Trade Studies Universitas Gadjah Mada (PSPD/CWTS UGM). Ia dapat dihubungi melalui rasyid.ridho95@gmail.com.

Ketahanan Manusia untuk Meningkatkan Ekonomi ASEAN di Masa Covid-19

Nufzatutsaniah, Yuga Pratama, Nurismalatri

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak masalah perekonomian yang sangat parah (Olivia et al., 2020; Padhan & Prabheesh, 2021; Tisdell, 2020). Ketahanan ekonomi yang tercermin dalam kinerja ekonomi menjadi faktor penting yang perlu dikendalikan (Shutters et al, 2015). Pandemi Covid-19 memicu krisis ekonomi global terbesar dalam lebih dari satu abad termasuk kawasan ASEAN yang diliputi guncangan krisis moneter, fluktuasi harga komoditas pokok dan ketidak pastian dunia ekonomi yang dapat memperbesar risiko krisis dan stagnasi.

Pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan pengangguran yang menyebabkan migrasi tenaga kerja dan meningkatnya kemiskinan (Rai dkk, 2021). Krisis ini juga memperburuk ketimpangan terutama menimpa kaum perempuan, pekerja usia muda, dan lansia di Asia Tenggara. Para pekerja tanpa keterampilan khusus, pekerja di sektor ritel dan perekonomian informal, serta usaha kecil yang tidak memiliki eksistensi digital merupakan kelompok yang paling terkena dampak dan berpeluang semakin memburuk.

Tabel 1
Data Kependudukan Negara ASEAN

Negara	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Indonesia	273.523.615	1.904.569	151
Filipina	109.581.078	300.000	368
Vietnam	97.338.579	331.690	314
Thailand	69.799.978	513.120	137
Malaysia	32.365.999	329.847	99
Kamboja	16.718.965	181.035	95
Laos	7.275.560	236.800	32
Singapura	5.850.342	728	8.358
Brunei Darussalam	437.479	5.765	83
Myanmar	54.409.800	676.575	83

Sumber : *nasional.kompas.com*, 2022

ASEAN memiliki sepuluh negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Berdasarkan tabel 1, Singapura merupakan negara paling padat penduduknya, kemudian disusul Filipina dan Vietnam. Sementara, kepadatan penduduk terendah adalah Laos dengan kepadatan penduduk di angka 32 jiwa/km². Bank Pembangunan Asia atau ADB melaporkan sedikitnya 4,7 juta penduduk Asia Tenggara alias ASEAN masuk ke jurang kemiskinan pada 2021 akibat pandemi Covid-19.

Jumlah tersebut merupakan perbandingan terhadap baseline perkiraan jumlah penduduk miskin pada 2020 dalam skenario normal atau tanpa Covid-19. Kelompok yang tergolong miskin ekstrem adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita kurang dari US\$ 1,9 atau Rp 27.170 per hari (kurs Rp 14.300). Meski demikian, penambahan jumlah penduduk miskin ekstrem tahun lalu lebih kecil dibandingkan tahun pertama pandemi, yakni 5,4 juta orang pada 2020.

Populasi penduduk Asean menjadikan ASEAN memiliki basis konsumen yang luas, yakni terbesar ke-3 setelah Tiongkok dan India secara global dan lebih dari 50 persen populasi Asean berusia di bawah 30 tahun, sehingga mereka adalah bagian terbesar dari angkatan kerja. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2020 Indonesia dan negara lain di kawasan ASEAN mengalami kontraksi berat, namun, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi ASEAN positif menunjukkan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang resilien. Indonesia menempati posisi tertinggi PDB di tahun 2021 sebesar 3.70 % atau mencapai US\$1,19 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut merupakan yang terbesar dibanding 9 negara ASEAN lainnya. Nilai PDB Indonesia pada 2021 juga mencapai sekitar sepertiga PDB ASEAN yang nilai totalnya US\$3,34 kuadriliun.

Tabel 2
Indikator Kinerja Keuangan ASEAN Tahun 2021

Negara	PDB	Inflasi	Current Account Of Selected Economies	Cadangan Devisa (Milyar USD)
Indonesia	3.70 %	1.9 %	3.46 %	144,905
Malaysia	3.10 %	3.1 %	12.89 %	116,890
Filipina	5.70 %	3.6 %	-3.58 %	108,794
Singapura	2.30 %	3.7 %	71.60 %	417,904
Thailand	1.50 %	2.4 %	-4.77 %	245,997

Sumber : SEKI (BI, 2022)

Pada perkembangan inflasi, kenaikan inflasi hampir terjadi disemua negara yang tergabung dalam ASEAN. Data inflasi Indonesia tercatat 1.9 persen pada Akhir tahun 2022. Sementara inflasi Malaysia mencapai 3.1 persen. Perkembangan cadangan devisa ASEAN pada Filipina senilai US\$108,75 miliar pada 2021, nilai tersebut cukup untuk membiayai 9,58 bulan impor negara tersebut. Cadangan devisa merupakan aset yang disimpan pada cadangan oleh bank sentral dalam mata uang asing. Bila terjadi penurunan cadangan devisa maka dapat membuat kemampuannya untuk membiayai impor dan utang luar negeri pemerintah juga turun. Harga komoditas energi yang cenderung naik dampak dari invasi Rusia ke Ukraina telah memicu krisis di banyak negara. Dengan naiknya harga minyak telah memicu inflasi tinggi dunia ditambah lagi dengan kenaikan harga pangan dunia telah menyulut krisis pangan dunia. Dengan naiknya harga pangan dunia yang disertai dengan menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) membuat harga pangan menjadi semakin mahal. Hal ini membuat kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangannya menjadi semakin terbatas seiring menipisnya cadangan devisa negaranya.

Definisi dan Indikator Ketahanan Ekonomi

Definisi ketahanan ekonomi menurut Rose (2004, 2007 & 2017) dibedakan dalam dimensi ketahanan ekonomi statis dan ketahanan ekonomi dinamis. Secara statis mengacu pada kemampuan sistem untuk mempertahankan tingkat tinggi berfungsi saat terkejut (Holling, 1973). Dalam ketahanan ekonomi statis, mengacu pada konsep ekonomi inti dari mengatasi kelangkaan sumber daya dapat mengalami kelangkaan pada titik waktu tertentu seperti adanya bencana alam. Pada ketahanan dinamis mengacu pada kemampuan dan kecepatan sistem untuk pulih (Pimm, 1984). Penggunaan sumber daya pada ketahanan ekonomi ekonomis fokus pada efisiensi dari waktu ke waktu untuk investasi dalam perbaikan dan rekonstruksi pada sisi produktivitas di masa depan. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari beberapa

indikator yaitu kinerja ekonomi suatu negara pada kondisi normal, selama dan setelah krisis; kebijakan ekonomi yang tepat serta kebijakan penanganan sumber daya Di Caro & Fratesi (2018). Indikator permasalahan ekonomi lainnya menurut Altig et al, (2020) yaitu volatilitas pasar saham, ketidakpastian kebijakan, ketidakpastian pertumbuhan bisnis, peramalan pertumbuhan PDB di masa depan dan ukuran ketidakpastian makro berbasis model.

Pengukuran ketahanan ekonomi dilakukan pada tingkat ekonomi mikro (investasi dalam perbaikan dan rekonstruksi stok modal yang rusak), meso (industri/pasar), dan makro setelah bencana (Dormady et al, 2018; Rose & Krausmann, 2013). Salah satunya dengan mempertahankan perilaku bisnis yang menjadi kunci pemulihan jangka pendek dan kerangka kerja untuk memilih indikator jangka pendek yang sesuai (penilaian efektivitas biaya taktik ketahanan secara individu dan kelompok dan manajemen rantai pasokan).

Solusi Ketahanan Ekonomi Melalui Ketahanan Manusia

Ketahanan merupakan kekuatan yang ditemukan dalam individu yang telah menguasai kesulitan. Walsh (2015) dan Masten & Cicchetti (2016) mendefinisikan ketahanan sebagai kapasitas untuk bertahan dan pulih dari tantangan hidup yang berat. Tantangan terberat saat Covid-19 adalah masalah kesehatan dan ekonomi. Permasalahan kegiatan ekonomi baik individu maupun organisasi erat kaitannya dengan sumber daya manusia.

Keadaan sosial manusia dapat mempengaruhi ketahanan kesulitan ekonomi (Donnellan, et al, 2009; Noy & Yonson, 2018). Keadaan sosial meliputi keadaan psikologis dan interpersonal seseorang seperti karakteristik pribadi seseorang, tindakan atas hal-hal yang dapat dikendalikan; menghadapi kebutuhan akan kepastian; belajar menerima ketidakpastian; memfokuskan pada situasi saat ini serta mengelola stress dan kecemasan. Keadaan sosial yang baik dapat dikatakan sebagai kekuatan hidup seseorang dimana salah satu sumbernya berakar dalam keyakinan agama dan nilai keyakinan spiritual manusia (Fry & Debats, 2010; Nufzatsaniah dkk, 2022). Agama menjadi pedoman hidup manusia karena di dalamnya terdapat seperangkat nilai bagi manusia dalam menghadapi kehidupan.

Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Hubungan manusia dengan permasalahan ekonomi di masa Covid-19 juga dapat terlihat dari adanya peningkatan risiko kredit macet di industri perbankan. Seperti yang kita ketahui, Industri perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Penyebab utama terjadinya risiko kredit macet menurut Nurismalatri (2022) berasal dari risiko sumber daya manusia.

Hal ini terjadi apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, tidak terpenuhinya jumlah pegawai, kebiasaan dan sikap pegawai, keterampilan pegawai, pendidikan, tingkat upah yang berlaku sesuai dengan upah minimum regional pada masing masing wilayah dan persaingan memperebutkan tenaga kerja berkualitas. SDM yang memadai dan mumpuni menjadi elemen penting dan pondasi dalam inovasi termasuk penerapan manajemen risiko (Spedding & Rose, 2007; Firdaus, 2014; Salampasis dkk, 2015). Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengembangan pengetahuan (Figueiredo dkk, 2016) dan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan (Fikriawan, 2018; Alijoyo & Munawar, 2019; Otoo, 2019).

Berdasarkan tabel 2, Singapura merupakan negara dengan peringkat indeks pembangunan manusia tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand berada pada kategori *very high human development*, disusul oleh Indonesia dan Vietnam pada kategori *high human development* kemudian di peringkat *medium human development* terdapat Negara Filipina, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya

Country	SDG3		SDG4.3	SDG4.4	SDG8.5	GNI per capita rank minus HDI rank	HDI rank
	Human Development Index (HDI)	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	Gross national income (GNI) per capita		
	Value	(years)	(years)	(years)	(2017 PPP \$)		
Years	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2020
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT							
Singapore	0.939	82.8	16.5	11.9	90,919	-10	10
Brunei Darussalam	0.829	74.6	14.0	9.2	64,490	-42	49
Malaysia	0.803	74.9	13.3	10.6	26,658	-8	61
Thailand	0.800	78.7	15.9	8.7	17,030	6	64
HIGH HUMAN DEVELOPMENT							
Indonesia	0.705	67.6	13.7	8.6	11,466	-11	116
Viet Nam	0.703	73.6	13.0	8.4	7,867	6	113
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT							
Philippines	0.699	69.3	13.1	9.0	8,920	-3	113
Lao People's Democratic Rej	0.607	68.1	10.1	5.4	7,700	-18	142
Cambodia	0.593	69.6	11.5	5.1	4,079	3	148
Myanmar	0.585	65.7	10.9	6.4	3,851	5	145

Sumber : UNDP (United Nations Development Programme, 2022)

Memperkuat ketahanan manusia menjadi salah satu dari lima strategi peningkatan ekonomi pascacovid 19 di Negara ASEAN berdasarkan kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN (ACRF, 2022). Empat strategi lainnya yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Mathur (1999) mengungkapkan bahwa manusia menjadi pondasi dari strategi pembangunan ekonomi dengan menjadi bagian kebijakan jangka panjang atas dasar efisiensi. Manusia di dalam pencapaian tingkat kegiatan ekonomi menjadi sangat penting karena dari hasil pengujian terbukti bahwa pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kegiatan ekonomi (Tanuwijaya & Luthfi (2021).

Manusia yang berkualitas harus memenuhi aspek manusia yang sehat, memiliki tingkat pendidikan yang berkualitas serta mampu memenuhi kebutuhannya secara optimal sehingga akan mendorong pencapaian tingkat kegiatan ekonomi dan ketahanan secara optimal (Oprea et al,2020). Kondisi manusia berkualitas ini tergambar dalam dimensi dasar pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sehingga dapat dipahami bahwa Singapura telah berhasil membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dengan sangat baik dan menempati posisi 10 dari ranking Indeks Pembangunan manusia Dunia, menghasikan pendapatan per kapita yang sangat tinggi yaitu \$ 90,919 pertahun, disusul oleh Brunei Darussalam sebesar \$ 64,490 dan Malaysia yang memiliki pendapatan per kapita sebesar \$ 26,658 pertahun.

Kesimpulan

Konsekuensi dari adanya krisis pandemi Covid-19 yaitu berubahnya struktur ekonomi baru yang memerlukan serangkaian mitigasi risiko keuangan dan mengarahkan ekonomi menuju pemulihan yang berkelanjutan dan adil. Salah satu strategi utama ASEAN dalam meningkatkan ekonomi melalui ketahanan manusia. Pondasi utama ketahanan manusia berasal dari keyakinan agama, sehingga agama menjadi faktor penting dalam berkegiatan ekonomi.

Agama tercermin dalam perilaku manusia seperti karakteristik pribadi seseorang, tindakan atas hal-hal yang dapat dikendalikan; menghadapi kebutuhan akan kepastian; belajar menerima ketidakpastian; memfokuskan pada situasi saat ini serta mengelola stress dan kecemasan. Dengan adanya ketahanan yang baik pada manusia, maka seseorang dapat meningkatkan kualitas dalam berkegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi dan distribusi sehingga dapat meningkatkan kinerja ekonomi negara dan regional ASEAN dengan memastikan persaingan yang setara, menginkubasi persaingan usaha yang sehat. *

Referensi

- ACRF. (2022). *Asean Comprehensive Recovery Framework*. <https://asean.org/book/asean-comprehensive-recovery-framework-implementation-plan/> Diakses pada 28 Desember 2022
- Alijoyo, F. A., & Munawar, Y. (2019). Faktor yang mempengaruhi Maturitas manajemen Risiko Organisasi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(1), 67-79.
- Altig, D., Baker, S., Barrero, J. M., Bloom, N., Bunn, P., Chen, S., Davis, S. J., Leather, J., Meyer, B., Mihaylov, E., Mizen, P., Parker, N., Renault, T., Smietanka, P., & Thwaites, G. (2020). Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic. *Journal of Public Economics*, 191, 104274. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274>
- Di Caro, P., & Fratesi, U. (2018, March 1). Regional determinants of economic resilience. *Annals of Regional Science*. Springer Verlag. <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0858-x>
- Donnellan, M. B., Conger, K. J., McAdams, K. K., & Neppl, T. K. (2009). Personal characteristics and resilience to economic hardship and its consequences: Conceptual issues and empirical illustrations. *Journal of Personality*, 77(6), 1645–1676. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00596.x>
- Dormady, N., Roa-Henriquez, A., & Rose, A. (2018). *Economic Resilience of the Firm: A Production Theory Approach*. *International Journal of Production Economics*. doi:10.1016/j.ijpe.2018.07.017
- Figueiredo, E., Pais, L., Monteiro, S., & Mónico, L. (2016). Human resource management impact on knowledge management: Evidence from the Portuguese banking sector. *Journal of Service Theory and Practice*, 26(4), 497–528. <https://doi.org/10.1108/JSTP-12-2014-0269>
- Fry, P. S., & Debats, D. L. (2010). Sources of human life-strengths, resilience, and health. In *New Frontiers in Resilient Aging: Life-Strengths and Well-Being in Late Life* (pp. 59–15). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511763151.003>
- Firdaus, Z. A. (2014). *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual review of ecology and systematics*, 1-23.
- Masten, A., & Cicchetti, D. (2016). Resilience in development: Progress and transformation. In D. Cicchetti (Ed.), *Developmental psychopathology* (3rd ed., Vol. IV, pp. 271–333). New York, NY: Wiley.
- Mathur, V. K. (1999). Human capital-based strategy for regional economic development. *Economic Development Quarterly*, 13(3), 203–216. <https://doi.org/10.1177/089124249901300301>
- Nasional.kompas.com. (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/24/02000021/kepadatan-penduduk-negara-asean> diakses pada 20 Desember 2022
- Noy, I., & Yonson, R. (2018, August 10). Economic vulnerability and resilience to natural hazards: A survey of concepts and measurements. *Sustainability (Switzerland)*. MDPI. <https://doi.org/10.3390/su10082850>
- Firdaus, Z. A. (2014). *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Oprea, F., Onofrei, M., Lupu, D., Vintila, G., & Paraschiv, G. (2020). The determinants of economic resilience. The case of Eastern European regions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/su12104228>

- Otoo, F. N. K. (2019). *Human resource development (HRD) practices and banking industry effectiveness. European Journal of Training and Development*. doi:10.1108/ejtd0068-2018-07-
- Padhan, R., & Prabheesh, K. P. (2021). The economics of COVID-19 pandemic: A survey. *Economic Analysis and Policy*, 70, 220–237. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.012>
- Pimm, S. L. (1984). The complexity and stability of ecosystems. *Nature*, 307(5949), 321-326.
- Rai, S. S., Rai, S., & Singh, N. K. (2021). Organizational resilience and social-economic sustainability: COVID-19 perspective. *Environment, Development and Sustainability*, 23(8), 12006–12023. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01154-6>
- Rose, A. (2004). Defining and measuring economic resilience to disasters. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*.
- Rose, A. (2007). Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. *Environmental Hazards*, 7(4), 383-398.
- Rose, A. (2017). Benefit-cost analysis of economic resilience actions. In *Oxford research encyclopedia of natural hazard science*.
- Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 5, 73-83.
- Salampasis, D. G., Mention, A. L., & Torkkeli, M. (2015). Human resources management and open innovation adoption in the banking sector: A conceptual model. In *International Journal of Business Excellence* (Vol. 8, pp. 457–433). Inderscience Publishers. <https://doi.org/10.1504/IJBEX.2015.070314>
- Shutters, S. T., Muneeppeerakul, R., & Lobo, J. (2015). Quantifying urban economic resilience through labour force interdependence. *Palgrave Communications*, 1. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.10>
- Spedding, L. S., & Rose, A. (2007). *Business risk management handbook: A sustainable approach*. elsevier.
- Tanuwijaya, J., & Luthfi, M. Y. (2021). Ketahanan Pangan dan Pembangunan Manusia Serta Dampaknya Terhadap Kegiatan Ekonomi : Studi kasus Negara ASEAN. *Media Ekonomi*, 29(1), 1-12.
- Tisdell, C. A. (2020). Economic, social and political issues raised by the COVID-19 pandemic. *Economic Analysis and Policy*, 68, 17–28. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.08.002>
- Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.
- World Bank. (2022). *World Development report 2022 Finance For An Equitable Recovery*

NUFZATUTSANIAH, YUGA PRATAMA dan NURISMALATRI merupakan dosen atau pengajar pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka dapat dihubungi melalui dosen01011@unpam.ac.id.

***Psychological Well-Being* dalam Membangun Kesiapan *Future Work* Masyarakat ASEAN**

Imas Damayanti Lovita

Problem Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN. Berdasarkan data yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) terhadap lima negara anggota ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia menjadi yang tertinggi kedua diantara lima negara ASEAN, yaitu sebesar 6,6% pada tahun 2022. Sedangkan tingkat pengangguran terendah di ASEAN adalah Thailand, yaitu sebesar 1,5% (IMF, 2022).

Masalah pengangguran perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena merupakan masalah yang fundamental. Pengangguran dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Hal ini berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan nasional suatu bangsa (Siahaan, 2020). Banyaknya pengangguran dapat membahayakan kondisi suatu negara. Negara akan sulit mengalami kesejahteraan dan kemakmuran.

Pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dapat dilakukan dengan cara mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, perlu adanya kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan kerja dan peluang kerja di masa depan. Selain itu, tingkat pengangguran juga memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu negara. Hal ini pun berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Kesiapan *Future Work* Masyarakat ASEAN

Tantangan Kerja Masa Depan

Penggunaan teknologi dalam kehidupan sudah tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditinjau dari banyaknya penggunaan teknologi di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Peran teknologi antara lain dapat membantu aktivitas manusia, membuat produktivitas meningkat, dan kinerja lebih efektif dan efisien. Namun, dampak lain dari penggunaan teknologi secara massal adalah bangkitnya otomasi digitalisasi dan melemahnya tenaga kerja manusia (Bostrom, 2014).

Machine learning dan *artificial intelligence* akan mempermudah pekerjaan manusia, sehingga penggunaan kinerja manusia berkurang. Sekarang banyak perusahaan yang menggunakan tenaga robot dan kecerdasan mesin dalam pekerjaan. Tak hanya itu, kini kecerdasan buatan (AI) sudah mulai digunakan dalam pengambilan keputusan (Jarrahi, 2018). Jika hal ini dibiarkan berlanjut tanpa solusi, maka akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dengan memperbanyak jumlah pengangguran.

Future Work Masyarakat ASEAN

Salah satu faktor munculnya pengangguran adalah rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia, baik dari segi pendidikan, keterampilan, dan keahlian (Wijayanto & Ode, 2019). Rendahnya daya saing erat kaitannya dengan kesiapan kerja. Untuk membentuk kesiapan kerja diperlukan kesehatan mental pada setiap individu. Salah satu bentuk kesehatan mental dalam menghadapi tantangan kerja di masa depan adalah *psychological well-being*. *Psychological well-being* merupakan gambaran baik tentang kondisi psikologis seorang individu (Ryff & Keyes, 1995). Lebih lanjut (Ryff C. D.,

2014) menjelaskan bahwa *psychological well-being* dapat terkait dengan kehidupan kerja seseorang. Individu dengan kondisi psikologis yang baik dapat melakukan kinerja yang optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam menghadapi bangkitnya otomasi digitalisasi, masyarakat perlu dibekali dengan kesiapan menuju pekerjaan di masa depan. *Future Work* atau pekerjaan masa depan merupakan gambaran pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan, prospek apa saja yang perlu dilatih dan dikembangkan, serta keterampilan dan kompetensi terkait pekerjaan di masa depan. Semua aspek tersebut perlu dipelajari dan diaplikasikan sebagai bekal menuju masyarakat yang sejahtera.

Lantas, apa saja *skill* yang dibutuhkan pada pekerjaan di masa depan? Pekerjaan di masa depan memerlukan individu yang cerdas dan melek teknologi. Saat ini, cerdas saja tidak cukup tanpa dibekali dengan penguasaan teknologi. Kemampuan teknologi dasar, seperti mengoperasikan komputer, menguasai *Microsoft Office* (*Word, Excel, Powerpoint, dll*), dan internet adalah modal dasar menuju kesiapan kerja di masa depan.

Terdapat beberapa *skill* yang perlu disiapkan oleh masyarakat ASEAN untuk memasuki dunia kerja (Haikal, 2022) diantaranya:

Pertama, teknik *interview*. *Interview* atau wawancara dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan untuk keperluan apa saja (organisasi, magang, *internship*, atau pelamar pekerjaan). *Interview* merupakan tes sangat penting dalam menentukan layak tidaknya seseorang untuk bekerja. Teknik *interview* yang baik dan benar adalah menjawab pertanyaan sesuai kondisi diri, tetapi cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Seseorang yang memiliki karakter kuat, pekerja keras, ramah, serta sopan merupakan daya tarik yang diperlukan perusahaan. Kemampuan lainnya yang tak kalah penting adalah kemampuan 4C, yaitu kolaborasi, kritis, kreatif, dan komunikatif. Sampaikan harapan dan target anda di perusahaan. Ceritakan latar belakang, pengalaman, dan *job description* yang anda harapkan dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Tak lupa perhatikan *gesture* saat berbicara agar lebih meyakinkan.

Kedua, kemampuan *copywriting*. Kemampuan *copywriting* sangatlah penting untuk menginformasikan produk perusahaan. Selain itu, *skill copywriting* juga digunakan sebagai media promosi dan pemasaran, seperti iklan *digital marketing*, postingan media sosial, *headline news*, *landing page*, dan artikel *blog*.

Ketiga, kemampuan negosiasi atau *sales*. Negosiasi atau *sales* merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk merealisasikan tujuan masing-masing, seperti menjual barang atau jasa dan merencanakan sebuah proyek. Kemampuan negosiasi dapat digunakan saat menawarkan sebuah proposal, produk, dan membangun sebuah usaha.

Keempat, *networking*. *Networking* adalah kemampuan seseorang dalam membangun dan memelihara jaringan dalam jangka waktu panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. *Networking* yang baik sangat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan karier di masa depan.

Kelima, manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola konflik (masalah) dengan menyusun strategi dan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam dunia kerja tentu akan menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, kemampuan manajemen konflik sangat diperlukan dalam mengatasi beragam permasalahan yang muncul untuk dicari solusi terbaik.

Kelima *skill* tersebut diperlukan dalam mempersiapkan *future work* masyarakat ASEAN. Perlu dipahami bahwa otomasi digitalisasi bukan diciptakan untuk mengganti kinerja manusia, melainkan untuk mempermudah aktivitas manusia. Adapun penggunaan kecerdasan buatan tetap membutuhkan pengaturan yang dibantu oleh manusia. Dalam hal ini, manusia diperlukan untuk mengontrol tingkat akurasi dan kinerja dari kecerdasan buatan.

Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Berdasarkan data laporan kebahagiaan dunia tahun 2020 (Neve & Sachs, 2020) menunjukkan bahwa rata-rata program pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkorelasi kuat dengan kesejahteraan global maupun regional. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk mengurangi tingkat pengangguran berpengaruh pada tingkat kesejahteraan suatu negara.

Salah satu bentuk kesejahteraan (*well-being*) dalam menghadapi tantangan dunia kerja adalah mempersiapkan kesejahteraan psikologi (*psychological well-being*). Hal ini karena, persiapan individu dalam menghadapi tantangan

kerja di masa depan, tak hanya diperlukan kemampuan fisik dan intelektual saja, melainkan kemampuan mental juga perlu dipersiapkan.

Sebagaimana hasil penelitian (Sindy, 2019) melaporkan bahwa terdapat tiga faktor penting yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa, yaitu modal psikologis, kompetensi karier, dan dukungan sosial. Modal psikologis meliputi *self efficacy*, optimisme, harapan, dan ketahanan dalam menghadapi masalah. Kompetensi karier berkaitan dengan kapasitas diri dalam merefleksi motif dan jaringan, kemampuan pengembangan diri, kontrol karir, dan eksplorasi kerja. Adapun dukungan sosial meliputi dukungan keluarga, teman, dan *role model* yang berpengaruh. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, faktor psikologi termasuk aspek yang paling berpengaruh terhadap kesiapan kerja.

Persaingan dan tantangan kerja di masa depan lebih kompetitif dan fluktuatif, sehingga dengan modal psikologi akan memudahkan masyarakat dalam menghadapi persaingan kerja. Modal psikologi membuat seseorang memiliki nilai di mata perusahaan dan lingkungan. Hal ini berdampak positif apabila dilatih dan dikembangkan sedini mungkin sebelum individu memasuki dunia kerja.

Psychological Well-Being

Kesejahteraan psikologis atau *psychological well-being* adalah suatu kondisi bebas dari tekanan atau masalah mental. Suatu kemampuan untuk dapat menerima diri saat ini dan masa lalu, serta memiliki keyakinan bahwa hidup memiliki makna dan tujuan. Seseorang yang memiliki *psychological well-being* cenderung memiliki kepribadian yang baik, pantang menyerah, dan pekerja keras. Mereka juga mampu mengenali potensi dan bakat yang dimiliki, sehingga memiliki tujuan hidup (Riadi, 2015).

Peluang dan tantangan di masa depan, sangat memerlukan *psychological well-being*. *Psychological well-being* dapat memberikan konsepsi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang efektif, membina hubungan positif dengan orang lain, serta dapat bertumbuh dan berkembang di lingkungannya (Jayawickreme & Brown, 2016). Tantangan pekerjaan di masa depan memerlukan pribadi yang kuat, cakap, dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja.

Konsekuensi otomasi digitalisasi dunia yang berpotensi mengancam keberadaan kinerja manusia dapat diantisipasi dengan *psychological well-being* dan *skill* dalam menghadapi *future work*. Problematika pengangguran di ASEAN memang tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, dengan melatih *psychological well-being* dan mempersiapkan *skill* menghadapi *future work* diharapkan masalah pengangguran ini dapat teratasi. Menjadi pribadi yang memiliki *psychological well-being* akan menumbuhkan kreativitas dan daya juang masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru dan diterima lamaran kerja. *

Referensi

- Bostrom. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford*. Inggris: Oxford University Press.
- Haikal, V. H. (2022). Skill: Tak Diajarkan di Sekolah, tapi Sangat Dibutuhkan Dunia Kerja. p. 8. (Media Pendidikan Ganesha Edisi 414 Vol. 11 Oktober-November 2022).
- IMF. (2022). *World Economic Outlook (October 2022)*. Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> (Diunduh pada 27 November 2022).
- Jarrahi, M. H. (2018). Artificial Intelligence and The Future of Work: Human-AI Symbiosis in Organizational Decision Making. *ScienceDirect Elsevier*, 1-10. (Diunduh pada 21 November 2022).
- Jayawickreme, E., & Brown, E. D. (2016). Developing Well-Being and Capabilities As A Goal of Higher Education: A Thought- Piece on Educating the Whole Student. In *Handbook of Eudaimonic Well-Being* (pp. 473-484). Switzerland: Springer International Publishing Switzerland. (Diunduh pada 19 November 2022).
- Neve, J.-E. D., & Sachs, J. D. (2020). In S. D. Well-Being. Columbia: Sustainable Development Solutions Network. (Diunduh pada 19 November 2022).
- Riadi. (2015). *Kesejahteraan Psikologis*. Retrieved from Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2015/05/psychological-well-being.html>. (Diunduh pada 19 November 2022).

- Ryff, C. D. (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in The Science and Practice of Eudaimonia. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 83, 10-28. (Diunduh pada 19 November 2022).
- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. (1995). The Structure of Psychological Well-Being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 719-727. (Diunduh pada 19 November 2022).
- Siahaan, B. (2020). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PMDN, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2000-2018*. Retrieved from <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4080>. (Diunduh pada 21 November 2022).
- Sindy. (2019). *Memasuki Dunia Kerja Apa Persiapan yang Harus Dilakukan Mahasiswa*. Retrieved from Psikologi UIN Jakarta: <http://psikologi.uinjkt.ac.id/memasuki-dunia-kerja-apa-persiapan-yang-harus-dilakukan-mahasiswa/> (Diunduh pada 21 November 2022).
- Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Administratio*, 1-8. (Diunduh pada 21 November 2022).

IMAS DAMAYANTI LOVITA adalah guru di SDN 1 Sindangkasih Kabupaten Ciamis (sejak 2019-sekarang). Ia merupakan Mahasiswa Pascasarjana UPI Kampus Tasikmalaya (2021-sekarang), *Trainer* PLMM PGRI Ciamis (2022), sebuah kegiatan Parade Literasi Merdeka Mengajar kepada guru-guru di Ciamis, dan anggota Divisi Ristek dan Pengembangan *Smart Learning and Character Centre* (SLCC) PGRI Ciamis. Beberapa karya tulisnya adalah *Modul Berbasis Miskonsepsi Siswa Sekolah Dasar tentang Sifat-Sifat Bangun Datar* (2014), Penggunaan Teknik Scaffolding dalam Memecahkan Masalah Matematika untuk Meningkatkan *Self Efficacy* Siswa Sekolah Dasar (2014), *Asyiknya Membelajarkan Matematika: Matematika Mudah dan Asyik* (Tsaqiva Publishing, 2021), *Analisis SWOT dalam Mutu Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar* (2021), *Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan: Peran PKn untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalis di Tengah Pengaruh Globalisasi* (Ksatriasiliwangi, 2022), dan *Ice Breaking sebagai Salah Satu Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa* (Radar Tasik, 2022). Ia dapat dihubungi di email: damayantiimaslovita@gmail.com.

Stabilitas Ekonomi Pasca Covid-19: Ketahanan dan Respon ASEAN Melalui *ASEAN Plus Three*

Syahrul Salam

Pendahuluan

Prospek ekonomi global di awal tahun 2022 diliputi ketidakpastian yang tinggi, meskipun ada tanda-tanda pemulihan ekonomi di ASEAN. ASEAN adalah kawasan yang tangguh di tengah pandemi dan Indonesia telah berkontribusi pada kinerja yang kuat ini. Laju pertumbuhan ekonomi ASEAN positif sebesar 2,9% (year-on-year) pada tahun 2021, dan Indonesia berpeluang tumbuh positif sebesar 3,69% pada tahun 2021.

ASEAN dan Indonesia juga telah menghentikan kontraksi parah pada tahun 2020, dengan sebagian besar wilayah dan negara mengalami kontraksi yang lebih parah. Hal ini tidak terlepas dari respon kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi. Tetapi, ASEAN memiliki langkah kerja sama yang baik dengan negara mitra di Asia Timur melalui ASEAN Plus Three yang akan membantu meminimalisir kondisi ekonomi pasca Covid-19.

Dalam beberapa dekade terakhir, wabah-wabah baru bermunculan dan menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Isu kesehatan merupakan salah satu isu yang berdampak pada dunia karena sifatnya yang melintasi batas-batas negara. Berdasarkan sifatnya yang melintasi negara, kesehatan menjadi berkaitan dengan isu ekonomi di mana setiap negara terus menerus melakukan transaksi perdagangan secara global sehingga persebaran dan percepatan kasus semakin cepat dan rumit. Kegiatan ekonomi di yakini sebagai pemicu dari epidemik atau penyebaran penyakit secara global. Karena kesehatan sangat berpengaruh terhadap isu ekonomi. Maka, menjadi menarik untuk di bahas tentang dampak Covid-19 terhadap perkembangan keamanan ekonomi suatu negara serta stabilitasnya di kawasan.

Tahun 2019 merupakan tahun terpuruk bagi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 memperluas dampaknya hampir ke seluruh negara dunia. Hal tersebut mengakibatkan berhentinya sementara kegiatan-kegiatan ekonomi maupun kegiatan di bidang lainnya. WHO (World Health Organisation) memberikan peringatan darurat bahwa Covid-19 merupakan wabah mematikan yang telah mengakibatkan banyak korban di seluruh dunia.

Penyebaran Covid-19 juga termasuk pada laju yang cepat hingga negara-negara dunia mengalami krisis di berbagai bidang terutama ekonomi. Wabah tersebut juga mengakibatkan negara-negara maju menjadi terpuruk termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Maka kemudian, kondisi ekonomi yang stabil dan baik-baik saja tidak menjamin stabilitas ekonomi di era pandemi Covid-19.

Selanjutnya, untuk menangani keterpurukan ekonomi di era Covid-19, setiap negara di dorong untuk melakukan konsensus penyelesaian permasalahan bersama salah satunya Asia Tenggara. Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang juga wilayah cukup banyak terdampak Covid-19 harus segera menciptakan kerja sama dalam menangani kasus Covid-19. Hal tersebut ditandai karena kondisi dunia yang memiliki keterbatasan untuk menangani Covid-19 sendirian termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Oleh karenanya, diperlukan tindakan dan kerja sama yang terkoordinasi antara pemerintah, sektor korporasi, masyarakat sipil, media dan individu dalam penanganannya.

Rendahnya penyebaran Covid-19 di seluruh dunia mengakibatkan babak baru fase pertumbuhan ekonomi dan tingkat keamanan di setiap negara. Menyusul keberhasilan tersebut, Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia mempresentasikan langkah Indonesia sebagai contoh dari negara ASEAN pada kegiatan showcase "Sustainable Finance: Mobilizing Financial Resources for Post-Covid-19 Economic Recovery" yang diundang untuk hadir. Ada beberapa hal yang disampaikan Menteri Keuangan saat itu mengenai bagaimana kebijakan fiskal berjalan sejak pandemi yaitu pelebaran defisit fiskal di atas 3% dari PDB selama tiga tahun. Kemudian, fleksibilitas kebijakan moneter Indonesia yang

memungkinkan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas. Kebutuhan tersebut meliputi kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hal terakhir yang disampaikan Indonesia pada kegiatan tersebut ialah gotong-royong dengan pihak lain atau melibatkan pihak-pihak dalam negeri lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ekonomi (Puspasari, 2022).

Lahirnya ASEAN Plus Three

Pada tahun 1977, ASEAN membangun kerja sama melalui ASEAN Plus Three dengan melibatkan tiga negara di Asia Timur yaitu China, Jepang dan Korea. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama dilaksanakan pada bulan Desember 1977 di Kuala Lumpur yang dipicu oleh krisis ekonomi pada saat itu. Selama tahun 1997-2007, kerja sama tersebut didasari pada Joint Statement on East Asia Cooperation, East Asia Vision Group Report dan Report of the East Asia Study Group. Kemudian, China, Jepang dan Korea Selatan mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) pada tahun 2003 oleh China dan disambung Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2004.

Kerja sama tersebut mencakup perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, transfer teknologi dan teknologi telematika, industri, e-commerce, pertanian, usaha kecil menengah, pariwisata, pengembangan wilayah. Sedangkan di bidang moneter mencakup manajemen risiko makro ekonomi dan monitoring aliran modal kawasan untuk memperkuat sistem keuangan dan perbankan. Fokus lain dari kerja sama APT ini ialah di bidang pengembangan sosial dan sumber daya manusia. Negara anggota ASEAN dan mitra nya bersepakat bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan di kawasan. (ASEAN, 2012).

Selanjutnya, untuk mewujudkan kerja sama antar negara-negara ASEAN Plus Three, dibentuklah East Asian Vision Group (EAVG) dengan anggota para intelektual APT. Grup tersebut memberikan beberapa rekomendasi EAVG yaitu pembentukan East Asia Free Trade Area, East Asia Investment Information Network, koordinasi mata uang, fasilitas pendanaan kawasan dan KTT Asia Timur. Rekomendasi tersebut diberikan guna mengintegrasikan ASEAN dengan kerja sama dengan negara-negara Asia Timur.

Maka dari itu, pembentukan APT diharapkan akan mengakomodir kepentingan bersama antara negara anggota ASEAN dan negara mitranya di Asia Timur yaitu Jepang, China dan Korea. APT dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang ada di ASEAN dan regional Asia Timur. Fokus utama dari APT ialah kebijakan di bidang ekonomi.

Kerja Sama Ekonomi ASEAN+3

Keberhasilan ASEAN dan tiga negara mitra melalui APT memberikan masa depan ASEAN yang lebih baik. Melalui APT, pemimpin pemerintahan di kawasan mengesahkan the Second Joint Statement on East Asia Cooperation berikut Work Plan 2007-2017 pada KTT ke-11 APT di Singapura. Ada beberapa bidang kerja sama yang disepakati pada KTT-11 APT di Singapura antara lain politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, energi, pembangunan, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Kemudian, sosial budaya dan pembangunan. Dalam mewujudkan kesepakatan tersebut maka, diperlukan dana atau biaya yang cukup dalam melaksanakannya. Untuk mendorong hal tersebut, The Second Joint Statement menyepakati dibentuknya ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF). Kesepakatan tersebut disahkan oleh para Menteri Luar Negeri APT pada pertemuan tingkat menteri APT dengan skema 9:1 atau US\$ 2.700.000 untuk negara Plus Three dan ASEAN secara keseluruhan sebanyak US\$ 300.000. Skema atau kerangka acuan tersebut akan digunakan untuk mendukung implementasi dari proyek-proyek yang telah disepakati dan ditetapkan pada Second Joint Statement on East Asia Cooperation beserta Work Plannya sepanjang tahun 2007-2017. (RI K., n.d.)

ASEAN merupakan wilayah dengan tingkat perekonomian di tahap berkembang. Maka kemudian, kerja sama dengan pihak luar yang memiliki jarak dekat dan strategis akan memperluas pengaruh dan mempercepat peningkatan ekonomi di kawasan. Salah satu Hasil dari ASEAN Plus Three ialah Chiang Mai Initiative (CMI) yang dibentuk berdasarkan APT. Kerja sama tersebut merupakan kerja sama yang paling menonjol pada APT.

Pada pertemuan para menteri keuangan ASEAN Plus Three di Phuket, Thailand pada 22 Februari 2009, (i) Tingkat pendanaan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) mulai dari \$80 miliar hingga \$120 miliar, dengan kontribusi ASEAN dan Plus Three 20:80; ii) unit kontrol regional independen dibentuk; iii) setelah penerapan mekanisme pemantauan ini, jumlah kredit yang dapat dipinjam tanpa keikutsertaan IMF dalam CMIM dapat ditingkatkan di atas

batas yang berlaku saat ini sebesar 20%. Menyadari keberhasilan CMI sebagai mekanisme untuk membiayai kerja sama, deklarasi bersama kedua meluncurkan prakarsa multilateral Chiang Mai. Pada 22 Oktober 2008, para pemimpin ASEAN Plus Three bertemu di sela-sela pertemuan ASEM di Beijing untuk membahas krisis keuangan global. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan, antara lain dukungan terhadap upaya Chiang Mai Initiative untuk mempercepat multilateralisme.

Dilanjutkan pada KTT ASEAN Plus Three ke-12, yang diadakan di Thailand pada bulan April 2009, membahas krisis keuangan global, ketahanan pangan dan energi, dan dua deklarasi tentang kerja sama ASEAN Plus Three di bidang ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi, dan satu siaran pers bersama tentang Kerja sama Peninjauan Dokumen Tiga Plus ASEAN dalam Menanggapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Global. Kedua dokumen ini menegaskan komitmen tersebut Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk menjaga ketahanan pangan dan energi kawasan dalam sistem pembangunan berkelanjutan, dan berkomitmen untuk memperkuat kerja sama kawasan di bawah ASEAN Plus Tiga untuk menanggapi dampak krisis global. Namun, karena situasi politik di Thailand, pembahasan tidak dilakukan.

KTT ke-12 ASEAN Plus Three pada 24 Oktober 2009 di Cha-am, Hua Hin, Thailand. KTT tersebut meratifikasi Deklarasi ASEAN Plus Tiga tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan dan Pengembangan Bioenergi. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk mendukung ketahanan pangan dan energi kawasan dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan. KTT juga mencatat laporan akhir studi kelayakan Asosiasi Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA) Tahap II.

Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan EAFTA untuk memperkuat fleksibilitas ekonomi kawasan Asia Timur dan diadakannya perundingan EAFTA paling lambat tahun 2012. KTT juga berharap Prakarsa Multilateral Chiang Mai akan beroperasi pada akhir tahun 2009 dan membahas kebutuhan untuk membentuk Mekanisme Penjaminan Kredit dan Investasi (CGIM) di bawah Prakarsa Pasar Obligasi Asia. KTT juga mempercepat pembentukan dana Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (APTERR) untuk memastikan kelanjutan mekanisme kerja sama untuk ketahanan pangan di kawasan setelah proyek percontohan Cadangan Beras Darurat Asia Timur berakhir pada Februari 2010.

Pertemuan ke-13 ASEAN Plus Three Finance Ministers di Tashkent, Uzbekistan pada 2 Mei 2010 mengumumkan bahwa Perjanjian CMIM mulai berlaku pada 24 Maret 2010. Pertemuan tersebut juga menyepakati semua elemen kunci dari Regional Macroeconomic Monitoring Unit (CMIM regional), unit pengawasan ekonomi makro yang disebut ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO berkedudukan di Singapura dan diperkirakan akan berbadan hukum pada awal tahun 2011. Selain itu, pertemuan tersebut juga mengumumkan pembentukan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) dalam bentuk dana yang didukung oleh ADB (Asian Development Bank), yang modal awalnya adalah 700 juta USD.

Pertemuan Kepala Negara ASEAN Plus Tiga ke-13 pada 3 Juli 2009 di Seoul pada prinsipnya menyetujui pedoman pelaksanaan Deklarasi Bersama Kedua tentang Kerja sama Asia Timur dan Rencana Kerja sama ASEAN Plus Tiga. Kebijakan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan Rencana Kerja Kerja sama ASEAN Plus Tri 2007-2017 agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk tahun 2010-2011, rapat tersebut mengusulkan agar pelaksanaan rencana kerja difokuskan pada peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam.

Rancangan proposal Rencana Aksi Pendidikan ASEAN Plus Tiga (2010-2017) telah dipresentasikan pada Pertemuan ke-14 Direktur Eksekutif ASEAN Plus Tiga, 2-4 November 2009 di Chiang Mai, Thailand Shepherd. Selain itu, Filipina dan Indonesia mengumumkan niat mereka untuk bertindak sebagai gembala terkemuka di bidang kerja sama energi, kontra terorisme, media dan budaya. Beberapa perkembangan telah terjadi di bidang kerja sama energi, misalnya. Pengembangan peta jalan cadangan minyak, finalisasi ke-2 Perspektif Energi ASEAN+3, aktivasi Sistem Komunikasi Energi ASEAN+3.

Program kerja SOME+3+AMEM+3 meliputi 5 kerja sama, yaitu: Ketahanan Energi, Pasar Minyak, Cadangan Minyak, Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi, Konservasi Energi dan Gas Bumi, dan Dialog Perdagangan. Kerja sama APT juga dikembangkan untuk menyusun ASEAN Communications Master Plan yang merupakan tahap kedua dari gagasan pembentukan East Asian Free Trade Association (EAFTA) dan East Asian Comprehensive Economic Partnership (CEPEA). (RI, n.d.)

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan runtuhnya berbagai sektor penting di seluruh negara dunia. Namun, ASEAN sebagai kawasan dengan tingkat ekonomi yang masih berkembang telah membuktikan bahwa kawasan tersebut memiliki ketahanan ekonomi dengan melakukan kerja sama dengan negara non-anggota melalui ASEAN Plus Three yang melibatkan negara Asia Timur sebagai faktor pendukung keberhasilan ekonomi di Asia Tenggara juga untuk memulihkan sendi-sendi ekonomi pasca Covid-19.

ASEAN+3 merupakan bentuk kerja sama yang condong memfokuskan tujuannya pada integrasi ekonomi bersama dan bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi melalui sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah ASEAN. Pertemuan yang dilakukan sejak 1977 membuktikan bahwa ASEAN bersama mitra Asia Timur selalu siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan khususnya di bidang ekonomi.

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa ASEAN Plus Three merupakan bentuk diplomasi dan negosiasi ASEAN terhadap negara mitra untuk bersama-sama melanjutkan dan menjalankan visi misi bersama di bidang ekonomi. Kemudian, kondisi yang stabil antara hubungan ASEAN dan mitra Asia Timur sangat berpengaruh terhadap keamanan regional. Dapat dilihat dari proses *non-intervention* antar negara ASEAN. Selanjutnya, pengaruh terhadap keamanan global. ASEAN mampu menunjukkan bahwa kondisi antara ASEAN dan mitranya berjalan dengan baik di mana ketiga negara mitra memberikan bantuan dan dukungan meskipun negara kawasan ASEAN tidak memiliki keberimbangan ekonomi dengan negara Asia Timur.*

Referensi

- ASEAN. (2012, Juni 18). *Joint Statement on East Asia Cooperation 28 November 1999*. Retrieved from asean.org: <https://asean.org/joint-statement-on-east-asia-cooperation-28-november-1999/>
- Bilateral, P. K. (2020). *Pandemi Covid-19 dan Stimulus Fiskal di Negara-Negara ASEAN+3*. Retrieved from fiskal.kemenkeu.go.id: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/10/15/19230533070976-pandemi-covid-19-dan-stimulus-fiskal-di-negara-negara-asean3>
- Febreani, Y. K. (2022). Penguatan Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) untuk Penanganan dan Mitigasi Dampak Negatif Ekonomi dari Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XV, No. 1*, 1-19.
- Puspasari, R. (2022, April 9). *Indonesia Jadi Contoh di ASEAN untuk Strategi Pemulihan yang Kuat dan Berkelanjutan*. Retrieved from fiskal.kemenkeu.go.id: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/386>
- RI, K. K. (2020, April 2020). *ASEAN Plus Three Sepakat Tingkatkan Kerja sama Menangani Covid-19*. Retrieved from Kemkes.go.id: <http://p2p.kemkes.go.id/asean-plus-three-sepakat-tingkatkan-kerjasama-menangani-covid-19/>
- RI, K. (n.d.). *Sinopsis ASEAN Plus Three*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean_plus_three/978/etc-menu

SYAHRUL SALAM adalah lulusan program doktoral Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung. Sejak 2010 menjadi Dosen Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Produksi Jagung ASEAN dan Pemihakan pada Petani Kecil

Momy A. Hunowu

“Kehidupan petani seperti orang yang berdiri di dalam air dengan tubuh yang terendam sampai mulut, berpijak dengan ujung jari kaki, tangan mengepak-epak seperti sayap menjaga keseimbangan dengan kepala menengadah ke atas, sehingga riak-riak kecil saja sudah bisa membuat dia terengah-engah” (Scott, 1976).

Pendahuluan

“Dulu kita impor 3,6 juta ton jagung sekarang kita balikkan impor menjadi ekspor,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman penuh percaya diri saat pelepasan ekspor 60.000 ton jagung ke Filipina di Pelindo IV, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu silam (Salengke, 2018). Jagung menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia, dan Gorontalo menjadi salah satu provinsi penyuplai jagung nasional. Sejak 2004, pemerintah provinsi Gorontalo telah menggalakkan program agropolitan. Komoditas jagung menjadi branding Gorontalo di pentas nasional. (Hunowu, 2020). Padahal sejatinya Gorontalo hanyalah berada pada urutan ke 9 propinsi penghasil jagung di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian melalui situs resmi Kementerian Pertanian bahwa provinsi dengan luas panen terluas di Indonesia tahun 2020 adalah Jawa Timur dengan luas panen 1,19 juta ha menghasilkan 5,37 juta ton jagung. Sementara Gorontalo pada urutan ke sembilan dengan luas panen 212,5 ribu ha menghasilkan 0,91 juta ton jagung (Kementerian Pertanian, 2021).

Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan produksi jagung terbesar. Mengutip ASEAN Statistical Publication 2021, produksi jagung di Indonesia mencapai 24,05 juta metrik ton pada tahun 2020. Produksi tersebut meningkat 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,95 juta metrik ton. Jumlah produksi Indonesia pada 2020 berkontribusi 52,8% dari total produksi jagung di kawasan Asia Tenggara. Produksi jagung Indonesia terpaut jauh dibandingkan Filipina yang berada di posisi kedua. Filipina tercatat menghasilkan 8,2 juta metrik ton jagung pada 2020. Sementara posisi ketiga ditempati Vietnam dengan produksi jagung 4,85 juta metrik ton. Setelahnya ada Thailand dan Myanmar dengan produksi jagung masing-masing 4,78 juta metrik ton dan 2,07 juta metrik ton. Adapun total produksi jagung di Asia Tenggara pada 2020 sebesar 45,48 juta metrik ton pada 2020. Jumlah ini naik 1,2% dari tahun 2019 yang tercatat 44,93 juta metrik ton (Dihni, 2022).

Peningkatan produksi jagung baik secara nasional maupun global tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, dalam hal ini petani kecil (Hunowu et al., 2021). Secara global, peningkatan produksi ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memproduksi pupuk, bibit unggul, pestisida dan herbisida. Berkat perusahaan raksasa ini, produksi pertanian meningkat tajam.

Sementara itu, para petani harus membayar mahal teknologi pertanian untuk mengejar peningkatan produksi. Selain membayar mahal, para petani harus bersusah payah mengaplikasikan teknologi pertanian agar berhasil guna. Hasil produksi harus berlipat, jika tidak, mereka hanya bisa gigit jari karena hasil produksi yang *pas-pasan* hanya untuk menutupi ongkos teknologi. Secara makro, jumlah produksi petani meningkat, tetapi harga jagung yang ditetapkan pemerintah tidak mengikuti trend kenaikan sarana pertanian seiring penyesuaian harga minyak yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini tentu saja membuat banyak petani terlilit utang. Nilai produksi yang tinggi dihabiskan untuk membayar ongkos teknologi pertanian yang terlampau mahal.

Jagung Komoditas Kultural

Petani Gorontalo dan jagung ibarat dua sisi mata uang. Meski pertanian jagung pada kalangan petani kecil semakin menyengsarakan, tetapi mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah tanaman untuk diusahakan. Secara kultural, jagung adalah tanaman andalan para petani Gorontalo. Mereka menyebutnya *binte*, berasal dari kata bintengi (benteng pertahanan). Artinya jagung bagi masyarakat Gorontalo adalah tanaman yang menjadi benteng pertahanan dari ancaman kelaparan.

Masyarakat petani memiliki alasan kenapa memilih jagung sebagai komoditas utama. Pertama, mengkonsumsi jagung membuat kenyang lebih awet dibandingkan mengkonsumsi beras dan ubi-ubian. Itu sebab sebagian masyarakat Gorontalo masih mengkonsumsi jagung saat makan sahur pada bulan Ramadhan. Kedua, jagung dapat dikonsumsi sebelum masa panen, dijadikan jagung bakar, jagung rebus, milu siram (sop jagung) dan kuliner lokal lainnya. Berbeda ketika menanam padi, petani harus menunggu 3-4 bulan baru bisa dikonsumsi. Ketiga, daun jagung dapat diambil untuk makanan ternak. Saat jagung sudah berbuah, daunnya dapat diambil (dipotong) sebatas buah. Tanaman jagung selain memiliki keuntungan dapat dikonsumsi beberapa kali dalam semusim, juga membutuhkan proteksi yang ekstra ketat dari serangan hama.

Hama jagung bukan hanya berasal dari serangga kecil seperti semut, ulat dan belalang, melainkan pula dari hama besar seperti tikus, babi hutan, monyet, bahkan kambing dan sapi liar milik warga yang dilepas. Belum termasuk tanaman liar pengganggu. Untuk memproteksi tanaman jagung dari berbagai hama kecil dan besar tersebut, selain melakukan kerja-kerja fisik seperti pemagaran sekeliling kebun, pembersihan sela-sela baris tanaman dari tanaman liar, juga melakukan kerja-kerja ritual seperti membakar kemenyan di sudut-sudut kebun pada hari penanaman, dll (Hunowu, 2021).

Peningkatan Produksi, Siapa diuntungkan?

Penerapan teknologi pertanian jagung membutuhkan modal besar. Ketidaksiapan modal pada musim tanam memaksa petani kecil berutang kepada petani kaya. Petani kaya telah menyediakan pinjaman dalam bentuk sarana pertanian. Petani kaya juga bersedia menebus pupuk bersubsidi dari pemerintah yang tidak bisa ditebus anggota kelompok tani. Pinjaman itu akan dibayar dengan syarat harus menjual hasil panen kepada petani kaya dan pedagang.

Harga jagung di tingkat petani kaya akan berbeda dengan harga jagung yang ditetapkan pemerintah di tingkat pengumpul. Hal ini sebagaimana diungkapkan petani muda bahwa bertani sekarang lebih mudah tetapi harus menyediakan modal. Modal itu digunakan untuk membeli bibit unggul, menebus pupuk bersubsidi dan menyewa tenaga kerja dan jasa lainnya. Kalau tidak punya modal terpaksa mencari pinjaman kepada pedagang. Pinjaman itu akan dibayarkan saat panen. Jagung yang dipanen harus dijual kepada pedagang. Harganya lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Pertanian modern membutuhkan modal yang cukup besar. Siapa yang punya modal besar dia akan menjadi sukses. Berbeda dengan petani tradisional. Keberhasilan panen sangat ditentukan oleh kerja keras, sebagaimana dikisahkan petani sepuh bahwa dahulu petani yang berhasil tidak diukur dengan kepemilikan modal ekonomi, melainkan modal sosial dan rajin bekerja. Mulai dari bangun pagi sampai menjelang magrib penuh dengan kegiatan; membajak, mencangkul dan membersihkan rumput yang mengganggu, menanam, memanen dll, kemudian istirahat pada jam 9 untuk sarapan dan makan siang. Semakin lama durasi waktu bekerja, semakin banyak hasil yang didapat.

Dewasa ini, usaha pertanian tidak menuntut durasi waktu bekerja yang lama. Teknologi pertanian telah memudahkan pekerjaan. Tidak perlu membajak, mencangkul dan membersihkan rumput yang mengganggu. Dengan teknologi, bekerja tidak setiap hari. Hanya pada saat mempersiapkan lahan untuk ditanam, menanam, memberi pupuk, menyemprot dan memanen. Pekerjaan itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Petani kaya dengan modal ekonomi yang mapan, lebih ringan lagi, hanya menyediakan sarana produksi dan upah tenaga kerja, semua pekerjaan menanam, memupuk, menyemprot dan memanen dilakukan oleh buruh tani yang diberi upah harian.

Untuk mengetahui selisih modal dan hasil yang diperoleh petani, salah seorang petani memerinci berdasarkan hasil panen terakhir pada lahan 1 hektar; biaya sarana produksi sebesar Rp. 1.840.000. biaya jasa mulai dari sewa traktor, sewa tanam memupuk, menyemprot memanen dan pasca panen sebesar Rp. 5.585.000. Pada saat panen dengan harga jagung Rp. 3.650 per kg, minimal memperoleh hasil Rp. 9.125.000 pada hasil 2.5 ton jagung. Sisa yang didapatkan adalah Rp.1.698.000. pada penanaman selanjutnya tidak lagi dibajak sehingga berkurang sewa traktor. Kalau hasil panen lebih baik dan mencapai 4 ton bisa mendapatkan hasil 14.600.000, sehingga petani dapat memperoleh Rp. 4.938.000. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin menurun biaya yang dikeluarkan, demikian sebaliknya.

Petani yang tidak mampu menyediakan sarana pertanian akan dibantu oleh petani kaya dengan pembayaran dilakukan pada saat panen tiba. Hal ini diakui oleh seorang petani kaya bahwa dirinya memiliki kelompok tani di beberapa lokasi. Petani kecil dibantu dengan bibit, menebus pupuk dan pinjaman uang. Saat panen petani kecil diminta menjual jagung kepada petani kaya dengan alasan agar para petani kecil tidak repot dengan angkutan. Petani kaya menyediakan angkutan baik dari lokasi panen maupun ke gudang penjualan. Kalau panennya gagal petani kaya tetap memberi pinjaman sampai petani kecil itu berhasil dan bisa melunasi utang. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian sangat berpihak kepada petani kaya.

Keberpihakan teknologi terhadap petani kaya telah banyak ditunjukkan oleh riset-riset terdahulu, terutama pada program revolusi. (Yulia, 2019), (Sajogyo, 1977), (Tjondronegoro, 2013), (Tahir, 2019). Banyak ditemukan kooptasi petani kaya (patron) kepada petani kecil (klien). Patron berusaha mempertahankan pola hubungan tersebut untuk menjaga eksistensinya dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Rustinsyah, 2011). Petani kecil yang meminjam uang dari petani kaya sudah diikat perjanjian untuk menjual hasil panennya kepada patronnya. Sang patron akan menyediakan jasa angkutan, jemuran dan lain-lain.

Hubungan patron-klien ini semakin menguat, berbeda dengan temuan Rustinsyah (2011) yang menunjukkan semakin melemahnya hubungan antara patron dan klien. Pola hubungan patron-klien yang terbangun ini justru menjadikan petani kecil semakin tereksplotasi. Apalagi jika hasil panen tidak mampu menutupi utang, yang menyebabkan utang semakin lama semakin menumpuk. Umumnya, ini berakhir dengan penjualan lahan kepada petani kaya yang menjadi juragan untuk menutupi utang, sehingga status petani berubah dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani. Namun demikian, menjadi buruh tani dipandang "lebih aman" karena setiap hari dapat menerima upah. Hal ini diakui petani berdasarkan pengalamannya bahwa menjadi buruh tani itu aman. Setiap hari terima uang dan tidak memikirkan hama yang menyerang tanaman. Kalau petani pemilik lahan setiap hari cemas memikirkan tanaman yang diserang hama tanaman.

Untuk menjadi tenaga tanam dengan upah 50.000 perhari, dalam sebulan dapat menerima upah sebesar 1.500.000. jika seseorang bekerja 30 hari penuh. Pilihan ini lebih menguntungkan daripada mengolah sendiri lahan 1 hektar dengan hasil dalam satu kali masa panen (3 bulan) pendapatan sebesar Rp. 1.698.000. Artinya, selisih antara pendapatan sebagai petani pemilik lahan dan sebagai buruh tani hanya sekitar Rp200.000.

Hal ini sebagaimana dikemukakan seorang petani perempuan bahwa bertani di lahan sendiri saat ini hanya memperoleh lelah. Kalau dihitung lebih untung menjadi buruh tani mengambil upah. Hanya menjadi buruh tanam saja sehari Rp. 50.000. Kalau 30 hari penuh mendapat upah Rp. 1.500.000. Dalam 3 bulan mendapat upah Rp. 4,500.000. Kalau mengolah lahan 1 hektar setelah dibayarkan ongkos produksi hanya mendapatkan untung Rp. 1.698.000.

Data di atas berasal dari lahan pertanian yang diserang hama tanaman. pada musim-musim tertentu petani pemilik lahan menikmati hasil yang melimpah, terutama ketika penggunaan sarana pertanian digunakan sesuai petunjuk penggunaannya.

Memihak Petani Kecil

Teknologi pertanian telah membelah petani menjadi dua kelas, kelas yang diuntungkan dan kelas yang dirugikan. Kelas pertama adalah petani yang mengadopsi teknologi pertanian sementara kelas kedua adalah petani yang tidak

mampu menerapkan teknologi pertanian dan akhirnya kembali pada cara-cara tradisional (Hunowu et al., 2022). Kerugian yang dialami petani salah satu sebabnya adalah karena kelalaiannya dalam menerapkan teknologi pertanian. Pada tingkat global, perusahaan multinasional terus mengeruk keuntungan tanpa harus bersusah payah, berjemur terik dan bermandikan keringat. Pemerintah yang diharapkan berpihak kepada petani kecil terus menikmati penghargaan demi penghargaan dari berbagai pihak atas keberhasilan meningkatkan produksi jagung.

Ke depan, perlu dihadirkan satu kebijakan atau program yang berpihak pada petani kecil. Program yang tidak hanya berasal dari pemerintah, melainkan pula dari perusahaan multinasional. Salah satu perusahaan di ASEAN yang perlu dilirik adalah Seedcare Institute Singapore yang terletak di Kendall Lab di Science Park II. Perusahaan ini dilengkapi dengan teknologi komprehensif serta tenaga ahli yang mumpuni untuk membantu para petani serta mitra lain di ASEAN (Herlinda, 2016). Misi perusahaan ini perlu disambut baik agar jumlah petani kecil tidak semakin meningkat. Kalau tidak, mereka inilah yang menjadi korban dan subordinat pengusaha besar dan kecil yang menikmati kenaikan harga produksi.*

Referensi

- Dihni, V. A. (2022, August 18). Produksi Jagung Indonesia Terbesar di ASEAN Pada 2020. *Databoks.Com*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/18/produksi-jagung-indonesia-terbesar-di-asean-pada-2020>
- Herlinda, W. D. (2016, April 20). BENIH TANAMAN PANGAN: Bidik Pasar Asean, Syngenta Buka Seedcare Institute di Singapura. *Ekonomi.Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160420/99/539890/benih-tanaman-pangan-bidik-pasar-asean-syngenta-buka-seedcare-institute-di-singapura>
- Hunowu, M. (2020). Bertani Jagung: Subsistensi, Komersialisasi dan Resistensi. In Martua Sihaloho & Bayu Eka Yulian (Ed.), *Eulogi Untuk Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro; Mengenang dan meneladani Sang Guru* (pp. 119–132). Pusat Studi Agraria IPB.
- Hunowu, M. A. (2021). *Energi Perjalanan Pulang* (Hatim Badu Pakuna (ed.)). Insan Cendekia Mandiri.
- Hunowu, M. A., Lampe, M., & Idrus, N. I. (2022). From Sacred To Profane : Efforts To Control The Corn Pests In Gorontalo , Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 17(5), 117–132. <https://doi.org/10.46754/jssm.2022.05.009>
- Hunowu, M. A., Tamu, Y., Obie, M., & Pakuna, H. B. (2021). Modernization and Shifting Practices of Local Wisdom on Corn Farming in Gorontalo Province Modernisasi dan Pergeseran Praktik Kearifan Lokal pada Pertanian Jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Sodality*, 09(02), 1–15. <https://doi.org/10.22500/9202134694>
- Kementerian Pertanian. (2021, January 5). Inilah 10 Provinsi Produsen Jagung Terbesar Indonesia. *Pertanian.Go.Id*. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4639#:~:text=Pertama%2C Provinsi Jawa Timur%2C dengan,2%2C83 juta ton jagung>
- Ratnawati Tahir, R. dan I. D. (2019). Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani Kecil Dan Perempuan Di Sulawesi Selatan. *Agrokompleks, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019*, 19(2), 35–44.
- Rustinsyah. (2011). Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*.
- Sajogyo. (1977). Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. *Prisma LP3ES*, 3.
- Salengke, H. H. (2018). Indonesia Suplay Kebutuhan Jagung ASEAN. *Media Indonesia*. sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/148670/indonesia-suplai-kebutuhan-jagung-negara-asean>
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of The Peasant; Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*.
- Tjondronegoro, S. M. P. (2013). an Agricultural Development Legacy Unrealised By Five Presidents , 1966 – 2014. *Masyarakat Indonesia*, 39(2), 379–395.
- Yulia, D. (2019). Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931>

MOMY A. HUNOWU adalah Ketua Prodi Sosiologi Agama IAIN Sultan Amai Gorontalo sejak 2018 sampai sekarang. Lulusan S2 Sosiologi Pedesaan IPB ini sangat konsen menulis tentang kearifan tradisional dan masyarakat pedesaan. Pada saat

melanjutkan studi S3 Antropologi Unhas (2019), dia mulai memperdalam kajiannya pada budaya lokal. Sejak Covid-19, dia banyak menekuni dunia literasi, menulis dua buah buku dan telah terlibat dalam penulisan 5 book chapter, Salah satunya pada buku *G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Selama kurun waktu tersebut, dia juga telah menulis belasan artikel internasional dan nasional, baik yang bereputasi nasional (sinta 2) maupun internasional (Scopus). Selain kegiatan menulis, dia turut tampil sebagai pemakalah pada event-event nasional dan internasional. Tercatat sejak tahun 2020 sampai sekarang telah 5 kali mempresentasikan makalah pada konferensi nasional dan internasional, seperti pada *The 21st Annual International Convergence on Islamic Studies (AICIS) 2022* pada Oktober silam di Lombok NTB dan terakhir diundang bersama 100 penulis artikel terbaik mempresentasikan tulisannya pada Konferensi PSGA Pra KUPI di UIN Raden Fatah Palembang 15-17 November 2022.

Gerakan Credit Union: Manifestasi Kemandirian Ekonomi ASEAN

Efrial Ruliandi Silalahi

Pendahuluan

Credit Union merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki program pendidikan, pembinaan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan. Setiap anggotanya adalah pilar-pilar yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota untuk melaksanakan hak dan kewajiban anggota secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya tidak jarang dijumpai badan hukum koperasi yang terbentuk namun belum mampu mengangkat kesejahteraan anggotanya, selain itu banyak pula kita temui koperasi tersebut hanya menguntungkan para pengurusnya sendiri.

Sebagai lembaga keuangan yang notabene dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, negara perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap perkembangan credit union. Apalagi di tengah derasnya investasi di industri keuangan, peran credit union di kawasan Asia Tenggara seharusnya terus diperkuat dan diperluas sebagai penyeimbang. Diperlukan akomodasi, harmonisasi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga credit union dapat terus bertumbuh dan berperan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Sehingga perlu untuk mengajak semua pihak untuk terus mendukung gerakan kemandirian ekonomi rakyat yang dilakukan oleh credit union, khususnya dalam melayani warga masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain di Asia Tenggara.

Sebagai gerakan kemandirian ekonomi rakyat yang diamanatkan dalam UUD 1945, negara wajib melindungi gerakan credit union di Indonesia, seperti di negara lain (Filipina, Thailand, Korea Selatan, Kanada, Spanyol dan lainnya) yang telah meletakkan gerakan credit union sebagai pilar utama ekonomi negara, serta dapat mengakses fasilitas negara seperti subsidi perumahan dan lain sebagainya.

Pembahasan

Credit Union adalah koperasi keuangan yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota dimana para anggotanya adalah penabung, pemegang, dan sekaligus pemegang saham. Credit union mempunyai anggota terbanyak di Asia Tenggara, bila dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya. Berdasarkan laporan keuangan yang tercatat pada tahun 2005-2014 pada website resmi credit union yang berpusat di Amerika Serikat mencatat pada laporan keuangan yang diantaranya anggota, aset, simpanan, cadangan dan pinjaman mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa credit union tumbuh subur dan menjadi suatu wadah bagi masyarakat kawasan Asia untuk menjadi alternatif pilihan untuk kesejahteraan.

Gerakan credit union pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk sistem perekonomian kerakyatan. Karena di dalam credit union seluruh anggota adalah pemilik, sebagai pemilik tentunya ikut menentukan arah dan kebijakan dari credit union tersebut. Dengan sistem satu anggota satu suara, sangat jelas bahwa program kerja, arah kebijakan, serta hal yang terkait dengan produk dan jenis usahanya telah melalui proses kekeluargaan dan demokratis. Begitu juga dalam pengelolannya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ekonomi kerakyatan dan doktrin ekonomi Indonesia muncul dari falsafah Pancasila yang merupakan subsistem dari UUD 1945. Pasal utama bertumpunya doktrin ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal-pasal itu bisa dikaitkan dengan kerangka kerja ekonomi kerakyatan yang jelas

mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab dalam ekonomi kerakyatan memuat pesan-pesan moral yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan serta berintikan kerakyatan.

Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kesejahteraan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga rumusan lain dari sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mandiri, terbuka, dan berkelanjutan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan	
Mandiri	Kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempergunakan sumber daya lokal yang ada dan ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal.
Terbuka	Harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berusaha dan mengakses sumber daya yang tersedia.
Berkelanjutan	Kegiatan ekonomi dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan dan masyarakat yang lebih luas

Sumber : www.amerta.id

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa.

Wujud Ekonomi Kerakyatan				
1. Pengembangan koperasi	2. Pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	3. Pemenuhan hak rakyat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak	4. Penggunaan serta pengelolaan bumi, air, dan sumber daya alam yang mengutamakan kemakmuran rakyat.	5. Perlindungan juga peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar.

Sumber : www.kompas.com

Credit union memiliki anggota dan modal usaha yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Pada prinsipnya, pertumbuhan uang yang beredar harus lebih banyak di masyarakat. Semakin berkembangnya sebuah credit union, maka semakin baik juga dampaknya. Bahkan diharapkan bisa banyak lagi unit usaha yang dapat dibiayai, yang sebelumnya dilakukan pengkajian oleh pihak credit union. Misalnya, pengembangan unit usaha pada suatu UMKM. Setelah dilakukan pengkajian, unit usaha tersebut ternyata bagus. Namun, mereka memerlukan modal untuk meningkatkan usaha, maka disinilah peran credit union untuk membantu.

Credit union menyelenggarakan program solidaritas anggota yaitu solidaritas kesehatan berupa bantuan pengobatan dan solidaritas kedukaan untuk sumbangan duka kepada anggota yang meninggal dunia. Sumbangan-sumbangan itu hanya diperuntukkan bagi anggota semata. Sumbangan ini dinilai tepat sasaran karena sangat membantu anggota lantaran adat-istiadat setempat, proses yang berkaitan dengan upacara kematian bisa diselenggarakan hingga beberapa hari. Program solidaritas ini sesuai dengan pilar credit union dan tidak bermotif ekonomi tetapi bersifat sosial semata. Jadi tidak benar bahwa credit union menjalankan praktik asuransi.

Kita dapat menilai dengan objektif bahwa yang dapat menyelamatkan rakyat (masyarakat) adalah mereka sendiri dengan mengedepankan prinsip kemandirian. Orang miskin bisa memperbaiki dan menyelesaikan masalah hidupnya bila diberikan kesempatan yang ditafsirkan sebagai pemberian akses kredit kepada orang miskin sehingga mereka bisa berusaha. Perlunya menggalang dana dimana para anggota mengumpulkan uang yang mereka miliki dan meminjam

dari dana tersebut serta diimbangi dengan rangkaian pendidikan bagi anggota seperti pendidikan dasar, literasi keuangan dan literasi usaha. Credit union harus berkembang secara inklusif tanpa memandang latar belakang apapun.

Salah satu prinsip yang mesti diketahui oleh pihak lain adalah solidaritas. Tidak hanya berurusan dengan menabung dan meminjam, credit union juga mengajak anggotanya peduli kepada anggota lain. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam skema iuran solidaritas untuk meringankan beban anggota lain apabila mengalami musibah. Credit union tidak hanya telah berhasil menjadi penyanggah kehidupan ekonomi masyarakat bawah yang selama ini terabaikan oleh pembangunan, tetapi telah mampu membangun kemandirian, ekonomi lokal, literasi keuangan, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gerakan credit union bukan semata-mata hanya soal uang, namun telah berhasil membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berdimensi sosial, ekonomi dan budaya. Gerakan ini juga berhasil mereduksi residu pembangunan yang kapitalistik, monokultur dan atas-bawah (*top down*). Sehingga telah berhasil mengangkat derajat dan martabat anggotanya.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang dianggap telah membawa kesuksesan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Terjadinya kesenjangan sosial, ketergantungan ekonomi, dominasi perusahaan besar dan multinasional, serta tumbuhnya budaya komersial, konsumtif, dan hedonis di masyarakat yang terjadi di Asia Tenggara.

Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan	
Pengembangan akses kepada sumber daya ekonomi	Modal, Bahan Baku, dan Informasi yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi rakyat dan tidak mendiskriminasi pelaku ekonomi rakyat.
Penataan kelembagaan	Perijinan yang cepat, mudah dan murah. Dipastikan agar semua sektor ekonomi yang menjadi bidang gerak ekonomi rakyat tidak disusupi pelaku ekonomi besar/global.
Pengembangan kapasitas	Mampu bersaing dengan pelaku ekonomi global.
Reorientasi Pendidikan	Pendidikan kejuruan menjadi prioritas pengembangan khususnya pada daerah dengan sumber daya tertentu.
Optimalisasi otonomi daerah	Menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal yang sesuai dengan karakteristik sumber daya ekonomi yang tersedia.

Sumber : www.amerta.id

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Kesimpulan

Credit Union merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri, inilah bentuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan mikro *non-bank*, dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (*micro finance*) dengan amat baik, yakni menyediakan jasa keuangan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya melalui pemberian pinjaman modal serta mewajibkan para anggotanya untuk selalu menabung melalui produk-produk simpanan yang telah disediakan. Credit union tidak semata-mata berorientasi untuk mencari keuntungan karena

pendapatan usahanya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk suku bunga simpanan yang lebih tinggi dan suku bunga pinjaman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Bagi hasil di dalam pengelolaan koperasi setiap anggota akan diberikan sisa hasil usaha (SHU) yang proporsional disesuaikan dengan peran aktifnya dalam melakukan transaksi baik pinjaman maupun simpanan.

Setidaknya ada tiga alasan gerakan credit union sebagai manifestasi kemandirian rakyat. *Pertama*, alasan secara filosofis yakni credit union merupakan *self regulated organization* yang menempatkan manusia lebih tinggi dibandingkan modal dan material. Credit union merupakan organisasi berbasis orang (*people-based association*) yang berbeda dengan korporasi berbasis kumpulan modal. Selain itu, gerakan credit union di seluruh dunia mengakui bahwa prinsip ekonomi dan demokrasi merupakan kekuatan masyarakat sendiri untuk mengatur diri sendiri (*self help regulated*). Selanjutnya, koperasi sejak Tahun 2016 telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai warisan bukan benda (*intangible heritage*) yang merupakan gerakan menolong diri sendiri melalui kerja sama (*self help through mutual*).

Kedua, alasan empiris sosiologis. Credit union justru memiliki ketahanan (*resilience*) karena diakui otonom dan cara kerja yang demokratis. Dengan demokrasi credit union justru anggota turut mengambil tanggung jawab terhadap risiko bisnis yang itu berbeda dengan korporasi perbankan. Ketiga, alasan yuridis, yakni credit union sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan demokrasi ekonomi seperti yang disebut dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.*

Referensi

- Ayub Barombo, dkk (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Credit Union (CU) Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak*, Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Wibowo, Danny (2013). Pengaruh Pendapatan Per kapita, *Economic Growth Rate, Economic Structure, dan Tax Rate Terhadap Tax Ratio* pada Negara-Negara OECD dan Indonesia. Jember: Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Mubyarto (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Munaldu, dkk (2012). *Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Website

<https://www.amerta.id/2015/05/20/1109/sistem-ekonomi-kerakyatan-sebuah-catatan-ringkas.php>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/162624169/ekonomi-kerakyatan-pengertian-ciri-ciri-dampak-faktor-pendorong-dan?page=all>

EFRIAL RULIANDI SILALAH tertarik pada isu ekonomi kerakyatan, ekologi serta masyarakat adat. Aktif dalam organisasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Terlibat sebagai salah satu penulis buku *G20 Recover Together Recover Stronger*. Ia dapat dikontak melalui email: efrial.ruliandi@gmail.com.

Menatap Masa Depan Baru: Peran RCEP dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di ASEAN

Amelia Basarda

Tanggal 15 November 2020 adalah tanggal bersejarah bagi ASEAN dan lima negara mitranya yakni (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Di tanggal tersebut Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ditandatangani oleh 15 negara. Sedangkan Implementasi Perjanjian RCEP yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I tahun 2022 menjadi semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19.

“RCEP merupakan kesepakatan regional trading block terbesar di dunia, yang meliputi 30% dari PDB dunia, 27% dari perdagangan dunia, 29% dari investasi asing langsung dunia dan 29% dari populasi dunia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam MEDIA BRIEFING RCEP, secara virtual di Jakarta (12/31). Menko Airlangga menjelaskan, implementasi Perjanjian RCEP akan mendatangkan berbagai manfaat bagi Indonesia, di antaranya adalah kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha barang, jasa dan investasi, serta penguatan integrasi ke dalam REGIONAL VALUE CHAIN (RVC).

“Kata kunci pemanfaatan RCEP adalah peningkatan daya saing. Kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja menjadi salah satu senjata utama kita untuk menarik investasi dari negara anggota RCEP yang berorientasi ekspor. Kita juga harus bisa memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 untuk mendorong pemanfaatan RCEP dan memperkuat kepemimpinan Indonesia,” tutup Menko Airlangga.

RCEP dan Dampaknya Bagi UMKM ASEAN

UMKM adalah tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar negara negara di ASEAN. Keberlangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM akan menjadi penentu apakah suatu negara di ASEAN bisa *survive* dari berbagai krisis ekonomi dan bisa bertumbuh dari negara berkembang dan maju. Dengan menciptakan pasar perdagangan terbesar di dunia, RCEP menawarkan berbagai peluang bagi berbagai sektor ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Artikel ini akan menggali peran RCEP dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Asia.

Kelima belas negara penandatanganan perjanjian RCEP ini secara kumulatif mewakili 29,6 (persen) penduduk dunia, 30,2 persen GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCT) dunia, 27, 4 persen perdagangan dunia, dan 29,8 persen FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) dunia,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto usai penandatanganan RCEP. Salah satu manfaat terbesar yang diberikan oleh RCEP kepada UMKM adalah akses yang lebih luas ke pasar regional yang mencakup lebih dari 2,3 miliar orang. Dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor, RCEP memungkinkan UMKM untuk lebih mudah menjual produk mereka ke negara-negara mitra. Ini membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas bisnis mereka dan mengembangkan jaringan pelanggan di seluruh wilayah.

RCEP bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan yang telah menjadi kendala bagi UMKM selama ini. Hal ini mencakup kesepakatan tentang penyederhanaan peraturan dan prosedur perizinan, harmonisasi aturan asal, dan standarisasi teknis. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar lintas batas dan menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk mematuhi berbagai aturan nasional yang berbeda.

RCEP memiliki komitmen khusus untuk pemberdayaan UMKM. Berbagai inisiatif yang mencakup pelatihan, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas ditujukan untuk memperkuat daya saing UMKM. Ini termasuk membantu

UMKM dalam memahami peraturan perdagangan internasional, meningkatkan kualitas produk, dan menjadikan bisnis mereka lebih berkelanjutan.

Perjanjian ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk membangun kemitraan dengan perusahaan besar dan pelaku bisnis lainnya di negara-negara anggota RCEP. Kemitraan ini dapat membantu UMKM untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang lebih besar. Dalam kerangka ini, UMKM dapat belajar dari pengalaman dan keahlian pelaku bisnis yang lebih besar, membantu mereka dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka dengan lebih efisien.

Kebijakan Pemerintah

Presiden Joko Widodo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama masa kepemimpinannya. Berikut beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia;

Pertama, Program Dana Bergulir UMKM. Salah satu inisiatif utama yang diambil oleh pemerintah adalah pendirian Program Dana Bergulir UMKM. Program ini memberikan akses keuangan kepada UMKM yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, UMKM dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, membantu mereka untuk memperluas operasi dan meningkatkan produktivitas.

Kedua, Simpul-Simpul Ekonomi. Pemerintah Jokowi mendorong konsep “satu desa satu produk” dan pembentukan “simpul-simpul ekonomi.” Ini bertujuan untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM secara efektif. Pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan, pemasaran, dan bantuan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar.

Ketiga, Pemberian Insentif Fiskal. Pemerintah RI memberikan insentif fiskal kepada UMKM. Beberapa insentif tersebut meliputi pembebasan pajak, keringanan pajak, dan fasilitas perpajakan lainnya untuk memberikan keringanan biaya dan memudahkan UMKM dalam menjalankan usahanya.

Keempat, Reformasi Perizinan. Pemerintah RI juga telah melakukan reformasi perizinan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM. Proses perizinan yang lebih sederhana dan cepat telah membantu mengurangi birokrasi dan memudahkan UMKM dalam mendirikan dan mengelola usahanya.

Kelima, Pelatihan dan Pengembangan. Indonesia juga telah aktif dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para pelaku UMKM. Program-program pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi, yang membantu UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM, meningkatkan akses keuangan, dan meningkatkan daya saing produk-produk UMKM di pasar lokal dan internasional.

RCEP merupakan tonggak penting dalam kerja sama ekonomi regional di Asia. Perjanjian ini membawa harapan baru bagi UMKM dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, mengurangi hambatan perdagangan, pemberdayaan, dan peluang untuk membangun kemitraan. Namun, implementasi yang sukses memerlukan persiapan dan adaptasi yang cermat dari UMKM. Dengan mengambil manfaat dari RCEP dan dengan dukungan pemerintah yang tepat, UMKM di kawasan Asia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi regional dan global.*

AMELIA BASARDA adalah pengusaha muda Indonesia yang aktif sebagai pengurus HIPMI dan Gekrafs.

Integrated Reporting, Alternatif Pengkomunikasian Informasi Korporasi di ASEAN

Winwin Yadiati

Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan harapan dan tujuan negara negara ASEAN. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dan sebagai salah satu paru-paru hutan dunia, Indonesia memiliki peran startegis dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem dunia. Dalam bidang ekonomi Indonesia memegang peran kunci dalam memenuhi kebutuhan pangan dan enegri baik untuk kebutuhan dalam negerinya dan kebutuhan negara ASEAN. Banyak korporasi korporasi besar di Indonesia yang bergerak antara lain dalam bidang kehutanan, pertambangan, energi, pengolahan pangan, dan industry strategis lainnya.

Korporasi sebagai badan usaha berbadan hukum didirikan diantaranya untuk menghasilkan keuntungan, manajemen suatu korporasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan para pemegang kapital untuk menghasilkan keuntungan semata (*profit*), di satu sisi keberadaan suatu korporasi dituntut untuk peduli terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Sesuai dengan UU PT No 40. Tahun 2007, setiap perusahaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya atau yang dikenal dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas sosialnya setiap korporasi memiliki tanggungjawab untuk melaporkan segala aktivitasnya tidak saja dalam bentuk laporan keuangan saja tetapi juga laporan lainnya yang disebut pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure*).

Pelaporan keuangan adalah proses pengkomunikasian informasi suatu perusahaan kepada para penggunanya seperti para pemegang saham, kreditur dan pengguna lainnya, yang dituangkan dalam seperangkat laporan Laporan Keuangan untuk berbagai perusahaan di Indonesia adalah laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berterima umum di Indonesia yang disebut dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Dalam standar tersebut diatur item-item apa yang harus dilaporkan/isi laporan keuangan bagaimana item-item laporan keuangan itu diakui dan diukur semuanya diatur dalam Standar tersebut. Laporan keuangan hanya menyajikan item-item yang sifatnya kuantitatif yang bisa diukur secara moneter dalam standar akuntansi pun ditentukan bahwa basis pengukuran digunakan bisa menggunakan nilai historis (*historical Vvalue*) dan *fair value* (nilai wajar sekarang). Laporan keuangan adalah sabagai bentuk tanggung jawab manajemen, manajemen diberi keleluasan untuk memilih metode akuntansi yang akan diterapkannya asalkan tidak keluar dari standar akuntansi yang ditetapkan.

Namun demikian, ada beberapa kelemahan dari Laporan Keuangan yang sekarang diberlakukan diantaranya laporan keuangan hanya menyajikan item item yang kuantitatif secara moneter saja. Kemudian laporan keuangan hanya bersifat melaporkan apa yang terjadi dibelakang dan hanya melaporkan peristiwa-peristiwa bisnis selama 1 tahun di masa lalu (*backward looking*). Item-item yang sifatnya kualitatif seperti intelektual kapital itu tidak disajikan.

Kelemahan lainnya adalah adanya fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi yang cenderung akan memunculkan terjadinya praktik *Earning Management*. Terjadinya perubahan iklim, polusi dan dekadensi moral serta tuntutan transparansi dari para pemangku kepentingan, korporasi dituntut untuk melaporkan tidak saja informasi kuantitatif yang keuangan tetapi juga dituntut untuk mengungkapkan informasi kualitatif yang terkait dengan lingkungan. Tata kelola strategi perusahaan, remunerasi, sumber daya manusia yang sifatnya berorientasi masa depan/*future outlook* dan yang lebih memberikan gambaran tentang keberlanjutan suatu korporasi.

Beattie and Pratt (2002) mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut, yakni financial data, objectives and strategies, management discussion and analysis, company

background, value drivers (*innovation, customers, processes, employees; risks and opportunities; intangibles/intellectual capital*) dan environment and social.

Pada tahun 2011, International Integrated Reporting Committee (IIRC) dan didukung oleh GRI mengembangkan model pelaporan korporasi yang baru yang disebut Integrated Reporting. The IIRC menulis:

“Integrated Reporting demonstrates the linkages between an organization’s strategy, governance and financial performance and the social, environmental and economic context within which it operates. By reinforcing these connections, Integrated Reporting can help business to take more sustainable decisions and enable investors and other stakeholders to understand how an organization is really performing”

[*Integrated Reporting* menunjukkan hubungan antara strategi, tata kelola, dan kinerja keuangan suatu organisasi serta konteks sosial, lingkungan, dan ekonomi di mana organisasi tersebut beroperasi. Dengan memperkuat hubungan ini, *Integrated Reporting* dapat membantu dunia usaha untuk mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana kinerja sebenarnya suatu organisasi].

Integrated reporting adalah suatu komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi, tata kelola dan remunerasi, kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Penutup

Uraian di atas menunjukkan pentingnya berbagai perusahaan yang berakuntabilitas publik, baik di Indonesia dan ASEAN, untuk mengimplementasikan pelaporan keuangan yang terintegrasi tersebut. Pelaporan tersebut dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan tersebut tidak saja berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan investasinya, akan tetapi sebagai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Salah satu manfaat pelaporan terintegrasi adalah membantu proses penciptaan nilai bagi perusahaan tersebut melalui pengukuran faktor faktor non-finansial dan mengkaitkan kinerja non-finansial secara langsung pada bisnis perusahaan serta memberikan identifikasi terbaik untuk pelaporan risiko dan mitigasinya.*

Referensi

- Beattie, VA and Pratt K. (2002). *Voluntary Annual Report disclosures: Users Want*. Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
- IIRC (2013). *Integrated Reporting*. <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf> (diunduh pada 15 Oktober 2023)
- Poole, Veronica (2023). “A directors’s guide to integrated reporting,”<https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/audit/articles/directors-guide-to-integrated-reporting.html> (diunduh pada 15 Oktober 2023)

WINWINYADIATI adalah Guru Besar dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Mengajar mata kuliah Filsafat Ilmu Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Teori Akuntansi dan Metodologi Penelitian pada program sarjana, magister dan doktor. Beberapa buku yg telah ditulisnya adalah *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* dan *Kualitas Pelaporan Keuangan* dan memiliki H-Indeks.

Mewujudkan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan Melalui Pemuda Ekonomi Biru 4.0

Kaisar Akhir

Sudah menjadi sebuah fakta bahwa kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didominasi oleh wilayah lautan yang mencakup 66 persen dari total luas wilayah kawasan. Di kawasan ini, ada sembilan Negara Anggota ASEAN yang memiliki wilayah laut dan hanya satu yang tidak memilikinya, yakni Laos. Selain itu, setidaknya ada dua negara di ASEAN yang memenuhi kriteria sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), yaitu Indonesia dan Filipina. Menurut perkiraan ASEAN pada tahun 2023, sumber daya laut di kawasan ini dapat menyumbang 5% ekonomi global, dengan perkiraan nilai pasar mencapai 2,5 Triliun dollar AS per tahun.

Posisinya yang strategis di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik juga menjadikan ASEAN berpotensi sebagai Episentrum Pertumbuhan yang bertumpu pada sumber daya maritim, utamanya pada sektor-sektor prioritas ekonomi biru berdasarkan dokumen *ASEAN Blue Economy Framework 2023* yaitu: 1) perikanan tangkap berkelanjutan, 2) budidaya perairan berkelanjutan, 3) pariwisata bahari dan konservasi warisan budaya dan alam bahari, 4) transportasi maritim dan pelabuhan hijau, 5) energi biru terbarukan, 6) desalinasi air laut, 7) industri ekstraksi mineral laut, dan 8) bioprospeksi dan bioteknologi kelautan.

Oleh karenanya, sudah tepat bahwa dalam beberapa dokumen dan deklarasi pemimpin negara-negara anggota ASEAN, seperti *the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (2019)*, *ASEAN Leaders' Declaration on the Blue Economy (2021)*, *ASEAN Blue Economy Framework (2023)*, dan *ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as An Epicentrum of Growth (2023)*, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen bersama-sama memajukan dan mengembangkan ekonomi biru di Kawasan ASEAN untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perairan, utamanya laut secara berkelanjutan.

Dalam dokumen *ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as An Epicentrum of Growth* dan *ASEAN Blue Economy Framework*, ASEAN mendefinisikan Ekonomi Biru adalah pendekatan terpadu, holistik, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan yang menciptakan nilai tambah dan rantai nilai sumber daya dari samudera, laut, dan air tawar secara inklusif dan berkelanjutan, serta menjadikan ekonomi biru sebagai mesin baru pendorong bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN di masa depan.

Menurut dokumen kajian pengembangan *Blue Economy Company Index (BECdex)* tahun 2021, apabila ekonomi biru diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan maritim dapat mengurangi kelangkaan ekologis dan risiko lingkungan; meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan manusia, pekerjaan berkualitas, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi; serta memastikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang mencakup semua pemangku kepentingan di sektor-sektor kemaritiman.

Dalam dokumen *ASEAN Leaders' Declaration on the Blue Economy*, ASEAN lebih jauh mengakui bahwa ada peluang-peluang yang muncul dari kemajuan teknologi dan revolusi industri keempat (industri 4.0) untuk pengembangan ekonomi biru dalam kerangka kerjasama regional.

Berdasarkan *ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0* pada tahun 2019, teknologi industri 4.0 meliputi *Internet of Things (IoT)*, *Big Data and Cloud-based Technology*, *Artificial Intelligence*, *Augmented Reality*, dan *Additive Manufacturing (3D printing)*. Adapun menurut dokumen *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan Kementerian Perindustrian pada tahun 2018, penerapan teknologi industri 4.0 dapat dilakukan pada lima subsektor subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Berikut ini beberapa contoh penerapan teknologi industri 4.0 pada ekonomi biru (Ekonomi Biru 4.0) di lima subsektor yang dapat dilakukan.

Pertama, subsektor makanan-minuman, misalnya alat pemberi pakan ikan otomatis, alat penghasil oksigen berlipat ganda untuk ikan tambak secara otomatis, dan sistem otomatis kultivasi mikroalga laut (penghasil bahan baku pakan ikan, bahan bakar nabati, dan pangan bergizi) di fotobioreaktor.

Kedua, subsektor tekstil dan pakaian jadi, misalnya industri tekstil dan aksesoris yang menggunakan sampah plastik di darat maupun laut sebagai bahan baku pembuatan baju, pakaian renang, sepatu, dan kacamata.

Ketiga, subsektor otomotif, misalnya kapal listrik, kapal yang menggunakan tenaga surya dan energi terbarukan lainnya, serta kapal tanpa awak (otomatis).

Keempat, subsektor elektronik, misalnya pemetaan dinamika dan pemadaman kebakaran hutan mangrove serta pengawasan keamanan maritim menggunakan drone, mesin tiket transportasi umum yang pengisian saldonya memanfaatkan sampah plastik, alat pengumpul sampah plastik otomatis di lautan, penanda digital alat tangkap ikan, dan robot-robot yang bisa mengumpulkan sampah di sungai dan dermaga.

Kelima, subsektor kimia (termasuk farmasi), misalnya pengolahan rumput laut dan mikroalga laut sebagai suplemen kesehatan, bahan bakar nabati, pupuk, pakan ikan, dan bioplastik serta jamur laut sebagai antikanker dan antivirus.

Guna meningkatkan peran pemuda untuk mengembangkan kewirausahaan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong kesejahteraan masyarakat, ASEAN telah komitmen melalui *ASEAN Leaders' Statement on the Year of ASEAN Youth to Strengthen the Role of Youth in ASEAN Community-Building* pada tahun 2022. Hal ini didasari juga bahwa Pemuda di Kawasan ASEAN menyumbang sekitar 34 persen dari total penduduk 654 juta jiwa.

Berdasarkan penjabaran di atas, menjadi sebuah peluang dan potensi bahwa sebagian Pemuda ASEAN untuk menjadi Pemuda Ekonomi Biru 4.0 yakni pemuda yang dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi industri 4.0 dalam pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya akuatik secara berkelanjutan, guna menjalankan perannya untuk mengembangkan kewirausahaan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang dilakukan oleh lintas pemagku kepentingan, lintas sektor, dan antarnegara di kawasan ASEAN.

Pengembangan Pemuda Ekonomi Biru 4.0 di kawasan ASEAN yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0 di sektor-sektor ekonomi biru; pembangunan infrastruktur digital termasuk internet berkecepatan tinggi di seluruh negara anggota ASEAN utamanya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar, daerah destinasi wisata bahari, dan daerah sepanjang rute pelayaran; penyediaan pusat pengembangan inovasi digital pemuda seperti fasilitas bengkel, laboratorium produksi, laboratorium digital, dan ruang simulasi bisnis digital di setiap provinsi atau kabupaten/kota; serta pemberian dana investasi, modal, dan insentif berupa subsidi dan potongan pajak perusahaan pemula ekonomi biru 4.0.

Pemberdayaan Pemuda Ekonomi Biru 4.0 yang dapat dilakukan antara lain pendampingan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam aktivitas ekonominya oleh Pemuda Ekonomi Biru 4.0 agar mengenal dan menerapkan teknologi industri 4.0, pelibatan Pemuda Ekonomi Biru 4.0 sebagai pemberdaya dan pembuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam usaha ekonomi biru 4.0 baik dalam bentuk koperasi maupun badan usaha lainnya, serta pelibatan Pemuda Ekonomi Biru 4.0 sebagai mentor dan pelatih bagi pemuda lainnya yang ingin menjadi Pemuda Ekonomi Biru 4.0 berikutnya. *

KAISAR AKHIR adalah wirausaha dan akademisi maritim dengan spesialisasi keberlanjutan, tata kelola, dan pengelolaan laut dengan pendekatan interdisipliner termasuk ekonomi biru, pemberdayaan pemuda, dan transformasi digital. Karyanya berfokus pada literasi maritim digital dan koneksi profesional, sertifikasi perusahaan ekonomi biru, pengembangan pemuda maritim, dan perkuliahan di bidang manajemen dan bisnis. Kaisar juga adalah Ketua Umum Maritim Muda Nusantara. Saat ini ia menjadi dosen dan direktur Indonesia Blue Economy Center (IBEC) STIE Indonesia, Jakarta.

BAB 7

IKN Nusantara, Hi-Tech, dan Transformasi Digital Indonesia

Pemindahan IKN dan Relevansinya bagi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

Bunyan Saptomo

Pendahuluan

Perdana Menteri Malaysia yang baru, Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia bagian Timur (Sabah dan Serawak). Hal ini menimbulkan semangat baru bagi dua negara serumpun untuk mempererat kerja sama, termasuk dalam pembangunan IKN Indonesia.

Sebenarnya rencana pemindahan IKN Indonesia telah ada sejak 65 tahun yang lalu. Bung Karno pada saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah tahun 1957, beliau juga mencanangkan kota ini sebagai calon IKN di masa depan. Rencana tersebut juga telah dituangkan oleh Bung Karno dalam Master plan yang dirancang sendiri oleh beliau. Namun rencana Bung Karno tersebut belum bisa terlaksana karena kondisi politik dan perekonomian negara. Wacana pemindahan IKN Kembali muncul pada masa presiden Soeharto dan presiden SBY, di mana selain Palangka Raya diberitakan Jonggol juga menjadi salah satu alternatifnya. Namun rencana tersebut belum terlaksana.

Baru setelah Jokowi terpilih jadi Presiden RI tahun 2014, rencana pemindahan IKN tersebut mendapat momentum yang tepat dan cepat. Pada bulan April 2017, presiden Jokowi memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membuat kajian tentang pemindahan IKN. Dua tahun kemudian (April 2019), presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN tsb telah mendapat dukungan DPR dengan disahkannya UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022.

Presiden Jokowi dalam pengumumannya menetapkan lokasi IKN di Kalimantan Timur Agustus 2019, menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 alasan menetapkan lokasi IKN yang baru, yaitu: Pertama, risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gempa, maupun tanah longsor. Kedua, lokasinya sangat strategis dan ada di tengah Indonesia. Ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang telah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). Keempat, infrastruktur yang telah relatif lengkap, dan terakhir, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu ha.

Kelima alasan tersebut hampir semuanya terkait pertimbangan domestik, kecuali alasan kedua: "lokasinya sangat strategis (*strategic location*)". Sebenarnya pengertian "strategis" bukan hanya merujuk pada aspek lokasi, tapi juga aspek yang lebih luas, seperti aspek politik, keamanan dan ekonomi. Sambutan positif PM Anwar Ibrahim tsb menunjukkan bahwa IKN yang baru bukan saja strategis bagi Indonesia, tapi juga bagi Malaysia dan negara ASEAN bagian Timur, seperti Brunei, Filipina dan Timor Leste. Tulisan ini akan membahas "Pemindahan IKN Indonesia dan Relevansinya bagi ASEAN bagian Timur", dilihat dari beberapa aspek "strategis", baik lokasi, politik, keamanan, dan yang lebih penting dari segi ekonomi.

Kawasan Asia Tenggara dan ASEAN

Asia Tenggara adalah bagian dari benua Asia yang terletak di bagian tenggara. Kawasan ini letaknya sangat strategis, yaitu: di antara dua Samudera (Samudera India di sebelah selatan dan Samudera Pasifik di sebelah timur), dan di antara dua benua (benua Asia di sebelah Utara dan Barat, dan benua Australia di Tenggara). Kawasan ini dikelilingi oleh 4 negara besar: China dan Jepang di utara, India di Barat, dan Australia di tenggara. Dari segi geografi, Kawasan Asia Tenggara terbagi dua, yaitu: Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara lautan (maritim). Asia Tenggara daratan meliputi negara Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam dan sebagian Malaysia (Semenanjung Malaya). Asia

tenggara maritim meliputi negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste dan sebagian Malaysia (Sabah dan Serawak).

Karena letak Asia Tenggara yang sangat strategis (dan kaya akan sumber daya alam), maka Kawasan ini sering menjadi rebutan pengaruh oleh negara-negara besar yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan pertumbuhan ekonomi kawasan, pada 8 Agustus 1967 didirikan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Organisasi regional ini didirikan oleh 5 negara, yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam perkembangannya sampai akhir abad ke-20 jumlah anggota meningkat jadi 10 negara (tambah Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan tahun ini anggotanya menjadi 11 (tambah Timor Leste). Lokasi kantor Sekretariat ASEAN berada di Jakarta (IKN Indonesia). Sesuai dengan namanya, maka ASEAN dirancang sebagai organisasi regional yang anggotanya hanya terdiri dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi ASEAN pada dasarnya identik dengan Asia Tenggara. Sehubungan dengan letak yang sangat strategis ASEAN, maka tidaklah berlebihan bila pada keketuaan Indonesia tahun ini mengusung tema "ASEAN Matters, Epicentrum of Growth."

Signifikansi pemindahan IKN Indonesia bagi pertumbuhan ASEAN bagian Timur

Dilihat dari aspek strategis, pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan minimal ada empat relevansi dengan ASEAN, yaitu: *Pertama*, dilihat dari segi lokasi, Kalimantan Timur yang akan menjadikan IKN, yang bernama Nusantara, menjadi lebih di tengah Asia Tenggara (ASEAN). Tepatnya lokasi IKN di tengah ASEAN maritim atau ASEAN bagian Timur (Brunei, Malaysia Timur, Filipina, dan Timor Leste). Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta yang menjadi IKN saat ini terletak di pulau Jawa, pinggir selatan ASEAN. Jakarta hanya sekitar 90 km dari Samudera Hindia (batas selatan ASEAN). Sedangkan jarak Jakarta (lokasi kantor Sekretariat ASEAN) ke Hanoi (ibukota ibukota paling utara negara anggota ASEAN) sekitar 3.000 km. Setelah nanti pindah ke Kalimantan Timur, maka IKN yang baru lokasinya sekitar 850 km dari Samudera India dan sekitar 2.750 km dari Hanoi. Namun karena lokasinya lebih ke timur, maka IKN agak menjauh dari ibukota 4 negara anggota ASEAN di bagian barat (Myanmar, Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok).

Kedua, dilihat dari segi politik, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dan integrasi ASEAN. Hal ini karena adanya fakta bahwa pulau Kalimantan di-*share* oleh 3 negara anggota ASEAN, yaitu: Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia (Sabah dan Serawak). Jarak dari IKN Nusantara ke Brunei Darussalam hanya sekitar 700 km, dan ke kota Kinabalu (ibukota Sabah) hanya sekitar 800 km. Kedekatan lokasi ini akan semakin memperkuat integrasi bila disertai dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang lebih baik. Komitmen untuk integrasi ASEAN ini juga akan sempurna bila kantor Sekretariat ASEAN juga pindah ke IKN yang baru, sebagaimana diindikasikan dalam Undang-undang No.3/2022 tentang IKN pasal 22 ayat 4.

Ketiga, dilihat dari segi keamanan, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan sekitar Kalimantan yang cukup mengkhawatirkan. Pengambil keputusan tentunya paham bahwa Kalimantan Timur terletak di pinggir Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi ancaman keamanan yang mungkin ditimbulkan.

Letak Kalimantan yang berdekatan dengan Laut China Selatan (LCS) yang potensi konfliknya sangat besar tentunya juga sudah dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Lokasi LCS hanya sekitar 700 km dari IKN Nusantara. Begitu pula letak Kalimantan yang berdekatan dengan laut Sulu yang berpotensi ancaman bajak laut pasti telah dipertimbangkan. Komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan kawasan sekitar Kalimantan tentu akan dilakukan bekerjasama dengan negara anggota ASEAN terkait (Brunei, Malaysia dan Filipina).

Keempat, dari segi ekonomi yang disambut baik oleh PM Malaysia dan sangat terkait dengan subtema "Epicentrum of Growth." Pemindahan IKN ke Kalimantan diprediksi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kawasan East ASEAN Growth Area (EAGA) dimana Malaysia Timur termasuk di dalamnya. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1994 telah disepakati pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi ASEAN bagian Timur (EAGA) yang meliputi wilayah empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Philipina (BIMP).

Oleh karena itu kawasan kerja sama ekonomi ini disebut BIMP-EAGA. Wilayah Indonesia yang termasuk bagian kawasan ini adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan kepindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan,

maka Indonesia tentu komitmen untuk pengembangan ekonomi Kawasan EAGA yang masih relatif tertinggal dibanding kawasan bagian Barat.

Presiden Jokowi pada KTT BIMP-EAGA ke-14 Oktober 2021 memberikan penekanan pada 4 hal, yakni percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur (jalan tol, pelabuhan dan bandara); pengembangan pertanian inklusif dan berkelanjutan; digitalisasi ekonomi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau. Menko Perekonomian, siaran persnya terkait KTT itu, juga menambahkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian telah dibentuk dua koridor ekonomi, yaitu: West Borneo Economic Corridor (WBEC) dan Greater Sulu Sulawesi Corridor (GSSC). Secara khusus beliau juga menyampaikan tentang pengembangan East Borneo Economic Corridor (EBEC) yang mencakup Kaltim, Kaltara, Sabah, Serawak dan Tawi-tawi. Dalam pertemuan tingkat Menteri BIMP-EAGA November 2022, Menko Perekonomian juga menekankan pentingnya konektivitas di kawasan ini. Oleh karena itu, seharusnya pengembangan EBEC, khususnya konektivitas di kawasan ini menjadi program utama, karena sangat relevan bagi ekonomi IKN Nusantara dan kawasan ASEAN terdekat.

PM Anwar Ibrahim yang melihat pemindahan IKN Indonesia sebagai hal yang positif bagi Malaysia Timur dalam kunjungan ke Indonesia telah menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman terkait dengan investasi 11 perusahaan Malaysia di IKN Nusantara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan sangat relevan bagi ASEAN, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN bagian Timur. *

Referensi

- BBC News Indonesia, Laut Sulu Merupakan Perairan 'Paling Berbahaya' di Dunia, [bbc.com](https://www.bbc.com), 1 April 2017
- Chandra G. Asmara, Ini 5 Alasan Jokowi Pilih Kaltim jadi Ibu Kota Baru RI, [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)
- Ditjen Kerja sama ASEAN (2008). ASEAN Selayang Pandang. Jakarta
- Dian Andriyanto (2017). *Masterplan Soekarno, Palangka Raya Ibukota Indonesia*, Tempo.co, 7 Juli 2017
- Iskan, Dahlan (2023). *Emosi Serumpun*, [disway.id](https://www.disway.id), 10 Januari 2023
- Kemenko Perekonomian (2021). *Penajaman Kerja sama BIMP-EAG*, ekon.go.id, 28 Oktober 2021
- Pusat Riset Politik (2022). *Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II*, politik.brin.go.id, 10 Maret 2011
- Tom Miller (2017). *China's Asian Dream: Empire Building along the Silk Road*. London
- Tempo (2022). BIMP-EAGA 2022, Building Block Integrasi Perekonomian ASEAN, tempo.co, 26 November 2022
- Wikipedia. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia*, id.m.wikipedia.org

BUNYAN SAPTOMO adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Majelis Ulama Indonesia. Pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Bulgaria. Tulisannya dimuat di buku *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global* (Perpusnas Press, 2021), *Recover Together Recover Stronger* (Perpusnas Press, 2022), dan menjadi salah seorang penulis buku *Diplomasi Wasathiyatul Islam Majelis Ulama Indonesia* (2002 edisi Indonesia, 2023 edisi Inggris).

Infrastruktur Sekolah Sehat dan Ramah Lingkungan IKN Sebagai Hub ASEAN

Ardian Nengkoda

Pendahuluan

Dampak dari virus Corona di bidang pendidikan sangat negatif di banyak negara-negara ASEAN, terutama di Indonesia khususnya pelajar baik siswa/siswi dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan pendidikan tinggi dipaksa untuk belajar di rumah secara *online* atau daring. Sejatinya, proses pendidikan serta keberlangsungan proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan sempurna lewat tatap muka, lalu bagaimanakah sistem perlindungan kesehatan kepada siswa/siswi? Selain kemungkinan terpapar Covid-19, masalah kesehatan yang mengejutkan terkait dengan pandemi Covid-19 adalah tingginya orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Isolasi sosial, kekhawatiran keuangan, dan ketakutan sakit karena Covid-19 telah membuat orang menjadi depresi dan cemas secara berlebihan selama pandemi. Sehingga, peran, infrastruktur dan fungsi sekolah menjadi vital.

Melalui penelitian mendalam, penulis melihat pendidikan di Indonesia selama dan pasca pandemi masih belum siap untuk melaksanakan pendidikan daring dengan baik. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya pelajar dan siswa, tidak bisa belajar secara daring karena faktor gawai dan internet yang sangat sulit untuk didapatkan serta stres dengan kondisi di rumah. Apalagi ketika kita berbicara tentang pelajar di desa-desa atau pelosok-pelosok negeri dengan jaringan internet yang sulit didapatkan karena sinyal yang tidak memadai. Selain kesehatan mental, isu kesehatan lain juga timbul seperti kurang gizi, Tuberkulosis (TBC) serta akses terhadap makanan sehat (nutrisi) juga menjadi isu penting.

Sisi negatif dari pendidikan daring adalah tidak adanya pendekatan emosional secara langsung dengan para pengajar. Anak-anak TK dan SD sebagai regenerasi muda yang seharusnya mendapatkan pelajaran dengan baik dari awal sampai akhir, justru sekarang tidak mendapatkannya karena sistem pendidikan yang diterapkan selama dan pasca pandemi ke depan harus secara daring. Hasil dari berbagai survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik dan orang tua mengharapkan tatap muka. Dengan rencana pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia-sentris, bagaimana konsep sekolah di wilayah IKN baik infrastruktur, kurikulum dan komitmen terhadap kesehatan?

Konsep Sekolah Sehat

Dalam peta jalan pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengacu pada program *Millennial Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 di bawah arahan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Program berkelanjutan yang dibuat sebagai penyempurnaan dari MDGs tersebut adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan lebih banyak negara baik itu negara maju maupun berkembang, serta mempunyai lebih banyak isu yang harus diselesaikan bersama untuk menjamin hak asasi manusia, menjaga kualitas lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi. Singkatnya, SDGs adalah pembangunan yang dijadikan komitmen global sekaligus nasional. ASEAN juga mengikuti program ini.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan SDGs, Indonesia berkomitmen untuk menyuksekkannya melalui beberapa langkah-langkah strategis. Keterlibatan negara dalam pembangunan bidang pendidikan menunjukkan implementasi pendekatan statis yang sudah dipaparkan sebelumnya dengan menempatkan SDGs sebagai arah tujuan pembangunan nasional dan ini bisa disandingkan dengan rencana IKN. Sejumlah langkah yang telah ditempuh

Indonesia sampai dengan akhir 2019 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019).

Hal ini sesuai dengan ide penyelenggaraan pendidikan selama pandemi dan pasca pandemi yang diselenggarakan secara sistematis dan kolaboratif dengan konsep Hepta Helix, yang melibatkan para pihak: (1) Pemerintah, (2) Swasta, (3) Akademisi, (4) Institusi Pendidikan, (5) *Non-Governmental Organizations* (NGOs) Pendidikan, (6) Siswa dan (7) Para Orang Tua Siswa. Salah satu inovasi yang bisa dikembangkan adalah dengan menyiapkan sekolah sehat berbasis Internet of Thing (IoT), hemat energi dan ramah lingkungan melalui suatu platform. Platform ini bisa berbentuk aplikasi digital sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko terpaparnya pandemi di sekolah-sekolah yang ada di IKN.

Tujuan dari sekolah sehat di IKN nantinya adalah untuk mendukung siswa agar memiliki keadaan badan dan jiwa yang baik melalui dukungan infrastruktur serta lingkungan yang menunjang. Artinya, sesuatu dikatakan sehat jika secara lahiriah, batiniah, lingkungan dan sosial berjalan secara normal dan baik, sehingga memungkinkan sesuatu dapat produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka sekolah sehat dapat dimaknai sebagai adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik (normal) secara lahiriah (jasmani) dan batiniah (rohani) serta lingkungannya. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, higienis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam kerangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin setiap warga sekolah. Dengan begitu, sekolah sehat memungkinkan setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah terutama dalam kondisi pandemik dan pasca pandemik.

Penulis menemukan fakta bahwa kesehatan fisik, jasmani, dan rohani termasuk kondisi infrastruktur sekolah serta dukungan keluarga berpengaruh pada kesehatan siswa. Sekolah di IKN dapat didesain sebagai tempat belajar, bertumbuh, dan berkembang para siswa, ditambah dengan bantuan dokter, psikolog serta pakar ahli pendidikan dalam rangka mencapai kualitas tumbuh kembang siswa yang menyeluruh. Konsep peta ekosistem sekolah sehat dijelaskan di Gambar 1.



Gambar 1. Ekosistem sekolah sehat, IoT, hemat energi dan ramah lingkungan

Penyediaan infrastruktur pendidikan dan sekolah di IKN harus mempertimbangkan perkembangan *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) siswa yang baik tidak hanya fokus pada akademik, maupun juga pada kesehatan dan sejalan dengan peraturan pemerintah. Pemantauan kesehatan siswa secara *real time* menjadi krusial.

Dari ketujuh belas poin SDGs, salah satu yang menjadi perhatian adalah poin ke-4, yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang, yang tentunya bisa menjadi landasan desain sekolah di IKN. Pendidikan menjadi aspek yang patut untuk diprioritaskan karena kualitas sebuah bangsa dapat terlihat dari seberapa baik kualitas pendidikan bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik yang akan berpengaruh pula pada keberlangsungan pembangunan di suatu negara.

Kemendikbudristek juga telah Memperkenalkan Kampanye Sekolah Sehat pada bulan Agustus 2022. Ini merupakan program revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang bertujuan untuk mengoptimalkan upaya promosi kesehatan di satuan pendidikan melalui UKS dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Program ini memiliki tiga gerakan utama, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Sasaran dari program ini adalah Sekolah Dasar di seluruh Indonesia dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga pendidik, tim pembina UKS, orang tua murid, masyarakat, serta mitra-mitra swasta. Pendekatan ini merupakan kolaborasi penta-helix dengan berbagai pemangku kepentingan (mitra) agar program ini menjadi sebuah Gerakan Bersama dan bukan program pemerintah semata.

Pentingnya aspek pendidikan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan beberapa poin yang menekankan kepada pentingnya membangun aspek pendidikan yang baik. Namun demikian, pada masa pandemi, poin ke-3 dan ke-6 dalam SDG terkait kesehatan dan sanitasi juga menjadi penting. Sanitasi sekolah adalah langkah awal mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Pelaksanaan program sanitasi dan higienis sekolah yang berkualitas mampu mencegah penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan risiko terkena penyakit diare sebesar 30% pada murid sekolah yang mempraktikkan cuci tangan pakai sabun. Gambar 2 menunjukkan ilustrasi sekolah sehat dan ramah lingkungan.



Gambar 2. Konsep infrastruktur sekolah sehat dan ramah lingkungan IKN

Infrastruktur ramah lingkungan dalam desain sekolah sehat dapat mengikuti kaidah *green architecture* atau dikenal juga sebagai arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan. Desain infrastruktur sekolah sehat ini dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan dimaksudkan untuk menghasilkan bangunan yang hemat energi, ramah lingkungan dan mendukung kesehatan siswa dan para guru.

Konsep sekolah sehat, hemat energi dan ramah lingkungan yang digambarkan di Gambar 2 memiliki kriteria dan prinsip antara lain:

1. **Konservasi Energi:** Desain bangunan sekolah mampu beradaptasi dengan lingkungan bukan mengubah lingkungan yang telah ada di sekitar IKN, sebagai contoh pemanfaatan potensi matahari atau biogas sebagai sumber energi dibandingkan dengan listrik. Selain itu, desain udara juga harus lancar meminimalkan kontak virus, memiliki banyak bukaan untuk meminimalkan penggunaan *air conditioner* (AC). Desain bangunan juga tidak menggunakan pemanas karena cahaya matahari telah masuk melalui lubang ventilasi dengan pasokan udara yang cukup.
2. **Ramah Terhadap Iklim:** Mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar IKN yang tropis yang nantinya keberadaan, tata letak, pemilihan bahan memanfaatkan kondisi alam, iklim, dan lingkungan sekitar ke dalam bentuk serta pengoperasian bangunan sekolah. Bangunan juga didesain untuk mendukung higienis, kebersihan, menghadap sinar matahari, penggunaan sistem hemat energi, menerapkan sistem *cross ventilation*, serta menghadirkan tumbuhan hijau, air serta pengolahan limbah yang mampu mendukung ekonomi sirkular.
3. **Keseimbangan Alam:** Dari sisi pembangunan, sekolah harus memperhatikan interaksi antara bangunan dan tapaknya, baik dari konstruksi, bentuk dan pengoperasiannya serta limbahnya jika ada. Interaksi ini haruslah tidak merusak lingkungan sekitar.
4. **Mendukung Kesehatan dan Belajar Mengajar:** Dalam hal ini, desain sekolah sehat harus mempertimbangkan kenyamanan penghuni sekolah, dengan bangunan secara keseluruhan, mobilitas serta kebutuhannya (belajar, aktivitas olah raga, sosial, interaksi alam, dukungan kesehatan, klinik, *emergency*, kegempaan serta aksesibilitas dan disabilitas).
5. **Menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle Materials*) dan Ekonomi Sirkular:** Untuk mendukung sekolah yang sehat termasuk infrastrukturnya, maka dari sisi material, bangunan sekolah perlu dirancang dengan mengoptimalkan material yang ada. Untuk itulah, penggunaan kembali dan daur ulang bahan harus dipertimbangkan mulai dari tahap desain struktur baru, dan dalam kasus pembongkaran, bahan harus mudah diambil dan digunakan kembali atau didaur ulang melalui perencanaan yang cermat. Dalam proses penggunaan dan daur ulang material ini arahnya bisa menuju ekonomi sirkular.
6. **Teknologi IoT yang Bersahabat Tepat Guna:** IoT selama beberapa tahun terakhir telah menjadi andalan di ranah teknologi. Pada era transformasi digital seperti sekarang ini, IoT bisa membantu terbentuknya sekolah sehat di IKN. Bentuk komunikasi pintar ini adalah *Machine-to-Machine* (M2M) ke manusia sebagai penggunaanya. IoT akan menjadi teknologi yang memungkinkan segala hal dalam pendidikan dan kesehatan terkoneksi dengan internet, misalnya mengontrol kadar udara di sekolah, pemantauan kesehatan siswa, efisiensi penggunaan energi secara jarak jauh dari satu perangkat saja. Kriteria ini mencakup pemanfaatan teknologi di dalam bangunan. Bangunan hijau akan menerapkan teknologi tepat guna dan berkelanjutan yang mampu memenuhi permintaan konsumen, mempertimbangkan waktu dan sumber daya alam yang diperlukan sejak tahap awal proyek dengan cara yang paling alami.

Sekolah Sehat dan Ramah Lingkungan

Kesejahteraan siswa dan keberhasilan mereka di dalam dan di luar sekolah bergantung pada kemampuan mereka menggunakan kompetensi mereka untuk budaya demokrasi. Kesejahteraan memiliki banyak aspek, meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah memerlukan pendekatan seluruh sekolah, yang melibatkan guru dan orang tua. Sekolah harus memastikan pemenuhan kebutuhan siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat dan cara mencegah atau mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sekolah perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan dan sosial yang layak.

Untuk mencapai ini, Kemendikbudristek saat ini sedang mengembangkan berbagai Gerakan sekolah sehat layaknya Gerakan "Sekolah Sehat, Aman, Ramah Anak, dan Menyenangkan". Sekolah Sehat, Aman, Ramah Anak, dan Menyenangkan sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan karena beberapa sekolah sudah melaksanakan gerakan ini baik secara parsial maupun komprehensif dalam aktivitas kesehariannya.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 serta rencana IKN yang terintegrasi dengan ASEAN ke depan, maka konsep sekolah sehat dapat dipertimbangkan oleh IKN dalam pembangunan wilayahnya secara komprehensif serta adaptif berfokus pada Kesehatan yang menyeluruh (*school wellbeing*) mencakup empat parameter utama yaitu: manajemen risiko, *real time monitoring* (IoT), kesehatan siswa dan orang tua, staf, serta infrastruktur bangunan sekolah dan lingkungan, tumbuh kembang siswa serta jaminan tercapainya hal tersebut. Dengan menerapkan empat parameter tersebut, diharapkan sekolah-sekolah di Indonesia dapat mengupayakan untuk memprioritaskan pendekatan berbasis sekolah yang mempromosikan kesehatan seumur hidup (*lifelong health*), membangun komunitas untuk mendukung seluruh anak, dan dan mempromosikan lingkungan inklusif di mana siswa dapat belajar, dan mengembangkan perilaku sehat.*

Referensi

- Affia, L. (2021). Indonesia Spends Rp10.7 tn to Treat Covid-19 Patients as of April 2021. *Tempo*. 1 Juni 2021, <https://en.tempo.co/read/1465670/indonesia-spends-rp10-7-tn-to-treat-covid-19-patients-as-of-april-2021>.
- Brazil, A. (2014). *Managing e-Learning Content Development Risks*. 1 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/275155519_Managing_e-Learning_Content_Development_Risks.
- Community, Work, and School. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). 1 Juni 2021. *CDC*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html>.
- Coronavirus disease (COVID-19): Schools. Who.int. (2021). 1 Juni 2021. *WHO*. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-schools#:~:text=The%20following%20should%20be%20monitored,the%20safest%20environment%20possible>.
- Education: From disruption to recovery. UNESCO. (2021). 12 Januari 2021. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.
- Kemdikbud RI. (2021). *Buku Saku: Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Ebook]*. Kemdikbud RI. 1 Juni 2021. http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/bukuSaku_FAQ_PTM_Terbatas_REV-9.pdf.
- Livari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. *International Journal Of Information Management*, 55, 102183. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183>
- Mineo, L. (2020). The pandemic's impact on education. *Harvard Gazette*. Retrieved 26 May 2021, from <https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/04/the-pandemics-impact-on-education/>.
- Mulyanto, R. (2021). Indonesia: Lessons from the online classroom. *Aljazeera*. 1 Juni 2021, from <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/2/how-students-teachers-in-indonesia-cope-with-online-learning>.
- Rahmat, Adi F., (2021). Bee Well Bikin Solusi Digital Ciptakan Lingkungan Sekolah Lebih Sehat. *Detik*. 10 Oktober 2021. <https://inet.detik.com/business/d-6348046/bee-well-bikin-solusi-digital-ciptakan-lingkungan-sekolah-lebih-sehat>
- THE 17 GOALS | Sustainable Development. (2021). *sdgs.un.org*.. 26 May 2021. <https://sdgs.un.org/goals>.
- The Jakarta Post. (2021). Schools could become new clusters of COVID-19 transmission: Indonesian Red Cross. *The Jakarta Post*. 25 Mei 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/16/schools-could-become-new-clusters-of-covid-19-transmission-indonesian-red-cross.html>.
- What parents need to know about school reopening in the age of coronavirus. (2020). 1 Juni 2021. *Unicef*. <https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/what-parents-need-know-about-school-reopening-age-coronavirus>

ARDIAN NENGGODA adalah Wakil Ketua Forum Energizing Indonesia (FEI) ILUNI FT Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah anggota Komite Editorial, SPE International - Journal of Petroleum Technology (JPT) dan Penasihat Teknis untuk

Fasilitas Lepas Pantai berpusat di Texas, Amerika. Ardian memiliki latar belakang doktor di bidang Teknik Kimia dan memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang energi. Ardian adalah Insinyur Asia/ Indonesia pertama dalam sejarah penerima Penghargaan Internasional untuk Proyek, Fasilitas, dan Konstruksi Regional SPE 2015 (Abu Dhabi, UEA), Konferensi Teknis Tahunan Asosiasi Pemroses Gas Alam (GPA) 2014 (San Antonio, Texas), dan Proyek Fasilitas Timur Tengah 2011 (Doha, Qatar). Ia menulis lebih dari 100 makalah ilmiah, 1000 presentasi teknis dan memiliki 5 paten. Saat ini beliau juga aktif sebagai Visiting Lecture S1/S2 Teknik Kimia FTUI, dan memiliki *interest* terhadap pendidikan dan aspek infrastruktur.

Kontribusi Nyata Indonesia dalam mewujudkan Ekonomi Biru ASEAN

Anas Romzy Hibrida

Konsep Berkelanjutan, Ekonomi Biru dan Poros Maritim Dunia

Secara global, masyarakat di seantero dunia dibuat sibuk dengan kondisi alam yang semakin tidak menentu, baik dari segi kapasitas maupun kuantitas. Kesibukan itu tentunya dalam hal penjagaan keberlangsungan produktifitas sumber daya alam. Di sisi lain, manusia sebagai penghuni bumi dituntut untuk bertahan hidup dengan melakukan segala cara termasuk di dalamnya eksplorasi sumber daya alam secara positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia melalui sistem perekonomian yang dibangun.

Namun sayangnya, kondisi kedua hal tersebut saling bertolak belakang, dimana sumber daya alam yang ada di dunia sangatlah terbatas dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang jumlah populasinya semakin bertambah. Hal inilah yang kemudian mendorong manusia melakukan inovasi dan memompa kreatifitasnya untuk mencari dan menggali kembali sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan diolah secara berkelanjutan demi keberlangsungan kehidupan pada generasi berikutnya. Maka konsep tersebut telah sejalan dengan penukilan ayat di atas, yakni bagaimana manusia diperintahkan untuk menjelajahi bumi dalam rangka menghidupkan perekonomian sebagai jalan pemenuhan kebutuhan dasar dalam hidupnya, tentunya dengan cara yang arif dan bijak, bukan dengan keserakahan.

Berbagai langkah telah ditempuh banyak negara untuk menjaga keberlangsungan ekosistem supaya generasi penerus dapat memanfaatkannya dengan baik dan terhindar dari kepunahan populasi manusia. Indonesia sebagai negara maritim terluas juga mengambil peranan penting tersebut dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). SDGs adalah agenda global yang memiliki tantangan tersendiri khususnya pada bidang ekonomi berbasis lingkungan yang selama ini selalu menjadi fokus banyak negara. Bagaimana perekonomian bisa berkembang khususnya pasca Covid-19 namun juga turut memperhatikan kondisi lingkungan. Indonesia yang termasuk dalam komunitas negara ASEAN dan tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki potensi yang besar dalam aktivitas perdagangan bebas antar negara di ASEAN dan dapat memberikan kontribusi dalam memimpin perekonomian berkelanjutan antar komunitas negara tersebut.

Konsep pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan penerapan Ekonomi Biru telah memberikan suatu gambaran positif dalam hal perhatian terhadap 3 point yang termasuk dimensi SDGs yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan yang akan dicapai dari pembangunan masing masing negara, termasuk wilayah ASEAN. Dalam bidang lingkungan hidup, Indonesia memiliki kelebihan dibanding negara anggota ASEAN lain yaitu luasnya wilayah laut Indonesia dan variatifnya ekosistem di dalamnya. Hal itu yang mendorong pemerintah menetapkan wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Jaya, 2004). Tentunya hal tersebut perlu diawali Indonesia di wilayah ASEAN terlebih dahulu. Dengan kelebihan tersebut, maka Indonesia berpotensi untuk memberdayakan lini maritim sehingga menjadi unggul dan memiliki pengaruh dalam perekonomian regional di ASEAN.

Pemberdayaan perekonomian kelautan tersebut akan diterjemahkan dalam konsep Ekonomi Biru dan peranan Indonesia ke depan. Dalam usaha untuk mencapai Poros Maritim Dunia, Indonesia telah merancang pilar-pilar yang mendukung terwujudnya visi ini. Salah satunya adalah membahas tentang diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja di bidang kelautan. Diplomasi maritim diwujudkan dengan melakukan perundingan perundingan dengan mitra kerja Indonesia terutama negara-negara kelautan yang untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi maritim ini juga memberikan peluang untuk Indonesia dalam mengusulkan atau merekomendasi/prakarsa dalam berbagai isu kemaritiman seperti kerja sama jalur transportasi perdagangan laut, wilayah perbatasan kelautan, dan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Indonesia berusaha untuk konsisten dalam menjalankan diplomasi maritimnya yaitu dengan meningkatkan kerja sama negara-negara di wilayah ASEAN. Dengan pelaksanaan diplomasi maritim dengan IORA akan meningkatkan keuntungan Indonesia khususnya dalam sektor ekonomi kelautan. Keseriusan pemerintah Indonesia terlihat dari peran serta Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA pada tahun 2017 yang menghasilkan beberapa rumusan tentang Ekonomi Biru, salah satunya adalah Jakarta Concord.

Nilai Tawar Indonesia dalam Ekonomi Biru

Sebagai nilai tawar, Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km), memiliki 17.504 pulau, dan memiliki garis terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km². (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Dengan luas wilayah dan kekayaan laut di dalamnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor ekonomi kelautan ini dapat membawa keuntungan yang besar kepada Indonesia jika dimanfaatkan dengan maksimal. Alasannya adalah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat menyentuh angka USD 82 miliar per tahun (Bappenas, 2014).

Dengan modal potensi kelautan tersebut, Indonesia memandang laut dapat menjadi tumpuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (KKP, 2012) Pembangunan dan pemanfaatan kelautan ini disesuaikan dengan konsep *Sustainable Development Goals* Tujuan 14: Menjaga ekosistem laut yang juga menopang potensi Indonesia sebagai negara maritim dunia. Negara-negara ini mengadopsi karena menganggap bahwa konsep Ekonomi Biru dapat menjawab kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang sudah mendesak sehingga ekonomi biru mendapatkan perhatian khusus dengan menjadi tema diskusi skala internasional yang mendorong penelitian, pembuatan deklarasi, dan pertukaran informasi dalam memahami potensi laut yang bisa dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam sikapnya, Pemerintah Indonesia pada hubungan diplomatik dengan negara anggota ASEAN, akan membawa misi bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Kepentingan Indonesia di ASEAN pada aspek ekonomi adalah pertama, sebagai promosi kerja sama ekonomi antar anggota yang saling menguntungkan, yang di dalamnya mencakup transportasi/ perhubungan dan komunikasi, perdagangan investasi. Kedua, Pemerintah Indonesia mengejar kerja sama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam maritim (perikanan, energi dan mineral) dimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam non migas dapat mengambil keuntungan. Ketiga, dengan melakukan kerja sama antar Negara ASEAN untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia, mendorong para investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan meningkatkan jumlah wisatawan asing untuk melakukan aktivitas ke Indonesia.

Ekonomi Biru merupakan gagasan ilmuwan asal Belgia yaitu Gunter A. Pauli. Konsep ini pertama kali dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 2012 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu Cicip Sutardjo pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ekonomi Biru merupakan pendekatan baru dimana aktivitas ekonomi harus inovatif, nir-limbah, membuka banyak lapangan kerja untuk orang miskin, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Dua pilar yang mendasari Ekonomi Biru adalah ekonomi dan lingkungan. Komitmen Indonesia untuk menjalankan Ekonomi Biru yang dibangun atas kesadaran tentang lingkungan dan kebutuhan untuk menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera juga berusaha untuk ditularkan kepada negara-negara anggota ASEAN (Smith-Godfrey, 2016).

Konsep Ekonomi Biru menjadi suatu keharusan untuk diaplikasikan di berbagai kawasan karena dinilai konsep ini muncul sebagai pendorong potensial yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti di wilayah ASEAN. Konsep Sustainable Development Goals memiliki 17 target yang harus dicapai. Salah satunya adalah Tujuan 14 yaitu Menjaga Ekosistem Laut yang memiliki maksud untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan (Rusydy & Mansur, 2021).

Sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap kepentingan global, Pemerintah Indonesia juga menyeleraskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia. Dalam BAB IV.1.7 Lampiran UU 17/2007 menyebutkan bahwa pembangunan jangka panjang 2005–2025 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

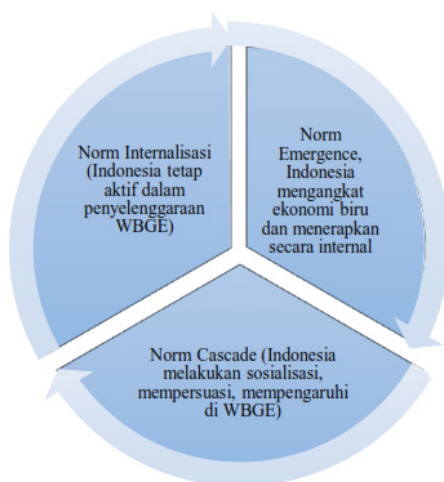
kepentingan nasional. Kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (2015-2019) untuk berkontribusi dalam mengatur perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan (Putri & Raharjo, 2019).

Indonesia sebagai *Blue Economy Norm Entrepreneur*

Pergerakan Indonesia dalam ASEAN telah turut serta untuk meningkatkan konsep Ekonomi Biru sebagai suatu prinsip, norma, prosedur pembuatan keputusan dimana kumpulan ekspetasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. Dalam teori norm *life cycles* ada tiga tahap yaitu norm emergence, norm cascading, dan internalization. Dasar Pemerintah Indonesia untuk bertindak sebagai norm entrepreneurs adalah bahwa Pemerintah Indonesia ingin terlibat dalam percaturan internasional tentang lingkungan. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Indonesia Arif Havas Oegroseno pernah menyebutkan bahwa konsep ekonomi biru bisa menjadi pilihan utama bagi semua negara di dunia, karena menawarkan konsep berkelanjutan dalam pelaksanaannya (Saefuddin, 2015).

Kepentingan untuk menunjukkan komitmen dan menggalang dukungan global dalam memanfaatkan potensi kelautan dengan pendekatan keberlanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru. Ada 6 prioritas dalam pelaksanaan Ekonomi Biru antara lain : (a) Perikanan dan Akuakultur; (b) Energi Laut Tebarukan; (c) Pelabuhan dan pengiriman; (d) Offshore Hydrocarbons and Seabed Minerals; (e) Bioteknologi Kelautan, Pengembangan dan Penelitian; (f) Pariwisata (Dinarto, 2016).

Selain itu, Indonesia juga akan memberikan usul penting untuk memudahkan implementasi ekonomi biru yaitu dengan melakukan Voluntary Commitment atau komitmen kesukarelaan terhadap terlaksananya ekonomi biru. Dengan ini, Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan ASEAN sebagai institusi berusaha untuk menunjukkan komitmennya dengan membahas dan menjadikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi biru dengan spesifik untuk menjadi fokus sebagai institusi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan konsep ini di negaranya masing-masing. Berikut peranan Indonesia jika digambarkan dalam sketsa :



Dalam siklus hidup di atas, ekonomi biru sebagai norma, penulis berusaha memposisikan Indonesia yang menegaskan dan memperdalam ekonomi biru sebagai norma yang disepakati oleh negara-negara di ASEAN. Pada tahap ini, ekonomi biru sudah dilakukan di Indonesia. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia juga dinilai berhasil melewati titik kritis dalam masa pandemi Covid-19 untuk menekan angka pandemi dan tetap melaksanakan kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan isu lintas sektoral yaitu ekonomi biru walau dalam kondisi keterbatasan saat pandemi. Sebelum sampai pada tahap cascading, Indonesia telah berperan secara aktif untuk mensosialisasikan ekonomi biru

dengan Blue Economy Working Group. Pada tahap terakhir yaitu internalisasi yang merupakan tahapan panjang untuk implementasi di masing-masing negara anggota ASEAN.

Tantangan Implementasi Ekonomi Biru

Untuk menghasilkan bukti konkret dari kerja sama ekonomi biru membutuhkan waktu yang cukup lama karena anggota ASEAN dengan bentuk pemerintahan politik dan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam. Dengan keberagaman anggota negara ASEAN yang merupakan negara berkembang merefleksikan kekuatan politik, keamanan, dan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan rencana aksinya sehingga meminimalisir kemungkinan ASEAN hanya menjadi ajang pertemuan saja. Oleh karena itu, dalam prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat dari banyak pihak yang semakin menambah sifat subyektifitas dari ekonomi biru.

Tantangan selanjutnya yang terjadi di kancah internasional adalah ketika menghasilkan sebuah keputusan ada negara yang belum optimal untuk menjalankannya atau tidak menjalankan keputusan tersebut sama sekali. Apalagi dengan keputusan negara-negara anggota ASEAN belum terikat (*non-legally binding*) sehingga kemungkinan untuk tidak dilakukan atau dilanjutkan juga ada sehingga penting untuk untuk kelompok kerja untuk mengembangkan pilot projects atau master plan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek yang terukur dan nyata yang disesuaikan dengan kemampuan negara-negara anggota. Ini dilakukan untuk tetap mempromosikan ekonomi biru sebagai *driver* dari pengembangan ekonomi-sosial.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas Indonesia ke depan yaitu tetap menginternalisasikan ekonomi biru pada negara anggota ASEAN. Proses internalisasi norma ekonomi biru merupakan waktu yang panjang sehingga negara-negara harus tetap menjalankan komitmen untuk tetap menjalankan ekonomi biru sampai dengan target-target pada dapat terwujud. Diplomasi Maritim yang dijalankan Indonesia merupakan perwujudan Indonesia menerapkan Poros Maritim Dunia.

Indonesia harus mampu berjaya di sektor kelautan. Indonesia melihat bahwa ada peluang secara ekonomi dan lingkungan yang bisa tercapai jika mampu menjadi negara penyeimbang di sektor kelautan sehingga Indonesia mulai memperhatikan posisinya sebagai negara yang aktif berperan serta dalam pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan dan menjadi inisiator dari konsep ekonomi biru hingga menjadi wujud nyata kontribusi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi biru ASEAN.*

Referensi

- Bappenas. (2014). Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. *Kementerian PPN/Bapenas Direktorat Kelautan Dan Perikanan*.
- Dinarto, D. (2016). Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Maritime Economy*.
- Jaya, A. (2004). KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development). In *Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains Semester Ganjil 2004*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). LAUT MASA DEPAN BANGSA, MARI JAGA BERSAMA SIARAN PERS Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019. Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- KKP. (2012). Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru. In *Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Putri, Y. N. L., & Raharyo, A. (2019). Actualizing Blue Economy: Multi-Track Diplomacy in Supporting Indonesia – Philippines Ocean Economy Cooperation (2014-2017). *AEGIS : Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i2.710>
- Rusydy, N., & Mansur, U. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa New Normal. *Senakota . . .*, 1(1), 75–82. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/12>
- Saefuddin, A. (2015). PERGURUAN TINGGI, PERAN PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i3.10289>

Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs*. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>

ANAS ROMZY HIBRIDA adalah salah satu dosen yang mengajar program studi manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Dia juga aktif sebagai pendiri sekaligus pembina remaja muslim dan Taman Pendidikan Al Quran di daerah asalnya yaitu Kediri, Jawa Timur. Dia menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Jember (UNEJ) dilanjutkan S2 di Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri. Untuk meningkatkan kompetensi sebagai penunjang disiplin keilmuan yang dimiliki, dia juga memiliki sertifikasi profesi Human Capital Staf dari BNSP Republik Indonesia. Berkeluarga kecil dan memiliki anak dua nyatanya bukan halangan bagi dia untuk aktif membuat karya tulis ilmiah berupa jurnal dan artikel bebas yang dipublish dan dapat dilihat dalam google scholar. Ia dapat dihubungi di WA 085258730303 atau email di : anasromzyhibrida@gmail.com atau dengan mengunjungi sosial media yang dimiliki di Instagram dengan akun @romzy_noah, facebook dengan akun @anasromzyhibrida dan twitter dengan akun @anas_romzy.

Perkembangan IPTEK dan Sains di ASEAN

Gita Erlangga K.

Kecepatan arus informasi dan komunikasi yang kita rasakan di era globalisasi ini menyebabkan negara-negara di belahan dunia saling berinteraksi dengan mudah. Hal tersebut memberikan dampak positif dalam rangka kerja sama antarnegara untuk memenuhi kebutuhan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Sayangnya, kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) belum merata, salah satunya di sejumlah negara ASEAN. Seperti diketahui, negara ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi yang mewadahi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara.

Jumlah anggota ASEAN sebanyak 10 negara, dimana negara-negara tersebut bekerjasama menjaga stabilitas ekonomi kawasan ASEAN dan menjaga daya saing regional. Adapun negara-negara ASEAN antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja. Namun, sama-sama menjadi anggota ASEAN ternyata tidak menjamin bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kemampuan yang sama di bidang teknologi informasi (IT). Padahal, perkembangan IPTEK berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan karena memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia.

Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah transportasi, komunikasi, dan produksi. Dari 10 negara ASEAN, dibagilah menjadi 3 kelompok antara lain Golongan kemampuan IPTEK maju (seperti Singapura), golongan kemampuan IPTEK dalam tahap perkembangan mengejar negara maju (seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia), serta Golongan kemampuan IPTEK masih dalam tahap membangun infrastruktur dasar (seperti Laos dan Myanmar).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai FOCAL POINT dalam 6 SUBCOMMITTEE di ASEAN COMMITTEE ON SCIENCE DAN TECHNOLOGY (ASEAN COST). Optimalisasi peran ini terkait pengembangan iptek di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengemuka dalam THE 71ST ASEAN COST AND RELATED MEETING yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja (24–29 Oktober 2016). Pertemuan yang diselenggarakan sekali dalam setahun ini bertujuan untuk memberikan ulasan proyek kerja sama yang sedang berjalan sekaligus mengaji dampak dan efektif tidaknya proyek kerja sama tersebut dalam meningkatkan kapabilitas iptek di kawasan ASEAN⁴¹.

Mengutip Kemdikbud RI, perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia karena memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain; Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi, ilmu yang menghasilkan teknologi

41 Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah delegasi LIPI, antara lain Kepala Pusat Penelitian (Puslit) Kimia Agus Haryono sebagai FOCAL POINT SC ON FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Kepala Puslit Bioteknologi Bambang Sunarko sebagai FOCAL POINT SC ON BIOTECHNOLOGY, Kepala Puslit Tenaga Listrik dan Mekatronik Budi Prawara selaku FOCAL POINT SC ON SUSTAINABLE ENERGY RESEARCH, Kepala Puslit Informatika Yan Rianto selaku FOCAL POINT SC ON MICROELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, Kepala Puslit Oseanografi LIPI Dirhamsyah selaku FOCAL POINT SC ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY, serta Bambang Prihandoko dari Puslit Fisika LIPI mewakili FOCAL POINT SC ON MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula perwakilan dari Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Muhammad Dimiyati yang turut hadir menuturkan, ASEAN COST penting dalam meningkatkan kerja sama dan jaringan di antara negara anggota ASEAN. "Indonesia perlu lebih berperan dalam mengusulkan ide-ide kegiatan terkait usulan kerja sama riset dalam konteks kerja sama ASEAN," pungkasnya.

komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antarpihak; Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan.

Pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN Teknologi transportasi mencakup berbagai bentuk alat transportasi di darat, laut dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan tinggi. Contoh kereta cepat monorel, pesawat terbang, *speed boat* yang terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpang. Tetapi di negara-negara ASEAN, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan. Contoh, pedati, delman, dan becak. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan.

Transportasi udara berupa pesawat bukan lagi alat transportasi mahal. Setiap orang dapat naik pesawat karena cepat, nyaman dan harga terjangkau. Transportasi air berupa kapal tidak hanya sebagai alat transportasi tetapi juga sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Perkembangan transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut dan udara maka sarana dan prasarana penunjang semakin mendesak pembangunannya, seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga atau pelabuhan.

Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah canggih. Contoh Singapura dan Thailand yang mengembangkan transportasi darat bawah tanah. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi juga terjadi di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contoh, pembangunan Bandara Suvarnabhumi di Thailand menggantikan Bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain.

Pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN Komunikasi adalah cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya, yang disebut bahasa ibu. Contoh bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris atau bahasa lain. Ilmu pengetahuan berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih.

Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena mengurangi jarak dan waktu. Berbeda dari keadaan masa lalu, komunikasi menggunakan surat sehingga butuh waktu lama sampai ke tujuan. Meski begitu, perkembangan teknologi komunikasi juga menimbulkan kerugian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antarmasyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek.

Tim pelajar Indonesia berhasil meraih sejumlah penghargaan di ASEAN Student Science Project Competition (ASPC) 2017 di Thailand. Indonesia diwakili oleh 6 tim yang terdiri dari 3 tim binaan LIPI dan 3 tim lainnya dari Indonesian Science Project Olympiad (ISPO). Dalam ajang tersebut, juara pertama diraih melalui karya yang berjudul Pemanfaatan Plastik sebagai Penghasil Arus Listrik dalam Microbial Fuel Cell dalam kategori *applied science*.

Karya tersebut merupakan temuan Angelica Grace Intan dari SMA Santa Laurensia, Tangerang, yang juga merupakan Juara III Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) LIPI tahun 2016 kategori Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH). Dalam ajang yang melibatkan 35 proyek dari 7 negara-negara ASEAN (Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) tersebut, tim Indonesia juga berhasil meraih juara ketiga untuk kategori *biological science* serta Consolation Prize kategori *physical science* oleh pelajar ISPO. Kita berharap Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat terus berkembang dalam sains.*

Referensi

<https://www.cnnindonesia.com/cnn-student/20170731165313-445-231519/pelajar-indonesia-raih-juara-di-ajang-sains-internasional>.

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-6/melihat-perkembangan-ipitek-di-negara-asean-14778/>)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/163000969/pengaruh-perkembangan-ilmu-dan-teknologi-terhadap-perubahan-ruang?page=all>

<http://lipi.go.id/berita/peran-lip>

GITA ERLANGGA K. adalah guru di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia pernah menulis terkait soal mata pelajaran IPA untuk SMP, project Indonesia digital learning, buku permainan sains tentang fluida statis, dan berbagai antologi lainnya. Ia menamatkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Manajemen Pendidikan STIE Cirebon.

Adoption of Technological Advancement in ASEAN Moslem Countries: Case Study in Indonesia

Patria Yunita

"Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan"

--QS. Al-A'la ayat 8

Introduction

The Covid-19 pandemic has changed financial system landscape in various countries. During the pandemic, electronic money transactions increased rapidly due to the obligation of physical distancing. Until now, there have been many mobile payment applications with electronic money technology used by people in various countries. Covid-19 encourages the development of global Digital Payments (World Bank, 2022). In addition to the increasing use of electronic money and payment gateways, the development of cryptocurrency transactions through the application of blockchain technology is also growing. Cryptocurrency transactions contain very high volatility, so that electronic money transactions that are growing rapidly using cryptocurrencies are very dangerous. This encourages Central Banks in various countries to issue The Central Bank Digital Currency (CBDC) for public needs.

Apart from being a means of payment, The Central Bank Digital Currency is also used to speed up the payment system for international transactions through the integration of the banking system. The development of cryptocurrency transactions and transactions using electronic money encourages Central Banks to issue state digital currencies that can be used in the financial system. The development of electronic money transactions in Indonesia according to statistics on financial and payment infrastructure. In Indonesia, the growth of the digital economy continues to increase along with the high number of electronic money transactions.

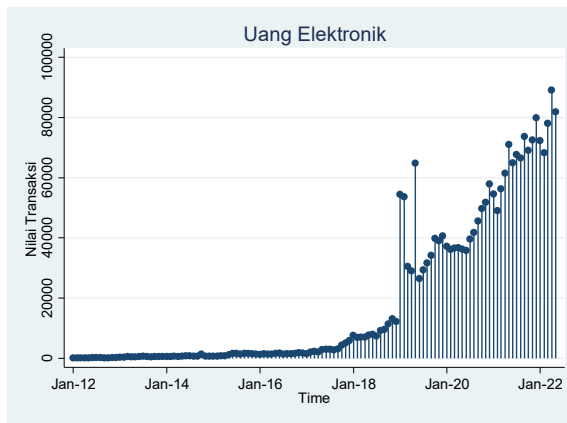
This prompted Bank Indonesia to develop Central Bank Digital Currencies (CBDC) or known as Digital Rupiah. Digital Rupiah is a term for the digital currency of the central bank or CBDC in Indonesia. Bank Indonesia continues to review the CBDC and plans to publish a white paper regarding the development of the Digital Rupiah by the end of 2022. However, it is not certain that Indonesia will implement the Digital Rupiah in the near future. Digital currency refers to any means of payment in the form of a digital whole. The main character of digital currency is that it can be exchanged for cash and the public without certain restrictions can access it. Digital Rupiah (CBDC) is a centralized and regulated digital currency in terms of issuance, settlement and destruction. CBDC is under the control of the Central Bank and its status as legal tender.

Digital Rupiah is needed in Indonesia to ensure the country's monetary sovereignty in the midst of economic digitization, provide new monetary policy instruments, strengthen and improve financial infrastructure, expand and accelerate financial inclusion, expand payment system efficiency including cross-border, non-sovereign digital currency risk mitigation. However, there are challenges in implementing the Digital Rupiah, including the differences and complexity of the blockchain application mechanism, unequal digital inclusion, high internal bureaucratic costs, large government control, and the lack of experts. The type of CBDC that will be developed in Indonesia is Rupiah Digital CBDC Cash Like. The Cash Like CBDC model is a CBDC that replaces currency as a medium of exchange but does not replace it as a store of value so that physical money will still be used. Some people consider this model the most suitable for Indonesia because it can increase financial inclusion and reduce shadow banking which tends to be a challenge in developing countries.

Digitization of the payment system has changed the landscape of the monetary and financial system. The Covid-19 pandemic has accelerated the growth of digital transactions (Alfonso et al. 2020). However, innovations in payment systems provide new challenges for policymakers. The increase in digital transactions causes the demand for money to decrease, affecting the effectiveness of monetary policy and the independence of the central bank (Prabheesh & Rahman, 2019). The development of cryptocurrencies also puts pressure on policymakers because cryptocurrencies transactions have a negative impact on financial system stability (Liu & Serletis, 2019).

This challenge prompted the central bank to consider the issuance of a CBDC, the central bank could use the CBDC interest rate as a second monetary policy tool to influence economic liquidity and regulate monetary policy transmission. (Maryaningsih et al., 2022). In addition, CBDCs also have the potential as a tool for financial inclusion (Zams et al, 2020) by providing easy access to the financial system. In addition, CBDCs can provide real-time data on economic activity, shifting the informal economy to a formal one and increasing the amount of tax revenue (Shirai. , 2019). Although central banks understand the feasibility of CBDC adoption, CBDC adoption varies from country to country. There is a question what factors influence the adoption of CBDC. This study analyzes the factors that influence the adoption of CBDC in Indonesia.

Previous studies related to CBDC are still very descriptive (Lee et al. 2021; Meaning et al., 2021; Bindseil, 2020; Qian, 2019). This research is focused on the adoption of Central Bank Digital Currency for the Muslim community in Indonesia. This research uses The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) method which was designed by Ventakesh (2003). The construct variables used are Performance Expectancy, Effort Expectancy, Attitude Towards Technology, Self Efficacy, Facilitating Condition, Social Influence and Anxiety on Behavioral Intention and Usage of the use of digital money transactions by the Indonesian Muslim community. With moderating variables of age, gender, education level and intensity of use of digital transactions.



Graph 1. Value of Electronic Money Transactions Jan 2012 – May 2022

Source: Payment System Statistics and Financial Market Infrastructure, Bank Indonesia, 2022.

The increasingly widespread use of electronic money has prompted the Central Bank to issue a central bank digital currency or The Central Bank Digital Currency (CBDC) to regulate the financial system and maintain financial stability in each country.

Technology of Digital Currency

The emergence of CBDC as one of the Central Bank’s efforts to control the development of cryptocurrencies that can disrupt financial system stability due to decentralized transactions and high volatility (Aysan & Kayani, 2022). CBDC has social value because of its ability to combine cash and deposits, among others, protect customers from the use of personal transaction data, enhance technology development. CBDC also opens up opportunities for Central Banks to monopolize access to personal transaction data. This has been studied by the Central Banks of Canada, China, Norway,

and Sweden. Use of CBDC reduces transaction costs (Agur et al., 2022). The main thing that makes CBDC a trusted currency is its ability to ensure its value in credit authorities. In addition, electronic databases and systematic record-keeping systems assist regulators and governments in monitoring individual financial transactions, preventing irregularities and ensuring the security of public transactions. CBDC assists the central bank in implementing optimal monetary policy. Identify potential problem areas, promote macroprudential policies in stabilizing prices and the financial system. The use of digital currencies in the form of CBDCs reduces central bank costs of printing money, assisting domestic and international transactions with minimum risk and low fees (Aysan & Kayani, 2022).

CBDC provides several advantageous opportunities in maintaining monetary and financial stability. CBDC protects consumers of personal transaction data for credit assessments, is likely to evolve as technology advances. CBDC is an electronic form of money that can be used by households and businesses as a means of payment (Bianco, 2020). CBDC adoption in different countries varies. Emerging countries are more motivated to adopt retail CBDCs as a substitute for cash to enable financial inclusion and the informal economy (Barontini & Holden, 2019). Meanwhile, developed countries prefer wholesale CBDC development to develop payment system services to the financial sector. Because the higher the financial development of a country, the higher the financial transactions so that it requires payment system innovation (Folkerts-Landau & Garber, 1997). Meanwhile, countries that implement real time payment systems in large numbers are not very interested in implementing wholesale CBDC because Real Time Gross Settlement (RTGS) is more suitable for domestic payment systems (Lee et al. 2021).

Limitations of the current payment system The technology of the wholesale payment system, RTGS, in terms of operational time, has encouraged the central bank to use CBDC. Distribution Ledger Technology (DLT) in wholesale CBDC has advantages over RTGS because this system synchronizes transactions automatically, makes it easier to trace and does not require third parties to verify, thereby speeding up the transaction process (Bank for International Settlements, 2018). DLT also requires financial institutions to have access to information networks thereby reducing asymmetric information (Parlor et al. 2020). Retail payment systems have a complex hierarchy, including involving payment system service technology providers, which makes it difficult for the central bank to supervise (Qian, 2019).

CBDC is electronic money issued by the central bank, which is widely used by all economic agents in the process of buying and selling goods and services (Davoodalhosseini, 2021). CBDCs are available 24 hours in the country's currency and can have interest rates (Barrdear & Kumhof, 2021). CBDC implementation may differ in each country depending on the goals and needs of each country and the technological approach used (Soderberg, 2022). CBDC can be done in a centralized or decentralized technology with a separation in the authorization of transaction data.

Currently, there are 2 types of CBDC based on users, namely wholesale CBDC which is used in transactions between the central bank and financial institutions or financial institutions or between financial institutions. Retail CBDC is central bank electronic money that can be accessed and used for public transactions (Meaning et al., 2021). Based on a survey conducted in 169 countries, no country has implemented CBDC in total (Auer et al. 2020). Data shows most countries are still in the early stages of CBDC adoption. Only 10% of countries have carried out pilot projects for the widespread use of CBDCs (Bank for International Settlements, 2021). The reason that some countries are very cautious about adopting CBDCs is to avoid instability of the financial system. 2021). CBDC may increase the role of the central bank in the allocation of economic resources, so that it can cause an economic deficit if the central bank is less efficient in allocating resources compared to the private sector (Bindseil, 2020). Issuance of CBDC by the central bank will disrupt the money creation process by commercial banks. Sources of bank financing will decrease due to the public's ability to reimburse deposits to CBDCs, leading to a decline in credit (Agur et al., 2021; Kim & Kwon, 2019; Keister & Sanches, 2019).

Table 2.1 Countries in which retail CBDCs have launched or being piloted or researched

Launched	China The Bahamas Cambodia Eastern Caribbean	Digital Currency Electronic Payment , e-CNY Sand Dollars Bakong DCash
----------	---	--

Pilot Stage	China Singapore Ecuador Sweden Jamaica Turkey Japan Ukraine Republic of Korea Uruguay	
Research	Australia Kenya Brazil Madagascar Brunei Morocco Canada Indonesia Thailand UK Eurozone South Africa	

Source: Canton, 2021(Aysan & Kayani, 2022)

Discussion

A. Statistical features of data

Table 1 Respondents' Profile

Profile of Respondents	Frequency	Percentage (%)
Gender		
Male	204	69.86
female	88	30.14
age		
Less than 20	8	2.74
20 – 29	56	19.18
30 – 39	57	19.52
40 – 49	123	42.12
Above 50	48	16.44

Profile of Respondents	Frequency	Percentage (%)
Generation Type		
1946 - 1964 (Baby Boomers)	11	3.77
1965 - 1980 (Generation X)	109	37.33
1981 – 1996 (Generation Y/Millennial)	136	46.33
1997 – 2012 (Generation Z)	36	12.33
Education Level		
Professor	1	0.34
Doctoral Degree	10	3.44
Master’s Degree	63	21.65
Bachelor Degree	178	61.17
high school	40	13.40
Job Position/Designation		
Lecturer	23	7.88
University Student	39	13.36
Traders	3	1.03
Civil Servant	35	11.99
Private Employee	136	46.58
Student	2	0.68
Entrepreneur	37	12.67
Jobless	17	5.82
Income Level		
Less than IDR 5 Million	100	34.25
IDR 5 – 10 Million	92	31.51
IDR 11 – 15 Million	50	17.12
IDR 16 – 20 Million	15	5.14
More than IDR 20 Million	35	11.99
Monthly Spending		
Less than IDR 5 Million	111	38.01
IDR 5 – 10 Million	117	40.07
IDR 11 – 15 Million	31	10.62
IDR 16 – 20 Million	13	4.45
More than IDR 20 Million	20	6.85

Profile of Respondents	Frequency	Percentage (%)
Cellular Phone Usage		
never	0	0
Less	6	2.05
sometimes	53	18.15
often	92	31.51
very often	141	48.29
Online Platform Transaction Usage		
never	10	3.44
Less	25	8.59
sometimes	78	26.80
often	81	27.84
very often	97	33.33

This study used a sample of 291 respondents consisting of 204 men and 88 women, in the age range of 20-50 years. We divide into 4 generations, namely Baby Boomers, Generation X, Generation Y/Millennials, and Generation Z. At the level of High School education to Professors and income levels, spending levels, intensity of cellular phone use and intensity of digital transactions that have been done as a digital transaction experience.

Conclusion

Central Bank Digital Currency is a technology development in cryptocurrency digital currency. However, the use of CBDC is still a debate in Indonesia. By using the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) this research model concludes that Performance expectancy significantly influences Behavioral Intention for all gender and level of generation and education. Effort Expectancy Nonsignificant due to the effect of Performance Expectancy, Social Influence significantly influence Behavioral Intention for all gender and level of generation, education and experiences, Facilitating Condition significantly influence Behavioral Intention, Self Efficacy significantly influence Behavioral Intention, Anxiety not significant influence Behavioral Intention. The pandemic situation creates a unique change in the way people live, where the use of digital technology and digital currency has become a phenomenon.*

References

- Ajzen, I. "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (50:2), 1991, pp. 179-211
- Bartlett, JE, Kotrlik, JW, & Higgins, CC (2001). *Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research*. *Information Technology, Learning and Performance Journal*, 19(1), 43–50.
- Chinn, WW (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. *Modern Methods for Business Research*.
- Committee on Payments and Market Infrastructures. (2015) *Digital currencies*. Bank for International Settlements.
- Compeau, DR, and Higgins, CA "Application of Social Cognitive Theory to Training for Computer Skills," *Information Systems Research* (6:2), 1995a, pp. 118-143.
- Compeau, DR, and Higgins, CA "Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test," *MIS Quarterly* (19:2), 1995b, pp. 189-211.
- Compeau, DR, Higgins, CA, and Huff, S. "Social Cognitive Theory and Individual Reactions to Computing Technology: A Longitudinal Study," *MIS Quarterly* (23:2), 1999, pp. 145-158

- Cooper, DR, & Schindler, PS (2014). *Business Research Methods* - Donald R. Cooper. McGraw-Hill.
- Fornell, C., & Larcker, DF (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*.
- Davis, FD "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* (13:3), 1989, pp. 319-339.
- Davis, FD, Bagozzi, RP, and Warshaw, PR "Extrinsic and Intrinsic Motivation to Use Computers in the Workplace," *Journal of Applied Social Psychology* (22:14), 1992, pp. 1111-1132.
- Davis, FD, Bagozzi, RP, and Warshaw, PR "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," *Management Science* (35:8), 1989, pp. 982-1002.
- Fishbein, M., and Ajzen, I. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1975.
- Fornell, C., and Larcker, DF "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics," *Journal of Marketing Research* (18:3), 1981, pp. 382-388
- Hair, JF, Black, Jr., WC, Babin, BJ, & Anderson, RE (2019). *Multivariate Data Analysis*. In Pearson New International Edition.
- Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Henseler, J., Ringle, CM, & Sinkovics, RR (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*.
- Moore, GC, and Benbasat, I. "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation," *Information Systems Research* (2:3), 1991, pp. 192-222.
- Mathieson, K. "Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior," *Information Systems Research* (2:3), 1991, pp. 173-191.
- Miller, JB *Toward a New Psychology of Women*, Beacon Press, Boston, 1976.
- Minton, HL, and Schneider, FW *Differential Psychology*, Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1980.
- Moore, GC, and Benbasat, I. "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation," *Information Systems Research* (2:3), 1991, pp. 192-222.
- Moore, GC, and Benbasat, I. "Integrating Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action Models to Predict Utilization of Information Technology by End-Users," in *Diffusion and Adoption of Information Technology*, K. Kautz and J. Pries-Hege (eds.), Chapman and Hall, London, 1996, pp. 132-146.
- Morris, MG, and Venkatesh, V. "Age Differences in Technology Adoption Decisions: Implications for a Changing Workforce," *Personnel Psychology* (53:2), 2000, pp. 375-403.
- Motowidlo, SJ "Sex Role Orientation and Behavior in a Work Setting," *Journal of Personality and Social Psychology* (42:5), 1982, pp. 935-945.
- Nunnally, JC, and Bernstein, IH *Psychometric Theory* (3rd ed.), McGraw-Hill, New York, 1994.
- Olfman, L., and Mandviwalla, M. "Conceptu Moore, GC, and Benbasat, I. "Integrating Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action Models to Predict Utilization of Information Technology by End-Users," in *Diffusion and Adoption of Information Technology*, K. Kautz and J. Pries-Hege (eds.), Chapman and Hall, London, 1996, pp. 132-146.
- Moore, GC, and Benbasat, I. "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation," *Information Systems Research* (2:3), 1991, pp. 192-222.
- Moore, GC, and Benbasat, I. "Integrating Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action Models to Predict Utilization of Information Technology by End-Users," in *Diffusion and Adoption of Information Technology*, K. Kautz and J. Pries- Hege (eds.), Chapman and Hall,
- Roscoe, JT (1975). *Fundamental Research Statistics for The Behavioral Sciences* (2nd Edition). In Holt Rinehart & Winston, New York.

- Now Uma; Bougie Roger. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach Seventh Edition* WileyPLUS Learning Space Card. International Labor Office.
- Taylor, S., and Todd, PA "Assessing IT Usage: The Role of Prior Experience," *MIS Quarterly* (19:2), 1995a, pp. 561-570.
- Taylor, S., and Todd, PA "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models," *Information Systems Research* (6:4), 1995b, pp. 144-176.
- Thompson, RL, Higgins, CA, and Howell, JM "Influence of Experience on Personal Computer Utilization: Testing a Conceptual Model," *Journal of Management Information Systems* (11:1), 1994, pp. 167-187.
- Thompson, RL, Higgins, CA, and Howell, JM "Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization," *MIS Quarterly* (15:1), 1991, pp. 124-143
- Triandis, HC *Interpersonal Behavior*, Brooke/ Cole, Monterey, CA, 1977. Twenge, JM "Changes in Masculine and Feminine Traits Over Time: A Meta-Analysis," *Sex Roles* (35:5/6), 1997, pp. 305-325.
- Vallerand, RJ "Toward a Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation," in *Advances in Experimental Social Psychology* (29), M. Zanna (ed.), Academic Press, New York, 1997, pp. 271-360.
- Venkatesh, V. "Creating Favorable User Perceptions: Exploring the Role of Intrinsic Motivation," *MIS Quarterly* (23:2), 1999, pp. 239- 260.
- Venkatesh, V. "Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Perceived Behavioral Control, Computer Anxiety and Enjoyment into the Technology Acceptance Model," *Information Systems Research* (11:4), 2000, pp. 342- 365.
- Venkatesh, V., and Davis, FD "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies," *Management Science* (45:2), 2000, pp. 186-204. Venkatesh, V., and Morris, MG "Why Don't Men Ever Stop to Ask For Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior," *MIS Quarterly* (24:1), 2000, pp. 115-139.
- Venkatesh, V., Morris, MG, and Ackerman, PL "A Longitudinal Field Investigation of Gender Differences in Individual Technology Adoption Decision Making Processes," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (83:1), 2000, pp. 33-60.
- Venkatesh, V., and Speier, C. "Computer Technology Training in the Workplace: A Longitudinal Investigation of the Effect of the Mood," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (79:1), 1999, pp. 1-28.

PATRIA YUNITA is a Doctor of Philosophy in Islamic Banking and Finance Candidate at Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University, Malaysia. She is a Lecturer in Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Tazkia Islamic University College. Her primary research interest are Islamic banking and finance, Islamic economic and social finance, Islamic accounting, investment and management. Her works have been published in *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)*, *International Journal of Islamic Economic and Finance (IJIEF)*, *Al-Awqaf*, *AZKA International Journal of Zakat and Social Finance (AZJAF)* and more. Her publication also presented on 2nd International Graduate Student of Islamic Economic and Finance Symposium in Istanbul University Turkey, *International Islamic Monetary Economic and Finance Conferences (IIMEFC)* and *Indonesia Finance Association International Conferences*. She received best paper awards from national and institutional institution to encourage her contribution in Islamic research area. Patria can be contacted by email: patria.yunita@gmail.com.

Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN

Ardi Prasetyo

Pendahuluan

Kendaraan listrik adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, memakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil yaitu tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, kendaraan listrik mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Pada hasilnya, ketergantungan minyak bumi / minyak mentah dari luar negeri pun berkurang, karena untuk beberapa negeri berkembang, kenaikan harga minyak mentah dunia, dapat memukul ekonomi mereka. Kenaikan harga bahan bakar minyak, menyebabkan kenaikan harga sembako (sembilan bahan pokok), yang notabene merupakan kebutuhan dasar bagi seseorang untuk melanjutkan hidup.

Meskipun kendaraan listrik memiliki beberapa keuntungan potensial seperti yang telah dibicarakan di atas, tapi penggunaan secara meluas memiliki jumlah hambatan dan kekurangan. Hingga pada tahun 2011, harga kendaraan listrik lebih mahal bila dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak dan karena harga baterai litium yang mahal. Meskipun begitu, saat ini harga baterai mulai cenderung turun karena persediaan baterai yang cukup memadai. Faktor lainnya yang menghambat tumbuhnya penggunaan kendaraan listrik adalah minimnya stasiun pengisian untuk kendaraan listrik, ditambah lagi ketakutan pengemudi akan habisnya daya baterai kendaraan listrik sebelum mereka tiba di tempat tujuan.

Beberapa negara ASEAN telah menerbitkan beberapa insentif dan aturan untuk menanggulangi persoalan ini, yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik, untuk membiayai pengembangan teknologi mobil listrik sehingga harga baterai dan komponen kendaraan makin efisien. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan dana hibah sebesar US\$2,4 miliar untuk pengembangan mobil listrik dan baterai. Pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan dana sebesar US\$15 milyar untuk memulai industri mobil listrik di negaranya. Beberapa pemerintah lokal dan nasional di sejumlah negara telah menerbitkan kebijakan insentif pajak, subsidi, dan sejumlah insentif lainnya, agar masyarakat mampu menjangkau untuk membeli kendaraan listrik.

Mobil dengan mesin pembakaran dalam bisa dianggap mempunyai jarak tempuh tak terbatas, karena bahan bakarnya bisa diisi dengan cepat dan stasiun pengisiannya pun mudah ditemukan. Mobil listrik mempunyai jarak maksimum yang jauh bertambah rendah bila dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran dalam. Selain itu, pengisian baterainya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini yang merupakan gagasan mengapa para pabrikan otomotif memasarkan mobil listrik sebagai "mobil harian" yang hanya cocok untuk pemakaian dalam kota saja atau perjalanan jarak pendek.

Salah satu cara produsen mobil untuk meningkatkan jarak tempuh mobil listriknya adalah dengan teknologi penggantian baterai. Mobil listrik yang memiliki teknologi ini bisa pergi ke stasiun penggantian baterai dan mengganti baterai mobilnya yang sudah habis dengan baterai yang sudah terisi dalam waktu 1 menit saja. Baterai mobil listrik ini umumnya mempunyai jarak tempuh 100 mil (160 km). Anggota ini bertambah bersih dan cepat daripada mengisi bahan bakar di SPBU,

Beberapa waktu lalu, *Roland Berger* sebuah lembaga konsultan manajemen internasional yang berbasis di Munich, Jerman, merilis laporan penting yang ditunggu banyak orang, *Automotive Disruption Radar* (ADR) edisi ke-10. Laporan ini dirilis setiap dua tahun, dan berfokus pada perkembangan sektor otomotif dunia, dan secara khusus lagi membahas bagaimana elektrifikasi berbagai kendaraan (*electric vehicles*/EV) dan kesiapan negara-negara di berbagai belahan dunia. Khusus untuk edisi ke-10 ini, ADR juga memasukkan dua negara baru, yakni Thailand dan Indonesia yang dianggap

sebagai salah satu tulang punggung sektor otomotif berbasis listrik di Asia Tenggara. Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-26) 2021 di Glasgow, Skotlandia, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah menegaskan kembali ambisi negaranya, sebagai salah satu pusat produksi kendaraan bermotor di Asia.

Penegasan itu menyebutkan bahwa, pada akhir dekade ini 50 persen dari seluruh mobil yang diproduksi di Thailand adalah *Zero-Emission Vehicles (ZEVs)*, atau kendaraan-kendaraan yang tidak menghasilkan emisi karbon. Pada tahun 2035, negara tersebut ingin mencapai target 100 persen sejalan dengan target ambisius *National Electric Vehicle Policy Committee* (Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional) pemerintah Thailand. Dampak dari kebijakan ambisius ini kini makin dirasakan, saat para investor dari seluruh dunia mulai tertarik masuk memanfaatkan kebijakan pro-EV negara tersebut.

Sementara itu, Indonesia mencanangkan strategi nasional untuk memproduksi 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda listrik yang diharapkan akan hadir di jalan-jalan Indonesia pada tahun 2030. Investor pun sudah berdatangan, seperti Hyundai Motor dan LG Energy Solutions yang sudah menginvestasikan 1 miliar dolar AS untuk pabrik manufaktur sel baterai dengan kapasitas 10 GWh di Karawang Jawa Barat yang diharapkan akan beroperasi penuh pada awal 2024. Masih menurut laporan Roland Berger, kebanyakan orang tertarik pada EV karena dirasa efisien. Di Indonesia, makin banyak orang tertarik dengan kendaraan listrik salah satunya karena fakta bahwa banyak orang Indonesia melakukan perjalanan jarak pendek, yang membuat kendaraan jenis ini menjadi pilihan yang layak.

Sementara di Thailand, 80 persen responden menunjukkan minat untuk membeli mobil listrik jika mereka berniat mengganti mobilnya yang sekarang. Di Indonesia, minat tersebut sudah mencapai 75 persen. Namun, ada hambatan utamanya yakni berkaitan dengan label harga kendaraan listrik yang masih begitu tinggi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Hal ini membuat belum begitu banyak kendaraan listrik dijumpai di jalanan. Data dari asosiasi manufaktur mobil di Indonesia (Gaikindo), menyebutkan bahwa realisasi total penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang semester pertama 2021 mencapai 1.900 unit. Jumlah ini terdiri atas model hybrid, *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV), dan mobil listrik baterai (BEV). Rinciannya, mobil hybrid terjual 1.378 unit, PHEV 34 unit, dan BEV menyumbang 488 unit. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan realisasi tahun lalu, ketika mobil hybrid membukukan 1.108 unit penjualan, PHEV 6 unit, dan BEV 120 unit.

Konklusi

Kendaraan listrik merupakan transportasi masa depan yang harus menjadi pilihan agar udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. Namun tantangan ke depan memang diakui cukup besar, diantaranya adalah harga kendaraan listrik yang masih cukup tinggi terutama pada komponen baterainya. Pemerintah berharap harga baterainya lebih murah dan lebih mudah didapatkan, demikian juga dengan motor listrik nya. Saat ini telah dibangun pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat yang *ground breaking*-nya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dirjen Budi melanjutkan, saat ini yang sedang didorong adalah skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau *swap* baterai. Sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut diantaranya PT Oyika Powered Solution dan PT. Swap Energi Indonesia. Nantinya, lanjutnya, pengguna dapat menuju ke mini market terdekat yang menyediakan *swap* baterai, kemudian menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh. "Jadi pembelian sepeda motor listrik bisa lebih murah karena tanpa baterai, mereka cukup bayar sewa saja," jelasnya.

Selain itu Pemerintah, lanjut Dirjen Budi, juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM (Bahan Bakar Minyak) ke kendaraan listrik. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional. Peraturannya sudah ada, regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Ketua V Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Shodiq Wicaksono menyarankan, peralihan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik tidak perlu dipercepat. Tapi sebaiknya berlangsung secara alami di sisi masyarakat maupun industri karena ada banyak faktor infrastruktur yang akan mempengaruhi, contohnya, kata

Shodiq, dahulu masyarakat Indonesia menggunakan mobil bertransmisi manual, namun untuk mengenalkannya ke transmisi otomatis dilakukan edukasi oleh APM secara alamiah sampai akhirnya mereka beralih sendiri.

Pasalnya, mobil listrik saat ini saja masih ada empat macam, dari HYBRID, PLUG IN HYBRID, BATTERY ELECTRIC VEHICLE (EV) dan FULL EV. Padahal mobil HYBRID lebih dipahami masyarakat konsumen ketimbang EV. “Jadi agar masyarakat konsumen mengenal mobil EV mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan transisi secara alamiah,” ujar Shodiq pada kesempatan yang berbeda, saat webinar Quo Vadis Industri Otomotif Indonesia di Era Elektrifikasi, pada (15/10) lalu.

Untuk mendukung dan mempertahankan adopsi EV yang cepat, infrastruktur pengisian (baik melalui *plug* atau *swapping*) harus dikembangkan dan didukung oleh investasi swasta dan publik. Pembangunan infrastruktur pengisian EV diharapkan akan disubsidi secara besar-besaran (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah di Kawasan ASEAN. Sebagian besar negara telah menetapkan target ambisius dalam hal jumlah pengisi daya yang mereka rencanakan untuk dipasang pada tahun 2030. Singkatnya, dengan permintaan yang kuat dan adopsi EV yang cepat menciptakan subsidi yang disponsori negara/pemerintah serta investasi swasta yang cukup besar, maka pengisian EV benar-benar siap digunakan di seluruh kawasan ASEAN dalam dekade berikutnya.*

Referensi

“So Close Yet so Far. The Bumpy Road to Autonomous Driving.” Roland Berger GmbH, Oct. 2021

“Harga Dan Infrastruktur Jadi Tantangan Mobil Listrik Indonesia.” GAIKINDO, <https://www.gaikindo.or.id/gaikindo-harga-dan-infrastruktur-jadi-tantangan-mobil-listrik-indonesia/> (akses 05 Desember 2022).

Maulana, Aditya. “Bermitra Dengan Gogoro, Gojek Percepat Penggunaan Sepeda Motor Listrik Di Indonesia Halaman All.” KOMPAS.COM, Kompas.com, 2 Nov. 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/02/180100215/bermitra-dengan-gogoro-gojek-percepat-penggunaan-sepeda-motor-listrik-di?page=all> (akses 05 Desember 2022)

Sperling, Daniel and Deborah Gordon (2009). *Two billion cars: driving toward sustainability*. Oxford University Press, New York. pp. 22–26

David B. Sandalow, ed. (2009). *Plug-In Electric Vehicles: What Role for Washington?* (1st. ed.). The Brookings Institution. pp. 1–6

ARDI PRASETYO lahir di Yogyakarta pada 16 April 1989 dan sekarang menetap di Tangerang. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Kanisius Sidowayah Klaten pada tahun 2001 serta menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten dan menengah atas di SMA Padmawijaya Klaten, masing-masing pada tahun 2004 dan 2007. Kemudian, Ardi menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2012. Kini, Ardi tengah bekerja di perusahaan obat tradisional terkemuka di Tangerang sejak tahun 2012 hingga sekarang. Ardi sangat menyukai membaca, terutama dalam bidang otomotif.

ASEAN Power Grid: Kerja sama Interkoneksi Listrik di Asia Tenggara untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Regional

Irma Gusmayanti

Pentingnya Listrik Bagi Perekonomian

Kawasan Asia Tenggara kini menjadi kekuatan ekonomi ke-5 dunia dan ke-3 di Asia (US-ASEAN Business Council, 2019). Sebagai kekuatan ekonomi dunia, kawasan ini juga didukung oleh populasinya lebih dari 661 juta jiwa sehingga menjadikan kawasan sebagai salah satu pasar terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada tahun 2020 total perdagangan barang di Kawasan Asia Tenggara masih tergolong tinggi meskipun pada saat itu terjadi pandemi Covid-19, yaitu mencapai USD2,5 triliun pada 2020 (the ASEAN Secretariat, 2021).

Laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi khususnya ekonomi digital tentu mendorong kebutuhan energi di Kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Asia Tenggara merupakan kawasan dengan potensi besar sebagai sumber energi global. Pada tahun 2040, permintaan energi, di kawasan ini diperkirakan akan tumbuh hampir dua pertiga atau mencapai 12% dari permintaan global (Syarifuddin Yana, Muhammad Nizar, Ardhana Yulisma, 2021).

Mengingat pentingnya kebutuhan energi Kawasan Asia Tenggara, pada prinsipnya sejak tahun 1986, Pemerintah Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menandatangani kerja sama antar negara anggota untuk mengembangkan sumber daya energi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan perdagangan yang terkait dengan energi di Kawasan Asia Tenggara.

Adapun sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional yaitu listrik. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr Robert Ayres, seorang ekonom dari INSEAD, dalam bukunya *The Economic Growth Engine: How Energy and Works Drive Material Prosperity* mengatakan bahwa penggerak ekonomi adalah energi, khususnya listrik. Listrik memegang peranan penting untuk mendukung industri dalam negeri dan regional untuk menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan peningkatan perekonomian. Bahkan pada tahun 2015 saja, data empiris dari berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa setiap 1 kwh konsumsi listrik akan memberikan kontribusi sekitar USD4 - 5 Produk Domestik Bruto (Roger Andrews, 2015).

Mengingat penting dan bermanfaatnya jaringan tenaga listrik ASEAN untuk menciptakan manfaat dan peluang ekonomi khususnya melalui pertukaran dan perdagangan tenaga listrik di antara negara anggota ASEAN maka pada 23 Agustus 2007, delegasi negara anggota ASEAN telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai jaringan transmisi tenaga listrik ASEAN atau the ASEAN Power Grid. Khusus untuk di Indonesia, MoU tersebut telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008.

Sampai saat ini, penyediaan dan kerja sama energi di Kawasan Asia Tenggara tetap menjadi fokus dan perhatian guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan untuk tahun 2023, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 menetapkan tiga prioritas. Pertama, Visi ASEAN 2045 yaitu ASEAN harus dapat menjawab tantangan 20 (dua puluh) tahun mendatang yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Kedua, ASEAN sebagai kawasan yang tangguh yang mampu menjaga ketahanan pangan, keamanan energi, dan stabilitas keuangan. Ketiga, ASEAN harus memperkokoh sentralitasnya dalam membangun kawasan yang inklusif (Kementerian Perdagangan, 2022).

ASEAN Power Grid untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi ASEAN

Setelah menyelesaikan Presidensi G20 selanjutnya Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN di tahun 2023. Hal ini menjadikan Indonesia untuk semakin berperan aktif dan berkontributif dalam forum internasional. Sebagai Ketua

ASEAN 2023 dan merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memastikan bahwa semua negara anggota mendapatkan manfaat dari kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia telah menetapkan tiga prioritas pelaksanaan. *Pertama*, Visi ASEAN 2045 yaitu ASEAN harus dapat menjawab tantangan 20 tahun mendatang yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. *Kedua*, ASEAN sebagai kawasan yang tangguh yang mampu menjaga ketahanan pangan, keamanan energi, dan stabilitas keuangan. *Ketiga*, ASEAN harus memperkokoh sentralitasnya dalam membangun kawasan yang inklusif (Kementerian Perdagangan, 2022).

Keamanan energi patut menjadi prioritas karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tercermin dalam produktivitas suatu negara, yaitu jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk negara. Adapun produktivitas tersebut salah satunya dipengaruhi oleh energi listrik. Bahkan berdasarkan data dari *International Energy Agency* bahwa permintaan energi di kawasan ini akan tumbuh sekitar 3% per tahun hingga 2030 (Asian Development Bank, 2022). Penggunaan energi tersebut tentunya didorong untuk menggunakan energi terbarukan. Sangat penting bagi negara-negara untuk mempercepat pembangkit listrik terbarukan dan beralih ke bahan bakar rendah emisi. Dalam skenario Pembangunan Berkelanjutan, pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik hampir tiga kali lipat dari level saat ini pada Tahun 2040, yaitu mencapai 70%. Di dalam dan di luar sektor listrik, Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk penggunaan berkelanjutan bioenergi modern, baik dalam hal teknologi maupun pengembangan biofuel maju untuk meningkatkan keberlanjutan sektor transportasi (International Energy Agency, 2019).

Selain mendukung perekonomian, penggunaan energi terbarukan juga turut menjaga lingkungan. Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam *ASEAN Working Group on Climate Change* berkomitmen memperkuat kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan dari negara-negara berkembang di ASEAN untuk segera mengimplementasikan Perjanjian Perubahan Iklim atau *Paris Agreement*. Negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memprioritaskan praktik pembangunan berkelanjutan baik dalam ekonomi maupun sistem energi mereka.

Negara anggota ASEAN telah mengidentifikasi target 23% pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer pada tahun 2025. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan KTT ASEAN-Amerika Serikat 12 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja sebagai bentuk komitmen kuat mewujudkan masa depan berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Salah satu solusi atau potensi untuk mewujudkan keamanan energi di ASEAN dan penggunaan energi terbarukan yaitu melalui *ASEAN Power Grid* (APG). APG merupakan kerja sama interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik untuk mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi regional yang lebih besar dengan dasar saling menguntungkan. Kerja sama APG ditandatangani oleh delegasi negara anggota ASEAN pada 23 Agustus 2007. APG merupakan upaya untuk menghubungkan jaringan listrik di kawasan ASEAN. Hal ini dapat menjadi strategi utama dalam memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara dan beralih ke energi terbarukan melalui pembagian sumber daya yang efisien.

Pembangunan APG diharapkan mampu membantu meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan mendorong pencapaian komponen energi terbarukan dengan target peningkatan kapasitas daya terpasang energi terbarukan di ASEAN hingga 35% di tahun 2025. Proyek APG tersebut senilai USD5,9 miliar yang membutuhkan 16 interkoneksi transmisi lintas batas di antara negara-negara ASEAN.

Sampai saat ini, sembilan interkoneksi telah dibangun dan sedang berjalan sementara yang lainnya dalam berbagai tahap perencanaan dan konstruksi. Beberapa proyek interkoneksi jaringan sebagai bagian dari mekanisme ekspor-impor listrik energi terbarukan di ASEAN, seperti antara pulau Malaysia - Singapura (Plentong - Woodlands); Thailand - Pulau Malaysia (Sadao - Chuping, Khiong Ngae - Gurun), Indonesia- Malaysia (Kalimantan Barat - Sarawak), dan Thailand-Laos (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).

Gambar 1. Peta ASEAN Power Grid



Sumber: International Energy Agency, 2020

Proyek APG yang telah selesai yaitu jalur transmisi 275 kV Sarawak (Malaysia)-Kalimantan Barat (Indonesia) sepanjang 120 km dan jalur transmisi 220 kV Xekaman 1 (Laos)-Pleiku 2 (Vietnam) sepanjang 191 km. Pembangunan transmisi energi terbaru ke Singapura dari Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos) melalui Thailand dan Malaysia pada Juni 2022 lalu juga menjadi tonggak sejarah dalam perdagangan listrik lintas batas di ASEAN. Proyek Integrasi Kelistrikan Laos –Thailand–Malaysia–Singapura berfungsi sebagai percontohan ASEAN dalam mengatasi masalah teknis, hukum, dan keuangan perdagangan listrik multilateral. Proyek ini dapat memasok hingga 100 megawatt (MW) tenaga air dari Laos PDR, selain itu pada awalnya, listrik hanya dikirim ke Malaysia, tapi sekarang juga dipasok ke Singapura.

Adapun total dan proyeksi produksi listrik negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut:

Negara	Produksi Listrik Total (TWh)			
	2015	2030	2040	2050
Indonesia	234	520	762	1035
Thailand	178	260	341	422
Vietnam	153	320	487	716
Filipina	82	186	287	434
Malaysia	150	250	321	388
Myanmar	16	66	103	149
Negara ASEAN Lainnya	55	68	73	76

Sumber: The Institute of Energy Economics, Jepang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2050, Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki total permintaan energi final tertinggi dengan 382Mtoe, 168Mtoe, dan 167Mtoe, masing-masing diikuti oleh Filipina, Malaysia, dan Myanmar masing-masing dengan 114Mtoe, 92Mtoe, dan 59Mtoe. Secara keseluruhan, negara-negara anggota ASEAN

menunjukkan peningkatan permintaan energi final antara 2015 dan 2050. Dalam hal pembangkit listrik, pada 2015 Indonesia adalah produsen listrik terbesar di kawasan ini dengan total listrik yang dihasilkan adalah 234TWh dan diproyeksikan akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada Tahun 2050 hingga 1.035TWh. Penghasil listrik terbesar kedua di wilayah ini adalah Thailand, diikuti oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan negara ASEAN lainnya.

Dengan adanya APG, diharapkan pada tahun 2025, pembelian listrik lintas batas dapat mencapai sebesar 19.576 MW dan terjadi pertukaran energi sebesar 3.000 MW (Southeast Asia Infrastructure, 2017). Penyediaan pasokan listrik tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kawasan ASEAN, melalui dukungan terhadap sumber-sumber ekonomi, antara lain ekonomi digital, industri manufaktur, dan transportasi. Ekonomi digital di ASEAN telah berkembang pesat karena didukung oleh jaringan digital yang berkembang pesat dan jumlah pengguna ponsel dan internet. ASEAN memiliki jumlah pengguna internet terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India (Syaifuddin Yana, Muhammad Nizar, Ardhana Yulisma, 2021).

Adapun untuk industri manufaktur, menurut data S&P Global, Purchasing Managers' Index manufaktur kawasan ASEAN berada di level 52,2 pada Juli 2022 yang mengindikasikan ekspansi. Dukungan energi listrik juga sangat berpengaruh untuk sektor transportasi di ASEAN, misalnya konektivitas antara *Transit Transport Routes* dari ASEAN *Highway Network* dan *the Singapore-Kunming Rail Link* (SKRL) dengan pelabuhan laut, bandara, stasiun kereta api dan zona ekonomi khusus yang penting di ASEAN.

Optimalisasi ASEAN Power Grid

APG perlu diptimalkan karena dapat menjadi solusi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan pola sebaran potensi energi listrik di negara anggota ASEAN. Realisasi APG akan bergantung sepenuhnya pada keterlibatan dan keterlibatan berbagai sektor dan institusi negara-negara ASEAN. Pemerintah dari masing-masing negara akan memainkan peran penting dalam membantu mengatasi tantangan peraturan, keuangan dan teknis dalam pelaksanaan proyek.

Dengan adanya APG, diharapkan penyediaan pasokan listrik dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kawasan ASEAN, melalui dukungan terhadap sumber-sumber ekonomi, antara lain ekonomi digital, industri manufaktur yang masih menunjukkan ekspansi, dan konektivitas transportasi yang menghubungkan pelabuhan laut, bandara, stasiun kereta api, dan zona ekonomi khusus yang penting di ASEAN. Hal ini menjadi kunci untuk mendukung peningkatan perekonomian di ASEAN, dimana saat ini kekuatan ekonomi ASEAN menjadi ke-5 terbesar di dunia dan ke-3 di Asia. ASEAN juga merupakan kawasan dengan potensi besar sebagai sumber energi global, yang diproyeksikan pada tahun 2040, permintaan energi, di kawasan ASEAN diperkirakan akan tumbuh hampir dua pertiga atau mencapai 12% dari permintaan global.*

Referensi

- Hazleen, Aris and Bo Norregaard Jorgensen. (2019). *ASEAN Power Grid 20 Years After: An Overview of Its Progress and Achievements*. International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019.
- Andrews, Roger (2015). "Electricity and the Wealth of Nations," <http://euanmearns.com/electricity-and-the-wealth-of-nations/> (diunduh pada 6 Desember 2022).
- Asian Development Bank. (2022). "Building the ASEAN Power Grid: Opportunities and Challenge," [shttps://seads.adb.org/solutions/building-asean-power-grid-opportunities-and-challenges](https://seads.adb.org/solutions/building-asean-power-grid-opportunities-and-challenges) (diunduh pada 6 Desember 2022).
- International Energy Agency (2019), *Southeast Asia Energy Outlook*. Perancis: International Energy Agency.
- International Energy Agency (2020), *Electricity Market Report*. Perancis: International Energy Agency.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022). "Menjadi Momen Penting dalam KTT ASEAN-AS, Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-AS Diluncurkan," <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4711/menjadi-momen-penting-dalam-ktt-asean-as-kemitraan-komprehensif-strategis-asean-as-diluncurkan> (diunduh pada 7 Desember 2022).

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). "Menteri ESDM: Pembangunan ASEAN Power Grid Peluang Besar Genjot Pemanfaatan EBT," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-pembangunan-asean-power-grid-peluang-besar-genjot-pemanfaatan-ebt> (diunduh pada 6 Desember 2022).
- Kementerian Perdagangan (2022). "Logo dan Tema Keketuaan ASEAN 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Semangat ASEAN Sebagai Episentrum Pertumbuhan Dunia", <https://www.kemendag.go.id/en/pers/logo-dan-tema-keketuaan-asean-2023-mendag-zulkifli-hasan-semangat-asean-sebagai-episentrum-pertumbuhan-dunia> (diunduh 6 Desember 2022).
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on The Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 208.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement on ASEAN Energy Cooperation. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 57.
- Shi, Xunpeng and Lixia Yao. (2020). *Economic Integration in Southeast Asia: The Case of the ASEAN Power Grid*. Journal of Economic Integration Vol. 35, No. 1, March 2020.
- Shi, Xunpeng. 2014. ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline and ASEAN Economic Community: Vision, Plan and the Reality. Global Review.
- Syaifuddin Yana, Muhammad Nizar, Ardhana Yulisma. Prospek Utama Pengembangan Energi Terbarukan di Negara-Negara ASEAN. Serambi Engineering, Volume VI, No. 2, April 2021.
- Southeast Asia Infrastructure (2017). "ASEAN Power Grid," <https://southeastasiainfra.com/asean-power-grid/> (diunduh pada 7 Desember 2022).
- The Institute of Energy Economics. (2018). *IEEJ Outlook 2018 -Prospect and Challenges until 2050 energy, Environment, and Economy*.
- The ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN Statistical Yearbook 2021. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- US-ASEAN Business Council (2019). "ASEAN's Economy", <https://www.usasean.org/why-asean/asean-economy> (diunduh pada 6 Desember 2022).

IRMA GUSMAYANTI adalah Analis Perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait dengan pertanahan, perekonomian, pengembangan wilayah, dan penataan ruang. Ia merupakan alumni Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia. Irma merupakan Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Pada tahun 2011, ia menjadi Juara 2 Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia Bidang Sosial dan Humaniora yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional). Ia aktif menulis publikasi baik di jurnal maupun surat kabar. Ia dapat dihubungi di email: irma.gusmayanti99@gmail.com.

Demokrasi Siber dan Kedaulatan Siber di Asia Tenggara dalam Membangun Masyarakat Digital ASEAN 2025

Mansur Juned dan Nugraha Pratama

Pendahuluan

ASEAN Digital Masterplan 2025 yang disepakati pada Januari 2021 melalui Deklarasi Putrajaya telah menjadi batu pijakan pertama dalam membangun masyarakat digital ASEAN 2025 (ASEAN, 2021). Tentu banyak halangan serta permasalahan yang perlu dipikirkan dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Salah satunya adalah dengan menghadapi paradoks kebebasan informasi di dalam *cyberspace* yang pada satu sisi memberikan peluang yang demikian besar akan adanya pertukaran informasi yang lebih bebas tanpa sekat serta membuka ruang kolaborasi tanpa batas namun di sisi lain juga memberikan kerawanan dalam aspek sosial politik. Hal ini tampak jelas terlihat manakala Indonesia dihadapkan pada aksi hacktivismе Bjorka yang menimbulkan perdebatan pro kontra dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, salah satu isu penting terkait kebebasan informasi di era digital saat ini adalah wacana mengenai implementasi demokrasi siber yang bagi sebagian pihak merupakan langkah pertama dari demokrasi langsung masa depan (Kaczmarczyk, 2012; dan Hilber, 2007). Ungkapan tersebut tidaklah mengherankan mengingat bagaimana *cyberspace* telah memberikan ruang bagi setiap pihak yang terhubung dengannya untuk dapat berinteraksi dan berbagi informasi secara *real-time* dengan relatif tanpa sekat. Banyak pihak memiliki harapan yang tinggi terhadap hal ini meskipun beberapa lainnya justru pesimis terhadap risiko yang mungkin dihadapi.

Kebebasan informasi di dalam *cyberspace* tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan berbenturan dengan doktrin kedaulatan siber negara atas *cyberspace* sebagaimana yang dianut oleh banyak negara ASEAN (Juned, et al., 2022). Sebagaimana yang dipaparkan Xu (2020), kedaulatan siber berarti kewenangan negara untuk mengatur wilayah sibernya dengan tujuan apapun termasuk juga atas informasi yang masuk dari luar guna mencegah terjadinya berbagai ancaman mulai dari serangan siber atas data pengguna serta infrastruktur digital maupun juga ancaman dan stabilitas sosial politik. Hal ini kemudian membuat beberapa pihak memandang bahwa kedaulatan cyber sebagai salah satu penghalang dari kebebasan informasi dan pada akhirnya juga menjadi hambatan terwujudnya demokrasi siber.

Hal ini kemudian menjadi problematik dalam konteks Asia Tenggara mengingat kawasan ini memiliki nilai-nilai ketimuran yang kental yang mengutamakan kesopanan dan saling menghormati satu sama lain yang mempengaruhi nilai serta pandangan politik setempat sebagaimana yang dapat terlihat dalam berbagai nilai-nilai ASEAN seperti doktrin non-intervensi (Noorajavi, 2021). Di sisi lain, kawasan ini juga tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi dan pengaruh luar kawasan terutama dalam memandang demokrasi dan kebebasan di cybespace (Gerbaudo, 2017). Hal kemudian menjadi tantangan besar untuk mengkolaborasikan dua hal yang tampak dipertentangkan tersebut dalam membangun masyarakat digital ASEAN yang berbasis pada masyarakat karena itu berarti bahwa implementasinya tidak lagi bisa hanya terfokus pada pencapaian kompromistis.

Hal ini kemudian menarik perhatian kami untuk mencoba menelaah lebih dalam terkait hal tersebut. Kami melihat bahwa untuk mewujudkan potensi kawasan yang begitu besar melalui pemanfaatan teknologi digital, diperlukan juga sinergi untuk membangun masyarakat siber Asia Tenggara yang demokratis, bebas namun tetap bertanggung jawab, yang sejalan dengan nilai-nilai kawasan itu. Lebih jauh lagi, dalam rangka mencapai hal tersebut pembentukan pemahaman bersama terutama terkait bagaimana pandangan terhadap demokrasi siber, kedaulatan siber, serta hacktivismе.

Gambaran Umum Masyarakat Siber Asia Tenggara

Asia Tenggara sebagai kawasan yang memiliki hampir 700 juta penduduk dengan tingkat penetrasi internet sebesar 73% merupakan sebuah kawasan yang memiliki potensi tinggi dalam hal pemanfaatan teknologi digital (Worldometer, 2022; dan Ganbold, 2022). Berdasarkan data yang sama, kawasan ini juga memiliki 400 juta pengguna aktif yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun seiring penetrasi masif teknologi internet keseluruhan pelosok Asia Tenggara. Melihat kecenderungan ini ditambah dengan data pertumbuhan ekonomi digital kawasan yang meningkat pada tahun 2022 ini wajar kiranya bila kita berasumsi bahwa integrasi digital di kawasan ini merupakan sebuah keniscayaan.

Namun demikian, tantangan besar untuk meningkatkan kualitas integrasi digital di kawasan Asia Tenggara. Ganbold (2022) menyatakan bahwa kawasan ini masih memiliki tingkat jurang digital yang begitu besar antara mereka yang *digital native* dan *digital migrant*. Senada dengan hal itu, laporan Indeks Keadaban Global yang dirilis Microsoft pada 2021 menunjukkan bahwa perilaku berinteraksi di ruang maya dari para netizen Asia Tenggara masih rendah yang ditunjukkan dengan tingginya rasa ketidakamanan dalam berinternet di berbagai negara Asia Tenggara (Mazriefa, 2021). Hal ini kemudian membuat adanya tantangan untuk meningkatkan literasi digital baik dalam artian pemanfaatan teknologi digital maupun juga pemahaman informasi dan interaksi di *cyberspace*.

Dari Demokrasi Siber sampai Kedaulatan Siber

Paparan mengenai kondisi masyarakat siber Asia Tenggara saat ini kemudian juga memberikan menggambarkan trend yang sedang dan akan terjadi di kemudian hari. Tingkat penetrasi internet yang pesat ditambah dengan keaktifan masyarakat Asia Tenggara dalam berinteraksi secara digital membuat ruang diskusi secara digital menjadi tidak terhindarkan yang pada gilirannya akan melahirkan sebuah bentuk dari demokrasi siber. Di sisi lain, aspek kerawanan seperti rendahnya literasi digital dan juga rendahnya Indeks Keadaban Digital (DCI) membuat negara tidak bisa lepas tangan dalam mewujudkan kedaulatan digital negara masing-masing demi menjaga ketertiban secara domestik.

Menariknya dua hal ini seringkali dipertentangkan oleh berbagai pihak di mana pemaknaan kedaulatan siber seringkali dianggap akan memberangus kebebasan berpendapat dalam *cyberspace* sebagai fondasi dari demokrasi siber yang dibangun oleh masyarakat sipil secara digital. Penelitian intensif dari Gerbaudo (2012) menunjukkan bahwa awal dari aktivisme sipil secara digital dimulai dengan anggapan bahwa ruang maya menawarkan efektivitas dan juga kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan ruang fisik sebagai akibat rendahnya kontrol dari negara. Sehingga adalah sebuah keniscayaan bila muncul gerakan-gerakan perlawanan ketika negara berusaha mewujudkan kedaulatan siber mereka dengan menerapkan berbagai regulasi dalam domain domestik *cyberspace* mereka.

Dalam hal ini kami berpandangan bahwa kasus Asia Tenggara dalam upayanya membangun masyarakat digital ASEAN 2025 memiliki keunikan tersendiri. Selain karena adanya potensi yang besar serta kerawanan seperti yang telah dibahas, kawasan ini unik karena memiliki basis nilai budaya ketimuran yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat barat yang selama ini menjadi rujukan dalam membangun masyarakat sipil digital. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menyelaraskan antara budaya ketimuran yang dianut oleh negara-negara Asia Tenggara dengan pembangunan demokrasi siber yang berbasis pada kebebasan berpendapat.

Hacktivisme dan Keamanan Siber

Penyelarasan antara kebebasan berpendapat di ruang digital dan juga kedaulatan siber yang dimiliki oleh sebuah negara dalam konteks Asia Tenggara juga penting untuk mencegah dua kutub ekstrem yang mungkin terjadi sebagai aplikasi kebebasan berpendapat di ruang digital dan juga kedaulatan siber. Sebuah situasi yang dipandang oleh Juned et al. (2022) sebagai *cyberanarchy* asimetris masing-masing pihak akan menghalalkan segala cara dalam mencapai kepentingan mereka meskipun hal tersebut justru akan memberikan dampak buruk bagi semua pihak.

Gerbaudo (2021) menyatakan bahwa salah satu bentuk ekstrem dalam mewujudkan kebebasan berekspresi dalam *cyberspace* adalah dengan melakukan hacktivisme atau tindakan-tindakan peretasan baik terhadap data pemerintah maupun juga data personal masyarakat dengan kepentingan politik di belakangnya baik sebagai kritik maupun juga sebagai serangan. Tindakan ini seringkali dilakukan untuk menunjukkan lemahnya negara dalam mewujudkan

kedaulatan siber mereka sehingga memiliki dampak masif hingga ke ruang fisik. Sementara di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa negara akan mengeluarkan regulasi yang lebih represif ruang *cyber* dalam rangka menjaga keamanan siber negara tersebut terutama dari para hacktivist yang dipandang sebagai ancaman bagi keamanan siber negara tersebut. Dua hal ini tentunya kontra produktif dengan cita-cita pembangunan masyarakat digital ASEAN 2025.

Membangun Masyarakat Siber Asia Tenggara

Membangun masyarakat siber Asia Tenggara sebagaimana yang diharapkan dalam peta jalan masyarakat digital ASEAN 2025 memerlukan pemahaman mendalam terkait kondisi aktual masyarakat digital ASEAN saat ini baik dalam hal potensi dan kerawanan yang dimiliki. Hal ini penting untuk kemudian mewujudkan visi dan misi ADM 2025 ke dalam rencana kerja yang efektif dalam membangun masyarakat digital ASEAN yang terbuka dan demokratis namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketimuran bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sebuah peta jalan dalam mewujudkan masyarakat digital yang memadukan kebebasan yang bertanggung jawab yang dijamin oleh pemerintah sebagai wujud aplikasi kedaulatan siber yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil Asia Tenggara.*

Referensi

- ASEAN. 2021. ASEAN Digital Masterplan 2025.
- Amalia, H. A. (2022). *Ekonomi Digital Asia Tenggara Diprediksi Capai US\$ 200 M*. Melalui: <https://investor.id/international/311198/ekonomi-digital-asia-tenggara-diprediksi-capai-us-200-m> (30/12/22).
- Gambold, S. 2022. *Internet usage in Southeast Asia – statistics & facts*. https://www.statista.com/topics/9093/internet-usage-in-southeast-asia/#topicHeader__wrapper (03/05/22).
- Gerbaudo, P. (2017). "From cyber-autonomism to cyber-populism: An ideological history of digital activism". *TripleC*. 15. 478-491. 10.31269/vol15iss2pp477-489.
- _____. (2012). *Tweets and Streets. Social Media and Contemporary Activism*. London: Pluto Press
- _____. (2021). *The Great Recoil. Politics after Populism and Pandemic*. London: Verso
- Hilbert, M. (2007). *Digital Processes and Democratic Theory: Dynamics, Risks and Opportunities that Arise when Democratic Institutions Meet Digital Information and Communication Technologies*. Peer-reviewed online. Publication; <http://www.martinhilbert.net/democracy.html>
- Juned, M., Bainus, A., Saripudin, M. H., & Pratama, N. (2022). "The dynamics of the USA and China relations in the cyberspace: struggle for power in a global virtual world in building a global cyber regime". *In International Journal of Business and Globalisation* (Vol. 30, Issue ¾, p. 396). Inderscience Publishers. <https://doi.org/10.1504/ijbg.2022.123617>
- Kaczmarczyk, A. (2012). "Cyberdemocracy as a Future Product of Political Systems Engineering". *Frontiers in Science*. 1. 5-15. 10.5923/j.fs.20110101.02.
- Mazriefa, E. (2021). *Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara*. Melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html> (20/12/22).
- Noorajavi, R. (2021). The Implementation of Asian Value on the Democratic System of Southeast Asia. In *NEGRI: Academic Journal of Law and Governance* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). STAIN Curup. <https://doi.org/10.29240/negri.v1i1.2562>.
- Worldometer. 2022. South-eastern Asia Population Live. <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20South,of%20the%20total%20world%20population.> (06/12/22).
- Xu, W. (2020). "Challenges To Cyber Sovereignty And Response". 64. 79-89. 10.20542/0131-2227-2020-64-02-.

MANSUR JUNED adalah dosen tetap di Prodi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ia memiliki ketertarikan pada kajian dalam bidang geopolitik di Asia serta *cyberpolitics*.

NUGRAHA PRATAMA adalah dosen luar biasa di Prodi Bisnis Logistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran dan juga kandidat doktor Hubungan Internasional di Universitas yang sama. Ia berfokus pada ekonomi politik global serta *cyberpolitics*.

G20, Momentum Transformasi Digital

Aula Andika Fikrullah Al Balad

G20 Summit di Bali (2022) telah selesai dilihat. Sebagai tuan rumah, Indonesia patut berbangga, karena Indonesia dinilai sukses dalam menyelenggarakan kegiatan besar di tengah krisis ekonomi yang melanda beberapa negara akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina yang telah menciptakan ketidak stabilan dan resesi ekonomi, politik, dan energi di berbagai belahan dunia. Indonesia masih dapat membuktikan eksistensinya kepada dunia internasional. Karenanya, perkumpulan di Bali ini harapannya bisa menemukan gagasan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif minimal member G20 itu dan harapan lainnya agar agenda G20 juga mencakup pembahasan isu-isu politik, seperti keamanan dan perubahan iklim yang belum benar-benar terwujud.

Meski menelan dana sebesar Rp 674 miliar, sebagaimana dikutip dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, namun Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa gelaran G20 Indonesia akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7,4 triliun dan memperkirakan akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1.7 triliun. Selain itu, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) juga menyakini rangkaian acara juga akan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menyerap 33 ribu tenaga kerja (Kompas.com). Secara politik dan diplomasi internasional pun, Indonesia patut berbangga. Karena dari 20 kepala negara yang menjadi member dari kelompok 20 ini, hanya tiga kepala negara saja yang batal menghadirkan kepala negaranya dan hanya mengutus pejabat setingkat menteri untuk mewakilinya, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador atas berbagai alasan eksternal. Namun, 17 kepala negara sebagai member tetap dan 10 undangan untuk negara sahabat Indonesia ikut andil dan aktif dalam serangkaian perhelatan akbar di Pulau Dewata, Bali.

Sejarah pembentukan G20 diinisiasi awal oleh anggota G7, yakni tujuh negara maju dan kaya, yang terdiri dari Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Namun, kegagalan kelompok G7 dalam mengatasi krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan kekecewaan komunitas internasional pada saat itu sehingga muncul inisiatif untuk melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan maju lainnya yang memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi untuk diikutsertakan dalam perundingan sehingga memiliki pandangan yang jauh lebih luas.

Selanjutnya pada tahun 1999 dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para menteri keuangan dan gubernur Bank Central, dibentuklah G20 bertujuan sebagai forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Anggota G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75 % perdagangan global, dan 80 % dari PDB dunia. Forum ini juga bermaksud untuk mencari solusi atas krisis ekonomi global yang terjadi dari tahun 1997-1999. Sehingga, delapan tahun berselang, di tahun 2008 di Washington DC, Amerika Serikat, G20 Summit untuk pertama kalinya digelar dengan menghasilkan beberapa poin di antaranya, para pemimpin negara menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik setuju untuk saling berkoordinasi atas respon global terhadap krisis keuangan yang terjadi dan sepakat untuk membahas kebijakan pencapaian stabilitas keuangan internasional, menyatukan para pemimpin dunia di tengah tantangan ekonomi, politik dan kesehatan bersama.

Pada perhelatan G20 2022, penulis mencatat ada beberapa poin menarik yang perlu diulik lebih jelas. Beberapa *side events* G20, topik digitalisasi tampak menguat ke permukaan. Sebut saja, *G20 Education and Working Group (G20 EdWG)* yang mendiskusikan butir konkrit akan strategi dan kebijakan yang dapat menekan kebermanfaatn pendidikan untuk semua. Meeting ini setidaknya menghasilkan beberapa poin, yakni Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Teknologi Digital dalam Pendidikan.

Pada side event lainnya, yakni *The 4th G20 Digital Economy Working Group Meeting* atau DEWG, kembali peserta meeting menyetujui bahwa digitalisasi merupakan faktor utama untuk mendukung perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Di sini, pertemuan mencapai kata sepakat pada hal-hal substantif di tiga isu prioritas DEWG, yakni konektivitas digital pascapandemi Covid-19; kecakapan dan literasi digital; serta *data free flow with trust and crossborder data flow*, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers Digital Economy Minister Meeting di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali beberapa hari sebelum puncak KTT meeting dimulai. Pada poin pertama, para anggota G20 DEWG setuju bahwa diperlukannya penguatan konektivitas digital yang bersifat *people centered* atau berpusat pada manusia dan konektivitas ini juga perlu mencakup keamanan data digital. Kedua, kecakapan digital and literasi digital, anggota G20 DEWG menyebutkan bahwa kerangka untuk mengukur kemampuan keterampilan dan literasi digital diperlukan, yang nantinya akan berguna untuk melakukan standarisasi dalam pembuatan kebijakan publik yang objektif. Adapun yang terakhir, poin *data free flow with trust and crossborder data flow*, prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan dalam isu *data free flow with trust*.

Dari kedua *side events* di atas, kata transformasi digital tak dapat dipisahkan baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini juga telah menjadi bukti bahwa akan urgensi digitalisasi di berbagai sektor, tak kecuali pendidikan yang merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia yang menyumbang lebih dari 6% dari PDB yang bahkan pengeluaran global akan mencapai hampir dua kali lipat dalam lima tahun ke depan, yakni \$404 miliar pada tahun 2025, mutlak diperlukan. Maka, melakukan transformasi digital akan suatu keharusan demi kemakmuran dan sebagai salah satu strategi mengatasi segala tantangan di masa yang akan datang.

Digital transformasi di bidang pendidikan

Esensi transformasi digital pada dasarnya, yaitu mengedukasi dengan cara baru, mengembangkan layanan dan produk yang inovatif, menekan biaya, adopsi teknologi terbaru, dan meningkatkan efisiensi waktu. Transformasi digital dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan signifikan melalui kombinasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas, sebagaimana disebutkan oleh para ahli di berbagai literatur mereka.

Pandemi virus corona yang berdampak pada perekonomian di seluruh dunia juga telah menyadarkan industri pendidikan baik di negara maju maupun berkembang, bahwa tanpa perubahan arah dan integrasi teknologi di pendidikan dapat berisiko meningkatkan isolasi siswa, memperburuk ketidaksetaraan, mempersempit pengalaman belajar, dan memprivatisasi pendidikan, dan tentunya merusak tatanan dan statusnya sebagai barang publik yang harus dan bisa dinikmati oleh tiap insan manusia tanpa memandang status, agama, warna kulit dan jenis kelamin. Sehingga, dunia mengambil langkah tegas dengan menerapkan solusi teknologi sebagai jembatan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh. Online class menjadi hal yang lumrah sejak saat itu. Namun, perlu diingat oleh kita bersama bahwa transformasi digital dalam industri pendidikan tidak hanya terbatas pada dua hal pokok saja, sebagaimana selama ini yang dipahami oleh pelaku di industri pendidikan, guru maupun *stakeholder* lainnya, yakni pengajaran dan pembelajaran online.

Melainkan, transformasi digital dalam pendidikan yaitu membantu meningkatkan pengalaman belajar baik bagi siswa, guru dan orang lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan itu; orang tua, pengawas, dan kepala sekolah contohnya. Perubahan ini sejatinya menitik beratkan pada peningkatan keterlibatan dan aksesibilitas melalui proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menyesuaikan dengan perubahan tingkah laku peserta didik, dan lebih human atau *student centered*.

Peluang yang mungkin bisa diterapkan

Situasi dunia akhir-akhir ini telah membuka mata kita semua bahwa *technology-based* merupakan salah satu strategi yang *significant* dan dominan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk peserta didik. Ketersediaan perangkat lunak, termasuk smartphone, laptop, dan tablet telah memungkinkan untuk melaksanakan transformasi digital secara lebih terbuka.

Di dunia pendidikan, salah satu yang bisa diterapkan yakni transformasi pembelajaran dan pengajaran (*learning and teaching transformation*) dengan mengintegrasikan teknologi. Penulis, dalam hal ini menawarkan dengan merangkul

teknologi terbaru dan up-to-date yang perkembangannya terus diminati oleh dunia. *Augmented Reality and Virtual Reality (A/VR)*, sebut saja sebagai sebuah evolusi terbaru dalam sistem pembelajaran. Dengan A/VR, pelaku pendidikan dapat menciptakan lingkungan interaktif dan virtual untuk peserta didik. Teknologi ini dapat mengubah dan mempermudah proses penjelasan konsep kompleks dengan menggabungkan visual dan audio yang lebih interaktif. Sehingga, dua tipe kepribadian siswa, yakni audio and visual learners, dapat terakomodir melalui teknologi ini. VR dapat membawa siswa untuk virtual tour ke beberapa tempat dan merasakan bahwa mereka benar-benar berada di sana. Selain itu, dapat membantu guru juga dapat memberikan penjelasan praktis tentang konsep pendidikan dan siswa dapat memahaminya secara efektif.

Misalnya, salah satu aplikasi AR, Elemen 4D memungkinkan siswa untuk menggabungkan berbagai elemen untuk mempelajari kimia dalam aksi. Elements 4D adalah seperangkat balok kayu yang dirancang dengan baik yang dapat menjadi hidup menggunakan aplikasi 4D DAQRI. Setiap permukaan balok mewakili simbol kimia yang berbeda, yang menggambarkan unsur-unsur tabel periodik. Memancarkan jendela bidik aplikasi ke blok akan langsung mengubahnya menjadi representasi 4D dari elemen tersebut. Ini akan membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep kimia. Menerapkan A/VR juga akan mengurangi kebutuhan untuk menyentuh objek fisik yang digunakan untuk eksperimen. Sehingga menimalkan risiko yang muncul dan hemat dari segi biaya. Penggunaan A/VR tentu tidak hanya terbatas pada materi kimia atau sains semata, tentu di pelajaran agama, bahasa, dan lainnya pun juga dapat diterapkan. Karena teknologi ini sejatinya dapat diimplementasikan di berbagai kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelakunya.

Sebagai penutup, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa transformasi digital sejatinya pengetahuan tidak lagi berfokus peran satu orang semata. Melainkan kolaborasi antar siswa, guru, dan pelaku pendidikan lainnya dengan memanfaatkan teknologi sebagai salah satu alat yang mendukung pencapaian tujuan. Guru dalam hal ini harus mendukung siswa dalam perjalanannya. Alih-alih menyampaikan pengetahuan secara frontal dan berdiri menghadap siswanya, posisi guru kini berubah dengan berdiri di samping siswa dan menjadi partner belajar mereka. Selain itu, teknologi juga bukan lagi barang yang harus dijauhkan dari kehidupan siswa, melainkan teknologi sebagai *tools* yang digunakan untuk mendukung proses belajar dan mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan yang sebenarnya, yakni mencerdaskan segenap anak bangsa. Selain itu, sebagaimana komitmen yang disetujui bersama di forum G20 di Bali oleh para pemimpin dunia terkait transformasi digital, harapannya kita semua bisa menerapkan dan mengakrabkan diri dengan digitalisasi. *

AULA ANDIKA FIKRULLAH AL BALAD ada putra asal Aceh yang saat ini menjadi Penerima beasiswa S3 LPDP bidang Teaching, Learning, Policy and Technology dan merupakan alumni Lehigh University, Instructional Technology, Amerika Serikat.

Literasi Digital Sebagai Fondasi Masyarakat Digital ASEAN 2025

Nugraha Pratama dan Eriska Meiyanis

Pembuka

Penemuan teknologi internet yang kemudian menjadi infrastruktur bagi sebuah ruang maya bernama *cyberspace* telah memicu perubahan besar pada kehidupan manusia di seluruh penjuru bumi. Sebuah perubahan yang tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi dan juga industri sebagaimana yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, namun juga secara masif aspek-aspek lainnya dari kehidupan umat manusia, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan sampai dengan budaya melalui perubahan cara interaksi tanpa sekat ruang dan waktu, bahkan sekat-sekat yuridis formal antar negara. Berbagai perubahan tersebut telah memunculkan banyak peluang yang juga ditemani banyak ancaman. Maka dari itu, diperlukan pemahaman bersama dan juga kooperasi berbagai pihak agar hal tersebut dapat membawa kebaikan bagi semua apalagi pandemi Covid-19 juga telah mempercepat terjadinya revolusi digital tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, pada tahun 2021 lalu, sebuah peta jalan masyarakat digital ASEAN telah disepakati dengan disetujuinya deklarasi Putrajaya Januari 2021 (ASEAN, 2021). Deklarasi menyepakati Masterplan Masyarakat Digital ASEAN 2025 sebagai panduan bagi negara-negara ASEAN dalam mewujudkan mimpi membangun masyarakat ASEAN yang terintegrasi secara digital pada tahun 2025. Dengan bertumpu pada 8 tujuan yang mencakup pemulihan pasca pandemi Covid-19, pemerataan akses internet, pembangunan pondasi ekonomi digital, dan pembangunan masyarakat ASEAN yang terintegrasi secara digital, diharapkan pada tahun 2025 nanti ASEAN dapat berkembang menjadi bukan hanya siap terhadap revolusi digital melainkan juga telah secara aktif memanfaatkannya demi kemajuan bersama (ASEAN, 2021).

Melihat kondisi ASEAN saat ini, terdapat harapan bahwa kita akan mampu mencapai hal tersebut meskipun secara realistis, masih banyak hal lain yang perlu juga dipersiapkan. Terlepas dari fakta bahwa potensi digital Asia Tenggara sangat lah besar dengan lebih dari 683 juta populasi, 73 persen penetrasi internet, dan lebih dari 400 juta penduduk terkoneksi internet masih banyak hal yang perlu diperbaiki guna menjadikan potensi yang sedemikian besar tersebut menjadi aset penting kemajuan kawasan di era digital (Worldometer, 2022; dan Ganbold, 2022). Berbagai masalah seperti disparitas ekonomi yang berdampak pemerataan akses internet, literasi digital, keamanan siber, sampai dengan identitas bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam gerusan arus globalisasi digital merupakan sedikit hal yang perlu dipikirkan solusinya.

Artikel ini kemudian berfokus pada aspek literasi digital masyarakat Asia Tenggara guna mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam ADM 2025. Terdapat beberapa alasan mengapa literasi digital menjadi begitu penting dalam menentukan sukses tidaknya ADM 2025. Pertama, berbagai faktor penghambat yang masih kita hadapi saat ini pada akhirnya akan bermuara pada tingkat literasi digital yang rendah sehingga kita tidak bisa memanfaatkan seutuhnya peluang dalam *cyberspace*. Kedua, bahkan di masyarakat dengan akses internet yang lebih baik serta lebih merata, literasi digital masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam berinteraksi di dalam *cyberspace* (Sirlin et al. 2021; dan Taskin dan Ok, 2022). Ketiga, tingkat literasi digital yang rendah pada akhirnya juga akan memberikan ancaman terhadap integrasi dan juga identitas Asia Tenggara.

Memahami permasalahan literasi digital dalam implementasi ADM 2025 tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan terkait lainnya sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam dokumen ADM 2025. Maka dari itu, artikel ini kemudian akan juga membahas hal tersebut untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kompleksitas isu yang tengah dan akan kita hadapi sebagai Masyarakat Digital ASEAN 2025. Demikian pula dengan aktor yang terlibat

di dalamnya, permasalahan ini bukan hanya perlu diselesaikan dalam tingkatan pemerintah negara-negara ASEAN, melainkan juga memerlukan peran kita sebagai masyarakat sipil.

Memahami Literasi Digital

Literasi digital merupakan sebuah konsep yang terbilang unik dan kompleks. Sirlin et. al. (2021) memandang bahwa setidaknya terdapat dua pandangan berbeda terkait literasi digital, pandangan pertama menekankan pada kemampuan dalam memanfaatkan berbagai teknologi digital dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi secara digital sementara pandangan kedua lebih menekankan pada pemahaman informasi yang luas beredar dalam *cyberspace*. Dari dua pandangan tersebut kemudian berkembanglah berbagai indikator guna mengukur tingkat literasi digital individu maupun masyarakat seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pekerjaan dan pendidikan, pemanfaatan media sosial, kemampuan untuk memfilter informasi dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut atau bahkan pengertian dari literasi digital diyakini akan terus berkembang seiring masifnya arus penggunaan IoT.

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Asia Tenggara dan juga kawasan lain dalam peningkatan literasi digital dalam pemanfaatan teknologi digital adalah terdapatnya *digital gap* antara mereka yang tergolong sebagai *digital native* dan mereka yang tergolong sebagai *digital migrant* (Ganbold, 2022). Ketimpangan ini memicu poliarasi dalam memandang teknologi digital antara mereka yang pro pada penggunaan teknologi digital dan mereka yang kontra sebagaimana yang kita alami bersama pada new-normal pandemi covid-19. Ketimpangan digital ini memicu ketidakefektifan dalam penyebaran dan pengolahan informasi yang pada akhirnya akan berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan target dalam ADM 2025 maupun target sejenis di kawasan lain. Penyebab terjadinya ketimpangan digital bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan akses internet, pandangan negatif terhadap internet dan cyberspace, perbedaan generasi dan lain sebagainya.

Sementara itu, pemahaman literasi digital dalam artian kemampuan untuk memfilter kevalidan informasi menjadi tantangan besar selanjutnya yang saat ini terjadi dan akan terus terjadi bahkan ketika permasalahan literasi digital pertama telah terselesaikan. Kebebasan di ruang Maya atau cyberspace memang merupakan sesuatu yang perlu dijamin keberadaannya, namun tentu saja hal tersebut dibarengi juga kewajiban setiap individu untuk dapat berinteraksi secara bertanggung jawab.

Penelitian Sirlin et al. (2021) dan juga penelitian pribadi penulis bahwa permasalahan ketidakmampuan menyaring informasi yang valid dan memaknainya secara bijak--yang termanifestasi dengan mudahnya seseorang mempercayai *hoax* dan *spam* atau bahkan menyebarkannya--masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, terlepas dari tingkat penetrasi internetnya seperti yang dapat kita lihat dari fenomena buzzer menjelang pemilu maupun disinformasi pada masa pandemi. Dampak dari hal ini tidak hanya akan dirasakan secara ekonomi digital sebagai rujukan utama dalam pembentukan ADM 2025, namun juga akan berdampak luas terhadap politik keamanan dan kultural dari masyarakat Asia Tenggara itu baik secara digital maupun secara fisik.

Maka dari itu penting kiranya untuk mempertimbangkan aspek literasi digital dalam menjalankan master plan masyarakat digital ASEAN 2025. Literasi digital akan membuat pembangunan infrastruktur internet secara fisik akan memberikan dampak positif yang lebih besar dengan dibarengi peningkatan *skill* dari masyarakat ASEAN itu dalam memanfaatkan media digital tersebut. Sementara peningkatan literasi digital dalam hal penyaringan dan pemaknaan informasi akan menjaga proses integrasi kultural di akar rumput tetap berjalan baik serta juga menjaga identitas bangsa-bangsa ASEAN dari pengaruh luar yang belum tentu cocok dengan kepribadian dan nilai-nilai ASEAN. Literasi digital dalam pemahaman kemampuan untuk menyaring informasi dan memahaminya dengan baik juga kemudian akan membentuk kedewasaan berinteraksi di ruang maya sehingga dapat mencegah pembulian siber, sikap tidak menghargai pendapat yang berbeda di media sosial, dan berbagai tindakan merugikan lainnya.

Sebaliknya, bila aspek integrasi digital Asia tenggara lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur digital guna meningkatkan penetrasi internet saja tanpa memperhatikan aspek literasi digital, maka ini akan memperbesar risiko ancaman di kemudian hari bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Secara ekonomi potensi ekonomi digital kawasan Asia tenggara yang sebenarnya sangat besar menjadi tidak dapat dimaksimalkan dengan baik baik dalam pemasaran produk maupun juga sumber daya manusianya. Sementara dari sisi keamanan siber, rendahnya tingkat literasi digital akan membuat masyarakat Asia tenggara menjadi korban potensial dari kejahatan siber. Dari sisi politik, rendahnya literasi

digital sebagaimana yang telah terjadi di berbagai kawasan lain juga akan membuat masyarakat yang terpolarisasi sehingga mimpi integrasi akan menjadi semakin jauh. Sementara dari aspek sosio-kultural, integrasi sosial kultural pun akan sulit untuk dicapai dengan literasi digital yang rendah akibat kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk dapat mengetahui dan memahami satu sama lain serta dapat membuat masyarakat Asia Tenggara menjadi masyarakat yang saling membenci satu sama lain akibat maraknya disinformasi.

Mengatasi Hambatan Literasi Digital Asia Tenggara

Mengatasi hambatan literasi digital di Asia Tenggara memerlukan cara pandangan multi-sektoral dan juga tidak terbatas pada peran pemerintah saja. Literasi digital terkait erat dengan akses terhadap teknologi digital yang saat ini belum merata di Asia Tenggara. Selain itu, penguatan literasi digital juga memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan keamanan siber di mana literasi digital akan menguatkan keamanan siber sementara regulasi terkait keamanan siber akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital mereka. Terakhir, literasi digital juga memerlukan forum yang mewadahi pertukaran pikiran guna memfasilitasi transfer pengetahuan dan juga berbagi pandangan serta pengalaman diantara masyarakat Asia Tenggara. Jadi 3 poin ini kemudian kami jabarkan lebih jauh melalui pemaparan di bawah.

Mengatasi Disparitas Ekonomi

Salah satu masalah utama yang dihadapi baik secara domestik oleh negara-negara di Asia Tenggara maupun juga sebagai kawasan secara umum adalah disparitas ekonomi terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan perkotaan (Setiawan et al. 2022 dan Ganbold, 2022). Studi lanjutan dari Setiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi antara tingkat ekonomi dan juga penetrasi internet di mana masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk memiliki akses internet yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Menariknya, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di era digital kontemporer adalah dengan melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut. Tentu akan sulit mengharapkan bila masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah kemudian melakukan inisiatif agar lebih terkoneksi secara digital sementara baik infrastruktur internet maupun juga daya beli terhadap perangkat yang memadai masih terbatas.

Dalam hal ini, sesuai dengan masterplan ADM 2025 kolaborasi antara pemerintah dan juga korporasi amat dibutuhkan baik dalam lingkup domestik maupun juga regional. Secara domestik dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menarik minat korporasi bersumbangsih dalam membangun infrastruktur digital di pelosok berbagai negara ASEAN dengan juga menelurkan kebijakan untuk dapat meningkatkan minat dan daya beli masyarakat dalam memiliki dan memanfaatkan berbagai perangkat digital dengan tujuan produktif.

Skema ini akan memberikan keuntungan baik kepada masyarakat, pemerintah, maupun korporasi. Bagi masyarakat hal ini membuka akses mereka terhadap jaringan internet yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sementara bagi pemerintah skema ini juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi anggaran belanja nasional dengan tetap menjalankan amanah dari ADM 2025. Sementara bagi korporasi, skema ini membuka peluang pasar yang lebih besar baik bagi korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur digital, perangkat digital, maupun juga aplikasi perangkat lunak.

Keamanan Siber dan Pola Pandang Kedaulatan

Keamanan *cyber* dan literasi digital juga memiliki hubungan yang sangat erat. Solikhah (2022) dan Rocha-Estrada (2022) memandang bahwa keamanan siber tidak melulu menjadi tanggung jawab dari pemangku kebijakan namun juga memerlukan literasi digital yang baik dari masyarakat untuk mengurangi risiko mereka menjadi korban dari kejahatan siber. Literasi siber yang baik akan membuat masyarakat lebih hirau akan pentingnya keamanan siber dan juga berberbagai ancaman yang mungkin mengintai mereka saat berinteraksi di ruang maya tersebut. Sebagai ilustrasi seseorang dengan literasi siber yang baik akan lebih waspada manakala mendapatkan link mencurigakan dengan imbalan yang menggiurkan atau akan sangat berhati-hati dalam membagikan data pribadinya kepada pihak ketiga.

Literasi digital yang baik juga akan membangun opini publik yang konstruktif pula bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan terkait keamanan siber. Hal secara ideal akan menghasilkan kebijakan keamanan siber yang komprehensif karena berbasis pada pengalaman masyarakat sebagai subjek keamanan. Tentu saja dalam hal ini kepekaan pemerintah pun diperlukan untuk mau mendengarkan aspirasi dari kaum akar rumput. Kolaborasi ini baik di tingkat nasional maupun regional kemudian akan menciptakan lingkungan yang relatif lebih aman dari ancaman kejahatan digital. Tentu saja kerangka kerja sama dalam bidang keamanan siber di tingkat regional pun perlu ditingkatkan baik yang diwadahi ASEAN maupun yang dilakukan secara bilateral.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membangun kerangka kebijakan keamanan siber adalah menentukan cara pandang terhadap kedaulatan negara di ruang siber. Secara umum terdapat dua pandangan yang berbeda terkait kedaulatan negara di ruang siber, pandangan pertama memandang bahwa negara memiliki kedaulatan di ruang virtual tersebut, sementara pandangan lainnya memandang bahwa *cyberspace* harus bebas dari pengaruh negara dan kebebasan dalam opini perlu dijamin sebebaskan-bebasnya. Keputusan apapun yang nanti akan diambil tentu saja perlu memperhatikan identitas kultural dan juga cara pandang masing-masing negara ASEAN terhadap ruang siber karena ini akan menentukan arah kebijakan keamanan *cyber* apakah berbasis kedaulatan negara di ruang virtual tersebut atau justru untuk menjamin kebebasan yang sebebaskan-bebasnya.

Meningkatkan Literasi Digital dan menguatkan Identitas Bangsa Asia Tenggara

Bagian terakhir namun tidak kalah penting dalam meningkatkan literasi digital di Asia Tenggara adalah pentingnya forum yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat sipil ASEAN untuk dapat berinteraksi dan menguatkan satu sama lain dalam rangka membangun aksi nyata yang berdampak kepada masyarakat luas. Berbagai komunitas virtual dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan seperti ASEAN Writers Network sampai dengan esport dirasakan penting untuk dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi dan pengetahuan serta juga meningkatkan integrasi di lingkup akar rumput bangsa-bangsa Asia Tenggara. Melalui forum-forum dan berbagai komunitas tersebut literasi digital dapat dipupuk berbarengan dengan mewujudkan visi dari ADM 2025 untuk menciptakan komunitas digital Asia Tenggara yang inklusif.

Penutup

Deklarasi Putrajaya 2021 yang menandai juga berlakunya ADM 2025 memerlukan peran aktif Dari berbagai pihak agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Salah satu aspek penting dalam ADM 2025 tersebut adalah diperlukannya literasi digital yang baik di kalangan masyarakat ASEAN agar pembangunan infrastruktur digital dan juga upaya pemerataan akses internet dapat berdampak positif sebagaimana yang diharapkan dalam master plan tersebut. Membangun dan menguatkan literasi digital di Asia Tenggara tidak dapat dilakukan secara parsial namun perlu dipandang sebagai suatu hal yang terkait erat dengan faktor-faktor lainnya serta membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah negara-negara ASEAN, dan juga pihak swasta. Terdapat tiga aspek utama yang kami soroti dalam artikel ini: pengentasan disparitas ekonomi untuk menyokong penetrasi internet yang lebih baik dan merata; rezim keamanan siber, serta forum pertukaran informasi bagi masyarakat ASEAN.*

Referensi

- ASEAN. 2021. Putrajaya Declaration.
- ASEAN. 2021. ASEAN Digital Masterplan 2025.
- Gambold, S. 2022. Internet usage in Southeast Asia – statistics & facts. https://www.statista.com/topics/9093/internet-usage-in-southeast-asia/#topicHeader__wrapper (03/05/22).
- Rocha Estrada, F. J., George-Reyes, C. E., & Glasserman-Morales, L. D. (2022). Security as an emerging dimension of Digital Literacy for education: a systematic literature review. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 18(2), 22-33. Retrieved from https://www.jelks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1135440 (06/12/22).
- Setiawan, I., Pape, U., dan Beschoner, N. (2022). How to bridge the gap in Indonesia's inequality in internet access. <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-bridge-gap-indonesias-inequality-internet-access> (05/12/22)

- Sirlin, N., Epstein, Z., Arechar, A. A., & Rand, D. G. (2021). Digital literacy is associated with more discerning accuracy judgments but not sharing intentions. Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-83>.
- Solikhah, F. (2022). The Role of Digital Literacy in Raising Cybersecurity Awareness. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/19/the-role-of-digital-literacy-in-raising-cybersecurity-awareness/> (05/12/22).
- Taskin, B.; Ok, C. (2022) Impact of Digital Literacy and Problematic *Smartphone* Use on Life Satisfaction: Comparing Pre- and Post-COVID-19 Pandemic. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2022, 12, 1311–1322. <https://doi.org/10.3390/ejihpe1209009>.
- Worldometer. 2022. South-eastern Asia Population Live. <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20South,of%20the%20total%20world%20population.> (06/12/22).

NUGRAHA PRATAMA bekerja sebagai dosen luar biasa di Prodi D IV Bisnis Logistik FISIP UNPAD dan aktif sebagai mahasiswa Pascasarjana S3 Hubungan Internasional di FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan bidang kajian terkait *cyberpolitics*.

ERISKA MEIYANIS adalah seorang ilustrator buku anak dan juga pegiat literasi usia dini. Ia merupakan alumni Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Program Pascasarjana strata 2 FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

Digitalisasi ASEAN: Transformasi Menjelang Paradigma Hiper-realitas

Marlon S.C. Kansil

Digitalisasi telah menjadi salah satu tren paling mendalam dalam perkembangan global dewasa ini, mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Di tengah transformasi ini, negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN tidak tinggal diam. Mereka telah aktif mendorong digitalisasi untuk memperkuat ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan hubungan antarnegara. Esei ini akan membahas peran digitalisasi dalam ASEAN, tantangan yang dihadapi, dan dampak positifnya.

Digitalisasi ASEAN mengacu pada upaya mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat. Hal ini termasuk perkembangan infrastruktur internet, investasi dalam teknologi, pengembangan startup teknologi, dan pendidikan digital. Transformasi ini diarahkan pada penciptaan *ASEAN Digital Community*, yang akan meningkatkan konektivitas regional dan kompetitivitas global.

Salah satu dampak positif yang paling nyata dari digitalisasi adalah pertumbuhan ekonomi. ASEAN telah menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan teknologi besar, dan sektor e-commerce telah berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan seperti Grab, Lazada, dan Shopee mengubah cara orang berbelanja dan bertransaksi. Selain itu, digitalisasi telah memungkinkan pertumbuhan bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform e-commerce dan akses ke pasar global.

Tidak hanya di sektor ekonomi, digitalisasi juga telah mempercepat akses pendidikan dan layanan kesehatan. Lebih banyak orang di wilayah ini dapat mengakses pendidikan jarak jauh, konsultasi medis online, dan sumber daya pendidikan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan penting. Namun, digitalisasi ASEAN juga dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Pertama, terdapat perbedaan dalam tingkat adopsi teknologi di antara negara-negara ASEAN. Negara seperti Singapura dan Malaysia jauh lebih maju dalam hal digitalisasi daripada negara-negara seperti Laos dan Kamboja. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan regional yang perlu diatasi.

Kedua, masalah keamanan siber menjadi semakin relevan. Dengan ketergantungan yang meningkat pada teknologi digital, muncul ancaman baru seperti serangan siber dan pelanggaran data. ASEAN perlu bekerja sama untuk memperkuat pertahanan siber dan kerjasama lintas batas dalam hal penegakan hukum digital.

Ketiga, isu privasi dan etika juga perlu diperhatikan. Dalam upaya memanfaatkan data pengguna, perusahaan teknologi sering kali menghadapi kekhawatiran mengenai privasi dan penggunaan data yang adil. Regulasi yang baik dan peraturan perlindungan data perlu dikembangkan untuk melindungi konsumen.

Digitalisasi ASEAN adalah upaya yang menarik dan penting untuk menghadapi era baru dalam ekonomi dan teknologi. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memaksimalkan potensinya, ASEAN dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjadikan wilayah ini sebagai pemimpin dalam inovasi digital. Hal ini akan memberikan manfaat bagi jutaan orang di seluruh ASEAN, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan perkembangan berkelanjutan.

Regionalisme

Digitalisasi ASEAN memiliki kaitan erat dengan konsep regionalisasi, terutama dalam konteks integrasi ekonomi dan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Digitalisasi memungkinkan pertumbuhan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan di ASEAN dapat lebih mudah mencapai pelanggan di negara-negara tetangga

melalui platform e-commerce dan aplikasi. Ini mendukung tujuan integrasi ekonomi dan pembentukan pasar tunggal ASEAN.

Regionalisasi ekonomi ASEAN telah diperkuat melalui perjanjian-perjanjian seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA). Digitalisasi memfasilitasi perdagangan elektronik lintas batas, yang mendukung tujuan perdagangan bebas dan kerja sama regional. Kerjasama regional dalam hal keamanan siber menjadi semakin penting. Digitalisasi telah menciptakan ancaman baru dalam bentuk serangan siber. Negara-negara ASEAN perlu bekerja sama untuk melindungi infrastruktur kritis dan data penting.

Ada upaya untuk membentuk *ASEAN Digital Community* yang akan memperkuat konektivitas regional dan komitmen bersama dalam mempromosikan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi regional. Pengembangan Infrastruktur Digital Bersama: Negara-negara ASEAN dapat bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur digital seperti kabel bawah laut dan jaringan 5G yang merata di seluruh wilayah. Ini mendukung konektivitas regional. Digitalisasi ASEAN juga mencakup kerja sama dengan mitra internasional. Kerja sama dengan negara-negara di luar wilayah ASEAN dapat memperkuat peran ASEAN dalam skenario regionalisasi global.

Melalui digitalisasi, ASEAN memiliki peluang untuk memperkuat integrasi regional, memperluas pasar, dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara. Digitalisasi dapat menjadi pendorong utama regionalisasi yang lebih mendalam di kawasan ini.

Digitalisasi memperkuat integrasi ekonomi Asia Tenggara

Digitalisasi memungkinkan perusahaan di ASEAN untuk mencapai pasar yang lebih luas. Dengan platform e-commerce dan aplikasi, bisnis dapat menjual produk mereka di seluruh kawasan, menciptakan pasar yang lebih besar dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Ini berkontribusi pada tujuan integrasi ekonomi. Pertumbuhan perdagangan elektronik adalah bagian integral dari digitalisasi. Regionalisasi perdagangan elektronik telah diperkuat oleh perkembangan ini. Perjanjian-perjanjian perdagangan ASEAN, seperti AFTA, dapat diperkuat dengan lebih mempertimbangkan perdagangan elektronik.

Digitalisasi juga menciptakan peluang untuk meningkatkan konektivitas regional. Investasi dalam infrastruktur digital bersama, seperti jaringan internet cepat dan kabel bawah laut, memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar antarnegara, mendukung kerja sama ekonomi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ancaman keamanan siber adalah isu global yang memerlukan kerja sama internasional. Negara-negara ASEAN perlu bekerja sama dalam menghadapi serangan siber. Ini menciptakan kerja sama regional dalam konteks keamanan yang berkaitan dengan regionalisasi.

Konsep *ASEAN Digital Community* mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan digitalisasi di wilayah ASEAN. Pembentukan komunitas semacam ini adalah langkah signifikan dalam mempromosikan digitalisasi di tingkat regional. Digitalisasi memungkinkan ASEAN untuk menjadi pemain yang lebih kuat dalam regionalisasi global. Dengan akses yang lebih besar ke teknologi dan sumber daya digital, ASEAN dapat memperluas kerja sama dengan mitra internasional di luar wilayah.

Meskipun digitalisasi memberikan peluang regionalisasi yang signifikan, kesenjangan dalam regulasi digital di negara-negara ASEAN adalah tantangan. Harmonisasi peraturan, khususnya dalam hal perdagangan elektronik dan perlindungan data, perlu menjadi fokus. Dengan memanfaatkan potensi digitalisasi, ASEAN dapat memperkuat integrasi regional, membantu pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih erat di Asia Tenggara. Pengembangan infrastruktur digital bersama dan upaya bersama dalam menghadapi tantangan digital adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan potensi ini.

Pro dan Kontra

Pro Digitalisasi ASEAN	Kontra Digitalisasi ASEAN
Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat: Digitalisasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, mendukung peluang usaha dan pekerjaan baru.	Kesenjangan Digital: Kesulitan akses dan adopsi teknologi yang tidak merata antara negara-negara dalam kawasan menciptakan ketidaksetaraan.
Integrasi Ekonomi: Digitalisasi mendukung integrasi ekonomi di ASEAN, memungkinkan perluasan perdagangan intra-ASEAN.	Keamanan Siber: Ancaman serangan siber semakin kompleks, dan negara-negara di wilayah ini perlu meningkatkan pertahanan siber.
Akses Pendidikan Jarak Jauh: Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan jarak jauh, mengurangi kesenjangan pendidikan.	Regulasi yang Beragam: Peraturan dan regulasi digital yang bervariasi antar negara-negara dapat menciptakan hambatan perdagangan.
Efisiensi Layanan Kesehatan: Telemedicine dan layanan kesehatan jarak jauh meningkatkan akses ke perawatan kesehatan.	Privasi dan Etika: Penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi dapat menimbulkan masalah privasi dan etika.
Peningkatan Konektivitas: Infrastruktur digital bersama dapat meningkatkan konektivitas regional.	Kekurangan Keahlian Digital: Kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi adalah tantangan.
Peluang Startup Teknologi: Digitalisasi mendukung ekosistem startup teknologi yang berkembang pesat.	Ketergantungan terhadap Mitra Teknologi Asing: Negara-negara ASEAN perlu mengelola ketergantungan terhadap perusahaan teknologi asing.
Keamanan Bersama: Kerja sama regional dalam penanggulangan ancaman siber mendukung keamanan bersama.	Kerentanan terhadap Serangan Siber Asing: Negara-negara di ASEAN dapat menjadi target serangan siber negara asing.
Partisipasi Masyarakat: Digitalisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial.	Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Isu pelanggaran hak cipta dan pemalsuan barang-barang fisik dan digital masih relevan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, digitalisasi ASEAN adalah fenomena yang mendalam yang memiliki dampak signifikan pada wilayah Asia Tenggara. Digitalisasi telah membuka peluang pertumbuhan ekonomi, integrasi regional, dan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan, termasuk ketidaksetaraan digital, keamanan siber, regulasi yang beragam, dan masalah privasi.

ASEAN memiliki potensi besar untuk memanfaatkan digitalisasi sebagai alat untuk mempromosikan perkembangan berkelanjutan dan integrasi regional. Upaya bersama antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan infrastruktur digital bersama, harmonisasi peraturan, dan peningkatan keamanan siber akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Dengan pendekatan yang bijak dan kerja sama yang kuat, digitalisasi ASEAN memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat posisi wilayah ini dalam era digital global. Hal ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh kawasan dan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi ASEAN dalam era teknologi yang terus berkembang.*

MARLON S.C. KANSIL adalah Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) SKSG UI yang saat ini sementara studi S3 di Fakultas Ilmu Budaya FIB UI. Sejak 2018-sekarang ia aktif sebagai advisor di WIR Group terkait metaverse dan sejak 2017-20121 ia aktif sebagai peneliti Center for Police and Terrorism Studies UI. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Universitas Samratulangi dan master di Kajian Stratejik Intelijen UI.

BAB 8

A Journey to Wonderful Destinations: Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk ASEAN

Strategi Marketing Brand di ASEAN Pasca Pandemi Covid-19

Ismawan Amir

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi awal 2020 telah mengubah tatanan kehidupan dunia dan dinamika bisnis pasar global, termasuk kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang terkena dampak. Untuk brand yang berada di ASEAN, tantangan yang mereka hadapi cukup beragam. Kebijakan politik, ekonomi, dan hubungan internasional pemerintah berpengaruh pada perubahan ekosistem pasar. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam belanja barang dan memilih brand yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dampak dari perubahan perilaku tersebut mengakibatkan perusahaan menghadapi situasi yang tidak menentu.

Survei yang dilakukan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) bekerjasama dengan Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia (AmCham) menemukan bahwa sebanyak 75 persen perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada produksi, pendapatan, atau penjualannya. Anjloknya kinerja itu seiring dengan turunnya permintaan dan rantai pasok yang terganggu akibat pembatasan wilayah (Kompas, 2020). Sama halnya di Filipina, Mengutip *Republika*, berdasarkan survei yang dirilis oleh Bank Dunia dan lembaga lokal, di Filipina, negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara, hampir setengah bisnis yang ditutup tidak yakin kapan dapat kembali beroperasi. Dampak panjang dari aturan pembatasan seperti *lockdown* (karantina wilayah) telah menghancurkan banyak orang.

Wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global memberikan dampak yang nyata terhadap perkembangan bisnis di kawasan ASEAN. Tidak hanya pada bisnis pariwisata, manufaktur, dan retail. Sektor jasa lainnya juga mengalami gangguan disrupsi rantai pasokan dan defisit keuangan. Kondisi tersebut membuat *brand* harus mengubah dan beradaptasi terhadap situasi yang tak menentu tersebut demi kelangsungan dan perkembangan *brand*. Mereka harus berpikir dan menyusun ulang strategi marketing untuk menjangkau konsumen yang pola konsumsinya telah berubah. Strategi tersebut tentu sangat diperlukan untuk keberlangsungan masa depan *brand*.

Mereka perlu memikirkan strategi yang diperlukan untuk beradaptasi antara lain (1) Bagaimana merancang dan mengembangkan *brand* yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan di masa *new normal*, (2) Bagaimana mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen yang mengalami pergeseran konsumsi dan beradaptasi dengan pasar (3) Bagaimana membuat strategi komunikasi yang tepat agar *brand* diterima dengan baik oleh konsumen, (4) Bagaimana menemukan dukungan eksternal agar *brand* tetap bertahan lama di masyarakat (L. Zhao and K. Kim, 2021).

World Health Organization (WHO) sejauh ini belum memberikan kepastian kapan pandemi Covid-19 berakhir. Mengutip CNBN, Komite Darurat WHO untuk Covid-19 telah bertemu dalam rangka memutuskan Covid-19 tetap menjadi Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC). Pada pertemuan itu, kasus Covid-19 secara global telah meningkat sebanyak 30% dalam dua minggu terakhir. Sebagian besar akibat sub-varian Omicron BA.4 dan BA.5 serta pencabutan kebijakan kesehatan masyarakat dan langkah sosial (CNBC, 2022). Wabah itu akan terus aktif jika negara tidak efektif mengelola virusnya secara tepat dan secara pasti akan berdampak pada perubahan model bisnis di era *new normal*.

Di ASEAN, sejumlah brand yang terkenal mengalami krisis karena kehilangan sumber pendapatan. Seperti Maskapai Air Asia, operasional pesawat sempat tidak menentu karena kehilangan sumber pendapatan. Mereka juga merumahkan dan melakukan pemotongan gaji karyawan hingga 50 % demi mempertahankan kelangsungan perusahaan. Air Asia kemudian mengembangkan bisnis di luar penerbangan untuk bisa beradaptasi di era *new normal*. Sama halnya dengan

Pioneerindo Gourmet International yang menjadi induk California Fried Chicken harus menutup 161 gerai karena tak mampu membayar biaya operasional. Begitu pula dengan KFC yang menutup 100 gerai karena imbas Covid-19. Hal sama juga terjadi pada toko ritel di Indonesia yang menutup sebagian gerainya selama Covid-19, antara lain Giant, Matahari, Gramedia. Sementara itu di Thailand, maskapai Thai Airways dinyatakan bangkrut karena tak mampu hadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan harus mampu memprediksi trend pasar di masa depan dan menyadari pentingnya melewati situasi pasar global yang tidak menentu dengan strategi komunikasi pemasaran yang tepat seperti Integrated Marketing Communication (IMC). IMC merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memiliki nilai lebih dari evaluasi peran strategis dalam berbagai disiplin komunikasi seperti periklanan umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan Hubungan Masyarakat. IMC memiliki beberapa konsep pemasaran yaitu: a). Pemasaran langsung; b). Promosi penjualan; c). Hubungan Masyarakat; d). Penjualan pribadi; e). Iklan; f). Pemasaran dari mulut ke mulut (Firmansyah, 2020).

Problem Marketing Communication

Selama masa pandemi Covid-19, departemen pemasaran berfikir keras untuk menghadapi tantangan keluar dari krisis. Mereka harus menciptakan strategi pemasaran yang memadai, inovatif, dan anggaran yang terbatas. Selain itu, harus menyiapkan rencana baru untuk memasuki era *new normal*. Brand akan berurusan dengan perilaku konsumen yang baru dan menghadapi persaingan yang ketat dengan *market* kategori yang sama. Hal ini akan menjadi penting karena selama Covid-19, terjadi penurunan pendapatan dan banyak toko yang tutup. Selama periode Covid-19, *brand* di ASEAN tidak mencapai pertumbuhan pasar yang memadai.

Ada beberapa aspek yang membuat target pendapatan tidak tercapai. Antara lain Pertama, ledakan Covid-19 yang terjadi di ASEAN cukup berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Konsumen lebih senang belanja untuk persiapan sepekan, dan lebih memilih kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Kedua, selama Covid-19 menyebar, konsumen takut untuk keluar rumah sehingga mereka lebih memilih belanja online dibanding ke pasar.

Situasi ini membuat banyak gerai toko yang rugi dan akhirnya tutup. Ketiga, masyarakat lebih banyak menyimpan uang untuk belanja makanan, dan kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan. Dalam situasi demikian, *brand* yang tidak mengubah model *marketing*-nya akan mengalami penurunan penjualan. Strategi pemasaran yang ideal harus dilakukan sejalan dengan perubahan perilaku konsumen.

Perubahan *consumer behaviour* sangat berpengaruh terhadap strategi yang akan digunakan. Cara-cara lama dalam memasarkan brand tentu membuat pelanggan semakin jauh tetapi dalam situasi krisis, *brand* bisa menggunakan metode yang lebih empatik, tidak sekedar menjual barang melainkan memanfaatkan Customer Relationship Management (CRM) untuk membangun komunikasi dengan pelanggan. Covid-19 membuat Brand menyadari dengan baik bahwa salah satu cara bertahan yakni dengan mengenali siapa pelanggan yang loyal.

Pemasaran Setelah Covid-19

Dalam situasi yang tak menentu itu, brand harus meningkatkan *value* agar bisa diterima dengan baik oleh publik. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama setiap *brand* meski dengan menggunakan efisiensi anggaran. Komunikasi dengan pelanggan menjadi acuan utama sebab pandemi Covid-19 akan terus berlanjut dan perilaku konsumen tidak jauh berubah. Untuk menjangkau konsumen, *brand* harus berfikir memanfaatkan media social sebagai alat pemasaran. Selain sebagai alat menjangkau pelanggan, memanfaatkan media social sebagai alat untuk membangun *brand awareness, loyalty, dan value*.

Pemanfaatan media sosial merupakan salah satu bagian dari model pemasaran digital. Pandemi telah mengubah pola hidup menjadi lebih banyak bersentuhan dengan dunia digital. Tidak hanya belanja tetapi belajar, rapat, dan kegiatan lainnya memanfaatkan platform digital.

Peran strategis pemasaran pasca Covid-19 sangat berdampak terhadap jangkauan pelanggan. Pemasaran harus memainkan peran serupa dalam strategi pemasaran pasca Covid-19. Pemasaran harus memenuhi fungsi strategis

dalam menyelaraskan kembali produk agar sesuai dengan pandangan dunia pasca pandemi tentang pelanggan yang beralih ke digital.

Selain itu, sangat penting untuk memahami target market dan segmentasi *market* yang akan dijangkau. Masa depan pemasaran di era *new normal* yakni dengan memadukan strategi *offline* dan digital. Sehingga *brand* yang bisa bertahan di era *new normal* yang mampu berinvestasi di ranah digital. Antara lain *social media management*, *content marketing*, *digital Marketing* dan lain sebagainya.

Konklusi

Tulisan ini berfokus terhadap dampak Covid-19 pada *brand* yang ada di ASEAN dan strategi komunikasi pemasaran yang digunakan untuk menjangkau konsumen. Faktor yang berpengaruh terhadap pola perubahan perilaku pelanggan. Selain itu, terdapat juga masalah yang dihadapi dalam komunikasi marketing dan strategi marketing digital di era *new normal*. Berdasarkan analisa yang kami temukan bahwa terdapat perubahan pola perilaku pelanggan dalam menentukan *brand* yang mereka gunakan juga berpengaruh terhadap cara pemasaran.

Brand di ASEAN harus fokus pada mengenali pelanggan dan memanfaatkan CRM dalam membangun *experience* dengan pelanggan. Pasca pandemi, memanfaatkan pemasaran digital menjadi sesuatu yang penting. Membuat toko online dan memanfaatkan sosial media sebagai saluran pemasaran. Hal lain yang lebih penting adalah bersikap empatik dan mendengar apa suara pelanggan. *

Referensi

<https://money.kompas.com/read/2020/12/01/113800726/dampak-pandemi-kegiatan-bisnis-di-asean-diproyeksi-mulai-pulih-kuartal-ii-2021?page=all>

<https://www.republika.co.id/berita/qi9x2n409/bagaimana-pandemi-covid-memukul-ekonomi-warga-asia-tenggara>

<https://www.oecd.org/southeast-asia/ERIA%20COVID19%20and%20ASEAN%20Connectivity.pdf>

Zhao and k. kim, "responding to the covid-19 pandemic: practices and strategies of the global clothing and textile value chain," *clothing and textiles research journal*, vol. 39, no. 2, pp. 157–172, 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220807134433-37-361740/kapan-pandemi-covid-berakhir-ini-prediksi-terbaru-who>

Azzahra Aulia Dewi, Darlin Aulia, Kurnia Indah Sumunar, Erni Hernawati (2021). "Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian di Negara ASEAN, Sekolah Tinggi Media Nusantara Citra, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5 No. 3 Juli 2021

Firmansyah, A. (2020). *Komunikasi Pemasaran*. CV. Penerbit Qiara Media.

<https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/04/the-impact-of-covid19-on-your-advertising-and-marketing-campaigns>

<https://www.cmswire.com/digital-marketing/how-covid-19-changed-marketing/>

<https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/10/27/post-pandemic-marketing-strategies>

ISMAWAN AMIR adalah mahasiswa pascasarjana Program Marketing di Istanbul Commerce University, Turki. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar dan aktif pada *digital marketing*. Semasa kuliah ia aktif sebagai aktivis mahasiswa dan jurnalis pada Penerbitan Kampus Identitas Unhas.

Peluang Ekonomi Kreatif di ASEAN: Studi Musik Dangdut Koplo (D-Kop) di Indonesia

Agus Sugiharto

"Kejujuran, keberanian, dan setia adalah satu jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran dalam mencapai kebermanfaata hidup."

--Citragama Politica

Konsep ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif yaitu pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai pelaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi, tanpa menggunakan suatu pandangan subyektif untuk mengatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Ekonomi positif dibagi menjadi dua yaitu ekonomi deskriptif dan ekonomi teori. Sedangkan ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi, dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan subyektif (Hasoloan, 2010:9).

Beberapa tahun terakhir sejak terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bertujuan melakukan perdagangan bebas lintas Asia tanpa dikenakan bea cukai yang tinggi, bahkan bebas bea cukai. Indonesia mencoba ikut andil dalam pola pengintegrasian ekonomi di wilayah benua Asia tersebut. Ada diantaranya negara-negara yang ikut dalam perdagangan bebas lintas Asia seperti: Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Hal itu tentu membuat Pemerintah Indonesia memutar otak untuk merancang strategi baru agar mendapatkan keuntungan maksimal dari keikutsertaan dalam MEA atau bisa disebut ASEAN Economic Community (AEC). Menggencarkan dan mengkampanyekan ekonomi kreatif menjadi bagian pembicaraan yang serius dalam dunia ekonomi, politik, dan juga budaya, karena diyakini akan menjadi salah satu tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi. Bila dikaitkan dengan industri pariwisata yang ada Indonesia, dimana pertunjukan kesenian, pentas musik tradisional, pameran kriya seni, wisata bersejarah, dan lokasi yang diciptakan dengan harapan untuk mendukung berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 setelah amandemen 2002: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluarga; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Gilarso, 2004:375).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif dalam pasal dua telah mengklasifikasi ulang sub-sektor industri kreatif dari 15 subsektor menjadi 16 sub-sektor, yaitu (1) arsitektur, (2) desain interior, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) film, animasi, video, (6) fotografi (7) kriya, (8) kuliner, (9) musik, (10) fashion, (11) aplikasi dan game developer, (12) penerbitan, (13) periklanan, (14) televisi dan radio, (15) seni pertunjukan, dan (16) seni rupa. Dalam perpres nomor 72 tahun 2015 ini dijelaskan bahwa yang tergolong dalam ekonomi kreatif meliputi enam belas sub sektor (Perpres, 2015).

Tujuan dari ekonomi kreatif tidak hanya terkait dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan. Ekraf mengupayakan agar terjadinya pembangunan

yang berkelanjutan melalui kreativitas, dimana konsep dari sistem pembangunan berkelanjutan yaitu menciptakan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur (Romarina, 2016:35).

Ekonomi kreatif merupakan sebuah "talenta" baru yang merubah pandangan pola pikir dalam kehidupan masyarakat melalui ide/ gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Arti "talenta" memiliki banyak definisi atau pengertian (Saksono, 2012:93). talenta adalah sesuatu yang dimiliki oleh karyawan yang dibangun dan dibina melalui program pelatihan dan pengembangan oleh suatu organisasi untuk proses jangka panjang mampu meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi pendorong dibalik kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi (Sukoco & Fadillah, 2016:87).

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dari kreativitas individu akan menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi masyarakat akan lebih sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, secara niala sosial mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga kesejahteraan sosial meningkat, secara lingkungan akan menambah nilai kebersamaan dalam pelaksanaan ekonomi kreatif.

Branding Musik di Indonesia

Kotler (2000) mengatakan bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar. Marketing Mix merupakan variabel-variabel terkendali yang digunakan untuk membuat konsumen tertarik akan karya atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Alat-alat bauran pemasaran (*marketing mix*) yang populer sering digunakan meliputi: produk (*product*), harga (*price*), saluran distribusi (*place*), dan promosi (*promotion*). Dalam pencapaian tujuan pemasaran keempat alat bauran pemasaran harus saling mendukung dengan harapan tercapainya kepuasan konsumen (Kotler, 2000:18). Keberhasilan dalam penciptaan produk harus diikuti dengan pemasaran yang baik sehingga segmen pasar yang ditargetkan dapat terpengaruh.

Penjelasan alat-alat bauran pemasaran (*marketing mix*) sebagai berikut. 1. Product (produk) adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat diperhatikan, diraba atau tidak bisa diraba dan dibeli atau dikonsumsi menjelaskan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperloleh, digunakan, atau dipasarkan. Produk bisa dikategorikan seperti barang-barang (fisik), pengalaman, orang dan gagasan. Dalam merencanakan produk atau jasa yang baik perlu adanya pedoman dalam penciptaannya, apakah akan mengubah produk yang ada dan/ menambah produk baru. Adapula keputusan-keputusan dapat diambil menyangkut pemberian merek, kualitas, kemasan, bentuk, ukuran dan warnanya. 2. Price (harga) adalah nilai dari barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang. Atas dasar nilai tersebut perusahaan atau seseorang akan rela melepaskan barang maupun jasa yang dimilikinya untuk konsumen. Tentu harga suatu barang atau jasa menjadi faktor penentu dalam permintaan pasar. Harga juga dapat mempengaruhi posisi persaingan dengan perusahaan lain.

Agar D-Kop Populer di ASEAN dan Dunia

Pada perkembangannya, dangdut *koplo* tersebar di Jawa Timur, dan persebaran paling luasnya terdapat di jalur pantura. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya grup dangdut *koplo* di sepanjang jalur pantura, dan pemasangan lagu dangdut *koplo* di sepanjang jalan pantura bila kita menaiki transportasi massal di sana. Persebaran dangdut *koplo* ke daerah lainya dapat dirasakan ketika fenomena Inul Daratista masuk ke industri musik nasional. Persebaran dangdut *koplo* makin luas bahkan sporadis. dangdut *koplo* mempunyai tempat tersendiri pada pertelevisian Indonesia, bahkan dangdut *koplo* menggantikan peran dangdut di televisi.

Pedangdut yang menjunjung orisinalitas dangdut semakin tergeser posisinya. Sehingga terdapat sentimen-sentimen tersendiri, hal tersebut terbukti ketika, penulis mendatangi sebuah seminar, yang di dalam seminar tersebut terdapat anggota dari Dangdut, beliau menyatakan bahwa "menurut Rhoma Irama, *Koplo* bukanlah jenis dari Dangdut, *Koplo* bukan Dangdut". Pembacaan yang saya lakukan atas hal ini adalah akibat patronase yang terbatas dari pelaku dangdut. Terlebih suasana makin keruh ketika industri musik dangdut pada tahun belakangan ini menjadikan dangdut *koplo* sebagai kiblat.

Dangdut *koplo* pada perkembangannya telah menyebar ke seluruh penjuru, demam Inul daratista menjadi lonjakan yang sangat besar terhadap dangdut *koplo*. Hal tersebut membuat dangdut *koplo* semakin berkembang dan semakin dapat dinikmati oleh para pendengar musik Indonesia. Entah apakah dangdut *koplo* merupakan musik resistensi atas dangdut lazimnya, atau sebagai pencarian jati diri dari musik tersebut. Jika menilik dari segi *performance*, dangdut *koplo* sangat menonjolkan performa yang enerjik. Kekuatan dangdut *koplo* adalah ke-enerjikan musik dan penyanyi. Namun hal ini turut membuat stigma yang merugikan, karena dominan penyanyi dangdut *koplo* berpenampilan seksi. Persebaran yang meluas juga dikuatkan oleh pernyataan Weintraub bahwa: Grup-grup/Orkes Melayu (O.M.) dangdut *koplo* juga berjaya di berbagai daerah, sebagaimana terbukti dari VCD “Dangdut Koplo” yang dipasarkan hingga ke Maluku. (2010:251). Tidak hanya itu, tahun 2015 ini, terdapat acara televisi yang berjudul “Bintang Pantura”, hingga dua seri.

Keberhasilan para pemusik dangdut *koplo* adalah ketika para penonton berinteraksi secara langsung, seperti ikut berjoged, menonton, hingga saweran. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang cukup tipis antara dangdut dan dangdut *koplo*, di mana ketika dangdut dimainkan, joged yang terjadi adalah joged-joged dangdut pada umumnya, karena temponya yang mendayu-dayu atau sebagainya. Sedangkan pada dangdut *koplo* joged yang terjadi adalah joged-joged yang bebas, yang lepas, dan tanpa terkontrol. Kekuatan joged mempunyai arti yang sangat penting pada dangdut *koplo*, yakni sebagai keberhasilan pemain, juga sebagai pusat interaksi, serta pertukaran atau transfer kebudayaan lewat musik dangdut *koplo* ini.

Asumsi pertama saya adalah, musisi dangdut *koplo* adalah upaya musikal paling real yang dipergunakan untuk masyarakat sekitar. Aksesibilitas masyarakat daerah terhadap musisi dangdut nasional merupakan hal yang muskil. Perbedaan tempat, hingga harga pertunjukan dari musisi nasional seakan menjadi jurang pemisah antara lokal dan sentral. Alhasil harus adanya upaya masyarakat akan musik. Bertolak dari pernyataan Fredrich Nietzsche, seorang filosof asal Jerman, yang menyatakan bahwa “tanpa musik, hidup pastilah sebuah kekeliruan.”

Tentunya masyarakat mempunyai pola produksi, distribusi, hingga konsumsinya masing-masing. Dalam hal ini dangdut *koplo* menjadi bukti ejawantah dari otonomnya masyarakat. Asumsi kedua adalah, penalaran estetis dapat diartikan sebagai penalaran selera (Kant via Hauskeller, 2015:35). Hal ini mengartikan bahwa estetis didasarkan pada selera masyarakat. Selera masyarakat didasarkan pada pola-pola kebudayaan yang dibangun. Namun selera lekang oleh kelas, seperti pada penelitian Lono Simatupang pada tesis masternya tentang dangdut, di mana dangdut tetap diperdengarkan dari kelas sosial bawah hingga atas sekalipun, walau dengan alasan adanya habitus (1996). Dalam hal ini selera menjadi persoalan yang transeden, dibentuk berdasarkan proses.

Asumsi ketiga adalah televisi yang menjadikan dangdut *koplo* dapat dikonsumsi khalayak lintas geo-kultur. Persebarannya tidak lagi pada hal transportasi, namun pada tayangan televisi yang terjadi setiap hari. Setidaknya lebih dari dua stasiun televisi mempertontonkan dangdut di setiap malam, baik tajuk konser hingga tajuk kontestasi. Alhasil hal tersebut lah yang menjadikan selera masyarakat yang menonton televisi menjadi terpatrit. Dalam hal ini, walau penonton mempunyai kuasa memegang remot televisi, namun dengan kehadiran dangdut pada stasiun televisi lain tetap teringat. Bagi para pendengar, maka dangdut *koplo* di televisi semakin mematri selera. Sedangkan bagi mereka yang kurang menyukai, kehadiran dangdut *koplo* membentuk pola pikir layaknya oposisi biner, di mana adanya kesadaran yang kuat akan adanya kehadiran dari oposisi lainnya. Dangdut *koplo* menjadi pilihan anak muda saat ini, semenjak hadirnya lagi Didi Kempot dengan slogan *Ambyar*-nya. Saat ini pemuda dari berbagai lapisan menggemari lagu-lagu sang Maestro Didi Kempot ini. Sehingga ke depan arah perpembangan Dangdut *koplo* ini mempunyai prospek yang positif.

Dalam perkembangannya Dangdut Koplo (D-Kop) kini (di tahun 2022) terus digemari oleh generasi muda, penyanyi seperti Denny Caknan, Nella Kharisma, Happy Asmara, Evan Loss, Ndarboy, Grup Band Guyon Waton, dan penyanyi cilik Farel, semakin menegaskan D-Kop menjadi selera Nasional saat ini, peran media sosial seperti Youtube dan Tiktok ikut memajukan dan menjadi viral. Hal ini sangat menarik untuk dijadikan asset ekonomi kreatif Indonesia ke depan. Bahkan bisa menjadi branding musik di tingkat internasional, D-Kop bisa menjadi identitas musik Indonesia. Peluang D-kop untuk masuk ke internasional, contohnya di wilayah ASEAN, mengingat musik adalah Bahasa universal, bisa menjadi diplomasi baik itu di tingkat ASEAN ataupun seluruh dunia, musik D-Kop mempunyai ciri khas Indonesia. Pesan-pesan lagunya pun mencerminkan budaya timur dan khususnya mencerminkan pola-pola kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu juga menjadi ajang memajukan ekonomi kreatif anak muda Indonesia, mengingat di tahun 2030 mengalami bonus demografi (anak muda). Peran pelatihan dan skill musik bisa menjadi alternatif anak muda dalam

berkarya dan memperoleh kesejahteraan dalam hal ekonomi. Peran kerja sama dan sinergi dengan pemerintah, musisi dan juga pelaku bisnis dibutuhkan agar masuk D-Kop ini masuk dalam jajaran musik yang disukai di seluruh dunia. Langkah awal kita adalah memperoleh posisi pasar yang bagus di ASEAN. Masyarakat ASEAN lebih menyukai dan lebih bisa mengenal budaya Indonesia melalui musik D-Kop. Hal ini juga selaras dengan peran Indonesia sebagai anggota Masyarakat Ekonomi Kreatif (MEA) dalam memberikan peran diplomasi yang lebih bagus untuk Indonesia di masa yang akan datang.*

Referensi

- Hauskeller, Michael. 2015. *Seni, Apa itu?* Yogyakarta: Kanisius
- Perpres. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Laman Hukum Online, 1–5.
- Gilarso. 2004. Pengantar ilmu ekonomi makro, edisi revisi. Yogyakarta: Kanisius
- Romarina, A. 2016. "Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35– 52.
- Saksono, H. (2012). "Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers." *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 93–104.
- Sukoco, I., & Fadillah, A. R. (2016). "The Analysis of Talent Management Strategy Using Organizational Competency Approach In Pt Pindad (Persero) Bandung City." *Jurnal AdBispreneur*, 1(1), 85–102.
- Kotler, P. (2000). *Manajemen Pemasaran* Jilid 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasoloan, J. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi (PIE)*. Yogyakarta: Deepublish

AGUS SUGIHARTO adalah Founder Goolin Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan riset; Sekolah Bakat yang bergerak dibidang pelatihan dan les bahasa dan skill, dan Mas Harto Foundation yang bergerak di bidang pemuda dan inovasi ekonomi kreatif. Ia merupakan Peneliti dan Founder di Citragama Politica yang bergerak di bidang politik dan kepemimpinan, dan Founder D-Kop Center yang bergerak pada kajian musik dangdut koplo. Agus adalah alumni Undip dan UI. Agus juga menulis 7 buku dan 7 lagu indie ciptaan. Diantara judul bukunya adalah *Mahasiswa Gado-Gado*, *Ramuan Senyawa Cinta 1*, *Ramuan Senyawa Cinta 2*, *Stalking di Media Sosial*, *Profesor 30*, *Desa Inovatif* dan *Satrio Piningit 2024*. Saat ini ia menjadi pengurus HIPMI Jateng, HIPMI Pemalang, dan Komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia (AABI) seluruh Indonesia, serta sebagai anggota Rumah Produktif Indonesia (RPI). Ia dapat dihubungi di email sugihartoagus8@gmail.com.

Inovasi Pengembangan Pariwisata ASEAN Masa Pandemi Covid-19: Kolaborasi Bersama Menuju Destinasi Tunggal ASEAN

Edrida Pulungan

"Sektor pariwisata harus menjadi motor peningkatan devisa dan menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita."

--Presiden Joko Widodo

Persona Asia Tenggara sebagai salah satu tujuan wisata dunia tidak pernah pudar. Tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, warisan budaya yang ada di kawasan itu juga jadi daya tarik bagi para pelancong. Termasuk Indonesia sebagai negara yang kaya destinasi wisata namun pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun yakni tahun 2020 hingga 2022 telah menimbulkan beragam krisis dan berdampak negatif pada semua negara secara regional dan global. Termasuk di Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Untuk itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya pengembangan sektor pariwisata karena menghasilkan devisa yang memiliki efek ganda dalam pertumbuhan ekonomi. Khususnya Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan di masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi setiap negara menurun drastis khususnya sektor pariwisata. Kondisi tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan wilayah dan pembatasan penerbangan antar negara yang diterapkan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Karena dengan adanya kebijakan pembatasan yang diterapkan tentu sangat berdampak bagi beberapa sektor pariwisata, karena wisatawan dari luar negeri tidak diizinkan masuk ke negara lain begitupun wisatawan domestik. Namun apabila dilihat dari kebijakan untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19 yang terjadi setiap negara di ASEAN mempunyai kebijakannya masing-masing untuk mengatasi masalah tersebut.

Indonesia juga berupaya membangun kembali sektor pariwisata merupakan prioritas dan perlu dilakukan dengan terobosan-terobosan baru agar lebih SUSTAINABLE dan RESILIENT di masa pandemi dengan mengembangkan sejumlah destinasi wisata di luar Bali yang dinamai Lima Destinasi Super Prioritas (5DSP) yang diyakini bisa mendongkrak pariwisata dengan istilah "Bali Baru." Pembangunan destinasi tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan menargetkan PDB pariwisata 5,5 % dengan devisa 30 miliar USD. Lima destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara) serta Mandalika (Nusa Tenggara Barat). Adapun tujuan beberapa prioritas pemulihan sektor pariwisata diantaranya mengembalikan kepercayaan turis, pengurangan ketidakpastian serta meningkatkan informasi dan komunikasi, restorasi konektivitas, infrastruktur dan kapasitas jasa pariwisata.

Untuk mempromosikan lima Bali baru itu, khususnya ke ASEAN, strategi *digital tourism* yakni pemasaran melalui pendekatan teknologi digital termasuk memanfaatkan big data dengan menggunakan promosi melalui strategi *short haul* dengan menggunakan media melalui *digital tourism* setelah awalnya menggunakan metode pemasaran konvensional pada negara-negara tujuan wisatawan mancanegara demi meningkatkan transaksi penjualan paket wisata.

Berdasarkan Laporan ASEAN Tourism Forum 2020 mengalami penurunan karena pada tahun 2019 Kunjungan wisatawan mancanegara ke negara ASEAN berjumlah sekitar 133,1 juta wisatawan internasional, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi.

Beberapa negara ASEAN lainnya yang terdampak yang merupakan primadona pariwisata negara ASEAN yakni Thailand. Berdasarkan Data Departemen Pariwisata Thailand dan Filipina Tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi karena lumpuhnya sektor pariwisata di Thailand karena kehilangan 1,45 juta pekerja termasuk 400.000 pekerjaan selama covid 19. Begitu juga dengan negara Filipina yang kehilangan pendapatan 8,3 Miliar Dollar AS tahun 2020 dengan kunjungan wisatawan yang hanya 1,3 juta wisatawan mancanegara setelah anjlok sekitar 80 persen dibandingkan kunjungan tahun 2019 yang berjumlah 8,3 juta jiwa.

Untuk itu negara-negara anggota ASEAN duduk bersama untuk mendapatkan solusi dan kesepakatan bersama untuk memulihkan perekonomian serta membuat target baru dan terukur serta inovasi program pariwisata dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional dan penerimaan dari sektor pariwisata.

Karena kondisi di atas ASEAN resmi meluncurkan situs pariwisata terintegrasi dilaman visitseasia.travel. Peluncuran situs tersebut dilakukan oleh Putra Mahkota Brunei Darussalam dan Senior Minister at the Prime Minister's Office, Haji Al-Muhtadeen Billah ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah. Situs ini menjadi platform satu pintu bagi pariwisata ASEAN yang diharapkan dapat mendorong kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan wisata pilihan bagi wisatawan untuk merasakan pengalaman budaya dan hidup otentik antar masyarakat ASEAN dalam mempererat hubungan antarmanusia serta memperdalam pemahaman lintas budaya.

Upaya yang dilakukan melalui Inovasi Digital Tourism juga bisa digunakan sebagai upaya pemasaran pariwisata negara-negara anggota ASEAN sebagai solusi dalam meningkatkan kinerja pariwisata yang menurun sekitar 36 persen pada kuartal pertama 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 dan 2019. Tingkat kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34 persen, dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tur dan travel.

Peran Indonesia

Sebagai salah satu negara ASEAN Indonesia juga berperan dalam pengembangan pariwisata masa pandemi dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN dalam "Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)" pada 29 April 2022. Kerja sama ASEAN tersebut dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak COVID-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN.

Sebelumnya juga Indonesia adalah negara ASEAN yang menjadi inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia melalui Resolusi PBB No 74/198 (Sustainable Creative Economy) dengan tema "Inclusively Creative: A Global Recovery" sebagai upaya pemilihan ekonomi global. Karena saat terjadi Covid-19, sektor ekonomi kreatif memberikan peluang bagi masyarakat dunia seperti pengantaran makanan, obat-obatan dan informasi tenaga medis secara daring untuk kebutuhan masyarakat yang banyak yang terdampak Covid-19.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) pertama kali dicetuskan oleh Komisi Brundtland di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland tahun 1984 dengan menuliskan buku "Our Common Future" terbitan *World Commission on Environment and Development (WECD)* menjadi konsep pembangunan pariwisata dengan mengedepankan pilar ekonomi berkelanjutan sosial dan lingkungan yang bertujuan memberikan pengawasan kepada wisatawan agar berkeinginan untuk berkunjung kembali setelahnya.

Negara-negara anggota ASEAN menyepakati tujuh perkuatan kerja sama di bidang pariwisata sebagai langkah mitigasi terhadap sektor yang dianggap paling terpukul dalam akibat pandemi Covid-19. Pertemuan tersebut menghasilkan *joint statement* yang memuat tujuh poin hasil kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pariwisata, salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul dalam pandemi.

Pertama, Kesepakatan membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN (ATCCT).

Kedua, kolaborasi Intensif antar Organisasi Pariwisata Nasional (NTOs) ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi serta dengan mitra eksternal ASEAN, dan

mengimplementasikan langkah-langkah komprehensif, transparan dan respons cepat dalam mitigasi dan mengurangi dampak Covid-19 serta krisis lain di masa depan.

Ketiga, kesepakatan peningkatan kerja sama dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor pariwisata.

Keempat, kesepakatan penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara, termasuk pengembangan standar dan pedoman dalam meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan guna melindungi para pekerja dan masyarakat di industri perhotelan dan industri lainnya terkait pariwisata.

Kelima, kesepakatan dukungan pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca Covid-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN serta upaya promosi dan pemasaran pariwisata bersama dengan tujuan memajukan ASEAN sebagai *single tourism destination*.

Keenam, kesepakatan percepatan penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi, untuk dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama keterampilan digital bagi para *stakeholder* industri perjalanan dan pariwisata.

Ketujuh, kesepakatan kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, organisasi internasional dan industri yang relevan untuk membangun Asia Tenggara yang tangguh dan siap untuk secara efektif menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah krisis. Untuk tindak lanjut kesepakatan kelima semua negara termasuk Indonesia siap menjadikan ASEAN destinasi wisata tunggal.

Inovasi Pariwisata ASEAN sebagai *Single Destination*

Inisiatif pengembangan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal merupakan inovasi Pariwisata ASEAN. Kampanye ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal harus sering disosialisasikan karena menguntungkan pariwisata Indonesia dalam tiga hal sebagai berikut.

Pertama, sebagai upaya mempromosikan destinasi Indonesia bersama dengan destinasi dari negara ASEAN lainnya karena negara ASEAN memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing yang bisa dijadikan potensi kekuatan sebagai destinasi wisata yang kaya dan unik. *Kedua*, sebagai sosialisasi destinasi wisata tunggal juga dinilai akan memudahkan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Asia Tenggara untuk berpindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya. *Ketiga* sebagai upaya peningkatan hubungan diplomasi yang erat antara negara-negara di regional Asia Tenggara.

Upaya lainnya didukung dalam ASEAN *Tourism Ministers Meeting* yang digelar dalam rangkaian ATF 2020, para menteri mencatat progres dari implementasi tujuh pilar untuk memastikan daya saing ASEAN sebagai tujuan wisata tunggal sebagai berikut. Ketujuh pilar itu yakni *intensify promotion and marketing* (mengintensifkan promosi dan pemasaran); *diversify tourism product* (diversifikasi produk wisata); *attract tourism investment* (menarik investasi pariwisata); *raise capacity and capability of human capital* (meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia); *implement and expand ASEAN tourism standards for facilities, services and destination* (menerapkan dan memperluas standar pariwisata ASEAN untuk fasilitas, layanan dan tujuan); *implement and expand connectivity and destination infrastructure* (menerapkan dan memperluas konektivitas dan infrastruktur destinasi wisata); serta *Enhance Travel Facilitation* (meningkatkan fasilitasi wisata). Potensi negara-negara ASEAN untuk berkunjung ke Indonesia cukup besar, namun, yang lebih besar adalah menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang sudah ada di negara-negara tetangga agar turut berwisata ke Indonesia.

Potensi wisatawan dari ASEAN cukup besar dan harus jadi perhatian. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari Asia Tenggara hingga November 2019 mencapai 5 juta wisatawan mancanegara, atau sekitar 33,7 persen dari total wisatawan mancanegara yang datang. Ini menunjukkan pentingnya ASEAN bagi Indonesia.

Indonesia saat ini tengah menyiapkan lima destinasi wisata super prioritas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan devisa dari sektor pariwisata. Kelimanya yakni Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba dan Likupang. Untuk mempromosikan lima Bali baru itu, khususnya ke ASEAN, strategi *digital tourism* yakni pemasaran melalui pendekatan teknologi digital termasuk memanfaatkan *big data*.

Promosi akan ditingkatkan berdasarkan strategi *long haul* dan *short haul*. ASEAN yang termasuk dalam kategori *short haul*, promosinya akan ditingkatkan melalui *digital tourism*. Pemerintah juga akan tetap melakukan metode pemasaran konvensional di negara-negara tujuan wisatawan mancanegara dan mendukung industri potensial di tanah air untuk mengadakan pameran di luar negeri agar meningkatkan transaksi penjualan paket wisata. Kita juga akan membuat paket-paket wisata ke Destinasi Super Prioritas yang akan didukung dengan kemudahan *interconnectivity* melalui infrastruktur dan transportasi yang memadai.

Indonesia Tuan Rumah ASEAN Tourism Forum 2022

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun 2022 setelah menjadi Co-Chair pada ASEAN Tourism Forum (ATF) 2021 dan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum 2022 setelah sebelumnya pelaksanaan kegiatan ASEAN Tourism Ministers Meeting sebagai rangkaian ASEAN Tourism Forum 2020 yang digelar pada 12-16 Januari 2020 yang menghimpun pemangku kepentingan terkait akan *ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020* yang dilaksanakan di Brunei Darussalam, Potensi itulah yang dilihat Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) sebagai satu kekuatan baru untuk bisa meningkatkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi kawasan.

Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan visi menjadikan ASEAN sebagai tujuan wisata tunggal itu. Dalam kegiatan yang mengambil tema "*ASEAN-Together Towards a New Generation of Travel*" itu, perwakilan 10 negara ASEAN beserta rekanan, yakni China, Jepang, Korea Selatan dan India, hadir untuk mengkaji program merumuskan pariwisata di negara ASEAN dengan laporan adanya 47 dari 73 aktivitas (sekitar 64,4 persen) Rencana Strategis Pariwisata ASEAN (*ASEAN Tourism Strategic Plan/ATSP*) yang telah berhasil diterapkan.

Para pemimpin negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengimplementasikan program strategis di bawah ATSP guna mendorong daya saing ASEAN sebagai tujuan wisata tunggal selain memastikan pariwisata di kawasan itu berjalan inklusif dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perlunya menerapkan tujuh pilar ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal (*single tourism destination*) yang menghasilkan tujuh pilar. Ketujuh pilar tersebut adalah *intensify promotion and marketing* (mengintensifkan promosi dan pemasaran); *diversify tourism product* (diversifikasi produk wisata); *attract tourism investment* (menarik investasi pariwisata); *raise capacity and capability of human capital* (meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia).

Selanjutnya, *implement and expand ASEAN Tourism Standards for Facilities, Services & Destination* (menerapkan dan memperluas standar pariwisata ASEAN untuk fasilitas, layanan & tujuan); *Implement and Expand Connectivity & Destination Infrastructure* (menerapkan dan memperluas konektivitas dan infrastruktur destinasi wisata); dan *Enhance Travel Facilitation* (meningkatkan fasilitas wisata).

Kesimpulan

Pemulihan sektor pariwisata masa pandemi Covid-19 membutuhkan berbagai inovasi pariwisata antar sesama negara ASEAN dalam pengembangan kolaborasi dan kerja sama regional melalui Single Destination ASEAN serta pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta strategi melalui *digital tourism* melalui *visitseasia.travel*. Sehingga dapat kembali memulihkan pariwisata dan perekonomian negara.*

Referensi

- ASEAN Secretariat (2022). *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2015*. Association of Southeast Asian Nations Asia Development Bank, Creative Economy 2030
- Thomad Bsum, David Solnet (2022). "Locating the Workforce at The Heart of Sustainable Tourism Discourse," *Journal Sustainable Tourism*
- Lenny Martini, Bayuningrat Hardjakaprabon (2012). *The Role of Indonesia-Kreatif" Website to Build Creative Connectivity in Indonesia*. Bandung
- Lisbet (2020). "Pemanfaatan Forum Pariwisata ASEAN untuk Promosi Pariwisata Indonesia," jurnal dpr.go.id

Safira Christiani, Fera Eliati, et.al. (2020). *Analisis Pengendalian Sektor Pariwisata Melalui Tourism Safe Corridor di ASEAN pada Masa Covid-19*. Diakses melalui <http://Journal Ilmu Sosial dan Humaniora /Downloads/ Article+0102-111-118-1.pdf>

EDRIDA PULUNGAN adalah seorang ASN dan penulis. Ia menerbitkan berbagai buku puisi. Menamatkan pendidikan sarjana di FE Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dan program pascasarjana di Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Ia merupakan penerima Anugerah ASN Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 2020 mewakili Setjen DPD RI kategori *Future Leader* (Pemimpin Masa Depan) dengan Inovasi Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Masa Pandemi Covid-19 dengan Model Penta Helix.

Ikon *Green Tourism Village* dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Daya Ekonomi Kreatif

Prety Diawati

Potensi Pesona Desa Wisata

Indonesia memiliki potensi alam dan sosial budaya yang melekat di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Anugerah alamiah tersebut, apabila dikembangkan secara berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian. Pariwisata sebagai salah satu tonggak ekonomi kreatif dapat menjadi sumbangsih yang besar untuk kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan oleh potensi alam dan kearifan lokalnya. Perlu digaris bawahi pada zaman yang kian berkembang secara masif, dinamis, dan pesat ini diperlukan upaya untuk merubah paradigma pembangunan kepariwisataan dari "*Greedy Tourism*" kepada transformasi inovasi berkelanjutan yaitu "*Green Tourism*."

Greedy Tourism mengarah pada kecenderungan eksploitasi keseluruhan sumber-sumber potensial pariwisata secara ekstraktif. Kemudian, secara perlahan akan menimbulkan destruktivitas alam dan potensi daya tarik wisata karena pengelolaan tanpa dasar yang relevan dan menepikan unsur keberlanjutan. Dalam kata lain secara singkat *Greedy Tourism* berarti "Pariwisata Yang Serakah". Serakah atas hal pemanfaatan yang hanya mementingkan profitabilitas ini, tidak akan melahirkan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Maka dari itu *Green Tourism* lahir sebagai alternatif di sektor pariwisata yang menekankan pada aspek keberlanjutan ekonomi (*eco-sustainability*) masyarakat. Hal ini adalah pondasi untuk melahirkan *Green Tourism Village* (Desa Wisata Hijau). Sehingga dengan adanya konsep Desa Wisata Hijau ini dapat menjadi celah peluang dalam upaya menangkap potensi dari desa wisata dengan segala kearifan lokalnya agar lebih berdaya dan secara berkelanjutan mampu memperkuat perekonomian masyarakat. Salah satu Desa Wisata yang berpotensi menjadi *Green Tourism Village* adalah Desa Wisata Panjalu, yang terdapat Situ Lengkong dan Cagar Alam Nusa Gede di kawasanannya.

Situ Lengkong adalah salah satu potensi wisata di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang menyuguhkan keindahan alam dan juga budayanya. Situ ini terkenal oleh wisatawan karena kecantikan lembah dan adanya danau kecil yang di tengahnya terdapat daratan sedimen (semacam pulau kecil) bernama Nusa Gede. Serta dari segi budaya terdapat wisata religi berupa ziarah ke makam Sanghyang Borosngora, yaitu pemuka agama Islam di Panjalu, yang terletak di Nusa Gede. Ada pula upacara adat setiap bulan Maulud tiba, yang dikenal dengan upacara adat Nyanguku.

Akan tetapi semenjak diresmikannya Objek Wisata Situ Lengkong Panjalu berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 6, 21 Februari 1919 sebagai cagar alam (UNKRIS, 2022), dan pengukuhan Desa Wisata Panjalu pada 17 Maret 2004 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Mutakin, 2020), tidak serta merta membuat Desa Wisata Panjalu menjadi lebih baik untuk menjadi sarana perekonomian masyarakat yang berbasis pariwisata. Terlepas dari aspek legalitas yang menjadi upaya perlindungan kawasan cagar alam Situ Lengkong dan Desa Wisata Panjalu, terdapat aspek lain yang menyebabkan kurang pesatnya laju inovasi untuk memberdayakan potensi Desa Wisata Panjalu hingga kini.

Daya kreativitas dan inovasi tidak terlepas dari aspek sumber daya manusia sebagai peran utama perubahan. Dapat diketahui, menurut data statistik dalam (Desa Panjalu, 2022), tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah. Tercatat sebanyak 5.440 (41,63%) warga Desa Panjalu hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, dan sebanyak 2.595 (19,86%) warga desa tamatan SMP/ sederajat, serta 1.284 (9,83%) warga desa adalah tamatan SMA/ sederajat, sedangkan sisanya adalah tamatan sekolah lanjutan. Rendahnya tingkat pendidikan mayoritas warga Desa Panjalu membuat pola pikir masyarakat di sekitar Situ Panjalu pun beragam.

Menurut (Wulananzani, 2022) sebagian masyarakat berpandangan bahwa alam adalah sumber kehidupan, sehingga alam harus dimanfaatkan secara maksimal. Lalu, jika ketersediaan sumber kehidupan habis atau terjadi gangguan, maka

mereka hanya bisa pasrah dan menunggu alam agar pulih kembali seperti sedia kala, hingga dapat didayagunakan kembali. Tentu saja pola pikir ini tidaklah baik. Jika pola pikir ini diteruskan maka akan terus membatasi kreativitas dan inovasi masyarakat Desa Panjalu. Serta hal ini akan menjatuhkan pariwisata kepada dengan *Greedy Tourism* yang dapat membuat potensi alam tereksplorasi secara tidak bijak.

Maka dari itu, untuk membangun keberlanjutan ekonomi yang berlandaskan “Desa Wisata Hijau (*Green Tourism Village*) dan Ekonomi Kreatif”, dibutuhkan langkah-langkah inovatif dalam upaya implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Panjalu di Kabupaten Ciamis. Sehingga dapat menjadi salah satu ikon wisata terpadu dan berkelanjutan, serta kebermanfaatannya sejalan dengan asas ekonomi hijau yang selaras dengan potensi alamnya.

Perencanaan Desa Wisata Hijau Panjalu

Panjalu ialah salah satu Desa Wisata yang bentang alamnya berada di Tatar Sunda. Desa ini berada di ketinggian 731 MDPL tepatnya berada di kaki Gunung Sawal (1.764 M DPL). Posisi Panjalu dikelilingi oleh jajaran pegunungan, yaitu Gunung Sawal, Gunung Galuh, Gunung Cakrabuana, dan Gunung Bitung. Sebuah danau yang di tengahnya terdapat pulau kecil terletak di antara bentang pegunungan itulah yang bernama Situ Lengkong. Situ ini menjadi daya tarik utama pariwisata sejak dahulu kala.

Situ Lengkong adalah sebuah kenampakan alam yang luasnya sekitar 57,95 Ha. Pulau di tengahnya Bernama Nusa Gede yang dahulunya adalah pusat Kerajaan Panjalu. Di tempat ini pula sejarah perkembangan ajaran Islam di wilayah panjalu bermula. Sehingga kini, masih banyak wisatawan berkunjung untuk menikmati keindahan alam sambil berwisata sejarah dan religi. Sebuah potensi alam yang sangat indah ini apabila dikelola dengan tata cara yang berasaskan Desa Wisata Hijau, pasti akan menambah nilai (*value*) tersendiri di mata wisatawan. Desa Wisata Hijau merupakan alternatif paling baik untuk menjaga eksistensi sumber daya potensial di Desa Wisata Panjalu dan menata perkembangan desa tersebut agar menjadi sebuah pondasi ekonomi keberlanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Panjalu.

Konsep Desa Wisata Hijau memberikan masyarakat kepentingan jangka panjang untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan yang ada. Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, disebut pula sebagai destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (UU No. 10, 2010). Sedangkan Desa Wisata Hijau adalah bentuk generasi baru desa wisata. Desa Wisata Hijau dalam implementasinya telah memasukkan konsep ekonomi hijau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan cara mengurasngi risiko ekonomi dan eksploitasi sumber daya. Dengan demikian, basis dari Desa Wisata Hijau adalah model pemberdayaan komunitas lokal dengan produk utama mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan alam, ekonomi, dan sosial budaya setempat.

Prinsip dasar dari Desa Wisata Hijau mengarah pada beberapa hal yang mampu memberikan panduan pengembangan potensi alam, sosial dan budaya secara garis besar. Hal pertama yang menjadi perhatian adalah mendorong tumbuh kembangnya kegiatan wisata yang ramah dan peduli lingkungan. Kemudian, mendorong pengembangan produk pariwisata berbasis pelestarian. Ketiga, mendorong produk pariwisata sesuai minat pasar berbasis pelestarian, misalnya wisata budaya, wisata pusaka (*heritage tourism*), wisata alam, dan wisata kreatif. Selain itu, masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang sadar akan tumbuh kembang pariwisata berbasis komunitas. Serta, mengusahakan tanggung jawab industri pariwisata dan industri pendukung lainnya pada perwujudan konsep pembangunan ramah lingkungan. Yang terakhir, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya lokal (Kementerian Pariwisata, 2017).

Ekonomi kreatif dapat menjadi panduan dalam memperkaya inovasi di Desa Wisata Panjalu. Menurut (UNCTAD, 2010) ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengedepankan kreativitas, ide, pengetahuan, teknologi, dalam pengembangan ekonomi terutama di bidang industri kreatif (Disbudpar Bandung, 2022). Sedangkan menurut (Purnomo, 2016) dalam (Sari *et al.*, 2020), Ekonomi Kreatif merupakan suatu konsep untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan kreativitas. Pariwisata adalah salah satu elemen pembangunan dari ekonomi kreatif.

Kini pariwisata menjadi kebutuhan masyarakat di antara kepenatan kehidupan berkarier yang padat (Cemporaningih *et al.*, 2020).

Geliat perkembangan wisata seiring dengan naiknya anemo masyarakat untuk *travelling* menjadikan potensi bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, “eksploitasi” potensi wisata alam belum berjalan sesuai dengan profesionalisme pengelolaan pariwisata yang menjadikan hal ini luput dari perhatian. Begitupun di Desa Panjalu, sebagai Desa Wisata yang telah ditetapkan sejak 2004, seharusnya perkembangan perekonomian berbasis pariwisata sudah berlangsung sejak lama dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar Situ Lengkong Panjalu.

Berkaitan dengan prinsip pengembangan ekonomi berbasis Desa Wisata Hijau, maka beberapa potensi yang dapat diberdayakan menurut aspek ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: Pertama, digelorkannya wisata budaya yang tercermin dari adanya Upacara Adat Nyangku yang terlaksana setiap tanggal 27 Bulan Maulud.

Upacara adat ini sudah berlangsung secara turun temurun, hingga kini bertahan dan disebut sebagai kearifan lokal. Bertalian dengan asas ekonomi kreatif, maka Upacara Adat Nyangku ini menjadi salah satu potensi seni pertunjukan yang harus dikembangkan. Mengingat daya tariknya hanya dapat berlangsung selama satu kali dalam satu tahun. Sehingga seharusnya dapat dibuat acara berbentuk festival yang membuat masyarakat tergerak secara bersama-sama membuat kontribusi dalam rangka memeriahkan festival tersebut.

Selain itu, kesakralan akan rangkaian upacara adat memang tidak dapat diubah. Akan tetapi jika ingin meraih hal yang menjual bagi wisatawan, maka harus ada kegiatan untuk mengkreasikan, mengembangkan, dan mempromosikan sebagai pokok gagasan pemberdayaan ekonomi kreatif. Dari hasil observasi penulis dan penelitian terdahulu oleh (Jauhari, 2018) ada beberapa rangkaian hiburan sebelum dan sesudah upacara adat Nyangku berlangsung. Sebelum Upacara Adat Nyangku berlangsung pada malam harinya didahului dengan pertunjukan tradisional yaitu Debus di alun-alun Panjalu.

Setelah Upacara Adat Nyanku selesai, diiringi juga dengan hiburan religi yaitu nyanyian *shalawat* bernama Gemyung pada malam hari sampai subuh tiba. Seni tradisional Gemyung ini berlangsung di Bumi Alit. Rangkaian hiburan ini bisa dikreasikan dengan menambah unsur seni tradisional lain yang masih lestari di Panjalu.

Terobosan baru yang dapat menjadi alternatif pilihan kreasi acara hiburan antara lain: Pentas Karinding, yaitu alat musik tradisional dari bambu yang cara memainkannya disentil oleh ujung telunjuk sambil di tempel di bibir yang dimainkan oleh anak-anak (Wikipedia, 2022). Lalu, Pentas Calung berupa permainan alat musik dari bambu hitam yang cara memainkannya dipukul secara berkelompok oleh remaja desa. Ada juga Pentas Bebegig, yaitu semacam manusia bertopeng berbalut ijuk yang menari sepanjang pentas musik calung berlangsung.

Pada Upacara Adat Nyangku penceritaan kembali tentang Maong Panjalu dan Legenda Prabu Borosngora selalu dibacakan guna mengingat leluhur dan petuahnya. Menurut Yayasan Prabu Borosngora (Jauhari, 2018) terkait dengan penceritaan legenda ini, sudah dimasukkan kepada muatan lokal di Sekolah Dasar sebagai upaya pembelajaran budi pekerti dengan kearifan lokal. Lantas, jika dikaitkan dengan sub sektor ekonomi kreatif, maka cerita ini dapat dikembangkan dalam bentuk audio visual (video). Penetrasi budaya dengan memanfaatkan teknologi perantara audio visual seperti film, video, dan animasi, diharapkan mampu membuat atensi publik lebih banyak terarah pada Upacara Adat Nyangku ini. Video tersebut kemudian dapat diunggah ke kanal media sosial Desa Wisata Panjalu sebagai langkah promosi yang paling murah dari segi pemasaran.

Harapan ke depannya dengan adanya kreasi di dalam Upacara Adat Nyangku yang melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai elemen usia, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Panjalu. Selain itu, dari segi penetrasi budaya menggunakan langkah kreatif dengan dikemas dalam bentuk film, video, atau animasi yaitu legenda atau cerita rakyat Prabu Borosngora dan Maong Panjalu diharapkan merambah pada seluruh masyarakat. Sehingga dapat membuat wisatawan lebih antusias untuk berkunjung ke Desa Wisata Panjalu.

Kedua, terkait wisata *heritage* di Desa Wisata Panjalu terdapat suatu bangunan untuk menyimpan benda-benda pusaka peninggalan Prabu Borosngora yang dinamakan “Bumi Alit”. Benda-benda *heritage* (cagar budaya) tersebut berupa Kujang, Bonang, Keris, dan Pedang dari Sayidina Ali, dll. Benda tersebut dibersihkan setahun sekali pada Upacara Adat Nyangku oleh Yayasan Borosngora. Seringkali wisatawan yang berkunjung ke Bumi Alit hanya untuk berwisata religi berkenaan dengan petilasan Prabu Borosngora tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari segi wisata berbasis cagar

budaya terkait dengan adanya benda-beda pusaka, maka dapat ditambahkan inovasi yang mengarah pada sejarah dari benda tersebut.

Sejarah dari benda-benda pusaka yang ada di Bumi Alit menarik untuk dikulik lebih lanjut bagi wisatawan. Apabila dari pihak pengelola memberikan kemudahan akses pengetahuan bagi mereka, maka tentu akan lebih baik lagi dalam implementasi Desa Wisata Hijau yang mengintegrasikan aspek kesadaran akan potensi sumber wisata dengan pelestarian untuk keberlangsungan ekonomi.

Penerapan teknologi *QR Code* dapat menjadi implemetasi kekinian terhadap kemudahan mendapatkan seluruh informasi, pengetahuan, dan sejarah dari hanya menggunakan sistem *scanner* yang terdapat pada *smartphone*. Seluruh informasi tersebut, juga memberikan keleluasaan bagi para wisatawan untuk mendapat percepatan daya tangkap dalam hal membagikan informasi yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Sehingga diharapkan Bumi Alit konsentrasinya tidak lagi hanya menjadi wisata religi tetapi juga merupakan ikon *heritage* (cagar budaya) di Desa Wisata Panjalu, Kabupaten Ciamis yang telah terintegrasi digitalisasi.

Selanjutnya, wisata alam sebagai basis dari tersiptanya Desa Wisata Hijau, sudah tentu memiliki pengaruh yang relevan dengan adanya program ekonomi kreatif. Desa Wisata Panjalu memiliki kenampakan yang sangat indah. Lereng pegunungan yang ditumbuhi pepohonan rindang membuat daerah Panjalu berhawa sejuk. Bentang alam pegunungan menjadi hamparan pemandangan yang menyegarkan mata wisatawan. Begitu pula Situ Lengkong yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan untuk berekreasi air.

Potensi wisata alam di Desa Wisata Panjalu apabila dikembangkan dengan daya kreativitas dan inovasi dapat membuat daya tarik baru bagi wisatawan. Misalnya, pemanfaatan Situ Lengkong sebagai pusat olahraga dan rekreasi Kayaking. Menurut Analisa (B. Firmansyah, 2020) telah ada wisata Kayaking yang dikembangkan oleh warga setempat. Tetapi minat wisatawan yang tertarik untuk Kayaking sangat rendah. Rata-rata pengunjung per hari hanya 15 sampai dengan 20 orang saja.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan promosi yang lebih gencar lagi, agar wisatawan banyak yang berkunjung untuk melakukan Kayaking. Apabila dilihat dari segi olahraga, maka program dari penggerak Desa Wisata Panjalu seharusnya melakukan langkah-langkah komperhensif untuk memajukan kayaking di Desa Wisata Panjalu ini. Sehingga dapat menjadi *Kayaking Centre* di Provinsi Jawa Barat. Pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan dan memberikan pemberdayaan ekonomi secara keberlanjutan bagi warga desa.

Potensi wisata alam yang indah di Desa Wisata Panjalu juga dapat mendukung aktivitas industri kuliner. Dapat diketahui dari (BPS Ciamis, 2020), yang terakumulasi dalam data BPS, Pendataan Potensin Desa (Podes) jumlah rumah makan/ restoran di Panjalu dari 2016-2019 perkembangannya stagnan yaitu hanya ada 16 rumah makan. Apabila dikaitkan dengan ekonomi kreatif, maka bisnis kuliner di Situ Panjalu seharusnya dapat menangkap peluang dari unsur *Place* (tempat atau lokasi bisnis) untuk meningkatkan citra pelaku bisnis (Universitas Ciputra, 2022). Kesesuaian antara tempat bisnis restoran/ rumah makan akan lebih baik jika dapat berkolaborasi dengan pemilik keramba apung yang terdapat di Situ Lengkong. Sehingga wisawatan dapat merasakan *Physical Evidence* (Tampilan Fisik) berkaitan dengan desain restoran/ rumah makan yang sensasinya dapat dirasakan oleh konsumen. Beberapa kegiatan yang dapat menjadi alternatif pengembangan kreativitas dan inovasi, antara lain: makan di atas keramba apung, mengolah hasil ikan tangkapan sendiri, dll.

Kemudian pemanfaatan lereng pegunungan di sekitar Situ Lengkong yang banyak jajaran pepohonan, maka dapat dikreasikan menjadi area mancakrida (*outbond*). *Outbond* merupakan pembelajaran di alam yang dirancang sedemikian rupa melalui berbagai permainan yang menantang dan mencerminkan pendekatan kepemimpinan (Cilenca Adventure, 2019). Beberapa fasilitas penunjang *outbond* yang dapat diimplementasikan di Desa Wisata Panjalu antara lain: Kayaking, *Flying Fox & High Rope*, Paralayang, dan *Paintball*. Sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Panjalu. Sejalan dengan dasar implementasi Desa Wisata Hijau, maka tidak ada paket *Offroad* seperti halnya di tempat wisata lain. Sebab, *Offroad* dengan mobil Jeep dapat menyebabkan polusi dan kontur tanah yang berlumpur dan bergelombang. Sehingga tidak termasuk dalam pondasi konsep pembangunan Desa Wisata Hijau yang beraskan pelestarian lingkungan dan ramah lingkungan.

Aspek akomodasi menjadi hal penting bagi wisatawan. Akomodasi disebut juga penginapan. Langkah progresif yang bisa diusahakan oleh Pengelola Desa Wisata Panjalu adalah dengan menggalakkan masyarakat desa untuk menyediakan jasa *villa* atau penginapan ala rumahan (*home stay*). Di sisi lain, masalah dari penginapan ini dapat diarahkan oleh Pengelola Desa Wisata dengan mencari mitra untuk bekerja sama berkaitan dengan inovasi fasilitas penginapan yang kekinian, inovatif, dan modern, seperti layanan Bobobox atau Bobocabin. Jasa akomodasi atau penginapan tersebut saat ini sedang melebarkan sayapnya di beberapa tempat wisata yang memiliki konsep (*close to nature*) penginapan yang dekat dengan alam. Jika dikaitkan dengan konsep Desa Wisata Hijau, maka penginapan yang dekat dengan alam ini cocok dengan kriteria yang mendorong masyarakat untuk mewujudkan konsep pembangunan ramah lingkungan.

Ada pula aktivitas transportasi yang menunjang mobilitas wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Panjalu jika diperhatikan hingga kini belum memenuhi kriteria ramah lingkungan. Untuk tetap menjaga kealamian lingkungan dan kelestarian budaya yang berlangsung di Desa Wisata Panjalu berdasarkan asas Desa Wisata Hijau, maka transportasi untuk menuju Situ Lengkong dapat dialihkan kepada alat transportasi tradisional yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat.

Transportasi wisatawan berupa kendaraan bermotor, seperti motor, mobil, dan bus dapat menimbulkan polusi udara di Desa Wisata Panjalu. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan aspek Desa Wisata Hijau yang berkonsep ramah terhadap lingkungan. Solusi dari adanya masalah polusi dari transportasi yang digunakan oleh wisatawan ini dapat dimanfaatkan peluangnya. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi jarak yang ditempuh jika wisatawan telah sampai ke Gerbang Desa Panjalu. Seluruh kendaraan bermotor harus berhenti di lokasi yang telah disediakan oleh Pengelola Desa Wisata Panjalu. Kemudian, apabila wisatawan ingin menyusuri Desa Wisata Panjalu, Situ Lengkong, dan Nusa Gede, dapat mengendarai delman.

Menurut (Hartono et al., 2022) Delman ialah alat transportasi tradisional yang ditarik dengan kuda dan dikemudikan oleh kusir. Delman dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik pariwisata di Desa Wisata Panjalu. Nantinya kusir dapat menjadi agen pariwisata di Desa Wisata Panjalu. Tentunya diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pengelola Desa Wisata Panjalu. Sehingga, Kusir Delman dapat menyarankan wisatawan untuk mengunjungi titik-titik yang menarik di sana.

Alternatif transportasi lain yang bisa disewakan kepada wisatawan saat menyusuri Desa Wisata Panjalu adalah Sepeda Gunung. Penyewaan sepeda ini diselenggarakan untuk meningkatkan animo wisatawan agar menyadari konsep wisata yang ramah lingkungan. Penyewaan sepeda dapat dikenakan tarif per jam atau per hari, sesuai dengan kebijakan pengelola. Pada akhirnya, konsep ramah lingkungan yang berkaitan dengan alat transportasi di Desa Wisata Panjalu, bukan hanya menimbulkan dampak positif terhadap alam. Tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga mendapat penghasilan dari atraksi tersebut.

Atas kompleksitas potensi wisata yang ada di Desa Wisata Panjalu baik dari segi alamiah, dan budaya, maka dapat dibuat suatu Wisata Edukasi yang mencakup kompleksitas tawaran wisata kepada sasaran wisatawan yang dituju. Biasanya wisata edukasi menasar pada komunitas dan pelajar sekolah yang masih memerlukan aktivitas pembelajaran terapan. Menurut (Rodger, 1998) dalam (Priyanto et al., 2018) wisata edukasi adalah konsep kolaborasi antara kegiatan wisata dan edukasi. Maksud dari program ini adalah untuk menciptakan tempat dalam menciptakan pengalaman pembelajaran secara langsung di lokasi wisata yang dikunjungi.

Tawaran wisata edukasi yang dapat diselenggarakan di Desa Wisata Panjalu meliputi *tutorial learning* kriya tempatan, eksplorasi Situ dan Desa Panjalu, wisata sejarah cagar budaya di Bumi Alit, *outbond* di lereng pegunungan Desa Wisata Panjalu, dll (*Tutorial Learning & Wisata Alam*). *Tutorial learning* kriya di Desa Wisata Panjalu dapat memanfaatkan kriya musik Karinding sebagai pembelajaran seni musik tradisional Sunda untuk wisatawan. Kemudian, eksplorasi Situ Panjalu dapat memanfaatkan kayaking untuk menyusuri danau. Bisa juga memberi makan di Situ, atau menangkap ikan di keramba dan mengolahnya untuk makan bersama kelompok, sambil menikmati suasana Situ Panjalu. Sedangkan untuk eksplorasi Desa Wisata Panjalu dapat menggunakan Delman dan sepeda sewa yang disewakan oleh Pengelola Desa Wisata Panjalu. Wisata sejarah cagar budaya (*heritage*) di Bumi Alit dapat memberdayakan beberapa warga yang dilatih untuk menjadi pemandu wisata.

Tugas dari pemandu wisata ini adalah untuk menjelaskan informasi sejarah yang berkaitan dengan benda-benda cagar budaya serta sejarah Desa Panjalu dari masa ke masa. Selain informasi sejarah, salah satu hal yang menarik untuk diketahui oleh wisatawan adalah tentang legenda asli di Desa Panjalu. Biasanya semua hal yang dirasakan di sana dan cerita didapat setelah melaksanakan eduwisata adalah cerita unik sebagai oleh-oleh bermanfaat dari lokasi tersebut. Sebagai wahana pelepas penat di alam dan sarana pembelajaran kepemimpinan, maka wisata *outbond* di lereng pegunungan dapat menjadi paket eduwisata di Desa Wisata Panjalu. Untuk merealisasikan konsep eduwisata ini, tentu tak lepas dari peran masyarakat Desa Wisata Panjalu.

Masyarakat Desa Wisata Panjalu adalah sumber daya pokok untuk merealisasikan konsep Desa Wisata Hijau, sehingga nantinya bisa menyokong kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Berbagai potensi wisata yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa harus ada kesadaran masyarakat Desa Panjalu untuk mengelola potensi dengan bijak dan berkelanjutan seiring dengan ekonomi kreatif yang berbasis pada konsep Desa Wisata Hijau. Pola pikir masyarakat Desa Panjalu yang nota bene mayoritas berpendidikan rendah dan berkeyakinan teguh pada pakem adat dan budaya menyebabkan yang pola pikir yang pasrah kepada kehendak alam. Jadi setelah pengeksploitasian hanya menunggu alam agar pulih seperti sedia kala, hingga dapat didayagunakan kembali.

Pola pikir tersebut harus diubah seiring berkembangnya zaman. Potensi alam dan budaya Desa Panjalu sangat baik kebermanfaatannya jika dikelola berdasarkan kesadaran masyarakat setempat. Untuk membangun potensi tersebut akan lebih baik jika dibentuk Kelompok Sadar Wisata "Pokdarwis". Kelompok ini dapat terselenggara berdasarkan *Community Based Tourism (CBT)*. Menurut (Purmanda, Dimas Kurnia et al., 2016) *Community Based Tourism* atau Komunitas yang berdasar pada pariwisata adalah konsep tata kelola pariwisata dengan mengarahkan pada partisipasi aktif masyarakat setempat, yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan terhadap mereka dengan senantiasa menjaga kualitas lingkungan, serta berupaya memproteksi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep *CBT* ini sejalan dengan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) Desa Wisata Hijau yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakatnya.

Penerapan *CBT* berkonsep Pokdarwis ini, dapat mengacu pada beberapa aktivitas, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, mengikutsertakan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata. Keikutsertaan anggota komunitas atau masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Desa Panjalu dapat dibagi kedalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Seperti: Jika seseorang adalah pemangku adat yang mengerti secara mendalam tentang sejarah dan informasi kebudayaan Desa Panjalu, maka dapat dialokasikan sebagai narasumber wisata.

Kedua, pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah aspek penting dalam pokok Desa Wisata Hijau. Apabila hal ini dikaitkan dengan konsep *CBT*, maka dapat dibuat kelompok yang berkonsentrasi pada kebersihan lingkungan, pelestarian tanaman hias, dan pembudidayaan flora fauna tempatan.

Ketiga, pelestarian budaya. Aspek pelestarian budaya, dalam implementasi *CBT* berdasarkan Pokdarwis dapat dilakukan dengan menggiatkan komunitas budaya setempat dalam Upacara Adat Nyanguku. Kemudian, dengan adanya Yayasan Borosngora hendaknya dapat mengarahkan masyarakat untuk sadar akan potensi wisata dan terlibat secara aktif dalam berbagai rangkaian adat tersebut.

Keempat, pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan masyarakat yang mengacu pada Pokdarwis, dapat diupayakan berdasarkan keahlian warga dalam berkreasi untuk membuat produk UMKM. Produk yang dapat menjadi oleh-oleh wisatawan bisa dalam bentuk kriya dan kuliner khas daerah Panjalu. Hal tersebut harus dikelompokkan dan diberdayakan melalui *co-working space* (ruang kerja sama) yang produktif. Sehingga dapat memberikan pendapatan masyarakat yang mumpuni dan merata. Merata dalam arti setiap warga Desa Wisata Panjalu dapat memperoleh pendapatan di setiap lini pariwisata yang dikembangkan.

Konklusi

Desa Wisata Panjalu, memiliki potensi menjadi *Green Tourism Village* (Desa Wisata Hijau). Di sana terdapat Situ Lengkong sebagai salah satu potensi wisata di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang menyuguhkan keindahan alam dan juga budayanya. Situ ini terkenal oleh wisatawan karena kecantikan lembah dan adanya danau kecil yang di tengahnya terdapat daratan sedimen (semacam pulau kecil) bernama Nusa Gede. Serta dari segi budaya terdapat wisata religi

berupa ziarah kepada Sanghyang Borosngora, yaitu pemuka agama Islam di Panjalu, yang terletak di Nusa Gede. Ada pula upacara adat setiap bulan Maulud tiba, yaitu upacara adat Nyangku.

Akan tetapi, hingga kini karena kurang pesatnya laju inovasi untuk memberdayakan potensi Desa Wisata Panjalu menyebabkan Desa Wisata ini kurang terkenal dan belum berkembang. Di sisi lain, pengaruh dari masyarakat Desa Panjalu yang mayoritas berpendidikan rendah serta sangat mematuhi adat istiadat, menyebabkan pola pikir masyarakatnya terbatas untuk berkreasi dan berinovasi. Pola pikir ini mengarah kepada *Greedy Tourism* yang merugikan masyarakat desa nantinya. Solusi dari hal ini adalah dengan mencanangkan konsep Desa Wisata Hijau yang memberdayakan komunitas lokal dengan produk utamanya mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan alam, ekonomi, dan sosial budaya setempat. Serta melalui usaha ekonomi kreatif, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan.

Atas dasar konsep Desa Wisata Hijau tersebut ada beberapa rancangan yang bisa diselenggarakan di Desa Wisata Panjalu, antara lain: Digelorakannya wisata budaya yang tercermin dari adanya Upacara Adat Nyangku, dan sebagai langkah inovatifnya adalah mengemasnya dalam bentuk audio visual agar penetrasi cerita legenda yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah di terima di masyarakat. Selanjutnya, wisata *heritage* Bumi Alit yang informasinya dapat diakses wisatawan melalui *QR Code*. Lalu, wisata alam Situ Lengkong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wahana *outbound* dan tempat penginapan kekinian, serta restoran apung.

Selain itu, untuk menambah atraksi dan mengurangi polusi udara di sana, alat transportasi yang digunakan adalah Delman dan sepeda. Yang terakhir adalah wisata edukasi, yang menggabungkan *tutorial learning* dan wisata alam di Desa Panjalu. Semua hal terkait rencana inovasi Desa Wisata Hijau Panjalu tersebut dapat terlaksana dengan mengupayakan *Community Based Tourism* berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengarahkan pada partisipasi aktif masyarakat setempat, dan bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan melalui penerapan ekonomi kreatif. Hingga pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat.*

Referensi

- B. Firmansyah, A. (2020, November 20). *Ekonomi dan Pariwisata Kecamatan Panjalu*. Analisa Global.
- BPS Ciamis. (2020). *Kecamatan Panjalu Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- Cemporaningsih, E., Titi, D., Raharja, & Damanik, J. (2020). Ekonomi Kreatif Sebagai Poros Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 106–125.
- Cilenca Adventure. (2019, October 6). *Outbond atau Outbound*. Team Building, Wisata Bandung.
- Desa Panjalu. (2022). *Sistem Informasi Desa Panjalu*. Sistem Informasi Desa Panjalu.
- Disbudpar Bandung. (2022). *Modul Pembelajaran: Program Aktivasi Coworking Space Kota Bandung 2022* (1st ed., Vol. 1). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Hartono, I. B., Ratnasari, D. N., Akbar, R., & Purnama, S. J. (2022). Delman dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 7(1), 45–58.
- Jauhari, H. (2018). Makna dan Fungsi Upacara Adat Nyangku Bagi Masyarakat Panjalu. *Jurnal Peradaban Islam: Al-Tsaqafa*, 197–210.
- Kementerian Pariwisata. (2017). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau* (C. Novianti, Ed.; 2nd ed.). Asisten Deputi Urusan Ketenagalistikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Mutakin, K. (2020, December 21). *Panjalu dalam Wisata "Beautiful Valley"; Dari Situ Lengkong Sampai Cikobis*. Kompasiana.
- Priyanto, R., Syarifuddin, D., & Martina, S. (2018). Perancangan Model Wisata Edukasi di Objek Wisata Kampung Tulip. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32–38.
- Purmanda. Dimas Kurnia, Wilopo, & Luchman Hakim. (2016). PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2).

- Sari, A. P., Pelu, M. F. A., Dewi, I. K., Ismail, M., Siregar, R. T., Mistriani, N., Marif, E. L., Felipus, M., Purba, B., Lifchatullaillah, E., Feriniam Rolyana, & Sudarmanto, E. (2020). *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Universitas Ciputra. (2022). *Bauran Pemasaran 7P Sebagai Bagian Strategi Manajemen Bisnis*. Universitas Ciputra.
- UNKRIS. (2022). *Situ Lengkong*. Edunitas P2K UNKRIS.
- UU No. 10. (2010). *Undang Undang (UU) tentang Kepariwisataaan No. 10* (Patent No. LN. 2009/ No. 11, TLN No. 4966, LL SETNEG). Pemerintah Republik Indonesia.
- Wikipedia. (2022, December 27). *Karinding*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.
- Wulanzani, D. T. (2022). Potensi Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Situ Lengkong. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 470–478.

PRETY DIAWATI adalah dosen tetap di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Lahir dan berdomisili di kota Bandung. Penulis menamatkan studi jenjang Sarjana Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran, Pasca sarjana Manajemen Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dan Program Doktor Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran. Sebelum bekerier di dunia pendidikan, penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta dan terakhir di PT Bank Danamon Indonesia dan menjadi wirausaha. Di sela kesibukan mengajar dan penelitian, juga aktif dalam penulisan beberapa karya ilmiah, antara lain buku, HaKI, prosiding, serta jurnal nasional dan internasional.

Strategi Kuliner Nusantara Merambah Pasar ASEAN

Mustika Dewi

Rempah Nusantara

Sebagai salah satu negara di Asia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada sang pencipta. Dengan kekayaan alam yang berlimpah tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang berkualitas. Beberapa daerah penghasil rempah di Indonesia adalah Jambi dengan kulit manis (*Casia Vera*), Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.

Rempah-rempah nusantara yang beraneka ragam, selain mempunyai nilai ekonomis dan nilai ekologis yang tinggi, rempah-rempah ini juga berkhasiat ssebagai obatan-obatan herbal, serta menjadi bumbu utama atau bumbu dasar dalam kuliner tradisional kita. Hal inilah yang menyebabkan dan memengaruhi cita rasa kuliner Nusantara. Pada umumnya kuliner Nusantara hampir semuanya menggunakan rempah-rempah yang aromatik, sebagai bumbu dasar, antara lain Jahe (*Zinger Ofisinale*), Kunyit (*Curcuma Longa*), Lengkuas (*Alfinia Golanga*), Ketumbar (*Coriandrum Satium*), Lada (*Piper Nigrum*), Kapulaga (*Elektronia Cardomamum*), Pala (*Myrestica Pragren Huut*), dan Cengkeh (*Syzygium Arommaticum*) (*wikipedia.co.id*).

Beberapa daerah di Indonesia yang kulinernya kaya akan cita rasa rempah nusantara antara lain, Rendang dari sumatra Barat, Bakso, Ayam bakar Taliwang dari Lombok, Soto Banjar, Pempek dari Palembang, Gado-gado, Nasi uduk, Martabak, Rawon Jawa Timur, Coto Makassar, Ayam goreng kalasan, Soto Betawi, Nasi minyak Jambi, Laksa, Sate padang, Mie Aceh, Sate madura, Batagor, Ayam Betutu dan masih banyak lagi kuliner lainnya.

Sebagai salah satu kuliner khas Sumatra Barat, di Indonesia rendang sangatlah populer, hampir di setiap kota di Indonesia banyak rumah makan yang menjual menu rendang, begitu juga di acara-acara pesta pernikahan di wilayah Sumatra, seolah-olah rendang menjadi menu wajib. Selain di Indonesia, rendang juga menjadi kuliner Nusantara yang sudah tidak asing lagi di lidah wisatawan mancanegara, begitu juga dengan sate dan nasi goreng, gado-gado, Bakso (*superapps.kompas.com*).

Beberapa kuliner nusantara yang juga digemari di negara Asean lainnya Laksa yang sangat populer di Malaysia dan Singapura, dengan kuah karinya yang kaya akan rempah, pedas dan *creamy*. Sate Indonesia juga menjadi hidangan yang juga banyak sukai oleh wisatawan mancanegara. Pada dasarnya ada berbagai macam kuliner nusantara yang sudah dikenal di negara ASEAN lainnya, akan tetapi kuliner kita belum bisa membuat Restoran khusus seperti Shabu-shabu, dan contohnya juga Thai tea. Thai tea sudah merambah di berbagi sudut kota negara kita, bahkan sudah menjamur mulai dari Mall sampai kaki lima.

Kita berharap bagaimana nantinya kuliner-kuliner Nusantara yang sudah dikenal di kawasan ASEAN bisa membuka restoran atau rumah makan yang khas Indonesia. Misalnya, Bakso, Pempek bisa menjadi kuliner tradisional yang bisa jadi menu favorit semua kalangan, mulai dari yang tua sampai anak-anak di seluruh kawasan ASEAN.

Faktor Penghambat Berkembangnya Kuliner Indonesia di ASEAN

Pada dasarnya, kuliner Nusantara yang kaya akan rempah dan bumbu sangat digemari wisatawan mancanegara, banyak peluang usaha yang bisa dilakukan oleh pengusaha kuliner Tradisional Indonesia untuk membuka gerai di kawasan negara ASEAN. Akan tetapi kendala yang banyak ditemukan di luar negeri.

Menurut APJI (Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia), kita kekurangan bahan baku, harga bahan baku, atau rempah-rempah kita sangat mahal di luar negeri. Seperti pengalaman salah satu sahabat saya yang melanjutkan

studi S3 ke Australia, ketika ingin memasak ayam bumbu lengkuas, harga lengkuas perkilogramnya berkisar antara 10 sampai dengan 12 USD.

Kuliner Indonesia seperti rendang, dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, dan harus teliti dan harus punya keahlian (*skill*) tersendiri dalam pengolahannya, walaupun harus belajar, memasak rendang harus membutuhkan waktu yang lama. Di Indonesia sering kita dengar "beda tangan beda rasa" karena akan berpengaruh terhadap kualitas, dan hasil akhir dari masakannya.

Begitu juga misalnya dengan rawon yang menggunakan bumbu khusus yaitu Kluwak, tidak ada takaran pasti untuk memasak satu kilogram rawon berapa kluwak yang harus dibutuhkan, kualitas kluwak yang kita gunakan juga mempengaruhi rasa dari rawon itu pun demikian dengan kuliner lain seperti pempek di luar negeri. Gula aren sangat sulit ditemui, karena dalam cuca pempek bahan dasar utamanya adalah gula aren dan asam jawa, yang tidak bisa digantikan dengan bahan baku lain.

Kuliner Indonesia yang punya peluang besar untuk membuka gerai-gerai di negara ASEAN lain adalah bakso dengan bahan utama daging sapi, atau bisa digantikan dengan daging ayam. Bisa juga ingin membuat bakso Seafood, seperti udang atau ikan, akan tetapi tidak semua ikan bisa dijadikan bahan dasar Bakso.

Beberapa kuliner negara-negara ASEAN yang sudah terkenal adalah, Rendang dari Indonesia yang menduduki urutan pertama, disusul nasi lemak dari Malaysia, Mie laksa dari Singapura, Ambayat dari Brunai, Tom Yum Thailand, Adoba Philipina, Amok kamboja, lah pet dari Myanmar. Pha dari Vietnam. Dari semua kuliner yang telah disebutkan di atas, rendang merupakan kuliner Indonesia yang proses penyajiannya membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti Tom Yum, nasi lemak, Pad Thai (Thailand), yang bahan baku dan bumbunya sangat sederhana, dan mudah ditemukan di Indonesia.

Strategi Pengembangan Kuliner Tradisional

Sebagaimana yang telah kita bahas mengenai kuliner Nusantara dapat kita simpulkan bahwa, yang pertama pada dasarnya kuliner nusantara banyak digemari oleh masyarakat ASEAN. Kuliner Nusantara banyak menggunakan rempah-rempah yang membuat cita rasa kuliner Nusantara lebih aromatik dan menggugah selera. Akan tetapi ada beberapa tantangan di dalam mengembangkan ke pasar ASEAN, yaitu ketersediaan bahan baku, dalam hal ini bumbu dan rempah asli yang sulit didapatkan di negara Asia lain, segi pengolahan diperlukan *skill* dan keahlian khusus, misalnya dalam membuat rendang membutuhkan waktu yang lama.

Agar kuliner nusantara dapat lebih dikenal dan bisa merambah pasar-pasar dan menarik perhatian pencinta kuliner di kawasan ASEAN. Pertama setiap kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan pemerintah Indonesia wajib menyajikan kuliner tradisional Nusantara, mulai dari makanan utama sampai makanan penutup. Kedua perlu adanya kerja sama dari kedutaan-kedutaan Indonesia yang berada di kawasan ASEAN untuk ikut serta mempromosikan kuliner kita pada kegiatan resmi di kedutaan.

Ketiga, perlu adanya promosi dengan mengadakan "Festival Kuliner Tradisional Nusantara" secara berkesinambungan di seluruh negara ASEAN. Serta melibatkan UMKM yang bergerak di bidang kuliner untuk ikut ambil bagian dalam festival tersebut, untuk itu diperlukan juga kalender tetap dalam setiap tahun yang dirancang oleh beberapa kementerian. Misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, dengan melibatkan kepala daerah dan pihak swasta.

Keempat, Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara ASEAN lain perlu di bekali dengan pengetahuan mengenai kuliner tradisional nusantara, agar mereka bisa lebih memahami kuliner tradisional dan bisa menjadi *influencer kuliner*. Kelima, Pemerintah harus berkerjasama dengan pihak-pihak terkait agar pengusaha kuliner yang ingin membuka usahanya di negara-negara kawasan ASEAN harus mendapatkan dukungan dan kemudahan dalam proses pengiriman bahan baku, terutama untuk bumbu dan rempah yang sulit di dapatkan di negara ASEAN yang lain. Pemerintah juga harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha kuliner tradisional agar mereka dapat dengan mudah mengembangkan dan memasarkan produk kuliner ke pasar ASEAN.

Selain kegiatan di atas, pengusaha kuliner juga harus memikirkan dan membuat inovasi kekinian, misalnya bagaimana caranya agar berbagai macam kuliner tradisional bisa di buat lebih menarik, baik dari bentuk, rasa, dan penyajiannya. Inovasi produk juga harus dilakukan untuk lebih memudahkan para pencinta kuliner. Ada beberapa

kuliner tradisional kita yang bisa dijadikan *frozen food*, antara lain rendang, dendeng, pempek, tekwan, Bakso, Rawon, Batagor. Dengan inovasi produk dan dikemas dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan, maka besar kemungkinan kuliner tradisional tersebut bisa diekspor ke negara ASEAN dan negara lainnya. Sehingga masyarakat di negara Asia lain dapat menikmati dan menyajikan makanan tersebut dari dapur mereka, seperti halnya mie Instan yang dapat dinikmati hanya lam dalam hitungan menit.

Proses pendampingan dalam pengembangan produk juga sangat diperlukan, agar memenuhi standar ekspor. Untuk produk makanan standarisasinya berbeda-beda, akan tetapi yang paling utama adalah tidak terkontaminasi mikrobiologi, pengemasan, pelabelan, enzim, dan perasa. Standar wajib ini harus dipenuhi oleh para pengusaha di bidang kuliner yang akan melakukan kegiatan Ekspor produknya, sebaiknya mengacu kepada standar *Coldex Amantius Comission* (CAC) yang diterbitkan oleh lembaga FAO, hal ini harus dilakukan agar kualitas produk dapat terjaga dengan baik, dan sesuai dengan standar baku sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasar ASEAN.*

Referensi

Titik-titik Jalur Rempah

<https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/tentang-jalur#:~:text=Jalur%20Rempah%20mencakup%20berbagai%20lntasan,suatu%20lntasan%20peradaban%20yang%20berkelanjutan.> (diunduh pada 26 November 2022).

Wikipedia Pala

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pala> (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Kapulaga Seberang

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kapulaga__seberang (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Cengkih

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cengkih> (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Jahe

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jahe> (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Kunyit

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kunyit> (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Lengkuas

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lengkuas> (diunduh pada 28 November 2022).

Wikipedia Ketumbar

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ketumbar> (diunduh pada 28 November 2022).

MUSTIKA DEWI adalah ibu rumah tangga yang memiliki satu anak laki-laki yang sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Antropologi Sosial di Universitas Diponegoro, Semarang dan satu anak perempuan yang saat ini SMA kelas X di kota Jambi. Suaminya bernama Seno, seorang pengusaha kuliner online yaitu "Kuliner DJava Borneo. Mustika juga aktif mengajar di Taman Pendidikan Qur'an Sabilil Huda, kota Jambi.

Peranan Penting Indonesia Bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di ASEAN

Azman Ridha Zain

Pendahuluan

Istilah ekonomi kreatif mulai menjadi pembicaraan di kalangan ekonom dunia sejak tahun 1960an. Tetapi istilah ekonomi kreatif tersebut dan publikasinya lebih dikenal secara massif di seluruh dunia sejak digaungkannya istilah tersebut oleh John Howkins tahun 2001 ditandai dengan terbitnya buku karangannya yang cukup fenomenal *The Creative Economy: How people make money from ideas*. Pemerintah telah menetapkan bahwa saat ini terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia yakni kuliner, fesyen, kriya, arsitektur, desain produk, desain interior, musik, seni rupa, periklanan, penerbitan, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, aplikasi, pengembang permainan, TV dan Radio, dan seni pertunjukan.

ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang memainkan peran yang sangat strategis dalam percaturan ekonomi global. Terdapat banyak sekali sumber komoditi utama dunia yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di kawasan ASEAN. Demikian juga Sumber Daya Manusia (SDM) negara-negara ASEAN yang produktif dan kreatif merupakan aset luar biasa yang akan dapat berperan penting dalam membawa ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di masa mendatang.

Menyadari anugerah dan potensi tersebut di atas Pemerintah maupun pengamat ekonomi di negara-negara ASEAN dalam berbagai *statement* maupun kebijakan yang diambil optimis terhadap kondisi dan outlook perekonomian di kawasan ASEAN. Hal tersebut berdasar pada fakta yang tak terbantahkan bahwa PDB dari 10 negara ASEAN di tahun 2021 yang mencapai USD 3,36 triliun dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Capaian tersebut memberi harapan yang mencerahkan sekaligus sejalan dengan visi ASEAN untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2030.

Sebagai negara terbesar di ASEAN Indonesia menyadari peran pentingnya untuk menjadi *Key Factor* bagi kebangkitan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut. Terdapat berbagai upaya dan program yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk tercapainya tujuan tersebut. Perhatian yang paling utama terkait hal ini adalah dalam hal pemberdayaan UMKM serta peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif maka pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN akan dapat lebih cepat terwujud.

Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif. Ditandai dengan adanya berbagai peraturan yang terkait dengan penguatan Ekonomi Kreatif. Diantaranya adalah Instruksi presiden No 9 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Industri, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011, Peraturan Menteri Nomor 7 dan Nomor 35 tahun 2012, Rencana Strategis (Renstra) Kemendag 2010-2014, Pemetaan Ekonomi Kreatif Indonesia 2014, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2015-2019, Rencana Pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif Nasional, Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lain sebagainya.

Di tingkat ASEAN Ekonomi Kreatif juga mendapatkan perhatian yang cukup penting. Blueprint Ekonomi ASEAN menjabarkan dengan jelas tentang penguatan ekonomi kreatif di tingkat ASEAN, Dalam Kerangka Kerja Strategi Integrasi Ekonomi ASEAN pembahasan mengenai ekonomi kreatif juga mendapat perhatian yang cukup besar. Demikian juga

dalam Rencana Aksi Intellectual Property Right (IPR), konten perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif yang dibahas secara terperinci.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, implementasi penguatan ekonomi kreatif tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Di Indonesia masih terdapat beragam kendala dan tantangan sehingga perkembangan industri kreatif belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dari 17 bidang ekonomi kreatif yang ada pengusaha UMKM belum benar-benar dapat mengembangkannya untuk mendapatkan nilai ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Kondisi yang sama juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut dan mengingat peran strategis Indonesia yang akan memegang estafeta presidensi ASEAN tahun 2023, menarik kiranya untuk melihat sejauh mana peran pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam mendorong peningkatan penguatan ekonomi kreatif dan UMKM ASEAN? Menarik juga untuk diketahui mengenai ide-ide pemikiran solutif untuk mendorong penguatan peran UMKM dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui sejauhmana koordinasi dan kolaborasi *stake holder* terkait di negara-negara ASEAN dapat diwujudkan untuk mendorong perkembangan dan sinergitas penguatan ekonomi kreatif di ASEAN.

Prospek Masa Depan Ekonomi ASEAN

Sebelum memotret potensi kerja sama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi kreatif, dan menghadapi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, perlu kiranya melihat data pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yang kuartal III tahun 2022 yang mencerminkan perkembangan ekonomi terkini negara-negara ASEAN. Departement of Statistics Malaysia (DSM) melaporkan ekonomi Malaysia tumbuh 14,2% pada kuartal III 2022 dibanding kuartal III 2021 (YEAR ON YEAR/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 8,9% (yoy).

Dengan capaian ini, Negeri Jiran memimpin pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Di bawah Malaysia, ekonomi Vietnam pada kuartal III 2022 tumbuh 13,67% (yoy). Diikuti ekonomi Filipina tumbuh 7,6% (yoy). Adapun ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72% (yoy) dan ekonomi Singapura tumbuh 4,4% (yoy). Negara lainnya seperti Thailand perekonomiannya hanya tumbuh 2,5% (yoy) pada triwulan II 2022, sedangkan ekonomi Brunei Darussalam mengalami kontraksi sedalam 4,4% (yoy). Ekonomi Laos dan Kamboja masing-masing tumbuh sebesar 3,5 dan sebesar 3% pada 2021. Sedangkan, ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sedalam 18% pada 2021.

Informasi di atas dapat dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap perkiraan yang disampaikan oleh *Director & Chief Investment Officer Fixed Income* Ezra Nazula, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) pada Desember 2021 bahwa tahun 2022 akan menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Diperkirakan bahwa ASEAN-5, yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB sebesar 5,8% di 2022, melampaui pertumbuhan PDB negara maju (4,5%), negara berkembang di Eropa (3,6%), dan Amerika Latin (3,0%).

Dalam keyataannya perkiraan tersebut tidak jauh meleset dan dapat dibuktikan bahwa ekonomi negara-negara kuat di ASEAN tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan semakin cerah yang tercermin dari berbagai *leading indicators*, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus berada di level optimis. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga semakin bergeliat dan tergambar dari level Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia pada September 2022 yang kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan beruntun dengan berada di tingkat 51,8. Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand (51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7), dan Myanmar (45,7).

Berdasarkan potensi pertumbuhan yang positif dari negara-negara ASEAN tersebut terdapat indikasi kuat bahwa pengusaha-pengusaha ASEAN berpeluang besar untuk dapat memanfaatkan kerja sama antara negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sekaligus meningkatkan perekonomian ASEAN dalam percaturan ekonomi global.

Penguatan Implementasi Ekonomi Kreatif di ASEAN

Bidang ekonomi kreatif termasuk salah satu bidang yang paling menarik dan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen presiden Indonesia yang dalam banyak kesempatan menyebutkan tentang peran penting ekonomi kreatif, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam suatu acara Temu Kreatif Nasional, Selasa (4/8/2022) di Tangerang Selatan, Banten, “Kita perlu melakukan lompatan dari perekonomian yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam dan pertanian, industri, teknologi informasi menjadi perekonomian yang digerakkan oleh industri kreatif.”

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. Terbukti misalnya, tercatat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sekitar 5,76%. Artinya berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa dan industri pengolahan.

Keyakinan akan masa depan sektor ekonomi kreatif inilah yang mendorong Presiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang diharapkan berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Sejalan dengan amanat yang disampaikan Presiden Indonesia tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar forum diskusi internasional Global Center of Excellence for International Cooperation and Creative Economy (G-CINEC) pada 20-21 November 2020. Kegiatan ini mengajak para pelaku ekonomi kreatif produktif dari rumah.

Kemenparekraf menekankan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang bernilai tinggi, negara-negara ASEAN perlu membuat suatu pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif di bawah ASEAN Economic Community di 2015. Dalam rangkaian kegiatan tersebut G-CINEC melakukan penelitian model dan karakteristik industri kreatif dari lima kota di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN. Temuan dari penelitian tersebut disuguhkan dalam bentuk sebuah buku yaitu “Modelling A Healthy Creative Scene” yang diluncurkan pada Forum Diskusi Internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penguatan pondasi dan pilar ekonomi kreatif (tahun 2009-2014), dan tahap akselerasi ekonomi kreatif (2015-2025). Sasaran Ekonomi Kreatif yang hendak dicapai hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut: (kontribusi PDB industri kreatif mencapai 9-11% PDB nasional dengan syarat pertumbuhan rata-rata 9-11%; (kontribusi ekspor industri kreatif mencapai 12-13% ekspor nasional, dengan syarat pertumbuhan rata-rata 10-12%; (3) kontribusi tenaga kerja industri kreatif mencapai 9-11% tenaga kerja nasional; (4) Jumlah perusahaan industri kreatif meningkat 3-4 kali Jumlah perusahaan industri kreatif tahun 2006; (5) melanjutkan dukungan terhadap laju deforestasi berdasarkan kesepakatan baru pasca Kyoto 2012; (6) mempertahankan pertumbuhan paten domestik terdaftar sebesar 4%; (7) Mempertahankan domestik san hak cipta domestik terdaftar sebesar 38,94%; (8) Mempertahankan pertumbuhan merk domestik terdaftar sebesar 6%; (9) Mempertahankan pertumbuhan desain industri domestik terdaftar sebesar 39,7%; (10) menumbuhkembangkan 7 kawasan industri kreatif potensial di wilayah Indonesia (1 kawasan per tahun); (11) Menciptakan 325 merk lokal baru yang sudah ada, yang terpercaya dan telah secara legal terdaftar di dirjen HKI di Indonesia dan juga di kantor paten negara tujuan ekspor.

Sasaran jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif nasional sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Insan kreatif dengan pola pikir dan moodset kreatif; (2) Industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal; (3) Teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia; (4) Pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif; (5) Masyarakat yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengkonsumsi produk kreatif lokal; (6) Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik.

Adapun untuk tingkat ASEAN, setiap negara memiliki kebijakan untuk memperkuat ekonomi kreatif di negaranya masing-masing. Untuk itu perlu dirumuskan sebuah kebijakan di tingkat ASEAN yang akan diberlakukan di setiap negara dan dapat dianalisa secara terukur dan secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi kontribusi ASEAN terhadap penguatan ekonomi kreatif di tingkat ASEAN. Terkait hal ini Kamboja, yang mendapatkan Amanah sebagai Chairs di tingkat Menteri yang bertanggung jawab terhadap budaya dan seni, telah mengambil inisiatif untuk mengajukan

pendirian ASEAN Center for Culture and Creative Industries (ACCCI). Tujuan pengajuan proposal di bidang ini adalah sebagaimana berikut ini:

Mendorong pengembangan penelitian dan inovasi untuk memajukan budaya dan industri kreatif di seluruh negara anggota ASEAN. Membangun data base regional sebaagai hub bagi penguatan bidang budaya dan industri kreatif. Mendorong kerja sama antar sesama negara anggota ASEAN di bidang budaya dan industri kreatif maupun dengan dialog partner, Mendukung dan saling berbagai informasi mengenai kebijakan inovatif, dan *best practice* di bidang budaya dan seni diantara sesama anggota ASEAN dan di negara patner dialog ASEAN,

Membangun kapasitas dan keterampilan serta perencanaan bisnis, penjualan, pengetahuan di bidang pilihan skema keuangan yang dapat meningkatkan kemanfaatan yang diperoleh dalam bidang kebudayaan dan industri kreatif, membangun jejaring/kemitraan diantara sesama anggota ASEAN di bidang budaya dan industri kreatif, memperkuat kesadaran tentang identitas sebagai negara ASEAN.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak tantangan dan kendala dalam menyelaraskan seluruh subsector ekonomi kreatif yang ada dengan beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah *overlapping* peraturan dan institusi yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini menghambat pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Misalnya Apakah penanganan ekonomi kreatif berada di bawah koordinasi pemerintah pusat atau di bawah koordinasi pemerintah daerah, sejauhmana peran dan otoritas pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan bagaimana koordinasi yang dilakukan.

Kendala lainnya adalah perbedaan perspektif dan penerapan pengembangan ekonomi kreatif antar berbagai *stakeholder* terkait, baik dari kalangan pemerintah, entitas bisnis, individu masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan komunitas masyarakat. Meskipun Blueprint Ekonomi Kreatif sedikit banyaknya sudah mampu menjawab permasalahan di atas, namun masih terdapat sedikit kelemahan terkait dengan kurang jelasnya informasi dan penerapan mengenai Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK).

Untuk menjembatani koordinasi dan integrasi ASEAN di bidang pengembangan ekonomi kreatif, ASEAN telah memiliki konsep pemikiran yang lebih komprehensif dan diharapkan dapat lebih mempercepat terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang dapat membawa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan ASEAN, yaitu dengan menguatkan fokus utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi gap pembangunan serta meningkatkan konektivitas diantara negara-negara ASEAN. Konektivitas di antara sesama negara ASEAN tersebut telah diatur melalui Master Plan Konektivitas ASEAN yang merupakan implementasi dari interrelasi di dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

Interrelasi antara Blue Print ASEAN Economic Community dan Master Plan Konektivitas ASEAN adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, untuk memfasilitasi Aglomerasi Ekonomi (pengelompokan atau pemusatan beberapa perusahaan dalam suatu daerah sehingga membentuk daerah khusus industri) dan integrasi jaringan produksi, termasuk dalam hal ini meningkatkan perdagangan intraregional yang di dalamnya mencakup pengembangan ekonomi kreatif.

Terdapat tiga pilar yang perlu diperkuat ASEAN untuk mewujudkan integrasi pengembangan ekonomi kreatif di antara negara-negara ASEAN, yaitu *people to people connectivity* (konektivitas orang ke orang), *physical connectivity* (konektivitas fisik), dan, *institutional connectivity* (konektivitas institusional). Tiga pilar ini akan memudahkan terwujudnya mobilisasi unsur-unsur terkait agar implementasi aturan standar yang menjadi acuan dapat diterapkan untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif di ASEAN:

1. *People to people connectivity* (konektivitas orang ke orang) menghubungkan orang di Kawasan ASEAN, khususnya orang yang membuat kreasi, bekerja dan mengembangkan bidang ekonomi kreatif. Salah satu fokus utama di bidang ini adalah sektor budaya karena memiliki keterkaitan yang akan mempromosikan dan mendukung penguatan ekonomi dan pariwisata. Fokus berikutnya adalah pengembangan asuransi dan proteksi terhadap industri kreatif serta juga fokus terhadap fasilitasi arus keluar masuk wisatawan diantara negara-negara ASEAN.
2. *Physical connectivity* (Konektivitas fisik), yaitu yang terkait dengan pembangunan *hard infrastructure* untuk mendukung keberlangsungan konektivitas orang ke orang. Terutama di bidang transportasi, *Information, Communication, Technology* (ICT) dan energi. Perluasan infrastruktur di bidang transportasi sangat dibutuhkan

untuk mendukung aktivitas pergerakan transportasi orang dan barang di setiap *entry point* masing-masing negara ASEAN.

3. *Institutional connectivity* (Konektivitas Institusional), yaitu perhatian terhadap *soft infrastructure* seperti fasilitasi perdagangan, liberalisasi perdagangan dan investasi, *Foreign Direct Investment* (Investasi Asing Langsung), *Mutual Recognition Arrangements* (MRA), dan program *Capacity Building*. *Institutional Connectivity* akan menghubungkan berbagai perjanjian internasional dan regional maupun protokol untuk memfasilitasi transaksi internasional perdagangan barang dan jasa. Termasuk dalam hal ini adalah Movement of Natural Persons (MNP) lintas negara.

Berbagai kebijakan yang telah diambil Indonesia untuk meningkatkan kapasitas UMKM maupun mengembangkan ekonomi kreatif, baik di tingkat domestik maupun di tingkat regional ASEAN menunjukkan besarnya peran Indonesia dalam mewarnai perkembangan ekonomi kreatif di kawasan. Kolaborasi dan sinergitas berbagai ide kreatif yang dihasilkan oleh seluruh *stake holder* terkait di negara-negara ASEAN untuk mengembangkan ekonomi kreatif akan menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang akan membawa ASEAN menjadi kekuatan utama ekonomi global di masa mendatang.

Penguatan Kapasitas UMKM untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif ASEAN

Berdasarkan analisa terhadap upaya pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan ekonomi kreatif di ASEAN, kebijakan Indonesia untuk memperkuat kapasitas UMKM Indonesia layak kiranya diangkat dan dikembangkan untuk diterapkan juga di tingkat ASEAN. Kebijakan tersebut sekaligus sebagai kesimpulan dari tulisan di atas yang dituangkan dalam tataran yang lebih teknis dan implementatif, sebagai berikut:

1. Penguatan posisi pelaku UMKM negara ASEAN yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dengan melakukan pembenahan terhadap hal-hal berikut: Produktifitas dan Inovasi (*productivity and innovation*). Kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*), Akses permodalan (*access to finance*), Akses Pasar, Dukungan Infrastruktur.
2. Sosialisasi dan implementasi 3 Pilar Kebijakan Pemberdayaan UMKM negara ASEAN: Pilar 1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM; Pilar 2 Lembaga Keuangan yang ramah UMKM; Pilar 3 Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM.

Strategi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 3 pilar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: perluasan Akses Pasar (Mendorong *brand* lokal di pasar global); peningkatan daya saing (pengembangan rumah produksi bersama di sentra-sentra industri kecil dan menengah, standarisasi dan sertifikasi internasional, kemitraan dengan pengusaha besar, sistem logistik UMKM, akselerasi pengembangan usaha). Kemudian, pengembangan kewirausahaan (layanan konsultasi dan pendampingan teknis, akselerasi dan komersialisasi, modernisasi koperasi), akselerasi Pembiayaan dan Investasi (memperkuat *soft insrastruktur* pembiayaan, pembiayaan nonbank. Selain itu, perlu ada kemudahan dan kesempatan berusaha (*penyederhanaan perizinan usaha dan standarisasi produk, kebijakan afirmasi dan proteksi, pembentukan pusat bantuan hukum, kemitraan dengan usaha besar*) dan koordinasi Lintas Sektor (*one gate policy, peningkatan peran pemerintah daerah*).

Rekomendasi, masukan dan saran dalam tulisan ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bahan acuan bagi para *stakeholder* terkait yang terlibat dalam pembahasan bidang Ekonomi Kreatif selama masa presidensi Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023. Tulisan ini dapat menjadi bahan acuan bagi para pelaku usaha UMKM ASEAN dalam menjalankan bisnis di bidang ekonomi kreatif.

Tulisan ini juga kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan kajian bagi para mahasiswa dan akademisi yang akan membahas mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagai bahan kajian karya tulis ilmiah atau bahan kajian bagi instansi pemerintah atau swasta untuk pengambilan kebijakan publik terkait pengembangan ekonomi kreatif. UMKM ASEAN perlu didorong untuk memiliki pola pikir yang kompetitif, terhubung ke target pasar, mengelola bisnis dengan standar internasional dan proses terbaik di kelasnya (*benchmarking*), bersaing secara berkelanjutan, dan beradaptasi dengan praktik bisnis terbaik.*

Referensi

- Howkins, John (2002) *The Creative economy: How people Make Money from Ideas*, United Kingdom, Penguin, Second Edition.
- The ASEAN, *Creative Economy, Culture, Identity and The Business of Creativity*, October-November 2021, bit.ly/TheAsean_VTS-16
- Komite III - DPD-RI (2015), *Naskah Akademik RUU Tentang Ekonomi Kreatif*, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2020), "Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), TNP2K"
- Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia (2016), "Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015 dan pasca MEA 2025"
- Teddy Ageng Maulana, Donny Trihanondo (2022), "Tantangan perdagangan bebas bidang industri kreatif pasca pandemi covid-19 di ASEAN", *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)* p-ISSN 2655-4313 (Print), e-ISSN 2655-2329 (Online) SENADA, Vol.5, Maret 2022, <http://senada.idbbali.ac.id>
- [https://www.tnp2k.go.id/download/62816Buku_Pemetaan%20Program%20Pemberdayaan%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah%20\(UMKM\).pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/62816Buku_Pemetaan%20Program%20Pemberdayaan%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah%20(UMKM).pdf)
- [https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20UMKM%20dalam%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20\(2015\)%20dan%20Pasca%20MEA%202025.pdf](https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20UMKM%20dalam%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20(2015)%20dan%20Pasca%20MEA%202025.pdf)
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/02/193000069/pengaruh-kerja-sama-bidang-ekonomi-terhadap-kehidupan-di-asean?page=all>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/malaysia-pimpin-pertumbuhan-ekonomi-asean-pada-kuartal-iii-2022>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5277/ekonomi-kreatif-adalah-pilar-perekonomian-masa-depan/0/berita>
- <https://investor.id/business/273656/mami-asean-5-bertumbuh-58-di-2022>
- <https://www.lspr.edu/caprs/index.php/2021/04/26/51-tahun-asean-dan-penguatan-umkm-indonesia/>
- <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pasar-bebas-asean/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf>
- <https://www.medcom.id/internasional/asean/Gbmo57xK-kemajuan-ekonomi-kreatif-di-kawasan-asean-perlu-diperkuat-digitalisasi-dan-kolaborasi>

AZMAN RIDHA ZAIN adalah keturunan Aceh, Padang, Nias dan Jawa; lahir di pulau Nias 10 Agustus 1973. Ia menempuh Pendidikan Sekolah Menengah di MTs Pesantren Darunnajah Jakarta dan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat, S1 di jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Ciputat dan S2 Kajian Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah UI. Sebagai ASN di Kementerian Perdagangan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kerja sama Perdagangan Bilateral dengan negara-negara Amerika Latin, Widyaiswara di Pusdiklat Perdagangan dan terakhir sebagai Wakil Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah tahun 2018-2021. Azman adalah Direktur dan Trainer National Character Building (NCB) Program, Founder Visi Indonesia Progresif (VIDPRO), Wakil Sekretaris Badan Sosial Lintas Agama (Basolia) Kota Depok, Pembina LPNU PCNU Depok, Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Arab Saudi (2018-2021), Trainer Neuro Linguistic Programming (NLP) dan Motivator alumni Kahfi Motivator School, Ketua Yayasan Zainul Ihsan Ar Ridho, Pengurus DMI dan JATMAN Kota Depok. Ia juga aktif sebagai Youtuber ARZ Broadcast Channel yang mempromosikan penguatan ekspor maupun potensi SDM & SDA Indonesia di Arab Saudi serta memelopori gerakan kebangkitan dan kemajuan Indonesia melalui NCB Program dan VIDPRO.

BAB 9

Penguatan UMKM dalam Ekosistem Digital

Transformasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM ASEAN

Hayu S. Prabowo

Pendahuluan

Undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No. 20 Tahun 2008 menggolongkan UMKM sebagai badan usaha yang memiliki kriteria omzet dan jumlah karyawan tertentu. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia yang menyumbang 61,07% dari total PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja (Kemenko Bidang Perekonomian, 2021).

Di kawasan Asia Tenggara, peran UMKM juga sangat penting dalam perekonomian. Menurut laporan ASEAN SME Policy Index 2018, sekitar 90% dari semua perusahaan di ASEAN adalah UMKM, yang menyumbang sekitar 40% dari PDB regional dan menyerap sekitar 80-97% tenaga kerja. Oleh karena itu, mendukung pertumbuhan UMKM di ASEAN menjadi sangat penting bagi kemajuan perekonomian regional (OECD/ERIA, 2018).

Transformasi digital mengacu pada perubahan fundamental dalam bisnis, ekonomi, dan masyarakat yang dihasilkan dari adopsi teknologi digital yang inovatif dan disruptif. Transformasi digital telah memengaruhi cara orang berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi, sehingga merubah lanskap bisnis dan ekonomi.

Dalam konteks UMKM, transformasi digital berarti memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan produk baru, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi sangat penting bagi UMKM di ASEAN untuk menghadapi tantangan persaingan global dan memperluas pasar (Datt, 2018).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas transformasi digital dalam konteks UMKM di ASEAN, terutama dalam penggunaan fintech dan e-commerce. Sasaran dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang potensi dan tantangan UMKM di ASEAN dalam menerapkan transformasi digital, peran fintech dan e-commerce dalam mendukung pertumbuhan UMKM, strategi penerapan transformasi digital bagi UMKM di ASEAN, dan studi kasus tentang UMKM di ASEAN yang sukses dalam menerapkan transformasi digital dengan fintech dan e-commerce.

Potensi dan Tantangan UMKM di ASEAN dalam Menerapkan Transformasi Digital

ASEAN MSME Development Summit melakukan survei digitalisasi UMKM di kawasan ASEAN. Laporan tersebut menyoroti kondisi digitalisasi saat ini di kalangan UMKM, peran platform digital dalam mendukung upaya digitalisasi mereka, dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan digitalisasi. Survei tersebut menemukan bahwa meski ada peningkatan minat terhadap digitalisasi di kalangan UMKM ASEAN, masih banyak kendala serta hambatan signifikan untuk mengadopsi teknologi digital. Laporan tersebut memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendukung digitalisasi UMKM di kawasan (ERIA, 2019):

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Teknologi digital dapat membantu UMKM untuk mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. Meningkatkan Akses ke Informasi: UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi pasar, tren industri, dan kebutuhan konsumen dengan lebih mudah dan cepat.
3. Meningkatkan Kreativitas: UMKM dapat menggunakan teknologi digital untuk menciptakan produk baru dan mengembangkan inovasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.
4. Memperluas Pangsa Pasar: Teknologi digital memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia.

5. Meningkatkan Daya Saing: Dengan menerapkan transformasi digital, UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan menghadapi tantangan persaingan dari perusahaan besar.

Meskipun potensi transformasi digital yang besar, UMKM di ASEAN masih menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkannya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Keterampilan Digital: Banyak UMKM di ASEAN masih memiliki keterbatasan dalam keterampilan digital, sehingga sulit untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
2. Keterbatasan Akses Infrastruktur: UMKM di beberapa wilayah di ASEAN masih menghadapi keterbatasan dalam akses infrastruktur seperti internet yang stabil dan cepat, serta teknologi digital yang terjangkau.
3. Kurangnya Sumber Daya: UMKM di ASEAN seringkali mengalami kendala dalam memperoleh sumber daya finansial dan manusia yang cukup untuk mengadopsi teknologi digital.
4. Ketidakpastian Regulasi: Tantangan regulasi yang belum pasti juga menjadi hambatan bagi UMKM di ASEAN dalam menerapkan teknologi digital, terutama dalam hal keamanan data dan privasi pelanggan.
5. Tantangan Budaya: Beberapa UMKM di ASEAN masih memiliki mindset tradisional yang kurang inovatif dan resisten terhadap perubahan, sehingga sulit untuk mengadopsi transformasi digital.

Laporan tersebut merekomendasikan agar pembuat kebijakan mengambil pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan ini, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur digital, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi UMKM, dan memfasilitasi akses pembiayaan untuk adopsi teknologi. Laporan tersebut juga menekankan perlunya upaya terkoordinasi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong transformasi digital UMKM di kawasan.

Fintech dan E-commerce, Pendukung Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi prioritas utama bagi banyak negara ASEAN untuk mengembangkan sektor UMKM. Fintech dan e-commerce merupakan dua bidang yang menjadi fokus utama untuk membantu UMKM memanfaatkan potensi transformasi digital secara maksimal.

Fintech, singkatan dari financial technology, merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Fintech muncul sebagai alternatif baru bagi UMKM yang kesulitan memperoleh akses keuangan melalui bank tradisional. Dengan menggunakan fintech, UMKM dapat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah, cepat, dan murah, serta menjangkau pasar global yang lebih luas. Fintech juga memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan dalam mengelola keuangan dan memantau kinerja bisnis mereka.

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merupakan bentuk perdagangan yang dilakukan secara online melalui platform seperti website atau aplikasi. E-commerce memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menjual produk dan jasa mereka secara online, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. E-commerce juga dapat membantu UMKM dalam menghadapi persaingan global dengan menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar internasional. Namun, meskipun fintech dan e-commerce menawarkan banyak manfaat bagi UMKM, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan UMKM, infrastruktur internet yang masih belum merata, serta masalah keamanan data dan privasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi UMKM, dan perusahaan teknologi. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan insentif untuk meningkatkan adopsi fintech dan e-commerce oleh UMKM. Lembaga keuangan dapat berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi UMKM. Asosiasi UMKM dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya dalam memanfaatkan fintech dan e-commerce. Perusahaan teknologi dapat mengembangkan platform fintech dan e-commerce yang mudah digunakan oleh UMKM dan memperhatikan keamanan data dan privasi.

Beberapa negara ASEAN telah memulai inisiatif untuk meningkatkan adopsi fintech dan e-commerce oleh UMKM. Contohnya, Indonesia telah meluncurkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mendorong

pertumbuhan perusahaan teknologi dan UMKM di bidang digital (Kominfo, 2021). Malaysia juga telah meluncurkan inisiatif untuk mempercepat adopsi fintech dan e-commerce oleh UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan insentif.

Strategi Penerapan Transformasi Digital bagi UMKM

Penerapan transformasi digital dalam UMKM bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam hal ini, strategi yang tepat harus dipilih untuk memastikan bahwa penerapan ini berjalan dengan sukses. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membantu UMKM dalam menerapkan transformasi digital dengan lebih baik. Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2022):

1. **Memahami Kebutuhan Pelanggan:** Pemahaman yang baik tentang kebutuhan pelanggan merupakan kunci sukses dalam penerapan transformasi digital. UMKM perlu memahami dengan baik kebutuhan pelanggan mereka dan menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan permintaan pasar.
2. **Memilih Platform Digital yang Tepat:** Ada berbagai platform digital yang tersedia untuk UMKM seperti media sosial, situs web, aplikasi seluler dan pasar daring. Pemilihan platform yang tepat harus didasarkan pada jenis produk dan layanan yang ditawarkan dan pasar yang ingin dijangkau.
3. **Menjalin Kemitraan dengan Fintech dan E-commerce:** Fintech dan e-commerce dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. UMKM dapat bekerja sama dengan perusahaan fintech dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.
4. **Mengadopsi Teknologi yang Sesuai:** Mengadopsi teknologi yang tepat sangat penting dalam menerapkan transformasi digital. UMKM perlu memilih teknologi yang sesuai dengan jenis produk dan layanan yang ditawarkan serta kapasitas keuangan mereka.
5. **Memastikan Keamanan Data:** Keamanan data menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan transformasi digital. UMKM harus memastikan bahwa data mereka aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah.
6. **Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:** UMKM perlu memberikan pelatihan kepada karyawan mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami teknologi dan mampu menggunakannya dengan efektif. Peningkatan keterampilan karyawan dapat membantu UMKM mencapai tujuan transformasi digital mereka.

Dalam penerapan transformasi digital, strategi yang tepat harus diambil untuk memastikan kesuksesan dalam jangka panjang. UMKM harus memahami kebutuhan pelanggan, memilih platform digital yang tepat, menjalin kemitraan dengan fintech dan e-commerce, mengadopsi teknologi yang sesuai, memastikan keamanan data, serta memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan bahasan di atas kesimpulan yang dapat diambil bahwa transformasi digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di ASEAN. Dalam mengadopsi transformasi digital, UMKM dapat memanfaatkan fintech dan e-commerce sebagai alat pendukung. Selain itu, penerapan strategi yang tepat juga perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Ada potensi besar bagi UMKM di ASEAN untuk menerapkan transformasi digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses dan kurangnya pemahaman tentang teknologi dapat menjadi hambatan dalam prosesnya. Fintech dan e-commerce dapat memberikan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM. Dalam penerapannya, UMKM perlu memahami cara menggunakan fintech dan e-commerce dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan transformasi digital bagi UMKM di ASEAN. Dalam strategi ini, UMKM perlu memperhatikan pengembangan SDM, integrasi sistem informasi, penggunaan platform digital, dan penggunaan data dan analitik.

Berdasarkan hasil studi ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah di ASEAN perlu memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup bagi UMKM untuk menerapkan transformasi digital, seperti program pelatihan dan pendanaan.
2. UMKM di ASEAN perlu meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan transformasi digital.
3. Pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan fintech dan e-commerce, perlu berkolaborasi dengan UMKM untuk memberikan dukungan dalam proses transformasi digital.
4. UMKM perlu mempertimbangkan keamanan dan privasi data dalam penggunaan teknologi, serta mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan hal tersebut.
5. UMKM perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan dalam proses transformasi digital agar tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang.*

Referensi

Undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No. 20 Tahun 2008

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2021), *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021

OECD/ERIA (2018), *SME Policy Index: ASEAN 2018: Boosting Competitiveness and Inclusive Growth*, OECD Publishing, Paris/Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Jakarta.

Datt, R., & Sharma, N. (2018). *Digital transformation in small and medium enterprises: A review and future research agenda*. *Journal of Small Business Management*, 56(1), 27-47.

ERIA. 2019. *Study on MSMEs Participation in the Digital Economy in ASEAN Nurturing ASEAN MSMEs to Embrace Digital Adoption*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2019/10/ASEAN-MSME-Full-Report-Final.pdf>

Kominfo. 2021. *Lewat 1000 Startup Digital, Kominfo Dorong Generasi Muda Buka Wawasan*. Siaran Pers No. 344/HM/KOMINFO/09/2021. 26 September 2021

Bank Indonesia. 2022. *Go Digital Strategi Memperkuat UMKM*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Go-Digital-Strategi-Memperkuat-UMKM.aspx>

Kompas. 2020. *Tantangan Transformasi Digital bagi UMKM dan Solusi untuk Mengatasinya*. <https://biz.kompas.com/read/2020/12/15/101747328/tantangan-transformasi-digital-bagi-umkm-dan-solusi-untuk-mengatasinya>

HAYU S. PRABOWO adalah Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Indonesia Banking School. Ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Penguatan Small Medium Enterprise di ASEAN dalam Ekosistem Digital

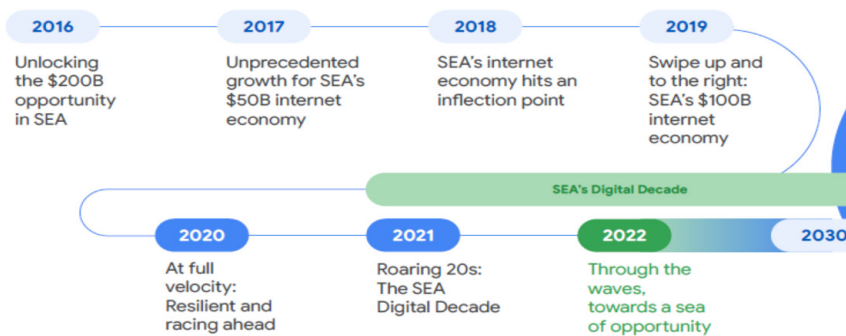
Abdul Luky Shofiul Azmi

Pentingnya SME masuk ke dalam Ekosistem Digital

Memasuki era disrupsi, berbagai tantangan dihadapi oleh para pelaku usaha untuk bertahan, tumbuh maupun berkembang pada situasi sulit. Transformasi digital Koperasi dan UMKM (KUMKM) digencarkan oleh pemerintah guna menjadi solusi untuk menghadapi disrupsi teknologi, disrupsi pandemi dan disrupsi demografi yang terjadi. Penandatanganan Perpres No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 menjadi dasar dan pendukung untuk menghasilkan banyaknya pengusaha muda yang produktif, kreatif dan inovatif demi mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Hal tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan ekosistem kewirausahaan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan rasio kewirausahaan sebesar 3,95%.

Kolaborasi dan kerja sama antara Kementerian, Lembaga, Daerah dan Sektor Swasta menghasilkan pencapaian dalam menghadirkan 20,24 juta pelaku UMKM Indonesia berbasis digital pada tahun 2020 hingga Agustus 2022. Momentum akselerasi transformasi digital yang harus diselaraskan dengan pendataan UMKM Indonesia yang komprehensif guna pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024. Hal ini juga menjadi perhatian dari berbagai negara yang ada di ASEAN.

Berbagai tantangan dihadapi oleh para pelaku usaha yang dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan digitalisasi baik internal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) maupun dengan pemanfaatan platform digital. Proses adaptasi digital yang dimudahkan dengan berbagai perkembangan teknologi ini memerlukan tahapan tertentu dan kerja sama dari berbagai pihak. Kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, Daerah dan Sektor Swasta diharapkan mampu mempercepat capaian pelaku UMKM Indonesia berbasis digital yang dicanangkan mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024. Roadmap pengembangan UMKM ASEAN dalam ekosistem digital ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.

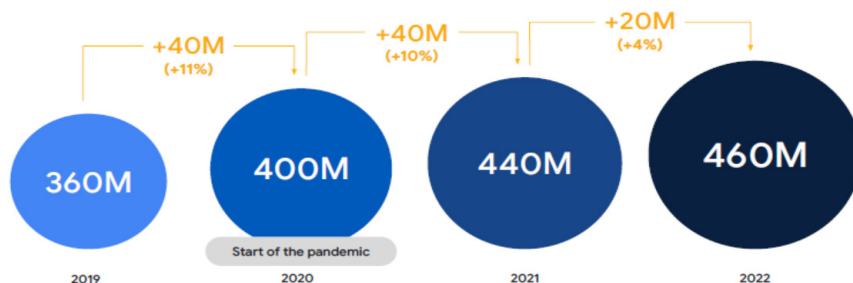


Gambar 1. roadmap pengembangan UMKM ASEAN dalam ekosistem digital.

Sumber: 7th edition of e-Conomy SEA by Google, Temasek, Bain: Southeast Asia's digital economy research programme

Masa pandemi yang menjadi masa sulit bagi sebagian besar masyarakat justru menjadi momen perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital berkembang dan terbukti mampu memudahkan berbagai batasan yang muncul di

saat pandemi Covid-19. Bersamaan dengan itu, perkembangan ekonomi digital ini juga membuka pasar yang lebih luas karena internet tidak membatasi ruang gerak dan ruang pasar para pelaku usaha.



Gambar 2. Perkembangan jumlah pengguna internet di Asia Tenggara

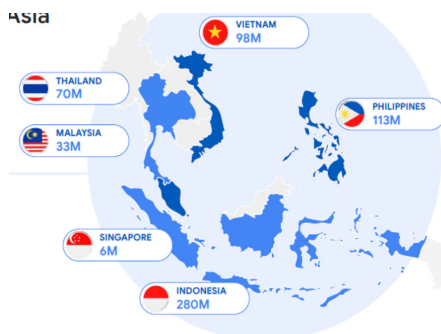
Sumber: Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA, 2019, 2020, and 2021; Statista for 2022

Ekosistem digital tidak dapat lepas dari Ekonomi Digital. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott (1995) ditulis dalam bukunya “The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence”. Dalam bukunya, Tapscott menyatakan bahwa ekonomi digital juga disebut ekonomi baru, hal ini dicirikan dengan adanya penggunaan informasi digital secara eksklusif. Beberapa definisi yang umum digunakan terkait Ekonomi Digital ini adalah:

- o Ekonomi digital yaitu hubungan antara ekonomi baru, bisnis baru, dan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain (Tapscott, 1996).
- o Ekonomi digital yaitu termasuk barang atau jasa pengembangan, produksi, penjualan, atau penyediaannya sangat tergantung pada teknologi digital (Kling dan Lamb, 2000).
- o Ekonomi digital yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta akses internet (OECD, 2020).

Problematika Optimasi SME masuk ke dalam Ekosistem Digital

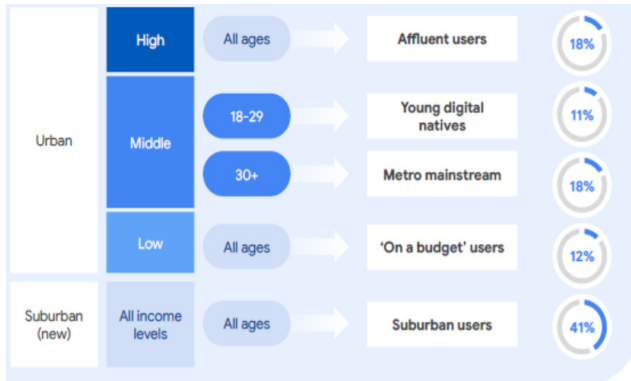
Potensi UMKM Asean di dalam Ekosistem Digital sangat besar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini. Dengan populasi total mencapai 600 juta penduduk, ASEAN menjadi salah satu regional terbesar dan potensi pasar yang sangat menarik bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Harapan para pelaku usaha dari ASEAN perlu diperhatikan sehingga potensi pasar dan perkembangan dunia digital tidak hanya dipenuhi dari para pelaku usaha asing.



Gambar 3. Jumlah penduduk masing-masing negara di ASEAN.

Sumber: Google-commissioned Ipsos e-Conomy SEA Research 2022

Dominasi anak muda dalam penggunaan teknologi digital saat ini merupakan salah satu contoh adanya proses adaptasi dalam perkembangan teknologi yang menghasilkan populasi generasi melek digital. Keaktifan penggunaan teknologi menjadikan mayoritas generasi muda bersemangat untuk memiliki usaha sendiri.



Gambar 4. Simulasi perbedaan adopsi digital sesuai dengan karakteristik wilayah dan demografinya.

Sumber: Google-commissioned Ipsos e-Conomy SEA Research 2022

Masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dan generasi muda yang digital native menjadi pengadopsi terbesar dari layanan digital. Masyarakat kelas ini menganggap bahwa layanan digital merupakan bagian integral dari gaya hidup modern yang mereka jalani. Sedangkan generasi muda secara alami merasakan kenyamanan dan akses yang mudah dengan menggunakan layanan digital. Data di Gambar 4 menunjukkan bahwa adopsi pemanfaatan e-commerce tinggi baik di konsumen perkotaan, maupun pinggiran kota. Adopsi e-commerce lebih cepat menyebar ke masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, sedangkan sektor lainnya cenderung lebih lambat teradopsi.

Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital ini. Perkembangan industri fintech menjadi semakin beragam yang tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Perkembangan tersebut termasuk jasa keuangan pembayaran (payment), pendanaan (funding), perbankan (digital banking), pasar modal (capital market), dan perasuransian (insurtech). Model bisnis pada sektor pertanian juga mengalami perubahan akibat adopsi teknologi robotik dan internet of things (IoT) yang dapat membawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0. Melalui platform e-commerce banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang dapat diperluas pasarnya. Teknologi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Sektor agrolistik juga berkembang dengan teknologi digital yang dapat memotong rantai pasok serta rantai nilai dalam sektor pertanian. Teknologi yang diperkirakan akan digunakan untuk mengembangkan sektor agrolistik adalah seperti automobile atau drone, GPS tracking, dan unmanned technology.

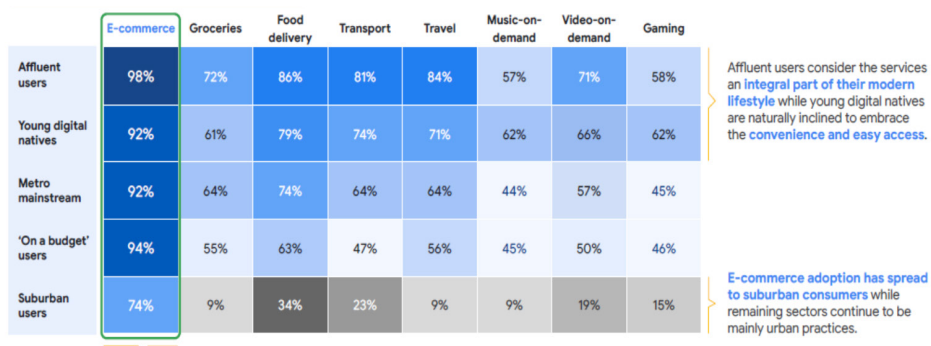
UMKM on-board merupakan istilah yang digunakan ketika UMKM sudah menggunakan akses internet dan berbagai kelebihannya dalam proses pelaksanaan usaha UMKM. Fokus utama yang perlu dilaksanakan masing-masing pemerintah adalah dengan monitoring progress perkembangan Transformasi Digital KUMKM. Hal ini dilaksanakan dengan membuat dan melaksanakan pengelolaan program akselerasi transformasi digital. Pelaksanaan kegiatan ini diprioritaskan untuk para pelaku usaha yang memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut:

- o Belum on-board atau sudah on-board namun tidak menggunakan aplikasi e-commerce.
- o Tidak mampu bersaing di pasar terbuka/marketplace.
- o Penjualan/transaksi melalui lingkungan kecil/jaringan social media.
- o Tidak menggunakan aplikasi umum (termasuk WhatsApp Business)

Guideline yang berbeda untuk masing-masing negara

Pendampingan menuju UMKM on-board diperlukan pendampingan dengan kurikulum berkelanjutan agar target UMKM on-board dari pemerintah pusat dapat tercapai. Kerja sama dengan asosiasi UMKM, gerakan kepemudaan, kampus dan perkumpulan keagamaan juga dapat meningkatkan efektivitas program akselerasi ini. Dalam kondisi lingkungan perbatasan dengan negara tetangga, potensi pasar perbatasan baik masyarakat negara tetangga yang melakukan kegiatan belanja di daerah perbatasan maupun pasar negara tetangga juga perlu diperhatikan karena memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan UMKM.

Selain program akselerasi pendataan, program Optimasi Ongkos Kirim ke Penjuror Negeri juga perlu digalakkan mengingat sebagian besar pedagang dan pembeli berlokasi di sekitar ibu kota. Sehingga masyarakat di daerah yang lokasinya jauh dari ibu kota harus menanggung ongkos kirim yang tinggi untuk membeli berbagai produk yang tersedia di e-commerce. Hal serupa juga dialami oleh para UMKM yang berlokasi di daerah yang jauh dari ibu kota mengingat penduduk biasanya terkonsentrasi di kawasan ini, sehingga ongkos kirim tinggi yang ditanggung oleh pembeli menjadi salah satu barrier-to-entry para UMKM daerah ketika akan on-board melalui e-commerce.



Gambar 5. Simulasi adopsi digital pada masing-masing layanan digital.

Sumber: Google-commissioned Ipsos e-Economy SEA Research 2022

Interactive Social media

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai angka 210 juta pada tahun 2022. Kominformasi (2019) menyatakan bahwa 83 persen dari pengguna internet adalah pengguna WhatsApp sehingga diperkirakan pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai 174 juta pengguna. Survei Sea Insights menunjukkan, sebanyak 54% responden pengusaha UMKM semakin adaptif menggunakan media sosial untuk meningkatkan penjualan (Katadata, 2020). Dengan jumlah UMKM yang telah terdata saat ini berjumlah 65 juta, maka setidaknya 35,1 juta sudah on-board dengan menggunakan media sosial.

WhatsApp merupakan platform yang paling banyak digunakan sehingga masyarakat sudah terbiasa menggunakan berbagai fitur yang ada di dalamnya dan tidak memerlukan unduhan aplikasi tambahan dalam proses pendataan ini. Interactive WA-Bot mudah digunakan karena dilengkapi dengan program OCR (optical character recognition) sehingga para pelaku usaha cukup memfoto KTP nya dan sistem secara otomatis menuliskan kembali berbagai data yang ada di KTP tersebut. Sistem ini juga dilengkapi dengan push button yang memudahkan proses pendataan. Para pelaku usaha cukup tekan salah push button dan tidak perlu melakukan pengetikan panjang untuk berbagai command yang tersedia di dalam Interactive WA-Bot ini.

Nomor HP yang digunakan untuk menghubungi Interactive WA-Bot ini menjadi pintu utama interaksi unik antara pemerintah dan masyarakat luas, terutama para pelaku usaha. Selain berbagai komunikasi dua arah, para pengguna juga dapat mengetahui kantor dinas maupun berbagai instansi yang berkaitan dengan pelaku usaha hanya dengan melakukan Shareloc. Hal ini juga akan memudahkan pendataan *by name by address* dan ke depannya adalah

kemungkinan komunikasi antar pelaku usaha dalam rangka optimalisasi gotong royong dan percepatan UMKM naik kelas melalui proses digitalisasi ini.



Gambar 6. Skema utama Interative WA-Bot

Optimasi Socio-commerce

Berbeda dengan e-commerce dimana para pelaku usaha harus berjuang berhadapan langsung dengan pasar terbuka, socio-commerce mengakomodir business as usual yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini memudahkan para pelaku usaha untuk memperluas skala usahanya dengan menggunakan jaringan sosial yang mereka miliki tanpa harus memasang iklan dan melakukan berbagai upaya agar muncul di posisi paling atas di dalam e-commerce, namun tetap dapat menikmati perkembangan teknologi dan menjadi bagian dari UMKM yang on-board.

Berbagai aplikasi yang ada dikelompokkan berdasarkan proses penggunaannya terutama terkait dengan kemudahan entry point penggunaannya oleh para pelaku usaha. Pengelompokan dibuat ke dalam Level 1, Level 2a, Level 2B, dan Level 3. Level 1 merupakan aplikasi yang cenderung paling mudah digunakan tanpa mengubah sistem pola bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha karena aplikasi ini bersifat menambahkan salah satu bagian dari proses bisnis yang dijalankan para pelaku usaha. Sedangkan Level 2 dan 3 bersifat perluasan pasar dengan berbagai karakteristik dan pemanfaatannya. Aplikasi-aplikasi ini memberikan berbagai keleluasaan bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar dan membesarkan skala bisnisnya. Pengelompokan ini dibuat untuk memberikan prioritas langkah yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan program UMKM on-board.

Pelaksanaan program percepatan ini dilaksanakan dengan sinergi dan optimalisasi berbagai aplikasi dan instansi terkait, termasuk di dalamnya memanfaatkan para affiliate ataupun internet marketer untuk menjual produk-produk UMKM unggulan. Piloting dengan beberapa UMKM terkurasi merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilaksanakan.



Gambar 7. Skema socio-commerce

Skema program ini secara umum akan meningkatkan dan mengintegrasikan berbagai skema bisnis dari berbagai jenis usaha. Sebagai contoh, para pelaku usaha tetap melaksanakan *business as usual*, namun proses pembayarannya ditambahkan dengan QRIS. Contoh lainnya adalah para pedagang warung yang biasanya mengambil dari sumber yang terbatas, namun saat ini dapat mengambil dari sumber yang tidak terbatas dan dengan harga yang lebih murah karena memotong rantai distribusi. Optimasi berbagai aplikasi ini akan mengintegrasikan berbagai ekosistem yang ada dan memungkinkan terjadinya agregasi penjualan guna mengoptimisasi value chain para pelaku UMKM.*

Referensi

- Google, Temasek, dan Bain & Company (2022). *The e-Economy SEA 2022: towards a sea of opportunity*.
- Katadata (2020). Survei: 54% UMKM Pakai Media Sosial untuk Pacu Penjualan saat Pandemi. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5efdb7a7bea69/survei-54-umkm-pakai-media-sosial-untuk-pacu-penjualan-saat-pandemi>
- Kling, R., dan R. Lamb (2000). IT and Organizational Change in Digital Economies: A Sociotechnical Approach. *ACM SIGCAS Computers and Society*, Volume 29, Issue 3 September 1999 pp 17–25
- Kominfo (2019). WhatsApp Kenalkan Literasi Privasi Dan Keamanan Digital. https://www.kominfo.go.id/content/detail/22824/kominfo-whatsapp-kenalkan-literasi-privasi-dan-keamanan-digital/0/sorotan_media
- OECD. 2020. *OECD Digital Economy Outlook 2020*. OECD
- Tapscott, Don (1995). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. New York: McGraw-Hill
- Tapscott, Don (1996). *The Digital Economy, Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence*. Jakarta: PT Abdi Tandur

ABDUL LUKY SHOFIUL AZMI adalah lulusan S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, S2 Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan S3 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Ia telah memenangkan lebih dari 30 penghargaan nasional dan internasional di bidang pengembangan produk, bisnis, seni serta pengembangan masyarakat. Pendidikan sebelumnya adalah SDN 3 Margoyoso Jepara, MTs PPMI Assalaam Surakarta, dan SMA Semesta Semarang. Minat penelitiannya saat ini adalah di bidang Experimental and Behavioral Economics, Engineering dan juga Basic Research terutama untuk pengembangan Startup dan UMKM. Ia juga mengajar serta membimbing mahasiswa baik tingkat sarjana maupun pascasarjana. Kegiatan lainnya terkait dengan bidang usaha (retail dan engineering), serta mengembangkan dua institusi penelitian (Alfalah Human Behavioral Institute dan Novel Teknologi Universal). Luky dapat dihubungi melalui lukyindonesia@yahoo.com.

Dari *Mobile First* ke *Mobile Only*: Prospek Ekonomi Digital ASEAN dan Strategi Bagi UMKM Indonesia

Pizaro Gozali Idrus

Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital di seluruh belahan dunia, tak terkecuali ASEAN. Gelombang transformasi digital ini telah membuat kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah terdepan dalam peningkatan konsumen digital. Hal ini terjadi utamanya akibat pandemi COVID-19 yang menghantam dunia global. Kondisi ini telah menuntut masyarakat dunia, khususnya ASEAN, untuk melakukan transformasi dari pola kehidupan konvensional menjadi digital dalam berbagai bidang. Baik pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam dunia pendidikan, misalnya, pola interaksi antara pengajar dan pelajar telah berubah dari di dalam kelas menjadi di depan layar internet. Tempat untuk mengakses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Bahkan edukasi bagi peningkatan skill dan pengetahuan bukan lagi milik sekolah formal. Youtube, Instagram, Tiktok menjadi saranan dalam berekspos, edukasi, hingga mencari keuntungan ekonomi, khususnya untuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan dunia teknologi telah mendorong berbagai bidang usaha yang tadinya *mobile first* menjadi *mobile only*. Artinya jika dulu orang selalu mendahulukan perangkat *mobile* dalam segala lini kehidupan dan aktivitas bisnis, tapi kini mobile phone justru menjadi satu-satunya pusat dari segala aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari mulai belanja, transportasi, berburu pakaian, memesan makanan, mencari ilmu pengetahuan, menikmati hiburan, semuanya dilakukan melalui ponsel. Fenomena ini selaras dengan penelitian Facebook bahwa sebanyak 95% responden mengungkapkan mengakses internet dari smartphone mereka (Facebook and Bain, 2021). Kekuatan ini akhirnya mendorong peningkatan e-commerce tumbuh sangat cepat di ASEAN.

ASEAN pemain utama ekonomi digital

ASEAN telah meluncurkan ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM) pada 2021. ADM dilahirkan untuk mewujudkan visi ASEAN dengan didukung oleh layanan, teknologi, dan ekosistem digital yang aman dan transformatif. Salah satu target dari ADM adalah terselenggaranya layanan digital yang terpercaya dan pencegahan terjadinya kerugian pada konsumen atau pengguna. Hal ini dilandaskan dengan fakta bahwa ekonomi digital di ASEAN dapat bertumbuh pesat di dunia dengan prediksi mencapai nilai 1 triliun USD pada tahun 2030.

Secara global, pendapatan e-commerce mencapai US\$1,6 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$2,7 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, dari 2018 hingga 2023, pertumbuhan tahunan pendapatan e-commerce di ASEAN diproyeksikan menjadi empat kali lipat dari PDB regional (ERIA: 2021). Sementara itu, dalam periode yang sama, pendapatan e-commerce global di seluruh dunia diproyeksikan menjadi dua kali lipat dari PDB dunia. Total perdagangan elektronik pendapatan ASEAN akan meningkat hampir 200%.

Bersama dengan China dan India, yaitu melalui free trade dan integrasi pasar, kASEAN dapat menjadi episentrum e-commerce dunia pada tahun 2023 dengan berkontribusi 40% dari pasar e-commerce dunia. Berdasarkan laporan tahunan Facebook, kawasan Asia Tenggara telah menambah 70 juta konsumen digital baru sejak pandemi di mana penambahan tertinggi berada di Indonesia. Indonesia terus menikmati tingkat pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara, dengan populasi konsumen digitalnya yang tumbuh dari 144 juta pada tahun 2020 menjadi 165 juta pada tahun 2021.

Pertumbuhan konsumen digital di Indonesia itu setara dengan 15,2%, disusul Vietnam sebanyak 8%, Malaysia 5%, Filipina 5%, Singapura 5% dan Thailand 2%. Bahkan, pada tahun 2026, populasi konsumen digital Asia Tenggara

diprediksi mencapai sekitar 380 juta atau 1,4 kali lebih besar dari tahun 2019. Pada tahun 2020, migrasi Asia Tenggara dari ekonomi offline ke online telah melampaui perkiraan awal dan meluncur dengan cepat. Perubahan itu tadinya diprediksi akan terjadi dalam 5 tahun. Namun pandemi Covid-19 memaksa transisi itu berlangsung hanya dalam kurun 1 tahun.

Lonjakan penetrasi ritel online dari 5% menjadi 9% di kawasan ASEAN juga menandai pertumbuhan yang lebih cepat dari India, Brasil, dan China. Pengeluaran online per kapita di seluruh kawasan Asia Tenggara pada 2020 adalah USD238 atau Rp3,3 juta, melampaui perkiraan sebelumnya dan meningkat menjadi USD381 pada akhir 2021. Penelitian ini juga menemukan bahan aplikasi pemesanan makanan online menjadi segmen yang tumbuh paling cepat, dengan mayoritas konsumen berencana mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran online mereka di rumah untuk kategori tersebut dan kategori lainnya.

RCEP dan Tantangan Bagi UMKM

Indonesia telah mencanangkan strategi dalam melakukan inovasi digital dalam merespons tumbuhnya ekosistem ekonomi digital. Kementerian Keuangan mencatat ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Namun tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN adalah jangan sampai situasi ini hanya menjadikan ASEAN, khususnya Indonesia, hanya sebagai konsumen bukan produsen. Apalagi ini sudah asuk dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar yang mencakup 45 persen populasi dunia dan 30 persen perdagangan dunia dengan PDB gabungan mencapai USD2,6 triliun. Blok ini terdiri dari 10 negara ASEAN dan lima negara lain yakni Jepang, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan dan China. Ekonom Senior dari Economic Cooperation and Integration among Developing Countries (ECIDC), UNCTAD, Rashmi Banga mengatakan perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP bisa membatasi kebijakan dan ruang fiskal negara berkembang (Anadolu Agency: 2020). Menurutnya, dengan asumsi tarif semua produk dihapuskan antara negara RCEP, maka sebagian besar negara ASEAN akan mengalami kenaikan impor. Negara berkembang lebih rentan dan diperkirakan akan terkena pukulan lebih keras dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih.

Negara-negara ASEAN hanya dapat memperoleh manfaat dari RCEP jika mereka benar-benar dapat menggunakan potensi rantai nilai regional yang terhubung dengan rantai nilai global. Setelah implementasi RCEP, Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan impor dari negara-negara anggota hingga USD101,9 miliar. Sebelum implementasi RCEP, impor Indonesia dari negara-negara anggota sebesar USD100,5 miliar. Ekspor Indonesia setelah RCEP diperkirakan hanya tumbuh sebesar USD997,7 juta menjadi USD91,96 miliar.

Berdasarkan kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), industri yang memiliki potensi besar berkembang RCEP adalah digital-oriented industries. Hal ini terjadi seiring dengan pandemi yang terus berlangsung dan tekanan ekonomi global. Perkembangan industri yang mengarah ke Revolusi Industri 4.0, akan membuat investor melirik kepada negara anggota RCEP yang paling siap dalam pengembangan Revolusi Industri 4.0 dan *e-commerce*. UMKM sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang besar, sangat berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, potensi bisnis ini diharapkan semakin tumbuh secara signifikan (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 201).

Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56-59%. Tidak hanya itu, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 50% dari total investasi di Indonesia. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan *e-commerce* bagi pertumbuhan UMKM masih memiliki tantangan. *E-commerce* dinilai masih menjadi wadah bagi produk impor sementara kontribusi produk dalam negeri dari UMKM masih sedikit. Menurut data Kementerian UMKM dan Koperasi, kontribusi produsen UMKM yang bergabung dengan platform *e-commerce* di Indonesia masih di bawah 8% sementara sisanya adalah pengepul barang atau trader yang menjual barang dari produsen besar di luar negeri.

Strategi untuk UMKM

Sejatinya UMKM memiliki pekerjaan rumah untuk beradaptasi dengan Revolusi 4.0 agar dapat bersaing dalam era perdagangan bebas. Pertama, Indonesia harus memperkuat infrastruktur e-commerce dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar di kawasan namun juga bagaimana memanfaatkan keterbukaan e-commerce khususnya di ASEAN untuk peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, penting menempatkan e-commerce dalam pemetaan strategis ekonomi nasional termasuk bagaimana mendorong marketplace nasional untuk bisa menembus pasar internasional.

Kedua, mendorong digitalisasi UMKM. Meningkatnya tren digital tidak lagi bisa kita hindari. Platform perdagangan elektronik kini kian menjadi favorit sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi. Untuk itu, UMKM harus melakukan penyesuaian dengan melakukan digitalisasi. Kominfo mencatat sebelum pandemi Covid-19, UMKM yang sudah *digitally onboard* berjumlah 9 juta. Jumlah ini meningkat setelah pandemi menjadi 19 juta UMKM. Meski angka pertumbuhan terlihat tinggi, peluang digitalisasi UMKM atau UMKM Go Online masih amat besar. Mengingat jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 64 juta, maka baru 29 persen UMKM yang *digitally onboard*.

Ketiga, membangun infrastruktur digital dan internet di daerah-daerah agar promosi UMKM Indonesia dapat berjalan secara optimal. Saat ini, penetrasi internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia hanya menduduki peringkat ke-7 di ASEAN. Jika Indonesia tidak menutup lubang ini, maka Indonesia hanya akan menjadi obyek dari persaingan ekonomi global.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih 17.000 pulau mengakibatkan Indonesia memiliki bentangan wilayah sangat luas. Sebagian wilayah Indonesia memiliki kontur geografis berupa pegunungan dan banyak sungai. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur digital dengan cakupan hingga ke berbagai daerah pelosok menjadi faktor penting pembangunan digital infrastruktur di Indonesia.

Keempat, pemerintah harus memanfaatkan event-event global untuk mempromosikan UMKM di Tanah Air. Sejatinya, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya dan budaya memiliki potensi besar untuk mempromosikan produk UMKM secara internasional, hal ini sebagaimana sudah dilakukan pemerintah saat KTT G20 di Bali pada November lalu. Saat itu produk kerajinan, kain, pangan, fashion, kopi, dan lain sebagainya telah menarik minat para peserta.

Kelima, mengarahkan masyarakat untuk membeli produk lokal UMKM. Dengan mencapai 64 juta UMKM, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggeliatkan produk-produk lokal. Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka kesadaran nasional untuk menaikkan produk-produk lokal akan sulit dicapai. Semangat untuk memakmurkan UMKM harus dimulai dari bangsa sendiri. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, porsi UMKM RI mencapai 99,9% terhadap total jumlah usaha, menyerap 97,05% tenaga kerja Indonesia, dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%.

Sebagai bangsa, kita harus menyadari bahwa tumbuh pesatnya UMKM Indonesia akan turut membuka lapangan pekerjaan baru. Devisa dan perekonomian Indonesia dapat pulih setelah badai pandemi memaksa jutaan orang kehilangan mata pencaharian. Di sisi lain, produk buatan dalam negeri diharapkan semakin dikenal pasar internasional, sehingga meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.

Semoga dengan sejumlah strategi yang dikemukakan di atas Indonesia dapat menjadi pemain dan bukan saja menjadi panggung dalam geliat ekonomi digital di dunia internasional. Lewat Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, sudah saatnya Indonesia berjaya.*

Referensi

Anadolu Agency (2020), Indonesia perlu strategi khusus dalam perdagangan bebas RCEP. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-perlu-strategi-khusus-dalam-perdagangan-bebas-rcep/2042722>. (Diunduh 2 Desember 2022).

ASEAN (2021), ASEAN Digital Masterplan 2025, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/ASEAN-Digital-Masterplan-2025.pdf>. (Diunduh pada 3 Desember 2022)

- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (2022), Penguatan Sektor E-Commerce ASEAN untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Optimalisasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Jakarta: Penerbit Kementerian Luar Negeri.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (2020), E-commerce Connectivity in ASEAN https://www.eria.org/uploads/media/Books/2020-Ecommerce-Connectivity-in-ASEAN/Ecommerce-Connectivity-in-ASEAN_FullReport.pdf. (Diunduh 3 Desember 2022)
- Facebook and Bain & Company (2021), *Southeast Asia, The Home For Digital Transformation*, https://scontent.fbdo4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.8562-6/240725403_245810084073631_4081640424985540226_n.pdf?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=8JXGQo0af9IAX8fRcdY&_nc_ht=scontent.fbdo4-1.fna&oh=00_AfdfUYFMja21Joqt_muGhaSa1iUMXAb714Akkw3PX2_z5Q&oe=6390C9A4. (Diunduh 2 Desember 2022).
- Kominfo (2022), Resiliensi UMKM Go Online jadi Model Transformasi Digital untuk G20, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/resiliensi-umkm-go-online-jadi-model-transformasi-digital-untuk-g20/>. (Diunduh 3 Desember 2022)

PIZARO GOZALI IDRUS adalah dosen Hubungan Internasional pada Universitas Al Azhar Indonesia. Ia merupakan *research fellow* pada Asia Middle East Center for Research and Dialogue yang berbasis di Kuala Lumpur. Dalam lima tahun terakhir, ia juga aktif mengawangi media-media Internasional seperti redaktur Kantor Berita Turki Anadolu Agency (2017-2022) dan sekarang menjadi jurnalis di Indonesia untuk Radio Free Asia/BenarNews yang berbasis di Washington. Pizaro terlibat dalam berkontribusi pada sejumlah buku seperti *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global* (Perpusnas Press, 2021), *Ketahanan Kesehatan Bangsa dalam Ancaman? Perspektif Pandemi Covid* (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2021). Novel *The Brain Charger* (Pustaka Al-Kautsar, 2012) dan lain sebagainya. Pizaro menamatkan S2 pada Paramadina Graduate School of Diplomacy dan kini melanjutkan jenjang doktorat Hubungan Internasional di Universitas Sains Malaysia (USM).

Kolaborasi Menjadi Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN

Zaky Al Hamzah

Pandemi Covid-19

Pada akhir 2019, Covid-19 pertama kali terdeteksi di China. Kemudian, menyebar di Indonesia pada Maret 2020 dan menyebar ke seluruh dunia pada Juni 2021. Serangan virus mematikan ini menyebabkan lebih dari 646 juta kasus yang dikonfirmasi dan 6,64 juta kematian per 4 Desember 2022.

Dalam buku berjudul *Corona Kills Everything* (2020), Yuswohady (*Managing Partner* Inventure), menulis jika Covid-19 membunuh manusia, sekaligus membunuh produk, jasa, bisnis dan industri. Covid-19 juga membunuh kebiasaan-kebiasaan kita. Yuswohady menyatakan: "Saya mengumpulkan 80 produk, bisnis, dan kebiasaan yang dibunuh oleh Covid-19." Dunia industri, ekonomi dunia termasuk ekonomi ASEAN, memasuki masa kelam.

Meski demikian, selalu ada hikmah dibalik sebuah musibah atau peristiwa. Kendati pandemi Covid-19 memberikan tantangan berat bagi perekonomian, namun pandemi Covid-19 memiliki dampak positif, salah satunya mendorong percepatan ekonomi digital. Khususnya untuk sektor *e-commerce*, *online media*, *e-payment*, *online travel* serta *ride hailing*. Pandemi Covid-19 mendorong pergeseran perilaku masyarakat ke arah *less contact economy* atau melakukan transaksi bisnis tanpa tatap muka/bersentuhan secara fisik.

Ekonomi Digital jadi Harapan

Pertanyaan penting: Apakah Ekonomi Digital menjadi salah satu solusi penting dan/atau pondasi kebangkitan ekonomi Indonesia maupun ekonomi ASEAN? Pada tahun 1995, Don Tapscott memperkenalkan istilah ekonomi digital (*digital economy*) lewat bukunya berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang mengacu pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *digital-based economy*, *internet economy*, *web economy*, *new economy knowledge* maupun *new economy*.

Ekonomi digital dapat digolongkan menjadi *e-commerce*, *financial technology* (*fintech*) maupun *on demand service*. *E-commerce* merupakan transaksi jual beli elektronik dengan media internet. Keberadaan *e-commerce* menghubungkan penjual dan pembeli, sehingga membuka peluang lebih luas bagi pembeli mendapat barang dan jasa serta memperluas pasar bagi penjual. Melalui *e-commerce*, penjual tidak perlu menyediakan modal tambahan membuka toko secara fisik atau mengeluarkan modal besar berpromosi. Semua dapat dilakukan lebih mudah, murah dan cepat melalui *e-commerce*. Sejumlah pelaku bisnis *e-commerce* di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, BliBli, Shopee, serta Lazada.

Mengacu pada laporan McKinsey (2018), setidaknya perdagangan *online* memiliki dampak di empat area. Pertama, *financial benefits*. Memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, seperti Indonesia sebagai pasar terbesar untuk *e-commerce* di Asia Tenggara (ASEAN). Saat ini, nilainya lebih kurang US\$ 2,5 miliar dan diprediksi menjadi US\$ 20 miliar pada tahun 2022. Kedua, *job creation*. Ekonomi digital diproyeksikan menciptakan 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022. Mayoritas pekerjaan baru ini dipengaruhi oleh pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Maka tidak heran jika Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada UMKM di China. Faktor ketiga yaitu *buyer benefits*. Harga-harga di *marketplace e-commerce* cenderung lebih murah dari harga di pasar *offline* (mal, minimarket, dll). Keempat, *social equality*. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan jender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan maupun masalah sosial lainnya.

Pemerintah RI dan Bank Indonesia (BI) memiliki kepedulian sama terhadap pertumbuhan sekaligus perkembangan ekonomi digital. Pasalnya, digitalisasi ekonomi terbukti telah membawa berbagai perubahan secara eksponensial.

Ekonomi digital memiliki 4 hal penting yang terkait dengan aktivitas ekonomi digital; *Pertama*, letak geografis tidak lagi relevan; *Kedua*, adanya *platform* tertentu yang menjadi kunci utama; *Ketiga*, berkembangnya jejaring kerja serta, *Keempat*, adalah penggunaan big data. Melalui ekonomi digital, bisa memberikan benefit atau manfaat dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan *cost production*, kolaborasi, terkoneksi nya pihak satu dengan pihak lain. Maka dari itu, transformasi ekonomi digital layak dijadikan pilihan solusi sebagai harapan selama dan pasca Pandemi Covid-19. Pendorong pertumbuhan ekonomi baru (*new economy*).

Proyeksi Lembaga Internasional

Sejumlah lembaga keuangan dunia memproyeksi Indonesia akan menjadi negara maju. Pada tahun 2012, dalam laporan “*ASEAN, The PRC, and India: The Great Transformation*”, Asia Development Bank (ADB) dan Asian Development Bank Institute (ADBI) menyebutkan pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara maju. Salah satu indikatornya, perekonomian akan beralih menuju Kawasan Timur ke negara-negara berkembang saat ini. Kemudian, Standard Chartered (Stanchart) juga menerbitkan laporan khusus berjudul: “*The Super-Cycle Report*”. Poin dalam laporan ini mengatakan bahwa Indonesia diprediksi menjadi raksasa ekonomi dunia sekitar tahun 2030-2050. Posisi Indonesia berada pada nomor 5 setelah China, Amerika Serikat (AS), India dan Brasil.

Sedangkan majalah bergengsi dunia, *The Economist*, memunculkan akronim CIVETS; kepanjangan dari Columbia/ Kolombia, Indonesia, Vietnam, Egypt/Mesir, Turki, dan South Africa/Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonomi di masa mendatang. Lembaga keuangan bergengsi, *Morgan Stanley*, memperkirakan PDB Indonesia bisa tembus US\$ 800 miliar pada 10 tahun ke depan. Standar Chartered Plc, menerbitkan laporan proyeksi jangka panjang yang dikutip dari media *Bloomberg*, Rabu (9/1/2019). Dalam laporannya, *Standard Chartered Plc* memprediksi pada tahun 2030, terdapat 7 dari 10 negara berkembang menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto (PDB) berdasarkan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP).

Peta Jalan Ekonomi Digital Indonesia

Pada tahun 2016 atau empat tahun sebelum Pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia sudah proaktif mengembangkan *E-Commerce* melalui Paket Kebijakan ke-XIV mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau *Roadmap E-Commerce*. Terdapat lima tujuan dan manfaat *Roadmap E-Commerce*.

Tujuan dan Manfaat	Penjabaran
Pertama	Memberikan dorongan perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia dengan cara efisien serta bisa terkoneksi secara global.
Kedua	Mendorong upaya kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru pada kelompok generasi muda. Kegiatan ekonomi baru yang berjalan akan menjadi lebih luas dan lebih jauh jangkauannya serta lahir inovasi-inovasi baru.
Ketiga	Memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan <i>E-Commerce</i> . Roadmap ini memberi arah, panduan strategis dan kemudahan arah dalam percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik pada periode tahun 2016-2019.
Keempat	Memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), maupun pelaku usaha pemula
Kelima	Meningkatkan keahlian sumber daya manusia di sektor <i>E-Commerce</i> sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan dan/atau menyesuaikan kebijakan sektoral untuk pengembangan <i>E-Commerce</i> .

Sumber: Kemenko Perekonomian.

Kelima tujuan dan manfaat ini membutuhkan 7 poin penting kebijakan, diantaranya; Pendanaan, Perpajakan, Perlindungan Konsumen, Pendidikan dan SDM (Sumber Daya Manusia), Logistik, Infrastruktur Komunikasi, dan *Cyber Security*.

Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah Indonesia menyatakan Pandemi Covid-19 justru menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Pada 2025, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan Rp2.050 triliun, dan pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 triliun. Hal ini didukung sektor *e-commerce*, *online media*, *online travel*, serta *ride hailing*. Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di ASEAN atau mewakili 40% digitalisasi di ASEAN dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif.

Dalam acara *CNBC Indonesia Economic Outlook 2022*, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun pada tahun 2030. Artinya Indonesia akan menguasai 29,96% (nyaris 30%) atau menjadi pasar ekonomi digital Indonesia terbesar di ASEAN. Ke depan, angka tersebut dipastikan terus bertumbuh. Menurut Menteri BUMN, ekonomi digital diprediksi tumbuh delapan kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan kolaborasi antara Google, Temasek, dan Bain & Co, nilai ekonomi digital di ASEAN sebesar US\$ 1 triliun pada tahun 2030 (atau Rp 14.351 triliun, dengan asumsi US\$ 1 setara Rp 14.351 seperti kurs tengah Bank Indonesia (BI) 23 Maret 2022). Pada 2030, laporan Google, Temasek, dan Bain & Co itu menyatakan penetrasi internet di ASEAN akan mencapai 75% dari populasi. Delapan dari 10 pengguna internet sudah membeli barang minimal 1 kali. Maka dari itu, Menteri BUMN menyatakan, inovasi dan investasi harus diseimbangkan. Tujuannya adalah Indonesia tidak hanya menjadi pasar. "Kita tidak anti asing tapi penting sekali kita harus ada *roadmap* Indonesia bukan *roadmap* China, *roadmap* Amerika, tapi *roadmap* Indonesia," ujar Erick (*Tim Riset CNBC Indonesia, 2022*).

Penopang Ekonomi Digital

1. Bonus Demografi

Seiring dengan tingginya potensi ekonomi digital tersebut, Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi pada tahun 2030. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia sesuai data BPS. Sehingga, pada 2030, jumlah ini diperkirakan meningkat pesat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memanfaatkan momentum tersebut guna mempercepat pembangunan berbagai sektor, diantaranya transformasi digital dengan mendorong mutu dan daya saing SDM.

Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Besarnya penduduk usia produktif tersebut merupakan SDM yang berkualitas, dengan kemampuan menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta kemampuan mentransformasikan ekonominya. Sehingga, keberadaan mereka diproyeksi menopang pertumbuhan ekonomi digital, sehingga dalam proyeksi jangka panjang menurut OECD, ekonomi Indonesia akan mencapai US\$ 8,89 triliun atau naik hampir tiga kali lipat dibanding kondisi saat ini dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

2. Migrasi ke Platform Digital

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan pandemi telah menjadi katalis bagi konsumen untuk bermigrasi ke *platform* digital. Menurut Menteri Sandiaga pada webinar "*Indonesia-Vietnam Business Opportunities to Accelerate Economic Recovery: Creative Economy and Digital Economy*", yang diselenggarakan Konsulat Jenderal RI Ho Chi Minh City, Rabu (24 November 2021), Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi digital yang besar. Pasalnya, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta orang. Kemudian, nilai transaksi perdagangan digital mencapai lebih dari US\$ 18 juta di tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi US\$ 23,5 juta.

Tren perkembangan perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia juga terus menunjukkan kenaikan akibat memperoleh ‘manfaat’ migrasi ke *platform* digital. Kini, Indonesia memiliki beberapa *startup* yang mendapat gelar **Unicorn** yaitu *startup* dengan valuasi melampaui US\$1 miliar atau sekitar Rp14,3 triliun. Berikut datanya.

No	Nama <i>Start-Up</i>
1.	Gojek
2.	Tokopedia
3.	Traveloka
4.	Ajaib
5.	Bukalapak
6.	OVO
7.	Kopi Kenangan
8.	Xendit
9.	Tiket
10.	J & T
11.	Kredivo
12.	DANA
13.	BliBli

(Sumber: www.cnbcindonesia.com, update 22 September 2022)

Sejak pandemi Covid-19, laporan kolaborasi Google, Temasek, dan Bain & Co, mengungkapkan terdapat 60 juta konsumen digital baru. Sebanyak 20 juta dari 60 juta konsumen digital baru itu bergabung pada Semester I 2020. Sehingga, total konsumen digital menjadi 350 juta di ASEAN. Kemudian, di tahun 2020, nilai pembelian barang dari internet tercatat US\$ 117 miliar di ASEAN. Angka ini meroket 49% dibandingkan tahun 2019. Hingga tahun 2025, laju pertumbuhan pembelian barang dari internet diperkirakan 20% per tahun.

Platform perdagangan daring (*e-commerce*) dinilai menjadi pemain utama di sektor ekonomi digital. Pada tahun 2025, nilai perdagangan *e-commerce* diperkirakan tembus US\$ 234 miliar di ASEAN. Transaksi tertinggi di *e-commerce* adalah pemesanan makanan-minuman. Atau dipesan sebanyak 71% pengguna internet sehingga menjadi penetrasi paling tinggi. Diikuti layanan keuangan digital (*Financial technology/FinTech*). Pembayaran digital dan *e-wallet* makin digemari pengguna internet. Pembelian barang dan jasa mulai menggunakan pembelian serta pembayaran *online*. Pada 2021, transaksi *fintech* menjadi US\$ 707 miliar atau tumbuh 9% dibandingkan 2020. Pada 2025, diperkirakan US\$ 1,17 triliun. *FinTech* juga merambah fitur simpan-pinjam. Pada 2021, transaksi simpan-pinjam berbasis *fintech* mencapai US\$ 39 miliar di ASEAN atau naik 48% dibandingkan 2020. Pada 2025, diperkirakan US\$ 116 miliar.

Kolaborasi Pentahelix

Pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan ekonomi digital terbesar ASEAN dalam di tahun 2025 atau 2030. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak kalangan. Pentahelix atau multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak, di antaranya, Academy (dunia pendidikan), Business (pelaku usaha), Community (komunitas), Government (pemerintah), and Media (ABCGM). Kolaborasi ABCGM akan tercipta Ekosistem Terbesar Ekonomi Digital di ASEAN.

Guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta penguatan keuangan digital, Bank Indonesia (BI) menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 pada 11 Juli 2022. FEKDI 2022 memiliki tema “*Advancing*

Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery". FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi maupun kolaborasi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang digelar BI dan Kemenko Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian/Lembaga serta industri⁴².

Kesiapan SDM Digital Indonesia

Dalam acara Peer Learning Meeting Nasional 2022 dengan tema "*Gerakan Kolaborasi & Sinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat Berkelanjutan*", Senin, 5 Desember 2022, Pemerintah menyampaikan dukungan program pengembangan talenta digital, diantaranya; Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy, dan Program Siber Kreasi. Program kartu prakerja juga diperbanyak agar bisa memenuhi kebutuhan 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Langkah-langkah ini untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Di samping itu, Pemerintah juga mendorong kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mempercepat investasi SDM dalam memenuhi kebutuhan kompetensi yang sejalan perkembangan tren global. Strateginya dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi yang berfokus pada SMK, Politeknik, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Mempersiapkan SDM yang unggul, tangguh, lincah serta siap pakai di dunia kerja juga dinilai dapat mampu menghadapi tantangan dalam era Revolusi Industri 5.0 seperti saat ini. Pemerintah juga menggenjot literasi ekonomi digital masyarakat secara inklusif untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam menguasai pasar ekonomi digital di ASEAN. (*)

Referensi

Khurniawan, Arie Wibowo Khurniawan (Cetakan I: 2019). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dukung Sumber Daya Manusia (SDM) 'Tol Langit'. Jakarta: Penerbit Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4694/indonesia-tekanan-inovasi-ekonomi-digital-dan-ekonomi-hijau-dalam-pertemuan-dengan-dewan-dunia-usaha-asean> (diunduh 6 Desember 2022)

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/integrasi-ekonomi-dalam-rumpun-asean> (diunduh 6 Desember 2022)

<https://indonesiabaik.id/infografis/menjadi-ekonomi-digital-terbesar-asean-di-2025> (diunduh 6 Desember 2022)

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417522.aspx (diunduh 6 Desember 2022)

ZAKY AL HAMZAH adalah *Founder* Zakee Media Inspira (sejak 2016-sekarang). Penulis lulus FH UNSOED pada Juni 2002. Berkarir di Harian Radar Madin (JPPN Group) (Agustus 2002-Januari 2023), Harian Republika di Wilayah Jawa Timur (1 Januari 2004-Maret 2005). Pada Maret 2005 di Harian Republika (Mahaka Group) di Jakarta. Pada 2011, menjabat Penanggung Jawab Rubrikasi Kreatipreneur. Ia meraih 8 penghargaan Kompetisi Jurnalistik Tingkat Nasional dari berbagai institusi dan menerbitkan 35 buku. Selain bertugas di Jabodetabek (2005-2014), Zaky pernah tugas jurnalistik di 28 dari 38 provinsi di Indonesia. Tiga kali tugas ke Jepang, 3 kali ke Malaysia dan 73 hari menjadi Tim Media Center Haji (MCH) di Arab Saudi pada 2014. Pada Oktober 2014-Juni 2015, ia jadi Koordinator Tim Media Sosial Republika Group. Hingga Desember 2022, ia menyusun 52 buku AR, 5 buku SR, 3 buku Compro, 3 edisi majalah internal & 5 Buku Literasi di Kemendikbud, serta berkontribusi menerbitkan 35 buku. Penulis bisa dihubungi di 089676942939 (WA) dan email: datazakee@gmail.com.

42 Sinergi dan kolaborasi tersebut diperkuat melalui komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Acara ini merupakan rangkaian side event pada G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Bali. Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, kini digitalisasi sudah menjadi pilar Indonesia Maju. Sehingga, dia mendorong perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia dalam FEKDI 2022. Menurut Perry, sinergi dan inovasi yang inklusif dibutuhkan demi memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. "Indonesia sudah maju secara digital," tegasnya.

Transformasi Digital dalam Pemulihan Ekonomi ASEAN

Supriyanto

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi terus mengalami perubahan secara cepat, hal ini terjadi akibat dari beberapa faktor yang menghancurkan perkembangan teknologi yang diantaranya adalah tren penggunaan teknologi itu ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia yang membuat masyarakat mengalami pembatasan aktivitas fisik dan sosial sehingga siapa atau tindak masyarakat harus menggunakan berbagai alternatif agar tetap terus bekerja. Pada era globalisasi dan era informasi yang membawa tren transformasi digital dalam memunculkan keberlangsungan kegiatan ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi juga pada kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*).

Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa bidang yang telah melakukan transformasi ini seperti pendidikan dengan e-learning-nya, bisnis dengan e-bisnis, perbankan dengan e-banking, pemerintah dengan e-government dan masih banyak lagi yang lain, intinya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan berkas pendukungnya dengan menggunakan database. Paperless adalah tujuan utamanya, semua bukti transaksi yang berupa dokumen telah tergantikan dengan database sehingga lebih simpel, fleksibel dan dapat diakses setiap saat (Danuri, 2019), sehingga tak heran jika transformasi digital merupakan salah satu harapan dan bisa menjadi kunci percepatan pemulihan dan peningkatan daya tahan ekonomi, serta upaya mengakselerasi transformasi digital juga menjadi strategi dalam memastikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kawasan ASEAN.

Saat situasi berubah menjadi situasi yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka transformasi digital / *Digital Transformation* (DT) merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Meskipun pengertian transformasi digital secara spesifik belum disepakati oleh para peneliti. hampir semua proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dialihkan ke media digital. Transformasi digital, secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses radikal yang terjadi di organisasi dalam memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang menyebabkan performa bisnis dari organisasi tersebut berubah drastis.

Proses atau kegiatan yang biasanya dilakukan secara fisik berkurang drastis. Tekanan untuk beralih ke media digital agar proses/kegiatan dapat tetap berjalan sekaligus bertahan disituasi pandemi ini semakin meningkat. Dari apa yang sudah diuraikan, artikel ini disajikan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih jauh apa itu transformasi digital dan peran Indonesia dalam ASEAN serta bagaimana dampak transformasi digital terhadap perekonomian ASEAN yang ditimbulkan serta kesimpulan dari topik yang diangkat di artikel ini.

Peran Indonesia dalam ASEAN

Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Pada masa ke ketuaan tersebut, Indonesia kembali ingin menjadikan ASEAN *people-centered* sebagai entitas sentral dalam upaya membumikan konsep dan manfaat ASEAN yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat negara anggota ASEAN secara luas. Tugas tersebut tidak mudah mengingat berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di kawasan maupun pada tataran internasional, termasuk dampak krisis pandemi covid-19 pada sektor ekonomi dan kesehatan (Candra, 2019).

Kepemimpinan ASEAN merupakan cerminan dari penerimaan bersama terhadap kebijakan negara anggota ASEAN di bawah koordinasi ke ketuaan yang dirotasi secara alfabet setahun sekali. Kepemimpinan masing-masing negara

akan mempengaruhi penentuan dan implementasi kebijakan di ASEAN. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN dan pentingnya Indonesia memainkan peranan dalam keketuaan ASEAN. Meskipun merupakan pilar yang sangat penting, penggunaan teknologi di Indonesia menghadapi banyak tantangan khususnya dalam beradaptasi dengan sistem digital dan di tengah persaingan global dan kawasan. Indonesia harus siap bersaing dengan negara ASEAN lainnya melalui penguatan infrastruktur untuk mengembangkan teknologi terbaru dan regulasi yang dapat membentuk habitat ekonomi yang dinamis sektor tersebut.

Kebijakan di kawasan ASEAN harus pro terhadap transformasi digital seiring dengan kebutuhan yang dituntut oleh revolusi teknologi digital. Peran dari transformasi digital di ASEAN dapat memacu pertumbuhan inovasi dan produktivitas di banyak kegiatan, seperti efisiensi pada layanan publik, meningkatkan kesejahteraan melalui kebutuhan informasi, pemerataan ketersediaan pengetahuan, akses pendidikan dan data.

Selain itu, ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia dituntut untuk mampu menavigasikan transformasi teknologi di tengah kecenderungan regulasi yang berbeda pada setiap negara untuk kepentingan kemakmuran bersama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dampak Transformasi Digital

Pertama, pandemi Covid-19 kerap menghadirkan resesi. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan berkontraksi 2,7% karena fenomena virus corona. Dampak kolektif ekonomi ini dipetakan setara dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Tidak hanya ASEAN, di kawasan maju seperti Eropa pun resesi terjadi dengan sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa merosok hingga menyentuh angka 12,1%. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa hadirnya pandemi di era keterkaitan global menjadi penghadang kondisi ekonomi suatu kawasan (ASEAN, 2020).

Sektor perekonomian yang paling terdampak dalam kebijakan penutupan dan stay at home karena pandemi ini adalah aktivitas tenaga kerja spesifiknya jasa. Terdapat lebih dari 30 juta tenaga kerja di ASEAN terpaksa menjadi pengangguran. Lesunya sektor jasa yang memerlukan interaksi langsung seperti: pariwisata, pelayanan publik, tenaga transportasi maupun industri, menjadi guncangan ekonomi yang memerlukan solusi (Ing, 2020).

Dalam studi kasus Negara ASEAN 5, pandemi Covid-19 telah berdampak pada lebih dari 9 juta tenaga kerja di Indonesia dengan presentase 28,9%. Di Malaysia, lebih dari 100.000 pekerja terdampak kehilangan pekerjaannya. Di Thailand, dalam publikasi CNBC (2021) diterangkan bahwa maskapai penerbangan Thai Airways mengalami pailit dan memberhentikan pekerja jasa dengan total hampir 400 pilot. Di Filipina, setidaknya 428.701 pekerja diberhentikan karena pandemi dan jutaan lainnya bekerja tanpa diberi bayaran. Sedangkan di Vietnam, sebanyak 900.000 (General Statistics Office, 2020).

Kedua, Cyber security masih menjadi tantangan primer di banyak sekali negara pada hal perekonomian digital. Begitu jua dengan investasi digital ekonomi Indonesia. menjadi negara berkembang yang mempunyai peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab buat melakukan penyerangan terhadap global cyber. Bahkan negara kita pernah menerima 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya.

Galat satu bentuk serangan cyber ini artinya *ransomware* yang bisa menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh serta Malaysia. Akibatnya, kerugian yang cukup akbar pun tidak bisa dihindari. sang karena itu, krusial bagi pemerintah membentuk sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi Ekonomi digital (Pramono dkk, 2022).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan dalam memajukan sektok perekonomian di Indonesia maupun di ASEAN. Pertama, Indonesia harus memperkuat infrastruktur teknologi digital dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar di kawasan namun juga bagaimana memanfaatkan keterbukaan perdagangan terutama di ASEAN untuk peningkatan ekonomi dan pemulihan

ekonomi. Dalam hal ini, pentingnya menempatkan teknologi digital dalam pemetaan strategis ekonomi nasional termasuk bagaimana mendorong marketplace nasional untuk bisa menembus pasar internasional.

Kedua, pentingnya pemerataan infrastruktur termasuk literasi digital bagi penduduk Indonesia. Saat ini penetrasi internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menduduki peringkat ke-tujuh di ASEAN, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan ini dengan cepat. Dengan besarnya tantangan karena kondisi geografis yang berupa kepulauan, tanpa pemerataan infrastruktur berupa internet, maka berpotensi untuk memperparah usaha pemerataan kesejahteraan penduduk karena berfokus pada perkembangan yang ada di pulau dan kota utama saja.

Ketiga, regulasi yang mengatur ekonomi digital Indonesia masih belum memasukkan faktor keamanan siber secara mendalam. Ini berarti bahwa keamanan data pribadi pengguna masih belum sepenuhnya bisa dimitigasi untuk menjaga keamanan. Padahal laju perkembangan dunia digital sangat cepat, dan melebihi kecepatan pembuatan regulasi yang holistik.

Keempat, pola pikir masyarakat yang masih belum sepenuhnya untuk berkompetisi juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi untuk menghambat perkembangan secara cepat. Hal ini karena kemajuan e-commerce sangat ditentukan oleh pemain yang ada di dalamnya, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Jika ini terus terjadi, produk dari luar negeri yang sudah secara besar-besaran masuk ke dalam sistem, akan menjadi opsi yang dominan tanpa disadari dan menjadi *predatory pricing* yang menjadi strategi pemodal besar masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun marketplace.

Kelima, kemampuan inovasi dan keberpihakan pada perlindungan privasi serta keamanan siber maupun perlindungan data dan kekayaan intelektual sesuai dengan ASEAN *Digital Integration Framework Action Plan* (DIFAP) 2019-2025. Isu ini juga harus menjadi prinsip kebijakan negara ASEAN yang mesti terus dikedepankan untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM sebagai pelaku dunia usaha e-commerce.

Keenam, meningkatkan *digital talent base* yang merupakan target pencapaian dari ASEAN Masterplan on Connectivity dan ASEAN Digital Masterplan. Selain itu Pemerintah juga perlu mendorong keseimbangan antara perpajakan dan insentif terhadap UMKM dan mendorong akses pasar bahkan hingga keluar ASEAN dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*).

Selain itu, guna mempersiapkan bekal bagi generasi muda dalam menghadapi transformasi dunia kerja di masa mendatang, Pemerintah juga telah memberlakukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya, Pemerintah juga mendukung upaya peningkatan riset dan inovasi digital, khususnya bagi pengembangan bisnis dan start-up melalui penciptaan ekosistem yang kondusif dan mampu memperkuat kolaborasi antar stakeholders serta peningkatan investasi di bidang riset, pengembangan, dan penerapan teknologi digital yang inovatif. *

Referensi

- Candra (2019). Policy Brief Policy Brief. *Pancanaka*, 1(04), 14. https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_penguatan_kbk_dalam_meningkatkan_mutu_rujukan_non_spesialistik.pdf
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- General Statistic Office. Report on the Impact of Covid-19 on Labour and Employment of the Third Quarter of 2020. Vietnam. <https://www.gso.gov.vn/en/data-andstatistics/2020/10/report-on-the-impact-of-covid-19-on-labour-andemployment-ofthe-third-quarter-of2020/>
- Ing, L. Y. (2020). Improving ASEAN COVID-19 response: Implementation Key - The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/07/improving-aseancovid-19response-implementationkey.html>
- Morakanyane, R., Grace, A., & O'Reilly, P. (2017). Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature. Bled eConference.

Pramono, B., Prakoso, L. Y., Alman, G. C., Rianto, R., Sutrasna, Y., Sulistyadi, E., ... & Almubaroq, H. Z. (2022). Kebijakan Ekonomi Digital Diantara Peluang Dan Ancaman Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 3225-3230.

SUPRIYANTO lahir di Tolitoli (Muara Besar) pada 19 Desember 1995 dan sekarang menetap di Kota Manado. Menyelesaikan pendidikan stata satu (S1) pada jurusan ilmu ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan kemudian melanjutkan Pendidikan magister (S2) pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada jurusan ilmu ekonomi dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Perencanaan Pembangunan Regional dan Daerah. Saat ini ia aktif sebagai dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Ia dapat dihubungi di email: supriyanto@unima.ac.id.

Bagian Ketiga

Membangun Sistem Pendidikan ASEAN Berkualitas

BAB 10

Imajinasi Baru Pembelajaran Pasca Learning Loss Covid-19

Metaverse di Dunia Pendidikan ASEAN

Arrizal Muhaemin Yunus

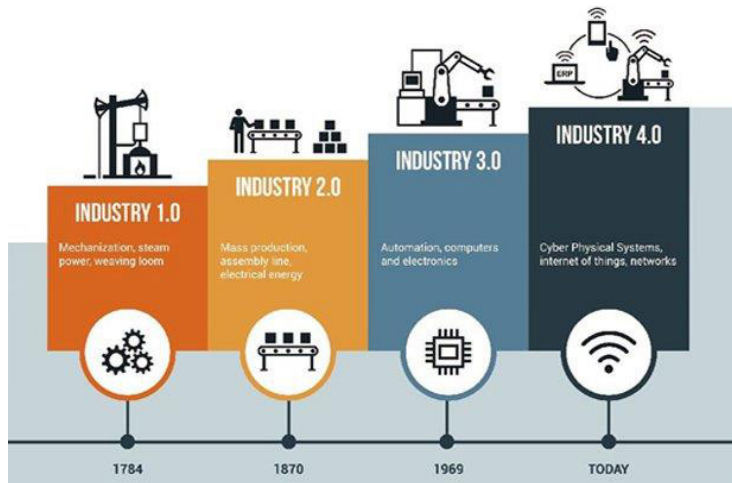
“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu”

--H.R. Ali Bin Abi Thalib

Metaverse

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dianggap sebagai cara untuk mengimbangi arus globalisasi saat ini. Teknologi adalah bagian integral dari perkembangan zaman, dan dapat diaplikasikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dengan era globalisasi saat ini, negara-negara di seluruh dunia saling bersaing untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negaranya masing-masing. (Battu & Bender, 2020).

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, telah memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan dunia pendidikan. Perkembangan dalam bidang pendidikan tak terlepas dari perkembangan revolusi industri yang terjadi di seluruh dunia, karena secara tidak langsung berpengaruh pada tatanan ekonomi dan juga tatanan pendidikan di berbagai negara. (Rachmadtullah et al., 2020).



Perkembangan revolusi industri (Sumber: Alaloul et al., 2020)

Pada era canggih dan modern ini, bukan lagi hal yang asing bila kita menyebut METAVERSE. Baru-baru ini, METAVERSE menarik perhatian semua orang di dunia maya. Metaverse adalah istilah dalam Bahasa Inggris, jika dalam Bahasa Indonesia menjadi metasemesta, atau metamesta. Istilah “metaverse” mengacu pada ruang bersama virtual kolektif, yang diciptakan oleh konvergensi realitas fisik yang disempurnakan secara virtual dan ruang virtual yang persisten secara fisik, termasuk jumlah dari semua dunia virtual, augmented reality, dan internet. Konsep metaverse telah ada selama beberapa dekade, tetapi telah mendapatkan perhatian baru dalam beberapa tahun terakhir karena proliferasi teknologi virtual dan *augmented reality*.

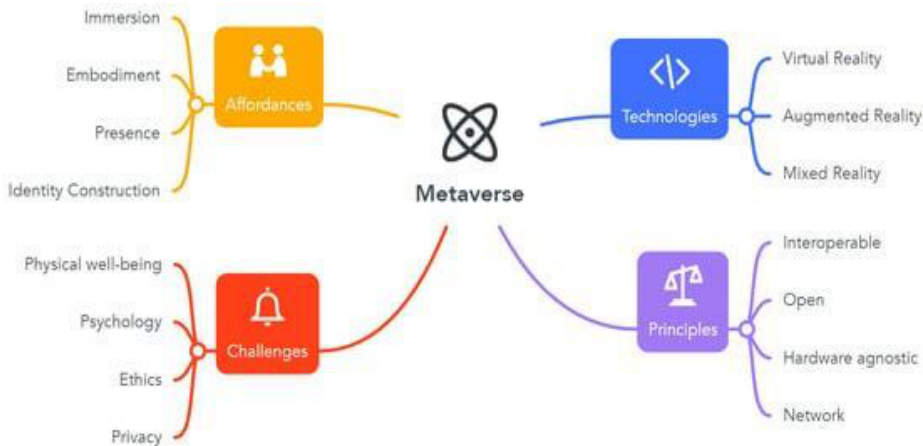
Teknologi ini memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan ruang dan objek virtual dengan cara yang lebih mendalam dan realistis, mengaburkan batas antara dunia fisik dan digital. Beberapa contoh aplikasi metaverse termasuk game realitas virtual, platform media sosial realitas virtual, dan pengalaman belanja realitas virtual. Ada juga banyak aplikasi praktis potensial untuk metaverse, seperti pekerjaan jarak jauh, pendidikan, dan hiburan. Perlu dicatat bahwa konsep metaverse sebagian besar masih bersifat teoretis, dan belum jelas bentuk apa yang pada akhirnya akan diambil atau bagaimana akan digunakan. Namun demikian, ini adalah bidang teknologi yang menarik dan berkembang pesat, yang memiliki potensi untuk secara signifikan memengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi dengan satu sama lain dan dunia di sekitar kita.

Pengguna harus masuk ke dunia virtual menggunakan perangkat modern, seperti *headphone*, AR atau VR. Mereka juga membutuhkan akses internet untuk melakukannya. Di dalamnya, para pengguna bisa melakukan berbagai hal, mulai dari investasi sampai pekerjaan jarak jauh. Metaverse memungkinkan untuk melakukan semua aktivitas yang ada di dunia nyata; seperti belajar, bermain, rapat, belanja, bekerja dan lain-lain. Bahkan pendidikan juga bisa dilakukan dalam dunia virtual. Sekolah akan dibangun di dunia virtual, kelas-kelas akan ada di dunia virtual, pembelajaran dilakukan secara virtual, bahkan administrasi sekolah juga dapat dilakukan secara virtual. Tentu kita tidak dapat menolak kemajuan teknologi. Justru kita harus memanfaatkannya sebagai alat untuk membuat sesuatu yang positif. Oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi seperti metaverse, dunia pendidikan mau tidak mau harus menyiapkan diri menyambut teknologi tersebut.

“Berkembangnya teknologi di era 4.0, membuat dunia pendidikan semakin berkembang pesat. Hal ini memicu para pendidik untuk menciptakan terobosan baru sehingga menyederhanakan proses pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Teknologi saat ini telah membantu pendidikan untuk maju dan tetap *up-to-date*, karenanya calon pendidik dipersyaratkan untuk bisa mengoperasikan dan memanfaatkan komputer, internet, dan lainnya.

Pendidikan dalam arti yang sederhana adalah proses memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta berperilaku secara tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dari yang sederhana hingga canggih dapat merangsang proses belajar yang baik secara formal, informal, atau nonformal. Pendidikan juga dilakukan sebagai cara membentuk potensial seorang pelajar guna melepaskannya dari zona nyamannya melalui proses belajar mandiri.

Media pembelajaran pun dipertimbangkan penting untuk menambah minat belajar para siswa. Fungsi utama media pembelajaran adalah alat bantu mengajar untuk memotivasi siswa dengan suasana belajar yang diciptakan oleh guru atau pendidik.”



Teknologi metaverse, prinsip, keterjangkauan, dan tantangan.

Pendidikan di ASEAN

Metaverse tidak lagi sebuah ide baru. Teknologi ini memberikan ruang tiga dimensi bebas di mana pengguna bisa bertemu dan berinteraksi secara virtual. Popularitas Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) telah meningkat. Kedua teknologi ini menjadi bagian penting dari metaverse dan menghadirkan tampilan digital yang komprehensif dan lebih memukau. Di ASEAN, kemajuan metaverse diikuti oleh hadirnya Non-Fungible Token (NFT) sebagai representasi aset dan bukti kepemilikan produk digital. Token digital ini dapat menyimpan data yang tidak bisa diubah di blockchain.

Metaverse adalah sebuah dunia virtual yang terhubung ke dunia nyata dan dapat diakses melalui internet. Di ASEAN, perkembangan metaverse sedang berkembang dengan cepat dengan banyak perusahaan dan individu yang mulai mengembangkan dan menggunakan metaverse untuk berbagai keperluan, seperti hiburan, komunikasi, pendidikan, dan bisnis.

Beberapa contoh perkembangan metaverse di ASEAN adalah:

1. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) telah mulai digunakan secara luas di ASEAN untuk berbagai keperluan, seperti hiburan, pendidikan, dan pelatihan.
2. Banyak perusahaan di ASEAN telah mengembangkan aplikasi VR dan AR untuk berbagai keperluan, seperti simulasi pelatihan, pengalaman hiburan, dan pemasaran produk.
3. Metaverse juga telah digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja online, dengan pengguna dapat melihat dan mencoba produk secara virtual sebelum membelinya.
4. Metaverse juga telah digunakan untuk meningkatkan pengalaman konferensi dan seminar online, dengan pengguna dapat berinteraksi secara virtual dengan peserta lain di dunia nyata.
5. Banyak negara di ASEAN juga telah mulai mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mengintegrasikan metaverse ke dalam ekonomi dan masyarakat, termasuk pengembangan industri metaverse dan penciptaan lapangan kerja di bidang tersebut.

Namun, perkembangan metaverse di ASEAN juga tidak terlepas dari tantangan, seperti masalah keamanan dan privasi, masalah akses terhadap teknologi metaverse yang masih terbatas di beberapa daerah, dan masalah regulasi yang belum terlalu jelas.

Pendidikan di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) bervariasi dari negara ke negara. Namun, beberapa karakteristik umum pendidikan di ASEAN adalah:

1. Pendidikan dasar dan menengah di ASEAN umumnya diselenggarakan oleh pemerintah negara, meskipun ada juga sekolah swasta yang tersedia.
2. Banyak negara ASEAN mengadopsi sistem pendidikan yang terinspirasi oleh sistem pendidikan di negara-negara Barat, seperti sistem pendidikan Prancis atau Inggris.
3. Pendidikan tinggi di ASEAN terdiri dari universitas swasta dan negeri, serta institusi lain seperti polytechnics dan institusi vokasi.
4. Beberapa negara ASEAN mengalami masalah dengan akses terhadap pendidikan yang merata, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil.
5. Banyak negara ASEAN juga mengalami masalah dengan kualitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dasar dan menengah, yang dapat mempengaruhi prestasi siswa.
6. Banyak negara ASEAN juga mengalami masalah dengan kelangkaan guru, terutama di daerah-daerah terpencil atau di sekolah-sekolah di daerah pedesaan.
7. Sekolah-sekolah di ASEAN umumnya menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar untuk pelajaran, meskipun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa pengantar untuk pelajaran tertentu seperti sains dan teknologi.

Peran Metaverse dalam Pendidikan di ASEAN

Seperti yang kita tahu, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada metode belajar di dunia pendidikan. Yang awalnya belajar bertemu tatap muka dengan guru, sekarang harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Dengan konsep dunia virtual yang diusung oleh metaverse, pembelajaran secara online dapat dilakukan dengan lebih interaktif. Adanya teknologi metaverse dalam dunia pendidikan dapat membantu mutu pendidikan menjadi lebih baik dan lebih modern.

Seorang pelajar dan mahasiswa tidak hanya bisa memahami suatu teori. Tapi ia juga bisa merasakan pengalaman langsung. Dengan berkunjung dan bersentuhan langsung dengan objek yang dipelajarinya menggunakan virtual reality. Sebagai contoh, dalam pelajaran geografi, guru dapat mengajak murid melihat peristiwa gunung meletus, pada pelajaran sejarah tidak perlu membawa murid ke museum di dunia nyata dan pada pelajaran biologi saat praktik murid bisa mengetahui bagaimana organ-organ tubuh hewan tanpa harus membedahnya.

Metaverse, termasuk virtual reality (VR) dan augmented reality (AR), dapat memiliki peran yang penting dalam pendidikan di ASEAN. Beberapa cara metaverse dapat digunakan dalam pendidikan di ASEAN adalah:

1. Menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan: Dengan menggunakan VR atau AR, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, seperti melakukan simulasi atau mengunjungi tempat-tempat yang tidak mungkin dikunjungi dalam kehidupan nyata.
2. Membantu mengatasi masalah akses terhadap pendidikan: Metaverse dapat membantu mengatasi masalah akses terhadap pendidikan di daerah-daerah terpencil atau di negara-negara yang memiliki masalah kelangkaan guru. Dengan menggunakan metaverse, siswa dapat belajar secara online dan terhubung dengan guru dan siswa lain dari berbagai tempat di dunia.
3. Meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi: Metaverse dapat membantu siswa belajar secara kolaboratif dan berinteraksi dengan siswa lain dari berbagai tempat di dunia. Ini dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa.
4. Membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran: Dengan menggunakan metaverse, siswa dapat mempelajari konsep dengan cara yang lebih visual dan interaktif, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam pembelajaran.
5. Membantu mengatasi masalah kelangkaan guru: Metaverse dapat membantu mengatasi masalah kelangkaan guru di beberapa daerah di ASEAN dengan memungkinkan guru untuk mengajar secara online dan terhubung dengan siswa dari berbagai tempat di dunia.

Namun, perkembangan metaverse di bidang pendidikan di ASEAN masih terbatas dan masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah akses terhadap teknologi metaverse yang masih terbatas di beberapa daerah, masalah regulasi yang belum terlalu jelas, dan masalah keamanan dan privasi. Pengembangan teknologi metaverse dalam dunia pendidikan harus turut memperhatikan dampak buruknya. Dampak buruk metaverse harus dihilangkan atau diminimalisir.*

Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/Metamesta#cite_note-IEEE_VW_Standard_Working_Group-2

Reza Rachmadtullah, dkk (2022). Monograf Pembelajaran Interaktif dengan Metaverse. Eureka Media Aksara. Jawa Tengah

ARRIZAL MUHAEMIN YUNUS, lahir di Jakarta 05 Agustus 1986. Menamatkan pendidikan di SD Negeri Cikiwul (1997), SMP Negeri 8 Kota Bekasi (2000), SMA Negeri 6 Kota Bekasi (2003), Pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang (2007), kemudian melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Terbuka (2017). Pengalaman mengajar mulai dari Tutor PRIMAGAMA Cabang Wedoro, SD Islam Al-Azhar BSD, SMP Islam Al-Azhar BSD, dan SMA Islam Al-Azhar BSD. Kegiatan di komunitas juga masih aktif sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Tangerang Selatan, Pengurus MGMP

Matematika Kota Tangerang Selatan, dan Pengurus di KOMED Provinsi Banten. Pengalaman menjadi Google Master Trainer (GMT), Microsoft Inovatif Educator (MIE), Trainer Nasional IGI, Trainer Super Quizizz, School Coach Classpoint, dan Trainer lain-lain. Pengalaman menulis, Kontributor dan Kurator di Antologi RINDU dan Antologi Kurikulum Merdeka antarguru di Tangerang Selatan.

Kerja sama Pendidikan dan Momentum Kepemimpinan Indonesia 2023

Arif Yudistira

“Pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis”

--Socrates

Pendahuluan

Pendidikan adalah alat untuk memajukan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan manusia menjadi sosok yang kuat, tangguh, berkepribadian dan berkemajuan. Manusia hari ini dibentuk oleh Pendidikan di masa yang lalu. Begitu pula sebaliknya, bila ingin melihat hasil pendidikan kita saat ini, kita bisa melihat dua puluh tahun mendatang. Manusia diciptakan di dunia untuk saling mengenal dan peduli. Pesan itu juga menggema dalam pembukaan gelaran piala dunia di Qatar. Pada ajang pembukaan piala dunia, Ghanim Al Muftah membacakan Surat Al-Hujarat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

ASEAN memiliki sejarah panjang yang cukup menggetarkan dunia. ASEAN semula didirikan dalam rangka untuk meningkatkan dan menjalin kerja sama antar negara ASEAN. Negara-negara ASEAN yang waktu itu menjadi negara yang berusia muda atau baru merdeka. Mereka bertekad untuk menjalin kerja sama dan gotong royong untuk meningkatkan hubungan antar negara ASEAN.

Pada tahun 2019, UNESCO menerbitkan sebuah buku menarik tentang negara ASEAN. Buku diberi judul *Memahami Sejarah Bersama: Sebuah Paket Pengajaran Asia Tenggara* (2019). Buku ini memotret bagaimana sebenarnya sejarah negara-negara Asia Tenggara memiliki satu kesamaan titik temu dan latar belakang yang sama. Mari kita kutip satu pernyataan di buku ini yang menunjukkan kesamaan negara-negara di ASEAN:

Secara historis, mayoritas orang Asia Tenggara tinggal di rumah panggung, sebuah adaptasi lokal terhadap iklim dan tuntutan lingkungan. Ketinggian rumah-rumah ini, biasanya beberapa kaki dari tanah, yang membuat rumah tetap kering selama musim hujan, dingin di musim panas dan jauh dari ternak dan satwa liar yang mungkin berkeliaran di malam hari.

Latar belakang manusia di ASEAN sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari persamaan secara geografis yang membentuk wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN di masa lampau terbentuk oleh factor geografis yang secara berabad-abad dibentuk oleh factor alam yang membuat setiap daerah atau wilayah yang sebelumnya tergabung dalam Austronesia kemudian karena faktor alam menjadi terbentuk secara alamiah memisahkan satu negara ke negara lain.

Meskipun terpisah menjadi antar negara, dan pulau, negeri ASEAN tetap bersatu, menjalin kerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Kerja sama ASEAN diantaranya meliputi berbagai bidang kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial dan juga Pendidikan. Pendidikan merupakan satu bidang efektif bagi ASEAN untuk saling mendorong, mendukung

dan saling membantu diantara negara ASEAN. Dengan kerja sama ASEAN yang baik, Pendidikan antar negara-negara ASEAN bisa ditingkatkan kualitasnya. Kawasan pendidikan ASEAN yang sangat potensial perlu didorong dan dijalin kekuatan bersama untuk mewujudkan semangat pendidikan yang maju untuk meningkatkan kualitas manusia di ASEAN.

ASEAN sampai saat ini juga memiliki satu organisasi yang konsen di bidang pendidikan yaitu SEAMEO. SEAMEO adalah organisasi Menteri pendidikan di tingkat Asia Tenggara. Kerja sama pada SEAMEO ini sangat potensial untuk saling melihat, belajar dan juga saling membantu dalam optimalisasi dan peningkatan mutu pendidikan di negara ASEAN. Sebagai negara yang berada dalam satu rumpun melayu. Secara umum, negara ASEAN memiliki satu kesamaan bahasa yakni bahasa Indonesia.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Shabri pernah mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. *The Conversation.com* (15 April 2022) memberitakan bahwa usulan bahasa resmi salah satu negara menjadi tidak relevan dan mengancam ribuan bahasa daerah lain di Asia Tenggara. Secara geografis, secara sosiologis dan secara realitas kebahasaan, negara ASEAN sebenarnya memiliki latar belakang yang sama dalam hal bahasa. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang cukup menyatukan di kawasan rumpun negara Melayu seperti; Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Selatan Filipina, Thailand Selatan, dan Sri Lanka.

Bahasa bisa menjadi jembatan dan pintu lebih lanjut untuk menjalin kerja sama dan juga program yang saling menguntungkan antar kawasan ASEAN. Sebagai sebuah negara dengan bentang kekayaan alam yang luas, posisi yang strategis, ASEAN bisa menjadi satu poros baru untuk dunia yang lebih baik dari aspek kebudayaan dan pendidikan.

Studi-studi negara Asia Tenggara yang dilakukan para indonesianis telah membuka mata kita tentang satu bentang alam yang memiliki titik temu antara negara ASEAN. Selain itu, temuan-temuan para Indonesianis seperti Benedict Anderson menerangkan ASEAN memiliki satu kesamaan gerak masyarakatnya yang secara sosial memiliki latar belakang gerakan protes sosial yang memiliki keunikan masing-masing negara.

Di samping itu, dalam studi tentang Asia Tenggara, Anthony Reid juga mencatat tentang kesamaan dan karakteristik budaya yang terbentuk di Asia Tenggara yang semakin memperjelas tentang titik temu antara negara-negara di dalamnya. Baik dari sisi makanan, cara berburu dan meramu di kala itu, hingga masyarakat sosialnya.

Problem dan Tantangan

Pertumbuhan dan perkembangan generasi muda di tiap negara tidak bisa terlepas dari pola pendidikan yang dikembangkan di negara tersebut. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan pertemuan, permufakatan dan juga kerja sama antar generasi muda menjadi amat penting.

Semakin banyak kerja sama, forum internasional dan pertemuan lintas negara seperti di ASEAN semakin mengikis konflik, semakin mempertebal persatuan dan mempererat kerja sama. Disamping itu, generasi muda merupakan tumpuan dan pemegang tampuk kepemimpinan di masa depan. Dalam dunia pendidikan, organisasi pemuda di tingkat ASEAN juga memberikan kontribusi penting dan positif dalam mengembangkan wadah aktualisasi serta ruang temu antar negara ASEAN.

Kita tengok sejarah pemuda kita di masa lampau. Banyak kisah dan cerita kepemimpinan anak muda di masa perjuangan kemerdekaan yang telah memimpin perjuangan dan juga organisasi tingkat Internasional. Datuk Ibrahim Tan Malaka misalnya, dalam usia yang sangat muda telah memimpin pergerakan dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia kala itu. Secara historis, apa yang dilakukan oleh founding fathers kita seperti Soekarno-Hatta juga menunjukkan bahwa mereka dalam usia muda sudah memiliki jejaring, relasi dan memimpin pergerakan dalam skala yang cukup luas. Dalam bidang pendidikan, kepemimpinan dan ruang kerja sama itu sudah dibangun dalam organisasi SEAMEO. Dalam bidang beasiswa dalam bidang organisasi kependidikan dan juga pertemuan-pertemuan penting tingkat regional ASEAN yang memiliki imbas dan efek yang cukup luas dalam isu pendidikan di ASEAN.

Kemajuan teknologi dan juga informasi telah terbukti mendorong kemajuan manusia di berbagai pendidikan. Melalui teknologi dan informasi yang ada, kita bisa membangun satu ruang yang bisa dioptimalkan dalam kerja sama pendidikan. Dunia yang semakin kosmopolit ini harus menjadi satu titik tolak untuk mendaki tangga kemajuan.

Kepemimpinan kaum muda sepanjang sejarah telah menciptakan satu inovasi dan juga terobosan penting. Dalam dunia pendidikan, kita juga memerlukan kepemimpinan kaum muda untuk menciptakan satu inovasi dan juga kemajuan

di dalamnya. Isu kepemimpinan organisasi pendidikan maupun lembaga pendidikan perlu menjadi perhatian bersama untuk menghadapi kompleksitas masalah dan tantangan dunia di masa depan.

Di Indonesia sendiri, menjadi Kepala Sekolah cenderung bergantung pada tradisi dan politik kepentingan. Tradisi di sekolah negeri, Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional yang prestisi di lembaga pendidikan bahkan menjadi rebutan. Paradigma pendidikan yang berlaku cenderung pada pendidikan sebagai “lahan basah” atau sarana pengayaan diri. Kebanyakan Kepala Sekolah menjadi terlibat kasus penyalahgunaan Bos yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Logika kepemimpinan sekolah atau lembaga pendidikan seperti ini harus direvolusi. Perubahan atau revolusi paradigma ini bisa lebih cepat saat kepemimpinan sekolah atau lembaga pendidikan diserahkan pada anak muda.

Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim dengan gerakannya Merdeka Belajar telah mampu mengubah paradigma kepemimpinan di pendidikan. Para guru penggerak yang hampir sebagian besar berusia muda didorong dan didukung untuk menduduki kepemimpinan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Roda kepemimpinan anak muda memang identic dengan pembaruan, inovasi dan percepatan kinerja. Apa yang menjadi gagasan Nadiem ini menjadi satu catatan penting mengenai revolusi paradigma kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Tantangannya memang tidak mudah, banyak para Yayasan, atau Lembaga yang berpikiran konservatif yang hanya berorientasi pada untung rugi semata yang menggeser paradigma kepemimpinan pendidikan pada anak muda.

Para kaum muda di Malaysia dan Brunei Darussalam telah menunjukkan satu perubahan yang cukup signifikan dalam terobosan-terobosan dan inovasi dalam bidang teknologi dan pendidikan. Saya ingat dalam pertemuan koperasi se-Asia Tenggara di tahun 2017, yang diadakan di Universitas Gadjah Mada, para anak muda se-Asia Tenggara sudah memiliki gagasan brilian dan praktis dalam dunia pendidikan.

Waktu itu saya mendengarkan dengan seksama bagaimana gagasan mereka tentang lingkungan pendidikan yang hijau dan berkelanjutan. *Green School* yang menjadi gagasan pendidikan di masa depan telah dipraktekkan di Filipina, di Thailand maupun di Malaysia. Konsepsi dan gagasan anak muda tersebut tidak hanya dipraktikkan dalam dunia pendidikan di lembaga mereka, tetapi juga sudah diwujudkan dalam produk yang khas anak muda dan ramah lingkungan.

Pada waktu itu, saya menyimak presentasi dari anak muda Filipina yang memamerkan gagasan jam digital ramah lingkungan yang bisa digunakan sebagai pena. Jam khas anak muda itu yang di klaim ramah lingkungan itu dibuat oleh perusahaan yang dipimpin anak muda. Uniknya, produk itu diproduksi oleh koperasi kampus yang rata-rata mereka berusia muda. Kepemimpinan kaum muda dalam dunia pendidikan adalah hal yang urgen. Dunia pendidikan memiliki potensi dan posisi strategis dalam merubah masa depan suatu bangsa. Gagasan yang sederhana, simple dan praksis menjadi bagian penting kepemimpinan kaum muda.

Saya membayangkan seandainya kepemimpinan lembaga pendidikan vokasi dipimpin oleh anak muda di Indonesia. Potensi yang amat banyak dari Sabang sampai Merauke bahkan di lingkup ASEAN tentu bisa menjadi potensi kerja sama yang besar dalam membangun satu ekosistem baru dalam dunia pendidikan. Apa yang dilihat di Brunei Darussalam dan Filipina hanya satu wujud lingkup kecil saja bagaimana sebenarnya anak muda mampu bila diberi kepercayaan.

Momentum Kepemimpinan Indonesia

Indonesia memiliki satu momentum besar yang sayang untuk dilewatkan dalam isu kepemimpinan dunia. Indonesia saat ini memimpin Presidensi G20 dan juga akan memimpin keketuaan ASEAN di tahun 2023. Momentum kepemimpinan Indonesia di tahun mendatang harus semakin menguatkan kerja sama dan inovasi penting dalam peta pendidikan global terkhusus di tingkat ASEAN.

Sebagai sebuah negara yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan, Indonesia sebenarnya memiliki sejarah penting mengenai kualitas pendidikan. Indonesia dan negara ASEAN harus memiliki peta pendidikan tersendiri yang tidak selalu membebek pada pola pendidikan barat. Semakin ke depan, kita akan melihat bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan di masa mendatang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan karakter dan juga pendidikan adab.

Pendidikan berbasis kebudayaan yang menjadi acuan pendidikan masa mendatang harus dikuatkan tidak hanya di lingkup Indonesia, tetapi juga di lingkup ASEAN. ASEAN dan juga dunia pada umumnya memiliki tantangan untuk membebaskan angka putus sekolah. Kita juga dituntut untuk mempertahankan para aktor dan pewaris kebudayaan yang semakin lama semakin menyusut. Para pelestari kebudayaan di Indonesia maupun di ASEAN sama-sama memiliki tantangan yang sama yaitu mengalami krisis penerus kebudayaan.

Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia tidak bisa dipandang dengan kaca mata negara kecil. Luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah bentang ruang dan juga bentang kebudayaan dan manusia yang memiliki keunikan masing-masing. Pendidikan dalam hal ini harus mewadahi segenap potensi dan juga karakteristik sumber daya manusianya.

Meskipun Indonesia menduduki peringkat pendidikan yang dipandang masih rendah, kita juga perlu mengkritisi tolak ukur atau titik ukur variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan kita. Bila kita ingat istilah Ivan Illich dengan menyebut “mitos nilai”, maka pendidikan tidak boleh melanggengkan ranking dan juga peringkat. Pendidikan adalah upaya membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ketertindasan dan juga sikap menindas.

Indonesia sendiri memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup hebat. Buktinya, olimpiade dunia bahkan dimenangkan oleh anak-anak kita. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia juga banyak memelopori kerja sama pertukaran pelajar, perkumpulan antarbangsa ASEAN dan terus saling belajar kebudayaan antar negara terutama dalam pendidikan dan kebudayaan.

Kepemimpinan Indonesia di tingkat ASEAN pada tahun 2023 harus menjadi momentum yang baik untuk mengupayakan berbagai kerja sama dan memperkuat saling sinergi antar lembaga pendidikan di tingkat Asia Tenggara. Kita bisa saling belajar tentang pengalaman Indonesia dalam berdemokrasi, dalam berkebudayaan dan dalam aneka aspek kehidupan internasional. Kita bisa saling belajar juga dari Singapura, dari Malaysia, dan dari Thailand mempertahankan serbuan budaya dari luar. Setidaknya ada empat hal pokok yang bisa ditingkatkan dalam kerja sama di bidang pendidikan.

Pertama, kerja sama antar pendidikan di lingkup ASEAN harus mampu mempererat ikatan persaudaraan bangsa ASEAN. Kita harus bisa semakin belajar menjadi manusia kosmopolit tetapi tidak melupakan tradisi dan adat yang kita punyai. Dengan kerja sama yang erat, kita bisa saling belajar dan bertukar pikiran tentang pendidikan dan juga kebudayaan.

Kedua, kerja sama di bidang pendidikan harus saling membangun dan menguatkan. Apa yang sudah dirintis selama ini melalui kerja sama pertukaran pelajar, pertukaran guru dan juga kerja sama antar negara khususnya bidang pendidikan harus lebih rapi, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Alangkah senangnya bila Indonesia bisa belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital untuk kemajuan pendidikannya. Begitu pula orang Singapura bisa belajar kebudayaan dan adat istiadat Jawa.

Ketiga, kerja sama pendidikan harus melahirkan satu isu bersama dan memecahkan masalah pokok pendidikan di ASEAN. Salah satu masalah yang cukup krusial dan menjadi isu bersama dalam pendidikan di ASEAN adalah ihwal pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di ASEAN harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan tenaga kerja muda di lingkup ASEAN. ASEAN harus mampu memberi jawaban akan keselamatan kerja, kesejahteraan dan juga kontribusi pendidikan vokasi bagi pembangunan masyarakat ASEAN.

Keempat, kerja sama bidang pendidikan di ASEAN harus mampu menjembatani jurang keterbatasan dan simpul anak muda. Kita harus bisa membangun jejaring yang kuat untuk anak muda ASEAN agar bisa saling bertemu, bertukar pikiran dan berkembang bersama untuk masa depan ASEAN yang lebih baik. *

ARIF YUDISTIRA adalah Alumnus MASTERA Esai 2019. Ia adalah seorang pendidik. Sehari-hari mengasah dan mengasuh anak-anak di SD Muhammadiyah MBS Prambanan. Kegiatan berliterasinya mengantarkan ia pada kejuaraan kompetisi esai di tingkat nasional. Ia menulis pada bidang pendidikan dan anak. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa cetak maupun online. Buku karya yang ditulis adalah Mendidik Anak-Anak Berbahaya (2020), Momong (2021). Ia bisa dihubungi di email: arifsafudinyudistiraa@gmail.com

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri (Solusi Lulusan LKP Tembus Pasar ASEAN)

Agus Ramdani

*"Level tertinggi KKNi sudah setara dengan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF),
sehingga sertifikasi di Indonesia sudah bisa diakui di tingkat ASEAN"*

--Yetty Rochyatini

KKNi Setara AQRF

ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nations* merupakan sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara. Sejak awal berdirinya, seluruh anggota ASEAN telah menjalin kerja sama baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Kerja sama di bidang pendidikan, dilakukan baik secara bilateral (dua pihak) maupun multilateral (lebih dari dua pihak) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing Asia Tenggara pada dunia internasional.

Ada beberapa bentuk kerja sama di bidang pendidikan yang sampai dengan akhir tahun 2022 masih tetap dilakukan secara aktif dan kolaboratif, antara lain terkait penyamaan standar kompetensi tenaga profesional di berbagai bidang, seperti yang dilakukan terhadap penyamaan standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata. Penyamaan standar itu dilakukan dengan penerapan *The ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (ASEAN MRA-TP). Tujuan akhir dari keseragaman standar untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan wisata terbaik dan berkualitas.

Saat ini, level tertinggi KKNi sudah setara dengan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF), sehingga sertifikasi di Indonesia sudah bisa diakui di tingkat ASEAN. Namun dikarenakan KKNi maupun AQRF bersifat standar kompetensi minimal, tentunya akan mengalami dinamika atau perubahan yang harus diadaptasikan dengan kompetensi yang berkembang di dunia industri. Oleh karena itulah, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai salah satu satuan pendidikan vokasi bisa memanfaatkan peluang ini untuk berkontribusi dan memperluas layanan serta kerjasamanya dengan dunia industri, caranya antara lain dengan menyelenggarakan layanan pendidikan yang berbasis kebutuhan kompetensi dunia industri di negara-negara ASEAN.

LKP sebagai Satuan Pendidikan Vokasi

Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 2020, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebanyak 9,77 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Di sisi lain, dalam Salinan Kepmendikbud RI Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, diinformasikan bahwa sistem pendidikan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum merespon kebutuhan pasar, termasuk lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Pendidikan vokasi dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkarakter untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja atau berwirausaha. Keberhasilan pendidikan vokasi diukur dari keterserapan lulusannya oleh dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja yang selaras dengan kompetensinya

maupun sebagai wirausahawan baru. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyedia sumberdaya atau tenaga kerja kompeten, diharapkan lulusan pendidikan vokasi dapat diserap oleh dunia kerja relatif tinggi dibanding lulusan satuan pendidikan lain.

4.0: Tantangan dan Peluang bagi LKP

Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan dari tahapan revolusi industri sebelumnya, yaitu evolusi industri ke-1 ditandai dengan penggunaan air dan tenaga uap sebagai sumber daya mekanisasi produksi. Selanjutnya revolusi industri ke-2 ditandai tenaga listrik menjadi sumber daya utama untuk menciptakan produksi, dan revolusi industri ke-3 yang ditandai dengan memanfaatkan TIK untuk mengembangkan produksi. Sementara itu, revolusi industri ke-4 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis (Schwab, 2016; Hermann et al, 2015; Irianto, 2017).

Era 4.0 didukung oleh teknologi canggih berupa kecerdasan buatan, robotika, realitas maya, dan mesin cetak tiga dimensi. Konsekuensi dari penggunaan teknologi canggih tersebut mengakibatkan kemungkinan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Hilangnya jenis-jenis pekerjaan tersebut tentu saja mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Namun, sebaliknya perkembangan era 4.0 masih membutuhkan beberapa jenis pekerjaan karena tidak tergantung fungsinya oleh teknologi baru. Hilangnya beberapa jenis pekerjaan berarti terjadi pengurangan peluang kerja. Berkurangnya peluang kerja otomatis akan membuat persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat. Dengan kata lain, hanya sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan era 4.0 yang akan eksis dan beradaptasi dengan dinamika dan perubahannya.

Era 4.0 menjadi tantangan dan sekaligus membuka peluang. Tantangan yang dihadapi memasuki era 4.0 terjadi pada aspek keamanan teknologi informasi, keandalan dan stabilitas mesin produksi, keterampilan dan inovasi sumber daya manusia, serta terjadinya otomatisasi yang mengurangi lapangan kerja. Yahya (2018) mengelompokkan tantangan era 4.0 menjadi 5 (lima) aspek yaitu ekonomi, sosial, teknis, lingkungan, dan regulasi. Tantangan era 4.0 tersebut, menggambarkan bahwa proses kegiatan ekonomi dan bisnis di era 4.0 memiliki karakteristik khusus yang menuntut penerapan prinsip-prinsip era 4.0, yaitu bantuan teknis, interkoneksi, keputusan terdesentralisasi, dan transparansi informasi. Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan perlunya sistem kerja yang terintegrasi, proses kerja kolaboratif, kepemimpinan transformatif, dan keterbukaan informasi.

Dengan kata lain, revolusi industri 4.0 ini mendorong sistem otomatisasi di dalam semua aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Berkembangnya teknologi *autonomous vehicle*⁴³, drone, aplikasi media sosial, bioteknologi dan nanoteknologi semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental.

LKP diharapkan mampu memiliki peran strategis untuk turut serta menghasilkan lulusan terampil dan terlatih yang dibutuhkan oleh dunia industri, sebagai organisasi yang terkena dampak langsung dari perubahan yang dihadirkan revolusi industri 4.0. Dengan kata lain, kehadiran era 4.0 yang ditandai otomatisasi dan digitalisasi mesin produksi dapat menjadi peluang dan tantangan bagi LKP untuk mengadaptasikan dirinya dengan perubahan yang terjadi, salah satunya dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan profil pekerja yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri, termasuk dunia industri yang berada di kawasan ASEAN.

Model Pengembangan Kurikulum Berbasis Industri

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19, menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

43 mobil tanpa supir

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan Kurikulum Berbasis KKNI untuk menjadi *program of planned activities*⁴⁴ penyelenggaraan kursus dan pelatihan di Indonesia. Namun, perubahan yang diakibatkan dari berlangsungnya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan terjadinya otomatisasi dan digitalisasi mesin yang secara tidak langsung menuntut LKP untuk mampu berinovasi dalam mengelola programnya supaya substansi pembelajaran dapat lebih sesuai dengan kultur kerja, kemampuan kerja yang dibutuhkan, dan teknologi baru yang dipergunakan. Cara yang dapat ditempuh sebagai manifestasi dari inovasi LKP di era revolusi 4.0 adalah dengan melakukan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk menciptakan lulusan yang terampil, kompetitif, dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dunia industri maupun kompetensi untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Namun pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan tidak serta merta dikembangkan secara langsung, akan tetapi memiliki langkah-langkah penting sebagai penguat mengapa kurikulum dikembangkan. Di sisi lain pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan juga harus mengacu pada hasil yang diinginkan, sehingga pengembangannya dapat mencakup semua kebutuhan dari tujuan kurikulum kursus dan pelatihan tersebut.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis model yang dipandang tepat untuk mengembangkan kurikulum kursus dan pelatihan di era revolusi industri 4.0 ini, yaitu:

1. Model Nicholls; model ini menitikberatkan pengembangan kurikulum pada rasional, khususnya melihat kebutuhan kurikulum berdasarkan perubahan situasi. Jika melihat landasan awal pembentukan kurikulum yang tepat maka model Nicholls menjadi hal yang tepat. Model Nicholls memiliki beberapa tahapan pengembangan yaitu analisis situasional, seleksi tujuan, seleksi dan organisasi isi, seleksi dan organisasi metode, dan evaluasi (Sholeh, 2013: 79)
2. Model Finch; pada program kursus dan pelatihan memiliki tujuan berbeda dari pendidikan pada umumnya. Hal ini membuat pengembangan kurikulum menjadi berbeda dengan yang lainnya. Finch menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mencakup perencanaan, konten, dan implementasi. Langkah-langkah dari model ini dapat diterjemahkan:
 - a. Perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan proses pengambilan keputusan, mengumpulkan dan mengkaji data terkait program kursus, dan mengumpulkan dan mengkaji data terkait masyarakat
 - b. Membentuk konten kurikulum yang meliputi memanfaatkan strategi untuk menentukan konten, membuat keputusan konten kurikulum, mengembangkan tujuan dan tujuan kurikulum, dan
 - c. Melaksanakan kurikulum yang meliputi identifikasi dan pemilihan bahan ajar, mengembangkan bahan ajar, memilih strategi penyampaian bahan ajar, dan mengkaji kurikulum.
3. Model Gwen; model ini memiliki ciri khusus dibandingkan dengan model yang dikembangkan Finch. Model yang dikembangkan Gwen pada pelaksanaannya mencapai tahap evaluasi. Langkah-langkah dari model ini dapat diterjemahkan:
 - a. Perencanaan yang meliputi identifikasi isu/masalah/kebutuhan, membentuk tim pengembangan kurikulum, dan mengadakan penilaian dan analisis kebutuhan
 - b. Konten dan metode yang meliputi hasil yang diinginkan negara (tujuan pendidikan nasional), pemilihan konten, dan merancang metode pembelajaran experiential
 - c. Implementasi yang meliputi menghasilkan produk kurikulum, menguji dan merevisi kurikulum, merekrut dan melatih relawan/fasilitator, dan melaksanakan kurikulum; dan
 - d. Evaluasi dan pelaporan yang meliputi strategi evaluasi dan melaporkan dan mengamankan sumber daya.

Pengembangan Kurikulum Sebagai Solusi Efektif

44 Program terencana yang memiliki rentang luas untuk membentuk pandangan holistik peserta didik terhadap aktivitas pembelajaran yang sedang dijalannya.

Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup menjadi lebih mudah dan murah. Namun demikian, revolusi industri 4.0 juga membawa dampak negatif, antara lain peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Hal ini diprediksi menyebabkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan era revolusi industri 4.0, LKP sebagai bagian integral sistem pendidikan nonformal diharapkan menjadi motor penggerak atau *leading sector* untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan melakukan pengembangan kurikulum yang akomodatif dan kontekstual dengan perkembangan jaman dan selaras dengan kompetensi di dunia kerja.

Dengan kata lain, program, kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di LKP mengharuskan selalu untuk mengembangkan kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan Industri. Saat ini, pemerintah Indonesia sendiri telah mengintruksikan untuk penggunaan kurikulum berbasis KKNI. Namun, pada KKNI tersebut penguasaan teknologi khususnya teknologi informasi belum digunakan secara maksimal. Pembelajaran masih didominasi dengan modul. Sehingga untuk dapat menyesuaikan dengan era revolusi 4.0 yang berbasis internet dan alat bantu komputer atau *smartphone*, maka kurikulum tersebut perlu dikembangkan agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran kursus dan pelatihan tersebut.

Pada pengembangannya, model pengembangan kurikulum menjadi hal yang penting untuk ditentukan. Model-model yang relevan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan keterampilan di era 4.0 adalah model Nicholls, Finch, dan Gwen. Model Nicholls yang mengacu pada data rasional yang sesuai dengan situasi yang ada, model Gwen yang memiliki tahapan yang rinci dan kompleks, dan model Finch yang memiliki karakteristik khusus pada pengembangan kurikulum vokasi. Namun, sebaiknya pengembangan kurikulum yang mudah dibuat atau diterapkan oleh LKP adalah kombinasi dari ketiga model tersebut. Langkah-langkah pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan yang sederhana adalah: 1) tahap perencanaan yang mencakup analisis kebutuhan dan perumusan tujuan; 2) tahap desain konten dan metode; dan 3) implementasi yang mencakup pengembangan materi dan strategi pembelajaran; dan 4) evaluasi.

Dengan kata lain, pengembangan kurikulum berbasis industri merupakan kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kurikulum tersebut harus memastikan peserta didik pendidikan vokasi yang saat ini sedang belajar di LKP, disiapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terampil, lentur, dan ulet (*agile learner*). Dalam hal LKP sebagai penyedia tenaga kerja kompeten menjadi sangat penting untuk dapat menjawab kebutuhan tersebut. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai salah satu satuan pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan dan keahlian tertentu yang khas, sehingga lulusannya siap memasuki dunia kerja, harus mampu bersaing secara global dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi yang aplikatif dan adaptif, termasuk memiliki kesiapan untuk bersaing pada level ASEAN.*

Referensi

- Hidayat, Sholeh. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Maulana, Arief (2022). Tingkatkan Literasi dan Kompetensi Mahasiswa, Unpad Jalin Kolaborasi dengan IIS dan LSP Perasuransian Syariah. Universitas Padjadjaran, <https://www.unpad.ac.id/2022/08/tingkatkan-literasi-dan-kompetensi-mahasiswa-unpad-jalin-kolaborasi-dengan-iis-dan-lsp-perasuransian-syariah/>
- Sadiyoko, Ali. (2017). *Industry 4.0: Ancaman, Tantangan atau Kesempatan?*. Oratio Dies pada: Dies Natalis XXIV Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan.
- Schwab (2016). *The fourth industrial revolution: What it means, how to respond*. <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-means-and-how-to-respond/>Diakses 31/5/2018.
- Sung, T.K. (2017). Industri 4.0: a Korea perspective. *Technological Forecasting and Social Change Journal*, 1-6.

Yahya (2018). Era industri 4.0: Tantangan dan peluang perkembangan pendidikan kejuruan Indonesia. *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Professor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan*. Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Negeri Makassar Tanggal 14 Maret 2018.

AGUS RAMDANI adalah seorang widyaprada ahli madya pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Agus menamatkan program magister pendidikan dari Universitas Islam Nusantara dan sarjana Antropologi Sosial Budaya lulusan Universitas Padjadjaran. Judul buku yang pernah ditulisnya, antara lain *Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Lulusan LKP* (Kemendikbud, 2022), *Penilaian Kinerja LKP* (Kemendikbud, 2022), *Pusat Pengembangan Karier* (Kemendikbud, 2022), *Reskilling dan Upskilling Instruktur LKP* (Kemendikbud, 2022), *Kurikulum Menjahit Garment* (PP PAUD dan Dikmas, 2019), *Pembelajaran Kursus Caregiver Online* (PP PAUD dan Dikmas, 2020), *Pembelajaran Kursus Menulis Kreatif di Era Pandemi* (PP PAUD dan Dikmas, 2021). Ia dapat dihubungi di email: gochie33@gmail.com.

Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah 3T ASEAN

Reza Fajri

Pendahuluan

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain kurangnya persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi di bawah standar, guru kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh. Selain itu, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan.

Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang dicanangkan sebagai upaya memperbaharui kurikulum K13 dan kurikulum darurat saat pandemi. Kurikulum ini memiliki ciri Central Student yakni proses pembelajaran berpusat pada siswa, guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran. Meski bukan merupakan sesuatu yang baru, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait penerapannya. Stressful untuk siswa yang kurang aktif, kelas yang “mati” akibat ketidakmampuan guru memimpin diskusi atau membimbing muridnya dengan baik adalah dua kekurangan dari proses pembelajaran ini yang belum terobati hingga pada K13 di daerah 3T. Akibatnya guru mencari solusi lain yang dirasa lebih prosiswa yakni kembali pada metode klasik ceramah, ceramah, dan ceramah.

Kurikulumnya merdeka belajar namun, guru dan siswanya belum merdeka. Dapat dipastikan bahwa hal ini pun akan terulang kembali pada kurikulum yang baru nanti di saat daerah lain sedang menikmatinya karena kecukupan sumber belajar dan tenaga pendidik yang memadai baik kuantitas maupun kompetensi, bagaimana dengan sekolah yang berada di kawasan 3T. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku, sedangkan kurikulum merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan model pembelajaran dan sistem penilaian yang seperti ini diharapkan output dari pendidikan kita adalah manusia Indonesia yang tidak hanya menguasai konsep tetapi memiliki perilaku dan keterampilan yang baik, khususnya di daerah 3T.

Tantangan dan Peluang

Era revolusi industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi. Dalam arti lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Di era Revolusi Industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi.

Merespon kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim meresmikan kurikulum merdeka belajar pada Jumat, 11 Februari 2022. Pada prinsipnya penerapan kurikulum merdeka belajar adalah untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Karenanya jauh sebelum kurikulum ini diterapkan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai sarana penunjang khusus infrastruktur pendidikan khususnya di bidang informasi dan teknologi sekaligus melakukan revolusi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui konsep kurikulum merdeka belajar secara menyeluruh.

Seperti yang telah disampaikan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam pidato peresmian kurikulum merdeka belajar mengatakan bahwa kurikulum terbaru ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Dalam kurikulum merdeka belajar, kemampuan serta keahlian kognitif yang ada pada siswa benar-benar diperhatikan secara khusus dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para siswa untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan minatnya.

Selain itu, terdapat beberapa konsep khusus yang menjadi ciri dari kurikulum merdeka belajar seperti berikut ini:

1. Asesmen Kompetensi Minimum. Dalam kurikulum merdeka belajar ini, siswa benar-benar diharapkan untuk mengembangkan kemampuan literasi serta numerik yang mereka miliki dengan dasar penilaian yang dilihat dari kemampuan melakukan analisa serta berpikir kritis melalui kemampuan analisa kognitif tiap siswa.
2. Survey Karakter Siswa. Dalam kurikulum baru ini, proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah tak hanya berbasis tingkat kualitas pendidikan di masing-masing sekolah saja, tapi juga melalui infrastruktur pendidikannya serta ekosistem pendidikan yang ada di tiap sekolah. Mekanismenya tidak lagi dilakukan dengan indikator kualitas yang bersifat tetap tapi mengacu pada data riil hasil survey karakter dari tiap sekolah.
3. Penilaian Hasil Belajar. Konsep lain dari kurikulum merdeka belajar ini adalah metode penilaian yang tak lagi hanya berdasar pada hasil ujian nasional semata tapi juga melalui hasil portofolio serta penugasan. Hal ini karena, dalam kurikulum baru ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri serta bakat yang mereka miliki.

Konklusi

Kurikulum ini juga memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh, melalui kebijakan afirmasi maupun pemberian kuota secara khusus bagi siswa yang ada di daerah terpencil, tertinggal maupun terluar. Berdasarkan konsep khusus yang ada itu pulalah, kurikulum merdeka belajar dianggap sebagai kurikulum yang paling aplikatif terhadap pembangunan pendidikan berbasis industri 4.0 yang sepenuhnya memanfaatkan data teknologi sebagai sebuah industri masa depan. Dengan kemampuan analisis siswa yang semakin baik melalui penerapan kurikulum merdeka belajar ini maka siswa akan lebih mampu berpikir secara kritis serta melakukan analisa sistematis melalui pengembangan kemampuan kognitif mereka.*

Referensi

- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185-201.
- Nehe, B. M. (2021, May). Analisis konsep implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di masa pendemik di STKIP Setia Budhi Rangkasbitung 2021. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Setia Budhi* (Vol. 1, No. 1, pp. 13-19).

REZA FAJRI adalah Founder Mafia Kurikulum di Platform Merdeka Mengajar, sebuah program komunitas belajar dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang aplikasinya bisa didownload melalui google playstore. Ia merupakan Guru di daerah 3T di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Reza dapat dihubungi di 081358937625 dan email: rezafajri19@guru.belajar.id

Transformasi Kurikulum Pendidikan Dasar di Negara Asean

Tri Astari

Pendahuluan

Kurikulum idealnya adaptif dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Tujuannya agar hasil pendidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan tantangan abad ke-21 ini. Pendidikan juga merupakan salah satu senjata utama dalam menghadapi globalisasi atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan menghadirkan masyarakat yang siap dalam persaingan semakin ketat, siapa yang unggul akan menjadi pemenang. Proses pendidikan yang benar dan bermutu memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara jati diri dari pengaruh negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Transformasi kurikulum merupakan hal yang lumrah terjadi di berbagai negara, salah satunya di ASEAN. Setiap perubahan kurikulum berdampak pada sejarah perjalanan sistem pendidikan di negara tersebut terutama dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (*The International Commission on Education for the Twenty-First Century*), yang diketuai oleh Jacques Delors. Komisi melaporkan hasil karyanya dengan judul *Learning: The Treasure Within* (1996), bahwa pendidikan dasar adalah sebuah "paspor" yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar. Esensi pendidikan dasar merupakan "paspor" bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan dirinya di masa depan, dan "bekal dasar" untuk dapat hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun di dunia ini (Sumantri & Syaefudin Sa'ud, 2003) generalized anxiety disorder (GAD). Pendidikan dasar merupakan katalis perubahan sosial (Tilak, 2003).

Sebelum mengambil bagian perekonomian dan politik dunia, pendidikan dasar merupakan proses yang harus dilewati oleh setiap individu. Singkatnya, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan dunia. Pendidikan dasar juga sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Dengan demikian, diperlukan kajian tentang transformasi pendidikan dasar khususnya di negara ASEAN sebagai bahan informasi refleksi dalam mengambil kebijakan, peningkatan mutu dan perbaikan pendidikan dasar tersebut.

Kurikulum Pendidikan Dasar di ASEAN

Kurikulum Pendidikan Dasar Indonesia

Di Indonesia istilah kurikulum menjadi populer sejak tahun 1950, dikenalkan oleh sejumlah kalangan pendidik lulusan Amerika Serikat. Sebelum mengenal istilah kurikulum, pendidikan Indonesia lebih akrab dengan istilah rencana pembelajaran. Kurikulum sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan latar belakang keilmuan para ahli tersebut, sehingga semantik definisi yang dirumuskan akan berbeda meskipun pada intinya terkandung maksud yang sama. Kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *currere*, yang mula-mula digunakan dalam bidang olah raga yang berarti jarak tempuh lari.

Dalam kegiatan berlari tentu saja ada jarak yang harus ditempuh mulai dari start sampai dengan finish, sama halnya dengan pendidikan ada awal dan akhir proses pembelajaran. Atas dasar tersebut pengertian kurikulum diterapkan dalam bidang pendidikan (Asri, 2017). Beberapa para ahli menyatakan kurikulum sebagai *a plan for learning* (Hilda Taba). Senada dengan Edward A. Krug menyatakan, kurikulum dipandang sebagai cara dan upaya guna mencapai tujuan pendidikan. Secara umum B. Othanel Smith menyatakan, *curriculum is a sequence of potential experiences set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting* (Moh Yamin, 2009).

Dalam sejarah pendidikan Indonesia tercatat, pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian terbilang relatif cepat, jika dalam pandangan khalayak awam bahwa kesan dari proses perguliran kurikulum di Indonesia adalah “ganti menteri pendidikan maka ganti kurikulum.” Padahal pergantian kurikulum merupakan hal biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Hal itu dilakukan untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman yang kian maju, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin stagnan. Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah (Machali, 2016).

Pada tahun 1947-1968 disebut Kurikulum Rencana Pelajaran, terbagi menjadi Rencana Pelajaran 1947 (kurikulum pertama), Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 dan Kurikulum 1968. Tahun 1975-1994 dinamakan Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan, mencakup Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, (Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif disingkat CBSA) dan Kurikulum 1994. Kurikulum Berbasis Kompetensi di tahun 2004 yang sering disebut KBK. Kurikulum 2006 atau yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di tahun 2006 (Al-asyhi, 2014; Asri, 2017).

Selanjutnya, Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013-2014, memiliki konsep kurikulum menyeimbangkan antara *hardskill* dan *softskill* dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Di Sekolah Dasar menggunakan buku berbasis kegiatan yang ditulis secara terpadu (tematik terpadu). Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian dilakukan secara otentik pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan portofolio (Kurniasih & Sani, 2014).

Selanjutnya, di tahun 2022 terjadi perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten esensial. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran (Tim Penyusun Kemendikbudristekdikti, 2022). Keunggulan kurikulum ini antara lain lebih sederhana dan mendalam; lebih merdeka dan lebih relevan dan interaktif (Tim Penyusun, 2022).

Struktur kurikulum SD/MI dibagi menjadi 3 (tiga) Fase yakni fase A (Kelas 1 dan 2, fase B (Kelas III dan IV) dan Fase C (Kelas V dan VI). Proporsi beban belajar di SD/MI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelajaran intrakurikuler Proyek penguatan profil pelajar Pancasila (Tim Penyusun, 2022). IPAS mulai diajarkan di Fase B (kelas III) untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Sedangkan, Fase D untuk SMP (kelas 7,8 dan 9 SMP), mata pelajaran Informatika menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan mata pelajaran

Prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran Seni (Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa, Seni Teater) (Tim Penyusun Kemendikbudristekdikti, 2022).

Kurikulum Pendidikan Dasar Malaysia

Negara Malaysia merupakan bekas jajahan Inggris, maka sistem pendidikannya sangat dipengaruhi sistem pendidikan di Inggris. Sejak tahun 1982, pemerintah Malaysia menerapkan kurikulum bersepadu sekolah Menengah yang disebut KBSM menggantikan kurikulum lama sekolah menengah (KLSM) yang masih digunakan sampai sekarang dengan terus dilakukan revisi-revisi perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Terdapat beberapa tipe lembaga pendidikan yang ada di Malaysia diantaranya adalah tipe National School, national tipe Chinese School, dan national tipe Tamil School. Sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, kewarganegaraan, nasionalisme dan patriotisme, dan sikap dan tindakan yang terpuji (nilai sivik). (Marta, 2015).

Negara Malaysia memiliki empat tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, wajib diikuti oleh anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap orang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan, jadi pada waktu anak umur 6 tahun orang tua wajib mendaftarkan sekolah anaknya. Keteledoran orang tua memasukkan anaknya mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Jika hal ini terbukti dipengadilan, maka orang tua tersebut akan didenda maksima RM 5000 atau dihukum maksimal 6 tahun.

Kondisi seperti ini jika kita bandingkan dengan Indonesia belum berlaku, tidak ada sanksi tegas untuk orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya pada usia wajib belajar. Sehingga masih marak anak-anak yang putus sekolah dan terlantar. Kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun, kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas dan itu melalui seleksi (Marta, 2015; Syakhrani et al., 2022).

Kurikulum Pendidikan Dasar Singapura

Pada tahun 1965 Singapura benar-benar berpisah dari Malaysia, disinilah sejarah Singapura sebagai sebuah Negara dimulai. Pada saat itu, Negara yang baru lahir ini belum memiliki sistem persekolahan, sistem konstitusi, tentara, angkatan laut maupun sum ber daya alam yang memadai. Kekuatan utama negara ini bersandar pada tiga hal yaitu posisi strategis di jalur laut tersibuk, kepemilikan pelabuhan laut terbesar, dan sumber daya manusia. Dari tiga modal inilah Singapura membangun sebuah negara (Koh, 2007).

Singapura secara konsisten dapat mencapai kualitas unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari empat puluh tahun, Singapura telah melewati beberapa tahapan perkembangan yaitu masa *survival* (1959-1978), efisines (1979-1996), kemampuan (1997- 2011), dan *student centric, values-driven* (2012) (Mok, 2008). Selama itu, Singapura sangat memperhatikan keunikan geopolitik dan kurangnya sumber daya alam yang dimiliki. Tahapan-tahapan tersebut juga merupakan respon dari perkembangan zaman, dimana Singapura selalu berusaha untuk menyesuaikan visi negara dengan tuntutan zaman (Ng, 2017).

Pemerintah Singapura secara terbuka menyatakan pentingnya reformasi pendidikan dalam rangka mempersiapkan warga negaranya untuk lebih kompetitif dan kompeten di era global. Gagasan "*Thinking schools, learning nation*" (TSLN) yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pada Juli 1997 menjadi tema sentral bagi arus utama reformasi pendidikan di Singapura (Mok, 2008). Untuk mendukung realisasi sekolah unggul sekaligus menjaga jaminan mutu, mulai tahun 2000, model penilaian sekolah mengalami perubahan. Perangkingan sekolah menengah berubah menjadi sistem pengelompokan yang lebih lunak. Namun, yang lebih signifikan saat ini, semua level pendidikan di Singapura, termasuk pada level sekolah dasar, menengah dan lanjutan, diminta untuk melakukan penilaian diri secara terbuka dengan menggunakan konsep *The School Excellence Model (SEM)* (Pak Tee, 2003; Sa'adah,

2020) schools in Singapore are now asked to develop themselves into excellent schools. To support this change, the way that schools are being appraised has been changed since 2000. The school today is asked to do self-appraisal using the new School Excellence Model (SEM).

Secara umum, jenjang pendidikan di Singapura dibagi menjadi beberapa tahapan, jenjang *Kindergartens* (Taman Kanak-kanak) Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari *Nursery*, *Kindergarten* 1 dan 2. *Primary Education* (Sekolah Dasar) Ini merupakan program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 hingga 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 hingga 6 (Ismunandar et al., 2014).

Singapura memiliki wajib pendidikan berlangsung selama 10 tahun, walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun pendidikan dasar. Sekolah dasar dan sekolah menengah berlangsung selama 10 tahun. Di akhir kelas 10, siswa akan menghadapi ujian GCE O-Level atau GCE N-Level. Siswa dapat menyelesaikan pendidikan di *Junior College*, mendapatkan gelar dan sertifikat diploma di salah satu *Polytechnics*, atau meninggalkan sekolah dan mulai bekerja. Pre-University akan berlangsung selama 3 tahun, dimana siswa mempersiapkan GCE A-Level. Setelah menyelesaikan GCE A-Level, siswa akan mengambil kuliah di salah satu universitas di Singapura. Gelar sarjana akan diraih setelah tiga sampai dengan lima tahun. (Syakrani W. et al., 2022).

Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand

Sistem pendidikan Thailand mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Pada hakikatnya pendidikan usia dini disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dasar negeri, Kementerian Pendidikan secara aktif mendorong sekolah-sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk dapat memainkan peranan yang signifikan untuk ikut terlibat dalam pendidikan usia dini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini terlihat banyak sekali pendidikan usia dini yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta. Hal ini tampak jelas di Bangkok dan sekitarnya, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan dini yang dikelola oleh swasta.

Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (Prathom 1-6), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (Mattayom 1-3) dan 3 tahun sekolah menengah atas (Mattayom 4-6). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama), namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Mattayom 6, atau setara dengan tamat SMU. Secara umum sekolah Prathom terpisah dari sekolah Mattayom, namun di beberapa tempat di Thailand di jumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari Prathom 1 sampai dengan Mattayom 6. Dalam hal sekolah menengah umumnya, pendidikan Mattayom 1-6 berada di dalam satu sekolah, akan tetapi dapat dijumpai pendidikan Mattayom yang dilayani oleh dua sekolah yang terpisah, yaitu sekolah yang melayani Mattayom 1-3 dan sekolah yang melayani Mattayom 4-6. Kurikulum nasional memuat 8 mata pelajaran inti yaitu: Bahasa Thai, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Agama dan Budaya, Kesehatan dan Olah raga, Seni, Karir dan Teknologi, dan Bahasa Asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran (Yunardi, 2014).

Kurikulum Pendidikan Dasar Brunei Darussalam

Berdasarkan *State of Brunei, Annual Report* tahun 1914 menyatakan, secara formal pendidikan mulai diperkenalkan di Negara Brunei Darussalam pada tahun 1914 dengan berdirinya sebuah Sekolah Melayu di Bandar Brunei. Sebelum Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, negara ini sudah memiliki tiga dasar pendidikan. Pertama Dasar Pendidikan 1954, kedua Dasar Pendidikan 1962 dan ketiga Dasar Pendidikan 1972. Kemudian semasa pasca merdeka terdapat dua jenis dasar dilancarkan oleh kerajaan, masing-masing Dasar Pendidikan Konsep Dwibahasa pada tahun 1984 dan Dasar pendidikan Sistem Pendidikan Abad ke-21 (SPN21) pada tahun 2008 (Mohamad, 2014).

Brunei Darussalam memiliki sistem pendidikan dengan pola A7-3-2-2 yang melambungkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra universitas (Abduh, 2020; Mohamad, 2014). Sehingga dapat dilihat secara jelas antara pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam, selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan.

Kurikulum Pendidikan Dasar Kamboja

Setelah konstitusi pembebasan Kamboja tahun 1993, sistem pendidikan kemudian dirubah kembali dengan dimulai dari pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pola wajib belajar 6+3+3 dengan arti 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan umum yang dibagi dengan enam tahun untuk pendidikan dasar kelas 1-6 dan enam tahun pendidikan menengah umum dari kelas 7-12 (Awaliyah, 2019).

Kurikulum Pendidikan Dasar Laos

Pendidikan formal di Laos terdiri dari 8 tingkatan yaitu sekolah dasar (lima tahun), sekolah menengah pertama (empat tahun), sekolah menengah atas (4 tahun), pendidikan pasca sekolah menengah (satu sampai dua tahun) dan pendidikan tinggi (tiga sampai enam tahun). bertahun-tahun). Peminatan dimulai di sekolah menengah atas di mana tiga program ditawarkan seperti pendidikan umum/akademik, kejuruan dan keguruan, dan meningkat di tingkat tersier. Sistem pendidikan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga (MOES) melalui sejumlah departemen.

Kemudian, sistem pendidikan sudah dimulai dari pendidikan umum (Pendidikan Anak Usia Dini: pembibitan) (usia 0-2), TK (usia 3-5), dan prasekolah (baru didirikan hanya untuk usia 5 tahun), Pendidikan Dasar (usia 6-11 untuk 5 tahun), Pendidikan Menengah Pertama (usia 11-15 selama 4 tahun), Sekolah Menengah Atas (usia 15-18 selama 3 tahun), Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (TVET) dan Pendidikan Tinggi. Di sisi lain, pendidikan nonformal disediakan terutama untuk orang dewasa dan anak-anak yang tidak pernah bersekolah. Sistem ini menyediakan program akademik bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Perguruan tinggi terdiri dari 5-8 tentang domain pengetahuan, domain keterampilan, domain aplikasi dan domain keterampilan sosial yang mencakup Gelar *Associate*, Gelar *Sarjana*, Gelar *Magister* dan Gelar *Doktor* (ASEM Education, 2021).

Kurikulum Pendidikan Dasar Myanmar

Pendidikan pra-sekolah dasar melayani anak-anak berusia 3-5 tahun. Kehadiran tidak wajib. Pada tahun 1997, diperkirakan sekitar 7% anak usia 3-5 tahun bersekolah di prasekolah. Layanan cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar dan kecil, di mana sebagian besar pra-sekolah yang ada berada di sektor swasta. Pendidikan dasar adalah pendidikan dasar tahap pertama dan pada prinsipnya wajib. Myanmar: struktur sistem pendidikan (1992) Pendidikan dasar berlangsung selama lima tahun, termasuk satu tahun pendidikan pra sekolah (TK); ini diselenggarakan dalam dua siklus: lebih rendah (TK dan Standar I dan II), dan sekolah dasar atas (Standar III dan IV). Usia masuk adalah 5+, meskipun diperkirakan sekitar 35% anak yang masuk taman kanak-kanak berusia di atas 6 tahun. Di akhir Standar IV, murid mengikuti ujian (International Bureau of Education, 2006).

Kurikulum Pendidikan Dasar Filipina

Pada tahun 2012 Filipina meluncurkan Program K-12, sebuah reformasi menyeluruh dari program tersebut pendidikan dasar. Melalui reformasi ini, Filipina mengejar standar global dalam pendidikan menengah dan memberikan nilai tinggi pada taman kanak-kanak. Struktur, kurikulum, dan filosofi sistem pendidikan sedang mengalami reformasi dan perbaikan. Kunci dari kebijakan baru adalah persiapan untuk pendidikan tinggi, kelayakan untuk memasuki perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan segera kemampuan kerja setelah lulus, semuanya mengarah kepada Filipina yang dikembangkan secara holistik (Okabe, 2013).

Kurikulum Pendidikan Dasar Vietnam

Pemerintah Vietnam memiliki tanggungjawab yang bermuara dari sejarah perjalanan negara Perancis yang merupakan negara penjajah Vietnam. Sejak tahun 1800an, negara Perancis memiliki misi untuk membangun dan mengembangkan peradaban bermartabat di negara-negara yang dijajah. Sekolah Dasar Pendidikan ditempuh selama

5 tahun, setiap anak usia 6 tahun diharuskan oleh pemerintah untuk masuk SD dan ditanggung negara. Pada setiap provinsi memiliki Sekolah Dasar inti sebanyak 1 sekolah.

Di sekolah dasar inti terdapat kelas bahasa Inggris. Siswa akan belajar bahasa Inggris dari kelas 1 dan pada tingkat akhir mendapat seleksi atau ujian kelulusan. Sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama Pendidikan SMP ditempuh selama 4 tahun, untuk mencapai kelulusan untuk tingkat akhir anak-anak mengikuti ujian nasional. Para siswa SMP, terlebih dahulu harus menempuh seleksi dalam bentuk ujian nasional untuk melanjutkan studi ke SMA/SMK. Namun demikian, sejak tahun 2018 program tersebut berlaku (Ekowati et al., 2020).

Penutup

Kemajuan dunia pendidikan dasar di suatu negara tentu akan mengiringi kejayaan Bangsa tersebut. Sebab, semakin baik kualitas pendidikan dasar maka semakin baik pula kualitas SDM yang dihasilkan. Begitu pentingnya peranan pendidikan dasar dalam memajukan suatu Negara, maka dibutuhkan berbagai cara untuk memajukan pendidikan dasar. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan dasar harus dipandang sebagai hal yang tidak terpisahkan. Tentu pendidikan dasar di suatu bangsa memiliki kondisi yang berbeda, baik dalam cakupan sejarah, budaya, tradisi, sistem pendidikan maupun kebijakan.

Penyusunan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih lagi kurikulum merupakan suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman dimana kurikulum diterapkan, sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari. Perkembangan dan pertumbuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) selain menyumbang bagi kemajuan bangsa juga menimbulkan permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi pendidikan. Pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan, mengingat agar pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, perlu diingat kembali bahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu aspek kurikulum saja. Beberapa aspek yang mendukung juga harus diperhatikan seperti kualitas pendidik, sarana dan prasarana belajar mengajar dan lainnya.*

Referensi

- Abduh, H. (2020). Perbandingan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 274–282. <https://core.ac.uk/download/pdf/291324086.pdf>
- Al-asyhi, S. (2014). Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 2, 140–147. Dicky Wirianto Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia.pdf
- ASEM Education. (2021). *Lao People's Democratic Republic - ASEM Education*. <https://asem-education.org/compendiums/204-lao/>
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Ekowati, D. W., Restian, A., & Yayuk, E. (2020). Kesadaran Nilai Pendidikan di Sekolah Dasar Ho Chi Minh Vietnam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 8(1), 71–78. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v8i1.12370>
- International Bureau of Education. (2006). *Education in Myanmar. Myanmar: The Government of the Union Myanmar* (Vol. 7, Issue September). UNESCO-IBE. <http://www.ibe.unesco.org/>
- Ismunandar, Nurhudatiana, R., Fikri, S., & Helena, D. (2014). *Mengenal Sistem Pendidikan Singapura*. Nuansa Cendekia.
- Koh, A. (2007). Living with Globalization Tactically: The Metapragmatics of Globalization in Singapore. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 22(2), 179–201. <http://www.jstor.org/stable/41308097>
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–162.
- Machali, I. dan A. H. (2016). *Handbook of Education Management.pdf*.
- Marta, N. (2015). Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia: Sebagai Bahan Refleksi Perkembangan Kurikulum Sejarah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1), 52–67. <https://doi.org/10.21009/jps.041.06>
- Moh Yamin. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Diva Press.

- Mohamad, Y. A. bin B. A. & B. (2014). *Evolusi dan transformasi : kecemerlangan 100 tahun pendidikan negara brunei darussalam 1914-2014 (Cetakan pertama)*. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.
- Mok, K. H. (2008). Positioning as Regional Hub of Higher Education: Changing Governance and Regulatory Reforms in Singapore and Malaysia. *International Journal of Educational Reform*, 17(3), 230–250. <https://doi.org/10.1177/105678790801700303>
- Ng, P. T. (2017). Learning from Singapore: The Power of Paradoxes (1st ed.). In *Routledge*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00038628.1989.9696654>
- Okabe, M. (2013). Where Does Philippine Education Go? The “K to 12” Program and Reform of Philippine Basic Education. *The Institute of Developing Economies (IDE)*, 425.
- Pak Tee, N. (2003). The Singapore School and the School Excellence Model. *Educational Research for Policy and Practice*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.1023/A:1024465302953>
- Sa’adah, M. (2020). Studi komparatif reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7(1), 70–79. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.25273>
- Sumantri, M., & Syaefudin Sa’ud, U. (2003). Pendidikan dasar dan menengah. *Prosiding: Indonesia Dalam Arus Sejarah VIII, 021*, 1–39.
- Syahrani, A. W. F., Janah, F., & Fauziyyah. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Malaysia. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 2(2), 320–327.
- Syahrani W., Malik Abd., Hasbullah, Budi Muhammad, & Maulidan Rifqi M. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Singapura. *Adiba: Journal of Education*, 2(4), 517–527. <http://www.ef.co.id/upa/education-systems/education-system-singapore>
- Tilak, J. B. G. (2003). *Education, Society, and Development: National and International Perspectives*. APH Publishing.
- Tim Penyusun. (2022). *Buku Saku Edisi Serba-Serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar.
- Tim Penyusun Kemendikbudristekdikti. (2022). *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Yunardi. (2014). Sistem Pendidikan di Thailand. *Kantor Atase Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok*, 1–45. atdikbudbangkok.org

TRI ASTARI adalah seorang blogger dan pendidik di bidang pendidikan dasar. Buku pertama ia tulis adalah *Selamat Senang Belajar Matematika: Matematika Pecahan* (2017) yang diikuti dengan *Sifat-sifat Cahaya dan Pemanfaatannya* (2017). Ia telah menulis sekitar 12 buku antologi yang berkolaborasi dengan guru dan dosen se-Indonesia. Buku antologi terakhir yang ditulis adalah *Psikologi Pendidikan Kunci Pembelajaran Kondusif* (2022) dan *Jelajahi Dunia Guru Penggerak* (2022). Ia dapat dihubungi di blog: <http://jurnalastari.com> atau email: tristari55@gmail.com.

Labschool sebagai Center for Excellence di Indonesia dan ASEAN

Wijaya Kusumah

SMP Labschool Jakarta adalah salah satu sekolah yang didirikan pada tahun 1968. Sebuah perjalanan panjang dan diterima dengan baik oleh masyarakat akademik. Setiap pendaftaran siswa baru, selalu banyak peminatnya dan terpilihah siswa terbaik. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Labschool tetap diminati masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Membaca sejarah Labschool, kita semakin tertarik untuk melakukan inovasi di dalamnya. Inovasi dalam bidang pendidikan memang menjadi tantangan kita bersama untuk melakukannya. Kita harus bekerjasama melakukan perubahan ini. Membangun *super team* yang kompak atau solid harus dilakukan agar Labschool menjadi tempat berkumpulnya masyarakat berpengetahuan.

Pengalaman belajar STEAM di China (2019), membuat penulis yakin kalau Labschool dapat bersaing dan unggul di masyarakat bila semua guru terus di-*update* dan dilatih untuk mampu mengajar dalam kondisi apapun. Hal itu sudah teruji ketika sekolah kami menghadapi ujian pandemi Covid-19: pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi tatap maya. Kemampuan adaptasi sangat penting dalam kondisi ini.

Center for Excellence harus diterjemahkan menjadi sekolah ramah anak dan berprestasi. Juga mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan di Era Disrupsi dan digital. Labschool harus mampu menciptakan calon pemimpin masa depan yang berakhlakul Karimah. Oleh karena itu semua guru harus dibekali dengan sifat kenabian yaitu sidiq, tabligh, amanah, dan fathonah.

Tantangan global harus dijawab dengan membina siswa melalui pendidikan karakter yang baik sehingga terbentuk budaya sekolah atau *school culture* sekolah yang unggul di masyarakat. Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila dalam sekolah penggerak harus dibuat dengan perencanaan yang matang sehingga hasilnya dapat menjadi contoh praktik yang baik atau *best practice* buat sekolah lainnya. Labschool menjadi sekolah yang banyak dikunjungi sekolah lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan pun harus ikut berubah. Guru sekarang dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Guru kreatif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai metode, media, model maupun pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Umumnya guru kreatif selalu peka terhadap kebutuhan peserta didik. Guru kreatif akan selalu mengembangkan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru kreatif tidak akan menyampaikan materi pembelajaran saja, tanpa memikirkan materi tersebut bisa terserap atau tidak oleh peserta didik. Suasana pembelajaran yang dilakukan bersama guru yang kreatif akan terasa menyenangkan dan jauh dari unsur membosankan. Sebab guru seperti itu akan berusaha menemukan hal-hal baru.

Sebagai sekolah favorit, Labschool harus mampu mentransformasikan sistem pendidikan yang menjawab tantangan kecakapan hidup di abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 harus digiring ke dalam empat hal yakni *critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration*.

Terkait *communication*, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Siswa diberikan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya. Sedangkan pada ranah *collaboration*, siswa menunjukkan kemampuannya dalam kerja sama kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab. Mereka mampu bergotong-royong dan bekerja dalam kelompok atau tim yang solid.

Pada wilayah *critical thinking and problem solving*, siswa berusaha memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya

dengan mandiri. Untuk itulah diperlukan berpikir komputasional yang mampu membuat siswa menyelesaikan masalah. Sedangkan pada ranah *creativity and innovation*, siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda.

Peranan Labschool dalam penerapan keempat hal di atas adalah dalam konteks meningkatkan kebijakan dan rencana sekolah untuk mengembangkan keterampilan baru buat siswa dan juga guru, mengembangkan arahan baru kurikulum merdeka, melaksanakan strategi pembelajaran yang baru dan relevan, serta membentuk kemitraan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Labschool juga harus mampu menyiapkan dan menterjemahkan sistem pendidikan di era digital. Abad ke-21 adalah abad digital, sebuah abad ketika internet sangat membantu manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi walaupun jarak yang melewati batas wilayah negara. Era digital mewajibkan kita untuk mampu menciptakan informasi baru sehingga dalam hitungan detik dapat terhubung dan tersebar ke seluruh dunia. Semua serba online dan nyaris tanpa kertas atau *paperless*. Sekolah *online* tak bisa dihindari di saat wabah Covid19- belum hilang. Layanan pendidikan yang bersifat *online* harus menjadi fokus kita dalam melayani orangtua, siswa dan guru serta karyawan labschool lainnya.

Ke depan akan banyak profesi baru muncul--di dalam atau luar negeri. Labschool harus mempersiapkan kualitasnya dengan baik. Terlebih lagi Labschool ditunjuk sebagai sekolah atlet nasional yang ditunjuk oleh Kemenpora. Labschool harus bekerja cerdas dengan kepemimpinan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang mampu melaksanakan programnya dengan baik. Labschool harus menjadi pusat pendidikan dan menjadi contoh lembaga pendidikan yang terus belajar dan mengupdate dirinya setelah masa pandemi covid-19. Perlu kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas hingga tuntas sehingga Labschool dapat menjadi *center for excellent* yang diharapkan bersama.

Tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna. Olehnya itu, kerja tim atau kolaborasi jauh lebih penting daripada kerja sendirian. Kita berharap Labschool akan benar-benar menjadi rumah kedua bagi kita insan akademiknya. Mereka para siswa betah berada di kelas, karena sarana dan prasarananya sangat menunjang. Semua siswa merasakan kenyamanan sehingga sekolah menjadi rumah kedua sebagai tempat untuk belajar, berprestasi dan mengembangkan potensi unik siswa. Bakat dan minat siswa terasah dengan baik. Siswa tergali potensinya dengan kegiatan ekstrakurikuler yang terjadwal dengan baik.

Salah satu yang tidak kalah penting adalah tentang pengelolaan kelas di sekolah. Kelas yang terjaga kebersihannya, dan fasilitas lengkap akan membuat mereka betah selama 8 jam berada di sekolah. Kebersihan sebagian daripada iman. Guru harus mampu menanamkan penguatan pendidikan karakter kepada para siswanya. Mereka harus diajari pentingnya menjaga kebersihan di kelas. Dari pagi hingga sore hari. Rumah kedua mereka selalu bersih setiap harinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah terus menerus mengajak siswa agar membuang sampah pada tempatnya dan menjaga agar piket kebersihan kelas berjalan baik. Kemampuan mengelola kelas ini harus dipantau dari berjalannya kepengurusan kelas. Ketua kelas harus diberikan kesempatan untuk memimpin kelasnya dengan baik.

Sebagai salah satu sekolah rujukan Kemendikbud, Labschool sering dikunjungi sekolah-sekolah dari negara lain, tak terkecuali dari ASEAN. Sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah kita. Semua itu terwujud kalau Labschool telah melengkapi standar sarana dan prasarana sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.

Visi dan misi sekolah SMP Labschool Jakarta harus dituliskan dengan jelas dan dipajang di setiap kelas bersama kalender akademik. Labschool harus mampu menetapkan visi dan misi bidang akademik, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah yang tentu saja disetujui oleh kepala sekolah dan pimpinan sekolah lainnya.

Labschool harus menjadi sekolah cerdas atau *Smart School* berbasis TIK dan Riset adalah salah satu contohnya. Dari hasil riset inilah kita bergerak bersama dosen Universitas Negeri Jakarta yang akan memberikan masukan dan saran untuk pembelajaran di kelas modern. Kelas modern berbasis riset dan pembelajaran digital di era revolusi industri 4.0 dan Covid-19 akan terjadi bila kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memahami tupoksi, melakukan inovasi dan memahami misi dan visi sekolah dengan baik.*

Referensi

<https://www.kompasiana.com/wijayalabs/5f177e3d097f363152415df3/membangun-labschool-sebagai-center-of-excellent?page=all#sectionall>

<https://omjaygurubloggerindonesia.blogspot.com/2022/08/berpikir-komputasional.html>

<https://www.kompasiana.com/wijayalabs/63062df004dff04a101586c2/indonesia-digital-resilience-conference-and-expo-id-res-di-royal-ambarrukmo-yogyakarta-yang-meriah>

<https://wijayalabs.com/2022/08/23/meningkatkan-kualitas-belajar-siswa-dimanapun-dan-kapanpun/>

<https://wijayalabs.com/2020/07/27/membangun-labschool-sebagai-center-of-excellence-dalam-menjawab-tantangan-global-dalam-memasuki-era-disrupsi/>

<https://www.gurupenggerakindonesia.com/membangun-labschool-sebagai-center-of-excellence-dalam-menjawab-tantangan-global-di-era-disrupsi-dan-digital-pasca-pandemi-covid-19/>

<http://labschool-unj.sch.id/home/sejarahSingkat>

WIJAYA KUSUMAH adalah guru SMP Labschool Jakarta. Ia aktif sebagai blogger yang secara rutin membagikan pemikiran dan pengalamannya kepada publik.

Mewujudkan Pendidikan Bermartabat untuk Siswa Inklusi di Sekolah Umum ASEAN

Slamet Wibowo

Pendidikan inklusi sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang merata, tanpa melihat keterbatasan fisik maupun mental seseorang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran yang tinggi agar semua pihak bekerja sama dalam proses penerapannya. Dalam penerapannya itu, pemerintah, pihak sekolah, guru, dan orang tua harus memberikan perhatian khusus kepada semua anak berkebutuhan khusus agar mencapai tujuan pembelajaran program inklusi.

Pendidikan inklusif dikenal istilah dan konsep *children with special needs* (anak dengan kebutuhan khusus) atau *children with special educational needs* (anak dengan kebutuhan pendidikan yang khusus) istilah ini tidak bermaksud menggantikan istilah “anak cacat” atau “anak luar biasa” tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap peserta didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di sini adalah setiap kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan.

Setiap anak dipandang mempunyai kebutuhan khusus baik yang permanen maupun yang temporer. Kebutuhan yang permanen adalah kebutuhan yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang, misalnya pada anak yang memiliki kelainan penglihatan ia selalu menggunakan media membaca dengan huruf braille (tulisan khusus bagi tunanetra). Sedangkan, kebutuhan yang bersifat temporer adalah kebutuhan yang bersifat sementara, misalnya anak yang tidak dapat berkonsentrasi karena ia sedang sedih, setelah penyebabnya hilang maka ia dapat berkonsentrasi kembali.

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerja sama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

Pendidikan inklusi telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusi didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948, konvensi PBB tentang hak anak tahun 1989, deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua, JOMTIEN tahun 1990, peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat tahun 1993, pernyataan salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus tahun 1994.

Upaya memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor budaya, politik, sumber daya manusia (Kwon, 2005). Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut *index for inclusion* (Ainscow, 2000). Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu dimensi budaya (*creating inclusive cultures*). Dimensi budaya terdiri atas seksi membangun komunitas (*building community*) dan seksi membangun nilai-nilai inklusi (*establishing inclusive values*). Kemudian, dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*). Dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Satu yang tak kalah penting adalah dimensi praktik (*evolving inclusive practices*). Dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain bersama (*orchestrating play and learning*) dan seksi mobilisasi sumber-sumber (*mobilizing resources*).

Pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" dan "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun."

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan dilapangan adalah hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang masih dibawah rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, serta belum memiliki sarana prasaranan khusus.

Dukungan dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa reguler, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral. Padahal seharusnya dukungan yang dibutuhkan berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: monitoring, pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi) maupun bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).

Permasalahan guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus pada program inklusi di SDN Jatimekar 1 Kota Bekasi adalah pada kemampuan guru dalam merencanakan proses belajar mengajar. Dalam proses penyusunan RPP-Modul Ajar, guru kelas integrasi tidak membedakan RPP-Modul Ajar bagi siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Guru kelas integrasi masih menggunakan RPP-Modul Ajar yang sudah ada, yang telah disediakan dari pemerintah. Sekolah masih menggunakan KTSP dan belum menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, sehingga dalam hal ini perencanaan guru kelas integrasi belum melakukan proses pembaharuan rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini.

Kemudian, soal kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah penting karena menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu, kemampuan yang baik dalam menyampaikan dan menjelaskan materi bagi ABK sangat diperlukan mengingat kemampuan ABK yang terbatas dan daya ingat yang juga terbatas dan bisa saja kemampuan fisik mereka yang terbatas. Diperlukan strategi khusus yang digunakan guru dalam menghadapi kondisi semacam ini. Jika siswa normal membutuhkan satu sampai dua kali penjelasan guru untuk dapat memahaminya, maka untuk ABK diperlukan mungkin 3 sampai 5 kali penjelasan.

Hal lainnya, yakni kemampuan guru mengelola kelas integrasi. Saat melaksanakan tugasnya, guru kelas integrasi sadar bahwa di kelasnya terdapat dua jenis siswa yang berbeda sehingga terkadang timbul masalah-masalah saat pembelajaran berlangsung. Namun demikian, guru kelas integrasi memaklumi kejadian tersebut dan menjadikan sabar sebagai kunci dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Permasalahan yang muncul antara lain adalah kelas menjadi tidak kondusif karena beberapa siswa yang ada di kelas tersebut terlalu hiperaktif.

Selain di SDN Jatimekar 1, permasalahan di atas tentu banyak dialami oleh para guru yang menangani anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, harus ada solusi dalam menangani permasalahan tersebut, diantaranya: Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru yang menangani ABK mengenai kurikulum modifikasi untuk ABK, salah satunya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai cara membuat kurikulum modifikasi. Kepala sekolah memilih guru yang mempunyai kompetensi di bidang pendidikan inklusif, dengan menugaskan guru kelas merangkap menjadi pembimbing khusus untuk ABK. Selain itu memberikan pelatihan kepada guru mengenai pendidikan

inklusif. Sekolah mengadakan jam tambahan yang dikhususkan untuk ABK, mengingat dalam proses pembelajaran ABK mempunyai kesulitan menangkap pelajaran.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menjadikan keberagaman menjadi satu kesatuan. Semua anak terlepas dari mampu atau tidaknya, status sosial, ekonomi, dan latar belakang yang berbeda menjadi satu dalam ranah pendidikan dengan sekolah yang sama. Setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam belajar, tanpa melihat keterbatasan fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran yang tinggi agar semua pihak bekerja sama dalam proses penerapannya. Dengan demikian, mulai dari pemerintah, otoritas sekolah, guru, hingga orang tua harus memberikan perhatian khusus kepada semua anak berkebutuhan khusus agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. *

Referensi

- Darma, Indah Permata dan Binahayati Rusyidi. 2015. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2 (2): 223-227.
- Hajar, Siti dan Sri Roch Mulyani. 2017. Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan Dan Inklusi Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*. 4(2): 37-48.
- Rahayuni, Widias. 2017. Kemampuan Guru Kelas dalam Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus Berkesulitan Belajar pada Program Inklusi. *Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar*. 9 (2): 81-88.
- Sidiq, R. Zulkifli. *Pendidikan Inklusif Suatu Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*.
- Umami, Febriana Nur. 2016. Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. Jurusan Administrasi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.

SLAMET WIBOWO lahir 16 April 1969 di Jakarta. Masa kecilnya yang luar biasa dan sampai sekarang pun tetap menjadi luar biasa. Ia tinggal di Perum Wahana Pondokgede Bekasi Blok B.6 No. 2 Kota Bekasi. Pendidikan terakhirnya adalah S3 di Universitas Waseda (Waseda Daigaku) tahun 2012. Saat ini bertugas sebagai kepala sekolah SD di Kota Bekasi dan dosen di berbagai perguruan tinggi wilayah Jabode1abek untuk mengisi waktu juga bekerja sebagai HRD Trainner (senior officer) di lembaga keuangan. Ia memiliki seorang istri yang cantik bernama Andi Rezki Hafid, MSi dan 4 orang anak (Alifia Ainayya Salsabila, Adelia Ainayya Salbila, Athifa Anggraeni Jasmine, Aqila Ameera Queen). Slamet pernah menjadi guru prestasi, kepala sekolah prestasi. Ia juga banyak menulis karya tulis ilmiah. Teruslah menulis kalau ingin tahu nikmatnya membaca, pesannya.

Pengaruh Industri 4.0 Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia-ASEAN

Retno Puspitasary

Pendahuluan

Belakangan kata Industri 4.0 sering digaungkan oleh masyarakat. Istilah Industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomatis dalam industry. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi *machine learning* dan *Artificial Intelligence*.

Menurut Nurdianita Fonna (Guepedia, 2019), dikutip dari buku yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution*, Schwab (2017) menjelaskan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintahan.

Perkembangan Teknologi Terhadap Pendidikan di ASEAN

Saidina Umar al-Khattab, mengatakan, "*didiklah anak-anak kamu mengikuti dengan zamannya*" (Sulaiman 2006 dalam Siti Patonah et. al 2014). Perkembangan teknologi tentu saja memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan, baik dalam hal kurikulum pendidikan, inovasi penyampaian bahan ajar, hingga pengimplementasian ilmu yang diperoleh para peserta didik. Era teknologi 4.0 yang bahkan kini sedang menuju 5.0 tentu saja memberikan tantangan yang besar bagi para pendidik. Dalam lingkup Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN khususnya, dunia pendidikan telah mengalami inovasi penyesuaian pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Berikut adalah perkembangan pendidikan di Indonesia dari era sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan Indonesia dikutip dari <http://formadiksi.um.ac.id/> (diakses pada 04 Desember 2022) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ajaran agama yang menjadi landasan pendidikan adalah pendidikan Hindu-Budha, pendidikan Islam dan pendidikan Katholik dan Kristen Protestan. Kepentingan penjajah yang menjadi landasan pendidikan adalah pendidikan masa Portugis, pendidikan masa Belanda dan pendidikan masa Jepang. Pendidikan masa kemerdekaan dimulai dengan pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Moh. Syafe'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan Bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Phuysen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan K. Prof. Dr. Priyono dari partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan.

Pendidikan pada masa Orde Baru membahas usaha pembangunan terencana dalam Pelita I sampai Pelita II, III dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita I ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan

keuangan Negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa orde baru ini berakibat pada keuangan Negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab di dirikannya SD Inpres (Instruksi Presiden) mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita I dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. Enam puluh tiga koma lima juta buku SD kelas I telah dibagikan, 6000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 Proyek Pusat Latihan Teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang telah dibangun.

Sedangkan pendidikan pada masa Reformasi menjelaskan tentang Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain: Diubahnya Kurikulum 1994 ke Kurikulum 2000 menjadi Kurikulum 2002 setelah disempurnakan (Kurikulum Berbasis Kompetensi), yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung HAM (dikutip dari laman <https://kompasiana.com> pada tanggal 29 November 2019, pukul 10.03 WIB).

Setelah jabatan Megawati dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono, UU No. 20/2003 masih berlaku ditambah dengan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian Kurikulum KBK menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) berdasarkan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (di kutip dari www.gurupendidikan.co.id di akses pada tanggal 29 November 2019, pukul 19.17 WIB). KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan serta silabus.

Sementara itu, sejak masuknya industri 4.0 yang digemakan tahun 2011, sistem pengajaran di sekolah pun mulai mengalami perubahan, beberapa diantaranya seperti digunakannya penyampaian materi secara digital dengan menggunakan OHP, atau pun proyektor dari dokumen power point yang telah dibuat oleh pendidik. Perubahan ini merupakan salah satu ciri adanya revolusi digital dan era disrupsi dalam dunia pendidikan. Seperti dijelaskan Eko Risdianto (2019), bahwa ciri-ciri era disrupsi dapat dijelaskan melalui (VUCA) yaitu perubahan yang massif, cepat, dengan pola yang sulit ditebak (*volatility*), perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian (*uncertainty*), terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan (*complexity*), kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas (*ambiguity*).

Langkah-langkah kebijakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di era revolusi industri 4.0 pun terus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia berdasarkan *Making Indonesia 4.0*. Dalam penyusunan *Making Indonesia 4.0* ini, pemerintah memiliki salah satu visi menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia tahun 2020 (Satya, 2018). Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya visi tersebut yaitu:

1. Indonesia berencana merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (*Science, Teknologi, Engineering, the Arts, dan Mathematics*)
2. Menyeleraskan kurikulum Pendidikan nasional dengan kebutuhan industry di masa mendatang
3. Indonesia akan bekerja sama dengan pelaku industry dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer kemampuan (Hartanto, 2018)

Tidak hanya itu, era disrupsi juga menuntut dunia Pendidikan mampu membekali para peserta didik dengan keahlian dan keterampilan abad 21. Keahlian bidang pendidikan abad ke-21 tersebut meliputi *creativity, critical thinking, communication, dan collaboration*. Sedangkan keterampilan abad ke-21 meliputi *Leadership, Digital Literacy, Communication, Emotional Intelligence, Entrepreneurship, Global Citizenship, Problem Solving, dan Team-working*. Akibat

dari kebutuhan ketercapaian keahlian dan keterampilan tersebut, maka trend pembelajaran dan *best practice* juga harus disesuaikan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran terpadu atau secara *blended learning*.

Manfaat *blended learning* menurut Ronsen, dkk (2015) dalam (Oktarina, Budiningish, & Risdianto, 2018) *blended learning* lebih efektif daripada hanya belajar tatap muka atau hanya belajar secara online. *Blended learning* dapat meningkatkan hasil belajar, *Blended learning*³ dapat menjadi cara yang tepat untuk memperpanjang waktu belajar sehingga mahasiswa dapat mencapai standar kesiapan di perguruan tinggi dan dunia kerja. *Blended learning* dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literasi digital dan keterampilan belajar online. *Blended learning* dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri secara tatap muka. *Blended learning* dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan fleksibel. *Blended learning* dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan mahasiswa secara lebih mudah.

Sudah Siapkah Pendidikan di Indonesia dan Negara ASEAN?

Berbicara tentang kesiapan, berdasarkan data yang diperoleh dari artikel “Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri” karya Eko Risdianto (2019), di Kawasan ASEAN, hanya Singapura yang telah siap mengadaptasi era industri baru ini. Hal ini disebabkan infrastruktur penunjang pemanfaatan teknologi di sejumlah wilayah Indonesia belum merata. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menekan kesenjangan pembangunan di Indonesia namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan pemerataan pembangunan masih terjadi. Salah satu ciri suatu daerah sudah tersentuh pembangunan biasanya ditandai dengan daerah tersebut sudah dialiri oleh listrik. Menurut data, 42.352 Desa di Indonesia belum tersentuh listrik dari total 82.190 desa di Indonesia (Sulastini, 2016). Hal ini tentu berimplikasi pada pemerataan Pendidikan di Indonesia.

Perkembangan Pendidikan Era 4.0 di Myanmar

Dikutip dari Artikel “*Developing a Digital Strategy for Distance Education in Myanmar*”, dalam Pra-Commonwealth Forum, 9-12 September 2019, Edinburgh, Scotland menyatakan, perubahan besar di negara ini sejak 2013 adalah pesatnya pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi “menyusul adopsi undang-undang telekomunikasi baru pada 2013 yang membuka pasar untuk persaingan” (ITU, 2018). Setelah proses tender, dua perusahaan sektor swasta internasional, Telenor dan Ooredoo, ditambah Myanmar Post and Telecommunication (MPT) milik negara, diberikan lisensi untuk mengembangkan infrastruktur. perusahaan keempat, Mytel, yang merupakan perusahaan patungan dari konsorsium pemerintah dan perusahaan Vietnam bernama Viettel yang diberikan lisensi pada tahun 2017.

Sebelum tahun 2013, internet sangat terbatas, dan Myanmar adalah salah satu dari sedikit negara yang tersisa di mana ponsel tidak digunakan secara luas karena pada awalnya biaya ponsel dan data mahal. Pada tahun 2019, terdapat jangkauan luas dan akses 3G dan 4G yang mendukung broadband seluler dan tersedia di sebagian besar negara. Informasi ini diumumkan pada awal 2019 bahwa 5G diantisipasi akan diluncurkan dalam 2-3 tahun ke depan (Saw Yi Nanda, 2019). Namun, seperti yang ditunjukkan oleh peta cakupan seluler OpenSignal untuk Myanmar, kepadatan jangkauan dan akses sebagian besar berada di sekitar kota dan bagian tengah negara. seperti yang dilaporkan oleh UNESCO & IMS (2016), misalnya masih banyak masyarakat (21,5%) terutama di daerah pedesaan yang hanya memiliki akses ke media penyiaran/cetak.

ITU (2018) melaporkan bahwa lebih dari 42.000 km jaringan tulang punggung serat optik telah dibangun secara nasional. Konektivitas Internet Internasional Myanmar telah meningkat secara radikal, dari sekitar 30 Gbps sebelum dimulainya reformasi sektor menjadi 440 Gbps pada April 2018. Masuknya internet, memberikan dampak yang signifikan dalam bidang Pendidikan di Myanmar. Salah satu proyek yang terimplementasi adalah proyek TIDE. *Proyek Transformation by Innovation in Distance Education (TIDE)* dalam salah satu portofolio dari sembilan proyek yang termasuk dalam program *Strategic Partnerships for Higher Education Innovation and Reform (SPHEIR)* yang didanai oleh UK Aid melalui *Department for International Development*. Proyek yang dimulai pada Februari 2018 ini berjalan hingga akhir September 2021. Kemitraan TIDE terdiri dari OU UK sebagai mitra utama, *Oxford University, University of Manchester, Irrawaddy Policy Exchange (IPE), Yangon University, Yangon University of Distance Education, dan Yadanabon University*.

TIDE bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Jarak Jauh di Myanmar, dan kemampuan kerja lulusan Pendidikan Jarak Jauh dan berkontribusi pada NESP. Ada fokus akademik pada *‘Education for Environment and Sustainable*

Development (EfESD) proyek ini dirancang di bawah tiga kegiatan utama; kegiatan tersebut berkaitan dengan kursus online kapasitas, akademik dan staf pendukung peserta dalam kegiatan pelatihan dan berbagi pengetahuan terkait dengan EfESD terkait pengetahuan akademik, pengajaran dan pedagogi, serta keterampilan TIK dan perpustakaan.

Kemajuan Dunia Pendidikan di ASEAN

Kemajuan teknologi dunia telah membawa banyak perubahan dalam dunia Pendidikan. Menurut Siti Hajar Taib dalam *ASEAN Comparative Education Reseach Journal on Islam and Civitization* berjudul "Inovasi Kesepaduan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Di Era Revolusi 4.0" mendapati penggunaan teknologi digital seperti pembelajaran *blended learning*, *i-Folio* dan *Massive Open Online Course* (MOOC) membentuk pengajaran dan pembelajaran menjadi mudah dan seru. Disamping *i-Folio* dan *MOOC*, *online journal* merupakan salah satu usaha melengkapkan pelaksanaan pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran adalah gabungan antara pembelajaran offline dan online. Pembelajaran online seperti penggunaan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Webex, terlebih pada saat peningkatan wabah covid-19 sejak 2020.

Namun, kemajuan pendidikan dalam bidang teknologi rupanya juga memberikan dampak negatif terhadap daya tangkap siswa, terlebih ketika pembelajaran online pada masa Covid-19. Hal ini disebabkan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap siswa, dari 10 orang siswa yang ditanya dengan jenjang kelas yang berbeda mengatakan, mereka tidak bisa menyerap dengan baik sistem pembelajaran online yang disampaikan oleh guru sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Penjelasan dengan menggunakan slide yang disampaikan oleh guru, terlalu cepat; Tidak semua anak dapat menggunakan pembelajaran online, karena sistem gaya belajar setiap anak berbeda. Ada yang kinestetik, audiovisual, atau visual; Anak-anak tidak dapat bertanya dengan leluasa apabila di virtual meeting

Menutup tulisan ini, penyiapan pendidikan 4.0 merupakan tugas kita bersama. Perlu adanya kerja sama dari para orang tua, sekolah formal, praktisi lapangan, lembaga non formal, pemerintah maupun kerja sama antar negara, untuk mempersiapkan pendidikan generasi selanjutnya di ASEAN yang lebih baik lagi. *

Referensi

- Daon001 (2019). "Apa itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya," Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 19 Februari 2019, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan-media> (diunduh pada 4 Desember 2022)
- Rahayu, Suci Setiya (2020). "Sejarah Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa, Universitas Negeri Malang, 30 Agustus 2020, <https://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/> (diunduh pada 4 Desember 2022)
- Risdianto, M.Cs, Eko (2019). "Analisis Pendidikan Indonesia Di Era Revolusi Industri,," Universitas Bengkulu, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=industri+4.0+ASEAN&oq=#dgs_qabs&t=1670151088239&u=23p%3DC61qd-qvh5wJ (diunduh pada 4 Desember 2022)
- Taib, Siti Hajar (2019). "Inovasi Kesepaduan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran di Era Revolusi Industri," Fakultas Pendidikan, Universitas Kebangsaan Malaysia, *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 3 (2) Sep 2019, 38-54. eISSN: 2600-769x*, November 2019, <https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/50/50> (diunduh pada 4 Desember 2022)
- Tsuyoshi Usugawa, Mon Mon The (2018). "Change in E-Learning Readiness and Challenge for Myanmar Higher Education," Department of Computer Science and Elektrical Engineering, Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kumamoto, Japan, Juli 2018, <https://scrip.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=85853> (diunduh pada 06 Desember 2022)

RETNO PUSPITASARY adalah Founder Pelatihan Skill. Saat ini ia merupakan pengajar matematika dan fisika di Homeschooling dan Bimbel Laskar UI, Brain Academy by Ruang Guru dan O Class Academy. Ia menulis sejak 2017, karya-karyanya pernah termuat di Majalah Komunitas Depok Clean Action edisi 1-5 pada Januari 2017-Mei 2017, 100-an

berita dan artikel untuk Lembaga Kemanusiaan Sekolah Relawan pada Maret 2017-Januari 2018, pernah menjadi Sosial Media Spesialis di Sekolah Relawan (Mei 2017-Desember 2017) dan di PT. Bina Kreasi Bangsa (Agustus 2020-November 2020), dan novel berjudul SHARQIA (Storial.co, 2021). Ia dapat dihubungi di email : puspitasaryretno@gmail.com

Model Pembelajaran SOLE Berbasis Sains di ASEAN

Suciati dan Bramastia

Pendahuluan

Dalam rangka menggapai sinergi dan kolaborasi pendidikan di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang dikenal dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), maka perlu inovasi pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan segala aktivitas manusia menjadi ketergantungan terhadap perangkat teknologi. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang diharapkan dapat memberikan kemudahan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan TIK yang pesat menyebabkan setiap orang dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kebutuhan suatu negara untuk berkembang dan berkelanjutan bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan kemampuan mereka untuk berinovasi. Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak yang sangat signifikan, khususnya pada bidang pendidikan. Kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas pendidikan dan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang.

Di era ini, pendidikan di ASEAN tentu harus komprehensif, berkelanjutan, dan harus terus berkembang untuk memenuhi tantangan di masa sekarang dan masa depan. Inovasi Pendidikan yang ada di negara Asia Tenggara harus dimunculkan dan diangkat ke permukaan sebagai bentuk kearifan lokal. Belajar sepanjang hayat harus selalu menjadi nilai utama yang harus diajarkan di sekolah. Namun pembelajaran menjadi lebih formal karena manusia telah mengembangkan cara berpikir dan pemecahan masalah yang sistematis (Farenga and Ness 2005). Seiring dengan semakin terformalisasi dan terlembaganya pembelajaran, masyarakat seringkali lupa bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang atau sebuah ruangan. Pembelajaran kini dapat dilakukan di luar sekolah, organisasi, atau lembaga informal lainnya. Seiring berkembangnya pola pikir pada masyarakat ASEAN, kita sering mengabaikan *soft skill* yang memungkinkan manusia bertahan hidup, yakni keterampilan yang membantu manusia untuk belajar, bekerja, dan hidup lebih baik. Fokus utama masyarakat umumnya adalah *hard skill* yang dibutuhkan untuk pekerjaan impian mereka, misal akuntansi, kedokteran, hukum, bisnis, dan lain-lain. Sejak saat itu, belajar sepanjang hayat pada dasarnya disalahpahami.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau yang biasa disebut sains merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat memberikan pengalaman dan peranan bagi siswa untuk melatih siswa belajar tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan alam. Guru harus menimbulkan motivasi dan minat siswa untuk belajar karena sains sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pemecahan masalah. Sains berkaitan dengan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sains sebagai produk yang berupa faktual, konseptual, dan prosedural, dan sains sebagai proses yang berupa kerja ilmiah. Belajar sepanjang hayat terhadap pembelajaran sains merupakan hal penting bagi manusia untuk beradaptasi dengan waktu dan lingkungan yang berbeda. Hal inilah yang membantu manusia untuk bertahan hidup, berinovasi dan mengakomodasi perubahan. Guru harus untuk mampu menyusun perencanaan atau memfasilitasi siswa dengan menjadikan materi yang diajarkannya sebagai sesuatu yang nyata sehingga mudah dipahami siswa.

Permasalahan pendidikan saat ini (termasuk di ASEAN) adalah pada sistem pendidikan yang sudah terstandarisasi dan belum efektif dalam mempersiapkan individu untuk kompetensi masa depan maupun *status quo* saat ini. Perusahaan besar seperti Intel dan Microsoft prihatin dengan lulusan yang memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang tidak mempersiapkan mereka untuk bekerja di era digital (Griffin and Care 2015). Selain itu, kecerdasan buatan modern telah menjadi sangat canggih sehingga telah mengotomatisasi industri manufaktur dan perlahan-lahan mengambil alih industri jasa (Salomons & Autor, 2018; Bartodziej, 2017). Hal ini adalah permasalahan waktu di mana pekerjaan dari tenaga kerja atau jasa dapat digantikan oleh mesin. Untuk dapat terus berkembang, perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul di masa depan.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi keterampilan masa depan bagi orang-orang untuk mempertahankan masa sekarang dan masa depan. Keterampilan untuk masa depan adalah seperti yang didefinisikan sebagai keterampilan abad ke-21. Keterampilan ini terdiri dari keterampilan hidup dan karir; keterampilan informasi, media dan teknologi; dan keterampilan belajar dan inovasi. Keterampilan ini diidentifikasi dan dirumuskan dari hasil survei kolektif yang dilakukan oleh berbagai organisasi di perusahaan dan institusi untuk mengetahui permintaan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan (Griffin & Care, 2015; Larson & Miller, 2012; Rotherham & Willingham, 2010).

Dari penjelasan di atas adanya ketidaksesuaian antara kondisi pekerjaan dan kehidupan dengan pendidikan yang diajarkan di sekolah. Hal itu terjadi akibat ketidakrelevanan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini sehingga membutuhkan efisiensi waktu dan tenaga bagi perusahaan atau individu untuk beradaptasi dengan status quo saat ini. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan industri saat ini dan masa depan. Jika apa yang dipelajari siswa sudah usang, tidak akan memungkinkan mereka untuk berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Dan dengan demikian, akan ada generasi yang tertinggal dalam perkembangan industri tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ancaman besar terhadap pembangunan ekonomi suatu Negara karena perkembangan kebutuhan di industri yang mengubah cara sekolah (Mitra, 2014). Dengan demikian, strategi pengajaran baru harus dirumuskan untuk membuat siswa siap menghadapi pengalaman kehidupan nyata di masa sekarang maupun di masa depan.

Model SOLE

Keterampilan untuk masa depan harus dibina secara intensif sehingga Indonesia mampu bersaing secara global. Hal dikarenakan motivasi menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan minat siswa untuk belajar, pembelajaran sepanjang hayat tidak akan dapat berkembang dalam diri siswa jika tidak ada motivasi (Yilmaz and Kaygin 2018). Pembelajaran bahasa dan komunikasi antarbudaya juga merupakan bagian dari pembelajaran sepanjang hayat, karena orang selalu perlu meningkatkan keterampilan bahasa dan keterampilan komunikasi mereka di dunia yang mengglobal ini. Perkembangan internet, perangkat pintar, seperti komputer dan gawai menjadikan berdampak pada kemudahan dalam mengakses dan mendapat informasi yang seharusnya memberikan keuntungan dalam proses pembelajaran. Setiap orang yang terlahir dibekali dengan rasa ingin tahu dan kemudahan yang diberikan dari perkembangan TIK dalam mengakses informasi.

Dua proses ini dipertemukan dan dioptimalisasi oleh model pembelajaran Lingkungan Belajar yang Terorganisir Sendiri atau *Self Organized Learning Environments* (SOLE) adalah sebagai program yang dirancang untuk mendukung pendidikan mandiri. Model pembelajaran SOLE menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan siapapun yang memiliki keinginan belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Dalam konteks pembelajaran sekolah, model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh siswa.

Pada dasarnya, bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dari prosedur untuk mengorganisasikan pengalaman pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran dan menjadi pedoman saat proses perancangan proses pembelajaran. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru saat merencanakan dan melakukan pembelajaran. Model pembelajaran SOLE termasuk salah satu model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran karena guru mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dengan memanfaatkan menggunakan komputer/gawai di dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa. SOLE dapat mengakomodasi guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student-driven learning*). Komponen yang terdapat dalam *Student-driven learning* yakni terorganisir sendiri (*self-organized*), rasa keingintahuan (*curious*), kooperatif, diikutsertakan, dan difasilitasi oleh dorongan (Mitra and Crawley 2014).

Di dunia dan khusus ASEAN, perkembangan teknologi telah mengubah cara kita hidup manusia dan mengubah panggung kemanusiaan dalam masyarakat teknologi dan informasi. Supaya masyarakat berkembang, maka harus dilatih dan diajarkan untuk memenuhi tuntutan sosial dalam proses belajar mengajar. Sedangkan sekolah adalah lembaga yang menghimpun keinginan dan tuntutan sosial untuk membangun dirinya dengan istilah pembayar pajak di masa depan. Telah menjadi kebiasaan berasumsi bahwa anak-anak membutuhkan bimbingan utama dari orang dewasa.

Namun, dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi dilihat sebagai proses transfer ilmu dari seorang guru kepada siswa (Esteban and Peart 2014)renewing the traditional teaching-learning process. Self-Organized Learning Environments (SOLE).

Namun demikian, guru yang membantu siswa untuk belajar dengan menyediakan fasilitas dan situasi yang mendukung mereka untuk membangun konsep dan pemahaman topik secara mandiri dan aktif. Sugata Mitra telah membuktikan bahwa anak-anak dapat belajar sendiri melalui proyek *Hole-in-the-Wall*-nya di India, yang dipresentasikan dalam TED Talk 2013 (Ted, 2013). Dari proyek *Hole-in-the-Wall*-nya, ia merumuskan konsep SOLE yang terintegrasi dalam mimpinya membangun *School in the Cloud* atau sekolah di atas awan. *School in the Cloud* adalah platform pembelajaran dan pengajaran yang bertindak seperti sekolah *online*. Platform ini diluncurkan pada konferensi TED 2014 dengan tujuan untuk membantu mempercepat penelitian SOLE secara global kepada para guru atau pendidik dan berbagi pengalaman mengajar dan belajar mereka bersama.

SOLE adalah konsep yang dikembangkan oleh Sugata Mitra dan para peneliti di SOLE Center di Universitas Newcastle. Konsep ini awalnya didasarkan pada proyek *Hole-in-the-Wall* Sugata Mitra di mana ia meneliti dampak dari komputer yang dapat digunakan secara gratis, terhubung ke internet, yang disematkan ke dinding di sebuah desa dengan ketinggian di mana ia akan nyaman digunakan oleh anak berusia 8-13 tahun. Dalam eksperimen yang dilakukan selama lebih dari 5 tahun di India ini, anak-anak asli India dapat mengoperasikan komputer yang beroperasi dalam bahasa Inggris dalam waktu singkat sambil mempelajari bahasa Inggris secara bersamaan. Eksperimen ini dilakukan di desa-desa pedesaan India yang menghasilkan peningkatan yang signifikan pada prestasi akademik anak-anak. Anak-anak dapat belajar menggunakan komputer dan internet secara mandiri, terlepas dari bahasa dan asal anak-anak (Mitra & Crawley, 2014; DeBoer, 2009).

Model SOLE sangat dipengaruhi oleh pendekatan konstruktivisme, konsep belajar dan mengajar yang membiarkan peserta didik mengendalikan proses belajar mereka memberi mereka kemampuan untuk membuat makna subjek sendiri. Peran guru sebagai fasilitator hanya akan mengamati dan mengawasi siswa dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk bekerja sama menjawab pertanyaan menggunakan internet. Selama proses tersebut, siswa akan disibukkan oleh penemuan diri, berbagi pengetahuan dalam komunitas, dan spontanitas dalam mencoba belajar di tepi kekacauan (Mitra and Crawley 2014). Pengenalan SOLE di pedesaan India meningkatkan pemahaman bahasa Inggris anak-anak. Anak-anak mengeksplorasi alat yang disediakan oleh Sugata Mitra dalam proyek *Hole-in-the-Wall*-nya sebagai perangkat misteri yang melakukan trik luar biasa yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Jenis keterlibatan ini terbukti efektif untuk mengaktifkan mode belajar siswa melalui proyek ini. Dengan peningkatan yang signifikan, ada kemungkinan untuk menerapkan konsep SOLE di Indonesia untuk mengubah paradigma pengajarannya dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa secara efektif. Karena teknologi modern semakin mudah diakses, ada baiknya anak-anak pedesaan di Indonesia secara positif mengeksplorasi ensiklopedia pengetahuan dari internet secara teratur yang difasilitasi oleh seorang guru. Proses belajar mengajar dalam konsep SOLE ini dapat diterapkan.

Model pembelajaran SOLE bertujuan untuk membentuk kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai tuntutan abad 21 yaitu: (1) kemampuan berpikir kritis, (2) kemampuan berpikir kreatif, (3) kemampuan memecahkan masalah, dan (4) kemampuan berkomunikasi. Aktivitas pada model pembelajaran SOLE terdapat tiga tahap yang harus dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran sains, yaitu: (1) Pertanyaan (*question*), guru memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu dari materi yang akan diajarkan pad siswa, 2) Investigasi (*investigate*), siswa membentuk kelompok kecil dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan perangkat internet atau gawai, 3) Mengulas (*review*), setiap kelompok mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang tadi diberikan (Marlina 2021). Jika model pembelajaran SOLE ini diterapkan di dalam kelas saat proses kegiatan belajar mengajar, kegiatan awal dari penerapan model ini adalah guru melakukan kegiatan apersepsi seperti melakukan presensi siswa yang bisa dilakukan melalui aplikasi video *conference* seperti *google meet* atau *zoom cloud meeting* dan *review* materi sebelumnya dengan cara melakukan tanya jawab, dan memberikan semangat untuk belajar pada saat berlangsungnya pebelajaran, serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran yang akan digunakan.

Selanjutnya pada kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan besar mengenai pelajaran sains misalkan pada materi asam basa yang akan diselesaikan siswa melalui aplikasi *whatsApp* (WA) pada grup kelas. Kemudian guru membagi

kelompok siswa menjadi kelompok kecil melalui grup WA kelas, dan siswa dalam kelompok kecil bisa menggunakan grup WA khusus siswa berkelompok. Pada kesempatan itu siswa diberi kesempatan berdiskusi untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang diberikan dengan mencari ke berbagai sumber menggunakan gawai yang dimiliki. Selanjutnya masing-masing kelompok membuat laporan hasil diskusi. Kemudian siswa kembali diarahkan untuk menggunakan aplikasi video *conference*, guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil investigasinya dan ditanggapi kelompok lain. Lalu, guru memberi penguatan dan siswa bersama membuat kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari pada materi. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran baik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kesimpulan

Konsep model pembelajaran SOLE membantu siswa untuk mengonfigurasi dan menggambarkan (pada saat yang sama) bagaimana siswa di abad ke-21 ini baru belajar, berpikir, menggunakan, dan menerapkan pada kehidupan mereka dan cara untuk bertukar kehidupan virtual dan nyata. Mendasar isu yang memiliki hubungan antara pendidikan formal dan pembelajaran, pendidikan informal dan pembelajaran dan pendidikan *online*, serta pembelajaran seumur hidup. Untuk mencapai tujuan pendidikan abad 21 diperlukan solusi dengan menerapkan pembelajaran SOLE berbasis Sains yang mampu mengembangkan keterampilan penelitian dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Secara tidak langsung siswa dapat belajar mengumpulkan data dan menggunakan perangkat teknologi untuk mengekspresikannya dalam berbagai cara. Hal ini diharapkan siswa dapat berkontribusi pada pembelajaran seumur hidup di lingkungan digital dalam menghadapi abad ke-21. Selain itu, juga melatih calon guru tentang bagaimana mereka dapat memperbarui praktik pendidikan dengan menggunakan TIK sebagai *partner* dalam proses belajar-mengajar.

Model pembelajaran SOLE termasuk salah satu model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran karena guru mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dengan memanfaatkan menggunakan komputer/gawai di dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa. Kesimpulan akhirnya bahwa penerapan model pembelajaran SOLE dalam pembelajaran sains, yaitu: (1) Pertanyaan (*question*), guru memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu pada mengenai pembelajaran sains, 2) Investigasi (*investigate*), siswa membentuk kelompok kecil dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan perangkat internet atau gawai, 3) Mengulas (*review*), setiap kelompok mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Sehingga konsep model pembelajaran SOLE membantu siswa untuk mengonfigurasi dan menggambarkan bagaimana siswa di abad ke-21 ini baru belajar, berpikir, menggunakan, dan menerapkan pada kehidupan mereka dan cara untuk bertukar kehidupan virtual dan nyata. Untuk mencapai tujuan pendidikan ASEAN diperlukan solusi dengan menerapkan pembelajaran SOLE berbasis Sains yang mampu mengembangkan keterampilan penelitian dan kemampuan pemecahan masalah siswa yang secara tidak langsung belajar mengumpulkan data dan menggunakan perangkat teknologi di lingkungan digital dalam menghadapi abad ke-21. *

Referensi

- Bartodziej, C. J. 2017. The Concept Industry 4.0: an Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics. <http://www.myilibrary.com?id=971715>
- DeBoer, Jennifer. 2009. "The Relationship between Environmental Factors and Usage Behaviors at 'Hole-in-the-Wall' Computers." *International Journal of Educational Development* 29(1): 91–98.
- Esteban, Prudencia Gutiérrez, And Mark Thomas Peart. 2014. "Introducing Self Organized Learning Environments In Higher Education As A Tool For Lifelong Prudencia Gutiérrez Esteban and Mark Thomas Peart.": 1–10.
- Farenga, Stephen J., and Daniel Ness. 2005. *Encyclopedia of Education and Human Development*. Armonk, New York
- Griffin, Patrick, and Esther Care. 2015. *Assessment and Teaching of 21st Century Skills Policy Pathways for Twenty-First Century Skills*.
- Larson, Lotta C, and Teresa Northern Miller. 2012. "Century Skills : Prepare Students For." (May 2014).

- Marlina, Diyan. 2021. "Penerapan Model Pembelajaran SOLE (Self Organized Learning Environments) Berbasis Daring Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA SD." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4(2): 70–78. <http://dx.doi.org/10.33603/v4i2.5319>.
- Mitra, Sugata, and Emma Crawley. 2014. "Effectiveness of Self-Organised Learning by Children: Gateshead Experiments." *Journal of Education and Human Development* 3(3): 79–88.
- Rotherham, A.J., and Daniel T Willingham. 2010. "'21st-Century' Skills." *American Educator*: 17–20.
- Salomons, Anna, and David Autor. 2018. "Growth , Employment , and the Labor Share." *Massachusetts Institute of Technology*.
- Ted. 2013. Sugata Mitra creates a School in the Cloud. Sugata Mitra creates a School in the Cloud. <https://www.ted.com/participate/ted-prize/prizewinning-wishes/school-in-the-cloud>
- Yilmaz, Emrullah, and Hüseyin Kaygin. 2018. "The Relation Between Lifelong Learning Tendency and Achievement Motivation." *Journal of Education and Training Studies* 6(3a): 1.

SUCIATI adalah Guru Besar Pendidikan IPA, Dosen Pascasarjana S3 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BRAMASTIA adalah Dosen Pascasarjana S2 Pendidikan Sains Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Post Pandemic Covid-19 as Trigger for ASEAN Higher Educational Transformation

Pratiwi Amelia and Ahmed A. O. Shbair

Covid 19 and Learning in Higher Education

Recent studies show that lack of students' motivation, lack of facilities, and lack of technological knowledge are the most challenging factors that influenced the success of online learning during pandemic Covid-19. Thus, the loss of students' engagement due to technological and mental issues during learning becomes a hot issue nowadays due to the utilization of online learning. Therefore, shreds of evidence derived from the application of distance learning during Pandemic Covid-19 particularly in higher education particularly in Asian should be explored further including barriers encountered by students in the teaching and learning process during Pandemic Covid-19; and lesson cultivated from these experiences and solutions for future directions.

Higher education attempts to teach students to think independently, hence research on students' university experiences is vital (Radley, 1979), particularly in Asian. It is vital because students' social and emotional experiences affect their academic achievement (Glass & Westmont, 2014). Hence, some academicians were interested in exploring the students' mental and emotional issues during the implementation of online learning. Most pupils showed signs of stress and worry (Baloran, 2020). Students were concerned about their food and financial resources, so they avoided socializing and large gatherings.

The adoption of online learning during epidemic Covid-19 varies across areas and fields of study, particularly in higher education. However, it cannot be denied that the delay of offline classes due to the widespread of pandemic Covid-19 pushes teachers to create adaptations on the lesson. During the pandemic Covid-19, many students in universities have difficulties in learning due to unpreparedness in dealing with difficult situations. Before the pandemic started and spread across countries, students were not used to changing and adapting because they were not trained enough to survive in crises, lack knowledge and skills, lack of durability, and lack of mentally and physically prepared.

In addition, despite many studies into the implementation of online learning, relatively more minor is known on students' experiences and challenges during education in the time of crisis during pandemic Covid-19. Some actions are needed to act and to change differently as a way to innovate education. It is also hoped that the result of these reviews can offer valuable considerations for the government to overcome and mitigate the effect of Covid-19, particularly in Asian higher education.

Trends of Barriers of the Enactment of Online Learning

According to Joshi et al. (2020), the effectiveness of online learning is questionable due to the lack of interaction during the teaching process. It means that lack of engagement and connection during online learning can produce some problems in the teaching and learning process. Students who have low competencies in using digital devices might have some issues during learning. There is a strong association between digital competency and the use of digital devices used by higher education students, Omotayo & Haliru (2020) stated. Moreover, some scholars also stated many barriers to implementing online teaching. Some areas still have limited access and lack of teaching and learning knowledge, particularly remote education (Lie et al., 2020). Besides, there are some problems such as lack of direct interaction (Sepulveda-Escobar & Morrison, 2020) and lack of practical experiences.

Besides, it also initiated that most of their findings found similar evidence toward the enactment of online learning. They argued that most students expressed poor views about the fulfilment of online learning. Lack of engagement, lack of student participation, lack of facilities, and lack of internet connection are the factors that affect the students'

attention in online learning. Most students also had unfavorable views toward online education due to many assignments delivered by lecturers during online learning.

Mental and Emotional Issues

The students' emotions changed quickly such as emotional stability and stress. Some of the students also thought that their feelings while taking part in online learning affected how they learned (Dixon et al., 2021; Kibbey et al., 2021). It is beneficial to look out for and maintain students' social-emotional geography and encourage them to control their mental while learning online during a pandemic (Sun & Zhang, 2021). Students need to know how to deal with stress, anxiety, and new problems in the future, and these strategies are essential (Guo, 2021). Hence, Lalani et al. (2021) highlighted that targeted leadership development is critical to increasing educational technology efficacy in higher education. Besides, it is not enough to move content to an online learning environment (Bhagat & Jim, 2020); there should be a modification on pedagogical approaches and technological and content adaptations.

Developing online learning communities can be enhanced students' learning, Khalili (2020) suggested. In line with these studies, Yululiza (2020) also reported that students had some challenges when learning online, such as a poor internet connection and being easily distracted, which produced more stress. In response, blended learning is a compelling, energizing strategy (Wich et al., 2020), and it's a viable option (Zhu, 2020). That is why university students should change their thinking, think out of the box, and take natural action for their future. This pandemic of Covid-19 should not stop their study, career, and academic life on campus. Making benefit of online learning by creating some improvement to their daily life could enhance their motivation and awareness to be independent.

Flexibility and Agility in Learning as Part of Educational Transformation

Flexibility means that you can quickly adapt to changing events or settings. Meanwhile, flexible learning refers to a form of instruction in which students can choose how, what, when, and where they will learn. Flexible learning environments allow students to work in groups while learning collaboratively in a collaborative environment. Learning can take place in various locations, including in the classroom, in the library, or at home through the Internet, among other things. Besides, agility is a set of sophisticated talents that enable us to learn something new in one area and then use that knowledge in a completely different context.

So, even though there are still many opportunities to enact online learning in an online setting. It has some advantages to open up the continuation of education, open up new academic experience opportunities, and provide opportunities for students to carry out their duties from campus more flexibly and efficiently. When the learning system has been systematically structured, when all lecturers have good expertise, when learning materials are easily accessible, so the enactment of online learning can implement successfully.

The ability to learn adapts, unlearn, and relearn in response to rapidly changing circumstances. Therefore, even in crisis, students in university should be agile to overcome the challenges in learning during pandemic Covid-19 by continually growing, developing, and utilizing new directions to success. The students should think creatively, build a positive environment in learning, and think differently; that is referred to as thinking outside the box. We should take this pandemic as a chance to make improvements and grow better for Asian higher education.*

References

- Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. *Interactive Learning Environments*, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180>
- Atmojo, A. E. P., & Nugroho, A. (2020). EFL classes must go online! Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. *Register Journal*, 13(1), 49-76. DOI: <https://doi.org/10.18326/rqt.v13i1.49-76>
- Balaran, E. T., (2020): Knowledge, Attitudes, Anxiety, and Coping Strategies of Students during COVID-19 Pandemic, *Journal of Loss and Trauma*. DOI: <https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1769300>
- Bhagat, S., & Kim, D. J. (2020). Higher education amidst COVID-19: challenges and silver lining. *Information Systems Management*, 37(4), 366-371. DOI: <https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1824040>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. DOI: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Dixon, L. J., Witcraft, S. M., & Schadegg, M. J. (2021). COVID-19 anxiety and mental health among university students during the early phases of the US pandemic. *Journal of American College Health*, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1923504>
- Glass, C. R., & Westmont, C. M. (2014). Comparative effects of belongingness on the academic success and cross-cultural interactions of domestic and international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 38(1), 106-119. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.04.004>
- Guo, R., Austill, L., Ginnetti, R. M., & Yan, L. (2021). Assessment of the factors affecting health profession students' emergency transition during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. *Journal of American College Health*, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1962327>
- Haidar, A., & Al-Salman, S. (2020). COVID-19's impact on the higher education system in Jordan: Advantages, challenges, and suggestions. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1418-1428. DOI: <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84131>
- Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A. (2020). Digital readiness and its effects on higher education students' socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic. *Journal of Research on Technology in Education*, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1846147>
- Hadar, L. L., Ergas, O., Alpert, B., & Ariav, T. (2020). Rethinking teacher education in a VUCA world: student teachers' social-emotional competencies during the Covid-19 crisis. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 573-586. DOI: <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1807513>
- Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A. (2020). Digital readiness and its effects on higher education students' socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic. *Journal of Research on Technology in Education*, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1846147>
- Joshi, O., Chapagain, B., Kharel, G., Poudyal, N. C., Murray, B. D., & Mehmood, S. R. (2020). Benefits and challenges of online instruction in agriculture and natural resource education. *Interactive Learning Environments*, 1-12. DOI: <http://doi.org/10.1080/10494820.2020.1725896>
- Kee, C. E. (2021). The impact of COVID-19: Graduate students' emotional and psychological experiences. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 31(1-4), 476-488. DOI: <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1855285>
- Kibbey, M. M., Fedorenko, E. J., & Farris, S. G. (2021). Anxiety, depression, and health anxiety in undergraduate students living in initial US outbreak "hotspot" during COVID-19 pandemic. *Cognitive Behaviour Therapy*, 50(5), 409-421. DOI: <https://doi.org/10.1080/16506073.2020.1853805>
- Khalili, H. (2020). Online interprofessional education during and post the COVID-19 pandemic: a commentary. *Journal of Interprofessional Care*, 34(5), 687-690. DOI: <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1792424>
- Lalani, K., Crawford, J., & Butler-Henderson, K. (2021). Academic leadership during COVID-19 in higher education: technology adoption and adaptation for online learning during a pandemic. *International Journal of Leadership in Education*, 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1988716>
- Lee, J., Solomon, M., Stead, T., Kwon, B., & Ganti, L. (2021). Impact of COVID-19 on the mental health of US college students. *BMC psychology*, 9(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40359-021-00598-3>
- Lie, A., Tamah, S. M., Gozali, I., Triwidayati, K. R., Utami, T. S. D., & Jemadi, F. (2020). Language teachers' online learning engagement during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Journal of Information Technology Education*, 19, 803-832 DOI: <https://doi.org/10.28945/4626>
- Mahasiswa Unhas Tewas Saat Cari Sinyal dan Belajar Online Akan Dibahas Bareng Fadjoel Jubir Jokowi. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/11/mahasiswa-unhas-tewas-saat-cari-sinyal-dan-belajar-online-akan-dibahas-bareng-fadjoel-jubir-jokowi>. [Access date: January 20th 2022]

- Miragall, M., Herrero, R., Vara, M. D., Galiana, L., & Baños, R. M. (2021). The impact of strict and forced confinement due to the COVID-19 pandemic on positive functioning variables, emotional distress, and posttraumatic growth in a Spanish sample. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), 1918900. DOI: <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1918900>.
- Moorhouse, B. L. (2020). Adaptations to a face-to-face initial teacher education course 'forced' online due to the COVID-19 pandemic. *Journal of Education for Teaching*, 46(4), 609-611. DOI: <https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1755205>.
- Moorhouse, B. L. (2020). Adaptations to a face-to-face initial teacher education course 'forced' online due to the COVID-19 pandemic. *Journal of Education for Teaching*, 46(4), 609-611. DOI: <https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1755205>
- Omotayo, F. O., & Haliru, A. (2020). Perception of task-technology fit of digital library among undergraduates in selected universities in Nigeria. *The Journal of Academic Librarianship*, 46(1), 102097. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102097>.
- Pentingnya Kemandirian Belajar Anak di Masa Pandemi. <https://www.dw.com/id/pentingnya-kemandirian-belajar-anak-di-masa-pandemi/a-53326909>. [Access date: January 15th 2022]
- Rasiah, R., Kaur, H., & Guptan, V. (2020). Business continuity plan in the higher education industry: University students' perceptions of the effectiveness of academic continuity plans during COVID-19 pandemic. *Applied System Innovation*, 3(4), 51. DOI: <https://doi.org/10.3390/asi3040051>.
- Radley, A. (1979). The social psychology of learning: A 'naïve' description of educational experience. *Journal of Further and Higher Education*, 3(1), 82-90. DOI: <https://doi.org/10.1080/0309877790030108>
- Rohman, M., Marji, D. A. S., Sugandi, R. M., & Nurhadi, D. (2020). Online learning in higher education during a covid-19 pandemic: students' perceptions. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(2s), 3644-3651. <http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/1272/970>.
- Sepulveda-Escobar, P., & Morrison, A. (2020). Online teaching placement during the COVID-19 pandemic in Chile: challenges and opportunities. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 587-607. DOI: <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1820981>
- Suleri, J. (2020). Learners' experience and expectations during and post COVID-19 in higher education. *Research in Hospitality Management*, 10(2), 91-96. DOI: <https://doi.org/10.1080/22243534.2020.1869463>
- Sun, J., & Zhang, X. (2021). Exploring Chinese college students' emotions as they engage in online learning during a pandemic. *Asia Pacific Journal of Education*, 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1965541>
- Teodorescu, D., Aivaz, K. A., & Amalfi, A. (2021). Factors affecting motivation in online courses during the COVID-19 pandemic: the experiences of students at a Romanian public university. *European Journal of Higher Education*, 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1972024>
- Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st-century competencies: Implications for national curriculum policies. *Journal of curriculum studies*, 44(3), 299-321. DOI: <https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938>
- Warfvinge, P., Löfgreen, J., Andersson, K., Roxå, T., & Åkerman, C. (2021). The rapid transition from campus to online teaching—how are students' perception of learning experiences affected?. *European Journal of Engineering Education*, 1-19. DOI: <https://doi.org/10.1080/03043797.2021.1942794>
- Wich, V., Selenski, J., & Brunn, A. (2020). Use of blended learning and blended networking in adult education in the fields of study photogrammetry and mobile mapping. In Conference Paper. FIG Working Week 2020-Smart surveyors for land and water management. Amsterdam, Netherlands.
- Yuzulia, I. (2021). The Challenges of Online Learning during Pandemic: Students' Voice. *Wanastra: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13(1), 08-12. DOI: <https://doi.org/10.31294/w.v12i1>.

Zhu, Y., Zhang, J. H., Au, W., & Yates, G. (2020). University students' online learning attitudes and continuous intention to undertake online courses: A self-regulated learning perspective. *Educational technology research and development*, 68(3), 1485-1519. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09753-w>

PRATIWI AMELIA is an enthusiastic University Lecturer with a passion for creating, stimulating, sharing, interactive teaching and learning environments by using TPACK as an approach in English Language Teaching, Language Sciences, Research Methodology, Curriculum Design, Media and Technology for Teaching, Multiliteracy. She is highly motivated to create meaningful learning in the classroom by utilizing appropriate technology, pedagogy, and content. Excellent lecturer and highly adept at teaching, planning lesson, managing classroom, researching, developing curriculum, and assessing. She can be contacted at: pratiwi.amelia@unmuhbabel.ac.id.

AHMED A. O. SHBAIR is an energetic Journalist with a passion for communicating, interacting, analyzing, reporting and researching in cross-sector of media and communication studies. He is highly motivated to carrying out journalistic duties by revealing the truth in various news outlets such as newspapers, television, radio, or other online media on current topics. He masters journalistic knowledge such as the ability to write, read critically, think critically, and understand journalistic ethics. He is also having good ability the ability to use social media, the ability to master technology and information well, communication skills, good time management, high curiosity, self-confidence, broad insight and the ability to adapt in various situations. He can be contacted at: ahmedshbairpal@gmail.com.

Kebijakan Pendidikan Negara-Negara ASEAN dalam Mendukung Pengasuhan Anak dalam Keluarga

Asriyati Nadjamuddin

The basic unit of any society is the home. When the home begins to break, the society is on the way to disintegration

Pengasuhan anak adalah salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam *The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)* pada pilar pembangunan sosial *goal 4*. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Target SDGs pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Laporan terakhir dalam ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report 2020 menunjukkan proporsi partisipasi anak usia dini dalam pembelajaran mencapai 78,8 %, tingkat melek huruf 93,4% pada tahun 2018, dengan 7 dari 10 negara yang memiliki tingkat melek huruf di atas 90%, dan pelatihan keahlian guru yang telah diikuti oleh 90,3 % guru ditingkat sekolah dasar dan 95,3 % guru tingkat sekolah menengah.

Dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, terdapat 5 karakteristik Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yaitu: Mengikutsertakan dan Bermanfaat bagi Masyarakat, Inklusif, Berkelanjutan, Berdaya Tahan dan, Dinamis. Maka, pendidikan dan pengasuhan anak di dalam keluarga menjadi fokus utama dalam upaya membangun masyarakat yang berbudaya dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan memahami pentingnya pengasuhan anak yang berkualitas, negara-negara ASEAN telah mengadopsi berbagai kebijakan pendidikan untuk mendukung perkembangan anak di dalam lingkup keluarga. Antaranya deklarasi di Putrajaya pada 2016 tentang komitmen negara-negara di Asia dan Pasifik, dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya di Poin 4 Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari jenjang PAUD dan Poin 5 Pemenuhan hak wanita dalam kerangka kesetaraan gender.

Kerja sama Regional Bidang Pendidikan

Pada tanggal 30 November 1965, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Republik Vietnam menggagas pendirian The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) yang merupakan organisasi internasional yang berbadan hukum. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya di Kawasan Asia Tenggara. Saat ini SEAMEO memiliki 11 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Selain itu, SEAMEO juga memiliki negara anggota luar biasa (*Associate members*) yaitu Australia, Kanada, Jerman, Selandia Baru, dan Spanyol. SEAMEO memiliki 26 pusat unggulan (SEAMEO Centres) yang tersebar di sepuluh negara Asia Tenggara yang memiliki bidang keahlian dan keunikan masing-masing.

Di Indonesia terdapat 7 SEAMEO Centre yang mengembangkan program-program yang diselenggarakan dengan konsep Pendidikan Abad 21, yaitu SEAMEO BIOTROP, SEAMEO SEAMOLEC, SEAMEO RECFON, SEAMEO QITEP in Mathematic, SEAMEO QITEP in Science, SEAMEO QITEP in Language dan SEAMEO CECCEP. Ketujuh SEAMEO Centre ini berada di bawah

koordinasi Kemendikbud. Dan tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para Menteri Pendidikan dari 11 negara dengan para pihak lainnya dalam *Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education* (SEAPD on ECCE) tanggal 25 s.d. 26 Juli 2023. Pertemuan ini pula menghasilkan draft naskah deklarasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang berkenaan dengan transformasi Pendidikan Anak Usia Dini di kawasan ASEAN dan disampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini membantu membangun fondasi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak. Melalui pendekatan bermain dan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif mereka sambil belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar.

Langkah pertama negara-negara ASEAN dalam mendukung agenda pengasuhan anak dalam keluarga adalah melalui kebijakan holistik untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini. Adapun kebijakan tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama	Praktik Baik Pendidikan Anak Usia Dini di Regional Asia Tenggara
1	Brunei Darussalam	Pemerintah telah melaksanakan berbagai prakarsa untuk mendukung pengembangan sektor diantaranya peningkatan infrastruktur dan pengembangan kapasitas guru sekolah swasta dalam program pelatihan dan lokakarya.
2	Cambodia	UNICEF menjadi donatur utama untuk pengembangan kualitas standar pemerintahan, pelatihan guru, dan pendidikan untuk orang tua (Unicef Cambodia, 2022).
3	Indonesia	Pemerintah memberikan bantuan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus.
		Pemerintah menerbitkan peraturan tentang alternatif pengasuhan di luar keluarga bagi anak dengan kondisi tertentu (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)
		PAUD Holistik-Integratif Program transisi PAUD-SD
4	Laos	Pemerintah menyediakan 105 hari untuk ibu (Standar ILO 14-18 minggu). (Thonelli, Simone et al., 2020).
5	Malaysia	Pelaksanaan program <i>Child Care</i> yang dikelola oleh pemerintah disediakan secara gratis (Taha & Zahyah, 2020).
6	Philippines	Pemerintah menaruh perhatian pada pengasuhan alternatif di luar keluarga bagi anak dengan kondisi tertentu (Senate of the Philippines, 2016)

No	Nama	Praktik Baik Pendidikan Anak Usia Dini di Regional Asia Tenggara
7	Singapore	Pemberian subsidi biaya kepada sekitar 45.000 keluarga yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk dapat mengikuti PAUD (Brief, 2019)
		Pelaksanaan kurikulum <i>Nurturing Early Learners Kindergarten Curriculum Framework</i> mengenai kesejahteraan anak pada usia 4-6 tahun (<i>Ministry of Education Republic of Singapore, 2022</i>), dan kurikulum untuk pedoman perawatan bayi-balita untuk usia 2 bulan hingga 3 tahun.
		Penyediaan 2 jenis layanan PAUD, yaitu <i>child care</i> dan kindergarten di bawah naungan <i>Ministry of Education</i> dan <i>Ministry of Social and Family Development</i> (Ang & Lippoonen, 2020).
		Program PAUD berada dibawah naungan <i>Ministry of Education</i> pada tahun 2019 terdapat 15 TK yang berjalan Skala Peringkat Mutu (<i>Quality Rating Scale-QRS</i>) (Tan, 2017).
		Sebanyak 170 ribu anak mengikuti 1400 <i>child care centers</i> dan 400 PAUD dengan kisaran 21% anak usia dibawah 2 tahun, 79% anak usia 2-4 tahun dan 90% anak usia 5-6 tahun.
		Singapura menyediakan waktu yang cukup panjang untuk skema cuti hamil yaitu 4 bulan atau 16 minggu. (Thonelli, Simone et al., 2020).
8	Thailand	Sejak tahun 2009, Kementerian Pendidikan telah mempunyai kebijakan pendidikan gratis 15 tahun dengan meliputi tiga tahun PAUD dan enam tahun untuk pendidikan dasar dan menengah (Jangdech, C., & Larpkesorn, P., 2018).
		Pendidik di PAUD harus mempunyai kualifikasi sarjana PAUD (Iemamnuay, 2019).
		Thailand membuat kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup panjang untuk skema cuti hamil (Thonelli, Simone et al., 2020).
9	Vietnam	Penganggaran untuk pendidikan lebih besar dari pengeluaran publik lainnya yaitu sebesar 20% dari total pengeluaran. (Elizabeth Kim, 2021).
		Pengembangan program untuk mendukung anak-anak yang kurang mampu dengan membangun PAUD dan penyediaan PAUD gratis (<i>Community-Based Early Childhood Care and Development in Vietnam</i>).
		Vietnam memiliki kebijakan tentang ibu yang bekerja setelah melahirkan waktu yang cukup panjang selama 6 bulan atau 26 minggu (Thonelli, Simone et al., 2020).

Sumber : Policy Brief on Universal Child Care, <http://www.seameo-ccccep.org>

Kebijakan-kebijakan tersebut masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang menjadi pembahasan utama dalam diskusi terkait pendidikan anak usia dini. Berikut beberapa identifikasi tantangan dalam pendidikan anak usia dini di negara-negara ASEAN :

No	Negara	Tantangan
1	Cambodia	Sebanyak 43 persen anak usia 3-5 tahun baru terdaftar dalam satuan PAUD, sementara 68,5 persen anak usia 5 tahun terdaftar dalam bentuk satuan PAUD lainnya. (Unicef Cambodia, 2019).
2	Indonesia	Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini yaitu sebesar 35,59 persen pada tahun 2021 (Badan pusat statistik, 2021) Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2018, anak di Indonesia yang tidak tinggal bersama orang tua kandung sebanyak 5,77% di pedesaan dan 3,91% di perkotaan. Hak cuti melahirkan di bawah standar ILO (Standar ILO 14-18 minggu). Hak cuti bagi ayah untuk mendampingi Ibu setelah melahirkan belum menggunakan standar minimum ILO. Program PAUD belum menjadi bagian dari pendidikan wajib.
3	Laos	Hak cuti bagi ayah untuk mendampingi Ibu setelah melahirkan belum menggunakan standar minimum ILO (Thonelli, Simone et al., 2020).
4	Malaysia	Pemerintah menganggarkan untuk pendidikan pra-sekolah hanya sebesar 3% (Elizabeth Kim., 2021). Standar yang direkomendasikan oleh <i>Tashkent Declaration</i> sebesar 10%. Hak cuti melahirkan di bawah standar ILO (Standar ILO 14-18 minggu) Hak cuti bagi ayah untuk mendampingi Ibu setelah melahirkan belum menggunakan standar minimum ILO (Thonelli, Simone et al., 2020)
5	Myanmar	Kurang dari sepertiga dari populasi anak usia dini (33,33%) yang mengikuti PAUD.
6	Timor Leste	Stunting pada anak dibawah usia lima tahun sebanyak 49% (Nurturing Care, 2021). Banyak sekolah masih kurang guru dan sebagian besar guru kurang mendapatkan pelatihan formal (Unicef Timor Leste, 2022). Pendidik dan orang tua belum memahami perlunya kerja sama antara keluarga dan komunitas untuk mendukung program prasekolah (Unicef Timor Leste, 2022).
7	Thailand	Belum adanya keterlibatan dari berbagai pihak untuk memberikan pendidikan kepada anak ketika mengalami transisi dari jenjang prasekolah ke sekolah dasar. Kehadiran PAUD lebih dari 50%

Sumber : Policy Brief on Universal Child Care, <http://www.seameo-ccccep.org>

Kebijakan dan situasi PAUD tersebut melahirkan beberapa rekomendasi mengenai *Universal Child Care*. Adapun keempat rekomendasi ini meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Layanan PAUD; pemerintah di negara ASEAN dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam mengelola anggaran dana pendidikan untuk menyediakan lembaga-lembaga PAUD yang berkualitas. Pemerintah harus mendukung, mendorong, dan menyediakan program layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua kalangan tanpa ada kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi lemah dan ekonomi kelas atas.

2. Diversifikasi Layanan dan Memperpanjang Durasi Layanan PAUD; tersedianya lembaga-lembaga PAUD yang dapat diakses oleh anak-anak dan orang tua dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Sehingga, bukan hanya ragam layanannya saja yang diperhatikan, akan tetapi menghadirkan lembaga PAUD yang terjangkau.
3. Seruan untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Mendukung bagi Ayah dan Ibu; Perlindungan dan dukungan maternitas dan paternitas dapat memungkinkan perempuan untuk beristirahat dan pulih dari persalinan; menyusui sesuai dengan rekomendasi kesehatan dan bermanfaat bagi orang tua untuk merawat bayi di bulan pertama. Adanya kedekatan antara pengasuh dan anak sangat penting untuk menjalin ikatan, nutrisi, dan perkembangan anak yang sehat. Hal ini juga berkontribusi untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi.
4. Rekomendasi Pendidikan Pra-SD Selama Satu Tahun bagi Anak Usia Dini; sesuai dengan kesepakatan *Tashkent Declaration (2022)* wacana mengenai program wajib belajar selama satu tahun di jenjang PAUD perlu diperkuat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan akan semakin terpacu untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan layanan PAUD berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat melalui berbagai dukungan, secara kebijakan, program, administratif, maupun finansial.
5. Seruan untuk Membuka Akses PAUD Secara Universal; PAUD yang dapat diakses oleh semua keluarga tanpa memandang ras, suku atau golongan, layanan yang mudah, regulasi yang mendukung, guru yang punya kesempatan luas serta tata Kelola dan system yang memperhatikan standar dan mutu layanan PAUD.

Penguatan Peran Orang Tua

Pendidikan yang pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Dan orang tua adalah kuasa pendidikan pertama itu. Sehingga, orangtua pun menjadi sasaran kebijakan negara-negara ASEAN dalam mendukung keberhasilan pengasuhan anak. Program pendidikan dan pelatihan khusus untuk orang tua telah dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan membimbing anak-anak mereka.

Selain itu, kampanye penyuluhan mengenai metode pengasuhan yang efektif juga dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa orang tua memiliki sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.

Ketersediaan Sumber Belajar dan Literasi Keluarga

Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang memadai di tingkat keluarga. Hal ini mencakup penyediaan buku-buku dan materi bacaan, permainan pendidikan, dan sumber daya belajar lainnya. Dengan memastikan ketersediaan sumber belajar, keluarga dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. ASEAN Foundation dengan dukungan dari Google.org mengimplementasikan ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai 2024 sebagai bentuk upaya konkrit dalam menghindari misinformasi dan disinformasi serta memberikan edukasi mengenai digital literacy di ASEAN.

Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi

Sebagai bagian dari pendidikan holistik, negara-negara ASEAN juga memasukkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sebagai komponen penting dari pendidikan anak. Ini membantu anak-anak memahami dan menghormati tubuh mereka sendiri, serta memahami pentingnya kesehatan reproduksi yang baik.

Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi juga membantu melindungi anak-anak dari risiko perilaku berisiko dan memberikan mereka alat untuk membuat keputusan yang bijak terkait dengan kesehatan mereka sendiri.

Dukungan Pendidikan Inklusif

Penting untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Negara-negara ASEAN telah bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mereka memasukkan dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini termasuk penyediaan sumber daya tambahan, pelatihan khusus untuk guru, dan fasilitas yang ramah bagi semua anak.

Kesimpulan

Melalui kebijakan pendidikan yang komprehensif, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk mendukung pengasuhan anak dalam lingkup keluarga. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan anak usia dini, memberdayakan orang tua, menyediakan sumber daya belajar, dan memasukkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, mereka memastikan bahwa anak-anak memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mencintai dan mendukung. Dengan upaya bersama, ASEAN terus bergerak maju menuju masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan tinggi.*

Referensi

<https://asean.org/book/asean-socio-cultural-community-blueprint-2025/>

<https://asean.org/book/asean-sustainable-development-goals-indicators-baseline-report-2020/>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/07/indonesia-siap-pimpin-dan-sambut-kehadiran-10-menteri-pendidikan-asean-di-forum-seapd-on-ecce>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4749/asean-regional-dialogue-on-child-online-protection-2023-resmi-dibuka-menteri-pppa>

Policy Brief on Universal Child Care, <http://www.seameo-ccccep.org>

<https://www.seameo.org/>

<https://sdgs.un.org/goals>

<https://sdgs.bappenas.go.id/>

ASRIYATI NADJAMUDDIN adalah Founder SALAM PUAN; Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga. Ia merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo (sejak 2014-sekarang), Wakil Ketua I (Bidang Pengembangan SDM, Keuangan, Komunikasi, Kerja sama, dan Advokasi) Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia, Pengurus Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Wilayah Gorontalo, dan Pengurus ICMI Kota Gorontalo. Menulis di kolom Persepsi di harian cetak lokal seperti Gorontalo Post dan Radar Gorontalo. Mempublikasikan beberapa karya tulis ilmiah di beberapa jurnal akademik. Ia juga menulis beberapa buku antologi bersama penulis lainnya. Ia dapat dihubungi di email: asriyati.nn@gmail.com.

BAB 11

Pendidikan Karakter untuk Perdamaian Global

Pendidikan Karakter untuk Masa Depan Kawasan ASEAN

Supangat Rohani

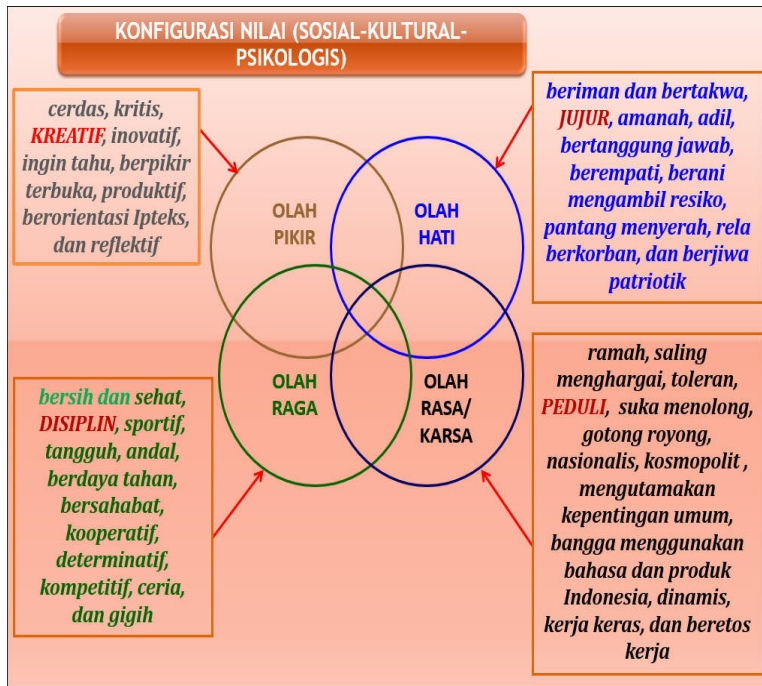
Pendahuluan

Salah satu hal yang perlu dan harus kita sukuri sebagai warga ASEAN adalah semua negara yang berada di kawasan ASEAN, hamper 100% penduduknya memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, dimana kesemua agama melakukan pendidikan karakter kepada pemeluknya untuk menjadi orang baik, yang salah satunya melalui jalur pendidikan/sekolah.

Pendidikan khususnya di jenjang sekolah (TK, SD, SMP & SMA) sangat serius dalam meempersiapkannya bahkan kecenderungannya sekolah memiliki kewajiban untuk menumbuhkan karakter menjadi orang baik kepada siswa, baik itu dilakukan dalam proses pembelajaran yang terstruktur maupun yang tidak. Dalam perencanaan penumbuhan karakter dilakukan dalam dua hal yaitu: *Pertama*, dalam proses pembelajaran dimulai Mapping Kurikulum, Lesson Plan & saat-saat pembelajaran. *Kedua*, adalah di budaya sekolah, yang meliputi aturan kelas, aktivitas kesiswaan, budaya sekolah, modeling dari pimpinan, guru dan karyawan.

Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam

Ada beberapa perbedaan setiap sekolah dalam merumuskan karakter sekolah, bererapa rujukannya antara lain: *Pertama*, Menggunakan 18 karakter yang dirumuskan dari Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial dan Tanggung-jawab. *Kedua*, dari sekolah Istiqlal yang sangat focus pada karakter keislaman yang menawarkan konsep asmaul gusna dengan 99 nama Allah. *Ketiga*, konsep karakter yang ditawarkan oleh salah satu sekolah nasional terbaik dalam penerapan karakter yaitu 20 karakter dari sekolah Al Falah Cibubur. *Keempat*, karakter yang dikembangkan oleh ESQ yang hanya berjumlah 7 (tujuh) karakter. *Kelima*, 20 karakter dari beberapa sekolah misalnya Lazuardi dan 16 karakter dari Universitas Muhammadiyah Yogya, dan lainnya. *Keenam*, konsep karakter yang menggunakan kerangka 4 (empat) pengelompokan yaitu olah Hati, olah Pikir, olah Rasa dan terakhir olah Raga dengan perinciannya sebagai berikut.



Beragamnya rujukan karakter di atas menunjukkan usaha yang maksimal akan perumusan karakter di mana ada karakter inti dan karakter pengembang. Penulis menawarkan karakter yang bersumber dari sang teladan terbaik di dunia ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam karakter terutama karakter yang membentuk pemimpin di suatu saat nanti: *Pertama*, ada sekitar 20 negara berazaskan agama yang dibawa Nabi SAW (Islam), kondisi ini menunjukkan begitu berpengaruhnya sosok tauladan bagi umum muslim ini. *Kedua*, tersebar dalam 50 negara lebih yang masyarakatnya berkarakter dengan menjadikan model serta menjalankan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW (termasuk Indonesia) *Ketiga*, sekitar sepertiga penduduk dunia memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang semakin hari semakin naik jumlahnya. *Keempat*, sosok Nabi SAW ini memiliki 4 karakter mendasar yaitu berkarakter Sidiq, Fathonah, Amanah dan Tabligh, jika dijelaskan sebagai berikut:

1. **Shiddiq**; karakter diri dengan hatinya, yang mengindikasikan terus berproses menyelesaikan dengan dirinya sendiri, yang bagi penulis yang masuk dalam kategori karakter ini adalah sebagai berikut: Tauhid, Jujur, Bersih, Ceria, Dinamis/aktif, Mandiri, Berani, Semangat, Taat, Halal, Disiplin, Qonaah, Tenang, Syukur, Gigih Pantang Menyerah Tangguh, Tawakal, Sabar, Istiqomah, Kerja Keras.
2. **Amanah**; karakter diri dengan orang lain, yang mengindikasikan terus berproses membangun hubungan baik dengan orang lain/Lingkungannya yang bagi penulis yang masuk dalam kategori karakter ini adalah sebagai berikut: Sopan, Ramah, Kesehatan, Bersahabat Menghargai, Empati, Komunikatif, Keterbukaan, Toleran Menepati Janji, Suka Menolong, Dapat Diandalkan, Bertanggungjawab.
3. **Fathanah**; karakter diri dengan Pikirnya, yang mengindikasikan terus berproses meningkatkan kepintarannya yang bagi penulis yang masuk dalam kategori karakter ini adalah sebagai berikut: Cermat, Rasa Ingin Tahu, Ulet, Pembelajar, Time Management, Berfikir Strategis, Hikmat, Ilmiah, Inovatif, Continuous Improvement, Modern, Fokus Pada Kualitas, Musyawarah.
4. **Tabligh**; karakter diri dengan Kualitas Kepemimpinannya, dimana siswa terus berproses menjadi bagian dari pemimpin di organisasinya yang bagi penulis yang masuk dalam kategori karakter ini adalah sebagai berikut: Membangun Langkah Bersama/Teamwork Model Bersama Bersatu Kooperatif, Komunikator, Demokratis, Komitmen, Mewakili, Produktif, Sportif, Teladan, Motivator, Visioner, Adil, Kompetitif Patriotik, Rela Berkorban, Berani Tampil

Penumbuhan Karakter i Sekolah

Karakter bagi Siswa TK. Bagi siswa TK sekolah membutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang mendasar yang juga akan dibawanya hingga nanti dewasa, beberapa karakter dasar tersebut yaitu; Tauhid, Jujur, Bersih, Ceria, Dinamis/aktif, Mandiri, Berani, Semangat, Taat.

Karakter bagi Siswa SD (kelas 1-3). Bagi siswa SD kelas 1-3 sekolah membutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang mendasar yang juga akan dibawanya hingga nanti dewasa, beberapa karakter dasar tersebut yaitu; Halal, Disiplin, Qonaah, Tenang, Syukur, Gigih Pantang Menyerah Tangguh, Tawakal, Sabar, Istiqomah, Kerja Keras.

Karakter bagi Siswa SD (kelas 4-6). Bagi siswa SD kelas 4-6 sekolah membutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang mendasar yang juga akan dibawanya hingga nanti dewasa, beberapa karakter dasar tersebut yaitu; Sopan, Ramah, Kesehatan, Bersahabat Menghargai, Empati, Komunikatif, Keterbukaan, Toleran Menepati Janji, Suka Menolong, Dapat Diandalkan, Bertanggung Jawab.

Karakter bagi Siswa SMP. Bagi siswa SMP sekolah membutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang mendasar yang juga akan dibawanya hingga nanti dewasa, beberapa karakter dasar tersebut yaitu; Cermat, Rasa Ingin Tahu, Ulet, Pembelajaran, Time Management, Berfikir Strategis, Hikmat, Ilmiah, Inovatif, Continuous Improvement, Modern, Fokus Pada Kualitas, Musyawarah.

Karakter bagi Siswa SMA. Bagi siswa SMA sekolah membutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang akan dibawanya hingga nanti dewasa, beberapa karakter dasar tersebut yaitu; Membangun Langkah Bersama/Teamwork Model Bersama Bersatu Kooperatif, Komunikator, Demokratis, Komitmen, Mewakili, Produktif, Sportif, Teladan, Motivator, Visioner, Adil, Kompetitif Patriotik, Rela Berkorban, Berani Tampil.

Kesimpulan

Dari uraian detail di atas dapat digambarkan secara singkat dalam kesimpulan sebagai berikut: bahwa siswa diperlukan untuk ditumbuhkan empat guruan karakter yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah & Tabligh, dengan materi karakter dalam setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

UNSUR	Indikator	Kelas	Target Kurikulum
Siddiq	karakter diri dengan HATINYA, yang mengindikasikan terus berproses menyelesaikan dengan dirinya sendiri.	PG	Tauhid, Jujur, Bersih, Ceria
		TK A	Tauhid, Jujur, Dinamis/aktif, Mandiri
		TK B	Tauhid, Jujur, Berani, Semangat, Taat
		Kelas 1	Tauhid, Halal, Disiplin, Qonaah
		Kelas 2	Tauhid, Tenang, Syukur, Gigih Pantang Menyerah Tangguh, Tawakal
		Kelas 3	Tauhid, Sabar, Istiqomah, Kerja Keras
Amanah	karakter diri dengan ORANG LAIN, yang mengindikasikan terus berproses membangun hubungan baik dengan orang lain/Lingkungannya	Kelas 4	Sopan, Ramah, Kesehatan, Bersahabat Menghargai, Empati
		Kelas 5	Komunikatif, Keterbukaan, Toleran Menepati Janji
		Kelas 6	Suka Menolong, Dapat Diandalkan, Bertanggung Jawab
Fathonah	karakter diri dengan PIKIRNYA, yang mengindikasikan terus berproses meningkatkan kepintarannya	Kelas 7	Cermat, Rasa Ingin Tahu, Ulet, Pembelajaran
		Kelas 8	Time Management, Berfikir Strategis, Hikmat, Ilmiah, Inovatif
		Kelas 9	Continuous Improvement, Modern, Fokus Pada Kualitas, Musyawarah
Tabligh	karakter diri dengan KEPEMIMPINANNYA, yang mengindikasikan terus berproses menjadi bagian dari pemimpin di organisasinya	Kelas 10	Membangun Langkah Bersama/Teamwork Model Bersama Bersatu Kooperatif
		Kelas 11	Komunikator, Demokratis, Komitmen, Mewakili, Produktif, Sportif, Teladan, Motivator
		Kelas 12	Visioner, Adil, Kompetitif Patriotik, Rela Berkorban, Berani Tampil

Namun demikian, selain fokus ke siswa tentu karakter di atas harus dimulai dari gurunya dan seluruh stake holder di sekolah kita seperti team yayasan, pimpinan sekolah dan juga termasuk karyawan TU, satpam, OB, dan seterusnya.*

SUPANGAT ROHANI adalah sosok yang mendapatkan penghargaan beasiswa untuk mengikuti pendidikan di luar negeri yaitu di McGill University Canada (Amerika Utara) dan Sydney University (Australia). Selain itu beliau juga mendapatkan kesempatan selama 6 Bulan belajar Intensive English Training for Academic Purpose di IALF Bali serta melakukan Studi Banding di beberapa negara antara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand & Turkiye. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah & Pascasarjana KALAM al Ma'wa Jakarta serta menulis sekitar 40 (empat puluh) buku tentang pengelolaan sekolah (Islam). Saat ini ia aktif sebagai Asesor Kemendikbud untuk Guru & Sekolah Penggerak dan Narasumber Kurikulum Merdeka. Ia dapat dihubungi di HP 08212.333.1045 atau email faatugm@gmail.com.

Model Pendidikan Multikultural Negara ASEAN

Rohmadi

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai negara yang memiliki kawasan luas. Bahkan, kawasan Asia Tenggara bisa disebut pula sebagai *a global epicenter of cultural diversity*. Artinya kawasan berbagai negara dari Asia Tenggara, yang secara politis terkenal dengan sebutan ASEAN ternyata memiliki tingkatan heterogenitas budaya yang sangat tinggi. Selain budaya, eksistensi keberagaman dalam ASEAN juga terlihat dari segi etnis, bahasa, dan ras pada masyarakat. Semuanya nampak berbeda, memiliki cirikhas masing-masing. Bahkan dari aspek arah pandangan hidup (agama) terdapat adanya perbedaan. Dalam kawasan Asia Tenggara bisa kita temukan bahwa Asia Tenggara punya hampir seluruh agama yang ada di dunia (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusian, dan jenis kepercayaan lainnya).

Dalam konteks rasio sosial, sekitar dari 11 kawasan Asia Tenggara negara yang menjadi bagian anggota Asean dapat kita saksikan penuh dengan keragaman. Inilah bentuk heterogenitas budaya, bahasa, agama dan jenis keragaman yang lainnya, biasanya terjadi rentan atas peningkatan mengenai identitas. Memang, ASEAN terbentuk bagi wilayah Asia Tenggara untuk menggalang kerja sama antarnegara yang mejadi anggota. Hal ini dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah. Selain itu membentuk kerja sama dalam bentuk kepentingan bersama. Jenis kepentingan bersama ini merupakan prinsip utama.

Prinsip utama bagi ASEAN secara khas melakukan tindakan kebijakan antar negara untuk saling memberikan kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara wilayah ASEAN. Hal ini, mencakup upaya menghormati semua perbedaan budaya, bahasa, agama dari masyarakat ASEAN. Mengenai berbagai nilai yang harus diutamakan setiap negara adalah menekankan nilai bersama dalam semangat persatuan untuk memelihara keanekaragaman.

Berbicara mengenai hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal bersifat sentralitas yang saling aktif terlibat antar negara ASEAN. Strategi ini meningkatkan wawasan ke luar, inklusif dan tidak bersikap diskrimatif. Selain itu, strategi khas yang menjadi prinsip utama dalam kerja sama ini adalah berupa standar kepatuhan atas aturan-aturan perdagangan.

Dalam studi Digital Reality dan Eco-Business, sekitar 89 persen memberikan laporan dalam tajuk *The Future of Data Centers in the Face of Climate Change*, menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan data center yang eksponensial. Menurut data center yang kuat, Singapura termasuk negara yang memimpin pertumbuhan, hal ini terlihat dalam tinjauan perdagangan ekonomi. Pertumbuhan ini muncul dengan adanya berbagai perusahaan yang memberikan strategi ekspansi secara cepat bagi Singapura. Maka, hasil studi sesuai dalam *Data Gravity Index* yang menghitung menjadi ledakkan data, akan selalu meningkat dua kali lipat setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Wilayah Asia Pasifik diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan cepat, sesuai *data gravity* di antara seluruh kawasan dunia. Sementara kawasan Singapura akan menjadi pasar dengan pertumbuhan yang tercepat dari 21 wilayah metropolitan.

Perkembangan dalam masalah politik, ekonomi tidak lepas dengan adanya pembatasan-pembatasan atas daerah di sekitar Asia Tenggara. Terkadang, berdasar kemajuan teknologi komunikasi dan informasi bagi setiap anggota negara dan hubungan internasional dengan negara yang lain—negara Eropa Barat, yang secara khas mereka memiliki pertahanan politik dan ekonomi masing-masing. Bahkan mereka memiliki nilai (values) yang senada dengan wilayah Asia untuk menjamin adanya pluralitas atau multikultural. Untuk negara Barat—Amerika Serikat, Kanada, dan Australia—dan negara Eropa seperti negara Inggris, Prancis, dan Swiss, hakikatnya secara umum telah menerapkan kebijakan multikulturalisme. Inilah yang mereka lakukan untuk menghilangkan atau menyelesaikan atas permasalahan (konflik) dalam etnis atau ras, jika muncul.

Jenis konflik yang kini masih terjadi, bahkan kita bisa saksikan di dunia Barat, Eropa dan Asia meskipun menunaikan solusi pencegahan dengan model multikulturalisme. Tetapi hingga kini kita masih menyaksikan masih terjadinya konflik antara Barat dan Asia. Hal ini termasuk agenda politik dunia dengan munculnya berbagai isu *Realisme* atau *low politics*. Isu Realisme adalah suatu paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan, atau suatu aliran seni dalam menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataan. Konsep ini senada dengan *low politics*, artinya politik yang cenderung hanya memikirkan tentang bagaimana memperoleh dan mem-pertahankan kekuasaan serta mencapai ke-pentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan aspek moralitas dalam per-juangannya.

Berkaitan dengan permasalahan (konflik) di Barat terhadap daerah Asia Tenggara seperti peristiwa kudeta Myanmar. Barat mengancam, Indonesia dan tiga negara ASEAN minta konflik diselesaikan melalui 'mekanisme hukum' dan 'dialog yang damai.' Pernyataan yang baru, untuk menanggapi perkara ini di Myanmar melalui perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR). Tindakan yang dilakukan adalah dengan menghormati berbagai prinsip Piagam ASEAN dan Dekalasi HAM ASEAN.

Tulisan ini memaparkan mengenai wacana karakter pluralisme, multikulturalisme model Barat tidak bisa diterapkan di wilayah Asia, terutama untuk kawasan Asia Tenggara. Ini berkaitan dengan strategi penerapan konsep plural dan multicultural dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Adapun dalam konsep dunia pendidikan menggunakan model pendidikan multicultural. Gambaran dalam akademis, studi dalam bidang seni, humaniora, ilmu-ilmu sosial bahkan dalam sains dan teknologi, membicarakan perkara budaya untuk menggantikan kehidupan masyarakat di sebut dengan istilah *Cultural Studies*.

Komunikasi dalam *cultural studies* berhubungan dengan nilai (*values*). Melihat jenis nilai-nilai model multicultural Barat berbeda dengan model Asia. Secara khas dalam falsafah Barat dalam multicultural mengedepankan berbagai nilai liberal (kebebasan) hingga saat ini. Sementara dalam daerah Asia memandang mengenai nilai secara umum bersifat religius, yaitu mengedepankan agama.

Multikulturalisme: Politik Identitas

Multikulturalisme berarti sebuah pengakuan terhadap kelompok-kelompok kecil untuk menjalankan kehidupannya baik yang berkaitan dengan urusan publik maupun privat. Semangat terpenting dalam gagasan multikulturalisme adalah hidup bersama sebagai satu masyarakat (*living together as one society*). Istilah multikulturalisme dapat juga menggambarkan sebuah model rasial sosial yang ideal dalam masyarakat dengan keberagaman budaya, daripada berbagai istilah yang lain seperti *cultural pluralism* (pluralisme budaya), dan *plural society* (masyarakat majemuk).

Ide munculnya multikulturalisme ini sebenarnya terdorong dari sebuah kenyataan bahwa dunia itu bergerak suatu wilayah secara global. Dunia saat ini bukan lagi sebagai tempat atau wilayah hanya dihuni oleh satu kelompok etnis, budaya dan agama tertentu saja. Istilah multikulturalisme muncul (sumber) dari sebuah dasar imigrasi. Yaitu suatu keputusan untuk meninggalkan tanah mereka dan pindah ke *society* yang baru. Hal ini untuk ekonomi dan politik. Artinya negara bisa disebut sebagai masyarakat multicultural jika negara tersebut menerima imigran dalam jumlah besar dari latar belakang yang berbeda. Memberikan peluang bagi para pendatang untuk tetap mempertahankan karakter budaya masing-masing. Gaya bahasanya adalah lebih demokratis.

Masyarakat multikultural dalam berbagai literature, seperti menurut David Pearson melihat masyarakat multikultural sebagai model *mosaic* dimana hak untuk memiliki budaya yang berbeda dihormati secara utuh. Model ini menyebutkan bahwa negara yang bermodel *mosaic* akan terbentuk interaksi antara tiga unsur, yaitu individu, kelompok identitas dan negara. Hal ini berbeda dengan jenis masyarakat tradisional yang fokus pada dikotomi negara dan individu.

Gambaran multikulturalisme merupakan sebuah serangkaian dari konsep tentang pluralitas yang berbeda-beda. Melani Budianta dalam sebuah jurnal yang berjudul "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum" menyatakan bahwa multikulturalisme termasuk bagian dari politik identitas dan transformasi budaya. Hal ini sesuai pernyataan Gunew dan Fox-Genovese (1999), multikulturalisme sangat rentan terjebak dalam politik identitas. Dalam memperjuangkan pengakuan atas keragaman budaya, orang berbicara atas nama satu kelompok budaya tertentu, dengan identitas tertentu, antara lain yang mengacu pada etnisitas, ras, agama, atau daerah. Karena perjuangan untuk

mendaapatkan hak terkait identitas budaya tertentu, maka dengan sendirinya muncul persoalan kepemilikan terhadap identitas tersebut; siapa yang berhak bicara atas namanya.

Multikulturalisme adalah gagasan umum secara praktis akan selalu menggambarkan keberagaman ras yang hidup dalam harmoni pluralistik. Ia melihat bahwa keberagaman sebagai pluralitas identitas dan sebagai "suatu eksistensi manusia." Konteks ini, identitas dipandang sebagai produk dari berbagai kumpulan adat-istiadat, praktik, dan makna sebuah warisan abadi yang menjadi pengalaman secara bersama. Terdapat kritikan yang tajam, mengenai ide multikulturalisme.

Berbicara mengenai politik identitas, tidak akan lepas dalam membahas materi mengenai alat perpolitikan yang sering digunakan oleh suatu kelompok seperti atas nama suku, etnis, budaya, agama atau sebagainya. Memang, politik identitas ini merupakan alat politik untuk melakukan perlawanan atau strategi untuk menunjukkan jati diri agar bisa mendapat dukungan dari berbagai kelompok dengan "satu rasa" agama, RAS, budaya, etnis atau berbagai kesamaan yang lainnya. Terpenting, politik identitas hadir sebagai wadah aspirasi bagi yang merasa tertindas.

Identitas sebenarnya termasuk unsur yang sangat krusial (penting untuk memecahkan masalah) bagi setiap masyarakat—baik secara lokal, nasional, atau transnasional, ternyata banyak ditemukan ancaman atas identitas pada dominan pada tataran masyarakat. Adapun pembentukan mengenai landasan bagi hubungan sosial secara lintas batas karena setiap identitas akan menentukan kepentingan yang diusung oleh sebagian masyarakat, baik secara nasional, transnasional maupun bersifat regional.

Transnasional biasanya terjadi ketika semua pemikiran mengenai kemanusiaan dan dokumen ideal dilanggar. Terjadinya transnasional berkaitan pula dengan suatu kebijakan politik dan dalam gaya bahasa yang khas dalam dunia akademik. Dalam multikulturalisme secara akademik (pendidikan), model penerapannya dengan istilah *Cultural Studies* berarti pendidikan budaya. Ziaudin Sardar dan Borin Van Loon memandang bahwa *Cultural Studies* adalah suatu bidang studi yang memikat dan "hangat," menjadi kegemaran ditengah-tengah yang progresif terutama budaya sebagai tema atau topik studi menggantikan masyarakat sebagai subyek di kalangan masyarakat tersebut. Kehadirannya ide *cultural studies* ini, termasuk karya akademik yang berfungsi dengan meminjam secara bebas dari disiplin ilmu sosial, seluruh cabang humaniora, dan seni. Mengambil berbagai teori dan metodologi dari antropologi, psikologi, linguistik, kritisisme sastra, dan teori seni atas filsafat ilmu politik.

Berbicara mengenai karakteristik *cultural studies*, tidak lepas dengan sejarah dari segi tujuannya. *Pertama*, *cultural studies* bertujuan mengkaji pokok persoalan dari sudut praktik kebudayaan dengan kekuasaan. *Kedua*, *cultural studies* tidak hanya studi tentang budaya, seakan-akan menjadikan sebagai entitas sendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politik. Tujuannya memahami budaya dalam segala bentuknya dan menganalisis konteks sosial dan politik. *Ketiga*, budaya dalam *cultural studies* selalu menampilkan dua fungsi: ia sekaligus sebagai objek studi atau lokasi tindakan dan kritisisme politik. *Cultural studies* bertujuan untuk menjadi bagian dari usaha pragmatis (asas manfaat) maupun aspek intelektualnya. *Keempat*, *cultural studies* akan selalu membongkar dan mendamaikan atas pengotakan pengetahuan, mengatasi perpecahan antara pengetahuan yang tersirat (intuitif) dan yang bersifat objektif (universal). Hal ini menggambarkan sebuah asumsi suatu identitas dan kepentingan bersama, baik mengetahui atau yang diketahui, gambaran praktis adalah antara pengamat dan yang diamati. *Kelima*, *cultural studies* merupakan tradisi yang punya komitmen bagi rekonstruksi sosial dengan melibatkan diri dalam kritik politik. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mengubah struktur dominasi di mana-mana dan secara khas dalam masyarakat kapitalis industri.

Dengan demikian, perkembangan ide multikulturalisme dalam khazanah ilmu pengetahuan, secara khas dalam pembahasan mengenai ilmu-ilmu sosial. Bahkan, dalam pendidikan tidak bisa terpisahkan dengan perubahan sosial, dan kehidupan manusia dalam berbagai masalah kebudayaan. Penararan pendidikan multikulturalisme merupakan realitas sosial dalam dunia pendidikan. Konsep pendidikan multikulturalisme dapat dimengerti dengan pemahaman falsafah hidup, kenyataan sosial, yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti politik berdasar falsafahnya pos-modernisme, antropologi, dan sosiologi. Jadi, konsep pendidikan multikulturalisme berkaitan pemikiran, bukan mengenai teknis model pendidikan semata.

H.A.R. Tilaar memberikan pernyataan pendapat, bahwasanya ada tiga hal yang mendorong berkembangnya "pesat" pemikiran multikulturalisme yaitu HAM, globalisasisme, dan proses demokratisasi. Multikulturalisme dan HAM

merupakan sebuah perangkat hak dasar bagi manusia. Hal ini secara alami sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini lahir ketika manusia merasa tertindas atau merasa tidak dihargai oleh kekuatan yang terpusatkan pada seseorang atau jenis elit penguasa yang bertindak diktator, totaliterisme, dan juga bisa terjadi karena kekuasaan kerajaan yang bersikap absolut. Konsep pemikiran ini bersifat internasional. Pengakuan ini meliputi hak kebebasan sipil, hak kebebasan politis, hak kebebasan dari penindasan, hak kebebasan dari penahanan tanpa melalui pengadilan, hak perlindungan sebagai individu yang memiliki hak alamiahnya tidak dapat digugat, disebut oleh siapapun atau pihak mana pun.

HAM berdiri pada abad ke-19 setelah terjadi peristiwa yang memiliki peraturan yang diktator, kesewenangan Adolf Hitler yang bersikap fasis dan diskriminatif sekitar pada tahun 1938-1945. Ini terjadi setelah Perang Dunia (PD) II dan mengadili para penjahat perang di pengadilan Nuremberg. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mencetuskan kesepakatan bersama membuat pedoman bagi semua pemerintah dengan DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Ini termasuk bentuk penegasan dari piagam PBB (1945) yang bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, keamanan pribadi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memproses setiap pelanggaran atas HAM dari individu masyarakat dan negara. DUHAM tidak berdaya saat berhadapan dengan negara yang memiliki suatu kepentingan. Keadaan ini saat terjadi Perang Korea (1951), berdirinya tembok Berlin (1961), Perang Vietnam (1960-1975) dan AS berhadapan dengan rezim Stalin, Khrushchev, Brezhnev, dan sekutu yang lainnya. Maka, terdapat dua perbedaan mengenai DUHAM dari pihak Barat dan Uni Soviet. Pihak Barat lebih menekankan pada hak sipil dan politis, sementara pihak Uni Soviet lebih menekankan pada hak ekonomi dan masyarakat.

Akibatnya, terdapat dua pandangan secara internasional mengenai HAM. *Pertama*, pandangan HAM bagi kubu negara Barat yang menyatakan bahwa *radical cultural universalism* 'hak asasi haruslah sama semua tempat'. Dalam sistem menggambarkan bahwa kekuasaan negara yang meliputi politik budaya setempat yang berfungsi sebagai acuan (pedoman) untuk menentukan hak individu, masyarakat dan negara itu sendiri. Esensi peraturan ini menandakan bahwa individu adalah yang berhak menentukan haknya, hak masyarakat dan negara bersifat konvensi yang berarti sebagai sifat untuk melengkapi, menyempurnakan serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undang dalam ketatanegaraan negara. *Kedua*, kubu *radical cultural relativism* yang sering disebut kubu partikularis. Hal ini memandang bahwa kebudayaan merupakan pedoman yang mengatur hak masyarakat. Sehingga menurut kubu kedua ini memandang keragaman budaya merupakan satu hak pilihan untuk berbeda dengan masyarakat dan budaya lain. Secara umum pandangan HAM dalam kubu kedua ini tidak bisa terwujud secara universal bagi suatu negara dalam bentuk pemerintahan, karena adanya kendala dalam keyakinan pandangan tersebut.

Berbicara mengenai ras dan budaya, secara khas menggunakan sebuah media. Kini, kita hidup dalam dunia multimedia. Kata "Multi" bukan hanya sebatas membahas mengenai keanekaragaman pesan, ternyata dalam representasi media juga melibatkan berbagai bentuk symbol visual dan linguistik, agar semua pesan bisa tersampaikan. Berkaitan dengan kode media, bisa terinternalisasikan sebagai bentuk mental. Bentuk ini sekilas "isu" dasar dari perbuatan yang mewakili. Semua budaya memiliki hak atas untuk mewakili. Secara umum bergerak untuk tujuan perkembangan ekonomi.

Kemajuan teknologi dan komunikasi hubungan antar manusia di dunia ini, semakin terbuka dan menyatu. Sehingga timbul rasa "persaudaraan" atau "permusuhan" yang mungkin karena kegiatan bersifat global—integrasi dan interaksi internasional dari entitas, individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia—tergantung kecenderungannya. Sebuah konsekuensi, ternyata globalisasi cenderung untuk mempertahankan pola-pola imperialisme ekonomi dan budaya Barat. Strategi penawaran produk tersebut melalui nilai dan praktik budaya yang dominan (kuat), yaitu menjalani kehidupan dengan selalu mengorbankan semua hal. Artinya selalu mengikis tradisi lokal dan berupaya praktik atas budaya Barat.

Jalin komunikasi ini diperuntukkan untuk penawaran produk budaya yang bersifat ekonomi liberalisasi. Pasar menjadi bebas dari segala pembatasan negara dan capital bergerak dengan cepat melintasi batasan-batasan seara mudah. Secara mayoritas ekonomi berbagai negara didominasi oleh pilihan gaya hidupnya. Kemunculan ekonomi Asia Tenggara yang maju berutang banya pada globalisasi. Budaya non-Barat juga berdampak pada budaya Barat.

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa proses globalisasi akan melanda dunia dewasa ini. Ada satu hal yang kurang ditonjolkan dari hasil globalisasi, yaitu jenis kemajuan atas teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi menuntut

suatu paradigma baru tentang martabat manusia dengan kebudayaannya. Untuk mengatasi ketimpangan menurutnya adalah paham multikulturalisme. Hakikatnya multikulturalisme mengakui martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang spesifik dan demikian setiap individu merasa dihargai dan sejalan itu pula merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama di dalam komunitasnya.

Globalisasi bisa saja diruntuhkan dengan kemunculan peradaban Asia. Ini pernah ditawarkan oleh seorang intelektual dan politisi Malaysia, Anwar Ibrahim dengan buku "The Asian Renaissance" yang akan memunculkan simbiosis antara Timur dan Barat, mengganti globalisasi dengan "global convivencia." Konsep ini seperti hidup bersama menyentuh pemerintah Roger II pada kurun ke dua belas di Sicily dan pemerintahan Islam di Semenanjung Iberian termasuk Toledo, Cordoba dan Granada. Ini sebuah pengalaman hidup yang harmonis dan memperkaya kehidupan rukun orang-orang dari budaya dan agama yang beragam.

Bagaimana mengenai multikulturalisme dengan demokrasi? Multikulturalisme menjadi pendukung mengenai ide pluralism, yaitu keberagaman budaya yang sama tinggi dan bernilai dalam masyarakat. Ini merupakan proses demokratisasi karena meliputi bukan hak-hak politik dan individu semata, namun mencakup juga dalam berbagai hak budaya dari jenis kelompok masyarakat. Dalam sistem demokrasi ini menjadi wadah HAM (Hak Asasi Manusia), berisi mengenai aturan untuk menghargai martabat kemanusiaan.

Asian Values: Kebijaksanaan Wilayah

Asian Values berarti Nilai-Nilai Asia, bisa juga digunakan untuk menyebut istilah *Asian Ways* berarti sebagai manajemen dari konflik negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kedua sebutan ini memberikan gambaran mengenai norma dan prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa dengan cara "damai," bertindak non-konfrontatif atas konflik, dan bertindak pada musyawarah mufakat.

Dalam sejarah, istilah *Asian Values* (Nilai-Nilai Asia) mulai muncul sekitar tahun 1980-an – 1990-an untuk perkembangan ekonomi. Namun, nilai ini baru diperkenalkan sekitar pada abad ke-20 oleh para pemimpin negara dan cendekiawan Asia di bagian Asia Timur dan Asia Tenggara. Nilai khas bagi penduduk Asia sering dihubungkan dengan disiplin, kerja keras, kesederhanaan, pencapaian akademik, keseimbangan kebutuhan secara individu dan masyarakat. Bersikap hormat pada otoritas berkuasa, mencapai prestasi demi tercapainya prestasi pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, *Asian Values* terlihat seiring dengan keberhasilannya ekonomi yang disebut Macan Asia (Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan). Hal ini mendapat dukungan oleh Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohammad selaku manta perdana menteri Malaysia. Mereka membela diri dari kritik dengan mengecam rezim authoritarian di Asia. Ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat Asia unggul. Jenis unggul ini juga terletak bisa mendistorsi berbagai wilayah yang memiliki kekayaan keberagaman budayanya, agama (Budha, Hindu, Tao, Shinto, Kristen), sistem politik yang beragam—dari demokratis, semidemokratis, sosialis; dan adanya persaingan etnis.

Dengan "nilai-nilai Asia" antara Asia Timur (Cina—termasuk Hongkong, Taiwan, Korea Utara dan Selatan serta Jepang) dan Asia Tenggara (seluruh negara ASEAN) secara faktis memiliki kawasan heterogenitas budaya yang tinggi. Ini berkaitan dengan model politik Asia yang merupakan jenis alternatif, yaitu alternatif dari totalitarisme dan demokrasi liberal. Inti *Asian Values* terdiri dari dua nilai yang besar, yaitu *pertama*, nilai komunitarianisme dan signifikansi pengaruh religi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat komuniter melihat bahwa relasi antar kelompok—baik dalam wujud keluarga, komunitas, jejaring (network), bangsa atau negara yang di dalamnya terdapat individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok, tidak dijadikan sebagai agen tunggal yang berdiri sendiri. Hal ini memandang kepentingan kelompok lebih utama dari kepentingan individu.

Mengenai konskuensi dari komunitarianisme akan membentuk sebuah masyarakat yang teratur (*orderly society*). Jenis keteraturan ini berawal seperti dari unsur keluarga atau suatu kelompok yang telah memiliki kesepakatan dan kebiasaan yang ada di dalamnya. Lalu, nilai kesepakatan itu diperjuangkan dan dipertahankan bersama. Jika salah satu tidak ada yang menyetujui kesepakatan, pihak yang dituakan atau ditinggikan kepercayaan untuk memberikan penyelesaian yang bijak. Karakter "kepentingan komunal" ini memberikan nilai positif dalam pengembangan perekonomian antar negara.

Selain itu, jenis karakter ini akan membentuk pemerintahan yang kuat (*strong government*). Contoh dari nilai komunal, merupakan realisasi pengambilan kepentingan umum (kelompok) daripada kepentingan individual, seperti dalam perwujudan identitas kolektif dan kepentingan warga negaranya. Kebutuhan warga harus didahulukan daripada hak individu. Para pendukung nilai-nilai Asia adalah pembela kedaulatan negara yang kuat, termasuk hak untuk tidak diinternensi oleh pihak luar. Ide-ide ini diungkapkan dalam Deklarasi Bangkok 1993 tentang hak asasi manusia yang ditandatangani oleh pemerintah Asia, namun ini dikritik oleh organisasi hak asasi manusia Asia.

Kedua, Asian Values signifikansi pengaruh religi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini terlihat dalam kondisi terjadinya homogenitas beragama di kawasan Asia. Gerd Langguth memotret keberagaman agama di Asia, yaitu: Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Budha memiliki pengaruh penting di wilayah Indochina, juga menjadi agama yang dianut mayoritas penduduk Thailand, Burma, Laos, dan Kamboja. Sinto adalah agama tradisional di Jepang, dan Korea. Kristen menjadi karakter negara Philipina. Hindu hadir secara dominan di Bali dan menyebar di wilayah Asia. Dan Konfusian mewakili karakter religius masyarakat di Cina, Korea dan Jepang.

Arus sekulerisme di Barat tidak lepas akan penyebarannya di wilayah Asia. Namun, secara khas dalam menjalankan kehidupannya tidak memisahkan dengan keyakinan atau pandangan hidup. Dalam kehidupan sosial, politik, atau ekonomi tidak meninggalkan agama sepenuhnya. Meskipun dalam penerapannya hanya sebagian kecil semata. Seperti dalam nilai-nilai agama masih berlaku dalam menempuh kebijakan. Bahkan, untuk membangun identitas masyarakat masih menggunakan nilai agama, agar bisa menyelematkan kehidupan masyarakat dari kehancuran sebagai manusia.

Secara fakta perhimpunan berbagai negara wilayah Asia Tenggara, dalam organisasi dengan istilah ASEAN ternyata memberikan falsafah dalam kebijakan berbeda-beda untuk mengatasi terjadinya konflik, meskipun memiliki kesamaan esensinya yaitu terbentuk perdamaian. Indonesia memberikan kebijakan yang disosialisasikan dalam sebuah slogan 'Bhineka Tunggal Ika'. Frasa ini mendorong untuk menyerukan konsep masyarakat majemuk, pluralis dan multicultural. Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' berarti meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Konsep multikultural ini merupakan sebuah pengalaman, yaitu karena adanya keanekaragaman etnis dan budaya. Selain itu, terjadinya pembangunan bangsa harus melibatkan seluruh komponen. Rasa pengungkapan ini, pemerintah Indonesia memunculkan mosaic budaya yang menarik dengan memperlihatkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kebijakan di Malaysia untuk menjamin keberagaman rasa tau etnis budaya, meskipun secara bahasa hanya memakai bahasa Melayu. Sistem Malaysia sejenis *hegemonic consociationalism*, di mana orang Melayu menikmati keunggulan-keunggulan yang secara kontitusional disakralkan untuk warga negara non-Melayu. Singapura merupakan negara kecil, termasuk kota imigran dari negara-negara lain baik Cina, Malaysia, India dan Indonesia. Dari banyaknya etnis itu akan muncul suatu kepercayaan yang berbeda. Muslim Singapura—secara politis—tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multi-kultural. Singapura negara sekuler yang netral dalam permasalahan agama. Adapun Brunei Darussalam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Sejak tahun 1984 Brunei Darussalam memperkenalkan dasar pendidikan dwibahasa untuk menjamin setiap pelajar ada kebolehan dalam menguasai kedua-dua bahasa yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris.

Perumpamaan model kebijakan Brunei Darussalam, menandakan nilai multicultural dalam pendidikan. Di wilayah Asia Tenggara sebagai negeri yang menerapkan bagian dari sistem Islam, selain Brunei Darussalam yang secara mayoritas beragama Islam adalah Malaysia dan Indonesia. Berbagai nilai perilaku menunaikan etika moral—akhlaq seperti menghargai perbedaan dalam pluralitas, terlaksana. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme yang ditawarkan oleh Barat tidak sesuai dengan cirikhas Asia.

Kritikan atas argumentasi konsep multikulturalisme Barat setidaknya terdapat empat karakter, yaitu: pertama, model multikulturalisme sesuai pandangan Kymlicka—pencetus istilah multikulturalisme—yang menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dari kelompok dominan yang berkulit putih, kelompok yang minoritas dan etnis yang lain hanya bersifat imigran. Kedua, penerapan pemikiran multikulturalisme berdasarkan kepada konsep liberalis yang menyamakan hak asasi individu dengan yang lainnya. Ketiga, multikulturalisme lebih mengarahkan kepada kepentingan individu, terutama mengekspresikan dalam tindakan sosial, politik, dan ekonomi. Keempat, karena kebijakan berdasarkan pada setiap individu tanpa melihat perbedaan spesifik budaya yang lain, maka penerapan kebijakan ini lebih one fits for all.

Multikultural hendaknya memakai konsep identitas budaya yang kritis dan terbuka agar wacana multicultural menjadi langkah sebagai senjata bagi kepentingan politik identitas. Ruang dan berkembangnya nilai-nilai hidup (*Value System*), model pendidikan multikultural Asia secara umum mengemukakan dengan model demokrasi. Hal ini tidak hanya melalui perubahan kehidupan politik, seperti hanya pelaksanaan pemilihan umum atau perubahan-perubahan struktur pemerintahan seperti otonomi daerah. Namun juga butuh model pendidikan untuk merubah. Hal ini, sesuai pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi tidak terlepas dari pendidikan dalam masyarakat yang multicultural, namun perlu membentuk wadah yang terdiri dari berjenis-jenis bangsa dan budaya. Inilah konsep pendidikan dan politik *melting pot* yang bertujuan untuk membina suatu masyarakat baru.

Model Pendidikan Multikultural: Religius

Terjadinya pertentangan antar etnis, menunjukkan sesuatu perkara penting mengenai pendidikan multi-kultural bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang menimpa di seluruh dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara adalah pengaruh kebijakan sistem ideologi Kapitalisme. Sehingga muncullah sebuah konsep '*link and match*' ibarat sebuah pabrik besar yang menghasilkan karyawan tenaga kerja dengan gaji murah.

Gambaran umum karakter dan cirikhas di benua Asia dan baik Asia Timur atau semua kawasan benua Asia, model pendidikan multicultural yang terjadi adalah menggunakan suatu pendekatan progresif. Hal ini untuk melakukan transformasi pendidikan yang menyeluruh untuk membongkar kekurangan, kegagalan dan berbagai praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multicultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan suatu komitmen untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan setiap siswa mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi ditingkat lokal, nasional dan global.

Pendidikan multi-kultural senantiasa mencipta sebuah struktur dan proses bagi peradaban yang mampu melakukan ekspresi, berhubungan filosofi, sistem, metodologi dan berkesinambungan sesuai dengan kurikulum dan teknik pengajaran. Model pendidikan yang sering terjadi di berbagai negara, di wilayah Asia Tenggara (ASEAN)—seperti Indonesia, biasanya menempuh dengan cara dialog dan toleransi. Kedua ini menurut Jajang Jahroni dalam menulis sebuah jurnal Tsaqafah, "Multikulturalisme, Mungkinkah di Indonesia?" sebagai tradisi dan budaya.

Dialog untuk menumukan titik temu antar peradaban dan kebudayaan, mencari titik persamaan dan menghidarkan titik perbedaannya. Ini yang pernah ditempuh dalam sudut pandang HAM oleh negara ASEAN. Toleransi adalah sikap untuk menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Mengingat multikulturalisme berkaitan erat dengan sebuah penghargaan pada budaya dan peradaban, maka tidak bisa ditunda. Maka, karena kondisi hendaknya menjadikan pendidikan multicultural mengarah ke advokasi dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas dari diskriminatif.

Konsep pendidikan multicultural karena bersifat religius—bersudut pandang agama, dapat dinyatakan bahwa pendidikan nasional memegang peranan penting dalam mewujudkan "rakmat" di atas segala perbedaan. Peran yang bisa dilakukan adalah menanam suatu kesadaran akan perbedaan kultur. Indonesia dalam pendidikan multicultural sebenarnya berangkat dari suatu kesadaran bahwa setiap manusia memiliki potensi-potensi yang berbeda. Karena itu, proses pendidikan dilaksanakan dengan asas "kearifan multicultural." Prinsip yang adalah bentuk keadilan, demokrasi, dan sekaligus bersifat humanisme.

Strategi yang ditempuh dengan cara mengakomodir dan sekaligus menghargai perbedaan kultur bangsa, sebagai wujud prinsip pendidikan multicultural dalam sistem demokrasi, keadilan, dan humanism, perlu memperhatikan beberapa unsur. Suyanto menjelaskan berbagai unsur itu berupa: pertama, perbedaan agama di Indonesia. Kebijakan tidak boleh secara general menganggap sama antara satu agama dengan agama yang lain. Kedua, multi-etnis dan corak bahasa yang dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa. Keragaman etnis (multi-ethnic) dan bahasa (multi-language) bisa menjadi pemicu konflik dalam konteks nasional jika tidak terkomodir dengan baik. Ketiga, perbedaan jenis kelamin dan gender. Pendidikan tidak mampu mengakomodir perbedaan jenis kelamin dan gender, maka akan melahirkan ketidakadilan.

Keempat, perbedaan status sosial. Setiap anggota masyarakat dalam suatu bangsa berstatus sosial yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang mampu dan ada yang berasal dari keluarga yang miskin. Pendidikan multicultural

mampu mengkomodifikasi kedua jenis latar belakang sosial itu. Kelima, berupa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, baik terlihat secara fisik maupun nonfisik. Perbedaan ini secara populer dengan sebutan *disability*.

Selanjutnya, model pendidikan multicultural ditempuh dengan cara membedakan dan mengambil kebijakan menerapkan konsep multicultural, dalam kehidupan. Hal ini, sesuai penjelasan Rob Reich mengenai perbedaan antara multicultural deskriptif dan multicultural normatif. Multikultural bersifat deskriptif yaitu kenyataan sosial yang dikenal dalam ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Standar ini tidak mengakui adanya konsep yang baik. Hanya saja, nilai baik atas nama masyarakat. Lalu, multikulturalis yang bersifat normative berkaitan dengan moral. Dasar-dasar moral antara lain keterikatan seseorang pada negara. Wacana yang berkembang dalam nilai multicultural normatif merupakan suatu kritik sosial atau rekonstruksi sosial dalam membangun pluralitas di komunitas tersebut.

Mengenai pemotretan gaya atau model pendidikan Islam yang berwawasan pendidikan multikultural, kita bisa melihat penduduk muslim di Filipina dibagian selatan Filipina, terutama di Mindanao, Ujung Selatan Palawani, gugusan Kepulauan Sulu. Mereka terdiri dari tiga belas kelompok bahasa dan budaya, yaitu: Maranao, Iranum, Manguindanao, Tausugs Samal, Bajao, Jama Mapun, Palawani, Malbog, Kalobugan, Yakan, Karaza, dan Sangil. Diantara mereka ada tiga kelompok terbesar, yaitu Maranaos, Tausugs, dan Magu Indanaos. Islam dikembangkan lewat jalur perdagangan dan juga disebar oleh para da'i yang Filipina Selatan dikenal dengan istilah Masaikh, Makhdumin, dan Aulia. Sebagai bentuk implikasi dari pemikiran dan budaya yang memisahkan agama dan negara, kondisi ini bertentangan dengan keislaman. Madrasah dimulai dengan rumah sederhana yang disebut maktab, di tempat seorang guru, biasanya seorang pemimpin Islam mengajar sebuah grup kecil anak-anak, selanjutnya posisi ini sebagai sekolah pandita (Pandita School).

Sekitar tahun 1982, madrasah mendapat pengakuan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (The Ministry of Education, Cultural, and Sport) disingkat dengan MES. Artinya madrasah masuk dalam sistem pendidikan Filipina, maka pemerintah melaksanakan kegiatan: Mempertahankan staf pengajar, dan fasilitas lembaga madrasah; Memperkuat dan mengembangkan program Islamic Studies di berbagai lembaga pendidikan tinggi, khususnya di Mindanao, dan Memperkuat dan mendirikan program pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Untuk Indonesia dalam menyempurnakan penerapan pendidikan multikultural, menunaikan beberapa program pendidikan dengan cara: lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan multicultural, kebijakan perbukuan, dan pendidikan guru.

Kesimpulan

Hidup di era globalisasi saat ini, membutuhkan sebuah analisis yang “kritis” agar bisa membawa perubahan. Ya, perubahan secara individu maupun kolektif buat kebaikan masyarakat tingkat lokal, nasional hingga global. Gambaran global bersifat lintas bangsa yang bisa kita sebut sebagai internasional. Dunia global tidak lepas dengan interaksi berbagai komunitas manusia. Saat “buka mata” ternyata banyak manusia, masyarakat, dan negara terjadi ketimpangan.

Jenis ketimpangan itu biasa berupa komunikasi dan informasi dalam perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Maka, setiap komunikasi antar lintas negeri—seperti satu wilayah Asia, akan menemukan berbagai keberagaman. Tentu, dalam komunitas yang bersifat heterogen dan pluralitas secara praktis akan menemukan pembatasan. Arti pembatasan ini berupa hak berpolitik, kewarganegaraan hingga urusan ekonomi. Jika terjadi pergeseran identitas nasional negara, menjadikan potensi konflik karena perbedaan ras, etnisitas, agama, dan yang lainnya.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik antar negara—karena peradaban, perlunya sebuah konsep atau pemikiran. Dalam perkembangannya, dunia Barat dan Timur serta di wilayah benua Asia—terutama daerah Asia Tenggara (ASEAN), secara praktis memakai model pemikiran pluralisme. Istilah yang khas adalah multikulturalisme. Karena konsep multikulturalisme lahir di negara Barat yang lebih mendominasi atas kekuasaan individu (*capital*) dan liberalism (kebebasan), akhirnya membawa keburukan manusia, tergambar tanpa moral. Maka konsep ini tidak layak diterapkan bagi Asia. Sebab, dalam Asia secara khas memiliki *Values Asian* (Nilai-Nilai Asia). Secara khas nilai Asia hidup berada dalam wilayah yang penuh kebijakan, meski berhadapan unsur sekulerisme—memisahkan agama dengan kehidupan, tetapi tetap memakai keputusan berdasar religius (agama).

Perlu perubahan frasa multikulturalisme menjadi multicultural semata, sebab kata multikulturalisme terdapat tambahan isme. Secara khas tambahan kata isme berarti kearah tinjauan ideologis Barat, yaitu Kapitalisme. Adapun

proses memberikan pemahaman bagi manusia mengenai konsep multikultural sesuai nilai religius, perlu adanya pendidikan. Karena itu, butuh pendidikan multikultural dengan model sesuai konsep agama. Sebagaimana model pendidikan multikultural berspektif pendidikan Islam.*

Referensi

- Aisyah, Novia. artikel detikedu, "Timor Leste Masuk ASEAN, Ini Hak dan Kewajiban Negara Anggota": [http://bit.ly//Timor Leste Masuk ASEAN, Ini Hak dan Kewajiban Negara](http://bit.ly//Timor%20Leste%20Masuk%20ASEAN,%20Ini%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Negara) (diunduh tanggal 20 November 2022)
- Alkatiri, Zeffry. (2006). "Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional," *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya: Multikultural Internasional*. Depok: Universitas Indonesia
- Budianta, Melani. (2003). "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Gambaran Umum," *Menggagas Pendidikan Multikultural*. Ciputat: Tsaqafah, Vol. 1, No.2
- Fathina, Hana. artikel yang berjudul "Daftar 10 Negara Asean Beserta Pendiri dan Fakta Menariknya," [http://bit.ly// AppsBisniscomIOS](http://bit.ly//AppsBisniscomIOS). (diunduh pada tanggal 10 November 2022)
- Fitriah, Rossi Delta. (2018) "Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural Di Negara – Negara Asean (Malaysia, Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam). At-Ta'lim, Vol. 17, No. 2, Juli 2018.
- Jahroni, Jajang. (2003). "Multikulturalisme, Mungkinkah di Indonesia?," *Menggagas Pendidikan Multikultural*. Ciputat: Tsaqafah, Vol. 1, No.2,
- Sardar, Ziauddin dan Loon, Borin Van. (2001). *Mengenal Cultural Studies For Beginners*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU)
- Sundrijo, Andhanariswari Dwi. (2008). "Accomodative Multiculturalism: Alternatif Pendekatan terhadap Masalah Keragaman Budaya di Asia Tenggara," *Global jurnal politik internasional: Dinamika Fenomena Hubungan Internasional Pasca Neo-Liberal*. Depok: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Suyanto, Ph.D,Prof., (2006). *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah
- Tilaar, H.A.R .(2008). "Pendidikan Multikultural," *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- <http://aidc-editor.blogspot.com/2008/11/anwar-ibrahim-global-convivencia-john.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai-nilai_Asia#cite_note-1
- <https://kbbi.web.id/realisme>
- <https://www.makna.com/politik/low-politics>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6412300/timor-leste-masuk-asean-ini-hak-dan-kewajiban-negara-anggota> (diunduh pada tanggal 15 November 2022)
- Projek Jurnal RPI ASEAN/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

ROHMADI lahir di Bantul, 8 Agustus 1983. Sebagai guru dan pustakawan di Ma'had Bustanul Quran Assuryaniyah, Bekasi. Ia tinggal bersama istri tercinta Isna Anafiah dan dua putra Abdurrahman Al-Ghazi dan Hafidz Ibadurrahman Al Ghazi. Ia pernah menjadi pengurus PC IRM (1999-2002), Pengurus KARISMATIQ 'Keluarga Besar Remaja Masjid Istiqomah' (1999-2002). Di Universitas Djuanda, Bogor ia pernah aktif di LDK-FUMI (Lembaga Dakwah Kampus—Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam) dan bidang Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa (2006-2007).

Memajukan Pendidikan dan Penanaman Karakter di Indonesia dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Indar Cahyanto

Pendahuluan

Asia Tenggara adalah suatu kawasan yang sangat strategis dalam segi lokasi wilayahnya. Memiliki ragam budaya dan adat yang sama dari bangsa melayu secara mayoritas. Sehingga memudahkan membangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun dan menata kawasan yang saling menguntungkan sesama negara di Asia Tenggara. Apalagi secara sosio-historis kawasan Asia Tenggara beberapa negaranya pernah dikuasai oleh bangsa Asing dan terjadinya konflik. Kolonialisme dan imperialisme barat Asia Tenggara memiliki rekam jejak tersendiri dalam sejarah kawasan. Kemudian persoalan konflik yang melibatkan sesama negara kawasan Asia Tenggara pun pernah terjadi seperti konflik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, Konflik Kamboja, konflik Vietnam.

Persoalan kemudian menjadi ruh terbentuknya sebuah gagasan membangun suatu komunitas yang dapat saling mendukung pada tahun 1967. Secara geopolitik komunitas yang dibangun merupakan suatu entitas baru dalam hubungan bilateral sesama kawasan Asia Tenggara. Serta peningkatan upaya dalam bidang perdagangan dan industri serta sosial budaya. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari sepuluh negara di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada lima negara penggagas, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima penggagas itu memberi nama Association of South-East Asian Nations yang disingkat ASEAN. Melalui kesepakatan yang ditandatangani bersama lima menteri luar negeri menghasilkan suatu deklarasi Bangkok.

Dalam catatan berdirinya komunitas negara kawasan Asia Tenggara yang bernama ASEAN. Memiliki suatu tujuan ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di antara negara-negara anggota, meniaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai masalah Negara anggota secara damai. Luas wilayah ASEAN adalah 4,46 iuta kmz atau 3 persen dari total daratau di seluruh dunia, dan mempunyai penduduk sekitar 600 iua jiwa atau 8,8 perseo dari penduduk dunia. Adapun bahasa Pengantar ASEAN adalah bahasa inggris, dan kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia (Koesrianti, 2014, 2).

Maksud dan tuian ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 1967 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya di kawasan melalui upaya bersama dengan semangat persamaan dan persahabatan untuk memperkokotr landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan ialah menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
3. Meningkatkan keria sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah masalah yang menjadi kepentingan bersama-baik di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, maupun administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
5. Bekeria sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaataa pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkaiian masalah-masalah komoditas internasional, memperbaiki sarana-sarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara-negara anggota.
6. Memaiukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.

7. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk meniaiki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara negara-negara anggota.

Pada saat ini ketika ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan telah mempengaruhi dinamika kehidupan perjalanan umat manusia. Maka peran organisasi regional dalam cakupan kerja sama Internasional sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan masyarakat regional kawasan Asia Tenggara. Terutama peran dalam bidang pendidikan harus sinergi dan kolaborasi dalam untuk memberikan respons dan stimulus penguatan karakter serta pengetahuan kepada generasi penerus yang ada dalam kawasan regional Asia Tenggara.

Oleh karena untuk menggapai penguatan pembinaan karakter generasi penerus itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembentukan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan tercantum dalam Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Pasal 1 tujuan ASEAN pada Pasal 1 butir 11 yaitu: "Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN."

Pembuatan program pemberdayaan untuk generasi penerus di kawasan Asia Tenggara perlu ditingkatkan kerjasamanya sesama anggota dari ASEAN. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, di antaranya adalah:

- 1) Adanya program ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN.
- 2) Penawaran beasiswa pendidikan, seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN.
- 3) Mengadakan olimpiade regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN.
- 4) ASEAN Council of Teachers (ACT) sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT pada pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global.
- 5) ASEAN-Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang.

Pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia di Malaysia merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi kebangsaan sesama negara serumpun Melayu dan berada di Kawasan Asia Tenggara. Jika ditilik dari peran Muhammadiyah di Indonesia dalam bidang pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karena Muhammadiyah memiliki tingkatan jenjang pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi yang jumlahnya ribuan. Adanya kesepakatan kerja sama ekonomi ASEAN dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 memberikan ruang baru bagi perkembangan industry dan pendidikan.

Kesepakatan dalam masyarakat Ekonomi ASEAN dalam membangun karakter Mea menuntut masyarakat yang mempunyai keahlian yang mampu siap menerima perkembangan jaman. Keahlian yang harus dimiliki oleh masyarakat di era mea yakni, mampu berkomunikasi, memangatkan peluang, mampu berbahasa asing, mampu memimpin, bijaksana, dan tenggang rasa. Semua keahlian tersebut membutuhkan karakter sebagai dasar dalam mengembangkannya.

Peningkatan pendidikan juga tak terlepas dari kompetensi guru yang dimiliki oleh masing-masing negara Asia Tenggara. Guru merupakan garda terdepan dalam kemajuan mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. motto yang dicetuskan oleh tokoh pendidik kita "Ki Hajar Dewantara" yaitu *Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* (di depan memberi suri tauladan, di tengah-tengah membangun, di belakang memberi dorongan dan motivasi).

Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025), yang bertujuan untuk semakin mengharmoniskan hubungan antar negara anggota ASEAN supaya potensi masyarakat ASEAN dapat secara penuh terwujud. Sejumlah kegiatan di dalamnya telah menunjukkan harapan dalam menarik lebih banyak investasi yang lebih baik di bidang pendidikan, seperti pembentukan proyek-proyek perbaikan pendidikan bagi anak-anak dan remaja tidak sekolah (out-of-school children and youth atau OOSCY), terutama di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (negara-negara CLMV); platform daring ASEAN Cyber University-Open Educational Resource (ACU-OER); dan EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU-SHARE). Melalui EU-SHARE, ASEAN mendapatkan Dana Hibah Uni Eropa (EU Grant) senilai total EUR 20 juta (\approx USD 23,30 juta) untuk mendukung program-program beasiswa dan kegiatan pendidikan tinggi lintas batas lainnya yang relevan (Fatharani Taqisa Nadhira, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selaras dengan bunyi undang-undang sistem pendidikan nasional pembangunan sumber daya manusia memiliki ruang yang dominan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul kreatif dan inovatif. Pendidikan menjadi kunci masuknya peradaban baru dalam menghadapi era persaingan bebas di Asia Tenggara.

Memajukan pendidikan di tengah gelombang kehidupan yang diwarnai dengan ragam persoalan menjadi tantangan tersendiri bagi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan pun juga hampir sama jika dilihat dari kemajuan zaman dan teknologi. Kecenderungan para pemuda yang bermain games online, geng motor, narkoba, kekerasan seksual dan sebagainya. Perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian kehidupan yang liberal dan cenderung bebas tanpa memperhatikan budaya yang melekat dari masyarakat Melayu dan adat budaya Timur.

Dalam menghadapi tantangan global dan memajukan pendidikan di kawasan regional ASEAN ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan. Pertama. Diperlukannya salah satu muatan mata pelajaran yang sama di seluruh kawasan regional ASEAN, karena secara geografis dan wilayah memiliki kesamaan sejarah, budaya dan adat istiadat serta berasal dari nenek moyang yang sama. Ketika muatan pembelajaran yang sama diharapkan memiliki pengetahuan yang sama tentang budaya dari masing-masing negara ASEAN. Pendidikan karakter sesama negara kawasan ASEAN dikolaborasi untuk membangun berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya bidang teknologi informasi yang semakin berkembang luas serta perlu dibangun program bersama dalam pengembangan karakter peserta didik yang dapat memberikan dampak bagi kawasan.

Kemudian, terkait pembentukan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) adalah sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli dan terikat dalam kemitraan. Dasar pemikiran komunitas sosial-budaya ini sebenarnya telah pula dicanangkan dalam Deklarasi Bangkok 1967. Maka dalam pilar ASCC ada empat unsur utama yang dipusatkan untuk dicapai, yakni: (1) membangun komunitas masyarakat yang peduli (community of caring societies); (2) mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi; (3) meningkatkan pelestarian lingkungan; dan (4) memperkuat fondasi kohesi sosial di kawasan. ASCC adalah bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik, serta Yayasan ASEAN (Simela Victor Muhamad, 2011).

Pembangunan manusia menurut definisi UNDP (2014) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people's choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: (1) panjang umur dan sehat, (2) berpendidikan dan, (3) standar hidup yang layak. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup, (2) tingkat pendidikan yang diukur dengan angka huruf melek pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta (3) tingkat kehidupan layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. (Dwijanto, 2016)

Lickona (dalam Elkind dan Sweet, 2004) menggagas pandangan bahwa pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral. Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat, dan bangsa (Ajar Dirgantoro, 2016). Peran pendidikan dalam hal penguatan kurikulum dan pengajaran guru juga penting selain pendidikan karakter dan mata pelajaran khusus tentang ASEAN. Walaupun secara kompleksitas masing-masing Negara ASEAN berbeda masalah yang dihadapi dalam kemajuan pendidikan. Mulai faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat, faktor lingkungan masyarakat, efektivitas pendidikan, efisiensi pengajaran, standarisasi pendidikan, di masing-masing negara kawasan Asia Tenggara berbeda cara dan penanganannya. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekurangan dan kelebihan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Implementasi Pendidikan Karakter

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah tempat yang strategis untuk pendidikan karakter karena anak-anak dari semua lapisan mengenyam pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan taman belajar bagi tumbuh dan kembangnya generasi penerus bangsa dalam konteks sistem pendidikan sekolah, sekurang-kurangnya pendidikan karakter harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) Pendidikan karakter harus menempatkan kembali peran guru sebagai faktor yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian peserta didik, (2) Menempatkan kembali sosok guru sebagai orang yang paling tahu tentang kondisi dan perkembangan anak didiknya, dan (3) Sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter, maka perlu digalakkan kembali sebuah sistem evaluasi afektif (Syarif Hidayat, 2013).

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Inggris, *character*, yang berarti watak atau sifat. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari. Florence Litteur, penulis buku terlaris *Personality Plus*, seperti dikutip Fauzone (2009) menguraikan, ada empat pola watak dasar atau karakter manusia. Keempat karakter tersebut adalah 1) sanguinis/ yang populer, 2) koleris/ yang kuat, 3) melankolis/ yang sempurna, dan 4) plegmatis/ yang damai (Syarif Hidayat, 2013).

Persoalan karakter terjadi ketika ada suatu masalah seperti yang terjadi pada sporter sepakbola negara-negara Asia Tenggara yang dalam media sosial lebih banyak melakukan bully, perundungan dan kekerasan yang saling menghujat satu sama lain dalam berbeda kelompok supporter antar negara Asia Tenggara. Hal ini memberikan indikasi bahwa adanya konflik itu karena ego dan kepentingan yang tak terkendali. Memberikan kesan bahwa penanaman pendidikan karakter menjadi tak berhasil dalam menciptakan kedamaian sesama negara kawasan Asia Tenggara.

Perlunya mengubah paradigma berfikir dalam mengimplementasikan pendidikan karakter agar berhasil. Mengubah mind set atau cara pandang berfikir seseorang untuk ke lebih baik istilah *mindset* terdiri dari dua kata, yaitu *mind* dan *set*. Mindset sebagai satu istilah bermakna kepercayaan (*belief*) atau sekumpulan kepercayaan (*set of beliefs*) atau cara berfikir yang memengaruhi perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitude*) seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya.

Gaya berfikir manusia menurut filosofi *Transformational Thinking* terdiri dari tiga sistem yaitu sistem perilaku (*behavior system*), sistem berfikir (*thinking system*), dan sistem kepercayaan (*belief system*) (Muhamad Alwi, 2019). Dalam Sistem Perilaku dimana seorang guru berupaya untuk berinteraksi dengan sesama berdasarkan pengalamannya. Dalam sistem perilaku perubahan seorang guru dapat berperan merangsang dan menjadi contoh dari peserta didik. Dari Pengalaman seorang guru dapat merubah gaya mengajar apabila ada kekurangan sehingga seorang guru dapat berfikir untuk memperbaiki gaya mengajar dan mendidiknya. Sehingga akan mendapatkan suatu kepercayaan dari peserta didik untuk mengikutinya.

Driver's mentality pada dasarnya adalah sebuah kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman dan pendidikan. Jadi seorang *driver* tidak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat, ia juga membutuhkan referensi dari pengetahuan akademis. Prinsip seorang *driver* adalah inisiatif, melayani, navigasi, dan tanggung jawab (Muhamad Alwi, 2019). Sebagaimana seorang guru prinsip *driver* dapat digunakan untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

Pertama, seorang guru harus mengambil inisiatif peran bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga suasana kelas dapat tercipta pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan tumbuhnya kreatifitas inovasi dalam pembelajaran. Kedua, melayani prinsip seorang guru melayani dengan sepenuh hati. Membangun interaksi yang positif antara guru dengan siswa. Ketiga, navigasi artinya seorang guru harus memiliki tujuan dalam pembelajaran yang telah digariskan dalam capaian pembelajaran. Paham akan proses yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran kepada siswa sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Keempat, seorang guru memiliki sikap tanggaung jawab atas apa yang dilakukan dalam pembelajaran di dalam kelas.

Dalam mengimplementasikan seorang guru memiliki kompetensi sosial, professional, pedagogik dan kepribadian. Sehingga seorang guru dapat melihat gaya belajar dari peserta didik yang cenderung beragam dalam kemampuannya. Maka dalam proses pembelajaran pemberlakuan akan berbeda dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Proses pembelajaran yang terdeferensiasi di dalam kelas memberikan peningkatan kepada mutu pembelajaran berimplikasi kepada menguatnya pendidikan karakter.

Implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran ketika telah berlangsung dengan baik dan bermakna maka akan menciptakan budaya sekolah yang unggul, kompetitif dan bersaing. Proses mutu pembelajaran ditentukan oleh tiga variabel, yaitu budaya sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan, upacara, slogan, dan berbagai perilaku yang telah terbentuk lama di sekolah dan diteruskan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Budaya ini diyakini memengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staf tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Dengan adanya budaya yang kondusif dapat mendorong perilaku warga sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah (Masduki Ahmad, 2021).

Dalam hal ini masing-masing negara anggota ASEAN dapat mendorong masyarakatnya untuk saling mengenal, mengakui dan menghargai kebudayaan masing-masing dan menjadikannya sebagai bagian dari warisan kebudayaan ASEAN. Melalui jalur pendidikan, tiap-tiap negara anggota ASEAN dapat mengembangkan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang menekankan pentingnya membangun kohesivitas sosial-budaya dan mengembangkan identitas ASEAN. Melalui jalur kepemudaan, dapat dibangun dan dikembangkan berbagai program kerja sama kepemudaan yang menekankan pentingnya membangun dan mengembangkan rasa memiliki ASEAN (*we feeling*). Melalui bidang-bidang lainnya juga dapat dilakukan hal yang sama (Simela Victor Muhamad, 2011).

Kesimpulan

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Dunia yang semakin maju dewasa ini menuntut memerhatikan mutu segala hal untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan hidup, baik dalam dunia industri, ekonomi, perdagangan, kesehatan, perbankan maupun pendidikan persoalan mutu semakin mengemuka dalam berbagai forum dan pertemuan ilmiah dan kalangan profesi. Pendidikan memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam mewujudkan bangsa menjadi tangguh dan bermartabat.

Terbukanya komunitas masyarakat ASEAN berarti membuka kesempatan ruang-ruang public untuk dapat diakses oleh sesama masyarakat komunitas ASEAN. Keterlibatan masyarakat perlu didorong secara maksimal dalam meningkatkan hubungan dan interaksi sosial di kawasan ASEAN. Organisasi ASEAN harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Asia Tenggara mengubah cara pandang dari *state oriented organization* menjadi *people oriented organization*.*

Referensi

- Alwi, Muhammad (2019). Perubahan Mindset Mengajar Dalam Persaingan Pendidikan Di Era MEA <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/147/129> Tanggal 29 November 2022
- Dirgantoro, Ajar (2016). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN <http://www.jurnal.stkippritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/321/180> 2 Tanggal 29 November 2022
- Dwijanto (2016). Strategi Dunia Pendidikan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/21524/10213> Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Koesrianti, *Association of South-East Asian Nations Seioroh Konstitusi don Integrosi Kowoson, Malang: Airlangga University Press* dengan LP3 Universitas Airlangga, 2014
- Deklarasi ASEAN, Pasal I, preambul Deklarasi ASEAN, lihat the ASEAN Declaration 1967, <http://www.aseansec.org/12121.htm> 34 ASEAN: Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Hidayat, Syarif (2013). Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Melalui Inovasi Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/8953/6514> Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Masduki Ahmad (2021). Manajemen Mutu Pendidikan, Jawa Timur CV. PENERBIT QIARA MEDIA, Pasuruan
- Muhamad, Simela Victor (2011). Dinamika Perembangan ASEAN Menuju A People Orienred Organization Kaiian, Vol 16, No. 3, September 2011 Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Nadhira, Fatharani Taqisa (2022). Mendorong Investasi di Sektor Pendidikan di ASEAN Pendidikan Inklusif, Program-Program Pendidikan Lintas Batas, dan Pengembangan Kapasitas TIK. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2021 Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Rondiyah, Arifa Ainun (2017). Pembelajaran Sastra Melalui Bahasa dan Budaya Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/elic/article/view/1230> Diunggah Tanggal 29 November 2022
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/14/153000469/tujuan-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan>. Diunggah Tanggal 29 November 2022
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/120000569/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan>. Diunggah Tanggal 29 November 2022

INDAR CAHYANTO lahir di Jakarta pada 3 Desember 1978. Menamatkan SDN Ciracas 03 Pagi, SMPN 208 Jakarta, SMAN 58 Jakarta, kemudian menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan Pada FKIP Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka dan Magister Pendidikan pada Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (tamat 2016). Saat ini ia mengajar di SMA 25 Jakarta dan aktif dalam Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis PGRI Provinsi DKI Jakarta. Ia juga aktif sebagai Ketua MGMP Sejarah Kota Administarsi Jakarta Pusat. Indar menulis di blognya, iracas58.blogspot.com, Kompasiana, Retizen, serta beberapa media online.

Global Citizenship Education (GCED) sebagai Pendidikan Transformatif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kawasan ASEAN

Susi Fauziah

“Education promotes equality and lifts people out of poverty. It teaches children how to become good citizens. Education is not just for a privileged few, it is for everyone. It is a fundamental human right.”

--Ban Ki-moon

Transformasi Pendidikan

Tidak dapat dimungkiri bahwa akibat globalisasi, dunia menjadi semakin saling terhubung dan itu terjadi baik di dalam maupun di antara negara-negara. Berdasarkan pendekatan transformasional, dampak globalisasi yang paling signifikan adalah semakin melebarnya jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang akibat ketidakkonsistenan ‘pembagian kerja global’ di antara negara-negara tersebut. Konsekuensinya, beberapa negara dan masyarakat dari negara maju dapat memperoleh manfaat penuh, sedangkan negara lain dari negara berkembang bahkan terbelakang menjadi lebih dirugikan; hal tersebut menghasilkan “stratifikasi global” (Parjanadze, 2009). Dengan demikian, dalam konteks Asia Tenggara yang sebagian besar negaranya dikenal sebagai negara berkembang, harus ada upaya untuk memanfaatkan globalisasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan mereka.

Salah satu cara untuk bertahan di era globalisasi ini adalah dengan menyesuaikan pendidikan kita dengan kondisi global. Namun demikian, pendidikan kita masih perlu dikembangkan dalam hal praktik pengajaran, komunikasi guru dan gaya mengajar serta diubah agar mampu menghadapi masalah ketimpangan dan ketidakadilan global (Neubauer, 2007: 1) Praktik mengajar di dalam kelas tidak sesuai dengan transformasi dunia. Dunia menjadi datar dan tidak memiliki batas sehingga distribusi barang, pergerakan manusia dan arus informasi dan ide menjadi lebih cepat dari sebelumnya karena kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi. Namun, sebagian besar praktik pengajaran masih mirip dengan beberapa dekade yang lalu, di mana pengajarannya terstruktur secara ketat, biasanya berdasarkan hafalan, dibagi berdasarkan usia peserta didik, disusun dalam kurikulum tradisional, dan menghasilkan lulusan yang tidak mampu memecahkan masalah dunia nyata. 2) Komunikasi guru sebagian besar masih berpusat pada guru yang berdiri di depan kelas sebagai pemegang otoritas tunggal di dalam kelas. Selain itu, terkait gaya mengajar, penggunaan media hanya sebagai pelengkap alat pengajaran, dan sebagian besar fokusnya masih pada ujian. Dengan demikian, peserta didik pada umumnya menganggap kelasnya tidak relevan dan membosankan karena sangat berbeda dengan dunia “nyata” mereka yang terbiasa menggunakan perangkat komunikasi digital (ponsel, video game, internet, dan sebagainya) dalam kehidupan sehari-harinya 3) Isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan global semakin meningkat karena semakin memburuknya kesenjangan ekonomi tidak hanya antar negara di dunia tetapi juga antara individu kaya dan miskin di negara masing-masing. Dari isu-isu tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus berperan untuk mencerdaskan peserta didik agar memiliki empati dan berkontribusi aktif dalam menghadapi isu-isu tersebut, khususnya di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, selaras dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh seluruh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, penulis ingin mengusulkan pendidikan kewarganegaraan

global (GCED) sebagai pendidikan transformatif untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Untuk mendukung argumen tersebut, artikel ini menyajikan latar belakang, definisi, prinsip utama serta hubungan antara GCED dan SDGs.

Problematika dan Perdamaian Dunia

Latar Belakang GCED

GCED terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 4 Pendidikan Berkualitas dan telah dinyatakan secara eksplisit dalam Target 4.7 di mana pada tahun 2030, diharapkan semua peserta didik di negara-negara di seluruh dunia telah memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, yang mana kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya adalah kewarganegaraan global. Selanjutnya, implementasinya sebagaimana tercantum dalam indikator 4.7.1 akan diukur berdasarkan (a) pengarusutamaan dalam kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa di masing-masing negara.

GCED didukung dan disebarluaskan secara luas oleh PBB dan badan-badannya serta melalui inisiatifnya yaitu 1) United Nations Educational, Science and Cultural Organization (UNESCO) bertujuan untuk membangun perdamaian melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, 2) Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding Under The Auspices of UNESCO (APCEIU) di bawah naungan UNESCO bertujuan untuk mempromosikan pendidikan untuk pemahaman internasional dan kewarganegaraan global untuk membangun budaya perdamaian. 3) Global Education First Initiative (GEFI) dari United Nation (UN) yang mendeklarasikan tiga prioritas utama dalam peluncurannya, pada September 2012, yaitu: 1. Menyekolahkan setiap anak; 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran; dan 3. Menumbuhkan kewarganegaraan global dalam rangka mewujudkan Education for All/ Pendidikan untuk Semua (EFA).

Lebih lanjut, GEFI menyatakan "Pendidikan tidak cukup untuk menghasilkan individu yang bisa membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan harus sepenuhnya menjalankan peran sentralnya dalam membantu masyarakat membentuk masyarakat yang lebih adil, damai, toleran, dan inklusif. Artinya, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, peserta didik tidak hanya harus belajar literasi dan numerasi tetapi juga kewarganegaraan global.

Definisi GCED

Ada dua kata kunci untuk GCED, yaitu Global dan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil pencarian dari kamus pelajar online Oxford, kata, 'Global' berarti mencakup atau mempengaruhi seluruh dunia, sedangkan, 'kewarganegaraan' berarti (1) hak hukum milik negara tertentu, (2) keadaan menjadi warga negara dan menerima tanggung jawabnya. Karena, 'global' tidak terbatas pada satu negara, maka untuk pengertian kewarganegaraan, kita akan menggunakan pengertian yang kedua. Jadi, secara umum, kita dapat mendefinisikan kewarganegaraan global sebagai keadaan menjadi warga dunia dan menerima tanggung jawabnya.

Berdasarkan UNESCO (2022; 2020; 2018) dan OXFAM (2015), GCED dapat didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap mereka agar menjadi warga dunia. Mereka akan diajari tentang rasa hormat dan solidaritas dengan orang-orang dari seluruh dunia yang memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat mengembangkan rasa memiliki dan kemanusiaan bersama yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab dan aktif. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi untuk membangun masyarakat yang inklusif, damai dan berkelanjutan.

Prinsip Utama GCED

GCED mencakup tiga dimensi konseptual pembelajaran, yaitu domain kognitif, sosio-emosional, dan perilaku sebagaimana disebutkan dalam publikasi UNESCO (2019; 2018; 2015; 2014). Dengan mencakup ketiga ranah tersebut, peserta didik akan diajarkan tentang pengetahuan dan keterampilan (kognitif), nilai (sosio-emosional) dan sikap (perilaku) yang diperlukan untuk menjadi warga dunia. Ranah kognitif erat kaitannya dengan pikiran atau kepala.

Artinya, peserta didik dibimbing oleh gurunya untuk mengetahui, memahami dan berpikir kritis tentang isu-isu global, regional, nasional dan lokal serta keterkaitan dan ketergantungan negara dan populasi yang berbeda.

Domain sosio-emosional sangat erat kaitannya dengan hati. Di sini, peserta didik diajarkan oleh gurunya untuk mengembangkan rasa memiliki terhadap kemanusiaan yang sama, memiliki nilai dan tanggung jawab bersama, serta mengembangkan rasa empati, solidaritas, dan menghargai perbedaan dan keragaman. Ranah perilaku terkait erat dengan tangan di mana peserta didik diajarkan untuk bertindak secara efektif dan bertanggung jawab untuk berkontribusi memecahkan masalah di tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, dengan mengajarkan dan mendidik 3H (Head/Kepala, Heart/Hati, dan Hand/Tangan) peserta didik, guru bertujuan untuk mengajari mereka tentang bagaimana menjadi warga dunia yang dapat berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman.

GCED bertujuan untuk mengembangkan kompetensi berikut pada peserta didik (UNESCO, 2014): Peserta didik memahami isu-isu global dan nilai-nilai universal, misalnya keadilan, kesetaraan, martabat dan rasa hormat; Peserta didik mengembangkan kemampuan kognitif untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif, dalam bernalar dan memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan multiperspektif yang mengakui perbedaan dimensi, perspektif, dan sudut pandang suatu masalah; Peserta didik mengembangkan keterampilan non-kognitif, termasuk keterampilan sosial dan komunikasi serta bakat untuk berjejaring dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang, asal, budaya dan perspektif yang berbeda; dan Peserta didik mampu bertindak secara kolaboratif dan bertanggung jawab untuk memecahkan isu dan permasalahan global serta memperjuangkan kebaikan bersama.

Hubungan antara GCED dan SDGs

Berdasarkan situs resmi PBB, terdapat 17 tujuan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (SDGs) yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*. Dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, ada 5 tujuan yang dapat dikategorikan dalam kategori *People* (Orang) karena kelima tujuan pertama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak semua orang dalam hal penghidupan yang layak, kecukupan pangan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuan 3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia. Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas: Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Tujuan 5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Kedua, ada 5 tujuan yang dapat dikategorikan dalam kategori *Planet* karena kelima tujuan tersebut bertujuan untuk melindungi planet ini dari degradasi dengan memastikan air bersih dan sanitasi, memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, melestarikan dan berkelanjutan menggunakan sumber daya di bawah air dan di darat. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan 13: Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 15: Kehidupan di Darat: Melindungi, merestorasi, dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ketiga, terdapat 5 tujuan yang dapat dikategorikan dalam kategori *Prosperity* (Kemakmuran) karena kelima tujuan tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh umat manusia dengan memastikan bahwa pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan teknologi tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Tujuan 7: Energi yang Terjangkau dan Bersih: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif

dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Tujuan 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Keempat, ada satu tujuan yang dapat dikategorikan dalam kategori Perdamaian, yaitu Tujuan 16 yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Kelima, ada satu tujuan yang dapat dikategorikan dalam kategori *Partnership* (Kemitraan), yaitu Tujuan 17 yang bertujuan untuk melibatkan semua entitas (negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat) untuk mencapai semua 17 SDGs. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

GCED terkait erat dengan SDG karena bertujuan untuk mengajarkan peserta didik tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap tentang bagaimana menjadi warga dunia yang dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. dunia. Selain itu, konten pembelajaran dan kegiatan yang diajarkan di GCED berkorelasi dengan tema SDG.

GCED sebagai solusi perdamaian di ASEAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa GCED saling terkait dengan SDG Nomor 4 Pendidikan Berkualitas serta didukung dan disebarluaskan oleh PBB dan badan-badannya serta melalui inisiatifnya. GCED dapat didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengajar peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap mereka agar menjadi warga global yang bertanggung jawab dan aktif yang memiliki rasa memiliki dan kemanusiaan yang sama.

Pendidikan ini mencakup tiga dimensi konseptual pembelajaran, yaitu domain kognitif, sosio-emosional, dan perilaku. Dengan demikian, dengan menggunakan GCED sebagai pendidikan berbasis nilai, peserta didik diajar menjadi tidak hanya warga negara di negaranya masing-masing tetapi juga sebagai warga dunia (regional/ASEAN dan internasional) yang dapat berkontribusi untuk membangun dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Dengan demikian, kita pasti akan bisa mewujudkan kestabilan dan kemakmuran di kawasan ASEAN.*

Referensi

- Bhutan National Commission for UNESCO (2019). *A Framework: Preparing Teachers for Global Citizenship Education and Development in the Context of Gross National Happiness*. Thimphu, Bhutan National Commission for UNESCO.
- Neubauer, Deane (2007). *Globalization, interdependence and education*. *Front. Educ. China* 2007, 2(3), 309–324.
- OXFAM (2015). *Global Citizenship in the Classroom: A Guide for Teachers*. Oxford, OXFAM GB.
- Parjanadze, Nikoloz (2009). "Globalisation Theories and Their Effect on Education." *IBSU Scientific Journal* 2009, 2(3), 77-88.
- UNESCO (2022). *Promoting Global Citizenship Education in Arab Universities: A Regional Outlook*. Beirut: UNESCO.
- UNESCO (2020). *Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-to Guide for 'Taking It Local!'*. Seoul: APCEIU.
- UNESCO (2019). *GCED: Taking it local in Asia-Pacific A regional study on GCED localization and challenges*. Bangkok, UNESCO.
- UNESCO (2018). *Preparing Teachers for Global Citizenship: A Template*. Paris, UNESCO.
- UNESCO (2015). *Global Citizenship Education: Topics and learning objectives*. Paris, UNESCO.
- UNESCO (2014). *Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century*. Paris, UNESCO.

SUSI FAUZIAH adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Teknologi. Ia ditugaskan di SEAMEO QITEP in Language sejak 2014 sampai sekarang. Ia menjabat

sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Jejaring setelah sebelumnya lama menjabat di Divisi Pelatihan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ia juga merupakan tutor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT). Dengan latar belakangnya sebagai lulusan Sastra Inggris dan Linguistik dari Universitas Indonesia, ia aktif menulis buku dan modul untuk pengajaran bahasa, diantaranya: *Cara Kilat Menguasai Tenses* (Transmedia, 2009), *99% Lolos TOEIC: Strategi Jitu Memahami dan Menyelesaikan Soal - soal TOEIC* (Transmedia, 2013), *Modul Model Pembelajaran Berbasis Proyek Berorientasi HOTS* (SEAMEO QITEP in Language, 2019), *Modul Model Pembelajaran Berbasis Teks Berorientasi HOTS* (SEAMEO QITEP in Language, 2019), *Modul Model Pembelajaran Penyingkapan Berorientasi HOTS* (SEAMEO QITEP in Language, 2019), dan *English Material to Promote Gender Equality* (SEAMEO QITEP in Language, 2022). Ia juga menulis skrip video pembelajaran bahasa Inggris, yaitu *Speaking English Confidently using ORAI, the Smart Application* (SEAMEO QITEP in Language, 2020). Ia dapat dihubungi di email: susi.fauziah@kemdikbud.go.id.

Kompetensi *Ciber Pedagogik* Guru dan Literasi Digital di ASEAN

Mu'minin

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan"

--QS. Al-Alaq: 1

Covid-19

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan salah satu tantangan pendidikan saat pandemic Covid-19 adalah para guru dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi. Hal itu disampaikan Nadiem dalam acara *QS Higher Ed Summit: Asia Pasifik 2022* di Hotel Intercontinental Jakarta pada Rabu, 9 November 2022 (*Tempo.co*, 11 November 2022):

"Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. However, some will become seriously ill and require medical attention." [Kebanyakan orang yang terinfeksi virus akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis]. (*who.int/health*)

Pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka mengalami peralihan menjadi pembelajaran daring karena adanya kebijakan *social distancing* yang juga berakibat juga pada dunia pendidikan. Para guru dosen dan pelaku pendidikan pada umumnya mencari berbagai cara bagaimana pendidikan tetap berlangsung tanpa meninggalkan rumah karena adanya kebijakan *social distancing*. Pembelajaran dengan system daring (dalam jaringan) merupakan salah satu alternative yang dilakukan oleh guru, dosen dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Mereka dipaksa untuk memahami dan menggunakan beberapa platform yang dapat digunakan untuk memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran tersebut. Gambaran ini mengisyaratkan guru harus segera meng-update ilmu digital untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Terlebih pada masa pandemi dimana kegiatan belajar dilakukan secara daring, mau tidak mau guru harus mampu melek teknologi.

Kompetensi Guru dan *Ciber Pedagogy*

Kompetensi guru menurut UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, seorang guru profesional harus memiliki empat kompetensi dasar dalam pendidikan. Aturan ini memiliki harapan yang besar terhadap guru yang mengajarkan ilmu kepada anak bangsa yang kelak dikemudian hari akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Empat kompetensi dasar ini adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional.

Pembelajaran yang berlangsung dikelas terjadi interaksi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu didesain untuk melayani peserta didik yang beraneka latar belakang dan karakteristiknya, tentunya ketrampilan guru diperlukan untuk dalam mendesain pembelajaran harus tepat.

Seiring dengan semakin eratnya hubungan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dalam dunia pembelajaran muncul istilah *cyber pedagogy*. *Cyber pedagogy* adalah keahlian mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Kompetensi pedagogi menjadi alat bantu dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Alat digital mulai dari yang paling sederhana seperti smartphone, laptop, computer PC hingga yang paling rumit.

Cyber Pedagogy merupakan ilmu mendidik anak melalui dunia maya (virtual/digital). Sebelum dunia dilanda covid 19 pembelajaran dilaksanakan di kelas-kelas fisik namun salah satu dampak dari adanya covid 19 pembelajaran mulai dilaksanakan secara virtual. Disamping karena adanya covid 19 dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut maka semakin beragam pula sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Hal ini yang dijadikan sebagai landasan mengapa *ciber pedagogy* disandingkan dengan pendekatan paradigma *student centered learning*. *Cyber pedagogy* tersebut tentu dapat diwujudkan jika para pendidik dan peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam menjalankan dan mengoperasikan perangkat TIK (teknologi Informasi dan Komunikasi) terutama pendidik agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan konsep *cyber pedagogy*. Dapat disimpulkan bahwa konsep *cyber pedagogy* dapat diartikan dengan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis TIK.

Kompetensi *pedagogi* merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh guru, terlebih pada era digital seperti sekarang ini keempat kompetensi guru tidak lepas dari pengaruh teknologi, salah satu kemajuan terutama abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kondisi sekarang ini apabila guru tidak memiliki kompetensi *cyber pedagogy*. Maka akan terjadi kesenjangan antara guru dan peserta didik semakin lebar karena peserta didik yang dihadapi sekarang merupakan generasi alfa yang pada umumnya peserta didik tidak asing lagi dengan teknologi dan internet.

Kehadiran teknologi digital menjadikan guru tidak lagi menjadi sumber ilmu utama. Karena pada saat ini peran guru tidak hanya melakukan transfer ilmu tetapi menjadi fasilitator, coaching, pendamping yang dapat memotivasi dan menginspirasi peserta didik, sehingga guru harus memiliki bekal lebih. Kehadiran teknologi menjadikan peserta didik akan lebih cepat menyerap informasi dan pengetahuan secara outodidak.

Penguasaan kompetensi *cyber pedagogy*, guru mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif. Dengan kemudahan akses teknologi digital guru diharapkan dalam membuat soal yang tidak mudah mencari jawabannya oleh peserta didik di internet. Oleh karena itu dalam proses penilaian guru hendaknya membuat soal yang dapat mengarahkan peserta didik untuk berproses dan tidak berpatokan pada hasil. Melainkan bagaimana soal tersebut diarahkan untuk menguji kemampuan literasi dan numerasi.

Penguasaan kompetensi guru ditambah dengan *cyber pedagogy*, guru diharapkan dapat lebih siap dalam bersaing dalam pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Harapannya guru dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Maka guru dapat mencetak generasi yang memiliki ketrampilan belajar dan inovasi dengan kemampuan berpikir kritis, memiliki keahlian literasi digital. Namun demikian guru harus tetap melakukan pendampingan agar sumber belajar dengan sumber digital yang dipergunakan tidak terpengaruh oleh dampak buruk dari kemajuan teknologi. Tugas inilah yang cukup berat karena guru akan mengantarkan peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia.

Indonesia melalui *Working Group on Information Media and Training*, Kelompok Kerja Pelatihan Media dan Informasi ikut serta dalam meningkatkan literasi digital komunitas di Asia Tenggara. Komunitas ASEAN ini bekerja sama menyediakan konten media yang baik untuk media mainstream maupun online, serta membuat program peningkatan literasi informasi untuk seluruh anggota/kelompok masyarakat ASEAN dan kerja sama penanganan hoaks atau *fake news*. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kerja sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Riaz J.P. Saehu, dalam keterangan jumpa pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Antara*: Senin 11 Maret 2021).

Digital Mindset Dunia Pendidikan

“ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya,
karena mereka hidup di zaman mereka bukan di zamanmu, sesungguhnya
mereka hidup di zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian.”

(Ali Bin Abi Thalib)

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah relative tinggi. Peran guru tersebut berkaitan dengan peran serta peserta didik dalam belajar. Guru merupakan factor pertama dan penentu (kunci) keberhasilan pembelajaran juga keberhasilan implementasi kebijakan, usaha-usaha inovatif, atau demokratisasi pendidikan.

Tugas utama guru adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan memonitoring serta mengevaluasi pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu perlu adanya revolusi mental atau pola pemikiran (*mindset*) di sekolah, pembelajaran harus dimaknai dengan penataan lingkungan agar terjadi perubahan perilaku sebagai hasil belajar pada peserta didik. Guru yang melek digital memegang peran penting sebagai konsultan membantu peserta didik dalam memperoleh berbagai informasi. Peran guru dalam pembelajaran era digital adalah guru sebagai pendidik (*educator*), pengajar (*instruktur*), mediator, fasilitator, motivator, peneliti, demonstrator, pengelola kelas, sumber belajar, pemimpin, pendorong krestifitas, orang tua dan teladan, pembawa cerita, emancipator dan sebagai evaluator.

Spirit atau ruh guru lebih sangat penting perannya dalam pembelajaran. *Ath-thoriqatu ahammu minal maddah, Wal mudarris ahammu minat thoriqah. Wa ma ahammu minal mudarris. Ruhul mudarris ahmmu min mudarris binafsihi.* Lebih kurang maknanya: metode itu lebih penting daripada materi. Tapi guru lebih penting daripada metodenya. Lalu apa yang lebih penting dari seorang guru? Jiwa guru lebih penting dari pada guru itu sendiri. Dengan demikian dalam melakukan transformasi tidak hanya tentang masalah teknologi, melainkan pada masalah *mindset* atau pola pikir para pelaku informasi digital. Tetapi bagaimana sikap dan perilaku guru dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu guru harus mampu mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran lainnya sebagai salah satu sarana dalam mempersiapkan materi di kelas.

Prinsip yang harus dipegang oleh guru pada era digital yaitu *al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni "Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik". Artinya seorang guru harus responsive dan adaptif terhadap nilai-nilai baru yang memberikan manfaat.*

Referensi

- Cyber Pedagogy untuk Pembelajaran Abad 21. <https://www.eduprisma.com/2022/04/cyber-pedagogy-pembelajaran-abad-21.html> (diunduh Jum'at, 18 November 2022)
- Cyber Pedagogy wajib dikuasai Guru Era digital. <https://www.kompasiana.com/agustinus13449/629e2054aa3ccd3b5f104a72/cyber-pedagogy-bagi-guru-di-era-digital>. (diunduh Selasa, 6 Desember 2022)
- Undang-undang Noomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru
- Peran Guru di Era Digital Abad 21. <https://www.silabus.web.id/peran-guru-di-era-digital-abad-21/> (diunduh Jum'at 18 November 2022)
- Coronavirus disease (COVID-19) https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (diunduh 5 Desember 2022)
- Nurhabibah & Richardus Eko Indrajit. (2021). *Cyber Pedagogy : Pendampingan Guru yang Tepat di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Cyber pedagogy pembelajaran abad 21. <https://www.eduprisma.com/2022/04/cyber-pedagogy-pembelajaran-abad-21.html>. (diunduh Jum'at, 18 November 2022)
- Cyber Pedagogi, Dambaan Guru dan Dosen Masa Kini, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/319738/cyber-pedagogik-dambaan-guru-dan-dosen-masa-kini>. (diunduh Selasa, 6 Desember 2022)
- <https://www.antaraneews.com/berita/2037582/indonesia-berpartisipasi-dalam-literasi-digital-di-asean> (diunduh 5 Desember 2022)

MU'MINATIN adalah guru di SD Negeri 007 Galang Kota Batam dan salah satu Guru Penggerak angkatan 4 Kota Batam. Ia juga aktif sebagai ketua KKG PAI Kecamatan Galang. Tulisan yang pernah dibuatnya adalah terkait modul yang terintegrasi dengan YouTube, yakni buku antologi VCT 83 Kepulauan Riau. Ia dapat dihubungi via e-mail: muminatin80@gmail.com.

Menumbuhkan Keharmonisan Bangsa Serumpun Melalui Festival dan Platform Sastra Digital ASEAN

Bambang Kariyawan Ys

Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara selalu menarik perhatian bagi negara-negara yang berada di kawasan utara maupun selatan. Menarik karena posisi strategis serta ketersediaan sumber daya alam sekaligus manusia. Sesama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menganggap perlu melakukan kerja sama dengan menjunjung prinsip saling berkebutuhan dan ketergantungan. Perjalanan sejarah panjang di kawasan ini telah membuktikan pernah hidup bersama dalam membangun konsep kekuasaan yang humanis. Mulai dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga Kemaharajaan Melayu. Konsep tersebut kini dilanjutkan dalam bentuk lain yang dituangkan dalam organisasi yang dikenal dengan ASEAN (*Association South of East Asian Nation*). Melalui organisasi ASEAN telah diupayakan terbangun kerja sama yang harmonis di kawasan ini.

Dalam hidup bertetangga sebagai bangsa dan negara yang saling berbatasan di kawasan ASEAN masih ditemukan beragam benturan dan friksi karena perbedaan persepsi dan kepentingan. Jika semua bangsa-bangsa di kawasan ASEAN menyadari arti penting budaya dan kehidupan sosial sebagai pilar utama pemersatu, maka permasalahan-permasalahan tidak akan terjadi. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi mendorong percepatan arus informasi dan dunia mengalami perubahan lingkungan sosial menuju globalisasi. Pergantian generasi ke generasi terus berlanjut dan tidak bisa dihindari terjadinya evolusi karakter yang berpengaruh langsung pada cara pandang mereka dalam melihat hubungan sosial budaya antar masyarakat serumpun ASEAN yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Dalam beberapa kasus dapat kita lihat berupa klaim teritorial, klaim budaya, klaim perbatasan dan konflik-konflik kecil lainnya. Bila kondisi ini tidak diselesaikan dengan bijak melalui organisasi maka bisa saja berlanjut pada pecahnya kestabilan kawasan. Hal ini sangat kita tidak harapkan sebagai kawasan yang strategis yang dianggap mampu menopang berbagai aspek kehidupan di belahan utara dan selatan di permukaan bumi ini.

Banyak negara di muka bumi ini melakukan kegiatan kerja sama melalui berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang kebudayaan, ada yang dikelola oleh organisasi dunia seperti UNESCO dan ada pula yang bersifat bilateral antar dua negara, bahkan ada yang terjalin antar individu atau kelompok dari berbagai belahan umat di muka bumi ini. Kegiatan yang dilakukan cenderung bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan masing-masing negara dan terjalinnya keharmonisan sesama bangsa. Dalam bidang kebudayaan ASEAN telah menjalin kebersamaan sejak awal berdiri hingga ini melalui berbagai forum kebudayaan.

Keharmonisan Budaya Bangsa Serumpun

Jalanan kerja sama budaya juga terjadi di negara-negara serumpun. Istilah bangsa serumpun dikenal untuk kawasan Asia Tenggara. Bangsa serumpun telah dikenal sebagai bangsa yang mengedepankan prinsip kerja sama. Bukti keharmonisan itu dengan terbangunnya secara kelembagaan melalui ASEAN.

Kerja sama budaya merupakan bentuk lain dari proses diplomasi budaya. Diplomasi budaya adalah contoh utama dari *soft power* (Gienow-Hecht, 2010: 21). Diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi militer; kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta ide; dan tidak melalui kekerasan dengan menggunakan kapabilitas militer, politik, maupun ekonomi. Walaupun diplomasi budaya tidak dapat diukur secara kuantitatif, diplomasi budaya dapat berlangsung di kawasan

ASEAN, di mana kekuatan tersebar ke seluruh negara-negara di kawasan ASEAN dan saling ketergantungan sebagai etos kerjanya.

Kerjasama budaya ada yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral. Pertukaran pelajar, kependuan, dan atraksi seni budaya merupakan program yang telah kita kenal secara umum. Kita pernah mengenal acara Titian Muhibah, Festival Lagu ASEAN, Kemah ASEAN, dan yang lagi populer Akademi Dangdut oleh Indosiar dengan menghadirkan juri dan kontestan dari kawasan ASEAN merupakan wujud nyata ingin maju bersama lewat budaya.

Program lain yang telah berlangsung lewat karya sastra berupa puisi, banyak even yang dibuat untuk mempertemukan penyair-penyair dari kawasan serumpun ini. Beberapa agenda yang pernah tercatat antara lain: Festival Sastra Internasional Gunung Bintang di Tanjung Pinang, Senandung Tanah Merah di Singapura, Nusantara Melayu Raya di Kuala Lumpur, Temu Penyair Nusantara dan lain-lain. Even-even tersebut menarik untuk merajut kekuatan Melayu dalam membangun kawasan bangsa serumpun. Dalam bidang kebudayaan ASEAN memiliki program mempertemukan ragam perbedaan budaya dalam forum dan festival. Secara khusus salah satu program yang ada diwujudkan dengan kegiatan pertemuan sastra tingkat ASEAN yang dikenal dengan Festival Literasi ASEAN.

Muara dari kegiatan yang dijalin melalui kebudayaan adalah untuk memperkuat integrasi ASEAN dan menciptakan komunitas masyarakat yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rakotomalala H. Stehanie dalam jurnal berjudul ASEAN Sosio-Cultural Community: Membangun Integrasi Budaya dan *Sense of Community* Masyarakat Asia Tenggara (2017) integrasi ASEAN menciptakan rasa kebersamaan dan komunitas yang bebas di mana masyarakat saling peduli dan berbagi, merasa aman, juga bisa menyatu satu sama lain.

Festival Sastra ASEAN

Kegiatan membangun keharmonisan melalui sastra telah dibangun bersama oleh ASEAN secara berkesinambungan. Kegiatan yang telah dilakukan berupa ASEAN Literacy Festival (ALF). ALF mendorong kesadaran perlunya usaha bersama di kawasan ini untuk mempromosikan karya sastra penulis Asia Tenggara ke dunia internasional. Kegiatan utama ALF yang dilakukan berupa Sastra Masuk Kampung, residensi, dan Jambore Nasional Sastra. Dalam utama tersebut dirinci dalam bentuk pelatihan pembacaan puisi, penulisan, teater, dan seni, musikalisasi puisi, pelatihan menulis, pelatihan reportase, hingga cerdas cermat sastra dan buku. Dari kegiatan yang berlangsung memang selalu antusias diikuti oleh peserta yang terlibat. Namun bila dievaluasi berapa besar jangkauan kepesertaan yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Festival Sastra Digital ASEAN

Festival sastra yang melingkup negeri serumpun yang telah dan pernah berlangsung cenderung dihadiri para penulis, penyair, dan sastrawan semata. Proses berinteraksi dan saling tukar pengalaman hanya selingkup kecil individu dan komunitas. Dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi terkhusus pasca Covid-19 maka festival sastra yang telah berlangsung dapat diperluas jangkauannya dengan memanfaatkan teknologi piranti digital.

Sejalan dengan itu perkembangan teknologi menyebabkan munculnya variasi dan ragam aktivitas. Muncul istilah sastra digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan media sastra sebagai wadah pertemuan untuk memperkuat kerjasama. Sastra digital merupakan sebuah aktivitas berbahasa dalam bentuk tulisan yang berwujud digital yang memanfaatkan teknologi sebagai mediana, misalnya seperti handphone, komputer, internet dan lainnya. Sastra digital memanfaatkan kemampuan dan kemajuan teknologi komunikasi sebagai sarana dan prasarana berkarya.

Kepesertaan festival sastra digital dapat dilakukan secara kombinasi luar jaringan dan dalam jaringan. Tujuannya akan menjangkau banyak kepesertaan dalam kegiatan tersebut sehingga jalinan silaturahmi antar peserta yang hadir dan mewakili negaranya akan lebih berkesan. Rangkaian acara festival sastra digital ASEAN dapat berupa bincang sastra melalui piranti digital, peluncuran karya sastra bersama, pelatihan kepenulisan kreatif, musikalisasi puisi, apresiasi tokoh sastra dan beragam kompetisi digital yang dapat mengikat tali kebersamaan. Selain itu pelibatan anggota klub literasi sekolah se-Asia Tenggara melalui beragam kegiatan berbasis digital sastra. Teknologi digital dengan perkembangan

inovasinya telah mampu mendekatkan jarak, sehingga meskipun tidak bertemu secara fisik, esensi dan tujuan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan sebagai bangsa serumpun takkan hilang.

Platform Digital Sastra ASEAN

Dunia terus bergerak menuju perkembangan tanpa batas. Pada era digital, kita “dipaksa” untuk menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Memasuki era digital dan keterbukaan informasi, perkembangan teknologi berdampak besar pada kehidupan manusia. Jarak dan waktu tidak lagi membatasi seseorang dalam menyampaikan maupun mendapatkan informasi. Saat ini capaian informasi dapat diakses dalam genggaman melalui *android*.

Proses mengenal antarbangsa di kawasan ASEAN dapat didekatkan dengan menggunakan platform sastra digital ASEAN. Dari rangkaian kegiatan Festival Sastra ASEAN dapat dilanjutkan oleh Komisi Kebudayaan ASEAN dalam mengelola platform digital sastra ASEAN. Platform ini dapat menjadi rujukan tentang perkembangan sastra di kawasan ASEAN. Kontennya dapat berisikan bilik-bilik perkembangan sastra setiap negara di kawasan ASEAN, tokoh-tokoh sastra, karya-karya sastra dengan berbagai genrenya yang ditulis melalui berbagai aplikasi seperti Wattpad, Webtoon, Joylada, dan lainnya, kegiatan sastra secara daring, dan segala hal yang berhubungan dengan sastra ASEAN.

Platform sastra digital ASEAN akan menjadi bahan kajian akademik sekaligus pusat informasi merawat peradaban bangsa serumpun melalui sastra. Perlu pengelola secara khusus di Sekretariat ASEAN Komisi/Bidang Kebudayaan secara berkelanjutan seiring berkembangnya sastra dari waktu ke waktu.

Epilog

Kawasan ASEAN merupakan kawasan warisan peradaban dunia. Kawasan yang telah dikenal sebagai bangsa-bangsa yang selalu menginginkan jalinan harmonis antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kebudayaan merupakan salah satu pintu yang mampu mewujudkan tujuan baik tersebut. Secara spesifik jalinan lintas waktu dapat terus diperkokoh melalui festival dan platform sastra digital ASEAN.

Semua kerangka kerja sama budaya dapat dibawa ke arah yang lebih besar dalam naungan ASEAN. Hal ini juga menjadi tantangan bagi ASEAN pada masa depan. Bagi ASEAN, penanganan atas situasi dan kompleksitas permasalahan global dan regional merupakan tantangan yang mensyaratkan inovasi dan kreativitas baru dari aspek dan diplomasi budaya.*

Referensi

- Bambang B. Sulistiyono. (2017). “Merajut Asa Dalam: Kekerabatan dan Kerjasama Sosial Budaya Khas Bangsa-Bangsa ASEAN”. *Jurnal M-Progress*. Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Dalam International Conference on the Three Pillars of ASEAN Community Development, 3-4 October 2017.
- Dea Nur Zuraidah dkk. (2021). “Menelidik Platform Digital dalam Teknologi Bahasa Pemrograman”. *Teknois*. Volume 11 Number 2 November 2021, hlm. 1-6.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/107977/alf-2017-merayakan-50-tahun-asean-lewat-festival-sastra>, diakses tanggal 20/11/2022.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/29/190000469/manfaat-kerja-sama-sosial-budaya-bagi-negara-asean?page=all>, diakses tanggal 4/12/2022.
- Jessica C.E Gienow – Hecht. (2010). “What are Searching for: Culture, Diplomacy, Agents, and the State”, *Searching for A Cultural Diplomacy*: New York: Berghann Books
- Sekar Ayuni Diah Pertiwi dan Rianna Wati. (2022). “Maraknya Platform Sastra Cyber Berdampak Terhadap Dunia Literasi di Indonesia”. *Jurnal Literasi*. Volume 6, Nomor 1, April 2022. hlm. 2.

BAMBANG KARIYAWAN Ys aktif dalam organisasi kepenulisan Forum Lingkar Pena (FLP Riau) sejak 2006. Beberapa prestasi kesusasteraan yang pernah diraih antara lain Penghargaan Tokoh Bahasa dan Sastra dari Balai Bahasa Provinsi

Riau (2021), Penghargaan Acarya Sastra untuk Pendidik dari Kemendikbud (2019), Ubud Writers and Readers Festival (2014) dan Penerima Anugerah Kebudayaan “Sagang” (2011). Selain berkarya juga aktif dalam even-even sastra seperti Festival Sastra Internasional Gunung Bintang di Tanjung Pinang (2022), Nusantara Melayu Raya (NUMERA) di Kuala Lumpur (2017), Peluncuran Buku se-Asia Tenggara “Senandung Tanah Merah” di Singapura (2016), Penulisan Skenario Film di Nusa Dua Bali (2016), dan lain-lain. Ia dapat dihubungi di email: bkariyawan090571@gmail.com.

Mencegah Kekerasan terhadap Anak di ASEAN

Fathnuryati Hidayah

Pendahuluan

Tiada hari berlalu tanpa adanya berita kekerasan di belahan dunia manapun. Pertanda kekerasan belum dapat dihilangkan sampai saat ini. Data kekerasan di Indonesia melalui SIMFONI PPA menunjukkan bahwa tahun 2022, 23.549 jumlah kasus yang masuk dan 21.418 atau 90,95% korbannya adalah perempuan. Lebih lanjut korban usia 13-17 tahun di jenjang pendidikan menengah yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Menariknya lagi bahwa kekerasan yang paling tinggi terjadi di rumah. Fakta menarik ini menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan. Karena bisa jadi mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan telah dikategorikan dalam kekerasan.

Definisi kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak. Kekerasan dapat dibagi menjadi kekerasan fisik dan kekerasan non fisik baik itu verbal maupun psikis. Bentuk kekerasan bermacam-macam. Salah satunya adalah perundungan atau *bullying*.

Perilaku yang dikategorikan perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok lain atas ketimpangan relasi kuasa secara berulang atau terus menerus. Jika perilaku perundungan tidak dihentikan, maka dapat menjadi tradisi yang terus berlanjut dan membahayakan bagi peserta didik. Ciri perilaku perundungan adalah adanya perilaku agresif yang tidak diinginkan dengan tujuan menyakiti, ketimpangan relasi kuasa antara peserta didik yang melakukan perundungan dan yang dirundung, dan terjadi berulang-ulang.

Perundungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: 1). Perundungan Fisik adalah perilaku menyakiti seseorang secara fisik. Misalnya, memukul, menendang, menjepit, meludah, menyenggol, mendorong, menyembunyikan, atau mengambil barang seseorang, termasuk memperlihatkan bahasa tubuh atau isyarat tangan yang mengejek atau menghina seseorang; 2). Perundungan Verbal yaitu perilaku mengatakan atau menuliskan sesuatu yang memalukan. Misalnya, mengejek, menghina nama panggilan, komentar berbau seksual yang tidak pantas, mencela, mencemooh, dan mengancam; 3). Perundungan Sosial, sering juga disebut perundungan relasional, adalah perilaku merusak reputasi atau hubungan seseorang.

Misalnya, meninggalkan seseorang atau mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok, mengatakan kepada teman untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip, memermalukan seseorang di depan public; 4). Cyberbullying adalah perilaku yang menggunakan media sosial, email, telepon genggam, webcam, pesan singkat, situs internet, untuk mengirimkan pesan yang mengejek, menyebarkan gosip, dan gambar atau video yang memalukan mengenai pengalaman atau profil seseorang. Cyberbullying ini dapat terjadi selama 24 jam dalam sehari, dikirim tanpa menggunakan nama dan disebar kepada masyarakat luas dan sangat susah untuk dihapus ketika telah tersebar.

Kasus perundungan anak menurut data dari United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 2016 Indonesia menempati posisi pertama dengan 84%. Jumlah lebih banyak dibandingkan Vietnam dan Nepal yang sama-sama mencarat 79%, disusul kemudian Kamboja (73%) dan Pakistan (43%). Lebih lanjut pada data perundungan di Indonesia dari Unicef tahun 2017 menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak usia 13-17 tahun pernah mendapatkan pengalaman kekerasan dalam hidupnya. 3 dari 4 anak pernah mendapatkan kekerasan dari teman sebayanya. Kekerasan tersebut antara lain dipukul, merusak barang pribadi, diancam, dipermalukan, dikucilkan, dan menyebar berita bohong.

Jika disandingkan dengan data WHO, 2019, sekitar 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri per tahun, di dunia. Angka bunuh diri lebih tinggi pada usia muda. Di Asia Tenggara, angka bunuh diri tertinggi terdapat di Thailand yaitu 12.9 (per 100.000 populasi), Singapura (7,9), Vietnam (7.0), Malaysia (6.2), Indonesia (3.7), dan Filipina (3.7). Perilaku bunuh diri yang dimaksud adalah ide bunuh diri, rencana bunuh diri, dan tindakan bunuh diri yang dikaitkan juga dengan berbagai gangguan jiwa, seperti depresi. Perundungan dan tekanan yang berlebihan dapat mendorong untuk melakukan perilaku bunuh diri.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pihak terkait untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Pembiaran akan menimbulkan dampak yang lebih parah dan meluas. Oleh karenanya diperlukan gerakan yang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga, lintas pemerintah daerah, lintas mitra pembangunan, bahkan lintas negara untuk bersama-sama menyuarakan pencegahan kekerasan untuk mewujudkan lingkungan global ASEAN yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Tumbuh Kembang

Usia 13-17 tahun adalah usia anak untuk tumbuh kembang di jenjang pendidikan menengah. Faktanya mereka adalah kelompok usia yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Setiap harinya mereka lebih lama berada di sekolah pada waktu produktifnya, daripada di rumah. Khususnya juga pada beberapa sekolah yang menerapkan *fullday school*. Oleh karenanya lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sangatlah diharapkan dapat terwujud di sekolah.

Sekolah ramah anak (SRA) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di sekolah. SRA dapat dimaknai sebagai satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar anak, terdiri dari kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, partisipasi anak, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta pengelolaan yang baik.

Konsep SRA berusaha untuk mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak serta dapat memberikan keteladanan dalam keseharian. Selain itu juga memastikan bahwa semua unsur di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak dan terlibat aktif dalam di dalamnya. Komponen yang harus dipenuhi SRA yaitu kebijakan SRA merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA; pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan SRA minimal ada dua orang pendidik/tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA; proses belajar yang ramah anak menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan; sarana dan prasarana ramah anak memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan anak; partisipasi anak anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA, serta melibatkan orangtua, organisasi kemasyarakatan, dunia usia, stakeholder lain dan alumni dalam mendukung SRA. Kondisi akhir yang diharapkan sekolah menjadi Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman dan Nyaman.

Selaras dengan SRA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi bekerjasama dengan Unicef sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebijakan merdeka belajar telah mengembangkan beberapa program perlindungan anak diantaranya edukasi Pendidikan Ketrampilan Hidup (PKH) untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Program Roots untuk peserta didik dan Disiplin Positif untuk menggerakkan sekolah.

Pada dasarnya pendidikan yang lengkap membutuhkan tiga jenis keterampilan, yaitu: keterampilan akademik sehingga kita dapat memahami konsep literasi dan numerasi; keterampilan penghidupan sehingga kita dapat menguasai tugas-tugas praktis seperti menjahit, pertanian dan pertukangan; dan keterampilan hidup sehingga kita dapat memahami diri kita sendiri, orang lain dan dunia tempat kita. PKH menekankan pada keterampilan yang membantu kita mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk menjalin hubungan, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan dan bekerja sama dengan orang lain. Dikemas dalam modul yang berisikan tentang mengenal diri, membentuk kebiasaan sehat, mengembangkan hubungan yang saling menghormati, menciptakan dunia yang lebih baik dan melakukan aksi.

Satu hal yang membedakan kelas ini dengan kelas lainnya adalah kelas yang menyenangkan karena akan melakukan berbagai kegiatan seperti bermain peran, bermain games (permainan) dan hal-hal menyenangkan lainnya; belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya dengan tema yang relevan di dunia nyata; peserta didik-siswi adalah pihak yang mengetahui segalanya oleh karena itu, penting untuk berbicara dan berbagi tentang apa yang kamu ketahui dengan peserta didik-siswi lainnya; tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin selama kelas berlangsung. PKH ini dapat diakses pada Platform Merdeka Belajar terbagi atas modul guru dan modul peserta didik.

Program Roots adalah program pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran peserta didik sebagai Agen Berpengaruh atau Agen Perubahan. Penggunaan jaringan sosial peserta didik untuk memilih rekan-rekan mereka yang dapat 'didengar' dan 'berpengaruh', serta mengurangi pemilihan peserta didik yang dianggap 'baik' atau 'berprestasi'. Beberapa peserta didik yang dipilih/terpilih bisa jadi adalah peserta didik yang sering terlibat konflik, tapi yang terpenting adalah, perilaku seperti ini dapat menjadi pembelajaran yang dapat dilihat bersama. Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebanyak 30 sampai 40 peserta didik pada tiap satu sekolah akan dipilih untuk berpartisipasi dalam program roots. Mereka akan mengikuti 15 sesi pelatihan dengan materi pengenalan program, meningkatkan rasa percaya dalam kelompok sebaya, mengenal bullying, kepemimpinan dan komunikasi efektif, melihat dari perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat, memberikan respon terhadap konflik, membuat perubahan perilaku secara positif, mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah pencegahan kekerasan, mengembangkan dan mempraktikkan permainan peran berdasarkan observasi peserta didik terhadap perilaku bullying di sekolah. Mereka juga membuat aksi yang melibatkan seluruh peserta didik, merancang aktivitas, menyusun dan memperkuat pesan (melalui hastag) serta mempersiapkan aktivitas roots di sekolah, pelaksanaan aktivitas roots di sekolah, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk kesinambungan program karena setiap tahun akan ada peserta didik yang lulus dan peserta didik baru.

Gerakan Disiplin Positif Untuk Merdeka Belajar menggunakan pendekatan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik dan membina yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Sehingga, peserta didik dapat mengontrol perilakunya sendiri karena pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan perilakunya sebagai perwujudan menghormati diri sendiri dan orang lain. Pendekatan ini melengkapi program pendukung untuk menghapuskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. Materi yang disampaikan sejumlah 13 sesi yang dapat disiplin positif.

Jika ditelaah dari beberapa program tersebut, pada dasarnya adalah bagaimana memberikan bekal ketrampilan hidup pada anak untuk dapat menghadapi fakta yang terjadi di dunia nyata. Pada prinsipnya kita tidak dapat menyalahkan lingkungan atas kejadian apa pun yang terjadi pada kita. Respon kitalah yang akan menentukan langkah selanjutnya. Bekal keterampilan hidup tadi akan mengasah respon kita untuk menghadapi segala sesuatunya lebih tepat dan bijak.

Kedua, bersama berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman nyaman dan menyenangkan. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri. Berlapis seperti halnya lapisan pada pohon. Utamanya dimulai dari keluarga inti, sekolah, masyarakat, negara dan lintas negara. Edukasi ke masyarakat yang sepertinya perlu untuk ditingkatkan. Strategi komunikasi massa yang tepat agar isu pencegahan kekerasan ini dapat 'viral' di berbagai media. Sehingga mau tidak mau akan menjadi pemantik perhatian masyarakat untuk bersama mencegah kekerasan.

Ketiga, harapan besar pada peserta didik sebagai agen pencegahan perundungan, tidak sebatas pada agen perubahan pada lingkungan sekolah tetapi lebih luas cakupannya dari pada itu untuk mengedukasi masyarakat yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga inti. Peserta didik juga dapat sebagai duta pencegahan kekerasan lintas negara. Karena dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memungkinkan informasi dapat tersampaikan dalam hitungan detik. Kampanye dari para pesohor seperti artis, influencer, youtuber, dan sosok lainnya yang memiliki pengaruh luas seperti ulama dan tokoh agama yang menyampaikan pesan pencegahan kekerasan akan memiliki dampak yang luas. Apalagi jika dilakukan bersama lintas negara. Karena fenomena yang terjadi saat ini, musik

dan film sudah menjadi industri yang tanpa batas negeri. Sehingga artis dan idol di luar negeri pun memiliki penggemar yang tidak terbatas antar lintas negara.

Saya sangat mendukung dengan adanya ASEAN Children's Forum (ACF) tahun 2022 di Manado, Indonesia dengan mengangkat tema "Membangun Ketahanan Digital untuk Anak-anak ASEAN." Perwakilan delegasi anak ASEAN turut hadir dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Adapun Suara Anak ASEAN Tahun 2022, yakni menyerukan kepada semua anak untuk bersuara guna meningkatkan kesadaran akan keamanan digital dan membantu masyarakat yang terpinggirkan untuk memiliki akses terhadap literasi digital dan mendorong para orang tua dan wali untuk berkolaborasi dengan guru dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengedukasi anak terkait literasi digital. Selain itu, adalah mendorong sekolah untuk aktif menerapkan pembelajaran digital dan meningkatkan kapasitas guru; mendorong masyarakat untuk membantu penggalangan dana dan mempromosikan kampanye terkait literasi digital; mendorong pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas internet bagi masyarakat di daerah terpencil, dan meminta dukungan dari pemerintah untuk memastikan pendidikan dan transformasi digital yang setara.

Forum tersebut juga meminta pemerintah agar lebih banyak membangun mekanisme yang layak untuk mempromosikan partisipasi dan ketahanan digital bagi semua anak agar memungkinkan mereka memainkan peran aktif dalam menjadikan kawasan ini sebagai Episentrum Pertumbuhan dan mengusulkan sekolah untuk mengatur kegiatan dan membuat platform untuk meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan digital dan meminta perusahaan digital untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan digital abad ke-21 bagi peserta didik dan guru.

Hal esensial dalam forum itu juga adalah pentingnya menyadari tanggung jawab orang tua dan wali untuk mendukung, membimbing, dan mengawasi anak-anak mereka ketika anak-anak menggunakan internet dan untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya. Kemudian, meminta pemerintah untuk menyediakan regulasi tentang kurikulum literasi digital di semua jenjang pendidikan terkait penegakan hukum dan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan online. Meminta pemerintah untuk membuat hotline yang aman dan dapat diakses untuk melaporkan eksploitasi dan pelecehan online kepada anak-anak.

Hal lainnya adalah mendorong pemerintah untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi semua aktor dan pemangku kepentingan terkait keamanan digital, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan digital bagi semua anak; mengusulkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menciptakan kemitraan yang lebih strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengadvokasi, menyebarluaskan, dan mengkampanyekan keselamatan dan keamanan digital untuk semua anak dan untuk menawarkan dukungan bagi korban penyalahgunaan dan eksploitasi online. Kemudian, mendesak perusahaan swasta untuk memastikan keamanan digital dengan memperkuat sistem perlindungan anak dan mempekerjakan pakar digital dengan memberikan upah dan remunerasi yang layak.

Kemudian, menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk mengedukasi pelanggan dengan memberikan informasi yang ramah pengguna dan detail yang memadai terkait keamanan digital mereka. Satu hal yang penting juga adalah mendesak orang tua dan wali untuk berkomitmen dalam pengasuhan yang baik dan memperhatikan kebutuhan belajar dan perkembangan anak-anaknya. Selain itu, mengimbau para orang tua untuk memelihara dan menjaga komunikasi dan interaksi yang sehat dengan anak-anaknya, serta mengikuti program pengasuhan digital terkait keamanan dan keselamatan digital. Suara para anak se-ASEAN sangatlah komprehensif didasari dengan keprihatinan atas kondisi kekerasan yang terjadi di hampir seluruh dunia.

Konklusi

Keprihatinan atas kondisi masih terjadinya tindakan kekerasan di Indonesia dan lingkungan ASEAN secara luas perlu diambil langkah tindakan berkelanjutan yaitu dengan menjadikannya sebagai gerakan bersama dengan melakukan kampanye lintas negara bersama generasi muda sebagai agen perubahan dan para pesohor untuk menyuarakan pencegahan kekerasan dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulailah sekarang. *

Referensi

J. H. Souisa dkk (2022). *Disiplin Positif Untuk Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Kiri Dicker dkk (2021). *Panduan Kerja Siswa Pendidikan Keterampilan Hidup: Untuk Siswa Siswi SMP dan SMA/SMK Edisi Revisi Juli 2021, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lenny N Rosalin dkk (2020). *Pedoman Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Puspeka (2020). *Program Roots Pencegahan Perundungan (Bullying): Panduan Fasilitator di SMA/K*. Jakarta: Kemendikbudristek
- SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)
- Indonesia Tempati Posisi Tertinggi Perundungan di ASEAN (sindonews.com)
- Bullying Revisi 3.cdr (unicef.org)
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (kemkes.go.id)
- 14 Butir Seruan Forum Anak ASEAN, Pemerintah dan Pengusaha Diminta Hadirkan Keamanan Digital Ramah Anak dan Memastikan Kesetaraan Pendidikan (kemdikbud.go.id)

FATHNURYATI HIDAYAH telah 15 tahun menjadi abdi negara di Direktorat SMA, Kemendikbudristek. Ia bercita-cita memajukan pendidikan di Indonesia, yakni pendidikan berkualitas milik semua dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ia menempuh Pendidikan S1 Manajemen di Universitas Diponegoro, S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang, dan studi lanjut di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini, ia tertarik pada ilmu pengembangan diri. Mengikuti beberapa pelatihan pengembangan diri. Bersama Better Mind, ia menulis buku ontologi berjudul *Mind inspiration for better life dan mind inspiration for grateful life*. Turut berperan serta aktif dalam penulisan beberapa buku edukasi seperti *Pengelolaan UKS di SMA, Peta Jalan UKS SMA, Duta UKS SMA, Rumahku Sekolah Sehatku: Peran UKS dalam Kehidupan Sekolah yang Sehat Bagi Peserta Didik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat: Panduan di Masa Kebiasaan Baru, Habitiasi Ramah Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan Disiplin Positif Untuk Merdeka Belajar*.

Membumikan Nilai Kebhinekaan dan Mereduksi Intoleransi di ASEAN

Budiarto Suselmen

Pada tahun 2023 Indonesia adalah Ketua ASEAN yang memainkan peranan penting setelah menjadi Presidensi G20 tahun 2022. Dua posisi strategis tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berdampak bagi kawasan. dalam konteks ASEAN, Indonesia akan memimpin rangkaian kegiatan KTT ASEAN dan yang terkait dan dipastikan muaranya untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN serta memperkokoh internal dan mitra eksternal ASEAN.

ASEAN terdiri dari negara-negara Asia bagian tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina serta terbaru Timor Leste bergabung, ini merupakan bangsa-bangsa yang terkenal sebagai bangsa-bangsa yang mempunyai jati diri dan sikap toleransi, gotong royong, berkeadilan dalam prinsip kebhinekaan (Bhinneka Tunggal Ika: berbeda-beda tetapi tetap satu).

Asosiasi bangsa-bangsa ini mempunyai kekayaan besar, berbagai macam ras, suku, agama dengan kekayaan sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Kondisi geografis dan sosiologis seyogyanya mampu membawa kearah persamaan visi untuk menghadapi tantangan global dan umenciptakan masyarakat ASEAN yang maju, adil, makmur, dan sejahtera.

Khusus keadaan sosiologis ASEAN, realitanya masih banyak kasus dimasyarakat akan kurangnya penghayatan sikap toleransi dan saling menghargai sesama manusia dalam interaksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak ditemukan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat mengarah pada tindakan diskriminasi atau membeda-bedakan. Pada akhir masa pandemi Covid-19 di ASEAN terus mengalami turbulensi di berbagai sendi-sendi kehidupan baik pada sektor ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan dan di dunia kesehatan itu sendiri.

Kebijakan pembatasan sosial yang membatasi ruang gerak manusia sangat memberikan dampak interaksi kehidupan sosial budaya masyarakat, mulai dari sosial distancing, pembatasan ruang peribadahan, pembatasan kegiatan keyakinan, pembatasan kegiatan kearifan lokal dan lain sebagainya. Nilai-nilai Kebhinekaan dan gotong royong yang sudah melekat di masyarakat tengah diuji dengan kondisi-kondisi yang dinamis dan penuh ketidakpastian, sehingga makna dalam interaksi sosial saat ini kurang membumi karena hanya dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Kemudian dalam perspektif ekonomi mengakibatkan beban negara yang semakin berat yang mengharuskan kita mendesain ulang prioritas pembangunan nasional dan tujuan ASEAN. Bagi masyarakat dan pemerintah mempunyai tantangan tersendiri, adanya berita hoaks, saling menghina dan mendiskreditkan suatu kelompok, PHK, Kejahatan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri, perdagangan anak dan perempuan serta sehingga sangat berdampak terhadap hubungan antarnegara di ASEAN.

Banyaknya berita hoaks terkait Covid-19 juga menjadikan *Conflict of interest* dimasyarakat, hal ini juga berdampak munculnya adanya politik identitas dengan isu SARA. Sebagai contoh, laporan Wahid Foundation berjudul "Kemajuan tanpa Penyelesaian Akar Masalah" yang menyebutkan tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) antara tahun 2018 hingga 2019. Wahid Foundation mencatat sedikitnya telah terjadi tindak pelanggaran KBB sebesar 276 kasus di tahun 2018. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019, sebanyak 215 kasus (Wahid Foundation, 2020: 4). Lebih lanjut, di Indonesia khususnya ada Kidung Asmara Sigit. Ismail Hasani juga menambahkan bahwa peningkatan kasus dan peristiwa KBB terjadi yang ditandai dengan maraknya penyebaran *hoax*, radikalisme, dan politik identitas sebagai faktor utama melemahnya nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* di Kawasan ASEAN.

Dampak Covid-19 tidak hanya pada sektor kesehatan melainkan juga mempengaruhi pada aspek sosial budaya, ekonomi, politik dan stabilitas negara. Kondisi pandemi covid 19 merupakan bagian dari dinamika global yang harus direspon demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat kebhinekaan mesti digaungkan agar masyarakat memiliki keyakinan diri bahwa kita semua adalah satu nusa satu bangsa dan satu bahasa. Bahwa implementasi nilai-nilai kebhinekaan di semua negara-negara ASEAN dan khusus Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dengan bekerjasama melibatkan pentahelix yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, *civil society* dan media masa.

Penyalahgunaan kemajuan IPTEK (Medos) yang mengancam nilai-nilai kebhinekaan sebaiknya segera ditanggulangi melalui tindakan nyata mulai dari diri sendiri, kelompok maupun Lembaga dengan memberikan kontra berita hoaks atau penetrasi narasi untuk mencerahkan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk segera dilaksanakan dalam tempo yang cepat agar masyarakat tidak mengalami degradasi informasi yang jika dibiarkan akan dapat mengganggu kebhinekaan. Pada tataran *grass roots* perlu adanya keteladanan dari taraf individu, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk selalu menggaungkan nilai-nilai kebhinekaan disetiap kegiatan sosial.

Beberapa kasus di atas sebagai akibat Covid-19 menjadi tantangan kita bersama dalam membumikan nilai-nilai kebhinekaan. Sifat pandemi yang mengglobal dan berdampak pada semua sendi kehidupan masyarakat harus diselesaikan secara kolektif dengan melibatkan pentahelix. Masyarakat sebagai individu juga diharapkan dapat ikut andil dalam bergotong royong untuk mengatasi permasalahan bangsa melalui implementasi nilai-nilai Toleransi, gotong royong dan berkeadilan. Upaya nyata yang dapat kita lakukan seperti: memberikan dorongan kepada masyarakat sekitar melalui program "JOGO TONGGO" dalam memulihkan pendapatan warga setempat mulai dari belanja di warung tetangga, memberdayakan UKM tetangga dan lain sebagainya. Pada aspek media sosial sebagai agen perubahan seyogyanya dapat menjadi penetrasi berita hoaks, disinformasi, ujaran kebencian yang beredar di media Whatsapp, Facebook, twitter, IG dan semacamnya.

Generasi muda merupakan asset sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga kita sebagai agen perubahan tentunya harus dapat menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai kebhinekaan dari tataran unit terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.

Faktor Berpengaruh terhadap Kebhinekaan

Berdasarkan kondisi toleransi, keadilan, dan gotong-royong diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* di masa pandemi adalah sebagai berikut. *Pertama*, sikap pro dan kontrak individu terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 menyebabkan kesenjangan paradigma antara masyarakat. Di satu sisi, pro dan kontrak yang hadir di tengah penyebaran covid-19 tidak lepas dari perkembangan pemberitaan yang bersifat masif, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia tidak mengkaji dan menelaah kebenaran informasi yang ada, sebagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sedikitnya terdapat 4.163 isu hoaks selama pandemi covid-19, meliputi; 3. 523 Facebook, 554 Twitter, 49 Youtube, 35 Instagram, dan 2 Tik Tok. Penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat yang menghadirkan berbagai reaksi yang berbeda dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan sukar menerima berbagai pandangan yang berlawanan dengan pengetahuannya.

Kedua, meningkatnya aktivitas penggunaan media sosial dalam masyarakat selama pandemi covid-19, terutama oleh generasi muda. Pengguna internet di Indonesia meningkat drastis, dari sekitar 175 juta sebelum pandemi, menjadi sekitar 210 juta pada tahun 2022. Perkembangan ini menjadi salah satu permasalahan baru, yang mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial di masyarakat, sehingga nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin menurun seiring meningkatnya penggunaan sosial media di masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan sosial media juga banyak berdampak positif jika digunakan dengan benar dan digunakan secara baik, seperti untuk sarana kreatif, pembelajaran maupun mencari informasi yang bermanfaat. Internet juga dapat menjadi sarana komunikasi jarak jauh yang handal. Salah satu contoh munculnya fenomena kebiasaan gotong-royong dengan cara baru melalui media sosial, seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk beberapa warga yang terpapar Covid-19, saling memberikan semangat, saling memberikan informasi terkait fasilitas kesehatan.

Membumikan Nilai Kebhinekaan: Toleransi, Keadilan, dan Gotong-Royong

Proses membumikan nilai toleransi dapat diterapkan melalui proses edukasi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media massa dari berbagai pihak, baik tokoh agama, pemuda, dan penyelenggara negara untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membatasi perkembangan hoaks sebagai faktor utama terjadinya pro dan kontra di tengah kehidupan warga negara Indonesia.

Terkait nilai keadilan, Indonesia menaruh harapan besar pada generasi milenial agar dapat menerapkan nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagaimana pandangan Gubernur Lemhannas bahwa “Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada era internet dengan pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi sebelumnya dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi”, demi mengkaderisasi nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dalam diri para generasi muda.

Adapun penerapan nilai gotong royong harus didukung dengan keterlibatan pentahelix yang terdiri dari Pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, *civil society* dan media masa dalam perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Artinya, kelima unsur di atas diharapkan dapat mempertahankan dan menyejahterakan pelaku usaha UMKM untuk saling bahu-membahu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi.

Di satu sisi, juga diperlukan kebijakan untuk mendukung produksi dan pembelian produk dalam negeri untuk meningkatkan pendapat para pelaku UMKM dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan nilai gotong-royong, berusaha untuk mengembangkan pemerataan perekonomian dan rasa kepedulian dalam diri masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, juga dipahami bahwa diperlukan proses menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dalam diri generasi muda untuk membangun sikap bersosialisasi antara masyarakat negara-negara ASEAN yang tidak sebatas terjadi di dunia virtual. Meskipun, diketahui bahwa keberadaan media sosial adalah keniscayaan, tidak dapat dihindari. Untuk itu diperlukan cara-cara yang dapat mengurangi dampak buruk dari penggunaan media sosial, seperti membatasi penggunaan, menyaring informasi yang beredar, berkomunikasi secara santun dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu diperlukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama generasi muda agar bijak dalam penggunaan media sosial.*

Referensi

- We Are Social (Hootsuite). *Indonesian Digital Report 2020*. <https://andilink/hootsuite-wearesocial-Indonesian-digital-report2020> akses tanggal 05/12/22
- Sunarwan, B. (2015). Aktivitas Komunikasi dan Media Sosial (Survei Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta Melalui Social Network Sites). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 19 (1), 93-106.
- <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/kominfo-temukan-1-819-isu-hoaks-seputar-covid-19/> akses tanggal 05/12/22
- Riana F. (2021). “<https://nasional.tempo.co/read/1449901/riset-setara-pandemi-covid-19-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi>” akses tanggal 05/12/22
- Jati WR (2021). “<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/24/berkembangnya-narasi-intoleran-warganet-selama-pandemi>” akses tanggal 05/12/22
- BPS (2022). “Prilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19”

BUDIARTO SUSELMEN adalah alumni Universitas Halu Oleo, Kendari (2021) dan telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat kerja sama PERADI-IAIN Kendari. Ia juga aktif sebagai peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI/IPI), Pengurus Pusat Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia, Kepala Biru MO Maharaninewstime.com kota Kendari, Humas MO Jejakkasus.id, serta Pegawai Kontrak BLUD Rumah Sakit Konawe (2021-sekarang). Saat ini ia sedang merintis usaha AS Group dan sebagai blogger di <https://artosulawesi.blogspot.com>, mediahaluoleo.blogspot.com. Tulisannya dimuat dalam buku antologi G20 *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Saat ini ia berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat dihubungi di email: artosulawesi@gmail.com.

Rethinking Peace Building Di Kawasan ASEAN

Muhammad Ihsanul Arief

Tantangan Dunia dan Perubahan Sosial Masyarakat ASEAN

Dunia yang saat ini kita huni memiliki keragaman bahasa dan etnis. Menurut Willy Kymlicka (Eddin, 2011:1-2) di dunia ini terdiri atas 600 kelompok bahasa hidup, dan 5000 kelompok etnis, dan beberapa negeri termasuk dalam kelompok etnonasional yang sama. Keanekaragaman tersebut muncul sejumlah "PR" bersama, misal, permasalahan minoritas dan mayoritas yang mengerucut hak berbahasa, tuntutan lahan. Kita lihat kasus di Eropa, gesekan serius mengenai hak kaum imigran, masyarakat asli dan minoritas kultural lainnya merupakan isu-isu yang belum tuntas sampai hari ini. Penyelesaian pemerintah kadang terkesan tarik-ulur, dan berujung muncul di publik berulang kali.

Anggota para negara ASEAN berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen-instrumen ASEAN. Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara-Negara anggota ASEAN. Selain itu komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional serta mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai (Farida, 2018: 58). Hal demikian menunjukkan secara keseluruhan ASEAN komitmen untuk terus merawat perdamaian universal, namun perlu "pengawasan ekstra" agar berjalan maksimal.

ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk menjembatani negara-negara anggota ASEAN dari potensi konflik. Di dalam deklarasi ASEAN dinyatakan bahwa maksud dan tujuan ASEAN salah satunya adalah "Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB" (Kusumah, 2018:256). Tantangan merawat perdamaian yang tidak boleh kita abaikan salah satunya adalah masyarakat ASEAN berstatus multicultural, bahkan sudah terjadi sejak zaman dulu. Kondisi tersebut menuntun pemangku kebijakan "pro aktif" menentukan struktur politik yang dapat memupuk rasa persatuan yang kuat (Adi, 2008:263).

Kita meneliti perubahan sosial masyarakat cenderung sulit hanya menggunakan satu teori. Masyarakat mengalami perubahan yang bersifat elastis, dan inilah letak keunikannya yang terus "update". Perubahan yang telah terjadi berasal dari daya tarik beberapa gerakan sosial di masyarakat. Gerakan sosial yang muncul memiliki "niat" kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, kepentingan kekuasaan, dan mengubah pandangan hidup (Susan, 2009:29). Terdapat tiga aspek yang dapat kita petakan sebagai *theoretical frame* dalam melihat munculnya konflik, kekerasan, terorisme, dan perang yaitu: *material world*, *social world*, dan *cultural-spiritual world* (Rofik, 2011:27). *Material world*, terbagi kepada *natural resources* seperti wilayah teritorial, kekayaan laut, tanah, dan lain-lain. *Industrial resources-economic* yaitu infrastruktur perindustrian, sumber daya energi, kota dan pelabuhan, sumber-sumber finansial (*financial resources*), sumber daya manusia dan lain-lain. *Post-industri* yakni informasi, jaringan kerja computer (*computer network*), ilmu pengetahuan, militerisme dan teknologi. Berikutnya *social world*, ialah persoalan politik internal Negara dan politik antar Negara. Sedangkan *cultural-spiritual world* terkait masalah motivasi yang memicu timbulnya konflik antar budaya, agama dan ideologi (Rofik, 2011:27). Tiga *theoretical frame* bisa kita jadikan sebagai pemetaan dalam meneliti akar konflik, khususnya kawasan ASEAN.

Potensi Konflik Kawasan ASEAN

Kita lihat sejak awal konflik antar negara sudah mewarnai perjalanan awal terbentuknya ASEAN. Bahkan, sampai sekarang konflik antar negara anggota ASEAN juga masih terjadi, misalnya saja konflik antara Vietnam dengan Kamboja,

Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di kawasan. Namun, perlu kita di sisi lain juga, peluang baik bagi ASEAN sebenarnya telah memiliki kekuatan tersendiri untuk menjadi fasilitator mediasi konflik yang baik. Selain itu ASEAN juga memiliki beberapa dokumen perjanjian yang menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik, seperti Deklarasi Bangkok, Deklarasi ASEAN I (*ASEAN Concord*), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), Deklarasi ASEAN II (*Bali Concord*), *ASEAN Charter*, dan *ASEAN Political and Security Community* (APSC) (Indrawan, 2021:173-174).

Kita mengamati pada aspek pokok permasalahan, di ASEAN sering terjadi karena adanya pergeseran kekuatan di dalam politik internasional. Kasus-kasus kejahatan lintas negara antara lain perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan kejahatan siber menurut ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002. Selain itu, permasalahan perbatasan antar negara anggota ASEAN juga masih menjadi polemik yang perlu waktu lama penanganannya. Beberapa permasalahan yang berpotensi konflik bisa kita lacak sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi dan garis perbatasan di pulau Kalimantan (salah satunya mengenai blok Ambalat). Konflik historis juga terjadi antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur. Malaysia juga memiliki konflik dengan Singapura tentang kepemilikan Pulau Batu Putih (Pedra Branca) di Selat Johor. Ketegangan sosial politik laten juga terjadi antara Malaysia dan Thailand di wilayah perbatasan. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei Darussalam mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara-negara ASEAN lainnya juga mengalami sengketa terkait perbatasan kedua negara yaitu Myanmar dan Thailand serta antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah di perairan lepas pantai dari masing-masing negara (Rahman, 2017: 2-3).

Konflik teritorial yang cukup rumit yaitu konflik antara Thailand dan Kamboja yang mana Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Vihear dan akibatnya Thailand harus menarik pasukan militernya maupun para penjaga yang dikerahkan di sekitar kuil atau di sekitar wilayah kedaulatan Kamboja (Saragih, 2021:305-307). Potensi konflik lain kasus Laut Cina Selatan (LCS) terkait klaim tumpang tindih yang melibatkan enam pihak yaitu Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia berdasarkan catatan sejarah maupun UNCLOS (*United Nation on the Law of the Sea*) 1982. Mayoritas negara di dunia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut yang ditetapkan oleh PBB yang dikenal dengan UNCLOS 1982 yang mengatur batas wilayah laut setiap negara. Akhirnya negara-negara ASEAN pun merujuk Konvensi Hukum Laut ini dalam menentukan batas terluar wilayah laut negara (Pudjiastuti, 2016:100).

Langkah Optimis upaya Peace building di ASEAN

Perdamaian sendiri bisa diidentifikasi menjadi dua, *positive peace* dan *negative peace*. *Negative peace* adalah kondisi dimana konflik sudah tidak ada lagi atau rekonsialisasi pasca-konflik sehingga konten-konten konflik sebelumnya masih sangat terasa. Sedangkan *positive peace* adalah kondisi perdamaian yang tidak mengandung unsur konflik sama sekali sehingga kehidupan bernegara berjalan baik. Peace adalah pencapaian yang dapat ditempuh dengan 3 pendekatan yaitu *strategic studies*, *security* dan yang terakhir adalah *conflict resolution* (Yusuf, 2020:19-20).

Proses resolusi konflik pernah dilakukan oleh ASEAN dengan menggunakan pendekatan ASEAN Way. Metode demikian memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif dan bersifat informal. Mekanisme ASEAN Way menitikberatkan pada proses musyawarah dan mufakat. Berbeda dengan ASEAN Way, metode resolusi konflik *Treaty of Amity and Cooperation* atau singkatannya TAC justru bersifat formal, sehingga dapat mengikat secara resmi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Penerapan TAC ini wujud dari pedoman-pedoman di dalam ASEAN Way yang memiliki kemampuan lebih mengikat secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan (Kusumah, 2018:260).

Para peneliti dan aktivis kajian perdamaian selalu mengusung nilai-nilai kerja sama dibandingkan bentuk kompetisi. Selama perang dingin, peneliti dan aktivis perdamaian terpusat pada pelucutan senjata nuklir dan pengupayaan kesepakatan keamanan bersama (Pangabeian, 2010:15). Para aktivis perdamaian telah berjuang melawan diskriminasi untuk memperjuangkan ras dan etnis. Kontribusi penting di dalam sebuah kajian perdamaian adalah penekanan terhadap analisis struktural konflik yang merupakan cara untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya ketimpangan

sosial, serta diskriminasi di masyarakat yang berkembang. Sebenarnya keadilan dan perdamaian itu merupakan konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu advokasi terhadap satu (keadilan) pada dasarnya melibatkan advokasi terhadap yang lainnya (perdamaian) (Pangabean, 2010:16). Penulis sependapat dengan Gulen yang menjelaskan tiga musuh utama manusia, yaitu kebodohan, kemiskinan dan perpecahan. ketidaktahuan salah satu dari tiga musuh utama, dan peningkatan pendidikan adalah solusi. Kemiskinan merupakan musuh kedua, solusi tepat menurut Gulen mendirikan organisasi-organisasi amal. Terakhir, menurut Gulen pertikaian atau konflik internal adalah musuh utama ketiga, solusi yang dia tawarkan melalui dialog, toleransi dan saling pengertian satu sama lain (Saritoprak, 2010: 12-13).

Benedict Anderson, memiliki tawaran yang menarik sebagai mekanisme integrasi dalam upaya peace building menurut penulis. *Imagined communities* menjadi perekat dalam menumbuhkembangkan rasa persamaan di Kawasan ASEAN. Teori tersebut digunakan Ben Anderson untuk mengkonsepkan tentang sebuah bangsa. Menurut Ben, sebuah bangsa merupakan komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan (Naomi, 2008:8). Selain itu menurut dia bangsa merupakan sesuatu yang terbayang muncul dalam setiap anggota, walaupun sama sekali tidak pernah bertemu, komunikasi, dan saling kenal, namun tetap muncul di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu, yaitu bayangan tentang hidup kebersamaan mereka (Naomi, 2008:8). Hal ini secara kolektif terbangun secara sadar dalam diri masing-masing, dan dapat digunakan sebagai integrasi masyarakat ASEAN.

Menurut Benedict Anderson, bangsa yang dibayangkan pada hakikatnya bersifat terbatas. Walau bangsa-bangsa besar yang memiliki miliyaran penduduk sekalipun tetap memiliki batas yang jelas. Tidak ada bangsa yang ingin merangkul semua wilayah yang ada di bumi (Naomi, 2008:10). Bangsa yang dibayangkan sebagai sebuah komunitas dipahami sebagai bentuk kesetiakawanan yang muncul dari diri anggotanya. Sebab rasa persaudaraan inilah selama dua abad terakhir, menjadikan orang-orang bersedia menghilangkan nyawa orang lain, bahkan berkorban diri sendiri demi memperjuangkan dan membela pembayangan yang mereka miliki tersebut (Naomi, 2008:11). Upaya dalam memunculkan rasa persamaan atas satu komunitas terbayang-bayang dalam para anggota negara ASEAN bisa menjadi solusi untuk merawat perdamaian. Penguatan demikian merupakan langkah dari bawah yang bisa di tawarkan untuk menguatkan strategi politik internasional yang bersifat formal, dan elit.*

Referensi

- Aunur Rofik, *Tafsir Resolusi Konflik*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nasionalism*, terj. Omi Intan Naomi, *Imagined communities, Komunitas-komunitas Terbayang*, Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar, 2008
- Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Farida, E. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1).
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2)
- Kusumah, R. W. P. I., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7(2).
- Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peacebuilding in Islam*, terj. Rizal Pangabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2010
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009
- Pudjiastuti, T. N., & Prayoga, P. (2016). ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 17
- Rahman (2017). Peran Peacekeeping Operations dalam Kerangka Asean Defense Ministerial Meeting di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(1).

- Saragih, H., & Yani, Y. M. (2021). Makna Penting Keberadaan Komunitas Politik Keamanan Asean dalam Menyelesaikan Konflik KAWASAN. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2)
- Saritoprak, John L. Esposito and Ihsan Yilmaz, (eds.) *Islam and Peacebuilding*, New York: Blue Dome Press, 2010
- Willy Kymlicka, Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right, terj.Edlina Hafmini Eddin, *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Yusuf, R. I. (2020). Asean's Regional Mechanism; ASEAN dan Perdamaian Kawasan Melalui Security Community. *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)*, 1(2)

MUHAMMAD IHSANUL ARIEF lahir 7 Agustus di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sempat nyantri di salah satu pesantren daerah kelahirannya. Strata satu Jurusan Tafsir Hadis (Program Khusus Ulama) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN (sekarang UIN) Antasari Banjarmasin. Strata dua Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif memberikan perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin dan STAI Al-Falah Banjarbaru. Selain itu aktif sebagai sekretaris Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) DPW Kalimantan Selatan, Ketua Rumah Produktif Indonesia (RPI) Wilayah Kalimantan Selatan. Di antara karya tulis yang dihasilkan *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum (2018)*, *Konsep Dasar Ajaran Islam (2018)*, *Studi Islam di Era 4.0 (2019)*, *Khazanah Keislaman Masyarakat Banjar(2020)*, *Way of Life(2021)*. Alamat email Ihsanul.arief@ulm.ac.id.

Indahnya Pluralitas Masyarakat Indonesia

Juni Hidayati

Pendahuluan

Pluralitas dipahami sebagai sebagai upaya aktif untuk memahami perbedaan. Pluralitas merupakan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan masyarakat Indonesia. Salah satu ciri utama yang ditegaskan pluralisme tidak menuntut individu meninggalkan identitasnya. Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnik, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kesemuanya harus dijaga dilindungi dari berbagai macam ancaman yang menghadang.

Sebenarnya masyarakat Indonesia mencintai perdamaian sejak zaman dahulu kala. Ketika bangsa asing datang ke Indonesia semua diterima dengan ramah dan tangan terbuka. Letak Indonesia secara geografis berada di persimpangan yaitu dua samudra dan dua benua membuat Indonesia menjadi persinggahan kapal-kapal asing yang berlayar. Bangsa yang pertama kali berkunjung di Indonesia untuk berdagang adalah Cina dan India, mereka berdagang sekaligus menyebarkan agama. Ketika agama Islam datang di Indonesia pengaruh Hindu-Buddha masih ada, Islam menggabungkan kebudayaan menjadi akulturasi dan asimilasi yang harmonis penuh kedamaian.

Mengenal Pluralitas Masyarakat Indonesia

Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Ada enam agama yang diakui oleh negara, keenamnya antara lain: Agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Disamping enam agama tersebut, terdapat juga aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Ada aliran kepercayaan Sapto Darma, Kalang, dan lain sebagainya. Semuanya mengalir berjalan dengan tenang dan damai. Masing-masing penganut dapat melaksanakan kepercayaan dan keyakinan dengan harmonis, satu sama lain saling menghormati dan menghargai kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

Indonesia kaya akan suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Kekayaan suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat membuat pluralitas masyarakat Indonesia beragam. Kata Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya "jamak". Pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam warna membuat Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan segala perbedaan. Perbedaan itu disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika merupakan ide dari Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan wilayah Nusantara.

Toleransi dalam menjalankan ibadah agama di Indonesia sangat dijaga oleh masyarakat. Ketika umat Kristiani tengah menjalankan perayaan Hari Raya Natal, beberapa anggota masyarakat Islam saling menjaga keamanan dan kekhusukan ibadah. Begitu pula sebaliknya, saat umat Islam merayakan Hari Besar Idul Fitri, umat Kristiani bersamasama mendukung kegiatan, saling silaturahmi dan ikut bergembira. Di Bali, ketika merayakan hari Raya Nyepi, semua umat agama seluruh Bali ikut merasakan sunyinya dunia. Mereka ikut menghormati kegiatan tanpa mencampur adukkan keyakinan yang mereka miliki.

Akulturasi dibangun untuk menyatukan dua budaya tanpa meninggalkan unsur asli. Bangunan Masjid Kudus memadukan antara bangunan candi dan masjid. Tokoh yang mendirikan masjid memahami bagaimana harus memperlakukan masyarakat agar saling menghargai antara satu umat dengan yang lain. Dalam menjalankan ibadah juga terdapat adanya saling melengkapi satu sama lain. Misalnya dalam memperingati kematian seseorang dalam Islam. Seorang yang meninggal akan diadakan pengajian selama tujuh hari berturut-turut. Padahal dalam Islam versi aslinya tidak ada aturan seperti itu. Hal tersebut merupakan gabungan dari kepercayaan Hindu-Buddha dan Islam.

Mengatasi Konflik

Keberagaman budaya, ras, dan agama di Indonesia tidak hanya menimbulkan keindahan bagaikan puzzle warna warni yang memukau tetapi juga menimbulkan konflik. Konflik yang kecil akan membesar bagaikan api yang membakar rumput kering. Konflik sangat mudah timbul manakala timbul suatu gejolak, baik gejolak ekonomi, politik, maupun isu lainnya. Konflik yang berkepanjangan akan membuat bangsa dan negara Indonesia terjun menuju jurang kehancuran jika tidak diatasi dengan serius.

Berikut ini ditampilkan beberapa kasus konflik tentang keberagaman suku, agama, dan etnis di Indonesia. Kasus Sampit yang melibatkan suku Madura dan Kalimantan yang memakan korban yang tidak sedikit. Kasus dimulai ketika Suku Madura mengikuti program transmigrasi ke Pulau Kalimantan sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Program transmigrasi Suku Madura ke Kalimantan ternyata berhasil kemudian program berlanjut pada Pemerintahan Indonesia. Para transmigran sukses dalam perantauan dan hal tersebut membuat cemburu penduduk asli. Konflik berkepanjangan pecah dipicu oleh pembakaran rumah salah satu suku Dayak oleh suku Madura. Berita tentang pembakaran yang belum tentu kebenarannya membuat suku Dayak tersulut emosi dan membantai habis suku Madura. Pemerintah dibuat kewalahan mengatasi konflik Sampit. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencari pelaku provokator, mencari jalan damai dengan melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat. Membuat surat perjanjian damai antara suku Madura dan suku Dayak, serta membuat tugu perdamaian untuk mengenang peristiwa berdarah. Dibangunnya tugu perdamaian diharapkan dapat membuat peringatan pada masyarakat bahwa perdamaian merupakan hal yang utama di atas segalanya

Kasus perbedaan agama di Maluku yang menewaskan jiwa manusia. Kerusuhan di Ambon membuat umat Islam populasinya semakin mengecil, padahal sebelumnya mereka mayoritas. Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* dituliskan bahwa Islam masuk di Ternate antara tahun 1460-1465. Kerajaan Ternate sejak itu makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi-perdagangan maupun dibidang politik, terlebih setelah Sultan Hairun putra Sultan Zainal Abidin naik tahta sekitar tahun 1535 kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Akan tetapi persatuan daerah-daerah dalam Ternate itu mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Kedua bangsa bersaing monopoli perdagangan, Portugis memusatkan perhatian kepada Ternate sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore. Pada tahun 1607 VOC mendirikan menguasai perdagangan di Ternate dan sekitarnya membuat Portugis dan Spanyol hengkang.

Kasus Ambon bermula ketika terjadi kerusuhan antara sopir dan kenek di terminal Batumerah. Setelah kerusuhan di terminal terjadi pengerahan massa besar-besaran untuk mengusir, menjarah, dan membakar rumah orang-orang Islam. Tidak jelas siapa dalam dibalik kasus pecahnya kerusuhan di Ambon. Selain menelan korban jiwa, harta benda, rumah, kios, toko, pasar, kantor pemerintah, masjid, dan kendaraan rusak berat akibat kerusuhan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Menko kesra dan Menko Polkam memprakarsai perjanjian Malino II yang menghasilkan 11 butir kesepakatan perdamaian. Diantaranya mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan, menegakan hukum, dan pembentukan tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa kerusuhan. Pemerintah mengeluarkan Keppres no 38 tahun 2002 tentang pembentukan Tim Penyelidikan Independen Nasional Konflik Maluku. Tim yang beranggotakan 14 orang diberi waktu 6 bulan untuk memulihkan situasi di Ambon.

Kasus etnis Tionghoa yang membuat pertumpahan darah. Etnis Tionghoa sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka. Puncaknya adalah kejadian setelah Reformasi tahun 1998, musibah besar melanda etnis minoritas Tionghoa, usaha yang mereka rintis sejak nol habis dalam sekejap. Banyak wanita Tionghoa yang mengalami korban pelecehan seksual. Ada banyak alasan mengapa orang Tionghoa menjadi korban kekerasan fisik. Salah satu penyebabnya adalah mereka dianggap sebagai sekutu pemerintahan Orde Baru yang banyak memanfaatkan uang negara untuk memperkaya kelompoknya. Etnis Tionghoa walaupun jumlahnya sedikit, sekitar 2% dari populasi penduduk Indonesia, namun keberadaan mereka sangat menentukan perekonomian Indonesia. Etnis Tionghoa sangat piawai dalam hal perdagangan dan perekonomian, mereka sangat tekun dan ulet dalam berbisnis. Hal tersebut membuat mereka rata-rata mempunyai perekonomian yang mapan, dan membuat masyarakat lain cemburu buta. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi etnis Tionghoa untuk melupakan kejadian tersebut. Trauma mendalam yang

Masih banyak kasus lain yang berasal dari keberagaman budaya, ras, dan agama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan usaha dari pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik. Konflik tersebut dapat terselesaikan dengan damai. Masyarakat Indonesia dapat kembali hidup berdampingan harmonis dalam perbedaan pluralitas.

Indahnya Pluralitas Masyarakat Indonesia

Kita wajib menjaga pluralitas masyarakat Indonesia yang telah terjalin sejak zaman dahulu kala. Keberagaman agama di Indonesia merupakan keunikan khas dari bangsa Indonesia, perlu pemahaman terhadap generasi penerus bahwa bangsa Indonesia dihuni oleh berbagai macam agama kita harus menghormati satu sama lain penganut agama. Semua agama di dunia mengajarkan perilaku yang baik, menjunjung tinggi kejujuran dan saling menghargai sesama. Cara untuk menjaga pluralitas di Indonesia, antara lain dengan beberapa hal berikut.

Pertama, menerapkan Materi Pluralitas di sekolah. Kurikulum Merdeka mengenalkan keragaman budaya Indonesia dengan menerapkan pada kegiatan pembelajaran yang diberi judul IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka salah satu kegiatan pembelajaran adalah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Salah satu kegiatan dalam P5 adalah pentas seni yang memperlihatkan tari-tarian kebudayaan Indonesia. Kegiatan ini memupuk semangat cinta tanah air dan cinta akan budaya Indonesia yang sangat beragam. Hasilnya ketika kegiatan diterapkan di sekolah, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengenal budaya Indonesia. Membentengi siswa untuk lebih memilih budaya Indonesia dari budaya barat yang gencar merangsek masuk ke jiwa-jiwa muda anak Indonesia. Kita perlu gerakan untuk mencintai budaya sendiri daripada budaya luar.

Kedua, memelihara keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia dapat dijaga dengan cara melakukan pementasan kesenian daerah ketika memperingati hari-hari istimewa. Peringatan hari kemerdekaan merupakan ajang tepat untuk menampilkan atraksi budaya daerah. Panggung-panggung hiburan digelar untuk menampilkan tarian, nyanyian, maupun kesenian daerah. Tarian adat di Indonesia lebih berfungsi sebagai cara untuk menyambut tamu agung pada saat sekarang. Seperti kita saksikan bersama ketika perhelatan akbar G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022, setiap kali ada tamu yang turun dari pesawat selalu ada tarian yang menyambut kedatangan mereka. Pada saat jamuan makan malam secara tidak terduga dipentaskan tari-tarian dan kesenian Indonesia dengan dekorasi dan penampilan yang sangat memukau membuat takjub semua tamu undangan. Mereka tidak menyangka kebudayaan Indonesia begitu indah dan menakjubkan.

Ketiga, mempromosikan keindahan budaya untuk pariwisata. Kita perlu mempromosikan keindahan budaya Indonesia pada dunia luar agar mereka tertarik. Kita dapat memotret keindahan budaya Indonesia kemudian menyebarkan di dunia maya. Membuat video yang berisi keindahan keragaman suku, etnis, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan di Indonesia kemudian menyebarkan di internet. Belajar menyanyikan lagu-lagu daerah yang sarat makna. Kuliner makanan daerah yang beraneka macam dan memanjakan lidah.

Keempat, mewajibkan pegawai di lingkungan pemerintah untuk mengenakan pakaian adat setiap tanggal tertentu. Pada tanggal tertentu pemerintah mewajibkan pegawai di masing-masing instansi pemerintah untuk mengenakan pakaian adat. Bahkan Pak Jokowi seorang presiden Indonesia dengan bangga memakai pakaian adat pada saat menjadi inspektur upacara pada hari ulang tahun kemerdekaan RI di istana negara. Hal itu dilakukan untuk memberi contoh pada masyarakat bahwa pakaian adat adalah pakaian terhormat yang wajib kita lestarikan.

Kelima, menjaga toleransi antarumat beragama. Indonesia yang terdiri dari 6 agama yang diakui dan beberapa kepercayaan yang dianut masyarakat membuat kita harus menjaga toleransi antarumat beragama. Pemerintah menghormati kebebasan menjalankan agama, salah satunya adalah dengan meliburkan segala kegiatan ketika hari besar agama berlangsung. Kita berharap semoga pluralitas masyarakat Indonesia tetap terjaga. Indonesia akan damai dan sejahtera manakala masyarakat dapat menjaga pluralitas dalam harmoni yang indah.

Mari kita jaga keindahan alam dengan segala *puzzle* perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Kedamaian akan mudah dicapai manakala segalanya tertata dengan rapi, masing-masing menyadari bahwa individu merupakan bagian dari perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu tidak akan pernah bisa bersatu, namun akan bisa melengkapi satu sama

lain. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol indah yang diungkapkan untuk menjaga pluralitas masyarakat Indonesia. Manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda, oleh karena itu mari jaga toleransi dan tenggang rasa antarsesama.*

Referensi

- Abidin, Zainal dkk (2011). *Pluralisme Kewargaan. Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Jhon dan Hassan (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Mukminan (2021). *Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Muslih, Ahmad (2014). *Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Sudjangi (2002). *Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusuhan di Ambon*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Keagamaan Departemen RI
- Yani, Huri (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Kuno II*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yani, Huri (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka

JUNI HIDAYATI adalah guru di SMPN 2 Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Lahir di Kendal pada 1 Juni 1975 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Bapaknya seorang guru dan kepala MTs, sedangkan ibunya adalah petani dan ibu rumah tangga. Lulus dari Politeknik UNDIP (1998) kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di UNNES (lulus 2002). Sejak 1998, ia menjadi guru, kemudian diangkat menjadi guru bantu (2004) dan menjadi Pegawai Negeri (2008). Empat bukunya telah terbit adalah *Gudang Prestasi Ekonomi Kelas 7 SMP/MTs, Layar Impian, Menembus Batas Ketegaran* dan buku keempat adalah terkait Kombes Polisi H. Thamrin Dahlan.

Mewujudkan Perdamaian Global; Dari ASEAN untuk Dunia

Syamsudin Kadir

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang tergolong damai bila dibandingkan dengan kawasan lainnya di Asia bahkan berbagai benua di dunia. Walau begitu, Asia Tenggara masih dihantui oleh konflik dalam negeri masing-masing negara. Misalnya, konflik Rohingya di Myanmar, Moro di Filipina, dan Papua di Indonesia. Selain itu, yang cukup menyita perhatian adalah konflik di Laut China Selatan antar berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat dan sekutunya dengan Cina dan sekutunya. Hal tersebut tentu berdampak pada Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, baik dari sisi luas wilayah maupun dari sisi jumlah penduduknya. Negara yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 dan beribukota Jakarta ini juga sebagai negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah sekitar 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020 dan negara beragam Islam terbesar di dunia dengan pemeluk sekitar 230 juta jiwa. Data ini tentu dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang, akan terus berubah dan bertambah seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian global. Kedua hal tersebut merupakan ciri utama negara bangsa yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 silam dan memiliki tujuan konstitusional ini. Tujuan Indonesia sebagai sebuah negara mencerminkan kompleksitas peranannya, baik dalam skala lokal dan regional maupun skala global. Pada alinea ke-4 konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mewujudkan tujuan negara membutuhkan kesungguhan dan tindakan praktis yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut. Selain memastikan terjaganya stabilitas dalam negeri, Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai negara di dunia terutama dalam kelompok negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). ASEAN sendiri merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN sendiri dibentuk atas dasar inisiatif lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina yang kala itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Pada tahun-tahun berikutnya beberapa negara secara berturut-turut bergabung seperti Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999).

ASEAN berdiri dengan latar belakang yang cukup kompleks berdasarkan kompleksitas permasalahan berbagai negara kawasan ini. Selain konflik dalam negeri setiap negara, ASEAN berdiri karena beberapa sebab, diantaranya, (1) persamaan geografis. Negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara Benua Australia dan daratan benua Asia, serta diantara Samudra Hindia dan Pasifik. (2) Persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari Ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab (Ghujarat) dan China.

Selain itu, menurut Shabrina Alfari (2022), negara ASEAN juga memiliki persamaan lain, yaitu (3) Persamaan kepentingan. Semua negara ASEAN memiliki visi yang secara umum sama yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan,

ketertiban dalam lingkup kawasan ASEAN. (4) Persamaan nasib. Hampir semua negara ASEAN pernah dijajah oleh negara lain. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dan Singapura dijajah Inggris, Filipina dijajah Spanyol dan Amerika Serikat.

Berdasarkan latar berdiri maka ASEAN sejatinya memiliki peranan dan agenda penting yang mesti terus dijalankan dengan baik dan aktif. *Pertama*, menjaga kedamaian kawasan ASEAN. Kedamaian kawasan ASEAN merupakan dampak dari adanya upaya berbagai negara untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan ASEAN. Kunci utama tercapainya adalah terjaganya keamanan dan pertahanan masing-masing negara dari berbagai gangguan dalam bentuk apapun. Karena itu, kerja sama negara ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan perlu diperkuat dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika keamanan global, termasuk konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan yang belakangan masih saja terjadi. Hal ini meniscayakan adanya kerja sama lembaga atau institusi antar negara seperti institusi TNI, Polri dan BIN dengan institusi serupa di negara-negara ASEAN lainnya.

Hal lain, perlunya penguatan aspek moderasi beragama. Moderasi beragama difokuskan pada upaya masing-masing negara dalam memastikan warga negaranya memiliki pemahaman keagamaan yang mendatangkan kemaslahatan bagi sesama dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat di kawasan ASEAN. Perguruan tinggi organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan media massa di masing-masing negara mesti menjalankan peran pencerahan, sehingga umat beragama tidak terjebak dalam pemikiran dan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan sikap antipati yang melampaui batas. Di sinilah perlunya pemerintah masing-masing negara mewadahi adanya dialog lintas agama yang dihadiri oleh para pimpinan dan tokoh setiap umat beragama. Dengan demikian, akan muncul saling kesepahaman, bersikap toleran dan menghargai perbedaan keyakinan dan latar belakang.

Kedua, mewujudkan ASEAN yang semakin maju. Keberadaan sekaligus eksistensi ASEAN sebagai organisasi perkumpulan negara se-kawasan tidak boleh terjebak pada hanya pada latar belakang yang sama, tapi mesti memiliki orientasi kolektif yang lebih futuristik. ASEAN maju merupakan salah satu skema negara-negara ASEAN dalam mewujudkan visi-misi ASEAN itu sendiri. Praktisnya, berbagai negara ASEAN berupaya untuk memastikan kemajuan bersama dalam bingkai saling sepenanggungan antar negara dalam kawasan.

Chief Adi Kusmargoni dalam bukunya *“Nationalism Leadership: Transforming Culture, Energizing Future”* (2021) mengulas perihal pentingnya “tumbuh bersama”. Walau gagasannya lebih fokus pada penguatan dan pengembangan perusahaan, namun secara substansi dan nilai, maka “tumbuh bersama” yang diajukan oleh Chief Adi Kusmargoni sangat relevan untuk diadaptasikan dalam memajukan negara-negara ASEAN. Mengafirmasi gagasan tersebut, penulis mengajukan beberapa aspek kunci yang perlu penguatan menuju ASEAN maju, diantaranya, (1) Aspek Pendidikan. Pemerintah negara ASEAN perlu memperkuat kerja sama bidang pendidikan yang selama sekian dasawarsa sudah berjalan dengan baik.

Ke depan, bukan saja diwujudkan dalam bentuk beasiswa dan pertukaran pelajar juga mahasiswa, tapi juga beasiswa dan pertukaran santri juga mahasiswa antar negara. Sebab dalam konteks meluruskan pemikiran “radikal” yang reduksionis hanya akan mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang utuh dan tidak tersimpang karena kepentingan sesaat dan merusak, atau dipengaruhi oleh arus global yang cenderung liar dan tidak menghargai nilai-nilai luhur sebuah bangsa yang pada prinsipnya tidak saling merintangi.

Hal lain, perlunya pendirian lembaga pendidikan masing-masing negara ASEAN di setiap negara-negara ASEAN. Misalnya, pemerintah masing-masing negara memfasilitasi pendirian perguruan tinggi berbasis Ormas keagamaan yang berasal dari setiap negara ASEAN. Secara praktis, pemerintah Malaysia telah merestui pendirian Universitas Muhammadiyah di Malaysia pada 2021 lalu. Hal ini mestinya menjadi pemantik bagi adanya lembaga pendidikan baru di beberapa negara ke depan.

Selanjutnya, penguatan (2) Aspek Ekonomi. Bencana non alam: Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 lalu hingga kini masih menyisakan dampak buruk di berbagai sektornya, baik kesehatan maupun ekonomi. Dari sektor ekonomi, misalnya, dampak pandemi telah menimbulkan angka kemiskinan yang terus meningkat. Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan, sedikitnya 4,7 juta penduduk Asia Tenggara atau ASEAN masuk jurang kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan perbandingan terhadap *baseline* perkiraan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dalam skenario normal atau tanpa Covid-19. Bila tidak diantisipasi secara optimal, maka ledakan angka kemiskinan semacam itu akan menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas kawasan.

Atas dasar itu, pemerintah berbagai negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama. Hal yang paling mendesak, misalnya, menyepakati standar dan aturan yang memudahkan terwujudnya kerja sama antar berbagai perusahaan lintas negara dalam kawasan. Pada saat yang sama, perlu dibentuk kesepakatan bersama perihal standar tenaga kerja dan aturan terkait yang tidak intimidatif atau melecehkan tenaga kerja negara lain. Berbagai permasalahan tenaga kerja asing pada setiap negara, misalnya, mesti diselesaikan dengan cara-cara damai dan mengedepankan saling percaya sekaligus menghargai aturan yang berlaku di masing-masing negara. Bila kerja sama ekonomi berjalan lancar, maka hal itu berdampak positif pada pendapatan akumulatif penduduk seluruh negara ASEAN.

Lalu, yang tak kalah pentingnya adalah (2) Penguatan kerja sama organisasi kepemudaan. Pada 2022 ini Media Network merilis data bahwa jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 7.9 miliar. Data ini berdasarkan data terakhir pada Juli 2022 (<https://databoks.katadata.co.id>). Sedangkan menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk dunia sudah mencapai sekitar 7,94 miliar jiwa per-Juli 2022. Adapun jumlah penduduk Asia Tenggara atau ASEAN pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 668 juta jiwa. Dari angka tersebut, rerata 45 persennya (sekitar 300.000.000-an lebih jiwa) merupakan penduduk usia produktif, dimana penduduk berusia 20-40 tahun mencapai 67 persen atau sekitar 300.000.000 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, dapatlah dikatakan bahwa jumlah penduduk usia produktif di kawasan ASEAN tergolong besar bila dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan Asia lainnya. Ini merupakan bonus demografi tersendiri bagi ASEAN yang bila dikelola akan berkontribusi besar bagi kemajuan kawasan ASEAN ke depan. Menurut Astrid Savitri (2019), bonus demografi merupakan peluang sekaligus tantangan yang dapat dijadikan sebagai modal bagi negara mana pun dalam menjemput sejarah terbaiknya di masa depan. Dalam konteks ASEAN, berdasarkan tesis tersebut, kerjasama yang optimal antar negara, terutama untuk memfasilitasi kerja sama organisasi kepemudaan semakin menemukan relevansinya. Pertemuan organisasi kepemudaan antar negara perlu difasilitasi dan dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan kerja sama yang berdampak pada kepentingan kawasan pada waktu yang panjang di masa depan.

ASEAN damai dan maju merupakan afirmasi jenial atas sebab terbentuknya ASEAN itu sendiri pada 55 tahun silam. Hal tersebut bisa terwujud manakala ASEAN memperkokoh dan meningkatkan kualitas kerja sama dalam berbagai aspek terkait seperti pertahanan-keamanan, ekonomi, dan pendidikan serta dialog lintas organisasi di dalam kawasan. Kita sangat optimis ASEAN damai dan maju karena kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah negara di kawasan ini, di samping elemen non pemerintah yang juga diberi peran dan peluang untuk membangun kerja sama yang baik sesuai dengan potensinya masing-masing.

Beberapa isu tersebut dapat dipilih menjadi isu prioritas, di samping isu lain yang memiliki koneksi dan pengaruh signifikan bagi upaya menjaga stabilitas dan kemajuan kawasan ASEAN. Hanya saja, pemihakan atau keterlibatan kita dalam suatu isu harus diukur dengan pertimbangan: apakah itu dapat menjaga dan melayani kepentingan nasional kita ataukah tidak (Anis Matta, 2022). Karena itu, sebagai bagian dari 20 negara termaju di dunia (G20) dan mendapat giliran menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia tetap menjalankan politik “bebas aktif” yaitu politik yang merdeka dan berdaulat serta tidak dihantui oleh tekanan negara mana pun seperti yang dipertegas dalam pembukaan konstitusi negara yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sungguh, bila kawasan ASEAN yang dihuni ratusan juta jiwa penduduk damai dan maju, maka hal tersebut dapat menjadi embrio dan inspirasi bagi terbentuknya perdamaian peradaban global-dunia.*

Referensi

Abdul Halim Falatehan dan Syamsudin Kadir (2022). *Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Zahir Publishing

Anis Matta (2022). *Kepada Bangsa, Kepada Rakyat*. Yogyakarta: Poestaka Rembug Kopi

Astrid Savitri (2019). *Bonus Demografi 2030*. Depok: Huta Media

Chief Adi Kusmargoni (2021). *Nationalism Leadership: Transforming Culture, Energizing Future*, Jakarta: Republika Penerbit
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada Selasa, 6 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

Shabrina Alfari, “Sejarah ASEAN: Negara Pendiri dan Anggota, hingga Tujuan Dibentuk”, <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-asean/>, 8 Agustus 2022, diakses pada Selasa 6 Desember 2022, pukul 09.52 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/15/penduduk-dunia-capai-79-miliar-pada-juli-2022//>, diakses pada 6 Desember 2022, pukul 10.47 WIB.

SYAMSUDIN KADIR akrab disapa Bang Kadir, lahir di Manggarai Barat, NTT pada 8 Agustus 1983. Menempuh pendidikan di SDK Cereng, Manggarai Barat, NTT, Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat, NTB, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung-Jawa Barat) dan IAI Bunga Bangsa Cirebon. Selain telah menulis ribuan artikel di berbagai surat kabar dan media *online*, serta 48 judul buku (sejak 2008 hingga saat ini, 2022), sosok yang kini berdomisili di Cirebon, Jawa Barat ini juga aktif sebagai Ghost Writer (GW) dan Editor Buku, serta Narasumber di Radar Cirebon Televisi (RCTV) dan forum lainnya. Pusat informasi dan komunikasi ke nomor WhatsApp: 085797644300 dan 08973844089.

Merajut Perdamaian Melalui Budaya ASEAN

I. S. Agustiani Agoestian

Pax Melior Est Quam Iustissimum Bellum
[Perdamaian itu lebih baik dari pada perang].
--The world Peace Organization)

Pembentukan ASEAN

ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan beranggotakan 5 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Saat itu, para menteri luar negeri tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selain itu, memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Brunei Darusalam, setelah memperoleh kedaulatan penuh dari Pemerintah Inggris, segera menggabungkan diri menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, lalu Myanmar dan Laos pada tanggal 2 Juli 1997, Kamboja pada tanggal 30 April 1999 dan Timor Leste diakui sebagai anggota ASEAN ke 11 pada tanggal 11 November 2022 setelah KTT ASEAN ke 41 di Kamboja. Sebenarnya masih ada 2 pulau lagi yang secara Geografis (dan juga secara historis) sebenarnya Taiwan dan pulau Hainan juga termasuk Asia Tenggara, sehingga diikutkan pula. Namun, karena alasan politik, Taiwan dan pulau Hainan lebih sering dimasukkan ke kawasan Asia Timur.

Setelah penanda tanganan deklarasi Bangkok, berbagai pertemuan dengan agenda di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/ TAC) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.

Peranan Indonesia dalam ASEAN

Indonesia sebagai salah satu penggagas terbentuknya negara ASEAN, memiliki peranan yang sangat penting di dalam pendirian tersebut (ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967). Tujuan pembentukan kawasan negara-negara ASEAN menurut Adam Malik (menlu Indonesia ditahun 1960an), adalah agar kawasan ASEAN mampu berdiri di atas kaki sendiri serta bekerja sama dalam perlindungan negara secara bersama dari serangan atau kekuatan negara asing diluar kawasan ASEAN, termasuk pengaruh negatif dari berbagai sektor yang dapat mengganggu keamanan teritorial ASEAN itu sendiri.

Selain sebagai salah satu pendiri ASEAN, peranan lainnya adalah sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. KTT tersebut diadakan pada 23-24 Februari 1976. Dari hasil pertemuan ini menyepakati pembentukan Sekretariat ASEAN di Indonesia (Jakarta), dan HR. Dharsono sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN pertama. Satu hal yang tak kalah penting dari 2 peranan tersebut di atas adalah pembentuk komunitas Keamanan negara-negara ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan ASC (*Asean Security Community*) yang dibentuk pada 12 September 2002. Pembentukan komunitas ini bertujuan mempercepat keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN dan masyarakat internasional.

Peranan berikutnya adalah mencegah konflik. Ada dua jenis konflik di dalam kehidupan bernegara, yaitu konflik dalam negeri atau konflik antar negara. "Konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik," kata Lewis A. Coser. Setiap konflik yang terjadi baik dalam negeri ataupun antar negara, pada umumnya karena alasan politik, ekonomi dan agama. Hal ini yang disebut dengan 3G (Gold, Glory dan Gospel). Begitu juga konflik yang terjadi di kawasan ASEAN, seperti konflik Kamboja dengan Vietnam dan Thailand, konflik dalam negeri Filipina dengan Moro, konflik dalam negeri Myanmar dengan Rohingnya serta pasang surut Indonesia dan Malaysia.

Peranan Indonesia dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN adalah menjadi penengah bagi negara yang berkonflik seperti yang terjadi pada konflik Kamboja dan Vietnam, Kamboja dengan Thailand. Indonesia melakukan KTT dengan menghadirkan pihak-pihak yang berseberangan untuk duduk bersama hingga menghasilkan kesepakatan damai dan rekonsiliasi politik negara-negara yang bertikai. Sedangkan untuk konflik dalam negeri seperti Filipina dengan Moro, Indonesia menjadi penengah atau fasilitator antara Filipina Selatan dengan MNLF. Soal Myanmar dengan Rohingnya, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan melakukan diplomasi dan menawarkan solusi kepada pemerintah Myanmar serta mengangkat isu Rohingnya di forum forum Internasional.

Peranan Indonesia yang tak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama pada produk Makanan, yaitu memproduksi makanan halal. Hal ini amat sangat diperlukan dimana 3 negara anggota ASEAN berpenduduk muslim, seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain ketiga negara ini Filipina dan Thailand juga memiliki penduduk yang menganut agama Islam. Oleh sebab itu harus jelas tentang kualitas dan kandungan bahan makanan, halal atau tidak halal, haruslah jelas. Satu paling menarik dari peranan penting Indonesia di ASEAN adalah berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya dan olah raga dengan membentuk komunitas-komunitas tersebut. Hal ini tentunya untuk terus menggaungkan negara-negara kawasan Asia Tenggara sebagai negara-negara yang damai. Damai dalam arti yang sesungguhnya bukan damai dalam slogan dan spanduk.

Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat di Asia Tenggara

Kehidupan masyarakat Asia Tenggara cukup unik dan memiliki persamaan satu sama lain. Persamaan ini terjadi karena, masyarakat Asia Tenggara dipengaruhi oleh ragam budaya India dan China. Dan tentunya termasuk agama juga adat istiadat mereka. Namun ada juga pengaruh budaya Eropa ketika memasuki wilayah Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa baik sebagai mitra niaga maupun sebagai penjajah tentunya mempengaruhi budaya, bahasa dan agama pula. Selain bangsa Eropa, budaya Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah berpengaruh sangat kental. Budaya-budaya asing yang berakulturasi dengan budaya lokal, dapat terlihat di beberapa negara maupun daerah yang berada di wilayah Asia Tenggara,

Sebagai contoh dari persamaan budaya adalah "Sepak Takraw", ini permainan olah jenis voli namun dilakukan melalui tendangan. Di Laos dinamakan Takaw. Permainan ini pada awalnya dilakukan oleh kaum pria saja, namun dewasa ini dimainkan pula oleh wanita. Budaya minum teh yang dilakukan oleh Thailand, pun di Indonesia ada. Perbedaannya adalah teh di Thailand menggunakan susu dan rempah yang dapat pengaruh dari India. Karena teh India menggunakan susu dan rempah-rempah. Sedangkan penyajiannya adalah pengaruh dari Tiongkok, yaitu penggunaan POCI. POCI adalah teko kecil yang terbuat dari tanah liat/keramik. Dijaman modern POCI terbuat dari logam yaitu aluminium dan stainless steel. Disamping tari/sendra tari bangsa Thailand mirip dengan sendra tari di Bali Indonesia, baik segi pakaian dan ornamennya. Hal inipun sangat kental budaya India.

Selanjutnya budaya Melayu dari Semenanjung Melayu adalah pengaruh Islam yang sangat kental. Dengan pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh dan penutup kepala baik laki-laki maupun perempuan. Dan lagu lagu serta jenis musiknya sarat akan pesan agama, yaitu berupa nasihat. Budaya Filipina amat sangat mirip dengan budaya suku Sulawesi Utara di Indonesia, baik dari segi Bahasa yang kental dengan Malayunya dipadu Bahasa Eropa Spanyol dan Belanda serta sedikit Arab dan tentunya Tiongkok. Pakaian adat suku Sulawesi Utara terutama Minahasa dan sekitarnya yang sangat berdekatan dengan Filipina memiliki kemiripan. Perbedaannya pada lengan, di Filipina lengan baju bagian atas menggelembung ala Spanyol sedangkan di Sulawesi Utara khususnya Manado lebih mirip kebaya ncm (kebaya Tiongkok).

Di Kamboja terkenal dengan 1000 pagodanya, ini sama dengan di Indonesia khususnya Jawa Tengah di Prambanan yang terkenal dengan 1000 candinya, atau Bali dengan 1000 candinya pula, oleh sebab itu Bali disebut sebagai pulau Dewata. Jenis-jenis candi yang ada di Kamboja amat sangat mirip dengan candi-candi yang ada di Indonesia, mulai dari Sriwijaya hingga ke Mendut. Kemiripan candi atau mungkin bahkan kesamaan ini adalah sebagai akibat begitu kuatnya budaya India dan Tiongkok pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Selain budaya-budaya tersebut di atas, kesamaan budaya di negara-negara Asia Tenggara yang sangat menonjol adalah budaya kebersamaan, Seperti misalnya di dalam sebuah rumah selalin terdiri dari keluarga inti, disana ada kakek, nenek juga anak yang sudah berkeluarga masih tinggal bersama orang tuanya bilaman sianak tersebut belum mampu secara ekonomi untuk mandiri, Jika meminjam istilah suku Jawa di Indonesia yaitu “mangan ora mangan sing penting ngumpul yang artinya makan tidak makan yang penting ngumpul.”

Budaya sebagai alat Pemersatu dan Perdamaian

Keragaman budaya lokal Indonesia sebagai bentuk bangunan budaya Nasional merupakan penggerak dan pemberdayaan hubungan antar budaya di antara kelompok masyarakat ASEAN. Warisan budaya merupakan ekspresi penting dari keanekaragaman budaya yang patut dilindungi. ASEAN dapat memainkan peranan penting dalam menjaga warisan budaya di seluruh dunia dengan memberikan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan kegiatan transfer pengetahuan ke negara-negara mitra.

Sejalan dengan deklarasi tentang kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan keragaman budaya ASEAN dalam hubungan internasionalnya secara objektif, seperti membuka potensi budaya dan kreativitas untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdamaian, pendidikan, kesehatan dan kemakmuran melalui dialog antar budaya dan memperkuat kerja sama warisan budaya.

Kesimpulan

Membangun perdamaian melalui budaya antar negara adalah jauh lebih baik ketimbang politik. Karena dalam politik lebih banyak menghasilkan konflik dari pada perdamaian dan perdamaian hanyalah sebuah slogan baik yang tertulis maupun terucap. Pembentukan komunitas budaya antar negara ASEAN sebagai alat promosi perdamaian juga dapat dijadikan contoh pada dunia, bahwa perdamaian itu bisa dicapai melalui keinginan. Karena setiap individu manusia memiliki rasa keinginan hidup yang damai baik antar kelompok maupun antar negara. Budaya yang harus dibangun selain budaya kearifan lokal dari kawasan ASEAN adalah budaya Damai, pendidikan, kesehatan dan kemakmuran (Peace Education, Health and Prosperity).*

Referensi

‘PKN Pend Kewarganegaraan’ karya Murwanti dan Teguh Yuwomo, Peranan Indonesia dalam lingkup negara=negara Asia Tenggara

‘PKN Pend Kewarganegaraan’ terbitan Grasindo, tertulis bahwa Indonesia juga turut meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN

‘Pkn Harmoni Berkebangsaan’ karya Rani R Moediarta, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5577699/simak-ini-7-peran-indonesia-dalam-asean-yang-harus-diketahui>.

Fact sheet on ASEAN community, yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN

The ASEAN CHARTER FA#ASN-Charter_content_REV.p65

World Population prospects – Population Division.population.un.org

IMAS SITI (I. S.) AGUSTIANI AGOESTIAN atau biasa disapa dengan Mam Yenny adalah seorang guru Bahasa Inggris di SMK Telkom Jakarta. Ia juga pernah mengajar di SMK Telesandhi, Tambun, Bekasi sekaligus mengajar di Singapore International School PIK, mengampu mata pelajaran Bahasa Mandarin. Ia juga mengajar di SMK Analis kesehatan,

Jakarta. Ia mengawali karir dari bawah sebagai receptionist di PT. Nilam Terang Indonesia (1982). Setelah menyelesaikan pendidikannya di USA atas biaya penuh dari Yayasan Albright, ia bekerja di ASG (Albright Stonebridge Group) di Washington, DC. dengan posisi General Manager for Bsiness and Development for Asia Pacific Region (1988-2000). Selesai masa dinas di ASG, ia bekerja di PT. Mitra Adi Perkasa (Gajah Tunggal Group) sebagai Marketing Director (2001-2003). Saat ini ia aktif sebagai Deputy Secretary General for Education, Culture and Human Resource merangkap Juru Bicara Presiden WPO di World Peace Organization dan berkecimpung juga di T-Chain Digital Innovation sebagai LTC Director .. Menguasai 6 bahasa asing secara baik lisan dan tulisan. Ia juga aktif di blog. Ketertarikannya dalam bidang tulis menulis sejak SMP. Dulunya ia banyak menulis di pojok Kompas, selain cerita bersambung, puisi dan pantun juga rubrik politik.

Harmonisasi Keberagaman untuk ASEAN Bebas Konflik

Zetty Azizaton Ni'mah

Pendahuluan

Keberagaman merupakan sunatullah yang pasti ada dalam kehidupan manusia, dan harus diterima dan dihargai serta dijaga. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN merupakan negara yang multikultural, multi-etnik, multi-agama, multi-bahasa, multi-ras, dan multi-kepulauan. Indonesia atau nusantara adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberagaman ini akan berpotensi besar adanya konflik sosial, agama dan politik yang akan mengancam stabilitas suatu bangsa bahkan antarbangsa. Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2022 adalah 275,36 Juta Jiwa. berdasarkan jenis kelamin sebanyak 50,48% penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki dan 49,52% perempuan pada bulan Juni 2022. Berdasarkan wilayah provinsi prosentasi jumlah penduduk Indonesia, Jawa: 56,05%, Sumatera: 7,39 %, Kalimantan: 6,14%, Bali dan Nusa Tenggara: 5,55%, Maluku dan Papua: 3,17%. (*Dukcapil*, n.d.). Jadi terdapat 154,34 Juta penduduk Indonesia atau setengah jumlah penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

Fenomena intoleransi yang terjadi dalam 20 tahun terakhir di Nusantara mengancam kehidupan yang damai di tengah masyarakat yang multikulturalisme dalam balutan Bhineka Tunggal Eka. Sepanjang satu dekade (2009-2018), jumlah intoleransi dan kasus-kasus radikalisme mencapai 2.453 tindakan, terdiri dari 1.033 tindakan aktor negara dan 1.024 tindakan oleh aktor non-negara. (*Dja'far & Nisa*, n.d.).

Pasca kemerdekaan RI, hal yang jadi perhatian penting tokoh agama adalah dialog antarumat. Sampai akhir abad 20 M, umat beragama di Indonesia masih menyimpan potensi-potensi ketegangan, intoleransi, konflik. Dalam artian sampai sekarang antarumat beragama masih menyimpan potensi ketegangan baik karena agama-agama itu sendiri maupun yang terjadi karena faktor di luar agama seperti faktor ekonomi, faktor politik, dan sebagainya (*Saidurrahman & Arifinsyah*, 2018).

Lain halnya Thailand yang berupaya melakukan proses integrasi masyarakat muslim Thailand atau Muslim-Thai ke dalam tubuh negara Thailand mengalami sejumlah kendala. Secara sederhana, kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kendala ideologis, kultural dan pragmatik. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar perlawanan Muslim-Thai dalam bentuk budaya, politik dan militer kepada pemerintah kerajaan Thailand (*Rahayu et al.*, 2022).

Adapun wilayah Filipina yang terdiri dari 7.109 pulau dengan luas wilayah 29.062.000 hektar, dihuni oleh penduduk mayoritas beragama katolik. Menurut sensus penduduk tahun 1990 penduduk muslim di Filipina berjumlah 5% dari totalitas penduduknya seluruhnya yakni sekitar 2,8 juta jiwa. Muslim di Filipina terkonsentrasi di bagian selatan Filipina, terutama di Mindanao, Ujung Selatan Palawani, gugusan Kepulauan Sulu. (*Fitriah*, 2018) Mereka terdiri dari tiga belas kelompok bahasa dan budaya, yaitu: Maranao, Iranum, Maguindanao, Tausugs Samal, Bajao, Jama Mapun, Palawani, Malbog, kalibugan, Yakan, Karaza, dan Sangil. Di antara mereka itu ada tiga kelompok terbesar, yaitu Maranaos, Tausugs, dan Magu Indanoas.

Keberagaman di Kawasan negara-negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina sedikit banyak akan membawa pada pergeseran nilai, gesekan pemahaman, yang mengarah pada munculnya konflik baik berbasis agama, politik, ekonomi, sosial, dan Budaya. Setiap negara mempunyai kebijakan dan pemikiran untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi akibat keragaman yang ada, baik penyelesaian yang dalam perspektif kebijakan politik atau kesepakatan pemikiran filosofi yang dijadikan dasar penyelesaian masalah. Kebijakan inilah yang merupakan angin segar bagi terciptanya Kawasan ASEAN yang bebas konflik. Artikel ini penting dikaji sebagai upaya mensosialisasikan kawasan negara-negara ASEAN yang damai di tengah setting keberagaman bangsa.

Realita dan Ancaman Keberagaman Berbangsa

Bangsa Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh multi-etnik, multi ras, dan multi agama yang tersebar di berbagai wilayah dan kawasan Nusantara. Masing-masing keragaman mempunyai karakter, identitas dan budaya tersendiri pula. Keragaman ini sebagai modal dan kekuatan untuk menciptakan bangsa yang bersatu dengan kekayaan majemuk, bukan sebaliknya sebagai pematah persatuan. Tetapi realitanya usaha yang dipikirkan para tokoh bangsa terdahulu dengan menyematkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai pemersatu harus terdodai dengan lunturnya nilai-nilai kebangsaan, nilai agama, dan nilai budaya pada generasi Indonesia akhir-akhir ini.

Keragaman Bangsa Indonesia bisa menjadi pemersatu atau sebaliknya sebagai pemecah bangsa Indonesia yang sudah dibangun dengan Tekad Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila keragaman ini menjadi pemecah maka akan merugikan kedaulatan dan kemajuan bangsa. Pada awal tahun 2017, Antropolog Indonesia mengeluarkan petisi bahwa bangsa yang dihuni oleh lebih dari 250 juta jiwa lebih ini tengah mengalami darurat toleransi itu (Zikri, n.d.). Pernyataan ini jelas menunjukkan sebuah kecemasan dengan prediksi tentang kehancuran nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jika hal ini dibiarkan, tentu tidak menutup kemungkinan bangsa yang dibangun dengan semangat juang yang tinggi dan korban yang tak terperiikan ini akan mengalami *the end of history*. Hal ini tidak dapat disangkal dari data intoleran yang dikumpulkan sejak tahun 2010 sampai 2017 berdasarkan laporan beberapa lembaga seperti dari SETARA institut menyebut 292 kasus, The Wahid Institute mencatat sebanyak 245 kasus dan CRCS-UGM mencatat 74 kasus. (Agna, 2012).

Tindakan kekerasan atas nama agama mencuat dan terdapat 4 faktor yang menyebabkan fenomena berkembangnya radikalisme: 1. Pemahaman agama yang terfokus pada tekstualitas, 2. Pemahaman ketidakadilan politik dan ekonomi, 3. Pemahaman ketidakadilan dalam hukum, 4. Proses dalam dunia Pendidikan yang mengajarkan ajaran kekerasan dan lebih mengutamakan indoktrinasi. (Qodir, 2016). Peristiwa konflik muslim Madura dengan orang Dayak Kaharingan menjadi salah satu konflik berdarah yang menakutkan, orang Madura sebagai pendatang dan migran baru di Kalimantan mendominasi atas masyarakat Dayak yang merupakan penduduk Asli sehingga terancam eksistensinya. (Sholeh, 2022) Puncaknya tahun 2001 kerusuhan Besar meluas, tidak hanya memakan korban yang besar dari kedua belah pihak, tetapi terjadi konflik yang melukai rasa kemanusiaan yaitu terjadinya pemenggalan kepala (Ngayau) warga Madura yang mayat-mayat tanpa kepala ditemukan bertebaran di jalan-jalan Kota Sampit.

Lain halnya yang terjadi di Maluku, konflik berbasis suku yang berkembang menjadi konflik agama yang melibatkan permusuhan antara umat Muslim dan Kristen. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, merupakan salah satu konflik yang paling dahsyat terjadi di Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Awal kejadian konflik di Maluku, target kekerasannya adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton dan Makassar, namun setelah itu, konflik diperparah oleh isu-isu sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap masjid dan gereja. Terlebih saat PDIP memenangkan pemilihan di Ambon tahun 1999, kekerasan meledak karena kemenangan PDIP yang diartikan sebagai kemenangan "kristen", hal ini membuat masyarakat bergerak mempertahankan agamanya dan melakukan kekerasan terhadap siapapun dari agama yang berbeda. (Lindawaty, 2016).

Konflik yang sama juga sempat melanda masyarakat Tolikara, Papua, tepatnya pada 17 Juli 2015 lalu. Konflik ini diduga ada kaitannya dengan agama, karena menasar kelompok agama tertentu dan juga rumah ibadah. Belum selesai persoalan ini, konflik antarwarga berbeda agama meletup di Singkil, Aceh, pada pertengahan Oktober 2015. Dengan alasan tidak memiliki izin, beberapa gereja menjadi sasaran amuk massa. Selanjutnya massa menuntut agar tempat-tempat ibadah umat kristiani tersebut ditutup selamanya. (Harahap, 2018)

Ledakan konflik horizontal yang bernuansa suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang terjadi di Sampit, Ambon, Tolikara, Singkil adalah tanda bahwa Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik. Indonesia telah memiliki sejarah konflik yang panjang. Tak dapat dinafikan, jika konflik mempengaruhi NKRI secara keseluruhan. Baik kerugian sosial yang menjadi rentan akibat mudahnya masyarakat tersulut provokasi, maupun kerugian ekonomi karena sumber dana untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan konflik tersebut. Hal ini menyebabkan, energi pemerintah mau tidak mau harus dikerahkan untuk meredam konflik hingga *recovery* pasca konflik

Secara faktual, fenomena sosio-politik di Thailand Selatan adalah situasi konflik antara penduduk Muslim-Thai dengan Negara Thailand yang memegang teguh ideologi Negara Buddha. Dalam perspektif sejarah, konflik ini terjadi seiring dengan perluasan wilayah kerajaan Thailand ke wilayah Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun).

(Rahayu et al., 2022) Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan kaum minoritas muslim dan terus berlanjut sampai sekarang dan Gerakan ini disebut Gerakan separatis oleh pemerintah Thailand.

Thailand belum mampu memperlihatkan kesatuan perbedaan keberagaman berbagai etnik yang ada. Pluralisme yang menjadi landasan kebangsaan. Kebijakan politik integrasi Thailand terhadap provinsi-provinsi Patani hampir semua kebijakan yang dibuat pemerintah untuk daerah Patani dimaksudkan untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan dan tradisi bangsa Melayu Patani. Semakin keras intervensi terhadap masyarakat maka semakin keras perlawanan (budaya) yang diberikan kepada pemerintah. (Yuniarto, 2005) Politik integrasi yang diterapkan pihak pemerintah hanya berhasil dalam memaksa orang-orang Melayu mengakui kekuasaan kenegaraan Thai secara simbolik.

Konflik Mindanao terjadi umumnya karena perebutan kepentingan dan kekuasaan yang berawal dari masalah primordial. Berkembang menjadi rumit karena etnis Moro yang notabene Islam berhadapan dengan mayoritas etnis Filipina yang mendominasi pemerintahan di mana mayoritasnya beragama Katolik. Munculnya gerakan-gerakan perlawanan di wilayah Mindanao, Filipina Selatan, memiliki tujuan untuk membebaskan masyarakat Moro dari pemerintah Filipina. (Indrawan & Kav, 2016) Kepentingan Bangsa Moro dalam konflik ini adalah mempertahankan wilayah Mindanao serta berusaha memisahkan diri dari Pemerintah Filipina. Sedangkan, kepentingan Pemerintah Filipina ialah menguasai wilayah Mindanao untuk Filipina dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah penting bagi Filipina dengan kekayaan alam yang melimpah serta posisi strategi di kawasan Asia.

Faktor-faktor penyebab konflik di Provinsi Rakhine yang melibatkan etnis Rakhine dan Rohingya lebih banyak disebabkan tindakan diskriminatif terhadap warga Rohingya etnis Bengali yang dilakukan oleh junta militer dengan para biksu Rakhine dibantu penduduk yang berasal dari etnis Rakhine. Bila dianalisa faktor-faktor konflik tersebut adalah (Revolusi, 2013) sebagai berikut: (1) faktor struktural yaitu negara yang lemah. Perkembangan demografi penduduk antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya yang dipengaruhi keadaan geografis di Rakhine dan pendudukan kolonial Inggris yang melakukan pemilahan garis batas negara tanpa memperhatikan logika etnis dan keamanan negara yang lemah. (2) faktor politik antar elit, kebijakan Burmanisasi yang eksklusif yang dilakukan oleh junta militer dengan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun model village, mereka menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah mayoritas Muslim Rohingya secara paksa. (3) Faktor diskriminasi ekonomi yaitu etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian sedangkan etnis Rohingya tidak diberi dalam menjalankan akses-akses perekonomian. (4) faktor pembangunan ekonomi yaitu dalam mempercepat pembangunan proyek telah banyak melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap penduduk lokal dan mayoritas yang menjadi korban adalah etnis Rohingya. (5) Faktor sosial dan budaya yaitu sejarah dendam (*reconquesta*) etnis Rakhine ketika nenek moyang mereka menjadi korban kebiadaban Kerajaan Mughal di mana banyak umat Buddha dan Hindu menjadi komunitas bawah yang dieksploitasi atas Mughal.

Semangat Mencapai Harmoni

Tanggung jawab harmoni dalam masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, media dan akademisi. Namun pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sebelum pemerintah menjaga harmoni masyarakat, Pemerintah yang harus membangun harmoni dulu di internalnya. Seperti, Pemerintah memberikan pelayanan yang memuaskan, kepastian hukum dan keamanan, hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk memfasilitasi upaya perdamaian, aparat Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu menumbuhkembangkan manajemen isu dalam menanggapi berbagai isu negatif yang berpotensi mengganggu proses rekonsiliasi yang diupayakan. Sosialisasi kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya ini, perlu diteruskan kepada seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun desa, untuk menjaga hubungan dialogis dengan masyarakat agar mereka ikut merasa terlibat bersama-sama dengan aparat pemerintah dalam mengusahakan perdamaian di kota Ambon.

Hal penting lainnya yang harus diterapkan dalam penyelesaian konflik di Indonesia bila terlibat konflik, adalah bahwa metode resolusi konfliknya harus merujuk kepada 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai warisan *the founding fathers* bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Sedangkan, Pancasila sebagai dasar kehidupan dan ciri budaya bangsa Indonesia, tidak tertutup dari perubahan.

Sehingga nilai-nilai luhur dan pluralitas yang terkandung dalam Pancasila, dapat merekatkan masyarakat semua golongan baik suku, agama, maupun afiliasi politik. Oleh karenanya, membumikan kembali dasar dan ideologi negara Pancasila menjadi salah satu solusi atas konflik sosial yang sering terjadi.

Secara teoritis, konsep negara nasional dapat dikelompokkan menjadi dua garis besar yaitu negara nasional integrasi dan negara nasional civil society. Negara Nasional integrasi merupakan konsep negara nasional yang menghendaki agar komponen bangsa yang berupa ras, agama, budaya melebur diri. Nasionalisme jenis ini meminta kesetiaan tertinggi anggota masyarakat adalah pada negara. Dan konsep kedua, negara nasional civil society adalah sebuah konsep negara nasional berbasis pada keragaman masyarakat dalam hal agama, budaya, aspirasi politik. (Rahayu et al., 2022) Pendapat negara nasional jenis ini berdasar pada asumsi tentang terbentuknya masyarakat. Keragaman tersebut mengisyaratkan bahwa suatu konstruksi sosial terbentuk secara alamiah yang menggambarkan pluralitas. keragaman tersebut dirawat dan dihargai eksistensinya sebagai sebuah aset yang berharga suatu masyarakat.

Sebuah Tawaran

Pekerjaan besar para tokoh negara-negara ASEAN terutama yang berdampak konflik disebabkan latar keragaman adalah menyatukan pecahan-pecahan persatuan yang diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia sebagai orang Timur yang santun, menjaga kebersamaan, gotong royong dan teposliro yang sudah sedikit demi sedikit tercerabut dari generasi bangsa ini. Dalam kerangka kebersamaan di Indonesia, keragaman dalam suatu masyarakat diikat dalam kesatuan yang dituangkan dalam frasa *Bhinneka Tunggal Ika*.

Konsep negara nasional *civil society* bisa dijadikan alternatif sebagai upaya membangun kebersamaan dengan menghargai eksistensi kelompok tanpa menghilangkan identitasnya. Kesadaran ini menjadi wacana bagi negara-negara konflik di ASEAN. Paradigma negara nasional *civil society* menekankan pada pentingnya kesadaran pembangun rumah bersama akan bisa memantik rasa kebersamaan dengan menafikan premodialisme, eksklusivisme di atas realita multikultural, multiras, multisuku, multietnik, multiagama, dan multibahasa suatu bangsa, dengan harapan tercapai kawasan negara-negara ASEAN bebas konflik.*

Referensi

- Agna, S. (2012). *The Wahid Institute dan gerakan kebebasan beragama di Indonesia: Perpektif gerakan sosialis*.
Dja'far, A. M., & Nisa, N. (n.d.). *Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*.
Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,36 Juta pada Juni 2022 | Databoks. (n.d.). Retrieved November 25, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022>
- Fitriah, R. D. (2018). Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural Di Negara Negara Asean (Malaysia, Filipina, Singapura Dan Brunei Darussalam). *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(2), 231–240.
- Harahap, S. (2018). Konflik etnis dan agama di indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), 1–19.
- Indrawan, R. M. J., & Kav, J. (2016). Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro di Filipina. *International and Diplomacy*, 2(1), 16.
- Lindawaty, D. S. (2016). Konflik Ambon: Kajian terhadap beberapa akar permasalahan dan solusinya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.
- Rahayu, S. H., Nugroho, T., Muthmainnah, M., Nadjih, D., Parid, M., & Bahem, N. A. (2022). Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 119–132.
- Revolusi, A. (2013). *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012*.
- Saidurrahman, S., & Arifinsyah, A. (2018). *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*.
- Sholeh, M. (2022). Konflik Muslim Madura Vs Dayak Di Sampit Serta Diskursus Kaharingan Sebagai Klaim Agama. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 63–74.

- Yuniarto, P. R. (2005). Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 7(1), 89–118.
- Zikri, A. (n.d.). INDONESIA ZAMRUD KERAGAMAN Upaya Penegelolaan Keragaman. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 12(1), 1–13.

ZETTY AZIZATUN NI'MAH adalah pegiat moderasi beragama di dunia Pendidikan terutama di Madrasah. Sebagai Instruktur Nasional Moderasi Beragama dalam program PKB MEQR Madrasah Reform Komponen 3 di bawah Kementerian Agama RI sejak 2021 sekaligus Instruktur Nasional AKMI Komponen 2 Tahun 2022. Zetty merupakan direktur *Jurnal Revorma* sekaligus penulis aktif di berbagai jurnal ilmiah. Ia juga tim penilai buku PA Puslitbang Kementerian Agama RI 2021-2022 dan guru dan wakil kepala madrasah di MAN 1 Kota Kediri. Ia dapat dihubungi di email: zetty100478@gmail.com.

ASEAN Sebagai Motor Perdamaian Dunia

Umar Juma Sau

Sejak berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ASEAN telah berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil dan sejahtera. Merujuk pada tujuan terbentuknya ASEAN, tentu negara-negara ini ingin menciptakan sebuah kawasan yang nyaman, damai dan bebas dari segala konflik dan pergolakan. Baik secara nasional maupun internasional. Tingkat nasional tentunya berkaitan dengan stabilitas dalam negara masing-masing. Secara internasional dimulai dari lingkup kawasan ASEAN itu sendiri hingga mencakup skala dunia. Dengan kata lain, ASEAN tidak saja mampu menciptakan perdamaian dalam cakupan “dunia” mereka saja, tetapi bagaimana ASEAN bisa menjadi motor penggerak untuk menggaungkan perdamaian di dunia.

Bukan tanpa alasan jika ASEAN dianggap penting menjadi pelopor perdamaian dunia, mengingat kawasan ini yang terletak sangat strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia maka posisi strategis ini, jika ASEAN mampu menciptakan kawasan yang kondusif maka akan sangat memungkinkan bagi ASEAN untuk menjadi contoh kawasan “hijau” di dunia yang bebas dari segala konflik yang ada. Posisi ASEAN yang sangat strategis ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab kawasan ini memiliki dampak yang baik jika keamanan dapat terwujud secara maksimal.

Semangat menciptakan kawasan yang aman, yang menjadi landasan utama terbentuknya ASEAN harus bisa ditularkan ke seluruh dunia. Maka ASEAN harus berkomitmen dan bisa bekerjasama tidak hanya saja dengan sesama anggota negara ASEAN, tetapi juga dengan negara-negara besar dan maju. Untuk itu ASEAN harus bisa menempatkan posisi tengah dalam setiap permasalahan yang muncul, lebih-lebih jika sudah melibatkan ketegangan negara-negara besar seperti Amerika, China atau Rusia. Contoh saja seperti permasalahan di Semenanjung Korea yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan, permasalahan perbatasan negara di Laut China Selatan yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam atau saat ini permasalahan dunia yang sedang membara yaitu masalah Palestina.

ASEAN yang merupakan salah satu organisasi besar serta dipandang sebagai salah satu organisasi dunia yang memiliki pengaruh penting hendaknya menjadi poros bagi terciptanya perdamaian dunia. Semangat menciptakan perdamaian dunia ini tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan menyemarakkannya lewat kampanye-kampanye atau membawa permasalahan ini di pertemuan-pertemuan tingkat dunia beserta tawaran atau solusi konkritnya.

Untuk mejandi polopor perdamaian dunia, tentunya harus dimulai dari ketahanan ASEAN itu sendiri. Bagaimana ASEAN meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam negeri berupa mampu mengentaskan permasalahan dan konflik internal masing-masing negara anggotanya, permasalahan antar negara anggota yang acap kali muncul, hingga isu-isu internasional yang kerap menyeret sesama negara anggota untuk terlibat pertikaian. Jika hal-hal seperti ini bisa teratasi maka bukan mustahil ASEAN bukan saja dapat menciptakan kawasan yang aman di lingkup wilayahnya, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menciptakan perdamaian dunia. *

UMAR JUMA SAU biasa disapa Ujes, lahir di Ternate. Saat ini menjadi Guru Bahasa Arab di MAN 1 Sula Kab, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Menghabiskan SD-SMA di Pasantren di Sukabumi, kemudian kembali ke Ternate dan menyelesaikan pendidikan S1 di STAIN Ternate pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Iulus 2011). Ia pernah menjadi Ketua Forum Lingkar Pena Maluku Utara.

Menyemai Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural di Kawasan ASEAN

A. Khoirun Nasihin

Toleransi beragama merupakan salah satu pilar utama untuk menjaga keharmonisan hubungan antar individu di tengah perbedaan keyakinan dalam masyarakat multikultural. Toleransi beragama dapat membantu masyarakat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam mengamalkan aktivitas keyakinannya. Kesadaran bertoleransi akan membawa pada lingkungan yang nyaman, terbuka dan inklusif bagi semua orang untuk belajar dan tumbuh bersama sambil menghormati perbedaan. Selain itu, kesadaran toleransi beragama dapat mencegah potensi konflik antar umat beragama. Toleransi beragama bukan hanya sekedar norma moral tetapi juga landasan masyarakat multikultural yang stabil dan otonom.

Toleransi beragama juga membuka jalan bagi masuknya kekayaan intelektual dan budaya yang tak ternilai harganya. Dalam lingkungan yang beragam agama, masyarakat dapat berbagi pengalaman hidup, pengetahuan, dan tradisi keagamaan. Hasilnya adalah pertukaran ide dan perspektif yang memperkaya seluruh komunitas. Budaya yang terbuka terhadap keberagaman agama juga mendorong rasa saling menghormati, mengurangi perbedaan pendapat, dan mendorong kerja sama yang positif antarkelompok agama. Dengan demikian, toleransi beragama tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang mengamalkannya tetapi juga membawa keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat multikultural.

ASEAN adalah contoh nyata kawasan multikultural, kaya akan tradisi dan kepercayaan. ASEAN adalah organisasi yang awalnya didirikan dalam kondisi yang kurang prospektif, karena para pendiri ASEAN sendiri memiliki *background* keberagaman yang sangat besar, baik dari sisi politik, sosial, budaya, dan latar belakang. Dari keberagaman tersebut muncul nilai-nilai yang mendukung toleransi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui upaya kerja sama dan dialog antar anggota ASEAN, kawasan tetap berkomitmen untuk menjaga dan mempromosikan semangat multikulturalisme, yang merupakan salah satu keunggulan kawasan ASEAN ini.

Toleransi beragama berperan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan di kawasan ASEAN yang heterogen. Bagi masyarakat yang berbeda agama, toleransi merupakan landasan menghargai perbedaan dan keberagaman keyakinan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana seluruh warga ASEAN dapat menjalankan agama mereka tanpa takut akan diskriminasi atau konflik. Lebih jauh lagi, toleransi beragama mendorong dialog dan pemahaman antar umat beragama, menciptakan jembatan untuk mengatasi kesalahpahaman dan prasangka. Melalui pertukaran ide dan budaya, komunitas warga di kawasan ASEAN dapat memperkaya cara pandang dan memperkuat semangat solidaritas, menjaga keharmonisan di tengah kekayaan keberagaman.

Selain itu, peran toleransi beragama juga menciptakan kerja sama yang positif dalam menyelesaikan konflik dan tantangan bersama. Memahami dan menghormati keyakinan agama orang lain mengarah pada terbentuknya hubungan yang sehat antar umat beragama. Hal ini membantu mengurangi risiko konflik dan membangun dasar yang kuat untuk kerja sama di berbagai bidang seperti pendidikan, masyarakat, dan ekonomi. Dengan demikian, toleransi beragama merupakan faktor kunci dalam membentuk masyarakat ASEAN yang sejahtera, harmonis, dan kohesif, yang mencerminkan semangat solidaritas dan integrasi sekaligus mendorong keberagaman.

Lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan di negara-negara ASEAN berperan penting dalam meningkatkan toleransi beragama. Pendidikan agama yang menyeluruh dan komprehensif memungkinkan individu untuk lebih memahami keberagaman keyakinan agama di sekitarnya. Hal ini membantu menghilangkan stereotip dan prasangka, menggantikannya dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui pendidikan, individu didorong untuk memahami nilai-nilai universal yang ada dalam agamanya masing-masing, sehingga menumbuhkan sikap

terbuka terhadap pandangan dan praktik agama lain. Selain itu, pendidikan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan beragama dalam memperkuat masyarakat multikultural.

Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan juga berperan penting dalam membentuk sikap toleran di kalangan masyarakat. Mereka menyediakan forum untuk interaksi antaragama, memfasilitasi dialog dan pemahaman antara komunitas yang berbeda agama. Umat beragama juga dapat menyelenggarakan kegiatan dan acara bersama untuk mendorong kerja sama yang positif, memperkuat solidaritas dan menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan membangun jaringan komunitas yang inklusif, individu bersedia menghormati dan mendukung keberagaman agama, sehingga mendorong toleransi yang kuat dalam masyarakat ASEAN yang multikultural.*

Referensi

- Rofidah, L., & Sahri, I. (2021). Kalimat Al-Sawa' Dalam Komunikasi Identitas Budaya Pada Deklarasi Amca ke-8 di Yogyakarta. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 8(2), 203-218. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v8i2.11276>
- Anon. (2020). Pembentukan Identitas ASEAN melalui Kegiatan ASEAN-KOREA Youth Forum. 2017(1), 19
- Asean.org. (2020). The Narrative of ASEAN Identity (Issue ASEAN Summit). https://asean.org/storage/2020/11/9-The-Narrative-of-ASEANIdentity_Adopted-37th-ASEAN-Summit_12Nov2020.pdf

A. KHOIRUN NASIHIN dilahirkan di Kabupaten Jepara 16 Agustus 1989 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, dan melanjutkan pada Program Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa dan organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya Forum Wacana IPB University, Relawan Guru di Organisasi Pengajar Harapan, dan Consultant pada Center for Strategic Entrepreneurial Leadership (CSEL), Universitas Indonesia.

BAB 12

Peran Guru dan Dosen dalam Pendidikan ASEAN

Urgensi Peningkatan Pertukaran Guru Antarnegara ASEAN

Fahrudin Achmad

Program pertukaran pelajar telah sangat lama kita kenal. *Student Exchange* adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi pelajar atau mahasiswa untuk belajar di sekolah lain atau universitas lain, termasuk di luar negeri. Bahkan dalam katalog tentang program ini, Pertukaran Pelajar AFS di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1954, dipelopori oleh Wartomo Dwijoyuwono, Mohammad Dipenogoro, dan Ibrahim Kadir. Pada tahun 1956 Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan 7 orang siswa Indonesia untuk mengikuti program AFS di Amerika. Saat ini AFS bekerja sama dengan 40 negara partner (meliputi negara-negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, Amerika). Yayasan Bina Antarbudaya yang menjadi perwakilan AFS di Indonesia memiliki 20 *chapter* yang tersebar di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Indonesia, Bogor, Bandung, Karawang, Semarang, Indonesia, Malang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Ambon. Kegiatan di cabang dikelola penuh oleh relawan. Relawan tersebut mencakup seluruh lapisan anggota masyarakat dari berbagai latar belakang, baik usia, pendidikan, sosial ekonomi. Tentu saja jauh sebelum itu, kita yakin sudah terjadi pertukaran pelajar meski nusantara berstatus Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain program AFS, kita akan menemukan saat ini sangat banyak program pertukaran pelajar (tingkat SMA bahkan SMP) dan pertukaran antar mahasiswa, baik dibawah langsung melalui Kementerian atau Dinas yang membawahi maupun kerjasama antar perguruan tinggi secara langsung, negeri ataupun swasta. Kerjasama antar lembaga pendidikan ini terus berkembang karena setidaknya mendapatkan tiga hasil yang dapat dikembangkan secara berkesinambungan:

1. Wawasan tentang lembaga hingga negara tempat bertukar
2. Pendalaman bahasa asing
3. Membentuk karakter humanis dan transformatif sebagai bagian dari peradaban dunia yang beragam

Namun, ada komponen lain dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya juga perlu untuk terus meningkatkan program ini, yakni pertukaran guru antar negara, khususnya antarnegara se-ASEAN.

Data yang dapat ditemukan, program *Teacher Exchange* belum sepopuler *Student Exchange*. Bahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak berlangsung rutin setiap tahunnya, pun dengan jumlah sedikit yang tidak merepresentasikan perwakilan sekolah-sekolah se-Indonesia dari berbagai level pendidikan, bentuk *ke-khas-an* kurikulum, hingga representasi mewakili provinsi atau kelompok masyarakat.

Data lain, beberapa provinsi berinovasi mengadakan program ini secara mandiri dengan langsung bekerjasama dengan beberapa lembaga di suatu negara, misal Pemprov Jawa Timur dengan lembaga pendidikan di Korea Selatan. Program Indonesia-Korean Teacher Exchange yang berlangsung sejak tahun 2013 awalnya dimotori para mahasiswa asal Jawa Timur yang melanjutkan studi di perguruan tinggi yang ada Korea Selatan. Program tersebut berlangsung selama 3 bulan, dengan syarat kepesertaan yang wajib memenuhi berbagai standar umum dan khusus, selain administrasi, terutama bahasa Inggris minimal skor 450 dalam sertifikat TOEFL.

Tentu hal di atas sangat baik, tapi mengapa belum menjadi salah satu program mobilisasi oleh antar negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas sesama guru? Sedikitnya 5 aspek yang dapat dieksplorasi ketika program ini berlangsung:

1. Dokumentasi faktual suatu negara, melihat secara langsung berbagai hal dan aspek di dalamnya, khususnya alam, budaya, penggunaan bahasa, pergaulan antar penduduk, dan aspek lainnya sebagai corak suatu bangsa.

2. Dokumentasi budaya lokal, sebagai karakteristik yang sangat baik ditransformasikan dalam pelajaran di sekolah asal, membuka wawasan peradaban dunia pada siswa yang berimbas pada memahami keberagaman.
3. Dokumentasi karakter dan budaya pergaulan manusia di setiap tempat yang berbeda, sehingga guru di sekolah asal, secara langsung memperlihatkan arti humanisme dalam memahami keberagaman sifat dan karakter manusia yang terbentuk dari berbagai aspek.
4. Aktifitas kemanusiaan, mempraktikkan sisi lain saling bekerjasama antar individu dan kelompok profesi (guru), ketika di tempat tersebut juga ada hal kemanusiaan yang menjadi problematika bersama, misal pengelolaan rumah singgah atau panti asuhan dan atau panti jompo, membantu pendidikan anak-anak terlantar atau di bawah garis kemiskinan, dan program lainnya yang dapat menjadi studi pembandingan pengelolaannya di negara asal masing-masing.
5. Pendalaman bahasa asing, khususnya Inggris, sehingga guru sebagai pengajar di sekolah asal, secara langsung mempraktikkan penggunaan bahasa internasional.

Masih banyak aspek lain yang dapat menjadi pertimbangan betapa strategisnya program pertukaran guru antar negara di ASEAN dalam meningkatkan kualitas para pendidik ini. Dari 5 aspek di atas, setidaknya peningkatan kualitas bahasa Inggris salah satu metodologi yang hampir pasti memberi pengalaman sangat baik bagi para guru yang mengikuti program. Bahasa adalah budaya, sedangkan budaya adalah sesuatu yang terjadi secara terus menerus. Ketika bahasa tak dibudayakan, maka sulit menjadi alat komunikasi yang rutin dan harian, apalagi menyiapkannya sebagai bahasa pergaulan se-dunia.

Selain bahasa Inggris, dalam praktiknya kerjasama antar guru antar negara tersebut akan berbagi pula berbagai metode dan teknik mengajar. Ini akan menjadi pengayaan sekaligus kekayaan intelektual para peserta program. Kombinasi dan transformasi antar peserta bahkan dapat membentuk rumus-rumus baru, trik-trik baru, dalam mengembangkan cara mengajar di kelas. Akan menjadi monumental ketika dibukukan dan menjadi sejarah literasi dalam dunia pendidikan antar negara.

Beberapa faktor sehingga program ini mudah dijalankan negara se-ASEAN, antara lain:

1. Kemiripan alam. Sisi geografis tentu saja karena negara-negara di Asia Tenggara sama-sama terletak di iklim tropis dan beberapa bahkan dilalui oleh garis khatulistiwa,
2. Kemiripan bahasa. Terutama serumpun melayu meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, hingga sebagian Philipina. Sementara Bahasa Thailand dan Laos termasuk ke dalam rumpun bahasa Tai-Kadai, Bahasa Kamboja termasuk ke dalam rumpun bahasa Austroasiatik, bersama dengan bahasa Vietnam yang menggunakan aksara Latin.
3. Kemiripan sosial budaya. Adanya rumpun-rumpun antar negara di Asia Tenggara, berawal dari adanya kesamaan atau kedekatan asal muasal leluhur, berkembang dengan pernikahan antar suku dan pembauran berkehidupan. Akan sangat banyak hal-hal unik di suatu negara menjadi mirip di negara lain dalam kawasan ASEAN.
4. Kebutuhan sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berlatar sebagai negara berkembang, pernah dijajah oleh asing (kecuali Thailand), memicu dan memacu keinginan besar menjadi negara maju dalam banyak aspek, tak terkecuali pendidikan. Bahkan aspek ini di awal kemerdekaan tiap-tiap negara menjadi perhatian utama menyiapkan generasi untuk memperbaiki bangsa.
5. Kemudahan transportasi antar negara dengan MEA. Sejak 2015 negara-negara se-ASEAN menyepakati yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Salah satu bentuk konkritnya, penerbangan ataupun transportasi darat antar negara ASEAN tidak memerlukan visa untuk masuk, cukup beli tiket dan menyiapkan paspor, sesama penduduk se ASEAN dapat mengunjungi negara yang diinginkannya.

Menuju Indonesia Emas tahun 2045, pendidikan menjadi aspek yang tak dapat diabaikan, sebab pendidikan berkualitas tinggi akan mengantar negara maju dan mampu meningkatkan kualitas hidup

rakyatnya lebih baik, dan jauh lebih baik lagi. Indonesia sebagai negara yang berkembang pesat di percaturan politik dan ekonomi internasional, sangat penting memperhatikan peningkatan kualitas guru dalam semua aspek, dengan mengembangkan berbagai program yang membantu dan menunjang hal tersebut. Sebab guru adalah komponen utama dan penting dalam dunia pendidikan. Tak salah untuk diriset dan dirumuskan lebih mendalam, menjadikan Program Pertukaran Guru antarnegara ASEAN sebagai salah satu alternatif yang mampu mempercepat peningkatan kualitas yang diimpikan.*

FAHRUDDIN ACHMAD lahir di Bulukunyi, sebuah desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 6 Agustus 1978. Menyelesaikan S1 di Teknik Universitas Hasanuddin pada 2002, namun perjalanan hidupnya lebih tertarik pada dunia training guru dan pengembangan pendidikan berbasis sekolah. Aktif berorganisasi di Muhamadiyah, Forum Lingkar Pena, hingga Rumah Produktif Indonesia. Juga menulis berbagai *genre*, prosa (esai, artikel, opini) hingga sastra (puisi dan cerpen). Sesekali menjadi konsultan atau analis politik.

ASEAN Memperkokoh Eksistensi Bangsa

Abustan

Pendahuluan

Tak dapat diingkari bahwa di tengah kuatnya rivalitas dan impitan aneka krisis, Indonesia berhasil memperkokoh dan membangun titik temu dalam forum multilateral sekelas G 20. Kini, presidensi G20 turut tandai era Asia. Memang, tentu saja harus diakui bahwa G20 Indonesia bukanlah kebetulan. Saat dunia tengah didera krisis dan konflik, upaya RI membangun sinergitas dan kesetaraan dari berbagai pihak yang kini berseberangan dalam satu forum multilateral sekelas G20 menegaskan era kebangkitan Asia.

Fenomena itu, kedatangan para menteri luar negeri, para ambassador dan kepala negara di Nusa Dua, Bali, merupakan suatu kehormatan bagi negara Indonesia yang diberikan kepercayaan (amanat) sebagai tuan rumah G20. Berbagai poin penting dan krusial menjadi agenda pertemuan, salah satu hal penting yang kami anggap menarik adalah pemberdayaan dan kesetaraan pendidikan. Pendidikan merupakan instrumental dalam kaitannya dengan literasi kritis (*critical literacy*), seperti untuk mengembangkan debat dan dialog publik. Di samping itu juga memiliki peran proses sosial dengan mengembangkan kemampuan untuk menjalin hubungan satu sama lain, dan dengan horizon pemahaman yang lebih luas.

Lebih dari itu, pendidikan juga memiliki peran pemberdayaan dan distributif dalam memfasilitasi kemampuan bagi orang-orang yang kurang beruntung, kalangan marginal, dan terkuilkan untuk bisa mengorganisasikan diri bagi negara-negara berkembang yang nasibnya belum setara dengan negara-negara maju. Dalam konteks inilah G20 memadukan atau mengsinergikan keberadaan negara-negara tersebut. Penyetaraan kapabilitas dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi emansipasi dan transformasi sosial. Dalam kaitan itu, pendekatan kapabilitas memandang heterogenitas manusia sebagai aspek fundamental dalam kesetaraan pendidikan dan menekankan perlunya menghubungkan biografi individual dan sosial, serta aspek tata kelola secara kolektif. Matriks kesetaraan dalam perspektif G20 sangat diharapkan adanya pengembangan kualitas pendidikan bagi negara-negara yang bernasib belum sebaik dengan negara maju.

Dengan kata lain, kesetaraan ditentukan oleh aspek tanggung jawab yang terhimpun atau yang bergabung dalam komunitas G20 untuk menciptakan pemberdayaan/kesetaraan pendidikan. Artinya bagaimana ada program serta visi bersama yang secara berkelanjutan “memecah perbedaan” disparitas antar negara. Hal itu sejalan dan selaras semangat untuk menyukseskan Chairmanship Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Ujian Bangsa Indonesia

Republik Indonesia telah berusia 77 tahun pada saat perayaan kemerdekaan RI tahun ini. Itu berarti, perjalanan bangsa ini sudah tergolong panjang, mekewati berbagai pasang surut. Hampi di setiap era pemerintahan, muncul ujian besar berupa persoalan pelik yang dapat menjerumuskan bangsa pada titik nadir.

Di era kali ini, amuk pndemi covid-19 menerjang dunia tanpa melewatkan Indonesia. Lebih dari 157 ribu jiwa putra-putri bangsa melayang. Ribuan anak yang masih belia kehilangan orang tua. Selama dua tahun lamanya kita benar-benar terkurung, kehidupan masyarakat terasing dan terisolir dari interaksi sosial, karena pembatasan-pembatasan ketat dari pemerintah untuk menyelamatkan warganya dari kematian. Bahkan, jutaan orang mengalami penurunan pendapatan secara drastic, karena rata-rata mereka mengalami kehilangan mata pencarian. Proses belajar dan mengajar terganggu hingga mendistrupsi pencetakan sumber daya manusia unggul. Karena itu, kita patut bersyukur keadaan telah berangsur pulih. Berkat kepemimpinan yang efektif dalam penanganan pndemi, di dukung semangat gotong royong dan persatuan masyarakat, bangsa ini mulai bangkit kembali. Geliat kebangkitan itu dapat dilihat dalam forum G20 Indonesia 2022.

Meski disadari pula, kini Indonesia tengah menjalani tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024. Untuk itu manifestasi pesta demokrasi ini kita berharap tetap kondusif dengan menjaga ketertiban dan peradaban budaya bangsa yang senantiasa mengedepankan “sopan santun”. Hiruk-pikuk politik jangan sampai “menyandera” iklim pertumbuhan perekonomian, melemahkan penegakan hukum (*law enforcement*). Bagaimanapun, tak dapat dimungkiri, pemerintah memerlukan dukungan politik agar beban subsidi yang memberatkan perekonomian nasional sedikit demi sedikit dikurangi. Kesemuanya itu, demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan warga neagara Indonesia. Akhirnya, seluruh komponen anak bangsa akan mengharapkan kontestasi politik dalam pesta demokrasi 2024 lebih memperkokoh eksistensi bangsa, serta memperkuat nilai keadilan dan pemberdayaan masyarakat dan penguatan budaya bangsa.

Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan terhadap akses pendidikan, harus terus menerus diusahakan melalui mutu pendidikan. Harus dihindari elitisme yang mengarah ke kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah, antar golongan, dan antar wilayah yang bersifat kontradiktif dengan tujuan pendidikan. Untuk itu, selain perlu pemerataan pembangunan fisik sekolah sebagai “infrastruktur keras” (*hard infrastructure*), yang lebih penting lagi ialah pemerataan sebaran guru yang bermutu dan infrastruktur-lunak (*soft infrastructure*) lainnya.

Pemajuan Kebudayaan Memperkuat Peradaban Bangsa

Budaya bangsa yang tersebar di setiap pelosok nusantara jangan sampai terkikis ataupun musnah (punah) akibat desakan peranan teknologi yang juga menyebar massif di masyarakat. Apalagi di tengah persaingan global yang terus menerus “menggelingding” di seantero dunia, keniscayaan ini tentu harus direspon dan/atau disikapi oleh peserta G20.

Indonesia, tak terbantahkan keragaman budaya bangsa sudah dikenal di mancanegara. Kekayaan yang tak ternilai harganya ini, karena itu tidak saja harus dirawat tetapi lebih dari itu perlu upaya serius untuk memajukan sebagai modal pembangunan nasional. Pemerintah mulai serius memperhatikan dengan menghidupkan kembali budaya-budaya bangsa yang sempat mati suri. Salah satu perhatian tersebut ialah penyediaan dana abadi kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (kemendikbud-Ristek) sebesar Rp 5 triliun sebagai komitmen dan kepedulian pemerintah dalam mendukung pemajuan kebudayaan Indonesia serta bagian dari revolusi industri 4.0. (Media Indonesia, Selasa, 16 Agustus 2022).

Alokasi dana abadi kebudayaan itu bertujuan menyelesaikan kendala mekanisme pengelolaan keuangan tersebut ketika melangsungkan kegiatan pemajuan kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia. Penggunaan alokasi dana akan fokus kepada teknis pembiayaan yang sulit dibiayai untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Secara eksipit, hal itu telah diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya dana abadi kebudayaan, masyarakat dapat menjalankan dan menjaga kebudayaan Indonesia dengan lebih baik lagi untuk masa mendatang. “Kebudayaan kita itu punya potensi yang sangat besar, ini bisa menjadi salah satu investasi masa depan dan mendukung visi Indonesia maju.” kata Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbud - Ristek Fiiitra Arda (Media Indonesia, Rabu, 10/8/2022).

Pendidikan dan Semangat ASEAN

Bangsa Indonesia haruslah merespon dan menyambut tahun 2023 dengan semangat, sebab Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN, Indonesia akan menjadi salah satu pemain kunci dan memainkan peranan penting setelah menjadi Presiden G 20 tahun 2022. Dua posisi strategis tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan dan atau memperkokoh eksistensi kepemimpinan Indonesia yang berdampak bagi kawasan.

Dalam kerangka ASEAN, maka pada titik inilah Indonesia akan memimpin rangkaian proses kegiatan seperti KTT ASEAN atau yang berkorelasi/terkait, serta memajukan atau mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN, dan memberi penguatan internal dan mitra eksternal ASEAN. Oleh karena itulah, berbagai perhelatan regional yang sangat urgent dan strategis bagi ASEAN haruslah menjadi momentum untuk menumbuhkan perhatian masyarakat Indonesia khususnya dan ASEAN pada umumnya.

Untuk itu, suasana kemeriaan dan semangat ASEAN yang dibangun/diciptakan oleh kepemimpinan yang ada sekarang, terus terang mengingatkan kembali pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika (18 April 1955), Bung Karno mengingatkan: “Dan saya minta kepada Tuan-Tuan, janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya

saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita diberbagai wilayah Asia-Afrika mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan materil yang nyata, dilakukan oleh sekelompok kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat . . . Dimana dan bagaimanapun ia muncul, kolonialisme adalah hal yang jahat, yang harus dilenyapkan di muka bumi.”

Atas dasar itulah, keberadaan dan kepemimpinan Indonesia di G20 pada level ASEAN haruslah mendatangkan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meminjam istilah ungkapan Albert Camus, “Freedom is nothing but a chance to be better.” Kemerdekaan (kebebasan) sejati itu harus dihayati sebagai peluang untuk mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik.

Asumsi prinsip dasar itulah, menunjukkan perbedaan dalam variasi interpersonal dengan konteks yang berlainan, konsepsi pendidikan tidak bisa begitu saja menyeragamkan pendekatan pendidikan bagi orang dan lingkungan berada, dengan orang dan lingkungan tertinggal. Di masa pandemi ini, misalnya, tidak semua kalangan bisa belajar melalui melalui media digital. Dengan penyeragaman pendekatan, klaim “pendidikan merdeka” bukan menjadi wahana “penyetara besar” (great equalizer), malahan bisa semakin memperlebar ketidaksetaraan (great unequalizer) (Yudi Latif, 2022).

Kondisi demikian, memang harus dicermati dan diwaspadai bahwa ranah pendidikan bisa menjadi ranah kontestasi “kuasa kekuasaan”. Manakala negara tidak mampu menyiapkan berbagai instrumen untuk menjagayatetap dalam ambang batas inklusivitas, pendidikan bisa menjadi skema bagi pembedaan kelas dan bagi pemaparan privelese sosial. Seperti diingatkan Pierre Bourdieu, kelas yang dominan tidak menjalankan dominasi mereka secara terang-terangan, tidak secara serta-merta menggunakan paksaan terhadap kelas yang didominasi, agar kelas yang didominasi bersedia memenuhi kehendak mereka. Alih-alih, pengaruh dari kelas yang dominan dilembagakan dalam modal kultural dan ekonomi, yang dijalankan di seluruh lembaga dan praktek kemasyarakatan, dan terutama direproduksi lembaga-lembaga dan praktik-praktik pendidikan (Bourdieu, 1988).

Dengan implikasi pendidikan yang berwajah ganda, menjadi wahana kesetaraan dan kesenjangan sekaligus, desain institusional dari sistem pendidikan dan pelatihan sangat menentukan. Menentukan peranan yang tepat bagi pemerintah dan swasta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, terlebih bagi negara seperti Indonesia dengan peran swasta yang sangat luas. Maka dari itulah, berbagai isu pendidikan nasional dua dekade lebih selalu menjadi kerisauan, mulai dari persoalan guru, kurikulum, ujian nasional, pengelolaan anggaran pendidikan, standarnisasi, sertifikasi, wajib belajar, isu pluralisme, hak asasi manusia, dan ancaman distigrasi bangsa. Hal itu harus diakui bahwa kerisauan itu muncul karena pengelolaan pendidikan di berbagai lini dinilai mengalami disorientasi yang mendesak secepatnya dikoreksi ke arah yang benar. Misalnya, mengapa dengan anggaran pendidikan yang amat besar, minimal 20 persen APBN dan APBD pendidikan kita dinilai terendah di dunia. Mengapa program sertifikasi guru yang biayanya ratusan triliun, tetapi hasilnya sama seperti tanpa program sertifikasi? (Hafid Abbas, 2019).

Dengan demikian, pembangunan manusia merdeka dengan pemberdayaan kapabilitas tentu sangat diharapkan dalam rangka percepatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sejalan dengan itulah, sehingga peranan Indonesia di kancah ASEAN diharapkan mampu lebih optimal, yang pada gilirannya akan memberikan pengembangan kapabilitas dan keberfungsian kemanfaatan manusia Indonesia. Bahwa semua tingkatan level pembangunan, sejumlah kapabilitas sangat esensial bagi pembangunan manusia, karena tanpa hal itu berbagai pilihan dalam hidup tak bisa direngkuh.

Kapabilitas-kapabilitas tersebut terutama menyangkut kemampuan mengembangkan kehidupan yang sehat, berpengetahuan (rasional), dan memiliki akses terhdsdp sumber daya yang diperlukan bagi standar hidup yang layak. Selain itu, banyak pilihan yang harus dinilai manusia sendiri. Itu termasuk kebebasan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta penghargaan atas hak-hak asasi manusia.

Dalam kaitan dengan pengembangan kapabilitas itu, pendidikan dipandang sebagai kapabilitas dasar. Pendidikan dinilai sebagai “salah satu dari relatif sedikit jumlah wahana sentral.” Memiliki kesempatan bagi pendidikan dan pengembangan kapasitas pendidikan bisa memperluas kebebasan (pilihan) orang. Dalam konteks inilah menjadi penting dan relevan G20 dan peran konkrit Indonesia di level ASEAN-Pasifik. Sebab bagaimanapun, perjuangan ASEAN ialah perjuangan meninggikan martabat dan kapabilitas bangsa, dengan menumbuhkan manusia etis yang kreatif dalam kerangka ksetaran, persatuan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama.

Konklusi

Sebagaimana yang telah dipaparkan dan diisyaratkan di pendahuluan dan pembahasan maka ada beberapa point penting yang dapat disimpulkan:

Pertama, tentu saja tak terbantahkan bahwa keberadaan KTT ASEAN dan KTT G20 dapat lebih memperkokoh eksistensi Indonesia di kancah Internasional. Di mana KTT G20 Indonesia mengajak semua negara untuk bangkit bersama.

Kedua, pertemuan dan dialog antar negara diharapkan dapat merespon isu-isu global dan mengimplementasikan secara konkrit, terutama pemberdayaan dan kesetaraan pendidikan antar negara berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi, pemberdayaan dan kesetaraan pendidikan juga menjadi salah satu agenda, disamping pemulihan ekonomi, isu global dan lingkungan

Ketiga, pendidikan sebagai ranah publik haruslah menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama bagi negara-negara yang melaksanakan KTT ASEAN dan KTT G20, sehingga dapat memajukan, melindungi, dan menegakkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata tanpa diskriminasi.

Keempat, pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang kita saksikan begitu antusias, terbukti mengambil inisiatif pertemuan bilateral jelang pembukaan KTT G20 yang pada 14 November 2022 para delegasi negara sudah berdatangan. Tentu saja publik berharap optimis akan muncul gagasan baru dalam rangka pemberdayaan akselerasi pendidikan yang lebih adil dan setara pada setiap negara yang tercakup dalam kelompok G20.

Kelima, anggota ASEAN diharapkan sepakat untuk menyerukan perdamaian. Apalagi Ukraina memperluas penggalangan dukungannya ke Asia Tenggara dengan menjadi negara ke 50 yang menandatangani perjanjian kerja sama dan persahabatan ASEAN. *

Referensi

- Abustan, Sosiologi Negara Hukum, Cet 1, ISBN 978-602-7890-15-2, Penerbit Universitas Islam Jakarta
-----Hak Asasi Manusia (Isu-isu Kritis Nilai-Nilai HAM), ISBN 978-623-231-986-8, Penerbit PT RajaGrafindo
----- Mencermati Korelasi Antar Lembaga Negara, Artikel, Opini Kompas, 6 September 2021
Abbas Hafid, Meluruskan Arah Pendidikan, ISBN 978-602-412-754-1, PT Kompas Media Nusantara
Azra Azyumardi, Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majemuk, Penerbit ICRP dan Kompas
Latif Yudi, Kemerdekaan dengan Pendidikan, Selasa, 16 Agustus 2022
Kompas, Myanmar Masih Jadi Ganjalan ASEAN, Jumat, 11 Nov 2022
Kompas, Pebisnis G20 Serukan Perdamaian, Selasa, 15 Nov 2022 .

ABUSTAN lahir di Bone, 27 Mei 1962. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum tata negara di Universitas Muslim Indonesia Makassar, menjadi anggota DPRD Provinsi SulSel 1999-2004, Komisioner BPKN RI (2013-2016), Pengurus KAHMI/ICMI, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pernah mengajar di beberapa kampus di Makassar, yakni Universitas Indonesia Timur (UIT), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Bosowa dan Universitas Fajar. Ia juga mengajar di Universitas Nasional (UNAS), dan kini Dosen/Pengajar tetap di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta (UID). Buku yang telah ditulisnya adalah *Mozaik Pemikiran Hukum dan HAM Pasca Reformasi*, *Parpol di Tengah Pusaran Korupsi*, *Membumikan Perlindungan Konsumen*, *Jalan Terjal Demokrasi*, *Filsafat Hukum (Konsepsi dan Implementasi)*, *Sosiologi Negara Hukum*, *Relasi Pemerintahan Pusat-Daerah*, *Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Konstitusi*, *Hak Asasi Manusia (isu-isu kritis & Kontekstual HAM)*, *Hukum Konstitusi Negara dan Demokrasi*. Tulisannya dimuat di *Kompas*, *Tempo*, *Republika*, dll. Di samping itu juga aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan nasional dan internasional. Contact person 087743161640, Alamat email: cakbus.community@gmail.com.

Peranan Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah 3T di ASEAN

Afrianti

Peranan guru dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T, merupakan ujung tombak untuk mengukur, sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah negara di bidang pendidikan. Bilamana di wilayah 3T, kualitas pendidikan bagus, hal ini membuktikan bahwa pemerintah suatu negara serius dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. "Mengapa demikian?" Apabila mengukurnya berdasarkan kepada data kualitas pendidikan yang berada di wilayah perkotaan, atau wilayah kota kabupaten, tentu hal ini jelas akan menunjukkan peningkatan keberhasilan dari pendidikan.

Wilayah perkotaan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang baik, lengkap dan canggih, selain dari itu juga komponen penunjang kualitas pendidikan tersedia seperti; sumber daya manusia, sumber pustaka dan, segala akses yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan ada. Bahkan tidak jarang, sekolah yang ada di wilayah perkotaan dijadikan sebagai pilot projek untuk penerapan program pendidikan baru dari pemerintah. Hal ini dapat ditemukan di seluruh wilayah di setiap negara yang ada di dunia. "Bagaimana dengan kualitas pendidikan yang ada di daerah 3T?"

Berbicara mengenai daerah 3T, yang muncul di benak kita adalah sebuah daerah yang jauh dari keramaian, tertinggal, dan terpencil, bahkan berlokasi di pedalaman yang sulit dijangkau, tidak jarang ditemukan daerah tersebut hanya bisa dijangkau melalui perjalanan udara, laut, sungai dan tidak mempunyai akses jalan darat. Sekiranya akses masuk ke lokasi daerah 3T ada, itu pun kondisinya sangatlah memprihatinkan, sebab medan yang dilalui akan sangat sulit sekali, melintasi tebing, terjal, curam, licin dan sebagainya. 3T merupakan akronim dari Tertinggal, Terdepan, Terluar. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, tidak heran, jika banyak wilayahnya yang tergolong ke dalam kategori daerah 3T. Dan, daerah 3T tentu tidak hanya dijumpai di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN.

Di negara Indonesia daerah 3T lebih banyak ditemukan di bagian timur wilayah Indonesia, seperti di wilayah Papua terdapat 30 kabupaten, wilayah Maluku 8 Kabupaten, wilayah Nusa Tenggara sebanyak 14 kabupaten, wilayah Sulawesi sebanyak 3 kabupaten, dan wilayah Sumatera 7 kabupaten. Kalau dilihat dari Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 6 kriteria dalam penetapannya, yakni; (a). perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia, (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, (e) aksesibilitas, (f) karakteristik daerah (*fasal 2 ayat 1*). Menurut Peraturan Presiden ini, yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id>).

Peraturan Presiden mengenai daerah tertinggal dan Peraturan Pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, itu sangat jelas ada aturannya, dan juga menjadi topik perbincangan di berbagai media. Di sini yang ingin kita bicarakan adalah pendidikan di sekolah-sekolah yang tidak termasuk ke dalam peraturan presiden dan peraturan pemerintah tersebut. Lokasi di mana tempat bangunan sekolah itu berdiri, tidak termasuk pada kelompok daerah 3T, desa tertinggal, atau kecamatan tertinggal.

Namun, kualitas pendidikan di sekolah tersebut sangat jauh tertinggal, baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusianya, jumlah peserta didik, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, keamanan, akses jalan menuju lokasi sekolah, letak/lokasi tempat berdirinya bangunan gedung sekolah dan sebagainya. Di sekolah seperti ini, peranan seorang guru dipertaruhkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, tidak jauh berbeda dengan guru yang bertugas di daerah 3T sesuai kriterianya. Namun perhatian terhadap sekolah seperti ini, masih kurang, sebab tidak ada perlakuan istimewa, sebagaimana yang didapatkan oleh guru-guru yang bertugas di daerah yang masuk ke dalam kategori 3T.

Seandainya ada pemisah peraturan antara daerah 3T dengan peraturan pendidikan tertinggal, maka tidak akan banyak kita temukan permasalahan kualitas pendidikan di daerah yang tidak termasuk kelompok 3T, tetapi sama memprihatinkannya dengan kondisi daerah yang ditetapkan sebagai daerah 3T. Saat ini di seantero dunia telah berbicara tentang pendidikan yang berstandar Internasional, pendidikan berbasis teknologi informatika. Dalam hal ini, pada daerah 3T, tentu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan seluruh negara di Asia Tenggara dan di dunia, mempunyai strategi, solusi, dan program percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan di negaranya masing-masing. Salah satu contoh upaya pemerintah di Indonesia. Baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu Johnny G. Plate, menegaskan komitmen pemerintah yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan pemerintah memprioritaskan untuk wilayah (3T (<https://www.kominfo.go.id>))

Direktorat Sekolah Dasar telah meluncurkan GIAT SD, kependekan dari Galeri Informasi, Aktivitas dan Transformasi Sekolah Dasar yang berfungsi sebagai pusat informasi. Semua informasi terkait kebijakan dan program sekolah dasar ada di sini. Informasinya dalam bentuk video, artikel berita, foto, buku elektronik dan juga majalah digital. Semua media sosial resmi milik Direktorat Sekolah Dasar ada di laman ditpsd.kemendikbud.go.id Direktorat Sekolah Dasar meluncurkan Chromebook untuk tenaga pendidik sebagai media pembelajaran di sekolah.

Chromebook adalah jenis komputer yang menjalankan system operasi (OS) Chrome, yaitu operasi dengan penyimpanan cloud, memiliki berbagai fitur google di dalamnya. Chromebook mempunyai beberapa kelebihan diantaranya adalah memiliki perlindungan virus bawaan sehingga bebas virus ketika menjelajah online maupun offline. Selain itu juga masa pakai baterai lebih dari 8 jam. Sehingga computer berbentuk Chromebook ini aman digunakan baik oleh siswa maupun oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Dengan masa pakai baterai lebih dari 8 jam, guru tidak perlu khawatir bilamana di sekolahnya belum ada jaringan listrik, maupun jaringan internet, sebab fitur-fitur yang ada di dalamnya terkoneksi dengan google.

Sudahkah semua sekolah menerima bantuan chromebook? Di daerah 3T, jelas ini menjadi prioritas utama pemerintah. Bagaimana dengan sekolah yang terletak di lokasi, yang jika dipantau dengan google map, tampak bahwa jarak antara jalan beraspal dengan gedung sekolah, hanya berkisar 5 km dan akses jalannya lurus?

Namun, ketika dilewati, membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang semestinya. Ini disebabkan oleh medan jalan yang berlubang, berlumpur, lengket, miring, sempit dan terjal. Bangunan sekolah berdiri di tengah-tengah perkebunan, yang tidak ada satupun bangunan rumah penduduk di sekitarnya. Sekolah tersebut berdiri semenjak 40 tahun lalu. Jarak sekolah dengan pemukiman masyarakat yang terdekat berjarak 3 km. Sepuluh tahun terakhir, jumlah peserta didik tidak lebih dari 50 orang, dan setiap tahun mengalami penurunan. Dana Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan jumlah peserta didik, sedangkan operasional sekolah lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh sekolah yang jumlah peserta didiknya di atas 100 orang. Salah satu contoh, pada pelaksanaan ANBK. Sekolah yang memiliki chromebook serta mempunyai jaringan listrik dan internet. Tak perlu berfikir panjang, tinggal melaksanakan di sekolahnya masing-masing.

Lain halnya dengan sekolah 3T, akses listrik tidak ada, apalagi akses internet. "Apa yang dilakukan oleh guru pada saat jadwal ANBK tiba?" Kepala sekolah dan guru memutar otaknya untuk menemukan solusi dan strategi yang dapat ditempuh oleh kemampuan sekolah. Media pembelajaran chromebook tidak ada, apatah lagi jaringan listrik dan internet. Satunya jalan adalah meminjam dan menumpang dengan sekolah lain, tidak sesederhana yang kita pikirkan, dengan meminjam dan menumpang, bukan berarti solusi terlaksana dengan baik dan lancar. Kepala sekolah dan guru kembali dihadapkan pada jarak tempuh, armada untuk membawa para peserta didik, biaya transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Sekolah seperti ini pantas disebut dengan sebutan sekolah dengan kriteria 3T atau sekolah 3T.

Sebaiknya, ada juga peraturan tentang sekolah 3T dengan perlakuan khusus, berbeda dengan sekolah yang berada di kecamatan yang sama, namun situasi kondisi yang sangat berbeda. Di sekolah ini, perlu ditempatkan para guru yang profesional, yang kompeten di bidangnya. Tidak hanya di sekolah besar yang jumlah muridnya banyak, berlokasi di kota kecamatan saja. Tetapi guru kompeten juga sebaiknya ada di sekolah 3T. kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), berpangkat dan golongan tinggi, memiliki sertifikat profesi/pendidik, bukan mereka yang baru diangkat menjadi kepala sekolah dan menjadikan sekolah 3T sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sekolah yang lebih besar.

“Bagaimana peranan seorang guru, yang diharapkan untuk sekolah berada di daerah 3T?” Hal ini bisa terwujud jika dibarengi dengan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan secara berkala dan berkelanjutan. Tidak sekedar kegiatan pelatihan dalam bentuk webinar yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak, guru penggerak, yang sampai saat ini belum menyentuh daerah 3T. Kalau pun ada itu baru dilakukan oleh organisasi penggerak, salah satu organisasi profesi guru seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang dalam hal ini sudah 2 tahun melaksanakan kegiatan diklat pada sekolah sasaran program organisasi penggerak untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah sasaran organisasi penggerak.

Dalam pandangan kami, hal ini belum menyentuh seluruh sekolah yang berada di daerah 3T. Baru sebagian besar daerah 3T di wilayah Indonesia bagian Timur. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, membuat program khusus peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk seluruh guru baik negeri maupun swasta, tanpa pandang bulu. Artinya kegiatan ini terprogram dengan baik dan berkelanjutan, terjadwal menyentuh seluruh elemen pendidik dan tenaga kependidikan yang ada.

Selaku pendidik dan tenaga kependidikan, kita menyambut baik program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, seperti Organisasi penggerak ini. Semoga ke depannya masih banyak organisasi penggerak yang bisa hadir untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah 3T. semua program yang diluncurkan pemerintah pada seri Merdeka Belajar sangat bagus, termasuk program guru belajar dan berbagi pada portal SIMPKB, PMM dan lainnya. Kini tergantung pada kemauan dan keinginan dalam diri seorang pendidik dan tenaga kependidikan.

Mau atau tidak untuk meluangkan waktu dalam belajar, seperti salah satu syair dalam lagu Mars Ikatan Guru Indonesia (IGI), yakni, “Pantang mengajar kalau tidak belajar”. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan bagi para guru IGI dalam menjalankan amanah sebagai guru di daerah atau sekolah 3T. Di mana saja ditugaskan, maka guru IGI, akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, menjadikan berbagai tantangan, rintangan, hambatan, kekurangan sebagai kesempatan belajar, merubahnya menjadi sebuah peluang untuk terus belajar, berkembang, berinovasi dan berkreasi. Mempersiapkan mentalitas yang tangguh agar mampu bersaing dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Tidak semua pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh peluang untuk peningkatan kualifikasi dan kualitas kompetensi, tetapi situasi pada daerah 3T, kondisi tempat bertugas mampu mengajari agar guru membuka cakrawala berfikir lebih luas, menjangkau luasnya alam terbentang di sekitar lokasi sekolah berdiri, sebab pendidik dan tenaga kependidikan menyadari bahwa, setiap peserta didik mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan.

Kekurangan mengajari guru bagaimana bisa mewujudkan kualitas pendidikan dengan kebersamaan, memanfaatkan segenap yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, berbagai teknologi bisa diciptakan. Teknologi bukan berarti semata-mata berhubungan dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk menerapkan tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ketika di sekitar sekolah hanya ditemukan pepohonan sawit, dan segala tanaman yang tumbuh di sekitarnya, maka semua itu menjadi media bagi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Seperti kata pepatah, “Tidak ada rotan akar pun jadi” yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Kurikulum merdeka sangat tepat dalam hal ini, diserahkan kepada sekolah sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Meski demikian, kata keterbatasan untuk daerah atau sekolah 3T, perlu terus menjadi prioritas dan perhatian yang serius dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, sebab apa pun usaha dan upaya yang dilakukukan oleh pihak sekolah, tanpa dukungan yang penuh, akan menghasilkan kinerja yang kurang maksimal. Sekolah yang tidak diberikan bantuan berupa pagar sekolah, maka setiap hari akan berhadapan dengan kotoran hewan ternak. Tehnologi sebaik apapun yang dibuat oleh sekolah, hancur dalam sekejap oleh hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas. Begitu kompleks yang harus dihadapi oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 3T. Perlu percepatan Pemerataan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya program rotasi guru dan kepala sekolah secara berkala, agar setiap sekolah merasakan dampak dari pemerataan.

Rotasi guru dan kepala sekolah akan berdampak terhadap kematangan diri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, menimbulkan rasa juang yang tinggi, mampu menciptakan karsa untuk terus berinovasi. Pendidik dan tenaga kependidikan yang pernah mutasi pada beberapa sekolah akan mempunyai banyak pengalaman, berdasar perbedaan situasi dan kondisi serta mempunyai kemampuan untuk menemukan solusi atas berbagai problema dalam pembelajaran. Berbeda halnya dengan guru dan kepala sekolah yang hanya bertugas di satu sekolah mulai dari diangkat menjadi guru sampai pensiun di satu sekolah itu saja." Adakah yang demikian?" masih banyak dijumpai di negeri ini.

Terkadang, timbul rasa tidak adil dalam hati para pendidik dan tenaga kependidikan, karena mereka ditugaskan di sekolah 3T, yang mana tinggal 2 tahun lagi bertugas dan akan memasuki masa purna bakti. Perjuangan yang dilalui dari waktu ke waktu terus bergulir seiring dengan tuntutan dunia pendidikan. Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, mereka bukan orang-orang yang tidak ingin meningkatkan kompetensi diri, tetapi kesempatan yang belum menghampiri mereka.

Ketika mereka diajak berinovasi, mereka melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ada kata tidak mampu, menolak, dan lainnya. Meski dengan segala keterbatasan, mereka terus mencoba sampai bisa. Tak jarang, mereka terjatuh, bahkan sampai mengalami patah tulang, akibat tertimpa kendaraan melewati medan jalan yang butuh perjuangan tinggi agar sampai ke tujuan. Demi masa depan anak bangsa, demi kemajuan negara. Beruntung sekarang para guru yang telah mengabdikan sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, kini sudah diberikan sertifikat dari presiden dan tanda jasa.*

AFRIANTI adalah seorang pendidik tingkat sekolah dasar dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Menamatkan pendidikan DII di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang (Universitas Negeri Padang), S1 di Universitas Lancang Kuning, Riau. Mengambil Akta Mengajar di Universitas Riau, S2 Master Manajemen Pendidikan di Universitas Ganesha Jakarta. Memiliki pengalaman ke Arab Saudi, Malaysia, Singapore, dan Thailand. Pengalaman organisasi, sebagai Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Rokan Hulu periode 2020-2025 dan sebagai pengarang di Blog YPTD, dan kontributor buku G20.

Peran Pengawas dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan di ASEAN

Astuti

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu diikuti dengan dinamika dalam semua sektor kehidupan manusia, maka sektor pendidikan pun tidak luput dari kondisi perubahan dan perkembangan yang semakin meluas. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak baik pihak yang terkait langsung dengan urusan kependidikan misalnya pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun masyarakat umum yang turut memegang peranan dalam posisi kontrolnya di dunia pendidikan. Hal yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat adalah mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini kualitas (*output*) yang dihasilkan oleh sebuah lembaga (sekolah) seperti apa. Di samping itu masalah transparansi pengelolaan pendidikan juga mendapatkan sorotan.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa suatu hubungan yang harmonis dan bersinergi harus selalu dibangun. Ibnu Syamsi (dalam Suryosubroto, 2004: 155) mendefinisikan humas sebagai kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Kegiatan kehumasan adalah melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja (sekolah) yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas.

Bentuknya adalah menyebarkan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai tugas-tugas dan fungsi yang diemban sekolah tersebut, termasuk mengenai kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan volume dan beban kerjanya. Hasil kerja dari kehumasan yang efektif apabila ada saling pengertian antara sekolah dengan pihak masyarakat. Adanya kesediaan untuk membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, dan tumbuhnya rasa ikut bertanggung jawab dari masyarakat terhadap kemajuan sekolah.

Dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian eksistensi masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah perlu dikelola dengan sungguh-sungguh. Sehingga tanggung jawab dunia pendidikan yang merupakan produsen generasi penerus cita-cita bangsa dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga diperkuat dengan hadi yang menyebutkan, "Didiklah anak-anakmu, sebab mereka akan mengalami zaman yang berbeda dengan zamanmu," demikian sebagaimana dikutip oleh Kuntowijoyo.

Mengarah kembali kepada sebuah lembaga pendidikan yakni sekolah yang merupakan wahana pengembangan para peserta didik dalam segala aspek yang harus mereka miliki misalnya kognitif, afektif dan psikomotor. Selain para guru dan kepala sekolah, terdapat komponen lain yang juga sangat memegang peranan penting dalam upaya mengembangkan sebuah potensi sekolah yakni pengawas sekolah.

Secara umum pengawas sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan sebuah sekolah. Dalam fungsinya tersebut, seorang pengawas bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam hal ini pengawas sekolah harus memiliki sifat kepemimpinan agar dapat mengarahkan sekolah binaan dengan lebih baik. Sebagai pengembang pendidikan pengawas sekolah mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga dengan adanya supervisi pengawas, hasil dari pelaksanaan pembelajaran akan lebih baik dan bermutu.

Dalam ketentuan umum PermenPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; (2) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; (3) kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

Dari uraian di atas istilah pengawasan dapat dimaknai sebagai kegiatan supervisi. Ary H. Gunawan mengemukakan bahwa supervisi diadopsi dari bahasa Inggris "*supervision*" yang berarti pengawasan/kepengawasan. Dengan demikian supervisi pada hakikatnya merupakan segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Dengan kata lain, pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam memberi bantuan profesional kepada guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari arus globalisasi yang tidak terbandung khususnya dengan perkembangan era industri 4.0 yang terus dan terus meningkat. Jarak antar belahan bumi semakin singkat. Relasi antar kawasan semakin dekat. Sektor pendidikan di ASEAN tidak luput dari sentuhan atau bahkan pergerakan teknologi digital yang semakin canggih dan berkembang pesat. Namun, semua kecanggihan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa kendali ataupun keterlibatan unsur manusia. Dalam hal ini semua komponen inti yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu sendiri yakni guru, kepala sekolah yang merupakan *leader* dari sebuah lembaga (sekolah) dan pengawas sebagai pendamping dan motivator utama guna mendorong perkembangan dan keberhasilan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan bersama.

Peran Pengawas

Dalam kapasitasnya yang harus mendampingi dan mengarahkan sebuah atau beberapa sekolah yang menjadi binaannya, sudahkah seorang pengawas melaksanakan tugasnya secara maksimal? Merujuk pada peraturan yang menaunginya maka pengawas dapat memberikan asistensi atau bantuan untuk memperlancar program peningkatan mutu sekolah. Relasi profesi yang lebih luas sangat memungkinkan seorang pengawas memiliki jaringan dengan kepala dinas pendidikan, kepala kantor cabang dinas kecamatan, dunia industri, dunia usaha dan lembaga atau instansi lainnya.

Dalam posisi ini, pengawas tidak hanya memantau hubungan sekolah dengan masyarakat dalam arti pasif tetapi juga memberikan bantuan dalam menjalin relasi tersebut. Selain itu pengawas dapat membantu dan mengarahkan sekolah dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan konteks sekolah itu sendiri. Analisis kekuatan dan kelemahan sekolah melalui analisis SWOT (Strength, weaknesses, Opportunity, Threat) sangat membantu untuk mengangkat eksistensi sekolah khususnya dalam pengembangan aspek kekuatan yang dimiliki.

Bermitra dengan dunia industri atau dunia kerja setempat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dan berlatih. Dengan demikian peran pengawas sangatlah luas dan bermakna. Masalah administratif dan teknis lainnya yang berkaitan dengan dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah secara berkala tidaklah menjadi satu satunya target utama dalam kepengawasan. Target yang menyangkut pengembangan visi dan misi sekolah secara utuh dan aktif lebih diprioritaskan. Pengawas berperan membantu sekolah ketika melakukan relasi dengan pihak lain untuk mencari tempat kerja praktik (bagi SMK) dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak luar dengan berbagai tujuan.

Kolaborasi Pengawas

Pengawas sekolah saat ini tergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dinamakan APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia). Lembaga independen ini didirikan pada tanggal 14 Oktober tahun 2002 di Bali. Melalui wadah APSI para pengawas dapat berkolaborasi dengan cara berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui kegiatan Webinar, Bimtek, Musker, Munas. Kegiatan itu dilakukan secara terjadwal secara online. Musyawarah Kerja biasa dilakukan di daerah sedangkan musyawarah Nasional dilakukan secara nasional untuk semua pengawas.

Pengawas Sekolah memiliki peran sebagai pengawal utama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Tantangan global dan revolusi industri 4.0 di era digital yang semakin kompleks menjadi tantangan utamapengawas sekolah. Mengingat kembali pernyataan Dr. Agus Sukoco selaku Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), bahwa ada tiga peran penting pengawas sekolah dalam kaitannya dengan era milenial.

Pengawas sekolah sebagai seorang trainer. Dimana pengawas ini diharapkan terus melatih keterampilan sehingga bisa relevan dengan tuntutan perubahan yang nanti akan berguna untuk diterapkan pada pekerjaan mereka. Ini berarti Pengawas Sekolah harus terus menerus mengasah skill, baik kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak sebagai kemajuan di era digital, maupun keterampilan dalam perangkat keras. Diharapkan mereka ini melatih terus keterampilannya sehingga bisa relevel dengan tuntutan perubahan yang nanti juga akan diterapkan di pekerjaannya di sekolah-sekolah binaan mereka.

Pengawas Sekolah menjadi seorang coach. Sehingga para Pengawas Sekolah ini bisa melakukan pelatihan membina guru dan kepala sekolah, karena tantangan di era digital ini permasalahannya semakin kompleks. Maka dibutuhkan seorang pelatih yang bisa mendampingi guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya di kelas maupun di sekolah. Pengawas Sekolah sebagai mentor, seorang pengawas sekolah adalah seorang guru atau kepala sekolah yang berprestasi. Jadi dia mempunyai pengalaman dalam hal baik dalam hal kegiatan belajar mengajar maupun tata kelola sekolah, sehingga sangat diharapkan ketika seorang pengawas menjadi mentor maka dia bisa berbagi pengalaman serta praktik baik yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada.

Kerja sama Pengawas se-ASEAN

Kerja sama di bidang pendidikan antar negara-negara ASEAN selama ini adalah kerja sama berupa pertukaran pelajar dan beasiswa pendidikan, Pertemuan antar guru dan pendidikan inklusi. Kerja sama antar pengawas se-ASEAN sebaiknya juga bisa dirintis untuk peningkatan mutu pendidikan di masing-masing negara. Sehingga kolaborasi yang ada bukan hanya di tingkat daerah dan nasional namun bisa ditingkatkan ke dalam kawasan regional ASEAN.

Sudah waktunya kerja sama di bidang pendidikan yang selama ini terjalin bisa ditingkatkan hingga ke jenjang pengawas sekolah. Sinergitas antar pelajar, guru, dan pengawas diharapkan dapat melahirkan nuansa baru yang bisa membantu percepatan peningkatan mutu pendidikan di ASEAN. APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia) dapat mengawali giat kerja sama karena APSI adalah wadah penyalur aspirasi sekaligus inspirasi para pengawas sekolah yang bisa dikembangkan dalam ruang yang lebih luas lagi hingga ke kawasan negara ASEAN. Tawaran kerja sama untuk pengawas dapat dilakukan dengan cara study banding antar negara ASEAN. Struktur geografis dan kultur masyarakat tingkat ASEAN akan memudahkan jalinan kerja sama antar bangsa serumpun.

Penutup

Sebagai langkah awal pengawas melakukan pemahaman terhadap Kurikulum yang dikembangkan oleh pihak sekolah. Kemudian, ia mulai menggali potensi pengembangan kurikulum yang terkait dengan pihak eksternal. Jika sekolah telah memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal sekolah, tugas pengawas berusaha menghilangkan rintangan yang mungkin akan dijumpai. Tetapi jika ternyata apa yang direncanakan oleh pihak sekolah masih kurang memadai maka pengawas dapat berperan sebagai fasilitator yaitu membantu sekolah mempersiapkan suatu kerja sama (Nota Kesepahaman) dengan pihak-pihak eksternal.

Ada kalanya dalam melakukan kontrak kerja sama atau kesepakatan, pihak sekolah masih merasa ragu. Dengan kata lain mereka takut bila tindakan yang mereka lakukan tidak diterima atau dianggap keliru. Pada kondisi seperti ini maka seorang pengawas dapat memberikan penguatan dan motivasi. Di sisi lain biasanya juga terjadi bahwa pengawas merasa khawatir terhadap inovasi yang lahir dari sekolah. Dalam menghadapi kondisi demikian, sebaiknya kembali pada langkah awal yaitu pemberdayaan diri sendiri terlebih dahulu. Karena barangkali kita semua masih tidak memahami kewenangan masing-masing dan tidak mengetahui sejauh mana kewenangan kita dapat diperluas.

Seiring perkembangan teknologi dan berubahnya paradigma berpikir ke arah yang lebih maju dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, upaya meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pengawas tentunya bukan suatu hal yang baru lagi. Di setiap aspek dalam ranah pendidikan baik itu pada ranah seorang guru, kepala sekolah dan

pengawas, semua harus mau dan mampu berdinamisasi dengan kebutuhan zaman. Sumber belajar yang bertebaran, akses yang demikian luas telah memberikan ruang gerak yang lebih terbuka dan fleksible bagi pengawas untuk meningkatkan fungsinya sebagai seorang pendamping atau coach pada sekolah binaan.

Tugas sebagai seorang pendamping yang dapat memberi energi sebagai sumber motivasi untuk maju dan berkembang tentunya akan memberi sebuah keleluasaan pada sekolah untuk lebih banyak berinisiatif dan berinovasi. Mencari sumber inspirasi sebagai sebuah pemodelan atau perbandingan antar sekolah menjadi tidak terbatas pada area atau lingkungan tertentu. Dengan bimbingan dan arahan pengawas sebuah sekolah dapat mengeksplorasi dirinya hingga ke mancanegara khususnya untuk kawasan ASEAN. Hubungan kerja sama yang sudah ada sebelumnya (pertukaran pelajar) tentu bisa ditingkatkan lagi hingga ke jenjang pengawas antar negara.

Kiranya hal ini akan berimbas pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, yang akan bermuara pada output yakni peserta didik yang berkualitas sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang sudah tercantum dalam kurikulum. Karena pada dasarnya tujuan akhir dari kinerja pengawas adalah untuk menjamin mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibinanya. Dengan kemampuan untuk menumbuhkan kerja sama, maka tugas tersebut akan dapat diwujudkan dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pendidikan) dan organisasi APSI yang merupakan wadah penyalur aspirasi para pengawas Indonesia.*

Referensi

- Affah Rahmah, 2022. *7 Contoh Kerja Sama Negara ASEAN di Bidang Pendidikan, Apa Saja?* (online) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6075976/7-contoh-kerja-sama-negara-asean-di-bidang-pendidikan-apa-saja>. diakses tanggal 17 November 2022
- Amien Nurhakim, 2020. *Didiklah Generasi Mengikuti Kebutuhan Zaman*, (online) <https://www.nu.or.id/opini/didiklah-generasi-mengikuti-kebutuhan-zaman-pi8S0/> diakses tanggal 17 November 2022
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Evaluasi Program Supervisi Pendidikan*. Modul A3-2. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional*. Modul 02-B7. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Penilaian Kinerja Guru*. Modul 04 A3. Jakarta: Depdiknas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Panduan Kerja Pengawas Sekolah*. Direktorat Prmbinaan Tendik Dikdasmen.
- Suadinmath, 2013, *Peranan Pengawas Dalam Pengembangan Kerjasama Sekolah*, (Online), <https://www.asikbelajar.com/peranan-pengawas-dalam-pengembangan/>, diakses 17 November 2022.

ASTUTI (nama lengkapnya Astuti Sipanawa) lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecamatan yang terletak di lembah Palu, Sulawesi Tengah, 11 September 1968. Ia menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Tawaeli (1981), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Palu (1984) dan Sekolah menengah atas di SMAN 1 Palu (1987). Gelar sarjana pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Tadulako, Palu (1994). Sedangkan pendidikan Pascasarjana dari Universitas Negeri Malang (UM, 2004). Sejak awal 1997-2021 ia bertugas sebagai guru di SMPN 14 Palu. Bukunya yang telah terbit berjudul *Catatan Harian yang Terserak di Masa Pandemi (Kumpulan Tulisan dalam Blogger Seorang Guru dari Tanah Kaili)*, dan sementara akan terbit *Satu Masa di bawah Pohon Beringin (Kumpulan Catatan Masa Kecil Tiga Bocah dari Tanah Kaili)*.

Literasi Digital Guru dan Praktik Baik di ASEAN

Dede Mulyanah

Berdirinya *ASEAN Council of Teachers (ACT)* merupakan awal terbukanya ruang kolaborasi guru-guru di wilayah ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang memprakarsai lahirnya *ASEAN Council of Teachers (ACT)* yang dalam hal ini diwakili oleh organisasi guru PGRI. Ruang kolaborasi ini peluang positif bagi seluruh guru di wilayah negara ASEAN yang ingin saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Menjadi seorang guru di era transformasi digital harus kreatif dan inovatif. Sebagai seorang guru kita harus menyambut dengan gembira dampak perkembangan pengetahuan teknologi yang sangat pesat. Terlebih lagi dalam bidang teknologi, perkembangannya sangat besar bagi perkembangan dunia Pendidikan. Output dalam bidang Pendidikan adalah melahirkan lulusan yang berkualitas yang mampu menghadapi tantangan hidup pada jamannya.

Seorang guru professional harus mampu menjadi fasilitator yang benar-benar mampu memfasilitasi murid untuk dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya dan memiliki kompetensi dan karakteristik yang kuat dan mampu menghadapi tantangan jaman. Untuk mampu menjadi seperti itu tentunya ada tahapan proses yang harus dilalui. Kompetensi prasyarat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Guru dalam hal ini adalah sebagai *learning agent* (agen pembelajaran), artinya guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi murid.

Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan murid memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua guru. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dan kemudahan semua orang mengakses dengan mudah informasi di seluruh belahan dunia ini membutuhkan kemampuan literasi dari setiap orang, begitu juga seorang guru. Kemampuan mutlak ini harus dimiliki setiap orang terlebih lagi guru, yang dalam hal ini umumnya dianggap sebagai orang pintar dan serba paham khususnya oleh muridnya di sekolah. Kemampuan membaca, mengelompokan, menganalisa setiap informasi yang cepat sampai karena kemudahan akibat dampak transformasi digital ini harus terus ditingkatkan agar sebagai seorang guru kita dapat memberikan informasi yang benar dan tepat.

Menjadi guru kreatif dan inovatif di era digital ini tentunya kita dipermudah dengan terbukanya ruang informasi dan komunikasi yang semakin mudah tersedia. Kemudahan ini membuat banyak informasi tersedia tidak terbatas ragam dan topik. Tidak terbatas pula informasi yang benar atau informasi yang tidak benar. Seorang guru profesional harus berlatih memilih dan memilah ragam informasi tersebut agar yang menjadi dasar kita memfasilitasi murid kita mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya adalah informasi yang benar.

Kemampuan literasi digital yang dimiliki seorang guru juga akan mampu meningkatkan kreatifitasnya untuk lebih luas melihat, memotret dan melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Inspirasi pembelajaran akan lebih sering muncul manakala kita membuka wawasan kita untuk melihat lebih luas model-model pembelajaran di berbagai belahan dunia. Inspirasi tersebut akan mendorong guru untuk mencoba menerapkan apa yang diamatinya di luar kelasnya dari seluruh penjuru dunia. Kehadiran *ASEAN Council of Teachers (ACT)* dapat dijadikan sarana bagi guru-guru di seluruh wilayah ASEAN untuk dapat berkolaborasi saling berbagi praktik baik pembelajaran di dalam kelasnya. Dengan kata lain guru-guru di wilayah negara-negara ASEAN dapat saling berbagi pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan murid di era sekarang ini.

Dengan bekal kemampuan literasi digital yang dimiliki dari setiap individu guru, berbagi praktik baik pembelajaran akan menjadi hal yang mudah tidak terbatas ruang dan waktu di era transformasi digital ini. Kolaborasi inilah yang akan memperkuat guru-guru ini diseluruh wilayah ASEAN untuk dapat berbagi praktik baik dengan dibekali kemampuan literasi digital yang baik. Memilih, memilah menganalisa berbagai model-model pembelajaran yang dapat diakses

dengan mudah secara digital yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid di kelasnya akan menguatkan ruang kolaborasi yang semakin baik bagi guru-guru.

Jangan asal meniru, tidak asal mencontek, tidak sembarangan memodifikasi, pelajari dulu setiap praktik baik pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi di kelasnya masing-masing. Budayakan untuk berbagi agar dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di penjuru wilayah *ASEAN* melakukan praktik baik di kelasnya.*

Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Council_of_Teachers

<https://pendidikankedokteran.net/dikdok/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan/>

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-bagi-tenaga-pendidik/>

Abidin Yunus (2015). *Pembelajaran Multiliterasi*. Aditama.

DEDE MULYANAH adalah seorang guru di Sekolah Dasar di kota Bogor dengan pengalaman menulis yang masih minim tapi sedang belajar terus berkarya, ada beberapa tulisannya yang sudah dibukukan dalam karya antologi. Ia aktif sebagai pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) di kota Bogor.

Peran Guru ASEAN di Era Society 5.0

Indriani Saraswati

Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

--Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia

--Nelson Mandela

Pendahuluan

Pendidikan diperoleh manusia sejak kecil hingga dewasa. Mulai dari masa kanak-kanak, yang harus dibantu Dalam banyak hal oleh orang-orang terdekatnya, hingga menjadi orang dewasa yang mampu membantu orang-orang sekelilingnya. Pendidikan menempa seseorang yang masih polos menjadi seseorang yang bisa memutuskan hal terbaik buat dirinya dan lingkungannya. Pendidikan adalah jalan panjang yang sangat menghargai proses untuk menjadi berhasil. Berhasil merubah diri, keluarga, lingkungan, bahkan dunia.

PENGERTIAN PENDIDIKAN dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Untuk mencapai pendidikan yang berhasil, guru sebagai pihak yang paling berkaitan dengan pendidikan memegang peranan penting. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan menilai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selaras dengan pengertian dalam UU ini, tulisan ini mengartikan guru sebagai orang yang mendidik pada pendidikan formal. Sehingga pendidik yang mengajar pada pendidikan nonformal tidak disebut guru. Beliau memiliki sebutan spesial seperti tutor, trainer, mentor, dan lain sebagainya. Selain itu, istilah guru dalam bahasan ini dibatasi untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan menengah atas. Bagi pendidikan tinggi formal, seperti universitas, sekolah tinggi, akademi, pendidikannya disebut dosen.

Guru adalah agen pembaharuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti agen pembaharuan adalah orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana. Sehingga guru adalah ujung tombak yang secara langsung memberikan pembelajaran adanya perubahan pada masyarakat, dalam hal ini adalah peserta didik. Tugas besar guru adalah membentuk budaya generasi yang akan datang. Hasil dari pendidikan tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tapi akan berdampak juga pada kurun waktu berpuh tahun kemudian.

Peran Guru

Apa peran guru sebagai pembentuk generasi masa depan bangsa dalam menghadapi Era Society 5.0 di wilayah ASEAN? Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter dan manusiawi. Sekarang ini kita memasuki Era Society 5.0 atau biasa disebut masyarakat 5.0, adalah sebuah masa ketika masyarakatnya hidup di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 adalah sebuah era yang kegiatan masyarakatnya sangat erat

berhubungan dan saling terhubung dengan jaringan internet atau satelit. Bisa diartikan sebuah masa ketika manusia sangat canggih berteknologi.

Era society 5.0 merupakan sebuah periode yang berpusat pada manusia yang berlandaskan teknologi. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia pun harus siap menghadapi perubahan menjadi SOCIETY 5.0, di mana sejumlah besar informasi dari sensor wilayah fisik diakumulasikan ke dalam wilayah maya (CYBERSPACE). Dalam CYBERSPACE, BIG DATA dianalisis oleh ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI), dan hasilnya akan dikembalikan ke wilayah fisik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menemukan serta membuka bermacam peluang yang dimiliki oleh manusia. Guru, sebagai tulang punggung pembentuk kecerdasan bangsa tentunya sangat berperan di era society 5.0 ini. Mengingat guru lah yang langsung berhubungan dengan Generasi Z sebagai penerus generasi. Generasi Z adalah generasi yang lahir di tahun 1995 sampai 2010.

Konklusi

Asdep Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Raden Wijaya Kusuma Wardhana menyampaikan, di Era Society 5.0 mempersyaratkan tiga kemampuan utama yang perlu dimiliki setiap individu yaitu: *creativity, critical thinking, communication and collaboration*.

Menurut Wijaya saat menyampaikan sambutan dalam Konferensi Nasional Teaching and Learning Summit (TLS) mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy pada Jumat (3/12), SDM Indonesia harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital dan mindset atau pola pikir kreatif, karena prasyarat kompetensi di abad ke-21 berfokus pada kemampuan problem solving, kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan kreativitas.

Wijaya menjelaskan, terdapat empat kompetensi wajib dalam pembelajaran, yaitu *knowledge, skills, attitude* dan *value*. Knowledge dan skill berhubungan erat dengan kompetensi siswa, sedangkan attitude dan value berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Empat kompetensi ini harus dikuasai oleh peserta didik melalui interaksi yang dia dapatkan dalam kehidupannya, baik saat di sekolah (dengan guru dan teman-temannya), maupun di rumah (dengan orang tua dan keluarga), serta di lingkungannya.

Untuk menghadapi tantangan era society 5.0 di ASEAN guru harus membangun pembiasaan literasi digital untuk mengasah talenta digital dan meningkatkan literasi digital kepada Generasi Z. Untuk itu komunitas guru, dalam hal ini komunitas guru ASEAN, harus saling bersinergi. Pastinya hal ini harus didukung dengan peran pemerintah masing-masing negara sebagai pemangku berbagai kebijakan. Untuk bisa menciptakan budaya kerja sama yang hebat, diperlukan kerja sama antar negara ASEAN. Ini tidak bisa diciptakan hanya dengan usaha dan upaya yang dilakukan oleh satu negara saja, namun semua anggota ASEAN harus bersatu dan saling berusaha untuk mencapai budaya kerja sama yang hebat. Dalam membangun budaya kerja sama yang baik di era society 5.0 ini negara-negara ASEAN harus dapat bersikap dan berpikir maju dan harus mengikuti pola perkembangan zaman.

Untuk menjalin kerja sama antarkementerian pendidikan, dibentuklah *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO) yang tujuan utamanya adalah memajukan kualitas dan kesetaraan pendidikan di ASEAN. Di antara programnya adalah pertemuan guru-guru, dikenal dengan program *ASEAN Council of Teachers* (ACT) yaitu pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN; wadah untuk diskusi dan berbagi ide pengembangan antar pendidik dalam lingkungan belajar. Khusus untuk pendidikan inklusif, telah ada ASEAN Declaration on Strengthening Education for out of school Children and Youth pada 2016 di Laos. Salah satu programnya adalah memperkuat kualitas guru, pelatihan, pertukaran dan jejaring guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif.*

INDRIANI SARASWATI adalah guru SMP/SMA Labs School Kaizen. Sempat aktif di dunia jurnalistik. Kini bergabung di beberapa komunitas penulis, seperti KPPJB (Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat), Women Script Community, Writerpreneur Club. Kontak penulis di indrisarasthebest88@gmail.com.

Peran Rulit Guru Sulteng dalam Mengobarkan Semangat Berliterasi di ASEAN

Suryani Tajuddin

Berawal dari keprihatinan beberapa guru penulis pada kondisi literasi di Sulawesi Tengah yang cenderung rendah dari tahun ke tahun, maka dibentuklah komunitas yang kita kenal sebagai Rulit. Ruang Literasi Guru Sulteng (Rulit) adalah sebuah wadah kepenulisan yang anggotanya terdiri dari para guru penulis di Sulawesi Tengah. Berdiri sejak 6 Mei 2020, Rulit konsisten untuk bergerak mengembangkan literasi tak hanya di Sulawesi, tapi juga kawasan Asean. Visi Rulit adalah turut mengembangkan kompetensi guru dibidang kepenulisan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dan ASEAN.

Awalnya, Rulit hanyalah berupa kelompok kecil yang menyajikan karya tulis para guru baik fiksi maupun non fiksi. Lalu berkembang menjadi ajang belajar bersama, saling mendukung dan saling berbagi secara kekeluargaan dalam hal kepenulisan. Juga, menjalin silaturahmi seiring pembelajaran dan penciptaan karya. Hal yang terpenting lainnya adalah membangkitkan dan melestarikan semangat berliterasi di Sulawesi Tengah serta ASEAN.

Pada bulan November 2020, Rulit berhasil menyelenggarakan Lokakarya Kepenulisan yang pertama bertepatan dengan Hari Guru Nasional di gedung Guru Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil kegiatan ini, terbitlah buku antologi perdana yang berjudul *Spektrum Pelangi Rulit*. Selanjutnya pada Februari 2021, *launching* pula buku antologi kedua Rulit yang berjudul *Setangkup Cinta Dange*. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan hidup para penulis. Sedangkan buku antologi ketiga Rulit lahir pada bulan Agustus 2022 dengan judul *Di Atas Langit Tadulako*. Buku ini di-*launching* bersamaan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah.

November adalah bulan dengan momen sejarah besar yang terjadi di Sulawesi Tengah. Pada bulan itu di tahun 2018 pernah terjadi bencana maha dahsyat yang menimpa kota palu dan sekitarnya. Momen ini tentu tak dilewatkan oleh Rulit dengan menggelar nulis bareng. Maka, pada bulan tersebut juga terbit sebuah buku berjudul *Kisah dibalik Bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi*, yang akhirnya mengantarkan Rulit memperoleh penghargaan sebagai komunitas inspiratif dari Wali Kota Palu. Tak berhenti sampai di situ, Rulit terus berkarya dengan menelurkan buku-buku berkualitas lainnya, seperti *Guru adalah Kita*, *Impi*, *Surat dari Guru*, *Bergerak dari hati*, dan lainnya.

Selain kegiatan menulis, Rulit juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan untuk guru dan siswa dari seluruh kota di Indonesia. Turut serta mengembangkan literasi di sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah dari Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Misalnya, Di SMA Negeri Model Terpadu madani, SMP Negeri 1 Bolano Lambunu, SD Negeri Poboya, SMA Negeri 5 Palu dan banyak lainnya. Mengadakan berbagai event dan lomba menulis untuk guru dan siswa, juga untuk umum.

Setidaknya, ada lebih dari 5 event besar sudah dilaksanakan. Rulit juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait literasi seperti Perpustakaan Propinsi, Perpustakaan Kota, Pemerintah Daerah dan Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan Kota, Balai besar Guru Penggerak, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah. Bukan hanya berkisar kepenulisan, tetapi juga dalam pengembangan kompetensi guru lainnya seperti pembuatan media ajar dan lainnya.

Untuk menggugah minat dan hobi menulis para guru, Rulit juga menyelenggarakan parade 100 menulis bagi para anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air. Tak disangka, antusias mereka sangat bagus. Terbukti pada bulan

Agustus 2022 bertepatan dengan pesta hari kemerdekaan Republik Indonesia, Rulit kembali meluncurkan 22 buku solo hasil karya para guru dan siswa dengan berbagai genre kepenulisan seperti cerpen, puisi, opini, dan lainnya⁴⁵.

Berikut salah satu puisi yang terinspirasi dari musibah bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu.

KUNJUNGAN PILU

Karya Suryani Tajuddin

Ayah, Ibu

Talitha dan adik datang lagi

Sudah empat tahun berlalu

Sejak ombak pantai ini membawa tubuh kalian pergi

Ayah, Ibu

Bagaimana kabarmu di sana?

Apakah baik-baik saja?

Rindukah ayah dan Ibu pada anakmu ini?

Ayah, Ibu

Lihatlah, kini aku sudah besar

Aku sudah tak cengeng lagi

Jika tidur, aku tak harus kau peluk lagi

Sekarang aku dan adik sudah terbiasa mandiri

Masak sendiri

Mencuci sendiri

Bahkan mengurus semuanya sendiri

Aku bukan lagi anak yang manja

Tak pernah lagi menangis diam-diam seperti saat ayah dan ibu baru pergi

Tak pernah lagi takut saat malam datang menghampiri

Aku sudah jadi anak yang pemberani

45 Buku-buku tersebut diantaranya adalah Suryani Tajuddin (Ajari Aku), Aris Arianto (Zig-zag), Supiati (Kertas Pinangan), Nizam Abadi (Sketsa Hitam Putih), Lusiani Chi (Hujan di Ujung Senja), Kusnaeni (Insecure), Fatyah Santari (Saat Harummu Hampir Menyentuhku), Emi Indra (Hidup Sukses Mati Masuk Surga), Finisca Roya (Anak Rantau), Nurbaya Latief (Rindu Bertabur Cinta), Susanah (Tepian Rindu), Aziza (Reportase), Miniarti; Aku Siap Jadi yang Kedua, Yulin Kandupi (Rasa yang Sama), Marchilia Damayangti (Cerita Dei, Anak Kaili yang Cinta Indonesia), Ulfiani Samir K. (Rindu yang Biadab), Husnul Mubaraq Zakirun Olih (Adat Posalama Pogunci pada Etnis Kaili di kota Palu), Nurin Rafil Sahin (Si Keboy), Dadang Rahman Sidiq (Belajar Membaca Tanpa Mengeja di Sekolah Penggerak), Rezi Kaurian (Pengetahuan Guru terhadap Penggunaan Microsoft Office pada Pembelajaran), Sesi Susanti (Prestasi Belajar Murid Kelas IV Melalui Penerapan Metode Diskusi), dan H. Mahludin (Belajar Gerak Parabola dengan Teorema Mh).

Ayah, Ibu
Kami rindu ... Sangat rindu
Rindu kecupanmu, rindu pelukmu
Rindu kebersamaan kita yang dulu

Aku ingat,
Dulu, Ibu selalu marah jika kami terlambat makan
Ayah selalu tegas jika kami tak pergi mengaji
Dan banyak hal-hal kecil lain yang tak kumengerti

Sekarang, aku tahu bahwa itulah pertanda sayang
Sekarang, aku paham bahwa itulah bahasa cinta
Dan, kami rindu ... Sangat rindu
Bisakah kita bertemu, sekali saja?

Ayah, Ibu ...
Dalam setiap sujud
Nama ayah dan ibu tak pernah luput dari perbincanganku dengan Illahi Robbi
Biarlah semua kuadukan perihal kerinduan yang amat sangat ini

Ayah, Ibu
Tenang dan bahagialah di sana
Jangan khawatir tentang aku dan adik di sini
Kami juga akan baik-baik saja

Meski berat tanpa Ayah
Meski rapuh tanpa Ibu
Kami akan tetap berusaha hidup
Dan membanggakanmu suatu saat nanti

Yah, Bu ...
Kami sekarang punya rumah baru
Rumah yang sederhana,
Hanya kami berdua di sana

Tiap hari, aku membayangkan Ibu menyeduh kopi
Dan Ayah menyesapnya dengan senang hati
Lalu, kita sarapan pagi
Tertawa, tersenyum saling mengasihi

Sayang, tak ada satupun gambar Ayah dan Ibu yang tersisa
Agar kami memajangnya di dinding
Semuanya hilang terbawa bencana

Ayah, Ibu
Kami tak akan mengeluh
Kami akan hidup seperti yang Ayah dan Ibu mau
Menjadi anak-anak yang sholeh, kan?

Juga, aku akan menjaga adik sebaik-baiknya
Menggantikan kalian
Aku tak akan membiarkannya menangis dan kelaparan
Aku berjanji

Yah, Bu ...
Kami pulang dulu
Lain kali kami pasti datang berkunjung lagi
Bercerita lebih banyak lagi tentang hidup kami

Yah, Bu ...
Peluk dan cium dari jauh
Kami menyayangi Ayah dan Ibu
Semoga kita bisa berkumpul lagi kelak di surga.

Seiring berjalannya waktu, anggota Rulit bukan lagi berkisar di Sulawesi, tapi juga sudah menyebar ke Sumatra, Jawa, Kalimantan, Malaysia dan Brunei. Misi Rulit tak akan berhenti hingga perubahan di dunia pendidikan ke arah yang lebih cemerlang dapat terwujud. Rulit masih memiliki banyak mimpi yang sudah pasti butuh perjuangan untuk mewujudkannya. Sebuah perpustakaan besar yang menampung karya-karya keren dari para penulis di Indonesia dan ASEAN, yang bisa menjadi referensi bagi dunia pendidikan. Menghimpun buku-buku yang dapat disalurkan ke pelosok-pelosok negeri di tanah air dan ASEAN. Mengembangkan kompetensi menulis guru-guru di ASEAN. Juga, menjalin kerja sama dan pertukaran penulis ke negara-negara ASEAN. Membuat platform bertajuk pendidikan di Asean. Juga, menjadi komunitas literasi yang mampu beradaptasi dan berkembang bersama komunitas lainnya di ASEAN. Dan masih banyak mimpi lagi yang lainnya.

Sementara ini, Rulit hanya bergerak di sekitar dunia pendidikan. Rulit juga akan terus berbenah, banyak belajar, dan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan literasi di Indonesia khususnya, dan

ASEAN pada umumnya. Menulislah, meski kita bukan seorang penulis. Jadikan karyamu sebagai nasehat bagi semesta, bahkan kelak jika kau telah tiada.*

SURYANI TAJUDDIN adalah guru sederhana yang lahir di Mapugat 19 februari 1983 adalah seorang pecinta literasi. Setelah tamat SMA tahun 2002, ia melanjutkan kuliah di FKIP Pendidikan Matematika dan lulus tahun 2006. Kemudian pada tahun 2013, lulus sebagai Magister Pengajaran Matematika dari Institut Teknologi Bandung. Menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil, dan kini mengabdikan sebagai guru matematika di SMP Negeri 19 Palu. Perempuan yang hobi menulis ini juga pernah mengajar di SMAN 1 Palu, SMAN 5 Palu, MA Alkhairaat Sis Al-Jufri Palu dan SMP Labschool Untad Palu. Sebelum mengikuti guru penggerak, ia juga pernah menjadi Guru Inti PKP di tahun 2019, menjadi instruktur GUMUN (Guru Mengajar Nusantara) dari tahun 2020, dan kini aktif sebagai Founder dan ketua Ruang Literasi Guru Sulawesi Tengah. Kecintaannya pada dunia tulis membawanya memperoleh penghargaan dari Wali Kota sebagai Guru inspiratif Kota Palu di tahun 2021, dan Guru Penulis Inspiratif Kota Palu dari Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2022. Sebelumnya, di tahun 2019 ia juga memperoleh peserta terbaik 1 pada pelatihan Guru Inti Matematika SMP di Jakarta.

Indonesia Memajukan Pendidikan ASEAN

Chrisma Juita Nainggolan

Pendahuluan

Setelah sukses berperan sebagai Presidensi G20 di Bali pada November 2022, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN 2023. Dengan posisi sebagai tuan rumah, maka Indonesia mendapat kesempatan untuk berperan aktif untuk mengatasi berbagai tantangan dan risiko terutama dalam pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi global, tentu harus mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Saat ini, yang paling urgen adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang mampu bersaing secara global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki *skill*, dan mampu bersinergi dengan dunia usaha agar mampu menghasilkan output yang berkualitas.

Bagaimana kondisi siswa kita hari ini? Pada jenjang Sekolah Menengah Atas, kita memiliki SMA umum dan Sekolah Menengah Kejuruan. Siswa SMA, diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, sementara siswa SMK memiliki dua pilihan, masuk ke dunia kerja atau ke bangku kuliah. Namun faktanya, dari sekitar 3,7 juta siswa lulusan SMA sederajat, hanya 40% yang meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi. Lulusan SMA sederajat yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah, akan memasuki dunia kerja tanpa bekal yang cukup.

Rendahnya Kualitas Pendidikan

Ada beberapa faktor penyebab hingga demikian rendahnya daya serap perguruan tinggi negeri. Diantaranya adalah rendahnya daya tampung perguruan tinggi (baik perguruan tinggi negeri maupun swasta), rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta masih minimnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tentu, ini menjadi masalah serius bagi dunia pendidikan serta dunia kerja di masa depan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah terjadinya massifikasi Pendidikan Tinggi. Seiring dengan terbukanya akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi calon-calon mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang, ternyata menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, perguruan tinggi memberi asas kesamaan akses (*equity of access*) bagi siapa saja, dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Artinya, calon-calon mahasiswa yang berada pada strata sosial rendah, daerah pinggiran bahkan daerah 3 T (Terluar, Terluar, dan Tertinggal) untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggap pendidikan tinggi.

Masalah baru muncul, ketika ditemukan fakta bahwa pengelolaan pendidikan tinggi terkesan mempermudah syarat masuk. Tentu, tujuannya adalah agar calon-calon mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan meraih gelar akademik dengan syarat yang lebih longgar. Maka, kita tidak heran ketika menemui civitas akademika menyandang Strata 1,2, atau 3 dengan kompetensi rendah. Akibatnya, muncullah produksi perguruan tinggi Indonesia "dokter bodong" yang compang-camping di forum-forum ilmiah luar negeri (Agus Suwignyo, *Kompas*, 6 November 2015).

Kondisi seperti ini memperburuk citra pendidikan Indonesia dimata luar negeri. Berdasarkan rilis *World Ranking University 2022*, sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia berada pada posisi di atas 1.200, atau bahkan tidak termasuk dalam daftar (Asep Muhammad Iqbal, Direktur Centre for Asian Social Science Research, FISIP UIN Bandung, 2022).

Peran Indonesia Sebagai Chairman ASEAN 2023

Buruknya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, tentu harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Kualitas pendidikan dan peluang kerja, merupakan komponen yang saling melengkapi. Jika pendidikan semakin berkualitas, maka dapat memunculkan peluang-peluang kerja baru. Sebaliknya, peluang kerja di masa depan, membutuhkan

pekerja yang memiliki skill sesuai permintaan pasar, yang dapat diperoleh di bangku pendidikan/pelatihan. Sebagai Chairman ASEAN 2023, Indonesia memiliki peran strategis sebagai *global middle power*. Sebagai satu-satunya negara anggota dari G20, APEC, dan ASEAN, maka sejatinya Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Permasalahan global dapat diatasi dengan memaksimalkan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan.

Salah satu tujuan ASEAN adalah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang demi meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya. Pendidikan, merupakan salah satu bentuk kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Menteri-menteri pendidikan ASEAN memiliki wadah bernama Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). Sebagai anggota SEAMO, maka Indonesia dapat bekerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan pelatihan, penelitian, dan bentuk kerja sama lainnya di bidang pendidikan.

SEAMEO ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Asia Tenggara, juga menjamin kesetaraan pendidikan di tiap warga masyarakatnya. Beberapa jenis kegiatan di bidang pendidikan yang telah diprogramkan, antara lain pertukaran pelajar lewat ASEAN University Network, beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, ASEAN Olimpiade, ASEAN Council of Teachers Convention (ACT), dan sebagainya.

Indonesia Sebagai *Global Middle Power*

Dengan posisi strategis sebagai Chairman ASEAN 2023, Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi negara anggota ASEAN lainnya. Sebagai ketua, diharapkan Indonesia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena itu, Indonesia memiliki peluang untuk melakukan pembicaraan dan peninjauan kerja sama di bidang pendidikan, yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Berbagai program yang telah terlaksana selama ini, dapat ditingkatkan agar lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di ASEAN.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu mengawal berbagai program kegiatan melalui kordinasi dengan counterpart lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat memunculkan ide-ide dan inisiatif baru demi kemajuan pendidikan. Semoga harapan ini dapat terwujud melalui berbagai terobosan baru, yang akan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.*

Referensi

- Kominfo.go.id (2022), https://www.kominfo.go.id/content/detail/45572/indonesia-bawa-tiga-isu-prioritas-g20-pada-keketuaannya-di-asean-2023/0/artikel_gpr
- Puspasari, Dyah (2022), <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/10/10/indonesia-menyambut-tuan-rumah-pertemuan-asean-on-environment-2023/>
- News.okezone.com (2022), <https://news.okezone.com/read/2022/09/21/18/2671962/5-peran-penting-indonesia-di-asean-dalam-bidang-pendidikan>
- Jabar.nu.or.id (2022), <https://jabar.nu.or.id/opini/rendahnya-reputasi-pendidikan-tinggi-indonesia-di-tingkat-dunia-1-Gwhxk>

CHRISMA JUITA NAINGGOLAN adalah guru ekonomi SMA Negeri 1 Kualuh Selatan dan SMA Muhammadiyah 9 Kualuh Hulu. Ia merupakan pegiat literasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Pengurus Road Blog to Book Attribute, Pengurus Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia, Ketua Majelis Dikdasmen PCM Aekkanopan Labura Sumut (2010-2018). Buku *Tersesat di Belantara Pendidikan* (Media Guru, 2019) merupakan buku pertamanya, *Berkaryalah Meski Tak Lagi Muda* (Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2020), *The Power of Pada Suatu Hari* (Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2021). Ia juga berkontribusi pada buku *Sehimpun Mutiara Literasi Indonesia* (Perpusnas Press, 2021), *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022), serta editor buku *Menembus Batas Normal* (Wirausaha Unggul Bank Indonesia Batch II, 2022). Karya lainnya: *Karena Menulis Aku Ada* (Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan 2020), *Lomba Blog Menulis 40 Hari* (Belajar Menulis 2021), *Peranan Bahasa Indonesia* (Youth Science Indonesia Jawa-Bali 2021), *Menantu Terbaik* (Lomba Menulis Cerpen Komunitas Binjai Kota Cerdas 2021). Ia dapat dihubungi di email: masitahnainggolanraj@gmail.com.

Pertukaran Guru ASEAN: Sebuah Inisiatif Belajar Lebih Luas

Zubir

Dalam sebuah kesempatan, saya mengirim pesan kepada salah seorang guru, “Wali kelas yang baik hati, mohon kehadirannya di ruang Kepala Sekolah. Kapan ada jadwal kosong ya.” Tak lama setelah pesan terkirim, saya mendapat balasan, “Baik Pak. Ini saya sedang belajar dengan siswa.” Ada yang menarik perhatian saya dari jawaban si guru, ketika ia menggunakan kalimat “sedang belajar.” Umumnya guru yang masuk kelas akan menjelaskan posisinya: “sedang mengajar.”

Belajar dan mengajar adalah dua kosakata yang sangat jauh berbeda. Belajar berarti menerima, sedangkan mengajar berarti memberi. Dalam kamus KBBI V, definisi belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan definisi mengajar adalah memberi pelajaran. Atas dua definisi di atas, saya jadi teringat pada pesan Pak Harfan dalam film *Laskar Pelangi*, “Hidup adalah memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya.”

Guru memiliki peran vital dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, guru perlu mendapatkan sejumlah kesempatan belajar dalam pengembangan kapasitas diri. Konsep pengembangan kapasitas guru bisa diartikan sebagai proses belajar guru, baik secara formal maupun informal, di laksanakan oleh individu atau sistem, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pembelajaran peserta didik (Avalos 2011, Conners 1991, Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke, & Baumert 2014).

Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah—dalam hal ini kementerian pendidikan. Secara perlahan, konsep belajar terus digaungkan. Ini misalnya bisa kita lihat dari program Guru Belajar yang dikemas dalam laman <https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/>. Pemberian nama situs ‘ayo guru belajar’ adalah penanaman pondasi terbaik untuk guru dalam memahami tugas dan fungsi dirinya. Contoh lain, hadirnya platform pembelajaran digital dari Kemendikbud Ristek untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK dalam akses layanan pembelajaran. Platform ini juga diberi nama “belajar.id.”

Di tempat saya mengabdikan, sebuah sekolah swasta yang terletak di Aceh, juga memiliki konsep yang sama. Konsep itu dituangkan dalam visi sekolah: “Menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan berkelanjutan bagi warga belajar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan akademis, terampil, dan berakhlak mulia.” Penempatan kata ‘warga belajar’ adalah pondasi yang dibangun untuk menjelaskan fungsi keberadaan seorang guru.

ASEAN adalah Rumah Kita

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang didirikan pada 8 Agustus 1967 kini beranggotakan 10 negara. Negara-negara ASEAN adalah rumah bagi berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama. Keragaman sosial budaya beserta kekayaan sumber daya alam dan masyarakatnya ini merupakan aset yang sangat potensial (kemenkopmk.go.id).

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya Masyarakat Sosial Budaya, telah disusun Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC Blueprint) sebagai pedoman (*guidelines*) bagi negara anggota ASEAN. Salah satu kerja sama yang tertuang dalam Cetak Biru Sosial Budaya ASEAN adalah bidang Pendidikan. Penguatan kerja sama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing, baik di tingkat regional maupun global. Dalam kaitan ini, negara anggota ASEAN diwajibkan untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar, yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik (kemlu.go.id).

Pertukaran Guru: Pertukaran Etos

Berangkat dari pengalaman Sekolah Sukma Bangsa yang ada di Aceh (Sukma Bangsa Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe) pada program *Teacher Exchange*. Ketiga sekolah memiliki Visi Misi yang sama, hanya terletak di lokasi yang berbeda. Guru yang ada di tiga lokasi tersebut didorong untuk ambil bagian pada program *Teacher Exchange* ke lokasi yang lain.

Sekalipun Sekolah masih berada di satu provinsi, namun beberapa pengalaman belajar ternyata berbeda. Salah satu alasannya karena perbedaan karakter yang dimiliki peserta didik. Yang atas pada itu berpengaruh terhadap atmosfer belajar. Tantangan yang dihadapi guru berbeda sehingga berbeda pula model pendekatan yang harus diinisiasi guru.

Jika dalam lingkup yang kecil saja, dengan budaya yang sama, ternyata banyak pengalaman belajar yang bisa diperoleh, maka dalam lingkup regional, bisa diperoleh sejuta pengalaman. Mengingat di level ASEAN, terdapat banyak sekali keragaman sosial budaya.

Dalam pandangan penulis sebagai guru dan Direktur Sekolah, juga merujuk pada literatur yang ada, setidaknya terdapat 3 manfaat jika pertukaran guru di level ASEAN ini bisa diwujudkan. *Pertama*, guru belajar memahami perspektif regional ASEAN. Ini diperoleh dari pemahaman dan pengalaman sejarah serta budaya negara ASEAN. Dengan demikian, dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru bahwa adanya saling ketergantungan satu sama lain di belahan bumi ini. *Kedua*, belajar keragaman sosial budaya. Negara-negara ASEAN memiliki keunikan tersendiri akan keragaman sosial budaya. *Ketiga*, belajar etos kerja. *Keempat*, Menjadi promotor wisata. Kembali ke pengalaman Sekolah Sukma Bangsa, saat ini sudah terhubung dengan banyak sekali instansi pemerintahan dan swasta yang ada di belahan dunia. Baik itu antar sekolah, Universitas, maupun NGO. Salah satu benefit yang kami peroleh dari koneksi ini adalah program intership yang dilaksanakan di sekolah. Ada sejumlah pelajar/praktisi dari luar negeri yang mengajar di sekolah Sukma Bangsa.

Lalu pertanyaan sederhananya adalah apa *impact* paling mendasar atas program ini? Yang kami lihat adalah adanya perubahan significant dari guru dalam cara berpikir dan bertindak. Secara *gradually*, berubah menjadi *Act Locally Think Globally*. Ketika guru sudah bertindak di lokal dengan berpikir global, maka ini menjadi salah satu kriteria seroang guru telah menjadi warga dunia. Lalu, tentu saja, jika guru sudah menjadi warga dunia, maka dia akan menyiapkan anak didiknya juga menjadi warga dunia.

ASEAN Annual Event

Banyak sekali event yang bisa digagas yang dapat mempertemukan guru-guru ASEAN. Dalam kesempatan ini, guru saling berbagi pengalaman terbaiknya di negara masing-masing. Ragam isu bisa dikemas dengan kegiatan yang terpisah. Misalnya isu kekerasan, bisa di-*create* sendiri secara terpisah, yang membahas bagaimana pendidikan perdamaian diajarkan oleh masing-masing guru berdasarkan *subject* yang diampu. Pengalaman terbaik di setiap negara dapat diadaptasi di belahan negara asean lainnya. Dalam event ini juga bisa melahirkan rekomendasi atas isu yang sedang hangat di negara asean. Seperti halnya, kekerasan yang terjadi pada minoritas Rohingya. Kekesan yang terjadi—hingga membuat mereka harus mencari suaka ke negara luar.

Isu global yang paling hangat saat ini adalah perubahan iklim. Butuh semua orang dari semua negara untuk berkontribusi menyelesaikan masalah ini. Salah satu cara terbaik untuk jangka Panjang adalah melalui Pendidikan perubahan iklim. Banyak negara yang sudah memasukkan isu ini dalam kurikulum sesuai dengan pendekatan lokal masing-masing. Saling berbagi praktik baik dengan sesama guru ASEAN adalah cara untuk memperkuat satu sama lainnya. Ketika semua negara bergerak dalam rangka 'stop climate change' maka akan ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga ini tidak hanya berhenti pada ide, tapi dapat terealisasi dan *insya Allah* akan berdampak baik untuk Pendidikan Indonesia, ASEAN, dan global. *

ZUBIR adalah seorang ayah dengan dua putra yang ganteng dan dua putri yang cantik. Saat ini, dipercayakan sebagai Direktur Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe, Aceh. Sebelumnya pernah mendapat kepercayaan sebagai Kepala SMA selama 5 tahun. Lahir pada 5 Juni 1986, di desa Ulee Madon, Aceh Utara. Sehari-hari, selain mengurus pendidikan, juga menulis di media massa, baik media lokal maupun media nasional. Seperti di harian Serambi Indonesia, kolom detik.com, dan harian Media Indonesia. Zubir dapat dihubungi di alamat email: zubir@sukmabangsa.sch.id.

Guru dan Tantangan Mengajar di Era Keterbukaan

Puji Wahyuningasih

Saat ini guru berperan penting di era keterbukaan informasi dan teknologi. Guru jugadiharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap terjun dan memiliki daya saing di berbagai bidang. Kemampuan bahasa internasional dapat dijadikan sarana dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pendidik di negara lain contohnya seperti negara-negara tetangga di Asia tenggara untuk bertukar informasi dan berbagi praktik baik dalam dunia pendidikan.

Dalam sebuah program Kemendikbud yaitu pertukaran guru-guru Indonesia ke negara lain, saya pernah terlibat menjadi salah satu duta bersama sepuluh guru terbaik lainnya. Nama programnya adalah *teacher exchange* atau Sister School Program di Melbourne, Australia. Para peserta harus menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan bahasa setempat agar dapat menggali lebih jauh informasi serta mampu menyerap berbagai praktik baik dinegara tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan.

Sebagai guru saya berharap KTT ASEAN dapat menjembatani guru-guru se-Asia Tenggara untuk lebih intens lagi dalam berkomunikasi dan berbagi praktik mendidik baik itu teknologi maupun terobosan-terobosan baru dalam mendidik siswa di masa yang penuh tantangan saat ini.

Salah satu tantangannya adalah dimana siswa dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media dibandingkan gurunya yang sebagian besar masih terbatas dalam menggunakan media dan teknologi komunikasi sehingga walaupun informasi tersebut bagus untuk belajar siswa dalam mempelajari berbagai hal baru, namun kemampuan untuk memfilter dan membedakan mana yang nyata baik dan mana yang berdampak buruk masih sangat perlu bimbingan guru. Di situlah guru harus dapat mengasah lebih jauh kemampuan literasi digital dan komunikasinya.

Guru memiliki hambatan atau rintangan dari internal seperti perubahan kurikulum yang terlalu cepat, yang terkadang menyulitkannya dalam beradaptasi sampai pada permasalahan kesejahteraan guru itu sendiri yang saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa guru di Indonesia belum mendapatkan gaji yang layak bila dibandingkan negara tetangganya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum dan merupakan PR pemerintah sejak dulu. Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan berdampak kurang baik untuk dunia pendidikan di Indonesia.

Di luar itu semua, saat ini jutaan guru di Indonesia sedang terlibat aktif dalam program Kemendikbud yaitu Program Pendidikan Guru Penggerak. Program ini meniscayakan setiap guru mampu menjadi motor penggerak perubahan minimal di sekolahnya masing-masing. Dikutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024 salah satu visi Pemerintah Republik Indonesia berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Visi tersebut terkait langsung dengan tugas Kemendikbud sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, Kemendikbud mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Filosofi “Merdeka Belajar” disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, merdeka belajar dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan.

Guru Indonesia diharapkan mampu mencirikan lima karakter utama yaitu berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Berbagai kebijakan dan program tersebut diupayakan serta melibatkan berbagai pihak menjadi satu ekosistem pendidikan yang bergerak dan bersinergi dalam satu pola pikir yang sama antara masyarakat, satuan pendidikan, dan pemangku kebijakan.

Selain itu Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan serta diharapkan kelak mampu menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing.

Program Pendidikan Guru Penggerak ini mendapat banyak dukungan dari guru-guru khususnya karena merekalah yang menjadi ujung tombak dalam dunia pendidikan. Saya mengambil salah satu peran sebagai Pengajar Praktik pada angkatan ke-9 dimana salah satu tugasnya yakni mendampingi, memotivasi dan *coaching* calon-calon guru penggerak selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Selama mengikuti program ini kami banyak *sharing* dan masukan ilmu serta berbagai praktik baik yang dapat ditularkan dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

Alangkah indahnya apabila guru-guru memiliki akses yang sebebas-bebasnya sehingga dengan mudah berkomunikasi serta berbagi ilmu pengetahuan dengan sekolah-sekolah selain di negeri sendiri.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN tentunya memiliki harapan dan cita-cita bersama melalui rancangan program dan strategi dalam mewujudkannya, namun bila mengingat di masa lalu betapa mesranya hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dimana sekarang ini masing-masing negara ASEAN mungkin lebih disibukkan dengan urusan internalnya sendiri. Salah satunya fokus dalam meningkatkan perekonomian yang pastinya sudah menjadi prioritas pada setiap negara di dunia saat ini. Maka gurulah yang menjadi penyambung informasi kepada generasi penerus bangsa, memastikan siswa kita mengenal ASEAN, kiprah Indonesia di ASEAN, dan bagaimana ke depannya menitipkan harapan pada mereka sehingga memberikan manfaat yang lebih luas khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia.*

PUJI WAHYUNINGASIH dilahirkan di Jakarta 19 Januari 1984. Saat ini mengajar pada sebuah Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Utara sebagai guru Pendidikan Agama Islam, selain mengajar aktif juga dalam organisasi dakwah dan pendidikan seperti Lembaga Dakwah PWNUI DKI Jakarta, Syiar Dakwah Indonesia, Komunitas belajar Pendidikan Guru Penggerak serta Kelompok Kerja Guru Agama Islam provinsi DKI Jakarta. Ia pernah dikirim sebagai duta Program Kemendikbud bersama 10 guru terbaik pada program pertukaran guru antarbangsa atau Sister School Program ke Melbourne, Australia.

Peran Dosen Ilmu Sosial dalam Resiliensi Pendidikan Indonesia-ASEAN Pasca Pandemi Covid-19

Romi Mesra

Pendahuluan

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi, pendidik yang dalam hal ini disebut dosen tentu perlu memiliki manajemen masing-masing sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun setiap dosen tentu tidak harus memiliki manajemen yang sama antara satu dosen dengan dosen lainnya namun dosen lebih tahu bagaimana situasi peserta didik dan situasi lingkungan pendidikannya sehingga disesuaikan dengan manajemen yang ingin diterapkan oleh dosen tersebut. Terlebih selama pandemi Covid-19 para dosen harus lebih kreatif lagi dalam memilih manajemen mana yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran online dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tersebut tetap dapat dicapai meskipun begitu banyak kendala yang harus dihadapi dosen khususnya maupun mahasiswa dan seluruh stakeholder dunia pendidikan.

Karena kedekatannya dan keterkaitan yang kuat dalam pariwisata dan perdagangan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan negara anggota ASEAN mengalami fase terjangkit lebih awal. Sebelum Covid-19, ASEAN telah mengelola epidemi bersama selama SARS, H1N1 dan MERS-CoV. Langkah \pm langkah awal yang diambil oleh masing-masing negara anggota adalah kunci keberhasilan untuk mengekang penyebaran virus. Selama bulan Maret \pm April 2020 lalu, ASEAN mengadakan pertemuan dan menggunakan mekanisme kesehatan regional sebagai upaya dalam memberikan tanggapan yang koheren terhadap merabaknya wabah Covid-19 di kawasan Asia Tenggara (Jannah, 2022).

Kondisi pembelajaran online tentu merupakan hal baru yang harus dijalani oleh seorang dosen, banyak hal yang harus dipelajari, banyak kendala juga yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya sementara tujuan pembelajaran tetap harus diupayakan tercapai semaksimal mungkin meski didera berbagai permasalahan, baik yang datangnya dari dosen sebagai pendidik, mahasiswa sebagai peserta didik, maupun lingkungan pendidikan itu sendiri (Santie & Mesra, 2022).

Kondisi pandemi ini mau tidak mau, suka ataupun tidak suka telah memaksa berbagai aspek pendidikan untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut dan tidak terkecuali kondisi pendidikan yang ada di negara ASEAN. Pada dasarnya semua negara ASEAN juga terdampak oleh pandemi Covid-19 ini bahkan hingga sekarang Desember 2023 meskipun sudah agak berkurang dan pendidikan sudah mulai dilakukan secara *offline* namun masih saja ada ketakutan kondisi pandemi ini akan kembali meningkat terutama menjelang akhir tahun 2023 yang juga beredar isu akan terjadi puncak pandemi Covid-19.

Peran Dosen Ilmu Sosial

Seperti apa peran Dosen Ilmu Sosial dalam resiliensi pendidikan Indonesia-ASEAN pasca pandemi Covid-19? Mencermati fenomena sosial yang terjadi saat ini, maka diketahui betapa pentingnya daya tahan dan daya lentur (resiliensi) bagi individu remaja agar mampu menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, dan dapat terhindar dari stres, depresi, dan perilaku negatif yang merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Kesulitan, kemalangan, bencana, dan lain-lain yang membuat remaja merasakan kesedihan, dan putus asa seringkali ditemui dalam kehidupan (M.C. Ruswahyuningih, 2015).

Selain terpengaruhnya sektor ekonomi, sektor pendidikan juga sangat terdampak oleh pandemi ini. Pada dasarnya proses belajar mengajar itu dilakukan di sekolah secara tatap muka, namun karena pandemi ini pembelajaran mau tidak mau harus dilakukan dari rumah masing-masing. Kalaupun bisa dilakukan secara gabungan antara online dan

tatap muka maka hal tersebut tergantung kondisi penyebaran virus Covid-19 di masing-masing daerah dan juga harus sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tersebut.

Bentuk kerja sama pendidikan negara ASEAN. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, di antaranya:

- Penawaran beasiswa pendidikan, seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN.
- ASEAN Council of Teachers (ACT) sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT pada pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global.
- Mengadakan olimpiade regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN.
- ASEAN-Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang.
- Adanya program ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN (Pendidikan Kedokteran, 2021).

Dalam proses belajar mengajar, selain peran penting pendidik atau guru maka posisi peserta didik di dalam ini juga merupakan pusat dari proses pembelajaran di sekolah yang juga akan sangat terpengaruh oleh situasi ini, di awal-awal kebijakan kuliah secara daring tentu adanya proses adaptasi bahkan mungkin peserta didik agak sedikit terkejut ketika harus menjalani proses belajar mengajar dari rumah masing-masing tanpa ada teman-teman satu sekolah dan hanya ada keluarga di rumah dimana situasi ini belum pernah dialami sebelumnya.

Seiring berjalannya waktu maka peserta didik akan mulai terbiasa dengan situasi yang ada di samping begitu banyaknya dinamika permasalahan pembelajaran online yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya oleh peserta didik hingga saat ini proses belajar mengajar pada beberapa daerah sudah diperbolehkan secara tatap muka, ada juga yang masih online, serta ada juga yang melakukan pembelajaran hybrid learning yang merupakan penggabungan antara pembelajaran online dengan offline atau tatap muka.

Berbagai fenomena yang dialami oleh peserta didik adalah sebagai berikut;

1. Sebagian siswa kesulitan melengkapi alat pembelajaran online
2. Kemampuan menggunakan media digital siswa meningkat
3. Pembelajaran tatap muka menjadi variasi pembelajaran secara online
4. Metode ceramah kurang efektif pada pembelajaran menggunakan media online
5. Metode penugasan atau proyek melalui media digital diminati siswa
6. Penilaian afektif terhadap siswa sedikit sulit dilakukan (Mesra, Mononege, et al., 2022).

Pada dasarnya manajemen pembelajaran di perguruan tinggi tentu juga berkaitan dengan kompetensi seorang dosen dalam mengelola kelas pada mata kuliah yang ia ampu, hal ini akan berkaitan juga dengan pemilihan alat dan media pembelajaran, pemilihan metode, serta juga memperhatikan faktor-faktor lain yang secara langsung akan mempengaruhi proses dan pencapaian tujuan sebuah pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran ini tidak hanya tergantung dosen, atau juga tergantung pimpinan, atau tergantung mahasiswa, namun lebih kepada berhasilnya kolaborasi antara semua bagian menjadi satu sistem pembelajaran yang melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan baik atau kalau pun ada kendala maka minimal tujuan pembelajaran tetap mengarah ke pencapaian terbaik yang bisa dicapai.

Lebih lanjut, persoalan faktor-faktor inti yang memang sangat vital jika tidak diatur atau diorganisasikan dengan baik dimana faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran di masa pandemi ini. Misalnya saja jika mahasiswa atau dosen tidak memiliki alat pembelajaran seperti laptop, handphone yang memadai

dan lainnya maka proses belajar mengajar pun akan sulit efektif dilaksanakan, maka penting untuk melihat secara lebih serius tentang bagaimana pengelolaan berkaitan dengan faktor-faktor krusial tersebut.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran *online* pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: fasilitas yang tersedia kurang memadai, dosen masih banyak yang tidak melek teknologi, dosen dan mahasiswa harus banyak mempelajari dunia digital, beberapa mahasiswa tidak bisa mengakses alat dan media pembelajaran, dan sulitnya dosen melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran siswa (Imbar & Mesra, 2022).

Perubahan yang sangat cepat dan mendesak karena adanya pandemic covid-19 mengakibatkan semua negara merespon dengan cepat. Berdasarkan perbedaan tersebut dan kondisi awal masing-masing negara maka dampak yang dirasakan dan tantangan yang dihadapi akan berbeda. Permasalahan – permasalahan tersebut dikhususkan dalam tiga negara diantaranya Indonesia, Jepang dan Filipina ditunjukkan dalam tabel 1 dimana Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia memiliki kurang lebih 68 juta peserta didik yang terpengaruh oleh adanya pandemic ini.

Dengan permasalahan yang dialami dimasa pandemic yaitu pemahaman peserta didik terkait materi dirasa kurang maksimal, tidak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, melonjaknya kebutuhan kuota internet, orang tua disibukkan oleh tugas atau pekerjaan anak, rasa jenuh pada anak yang merasa hanya berkuat pada tugas, serta tidak jelasnya penjelasan guru ketika pembelajaran membuat kurikulum mengalami perubahan dari K13 menjadi kurikulum darurat Covid-19, bukan hanya itu sistem pembelajaran yang digunakan yaitu daring atau pembelajaran jarak jauh. Mendukung hal ini maka aplikasi yang digunakan yaitu whatsapp, zoom, dan google classroom. Menanggapi permasalahan yang sedang melanda negara Indonesia maka upaya pemerintah guna menungurangi kendala yang dihadapi diterapkannya kurikulum darurat, memberikan dukungan dan bantuan berupa kuota internet untuk kepentingan pembelajaran.

Berdasarkan sumber data UNICEF bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang melaksanakan pembukaan sekolah secara Nasional. Akibat permasalahan yang dihadapi diantaranya terganggunya kalender pendidikan membuat sistem pendidikannya yang mengalami gejala Covid-19 dilakukan dengan Daring dan Luring. Sistem ini disebut dengan sistem pembelajaran Hybrid Learning. Sistem pembelajaran ini lakukan dengan menggabungkan pembelajaran online dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Aplikasi yang digunakan yaitu Quiper, Zoom dan Waseda Moodle. Upaya Pemerintah membantu permasalahan dalam dunia pendidikan yaitu mewajibkan beberapa peraturan yang harus diterapkan yaitu cek suhu tubuh, buka ventilasi kelas, dilarang mengobrol jarak dekat, pakai masker, meliburkan pihak yang terinfeksi, dan cuci tangan sebelum makan siang.

Permasalahan lainnya yaitu pelatihan yang tidak merata di institusi pendidikan, minim teknologi, kesulitan dalam adaptasi, permasalahan finansial keluarga, dan komunikasi minim antara anak didik dan pengajar bahkan ketersediaan listrik yang tidak merata dan adanya gangguan listrik. Sama halnya dengan negara yang dipaparkan sebelumnya bahwa sistem pembelajaran dilakukan secara daring, mendukung hal ini untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal dapat diperoleh dari radio komunitas, V komunitas, quiper dan google classroom. Pemerintah Filipina juga memberikan bantuan dalam dunia pendidikan dimana Menteri Pendidikan bersikeras agar para murid tetap di rumah, tetapi belajar bahkan Kementerian Pendidikan Filipina menyetop acara-acara yang melibatkan murid dan guru (Simanjuntak, 2021).

Kreativitas Dosen Ilmu Sosial

Pembelajaran online yang harus diterapkan di perguruan tinggi akibat efek pandemi Covid-19 tentu memiliki efek positif maupun negatif. Berkaitan dengan proses belajar mengajar di kampus, dosen melihat adanya beberapa perbedaan perilaku mahasiswa selama perkuliahan dengan perilaku mahasiswa setelah melihat nilai mereka yang sudah diinput di portal.

Ragam perilaku mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran online: mahasiswa yang aktif mengikuti arahan dosen, mahasiswa yang cuek dengan arahan dosen, mahasiswa yang selalu mematikan video ketika perkuliahan lewat aplikasi zoom, mahasiswa yang selalu menghidupkan video ketika perkuliahan lewat aplikasi zoom, mahasiswa yang melakukan kegiatan lain ketika perkuliahan lewat aplikasi zoom, mahasiswa yang selalu banyak alasan ketika terlambat atau tidak hadir pertemuan perkuliahan. Perilaku mahasiswa setelah penginputan nilai: berterimakasih atas nilai bagus yang

diberikan dosen, mempertanyakan nilai yang diberikan dosen, meminta waktu untuk perbaikan nilai, memohon kepada dosen agar nilainya bisa diubah, memberikan alasan-alasan tentang kekurangan nilainya (Mesra, Waldi, et al., 2022).

a. Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa

Ilmu manajemen tentu sangat penting dimiliki oleh seorang dosen berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran online di kampus. Kondisi pembelajaran online tentu merupakan hal baru yang harus dijalani oleh seorang dosen, banyak hal yang harus dipelajari, banyak kendala juga yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya sementara tujuan pembelajaran tetap harus diupayakan tercapai semaksimal mungkin meski didera berbagai permasalahan, baik yang datangnya dari dosen sebagai pendidik, mahasiswa sebagai peserta didik, maupun lingkungan pendidikan itu sendiri. Setelah melalui proses penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Merencanakan Pembelajaran Berupa Hybrid Learning Melalui RPS

Pada model pembelajaran ini dosen prodi pendidikan sosiologi merancang kegiatan PBM yang efektif dilakukan secara online dan kegiatan PBM yang lebih efektif dilakukan secara offline di mana mahasiswa bisa mengerjakan kegiatan tersebut dari rumah masing-masing dengan tetap bisa dipantau apakah secara visual langsung seperti penggunaan aplikasi zoom, video call, dan lainnya atau bisa juga dikontrol dengan pengumpulan laporan dan lainnya melalui group whatsapp, LMS, ataupun google classroom, dan media sosial lainnya.

b. Menjelaskan Kontrak Perkuliahan secara Mendalam Kepada Mahasiswa

Pada pertemuan ke-1 di prodi pendidikan sosiologi unima biasanya diawali dengan penjelasan kontrak perkuliahan oleh dosen kepada mahasiswa. Hal ini merupakan tahap yang sangat penting mengingat mahasiswa harus mengetahui seluk-beluk perkuliahan pada mata kuliah yang sedang dipelajari oleh mahasiswa sehingga dalam proses belajar mengajar ada kesepahaman antara dosen dan mahasiswa. Terlebih pada model pembelajaran online, penjelasan kontrak perkuliahan ini harus dijelaskan secara lebih mendalam, misalnya saja menjaring permasalahan yang dialami mahasiswa, mendata mahasiswa yang mampu mengikuti pembelajaran online dan yang tidak mampu diberikan alternatif pembelajaran offline namun tetap menggunakan media online sebagai tempat berinteraksi dengan dosen.

c. Membagi kelas online dan kelas offline

Ketika dosen sudah menetapkan model hybrid learning yang tertera di RPS dan juga kontrak perkuliahan yang akan diterapkan pada proses perkuliahan maka dosen perlu mengorganisir mahasiswa dan mendata mahasiswa mana yang masuk pada kategori mampu mengikuti kelas online dan mahasiswa mana yang harus diwadahi di kelas offline.

d. Mengontrol pelaksanaan PBM sesuai RPS

Dalam hal ini apapun yang sudah dirumuskan di RPS maka seyogyanya itulah yang harus diterapkan oleh seorang dosen meskipun menurut peneliti seorang dosen tetap harus diberikan ruang dalam mengembangkan RPS tersebut berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada. Misalnya saja soal materi yang akan diberikan pada setiap pertemuan itu harus diusahakan memang materi itu selesai pada pertemuan tersebut, begitu juga kalau ada tugas, ujian dan lain sebagainya seorang dosen harus mencocokkan dengan agenda yang sudah tertulis di RPS tersebut.

e. Memberikan instrumen pembelajaran dan penilaian yang sebanding antara kelas online dan offline

Tantangan yang harus dihadapi oleh seorang dosen dalam menerapkan model hybrid learning ini cukup banyak yang salah satunya adalah menentukan instrumen penilaian yang seimbang antara kelas online dan kelas offline sehingga mahasiswa mendapatkan unsur-unsur nilai keadilan tanpa adanya ketimpangan khususnya dalam mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan juga sesuai dengan instrumen penilaian yang proporsional terhadap mahasiswa yang mengikuti kelas online maupun kelas offline.

f. Mempermudah media komunikasi dengan mahasiswa

Kunci dalam pelaksanaan kelas online dan kelas offline ini adalah adanya muara komunikasi yang mempertemukan kedua kelas tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Mungkin untuk kelas online akan lebih mudah mengontrol melalui media komunikasi secara online namun untuk mahasiswa yang kelas offline maka akses dosen untuk mengontrol secara langsung ke lokasi mahasiswa berada tentu terbatas terlebih kelas ini minim menggunakan media online.

b. Faktor-Faktor Krusial dalam Manajemen Pembelajaran Sejarah

Persoalan faktor-faktor inti yang memang sangat vital jika tidak diatur atau diorganisasikan dengan baik dimana faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran di masa pandemi ini. Misalnya saja jika mahasiswa atau dosen tidak memiliki alat pembelajaran seperti laptop, handphone yang memadai dan lainnya maka proses belajar mengajar pun akan sulit efektif dilaksanakan, maka penting untuk melihat secara lebih serius tentang bagaimana pengelolaan berkaitan dengan faktor-faktor krusial tersebut.

a. Adanya Learning Management System (LMS)

Selama pelaksanaan pembelajaran online meskipun tidak edari awal amun proses pembelajaran di cukup terbantu dengan adanya Learning Management System (LMS) Unima. Penggunaan LMS ini memang tidak bisa secara instan karena bahkan harus diadakan terlebih dahulu workshop yang menghadirkan para dosen kemudian juga disosialisasikan kepada mahasiswa. Kemajuan teknologi informasi yang pesat mendukung terselenggaranya pembelajaran berbasis elektronik (e-learning). E-learning memiliki sejumlah keuntungan diantaranya peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan evaluasi yang dapat mengukur pemahaman konsep siswa. Dengan kondisi seperti ini peserta didik diharapkan dapat memantapkan pemahaman konsep terhadap materi pembelajaran.

b. Adanya subsidi quota dari pemerintah

Menyadari adanya kendala yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran maka pemerintah memberikan subsidi quota internet melalui kemendikbud agar proses pembelajaran bisa lebih lancar terutama mahasiswa bisa terbantu tidak perlu memikirkan biaya quota internet untuk mengikuti pembelajaran online tersebut. Namun untuk mendapatkan quota ini juga tidak mudah harus dengan melalui proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Dosen dan mahasiswa memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran online dari rumah masing-masing

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran online ini dilakukan dari rumah masing-masing selama masa pandemi Covid-19 sesuai arahan dan aturan pemerintah, ada juga beberapa orang yang bekerja dari kantor karena kondisi posisi maupun pekerjaannya yang mengharuskan hal tersebut. Seperti halnya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa biasanya dilakukan dari tempat masing-masing sehingga ada mahasiswa yang belajar dari kampung halamannya dengan mengikuti zoom meeting, ada juga terlihat mahasiswa yang sedang di kebun membantu orang tuanya berkebun namun tetap menyempatkan diri mengikuti perkuliahan secara online.*

Referensi

- Imbar, M., & Mesra, R. (2022). *SEJARAH DI MASA PANDEMI (Studi Pada Jurusan Pendidikan Sejarah Unima)*. 8(3), 2174–2184. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3672/http>
- Jannah, U. (2022). Kerjasama Malaysia dan ASEAN dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 379. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1867>
- M.C. Ruswahyuningsih, T. A. (2015). Resiliensi pada Remaja Jawa. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 1(2), 11.
- Mesra, R., Mononege, N., & Korah, Y. C. (2022). *Efektifitas Pembelajaran Online Dan Offline (Hybrid Learning) Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Tondano*. 8(3), 2287–2294. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3710/http>

- Mesra, R., Waldi, A., Wijaya, W., & Melia, Y. (2022). *Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNIMA Ketika Pembelajaran Online*. 8(3), 2056–2067. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3586/http>
- Pendidikan Kedokteran. (2021). *Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Pendidikan*. pendidikankedokteran.net. <https://pendidikankedokteran.net/dikdok/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan/> diakses pada hari Minggu, 04 Desember 2022 Pukul 12.23 WITA
- Santie, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Simanjuntak, J. (2021). Analisis Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Matematika pada masa Pandemic COVID-19 di Negara Asia (Indonesia, Jepang dan Filipina). *Sepren*, 2(2), 47–55. <https://doi.org/10.36655/sepren.v2i2.504>

ROMI MESRA adalah dosen PNS di Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Manado yang juga aktif sebagai *content creator* pada channel Youtube: NALURI EDUKASI serta sebagai Editor in Chief JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education, pengelola Youtube: BAKU INGA TV, Youtube Program Studi Pendidikan Sosiologi Unima, Ketua SEJUK (SEdekah JUmah yuK) Mushalla Unima. Saat ini ia at berminat menulis buku, meski buku yang sudah ditulis baru berupa buku chapter dengan judul *Pengantar Sosiologi Umum: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi* (2019), *Analisis Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (2021). Ia dapat dihubungi melalui email: romimesra@unima.ac.id, dan nomor WhatsApp. 085762530583.

Reformasi Pendidikan Tinggi Indonesia dan ASEAN

Raiders Salomon Marpaung

Pendahuluan

Mutu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan diupayakan untuk dicapai, sebab pendidikan akan menjadi sia-sia bila mutu proses dan lulusannya rendah. Lebih parah dan menyedihkan lagi jika *output* pendidikannya menambah beban keluarga, masyarakat, dan negaranya. Reformasi di Indonesia diharapkan memberikan banyak perubahan kehidupan bagi bangsa, khususnya pada sektor pendidikan. Reformasi Pendidikan diyakini oleh banyak pakar sebagai solusi terbaik yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Sesungguhnya, sejak lama telah tumbuh kesadaran perlunya reformasi pendidikan di Indonesia, dikalangan pemerhati pendidikan. Kesadaran itu akibat ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. (Sutjipto, 2004). Akan tetapi tragisnya, sektor pendidikan ini masih merupakan lahan yang terabaikan sehingga telah membawa pendidikan di bumi Indonesia semakin menjadi problem baru.

Sebagai bukti, dalam catatan Human Development Index (HDI) saja, Indonesia masih memprihatinkan, tahun 2011 HDI Indoneia ada di peringkat (124) di bawah Thailand (103), Brunei Darussalam (33), dan Singapura (26). (hdr.undp.org, 2 November 2011). Satu dekade kemudian HDI Indoneia ada peningkatan, naik ke peringkat (114), tapi masih di bawah Thailand (66), Malaysia (62), Brunei Darussalam (51), dan Singapura (12). (hdr.undp.org, 19 November 2022).

Kemudian menurut "The 2006 Global Economic Forum of Global Competiveness Index (GCI)" yang di-release World Economic Forum (WEF), daya saing global Indonesia ada di posisi (46), di bawah Thailand (39), Brunei Darussalam (28), Malaysia (21), dan Singapore (2). (weforum.org, 2 November 2011). Delapan tahun kemudian GCI Indoneia ada penurunan, turun ke peringkat (50), dan masih tetap di bawah Thailand (40), Malaysia (27), dan Singapura (1). (weforum.org, 6 Desember 2022).

Soedijarto (1998) menyoroti lemahnya kualitas SDM Indonesia sebagai faktor yang menjadikan rentannya infrastruktur ekonomi Indonesia, seperti pengaruh depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar yang sedemikian besar terhadap ekonomi nasional sehingga mempengaruhi hampir seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan Indonesia.

Perguruan Tinggi, sebagai lembaga pendidikan yang mengemban amanat pendidikan nasional, memiliki peluang besar untuk ikut serta dalam memberdayakan masyarakat luas. Mengenai peran Perguruan Tinggi, Clark Kerr (1962) menyatakan: *"The basic reality, for the university, is the widespread recognition that new knowledge is the most important factor in economic and social growth. We are just perceiving that the university is invisible product, knowledge, may be the most powerful single element in our culture, affecting the rise and fall profession and even social classes, regions and even nation."*

Reformasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi Berwawasan Global

Mengawali pembahasan tentang pendidikan tinggi berwawasan global, penulis mengutip pernyataan dua orang pakar manajemen yang dikaitkan dengan globalisasi yaitu Peter F. Drucker (1999) yang menyatakan *"All institutions have to make global competitiveness a strategic goal. No institution, whether a business, a university or a hospital, can hope to survive, let alone to succeed, unless it measures up to the standards set by the leaders in its field, anyplace in the world."* dan David K. Carr (1996) dengan pernyataannya *"Governments for emerging countries aim to establish free market economies and major companies strive to create an extensive global presence to take advantage of the new possibilities."*

Menghadapi globalisasi dengan imbasnya dalam membentuk struktur ide masyarakat, pendidikan harus mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut, terutama menekankan pada metode belajar yang mendekatkan peserta didik pada “dunia secara utuh”, keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain yang saling mempengaruhi antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat. (Nurani Soyomukti, 2008).

Richard L. Daft (2010) mengatakan: “*pola pikir global dan pengalaman di kancah internasional makin menjadi syarat kesuksesan manajerial*” demikian pula dalam bidang pendidikan. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini.

Globalisasi menuntut perubahan yang sangat mendasar dari tingkah laku manusia dan masyarakat karena masyarakat dengan perdagangan bebas menuntut suatu masyarakat dan manusia yang berbeda dibandingkan di dalam masyarakat yang tertutup. Perubahan-perubahan penting yang dapat dijadikan indikator terhadap proses terjadinya globalisasi di dalam suatu masyarakat adalah adanya perubahan di lapangan ekonomi, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis, perubahan dalam bidang gaya hidup (*lifestyles*), dan perubahan dalam sains dan teknologi (Muchlis R. Luddin, 2008).

Dampak globalisasi membuat pembuat kebijakan termotivasi untuk mencari cara baru untuk menjamin kualitas akademik dalam pendidikan tinggi, seperti yang dikatakan David D. Dill (2010): “*The combined impacts of globalization and massification have radically altered the traditional relationship between the state and institution of higher education and motivated policy maker to seek new means for assuring academic quality in higher education.*”

Oleh sebab itu dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Premis untuk memulai pendidikan berwawasan global adalah bahwa informasi dan pengetahuan tentang bagian dunia yang lain harus mengembangkan kesadaran kita bahwa kita akan dapat memahami lebih baik keadaan diri kita sendiri apabila kita memahami hubungan dengan masyarakat lain dan isu-isu global.

Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan. Pendidikan dengan kebijakan dasar sebagai kebijakan sosial tidak lagi cocok bagi pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan sosial disatu sisi dan disisi lain sebagai kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar. Oleh karena itu, sistem dan struktur pendidikan harus bersifat terbuka, sebagaimana layaknya kegiatan yang memiliki fungsi ekonomis.

Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (Distance Learning)

Sampai dengan beberapa waktu yang lalu, penyelenggara utama pendidikan jarak jauh (PJJ) di tingkat pendidikan tinggi adalah Universitas Terbuka (UT). Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, ada kesempatan bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya, yang mempunyai kapasitas menyelenggarakan PJJ, untuk menyelenggarakan program tersebut.

Dijinkannya menyelenggarakan PJJ oleh institusi selain UT ini, salah satu sebabnya adalah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam banyak hal, TIK ternyata mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bidang pendidikan. Globalisasi ternyata merubah cara belajar-mengajar, dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan nonpersonal, melalui internet, dan video jarak jauh. Dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu, ahli manajemen Peter F. Drucker memang pernah meramalkan:

Thirty years from now the big university campus will be a relic. Universities won't survive in their present form. The main reason is the shift to the continuing education of already highly educated adults as the center and growth sector of education. (Drucker, 1999).

Faktor utama dalam pendidikan jarak jauh yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Namun demikian, dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk *real time* (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk *real time* dapat dilakukan misalnya dalam suatu chatroom, interaksi langsung dengan *real audio* atau *real video*, dan *online meeting*. Yang tidak *real time* bisa dilakukan dengan *mailing list*, *discussion group*, *newsgroup*, dan *buletin board*.

Penyelesaian administrasi juga dapat diselesaikan langsung dalam satu proses registrasi saja, apalagi di dukung dengan metode pembayaran online. Dengan demikian, bagi Perguruan Tinggi, globalisasi berarti: Teknologi informasi dan komunikasi, seperti Internet dan WORLD WIDE WEB, menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset.

Angka tingkat partisipasi masuk Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2001 adalah hanya sebesar (11%) padahal di negara tetangga angka tersebut lebih tinggi seperti Malaysia (11,7%), dan jauh di bawah Thailand (22,1%), Filipina (30%), dan Singapura (34%). (Asandhimitra, 2004). Melalui pengembangan pendidikan jarak jauh di tingkat pendidikan tinggi, mampu menaikkan angka partisipasi masuk Perguruan Tinggi. Dua dekade kemudian, angka tingkat partisipasi masuk Perguruan Tinggi di Indonesia ada peningkatan, naik menjadi (31,9%), tapi masih di bawah Malaysia (43%), Thailand (49%), dan Singapura (91%). (databoks.katadata.co.id, 6 Desember 2022).

Pendidikan Tinggi Kelas Dunia (World Class University)

Pendidikan tinggi di Indonesia pada saat sekarang telah memasuki era baru, suatu era kompetitif yang penuh tantangan, dan perubahan. Perguruan Tinggi kelas dunia merupakan Perguruan Tinggi yang siap dan berhasil dalam kompetisi di arena global, memiliki visi yang tidak hanya berkaitan dengan staf pengajar, peneliti, dan mahasiswa berwawasan global, tetapi juga berkaitan dengan institusi dan mitra global.

Berdasarkan survei yang dilakukan QS World University Rankings tahun 2011/2012, Perguruan Tinggi terbaik yang kita miliki seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) ternyata masih tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa Perguruan Tinggi milik negara tetangga kita, Malaysia atau Singapura meskipun Perguruan Tinggi kita tersebut berada pada posisi 217 (UI), 342 (UGM) dan antara 451-500 (ITB). (topuniversities.com, 2011). Satu dekade kemudian ranking Perguruan Tinggi terbaik Indonesia ada penurunan, turun ke posisi 254 (UGM), dan masih di bawah Perguruan Tinggi terbaik Thailand ada di posisi 247 (Chulalongkorn University), Malaysia ada di posisi 70 (Universiti Malaya), dan Singapura ada di posisi 11 (Nanyang Technological University dan National University of Singapore). (topuniversities.com, 6 Desember 2022).

Potensi Perguruan Tinggi kita sangat besar, tidak kurang ada 3000 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia (pts.co.id, 22 Januari 2010) yang berbanding lurus dengan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang berkecimpung di Perguruan Tinggi dan diharapkan dapat mengangkat citra negara kita di mata internasional. Akan tetapi menurut Soedijarto (2008), universitas kita dari yang paling tua sampai yang paling muda, baik negeri maupun swasta, belum menunjukkan keinginan besar dan atau belum diberi kesempatan untuk terlibat, melibatkan diri, dan/atau dilibatkan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Jika pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan secara merata seluruh Perguruan Tinggi, sudah selayaknya dikembangkan beberapa Perguruan Tinggi yang setidaknya bisa menjadi pertanda, adanya Perguruan Tinggi Indonesia yang representatif untuk bersaing di tingkat internasional. Keunggulan tersebut mencakup, antara lain, keunggulan dalam riset yang diakui masyarakat akademis internasional melalui publikasi internasional; keunggulan dalam tenaga pengajar (profesor) yang berkualifikasi tinggi dan terbaik dalam bidangnya; keunggulan dalam kebebasan akademik dan kegairahan intelektual; keunggulan manajemen dan *governance*; fasilitas yang memadai untuk pekerjaan akademis, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang mutakhir; dan pendanaan yang memadai untuk menunjang proses belajar-mengajar dan riset.

Jika pemerintah, masyarakat, dan kalangan Perguruan Tinggi Indonesia serius ingin memiliki world-class universities, maka jelas tantangannya tidak sederhana. Namun, peluang bukan tidak ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menganggarkan minimal 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan, dapat menjadi peluang untuk lebih serius meningkatkan kualifikasi Perguruan Tinggi Indonesia menjadi

world-class universities. Anggaran pendidikan tersebut seyogyanya dialokasikan untuk akselerasi beberapa Perguruan Tinggi Indonesia ke kelas dunia.

Oleh sebab itu pemerintah bersama-sama dengan para pelaku pendidikan tinggi harus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, untuk menjadi Perguruan Tinggi kelas dunia, katakan menjadi salah satu dari 50 Perguruan Tinggi terbaik di dunia, kita tentunya perlu mempelajari karakteristik unggul dari sejumlah Perguruan Tinggi kelas dunia, untuk kita capai di kemudian hari.

Untuk mewujudkan mimpi mempunyai Perguruan Tinggi kelas dunia diperlukan kerja ekstra keras dan waktu yang lama. Pada saat ini, reformasi dalam pendidikan tinggi harus dapat meletakkan basis yang kuat melalui pembangunan karakter sivitas akademika yang memiliki etika akademik dengan ciri-ciri rasional, obyektif dan normatif. Etika akademik tersebut harus menjadi unsur fundamental moralitas dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya dan iptek. Pendidikan tinggi di Indonesia harus mampu mempertanggung jawabkan secara publik, hormat kepada martabat dan hak azasi manusia serta dapat menjadi sumber acuan budaya luhur bangsa. Membangun Perguruan Tinggi kelas dunia bukanlah pekerjaan yang bisa selesai semalam, tapi kendati demikian harus dimulai. Jika tidak dimulai suatu negara tidak akan pernah sampai pada puncak pencapaian itu.

Catatan Penutup

Dalam era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global.

Penyelenggara utama pendidikan jarak jauh (PJJ) di tingkat pendidikan tinggi adalah Universitas Terbuka (UT). Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, ada kesempatan bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya, yang mempunyai kapasitas menyelenggarakan PJJ, untuk menyelenggarakan program tersebut.

Tantangan ke depan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global adalah kemampuan institusi pendidikannya menempatkan diri sejajar dengan Perguruan Tinggi terkemuka di dunia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka segenap sistem nilai yang menjadi kunci untuk mencapai tingkatan sebagai Perguruan Tinggi berkelas dunia (world Class University) harus dikembangkan dengan sungguh-sungguh, baik instrumen legal sampai terbentuknya budaya berkualitas global dari setiap komponen dari Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2023 Indonesia menjadi ketua ASEAN, sebagai ketua Indonesia memainkan peranan penting. Posisi strategis tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berdampak bagi Kawasan. Dalam konteks Pendidikan Tinggi, Chairmanship Indonesia diharapkan mampu mendorong adanya sinergi dan kolaborasi Pendidikan Tinggi melalui pertukaran pengetahuan dan pakar untuk memajukan kawasan ASEAN.*

Referensi

- Asandhimitra (edit), et al (2004). *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Carr, David K, et al (1996). *Managing The Change Process: A Fields Book For Change Agents, Team Leaders, and Reengineering Managers*, New York: McGraw-Hill.
- Dill, David D dan Beerkens Maarja (edit) (2010). *Public Policy for Academic Quality: Analyses of Innovative Policy Instruments*, New York: London Springer Science and Business Media B.V.
- Drucker, Peter F.(1999). *Management Challenges for the 21st Century*, New York: Harper Collins Publisher Inc.
- Daft, Richard L (2010). *Era Baru Manajemen (New Era of Management)*, Buku ke-1, Jakarta: Salemba.

- <https://hdr.undp.org/system/files/documents//human-development-report-2011-summary-english.human-development-report-2011-summary-english> (diunduh pada 2 November 2011).
- https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf (diunduh pada 6 Desember 2022).
- http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CompetitivenessIndexRanking_2011-12.pdf (diunduh pada 2 November 2011).
- https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (diunduh pada 6 Desember 2022)
- <http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011?page=8>. (diunduh pada 2 November 2011).
- <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021> (diunduh pada 6 Desember 2022).
- <http://www.pts.co.id/?q=akreditasi-perguruan-tinggi-indonesia> (diunduh pada 22 Januari 2010).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/29/belum-capai-target-angka-partisipasi-pendidikan-tinggi-di-ri-2021-masih-rendah>
- Kerr, Clark (1962). *The Uses of University*, New York: Harper Torch Book.
- Luddin, Muchlis (2008). *Negara, Pendidikan Humanis dan Globalisasi*, Jakarta: Karya Mandiri Pers.
- Soyomukti, Nurani (2008). *Pendidikan Berperspektif Globalisasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soedijarto (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Soedijarto (1998). *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutjipto (2004). *Kesaksian Seorang Rektor: Siapa Menyuruh Mahasiswa ke Jalan?*, Jakarta: PT Global Mahadika Netama & UNJ.

RAIDERS SALOMON MARPAUNG adalah seorang pensiunan guru dengan pengabdian selama 31 tahun mengajar dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Ia mengajar mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Semasa kuliah ia aktif berorganisasi, hampir semua organisasi kemahasiswaan diikutinya seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan, Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Persekutuan Mahasiswa Kristen, Unit Kesenian Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Batak Jakarta. Ia juga pernah aktif di organisasi politik seperti Partai Damai Sejahtera dan Partai Persatuan Indonesia bahkan sempat menjadi Calon Anggota Legislatif pada PEMILU 2009 dan 2019. Sebagai penggemar olahraga dan seni, ia juga sering mengikuti perlombaan dan sempat beberapa kali meraih juara. Saat ini ia masih aktif dalam berbagai kegiatan seperti mengelola Sekolah Catur Benteng Raiders (sejak 2022-sekarang), menjadi Kepala Perwakilan Media Online Bidik Ekspres (sejak 2022-sekarang), dan menjadi Produser acara "Puspa Ragam Indonesia" di Magna TV (sejak 2022-sekarang). Ia juga menulis empat judul buku, diantaranya: kontributor buku *G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Ia dapat dihubungi di email: raidersmarpaung@gmail.com.

Berkah Pandemi Covid-19, Transformasi Pendidikan Berbasis Digital

Feri Rustandi

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 menimbulkan krisis multidimensional telah mendisrupsi cara hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Semua sektor terkena dampak yang sangat signifikan sehingga menyebabkan pola hidup *new normal*, dari mulai sektor ekonomi, pariwisata, sosial budaya bahkan dunia pendidikan yang sejatinya merupakan hal yang fundamental dalam penyiapan sumber daya manusia unggul dalam suatu bangsa. Sehingga pada tahun 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global, yang merujuk pada penyebaran penyakit yang dianggap dapat menginfeksi dari orang ke orang dengan mudah dan cepat, serta terjadi secara berkelanjutan, di berbagai wilayah (Gumelar & Dinnur, 2020).

Selain pandemi ini memberikan dampak negatif terhadap tatanan kehidupan, disisi lain kita melihat ada berkah positif yang didapatkan terutama setelah pandemi mulai berangsur membaik, salah satu yang dirasakan dalam dunia pendidikan adalah dengan adanya konsep belajar daring, munculnya teknologi digital sebagai media pembelajaran yang mempertemukan antara guru dan peserta didik ketika tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, selain itu adanya aplikasi pembelajaran yang lebih menarik dan menghidupkan proses pembelajaran. Sebut saja yang paling populer digunakan pada saat pademi diantaranya *whatsapp group*, *google classrom*, *zoom meeting*, *youtube*, *editing video* seperti *kinemaster* dan *filmoraGo*.

Sebelum pandemi melanda media pembelajaran yang digunakan bersifat seadanya, karena pembelajaran dominan dilakukan secara tatap muka sehingga tidak ada kebutuhan inovatif para guru dalam menghadirkan media pembelajaran berbasis digital. Oleh karena itu media pembelajaran berbasis digital merupakan kebutuhan wajib dan memaksa para guru dan peserta didik untuk bisa menyesuaikan tuntutan keadaan. Yang awalnya enggan bahkan tidak sedikit yang apatis menggunakan media dan teknologi, pada akhirnya mereka berangsur mulai belajar dan menerima tuntutan perubahan tersebut. Media Internet bisa di jadikan media altertnatif unggulan dalam menyajikan materi pembelajaran secara online (Hermansyah, 2021).

Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Digital di Bidang Pendidikan

Perkembangan zaman yang selalu dinamis menuntut kita selalu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, hadirnya teknologi digital bisa mempercepat peradaban kehidupan. Pandemi dalam sudut pandang lain bukan hanya sebagai tantangan melainkan peluang untuk mempercepat transformasi digital di bidang pendidikan, entah tahun keberapa pemanfaatan media digital di bidang pendidikan digunakan secara masif kalau pandemi tidak melanda, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama.

Transformasi digital di bidang pendidikan merupakan tuntutan agar proses pendidikan lebih efektif dan praktis, menurut (Gumelar & Dinnur, 2020) digitalisasi pendidikan merupakan pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran, mulai dari kurikulum hingga ke sistem administrasi pendidikan. Dengan digitalisasi pendidikan diharapkan membantu dan memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan percepatan kemajuan dalam pendidikan nasional, maka tantangan dan tuntutan Revolusi 4.0 serta pasar bebas Global mesti dihadapi (Zikrillah, 2019). Dahulu sosok seorang guru menjadi *media center* untuk sumber informasi dalam pembelajaran, dewasa ini hadirnya internet sangat membantu peserta didik dalam mengambil sumber dan media belajar, sekaligus menjadi media bantu guru dalam memvisualisasikan proses pembelajaran. Salah satu manfaat

internet adalah mengajar tidak terbatas waktu dan ruangan, karena pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas dan dalam satu ruangan melainkan bisa lebih fleksibel dimanapun dan kapanpun.

Mengutip (Diah Ihsan, 2022) Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam pertemuan pertama Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan di Yogyakarta, Rabu (16/3/2022) pertemuan tersebut dihadiri oleh 27 delegasi anggota negara G20, undangan khusus, dan organisasi internasional yang hadir secara luring, serta 64 anggota negara G20 yang hadir secara daring. Menurut Nadiem, pandemi Covid-19 telah membawa momen refleksi kepada berbagai pihak mengenai tantangan sistem pendidikan yang dihadapi dunia saat ini. Pandemi Covid-19 juga telah mendisrupsi dan mengganggu sistem pendidikan secara global serta mempengaruhi ratusan juta anak di seluruh dunia. "Karena kesejahteraan dan kemakmuran masa depan kita bergantung pada anak-anak kita, maka bersama-sama kita harus membawa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan kita dan menjadikan pembelajaran menjadi semakin relevan dengan tantangan di abad ke-21 ini," ucap dia melansir laman Kemendikbud Ristek.

Transformasi Pendidikan Digital

Transformasi ini perlu di pertahankan bahkan di kembangkan inovasinya, agar peradaban semakin maju dan bisa memenuhi tuntutan zaman, kita sudah terlalu jauh melangkah maju sekalipun dengan dipaksa keadaan, tetapi pada akhirnya fenomena ini sangat bagus akselerasi perubahannya dan kemampuan manusia dalam beradaptasi untuk bisa bertahan hidup. Ada beberapa tradisi yang perlu dipertahankan sehingga bisa menjadi budaya dikalangan pendidik dan peserta didik dalam memenuhi tuntutan pendidikan abad ke-21 atau dalam era Revolusi Industri 4.0.

Menurut US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), mengidentifikasi tentang kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21 yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. *Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S)* mengklasifikasi keterampilan yang harus dikuasai dalam abad 21 yaitu *way of thinking, way of working, tools for working* dan *skills for living in the world* (Griffin et.al ,2012). *Way of thinking* terdiri atas bagaimana bisa berkeaktifitas, menemukan inovasi, cara berpikir kritis, mencari pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. *Way of working* terdiri dari bagaimana bekerja dalam sebuah tim, bagaimana juga bisa berkolaborasi. Berperan sebagai warga negara dunia maupun lokal serta tanggung jawab secara pribadi maupun secara sosial. Sedangkan *Skills for living in the world* merujuk keterampilan berdasarkan literasi informasi, kemampuan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan bekerja melalui *social digital*.

Dalam laporan Indonesian (*Digital Education and E-Learning Market Outlook to 2018- Rising Trend of Blended to Drive the Future Growth*, 2018) menyebutkan "Lembaga pendidikan terkenal terkemuka di Negara ini telah menjadi lebih reseptif terhadap penerapan unsur pembelajaran dengan teknologi tinggi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan di indonesia telah menyumbangkan berbagai manfaat bagi institusi pendidikan dan juga melatih perusahaan seperti pelatihan multimedia, tes online dan tutorial, video streaming langsung kemudian pengajaran dan beberapa fasilitas lainnya."

Manfaat digitalisasi pendidikan dirasakan oleh pendidik dan peserta didik dalam segala hal terutama yang menyangkut efektivitas, efisiensi dan kepraktisan dalam hidup. Diantara manfaat yang dirasakan dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Meningkatnya inovasi teknologi pembelajaran. Hadirnya *platform*, media dan aplikasi sangat membantu proses pembelajaran lebih bergairah dan variatif, proses belajar tidak lagi *teacher center* melainkan akan mencari sumber belajar dari berbagai media elektronik/digital. Peserta didik memiliki ruang lebih untuk terbiasa berpikir kritis dan berpikir secara komputasional untuk menghadapi tuntutan era baru revolusi industri.

Kedua, Memiliki daya saing global. Proses pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu; yang jauh bisa terasa dekat. Sinergi antar negara bisa terjadi tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar. Pola kerja sama, kolaborasi dan *sharing knowledge* akan terbangun dengan media teknologi yang mempertemukan berbagai pihak kepentingan, sehingga barangsiapa yang mampu menguasai teknologi maka merekalah yang akan menguasai dunia.

Ketiga, Pengembangan kurikulum yang dinamis. Kurikulum merupakan alat bantu dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dengan hadirnya teknologi maka akan sangat membantu untuk bisa melakukan penyesuaian strategi dan metode yang lebih modern, canggih dan lebih langsung mengena tepat sasaran. Peran

stakeholder Pendidikan tidak lagi bertumpu pada aktivitas tangan manusia melainkan akan tergantikan oleh teknologi beberapa pekerjaan yang jauh lebih efektif dan efisien.

Keempat, Peningkatan skill sumber daya manusia. Hadirnya teknologi dalam pendidikan membantu tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugasnya, awalnya belum terbiasa bahkan menjadi tantangan tersendiri harus mahir dalam menggunakan teknologi, didorong oleh tuntutan dan kebutuhan untuk bisa eksis menyelenggarakan Pendidikan, maka secara memaksa untuk bisa lebih cepat beradaptasi dan menguasai hal tersebut, mungkin dulu ketika ada media video pembelajaran hanya terima jadi dari pihak lain, sekarang melihat kebutuhan yang mendesak hampir semua guru bisa membuatnya secara mandiri. Di sisi lain tidak sedikit bermunculan aplikasi baru yang menyuguhkan layanan menarik untuk membantu para guru. Hal ini sekalipun terasa menyulitkan dan menjadi masalah di awal-awal tapi pada akhirnya menjadi potensi skill yang patut di perhitungkan.

Ambil berkahnya, karena disadari atau tidak kita sudah melewati bersama

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda dunia ini, tidak diinginkan oleh semua orang, bahkan tidak diperkirakan berkepanjangan sampai menghancurkan tatanan kehidupan bahkan jutaan nyawa melayang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019*. Krisis yang mega dahsyat sepanjang kehidupan manusia. Namun disamping efek negatifnya yang tidak bisa terhitung kita harus jujur bahwa ada sisi kebaikan (berkah) dalam kemajuan peradaban umat manusia, terutama adaptasi dan akselerasi dalam mempertahankan hidup dengan pemanfaatan teknologi digital dan pola hidup *new normal* yang dijalankan semua orang. tentu hal ini bukan menjadi obat penahan rasa sakit sesaat melainkan obat permanen sekaligus menjadi antibodi yang membuat manusia kebal.

Hadirnya solusi yang inovatif kadang terjadi akibat adanya masalah dan tantangan yang besar sehingga manusia dalam keadaan mendesak memaksa untuk berpikir *out of the box* dan menembus dimensi ketidakmungkinan. Peristiwa tahun 1945 dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu yang meluluhlantakkan negara Jepang sehingga menelan korban ratusan ribu, bukan berarti membuat jepang hancur lebur menjadi abu, melainkan mereka dijadikan motivasi untuk bisa bangkit bisa menata kehidupan lagi yang jauh lebih baik. Dan terbukti sekarang, jepang berdiri di tengah-tengah dunia menjadi negara yang maju dan menjadi negara rujukan dalam inovasi teknologi dan memiliki budaya hidup yang disiplin, pembelajar, memiliki etos kerja yang baik sehingga banyak negara menaruh rasa hormat, iri dan berharap bisa meniru untuk diimplementasikan di negaranya masing-masing.*

Referensi

- Diah Ihsan. (2022). *Nadiem Makarim: Pandemi Covid-19 Mengubah Sistem Pendidikan di Dunia*. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/17/085445471/nadiem-makarim-pandemi-covid-19-mengubah-sistem-pendidikan-di-dunia?page=all>
- Digital Education and E-Learning Market Outlook to 2018- Rising Trend Of Blended To drive The Future Growth*. (2018). <https://www.mifta.or.id/read/indonesia-digital-education-and-e-learning-market-outlook-to-2018-rising-trend-of-blended-learning-to-drive-the-future-growth-634.html>
- Gumelar, D. R., & Dinnur, S. S. (2020). Digitalisasi Pendidikan Hukum Dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 111–122. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9909>
- Hermansyah. (2021). Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah Berbasis Digitalisasi Di Era Covid 19. *Fitrah*, 12(1), 28–46.
- Zikrillah. (2019). *Digitalisasi Pendidikan Zaman Now*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zikrillah27846/5de5e6aad541df72760578a2/digitalisasi-pendidikan-zaman-now>

FERI RUSTANDI terlahir dari sebuah desa di pedalaman Garut Selatan, mengadu nasib untuk bisa mengenyam Pendidikan yang lebih tinggi di tengah asa keadaan yang tidak mendukung, namun ia berhasil memecah ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Dengan pengalaman menjadi aktivis mahasiswa, kuliah sambil mencari tambahan ekonomi untuk bertahan hidup. Sekarang bergelut dalam dunia pendidikan dari mulai menjadi guru sampai hijrah menjadi Dosen di STIQ As

Syifa, selain hobinya menulis artikel di media massa dan media online, juga belajar menulis buku dengan 3 karya yang sudah dirampungkan. Selain itu ilmu teorinya di praktikan dengan mendirikan lembaga konsultan Pendidikan bersama teman-temanya agar banyak sekolah bermunculan untuk bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia dapat dihubungi di email : ferirustandi@stiq.assyifa.ac.id

Pentingnya Pendidikan Tinggi dan Vokasi di ASEAN

Sixson Roberto Simangunsong

Pendahuluan

Masyarakat di Indonesia sangat beragam dalam latar pendidikan dan keahlian karena dipicu oleh keberagaman suku dan budaya, cara pikir yang beragam dan cara pandang yang beragam membuat pendekatan ilmu pendidikan berbeda-beda, ada yang menerapkan secara terapan, ada yang secara pendidikan formal, dalam kondisi sosial yang beragam budaya, pendidikan sangatlah penting sebagai modal utama sumber daya manusia. Karena keberagaman tersebut sangatlah penting untuk menyandang pendidikan untuk menyatukan pemikiran yang beragam dalam satu kemufakatan yang berdasarkan dalil pemikiran yang benar untuk kebaikan orang banyak.

Di Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak, membuat pemerintah terus berpikir untuk menumbuhkan pendidikan, pada saat ini juga menteri pendidikan telah banyak menerapkan pendidikan vokasi untuk mengasah skill dan mengembangkan skill para pemuda yang produktif usia muda, hal ini dimaksudkan untuk pengembangan bakat, skill, dan keahlian dalam bidangnya tanpa harus melalui pendidikan tinggi yang lama seperti sekolah menengah kejuruan dan sekolah tinggi vokasi. Penduduk yang plural butuh dalam penerapan ilmu secara langsung dan bekerja langsung menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, hanya beberapa suku dan budaya yang betah menajaki pendidikan tinggi dikarenakan posisi kultur dan budayanya sesuai dengan kondisi pendidikan tersebut.

ASEAN memiliki budaya yang beragam, bahkan pemerintahan yang beragam, sama halnya seperti Indonesia, di Negara Malaysia telah menerapkan pendidikan vokasi untuk mengembangkan skill pemuda dalam bekerja langsung, dikarenakan budaya di negara tersebut suka bekerja dan menerapkan ilmunya dalam pekerjaan secara langsung dan tidak mau berlama-lama di dunia pendidikan, Jepang termasuk negara yang suka bekerja dan tidak mau berlama-lama dalam pendidikan, sehingga menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa luar negeri untuk mengisi kekosongan kursi perkuliahan pascasarjana yang ada di Jepang, kondisi ini juga didapati di Taiwan, dimana negara tersebut mengalami kekurangan mahasiswa untuk menenpuh pendidikan magister (S2) dan doktoral (S3).

Taiwan menganut wajib belajar 9 tahun sampai dengan tahun 2013 yang terdiri atas primary school (SD) selama 6 tahun dan junior secondary school (SMP) selama 3 tahun. Jenjang setelah junior secondary school terdapat 3 pilihan program yakni senior secondary school (SMA), vocational secondary school (SMK) yang keduanya berlangsung selama 3 tahun atau junior college yang berlangsung selama 5 tahun. Pada program junior college 5 tahun, siswa yang telah menyelesaikan program tersebut dapat langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan magister setelah minimal memiliki 3 tahun pengalaman kerja (Prayoga, 2016). Taiwan memiliki banyak universitas, baik universitas negeri ataupun swasta. Meskipun demikian biaya pendidikan di universitas negeri tidak semahal di universitas swasta karena universitas negeri masih mendapatkan bantuan keuangan dari negara (Prayoga, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan tinggi. Seperti pada pertukaran mahasiswa dan beasiswa internasional, hal ini ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Tidak mengherankan jika terdapat banyak mahasiswa baru, termasuk dari Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Alasan calon mahasiswa dari Indonesia untuk mencari universitas di luar negeri adalah untuk memiliki pengalaman pendidikan yang lebih baik daripada mencari pengalaman studi di dalam negeri. Salah satu negara yang memiliki universitas terbaik yang diminati oleh mahasiswa baru dari Indonesia adalah Taiwan. Data tahun 2018 yang dilansir oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) menunjukkan sekitar 7.000 mahasiswa yang terdaftar di universitas Taiwan (Rahman et al., 2020).

Persaingan tenaga kerja terampil antar negara anggota ASEAN tersebut tentunya akan membutuhkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. Kualitas tenaga kerja tersebut harus didukung dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan di masing-masing negara. Dengan kualitas yang baik, maka sumber daya manusia negara tersebut siap

bersaing dalam pasar tenaga kerja ASEAN. Begitu pula sebaliknya jika kualitas pendidikan rendah maka sumber daya manusia yang dihasilkan akan sulit bersaing dalam pasar tenaga kerja. Melihat pada kondisi tersebut, maka perguruan tinggi memiliki peranan yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang bersaing. Perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar.

Selain itu, perguruan tinggi yang berkualitas juga akan dapat mencetak pemimpin dan pemikir suatu bangsa yang menentukan pembangunan negaranya di masa depan. (Nulhaqim et al., 2016). Sehingga penting nya perna pendidikan tinggi dan vokasi di indonesia dan di ASEAN dapat mengembangkan kemampuan generasi baru untuk bersaing dalam dunia kerja, menurut (Simangunsong, Dian, et al., 2021) Melalui pendidikan, para pemuda dididik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, terdidik, dan terampil yang mampu menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan bersaing di masyarakat.

Menurut Michael Porter (1980), suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika Negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya (Wiranta, 2015) the ASEAN will become a single market and production base which occurs the flow of goods, services, investment and skilled labor are free as well as capital flows more freely. The flow of commodities and factors of production are expected to bring ASEAN into a prosperous and competitive region with equitable economic development, and reduced levels of poverty and socio-economic differences in the ASEAN region. Therefore, we need a new paradigm of economic policy based on the ability to recognize the potential of the local economy, the character of the economic, social and physical every area, including its interaction with other areas. Synergy ability of the local economy is expected to strengthen the competitiveness of the national economy, which according to the agreement in 2015 will face the challenge of unification of the ASEAN economic market. For Indonesia, the regional economic integration opportunities should be utilized to the maximum extent possible. Total population, area and geographical location, and the largest GDP in ASEAN should be an asset so that Indonesia could become a major player in the AEC. 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada kenyataannya juga memberi dampak pada meningkatnya ketidakmerataan Jurnal Lingkar Widya Iswara (www.juliwi.com). Masyarakat ASEAN adalah masyarakat yang dinamis dan plural, Dimulai dari desa hingga kota, dan sampai pada Negara. Penerapan pendidikan selalu berbeda beda, dan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Simangunsong, Tanjung, et al., 2021).

Di masa yang akan datang ASEAN akan menghadapi persaingan global dengan persaingan skill, kemampuan, keahlian dari berbagai negara ASEAN, dibutuhkan peranan pendidikan tinggi dan vokasi yang kuat dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, pendidikan tinggi akan membekali para tenaga kerja baru dalam ilmu manajerial dan keahlian, dan pendidikan Vokasi akan membekali para tenaga kerja baru untuk bekerja langsung sebagai staff ahli dalam bidangnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan keahlian tertentu.

ASEAN akan menjadi negara-negara yang mampu mengendalikan tenaga kerja robot yang akan diproduksi untuk membantu pekerjaan manusia, seperti halnya produksi Nikel dan Mobil Listrik yang akan dibantu oleh *robotic* yang mampu merakit dan merangkai menjadi produk utuh, dalam dunia pendidikan teknologi telah mulai menemukan titik awal perkembangannya, dimana pendidikan juga sudah dapat dilakukan secara online sejak masa pandemi.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda berbagai negara di dunia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pemerintahan, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi seperti penerapan pembelajaran secara online (Simangunsong & Siahaan, 2022). Membutuhkan calon tenaga kerja guru yang kompeten dibidangnya dan mumpuni menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar, sehingga ASEAN akan menjadi negara-negara yang maju jika Sumber daya Manusia tersebut terpenuhi dan mampu bersaing di persaingan global.*

Referensi

- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13209>
- Prayoga, S. (2016). Pendidikan Taiwan dan Tantangannya Dimasa Kini Dan Nanti. *Prosiding SNIPS*, 695–704.
- Rahman, F. F., Hamka, & Lin, K. (2020). The Psychological Well-Being of Newly-Arrived Indonesian Students in Taiwan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Baru Indonesia di Taiwan. *Journal of International Students*, 1(S3), 44–57.
- Simangunsong, S. R., Dian, S., Siahaan, N., & Pramana, D. (2021). The Effect of Online Explaining Skills on Teacher Competence. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 524(Icce 2020), 267–270.
- Simangunsong, S. R., & Siahaan, S. D. N. (2022). Efektivitas Pembelajaran Daring Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Online Pada Mata Kuliah Kewirausahaan. *Niagawan*, 11(2), 114. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.32773>
- Simangunsong, S. R., Tanjung, A. A., Dian, S., & Siahaan, N. (2021). Analisis Dampak Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal Of Business and Economics Research (JBE)*, 2(1), 8–12.
- Wiranta, D. N. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Lingkar Widyaiswara*, 24(3), 33–50.

SIXSON ROBERTO SIMANGUNSONG lahir 14 Oktober 1995 di kota bertuah Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendidikan sarjananya diselesaikan pada 2018, dan magister tahun 2022 di Universitas Negeri Medan, Pegiat Musik Keyboard dan aktif menulis Jurnal akademik pendidikan dan ilmu murni Ekonomi, serta artikel ilmiah. dapat dihubungi di email: msixson@gmail.com.

Peran ASEAN dalam Memajukan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional

Heru Dwi Herbowo

Iklim Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pendidikan tinggi merupakan pilar dalam membangun peradaban dunia yang semakin maju, guna memproduksi sarjana-sarjana yang mampu bersaing serta berdaya guna di kancah nasional maupun internasional. Tidak hanya kecerdasan intelektual atau kognitif yang mampu membawa mereka dalam persaingan di kancah global keterampilan berupa *soft skill* merupakan salah indikator dalam memenangkan persaingan di dunia kerja yang kian tahun semakin berkembang. Kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk terus mengupgrade kemampuan serta literasi digital agar tak tertinggal oleh arus globalisasi yang tak terbendung pergerakannya. Kualifikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja pun semakin tinggi dikarenakan perubahan dan pergeseran permintaan pasar (demand).

Jika melihat sistem pendidikan yang diterapkan di beberapa negara ASEAN mayoritas masih dalam tataran negara berkembang. Guna mencapai *world class university* maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya melalui program kerja yang mencakup keseluruhan aspek dan kriteria pendidikan tinggi yang bermutu mulai dari SDM, sarana prasarana, kekuatan kerja sama, pelayanan mahasiswa, dan tentu saja tridharma perguruan tinggi. Keseluruhan aspek tersebut harus mampu memberikan manfaat bukan hanya bagi seluruh sivitas akademika, namun bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia ke depannya.

Pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya telah mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika ditelaah lebih mendalam masih banyak perguruan tinggi yang hanya sekedar membuka program studi hanya untuk memenuhi kebutuhan para pemilik modal atau penguasa di dalam menjalankan komersialisasi bisnis Pendidikan. Karena mayoritas lulusan dari mereka tidak terserap di dunia kerja, bukan karena tidak mampu bersaing. Tapi lowongan kerja yang ada di pangsa pasar lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan yang dihasilkan dari perguruan tinggi.

Pola Pendidikan di Indonesia yang semakin membuat sistem pendidikan mahal atau liberalisasi jasa Pendidikan. Karena Indonesia banyak pulau yang tersebar di belahan bumi nusantara dan banyak juga persebaran kampus yang memang jika dilihat dari segi kualitas pelayanan Pendidikan, kulaitas dan kuantitas tenaga pengajar (dosen), serta fasilitas pendukung perkuliahan yang belum memadai maka banyak kampus yang tidak memenuhi standar.

Adanya akreditasi juga mengakibatkan atmosfer persaingan di dunia akademik semakin memanas karena ada beberapa indikator yang dijadikan acuan untuk memperoleh akreditasi A maupun unggul seperti publikasi hasil riset, jumlah sitasi, dll. Hal inilah yang membuat setiap universitas harus memiliki dana yang banyak guna mendukung terselenggaranya sistem Pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara akreditasi baik universitas maupun prodi. Oleh karena itu universitas dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan perkuliahan harus mengumpulkan dana untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana kampus begitu juga pembangunan sumber daya manusia yang tidak kalah penting untuk dilakukan.

Dampak dari hal tersebut adalah biaya perkuliahan yang semakin mahal dan dibebankan kepada para mahasiswa baru. Jika mahasiswa semakin banyak otomatis dana yang terkumpul juga akan semakin banyak dan semakin memudahkan pihak kampus untuk melakukan pembenahan dan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Oleh karena itu untuk menaikkan reputasi dan membuat daya tarik bagi mahasiswa baru, pihak kampus harus mempunyai inovasi dan produktivitas yang dapat diandalkan.

Peringkat kampus baik baik ditingkat nasional maupun internasional menjadi sangat berarti karena melalui predikat unggul atau A mereka sudah mendapatkan reputasi yang baik di kalangan calon mahasiswa yang akan

mendaftar dan mencari perguruan tinggi. Selain itu ada juga peringkat dalam skala internasional yaitu world class university, peringkat ini bisa kita lihat QS World University dimana ada banyak universitas top diseluruh dunia yang bersaing dalam memenangkan peringkat 100 besar kampus terbaik dunia.

Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi di ASEAN

Di antara faktor yang mendorong terjadinya globalisasi adalah (Scott, 1988) pertama, hakikat manusia sebagai homo sosial; kedua kebutuhan ekonomi, dan ketiga tersedianya sarana komunikasi dan transportasi modern. Ketiga faktor tersebut berkaitan erat satu sama lain dan mendorong terbentuknya berbagai wadah kerja sama regional dan global, terutama dalam bidang ekonomi, seperti ASEAN (Association of South-East Asian Nations), AFTA (Asian Free Trade Area), dan WTO (World Trades Organization).

Globalisasi menyebabkan persaingan dalam bidang ekonomi semakin keras dan ketat, tetapi selalu berada dalam ruang lingkup kerja sama. Bangsa yang mampu membenahi dirinya dengan meningkatkan SDM-nya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam kompetisi sehat tersebut. Di sinilah lembaga tinggi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi swasta diharuskan menampilkan dirinya, apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi (*qualified*) atau justru mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Dengan demikian, era globalisasi dewasa ini adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Dalam dunia pendidikan tinggi termasuk di Indonesia, adalah menganut faham universalisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masyarakat pendidikan Indonesia, adalah bagian dari masyarakat global. Proses globalisasi seperti ini, telah berlangsung sejak lama dalam dunia pendidikan. Namun dalam perkembangan yang terjadi sejak 1970an, globalisasi berkembang menjadi "*the process through which sovereign national states are criss-crossed and undermined by transnational actors- governments or MNCs-with varying prospects of power, orientations, identities, and networks*" (Jarvis, 2001).

Globalisasi dalam dunia pendidikan, adalah sebuah proses sejarah yang panjang. Terjadinya era globalisasi dalam dunia pendidikan, memberi dampak ganda yaitu dampak yang positif (menguntungkan) dan dampak yang negatif (merugikan). Dampak yang menguntungkan, adalah memberi kesempatan kerja sama yang seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Namun di sisi lain, jika Indonesia tidak mampu bersaing di bidang pendidikan dengan negara lain, karena kualitas SDM yang lemah misalnya, maka konsekuensinya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, tantangan Indonesia di bidang pendidikan pada masa yang akan datang ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita.

Tantangan perguruan tinggi di era global adalah ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh dengan persaingan. Cepat atau lambat, perguruan tinggi di Indonesia yang akan datang, harus menghadapi peningkatan kualitas perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan yang harus menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lainnya baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai peran yang amat besar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma pendidikan tinggi yang pertama, perguruan tinggi harus mampu memberdayakan proses pendidikan yang sedemikian rupa agar seluruh mahasiswanya berkembang menjadi lulusan sebagai SDM berkualitas yang memiliki kompetensi paripurna secara intelektual, profesional, sosial, moral dan personal. Dharma kedua yaitu penelitian, perguruan tinggi harus mampu mewujudkan sebagai satu institusi ilmiah akademik yang dapat menghasilkan berbagai temuan inovatif melalui berbagai kegiatan ilmiah berupa penelitian. Melalui penelitian tersebut, perguruan tinggi dapat mengembangkan dirinya serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan bidang keilmuan dan aplikasi dalam berbagai upaya pembaharuan. Selanjutnya melalui dharma ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat luas. Hal ini mengandung makna

bahwa keberadaan perguruan tinggi di Indonesia harus dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Dalam memasuki era baru di abad ke-21 ini, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terwujud sedemikian rupa dengan karakteristik antara lain, pertama, terkait dengan kebutuhan mahasiswa, prioritas nasional dan Kadarisman, Tantangan Perguruan Tinggi dalam Persaingan Global 7 pembangunan ekonomi; kedua, terstruktur secara efektif sehingga memberi peluang kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan potensi pribadi sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; ketiga, didukung dengan pendanaan yang memadai sehingga memungkinkan untuk berinovasi dan mencapai keunggulan; keempat, melakukan penelitian yang dapat menunjang pembangunan nasional; kelima, memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi; keenam, berperan sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani.

Dengan demikian, perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan menyeluruh. Sistem ini harus memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat, menunjukkan efisiensi dalam operasionalnya, menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki manajemen internal yang transparan dan memenuhi standar. Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia saat ini menghadapi masalah dan tantangan eksternal yang berkaitan erat dengan globalisasi, pembangunan ekonomi, desentralisasi, situasi politik, perkembangan sosial budaya dan teknologi.

Solusi yang diberikan terhadap tantangan pendidikan tinggi dalam menghadapi era disrupsi di ASEAN. *Pertama*, Transnasional Pendidikan Tinggi. Bagaimana strategi mengembangkan transnasional pendidikan tinggi. Ini berkenaan dengan arus deras arahan negara-negara maju atas negara-negara berkembang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan sebagaimana dialami pendidikan tinggi di Vietnam, Filipina, India, Pakistan, dan bahkan pendidikan tinggi di wilayah Arab. Pendidikan tinggi di negara Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam transformasi menuju transnasional untuk bermitra, bekerjasama dan berkolaborasi di tingkat global dengan tetap untuk memegang keaslian dan keunggulan khas Indonesia.

Kedua, Kebijakan Otonomi. Pengelolaan Pendidikan tinggi diserukan untuk menjalankan kebijakan otonomi pengelolaan secara desentralistik. Ini memungkinkan untuk keleluasaan dalam kemandirian kualitas pendidikan tinggi yang inklusif dan adil dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diharapkan komunitas global. Namun, hal ini penuh dengan tantangan finansial dan mekanisme akuntabilitas. Juga aspek-aspek lain yang termasuk rintangan desentralisasi pendidikan tinggi.

Ketiga, Pendekatan Pengajaran Baru. Pendekatan baru menjadi niscaya dalam pengajaran di pendidikan tinggi menurut tuntutan era global. Hal ini terutama bermakna untuk peningkatan *skill* lulusan untuk kesiapan memasuki dunia kerja. Selain pengajaran, kebutuhan baru akan mencakup pula kurikulum dan materi pembelajaran. Ini akan menyisihkan materi-materi lama yang tidak relevan dan telah usang dan terpaksa harus meninggalkan cara-cara tradisional dalam pengajaran. Ini sangat bermanfaat untuk pengembangan kapasitas lulusan tanpa batas dengan berbagai pengajaran efektif baru dalam merebut pasar atau peluang kerja. Namun, harus ada yang dipertimbangkan terkait dengan nilai-nilai inti dalam hubungan antara pengajar dan siswa dalam era dimana siswa mesti diposisikan sebagai pusat.

Keempat, Sistem Manajemen Data Media Sosial. Media sosial akan menjadi pusat informasi utama bagi masyarakat komunitas global. Millenium diakui sangat adaptif terhadap terobosan baru kecerdasan artifisial yang dikembangkan teknologi informasi. Data akan sangat melimpah di media sosial berbau antara yang otentik dan berita bohong. Platform manajemen data yang dikembangkan pendidikan tinggi cenderung tidak diminati oleh akademisi karena lebih memilih fasilitas media yang dikembangkan pihak ketiga yang biasanya lebih canggih dan efektif. Ini menuntut pendidikan tinggi untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi eksternal dan media sosial dalam pengelolaan data. Di pihak lain, pendidikan tinggi menghadapi tantangan untuk mengembangkan sistem manajemen informasi internal untuk standar, barometer, fisibilitas, grafik, pemetaan, pengelolaan pengetahuan sistematis, penetapan kebijakan, dan penguatan performa institusi.*

Referensi

Jarvis, Peter (2001). *Universities and Corporate Universities: The Higher Learning Industries in Globalization*. London: Kogan Page Industries.

Scott, P. (Ed.) (1988). *The Globalization of Higher Education*. Buckingham: Open University Press.

HERU DWI HERBOWO lahir pada 3 Desember 1992 di Kebumen. Pernah bekerja di Save The Children, Asisten Peneliti Lapangan *Australian Nasional University* (ANU) dan PSKK UGM, dan Supervisor Praktek Pekerjaan Sosial Prodi Ilmu IKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia pernah mengikuti pelatihan desain grafis BLK Kebumen, POA BLK Surabaya, Manajemen Kasus IPSPI DIY, Advokasi Sosial KPSI, *Policy Recommendation University of California* dan Staf Khusus Presiden. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi maupun komunitas seperti Kelas Inspirasi Kebumen, Kebumen Mengajar, Kebumen Campus Fair, Kebumen Social Care, Ketimbang Ngemis Kebumen, ESQ 165, Forkomkasi DIY, dan Kophi Yogyakarta. Dosen tetap Prodi Kesejahteraan Sosial di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

BAB 13

Peran Bahasa dalam Integrasi ASEAN

Bahasa Melayu Mempersatukan ASEAN

Efitri Yeni

“Tak hilang Melayu di Bumi,” ungkapan ini merupakan keyakinan masyarakat melayu Riau akan bahasa, tradisi dan budayanya. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa alamiah (bahasa linguistik) di antara 5.000-an bahasa alamiah yang terdapat di dunia ini (Abdul Malik, 2013:26). Bahasa Melayu modern yang dikenal setakat ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu purba. Dengan demikian, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dari sebuah tamadun yang sudah sangat tua di dunia. Orang Melayu telah sejak lama dikenal memiliki keunggulan teknologi perairan (Collins, 2011:4). Dengan kemajuan teknologi itu, mereka dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di Nusantara ini.

Karena perpindahan itu pulalah, bahasa Melayu dapat tersebar relatif cepat ke seluruh nusantara sampai ke Madagaskar. Dalam perkembangan selanjutnya, karena orang Melayu sangat berminat dalam bidang pelayaran dan perdagangan, bahasa Melayu pun telah berkembang setaraf dengan bahasa-bahasa maju di Eropa pada abad ke-18. Kemajuan bahasa Melayu itu telah dicatat oleh Francois Valentyn, pendeta sekaligus pakar sejarah berkebangsaan Belanda.

Bahasa Melayu merupakan bahasa cikal bakal Bahasa Indonesia sekarang ini berdasarkan Usulan Ki Hajar Dewantara pada 28 Agustus 1916 dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag Belanda. Pada 2 Mei 1926 maka di Kongres 1 Pemuda Indonesia disahkanlah Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Persatuan Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu. Pada abad ke-12 sampai abad ke-13 berdirilah Kerajaan Melayu di Selat Malaka.

Bahasa Melayu merupakan bahasa yang menjadi akar dari bahasa Indonesia. Meskipun demikian, dalam perjalanan dan perkembangannya, bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia itu telah mengalami perubahan dibandingkan dengan Bahasa Melayu yang menjadi akarnya. Prijana dalam pidatonya pada Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan tahun 1954 di Medan berkata: “Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia tidak sama lagi dengan bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia bukan sama, tetapi bukan pula berlainan juga dengan bahasa Melayu” (Tarigan 2011: 84).

Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo menyatakan bahwa, “Jang dinamakan “Bahasa Indonesia jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari “Melajoe Riau akan tetapi jang soedah di tambah, dioebah atau dikoerangi menoeroet kepeloean zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat diseleroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang bealam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia” (Kridalaksana, 2009: 1).

Meskipun bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional yang pemakaiannya mencakup seluruh masyarakat di Indonesia, namun bahasa daerah tetap digunakan sebagai sarana komunikasi sehari-hari di daerah yang bersangkutan. Menurut Alwi (dalam Sugono dan Abdul Rozak, 2001:400), ada beberapa fungsi dari bahasa daerah, yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah; lambang identitas daerah; alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat 2 daerah; sarana pendukung kebudayaan daerah; dan sebagai pendukung bahasa dan sastra daerah. Ditinjau dari segi hubungan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa tersebut dituturkan di kawasan Sumatra bagian utara. Bahasa Melayu telah dijadikan *lingua franca* di kepulauan Indonesia selama setengah milenium terakhir. Prasasti Kedukan Bukit adalah literatur tertua berbahasa Melayu yang diketahui saat ini. Berarti bahasa tersebut telah digunakan oleh kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu tersebar ke seluruh pelosok nusantara oleh para pedagang yang kebanyakan berasal dari Sriwijaya. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan (*lingua franca*), bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan.

Selanjutnya pada zaman kerajaan Malaka, bahasa Melayu bukan saja menjadi bahasa pemerintah, namun menjadi bahasa perdagangan di pelabuhan-pelabuhan lain dalam jalur perdagangan rempah dari Aceh hingga kepulauan Maluku. Bahasa Melayu juga digunakan untuk transaksi perdagangan di pantai utara Australia dan ke barat hingga ke Gujarat, India. Di samping itu, bahasa Melayu digunakan dalam misi dakwah Islam di pelabuhan Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, hingga Maluku.

Bahasa Melayu menjadi bahasa politik karena politik yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan kekuasaan, juga dapat diraih dengan jalan komunikasi dan diplomasi. Hal ini didukung oleh pendapat Anderson (2000:292) yang menyatakan bahwa:

Wahana yang dapat digunakan memahami kekuasaan Belanda adalah dengan bahasa Belanda, sedangkan wahana untuk menyerang atau melawan Belanda adalah dengan bahasa Indonesia (bahasa Melayu revolusioner).

Pendapat ini membuktikan bahwa bahasa Melayu era pergerakan nasional telah menjadi bahasa politik dan diplomasi tokoh bangsa dalam menggalang persatuan melawan kolonialisme Belanda. Mengutip sebuah berita, Malaysia akan berdiskusi dengan para pemimpin regional untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal tersebut diungkap oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob saat menjawab pertanyaan di Majelis Tinggi Malaysia tentang upaya mengangkat bahasa nasional negeri itu ke kancah internasional. Ismail Sabri mengatakan selain di Malaysia, bahasa Melayu sudah digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan sebagian Kamboja.

Selama kunjungannya ke Kamboja, dia diberitahu ada 800.000 Melayu-Cham yang menggunakan bahasa itu. Ada sekitar 160.000 penutur Melayu di Vietnam. Populasi kecil masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu juga terdapat di Laos. "Makanya di seluruh ASEAN ada orang yang bisa berbahasa Melayu. Oleh karena itu tidak ada alasan mengapa kami tidak dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN," kata Ismail Sabri, dikutip dari *CNA*, Rabu (23/3/2022).

Pihaknya akan membahas masalah ini dengan rekan-rekan ASEAN-nya. Dia akan berdiskusi dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya, terutama di negara-negara yang sudah menggunakan bahasa Melayu. "Saya akan berdiskusi dengan mereka tentang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN," untkannya lagi. Saat ini, ada empat dari 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggris dalam acara resmi di tingkat internasional. Sedangkan enam negara lain menggunakan bahasa ibu untuk urusan resmi

Ini tercermin dengan Lagu Kebangsaan "Majulah Singapura" dalam bahasa Melayu. Begitu juga aba-aba dalam ketenteraan, seperti bersiap, maju jalan dan lain-lain. Sekarang dinyatakan sebagai 4 bahasa resmi di Singapura. Pada akhir 1960-an atau awal 1970-an, hampir setiap orang bisa berbahasa Melayu. Golongan *English-educated Chinese* bisa berbahasa Melayu dengan baik. Ini adalah generasinya Lee Kuan Yew. Malah sebagian dari mereka tidak bisa berbahasa China (dialek lokal), apalagi Mandarin.

Rata-rata warga turunan India bisa berbahasa Melayu. Saat itu disekolah selain bahasa Inggris, murid-murid disuruh pilih bahasa kedua, Melayu, Tamil dan Mandarin. Anak Melayu pasti pilih Melayu, anak India sebagian besar pilih Tamil, sedang anak China terpecah. Cukup banyak dari mereka yang memilih bahasa Melayu karena alasan pragmatis, mudah dipelajari dan mereka dikelilingi oleh bangsa yang berbahasa Melayu.

Wahai seluruh pemuda Melayu nan bertuah

Mari kita songsong masa depan yang cerah

Mari bersama kita berbenah

Jangan biarkan Melayu punah

Oleh prilaku yang banyak ulah

Kalau tidak salah pada pertengahan 1970-an pemerintah Singapura mengeluarkan peraturan supaya semua anak didik harus menjadikan bahasa ibunya jadi bahasa utamanya, dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Konon alasannya untuk menjaga anak-anak ini tidak terputus dengan leluhur mereka.

Tentu ini tidak berdampak apa-apa dengan orang Melayu dan India, tetapi suatu perubahan yang mengagetkan buat orang China. Karena bahasa yang diajarkan adalah bahasa Mandarin, sedang bahasa China yang sehari dipakai adalah berbagai dialek seperti Hokkian. Semoga dengan Bahasa Melayu bisa mempersatukan dan mempererat kerja sama dan hubungan budaya sesama Negara ASEAN. *

Referensi

- Abdul Malik (Ed.). 2013. Bahasa Melayu Kepulauan Riau: Tumpah Darah Bahasa Indonesia. Depok: Komodo Books.
- Anderson, Benedict. R. O'C. 2000. Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Artikel Menelusuri Sejarah Bahasa Indonesia (Tulisan 1 dari II) Senin 28 Oktober 2019 <https://www.antaranews.com/berita/1135376/menelusuri-sejarah-bahasa-indonesia-tulisan-i-dari-ii> (diunduh pada tanggal 01 Desember 2022)
- Collins, James T. 2011. Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah Singkat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fkip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/SEJARAH-BAHASA-MELAYU-SEBAGAI-BAHASA (diunduh pada 02 Desember 2022)
- https://www.kompasiana.com/isk_harun/5500e7b68133119c19fa7f54/bahasa-melayu-di-singapura.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/04/01/menengok-pamor-bahasa-melayu-yang-diusulkan-menjadi-bahasa-resmi-asean>
- JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF KEPENDIDIKAN Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Maman S. Mahayana 1 INSANIA|Vol. 14|No. 3|Sep-Des 2009|395-424 Perkembangan Bahasa Indonesia—Melayu di Indonesia dalam Konteks Sistem Pendidikan Maman S. Mahayana *).<https://hedisarawan.blogspot.com/2014/06/bahasa-indonesia-artikel-lengkap.html> (diunduh 01 Desember 2022).
- Jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/22849/18118(diunduh 02 des 2022) NEWS - Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia 23 March 2022 20:33 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323192315-4-325452/wow-malaysia-bakal-jadikan-bahasa-melayu-bahasa-asean> (diunduh pada tanggal 01 Desember 2022)
- Kedudukan Bahasa Melayu Dalam Story Tetralogi Buru Karya Pramoedya Ananta Toer (Hakim Surya Putra Artikel Penelitian Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak 2017(diunduh 02 des 2022).
- EFITRI YENI lahir di sebuah Desa Pagaran tapah tanggal 26 Agustus 1978. Pada saat diterbitkan buku ini Penulis aktif sebagai Guru di SMP Negeri 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Riau. Indonesia Saat ini penulis tinggal di Koto Tandun RT 005 RW 003 Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Email: efitriy@gmail.com.

Mempelajari Bahasa Asing sebagai Bekal Interaksi Global

Irianis Rasyidin

Di era globalisasi ini kemampuan berkomunikasi dengan berbagai budaya melalui bahasa asing telah menjadi suatu kebutuhan. Berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang dari latar belakang budaya yang berbeda dapat memperluas pemahaman, membuka pintu peluang bisnis, dan memperdalam persahabatan lintas batas. Mempelajari bahasa asing bukan hanya suatu keterampilan tambahan, tetapi juga merupakan bekal interaksi global yang sangat berharga.

Hal-hal penting yang dapat dilakukan untuk mempelajari bahasa asing adalah sebagai berikut.

1. Bakat sebagai motivasi utama. Bakat atau minat yang kuat dalam mempelajari bahasa asing adalah motivasi pertama yang akan mendorong seseorang untuk belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Interaksi dengan penutur asli. Interaksi langsung dengan penutur asli bahasa tersebut membantu dalam memahami pengucapan yang benar, intonasi, dan nuansa dalam berbahasa. Hal ini memberikan pengalaman langsung yang sangat berharga dalam memperkaya kemampuan berbahasa.
3. Melupakan Bahasa Ibu untuk sementara waktu. Sementara belajar bahasa asing, penting untuk melupakan bahasa ibu sementara waktu. Ini membantu menghindari terbelenggunya pemahaman oleh kaidah-kaidah bahasa ibu, sehingga seseorang dapat lebih cepat memahami struktur dan nuansa bahasa asing yang dipelajari.
4. Kepekaan berbahasa. Kepekaan berbahasa melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami bahasa dengan baik. Dengan kepekaan ini, seseorang dapat menilai apakah suatu kalimat atau ungkapan dalam bahasa asing digunakan dengan benar atau salah.
5. Imersi dalam lingkungan berbahasa asing. Tinggal dalam lingkungan yang menggunakan bahasa yang ingin dipelajari sangat membantu. Dalam situasi ini, pembelajar terus menerus terpapar dengan bahasa tersebut, mempercepat proses belajar dan pemahaman.
6. Kosakata yang kaya. Mengumpulkan kosakata sebanyak mungkin adalah kunci. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin luas kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa asing tersebut.
7. Keberanian. Mempelajari bahasa asing memerlukan keberanian. Keberanian untuk mencoba berbicara meskipun masih banyak kesalahan, keberanian untuk bertanya saat tidak mengerti, dan keberanian untuk terus belajar meskipun menghadapi kesulitan.

Mempelajari bahasa asing adalah investasi berharga untuk masa depan global. Dengan motivasi yang kuat, interaksi langsung dengan penutur asli, kepekaan berbahasa, dan lingkungan yang mendukung, seseorang dapat memperoleh keterampilan berbahasa asing yang memadai. Keberanian untuk terus belajar dan berlatih adalah kunci utama dalam meraih keberhasilan dalam mempelajari bahasa asing.

Dengan menguasai bahasa asing, seseorang dapat membuka pintu menuju pemahaman lintas budaya, meningkatkan peluang karier, dan memperluas jaringan hubungan internasional. Oleh karena itu, mempelajari bahasa asing bukan hanya sekadar kegiatan belajar, tetapi juga merupakan suatu perjalanan pengembangan diri yang mengantarkan individu menuju interaksi global yang lebih luas dan mendalam.*

IRIANIS RASYIDIN adalah guru bahasa Arab asal Sumatra Barat. Sebelum mengajar di Ma'had Aisyah Binti Abu Bakar Bogor, ia mengajar di LIPIA Jakarta. Ia pernah belajar di Padang dan Kuwait. Saat ini menetap di Condet, Jakarta.

Bebas Aktif Pendidikan Bahasa Antar Negara ASEAN yang Bermartabat

Tutus Indah Aryuni

Pendahuluan

Sejak berdirinya ASEAN (1976), Indonesia pernah mendapat kehormatan sebagai Ketua ASEAN beberapa kali, yaitu pada 1976, 1996, 2003, dan 2011. Sedangkan tahun 2023 mendatang Indonesia kembali didapuk menjadi Ketua ASEAN. Hal ini ditandai saat Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen secara simbolis di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu (13/11/22). "ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat dan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi," ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari laman *Setkab*.

Sejalan dengan salah satu pepatah Jawa yang berbunyi "*Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana*" Kalimat tersebut memiliki makna bahwa seseorang akan dihargai dan dihormati berdasarkan tutur katanya atau ucapannya dan cara berpakaianya. Dengan ditunjuknya Presiden Indonesia sebagai Ketua ASEAN, maka warga negara di kawasan tersebut diharapkan juga memiliki kemampuan bertutur kata dan berperilaku yang baik. Sehingga menjadi kawasan yang bermartabat dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Bagaimana sebuah bangsa menjadi bangsa yang bermartabat bisa dilihat dari bagaimana cara berbahasa dan berperilaku warganya. Tidak hanya bagaimana bertutur dan bersikap terhadap sesama warga negara namun juga pada warga negara asing terutama di kawasan ASEAN. Tentunya kemampuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal serta berinteraksi secara langsung di kawasan yang mendukung.

Urgensi Bahasa Asing

Pentingnya bisa berbahasa asing terutama di kawasan ASEAN? Sepenggal ayat Al-Qur'an menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujarat:13)

Dilansir dari laman 123dok.com, pendidikan multikultural dalam kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar (Studi Komparatif Surah Al-Hujurat ayat 13), Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjabarkan:

Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka saling mengenal dari mana asal usul, dari mana pangkal nenek moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala. Kesimpulannya ialah bahwasanya manusia pada hakikatnya adalah dari asal keturunan yang satu. Meskipun telah jauh berpisah, namun di asal-usul adalah satu. Tidaklah ada perbedaan di antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah ada perlunya membangkit-bangkit perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan keturunan. "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ujung ayat ini memberi penjelasan bagi manusia bahwasanya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah tidak lain adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, dan ketaatan kepada Ilahi.

Sehingga dapat diambil benang merah bahwa warga negara yang terlahir berbeda-beda dan bersuku-suku diciptakan agar bisa mengenali satu sama lain. Melalui komunikasi bahasa asing yang terjalin baik akan diperoleh pemahaman yang baik pula. Pemahaman kesatuan asal usul nenek moyang, budayanya, dan kawasannya itulah yang

mampu mewujudkan kawasan negara yang bermartabat dan damai. Sehingga jelas sekali pentingnya menguasai bahasa asing.

Didukung pula oleh pernyataan Direktur SEAQIL, sebuah forum kerja sama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di bidang bahasa yang berkantor di Indonesia, Luh Anik Mayani menyampaikan pentingnya pendidikan bahasa yang baik. "Kebijakan pendidikan bahasa yang baik adalah kunci keberhasilan pendidikan nasional. Sebab, bahasa adalah medium pembelajaran..." dikutip dari *kemdikbud.go.id*. Kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan bahasa asing terutama bahasa Inggris juga menjadi prioritas utama bagi negara ASEAN. Salah satunya adalah Vietnam.

Masih dari sumber yang sama, Kepala Divisi Investasi, Departemen Kerja sama Internasional, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam, Tran Thi Phuong juga mengungkapkan bahwa kurikulum nasional tetap menggunakan bahasa Vietnam, di samping ada beberapa bahasa asing lainnya, "Tapi, terbanyak memang pembelajar bahasa Inggris yang berjumlah 99%," jelas Tran. Fakta tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan pendidikan bahasa asing. "Kini, Pemerintah Vietnam tengah menggiatkan kerangka kerja kebijakan proyek nasional bahasa asing, dengan merancang kebijakan sertifikasi kemahiran bahasa asing bagi seluruh pembelajar untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional Vietnam pada 2025," lanjut Tran.

Kerja sama Peningkatan Bahasa Asing

Tidak diragukan lagi akan bahaya dunia digital dan global jika masih banyak bangsa yang kurang menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sebut saja keterbelakangan teknologi, kekurangan informasi, penurunan ekonomi rakyat, mudahnya provokasi dan kejahatan digital. Hal ini adalah sebuah beban berat dari negara kawasan ASEAN. Untuk itu perlu kerja sama yang baik antar negara ASEAN.

Affah Rahma, *detik.com* mencontohkan 7 kerja sama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Diantaranya membentuk Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), mengadakan program olimpiade pendidikan, memberi beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, ASEAN Council of Teachers Convention (ACT), pendidikan inklusif, dan pertemuan delegasi kementerian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai kerja sama internasional sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Namun tidak ada yang berfokus pada bahasa asing. Bisa dikatakan manfaatnya belum bisa mencakup berbagai elemen masyarakat. Sebagian besar yang memperoleh manfaat adalah warga yang mampu bersekolah maupun kuliah. Lalu bagaimana dengan yang tidak mampu lanjut sekolah dan tidak kuliah pula. Kesempatan mereka mengenyam pendidikan bahasa asing sangatlah kecil.

Faktanya, masih banyak ditemui siswa sekolah pun yang tidak aktif berbahasa asing alias pasif. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu guru senior yang ada di SMP Negeri 8 Surakarta, Drs, Darwanto. Menurut beliau, ada 3 hal utama yang menyebabkan kegagalan target pada siswa pembelajar bahasa asing. Pertama, karena kurangnya motivasi dari keluarga maupun lingkungan. Hal ini juga menyangkut kondisi ekonomi dan pendidikan lingkungan sekitar. Kedua, karena anggapan bahwa bahasa asing itu sulit. Mindset siswa seperti itu cenderung tidak semangat mengikuti pendidikan. Ketidakseimbangan waktu dan jumlah siswa dalam pembelajaran menjadi alasan selanjutnya. Dan yang tak kalah penting adalah Kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang mendukung proses pendidikan. Hal ini mencakup benda untuk mengajar contohnya model, kartu, laboratorium bahasa dan lainnya. (*Adiwiyata blog*)

Di sisi lain, lembaga pendidikan non formal seperti LBB, Pelatihan Kilat, kursus privat menunjukkan hasil yang lebih optimal. Salah satu contoh terbaru adalah terjalannya kerja sama antara English First (EF) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenuk Marves) RI guna melatih kemampuan Bahasa Inggris secara intensif. Pelatihan yang menitikberatkan pada kelas BUSINESS ENGLISH itu diikuti oleh para staf dimulai tepat di bulan Oktober 2022.

Dikutip dari situs *swa.co.id*, "Kami telah berhasil membantu meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris ratusan ribu siswa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. EF berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan pengalaman belajar secara langsung maupun daring baik bagi individual ataupun perusahaan," jelas Stefany Yacop, SALES DIRECTOR EF Adults.

Program EF menawarkan kemudahan akses tak terbatas waktu dan tempat. Ketersediaan *native speaker* dan kunjungan langsung ke luar negeri menjadi nilai plusnya. Ya, tentu saja biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Namun sekali lagi, apakah semua siswa atau warga negara mampu mengikuti pelatihan yang biayanya tidak sedikit seperti ini? Jangankan untuk biaya kursus, biaya hidup sehari-hari saja belum tentu ada. Tentunya ada banyak pertimbangan lagi.

Harapan Terbaik

Setiap ada kendala pastilah ada solusinya. Ketika seluruh pemegang kepemimpinan sepakat maka tidaklah susah meraih keinginan menjadikan negara ASEAN yang bermartabat. Salah satu caranya melalui program bebas aktif pendidikan bahasa asing antarnegara ASEAN. Program ini berfokus pada kerja sama aktif antarbangsa ASEAN di bidang bahasa asing. Pada intinya, siapapun dan dimanapun boleh saja mengikuti program ini tentunya dengan seleksi yang sesuai. Negara-negara ASEAN hanya perlu mengembangkan program-program yang telah dicanangkan oleh EF atau lembaga kursus lainnya yang berpengalaman dalam menghadapi kebutuhan pendidikan bahasa asing yang global dan situasional. Peluang ini tentunya perlu dioptimalkan oleh negara ASEAN.

Mengapa tidak bisa mewujudkan pendidikan bebas aktif yang saling menguntungkan? Bisa dibayangkan bukan ketika warga Indonesia yang berminat belajar bahasa Jepang bisa bebas belajar dengan langsung tinggal di Jepang selama waktu tertentu. Instansi baik formal maupun informal sudah disediakan negara untuk memudahkan proses pembelajaran. Termasuk juga akomodasi, transportasi dan akses belajar yang mudah dan gratis. Dan begitu pula sebaliknya bila ada warga negara Jepang yang ingin mengasah bahasa Indonesia mereka.

Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini? Pertama, Mengajak peran aktif pemerintah dan warga masing-masing negara agar memberi fasilitas pelatihan dan peluang luas kepada warga negara yang berkompoten mendirikan lembaga kursus. Mendirikan lembaga kursus yang berkualitas dan mampu bersaing secara global tentunya membutuhkan pelatihan intensif. Pemerintah bisa menunjuk beberapa lembaga kursus yang relevan.

Kedua, membuka kerja sama yang luas dengan instansi formal maupun informal antar negara ASEAN. Ketika antar instansi bisa mudah menjalin kerja sama, akan lebih mudah untuk mengirim siswa didik belajar langsung di lingkungan yang mendukung. Tidak hanya lebih cepat menguasai bahasa asing siswa bisa dengan mudah *native speaker*. Selain meningkatkan kepercayaan diri, siswa akan menemui pengalaman tak terlupakan. Pemahaman dan rasa saling mendukung akan tercipta melalui pengenalan bahasa dan budaya masing-masing. Efek baiknya adalah membantu meningkatkan devisa negara melalui wisatawan asing.

Selanjutnya, Memberikan peluang kerja yang memadai bagi siapapun yang ingin mengasah kemampuan berbahasanya dengan rentan waktu yang lebih lama. Selain belajar bahasa, siswa bisa dengan mudah memperoleh dana tambahan. Terlebih lagi jika bisa menjadi pekerja, akan lebih mudah menambah pundi-pundi keluarga dan negara.

Tentunya yang tak kalah penting adalah mempermudah pembuatan visa belajar bagi siapapun yang ingin belajar langsung ke negara setempat. Tidak perlu lagi takut ke luar negeri karena kemungkinan visa yang ditolak. Dengan adanya program bebas aktif pendidikan bahasa antar negara ASEAN diharapkan masing-masing warga negara lebih mudah mengenal dan memahami satu sama lain. Lebih mengerti budaya dan aturan masing-masing negara sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu palsu. Dengan demikian terwujudnya Negara kawasan ASEAN yang damai dan bermartabat akan lebih optimal.

Konklusi

Negara-negara yang terhimpun dalam ASEAN sejatinya adalah bangsa serumpun. Bangsa yang memiliki nenek moyang dan asal usul yang sama. Hal ini ditandai dengan beberapa pakaian adat, rumah adat, dan budaya yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Memiliki beberapa taha bahasa, kosakata dan tulisan daerah yang mirip pula. Jangan biarkan perbedaan menjadi penghalang dari mengenali saudara sendiri. Namun sebaliknya jadikan bahasa sebagai alat penjaga harkat dan martabat bangsa.*

Referensi

- Adiwiyata, Blog (2019). *HAMBATAN PENGAJARAN BAHASA INGGRIS, BAGAIMANA MENGATASINYA?* Surakarta 13 Agustus 2019. <https://smpn8solo.sch.id/category/adiwiyata/https://smpn8solo.sch.id/hambatan-pengajaran-bahasa-inggris-bagaimana-mengatasinya/> (diunduh 5 Desember 2022)
- Agustini, Sri (2019). "Pendidikan Multikultural Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar (*Studi Komparatif Surah Al-Hujurat ayat 13*)" *Palangka Raya 12 Juni 2019*. <https://123dok.com/article/pandangan-quraish-shihab-terhadap-surah-al-hujurat-ayat.y905k0ry> (diunduh 5 Desember 2022)
- BPMI SETPRES/AIT (2022) "Indonesia Terima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja" Jakarta 13 November 2022 <https://setkab.go.id/indonesia-terima-keketuaan-asean-2023-dari-kamboja/> (diunduh 5 Desember 2022)
- Pengelola web kemdikbud (2020) Penguasaan Bahasa Asing, Kunci Unggul ASEAN dalam Kompetisi Global 11 Desember. Jakarta 9 Desember 2020. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/penguasaan-bahasa-asing-kunci-unggul-asean-dalam-kompetisi-global> (diunduh 5 Desember 2022)
- Rahayu, Eva Martha (2022) Kemenko Marves Gandeng EF Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Karyawan. Jakarta 23 Oktober 2022 <https://swa.co.id/swa/trends/kemenko-marves-gandeng-ef-tingkatkan-kemampuan-bahasa-inggris-karyawan?amp=> (diunduh 5 Desember 2022)
- Rahma, Afifah (2022), *7 Contoh Kerjasama ASEAN di Bidang Pendidikan, Apa Saja?* Jakarta 17 Mei 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6075976/7-contoh-kerja-sama-negara-asean-di-bidang-pendidikan-apa-saja> (diunduh pada 3 Desember 2022)

TUTUS INDAH ARYUNI adalah seorang pengajar freelancer khususnya di bidang bahasa Inggris. Sebelum lulus dari kuliahnya di STIBA Satya Widya Surabaya sudah mulai mengajar privat hingga LBB. Senang mengikuti organisasi dan perkumpulan, salah satunya adalah sebagai anggota RPI wilayah Jawa Timur. Senang terhadap dunia seni dan design seperti Melukis, theater, dan kaligrafi. Bunga dan tanaman adalah *mood booster* baginya dalam mengajar siswa didik yang memerlukan perhatian khusus. Waktu luangnya diisi dengan wiraswasta dibidang kuliner dengan merk Dapur Ummah. Menulis adalah keinginan masa kecilnya. Sejauh ini telah menulis buku antologi puisi dengan judul 'Wahai Kawanku' 2021. Antologi cerpen dengan judul 'Setengah kenangan Abu-Abu' 2022 dan antologi relawan dengan judul 'Rela hati Relawan' 2022. Ia dapat dihubungi melalui email tiaryarica2000@gmail.com.

Kontestasi Ideologis Bahasa Lokal dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris di Negara-Negara ASEAN

Ahmad Faizuddin

"Language is the road map of a culture.

It tells you where its people come from and where they are going

[Bahasa adalah peta jalan suatu budaya.

la memberi tahu asal-usul orang-orang dan arah tujuan mereka]"

--Rita Mae Brown

ASEAN dan Keragaman Bahasa

ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara adalah organisasi antar pemerintah regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Sesuai dengan urutan bergabungnya, saat ini ASEAN terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura (semuanya tahun 1967), Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Pada awalnya, ASEAN didirikan sebagai payung organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Selain itu ASEAN juga bercita-cita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya serta meningkatkan kerja sama dan saling membantu di antara anggotanya (ASEAN, 2020).

Semua negara ASEAN memiliki kesamaan sejarah penaklukan kolonial, kecuali Thailand, meski pengalamannya tidak seragam dan juga tidak homogen. Contohnya, Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris dan Portugis; Brunei Darussalam oleh Inggris; Malaysia, Myanmar, dan Singapura oleh Inggris dan Jepang; Filipina oleh Spanyol dan Amerika; dan Vietnam, Kamboja dan Laos oleh Prancis. Asia Tenggara juga merupakan teritori yang paling banyak memiliki keragaman bahasa di dunia. Diperkirakan terdapat 1.476 bahasa, yaitu hampir dua pertiga dari total 2.341 bahasa di Asia. Distribusi Bahasa resmi serta jumlah Bahasa lokal untuk setiap negara ASEAN dapat dilihat dalam Tabel 1 (Zein, 2022).

No.	Nama Negara Anggota ASEAN	Bahasa Resmi	Jumlah Bahasa (Lokal)
1	Indonesia	Indonesia	707
2	Malaysia	Melayu	133
3	Filipina	Filipino, Inggris	183
4	Thailand	Thai	73
5	Singapura	Inggris, Mandarin, Tamil, Melayu	24
6	Brunei Darussalam	Melayu	15
7	Vietnam	Vietnam	109
8	Laos	Lao	85
9	Myanmar	Burma	120
10	Kamboja	Khmer	27
Total			1,476

Table 1. Bahasa di Negara Anggota ASEAN

Namun begitu, ASEAN menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja resmi untuk komunikasi di antara negara-negara anggotanya. Hal ini dilakukan khususnya untuk mengantisipasi terbentuknya *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015, yang merupakan tonggak penting dalam agenda integrasi ekonomi Asia Tenggara dengan terbukanya peluang pasar sebesar US\$ 2,6 triliun atau ketujuh terbesar di dunia (ASEAN, 2021). Pemilihan Bahasa Inggris sebagai Bahasa resmi sesuai dengan Pasal 34 English Charter Tahun 2009 yang berbunyi, “*The working language of ASEAN shall be English* (Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris)”. Menurut Kirkpatrick (2017), “*Possible reasons for its universal acceptance as the sole working language include its apparently relatively ‘neutral’ status and the perception of English being crucial in the drive for modernization and participation in globalization*” ([diantara] Kemungkinan alasan penerimaan universal [Bahasa Inggris] sebagai satu-satunya bahasa kerja adalah karena statusnya yang relatif ‘netral’ dan persepsi bahasa Inggris yang penting dalam mendorong modernisasi dan partisipasi global) (h. 8). Hal ini mematahkan argumen bahwa organisasi ASEAN memilih Bahasa Inggris sebagai Bahasa resmi karena ikatan sejarah kolonial sebagaimana dijelaskan di awal (Sagoo, McLellan & Wood, 2013).

Pengesahan bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung secara resmi tidak hanya membuka jalan mobilitas intra-regional dalam bentuk informasi, barang dan tenaga kerja manusia, tetapi juga menekankan kebutuhan untuk memasukkan bahasa Inggris ke masing-masing sistem pendidikan di negara anggota ASEAN. Dalam dua dekade terakhir, bahasa Inggris menjadi fitur reguler dalam kurikulum pendidikan negara-negara ASEAN. Alhasil, kebijakan bahasa di seluruh anggota ASEAN bervariasi, tetapi cenderung menunjukkan kesamaan: bahasa Inggris dijadikan sebagai Bahasa asing pertama setelah bahasa nasional mereka dan dimasukkan dalam pendidikan formal (Zein, 2022).

Semua negara ASEAN secara resmi memasukkan bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar, kecuali Indonesia. Di Vietnam, misalnya, bahasa Inggris di implementasikan di sekolah dasar mulai pada tahun 2008 (Canh, 2019). Sementara itu di Kamboja, Laos dan Thailand, bahasa nasional Khmer, Lao, dan Thai tetap menjadi satu-satunya bahasa literasi dan pengajaran di semua tingkat pendidikan (Kosonen, 2019). Akan tetapi pengajaran bahasa Inggris di pendidikan dasar diperkenalkan sebagai pelajaran wajib di kelas 1, 3 dan 5 (Kirkpatrick, 2017). Myanmar sebelumnya menerapkan kebijakan pintu tertutup (*close door policy*) untuk pengecualian bahasa Inggris dalam kurikulum dasarnya. Namun, pada tahun 1981 pemerintah membuatnya sebagai mata pelajaran wajib dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai sekolah menengah (Fen, 2005). Adapun secara sosiolinguistik, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina telah menjadikan bahasa Inggris berstatus resmi atau setengah resmi dalam bidang administrasi, pendidikan, dan sosial (Low, 2020).

Sosiolinguistik dan Kebijakan Bahasa Inggris di Negara-Negara ASEAN

Bahasa Sebagai Sebuah Ideologi

Ideologi bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem keyakinan, persepsi, nilai, cita-cita dan aspirasi tentang hakikat, struktur, penggunaan, perolehan, dan pengembangan bahasa. Biasanya ideologi bahasa jarang bebas nilai. Ia sering dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi, politik, budaya dan agama. Nilai-nilai tersebut berinteraksi dalam hubungan timbal balik yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, nilai ideologi bahasa memainkan peran sentral dalam membingkai sikap terhadap bahasa dan penuturnya, serta membentuk pemahaman tentang dunia sebagai sesuatu yang bermakna (Woolard, 1998).

Dari satu sisi, meskipun bahasa Inggris dapat dianggap memiliki dampak negatif dengan asosiasi kolonial dan Barat, ada juga ideologi umum yang memandang bahasa Inggris secara lebih positif. Sebagian besar negara ASEAN mempunyai pandangan ideologis yang menganggap bahasa Inggris sangat penting dalam membina hubungan antar negara dan partisipasi global (Zein, 2022). Dalam hal ini, bahasa Inggris telah menjadi media untuk kemajuan ekonomi, peningkatan status dan prestise, serta mobilitas trans-nasional (Singh, Kell & Pandian, 2002). Terkadang, di negara-negara yang menjadikan Inggris sebagai Bahasa pengantar (*English as Medium of Instruction*), ada kemungkinan prioritas Bahasa nasional mereka dinomor-duakan, seperti kasus di Malaysia, Myanmar dan Brunei Darussalam (Coluzzi, 2012). Dengan demikian, peran bahasa Inggris telah melampaui nilai-nilai Bahasa nasional di negara-negara ASEAN.

Ideologi lainnya berkaitan dengan peran bahasa Inggris dalam ekonomi global. Biasanya kemampuan berbahasa Inggris mempunyai hubungan erat dengan berbagai isu seperti kerja sama internasional, kompetisi global dan ekonomi berbasis pengetahuan di dunia global (Tupas, 2018). Argumen ini juga berlaku dalam kasus pengajaran bahasa Inggris di Asia pada umumnya (Hu & McKay, 2012; Kaplan, Baldauf & Kamwangamalu, 2011). Secara ringkas, untuk semua negara ASEAN, bahasa Inggris tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi efektif tetapi juga indeks globalisasi dan mobilitas ekonomi yang harus ada untuk meraih keberhasilan di abad ke-21 (Hamid, 2016).

Secara khusus, Bahasa Inggris menjadi ideologi monolingual. Ideologi ini mengharuskan siapa pun yang belajar bahasa Inggris untuk mengikuti standar berbahasa seperti yang digunakan di negara-negara penutur asli seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Hal ini dikutip dalam teori kognitif akuisisi bahasa kedua (*second language acquisition*) seperti yang dipelopori oleh Eric Lenneberg dan Noam Chomsky, yang telah dimasukkan ke dalam program pendidikan guru di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa reorientasi pendekatan akuisisi Bahasa kedua sangat diperlukan (Seidlhofer, 2004).

Dalam konteks ASEAN, diperlukan pendekatan baru untuk pengakuan pragmatis bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi (*lingua franca*). Menurut Kirkpatrick (2014), target pembelajaran bahasa adalah untuk saling pengertian, bukan hanya meniru ucapan penutur asli; dan target utamanya adalah kompetensi antar budaya, bukan penguasaan budaya target. Pandangan ini tercermin dalam penelitian lain yang dilakukan di Kamboja (Lim, 2020), Malaysia (Hashim & Leitner, 2016) dan Indonesia (Zein, 2022). Pada dasarnya, studi yang ada menyarankan perpindahan dari pendekatan kognitif ke sosio-kultural untuk pengajaran bahasa Inggris di mana tujuan akhirnya adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan efektif.

Dampak Bahasa Inggris Terhadap Multibahasa di Negara-Negara ASEAN

Reformasi kebijakan pendidikan bahasa di negara-negara anggota ASEAN didukung oleh berbagai ideologi bahasa. Ini termasuk persepsi umum bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa penting dalam ekonomi global, bahasa sains dan kebutuhan untuk mencapai standar internasional. Namun, hubungan antara ideologi dan kebijakan bahasa tidak pernah linier atau searah. Ini mirip dengan temuan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan prevalensi ideologi pemerolehan bahasa dalam konteks ASEAN yang lebih luas (Pechapan-Hammond, 2020). Secara ringkas, Bahasa Inggris mempunyai dampak yang hampir sama terhadap kebijakan pendidikan di 10 negara-negara ASEAN. Berikut uraian singkat kebijakan Bahasa Inggris dalam dunia Pendidikan di ASEAN.

Indonesia – Dalam ekologi linguistik Indonesia yang kompleks, bahasa Inggris dianggap sebagai salah satu bahasa asing bersama dengan bahasa Arab, Perancis, Jerman dan Mandarin (Mistar, 2005). Selama beberapa dekade menjelang 2013, bahasa Inggris adalah bagian dari pendidikan dasar. Kebijakan tersebut menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal, yang memungkinkan sekolah untuk mengajar bahasa Inggris tergantung pada kebutuhan lokal. Namun, penerapan Kurikulum 2013 Revisi membuat bahasa Inggris dihapus dari kurikulum utama dan hanya boleh diajarkan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler, meskipun baru-baru ini status bahasa Inggris telah dijadikan sebagai bahasa kedua (Ariatna, 2016) dan *lingua franca* (Zein, 2022).

Malaysia – Pemerintah Malaysia meresmikan penggunaan Bahasa Melayu Standar sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar dan menengah nasional. Namun, Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang penting dan digunakan sebagai media pengajaran di beberapa sekolah terpilih. Malaysia bereksperimen dengan kebijakan *English as a medium of instruction* (EMI) dari tahun 2003 hingga 2012. Namun kebijakan tersebut dibatalkan karena keluhan dan kritik keras dari guru dan siswa di daerah pedesaan yang mengalami kesulitan menggunakan bahasa Inggris untuk belajar mengajar (Idrus et al., 2019). Kini, variasi asli bahasa Inggris yang muncul di Malaysia telah diidentifikasi secara khusus dalam literatur dan diakui mencakup semua sub-varietas bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang Malaysia (Hashim & Tan, 2012).

Filipina – Konstitusi Filipina juga menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua. Bahasa Inggris dipelajari sebagai mata pelajaran dalam pendidikan formal dan digunakan sebagai media pengajaran seiring dengan Bahasa Tagalog dan 19 bahasa daerah lainnya (Rañosa-Madrugno et al., 2016). Sementara itu, Filipina juga memiliki ragam bahasa Inggris pribumi, yang disebut Bahasa Inggris Filipina. Menurut Dayag (2012), Bahasa Inggris Filipina adalah

variasi asli bahasa Inggris yang sah. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang Filipina dalam domain sains dan teknologi, peradilan, legislatif, birokrasi, pendidikan tinggi, wacana ilmiah, dan sejenisnya.

Thailand – Bahasa Inggris memegang peranan penting dalam ekologi linguistik Thailand yang kompleks. Sejak dipromosikan sebagai bahasa asing paling bergengsi pada masa pemerintahan Raja Rama V (1868–1910), bahasa Inggris terus menjadi populer di Thailand dalam bidang pendidikan, media, dan pariwisata (Pechapan-Hammond, 2020). Pada tahun 2010, ada upaya untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua resmi, tetapi gagal terwujud karena ketakutan Thailand akan ditafsirkan sebagai negara terjajah dan kebutuhan untuk menumbuhkan identitas nasional Thailand (Baker & Jarunthawatchai, 2017). Sekarang bahasa Inggris sudah mapan dalam sistem pendidikan dasar Thailand, karena telah dijadikan mata pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Sermsongswad & Tantipongsanuruk, 2015).

Singapura – Bahasa Inggris memainkan peran penting dalam sosiolinguistik Singapura. Konstitusi tahun 1965 mengakui alokasi fungsional bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris dalam lanskap linguistik lokal dan ditetapkan sebagai empat bahasa resmi. Dari bahasa-bahasa tersebut, bahasa Inggris adalah bahasa dominan bangsa yang berfungsi sebagai bahasa administrasi dan *lingua franca* dalam komunikasi antar etnis. Bahasa Inggris juga merupakan mata pelajaran sekolah yang penting dan merupakan satu-satunya media pengajaran dalam pendidikan dasar (Low, 2020). Singapura juga memiliki variasi bahasa Inggris asli, yang disebut Bahasa Inggris Singapura, dikenal sebagai Singlish. Bahasa Inggris Standar Singapura sebagian besar digunakan oleh orang Singapura terpelajar dalam konteks formal, sedangkan Singlish telah menjadi bahasa sehari-hari dari sebagian besar anak-anak yang memasuki pendidikan formal (Wee, 2018).

Brunei Darussalam – Bahasa Inggris adalah bahasa kedua *de facto* di Brunei dan memiliki posisi sangat kuat dalam lanskap linguistik (Coluzzi, 2012). Bahasa Inggris juga digunakan secara luas di media massa dan merupakan bahasa komunikasi antar etnis yang disukai, terutama di kalangan elit terdidik. Kebijakan pendidikan dwibahasa yang dianut oleh Brunei menetapkan Bahasa Melayu Standar dan Bahasa Inggris sebagai media pengajaran di sekolah umum (Jones, 2012). Lebih lanjut, variasi Bahasa Inggris Brunei juga berkembang sehingga dikenali sebagai bahasa yang berbeda dari bahasa Inggris di negara-negara Asia Tenggara secara umumnya (McLellan & Haji-Othman, 2012).

Vietnam – Dalam konteks Vietnam yang kompleks, bahasa Inggris berperan penting melampaui bahasa Prancis, Rusia, dan Cina sebagai bahasa asing yang paling disukai di masyarakat Vietnam (Kirkpatrick, 2017). Popularitas bahasa Inggris menjadikannya terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Dimulai sebagai mata pelajaran pilihan pada tahun 1996, bahasa Inggris kini telah resmi diwajibkan di tingkat dasar. Anak-anak Vietnam telah belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran sejak Kelas 3 sekolah dasar (Canh, 2019).

Laos – Secara sosiolinguistik, Bahasa Prancis dan Rusia memainkan peran penting dalam masyarakat Laos. Namun, bahasa Inggris telah melampaui keduanya sebagai bahasa asing terpenting dan paling disukai dalam pendidikan. Pemerintah telah mewajibkan bahasa Inggris dalam pendidikan dasar Laos yang diajarkan sejak Kelas 3 sekolah rendah (Achren & Kittiphanh, 2020).

Myanmar – Bahasa Inggris memainkan peran yang unik dalam ekologi linguistik Myanmar. Sejak diajarkan di sekolah-sekolah misionaris dari tahun 1830-an, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah Inggris dan sekolah Anglo-Vernakular selama penjajahan Inggris (1824–1948). Tetapi peran institusional bahasa Inggris telah hilang sejak kemerdekaan dan melemah selama kediktatoran militer Myanmar (1962–2011). Tidak seperti bekas jajahan Inggris lainnya di ASEAN, penguasa militer “Tatmadaw” Myanmar menerapkan ‘kebijakan pintu tertutup’ yang membatasi penggunaan bahasa Inggris (Sercombe & Tupas, 2014). Namun demikian, bahasa Inggris kini terintegrasi dengan kuat dalam pendidikan dasar Myanmar sebagai pelajaran wajib dari Kelas 1 dan seterusnya, khususnya untuk pengajaran matematika dan sains di Tingkatan 9 dan 10, 11 dan 12 (Kirkpatrick, 2017).

Cambodia – Dalam ekologi linguistik Kamboja yang kompleks, bahasa Inggris dilarang dan dipelajari secara rahasia (Pit & Roth, 2003). Namun, situasi menjadi lebih menguntungkan bagi bahasa Inggris pada 1990-an setelah Kamboja membuka diri terhadap dunia menyusul datangnya bantuan internasional setelah pemilihan umum pasca perang (Kosonen, 2019). Pemerintah Kamboja mewajibkan bahasa Inggris di sekolah menengah pada tahun 1997 (Tweed &

Som, 2015). Bahasa Inggris dalam pendidikan dasar Kamboja memiliki arti integral dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, yang diajarkan kepada siswa dari Kelas 4 sekolah dasar dan seterusnya (Ang, Anderson & Chhum, 2015).

Dari uraian di atas, berbagai reformasi pendidikan telah dilakukan di negara-negara ASEAN dalam dua dekade terakhir, namun tidak serta merta memberantas masalah bahasa. Beberapa tantangan terakumulasi dalam lingkungan belajar yang menghambat pembelajaran, seperti motivasi siswa yang rendah, budaya pembelajaran yang tidak kondusif, kemampuan bahasa dan kompetensi metodologis guru yang buruk, dan ukuran kelas yang besar dan fasilitas pendidikan yang terbatas (Kuchah, 2018). Temuan dari penelitian Zein (2022) menunjukkan bahwa situasinya tidak sama di semua negara ASEAN, tetapi ada aspek pedagogis yang relatif sama yang digabungkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak menguntungkan dalam konteks instruksional.

Integrasi Bahasa di Negara-Negara ASEAN

Artikel ini secara eksplisit menunjukkan bahwa masing-masing negara ASEAN menghadapi bahaya bahasa akibat pengaruh kebutuhan Bahasa Inggris sebagai Bahasa global. Dari satu sisi, Bahasa Inggris diperlukan sebagai jembatan kerja sama internasional dan partisipasi global dengan negara-negara lain di dunia. Namun demikian, kebijakan penggunaan Bahasa Inggris sejak sekolah dasar terbukti mengancam keberadaan bahasa-bahasa lokal di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN perlu mengembangkan kebijakan untuk merevitalisasi bahasa yang terancam punah dalam ekologi linguistik masing-masing negara. Kebijakan memasukkan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bukanlah sebuah masalah, tetapi perlu ada jaminan pelestarian bahasa asli di suatu wilayah.

Menutup tulisan ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku jabatan di ASEAN untuk mengakomodasi bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan dasar bersama dengan bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing lainnya. *Pertama*, merancang kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris yang sesuai dengan budaya dan konteks ASEAN. Konten bahan ajar yang relevan dengan negara-negara ASEAN dapat memudahkan integrasi Bahasa Inggris dengan budaya lokal sehingga terciptanya toleransi dan harmoni di antara pembelajarinya. *Kedua*, menerapkan model linguistik yang sesuai dengan tujuan pengajaran Bahasa Inggris mulai dari Pendidikan dasar. Negara-Negara ASEAN perlu memperkenalkan ragam Bahasa Inggris secara bertahap dengan mengadopsi variasi Bahasa lokal atau mempromosikannya sebagai *lingua franca*. Akhirnya, ASEAN perlu menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF dalam rangka menjamin terjaganya Bahasa lokal dan kebijakan Pendidikan yang saling menguntungkan.*

Referensi

- Achren, L. & Kittiphanh, D. (2020). English in Laos. In K. Bolton, W. Botha, and A. Kirkpatrick (Eds.), *The handbook of Asian Englishes* (pp. 667-682). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
- Ang, S., Anderson, C., & Chhum, S. (2015). *Teaching hours in primary schools in Cambodia*. Phnom Penh, Cambodia: NGO Education Partnership.
- Ariatna. (2016). The need for maintaining CLT in Indonesia. *TESOL Journal*, 7(4), 800-822.
- ASEAN. (2020). *About ASEAN*, di akses pada 1 Desember 2022 dari <https://asean.org/about-asean/>.
- Baker, W., & Jarunthawatchai, W. (2017). English language policy in Thailand. *European Journal of Language Policy*, 9(1), 27-45.
- Canh, L. (2019). English language teaching in Vietnam: Aspirations, realities, and challenges. In L. V. Canh, H. T. M. Nguyen, N. T. T. Minh, and R. Barnard (Eds.), *Building teacher capacity in English language teaching in Vietnam: Research, policy and practice* (pp. 7-22). New York: Routledge.
- Coluzzi, P. (2012). Modernity and globalisation: Is the presence of English and of cultural products in English a sign of linguistic and cultural imperialism? Results of a study conducted in Brunei Darussalam and Malaysia. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 33(2), 117-131.
- Dayag, D. T. (2012). Philippine English. In E-L. Low and A. Hashim (Eds.), *English in Southeast Asia: Features, policy and language in use* (pp. 91-99). Amsterdam: John Benjamins.

- Fen, W. S. (2005). English in Myanmar. *RELC Journal*, 36(1), 93-104.
- Hamid, M. O. (2016). The politics of language in education in a global polity. In K. Mundy, A. Green, B. Lingard, and A. Verger (Eds.), *The handbook of global education policy* (pp. 259-274). Chichester, England: John Wiley and Sons.
- Hashim, A., & Leitner, G. (2016). English as a lingua franca in higher education in Malaysia. *The Asian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 16-27.
- Hashim, A., & Tan, R. (2012). Malaysian English. In E. L. Low and A. Hashim (Eds.), *English in Southeast Asia: Features, policy and language in use* (pp. 55-74). Amsterdam: John Benjamins.
- Hu, G., & McKay, S. L. (2012). English language education in East Asia: Some recent developments. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 33(4), 345-362.
- Idrus, M. M., Ismail, H., Abdullah, H., Baharun, H., Mat Saad, S. N., Darmi, R., Puteh-Behak, F., & Harun, H. (2019). Opening up alternatives to dominant ideological constructions of English language teaching in Malaysia. *Changing English*, 26(3), 306-320.
- Jones, G. M. (2012). Language planning in its historical context in Brunei Darussalam. In E. L. Low and A. Hashim (Eds.), *English in Southeast Asia: Features, policy and language in use* (pp. 175-188). Amsterdam: John Benjamins.
- Kaplan, R. B., Baldauf Jr, R. B., & Kamwangamalu, N. (2011). Why educational language plans sometimes fail. *Current Issues in Language Planning*, 12(2), 105-124.
- Kirkpatrick, A. (2017). Language education policy among the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *European Journal of Language Policy*, 9(1), 7-25.
- Kosonen, K. (2019). Language education policy in Cambodia. In A. Kirkpatrick and A. J. Liddicoat (Eds.), *The Routledge international handbook of language education policy in Asia* (pp. 216-228). New York, NY: Routledge.
- Kuchah, K. (2018). Teaching English in difficult circumstances: Setting the scene. In K. Kuchah and F. Shamim (Eds.), *International perspectives on teaching English in difficult circumstances: Contexts, challenges and possibilities* (pp. 1-26). London: Palgrave MacMillan.
- Lim, S. (2020). A critical analysis of Cambodian teachers' cognition about World Englishes and English language teaching. *Asian Englishes*, 22(1), 85-100.
- Low, E. L. (2020). English in Asian schools. In K. Bolton, W. Botha, and A. Kirkpatrick (Eds.), *The Handbook of Asian Englishes* (pp. 107-131). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
- McLellan, J., & Haji-Othman, N. A. (2012). Brunei English. In E. L. Low and A. Hashim (Eds.), *English in Southeast Asia: Features, policy and language in use* (pp. 75-90). Amsterdam: John Benjamins.
- Mistar, J. (2005). Teaching English as a foreign language (TEFL) in Indonesia. In G. Braine (Ed.), *Teaching English to the world: History, curriculum, and practice* (pp. 71-80). New York, NY: Routledge.
- Pechapan-Hammond, S. (2020). English in Thailand. In K. Bolton, A. Kirkpatrick, and W. Botha (Eds.), *The handbook of Asian Englishes* (pp. 629-648). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
- Pit, C., & Roth, H. (2003). English language teaching development in Cambodia: Past, present and future. In W. K. Ho and R. Wong (Eds.), *English language teaching in East Asia today: Changing policies and practices* (pp. 111-129). Singapore: Times Academic Press.
- Rañosa-Madrurnio, M., Martin, I., & Plata, S. (2016). English language education in the Philippines: Policies, problems, and prospects. In R. Kirkpatrick (Ed.), *English language education policy in Asia* (pp. 245-264). Switzerland: Springer.
- Sagoo, K., McLellan, J., & Wood, A. (2015). Introduction. In T. W. Bigalke and S. Sharbawi (Eds.), *English for ASEAN Integration: Policies and practices in the region* (pp. 7-11). Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.
- Seidlhofer, B. (2004). Research perspectives on teaching English as a lingua franca. *Annual Review of Applied Linguistics*, 24, 209-239.

- Sercombe, P., & Tupas, R. (Eds.). (2014). *Language, education and nation-building: Assimilation and shift in Southeast Asia*. Dordrecht: Springer.
- Sermongsawad, U., & Tantipongsanuruk, C. (2015). English language education in Thailand. In T. W. Bigalke and S. Sharbawi (Eds.), *English for ASEAN Integration: Policies and practices in the region* (pp. 46-51). Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.
- Singh, M., Kell, P., & Pandian, A. (2002). *Appropriating English: Innovation in the global business of English teaching*. New York, NY: Peter Lang.
- Tupas, R. (2018). (Un)framing language policy and reform in Southeast Asia. *RELC Journal*, 49(2), 149-163.
- Tweed, A. D., & Som, M. (2015). English language education in Cambodia and international support ahead of ASEAN Integration. In R. Stroupe and K. Kimura (Eds.), *ASEAN Integration and the role of English language teaching* (pp. 13-40). Phnom Penh, Cambodia: IDP Education.
- Wee, L. (2018). *The Singlish controversy: Language, culture and identity in a globalizing world*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Woolard, K. A. (1998). Introduction: Language ideology as a field of inquiry. In B. Schieffelin, K. A. Woolard, and P. V. Kroskrity (Eds.), *Language ideologies* (pp. 3-47). New York, NY: Oxford University Press.
- Zein, S. (2022). *English as a subject in basic education (ESBE) in ASEAN: A comparative study*. London, United Kingdom: British Council.

AHMAD FAIZUDDIN adalah putra kelahiran Aceh dan *postdoctoral fellow* di Universiti Utara Malaysia (sejak 2021-sekarang). Ia juga merupakan presidium Indonesia Social Justice Network (ISJN) 2021-2023, sebuah organisasi alumni International Fellowship Program (IFP) Ford Foundation di Indonesia, dan Managing Editor untuk Journal of Humanity and Social Justice. Ia menamatkan pendidikannya dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (S1), Ohio University USA (S2), dan International Islamic University Malaysia (S3). Sebagai peneliti dan konsultan pendidikan, ia aktif menulis di berbagai jurnal, majalah, tabloid, bulletin, dan media massa baik lokal, nasional maupun internasional. Artikel lepasnya dapat diakses di *New Straits Times*, *The Star*, *Jakarta Post*, *Kompas*, *Serambi Indonesia*, *Gema Baiturrahman*, dan lain sebagainya. Ia dapat dihubungi di email: akhi.faizuddin@gmail.com.

Tantangan Pengajar Indonesia dalam Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Inggris sebagai *Lingua Franca* Negara-negara ASEAN

Anisah Setyaningrum

Urgensi Bahasa Inggris dalam Kerja Sama ASEAN

Bahasa memiliki peran penting sebagai sarana dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, seseorang akan menghadapi kendala dalam menyampaikan maupun memahami pesan saat berinteraksi dengan orang lain. Begitupun dalam pergaulan internasional. Di dunia ini ada beragam bahasa yang digunakan oleh penduduk di setiap wilayah, khususnya di Kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN *Community* antara lain adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Bahasa Inggris merupakan *lingua franca* di negara ASEAN (Shobikah, 2017). Pembelajaran bahasa Inggris telah menjadi salah satu prioritas utama banyak negara dalam proses globalisasi (Tiến & CườnG, 2015). Salah satu tujuan dari proses belajar mengajar bahasa Inggris di Indonesia adalah mempersiapkan generasi baru dalam menghadapi globalisasi (Setyaningrum, 2020). Globalisasi telah mengubah peran bahasa Inggris untuk dimasukkan secara global sebagai bahasa internasional atau media pengajaran (Sereni & Yanto, 2021).

Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mempermudah penyampaian dan pemahaman pesan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, khususnya dalam komunikasi resmi antar negara-negara ASEAN telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa kerja yaitu Bahasa Inggris (Okudaira, 1999). Oleh karena itu Bahasa Inggris memiliki peran yang signifikan dalam terselenggaranya kelancaran hubungan kerja sama dan harmonisasi antar negara-negara ASEAN. Berbagai macam kerja sama yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN baik dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, dan ekonomi (Putri, 2021) telah terlaksana dengan menggunakan bahasa perantara Bahasa Inggris.

Kerja sama antar negara ASEAN yang telah terlaksana diantaranya adalah diadakannya Olimpiade regional Asia Tenggara yang diikuti oleh negara anggota ASEAN. Disamping itu, kegiatan dalam bentuk pertukaran budaya dan seni telah diadakan melalui festival film ASEAN. Bidang olah raga juga turut disemarakkan setiap dua tahun sekali dalam penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games. Kerja sama yang tak kalah penting juga telah dilaksanakan melalui pemberantasan kejahatan lintas negara (Putri, 2021).

Kerja sama yang telah terjalin tersebut tentu sangat didukung oleh komunikasi yang baik. Adanya penggunaan Bahasa Inggris sebagai perantara dalam komunikasi hubungan negara-negara ASEAN berperan dalam keseluruhan proses kerja sama tersebut yang dimulai dari diskusi perencanaan, kemudian persiapan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja sama tersebut. Ketidاكلancaran dalam penguasaan Bahasa Inggris dapat menjadi salah satu penghambat dalam komunikasi antar negara anggota ASEAN.

Tantangan Pengajaran Bahasa Inggris sebagai *Lingua Franca* Negara-negara ASEAN

Di wilayah ASEAN, negara-negara yang telah tergabung dalam organisasi tersebut menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa perantara dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa ini diajarkan di setiap lembaga pendidikan di negara-negara tersebut. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam (Tiến & CườnG, 2015). Indonesia telah menetapkan Bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di setiap *level* pendidikan.

Dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris sebagai *lingua franca* negara-negara ASEAN, para pengajar Bahasa Inggris dihadapkan terhadap tantangan yang cukup *complicated*. Dalam melakukan proses belajar mengajar bahasa Inggris setiap guru atau dosen bahasa Inggris menghadapi tantangan masing-masing dari hari ke hari (Setyaningrum, 2020). Wiramarta (2021) menguraikan hasil penelitian terkait tantangan pembelajaran Bahasa Inggris - sebagai bahasa perantara ASEAN - khususnya dalam aspek *speaking skill* berbicara ini merupakan aspek yang cukup penting dalam penguasaan Bahasa Inggris. Apalagi pada umumnya manusia lebih banyak melakukan komunikasi secara lisan dibanding tulisan (Riyanto, 2018). Pengajaran *skill* ini memiliki kompleksitas dan memunculkan tantangan tersendiri. Wiramarta (2021) mengklasifikasikan tantangan tersebut ke dalam tiga poin utama, yaitu terkait pemasalahan teknis, tantangan dalam proses pembelajaran, dan tantangan dalam penilaian pembelajaran.

Media pembelajaran menjadi salah satu tantangan teknis yang dihadapi oleh pengajar Bahasa Inggris. Semakin banyaknya media pembelajaran berbahasa Inggris yang dapat diakses dengan mudah tidak serta merta memberikan kemudahan dalam belajar. Namun, pengguna dituntut untuk lebih selektif agar dapat mencapai target belajar yang lebih baik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi pengajar maupun pelajar Bahasa Inggris.

Sedangkan dalam proses pembelajaran, ketidakefektifan dalam berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri di era disrupsi sekarang ini. Adanya kemajuan teknologi yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan sangat membantu dalam pelaksanaannya, di sisi lain memunculkan hal negatif yang membuat para pelajar tidak bisa totally engaged atau menghadirkan kesadaran secara utuh dalam mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus karena adanya distraksi-distraksi yang muncul. Hal ini pun terkadang berdampak terhadap kurangnya motivasi peserta didik selama proses pembelajaran.

Begitupun dalam proses evaluasi, kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran juga menjadi tantangan dalam proses penilaian dalam evaluasi. Adanya distraksi yang menjadikan komunikasi kurang efektif berdampak pada proses penilaian yang kurang obyektif.

Berbagai tantangan tersebut merupakan sebagian dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh para pengajar Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggris sebagai *lingua franca* ASEAN. Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia sangat mendukung upaya kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Terlebih lagi, *speaking skill* juga memiliki peran penting dalam proses dan pelaksanaan kerja sama antar negara anggota ASEAN. Berbagai upaya dapat dilakukan guna menghadirkan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Kolaborasi dan Sinergi

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang telah diuraikan di atas, untuk memaksimalkannya, diperlukan sinergi dan kolaborasi pendidikan di ASEAN untuk membangun iklim positif dalam pengajaran bahasa Inggris. Disamping itu, hal ini juga merupakan upaya dalam membangun *mutual understanding* serta mengembangkan *cross cultural understanding* dengan membangun *cultural awareness*.

Para pengajar Bahasa Inggris di ASEAN dapat berkolaborasi baik dalam hal penelitian maupun pengajaran. *Sharing* dan diskusi juga dapat dilaksanakan oleh para pengajar Bahasa Inggris di negara-negara anggota ASEAN agar tantangan-tantangan yang ada dapat ditangani dengan lebih baik. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan dilaksanakannya kolaborasi para pengajar Bahasa Inggris dari negara-negara anggota ASEAN. Kolaborasi dan sinergi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan dan pematapan pengelolaan organisasi profesi pengajar Bahasa Inggris yang telah dibentuk seperti TEFLIN (*The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia*). Organisasi ini telah menjalin kerja sama dengan organisasi profesi internasional seperti TESOL International, MELTA Malaysia, IATEFL, Cam-TESOL Cambodia, Thai-TESOL Thailand, dan RELC SEAMEO Singapore.

Diantara manfaat yang bisa didapatkan adalah adanya peningkatan pemahaman budaya negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya pemahaman budaya yang baik, maka akan semakin memperlancar komunikasi dan terjaga hubungan yang baik antar negara-negara anggota ASEAN. Pengajaran bahasa Inggris yang efektif dianggap sebagai elemen penting dalam penciptaan komunitas ASEAN yang dinamis secara budaya, sehat secara ekonomi, dan stabil secara sosial (Waterworth, 2016). Hal ini dikarena dalam mempelajari bahasa, seseorang juga sekaligus belajar tentang

budaya. Lebih bagus lagi jika pengetahuan atau informasi tentang budaya negara-negara anggota ASEAN diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran Bahasa Inggris. Baker (2018) menyebutkan bahwa Bahasa Inggris sebagai *lingua franca* (ELF) sangat interkultural baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai bidang penelitian.

Pembiasaan pengenalan *accent* masing-masing negara juga menjadi salah satu manfaat adanya kolaborasi dan sinergi para pengajar Bahasa Inggris dari negara-negara ASEAN. Terciptanya komunikasi yang lebih baik dapat mendukung jalannya proses kerja sama yang lebih lancar. Disamping itu, jangkauan kerja sama antar negara anggota ASEAN juga dapat lebih menyeluruh karena terbukanya ruang komunikasi yang lebih baik.*

Referensi

- Baker, W. (2018). *English as a lingua franca and intercultural communication in The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca*. Oxon: Routledge.
- Okudaira, A. (1999). A Study on International Communication in Regional Organizations: The Use of English as the "Official" Language of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). *Asian Englishes* Vol. 2, No. 1.
- Putri, D. (2021). Bentuk Kerja Sama ASEAN dalam Berbagai Bidang serta Contohnya. Online. Diakses dari <https://kids.grid.id/read/473040123/bentuk-kerja-sama-asean-dalam-berbagai-bidang-seerta-contohnya?page=all> pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 14:07 WIB.
- Riyanto, S. (2018) Komunikasi Lisan dan Tertulis. Diakses dari <http://sutisnari.staff.ipb.ac.id/files/2018/10/PKom-1819-08-KOMUNIKASI-LISAN-DAN-TERTULIS-1.pdf> pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 15:20 WIB.
- Sereni, L.C. & Yanto, E.S. (2021). A Story of South-East Asian TESOL Why Teach Abroad: Its Opportunities and Challenges. *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching July 2021. Vol. 9, No,3 pp. 264-278*. DOI: <https://doi.org/10.33394/jollt.v%vi%i.3978>.
- Setyaningrum, A. (2020). English Teaching Challenges at IAIN Kudus in Millennial Era. *Journal of English Teaching and Learning Issues*, 3 (1) page 67 - 86, 2020. DOI: 10.21043/jetli.v3i1.7018.
- Shobikah, N. (2017). The Importance of English Language in Facing ASEAN Economic Community (AEC). *At-Turats Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* Vol. 11 No.1 (2017) 85 – 93.
- TiẾn, N.Q. & CườnG, N.C. (2015). English Language Teaching and Learning in ASEAN Countries and Preparatory Steps to Integrate into the ASEAN Economic Community (AEC) 2015. *PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP* Số 24 (34) - Tháng 09-10/2015.
- Waterworth, P. (2016). TEACHING ENGLISH IN ASEAN: THE VOICES OF ENGLISH TEACHERS IN ASEAN NATIONS. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, Vol. 5 No. 2, January 2016, pp. 154-166. Doi: <dx.doi.org/10.17509/ijal.v5i2.1340>.
- Wiramarta, K. (2021). Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Aspek Berbicara Pada Sekolah Pariwisata dalam Masa Pandemi. *Culture* Volume 2, No. 1, April 2021.

ANISAH SETYANINGRUM atau yang dikenal dengan sebutan Ms. Nisha berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini ia berdomisili di Kudus dan merupakan salah satu dosen tetap di IAIN Kudus. Disamping berpartisipasi aktif dalam kolaborasi penulisan, *editing*, dan penerjemahan buku, ia juga aktif melaksanakan penelitian dan menekuni bidang keilmuan *English Language Teaching* (ELT) serta mengintegrasikannya dengan bidang kajian keislaman. Ia telah mempublikasikan karya-karyanya baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional. Beberapa hasil penelitian dan tulisan lainnya dapat diakses melalui <https://www.researchgate.net/profile/Anisah-Setyaningrum>, <https://scholar.google.com>, <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6653733>, <https://orcid.org/0000-0002-0113-4620>, dan <https://www.kompasiana.com/anisahsetya>. Ia dapat dihubungi melalui surel anisahsetya@gmail.com.

Pentingnya Bahasa Arab Dalam Ijtihad di Kawasan Asia Tenggara

Mariati Aprilia Harahap

Pendahuluan

Negara-negara Asia Tenggara terbagi menjadi dua kelompok yaitu Asia Tenggara Daratan (ATD) dan Asia Tenggara Maritim (ATM). Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam adalah termasuk bagian tenggara daratan, sedangkan Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste adalah termasuk tenggara laut. Agama yang dianut masyarakat Asia Tenggara ini pun beragam, mulai dari Islam, Buddha, Kristen, Taoisme, dan Konfusianisme. Adapun negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Negara-negara yang berlokasi di Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua kelompok, (1) merupakan wilayah Asia daratan, (2) yang termasuk wilayah kelautan. Indonesia masuk ke dalam wilayah kelautan. Bersama Malaysia dan Brunei, Indonesia dipenuhi oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Sebagai pemeluk agama Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pegangan hidup dalam pengambilan suatu hukum. Menurut Hamid (2009) ada empat sumber hukum dalam Islam yaitu *al-Qur'an*, *Hadis*, *ijmak* dan *qiyas* (Hamid 2009). Al-Qur'an adalah merupakan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan *Hadis* merupakan semua perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi terhadap tindakan yang dilakukan para sahabat beliau semasa hidupnya. *Ijmak* merupakan kesepakatan para ulama dalam berijtihad (mengambil keputusan) atas suatu hukum yang belum jelas tertulis di dalam Al-Qur'an maupun *Hadis*. Dan *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dengan kasus lain yang serupa dan ada hukumnya.

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Setelah berkembangnya zaman, masalah-masalah baru dalam agama pun bermunculan dari waktu ke waktu. Situasi ini menyebabkan seorang ahli hukum (*Mujtahid*) membuat keputusan dalam mengatasi masalah baru dengan cara menyimpulkan hukum-hukum agama secara benar. *Ijtihad* artinya berbuat dengan usaha maksimal (makna bahasa). Adapun secara teknis, seorang *Mujtahid* berupaya menginterpretasikan kaidah-kaidah ilmu *syari'ah* (agama) dalam persoalan baru (Nyazee, 2000, hal.176). Di sini, seorang ia (yang melakukan ijtihad) dituntut untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum agama.

Namun sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* didokumentasikan dalam bahasa Arab pada bentuk aslinya. Bahasa Arab adalah bahasa utama dalam agama Islam. Oleh karena itu, kemahiran pengetahuan berbahasa Arab harus dimiliki oleh seorang pengambil keputusan untuk dapat membaca serta menarik kesimpulan dari setiap kesulitan tertentu yang dihadapi oleh umat.

Bahasa Arab sangat penting dalam bab *ijtihad*. Kredibilitas seorang *Mujtahid* dalam ilmu bahasa Arab merupakan salah satu syarat mutlak. Selain itu, sumber dasar-dasar ilmu *fiqh* sangat berkaitan dengan ilmu bahasa Arab sebagai penyebab. Adapun kelemahan dalam ilmu tersebut mengakibatkan lemahnya interpretasi pemikiran dalam hal kesimpulan hukum. Sekarang mari kita bahas poin-poin penting bahasa Arab dalam bab *ijtihad* satu per satu.

Penguasaan bahasa Arab merupakan syarat mutlak bagi *Mujtahid*

Menurut Kamdar, para cendekiawan muslim telah menetapkan dua hal penting yang harus dilakukan ahli hukum agar dapat ber-*ijtihad*, (pertama) seorang ahli hukum harus jujur dan beragama, dan (kedua) dia harus memiliki kemampuan memahami bahasa Arab. Dan ia memiliki pengetahuan yang cukup dalam tiga bidang; *Ushul Fiqh*

(metodologi hukum), *Maqasid al-Syariah* (tujuan dan motif syariat), dan *Qawa'id Fiqhiyyah* (aturan yang komprehensif dalam aturan hukum *Fiqh*).

Padahal, kualifikasi lain seperti *ilmu Hadits*, *Ulum Al-Qur'an*, wahyu dan nalar pencabutan, dan Tafsir juga perlu dikuasai dengan sangat baik oleh seorang *Mujtahid* (Kamdar, n.d., hal.2). Oleh karena itu, seorang ahli hukum yang tinggi dan kredibel harus menguasai linguistik bahasa Arab dan informasi terkait, yang merupakan bahasa utama dalam bahasa Arab. Di sini, kemahiran dalam dialek itu memainkan peran penting sebagai prasyarat ahli hukum.

Pentingnya bahasa Arab sebagai sumber-sumber ilmu *Ushul Fiqh*

Sebelumnya telah disebutkan bahwa selain linguistik bahasa Arab, seorang ahli hukum juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang *Ushul Fiqh*. Di sini, ilmu ini dikembangkan dari tiga bagian, (1) Tauhid sebagai ilmu dasar agama ini, (2) ilmu bahasa Arab, termasuk memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk bahasa Arab aslinya, dan (3) konseptualisasi hukum Islam (Philips, 2003, hal. 24-25).

Oleh karena itu, menurut Ilmu *Ushul Fiqh*, tiga bagian penting yang ditempati sebagai sumber derivasi hukum adalah; Ilmu tauhid, bahasa arab, dan konseptualisasi hukum Islam. Lagi-lagi jika melihat poin no.2, syarat penguasaan semantik bahasa Arab harus dimiliki oleh seorang ahli hukum di bidang ilmu *ushul fiqh*. Oleh karena itu, pemahaman yang lengkap tentang ilmu *ushul fiqh* sangat erat kaitannya dengan pengetahuan seorang ahli hukum dalam bahasa Arab itu sendiri.

Ketidaktahuan bahasa Arab adalah sumber munculnya pemikiran *bid'ah* dan *syubhat*

Menurut Lawadi (2012), Syeikh Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa manusia hidup dengan syarat bahwa ia tunduk pada bahasa dan budaya asalnya dalam memahami suatu kata. Kemudian jika ia menemukan kata tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dia cenderung menyimpulkan kata sesuai dengan bahasa dan kearifan lokalnya. Tentu hal ini menyebabkan konflik pemahaman dari Allah dan Rasul Nabi Muhammad, sementara dia tidak tahu bahasa yang dikomunikasikan oleh para sahabat (Arab) ketika mereka mendiskusikan masalah tertentu dengan Rasul (Lawadi, 2012, hal. 62-64).

Oleh karena itu, agar seorang *Mujtahid* menjadi orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, keahliannya sangat penting untuk menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana dia bisa menafsirkan keputusan berdasarkan argumen Islam jika dia tidak mengerti bahasa asalnya dengan baik? Tentu saja, interpretasinya akan meragukan. Bahkan mungkin bertentangan dengan pemahaman yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi atau sumber hukum lainnya, yang bersumber dari bahasa Arab.

Imam Asy-Syafi'i (2012) dalam buku terjemahannya "*Ar-Risalah*", bertema Ijtihad no. 1471 menulis bahwa tidak seorang pun boleh melakukan *qiyas* kecuali dia telah mengetahui tentang *sunnah-sunnah* sebelumnya dari berbagai kejadian yang terkait, pendapat ulama terdahulu tentangnya, *ijma'* umat, perbedaan pendapat di antara mereka, dan bahasa Arab (Asy-Syafi'i, 2016, hal. 399). Sekali lagi, menurut pandangan Imam Syafi'i, tidak ada alasan bagi seorang ahli hukum Islam untuk tidak mempelajari dan menguasai bahasa Arab dan menguasai *sunnah-sunnah* terdahulu, pendapat ulama terdahulu, musyawarah mufakat, dan perbedaan-perbedaan antara lain sebelum melakukan *qiyas*. Oleh karena itu, tidak ada ruang *qiyas* bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab dan hadits-hadits Nabi mengenai pendapat ulama terdahulu tentang suatu hal, keputusan ulama, kesepakatan atau ketidaksepakatan di antara mereka.

Kesimpulan

Menguasai bahasa Arab, khususnya dalam bab *ijtihad* bagi pemeluk Islam di negara-negara Indonesia, Malaysia dan Brunei ini adalah wajib. Mampu berbahasa Arab dengan baik adalah sangat dianjurkan bagi semua umat Islam. Apalagi bagi seorang ahli hukum terpercaya. Karena apa pun masalah yang berkaitan dengan agama mana saja yang terjadi dalam masyarakat Islam adalah tidak terlepas dari peran penting bahasa Arab sebagai keterampilan pelengkap yang harus dimiliki oleh para pengambil keputusan (*Mujtahid*). Jika hal tersebut berlaku sebaliknya, maka sebagai pemimpin umat Islam ia tidak dapat diandalkan. Ia pun tidak dapat dipercaya penafsirannya tentang suatu kesimpulan dari masalah yang dihadapi oleh umat saat ini.*

Referensi

- Asy-Syafi'i, Imam. 2016. *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih Dan Ushul Fikih*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2009. *Buku Pintar Agama Islam: Edisi Junior*. Cetakan I. Bogor: Cahaya Islam.
- Kamdar, Ismail. n.d. "Fiqh 402 Islamic Legal Maxims (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah) Modul 1-30." In *Islamic Online University: Bachelor of Art in Islamic Studies*, Modul 1-30. Islamic Online University.
- Lawadi, Hamzah Abbas. 2012. *Keutamaan & Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab*. Naashirusunnah.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2000. *Outlines of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute.
- Philips, Abu Ameenah Bilal. 2003. *A Commentary on Usool Al-Fiqh Made Easy*. United Arab Emirates: Ismail Graphics.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara (akses 7 Desember 2022)

MARIATI APRILIA HARAHAHAP lahir di Jakarta pada 10 April 1981. Alumni International Islamic University Malaysia (IIUM) pada jurusan Organisasi Komunikasi dan International Open University (IOU) yang berbasis di Gambia, India. Aktif sebagai pengajar bahasa Arab dan Inggris, penulis buku bahasa Arab dan Inggris Anak, juga pemerhati kesehatan tulang belakang (*Certified Pastrooper*). Mariati saat ini aktif sebagai mahasiswa program master pada Fakultas Islamic Studies Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat. Diantara karya tulis Mariati adalah *Easy and Fun English for Kids*, *Asyiknya Belajar Bahasa Arab dan Inggris* (Kosa kata Pertamaku, Makanan Favoritku, Kesenangan dan Keseharian Anak, dan Mengenal Hewan-Hewan), *Emak Backpacker: Bertualang ke Istanbul & Doha Qatar*, serta *Pedoman Haji Mandiri: Berbasis Aplikasi Android*. Karya tulis lainnya di, <https://www.tokopedia.com/budgetsy>. Info lanjut bisa kontak di 081932853906, atau email: aprilia.meli@gmail.com, ig: [aprilia.meli](https://www.instagram.com/aprilia.meli) dan [twitter: @BuddyValah](https://twitter.com/BuddyValah).

Nasib Bahasa Indonesia

Nuim Hidayat

Kita faham bersama bahwa salah satu fungsi bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu makna benda atau peristiwa. Bila dua orang atau lebih berkomunikasi, menggunakan sebuah bahasa, mereka saling paham, maka 'telah cukuplah fungsi bahasa itu'. Bahasa bukan untuk bergaya-gaya atau menghegemoni suatu komunitas/bangsa ke bangsa lain. Raja Ali Haji (1808-1873), ulama besar dan ahli bahasa Melayu menyatakan bahwa tujuan belajar bahasa sebenarnya adalah untuk makrifat kepada Allah, Sang Pencipta alat indera dan alam semesta ini. Bukan seperti yang diungkap oleh Gorrys Keraf, bahasa hanya berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, alat untuk integrasi atau adaptasi sosial dan alat untuk melakukan kontrol sosial.

Prof. Hashim Musa, ahli bahasa dari Universiti Malaya, ketika memberikan pengantar buku *Bustaanul Kaatibin*, karya cendekiawan besar bahasa Melayu Raja Ali Haji, mengatakan: "Dalam Islam, pengajian bahasa khususnya bahasa Arab dan bahasa penganut Islam yang lain, merupakan ilmu alat untuk mencapai makrifat yaitu mengenali Allah dan seluruh kewujudan, memperteguh keimanan dan ketakwaan, dan menyemai adab kesopanan yang mulia, yang mengandungi antara lain ilmu-ilmu nahwu (sintaksis), sharaf (morfologi), qawaid (bahasa), mantiq (logika), balaghah (retorik), istidlal (pendalilan), kalam (penghujahan) dan sebagainya."

Dalam bukunya 'Taman untuk Penulis' itu, Raja Ali Haji mengatakan: "Adapun kelebihan ilmu dan kalam amat besar sehingganya mengatakan setengah hukama, segala pekerjaan pedang bisa diperbuat dengan kalam. Adapun pekerjaan-pekerjaan kalam tidak bisa diperbuat dengan pedang, maka ini ibarat yang terlebih sangat nyatanya. Dan beberapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus, dengan *seguris* kalam jadi tersarung, terkadang jadi tertangkap dan terikat dengan pedang sekali."

Menurut Prof. Syed Mohammad Naquib al Attas yang kemudian diikuti oleh Prof. Braginsky (1989, 1993), pekerjaan kalam —istilah yang merujuk pada kegiatan penulisan— adalah tonggak kebudayaan Melayu, yang mengakar umbi selepas kedatangan Islam ke rantau ini. Menurut beliau, di bawah pengaruh Islam, orang Melayu mula sadar tentang kewujudan sastera sebagai satu entiti yang utuh, yang menjadi sebahagian integral hidup mereka (*lihat Prof. Ungku Maemunah Mohd Tohir, Kritikan Sastera Melayu, Antara Cerita dan Ilmu, 2007*).

Ulama terkemuka Melayu lainnya, Syekh Ahmad al Fathani (1856-1908 dari Pattani) juga pernah mengirim surat kepada Sultan Zainal Abidin, Sultan Trengganu, agar sultan-sultan berperanan aktif dalam menyebarkan ilmu di masyarakat. Ia menulis: "Aku berharap semoga bangsa Melayu dapat maju dengan pimpinannya dan dapat mencapai kemuncak peradaban kesejahteraan. Aku berharap semoga baginda berkenan menyebarkan ilmu, makrifat dan petunjuk. Lalu baginda menjadi kegembiraan dan rakyat mendapat kejayaan. Agar mereka dapat membukukan bahasa Melayu. Karena aku bimbang ia akan hilang atau dirusak oleh perubahan yang berlaku dari masa ke masa. Begitu pula hendaklah mereka mengarang sejarah Melayu yang meliputi segala perihal orang Melayu. Kalau tidak, mereka nanti akan hilang dalam lipatan sejarah. Wahai para cerdik pandai. Hidupkanlah sejarah bangsamu. Dengan itu kamu akan disebut dalam sejarah dan namamu akan harum sepanjang masa. (*lihat plakat Khazanah Fathaniyah oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah*).

Imperialisme Bahasa

Bahasa adalah kebiasaan. Orang yang dilahirkan di Jawa, bapak ibu dan teman-temannya menggunakan bahasa Jawa maka anak itu—bila normal—pasti bisa berbahasa Jawa. Bila di sekolah mereka diajari tiap hari bahasa Indonesia, maka ia akan lancar berbahasa Indonesia. Begitu pula orang Inggris, Arab, Jerman, Cina dan lain-lain. Sebuah masyarakat atau individu unggul bukan karena bahasa yang digunakan. Tapi karena ilmu, kecerdasan dan kreativitas yang masyarakat miliki. Maka bangsa Jepang, Jerman dan Cina unggul dalam berbagai bidang kehidupan, tapi tetap mereka tidak kehilangan identitas bahasanya. Begitu juga dulu bangsa Arab, sekarang bangsa Inggris atau Amerika.

Di negara tetangga kita, bila kita mencermati kelahiran Universiti Malaya atau Universiti Kebangsaan Malaysia, banyak ahli pendidikannya mengkhawatirkan tergerusnya bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Maka kini di universitas itu, tiap mahasiswa dari luar negeri (tidak terkecuali dari Indonesia), bila mencari ilmu di kedua universitas itu, apapun

jurusannya, mereka harus mengambil bahasa Melayu. Untuk di Universiti Malaya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia biasanya disuruh tes bahasa Melayu terlebih dulu. Bila lulus, maka mereka terlepas beban untuk mengambil SKS bahasa Melayu.

Meski demikian banyak cendekiawan Melayu di Malaysia (dan Singapura) resah karena bahasa Melayu di kedua negara tetangga kita itu, mulai jarang dipakai anak-anak muda mereka. Bila anak-anak India, Cina dan Melayu berbincang bertiga di Malaysia, maka mereka menggunakan bahasa Inggris bukan bahasa Melayu. Bila kita berkunjung ke kedai-kedai buku Malaysia, maka jumlah buku berbahasa Inggris jauh lebih membludak dari bahasa Melayu. Di Singapura, penggunaan bahasa Melayu lebih menyedihkan lagi. Ia hampir-hampir hanya digunakan orang-orang Muslim Melayu saja, yang jumlahnya kini hanya sekitar 15%. Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar wajib di sekolah-sekolah.

Dalam sejarah kita, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sebenarnya mengajarkan kepada kita semangat agar bahasa Indonesia-Melayu ini menjadi ciri bangsa Indonesia. Agar bangsa Indonesia dikemudian hari menjadi bangsa besar dengan bahasa Indonesia. Bukan dengan bahasa Belanda yang saat itu banyak dipakai kaum terpelajar Indonesia, karena diwajibkan pemerintah Belanda digunakan di sekolah-sekolah tanah air. *Founding Fathers* kita hebat bisa mengusir bahasa Belanda dari tanah air, padahal bahasa itu ratusan tahun digunakan di sekolah-sekolah formal milik Belanda.

Para ulama kita juga merintis penggunaan bahasa Melayu ini dalam karya-karya mereka. Bahasa Arab Jawi atau Arab Melayu mereka tulis dalam karya-karya agung mereka mengenai bahasa, sejarah, biografi, politik, kisah-kisah dan lain-lain. Buku-buku karya ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Nuruddin ar Raniri, Raja Ali Haji, Hamka, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, A Hassan Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab Melayu (Arab Jawi).

Kini bahasa Inggris, seolah-olah menjadi tolok ukur kecerdasan. Bila orang tidak bisa bahasa Inggris dengan skor sekian, maka mereka sulit untuk masuk ke perguruan tinggi ternama. Seolah-olah derajat mereka yang bisa bahasa Inggris, lebih tinggi dari mereka yang faham bahasa Indonesia. Mereka lupa, bahwa kecerdasan bahasa hanyalah salah satu kecerdasan pada diri manusia. Ada sedikitnya delapan kecerdasan di diri manusia: kecerdasan bahasa, matematika, spasial, interpersonal, musik dan lain-lain. Orang Indonesia bisa ahli matematika, organisasi atau musik tanpa menguasai bahasa Inggris.

Yang paling gawat dampaknya, bila bahasa sendiri tidak dihormati, menurut pakar pendidikan Malaysia, Prof Wan Mohd Nor Wan Daud, "Bangsa itu menjadi tidak menghormati karya-karya orang-orang yang cerdas dari bangsa sendiri." Seolah-olah karya berbahasa lain mesti lebih bagus dari tokoh-tokoh bangsa sendiri. Padahal orang-orang hebat bangsa itu sendirilah yang hari ke hari mengamati kondisi bangsanya, yang akan sanggup mengatasi permasalahan di bangsa itu.

Tentu, tidak dipungkiri bahasa asing perlu dikenal. Mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi perlu belajar bahasa Inggris untuk lebih mendalami sains, teknologi, komputer dan lain-lain. Karena memang tidak dipungkiri sains dan teknologi sekarang ini, banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Permasalahannya, bila bahasa Inggris diajarkan intensif di sekolah menengah, maka para murid akan setengah matang pemahamannya terhadap bahasa ibu sendiri. Akhirnya kemampuan bahasa Indonesia pun setengah jadi dan bahasa Inggrisnya pun tanggung. Jadilah penggunaan bahasa yang kacau di masyarakat, seperti kita lihat di mall-mall, perumahan-perumahan dan buku-buku sekarang ini.

Juga banyak mental para pebisnis dan penerbit buku di tanah air sekarang ini, bila hanya menggunakan bahasa Indonesia, seolah-olah kurang keren. Kurang diminati. Mereka pun ikut-ikutan membuat judul dengan bahasa Inggris, padahal isinya bahasa Indonesia. Dampak lebih jauh generasi muda di masa 10 tahun mendatang bisa-bisa lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Melayu. Seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura sekarang ini. Memang tidak dipungkiri adanya pertarungan ide dalam memasukkan sebuah kata serapan dalam bahasa Indonesia. Bila dulu banyak lafadz-lafadz Arab masuk dalam kosa kata Indonesia, kini kebanyakan kata-kata Inggris yang masuk. Seiring digesernya peranan ahli sastra Melayu, seperti Raja Ali Haji dan Hamka dengan Gorrys Keraf dan A Teeuw.

Padahal penggantian kata kadang membawa makna yang jauh. Kata murid, yang digulirkan secara cermat oleh cendekiawan/ulama Islam diganti dengan kata siswa dengan menginduk pada Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro. Murid dari kata *araada-yuriidu-muriidan*. Maknanya orang mempunyai kehendak. Orang yang mempunyai kemauan. Orang yang mempunyai cita-cita. Sedangkan siswa? *Wallahu aliiimun hakiim.**

NUIM HIDAYAT adalah penulis produktif dan jurnalis yang menetap di Depok. Ia merupakan lulusan Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam UI, dan pernah menjadi Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Depok.

Dukungan terhadap Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Kolektif ASEAN

Zikria Desi Anggraini

Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada lawatannya ke Indonesia, menyatakan hendak memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN. Menanggapi hal itu Mendikbudristek Nadiem Makariem tentu saja menolak usulan tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan.

Memang benar jika bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia, namun pada kenyataannya bahasa Indonesia lebih berkembang dibandingkan dengan bahasa Melayu. Menurut beliau, Bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum dan linguistik. Selain itu bahasa Indonesia sudah diakui secara internasional.

Debat Kusir Bahasa Kedua ASEAN

Perdebatan tentang pemilihan Bahasa resmi ASEAN sudah beberapa kali terjadi, namun belum ada yang menuai hasil akhir, atau bisa dikatakan tak menuai hasil apapun. Menurut Dr. Luh Anik Mayani, Direktur SEAMEO QITEP in Language, pada pembicaringannya dengan Dr. Muh Abdul Khak, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam acara Bincang Bahasa dengan tema "Bahasa Resmi ASEAN dalam Timbangan: Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu?", bahasa dapat menjadi identitas kolektif tingkat regional ASEAN.

ASEAN kini menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kerja (*working language*) karena Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa regional. Tidak ada catatan yang secara syah menyebutkan bahwa Bahasa Inggris adalah Bahasa pertama ASEAN. Namun ada dalam satu pasal piagam ASEAN yaitu pasal 34 yang berisikan tentang Bahasa "Bahasa Kerja ASEAN adalah Bahasa Inggris."

Apakah sama arti dari Bahasa resmi dan Bahasa kerja? Menurut Wikipedia Bahasa Kerja (atau bahasa profesi) adalah Bahasa yang diberi status hukum dalam sebuah organisasi beranggotakan banyak bangsa sebagai alat komunikasi utama.

Mengangkat Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu sebagai Bahasa Resmi ASEAN

Menurut Dr. Sailal Arimi, S.S., M.Hum, staf pengajar Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UGM, aktualisasi bahasa Indonesia di panggung internasional ini bisa dilihat dari sekurang-kurangnya empat perspektif, yaitu historisitas, legalitas, statistik, dan vitalitas sosiolinguistiknya.

Pertama, Perspektif historisitas. Menilik sejarah Bahasa Indonesia, berawal dari adanya peristiwa sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana dalam kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berisikan 3 butir dan dibutir kedua berbunyi "Kami putera puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Jika ditelisik lebih mendalam, pengusung Bahasa Indonesia berawal dari Bahasa Melayu Riau, yang pada perkembangannya mengalami penambahan kosakata baru. Sejak saat itu, Bahasa Indonesia menjadi Bahasa penghubung dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia.

Kedua, Legalitas. Yang melegalkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi negara dapat dilihat pada: UUD 1945 pasal 36 yang menyebutkan Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018. Pada bagian ke empat UU No. 24 Tahun 2009 tentang "Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional" di sana terdapat pasal 44 yang menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Kemudian pada Pasal 11 PP No. 57 Tahun 2014 juga ditandaskan bahwa pengembangan bahasa Indonesia dilakukan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Ketiga, Statistik. Pengguna Bahasa Indonesia diketahui telah dipakai oleh lebih dari 300 juta penutur di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia saja telah melebihi 250 juta jiwa dari penduduk Indonesia yang tercatat lebih dari 272 juta. Bahasa Indonesia, sebut Sailal, juga menjadi variasi dialektal di kawasan serantau seperti di Malaysia yang berpenduduk 33 juta, Thailand Selatan, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, Suriname, dan berbagai diaspora Indonesia di dunia seperti di Amerika, Kanada, Jepang, Korea, Timur Tengah, dan sebagainya.

Keempat, Vitalitas sosiolinguistik. Sedangkan dari perspektif vitalitas Bahasa, bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara juga telah berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (UU No.24 Tahun 2009).

Dari keempat perspektif tersebut di atas, sudah selayaknya bahasa Indonesia untuk terus digaungkan dan dikembangkan fungsi dan perannya sebagai bahasa nasional di Indonesia dan bahasa internasional sekurang-kurangnya di kawasan ASEAN. Seiring dengan meluasnya pemakaian bahasa Indonesia ini dan menguatnya peran ekonomi, politik, diplomasi kebudayaan Indonesia, semakin kukuh dan meningkat pula vitalitas bahasa Indonesia ini.

Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional

Kembali lagi membahas kemungkinan Bahasa Indonesia menjadi Bahasa internasional, jika dilihat dari banyaknya ahli Bahasa yang sudah mengamati dan meneliti kemungkinan tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menggunakan Bahasa Indonesia. Melalui dunia Pendidikan tentunya, harus selalu didengung-dengungkan penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terutama untuk daerah-daerah yang masuk wilayah 3T, apalagi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa.

Faktor intrabahasa, yaitu Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan menggunakan aturan yang sudah diberlakukan yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) dan juga sudah berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Faktor ekstrabahasa yang bisa berpengaruh secara langsung tentunya dari penutur Bahasa Indonesia itu sendiri, semakin banyak penutur Bahasa Indonesia semakin baik.

Menilik ke jumlah penduduk di Indonesia yang tercatat sebagai penduduk terbesar ketiga di Asia dan keempat di dunia berdasarkan data Litbang MPI. Dengan bermodalkan jumlah penduduk tersebut, menjadikan jumlah penutur bahasanya pun lebih banyak. Untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa kolektif, bangsa Indonesia sendiri harus mencintai Bahasa Indonesia, kemudian mengoptimalkan pengenalan Bahasa Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN maupun negara-negara di belahan benua lainnya.

Faktor ekstrabahasa lainnya dapat muncul dari daya tarik kebudayaan serta kekayaan alam. Sudah bukan hal baru jika Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga internasional. Keindahan yang tercipta dari wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, menjadikan banyaknya destinasi wisata alam dan berbagai macam kebudayaan. Tentunya semua itu berdampak pada ketertarikan wisatawan asing, untuk mempelajari budaya Indonesia termasuk Bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi daya pikat bagi wisatawan asing, apalagi dengan sikap keramah tamahan warganya yang mudah menerima wisatawan dari mancanegara. Yang tidak kalah penting adalah kestabilan keamanan di Indonesia. Dengan stabilnya tingkat keamanan menyebabkan hilangnya rasa takut di hati wisatawan sehingga mereka merasa nyaman untuk datang ke Indonesia.

Fakta Menarik Bahasa Indonesia

Menurut Kemenlu RI Wikipedia Bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing. Untuk tingkat Asia, Bahasa Indonesia berada di peringkat ke tiga setelah Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, di Vietnam Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi ke-2, juga menjadi bahasa terpopuler ke-4 di Australia. Setidaknya 52 negara asing membuka Program Studi Bahasa Indonesia.

Melalui Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Indonesia memberikan kemudahan bagi setiap warga di negara anggota ASEAN, untuk mempelajari Bahasa Indonesia. Antusiasme warga dunia terhadap Bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Terlihat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sampai akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara, dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Data tersebut merupakan sebuah fakta dari usaha Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri membuktikan komitmennya dalam mewujudkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional.

Beberapa media massa elektronik, khususnya radio yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika (Voice of America = VoA), dan Radio Belanda, secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, sudah banyak laman luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula laman klub sepak bola ternama dunia juga sudah ada yang menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya.

Berdasarkan uraian di atas, Bahasa Indonesia dipandang lebih strategis untuk dijadikan Bahasa Induk atau Bahasa Kolektif ASEAN, tentunya dengan tidak melupakan Bahasa melayu dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, atau menjadikan Bahasa melayu tersebut sebagai pengiring Bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan usahanya menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa regional dan Bahasa internasional dengan selalu mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia daripada penggunaan Bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, kita yang memiliki Bahasa Indonesia harus mencintai Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dengan adanya rasa cinta tersebut, maka akan tercipta rasa setia. Dari kesetiaan kita pada Bahasa Indonesia maka akan membangkitkan kebanggaan tersendiri di hati.*

Referensi

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/menakar-jalan-bahasa-indonesia-menjadi-bahasa-internasional> diakses pada 11/19/22, 8:01 AM

<https://www.qiteplanguage.org/detail/news/Pewujudan-Identitas-Kolektif-ASEAN-melalui-Bahasa> diakses pada 20/11/22

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_pekerjaan&oldid=21484717

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22515-promosikan-bahasa-indonesia-sebagai-bahasa-kedua-asean> diakses pada 11/19/22, 8:01AM

www.ugm.ac.id diakses pada 23 May 2022, 14:40 WIB

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22515-promosikan-bahasa-indonesia-sebagai-bahasa-kedua-asean> diakses pada 11/19/22, 8:01AM

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/803/bahasa-indonesia-menuju-bahasa-internasional> diakses pada 11/19/22

<https://news.okezone.com/read/2022/07/27/18/2637286/5-negara-asia-dengan-penduduk-terbanyak-salah-satunya-indonesia> diakses pada 6 Desember 2022

<https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-indonesia-diminati-banyak-negara> diakses pada 11/19/22, 8:07 Am

ZIKRIA DESI ANGGRAINI adalah seorang pendidik di Sekolah Dasar Negeri Kroya 05 sejak tahun 2011 hingga kini. Ia telah menerbitkan buku berjudul *21 Catatan Belajar Menulis Buku* dan beberapa buku antologi.

Bagian Keempat
Moderasi Beragama:
Dinamika Keagamaan, Otoritas
Religius, dan Kearifan Lokal
Memajukan ASEAN

BAB 14

Islam dan Religiusitas di ASEAN

Warna Islam Asia Tenggara

Ade Solihat

Pendahuluan

Pada umumnya, studi Islam sering dikaji berdampingan dengan studi kawasan Timur Tengah (mencakup Asia Barat dan Afrika Utara). Pengetahuan umum tentang Islam sering dikaitkan dengan wilayah tempat lahir dan berkembangnya agama ini yang memang berada di kawasan Asia Barat. Namun sebenarnya, negara dengan masyarakat Muslim terbanyak di dunia, yaitu Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data World Population Review (2021) Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim sebanyak 231.000.000 jiwa menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Di kawasan Asia, keberadaan Muslim Indonesia menempatkan Asia Tenggara sebagai wilayah berpenduduk Muslim terbanyak kedua setelah Asia Selatan. Kondisi ini juga memberi gambaran bahwa Islam meskipun lahir di dunia Arab yang berada di kawasan Asia Barat, namun justru lebih banyak dianut oleh masyarakat di luar kawasan tersebut.

Meskipun demikian, studi tentang Islam sampai saat ini masih secara general dibahas dalam konteks Islam di dunia Arab. Banyak universitas yang menyelenggarakan studi Timur Tengah yang disatukan dengan studi Islam. Sebagai contoh, di Universitas Indonesia, terdapat Program Studi Timur Tengah dan Islam; di University of Edinburgh-Skotlandia terdapat Islamic and Middle Eastern Studies; juga di George Mason University, Virginia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dunia Barat masih mendiskusikan masyarakat Muslim dengan mengarahkan pandangan ke kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.

Cara pandang ini, dalam beberapa hal masih menunjukkan relevansinya, karena memang Jazirah Arab yang berada di kawasan Asia Barat, memang rumah tempat lahir dan tumbuh agama Islam. Namun, jangan dilupakan kawasan ini juga tempat lahir agama Yahudi dan Kristen. Kondisi multikultural di kawasan dunia Arab, sering diabaikan. Sebaliknya masyarakat dunia sering memandang Islam dan Arab dua sisi koin. Dampaknya, banyak yang terjebak pada pandangan bahwa ekspresi dan atribut keislaman *apple to apple* dengan ekspresi dan atribut kearaban. Islamisasi sering juga dianggap secara mengkhawatirkan sebagai arabisasi.

Pandangan Islam yang masih sangat terarah ke dunia Arab, meminggirkan fenomena masyarakat Muslim di kawasan lain. Seperti telah dijelaskan, populasi muslim terbanyak di dunia berada di Indonesia, yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Memang wilayah Asia Tenggara ini, oleh sejawaran Asia Tenggara asal Selandia Baru, Anthony Read, ditulis sangat jauh dari pusat-pusat peradaban. Menurut Reid (2014), keterasingan wilayah ini menjadikan studi tentang Asia Tenggara masih sangat sedikit. Terlebih lagi studi tentang Islam di Asia Tenggara (Helmiati, 2015)

Tulisan ini, seperti tercantun pada judulnya, "Warna Islam Asia Tenggara menawarkan alternatif narasi tentang dunia Islam. Dalam konteks dunia Islam yang multikultural Asia Tenggara dengan 'kantong-kantong' wilayah berpenduduk Muslim, memperlihatkan wajah yang berbeda dengan 'wajah' kehidupan Muslim di kawasan lain. Masyarakat Muslim di Asia Tenggara memperlihatkan kekhasan praktik-praktik beragama Islam. Kondisi ini memberikan warna bagi wajah kebudayaan masyarakat muslim dunia.

Berangkat dari konsep warna Islam Asia Tenggara yang berbeda dengan warna Islam di wilayah asalnya, tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, yaitu untuk menjelaskan bagaimana Islam telah mewarnai kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Tujuan kedua, menjelaskan bagaimana Islam Asia Tenggara memberikan warna bagi wajah dunia Islam. Secara berturut-turut tulisan ini memaparkan "Islam sebagai lapisan kebudayaan di Asia Tenggara, keberadaan Islam dan muslim di Negara-negara Asia Tenggara, dan karakteristik masyarakat muslim Asia Tenggara.

Islam sebagai Lapisan Kebudayaan di Asia Tenggara

Penyebaran Islam sebagai gerakan ekspansi (?)

Islam tumbuh di Jazirah Arab. Namun, sejak awal perkembangannya, Islam disebarluaskan oleh pasukan-pasukan muslim ke luar batas wilayah Jazirah Arab. Dalam catatan sejarah penyebaran Islam baik di wilayah-wilayah Jazirah Arab hingga ke berbagai kawasan di Asia Barat, menembus wilayah Asia Selatan, wilayah Afrika, hingga Eropa, Islam disebarluaskan secara ekspansif.

Dalam konteks pertumbuhan awal Islam, dikenal istilah *Fathu Makkah*, /Fathu Makkah/ yang diartikan 'penaklukan Makkah', yang menggambarkan bagaimana eksistensi Islam di tempat kelahirannya dilakukan dengan kekuatan pasukan. Meskipun dalam peristiwa *Fathu Makkah* ini tercatat tidak ada pertumpahan darah, namun narasi ekspansi ini terbaca. Demikian juga, pada peristiwa ditaklukkannya Konstantinopel oleh pasukan Mehmet II, Sultan Turki Osmani generasi ketujuh ini bergelar "Al Fatih yang berarti 'Sang Penakluk'.

Kekuatan ekspansi pasukan muslim yang telah mengubah wajah dunia ditulis oleh Kennedy (2007) dalam karyanya berjudul "The Great Arab Conquests: How The Spread of Islam Changed the World We Live In". Dalam kata pengantarnya Kennedy menyampaikan bahwa memang ada perdebatan tentang istilah 'fath' Dalam terjemahan singkat, 'fath' disepadankan dengan istilah bahasa Inggris 'conquest' atau dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata 'penaklukan'. Kemudian dalam terminologi berbahasa Inggris, 'conquest' berarti penaklukan atau pengambilalihan suatu wilayah. Arti ini sering secara ekstrim dibayangkan berupa penyerangan, pengerahan pasukan militer, kekerasan, dan penggunaan senjata.

Dalam contoh 'Fathu Makkah, sebenarnya tidak terjadi penyerangan pengertian 'fathu' dalam konteks kekerasan dan penyerangan. Juga banyak contoh penaklukan pasukan muslim dengan damai di banyak wilayah. Bahkan beberapa wilayah di pegunungan Iran, Afrika Utara, dan Spanyol, takluk pada penguasa muslim dengan tanpa wilayahnya didatangi oleh pasukan muslim. Dengan demikian, istilah penaklukan tidak selalu dalam pengertian yang pengerahan pasukan militer.

Secara etimologi 'fath' berasal dari akar kata f-t-h, yang bermakna pembukaan (2007:7). Akar kata yang sama membentuk satu nama surat di dalam Al-Qur'an yaitu surat 'Al-Fatihah', yang berarti surat pembuka. Dalam konteks penyebaran agama Islam, 'fathu' ini juga sering diartikan 'pembukaan' wilayah baru. Demikian catatan penyebaran agama Islam di wilayah asalnya, hingga Islam menyebar ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab, ke Eropa, Afrika, ke Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur.

Demikian catatan sejarah tentang penyebaran agama Islam di seluruh Jazirah Arab hingga menembus batas wilayah menuju Selatan dan Barat, yang sering dikaitkan dengan terminologi "penaklukan". Namun berbeda dengan penyebaran Islam ke wilayah Asia Tengah. Bagaimana penyebaran agama Islam ke wilayah Asia Tenggara? Paparan berikut akan menjawab pertanyaan tersebut.

Penyebaran agama Islam di Asia Tenggara

Kajian tentang penyebaran agama Islam di Asia Tenggara sering berkisar pada perdebatan tentang kapan dan siapa yang menyebarkannya. Banyak teori telah diungkapkan, antara lain yang teori India atau teori Gujarat. Penulis menerima kesemua pandangan itu dengan kritis dan berargumentasi bahwa memang masuknya Islam tidak dalam satu titik, namun dari berbagai titik dan berbagai waktu. Islam datang dari berbagai titik perjalanan para pelayar muslim. Kesemua teori telah menunjukkan argumentasinya dengan menyertakan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan. Menerima kesemua argumentasi itu juga bersandar pada bukti-bukti yang memang ada dan juga kenyataan keragaman praktik keagamaan Islam di Asia Tenggara.

Penulis berpandangan bahwa penyebaran Islam sebenarnya memperlihatkan proses bercabang-cabang. Selain dari satu titik yaitu dari kota Makkah dan Madinah ke berbagai penjuru dunia, dalam perjalanannya setiap cabang yang dimasuki Islam membentuk percabangan penyebaran yang baru. Di beberapa titik, penyebaran itu terhenti, karena banyak wilayah budaya dijaga ketat oleh masyarakatnya untuk tidak dimasuki pengaruh ajaran Islam. Situasi globalisasi,

meliputi transfer pengetahuan, keyakinan, perdagangan, senjata, hingga gaya hidup, sebenarnya telah terjadi dalam proses penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Asia Tenggara.

Demikian juga tentang siapakah yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara, tulisan ini berpandangan bahwa Islam menyebar dengan aktor-aktor pembawa yang tidak homogen, melainkan heterogen. Aktor-aktor yang menyebarkan agama Islam, dalam paradigma globalisasi pun bergerak secara simultan dan paralel. Empat globalizers, mengutip Chanda di dalam "Bound Together" (2007), yaitu pedagang, pendakwah, petualang, dan prajurit. Kesemuanya aktor tersebut adalah agen-agen perubahan yang membawa sistem nilai baru dan masing-masing menorehkan sejarah kepada segmen dari misi dakwahnya masing-masing.

Lapisan kebudayaan Asia Tenggara

Biasanya buku-buku sejarah Indonesia dan juga Asia Tenggara berhenti pada teori-teori kedatangan Islam. Namun, sering kali para penulis sejarah melupakan bahwa proses penyebaran kebudayaan tidak memasuki ruang-ruang kosong dan tidak berkebudayaan. Islam dikenalkan kepada masyarakat Asia Tenggara, yang telah terlapisi dalam proporsi yang berbeda-beda dengan kebudayaan yang datang sebelumnya. Masyarakat di wilayah Asia Tenggara, pada umumnya telah menerima dan mengembangkan kebudayaan dari dua agama besar, yaitu Hindu dan Budha, yang dibawa masuk dalam silang budaya India--Asia Tenggara. Di beberapa titik wilayah yang agak terisolir, beberapa masyarakatnya tidak mendapat pengaruh kebudayaan India ini. Mereka meneruskan tradisi lokal nenek moyang mereka. Keragaman akibat perbedaan kondisi lapisan kebudayaan ini akan menghasilkan proses pertemuan kebudayaan yang beragam pula.

Setiap kelompok masyarakat di wilayah yang sangat luas dan memiliki perbedaan kondisi geografis serta perbedaan pengalaman berkebudayaan menunjukkan keragaman dalam menerima Islam. Beberapa kelompok masyarakat menerima Islam dan memasukkannya menjadi sendi-sendi kehidupan mereka. Di beberapa kelompok lain, Islam dipadukan dengan kebudayaan dari agama sebelumnya, yaitu Hindu dan Budha. Kepada kelompok ini sering dilemparkan tuduhan melakukan sinkretisme praktik agama Islam dengan praktik agama sebelumnya. Sebenarnya sinkretisme juga dilakukan oleh berbagai masyarakat yang berkebudayaan lokal, yang tidak tersentuh oleh kebudayaan Hindu Budha. Keragaman budaya lokal dan sikap serta karakter masyarakat Asia Tenggara dalam meresepsi Islam telah membentuk mosaik kehidupan beragama dan berkebudayaan di masyarakat Asia Tenggara.

Keberadaan Islam dan Muslim di Negara-negara Asia Tenggara

Dalam pergantian abad yang panjang, Islam menjadi agama yang diterima oleh mayoritas etnis Melayu, dan etnis lainnya di wilayah Indonesia. Selanjutnya bersamaan dengan proses mengakar dan bertumbuhnya keislaman masyarakat Asia Tenggara, hadir bangsa-bangsa Barat, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda, dalam gerakan kolonialisme yang membawa juga beragam agama Kristen menjadi lapisan baru bagi masyarakat Asia Tenggara.

Islam di kawasan Asia Tenggara hanya menjadi agama mayoritas di tiga wilayah utama yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun Indonesia yang berpenduduk muslim 231 juta jiwa (87% dari total populasi 277 juta jiwa), telah menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Di tiga negara kantong muslim di Asia Tenggara, agama Islam menempati posisi dan peran penting, terutama dalam perikehidupan masyarakat Melayu. Di Malaysia dan Brunei Darussalam, identitas Melayu tidak dapat dipisahkan dari identitas Islam. Seseorang non-Muslim beretnis di luar Melayu yang memeluk agama Islam, dianggap sebagai orang Melayu. Di delapan negara lainnya, yaitu Filipina, Singapura, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, Islam menjadi agama minoritas.

Karakteristik Masyarakat Muslim Asia Tenggara

Tentang karakteristik masyarakat Muslim Asia Tenggara, tulisan Anthony Read, merupan sumber rujukan yang relatif paling lengkap. Menurut Reid, masyarakat Asia Tenggara memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka terbaca sebagai satu kesatuan etnis yang khas secara regional.

Warna Islam Asia Tenggara merupakan tulisan yang mengajak pembaca untuk melihat wajah Islam yang universal sekaligus regional dan partikular. Islam memang agama yang universal. Kesatuan iman dan praktik ibadah yang berlaku sama bagi setiap pemeluk agama Islam di dunia manapun. Namun, apabila kita lebih detil melihat, dalam praktik

beragama ini, masyarakat muslim tidaklah seragam. Berbagai praktik beribadah ini dilapisi oleh kebiasaan atau praktik budaya yang dari agama atau kepercayaan di masing-masing kesatuan budaya itu.

Alih-alih membuat kategorisasi dan periodisasi, sebagaimana para teoretis objektif lainnya bekerja untuk menjelaskan fenomena kebudayaan, tulisan ini tidak memberikan data baru tentang kategorisasi dan periodisasi. Namun, tulisan ini mengajak pembaca untuk tidak sekedar melihat arus kedatangan Islam dari negara asalnya. Dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai episentrum dari penelitian dan diskusi tentang "Islam di Asia Tenggara" kita akan mendiskusikan bagaimana Islam diresepsi, dipersepsi, dan diaktualisasikan secara beragam oleh masyarakat di Asia Tenggara. Keragaman masyarakat Asia Tenggara, baik dari sisi kebudayaan lokal yang dikembangkan, kebudayaan asing yang juga telah melapisi, kedekatan dan interaksi dengan aktor-aktor pembawa ajaran Islam, menjadi faktor yang mewarnai ekspresi keislaman di masyarakat Asia Tenggara. Dengan demikian juga ekspresi keislaman masyarakat Asia Tenggara juga menjadi mosaik dari keragaman ekspresi keislaman di dunia Islam.

Penutup

Islam Asia Tenggara, selain mewarnai kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara, juga memberi warna dalam kehidupan masyarakat Muslim di dunia. Islam Asia Tenggara dipeluk oleh umatnya dalam keragaman pengalaman bertemu dengan sistem keyakinan dan agama. Islam pun didudukkan dalam posisi dan peran yang berbeda-beda di negara-negara berpenduduk muslim terbesar di Asia Tenggara. Muslim di Asia Tenggara berpengalaman dalam kehidupan multikultural dan saling toleransi dalam keragaman.

Menutup tulisan ini, saya ingin menyampaikan hikmah dari Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT bersumpah bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Jika Allah berkehendak, tentulah mudah bagi-NYA menciptakan yang seragam dan homogen. Namun yang kita saksikan ciptaan Allah sangat beragam dan keragaman itu adalah *Sunnatullah* yang berjalan. Warna Islam di Asia Tenggara adalah mosaik dari keragaman yang menjadi *sunnatullah* itu.*

Referensi

- Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama; Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.
- Azra, Azyumardi. Perspektif Islam di Asia Tenggara. Penerbit: Yayasan Obor Indonesia.
- Azra, Azyumardi. (2007) *Renaissance Islam Asia Tenggara: sejarah wacana dan kekuasaan*.
- Ibrahim, Arfah. (2018). *Islam in Southeast Asia*. Ar Raniry International Journal of Islamic Studies.
- Chanda, Nayan (2007). *Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers and Warriors Shaped Globalisation*. Connecticut: Yale University Press.
- Dhofier, Zamakhsyari (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Giddens, Anthony (2002). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge
- Hamka (2016). *1001 Soal Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani
- Shihab, M. Quraish (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati
- Umar, Nasaruddin (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Quanta
- Umar, Nasaruddin (2019). *Geliat Islam di Negeri Non-Muslim: Sebuah Catatan Perjalanan*. Jakarta: Alvabet

ADE SOLIHAT adalah dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) sejak 2005. Di bidang pengajaran, mata kuliah yang diampu pada jenjang S1 adalah Pranata Arab, Kapita Selekta Dunia Arab, Bahasa Turki, dan Penulisan Ilmiah. Pada jenjang S2, mata kuliah yang diampu adalah Dinamika Kebudayaan Islam di Asia Tenggara dan Dinamika Gender di Asia Tenggara. Ade juga mengajar di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI untuk mata kuliah Perubahan Sosial Budaya di Timur Tengah dan Seminar Isu-Isu Islam Kontemporer. Di bidang penelitian dan

pengabdian masyarakat, la fokus pada tema-tema Antropologi Budaya, (terutama terkait tema diaspora, identitas, dan produksi budaya) dan Kajian Islam di Kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ade memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S.) dari jurusan Asia Barat Fakultas Sastra UI; Master of Art (M.A) dari jurusan Sosiologi-Antropologi untuk Negara-negara Timur Tengah dan Islam, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Marmara-Istanbul, Turki, dan; Doktor bidang Antropologi Budaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Aktivitas di luar kampus, antara lain: Ketua Himpunan Alumni-Turki (Altur); Wakil Ketua Poetry Reading dan Writing Society of Indonesia (Komunitas pembaca dan penulis puisi, yang terdiri dari beberapa Guru Besar dan Alumni UI); Pengurus Bidang Sosial Budaya Majelis Alimat Indonesia (Organisasi Muslimah Ilmuwan Indonesia) pimpinan Prof. Dr. Amany Lubis, M.A.; Pengurus Bidang Sosial Budaya Institut Literasi Nasionalisme (ILNAS), pimpinan Dr. Wahidah R. Bulan; M.Si. dan Dewan Pakar Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia (RPI), pimpinan Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si. Karya akademis Ade Solihat dapat ditelusuri di website adesolihat.com.

Paradigma Islam Nusantara dan Corak Islam ASEAN

Nanda Khairiyah

Paradigma Keilmuan Islam Nusantara

“Islam Nusantara merupakan konsep yang sarat warna politik”. Argumen ini yang kerap muncul di media. Pernyataan di atas tak dipungkiri bahwa memang Islam Nusantara tak lepas dari bayang kekuatan politik saat itu sehingga makna terlebih paradigma mengenai Islam Nusantara menjadi kabur. Islam Nusantara sebagai sebuah warna baru dalam memahami Islam, hal inilah yang kiranya diusung dalam Muktamar 2015. Namun lebih matang daripada itu, Islam Nusantara mencoba mengangkat keilmuan serta paradigma ber-Islam cara Jawa (baca: Nusantara) dalam latar kesejarahan masuknya Islam ke Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui cara perdagangan. Pada masa itu, Islam tak lantas berkembang hingga terIslamkan hampir seluruh wilayah di Indonesia seperti hari ini. Perjalanan Islam di abad ke-7 adalah perjalanan pedagang-pedagang Islam yang mayoritas berasal dari tanah Arab (Timur Tengah). Warna Islam yang kala itu hadir pun beragam mulai dari Syiah hingga Ahlusunnah wal Jama’ah. ‘Islam lahir dari aktivitas perdagangan’ kalimat ini yang populer melekat dalam cerita sejarah kelslaman, namun tak semua hal ini benar. Bukti bahwa Islam baru mulai berkembang di abad ke-14 dengan munculnya Walisongo adalah bukti bahwa giat dagang di abad ke-7 hingga 13 tidak mampu mengIslamkan Nusantara.

Munculnya walisongo sebagai sebuah struktur massif kala itu dinilai begitu efektif dalam mengIslamkan Nusantara. Perjuangan walisongo yang kita rasakan hingga kini adalah hasil perenungan tentang bagaimana strategi Islam yang dapat diterima penduduk Nusantara kala itu. Corak masyarakat Nusantara yang memang bereda dengan Timur Tengah adalah sebuah berkat yang Allah berikan sehingga dinilai cocok dengan ajaran Islam yang Rahmatan lil ‘Alamiin. Oleh karenanya, kecerdasan strategi walisongo yang diikuti oleh para Ulama inilah yang mampu membalikkan ‘agama ibu’ Nusantara seolah melebur, menghangat dengan Islam.

Ulama Nusantara pasca walisongo pun tak lantas berkeras membawa ajaran Islam ala Timur Tengah, namun mampu beradaptasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam perilaku social masyarakat Nusantara. Sehingga sebetulnya, tipologi Islam Nusantara bukanlah hal baru untuk dibicarakan hari ini, karena tipologi Islam Nusantara telah hadir dalam nilai-nilai masyarakat kala itu dalam memahami Islam. Islam lahir lewat budaya Nusantara yang mengakar di dalam hati, pikiran dan perilaku masyarakat Nusantara.

“lalu kenapa Islam Nusantara, dan bukan Islam Indonesia?” Pertanyaan semacam ini kerap muncul dalam mengkritisi makna Islam Nusantara. Dalam hal ini, penulis mencoba mengembalikan lagi pemahaman kesejarahan kita terkait negeri ini. Tanah Indonesia yang kini besar dengan segala kekayaan di dalamnya, dahulu, ketika belum ada Batasan dalam bernegara dan berbangsa tidaklah bernama Indonesia. Kekayaan Indonesia kala itu sangatlah besar, luas hingga kerajaan-kerajaan yang berpusat di Indonesia penyebarannya dapat dirasakan terus hingga negara-negara ASEAN sehingga disebut dengan nama Nusantara. Maka, ketika penulis menyebut Nusantara berkali-kali yang dimaksud tidaklah Indonesia seperti yang hari ini kita pahami, namun merujuk pada penyeberan kekuasaan Majapahit dan bahkan Sriwijaya.

Paradigma Islam Nusantara akhirnya dikerucutkan menjadi keilmuan baru agar penulis dan pembaca ketika berhadapan dengan siapapun akan memahami dimana kaki berpijak. Sejarah bagi penulis adalah cara pandang agar kita pahami siapa jati diri kita termasuk tentang kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman kedepan. Islam Nusantara yang merupakan leburan ajaran Islam dan budaya Nusantara adalah sebuah cara memahami Islam dengan santun, ramah yang kedua hal ini adalah modal dasar manusia dalam berinteraksi. Maka ketika konsep paradigma Islam

Nusantara ini ditawarkan kepada dunia, penulis yakin akan menghapus sedikit demi sedikit ‘momok islamophobia’ yang kini masih mewarnai masalah sosial manusia global.

Ideologi Aswaja

Ahlussunah Wal Jama’ah (Aswaja) seperti yang kita pahami bersama adalah ideologi dasar Nahdlatul Ulama serta para Ulama terdahulu. Aswaja termaknai sebagai perilaku yang di ajarkan Rasul serta para sahabatnya. Lebih dari pada itu Aswaja merupakan titik tengah diantara *tekstual* nya Kaum Jabariyah dan Khawarij dengan *liberal* nya kaum Qadariyah dan Mu’tazilah. Titik tengah atau *wasathi* bermakna kesucian dan keadilan, maka Aswaja adalah sebuah kesucian dan keadilan diantara pemikiran pemikiran Islam yang kerap ‘nganan dan ngiri’. Islam sendiri lahir bukan sebagai agama pertama, namun Islam sejak lahirnya menyatakan diri sebagai agama penyempurna dari *kakunya* Yahudi dan *bebasnya* Nasrani. Islam memiliki ajaran tengah tentang bagaimana memaknai hubungan kepada Tuhan, Manusia dan alam.

Aswaja kemudian berlanjut dalam tinjauan fiqih yang menyatakan diri sebagai jalan tengah antara 2 hal berlebihan lalu mengambil jalan bijak di tengah. Madzhab Syafi’i misalnya yang mayoritas menjadi pegangan Ulama-Ulama Nusantara dipilih karena memiliki nilai-nilai ajaran tengah yang dapat diterima. Namun 3 madzhab lainnya tidak kemudian ditinggalkan dan dianggap ‘virus’ oleh NU. Penerimaan inilah esensi dari makna Aswaja dalam tinjauan fiqih.

Ulama Nusantara yang memang menjalani ajaran Islam dengan cara sederhana dan tak lepas dari budaya lokal, terus memberikan corak dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara. Aswaja tidak bertentangan dengan nilai budaya Nusantara yang dulu masih lekat diwarnai oleh ajaran agama lokal. Islam dengan konsep Aswaja adalah Islam yang fleksibel tanpa kehilangan jatidiri Aqidah dalam proses perkembangannya.

Aswaja dan kerangka jalan tengah (*Wasathi*) jangan kemudian dimaknai sebagai sisi yang berbeda dari sisi kanan dan kiri. Ia adalah bagian dari keduanya dalam sebuah ruang yang sama. Wasath adalah perilaku ketika kita berfikir ‘terlalu ngiri’ maka kembalilah lagi ke tengah, begitupun sebaliknya. Maka Aswaja tidak berarti meniadakan Jabariyan dan Khawarij. Aswaja tidak berarti meniadakan Qadariyah dan Mu’tazilah. Aswaja adalah memahami semua ideologi namun berperilaku dengan adil antara kesemuanya.

Ahlussunah Wal Jama’ah seperti halnya konsep lain juga tak lepas dari kritik atas kelembahannya, namun kelemahan ini penulis kira hanya perlu menjadi acuan saja tanpa perlu meniadakan Aswaja dengan konsep luhur ajarannya. Bagi orang-orang yang memahami paham Aswaja, tak jarang mereka akan dianggap ‘plin-plan’ tak memiliki pendirian. Dianggap bermain dari 1 madzhab ke madzhab lain, bermain dari 1 pandangan ke pandangan lain meski yang sebenarnya adalah proses mencari titik tengah (baca: titik temu) dalam satu hal. Oleh karenanya, bagi orang-orang Aswaja perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap perilaku tengah agar tak lantas menjadi lemah di antara kedua belah pihak.

Sejarah Islam Nusantara

“Islam Nusantara adalah Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy’ari, fiqih mazhab Syafi’i, dan tasawuf Ghazali) menumbuhkan karakter wasathiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya akan warisan Islam (Islamic Legacy) menjadi harapan renaissans peradaban Islam global.” (Azyumardi Azra)

Membincang Islam Nusantara adalah soal latar kesejarahan dan tidak untuk diartikan sebagai ideologi baru dalam berIslam. Namun, dalam *paragraph* awal ini penulis ingin menyamakan persepsi terkait diksi Nusantara dalam Islam Nusantara. Kata Nusantara sebagaimana penulis kutip dalam kolom opini di Republika.co.id berjudul Islam Nusantara tidak dimaknai sebagai geografi Indonesia saat ini. Nusantara adalah gugusan kepulauan atau benua maritime yang mencakup tidak hanya Kawasan Indonesia, namun juga wilayah Malaysia, Thailand, Selatan, Singapura, Filipina Selatan dan Champa (Kambodja-Vietnam).

Menelusik lebih jauh kata Nusantara yang penulis nukil dalam artikel dari kompas.com berjudul Sejarah Nama Nusantara menyebutkan bahwa kata ini sudah hadir sejak abad ke-14 atau tepatnya di 1336 saat Raja Majapahit mengucapkan Sumpah Palapa dan menyebut kata Nusantara di dalamnya. Oleh karenanya ketika kita menyebut kata

Nusantara maka maknailah sebagai teritori (geografi) lama yang kala itu belum tercetus tentang adanya negara bangsa. Aturan teritori hari ini membatasi siapapun untuk melangkah sehingga membatasi kerangka berfikir akademisi hari ini dalam mempelajari sejarah. Masyarakat awam dibuat percaya bahwa tidak ada korelasi atas zaman kenabian Rasulullah SAW dengan dinamika Islam di Nusantara. Cerita lama tentang banyaknya Ulama Nusantara saling bepergian, berkunjung, hingga menetap disuatu tempat membuktikan mudahnya kala itu untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan. Sebagai contoh dapat ditemui hari ini makam Syech Abdus Samad al Palimbani yang hidup di abad ke-18 ditemukan di Patani, Thailand Selatan, adalah bukti tingginya dinamika ulama kita di zaman itu.

Nusantara menurut teori terletak di antara tiga lempeng dunia yang potensial menimbulkan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibat lapisan kulit bumi Nusantara lalu hasilnya membentuk hamparan-hamparan luas yang dikenal sebagai paparan Benua Sunda dengan barisan gunung berapi dan pegunungan panjang yang pada masa purbakala disebut sebagai *Swetadwipa* atau *Lemuria*.

Dalam peta geografi modern, Nusantara terletak di persimpangan jalan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang dalam jalur perdagangan tradisional menghubungkan Teluk Benggala dan Laut Cina. Maka, tidak berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa Nusantara dulu, adalah wilayah ASEAN hari ini. Negara-negara di ASEAN seperti yang kita pahami memiliki banyak kesamaan dalam hal ciri fisik masyarakatnya, keagamaan, sosial hingga budaya. Maka, Islam Nusantara perlu dipahami sebagai bentuk kajian para akademisi yang tertarik menelisik tentang Islam di Nusantara (ASEAN hari ini).

Islam di ASEAN

Beberapa catatan sejarah memiliki versinya masing-masing dalam mencatat masuknya Islam di negara-negara ASEAN. Azyumardi Azra dalam bukunya berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII mengataakan bahwa dinamika diskusi mengenai masuknya Islam di Nusantara sedikitnya perlu membahas dalam 3 masalah pokok, yaitu mengenai asal mula masuknya Islam, Pendakwah Islam yang berpengaruh kala itu, dan kapan sebenarnya Islam masuk ke Nusantara.

Teori awal terkait masuknya Islam di Nusantara adalah teori Gujarat yang dikemukakan oleh beberapa akademisi seperti Pijnappel, Snouck Hurgronje dan Moquette. Mereka menyampaikan hal yang sama bahwa Islam di Nusantara tidak berasal dari Persia atau tanah Arab, namun dari penjelajah Timur Tengah yang telah menetap di teritori baru yaitu Gujarat atau India lalu kemudian dibawa ke Nusantara.

Teori selanjutnya datang dari Thomas W. Arnold yang dalam bukunya menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arab mulai dari abad ke-7 dan 8. Teori ini dikatakan datang dari catatan Dinasti Tang yang menyebutkan bahwa Islam Nusantara hadir sejak akhir abad ke-6. Perlu dipahami bahwa masa hidup Rasulullah tercatat dari tahun 571 M (abad 6 hingga awal abad 7).

Catatan Dinasti Tang menjelaskan bahwa di sekitar tahun 628 Masehi, Sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ukasyah bin Mushin al Usdi masuk ke Sriwijaya dengan membawa surat dari Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada raja Sriwijaya kala itu. Surat tersebut menjelaskan tentang ajaran monoteis yang diusung oleh Islam dan memiliki kesamaan dengan bangsawan Kan-to-li. Catatan berikut menyebutkan ditemukannya surat yang ditulis oleh maharaja Sriwijaya kepada dinasti Umar bin Abdul Aziz agar mengirimkan Ulama ditanah Sriwijaya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Islam lahir di Nusantara tidak hanya berlandaskan hubungan *people to people* antara para penjelajah atau pedagan, namun masuk dalam hubungan *government to government* antara Raja Sriwijaya dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun begitu, Islam tidak lantas berkembang menjadi agama mayoritas penduduk ASEAN.

Peran Walisongo dalam mengIslamkan penduduk ASEAN memang tidak dapat dipungkiri. Hari ini, Islam menjadi mayoritas agama yang dianut dari negara-negara ASEAN. Berdasarkan yang penulis ambil dalam detik.com tentang data penduduk Islam di negara ASEAN tercatat bahwa Islam mayoritas di Indonesia dengan angka 87% dari total seluruh penduduknya. Malaysia mencatat sekitar 66% penduduknya beragama Islam. Sebanyak 75% dari populasi masyarakat Brunei Darussalam memeluk Islam. Tahun 2013 beredar artikel dari republika.co.id berjudul Muslim Asia Tenggara Mencari Identitas, menyebutkan bahwa 42% dari populasi ASEAN memeluk agama Islam.

Kesimpulan

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Islam Nusantara bukan ideologi baru yang hendak mengotakkan Muslim baik di Indonesia ataupun ASEAN. Islam Nusantara adalah kajian kesejarahan untuk membuktikan dinamika Islam di Nusantara dengan ciri khas Ahlusunnah Wal Jama'ah yang perlu diterapkan dalam mencari solusi permasalahan global hari ini. Islam Nusantara bukan soal Islam di Indonesia namun adalah perkembangan Islam di negara-negara ASEAN dimana sejarah menyebutkan bahwa pemaknaan Nusantara tidak hanya Indonesia hari ini. Islam hadir di Nusantara tidak semuda yang hari ini kita temui dalam buku pelajaran sejarah. Islam telah hadir dan memiliki korelasi sejak hadirnya Rasulullah SAW di abad ke-6.*

Referensi

- Sejarah Nama Nusantara (kompas.com) diambil pada 06 Desember 2022
- Islam Nusantara (1) | Republika Online diambil pada 06 Desember 2022
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islammancanegara/12/01/17/lxy1jiMuslim-asia-tenggara-mencari-identitas>, diunduh pada tanggal 10 Juli 2013.
- Arnold, Thomas W (1950). *The Preaching of Islam*. London. Ter.. Nawawi Rambe, Widjaya (1981). *Sejarah Da'wah Islam*. Jakarta
- Azra, Azyumardi (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan
- Clifford, Geertz. (1981). *Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Jawa.
- Cowan, C.D. and O.W. Wolters (1961). *Nineteenth Century Malaya: Origins of British Political Control*. London: Oxford University Press.
- Dardiri, Helmiati, dkk (2006). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: kerjasama ISAIS dan Alaf Baru.
- Drakard, Jane (2003). *Sejarah Raja-raja Barus, Dua Naskah Dari Barus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasymi, A (Peny.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)
- Helmiati (2014). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pranowo, Bambang (2009). *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Bafadhal, Fadhal & Saefullah, Asep (2005). *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara 1 (Cerminan Budaya Bangsa)*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Sunyoto, Agus (2016). *Atlas Wali Songo : buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah*. Depok: Pustaka liman

NANDA KHAIRIYAH adalah Ketua Bidang Pembinaan Seni dan Budaya Islam MUI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Lembaga Pengkajian SDM NU Jakarta Pusat, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Pusat serta Mahasiswa Doktoral di Universitas NU Indonesia. Ia juga *founder* channel youtube Info Kerukunan yang aktif membahas persoalan kerukunan umat beragama di Jakarta. Ia merupakan akademisi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Aqidah Al Hasyimiyyah untuk keilmuan Komunikasi Penyiaran Islam atau Dakwah. Kiprahnya dalam penulisan melalui beberapa jurnal ilmiah dan prosiding baik nasional ataupun internasional. Kontribusi tulisannya juga telah terbit melalui buku tematik G20 *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* yang diinisiasi oleh Rumah Produktif Indonesia dan diterbitkan Perpusnas Press. Saat ini tengah aktif menyusun penelitian disertasi tentang naskah Islam Klasik Betawi berjudul Pecenongan karya Muhammad Bakir yang akan dipersembahkan bagi masyarakat Betawi untuk merubah stigma Suku Betawi selalu jauh dari pendidikan dan literasi. Giatnya dalam penulisan juga dibuktikan lewat buku Sastra berjudul Senja yang terbit ditahun 2020. Ia dapat dihubungi melalui email di : nanda.rifani.nr@gmail.com.

Penyebaran Islam di ASEAN

Fathu Khairiddin

Seorang atheis Will Durant pernah mengatakan, “Agama punya seribu jiwa, segala sesuatu jika sudah dibunuh ia akan sirna, kecuali agama. Agama sekiranya ia dibunuh seratus kali, akan muncul lagi dan kembali hidup setelah itu.” Sejarah mencatat bahwa peradaban manusia tidak terlepas dari doktrin agama dan agama tidak terpisahkan dari pemeluknya. Pemeluk agama memiliki pemuka yang disebut sebagai ulama dalam Islam. Penyetaraan gelar ulama tidak dapat dilakukan secara srampangan, semena-mena, tanpa ajar dan dasar. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, *al-‘ulama waratsatul anbiya’*, ulama merupakan pewaris para Nabi. Warisan Nabi tidak hanya ilmu agama, tetapi juga keistimewaan dan akhlak mulia terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi.

Ketika Rasulullah SAW telah wafat, para sahabat menjadi rujukan umat dalam setiap urusan, baik menyangkut agama, politik, dan sosial. Setelah sahabat tidak ada, generasi selanjutnya ialah tabi’in yang disebut juga generasi salaf, atau yang sering disebut salafus shalih. Dan setelah itu ulama mutaqqadimin. Mereka semua mendapat pengakuan langsung dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Predikat yang diberikan Rasulullah kepada generasi berikutnya ialah *ulama’i ka an-nabi bani isra’il* (ulama dari kalangan umatku seperti para Nabi di kalangan Bani Israil).

Dari pengakuan dan predikat yang dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad tersebut menegaskan keistimewaan ulama dari kalangan umat Nabi SAW yang sebanding dengan Nabi di kalangan Bani Israil. Dari petunjuk tersebut, tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti ulama yang merupakan pewaris para Nabi. Kriteria ulama yang dapat diikuti tentu saja yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad dan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya, tidak membuat kerusakan di muka bumi, mampu hidup berdampingan dengan sesama makhluk Allah SWT, dan lain sebagainya.

Stilah ulama sendiri merujuk kepada seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, menjadi teladan hidup bagi masyarakat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Ulama senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan dengan laku positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaan ulama mendatangkan rahmat, bukan laknat. Dakwahnya juga merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek.

Dalam hadits Riwayat Ad-Dailami dari Anas r.a, Rasulullah SAW bersabda: *ittabi’ul ulama’a fainnahum suruuhud dunyaa wamashaa biihul akhirah*. “Ikutilah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampu akhirat.” (HR Ad-Dailami) Hadits di atas tentu saja semakin memperkuat pengakuan Rasulullah terhadap para ulamanya. Namun, saat ini sebagian masyarakat tidak sedikit yang terjebak dengan simbol-simbol agama yang melekat melalui pakaian seseorang. Akibatnya, meskipun seorang itu tidak berilmu, bahkan secara perilaku dan ucapan tidak mencerminkan akhlak mulia, tetapi kerap diikuti sebagai seorang yang dianggap mengerti agama. Na’udzubillah.

Untuk menentukan siapa yang termasuk ulama, rujukannya adalah nash Al-Qur’an dan Hadits tentang ciri atau sifat ulama.

Pertama, paling takut kepada Allah. “Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama” (QS. Fathir: 28) karena ia dianugerahi ilmu, tahu rahasia alam, hukum-hukum Allah, paham hak dan batil, kebaikan dan keburukan, dsb.

Kedua, berperan sebagai “pewaris nabi” (*waratsatul ambiya’*). “Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi, yakni memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan Islam, seperti mengeluarkan fatwa, laksana bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi dan laut (HR. Ahmad).

Ketiga, terdepan dalam dakwah Islam, menegakkan ‘amar ma’ruf nahyi munkar, menunjukkan kebenaran dan kebatilan sesuai hukum Allah, dan meluruskan penguasa yang zalim atau menyalahi aturan Allah. Badaruddin Huskby dalam bukunya *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (1995) mengungkapkan definisi ulama menurut para Mufassir

Salaf, di antaranya, pertama, menurut Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Anas pun menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama.

Syekh Nawawi Al-Bantani yang berpendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang menguasai hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amal syari'at lainnya. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili berkata bahwa secara naluri ulama ialah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk mengubah hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Ulama memegang peran penting dalam kehidupan umat, mulai dari tempat bertanya tentang ajaran agama sampai kepada menyelesaikan problem masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ulama adalah figur-figur yang diidealisasikan oleh umat. Mereka adalah patron sosial, sosok yang diidealisasikan oleh kehidupan kultural.

Proses seseorang mendapat pengakuan sebagai ulama sesungguhnya tidak mudah. Ia harus melalui jalan panjang, berdarah-darah, dengan keringat dan air mata, di mana pada hakikatnya adalah pengujian yang berat dari masyarakat. Ada semacam seleksi sosial yang menyangkut mutu keilmuan, rekam jejak, dan integritas keberibadannya.

Ulama adalah tokoh masyarakat yang disegani. Ia menjadi tokoh utama dalam mengarahkan pendidikan baik pesantren yang diasuhnya ataupun masyarakat secara umum. Penyebutan ulama adalah gelar kehormatan. Mereka mempunyai rutinitas padat. Identitas ulama pada ranah sosial universal, tidak tunggal, ulama banyak merangkap peran. Ulama dianggap mampu menangani apa pun, dari mulai urusan remeh-temeh hingga urusan yang merepotkan. Dalam sosiologi kepemimpinan tradisional seorang ulama dicitrakan sebagai orang yang mengerti segalanya sekaligus mampu menangani semua permasalahan; ibarat seorang dokter. Sedangkan dalam kepemimpinan modern kita mengenal istilah *division of labour*, pembagian kerja. Setiap orang memegang perannya masing-masing. Seperti pembantu Presiden dengan kementerian-kementeriannya, dan di perusahaan dengan pembagian tugas kerjanya, semua itu diukur atas dasar kecakapan dan spesialisasi. Di sinilah perbedaan ulama dengan menteri, ulama dituntut tahu dan mengurus banyak hal, berbeda dengan kepemimpinan modern dalam hal ini kita bisa melihat contoh menteri, di mana satu orang hanya mengurus satu hal. Sehingga kita bisa mengkategorikan bahwa ulama itu multitasking.

Peran strategis ulama memang tidak boleh diabaikan. Hal ini mengingat posisi ulama sebagai pemimpin umat yang secara sinergis harus bersamaan dengan pemerintah dalam upaya menghadapi persoalan kebangsaan. Peran ulama bersama pemerintah diharapkan lebih fokus untuk mengatasi gejolak sosial dan ekonomi yang hari-hari ini belum sepenuhnya stabil.

Karena ulama adalah pewaris para nabi, maka di tangan merekalah umat Islam menggantungkan harapan. Bukankah baik tidaknya sebuah masyarakat Islam itu tergantung pada ulama? Di zaman era globalisasi dan modernisasi ini, peran ulama justru sangat penting untuk memberikan fatwa dan arahan kepada umat.

Seorang ulama sejati sudah pasti mengetahui tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga ia akan senantiasa sabar, bijaksana, berpikiran terbuka, toleran, mengayomi, menyejukkan, mencerahkan, tidak merasa paling benar sendiri, menyerukan persatuan dan kesatuan umat manusia untuk tujuan kebaikan, menyerukan semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, dan berbagai perilaku Qurani lainnya.

Agama sekarang ini berada pada posisi "dimanfaatkan" dan "bermanfaat". Agama dimanfaatkan ketika suatu kelompok tertentu bertindak, berbuat, dan berdalih atas nama agama demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya. Agama bermanfaat ketika agama benar-benar difungsikan sesuai dengan esensi dari nilai-nilai agama itu sendiri, sebagai sistem pengajaran yang mendidik, sebagai sistem sosial yang mensejahterahkan, dan sebagai ajakan yang menentramkan. Namun, kedua posisi itu tidak bisa dielakan dalam situasi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Memang, agama tidak berubah, tetapi agama dianut oleh masyarakat baik secara menyeluruh maupun individu dalam gerak sejarahnya terus mengalami perubahan, diberbagai dimensi sosialnya. Fenomena tersebut terjadi disemua lapisan pemeluk agama, agama apapun mengalami hal yang sama. Dengan demikian, ada pergumulan antara agama dan sosial, atau biasa kita kenal juga dengan istilah "peradaban".

Agama dari mulai kelahirannya (agama manapun), selalu berinstrument dengan kondisi sosialnya, di satu sisi agama membangun kebudayaan, di sisi lain agama berusaha membentuk peradaban. Bila ditatap dari perspektif sejarah, setiap agama memang membentuk dan membangun kebudayaan serta peradabannya sendiri. Ketika Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Yastrib, Kanjeng Nabi langsung mengganti nama kota Yastrib yang berarti "tanah gersang

berdebu” menjadi Madinah yang berarti “kota atau peradaban”. Artinya, Nabi Muhammad Saw ingin membangun dan mewujudkan peradaban dunia melalui makna kota Madinah, dengan kreatifitas peradaban masyarakatnya dan nilai-nilai Islam melalui petunjuk Ilahi.

Dengan demikian, secara alamiah agama mempunyai kemampuan untuk melahirkan peradaban (madinah atau tamaddun). Berarti agama dan peradaban dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, berdampingan dan bersamaan. Walaupun banyak orang menyangsikan bahwa agama dan peradaban adalah berbeda, mereka mencoba membuat distingsi (pembedaan), dengan konklusi, agama di satu sisi dengan peradaban di sisi yang lain.

Realitas hidup manusia menghendaki sesuatu yang operasional, tidak hanya berhenti pada ajaran-ajaran kaku. Agama memang tidak berubah, namun sekali lagi kita tekankan masyarakatnyalah yang berubah, pemeluknya yang berubah. Perubahan ini mau tidak mau mempengaruhi pula cara dan sikap keberagamaan mereka. Apalagi di era informasi serba terbuka, tidak sedikit dari mereka berguru pada google, youtube, facebook, twitter, dan sebagainya—seringkali memuat informasi atau penyampaian tidak berimbang. Dari hal tersebut, akan terjadi penguapan yang tidak bisa dikontrol apalagi dibatasi, setiap orang boleh menyampaikan sesuatu, dan dilakukan secara bebas, dengan cara; emosi, tanpa data, ujaran kebencian, dan ngawur. Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut merupakan masalah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

Islam dan dinamika sosial adalah sebuah proses mencari bentuk operasional agama yang sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan, walaupun dengan corak dan karakter pemikiran yang berbeda. Namun, tetap dilandasi dengan pijakan-pijakan, data, referensi yang ilmiah tanpa gegabah dalam mengambil kesimpulan dengan gambaran besarnya bagaimana Kitab Suci dan Rasulullah dalam menerjemahkan ajaran langit pada realitas bumi. Seluruh ulama yang tersebar di dunia khususnya se ASEAN adalah mereka yang menimba ilmu di Makkah, Madinah, Mesir, Iraq, Yaman, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan titik awal kemunculan Islam berasal dari Makkah. Umat Islam pun dengan membawa misi kenabian mereka kemudian tersebar ke seluruh pelosok dunia.

Penyebaran Islam terjadi dengan beragam cara. Jika kita melihat penyebaran Islam ke arah Selatan adalah penyebaran berbasis penaklukan. Berbeda dengan penyebaran Islam ke arah Asia yang berbasis kultur budaya, Islam masuk dengan penuh hikmat dan bersentuhan langsung dengan tradisi penduduk setempat yang dikenal dengan masyarakat Melayu pada waktu itu. Yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunai Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Sehingga orang-orang Asia pada umumnya setelah melihat keindahan Islam, ajaran-ajarannya yang penuh cinta dan keselamatan mereka kemudian memeluk Islam dengan suka rela tanpa paksaan. Hal inilah yang menyebabkan keislaman orang Asia sangat kuat dan kental, bahkan menjadikan salah satu negara di Asia yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia.

Sejak abad ke-17 M, Nusantara bisa dibilang banyak melahirkan putra-putra terbaiknya dalam bidang keilmuan Islam. Beberapa diantaranya bahkan masyhur di dunia Islam secara umum dan menjadi tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam literatur keilmuan. Sebut saja semisal Ismail Alkhalidy Alminangkabawi (1844). Berasal dari Simabur Tanah Datar, inilah ulama minang terawal di Mekah. Sampai saat ini karya beliau Kafayatul Ghulam terus dicetak ulang dipelajari di pesantren Asia Tenggara, dan masih ada beberapa karya lain. Di masa Paderi beliau berdakwah di pulau-pulau yang terletak di kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau (Kepri), Malaysia, dan lainnya. Inilah ulama Indonesia paling cemerlang di Mekah.

Syekh Ahmad Khathib Al Minangkabawi Rahimahullah lahir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada 6 Zulhijah 1276 H (1860 M). Ia menutup usianya di Mekah pada 8 Jumadilawal 1334 H (1916 M). Dia menjabat sebagai imam mazhab Syafii di Masjidil Haram. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Syaikh Nawawi al-Bantani. Beliau berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Makkah, seperti Syaikh Khâtib al-Sambasi, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Abdul Hamid Daghestani, Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syaikh Ahmad Dimiyati, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Muhammad Khatib Hambali, dan Syaikh Junaid Al-Betawi. Namun, guru yang paling berpengaruh adalah Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syaikh Junaid Al-Betawi dan ulama terkemuka Makkah Syaikh Ahmad Dimiyati.

Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud juga menimba ilmu ke Makkah. Seorang ulama termasyhur di Asahan menganjurkannya belajar ke sana karena menilai ia memiliki talenta menjadi ulama. Begitu juga dengan Syeikh Muhammad Mukhtar Al-Bughri yang belajar ke Masjidil Haram, Makkah.

Selain memperdalam agama Islam di Makkah, ada pula ulama yang belajar selain ke Makkah. KH Abdullah bin Nuh dari Cianjur pernah menimba ilmu di Universitas al Azhar, Kairo, Mesir karena kemahirannya berbahasa Arab. Dia pergi atas ajakan gurunya Sayyid Muhammad bin Hasyim. Syeikh Abdur Rauf Singkili, Syeikh Nawawi bin Umar Banten, Syeikh Mahfudz bin Abdullah bin Abdul Mannan Termas-Pacitan dan masih banyak ulama-ulama lain.

Menurut Johan Eisenberger dalam disertasinya yang berjudul *Indie and de Bedevaart naar Mekka*, penguasa tradisional nusantara pada abad ke-18 memang memiliki kebiasaan dan selalu berusaha mengirim para ulamanya ke Makkah. Salah satu ulama cemerlang juga adalah Syekh Yasin al-Fadani, lahir, besar, berkarir, dan wafat di Makkah, dari kedua orang tua yang berasal dari Nusantara, tepatnya dari Padang, Sumatera Barat. Syekh Yasin Padang berkebangsaan Saudi Arabia. Ayahnya, Tuan Isa bin Udik, adalah generasi pertama yang hijrah dari Padang ke Makkah pada akhir abad ke-19 M.

Syekh Yasin Padang dikenal sebagai ulama besar dunia Islam dalam bidang hadits dan asânid (sanad) pada paruh kedua abad ke-20 M. Beliau mengajar di Masjidil Haram dan menjadi salah satu pemuka ulama terbesar di sana, sekaligus mengampu Madrasah Dâr al-'Ulûm al-Dîniyyah, sebuah institusi pendidikan keilmuan agama Islam terkemuka di Makkah.

Ada banyak julukan kemuliaan yang disematkan kepadanya, seperti 'Ilmud Dîn (pelita ilmu pengetahuan agama), al-muhaddits (guru besar hadits), al-'allâmah (seorang yang kapasitas keilmuannya di atas rata-rata), musnidud dunyâ (mata rantai periwayatan hadits pada zamannya), dan lain-lain. Karena itu, tidaklah mengherankan jika murid-murid Syekh Yasin Padang adalah para ulama sentral dari berbagai pelosok dunia Islam. Syekh Yasin Padang terhitung sebagai ulama besar terakhir asal Nusantara yang berkarir di Haramain, karena setelah kewafatan beliau (1990 M), belum muncul lagi sosok ulama besar dari Nusantara yang karirnya cemerlang di Tanah Suci.

Karya pemikirannya lahir lebih dari seratus buah, kesemuanya ditulis dalam bahasa Arab dan mengkaji pelbagai bidang keilmuan Islam, mulai dari ilmu tauhid (teologi Islam), fikih (yurisprudensi Islam), ushul fikih (filsafat yurisprudensi Islam), balaghah (retorika), manthiq (logika), hadits, dan utamanya dalam bidang ilmu transmisi intelektual atau ilmu sanad ('ilm al-asânid wa al-tsabat wa al-ijâzah). Dalam rentang sejarah keilmuan Islam selama kurun waktu 14 abad ini, bisa dikatakan Syekh Yasin Padang adalah orang pertama yang menghimpun karangan ilmu sanad ulama-ulama Islam sepanjang zaman dan dari pelbagai pelosok dunia. Karena ini pulalah, beliau dijuluki "musnid al-dunyâ".

Salah satu karya terpenting Syekh Yasin Padang dalam bidang "ilmu sanad" ini adalah kitab "al-'Iqd al-Farîd min Jawâhir al-Asânid". Kitab ini menghimpun kumpulan sanad ulama-ulama Nusantara. Dalam konteks kajian sejarah peradaban dan keilmuan Islam Nusantara, tentu kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan istimewa, karena dalam kitab inilah jejarang dan genealogi intelektual para ulama Nusantara dapat terlacak dan terbaca dengan sangat jelas dan runut.

Sejarah perkembangan Islam di tanah Asia kembali menyongsong kemunculannya pada awal-awal abad ke-20 Islam masuk ke Asia karena tekanan yang sangat kuat dari Wahabi Makkah kepada ahl al-bayt yang notabene Ahlussunnah wal Jamaah. Tekanan inilah yang mengakibatkan para Sayyid dan Habaib melarikan diri dari tanah Makkah ke belahan negara Timur termasuk ke daerah Indonesia. Hari ini bisa kita saksikan masih begitu banyak para Habaib yang tersebar di Asia terutama Indonesia.

Orang Arab mulai banyak menetap di Jawa setelah tahun 1820 dan koloni-koloni mereka di bagian timur Nusantara pada 1870. Data statistik pada tahun itu, tercatat jumlah populasi orang Arab dan keturunannya sudah mencapai 10.888 orang. Di Batavia, misalnya, ada 952 orang, Cirebon 816 orang, Tegal 204 orang, Cirebon 816 orang, Pekalongan 608 orang, Semarang 358 orang, dan Surabaya (mencakup Keresidenan Surabayam Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Sidayu) mencapai 1626 orang. Lalu, Yogyakarta 77 orang, Surakarta 42 orang, Madura 979 orang, Kedu (Magelang) 47 orang, Cilacap 7 orang, Purwokerto 3 orang, dan Purbalingga 4 orang.

Sebagian besar orang Arab yang datang ke Pulau Jawa dan Singapura, terlebih dahulu singgah di Batavia, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Delapan tahun setelah itu (setelah adanya pendataan penduduk yang terakhir di

1884--Red), jumlah pendatang baru yang diizinkan masuk oleh Pemerintah Batavia, rata-rata jumlahnya melampaui seratus orang untuk setiap tahunnya. Dan, sebagian pendatang baru ini kemudian menetap.

Diantaranya adalah para wali songo semuanya adalah Habib kecuali satu orang (tersebar di seluruh daratan Jawa). Sayid Syekh Umar Al Yamani (terdampar di daerah Parepare), Assayyid Syekh Muhammad Al Akhdal (di daerah Pinrang dan Mandar), Sayyid Syekh Mahmud Al Jawab Al Madani (bersinggah ke Sumatra Timur). Kehadiran mereka di Asia ini dimanfaatkan dengan menebarkan ajaran agama Islam. Selain ulama dari ahl a-bait, menurut para peneliti, islamisasi Asia juga dilakukan oleh ulama asli pribumi yang sebelumnya menimba ilmu pengetahuan ke Timur Tengah. Selain itu juga disampaikan oleh ulama asal Eropa yang mendedikasikan dirinya untuk menyampaikan ajaran Islam di Nusantara.

Ulama Thailand Ali Matih juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hubungan panjang dengan Thailand terkait dengan sejarah Islam di Nusantara. Bahkan, ia mengatakan bahwa salah satu guru Wali Songo Sunan Gresik adalah orang Campa Thailand. Sunan Gresik dari Surabaya gurunya di Gresik Pattani (Thailand), namanya Syekh Said Al Basisa. Banyak orang Thailand yang pindah ke Indonesia setelah kaum muslim sana dikalahkan oleh Kerajaan Siam. "Ke Demak, ke Kudus, ke Aceh, dan wilayah-wilayah lainnya. Dengan semakin banyaknya pelajar Islam Thailand yang belajar ke Indonesia, bisa disimpulkan bahwa Islam moderat Ahlulsunna wal Jamaah dapat tersebar di Thailand.

Dalam sejarah kita mengenal beberapa ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaysia yang berasal dari suku Melayu Banjar, Bugis, Mandailing, Minangkabau, Rao/Rawa, Johor, Riau dan sebagainya. Sebagai tokoh, mereka ini tentu saja memiliki pengaruh yang begitu banyak di Malaysia hingga saat ini. Mereka melahirkan keturunan-keturunan yang berpengaruh, mereka meninggalkan ajaran, karya tulis dan murid-murid yang setia serta mereka meninggalkan jasa yang tidak terhingga nilainya.

Seperti Tuanku Tambusai (1784-1882 M). Walaupun Tuanku Tambusai berasal dari Melayu Riau, namun penulis memasukkan namanya di sini kerana beliau adalah murid dan teman seperjuangan Tuanku Rao melawan Belanda. Banyak pengikut Tuanku Tambusai adalah orang Rao. Tuanku Tambusai adalah seorang ulama dan pahlawan yang telah menanamkan benih anti penjajah di tanah melayu. Beliau terkenal dengan tiga serangkai pejuang bersama Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao di Sumatera Barat.

Karena tidak mau tunduk pada penjajah, akhirnya beliau terpaksa hijrah ke Negeri Sembilan dan meninggal dunia di sana. Muhammad Shalih mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri. Ketika Muhammad Shalih beranjak dewasa beliau diantar ke Rao yang berdekatan dengan Tambusai. Setelah mendapat pendidikan Islam di Rao dan Bonjol beliau lebih dikenali dengan nama "Faqih Shalih". Setelah itu Tuanku Rao dan Tuanku Imam Bonjol menasehati agar supaya Faqih Shalih pergi haji ke Mekkah untuk mendalami ilmu di sana. Setelah kembali dari Mekah, Faqih Shalih lebih dikenal dengan "Haji Muhammad Shalih".

Dalam Perang Imam Bonjol atau Perang Paderi, beliau lebih dikenali sebagai "Tuanku Tambusai". Tuanku Tambusai dan kawan-kawan bersamanya bergabung dalam satu kesatuan yang dinamakan "Kaum Paderi" yang dipimpin oleh Peto Syarif yang kemudian terkenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Tambusai beliau dugelari, 'Pahlawan Nasional Republik Indonesia' dengan SK. No. 071/TK/Tahun 1995, Tanggal 7 Ogos 1995.

Dari sekian banyak ulama yang menyebarkan Islam se Asean, secara garis besar mereka menggunakan empat model metode dakwah. Pertama, para ulama yang tidak berafiliasi dengan kekuatan dan kepentingan politik mana pun. Mereka semata-mata bekerja untuk memperjuangkan pembumih nilai-nilai Islam secara kultural dan personal. Bahkan, para peneliti menyebutkan bahwa ulama yang menempuh jalur ini menjaga jarak dari rezim dan memusatkan perhatian ke dakwah dan tarbiyah berdasarkan tafsir Islam puritan dalam spektrum modernis-reformis. Ulama yang menempuh metode ini mentransmisikan keilmuan Islam melalui lembaga nonformal. Mereka melakukan proses transfer ilmu pengetahuan melalui pengajian di masjid-masjid, di majelis taklim dan madrasah-madrasah non formal. Dalam konteks hubungannya dengan penjajahan, tulis para peneliti dalam laporannya, mereka melawan seluruh bentuk gerakan kolonialisme dengan basis dan dukungan otoritas lokal.

Kedua, ulama yang membangun afiliasi dan bersinergi dengan kekuatan politik lokal yang kerap memangku jabatan 'penghulu', 'kadi', atau jabatan lain yang membuat mereka selalu berada di lingkungan istana bahkan menjadi bagian dari elite lokal. Kelompok ini 'lebih bersikap konstruktif dalam berurusan dan bekerjasama dengan pemerintah.

Mereka disebut sebagai pihak yang akomodasionis'. Secara umum, ulama yang memilih metode dakwah ini adalah ulama yang memiliki kemampuan dan pemahaman agama yang mumpuni sebagai hasil pembelajaran selama di Makkah.

Ketiga, ulama yang memilih jalan dakwah melalui pengembangan pranata kelembagaan yang berbasis pada masjid dan pendidikan pondok pesantren. Model strategi dakwah seperti ini hampir didapat di seluruh daerah. Sebab pengajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan masjid sebagai tempat ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat menimba ilmu pengetahuan.

Keempat, ulama yang menebarkan dakwah Islam melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi dakwah ini biasanya dilakukan oleh para ulama yang memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sejahtera dan mampu menjawab segala bentuk tantangan sosial di tengah-tengah masyarakatnya pada masanya. Oleh karena itu mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan sosial keagamaan, lembaga-lembaga perekonomian, organisasi politik, bahkan kerap kali ikut berjihad melawan para penjajah

Melihat dari sejarah dapat disimpulkan bahwa banyak kesamaan sanad ulama se Asean dalam keilmuan mereka. Sehingga visi misi penyebaran Islam dalam strategi dakwah dilakukan dengan cara-cara yang arif. Artinya, proses islamisasi yang berlangsung di Asia, khususnya di Nusantara tidak dilakukan dengan cara-cara represif yang mereduksi tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga Islam diterima dengan penuh hikmat dan bahagia bahkan sampai ke Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunai Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, dan belahan bumi yang mendambagakan kedamaian.

Semoga kita sebagai generasi penerus dapat menjaga dan mengembangkan semangat keislaman yang diajarkan leluhur kita, bahwa Islam adalah agama penuh kedamaian, kasih sayang, dan jalan keselamatan. Maka cukuplah orang-orang menilai keislaman kita yang kesemuanya itu tercermin kuat dalam tradisi masyarakat Melayu.*

FATHU KHAIRIDDIN adalah lulusan Universitas Al-Azhar Mesir dan memimpin pesantren di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat ini sedang studi Program Kaderisasi Ulama (PKU) di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Islamofobia di Asia Tenggara: Ancaman dan Penanggulangannya

Sudarnoto Abdul Hakim

Fenomena Islamofobia, yaitu sikap negatif terhadap Islam dan umat Islam, telah menjadi isu kontroversial di berbagai belahan dunia. Di wilayah ASEAN isu ini juga telah muncul sebagai ancaman serius terhadap kerukunan sosial dan stabilitas. Artikel ini akan membahas secara rinci pengertian Islamofobia, ciri-cirinya, faktor-faktor penyebab, perkembangannya di ASEAN, serta upaya penanggulangannya.

Pengertian dan Ciri Islamofobia

Islamofobia adalah sikap negatif, prasangka, atau diskriminasi terhadap agama Islam dan umat Muslim. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu "Islam," yaitu agama Islam dan "fobia," yang berarti rasa ketakutan atau kebencian terhadap suatu kelompok atau objek tertentu. Islamofobia juga mengandung arti pandangan yang merendahkan, stereotip yang tidak akurat, dan tindakan yang merugikan terhadap individu atau kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Ada beberapa ciri Islamofobia yaitu, *pertama*, penggeneralisasian negatif, di mana tindakan ekstrem atau kelompok minoritas dihubungkan dengan seluruh komunitas Muslim. *Kedua*, Stereotip yang menggambarkan umat Muslim sebagai teroris potensial atau ekstremis. *Ketiga*, persepsi bahwa Islam adalah ancaman terhadap nilai-nilai dan identitas nasional, yang menyebabkan penolakan terhadap kontribusi positif umat Muslim terhadap masyarakat.

Pengaruh media massa dan politik dalam memperkuat Islamofobia tidak bisa diabaikan. Berita yang menyoroti serangan teroris oleh kelompok ekstrem atau retorika negatif terhadap Islam seringkali memperkuat asosiasi negatif terhadap agama ini. Ketidapahaman tentang ajaran Islam juga dapat memperburuk Islamofobia, karena informasi yang salah atau tidak akurat dapat membentuk pandangan yang keliru. Islamofobia bukan hanya ancaman terhadap HAM, tetapi juga dapat merusak kerukunan sosial dan stabilitas dalam masyarakat yang beragam agama dan budaya.

Faktor-Faktor Kemunculan

Munculnya Islamofobia melibatkan sejumlah faktor kompleks yang membentuk pandangan negatif terhadap agama Islam dan umat Muslim. *Pertama*, terorisme global yang dianut oleh sejumlah kelompok ekstremis Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap Islamofobia. Serangan seperti 9/11 atau serangan-serangan teroris lainnya telah memberikan citra negatif terhadap Islam secara umum, meskipun mayoritas umat Muslim menentang ekstremisme. *Kedua*, media massa memainkan peran penting dalam penyebaran Islamofobia. Sensasionalisme dalam pemberitaan seringkali menonjolkan tindakan ekstrem dan meredupkan gambaran yang lebih luas tentang Islam dan umat Muslim. Ketidapahaman tentang agama Islam juga mempengaruhi persepsi masyarakat, karena informasi yang salah atau tidak akurat dapat mengarah pada pemahaman yang keliru dan prasangka. *Ketiga*, faktor politik dan sosial juga berkontribusi pada munculnya Islamofobia. Sentimen nasionalis yang diperkuat oleh politik identitas dapat memanfaatkan isu agama untuk membangun kesatuan dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah internal. Konflik global dan regional, seperti konflik di Timur Tengah, juga dapat memperluas pandangan negatif terhadap Islam dan umat Muslim. Konflik-konflik ini berpotensi memperluas pandangan negatif terhadap Islam dan umat Muslim. Media seringkali meliput konflik ini dengan fokus pada tindakan ekstremis atau kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok ekstrem, yang kemudian dapat ditarik garis kesamaan dengan seluruh komunitas Muslim. Akibatnya, pandangan stereotip tentang Islam sebagai agama yang terkait dengan kekerasan dan ekstremisme dapat terbentuk di kalangan masyarakat, walaupun mayoritas umat Muslim menolak tindakan tersebut. Konflik ini juga dapat memperkuat narasi bahwa Islam dan Barat berada dalam konflik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap komunitas Muslim di wilayah-wilayah di luar Timur Tengah.

Secara keseluruhan, Islamofobia muncul dari kumpulan faktor yang beragam, termasuk terorisme, media, ketidakpahaman, dan dinamika politik. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah penting dalam mengatasi Islamofobia dan mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan toleran terhadap agama dan budaya yang berbeda

Islamofobia di Negara-Negara ASEAN

Gambaran Islamofobia di ASEAN cukup beragam faktor dan polanya, sangat tergantung kepada situasi sosial politik di masing-masing negara. Meskipun demikian, di beberapa negara ASEAN ada juga kemiripan atau kesamaan faktor dan polanya.

Myanmar

Di Myanmar, Islamofobia telah memunculkan permasalahan serius terkait dengan konflik antara mayoritas Buddhis dan minoritas Muslim Rohingya. Konflik ini telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang mengerikan, termasuk pengusiran massal, kekerasan seksual, dan pembunuhan terhadap komunitas Rohingya. Pemerintah Myanmar, dengan beberapa elemen masyarakatnya, telah berkontribusi dalam memperburuk situasi ini dengan memicu dan memperkuat sentimen Islamofobia. Pada tahun 2017, terjadi pembantaian di Rohingya, dengan total 6.700 korban, 730 di antaranya adalah anak-anak. Anak-anak menderita kekerasan karena keserakahan pemerintah. Mereka dibantai, dibunuh secara brutal, dan diperkosa tanpa rasa kemanusiaan. Berdasarkan jumlah korban jiwa, ini adalah kejahatan genosida. Konflik ini juga menyebabkan masyarakat internasional khususnya negara anggota ASEAN lainnya merasa khawatir terhadap kesejahteraan Myanmar. Pengaruh media dan narasi politik juga telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islamofobia yang sangat menyudutkan umat Muslim Rohingya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Kelompok nasionalis Buddhis Myanmar juga mempromosikan narasi anti-Muslim yang memperkuat sentimen Islamofobia.

Dalam konteks ini, upaya penanggulangan Islamofobia di Myanmar harus melibatkan pendekatan holistik. Pendidikan masyarakat tentang keragaman budaya dan agama, serta pelibatan aktif dalam dialog antaragama, dapat membantu meredakan ketegangan dan prasangka yang ada. Selain itu, organisasi internasional dan lembaga HAM harus terus mengadvokasi untuk perlindungan hak-hak minoritas Muslim Rohingya dan menyuarakan keprihatinan terhadap pelanggaran HAM. Upaya ini perlu diperkuat oleh tekanan internasional dan diplomasi untuk memastikan bahwa pemerintah Myanmar mengambil tindakan yang tegas untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas Rohingya serta mengatasi akar penyebab Islamofobia di negara tersebut.

Indonesia

Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tapi Islamofobia telah muncul. Hal ini terkait dengan perkembangan politik dan dinamika sosial yang kompleks. Salah satu kelompok yang mengembangkan Islamofobia adalah sebagian kecil kelompok Ultra-Nasionalis. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat nasionalistik dan seringkali menempatkan identitas nasional di atas segala hal, bahkan melebihi identitas agama sehingga mengesankan kuat agama diabaikan. Bentuk-bentuk Islamofobia di Indonesia dapat mencakup tindakan diskriminatif, retorika kebencian, fitnah dan serangan fisik terhadap tokoh Islam, bullying, penistaan terhadap ajaran agama Islam. Salah satu contoh kasus adalah serangan terhadap tokoh-tokoh Muslim yang menyuarakan pandangan moderat. Bentuk lain Islamofobia ialah apa yang disebut dengan "Passive Islamophobia" yang nampak antara lain terjadinya marjinalisasi Islam dalam kurikulum sekolah (Saifuddin Dhuri, et.al. 2021).

Reaksi civil society di Indonesia terhadap Islamofobia umumnya telah positif. Berbagai kelompok HAM, organisasi agama termasuk MUI, dan masyarakat sipil secara aktif berjuang untuk melawan diskriminasi, intoleransi, dan marjinalisasi. Mereka melakukan kampanye kesadaran, menyediakan bantuan hukum bagi korban Islamofobia, dan mempromosikan nilai-nilai inklusif. Pemerintah juga telah mencoba mengatasi Islamofobia dengan memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak-hak minoritas agama. Namun, beberapa kelompok ekstremis masih berhasil memperkuat pandangan intoleran mereka, menunjukkan perlunya kerja keras dalam menghadapi tantangan islamofobia di Indonesia.

Malaysia

Di Malaysia, negara yang memiliki keragaman etnis dan agama, Islamofobia juga telah muncul dalam beberapa konteks, seringkali terkait dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Seperti Indonesia, meskipun mayoritas penduduk Malaysia adalah Muslim, terdapat tindakan dan retorika yang menciptakan sentimen negatif terhadap komunitas Muslim dan kelompok minoritas agama. Contoh nyata Islamofobia di Malaysia dapat dilihat dalam isu-isu terkait etnis dan agama. Beberapa isu kontroversial telah muncul, seperti pertentangan Melayu-Muslim dan Cina-Kristen. Isu ini memicu retorika kebencian dan Islamofobia di media sosial dan bahkan di beberapa platform politik. Reaksi terhadap Islamofobia bervariasi. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis agama telah mengambil langkah-langkah mengatasi Islamofobia dengan mempromosikan toleransi antaragama. Namun, upaya ini seringkali berhadapan dengan tantangan, terutama dalam konteks politik yang kompleks dan retorika identitas nasional yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kelompok agama lain.

Filipina

Di Filipina, Islamofobia juga muncul dan mempengaruhi hubungan minoritas Muslim dengan mayoritas Kristen. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah pertempuran antara pemerintah Filipina dan kelompok Muslim di wilayah Mindanao, seperti kelompok Abu Syyaf dan Moro Islamic Liberation Front. Konflik ini telah menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Bukti-bukti Islamofobia di Filipina dapat dilihat dalam diskriminasi terhadap komunitas Muslim, terutama yang tinggal di wilayah Mindanao. Kelompok Muslim sering menghadapi batasan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Selain itu, adanya serangan teror oleh kelompok ekstremis Muslim di beberapa wilayah Filipina juga telah memperdalam polarisasi dan menciptakan pandangan negatif terhadap seluruh komunitas Muslim.

Munculnya Islamofobia di Filipina sebagian besar terkait dengan konflik dan ketegangan etnis-agama yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pertempuran dan serangan teror di wilayah Mindanao telah meningkatkan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat Kristen dan berkontribusi pada persepsi negatif terhadap agama Islam. Isu ini diperparah oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang Islam dan budaya Muslim di kalangan mayoritas Kristen Filipina. Untuk mengatasi Islamofobia di Filipina, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan, dialog antaragama, dan pemulihan ekonomi di wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Pemerintah Filipina, bersama dengan kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional, perlu bekerja sama untuk menghentikan spiral negatif yang memperdalam konflik dan merusak kerukunan sosial.

Singapura dan Thailand

Singapura, dengan populasi yang beragam budaya dan agama, telah berkomitmen untuk menjaga harmoni antaragama. Namun, Islamofobia tetap menjadi isu yang mempengaruhi dinamika multikulturalisme. Beberapa tindakan Islamofobia telah terjadi, seperti retorika anti-Muslim di media sosial dan kasus diskriminasi dalam aspek sosial dan pekerjaan. Pemerintah Singapura telah merespons dengan tegas terhadap tindakan diskriminatif dan intoleransi, mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak minoritas agama dan mempromosikan dialog antaragama. Di Singapura ada Internal Security Act (ISA) yaitu undang-undang keamanan yang memberikan pemerintah kewenangan untuk menahan individu tanpa perlu pengadilan jika dianggap ada ancaman terhadap keamanan nasional. Meskipun ISA diterapkan terhadap berbagai kelompok yang dianggap merugikan keamanan nasional, termasuk ekstremis dan komunis, ada beberapa kasus di masa lalu yang melibatkan individu atau kelompok Muslim. Memang penerapan ISA terhadap individu Muslim tertentu, terutama yang dianggap terlibat dalam ekstremisme atau terorisme, telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan sebagai awal berkembangnya Islamofobia. Beberapa pengamat dan aktivis telah mengkritik pemerintah karena dianggap mengarahkan penerapan ISA secara khusus kepada komunitas Muslim, yang bisa memicu pandangan negatif dan prasangka terhadap komunitas tersebut. Walaupun terdapat perdebatan dan kekhawatiran seputar penerapan ISA di Singapura, apakah penerapan tersebut secara langsung mengarah kepada Islamofobia atau tidak dapat menjadi subjek interpretasi yang bervariasi di kalangan masyarakat dan ahli. Dalam hal ini, penting untuk memahami konteks yang lebih luas dan menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang dampak dan implikasi penerapan ISA terhadap Islamofobia di Singapura.

Sementara itu di Thailand, mirip dengan Filipine, Islamofobia terkait dengan Wilayah Selatan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan telah mengalami konflik bersenjata. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan,

pekerjaan, dan layanan publik di wilayah ini telah menciptakan ketegangan dan prasangka terhadap komunitas Muslim. Konflik tersebut, meskipun memiliki latar belakang sejarah dan politik yang kompleks, juga menciptakan pandangan negatif terhadap Islam dan Muslim di kalangan mayoritas. Islam dan muslim dipandang sebagai sumber separatisme yang membahayakan keutuhan nasional.

Dalam menghadapi Islamofobia, Singapura dan Thailand perlu melibatkan masyarakat sipil, pemimpin agama, dan pemerintah untuk mengatasi prasangka dan mempromosikan pendidikan yang inklusif. Kolaborasi internasional dan pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain yang juga menghadapi islamofobia dapat membantu mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan ini dan membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

Kelompok Islamofobia

Pelaku Islamofobia di Asia Tenggara berasal dari berbagai latar belakang dan entitas yang dapat mencakup individu, kelompok ekstremis, tokoh politik, dan bahkan aparat pemerintah. Individu dan kelompok ekstremis yang menganut pandangan anti-Muslim seringkali memiliki ideologi yang didasarkan pada intoleransi, nasionalisme radikal, atau bahkan supremasi agama tertentu. Beberapa kelompok ekstremis mungkin berusaha mempromosikan agenda keagamaan atau politik dengan cara merendahkan umat Muslim atau memicu ketegangan antaragama. Mereka dapat menggunakan media sosial atau platform online untuk menyebarkan retorika Islamofobia. Di sisi politik, terdapat tokoh-tokoh politik yang mungkin mengambil sikap anti-Muslim atau menggunakan Islamofobia sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Dalam beberapa kasus, Islamofobia dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal atau memanfaatkan ketegangan agama dalam upaya mencapai tujuan politik.

Kemudian, meskipun tidak semua aparat pemerintah terlibat dalam Islamofobia, tetapi dalam beberapa kasus, aparat pemerintah mungkin secara tidak langsung mendukung atau bahkan terlibat dalam tindakan Islamofobia. Misalnya, dalam konflik atau kebijakan yang merugikan kelompok Muslim tertentu, tindakan pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk Islamofobia oleh kelompok yang terdampak. Yang menjadi pertanyaan ialah dari mana sumber pendanaan kelompok Islamofobia? Sulit untuk mengidentifikasi secara pasti siapa yang mendanai mereka, karena pendanaan ini mungkin berasal dari berbagai sumber yang beragam. Ada spekulasi bahwa beberapa kelompok ekstremis atau politik dapat menerima dukungan dari entitas yang memiliki agenda serupa. Namun, karena transparansi sumber pendanaan seringkali kurang, sulit untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang hal ini.

Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat Asia Tenggara terhadap Islamofobia bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan toleran terhadap keragaman agama dan budaya, karena wilayah ini memiliki sejarah panjang koeksistensi antaragama. Banyak individu dan kelompok masyarakat sipil yang mengambil sikap menentang Islamofobia dengan melakukan kampanye kesadaran, mengorganisir dialog antaragama, dan mengadvokasi hak-hak minoritas agama. Aliansi kelompok antar agama, kebudayaan, dan profesi juga telah muncul memberikan respons terhadap Islamofobia. Di ASEAN, ada organisasi dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antaragama, membangun kerjasama lintas agama, dan mengatasi prasangka. Beberapa tokoh agama dan intelektual juga berkolaborasi untuk menghadapi Islamofobia dan merangkul keragaman.

Pertemuan dan dialog antara para ulama ASEAN juga telah menjadi bagian penting dari upaya menghadapi Islamofobia. Dalam beberapa kasus, ulama-ulama terkemuka berkumpul untuk berbicara tentang Islamofobia dan bagaimana mengatasi tantangan ini. Mereka menggarisbawahi nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam Islam, serta berkomitmen untuk memerangi pemahaman yang keliru tentang agama ini. Pertemuan semacam ini memberikan sinyal positif bahwa pemimpin agama di wilayah ini bersatu untuk melawan prasangka dan mempromosikan kedamaian. Dalam keseluruhan, reaksi masyarakat di ASEAN terhadap Islamofobia mencerminkan semangat inklusivitas dan toleransi yang telah mengakar dalam budaya dan sejarah wilayah ini. Meskipun tantangan masih ada, upaya berkelanjutan untuk membangun aliansi antar agama dan merangkul nilai-nilai keragaman memberikan harapan bahwa Islamofobia dapat diatasi dan kerukunan dapat diperkuat.

Langkah-Langkah Penanggulangan Islamofobia

Melawan dan menanggulangi Islamofobia di ASEAN memerlukan kolaborasi antara masyarakat sipil, kelompok agama, pemerintah, dan lembaga internasional. *Pertama*, pendidikan yang inklusif dan berbasis fakta sangat penting. Masyarakat perlu diedukasi tentang agama dan budaya yang berbeda, serta disadarkan akan keragaman dan kontribusi positif yang diberikan oleh umat Muslim. Kurikulum sekolah dapat mengintegrasikan pelajaran tentang toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. *Kedua*, promosi dialog antaragama dan interaksi lintas budaya dapat membantu meruntuhkan tembok prasangka. Inisiatif ini dapat dikoordinasikan oleh kelompok agama, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah. Diskusi terbuka, seminar, dan pertemuan antar komunitas agama dapat meredakan ketegangan dan membangun pemahaman yang lebih dalam.

Pemerintah juga memegang peran penting dalam melawan Islamofobia. Mereka perlu menjaga kebijakan yang tidak diskriminatif, mempromosikan HAM dan kebebasan beragama, serta menegakkan hukum melawan Islamofobia. Kampanye-kampanye kesadaran publik tentang keragaman dan anti-diskriminasi dapat membentuk pandangan yang lebih positif terhadap umat Muslim. *Terakhir*, kolaborasi antar negara ASEAN dan dukungan dari lembaga internasional dapat memperkuat upaya melawan Islamofobia. Pertukaran pengalaman, pelatihan antar negara, dan pembentukan jaringan lintas batas dapat memperkuat kerjasama dalam mengatasi tantangan yang sama. Lebih lanjut, lembaga internasional seperti PBB dapat memainkan peran dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan HAM di wilayah ini.

Secara keseluruhan, mengatasi Islamofobia memerlukan komitmen kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Melalui pendidikan, dialog, kebijakan inklusif, dan kerjasama regional, wilayah ASEAN dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mempromosikan kerukunan antaragama dan keragaman budaya. Muncul juga ide pentingnya Undang-undang khusus yang menangani Islamofobia di masing-masing negara ASEAN. Ide ini antara lain dimunculkan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional. Pengaturan semacam ini akan bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok dari tindakan Islamofobia.

Kesimpulan

Islamofobia di ASEAN memiliki akar yang kompleks dan dampak yang signifikan pada masyarakat. Penanggulangannya memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Dengan upaya kolektif dalam pendidikan, peningkatan kesadaran, dan penggalangan dukungan untuk HAMA dan toleransi, Islamofobia dapat diredam, dan ASEAN dapat mengukir masa depan yang lebih inklusif dan harmonis.*

Referensi

- Dhuhri, Saifuddin, et.al. "Passive Islamophobia and National Cultural Construction: a Critical Note on Art Curriculum," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, vol 11, no 1 (2021):1-27.
- Syarif, Zainuddin, et.al., "Post Truth and Islamophobia in the Contestation of Contemporary Indonesian Politics," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 10, No 2 (2020); 199-225).
- Farhan, Ahmad, "Islamophobia in Southeast Asia," *The ASEAN Post* (March 29, 2019).
- Rahmawati, Regi dan Zakiyuddin Baidhawi, "Peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights Dalam Penanganan Islamofobia Dalam Kasus Rohingnya," *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari*, Vol.3, No. 2 (2022): 19-38.

SUDARNOTO ABDUL HAKIM adalah Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menamatkan pendidikan di SD Muhammadiyah Temanggung, Pesantren Persis, kemudian melanjutkan S1 di IAIN Jakarta, S3 di McGill University, Canada, dan S3 di UIN Jakarta. Ia pernah dua periode menjadi Wakil Rektor di UIN Jakarta. Bukunya antara lain *Malaysia Jalan Terjal Menuju Bangsa Demokratis* (2023). Saat ini aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional. Ia sering menjadi narasumber berbagai media dalam dan luar negeri terkait dengan isu-isu internasional, Asia Tenggara dan dunia Islam.

Peran Religiusitas dan Moderasi Beragama Masyarakat ASEAN Pada Tahun Resesi

Ahmad Baedowi

Pendahuluan

Wabah pandemi virus Covid-19 hampir selama dua tahun menyebabkan berbagai masalah dan ancaman bagi masyarakat dunia, terutama dalam bidang perekonomian. Tidak sedikit Negara di belahan dunia berada dalam kondisi yang sulit dan bahkan pada ujung jurang resesi. Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, Untuk merespon dampak dari Pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus lebih tanggap agar negara terhindar dari ancaman resesi (Nancy & Tirto.id, 2020). Bila penanganan dapat dilakukan secara serius dan cepat, perekonomian sebuah negara pun dapat pulih lagi seperti sedia kala.

Dalam survei Bloomberg (06/07/2022), Indonesia menjadi satu di antara sedikit negara Asia yang dianggap memiliki probabilitas sangat kecil untuk mengalami resesi. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa probabilitas resesi di banyak negara Asia mengalami peningkatan, meski masih lebih kecil dibanding Amerika Serikat dan Eropa (rata-rata 40 - 55%). Probabilitas rata-rata negara Asia Pasifik terseret ke resesi berada pada rentang 20-25%. Peningkatan risiko global seperti tekanan inflasi yang tinggi dan persisten serta pengetatan kebijakan moneter yang cepat dan tajam merupakan faktor utama yang turut mendorong peningkatan potensi resesi berbagai negara di dunia.

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global tersebut perlu adanya solusi kolektif dari seluruh komponen masyarakat. Dalam hal ini upaya penguatan moderasi beragama harus terus dilakukan. Secara spesifik dalam bidang ekonomi salah satunya melalui Program Bina Ekonomi Masyarakat dan Sumberdaya Keagamaan. Pembangunan ekonomi umat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian umat sendiri untuk kepentingan umat atau untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara luas dengan mengembangkan dan meningkatkan potensinya melalui pembangunan ekonomi. Ekonomi Umat adalah masalah besar yang harus dilalui umat saat ini. Membahas ekonomi umat berarti berbicara masalah ekonomi, yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam produksi barang atau jasa untuk persediaan atau distribusi kepada konsumen atau antara orang-orang secara bersama-sama di pasar. Pengembangan ekonomi lokal adalah proses yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mendorong, merangsang, dan mempertahankan bisnis yang menciptakan lapangan kerja.

Kekeliruan sistem ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi kerakyatan yang berbasis sistem ekonomi kapitalis yang lebih berpihak pada individu manusia, menyebabkan munculnya rasa egoisme dalam diri individu tanpa memperhatikan mayoritas yang rentan. Tulisan ini mencoba memotret bagaimana aspek agama atau religiusitas dalam hal ini moderasi beragama mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin inklusif sehingga akan sangat bermanfaat bagi perekonomian seseorang karena meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota masyarakat.

Peran Religiusitas dan Moderasi Beragama di masa Resesi

Peran Agama dalam Ekonomi

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu pemikiran. Umat Islam yang bertujuan untuk menjawab berbagai macam tantangan ekonomi manusia menurut zamannya, dengan menggunakan menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan AsSunnah, yang dibantu dengan menggunakan akal dan pengalaman. untuk memahami mereka. Nurhidayat, 2020).

Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam sistem ekonomi syariah, Allah swt menjadikan alam semesta ini diberikan sepenuhnya kepada manusia yang tidak akan pernah habis, hal ini dikarenakan apa yang terkandung di alam semesta ini mengandung potensi kekayaan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. dieksplorasi oleh manusia. Umat Islam Indonesia perlu kembali menghidupkan kembali semangat para wirausahawan muslim masa lalu dalam bisnis dan perdagangan global, serta ajaran Nabi Muhammad SAW. sunnah yang dicontohkan kepada umatnya (Fitria, 2016).

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar dua tahun berdampak adanya krisis ekonomi global yang kemungkinan akan meningkatkan risiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Dikutip dari Kompas.com jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena PHK akibat terdampak Covid-19 sudah menembus 2 juta orang. Berdasarkan data Kemenaker per tanggal 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan.

Untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang menyerang psikis dibutuhkan adanya suatu pegangan nilai yang dapat dijadikan keyakinan secara batiniah. Nilai-nilai spiritual menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk tetap memberikan kekuatan yang berasal dari dalam jiwa. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai spiritual jiwa seseorang akan memiliki ketenangan dan berdampak positif juga terhadap imunitas tubuh.

Religiusitas dan Moderasi Beragama Sebagai Solusi

Moderasi beragama secara berasal dari bahasa latin yang bermakna kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kurang). Kata itu juga memiliki pengertian yaitu pengendalian diri (pengendalian diri yang berarti menjauhi sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Berdasarkan KBI, KBI memberikan dua arti dari kata moderasi, mengurangi kekerasan, menghindari perilaku ekstrim. Jika dikatakan seseorang bersikap moderat, maka kalimat itu berarti, orang itu masuk akal, berperilaku biasa, layaknya perilaku manusia normal yang tidak condong terlalu kanan atau kiri, dan tidak ekstrem dan berlebihan (Muhamad Istan. 2017)

Ketahanan ekonomi adalah keadaan dinamis kehidupan ekonomi bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari luar negeri dan yang berasal dari dalam negeri secara eksklusif maupun tidak langsung pada kelangsungan hidup bangsa. perekonomian bangsa dan NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 (Marlinah, 2017)

Pandemi global Covid-19 tentunya berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga secara global. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh minus 3%. Di Indonesia hal ini tentunya juga berdampak signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Hardilawati, 2020).

Virus corona (covid-19) yang berdampak cukup besar terhadap sendisendi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Memperkirakan bahwa PDB (produk domestik bruto/PDB) akan turun sekitar 2,5%, karena permintaan domestik akan paling terpukul. (Asiyah dkk., 2020). Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada roda perekonomian nasional. Hal ini berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bekerja sebagai buruh maupun wiraswasta. (Syaifariz dkk., 2020). Karena virus Covid-19 merajalela secara global, tidak hanya di Indonesia, 200 negara lain telah terjangkit virus tersebut, hal ini tentunya akan berdampak besar pada sistem kerja, sistem pengajaran dan sistem lainnya (Mustopa et al., 2021).

Namun, Covid-19 tidak hanya berdampak negatif tetapi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Peluang penguatan ekonomi di dalam negeri juga bisa terwujud karena pemerintah akan memprioritaskan dan memperkuat daya beli negara daripada menarik keuntungan dari luar negeri. selain itu kondisi sulit seperti sekarang ini juga bisa mengembalikan atau menyadarkan bangsa Indonesia untuk kembali kepada Allah Tuhan semesta alam dengan memperkuat spiiitualitas dan religiusitas pada masing-masing individu.

Pengembangan Ekonomi Umat terhadap Penguatan Moderasi Beragama

Ginandjar Kartasasmita (1996:249) memaparkan bahwa, pemberdayaan dalam upaya pengembangan ekonomi Umat adalah Upaya pemberdayaan Ekonomi Ummat yang bertujuan untuk mengerahkan sumber daya guna memberdayakan potensi ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat melalui kenaikan tingkat produktivitas maka diharapkan, sumber daya yang mencakup manusia dan alam dapat lebih di tingkatkan lagi pengelolaan dan pengembangannya, sehingga diharapkan tercapainya kesejahteraan ekonomi ummat yang mana menjadi salah satu penguat relasi moderasi keagamaan terhadap sesama manusia.

Dalam mengembangkan Ekonomi Ummat dalam Upaya Penguatan Moderasi Beragama dapat diwujudkan melalui program kegiatan yang telah disusun dalam Sasaran Kegiatan dalam Renstra Tahun 2020-2024 yang diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan konservasi dan optimalisasi produk budaya dan religi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jumlah produk budaya religi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (wisata religi, tempat, artefak)
- 2) Meningkatnya rasa hormat terhadap keragaman budaya, sebagai wujud implementasi nilai-nilai agama. Peningkatan Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang memuat nilai-nilai religi (misalnya MTQ Pesarawi, STQ, Ustawa, dll)
- 3) Peningkatan pembangunan sosial untuk mendukung pelayanan keagamaan yang lebih baik lagi: a) Jumlah media/alat dan infrastruktur ibadah yang dipersiapkan, b) Jumlah kitab keagamaan dan kitab-kitab suci yang dipersiapkan, c) Rasio media beribadah yang difasilitasi, d) Jumlah panduan layanan syariah yang dipersiapkan, e) Jumlah masjid/mushalla yang dilengkapi dengan pengukuran penunjuk arah kiblat, f) Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina dan di berdayakan, g) Jumlah center observation Bulan yang sesuai standar
- 4) Meningkatnya manajemen dan pembinaan pemberdayaan dana zakat
- 5) Peningkatan manajemen aset wakaf
- 6) Peningkatan pemberian sumbangsih pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga dan lingkungan tidak berada, daerah afirmasi, dan berbakat.

Pengembangan Ekonomi Umat menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki kesesuaian dengan Program Kerukunan Ummat dan Layanan Kehidupan Beragama. Pengembangan ekonomi ummat terhadap penguatan moderasi beragama dapat meningkatkan moderasi serta rukunnya sesama masyarakat maka diharapkan dapat Menurunkan problematika isi-isu kerukunan yang memecah belah umat, Meningkatkan frekuensi penuntasan konflik internal agama melalui penguatan moderasi keagamaan akan memperkuat bidang pendidikan, berwawasan luas dan bermuatan moderat serta meningkatnya taraf ekonomi Ummat.

Peran Religiusitas dan Moderasi Beragama pada tahun Resesi

Sejalan dengan Visi Misi presiden yaitu memajukan budaya persatuan sehingga, terciptanya kepribadian bangsa. Kebijakan peningkatan kualitas moderasi keagamaan dan kerukunan sesama umat beragama difokuskan pada penguatan pondasi bermoderasi dalam rangka meningkatkan kerukunan dan mengatasi konflik antar pemeluk agama di dalam dan di luar agama. Upaya penguatan moderasi beragama terus dilakukan, secara spesifik salah satunya melalui Program Bina Ekonomi Masyarakat dan Sumberdaya Keagamaan. Pembangunan ekonomi ummat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian ummat sendiri untuk kepentingan ummat atau untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara luas dengan mengembangkan dan meningkatkan potensinya melalui pembangunan ekonomi.

Referensi

- Aslamiyah, Suaibatul Aslamiyah, Nurhayati. 2021. "Dampak Covid-19 terhadap Perubahan Psikologis, Sosial dan Ekonomi Pasien Covid-19 di Kelurahan Dendang, Langkat, Sumatera Utara", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1, No. 1.
- Arif, M. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. 1, 171.

- Fitria, TN (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (03), 29– 40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Habibullah, ES (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial*, 5 (9), 691–710.
- Hairunnisa, H. (2020). Peran Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Solusi Resesi Ekonomi Global 2020. *Jurnal Al-Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (01), 1–13.
- Hardilawati, W.Laura. (2020). Strategi Survival UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 10 (1), 89– 98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Hisam Ahyani, MS (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Penelitian*, 7 (Februari), 0–21.
- Istan, Muhammad 2017. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*.
- Luthfiatunnisa, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Moderasi Agama Di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, jurnal program mahasiswa kreatif
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Horizon - Jurnal Humaniora*, 17 (2), 258–265. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>
- Maulida Yuliyanti. (2011). Epistemologi Ekonomi Islam dan Peranannya dalam memajukan perekonomian di Indonesia. 1–7.
- Ningsih, DEA (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perekonomian Indonesia Tahun 2020 dan Solusi Alternatifnya. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Islam*, 3 (1), 13–27.
- Nurhidayat, N. (2020). Muslim Milenial dan Gerakan Ekonomi Islam Indonesia. *Mizan: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 131-140. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.638>.
- Purwana, AE (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11 (1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Priyanto, Aris. 2021. "Urgensi Spiritual di Masa Pandemi Sebagai Upaya Membentuk Perilaku Moderasi Beragama di IAIN Pekalongan". *Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*. Vol.2. No.1.
- Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2014
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 *Jurnal Publicuho*, 3 (2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>

AHMAD BAEDOWI lahir di Cirebon Jawa Barat. Menyelesaikan Program S1 nya Pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2013 serta Magister Sains Universitas Indonesia pada tahun 2016. Tahun 2017 Tercatat sebagai Dosen Luar Biasa Politeknik Media Kreatif Depok Jawa Barat dan pada tahun itu juga menjadi Dosen Tetap Universitas Indonesia mengampu Mata Kuliah Agama Islam. Tahun 2019 juga mengampu mata kuliah Agama Islam di MNC College dan STIKOM Interstudi Jakarta. Mengikuti serangkaian Pelatihan Dosen PAI yang diadakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengembangan Kapasitas dan karir. Ia aktif di Organisasi Profesi Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ADPISI Jabodetabek sebagai ketua Bidang Komunikasi dan Organisasi. Aktif menulis di beberapa media online keislaman seperti Islami.co, Arrahim.id dan Buletin Risalah Nahdlatul Ulama. Ia dapat dihubungi di email: abaedowi40@gmail.com.

Teologi Moderasi Dalam Islam dan Internalisasinya Pada Generasi Muda Muslim Indonesia

Ainur Alam Budi Utomo

Pendahuluan

Ekstremisme dalam beragama yang menimpa pada sebagian generasi muda Indonesia menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan unsur masyarakat secara bersama-sama. Fenomene ekstremisme beragama di kalangan generasi muda saat ini jika diperhatikan, dilatarbelakangi oleh semangat beragama yang berlebihan (*al-Ghuluw*), sehingga pada akhirnya mengakibatkan mereka terpapar lebih jauh kepada pemahaman radikal bermakna negatif dan teroris mengatasnamakan agama.

Para akademisi sudah banyak yang mengkaji perihal fenomena ekstremisme beragama, bahkan hasil penelitian mereka memberikan kontribusi dalam bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah radikalisme teror sedini mungkin yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda terpelajar. Jika mengkaji terjadinya radikalisme teror secara teoritis, banyak faktor yang mempengaruhi. Mun'im Sirry (2023) menyebutkan, setidaknya ada 5 (lima) teori terjadinya radikalisasi yang dihimpun oleh sarjana barat, pertama teori kesenjangan sosial ekonomi, kedua teori politik identitas, ketiga teori afiliasi sosial, keempat teori suaka dikalangan terpelajar kepada kelompok radikal dan kelima teori bahasa yang dilakukan oleh kelompok jihadis. Himpunan teori-teori tersebut tentunya saling melengkapi dan memperkaya satu dengan yang lainnya sehingga menjadi pondasi kuat keilmuan studi terkait.

Radikalisme dan terorisme yang keduanya merupakan pemahaman yang harus dihindari bahkan tidak untuk dilakukan, justru menjadi daya tarik bagi sebagian generasi muda. Anehnya para pelaku dari sebagian mereka, merupakan kalangan terpelajar yang mengenyam pendidikan secara formal. Sebagai contoh, munculnya dikalangan mereka sikap anti terhadap komitmen kebangsaan, intoleransi dalam beragama, tindakan teror dilapisan masyarakat dan gemar menghakimi orang lain di luar pemahman dan kelompoknya dengan label "kafir", "musyrik", "bidah" dan istilah lainnya dengan dalih teologi. Maka dari persoalan dalih teologi, menjadi isu poin penting dalam tulisan ini membahas teologi moderasi dalam Islam sebagai upaya internalisasi di kalangan generasi muda muslim Indonesia.

Teologi Samawi

Islam sebagai agama samawi yang diimani para nabi memiliki muatan teologi yang sama karena mereka mengimplementasikan secara paripurna makna Islam sesungguhnya, yaitu tunduk, patuh dan pasrah terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah secara khusus kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Ketundukan pada Allah yang dilakukan para nabi dan umatnya diwujudkan dalam bentuk keimanan dengan mengesakan Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang maha suci dari makhlukNya dari benda maupun sifat benda di alam semesta ini. Kemudian selain keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan qadha dan qadar menjadi penyempurna rukun iman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi. Bentuk kepatuhan dan kepasarahan para nabi dan umatnya juga diwujudkan dalam rukun Islam, yaitu mematrikan dua kalimat syahadat dalam relung hati, merutinkan shalat sebagai bentuk identitas diri seorang muslim, melakukan puasa wajib pada waktunya sebagai bentuk ketakwaan, menunaikan zakat sebagai melatih kepekaan individu dan sosial dan melaksanakan haji dengan aturan yang berlaku sebagai bentuk persamaan status sosial. Rukun iman dan islam inilah yang menjadi tolok ukur kejujuran dalam beragama sesungguhnya, dan kebahagiaan bagi pelakunya.

Dalam kajian ilmu akidah (kalam), pembahasan rukun iman dan islam kerap mengalami distorsi, sehingga berdampak pada sikap dan perilaku beragama. Maka dalam sejarah sosial umat islam, hadirnya aliran-aliran dalam teologi yang satu sama lainnya berbeda pandangan dalam pemahaman teologi, bahkan dalam interaksi mereka melakukan bantahan-bantahan dalam tema-tema ushul (pokok) akidah. Sebagai contoh, menurut Kholil (2010) pada periode salaf, sahabat nabi, Ali ibn Abi Thalib (W.40 H) dengan argumentasinya membantah paham Khawarij dan Dahriyyah, begitupun dengan ulama-ulama salaf selanjutnya. Kemunculan aliran-aliran tersebut jika merujuk pada hadis nabi, mengingatkan kembali pesan nabi yang pernah disampaikan dalam hadisnya tentang perpecahan umatnya akan menjadi 73 (tujuh puluh tiga) aliran, dan perintah untuk mengikuti (1) satu aliran teologi dari 73 (tujuh puluh tiga) aliran tersebut, yaitu aliran teologi mayoritas (Abdul Qahir ibn Thahir al-Baghdadi, 1982).

Kemunculan aliran-aliran dalam teologi mengakibatkan juga persoalan yang bersifat pokok dan cabang. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong perhatian dari para ulama kalangan empat madzhab untuk menjelaskan kembali dalam karya tulis mereka berisi teologi yang dikenal dengan teologi Ahlussunnah Wal Jama'ah (sunnii) secara rinci, hingga kemudian, tepatnya di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang bermadzhab Syafii (W.324 H) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang bermadzhab Hanafi (W.333 H) memiliki jasa besar dalam menjelaskan dan merangkum kembali akidah sunni yang diyakini oleh para sahabat secara 'aqli (rasional) dan naqli (al-Quran dan hadis) disertai dengan bantahan terhadap syubhah-syubhah dari kelompok selain sunni. Atas dasar itulah kemudian para pengikut Ahlussunnah Wal Jama'ah dari kalangan empat madzhab, yaitu: Hanafiyah, Malikiyyah, Syafiiyyah dan Fhudala al-Hanabilah dalam akidah berafiliasi kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari (Tajuddin as-Subki, 1993).

Penjelasan para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah (sunnii) dalam teologi melalui karya-karyanya menarik untuk dikaji dan direvitalisasi kembali, terutama dalam hal moderasi sebagai bentuk penyegaran kembali teologi samawi berbasis moderasi. Dari para ulama sunni, yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Imam Abu Jafar at-Tahawi atau dikenal dengan imam at-Tahawi (W. 321 H) dari kalangan salaf yang dengan tegas memunculkan istilah moderasi dalam Islam. Alasan penulis sendiri memilih imam at-Tahawi dalam tulisan ini, karena kedalam ilmunya sehingga lahir salah satu karya tulisnya dalam akidah yang dinamakan al-'Aqidah at-Tahawiyah. Disamping itu, alasan lain penulis memilih at-Tahawi karena dari segi periode waktu, at-Tahawi tergolong dalam kategori ulama salaf dan pemikirannya masih autentik dan relevan pada masa kini untuk diimplementasikan dalam praktek beragama. Kitab al-'Aqidah at-Tahawiyah juga keberadaannya saat ini banyak diberikan syarah (penjelasan) ulang oleh para ulama dan akademisi, bahkan dijadikan sebagai buku pegangan dalam kurikulum pembelajaran di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, bagi generasi muda muslim Indonesia, penting untuk mempelajari dan mengamalkan isi kitab tersebut, terlebih dalam kajian teologi samawi berbasis moderasi yang saat ini menjadi kebutuhan dasar seorang muslim.

Teologi Samawi Berbasis Moderasi

Kitab al-'Aqidah at-Tahawiyah ditulis oleh seorang ulama besar bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Salaamah ibn Salamah ibn Abdul Malik al-Azdi al-Hajri al-Misri at-Tahawi atau biasa dikenal dengan Imam Abu Jafar at-Tahawi. Menurut satu pendapat dilahirkan pada tahun 238 Hijriah, dan pendapat lain pada tahun 239 Hijriah dan pendapat inillah yang paling kuat, sedangkan wafatnya pada tahun 321 Hijriah. Beliau sendiri pada awalnya bermadzhab Syafii, namun kemudian berpindah madzhab Hanafi dikarenakan melihat pamannya rutin mempelajari karya tulis Imam Abu Hanifah (Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Babirti, 2009).

Imam Abu Jafar at-Tahawi memiliki banyak karya tulis diantaranya: Ahkam al- Quran, Ikhtilaf al-Ulama, Maa'ani al-Atsar, Bayan Musykil al-Atsar, Kitab syurut al-Kabir, Syurut as-Shoghair, Syurut al-Aushat, Kitab fi at-Taarikh, Syarh al-Jaami' as-Shoghair, an-Nawadhiir al-Fiqhiyyah, Manaqib Abi Hanifah dan al-'Aqidah at-Tahawiyah (Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Babirti, 2009).

Pada pendahuluan awal kitab al-'Aqidah at-Tahawiyah, disebutkan bahwa kitab tersebut merupakan penjelasan akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah (sunnii) menurut Abu Hanifah (W.150 H), seorang pendiri madzhab Hanafi, Abu Yusuf Yakub ibn Ibrohim al-Anshori (W.182 Hijriah) dan Abu 'Abdillah Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani (W. 189 Hijriah). Menurut al-Harari (2012) Imam Abu Jafar at-Tahawi menyebutkan secara khusus dua nama pakar fikih terakhir, yaitu Abu Yusuf Yakub ibn Ibrohim al-Anshori dan Abu 'Abdillah Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani dikarenakan mereka dalam fikih mengikuti madzhab Hanafi, bukan karena akidah mereka secara khusus disandarkan kepada keduanya, akan

tetapi al-'Aqidah at-Tahawiyah adalah akidah keyakinan mayoritas Ahlussunnah Wal Jama'ah. Posisi kitab al-'Aqidah at-Tahawiyah pada hingga saat ini isinya telah disepakati isinya dari generasi ke ke generasi walaupun at-Tahawi sendiri belum pernah bertemu dengan Abu Hanifah dikarenakan tidak semasa dengannya, namun tulisan-tulisa at-Tahawi dalam kitabnya sama persis dengan ungkapan-ungkapan Abu Hanifah yang beliau kutip dilengkapi dengan sanadnya dari para murid-murid imam Abu Hanifah (Kholil, 2010).

Terkait teologi moderasi yang dimunculkan at-Tahawi dalam kitabnya *al-'Aqidah at-Tahawiyah* menyebutkan bahwa moderasi dalam Islam memiliki indikator-indikator yang baku. Al-Harari (2012) dalam mejelaskan pemikiran at-Tahawi menegaskan bahwa menurutnya Islam merupakan satu-satunya agama yang diimani oleh para malaikat dan para nabi, dan lebih tegas at-Tahawi menyebutkan bahwa teologi moderasi dalam Islam dapat dicirikan dengan tidak bersikap sebagai berikut: *al-Ghuluw* (sikap pandang berlebih-lebihan dalam urusan agama), *at-Taqshir* (sikap mengabaikan nilai-nilai ajaran agama), *at-Tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhlukNya), *at-Ta'thil* (meniadakan sifat Allah), *al-Jabr* (manusia tidak menciptakan perbuatannya sama sekali), *al-Qadar* (manusia menciptakan perbuatannya), *al-Amn* (meyakini terlepas dari siksa meskipun melakukan dosa) dan *al-Iyas* (putus asa dari ampunan terhadap dosa yang dilakukan).

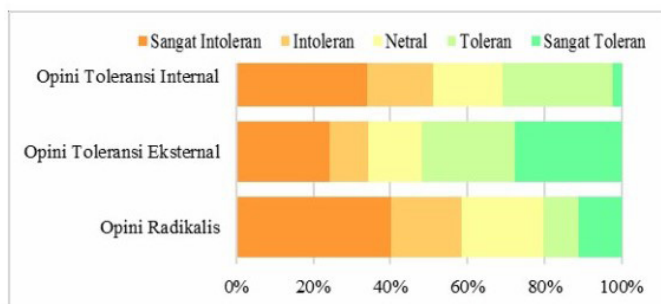
Dari indikator-indikator yang telah ditetapkan at-Tahawi di atas, maka dapat dianalisis bahwa teologi moderasi dalam Islam yang harus diimplementasikan dalam beragama seorang muslim secara *dhohir* dan *batin* hendaknya bersikap diantara *al-Ghuluw* dan *at-Taqshir*, diantara *at-Tasybih* dan *at-Ta'thil*, diantara *al-Jabr* dan *al-Qadr* dan diantara *al-Amn* dan *al-Iyas*. Inilah pandangan at-Tahawi yang sebenarnya bila dikaji lebih mendalam akan meluruskan pemahaman-pemahaman di luar akidah mayoritas *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (sunni) seperti aliran pemahaman yang menyebutkan pengkafiran terhadap umat Islam yang tidak menerapkan hukum Allah, pemahaman aliran yang menyebutkan ajakan untuk mengabaikan syariat/hukum praktis (menjalankan perintah dan larangan) dan mengedapankan hakikat tanpa harus melihat syariat, pemahaman aliran yang menyerupakan Allah dengan makhlukNya dengan mengatakan Allah benda, disifati denga sifat benda, memiliki batasan dan ukuran serta bertempat dan diliputi arah, pemahaman yang menyebutkan anti dengan sifat tuhan, pemahaman yang menyebutkan perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah dan juga pemahaman yang menyebutkan perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri dan terakhir pemahaman yang mengabaikan *khauf* (menghadirkan rasa takut akan siksa Allah) dan *raja* (mengharapkan selalu rahmat Allah).

Pemahaman-pemahaman yang telah disebutkan sebelumnya jika dirincikan dengan menyebutkan nama alirannya secara rinci, telah dijelaskan oleh para ulama karya tulis mereka seperti karya tulis 'Abdul Qahir ibn Thahir ibn Muhammad al-Baghdadi dalam karyanya *al-Farq baina al-Firaq* dan as-Syahrastani dalam karyanya *al-Milal wa an-Nihal* dan lain-lain. Kemudian jika dikaji dari 8 indikator dalam perspektif at-Tahawi, sesungguhnya dapat dianalisis juga bahwa aliran-aliran yang muncul pada masa lalu, apabila dikorelasikan dengan kelompok-kelompok radikal masa kini, sebagian masih terdapat persamaan doktrin namun dengan nama yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa teori at-Tahawi tentang teologi moderasi membawa misi jangka panjang dalam perlindungan akidah umat islam dari kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Teori at-Tahawi ini juga sebenarnya menjadi kontribusi yang sangat besar bagi umat islam yang perlu disyukuri dengan cara direvitalisasi kembali dan diinternalisasikan kepada mereka agar teologi moderasi dalam Islam menjadi pondasi dan identitas seorang muslim dalam beragama. Dari sini dapat dipahami juga bahwa ulama-ulama *muktabar* dari kalangan *salaf* seperti Imam Abu Jafar at-Tahawi dan lainnya secara tidak langsung mereka mendapatkan pujian langsung dari rasulullah dalam hadisnya kepada umat yang hidup dimasa tiga abad pertama *hijriyah*.

Internalisasi Teologi Moderasi Pada Generasi Muda Muslim

Internalisasi menurut KBBI (2023) memiliki arti penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dalam konteks teologi moderasi pada generasi muda muslim Indonesia, maka teori at-Tahawi sangat penting untuk diinternalisasikan mengingat menurut dari berbagai penelitian, di kalangan generasi muda, khususnya siswa dan mahasiswa rentan unuk melakukan tindakan radikal. Sebagai contoh pada gambar di bawah ini.

GEN Z: KEGALAUAN IDENTITAS KEAGAMAAN



Gambar 1. Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Kategori Opini Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal, dan Radikalisme

Sumber: *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan (2018)*

Dari gambar di atas menurut Survei Sikap Keberagamaan Siswa dan Mahasiswa Muslim di Indonesia yang dilakukan PPIM (2017), menunjukkan adanya penguatan paham radikalisme dan intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa, disamping itu juga dilihat dari sisi opini, siswa dan mahasiswa memiliki pandangan yang cenderung radikal. Jika digabungkan, mereka yang memiliki sikap yang radikal dan sangat radikal lebih dari separuh total responden yaitu sebesar 58,5%. Sedangkan mereka yang memiliki sikap moderat hanya sebesar 20,1%.

Adapun dalam teknisnya dalam internalisasi teologi moderasi pada generasi muda muslim Indonesia, perlu ada upaya membudayakan sanad dalam pembelajaran mereka, terutama dalam teologi seperti pengajaran kitabnya *al-'Aqidah at-Tahawiyah* diperkuat dengan mengenalkan pokok-pokok aliran-aliran teologi masa klasik dengan mempelajari dan mendalami karya tulis *al-Farq baina al-Firq* dan *al-Milal wa an-Nihal* dan kitab-kitab *muktabar* lainnya dikorelasikan dengan pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok radikal masa kini agar tidak terpapar pada pemahaman mereka. Selain itu juga memberikan pemahaman yang penting kepada generasi muda muslim Indonesia agar berkomitmen dan konsisten ikut serta dalam menyebarkan teologi moderasi di kalangan generasi muda muslim Indonesia lainnya.

Pengertian sanad (mata rantai) sendiri menurut Abdul Aziz Sukarnawadi (2018) dalam tradisi keilmuan Islam adalah rentetan para guru dalam sebuah bidang keilmuan yang menyambungkannya kepada sumber ilmu yang dimilikinya. Dalam Islam sendiri menurut Said Aqiel Hasan al-Munawwar dkk (2019), budaya sanad menjadi karakteristik kekhususan umat Muhammad. Oleh karenanya, setiap muslim hendaknya memperhatikan secara serius *sanad* dari disiplin keilmuan yang ditekuninya, termasuk dalam disiplin keilmuan teologi yang menjadi pondasi dan identitas muslim yang sejati.

Penutup

Ekstremisme beragama yang terjadi dikalangan sebagian generasi muda muslim Indonesia disebabkan minimnya pengetahuan teologi moderasi dalam Islam yang sebenarnya mudah untuk dicerna untuk dipahami oleh generasi muda muslim Indonesia. Dalam level internalisasi, teologi moderasi dalam Islam penulis merekomendasi untuk membudayakan *sanad* dalam pengambilan disiplin ilmu agama, terutama teologi moderasi seperti dalam kitab *al-'Aqidah at-Tahawiyah* karya Imam Abu Jafar at-Tahawi (W.321) sebagai pondasi dan identitas akidah seorang muslim agar memiliki cara pandang dan sikap yang moderat dengan memiliki karakter moderasi dengan tidak bersikap *al-Ghuluw* dan *at-Taqshir*, *at-Tasybih*, *at-Ta'thil*, *al-Jabr*, *al-Qadr*, *al-Amn* dan *al-Iyas* dalam beragama. Kitab *al-'Aqidah at-Tahawiyah* karya Imam Abu Jafar at-Tahawi ini menurut hemat penulis adalah kitab teologi samawi berbasis moderasi yang harus dipelajari

oleh generasi muda muslim sedini mungkin untuk menjadi muslim yang moderat sesuai pemahaman *Ahlussunnah Wal Jama'ah (sunni)* yang menjadi keyakinan mayoritas umat Islam.*

Referensi

- Aziz, Abdul Sukarnawadi. (2018). *Seputar Sanad Keilmuan dan Pengijazahannya*. Yogyakarta: Global Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.). KBI daring. Diakses pada 25 Juni 2023, dari Arti kata internalisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Harari-al, Abdullah. (2012). *Ad-Durroh al-Bahiyah fi Halli al-fadz al-'Aqidah at-Thahawiyah*. Beirut: Dar al-Masyari'.
- Muhyiddin, Kholil. (2010). *Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam*. Jakarta: Syahamah Press.
- Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Babirti. (2009). *Syarah al-'Aqidah at-Tahawiyah*. Dar al-Bairuti.
- Nisa, Faella Yunita, dkk. (2018). *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Said Aqiel Hasan al-Munawwar, dkk. (2019). *al-Isnad Wa Ahammiyatuhu fi 'Ilm al-Fiqh*. IASJ: Journal of Babylon Center for Humanities Studies, Vol.9, Issue:4.
- Sirry, Mun'im. (2023). *Pendidikan dan Radikalisme Data dan teori Memahami Intoleransi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Subki-as, Tajuddin. (1993). *Muidu an-Ni'am Mubidu an-Niqam*. Kairo: al-Maktabah al-Khanji.
- Qahir ibn Thahir al-Baghdadi, Abdul. (1982). *al-Farq baina al-Firaq*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

AINUR ALAM BUDI UTOMO adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Selain itu juga dimanahkan mengajar sebagai Tutor Online (Tuton) di Universitas Terbuka dan dosen tidak tetap di Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan program Doktor Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Ia merupakan Alumni Peserta Pelatihan Standardisasi DA'I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Angkatan 8 (2021), ToT Lemhannas RI; Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Dosen, Guru dan Widyaiswara Secara Virtual Angkatan Kedua Lemhannas RI (2022) dan ToT Moderasi Beragama bagi Dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum Angkatan 1 Kementerian Agama RI (2023). Aktivitas keorganisasian di antaranya diamanahkan sebagai salah satu Pengurus Pusat Rumah Produktif Indonesia (RPI) dan Anggota Pembina Yayasan Pendidikan al-Hikmah Johar Karawang, badan hukum dari Masjid Jabal al-Hikmah Johar-Karawang, Mts. al-Hikmah Johar Karawang dan Pondok Pesantren al-Wasathiyah Johar Karawang. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui no.hp 0812-2112-3559 atau melalui email : ainuralambudiutomo@ubpkarawang.ac.id.

Pendidikan Islam Asia Tenggara: Ragam Bentuk dan Transformasi Kelembagaan

Ismail Suardi Wekke

Potret Pendidikan Islam di Asia Tenggara

Sejak Islam diterima di Asia Tenggara, kadang juga ada yang menyebutnya Nusantara, kemudian lembaga pendidikan mengiringi perkembangan dan pengembangan Islam. Pesantren menjadi Lembaga yang kosmopolit (Ladiqi, Wardhani, Wekke, & Rahim, 2018). Diantaranya dimulai dari masjid. Maka, dapat disaksikan keberadaan masjid di setiap lembaga pendidikan yang juga menjadi pilar keberadaan institusi tersebut.

Keberadaan masjid inilah yang kemudian memunculkan lembaga pendidikan Islam. Pola yang sama dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Ketika memeluk Islam, maka sarana utama dan pertama adalah masjid. Dari keberadaan masjid itulah kemudian memunculkan kebersamaan dan mendorong wujudnya institusi pendidikan. Terlihat di madrasah atau pesantren, dimana masjid bukan semata-mata tempat sujud ataupun salat saja. Dalam penggunaan masjid sebagai “gedung serbaguna” untuk pelbagai aktivitas dan keperluan Bersama. Bahkan sesekali, dalam menerima tamu pun juga menggunakan masjid.

Termasuk dalam pengembangan perguruan tinggi Islam. Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Makassar, dan begitu juga dengan perguruan tinggi Islam di Malaysia, dan Thailand, salah satu bangunan besar dan utama adalah masjid. Dengan keberadaan masjid ini terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan. Termasuk dalam penyelenggaraan kurikulum dan aspek lain di kawasan perguruan tinggi, masjid menjadi institusi tersendiri. Bahkan ada perguruan tinggi yang mengangkat secara khusus, direktur masjid yang disetarakan dengan jabatan dekan.

Dalam pengembaraan para pedagang, mereka bukanlah mengawalinya dengan menyertakan guru atau tenaga pengajar. Justru kemunculan seorang ustadz yang kemudian dalam perkembangan berikutnya disematkan kata kiyai, semata-mata karena keperluan setempat. Kebersamaan antara pedagang, dan guru agama, kemudian memunculkan adanya “perintah” kerajaan bagi mewujudkan halaqah ataupun pengajian untuk penyebarluasan panduan beragama.

Dengan berakar pada tradisi Arab, maka pendidikan Islam jamak disebut madrasah. Sementara di Indonesia, Malaysia, dan Thailand ditemukan istilah lain yang juga digunakan dalam kaitan pendidikan Islam, pondok. Di Indonesia sendiri beragam, pondok pesantren kadang menjadi dua kata yang dipadukan. Adapun di Aceh, digunakan juga dayah. Untuk di Minangkabau digunakan Surau. Ada aspek budaya setempat yang dijadikan sebagai lingkungan dengan pola adaptasi sebagai bagian dalam perkembangan dan pengembangan Lembaga (Alfita, Kadiyono, Nguyen, Firdaus, & Wekke, 2019). Indonesia dengan bentangan yang luas, memiliki ragam pendidikan Islam termasuk di daerah minoritas muslim (Wekke, 2017).

Pendidikan Islam Kini, dan Pengembangan ke Masa Depan

Institusi pendidikan keagamaan secara khusus dimulai sejak balita. Aisyiyah dalam pengembangan taman kanak-kanak, menamakannya dengan Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA). Maka, sejak awal pengasuhan anak-anak tak lain dan tak bukan, hanyalah dengan semangat keislaman semata. Kemudian akhir 2022, Muhammadiyah kemudian mengelola perguruan tinggi yang kali pertama dengan nama Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan di Sinjai, Sulawesi Selatan. Selama ini, Muhammadiyah hanya menggunakan nama Muhammadiyah ataupun nama tokoh Muhammadiyah yang digabungkan dengan universitas, seperti Universitas Ahmad Dahlan, kemudian diikuti Universitas Prof. Dr. Hamka. Sebelum itu, hanya menggunakan kata Muhammadiyah.

Konvergensi madrasah/pesantren/ perguruan tinggi kemudian menjadi kesempatan untuk membentuk nama baru ataupun nama yang sama dengan bentuk pendidikan yang baru. Dimana ketika Sekolah Insan Cendekia perlu dipindahkan pengelolaannya dari Departemen Riset dan Teknologi, maka ditransformasi menjadi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Berawal dari dua lokasi saja di Serpong dan Gorontalo, kini menyebar hampir di setiap provinsi. Termasuk keberadaannya di Sorong, Papua Barat Daya. Kesemuanya menjadikan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran (Wekke, & Hamid, 2013).

MAN Insan Cendekia merupakan bentuk pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum sains secara khusus. Tidak saja dalam kaitan ilmu sosial, tetapi lebih cenderung ke ilmu eksakta. Ini merupakan bagian dari semangat awal ketika Sekolah Menengah Atas Insan Cendekia dibentuk diantaranya untuk mendorong wujudnya penguasaan terhadap keilmuan sains (eksakta). Bukan saja pada ilmu sosial dan humaniora.

Sementara itu, sejak 1997 perguruan tinggi Islam berkembang dan dikembangkan dengan “pesat”. Saat itu, tak satupun Universitas Islam Negeri. Kini jumlahnya semakin bertambah. Bahkan dalam satu provinsi, seperti Jawa Tengah terdapat empat UIN yang tersebar di Solo, Semarang, Purwokerto, dan Pekalongan. Di Sulawesi Selatan, selain Makassar, perguruan tinggi Islam juga berdiri di Parepare, Watampone, dan Palopo. Ibukota provinsi bukan satu-satunya tempat memperoleh pendidikan tinggi. Di ibukota Kabupaten atau kota sekalipun, Pendidikan Islam juga dikelola dengan unggul.

Keberadaan perguruan tinggi menjadi instrumen yang strategis. Di Thailand, perguruan tinggi seperti Universitas Fatoni menjadi pusat penyebarluasan pesan-pesan perdamaian. Di Universitas Fatoni, diwujudkan mata kuliah Peace Studies dan kemudian menjadi mata kuliah wajib. Ini disampaikan Syekh Ismail Lutfi, diantaranya untuk stigma bahwa pendidikan Islam mencetak teroris. Justru kini, Universitas Fatoni bukan hanya untuk mahasiswa muslim semata. Juga turut menerima mahasiswa yang bukan beragama Islam, dan sekaligus kesempatan menunjukkan langsung bahwa dalam pendidikan Islam manapun di dunia tidak pernah bersemai apalagi diajarkan kekerasan (Wekke, Siddin, & Langputeh, 2019).

Adapun Malaysia, pendidikan agama dikelola bersama dengan pendidikan umum. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), dan juga Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama Islam), tidak mengurus sekolah agama, atau pondok. Bahkan secara khusus di Malaysia, dibentuk Sekolah Agama Kebangsaan (dengan pola asrama). Sepertinya, keberadaan asrama menjadi pilihan strategis di Malaysia dan Indonesia. Bahkan di Indonesia, madrasah negeri, membentuk kelas khusus yang diasramakan. Ataupun pilihan untuk asrama yang sesekali disebut dengan istilah boarding.

Kembali ke Malaysia, walau tidak secara khusus disebut sebagai sekolah agama atau madrasah, keberadaan Maktab Sains MARA, sejatinya juga adalah sekolah agama. Dimana dengan sistem asrama yang diterapkan, menjadikan Islam sebagai panduan dan semangat pendidikan. Bagi Malaysia, Islam adalah agama formal yang diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, sebagaimana juga di dalamnya adalah sistem pendidikan. Secara khusus, MARA sendiri merupakan agensi kerajaan yang secara khusus menjalankan program kebumiputeraan. Sehingga, aktivitasnya bertumpu pada melayani keperluan bumiputra, termasuk di dalamnya urusan keislaman.

Bukan tentang Islam sebagai agama formal yang dijadikan sebagai dasar negara. Melainkan soal kepraktisan semata. Dimana ketika lembaga pendidikan keagamaan juga menyatu dengan system pendidikan nasional, maka tata kelola atau kemudahmengertian dapat dengan mudah diatasi. Begitupun juga di Vietnam, tetap saja ada jurusan bahasa Arab di perguruan tinggi yang bahkan tidak ada kata Islam yang melekat. Dimana metode perguruan tinggi yang khusus untuk Islam digunakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Awalnya, Thailand juga menggunakan “gaya” yang sama. Hanya saja dalam perkembangannya, kemudian menggunakan metode yang dijalankan saat ini. Hanya dengan menggunakan “semangat” Islam saja, tetapi tidak menyematkan nama Islam dalam perguruan tinggi. Atau di Brunei Darussalam, dengan nama seorang Sultan, sudah menjadi “tanda: bahwa ini merupakan universitas Islam untuk membedakan dengan pendidikan tinggi umum (Lubis & Wekke, 2009).

Di Manila, University of Phillipines membentuk secara khusus satu akademi untuk kajian Islam. Dipimpin dekan, dan juga menjadi bagian integral universitas. Kajian Islam ditempatkan sebagai sebuah disiplin tersendiri. Ini menjadikan

bahwa Islam bukanlah bagian yang terpisahkan dari keperluan masyarakat. Walau jumlahnya tidak sebesar di negara lain, tetapi tetap saja perlu mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan nasional.

Masa Depan Pendidikan Islam Asia Tenggara

Madrasah/Sekolah Islam tidak lagi terpinggirkan ataupun menjadi pilihan kedua. Selanjutnya, pendidikan Islam mengalami transformasi yang terus berkembang (Wekke, Ashrori & Hamuddin, 2018). Jika di awal dikemukakan lembaga pendidikan untuk anak-anak. Maka, kini mulai wujud pendidikan Islam untuk warga senior. Di Malaysia, berdiri Pondok Unais. Dikhususkan untuk warga emas. Sementara Majelis Ulama Indonesia mulai mendiskusikan perlunya lembaga untuk lansia. Mathlaul Anwar di Maros memberikan fokus pada pengembangan lembaga sejenis ini. Bahkan, dalam Ramadan 1444 H, Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan santunan zakat bagi warga lansia.

Pendidikan Islam sejatinya merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan di masyarakat. Dijalankan dengan pelbagai ragam, termasuk dengan pola konvergensi. Seperti di Emeyodere digunakan panti asuhan sebagai pola asrama bagi sekolah formal. Sehingga siswa yang jauh dari kawasan sekolah tetap mendapatkan kesempatan belajar melalui penyediaan asrama dalam bentuk panti asuhan.

Dalam pola pendidikan pesantren Indonesia, integrasi antara madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi dikelola dalam ragam sesuai kekhasan masing-masing. Seperti Gontor, dimana alumninya tidak lagi hanya “berkelana” ke perguruan tinggi seluruh dunia. Badan Wakaf menyediakan Universitas Darussalam, sebelumnya hanya dalam nama Institut Studi Islam Darussalam yang fokus pada jurusan keagamaan semata. Tebuireng, Darunnajah, dan As’adiyah, diantara pesantren yang kemudian juga mengembangkan perguruan tinggi. Tidak lagi dalam bentuk jurusan pendidikan agama Islam, tetapi program studi yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga mulai ditawarkan ke publik. Bukan hanya untuk kalangan alumni pesantren yang mereka Kelola. Sekali lagi, dibuka dan terbuka untuk umum. Sekalipun bukan dari alumni pesantren.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak lagi mendikotomi antara keilmuan Islam yang berasal dari khazanah keagamaan, tetapi STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) juga dijadikan sebagai pelajaran agama. Ini puluhan tahun sebenarnya sudah dijalankan Gontor. Sehingga, boleh jadi Gontor kemudian disebut modern dengan salah satunya tidak memisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran sains. Termasuk pesantren tidak lagi jadi hanya wacana Pendidikan, juga terkait kewirausahaan (Hadi, Wekke, & Cahaya, 2015), lingkungan (Desi, Sabri, Karim, Gonibala, & Wekke, 2021).

Satu hal lagi, sejak era reformasi kemudian wujud lembaga pendidikan dengan penamaan terpadu. Sekolah Islam Terpadu dalam pelbagai tingkatan. Sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah. Ini merupakan elaborasi dimana selama ini, sekolah dan madrasah terpisah. Dengan adanya Sekolah Islam Terpadu, menjadikan sekolah dan madrasah bukan lagi sebagai sebuah entitas yang terpisah. Semata-mata, hanya pada pengelolaan di tingkat kementerian semata. Komposisi kurikulum tidak lagi terpisah secara khusus, bahkan di madrasah sendiri. Terdapat tambahan mata pelajaran sains yang jumlahnya melebihi mata pelajaran keagamaan.

Akhirnya, Islam tak lagi terbatas pada praktik keagamaan semata. Perkembangan terakhir termasuk keberadaan pagebluk covid-19 menjadikan lembaga pendidikan mengalami transformasi, kalau tak dapat dikatakan revolusi (Muradi, Jailani, Wekke, & Noor, 2021). Semuanya lebih kepada adaptasi metode. Penggunaan teknologi terutama teknologi informasi bukan lagi sebagai sebuah media semata (Idris, Willy, Wekke, & Mokodenseho, 2021). Termasuk dalam adminstrasi dan tata kelola. Tidak lagi dalam bentuk penamaan tradisional ataupun modern. Keduanya bergerak bersamaan, sehingga dalam pola pendidikan modern ada unsur tradisional dan sebaliknya.*

Referensi

- Alfita, L., Kadiyono, A. L., Nguyen, P. T., Firdaus, W., & Wekke, I. S. (2019). Educating the External Conditions in the Educational and Cultural Environment. *International Journal of Higher Education*, 8(8), 34-38.
- Desi, N., Sabri, M., Karim, A., Gonibala, R., & Wekke, I. S. (2021). Environmental Conservation Education: Theory, Model, and Practice. *Psychology and Education Journal*, 58(3), 1149-1162.

- Hadi, C., Wekke, I. S., & Cahaya, A. (2015). Entrepreneurship and education: creating business awareness for students in East Java Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 177, 459-463.
- Idris, M., Willya, E., Wekke, I., & Mokodenseho, S. (2021). Peace resolution in education and application on information and communication technology. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6).
- Ladiqi, S., Wardhani, B., Wekke, I. S., & Rahim, A. F. A. (2018). Globalization and the rise of cosmopolitan shariah: The challenge and opportunity of Halal tourism in Indonesia. *Herald NAMSCA*, 1, 904-907.
- Lubis, M. A., & Wekke, I. S. (2009). Integrated Islamic education in Brunei Darussalam: The hopes and challenges. *Educare*, 1(2).
- Muradi, A., Jailani, M. S., HS, S., Wekke, I. S., & Noor, H. (2021). Revitalization of Education for Children in Indonesian Families During the Covid-19 Pandemic. *Ilkogretim Online-Elementary Education Online*, 20(3), 481-490.
- Wekke, I. S. (2017). Arabic learning material of higher education Muslim community North Sulawesi. *Dinamika Ilmu*, 17(2), 175-189.
- Wekke, I. S., & Hamid, S. (2013). Technology on language teaching and learning: a research on Indonesian pesantren. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 83, 585-589.
- Wekke, I. S., Ashrori, M., & Hamuddin, B. (2018). Institutional Transformation of Madrasa of Muslim Minority in Thailand. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 15-26.
- Wekke, I. S., Siddin, S., & Langputeh, S. (2019). Islamic Education in Thailand Pattani Muslim Minority: What Are the Institutional Continuity and Change?. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 4(1), 127-134.

ISMAIL SUARDI WEKKE adalah dosen di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Papua Barat Daya. Sejak Juni 2022 mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris, Makassar. Sejak kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia (2006-2009), turut serta dalam isu dan kajian regional Asia Tenggara. Salah satu pendiri Southeast Asia Academic Mobility (SEAM), jejaring Asia Tenggara sebagai platform kerja sama perguruan tinggi. Minatnya dalam kajian Asia Tenggara memberikan kesempatan dalam jelajah Asia Tenggara ke Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Pesantren dan Masa Depan Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia Untuk ASEAN

Tatang Hidayat

Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan arus globalisasi menuntut pondok pesantren untuk melakukan perubahan-perubahan, jika tidak demikian, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berdiri di negeri ini bisa saja kalah saing dengan banyaknya lembaga pendidikan modern yang didirikan. Menurut In'ami (2011), akhir-akhir ini apresiasi masyarakat terhadap pesantren saat ini cukup tinggi, dan kesadaran untuk mengantarkan anak-anak ke lembaga pendidikan pesantren mulai tumbuh di tengah persaingan lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih, dan tentunya dengan biaya yang tinggi.

Keberadaan pesantren menjadi data tarik dalam segala aspeknya. Baik kiainya maupun sistem pendidikannya. Itulah yang menjadikan pesantren dan apapun yang dimilikinya sebagai kearifan lokal dan kekayaan intelektual dari nusantara (Abubakar 2018). Pesantren di era globalisasi ini tampaknya perlu dibaca sebagai kekayaan intelektual nusantara yang mampu memberikan kontribusi terhadap lahirnya khazanah intelektual muslim yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab terhadap dirinya maupun masyarakat di sekelilingnya (Haryanto, 2017).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah menjadi tradisi kaum muslim di nusantara. Istilah pesantren di nusantara memiliki banyak kesamaan dengan institusi pendidikan Islam di Asia Tenggara. Di Aceh dikenal sebagai *dayah*, di Minangkabau dikenal sebagai *surau*, sementara di Jawa disebut *pesantren*, di Malaysia disebut *pondok* dan di Thailand Selatan disebut *pho no*. Sementara itu, pesantren pertama kali didirikan pada tahun 840 M oleh Tengku Chik Muhammad Amin di Aceh Timur yang dikenal dengan *dayah*. Adapun *surau* pertama kali dibangun oleh Syaikh Burhanuddin Ulakan (1646-1704 M) di Pariaman setelah beliau belajar dari Aceh dengan Syaikh Abdurrauf al-Singkili (w. 1693 M). Sementara di Jawa, pesantren didirikan oleh Raden Fatah pada 1475 M di Demak (Ridhwan, Nurdin, and Samad 2018).

Namun pendapat lain, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah berdiri sejak penyebaran agama Islam di nusantara pada abad 15 M. Tokoh pertama yang mendirikan adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419 M), alasannya beliau mengembangkan dakwah menggunakan masjid dan pesantren sebagai transmisi pusat keilmuan Islam (Musthofa 2015). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, tokoh paling sukses dalam pengembangan pondok pesantren ialah Sunan Ampel (Raden Rahmat), yang kemudian melahirkan beberapa pondok Wali Songo lainnya, seperti Pesantren Giri, Pesantren Demak, Pesantren Tubah, Pesantren Derajat, dan pesantren-pesantren lain di Nusantara (Anam 2017). Dengan demikian, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Penyebaran agama Islam di nusantara tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran ulama dan pondok pesantren. Hal yang demikian sudah terbukti bahwa pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, berfungsi juga sebagai pusat dakwah dan pusat perlawanan terhadap para penjajah (Haningsih 2008). Sementara itu, dalam konteks pendidikan di Indonesia, pesantren merupakan instrumen sistem pendidikan Indonesia yang unik. Keunikan dan daya tahan pesantren selalu menjadi penelitian yang menarik dan tidak ada habisnya. Keberadaan pesantren menjadi daya tarik dalam semua aspeknya, baik kiainya maupun sistem pendidikannya. Itulah yang menjadikan pesantren dan apapun yang dimiliki sebagai khazanah kekayaan intelektual dan kearifan lokal (Abubakar 2018).

Eksistensi pondok pesantren tetap diakui keberadaannya dari masa ke masa. Mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pembinaan kepribadian, keterlibatan dalam

membela agama dan bangsa dari penjajah tidak dapat dipungkiri (Hamzah 2014). Pada abad 21, peran pesantren tidak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai institusi keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial, bahkan melebar menjadi agen perubahan dan pengembangan masyarakat (Musthafa, Wahyudin, and Tresnawaty 2017). Meskipun tetap, kegiatan belajar dan mengajar di pesantren merupakan kegiatan utama (Wekke and Hamid 2013).

Selain lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus simpul budaya (Hidayat, Rizal, and Fahrudin 2018a). Tidak sedikit pondok pesantren saat masa penjajahan dan kemerdekaan menjadi basis-basis perlawanan terhadap penjajah. Namun karena penulisan sejarah di Indonesia pada umumnya mengalami deislamisasi dalam penulisannya menyebabkan peran para kiai dan pondok pesantren dalam memimpin pergerakan nasional kurang diketahui generasi muda bangsa Indonesia (Suryanegara, 2014:58).

Nashir (2010: 80) mencatat bahwa pondok pesantren ialah lembaga keagamaan, yang memberikan pengajaran, pendidikan serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Adapun Engku & Zubaidah (2014: 171-175) melaporkan bahwa kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata "pondok" menjadi "pondok pesantren". Ditinjau dari segi bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya, karena kata pondok adalah berasal dari bahasa Arab *funduq* yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi, pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Agama Islam.

Adapun dari segi metode pengajaran, Dhofier (1994: 28-29) mencatat bahwa metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren ialah sistem *bandongan* atau sistem *weton*. (Hidayat and Syahidin (2019) pada umumnya, unsur-unsur pondok pesantren terdiri dari kiai, santri, masjid, kitab kuning dan asrama.

Klasifikasi Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Dhofier (1994: 41) menyimpulkan secara garis besar, pesantren pada dewasa ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu : *Pertama*, pesantren salafi yakni pesantren yang masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Adapun sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. *Kedua*, pesantren *khalafi* yakni pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren.

Banyaknya variasi pesantren yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang unik dalam dunia pendidikan, Rahardjo dkk (1974: 24-25) menemukan dari hasil analisa dapat diperoleh variabel-variabel struktural seperti bentuk kepemimpinan, organisasi pengurus, dewan kiai atau dewan guru, susunan rencana pelajaran, kelompok-kelompok santri, bagian-bagian fungsional yang khusus, dan seterusnya, yang apabila dibandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari satu aliran ke aliran lainnya, maka akan kita peroleh tipologi dan variasi dunia pesantren.

Tujuan pendidikan pesantren adalah dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā*, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat dengan menjadi pelayan umat (*khadim al-ummah*) sebagaimana kepribadian Rasulullah *sallā Allah 'Alaihi Wa Sallam* dalam menyebarkan agama Islam (Hidayat, Rizal, and Fahrudin 2018b).

Peran Pondok Pesantren Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Tuanaya dkk (2007: 145) mengamati bahwa di masa penjajah, pesantren telah memainkan peran penting sebagai *counter culture* bagi sistem pendidikan modern yang diperkenalkan penjajah Belanda. Ketika sistem pendidikan modern ini diteruskan penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia sesudah merdeka, dan kemudian menjadi salah satu pilar yang menyangga proses modernisasi yang berfungsi menyiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk guru-guru yang menjadi salah satu sumber rujukan khazanah intelektual Islam bagi pendidikan. Sejak tahun 70-an pesantren telah memberikan

andil dalam melakukan pendidikan bangsa, terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dengan memasukkan kurikulum nasional dan pesantren menjadi salah satu sub sistem pendidikan nasional.

Dian Nafi dkk (2007: 11) menyimpulkan bahwa pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren, biasanya peran-peran itu tidak langsung terbentuk, melainkan melewati tahap demi tahap. Setelah sukses sebagai lembaga pendidikan pesantren bisa pula menjadi lembaga keilmuan, kepelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan membangun integrasi dengan masyarakat barulah memberinya mandat sebagai lembaga bimbingan keagamaan simpul budaya.

Hasyim (2015) menyajikan bukti bahwa sejak dulu pesantren dikenal sebagai tempat pengkaderan ulama, tempat pengajaran ilmu agama dan memelihara tradisi Islam. Fungsi ini terus berkembang akibat tuntutan pembangunan nasional yang mengharuskan pesantren terlibat di dalamnya. Sekarang pertumbuhan pesantren sangat pesat, menjamurnya pesantren dengan spesialisasi dan ragam kajian dari tradisional hingga modern membawa dampak positif bagi pendidikan nasional secara umum dan pendidikan Islam khususnya. Kehadiran pesantren bukan hanya membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa yang tidak mungkin terjamah secara keseluruhan, namun lebih dari itu pesantren menawarkan jenis pendidikan alternatif bagi pengembangan pendidikan nasional.

Pondok pesantren berperan dalam membentuk lulusan yang memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat, karena *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam. Suryana dkk (2006: 205) mencatat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam di tengah masyarakat dengan cara menegakkan kebenaran dan membenci keburukan dan kemungkaran yang ada di tengah masyarakat. *Amar ma'ruf* adalah keberpihakan seorang muslim terhadap kebenaran, kendatipun kebenaran itu merugikan dirinya. Demikian pula nahi munkar atau membenci kemungkaran harus selalu ditampilkan kendatipun keburukan itu akan menguntungkan dirinya.

Sementara itu, pada saat masa penjajahan, peran pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan Islam dan dakwah, juga telah berperan sebagai tempat yang menjadi basis perlawanan terhadap kaum kafir penjajah. Kita ambil contoh salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Tasikmalaya yaitu Asy-Syahid K.H. Zainal Musthafa yang melawan kepada balatentara Jepang dilandasi dengan Islam (Hidayat and Abdussalam 2020). Pasca kemerdekaan Indonesia, peran pesantren berlanjut dengan membina sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya yang dilakukan oleh salah seorang murid KH. Zainal Musthafa yakni KH. Choer Affandi, ulama legendaris pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, 7 Agustus 1967 yang telah melahirkan ratusan ribu alumni dan ribuan cabang pesantren tersebar di seluruh Indonesia (Hidayat and Syahidin 2019).

Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral (Syarifah 2016).

Choiri & Fitriani (2011) mengobservasi kini sebagian pesantren lebih terbuka untuk menerima arus modernisasi. Indikasi ini nampak dari adanya berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan. Namun demikian, pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya perlu melakukan telaah secara kritis agar hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Bukan sebaliknya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa malapetaka bagi eksistensi kehidupan manusia, karena hegemoni cara berfikir kapitalis dan liberalis yang bebas nilai.

Semakin berkembangnya lembaga pendidikan modern dan semakin gencarnya pemikiran Barat (sekularisme, pluralisme, liberalisme, dll), aliran ideologi (kapitalisme dan sosialisme/komunisme), serta gerakan modern yang mulai memasuki dunia Islam yang merupakan ancaman bagi keberlangsungan pendidikan pesantren, tetapi sistem pendidikan pesantren mampu bertahan dalam menghadapi arus pemikiran, aliran dan gerakan modern.

Kesimpulan

Peran pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi berperan juga sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, basis perlawanan terhadap penjajah dan sekaligus menjadi simpul budaya. Beberapa pesantren di Indonesia telah mengalami pembaruan, tetapi ada ciri khas tradisi pesantren dalam menghadapi pembaruan tersebut. Kalangan pesantren masih mempertahankan tradisi lama yang masih baik, tetapi tidak menutup untuk mengambil hal yang baru jika itu dianggap baik. Meskipun modernisme melanda dunia Islam, salah satunya yang terjadi di Indonesia, tetapi ada dari beberapa pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Tidak terbawa arus modernisme yang gencar dibawa oleh orang-orang Barat. Pengalaman Pesantren di Indonesia ini bisa juga diterapkan dalam pengembangan Pendidikan Islam di ASEAN.

Referensi

- Abubakar, Istianah. 2018. "Strengthening Core Values Pesantren as a Local Wisdom of Islamic Higher Education Through Ma' Had Jami' Ah." 1–7.
- Anam, Saeful. 2017. "Karakteristik Dan Sistem Pendidikan Islam : Mengenal Sejarah Pesantren, Surau, Dan Meunasah Di Indonesia." *Jalie : Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1(1):146–49.
- Choiri, Moh. Miftahul, and Aries Fitriani. 2011. "Problematika Pendidikan Islam Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional Di Era Global." *Al-Tahir* 11(2):303–25.
- Dhofier, Z. 1994. "Tradisi Pesantren."
- Dian Nafi dkk. 2007. *Praxis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Engku, Iskandar, and Siti Zubaidah. 2014. *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, Syeh Hawib. 2014. "Perkembangan Pesantren Di Indonesia." *Syamil* 2(1):1–14.
- Haningsih, S. 2008. "Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi* 1(1):27–39.
- Haryanto, Rudi. 2017. "Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Di Era Globalisasi (Studi Kasus Pondok Pesantren Musthafawiyah)." *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan* 9(2):16–32.
- Hasyim, Husmiaty. 2015. "Transformasi Pendidikan Islam (Konteks Pendidikan Pondok Pesantren)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 13(1):57–77.
- Hidayat, Tatang, and Aam Abdussalam. 2020. "KH. Zainal Musthafa's Struggle in Developing the Nation's Intellectual Life." *Ulumuna* 23(2):332–60. doi: 10.20414/ujis.v23i2.363.
- Hidayat, Tatang, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin. 2018a. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam* VII(2):1–15.
- Hidayat, Tatang, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin. 2018b. "Pola Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khoir Bandung Dalam Membentuk Kepribadian Islami." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7(1):357–69. doi: 10.29313/tjpi.v7i1.3770.
- Hidayat, Tatang, and Syahidin. 2019. "EDUCATION VALUES BASED ON THE THINKING OF K.H. CHOER AFFANDI AND THEIR RELEVANCE TO THE MODERN EDUCATION (The Study of The Legendary Islamic Scholar Of Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya)." *Tadris* 14(1):40–59. doi: 10.21831/JPK.V013.1246.
- In'ami, Moh. 2011. "Kultur Pesantren Modern : Integrasi Sistem Madrasah Dan Pesantren Di Pondok Modern Gontor." *Ibda' : Jurnal Kebudayaan Islam* 9(2):194–213.
- Musthafa, Izzuddin, Dedih Wahyudin, and Betty Tresnawaty. 2017. "The People Empowerment Pattern In Pesantren Environment : A Case Study about Community Around Pesantren in West Java, Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 143(November):53–33. doi: 10.2991/uicosp-17.2017.15.
- Musthofa. 2015. "Kedatangan Islam Dan Pertumbuhan Pondok Pesantren Di Indonesia Perspektif Filsafat Sejarah." *An-Nuha* 2(1):1–15.
- Nashir, R. 2010. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahardjo dkk, Dawan. 1974. *Pesantren Dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Ridhwan, Abidin Nurdin, and Sri Astuti A. Samad. 2018. "Dynamics of Islamic Education in The Land of Bugis : Growth , Development and Typology Pesantren in Bone." *IOP Conference Series : Earth and Environmental Science* 1–8.
- Suryana dkk, Toto. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2014. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani.
- Syarifah. 2016. "Manajemen Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah Di Pondok Modern Darussalam Gontor." *Jurnal At-Ta'dib* 11(1):53–71.
- Tuanaya dkk, A. Malik M. Thaha Tuanay. 2007. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Wekke, Ismail Suardi, and Sanusi Hamid. 2013. "Technology on Language Teaching and Learning: A Research on Indonesian Pesantren." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 83:585–89. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.111.

TATANG HIDAYAT adalah pemuda kelahiran Tasikmalaya yang bergiat di Student Rihlah Indonesia. Beberapa tulisannya dimuat di berbagai jurnal terakreditasi dan terindeks internasional bereputasi, buku, media cetak maupun online. Selain sebagai seorang dosen dan peneliti, ia telah menerbitkan buku solo, buku antologi dan bertindak sebagai editor buku, reviewer jurnal dan Handling Editor Islamic Research : The International Journal of Islamic Civilization Studies, Handling Editor Rayah Al-Islam : Jurnal Ilmu Islam, Mauriduna : Journal of Islamic Studies, Ukazh : Journal of Arabic Studies, Editor in Chief ZAD Al-Mufassirin : Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafsir. Selain menulis, ia aktif melakukan jelajah heritage ke daerah-daerah di Indonesia, saat ini ia telah mengunjungi sekurang-kurangnya 120 kab/kota di Indonesia. Di sisi lain, ia pun telah melakukan jelajah heritage ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Tatang dapat dihubungi melalui Instagram @tatang_hidayat31, Akun FB Tatang Hidayat. E-mail tatangmushabhidayat31@gmail.com

Sumbangan Pesantren kepada ASEAN dan Dunia: Pengalaman Pesantren Darunnajah

Muhammad Irfanudin Kurniawan

Pondok pesantren merupakan pusat pendidikan agama Islam yang berkembang selama berabad-abad. Pada tahun 2018 data pesantren menembus angka 28.194 unit dan pada tahun 2023 data tersebut terus meningkat di angka 39.043. Sebagai sebuah lembaga, saat ini pesantren telah mendapatkan legalitas resmi dari Pemerintah dengan terbitnya Undang-undang Pesantren No 18 tahun 2019. Walaupun dinilai terlambat, kehadiran undang-undang ini setidaknya memberikan angin segar tentang upaya pesantren untuk lebih mengukuhkan eksistensinya, tidak hanya di level nasional tapi juga di level internasional.

Pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi “Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Helmiati dalam bukunya tentang *Sejarah Islam di Asia Tenggara* memberikan catatan yang sangat baik. Dia mengutip pendapat Prof. Azyumardi Azra bahwa Islam di Asia Tenggara sangat “akomodatif” terhadap kepercayaan, praktik keagamaan, tradisi dan budaya lokal. Sikap akomodatif tidak lepas dari peran pesantren yang memiliki pendekatan *tasamuh*, *tawazun*, dan *tawasuth*, yang memberikan “ruang dialog” bagi semua komunitas yang ada. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren memberi dampak terhadap perubahan sosial, budaya, politik bahkan ekonomi. Pondok pesantren berdasarkan kompetensi dan keahlian, jumlah santri, dan usia pondok pesantren dan amal usaha telah mampu memberikan sumbangsih nyata dalam perjalanan dan pembangunan masyarakat, baik di lingkungan pondok pesantren, tingkat nasional bahkan ASEAN. Maka, tidak salah apabila pesantren disebut sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya di ASEAN.

Penguatan Nilai-nilai tersebut nampak jelas dalam beberapa poin berikut.

Pertama, Pesantren di ASEAN memiliki peran kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Mereka menyediakan pendidikan agama yang mendalam kepada ribuan santri dari berbagai negara di ASEAN. Dengan demikian, pesantren membantu memperkuat pemahaman agama Islam di seluruh kawasan. Hal ini terbentuk karena Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwwah Islamiah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwwah ini bukan saja selama mereka di Pondok, tetapi juga mempengaruhi ke arah persatuan umat dalam masyarakat setelah mereka terjun di masyarakat baik nasional, ASEAN bahkan internasional.

Kedua, Pesantren bukan hanya tempat untuk mempelajari agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Mereka memberikan pendidikan yang komprehensif kepada santri, menciptakan individu yang berpengetahuan luas dan siap berkontribusi pada pembangunan di negara-negara mereka. Seperti yang tersurat dalam motto pesantren yaitu berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran terbuka. Selain motto pesantren juga memiliki Dharma yang sangat erat hubungannya dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang bisa menguatkan negara-negara

di ASEAN bahkan di kancah Internasional. Kelima Dharma tersebut adalah Ibadah, Ilmu yg berguna di masyarakat, Kader Ummat, Da'wah Islamiyah, Cinta Tanah Air dan Berwawasan Nusantara.

Ketiga, Pesantren sering mengadakan forum dan pertemuan yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai negara ASEAN. Hal ini mempromosikan dialog antar budaya yang penting dalam menjaga kerukunan di kawasan yang beragam ini. tercatat dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kegiatan pesantren seperti konferensi Internasional pengasuh pesantren Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Universitas Darunnajah dan Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I). Terkait konferensi ini, pimpinan Pesantren Darunnajah Jakarta, KH. Hadiyanto Arief, menjelaskan, para pengasuh pesantren yang berkumpul di konferensi tersebut memang memiliki semangat untuk menghilangkan sekat antar sesama pesantren. "Semangat utamanya adalah P2I atau konferensi internasional ini sebenarnya adalah gerbong pengasuh pesantren se-Indonesia bahkan Asia Tenggara yang memang telah melepas batas dikotomi. Artinya kita tidak membeda-bedakan antara pesantren modern ataupun salaf, keduanya merupakan keunikan lembaga pendidikan Islam yang harus dikembangkan". selain itu konferensi internasional pengasuh pesantren se-Asia Tenggara juga mendorong terbentuknya perguruan tinggi di pesantren dan program studi Manajemen Pesantren. dan untuk mengejawantahkan komitmen tersebut maka Universitas Darunnajah membuka konsentrasi Manajemen Pesantren di bawah program studi Manajemen Pendidikan Islam.

Keempat, Pesantren di ASEAN aktif dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan ini bisa dilihat dari visi dan kreatifitas pesantren dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya. Pesantren sangat kental dengan nilai persaudaraan. Setidaknya ada ada tiga macam persaudaraan (ukhuwah), yang senantiasa diajarkan di lingkungan pesantren yaitu *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan umat manusia). Ukhuwah basyariyah bisa juga disebut ukhuwah insaniyah. Pesantren yang menangkan nilai-nilai Islami sangat ahli dalam meramu keberagaman. Sebagaimana diketahui kata 'Islam' itu sendiri artinya damai. Arti damai ini sejalan dengan nilai-nilai pluralitas, kesetaraan dan kemanusiaan. bahkan Bhineka Tunggal Ika sebagai motto keberagaman di negara kesatuan Republik Indonesia telah menjadi nama acara di beberapa pesantren pada saat pengenalan kegiatan yang dilakukan di awal tahun pelajaran. Pesantren seperti Gontor dan Darunnajah menampilkan "Bhinneka Tunggal Ika" Penampilan tersebut terdiri dari gabungan beberapa tarian tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bahkan tarian dari mancanegara seperti barongsai dari Tiongkok, Muangthai dari Thailand ikut ditampilkan dalam acara ini. Melalui kegiatan ini pesantren mendidik para santri untuk dapat bersatu dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku ataupun budaya mereka. Mereka saling melengkapi satu sama lain tanpa memandang perbedaan yang ada, namun justru mereka menciptakan keserasian dari perbedaan tersebut.

Kelima, Pesantren juga berkontribusi aktif pada Pendidikan Anak-anak Miskin: banyak pesantren yang memiliki program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka membantu menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di ASEAN, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan ini. Pesantren Darunnajah satu dari sekian pesantren yang memiliki program beasiswa ini. Selain memberikan beasiswa untuk santri dalam negeri, Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta juga memberikan beasiswa kepada santri dari mancanegara seperti Afghanistan dan Thailand. Kurang lebih 50 beasiswa diberikan oleh Darunnajah kepada masyarakat Afghanistan melalui *Afghanistan Indonesia School* di Kabul. Selain itu 100 beasiswa diberikan kepada masyarakat Thailand melalui lembaga pendidikan Islam *Thayaiwittaya School*, Hat Yai, Songkhla. Selain dua negara ini, beasiswa juga ditawarkan kepada masyarakat muslim di Vietnam dan Kamboja serta Filipina pada saat mengikuti lomba tahfidz Al-Qur'an tingkat ASEAN di Darunnajah.

Keenam, Pesantren ASEAN juga berperan dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pesantren mendorong nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan toleransi yang menjadi landasan bagi hubungan harmonis antara negara-negara di ASEAN. Peran pesantren tercermin dalam mendukung perdamaian dan stabilitas keamanan negara. ini bisa dilihat dari pengalaman Darunnajah yang memfasilitasi kunjungan pemuka agama Afghanistan dan Pakistan. Seperti Kunjungan Delegasi Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan Mohammad Karim Khalili, High Peace Council (HPC) Afghanistan ke Pesantren ini. Delegasi HPC Afghanistan yang dipimpin oleh mantan wakil presiden Afghanistan era Hamid Karzai, Muhammad Karim Khalili, sangat terkesan dengan sistem pendidikan

yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Darunnajah. Mereka ingin belajar bagaimana 700an lebih suku di Indonesia, 1000 lebih bahasa dan dengan 5 agama bisa hidup berdampingan dengan damai dan bersama membangun bangsa.

Dengan demikian, pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan keagamaan, meningkatkan pendidikan, serta mempromosikan dialog antarbudaya dan perdamaian. Selain itu Pesantren juga berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial dan kultural yang kuat di di ASEAN, bahkan dunia. *

MUHAMMAD IRFANUDIN KURNIAWAN adalah akademisi yang lahir di Cianjur, 5 Oktober 1984. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah juga pesantren Salafiyah Nahdlatul Shibyan Al-Musri di kota Cianjur. Kemudian melanjutkan jenjang atas di Pondok Modern Gontor. Pendidikan strata satu di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor pada tahun 2008 dan strata dua di Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2016. Adapun strata tiga diselesaikan di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) pada tahun 2023. Saat ini ia diberi amanah sebagai Wakil Rektor Universitas Darunnajah. Penulis dapat dihubungi melalui email irfanudin@darunnajah.ac.id.

Hadrah Music Education as a Youth Faith Improvement

Ariesza Permata

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut Agama Islam, dimana rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dapat dilakukan dengan cara apapun untuk mengimplementasikan. Dengan berdzikir mengingat-Nya ataupun dengan melantunkan syair-syair shalawat kepada Rasul dengan harapan mendapatkan *syafaat* dan pertolongan di hari akhir nanti (Aliman 2016).

Dalam era modern saat ini ditengah-tengah gebyar musik modern, musik traditional Hadrah merupakan bentuk music yang mengajak pada kebaikan, meninggalkan maksiat. Memiliki nilai keagamaan dengan lantunan syair yang berisikan dzikir serta sholawat yang dipanjatkan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat meningkatkan keimanan para remaja.

Musik Hadrah merupakan kesenian Islam yang di dalamnya terdapat syair-syair religius yang dilantunkan dengan tabuhan alat musik rebana. Musik Hadrah dalam kegiatan senantiasa mengajarkan akan nilai-nilai Pendidikan kepada setiap orang yang mempelajarinya (Ar-Ramadi 2015). Merupakan salah satu dari beberapa jenis seni musik traditional Islam yang terdapat di Indonesia. Di dalamnya tersirat nilai yang terkait akan aqidah juga ibadah. Untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, tiga kali dalam satu minggu diadakan kegiatan keagamaan dengan disertakan lantunan Hadrah. Terkadang mereka menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan.

Pembacaan sholawat terkhusus bagi remaja mampu menjadikan kualitas hidup dalam memahami makna apabila membawakan lantunan nyanyian religius kecintaannya kepada Allah SWT, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Fenomena remaja yang ada di masyarakat biasa dinilai kurang baik maka dengan mengikuti aktivitas kelompok seni Hadrah dan memahami makna dalam syair akan memberi manfaat yang positif. Pesan-pesan adanya indahny perdamaian, sebagai media dakwah Islam melalui seni Hadrah.

Kesenian Hadrah

Hadrah adalah kesenian yang keberadaannya sampai saat ini dipertahankan. Hadrah merupakan perpaduan antara seni dengan sholawat. Kesenian Islam yang di dalamnya berisi sholawat Nabi Muhammad dengan diiringi tabuh rebana (Gazalba 1977). Adanya kesenian Hadrah ini pada awalnya muncul dari Timur Tengah, kemudian seiring berjalannya waktu menyebar kemana-mana di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dimana terdapat umat Islam berada. Dalam pembelajaran Hadrah ini berfungsi untuk menentramkan pikiran dan hati juga dapat memperbaiki watak manusia. Selain itu juga dapat meningkatkan iman bagi para remaja.

Di samping itu, Hadrah berfungsi sebagai sarana berdzikir wujud syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada Hamba-Nya (Nasution 2002). Seni Hadrah bukan suatu hal baru dalam kehidupan ini, melainkan sudah ada sejak jaman dahulu sekitar abad ke 13 Hijriah. Seorang ulama dari negeri Yaman yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (1259-1333/1839-1913) (Nasution 2002; Hajjaj 2011). Beliau membawa kesenian Arab dengan membaca sholawat yang diiringi rebana. Itulah yang saat ini dikenal dengan nama Hadrah. Jenis alat yang digunakan dalam pembelajaran Hadrah adalah jenis tabuh (dipukul) (Hajjaj 2011).

Melantunkan sholawat juga syair-syair memiliki dampak positif bagi remaja. Dapat menjadikan pribadi yang lebih baik. Lebih dapat merasakan mencintai Rasulullah SAW. Dalam pembelajaran Hadrah ini mengantarkan remaja untuk

dapat meninggalkan musik yang kurang baik dapat berpindah mencintai, mengganti sholawat dengan syair-syair yang Islami. Dengan pertemuan tiga kali atau kadang lebih jika ada kebutuhan, dalam jangka waktu yang panjang akan merasakan positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan dan melantunkan sholawat itu bisa membuat hati menjadi tenang dan dapat menjadi obat penawar bagi yang mendapatkan masalah dalam hidup (Al Mighwar 2006).

Dampak terhadap para remaja selain pada peningkatan iman melainkan sedikit demi sedikit menghapus kebiasaan kurang baik menjadi lebih baik. Kedisiplinan nampak dapat dilihat dari para remaja. Menghormati orang tua atau yang lebih dewasa (Nampak dilakukan bagi mereka para remaja yang mengikuti seni musik Hadrah. Melantunkan shalawat Nabi serta syair-syair tidak hanya menyanyikan, namun dapat kita resapi bahwa terdapat makna yang terkandung dalam shalawat. Cinta terhadap Rasul membawa suasana tenang dan perilaku menjadi lebih sopan (Hairuddin 2013).

Struktur pertunjukkan seni Hadrah terdiri dari unsur-unsur saling berhubungan. Dimulai dengan Pembukaan yang dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang diharapkan semua senantiasa mendapatkan pertolongan/ridho Allah SWT. Mempertebal masalah keimanan para remaja seperti dalam firman-Nya surat ke-6 Al-An'am ayat 79. *Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarassamawati wal ardlah hanifaw wama ana minal musrykin*. Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musryk (P. P. T. Al-Qosbah 2021). Disusul kemudian membaca sholawat Nabi diiringi dengan tabuh serta lagu religi.

Pembacaan shalawat berisi permohonan kepada Allah akan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad serta memohon beri keridhoan kepada sahabat dan keturunan. Memohon petunjuk di dunia dan tidak menyedatkan hati. Senantiasa melangkah di jalan yang benar, jalan menuju Surga yang indah. Sholawat memberi selamat dengan nyata bagi orang yang minta pertolongan. Keberadaan Nabi Muhammad, beliau adalah yang mendatangkan sesuatu yang hak, bisa menolong memberi safaat kepada semua orang memerlukan.

Dengan melantunkan sholawat sebagai rasa rindu yang mendalam, sangatlah indah diiringi dengan rebana, yang mana di Indonesia dimainkan dan dikenal dengan seni Hadrah. Para remaja sebagai generasi penerus sangatlah penting untuk dapat memegang budaya Islam sebagai bentuk dari jati diri yang pada hakikatnya generasi muda generasi Islam harus dapat memanfaatkan hidup positif dalam hidupnya.

Sudah menjadi fenomena bahwa dalam melantunkan sholawat lebih menarik jika dikemas dengan alat tradisional untuk mengiringi beberapa lantunan sholawat dan syair religi tersebut. Semua agar para remaja tidak merasa jenuh hanya melantunkan tanpa adanya music yang mengiringi sehingga untuk menarik perhatian para remaja maka diiringi dengan musik hadrah.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta meneladani sikap mulia beliau. Menjauhi larangannya, tidak saling menggunjing maupun mengejek sesama, menghormati siapapun yang lebih dewasa, berkata sopan.

Dalam seni Hadrah memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat pendukungnya. Seni Hadrah tidak hanya sebagai hiburan namun juga sebagai alat yang menyebarkan ajaran keagamaan. Juga sebagai media dakwah dimana mempunyai sarana pendidikan menanamkan pada para remaja. Syair-syair dalam kandungan sholawat merupakan pendidikan bagi manusia untuk mencapai Tuhan. Dan dalam syair musik Hadrah tidak terpisahkan dari kreasi berwirid, dzikir, munajat dan doa. Anjuran bahwa sebagai manusia harus selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang sesat (Hairuddin 2013).

Sebagian besar penyebab kegelisahan dan kelemahan jiwa adalah ketidakmampuan kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Rasa kebergantungan kita kepada Allah hilang dan melemah. Tanpa pertolongan dan petunjuk-Nya, niscaya kita tidak dapat lepas dari cengkeraman dan genggaman hawa nafsu, sehingga hidup ini akan menjadi sesat. Manusia selalu memperoleh bisikan untuk melakukan jalan yang sesat namun semua itu dapat berubah apabila senantiasa menuruti perintah juga petunjuk yang diberikan Allah SWT. Dalam syair musik Hadrah mengandung unsur keagamaan seperti contoh dalam syair "Ya Badrotim".

Ya badrofhim haza kulla kamali

Maza yu'abbiru'an ulaka maqoli

*Antal ladzi bisyragta fi ufiqil 'ulaa
Famashata bil Anwari kulla dlulali
Wa bikas famarol kafnu ya'alamal huda
Binnuri wal in'ami wal ifdholi
Sholla' alaikallahu robbi da'iman
Abadan ma'al ikbari wal asholi
Wa'ala jami'il wala ashhabi man
Qod khoshuhum robbul 'ula bikamali*

(Wahai bulan purnama yang telah penuh sempurna, maka kata-kata apakah yang dapat saya ucapkan untuk menyingkap keagunganmu. Engkaulah yang telah terbit bersinar di ufuk yang tinggi, sehingga dengan mudah engkau dapat menghapus segala kesesatan dengan cahayanya. Karena petunjukmu bersinar terang kenikmatan dan keutamaan. Semoga Allah Tuhanku selalu melimpahkan rahmat panjang masa baik di waktu pagi maupun petang. Semoga untuk semua keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yaitu orang-orang yang telah diistimewakan Allah).

Terdapat petunjuk bahwa senantiasa mendapat rahmat dan limpahan dari Allah sepanjang masa, baik itu pagi maupun malam. Sebagai manusia harus menurut perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kehidupan di dunia ini hanya merupakan persiapan menuju kehidupan akhirat sebuah kehidupan yang hakiki dan abadi. Mendapat keselamatan di akhirat dan dijauhkan dari siksa neraka. Hadrah sebagai media dakwah lewat syair yang dilantunkan.

Selain dapat meningkatkan iman para remaja, musik Hadrah juga dapat menghibur masyarakat.

Dengan adanya pementasan dalam rangka pesta perkawinan, acara khitanan dan lain-lain (Bouvier 2002). Sebagai sarana Pendidikan, seni musik yang menjadi salah satu dari beberapa jenis kesenian yang ada di Indonesia, nampak terlihat dari keseluruhan syair-syair yang terkandung tersirat banyak nilai aspek-aspek seperti aqidah, akhlak, dan ibadah di dalamnya. Dengan senantiasa mengajarkan kegiatan keagamaan, memiliki sikap sabar, selalu berdzikir, dan beryukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai Rasulullah adalah prioritas kedua setelah cinta terhadap Allah SWT. Allah adalah sumber segala cinta.

Firman Allah:

“Katakanlah: “Jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan, yang kamu usahakan, perniagaan, yang kau khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal, yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik” (Q.S At -Taubah:24)

Kecintaan kita akan Rasulullah hendaklah ditanamkan sejak dini melalui sholawat dalam kesenian Hadrah sebagai salah satu bentuk cinta terhadap Rasulullah SWT. Dalam meneladani segala yang diajarkan, para remaja membentuk sebuah group dimana mereka dapat meng umandangkan syair dari seni Hadrah tersebut. Pada akhirnya para remaja tersebut terbiasa mendengarkan lantunan sholawat sehingga menambah keimanan para remaja tersebut.

Saat ini yang terjadi bahwa remaja banyak waktu tersita dengan adanya gadget yang tentu saja sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja. Adanya fenomena tersebut, maka strategi yang harus dilakukan adalah lebih mendekatkan remaja untuk selalu melantunkan sholawat dan untuk menghindari kejenuhan remaja akan semua ini maka sholawat dapat diiringi dengan musik Hadrah. Sholawat yang mengisahkan Rasulullah SAW dan memahamim makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Pada intinya remaja harus mempunyai perasaan cinta yang timbul untuk Rasulullah dimana semua itu akan membawa kebaikan pada diri sendiri, bahkan sampai pada generasi penerus. Banyak lagu Islami yang bernuansa religius dalam musik Hadrah berharap dapat memahami makna-makna. Karena saat ini banyak sekali lagu yang liriknya

kurang mengandung unsur Pendidikan, maka dengan adanya pembelajaran musik Hadrah ini diharapkan remaja dapat menambah semakin cinta kepada Rasulullah, menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui seni Hadrah ini diharapkan upaya Pendidikan cinta kepada Rasulullah SAW dapat dilihat perilaku dan akhlak dari para remaja. Apakah bisa mengikuti perilaku dari Rasulullah dengan mengamalkan sunah-sunahnya serta menjauhi larangannya. Dengan melantunkan shalawat diharapkan remaja dapat menghayati dan lebih mencintai Rasulullah. Kesenian Hadrah diciptakan sebagai sarana dakwah melalui pertunjukkan yang disampaikan. Anjuran untuk dapat berbuat baik sesuai dengan anjuran Agama (Naufil 2017). Pesan-pesan mengandungn religius dimana manusia dianjurkan untuk shalat malam, karena merupakan wahana untuk berdoa dan meminta kepada Allah dan akan mengabdikan permintaan hambanya melalui sholat malam.

“Perubahan ada di pertengahan waktu malam hari. Tajamnya seperti pedang apabila digunakan bermunajat kepada Allah. Allah akan menjawabnya dengan apa yang diharapkan pada hari berikutnya”

Manusia diwajibkan berdoa agar dijauhkan dari jalan yang sesat. Hati ini tidak akan condong pada kesesatan apabila diberi petunjuk Allah.

Konklusi

Dalam Hadrah syair yang terkandung memiliki nilai moral yang tentunya dapat mendorong seseorang untuk melakukan sikap baik dan akhlak yang baik, sikap yang baik dan ikhlas dan yang terakhir adalah akhlak (Supratno 2010). Hadrah mengajarkan bahwa hidup adalah untuk memperoleh keselamatan sebagai tujuan utamanya. Mengingat akan kebesaran Allah serta Nabinya, menahan diri dari tingkah laku yang tidak jujur, sehingga dapat hidup dengan tenang. Hidup akan tenang apabila diisi dengan penuh keimanan, penuh amal kebaikan, berlaku jujur, penuh kesucian, dan sikap mulia.

Allah merupakan sumber kekuatan moral atau akhlak. Allah sebagai teman kesepian, menjadikan Allah sebagai tempat curahan ketika dalam kegelisahan. Dalam realitas kehidupan bahwa orang tetap menjaga dan memelihara jiwa yang istiqomah serta damai akan tidak mudah terguncang dan terombang ambing hanyut oleh gelombang situasi di sekitarnya, tak mudah dihanyutkan oleh seputar kehidupannya. Dengan sikap seperti itu, tentu ketenangan batin dan ketentraman hidup dapat tercapai (Rachel 2004).

Melalui seni Hadrah, melantunkan shalawat dan syair religi dimana diiringi dengan music Hadrah dapat lebih mudah menarik dalam penyampaian lantunan shalawat (Bouvier 2002). Dampak positif dari para remaja yaitu banyak yang berkeinginan untuk mengikuti melantunkan shalawat dikarenakan adanya music Hadrah. Melantunkan sholawat dengan diiringi musik Hadrah akan membuat para remaja lebih antusias, tidak menimbulkan kejenuhan. Di dorong akan adanya rasa cinta terhadap Rasul, para remaja lebih menyukai melantunkan shalawat Nabi serta syair yang bernuansa religi dan Islami dari pada mendengarkan musik lainnya yang belum tentu mendatangkan kebahagiaan di hati. Banyak dari para remaja lebih sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua atau orang tuanya sendiri.

Selain mengandung nilai moral dalam seni Hadrah juga terdapat nilai religi dalam syair lagunya, sedangkan nilai moral menjadikan para remaja yang melantunkannya menjadi seorang yang sopan yangb tampak dalam perilaku sehari-hari. Dengan tatacara berbusana yang lebih sopan (Hairuddin 2013).

Dengan berkelakuan baik selama di dunia, melewatinya dengan damai. Dengan mengikuti petunjuk dari Allah akan selamat menuju jalan ke surga yang dijanjikan.*

Referensi

- Al-Qosbah, Penyelaras Penerbitan Tim. 2021. *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*. Edited by Tim Al-Qosbah. Bandung: Al Qosbah.
- Aliman, Mansur. 2016. *Muslimah Bahagia Dunia Akhirat*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Ar-Ramadi, Amani. 2015. "Menanamkan Iman Kepada Anak."
- Bouvier, Helene. 2002. *Lèbur: Seni Musik Dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura*. Vol. 14. Yayasan Obor Indonesia.
- Gazalba, Sidi. 1977. *Pandangan Islam Tentang Kesenian; Sidi Gazalba*. Pustaka Antara, Kuala Lumpur.

- Hairuddin. 2013. "Pendidikan Karakter Berbasis Sunnah Nabi." *Jurnal Al-Ulum* 13 (1): 167–90.
- Hajjaj, Muhammad Fauqi. 2011. "Tasawuf Islam Dan Akhlak, Terj." *Kamran As Ad Irsyady DanFakhrin Ghozali, (Jakarta: Amzah, 2011)*.
- Mighwar, Muhammad Al. 2006. "Psikologi Remaja. Bandung: CV Pustaka Setia."
- Nasution, H Muslim. 2002. *Menuju Ketenangan Batin*. Gema Insani.
- Naufil, Ahmad. 2017. "Amalan-Amalan Dahsyat Nabi Dari Pagi Hingga Malam Hari." Yogyakarta: Araska.
- Rachel, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supratno, Haris. 2010. "Sosiologi Seni Wayang Sasak Lakon Dewi Rengganis Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Di Lombok." Surabaya: Unesa University Press.

ARIESZA PERMATA adalah seorang dosen di Universitas Wisnuwardhana Malang. Anak ke tiga dari lima bersaudara. Lahir di Surabaya-Jawa Timur. Menempuh studi S1 di Universitas Negeri Surabaya, S2 di Universitas Negeri Surabaya, S3 di Universitas Negeri Malang.

Pendekatan Agama, Solusi Atasi Terorisme Atas Nama Agama di ASEAN

Mhd Alfahjri Sukri

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu momok menakutkan bagi masyarakat dunia. Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI)/Indeks Terorisme Global menyebutkan, pada tahun 2021 memang terjadi penurunan korban terorisme secara global sebesar 1,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 jumlah korban sebanyak 7.142 kematian. Tetapi, jumlah serangan terorisme justru mengalami peningkatan sebesar 17 persen menjadi 5.226 serangan. Adapun negara yang sangat terdampak serangan terorisme dengan peringkat pertama dari 163 negara adalah Afghanistan dengan 1.436 kematian. Sedangkan negara ASEAN yang cukup terdampak dari aksi terorisme ini yaitu Filipina peringkat 16 (kategori terdampak tinggi), Thailand peringkat 22, dan Indonesia peringkat 24 yang sama-sama masuk kategori sedang. Malaysia masuk dalam kategori sangat rendah pada peringkat 63 (IEP, 2022).

Data di atas sangat memprihatinkan bagi beberapa negara di ASEAN yaitu Filipina, Thailand dan Indonesia yang cukup terdampak dari aksi terorisme. Negara-negara tersebut merasakan salah satu ancaman terorisme yang sama yaitu dari kelompok terorisme Islam transnasional seperti dari Jamaah Islamiyah dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok tersebut sama-sama menjadikan Islam sebagai alasan perjuangan dengan “jihad” menegakkan agama Allah. Kasjim Salenda (2009) dalam penelitiannya berjudul “Analisis terhadap Praktek Terorisme atas Nama Jihad” menyimpulkan, salah satu faktor beraninya kelompok Islam radikal melakukan aksi teror mereka adalah sebagai aktualisasi pemahaman atas jihad.

Maka wajar kemudian Islam diidentikkan dengan “kekerasan”, padahal itu hanyalah pemahaman yang salah dari para pelaku teror yang mengatasnamakan Islam. Salah satu solusi yang penulis tawarkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menggunakan pendekatan agama untuk melawan terorisme yang mengatasnamakan agama. Hal ini dikarenakan pemikiran hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Solusi ini yang dibahas sekaligus mengurai problematika terorisme agama di negara-negara ASEAN. Tulisan ini hanya berfokus pada kelompok-kelompok terorisme yang mengatasnamakan Islam.

Problematika Terorisme Atas Nama Agama di Negara ASEAN

Istilah terorisme agama atau terorisme atas dasar agama memang menjadi perdebatan para ahli. Robert Pape, salah satu yang berpandangan terorisme tidak berhubungan dengan agama, karena agama hanyalah korban. Adapun David Rapoport berpandangan, terorisme atas dasar agama itu nyata adanya. Ini tampak dari teror yang mengatasnamakan agama atau beralasan untuk tujuan agama. Rapoport menyebutnya sebagai “*holy*” atau “*sacred*” *terror* (teror suci). Contoh pada kasus pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat pada 1981 oleh kelompok al-Jihad. Menurut Rapoport, teror yang dilakukan bersumber dari doktrin agama (Naharong, 2014).

Aksi teror berdasarkan agama dapat dilakukan oleh semua agama di dunia. Dalam hal ini, Jurgensmeyer mengambil beberapa contoh seperti kekerasan oleh umat Kristen Amerika Serikat yang mendukung pemboman bangunan federal Oklahoma City dan tempat aborts, penyerangan World Trade Center (WTC) di New York oleh kelompok Islam, pembunuhan Pendana Menteri Yitzhak Rabin oleh orang Yahudi, pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi oleh kaum Sikh dan aksi terorisme lainnya yang mengatasnamakan misi suci agama (Samsuri, 2003). Namun, menurut Rapport fenomena terorisme atas nama agama untuk saat ini lebih menonjol dilakukan oleh kelompok Islam, baik sunni maupun syiah

(Naharong, 2014). Global Terrorism Index menyebutkan, sejak tahun 2007 sudah 60 persen kematian akibat terorisme terjadi berasal dari kelompok Islam (IEP, 2022).

Teror yang berdasarkan agama inilah yang kemudian memotivasi kelompok-kelompok teroris Islam transnasional melakukan aksi mereka di negara-negara ASEAN. Ini tampak dari gerakan Jamaah Islamiyah dan ISIS. Untuk Jamaah Islamiyah (JI) sendiri sudah berkembang di Asia Tenggara sejak lama. Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari Darul Islam (DI) yang berasal dari Indonesia. Organisasi ini secara resmi hadir diperkirakan pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Tokoh sentralnya adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir (Arjanto, 2021). JI bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura (Djelantik & Abbas, 2009).

Jamaah Islamiyah terlibat dalam membangun kamp-kamp pelatihan bersentaja di beberapa negara di Asia Tenggara. Di Filipina memiliki hubungan erat dengan Front Pembebasan Islam Moro. Kelompok ini juga aktif melakukan aksi teror di Indonesia yang salah satu serangan mematakannya adalah Bom Bali pada 2002 dan diikuti serangkaian serangan lainnya (Arjanto, 2021). Kelompok ini sudah menyebar di berbagai negara Asia Tenggara dan terafiliasi dengan Al-Qaeda. Salah satu yang ditanamkan oleh kelompok JI pada anggotanya adalah doktrin jihad. Sebagaimana pengakuan Nasir Abbas sebagai mantan JI, bahwa terjadi penyelewengan makna jihad dalam tubuh JI yang meligitimasi aksi-aksi kekerasan atas nama jihad, khususnya mengalirkan darah kaum non muslim (Djelantik & Abbas, 2009). Bilveer Singh dari Rajaratnam School of International Studies menyebutkan, terdapat sekitar 3 sampai 5 ribu anggota JI dengan beragam penampilan di Indonesia (Wardah, 2022). Ini terlihat dari ditangkapnya anggota JI dengan beragam profesi, mulai dari yang menjadi anggota MUI, pegawai negeri di Lampung, pegawai BUMN dan lainnya (Maulana, 2021).

Penyelewengan atas makna jihad ini juga dilakukan oleh ISIS. ISIS yang awalnya berpusat di Irak dan Suriah kemudian mengembangkan gerakannya ke berbagai negara, termasuk negara-negara kawasan ASEAN. Para pimpinan ISIS di Suriah dan Irak memberikan seruan agar jaringan mereka di berbagai negara untuk melakukan serangan masing-masing. Sebelumnya kelompok ISIS dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura sudah membentuk *Katibah Nusantara Lil Daulah Islamiyah* pada 2014. Katibah Nusantara menyebarkan propaganda melalui tulisan berbahasa Indonesia dan penyebaran ideologi menggunakan media sosial dan *blogging*. Katibah Nusantara inilah yang berpengaruh atas aksi-aksi teror di Asia Tenggara (Sholeh, 2017).

Ancaman nyata semakin tampak dengan diangkatnya Isnilon Hapilon pimpinan Abu Sayyaf di Filipina sebagai pimpinan ISIS di Asia Tenggara pada 2016 lalu. Juga sudah terlihat dari berbagai aksi teror di negara-negara ASEAN sebagai bukti keterlibatan ISIS seperti serangan bom bunuh di Jakarta pada 2014, di Malaysia dengan bom bunuh diri pada 2015, dan pada 2017 bom mobil yang terjadi di Thailand (Amin, 2018), perang Marawi di Filipina pada tahun 2017 dengan keterlibatan pimpinan ISIS Asia Tenggara Isnilon Hapilon bersekutu dengan kelompok Maute (BBC News, 2017).

Tindakan yang mereka lakukan diartikan sebagai jihad. Dan jihad lebih diartikan sebagai berperang melawan musuh Islam. Abu Bakar Al Baghdadi selaku pimpinan ISIS pada 2018 lalu, menyerukan umat Islam melakukan jihad melawan musuh-musuh Islam (CNN Indonesia, 2018). Dalam doktrin ISIS juga disebutkan, perjuangan mereka adalah sebagai bentuk jihad dan bagi mereka yang berbaiat kepada ISIS maka akan mendapatkan jaminan surga (Waid, 2014).

Dari terorisme yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah maupun ISIS di negara Asia Tenggara. Kedua gerakan tersebut memiliki kesamaan yaitu penyelewengan atas makna jihad dan menganggap tindakan yang mereka lakukan sebagai aksi "suci" menegakkan agama Allah. Masyarakat yang ikut serta dalam kelompok teroris adalah orang-orang yang terbuai dengan doktrin tersebut. Hal pertama yang diserang oleh kelompok teroris dalam merekrut anggota adalah pemikiran, maka cara melawannya pun harus melalui perang pemikiran dengan mendudukkan kembali pemahaman agama pada masyarakat.

Pendekatan Agama dan Pentingnya Kerjasama antar Negara ASEAN

Seperti yang dijelaskan di atas, doktrin awal dari beraninya pelaku teroris melancarkan aksi mereka hingga pada aksi bom bunuh diri, adalah tafsir atas agama khususnya jihad. Badawi Rahman selaku mantan narapidana terorisme mengakui bahwa jaringan terorisme menggunakan jihad sebagai doktrin gerakan mereka (MetroTv, 2021). Hal ini juga diakui oleh mantan narapidana Nasir Abbas yang bersaksi, dalam perekrutan anggotanya, kelompok teroris menggunakan isu-isu keislaman serta mengutip ayat Al-Qur'an (Permana, 2022).

Dari beberapa kasus tampak terjadi doktrin yang salah atas pemahaman agama pelaku teror, khususnya tentang jihad. Terdapat ayat-ayat yang menjadi pegangan para pelaku teror seperti Surat Al-Maidah ayat 44, Al-Baqarah ayat 191 dan lainnya. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist selalu dimainkan oleh para teroris untuk merekrut anggota baru mereka. Hal pertama yang mereka serang adalah pemikiran, kemudian menanamkan doktrin jihad menurut pemahaman mereka. Sebagaimana pengakuan Ali Imron, mantan narapidana teroris, yang mengatakan hanya butuh waktu dua jam bagi teroris untuk mendoktrin atau mengubah pemikiran seseorang (Wibowo, 2016).

Agama Islam dijadikan alat oleh pelaku teror. Maka, salah satu cara untuk melawannya adalah dengan pendekatan agama juga. Pemikiran dilawan dengan pemikiran. Pemahaman atas dalil juga dilawan dengan pemahaman dalil juga. Dan ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku teror dan masyarakat umumnya agar tidak mudah masuk dalam jaringan teroris. Bagian penting yang perlu disebarkan adalah pemahaman soal jihad itu sendiri yang biasa dijadikan alat oleh kelompok teroris.

Kitab Mu'jam al-Mausu'li Li Alfadz al-Qur'an al-Karim menyebutkan jihad berasal dari kata *Jahada-Yujahidu* dengan memiliki dua makna, yaitu (1) kerahkan semua kemampuan, dan (2) berperang di jalan Allah (Fattah, 2016). Dan memang salah satu dari pengertian jihad adalah merujuk pada perang. Akan tetapi itu hanyalah salah satu pengertian saja. Dalam Al-Qur'an sendiri kata jihad terdapat 41 kali yang merupakan gabungan dari huruf "ja-ha-da". Kalau merujuk pada kata jihad, berasal dari kata *jahada* yang berarti usaha dengan sungguh-sungguh. Dari asal kata tersebut kemudian berkembang menjadi kata jihad yang berarti perjuangan, *juhd* (kekuatan/kemampuan), *jaahid* (berusaha kerja keras), *ijtihad* berarti ketekunan serta arti lainnya. Dan kata tersebut juga mengalami perubahan ketika bersanding dengan kata lain, misalnya *al maradh (jahadahu al maradh)* artinya menguruskan (Nizar, 2015). Dapat diartikan bahwa kata jihad dapat berubah makna dan tidak sesederhana pengertian dalam kamus biasanya. Belum lagi tafsir-tafsir soal jihad itu sendiri yang sangat luas.

Ibnu Qoyyim membagi empat pengertian jihad yaitu, (1) *Jihadun Nafs* yang artinya jihad dalam memperbaiki diri, (2) *Jihadul Kuffar wal Munafiqin* yang berarti jihad melawan orang kafir dan munafik dan (3) *Jihadusy Syaithan* yang artinya jihad dalam melawan setan, (4) *Jihad Arbabuzh Zholmi wal Bida wal Munkarat* yang berarti jihad dalam menghadapi orang-orang zolim, ahli bidah dan pelaku kemungkaran (Triana, 2017). Adapun makna jihad dalam pandangan Quraish Shihab memiliki dua makna secara umum, yaitu (1) pengerahan semua kemampuan atau pengorbanan, dan (2) melakukan segala hal dengan sungguh-sungguh. Sedangkan berdasarkan pada sasaran jihad, Quraish Shihab membaginya menjadi empat yaitu (1) melawan hawa nafsu, (2) perang lawan setan, (3) melawan orang kafir, dan (4) lawan orang musyrikin (Aziz & Abidin, 2017).

Dari beberapa makna jihad di atas, dapat dikatakan bahwa jihad tidak hanya soal berperang secara fisik di jalan Allah, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Serta berjihad lebih berkonotasi kearah yang positif bukan merusak seperti terorisme. Ibnu Taimiyah menyatakan, taat pada Allah dan paling bermanfaat bagi manusia adalah jihad serta amal sholeh yang sangat utama. Akan tetapi, apabila jihad serta amal sholeh itu tidak menghasilkan manfaat dan menimbulkan kemudharatan, maka itu tidak termasuk amal sholeh (Taimiyah, 1995).

Konsep jihad seperti inilah yang seharusnya disebarkan kepada para pelaku teror serta masyarakat umumnya agar tercegah untuk masuk kelompok teror yang mengatasnamakan agama Islam. Dalam menyebarkan pemahaman ini, pemerintah perlu menggaet ulama-ulama yang paham akan hal tersebut. Negara membuat sistem dan menjadikan ulama sebagai tombak untuk memberikan pemahaman jihad. Sehingga pemikiran dan pemahaman atas dalil, juga dilawan dengan pemikiran dan pemahaman atas dalil Al-Qur'an dan Hadist juga. Karena salah satu cara penyelesaian cara pikir yang salah adalah dengan membuka forum dialog dan menjadi ulama sebagai tumpuannya.

Agar hal tersebut dapat terwujud dengan baik di negara-negara ASEAN, maka perlu kerjasama antar negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah dengan negara menyokong forum-forum pertukaran ulama antar negara, khususnya negara-negara yang menjadi target ISIS maupun organisasi terorisme transnasional lainnya seperti Thailand, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Sehingga tercipta dialog tentang kondisi masyarakat Islam di masing-masing negara, khususnya berkaitan dengan teroris. Ini juga mendorong agar ulama dapat menghasilkan solusi terbaik dalam mencegah masyarakat masuk dalam kelompok teroris dan membuat kelompok teroris taubat. Bagi penulis, menggunakan pendekatan kekerasan dalam penuntasan terorisme atas nama agama tidak akan efektif. Maka perlu dilakukan pendekatan agama agar dapat merangkul kelompok terorisme tersebut dan mencegah masyarakat masuk ke dalam kelompok tersebut.

Kesimpulan

Problematika terorisme atas nama agama yang masih terjadi di negara-negara ASEAN saat ini dapat diselesaikan dengan salah satu solusi, yaitu menggunakan pendekatan agama. Kelompok terorisme yang mengatasnamakan Islam biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai penguat alasan aksi teror dilakukan, bahkan berani untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Salah satu ajaran Islam yang disalahartikan adalah tentang jihad. Jihad dimaknai secara tekstual hanya sebatas pada arti berperang. Padahal arti jihad tidak hanya sekedar soal berperang tetapi memiliki arti lebih luas, seperti bersungguh-sungguh dan bekerja keras dan lainnya.

Mengatasi hal tersebut, pendekatan agama dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan *soft power*. Jihad yang dijadikan sebagai salah satu alasan dalam melakukan aksi teror, dapat dilawan dengan pengertian jihad dalam artian lainnya. Artinya pemahaman atas dalil dilawan dengan pemahaman atas dalil juga. Begitupun dengan pemikiran dilawan pemikiran. Agar pendekatan ini berjalan dengan maksimal, maka pemerintah masing-masing negara perlu mengedepankan para ulama sebagai ujung tombak dalam menyebarkan paham jihad dalam Islam. Ulama dianggap sebagai otoritas yang mampu akan hal tersebut. Juga perlu bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dibidang penguatan dialog ulama-ulama Islam agar tercipta pendekatan dan solusi terbaik dalam mencegah pemahaman jihad yang salah di masyarakat dan merangkul para pelaku teror.*

Referensi

- Amin, K. (2018). ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2).
- Arjanto, D. (2021). *Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1530164/kronologi-awal-organisasi-jamaah-islamiyah>
- Aziz, T., & Abidin, A. Z. (2017). Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Persepektif M. Quraish Shihab. *Kontemplasi*, 5(2).
- BBC News. (2017). *Pemimpin ISIS di Asia tenggara, Isnilon Hapilon, "tewas" dalam perang di Marawi*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41635757>
- CNN Indonesia. (2018). *Pemimpin ISIS Al-Baghdadi Serukan Jihad dalam Pesan Idul Adha*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180823072622-120-324227/pemimpin-isis-al-baghdadi-serukan-jihad-dalam-pesan-idul-adha>
- Djelantik, S., & Abbas, N. (2009). Jemaah Islamiyah; Profil Organisasi dan Penyelewengan Ajaran Islam. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 5(2), 26–47.
- Fattah, A. (2016). Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam. *Jurnal PAI*, 3(1), 65–88.
- Fury, E. (2021). *Ini Isi Surat Diduga dari Pelaku Teror Mabes Polri _ Hukum*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-508064-hukum-ini-isi-surat-diduga-dari-pelaku-teror-mabes-polri.html>
- IEP. (2022). *Global Terrorism Index 2022 (Measuring The Impact of Terrorism)*. In *Institute for Economic & Peace (IEP)*. Institute for Economic & Peace (IEP).
- Kemendikbud. (2016). Hasil Pencarian Jihad - KBBI Daring. In *kbbi.kemdikbud.go.id*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Maulana, I. (2021). *Memahami sisi gerakan politik Jemaah Islamiyah*. Theconversation. <https://theconversation.com/memahami-sisi-gerakan-politik-jemaah-islamiyah-172496>
- MetroTv. (2021). *Pengakuan Eks Napi Terorisme soal Doktrinisasi Jihad - metrotvnews*. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CAaZq-pengakuan-eks-napi-terorisme-soal-doktrinisasi-jihad>
- Naharong, A. M. (2014). Terorisme atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593–622.
- Nizar, C. (2015). Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-an. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 21.
- Permana, M. (2022). *Pengakuan Mantan Teroris Nasir Abbas _ Bermula dari Tawaran Gratis ke Afghanistan*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1553785/pengakuan-mantan-teroris-nasir-abbas-bermula-dari-tawaran-gratis-ke-afghanistan>

- Pradewo Bintang. (2021). *Kaleidoskop 2021: Bom Gereja sampai Mabes Polri Diserang Teroris*. Www.Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/Nasional/Hukum-Kriminal/30/12/2021/Kaleidoskop-2021-Bom-Gereja-Sampai-Mabes-Polri-Diserang-Teroris/>
- Rahman, A. (2021). *Begini Isi Surat Wasiat Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar - Nasional Tempo*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1447497/begini-isi-surat-wasiat-pelaku-bom-bunuh-diri-di-gereja-katedral-makassar>
- Salenda, K. (2009). Analisis Terhadap Praktek Terorisme Atas Nama Jihad. *Alqalam*, 26(1), 75.
- Samsuri. (2003). Terorisme Agama? *Millah: Journal or Religious Studies*, 2.
- Sholeh, B. (2017). Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2).
- Taimiyah, I. (1995). *Majmû' Fatâwâ*. Majma' Al-Malik Fahd.
- Triana, R. (2017). Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an. *At-Tadabbur*, 2(2), 292–318.
- Waid, A. (2014). ISIS: Perjuangan Islam Semu dan Kemunduran Sistem Politik. *Episteme*, 9(2), 401–425.
- Wardah, F. (2022). *Ji vs ISIS, Siapa Yang Masih Beroperasi dan Kuat di Asia Tenggara?* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/ji-vs-isis-siapa-yang-masih-beroperasi-dan-kuat-di-asia-tenggara-/6511382.html>
- Wibowo, K. S. (2016). *Ali Imron_ Teroris Bisa Ubah Pola Pikir Hanya dalam 2 Jam - Nasional Tempo*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/765753/ali-imron-teroris-bisa-ubah-pola-pikir-hanya-dalam-2-jam>

MHD ALFAHJRI SUKRI merupakan dosen di jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatra Barat. Pria kelahiran 20 Mei 1992 ini merupakan lulusan S1 Ilmu pemerintahan, Universitas Padjadjaran dan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Aktif dalam menulis tulisan opini dan artikel jurnal diberbagai jurnal sosial politik. Fokus bidang kajiannya adalah Politik Islam Global. Kontak lebih lanjut, dapat dihubungi melalui email: malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id.

BAB 15

Otoritas Religius dan Dialog Antar Agama di ASEAN

Umat dan Kepemimpinan Dunia Global

Imam Shamsi Ali

Jika kita berbicara tentang dunia masa kini maka kita berbicara tentang realita yang tidak lagi terhindarkan. Dunia kita adalah dunia global. Masyarakatnya lebih dikenal dengan *global citizen* (penduduk global). Segala sesuatu, bahkan di perkampungan-perkampungan terpencil sekalipun, terwarnai oleh pergerakan dunia global.

Dalam perspektif Islam fenomena dunia global ini bukan sesuatu yang baru dan asing. Islam sejak awal telah dipersiapkan untuk menjadi agama dan tuntunan hidup dunia dengan segala karakter globalnya. Sehingga wajar saja jika semua konsep dasar kehidupan dalam Islam bersifat "global in nature."

Salah satu makna mendasar dari dunia global adalah terjadi lintas batas. Dan karenanya Tuhan dalam konsep Islam itu adalah Tuhan yang melampaui batasan apapun. Bukan Tuhan Arab, bukan juga Eropa atau Amerika, juga bukan milik orang Nusantara. Bukan juga Tuhan yang dibatasi oleh batasan jender. Sehingga tidak perlu terjadi perdebatan apakah panggilan pihak ketiga itu "he" atau "she" apalagi "they". Allah adalah Tuhan bagi semua manusia. Tuhan alam semesta (*Al-alamin*).

Demikian pula Muhammad SAW telah ditakdirkan menjadi utusan lintas batas apapun. Baik itu ras, etnis, suku dan bangsa. Juga melampaui lintas warna kulit, bahasa dan kultur. Beliau adalah milik "kaafatan linnas" (seluruh manusia) dengan misi "rahmatan lil-alamin" (rahmah bagi alam semesta). Dan ini terafirmasi dengan Kitab Petunjuk (Al-Quran) yang memang "hudan linnas" (petunjuk bagi semua manusia).

Tidak kalah pentingnya adalah konsep Komunitas Islam yang tidak tersekat-sekat oleh sekat sempit kesukuan, kebangsaan, apalagi kekeluargaan. Dan karenanya "sesungguhnya Umat ini adalah umatmu yang tunggal". Umat tunggal ini yang dikenal "ummatun wahidah". Dalam kesatuan keumatan ini terajut keindahan keragaman (plurality) tanpa harus diikat oleh konsep pluralisme ala Barat.

Kesatuan keumatan (*ummatun wahidah*) itu tidak saja menjadi unik karena rajutan keragaman yang indah. Warna-warna partikularitas yang teranyam dalam kesatuan Umat menjadi unik karena adanya ikatan yang solid dan unik pula. Ikatan itulah yang mengikat setiap unsur menjadi satu kesatuan yang kokoh. Itulah ikatan iman "sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara" yang terwujud dalam ikatan batin kasih sayang "ruhamaa baenahum."

Makna kesatuan Umat dalam rajutan diversitas juga dimaknai dengan qadar samawi yang memandang semuanya dengan pandangan "kesetaraan" (*equalitas*). Bahwa keragaman tidak bisa dipandang dengan penilaian (*value*) yang berbeda. Karena ukuran nilai bukan pada keragaman itu. Tapi ada pada kesatuan hati (iman dan ketakwaan).

Dengan karakter Islam dan Umat yang global ini tidaklah sulit baginya untuk memasuki dunia yang semakin "deeply globalized". Katakter dunia yang sangat global ini tentu perlu dipahami secara baik dan bijak. Sehingga Umat yang harusnya menjadi bagian bahkan berada di garda terdepan untuk memberikan "celupan warna". Bukan justru terwarnai bahkan menjadi obyek dan korban hiruk pikuk globalisasi dunia yang semakin tak terbendung dan tak terkendali.

Kemajuan ilmu (*science*) dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi melahirkan media, termasuk media sosial yang semakin canggih (*sophisticated*). Semua ini kemudian diperkuat oleh keterbukaan informasi yang seringkali tidak terkontrol menjadikan dunia terasa semakin mengecil. Batas-batas semakin minim hampir tak terasa. Dan dengannya terlahirlah generasi yang lintas batas. Nampak dengan dirinya sendiri. Tapi kenyataannya mereka sedang berinteraksi dengan dunia yang tiada batas.

Dunia informasi yang *highly sophisticated* ini juga mengantarkan kepada realita perubahan (*change*) yang sangat cepat. Perubahan menjadi bagian dari alam yang didorong oleh inovasi, khususnya di bidang informasi, menjadikan manusia hanya punya satu pilihan. Sadar, tanggap dan antisipatif dengan perubahan. Jika tidak maka mereka hanya akan menjadi obyek dan korban dari perubahan drastis yang terjadi.*

IMAM SHAMSI ALI adalah diaspora Indonesia di New York yang terlibat aktif dalam berbagai aktivitas perdamaian dan *interfaith dialogue*. Saat ini menjadi Presiden Nusantara Foundation, sebuah institusi yang sedang membangun dan mengembangkan Pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Moodus, Connecticut, Amerika Serikat.

Urgensi Forum Lintas Agama Bagi Perdamaian di ASEAN

Bunyan Saptomo

Mukadimah

Tahun 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Penyerahan tongkat kepemimpinan Asean ini telah dilakukan pada saat menjelang penutupan ASEAN Summit Meeting di Phnom Penh 13 November 2022 yang lalu. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema: "ASEAN Matters, Epicentrum of Growth". Tema ini menunjukkan keinginan untuk memainkan dua peran sentral ASEAN (ASEAN Centrality), yaitu: peran sentral ASEAN dalam memelihara perdamaian kawasan, dan peran sentral ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa ASEAN harus menjadi wilayah yang stabil dan damai. Disampaikan pula bahwa ASEAN harus terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Disadari bahwa tugas ini sangat berat, mengingat kepentingan negara anggota ASEAN masih beragam, apalagi kepentingan masyarakat yang sangat majemuk. Pemerintah harus lebih aktif merangkul semua stakeholders, termasuk ormas keagamaan, untuk bekerjasama mewujudkan tujuan ASEAN.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah organisasi regional (kawasan) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam perkembangannya sampai akhir abad 20 jumlah anggota meningkat jadi 10 negara (tambah Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan tahun ini anggotanya menjadi 11 (tambah Timor Leste). Sesuai dengan Namanya, maka ASEAN dirancang sebagai organisasi regional yang anggotanya hanya terdiri dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan yang dibatasi oleh 2 samudera (samudera India selatan dan samudera Pasifik di timur) dan 3 negara besar (China di utara, India di Barat, dan Australia di tenggara).

Dalam Deklarasi ASEAN 1967 disepakati pembentukan ASEAN untuk mencapai 7 butir tujuan, diantaranya yang terpenting adalah sebagai forum Kerjasama ekonomi dan sosial budaya, dan kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas Kawasan. Namun setelah 40 tahun kemudian (tahun 2007) negara anggota ASEAN menyepakati piagam ASEAN (Asean Charter) yang di dalamnya memuat 15 butir tujuan. Diantara 15 butir tujuan itu, yang menonjol selain memperkuat peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian Kawasan, juga menginginkan pembentukan komunitas ASEAN dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyambut keketuaan Indonesia di ASEAN, khususnya untuk membahas pentingnya forum dialog Lintas Agama Asean yang lebih intensif dalam upaya mewujudkan Komunitas ASEAN.

Dari Kawasan Benturan Peradaban ke Kawasan Damai

Kawasan Asia Tenggara lokasinya sangat strategis dan wilayahnya sangat kaya akan sumber daya alam. Karena itu tidak mengherankan bila Asia Tenggara sejak dulu merupakan Kawasan perebutan pengaruh asing. Menurut Kishore Mahbubani dalam bukunya *Keajaiban ASEAN*, ada 4 gelombang besar pengaruh asing yang terkait dengan peradaban besar di dunia yang masuk Kawasan ini, yaitu: India, China, Islam dan Barat. Gelombang India di awal abad Masehi telah membawa pengaruh besar dalam politik, agama dan bahasa di Asia Tenggara. Agama Hindu dan Buddha serta bahasa Sansekerta mendominasi

Kawasan Asia Tenggara sangat lama. Gelombang China yang menyusul berikutnya memperkuat dominasi Kerajaan Budha di Asia Tenggara daratan (Thailand, Myanmar dan Kambodia) dan dominasi etnis China di Singapore sampai sekarang. Gelombang Islam yang datang berikutnya telah menggeser dominasi India, budaya dan agama Hindu di

Indonesia, Malaysia dan Brunei. Gelombang Barat yang datang terakhir telah membawa pengaruh Barat di Kawasan, menjadikan agama Kristen Katholik mendominasi Filipina dan bahasa Inggris menjadi Bahasa penting di kawasan ini.

Sebenarnya apabila diteliti lebih lanjut, setelah Perang Dunia II masih ada satu gelombang lagi yang melanda Asia Tenggara, yaitu: gelombang Komunism. Gelombang Komunism ini juga telah disebut dalam buku Mahbubani, namun dalam bab terpisah di luar 4 gelombang yang dia sebut. Gelombang Komunism ini berbenturan dengan pengaruh Barat (dan peradaban lain yang datang sebelumnya) di kawasan, sehingga Barat melakukan politik pembendungan (*containment policy*) dengan membentuk kerjasama militer South East Asia Treaty Organization (SEATO) tahun 1954 dan Five Power Defence Arrangements (FPDA) tahun 1971, serta mendukung berdirinya organisasi kerjasama ekonomi ASEAN tahun 1967. Benturan ini menyebabkan perang Vietnam, perang Kamboja dan sejumlah perang melawan pemberontak komunis di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Mungkin benturan gelombang pengaruh asing di Kawasan Asia Tenggara dapat disamakan dengan benturan peradabannya Samuel Huntington. Potensi benturan tersebut di Kawasan ASEAN dapat berupa benturan peradaban liberal vs komunis, maupun benturan antar agama besar di kawasan ini, yaitu: Islam, Kristen, dan Buddha. Dalam sejarah Asia Tenggara kita telah secara umum mengetahui terjadinya konflik akibat benturan antar peradaban dan agama di kawasan, khususnya di Indonesia. Untuk Asia Tenggara di luar Indonesia kita melihat ada 4 kasus konflik yang menonjol, yaitu: kasus konflik di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rohingya dan Kamboja.

Konflik Filipina Selatan (Mindanao) merupakan konflik akibat benturan dari dua agama besar (Islam dan Katolik) meskipun ada juga unsur etnisitas. Konflik ini berakar sejak abad 16 yaitu antara Kesultanan/Kedatuan yang sudah ada di Filipina dengan penjajah Spanyol yang datang belakangan. Pada waktu Perang Dunia ke-2 (PD 2) AS menjanjikan kemerdekaan Mindanao bila Bangsa Samoro membantu AS dalam perang melawan Jepang. Namun setelah PD 2 Mindanao tetap menjadi satu dengan Filipina yang merdeka tahun 1946. Kekecewaan ini ditambah perasaan didiskriminasikan oleh Pemerintah Manila selama 23 tahun Bersatu, tahun 1969 pecah pemberontakan Bangsa Samoro melawan Pemerintah Manila. Setelah lebih 40 tahun, akhirnya konflik dapat diselesaikan dengan ditandatangani perjanjian damai tahun 2014.

Konflik Thailand Selatan (Pathani) merupakan konflik akibat benturan dari dua agama besar (Islam dan Buddha) meskipun ada unsur etnisitas juga. Konflik ini berakar pada abad 18, dimana pada tahun 1785 Kesultanan Pathani yang muslim ditaklukkan oleh Kerajaan Siam (Thailand) yang Buddha. Konflik muncul kembali mungkin terinspirasi oleh kemerdekaan Malaysia dari Inggris tahun 1957. Akhirnya konflik tsb dapat diredam melalui kebijakan Pemerintah Bangkok yang positif, yaitu melibatkan mereka dalam pemerintahan tahun 2006. Meskipun demikian, ketika penulis berkunjung ke Thailand Selatan (kota Songkla) mendapat informasi bahwa untuk orang asing mengunjungi provinsi Pathani masih memerlukan ijin khusus.

Konflik Rohingya di Myanmar merupakan konflik akibat benturan dua agama besar (Islam dan Buddha) meskipun ada juga unsur etnisitas. Menurut catatan sejarah keberadaan orang Rohingya di Arakan sudah sejak lama. Konflik ini berakar dari penaklukan kerajaan Arakan oleh Kerajaan Burma tahun 1785. Kemudian setelah Myanmar merdeka, pemerintah Myanmar tak mengakui mereka sebagai warga negara. Tahun 1970an rezim Myanmar semakin represif kepada orang Rohingya. Sejak itu semakin banyak orang Rohingya yang terpaksa mengungsi ke negara lain. Puncaknya tahun 2017 ketika terjadi pembantaian dan pengusiran secara besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang Rohingya mengungsi. Kebanyakan mereka mengungsi ke Bangladesh, negara terdekat. Masalah pengungsi Rohingya belum dapat diselesaikan sampai sekarang, karena rezim Myanmar tetap berpendirian mereka bukan warga negara Myanmar.

Konflik Kamboja sangat menonjol karena kekejaman rezim Komunis Khmer Merah pimpinan Polpot tahun 1975-1979. Selama 4 tahun berkuasa, rezim ini telah membantai sekitar 2 juta rakyatnya sendiri yang tidak setuju dengan komunism, termasuk kelompok agama. Tercatat sekitar 90 ribu muslim Kamboja turut dibantai. Akhirnya rezim ini dapat ditumbangkan oleh Kelompok perlawanan yang dibantu Vietnam.

Keberadaan ASEAN lambat laun telah berhasil meminimalisir empat kasus konflik benturan peradaban besar tsb. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan benturan tersebut akan membesar lagi. Untuk itu perlu diintensifkan dialog antar semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama, di kawasan ini.

Pentingnya Forum Lintas Agama bagi Komunitas ASEAN

Tahun 2015 ASEAN telah sepakat untuk pembentukan Komunitas ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat integrasi ASEAN. Komunitas ASEAN meliputi 3 pilar, yaitu: Pertama, ASEAN Economic Community/ Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang tujuannya untuk mencapai integrasi ekonomi Kawasan Asia Tenggara. Kedua, ASEAN Political and Security Community/Masyarakat Politik dan Keamanan (APSC) yang tujuannya untuk mewujudkan Kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ketiga, ASEAN Social and Cultural Community/Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC) yang tujuannya utk mewujudkan masyarakat ASEAN yang harmonis dan inklusif di tahun 2025. Untuk mewujudkan ASCC ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered*): oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dalam upaya untuk memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan dan rasa kebersamaan (*we feeling*) terhadap ASEAN.

Forum dialog antar kelompok masyarakat, termasuk antar kelompok agama, untuk memperkuat komunitas ASEAN ini sangat penting mengingat beberapa alasan. *Pertama*, masyarakat di Kawasan Asia Tenggara termasuk salah satu masyarakat yang paling majemuk di dunia. Bila di Indonesia saja ada lebih dari 700 suku bangsa dengan bahasa dan budaya masing-masing, maka di seluruh Asia tenggara tentu lebih banyak, bisa lebih dari 2 kali lipat. Selain suku bangsa asli Asia Tenggara juga banyak etnis asing yang tinggal di kawasan ini, seperti etnis China, Arab, India dan Eropa. Bila di Indonesia ada semua kelompok agama besar di dunia (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha), maka di seluruh Asia tenggara juga ada. Muslim mayoritas di Indonesia, Malaysia dan Brunei, Kristen Katolik mayoritas di Filipina, dan Buddha mayoritas di Asia tenggara daratan (Thailand, Cambodia dan Myanmar).

Kedua, mayoritas penduduk ASEAN adalah masyarakat yang beragama. Menurut Kishore Mahbubani dalam bukunya Keajaiban ASEAN, dari 600jt penduduk ASEAN terdapat 240jt Muslim (40%), 130jt Kristen (22%), 140 Budha (24%), 8jt Hindu (1.4%). Jadi mayoritas mutlak (87.4%) penduduk ASEAN penganut 4 agama besar, sisanya mungkin menganut atheis, komunis dan kepercayaan lain.

Ketiga, meningkatnya persaingan Amerika dan China di Kawasan dikhawatirkan akan menciptakan gelombang benturan yang membahayakan komunitas ASEAN. Meningkatnya persaingan kedua raksasa ini semakin nyata sejak pembentukan Shanghai Cooperation Organization/SCO (Kerjasama China dengan Rusia dan sejumlah negara Asia Tengah) tahun 2001, dan peluncuran Proyek New Silk Road dan Maritim Silk Road oleh Presiden Xi Jinping tahun 2013 yang disertai dengan peningkatan kekuatan *Blue Water Navy China*. Amerika dan sekutunya telah merespon Langkah China tersebut dengan melakukan politik pembendungan, antara lain membentuk Indo Pacific Economic Frameworks (IPEF) tahun 2017, Dialog Keamanan Quadrilateral (Quad) tahun 2017 dan Pakta Militer 3 negara AUKUS tahun 2021. Di lapangan terlihat semakin jelas potensi konflik antara Amerika dan China, yaitu di Laut China Selatan (LCS) dan Taiwan. Yang dikhawatirkan ulah kedua raksasa tersebut bisa memecah belah ASEAN baik pada tingkat negara maupun tingkat masyarakat. Untuk itu Asean perlu meningkatkan upaya memupuk solidaritas antar anggota ASEAN, baik pada tingkat negara maupun pada tingkat masyarakat.

Keempat, adanya fakta masih adanya konflik antar kelompok etnis/agama di ASEAN. Yang paling menonjol adalah konflik etnis/agama di Myanmar 2017 yang berujung pada pembantaian dan pengusiran besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang Rohingya mengungsi. Masalah yang merupakan salah satu bencana kemanusiaan yang terbesar di ASEAN ini belum dapat diselesaikan sampai sekarang dan ASEAN nampaknya masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam FGD "Challenges and Opportunities for ASEAN Under Indonesia's Chairmanship" di Jakarta baru-baru ini pembicara dari Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) mengakui bahwa AICHR belum pernah mengadakan dialog antar pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini.

Mengingat 4 alasan itu, maka Indonesia yang selama ini dikenal sangat toleran dan berhasil mengembangkan forum kerukunan umat beragama di dalam negeri, serta telah aktif mengembangkan inter-faith dialogues dengan negara lain, diharapkan bisa lebih aktif mengembangkan Forum Dialog untuk kerukunan beragama di ASEAN guna mewujudkan komunitas ASEAN. Memang selama ini Indonesia sudah pernah mengadakan forum interfaith Asean, tapi belum permanen dan belum terlihat dampaknya, khususnya bagi penyelesaian konflik antar kelompok dan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Tahun 2023 ini Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Di antara tugas ketua Asean adalah memajukan kepentingan dan kesejahteraan Asean, termasuk mewujudkan Komunitas ASEAN. Bagaimana mungkin ASEAN bisa mewujudkan Komunitas Asean bila masih terjadi konflik antar kelompok masyarakat dan pelanggaran HAM berat di dalamnya. Untuk itu, diharapkan pemerintah RI lebih aktif mengajak ormas lintas agama di Indonesia, termasuk MUI, untuk membuat forum dialog lintas agama ASEAN secara lebih permanen mulai tahun 2023 secara berkelanjutan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang solid. Semoga sebagai ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia lebih berhasil mewujudkan apa yang ditulis oleh Kishore Mahbubani: "Dalam ASEAN, sebuah kultur damai telah berkembang sebagai hasil penerapan budaya Indonesia 'musyawarah' dan 'mufakat' (*konsultasi dan consensus*)."^{16*}

Referensi

- Asean Secretariat, Asean Declaration 1967, asean.org
Asean Secretariat, Piagam Asean 2007, asean.org
Ditjen Kerjasama ASEAN Deplu (2008). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta
Huntington, Samuel (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York
Kementerian Agama (2015). Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Jakarta
Mahbubani, Kishore et.al (2017). *Keajaiban ASEAN*. Jakarta: Gramedia, Jakarta
Miller, Tom (2017). *China's Asian Dream: Empire Building along the Silk Road*. London
Menlu RI, Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023, Kemlu.go.id, 11 Januari 2023
Pontianak Post, Belajar dari Konflik Mindanao, pontianakpost.jawapost.com, 2 Agustus 2022
ResearchGate, Asean Community Blueprint 2025, researchgate.net
Tempo (2022). Masa Kekuasaan Polpot dan Khmer Merah: kisah kelam Kamboja, tempo.co, 15 April 2022
Wikipedia, Konflik Moro, id.m.wikipedia.org
Wikipedia, Krisis Thailand Selatan, id.m.wikipedia.org
Wikipedia, Genocide Rohingya, id.m.wikipedia.org
Wikipedia, Rohingya Ppeople, en.m.wikipedia.org

BUNYAN SAPTOMO adalah diplomat Indonesia kelahiran Klaten, Jawa Tengah. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI. Ia pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria dan mengajar diplomasi di Universitas Bakrie, Jakarta.

Urgensi Dialog antar Iman di Kawasan ASEAN

Hadiyan

Menepis Tesis Huntington

Tesis 'benturan peradaban' (*clash of civilization*) yang dikemukakan Samuel P. Huntington, seorang profesor ilmu pemerintahan dari Universitas Harvard pada tahun 1990-an telah menyulut polemik. Tesis ini mengatakan bahwa identitas budaya dan agama akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca Perang Dingin. Menurut hipotesisnya, sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru ini pada dasarnya tidak lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik yang dominan. Samuel P. Huntington menyebut ada tujuh atau delapan peradaban besar yang akan semakin penting di masa yang akan datang, yaitu peradaban Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Ortodoks Slavia, Amerika Latin, dan Afrika. Peradaban sendiri umumnya difahami sebagai entitas sosial sangat besar dan komprehensif yang timbul melebihi individu, keluarga, atau bahkan negara.

Polemik atas tesis Samuel P Huntington di atas, menyedot perhatian publik. Di Jakarta diselenggarakan sebuah seminar yang mendatangkan banyak pembicara yang umumnya menyatakan ketidaksetujuan terhadap tesis Huntington; Donald K. Emerson, Profesor ilmu politik dari University of Wisconsin Madison AS. Ia memandang bahwa kategorisasi dan polarisasi versi Huntington tidak mewakili antar peradaban di dunia, yang hanya menyoroti kemungkinan semakin parahnya ketegangan peradaban Barat dan peradaban Islam. Padahal, menurut Emerson, di antara sesama manusia Barat di Eropa maupun di Amerika Utara nampaknya banyak ketegangan yang diabaikan Huntington.

Dewi Fortuna Anwar dengan versi yang berbeda juga menolak spekulasi Huntington. Ia menilai bahwa dengan berakhirnya perang dingin, kecenderungan yang terjadi bukanlah pengelompokkan masyarakat ke dalam entitas tertinggi, yaitu pengelompokkan peradaban, tetapi justru perpecahan menuju entitas yang lebih kecil lagi, yaitu berdasarkan suku dan etnisitas. Hal ini jelas sekali terlihat pada disintegrasi Uni Soviet yang secara ironis justru disatukan oleh dasar budaya dan peradaban yang sama. Pokok-pokok pikiran yang berkembang pada seminar tersebut hampir seluruhnya mendukung terselenggaranya dialog antara Islam dan Barat, adanya kerjasama dan sikap saling pengertian antara kedua belah pihak.

Dua pemikir yang merepresentasi dunia Timur dan Barat di atas tentu menjadi harapan cerah terjadinya situasi dunia yang lebih cerah, termasuk di kawasan ASEAN sebagai bagian dari entitas dunia.

Lima Model Dialog

A. Charles Kimball, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, menyebutkan beberapa model dialog yang dilakukan oleh para intelektual, dan juga melibatkan fungsionaris dan wakil-wakil berbagai agama; Pertama, dialog parlementer (*parliamentary dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta. Contoh paling awal dialog ini adalah World's Parliament of Religions pada 1893 di Chicago. Dalam pertemuan-pertemuan parlementer ini, ratusan para peserta cenderung memusatkan diri dalam penciptaan dan pengembangan kerjasama yang lebih baik di antara berbagai kelompok agama, dan sekaligus untuk menggalang perdamaian di antara para pemeluk agama.

Kedua, dialog kelembagaan (*institutional dialogue*), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda. Selain itu, dialog kelembagaan juga berusaha menciptakan dan mengembangkan komunikasi antara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama. Dialog kelembagaan ini melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).

Ketiga, dialog teologi (*theological dialogue*). Dialog teologi ini mencakup pertemuan-pertemuan—baik reguler maupun tidak—untuk membahas persoalan teologis dan filosofis. Dalam dialog-dialog semacam ini tema yang pernah diangkat, misalnya pemahaman kaum Muslim dan Kristen tentang Tuhan masing-masing, sifat wahyu Ilahi, tanggung jawab manusia dalam masyarakat, dan sebagainya. Dialog-dialog teologis juga dapat menjangkau hal-hal lebih luas, seperti makna tradisi keagamaan seseorang dalam konteks pluralisme keagamaan. Dialog teologi ini pada umumnya diselenggarakan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk juga mengembangkan dialog antaragama, seperti Interfidei, Paramadina, MADIA, dan lain-lain.

Keempat, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*) dan dialog kehidupan (*dialogue of life*). Dialog-dialog dalam kategori ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian “al-hal praktis” dan “aktual” dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama. Misalnya, hubungan yang lebih patut antara agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang muncul dari perkawinan antaragama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama, atau nilai-nilai agama dalam pendidikan. Dialog-dialog seperti ini pada umumnya diselenggarakan organisasi-organisasi dialog dan LSM lainnya.

Kelima, dialog kerohanian (*spiritual dialogue*). Dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk dialog spiritual yang mungkin lebih *acceptable* adalah melalui aspek esoteris agama, seperti ditawarkan misalnya oleh Schuon (1975), Schimmel & Falaturi (1979), dan Sayyid Hossein Nasr dalam berbagai bukunya.

Modal Tiga Milestones

Ada tiga *milestones* atau tonggak sejarah utama yang memberikan dukungan dan peluang bagi kemudahan dan peluang keberhasilan dialog peradaban Barat-Islam pada umumnya, maupun dialog antara Gereja dan Islam; Pertama, Deklarasi *Nostra Aetate* atau “Zaman Kita” dalam Konsili Vatikan II (1965) ini telah benar-benar melakukan terobosan dalam pembaruan sikap gereja terhadap Islam. Gereja Katolik membuka hati mengakui hal-hal yang baik dalam agama Islam, serta mengajak melupakan permusuhan kedua agama Abrahamik di masa lalu.

Kedua, A Common Word yang merupakan surat terbuka *A Common Word between Us and You* yang dirintis oleh Pangeran Prof Ghazi bersama 138 ulama dan cendekiawan Muslim sedunia ke Paus Benediktus XVI dan semua petinggi gereja sedunia (13 Oktober), yang merupakan ajakan perdamaian berdasarkan kesamaan pada firman Allah atau *common word* antara umat Islam dan Kristen tersebut mendapat sambutan dan respon yang sangat positif dari Paus Benediktus XVI dan seluruh petinggi gereja sedunia. Bahkan Vatikan telah secara resmi membentuk forum dialog resmi Katolik dan Muslim yang diselenggarakan secara periodik.

Ketiga, Agenda for Humanity. World Humanitarian Summit, Istanbul 22-24 Oktober 2016, merupakan puncak komitmen Perserikatan bangsa-Bangsa dalam mewujudkan *Agenda for Humanity* atau Agenda Kemanusiaan di sepanjang sejarah PBB. Kesepakatan Forum Katolik-Muslim I, Vatikan 4-6 November 2008, yang sepakat menyatakan “*Katolik dan Muslim sebagai instrumen cinta dan harmoni antarumat beragama, untuk kemanusiaan secara luas*”, diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan *global humanitarian efforts* di kalangan umat beragama dalam melaksanakan komitmen Agenda Kemanusiaan hasil World Humanitarian and Summit Istanbul tersebut.

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa penandatanganan Dokumen Human Fraternity atau Persaudaraan Kemanusiaan oleh Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmed al-Thayeb, Imam Besar Al-Azhar Kairo di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019, merupakan upaya strategis dalam ‘membumikan’ semangat ketiga *milestones* di atas. Persaudaraan kemanusiaan antar Iman kini bukan lagi sekedar wacana, tapi semakin menjadi kenyataan karena didukung oleh aksi-aksi bersamadi berbagai ranah, sejak di tingkat komunitas, lokal, hingga nasional, dan global.

Konteks ASEAN

Urgensi dialog di kawasan ASEAN terletak pada fakta bahwa ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadai kerjasama antarnegara di Asia Tenggara sejak terbentuknya pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Sepuluh negara

anggota ASEAN terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN didirikan bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara penandatanganan Deklarasi Bangkok menginginkan kerja sama untuk mencapai antara lain, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan dalam wadah ASEAN.

Berdasarkan Piagam ASEAN, penyelesaian sengketa masalah politik dan keamanan di dalam ASEAN diselesaikan melalui Dewan Tinggi dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, sedangkan masalah di bidang ekonomi diselesaikan melalui *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (DSM)*. ASEAN dalam menyikapi keragaman sosial budaya, bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban. Motto ASEAN : One Vision, One Identity, One Community. *

Referensi

- Adolf, Huala (2009). *Arbitrase Negara-negara ASEAN*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Azra, Azyumardi (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*, Jakarta : Paramadina, cetakan ke-1
- Bajunid, Omar Farouk (1994), *Muslim Social Science in ASEAN*, Kuala Lumpur : Yayasan Penataran Ilmu
- Markus, Sudibyo (2019). *Dunia Barat dan Islam Cahaya di Cakrawala*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama
- Shihab, Alwi (1999). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung : Mizan, 1999 Cetakan ke-V
- Tamara, M. Nasir & Taher, Elza Peldi (Ed.) (2019), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta : Paramadina, Cetakan ke 1
- Usman, Asnani & Sukma, Rizal (1997). *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS), cetakan ke-1
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI (2011). *Ayo Kita Kenali ASEAN*
www.asean.org
www.kemlu.go.id

HADIYAN lahir 18 Juni 1974. Saat ini aktif sebagai dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diperbantukan (dpk) pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sejak 2005. Amanah yang diembannya sekarang adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMJ dan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta

Dialog Antarumat Beragama di ASEAN

Daryanto Setiawan dan Effiati Juliana Hasibuan

Pendahuluan

Masyarakat ASEAN adalah masyarakat beragama, yang berbeda dengan masyarakat di belahan benua lainnya, seperti Eropa dan Amerika. Bagi masyarakat ASEAN, agama adalah kehidupan mereka yang sudah mulai tertanam sejak mereka dilahirkan. Agama yang diyakini ini selalu mengajarkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Agama bagi mereka adalah penyejuk batin, bukan pemicu konflik (Idi, 2018).

Berdasarkan data situs "www.religion-facts.com", total populasi agama di Asia Tenggara adalah 593,410,000 dari 11 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Burma (Myanmar), Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam dengan rincian sebagai berikut (Facts, 2022) :

Tabel 1: Tabel Persentase Agama di ASEAN

Nomor	Agama	Populasi	Persentase
1	Islam	239,594,630	40.38 %
2	Budha	143,582,660	24.20 %
3	Kristen	126,571,210	21.33 %
4	Hindu	6,932,110	1.17 %
5	Agama Rakyat	47,540,670	8.01 %
6	Lainnya	29,188,720	4.92 %
Jumlah		593,410,000	100.00 %

Sumber: www.religion-facts.com

Namun sangat disayangkan, masyarakat ASEAN yang merupakan mayoritas masyarakat agama, ternyata dalam praktiknya telah terjadi konflik diantara sesama negara ASEAN. Bahkan, sampai sekarang konflik antar negara anggota ASEAN juga masih terjadi, misalnya saja konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di kawasan (Pratomo, 2021).

Konflik Rohingya di Myanmar yang melibatkan umat Muslim dan Budha mendapat perhatian dari dunia khususnya kawasan Asia Tenggara. Padahal jika berpatokan pada Tabel Persentase Agama di ASEAN di atas, diketahui bahwa Islam dan Budha adalah agama yang paling banyak dianut oleh Negara ASEAN. Sangat disayangkan dua agama besar ASEAN yang seharusnya menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya malah menjadi pusat perhatian.

Jika hal ini tidak diperhatikan oleh negara ASEAN, maka dikhawatirkan akan muncul konflik agama lagi dan akan mengurangi keharmonisan hubungan internasional di negara ASEAN. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan negara ASEAN untuk mengantisipasi terjadinya konflik agama dan menjaga keharmonisan hubungan internasional antara negara ASEAN adalah dengan melakukan dialog antarumat beragama.

Dialog Antar Umat Beragama

Definisi Dialog Antar Umat Beragama

Suatu pembicaraan mengenai dialog antar umat beragama tampaknya hanya dapat dimulai dengan mengandaikan adanya keterbukaan dari pemeluk agama terhadap pemeluk agama lainnya (Kleden, 1978). Sifat Keterbukaan antara pemeluk agama menjadi prasyarat penting apabila seseorang hendak melakukan dialog, sebab keterbukaan akan membawa pada suatu kondisi dialog yang sehat dan konstruktif.

Kata dialog berasal dari bahasa Yunani yaitu *dia* dan *logos* yang mempunyai arti bicara antara dua pihak atau dwicara (Daya, 2004). Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dialog berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang ajaran dan kehidupan. Dialog mempunyai tujuan menciptakan kerukunan, pembinaan toleransi dan kesejahteraan bersama, membudayakan keterbukaan, mengembangkan rasa saling menghormati, saling mengerti, membina integrasi, berkonsistensi diantara berbagai perbedaan (G. Edwi Nugrohadi, 2013).

Dalam konteks hubungan antar umat beragama, dialog adalah komunikasi yang dilakukan antara dua atau lebih orang yang berbeda agama. Dialog menjadi jalan bersama menuju ke arah kebenaran, *partnership* tanpa ikatan dan tanpa maksud yang tersembunyi (G. Edwi Nugrohadi, 2013).

Sedangkan Mukti Ali memberi definisi dialog antar agama adalah dialog antar umat beragama yang mempertemukan antara orang-orang atau kelompok dari agama atau ideologi yang berbeda untuk sampai pada pengertian bersama tentang berbagai isu tertentu untuk setuju atau tidak setuju dengan sikap yang penuh apresiasi dan untuk kerjasama dengan mereka untuk menemukan makna kehidupan ini. Dialog adalah suatu proses dimana para individu atau kelompok berupaya untuk menghilangkan rasa takut dan rasa tidak percaya satu sama lain dan mengembangkan hubungan baru berdasarkan rasa saling percaya. Dialog adalah suatu kontak dinamis antara kehidupan dengan kehidupan-tidak saja antara satu pandangan rasional yang berlawanan satu sama lain- yang ditujukan untuk membangun dunia baru secara bersama-sama (Ismail, 2019).

Dari beberapa pengertian di atas, maka menurut penulis yang dimaksud dengan dialog antar umat beragama adalah pertemuan antar pemeluk agama yang berbeda keyakinan, tanpa merasa lebih tinggi atau merasa rendah rendah dan tanpa ada misi yang dirahasiakan dengan tujuan menjalin kerjasama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat beragama.

Upaya Menjaga Keharmonisan Masyarakat ASEAN

Dialog antar umat beragama sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan karena ASEAN merupakan negara dengan banyak agama, budaya, suku, ras maupun bahasa. Perbedaan dalam hal beragama selalu menghiasi kehidupan sehari-sehari. Maka dari itu perlu adanya dialog supaya perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi masalah serius yang bisa berdampak buruk terhadap orang lain atau timbul konflik yang mengatasnamakan agama.

Gagasan dialog yang menghadirkan perdamaian universal semakin mendapat tempatnya di tengah dunia ketika pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi; Bapa Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb menyepakati satu tatanan dunia tanpa konflik (Sarang, 2022). Umat beragama yang hendak melakukan dialog hendaklah berpegang pada 10 (sepuluh) prinsip dialog yang dalam istilah Leonard Swidler disebut dengan Ten Commandments (Mojzes, 2000) sebagai berikut:

1. Mempelajari perubahan dan perkembangan persepsi, serta pengertian tentang realitas, kemudian berbuat menurut apa yang sesungguhnya diyakini.
2. Dialog antar umat beragama harus merupakan suatu proyek dua pihak, internal pemeluk agama, dan antar masyarakat penganut agama yang berbeda.
3. Setiap peserta dialog harus datang untuk mengikuti dialog dengan kejujuran dan ketulusan yang sungguh-sungguh.
4. Setiap peserta dialog harus mendefinisikan dirinya sendiri atau *partner* dialognya.

5. Setiap peserta dialog tidak diperbolehkan melakukan perbandingan antara yang ideal dengan yang praktis. Namun sebaliknya yang diperbandingkan adalah antara yang ideal dengan yang ideal dan antara yang praktis dengan yang praktis dari partner dialog.
6. Dialog hanya dapat dilakukan di antara pihak-pihak yang setara (*per cum pari*). Namun jika Budha dianggap inferior oleh Kristen dalam kasus ini dialog akan sulit untuk dilaksanakan.
7. Dialog harus dilakukan dengan saling percaya (*mutual trust*).
8. Peserta dialog harus bersifat kritis, baik pada agama yang dianut oleh partner dialognya maupun pada agama yang ia anut sendiri.
9. Setiap peserta dialog harus mencoba memahami agama mitra dialognya dari dalam (*from within*).
10. Peserta dialog harus mengikuti dialog tanpa asumsi-asumsi yang kukuh dan tergesa-gesa mengenai perkara yang tidak bisa disetujui.

Dari 10 prinsip dialog yang telah dikemukakan Swidler tersebut, dapat membantu posisi dan tugas peserta dialog antar umat agama. Apabila prinsip-prinsip dialog mampu dipahami dengan benar maka dialog antar umat beragama agama akan berjalan dengan baik. Mengingat dialog antar umat beragama dilakukan dengan orang berbeda keyakinan maka dianjurkan peserta dialog antar umat beragama memiliki ilmu yang luas, berusia dewasa, dan sudah matang dalam berfikir. Jika muncul dalam dialog sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya maka dia akan mampu menanggapi secara sehat yang akhirnya mampu melanjutkan dialog antar agama sesuai dengan harapan.

Setelah 10 prinsip dialog dipahami antar umat beragama maka dialog dapat dilakukan antar pemeluk agama. Dialog antar umat beragama hendaklah dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penting yang berhubungan dengan upaya menjaga keharmonisan komunikasi masyarakat ASEAN. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerukunan umat beragama di ASEAN adalah sebagai berikut (Adnan, 2020) ;

1. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan bersedia menghargai keyakinan orang lain.
2. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan tetapi salahkanlah orangnya sebagai pelaku. Misalnya pelaku terorisme.
3. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati.
4. Hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Selain penjelasan di atas, penulis menambahkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi masyarakat ASEAN melalui dialog antar umat beragama adalah dengan cara menghindari pandangan negatif terhadap agama lainnya. Hal ini penulis rumuskan dengan menggunakan prinsip STIGMA (*Sift, Tolerance, Institutional Dialog, Give Counseling, Method Religion, and Allot*). Penjelasan dari prinsip STIGMA adalah sebagai berikut:

1. *Sift information* (filter informasi). Perlunya menyaring informasi yang sampai kepada penganut agama. Karena kebanyakan terjadinya konflik agama terjadi karena informasi-informasi yang sampai kepada para penganut agama tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. **Tolerance religion**. Toleransi antar umat beragama jangan selalu diartikan sebagai pembenaran semua agama sehingga masing-masing umat manusia dapat bertukar ritual dalam hal ibadah. Toleransi antara umat beragama yang dikembangkan melalui dialog cukup diarahkan pada upaya untuk menanamkan sikap saling menghormati kebenaran yang dianut oleh masing-masing umat beragama tanpa harus memaksakan umat agama lain untuk memeluk agama kita. (Sofnita, 2018)

3. **Institutional dialogue** (dialog kelembagaan). Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan umat dan mengembangkan komunikasi diantara organisasi keagamaan. (Adnan, 2020)
4. **Give Counseling** (memberi penyuluhan). Para pemuka agama hendaknya melakukan memberikan penyuluhan kepada umatnya masing-masing. Seorang pemuka agama tidak dibenarkan menanamkan benih-benih kebencian dengan umat lainnya yang berbeda keyakinan.
5. **Method Religion** (Metode beragama). Banyak para menganut agama tidak memahami bagaimana cara memahami agama. Hal ini dikemukakan oleh Amin Abdullah bahwa hambatan mendasar dalam membangun dialog keagamaan adalah adanya ketidaktahuan pemahaman yang dimiliki oleh penganut suatu agama. Kesulitan dalam menemukan pemahaman atas teks atau adanya kesulitan pembacaan terkadang menyebabkan distorsi pemahaman atas makna pesan agama yang sesungguhnya. (Esha, 2008).
6. **Allot information of religion** (membagi Informasi Agama dan budaya). Berbagi informasi seputar agama dan budaya masing-masing, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi. Ini dapat dilakukan dengan mengundang pemuka agama dari agama lain untuk berbicara tentang agama mereka dan berbagi informasi tentang budaya mereka.

Konklusi

Masyarakat ASEAN adalah masyarakat yang heterogen memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. Masyarakat ASEAN yang mayoritas merupakan masyarakat beragama seharusnya mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun sangat disayangkan ada beberapa peristiwa yang terjadi di ASEAN adalah masalah tentang isu agama. Untuk tetap menjaga keharmonisan komunikasi masyarakat ASEAN, maka perlu dilakukan dialog antar umat beragama. Dalam dialog antar umat beragama hendaklah memperhatikan 10 prinsip Swidler. Dalam dialog antar umat beragama hendaklah dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penting yang berhubungan dengan upaya menjaga keharmonisan komunikasi masyarakat ASEAN. Diantaranya adalah dengan menggunakan prinsip STIGMA (*Sift information, Tolerance religion, Institutional Dialog, Give Counseling, Method Religion, and Allot information of religion*).*

Referensi

- Adnan, M. (2020). Dialog Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Di Indonesia. *Lentera*, 19. No.2.
- Daya, H. B. (2004). *Agama Dialogis: Meranda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antarumat Agama*. Mataram-Minang Lintas Budaya.
- Esha, M. I. (2008). Hambatan dan Model Dialog Keagamaan Di Era Kontemporer. *El-Harakah*, 10. No.2.
- Facts, R. (2022). *Daftar populasi agama di Asia Tenggara*. Religion Facts. <https://www.religion-facts.com/id/u11>
- G. Edwi Nugrohadhi, E. a. (2013). *Menjadi Pribadi Religius dan Humanis*. Graha Ilmu.
- Idi, A. (2018). *Konflik Etno-Religius Di Asia Tenggara*. LKiS.
- Ismail, F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. IRCiSod.
- Kleden, I. (1978). Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-batasnya. *Prisma*.
- Mojzes, L. S. and P. (2000). *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*. Temple University Press.
- Pratomo, J. I. dan R. R. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17 No 2.
- Sarang, R. K. (2022). Membangun Dialog Sebagai Model Terciptanya Perdamaian Antar Umat Beragama Di Kota Merauke. *Jurnal Masalah Pastoral*, 10(1), 1–26.
- Sofnita, L. (2018). *Dialog Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Alquran Analisis Surah Ali 'Imran Ayat 64*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

DARYANTO SETIAWAN adalah Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di STAI As-Sunnah Deli Serdang. Ia merupakan pengajar di STAI As-Sunnah Deli Serdang (sejak 2016-sekarang). Selain mengajar di STAI As-Sunnah ia juga mengajar di Universitas Medan Area (sejak 2021-sekarang), menulis beberapa artikel ilmiah, diantaranya: *Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia* (Jurnal Simbolika, 2017), *Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya* (Jurnal Simbolika, 2018), *Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an (Science in the Qur'an* (Jurnal Al-Hadi, 2018), *Peer Group Behavior in Islamic Perspective* (IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology), *Filsafat komunikasi dalam makrokosmos* (Jurnal Simbolika, 2021), *The Influence Of Search Engine Student's Conduct In Junior High School Country Pancur Batu District* (International Journal Of Education Social Studies and Management). Ia dapat dihubungi di email: daryantosetiawannew@gmail.com.

EFFIATI JULIANA HASIBUAN adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Komunikasi USU dan selesai tahun 1989. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Studi Ilmu Manajemen USU tahun 2007 dan pendidikan S3 di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam diselesaikan tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Perjalanan karir pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Wakil Dekan 2, serta Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi di Fisipol, Universitas Medan Area. Aktif di bidang pengelolaan Jurnal ilmiah dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Redaksi Jurnal Simbolika dan Jurnal Perspektif UMA. Saat ini (tahun 2022) diberi amanah menjabat sebagai Dekan Fisip UMA. Sehari-harinya aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di program Studi Ilmu Komunikasi UMA dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Alamat email : effiatihsb@yahoo.co.id.

Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023

Ridwan

Nahdlatul Ulama (NU) di bawah tampuk kepemimpinan K.H. Yahya Kholil Staquf (Gus Yahya) gencar mempromosikan agama sebagai solusi dan arus utama perkembangan peradaban, dengan menginisiasi gelaran Religion Twenty (R20) di Bali dan Mukhtamar Fikih Peradaban di Surabaya. Kesuksesan dua acara tersebut membuat NU tidak berhenti berdenyut. Ia tetap menjaga asa dengan mengupayakan suatu konferensi yang dinamai ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023, satu kegiatan yang dirangkaikan dengan KTT ASEAN pada bulan September 2023 di Jakarta, di mana Indonesia bertindak sebagai pemimpin keketuaan ASEAN. Berdasarkan laporan media di bulan Juni 2023, Gus Yahya, Ketum PBNU, telah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk melaporkan perkembangan rencana pelaksanaan IIDC dan meminta secara resmi pak Jokowi sebagai pembicara kunci. Bahkan, pada 15 Juni 2023, NU telah bekerjasama dengan Kemenag RI untuk menyosialisasikan Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023.

Mengapa Forum tersebut penting dilaksanakan? Tulisan singkat ini hendak menelisik konteks lokal dan ASEAN mengapa helat Forum tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan. Bagian pertama, akan menyajikan data yang disampaikan oleh NU sebagai pelaksana event. Kedua, tulisan akan menjelaskan konteks ASEAN, dan dilanjutkan dengan mengkaji aspek sosio-politik lokal yang membuat event ini menjadi penting, sehingga akan ada sebuah penjelasan dari perspektif yang lebih luas mengenai event ini.

ASEAN terbentuk di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai dasar pendirian ASEAN. ASEAN adalah sebuah penemuan modern, yang merupakan konstruksi social, seperti ujaran Professor Farish A. Noor dalam simposium Fakultas Ilmu Sosial UIII (15 Juni 2023). Ada semacam imajinasi bersama untuk membentuk perkumpulan yang bisa saling membantu, menyupport dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keamanan di kalangan bangsa-bangsa di wilayah ASEAN. Bangsa-bangsa ASEAN sangat beragam dari aspek agama seperti hamparan permadani keragaman, yang terdiri dari Hindu, Budha, Islam, Kristen dan beberapa agama lokal dan kepercayaan lainnya. Indonesia adalah satu negara yang plural di bidang agama, dan juga hampir semua negara memiliki keragaman agama dan ada yang mayoritas dan minoritas. Seperti di Filipina, mayoritas penduduknya beragama Katolik dan terdapat bangsa Moro yang beragama Islam. Di Myanmar mayoritas adalah Budha, namun ada warga Muslim terutama di kalangan komunitas Rohingya, dst.

Indonesia secara relatif berhasil mewujudkan kerukunan umat beragama, meskipun terdapat segelintir perlakuan diskriminatif atas kelompok minoritas, baik agama sempalan (komunitas Syi'ah dan Ahmadiyah) dan agama-agama lokal dan penghayat. Pemerintah, untuk beberapa derajat, telah berhasil mendorong kerukunan umat beragama. Pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota. Meskipun ada kelemahan-kelemahan yang meleka di tubuh organisasi itu, keberadaan FKUB cukup membantu menjaga kerukunan di tanah air. Kementerian agama (Kemenag) juga gencar menyuarakan moderasi beragama (religious moderation) dalam berbagai kajian dan pelatihan di lingkungan kampus yang bernaung di bawah Kemenag. Selain itu, pelbagai ormas agama, NGO, lembaga kampus banyak yang menyuarakan kerukunan melalui program dialog antar agama. Sebagai tambahan, alumni KAICIID, lembaga yang fokus pada dialog antar agama, memiliki alumni yang tersebar di beberapa kota di Indonesia giat melakukan program dialog antar agama dan budaya.

Sebagaimana dikatakan di atas, NU sangat menaruh perhatian pada upaya mendorong agama sebagai solusi dan menjadi arus utama dalam perkembangan peradaban. Salah satu upaya dalam waktu adalah PBNU bekerjasama dengan Kemenag akan membuat forum Dialog Antaragama dan Budaya 2023. Dalam agenda forum tersebut, Gus Yahya ingin membangkitkan ingatan kolektif terhadap warisan peradaban yang dulu milik Kawasan Indo-Pasifik yang berhasil dikonsolidasikan pada masa Ashoka. Pendekatan Ashoka adalah pendekatan toleransi dan harmoni yang

mendasari konsolidasi peradaban di Indo-Pasifik. Paska Ashoka, dunia banyak mengalami disrupsi, perpecahan yang meminggirkan pendekatan toleransi dan harmoni sehingga dunia dipenuhi dengan permusuhan dan peperangan.

Pada pertemuan sosialisasi Forum IICD di Surabaya (15 Juni 2023), Gus Yahya menilai bahwa jatuh bangun peradaban-peradaban besar juga terkait dengan peran agama. Pada tahap perkembangan peradaban, agama diprivatisasi dan dipinggirkan sehingga perlu dikembalikan kepada jalur utama yang membentuk arus utama peradaban. Agama perlu dilibatkan untuk menyelesaikan konflik-konflik terutama yang berkaitan dengan konflik yang menggunakan agama sebagai senjata politik, terutama pada masa-masa pemilu yang kerap mempolarisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan bermusuhan.

Menurut penulis, perlunya agama dilibatkan dalam penyelesaian konflik menjadi semacam kebutuhan sejarah (*historical necessity*), oleh karena pelbagai konflik di Indonesia dan wilayah ASEAN juga, untuk beberapa derajat melibatkan agama. Di Papua, untuk beberapa derajat, faktor agama juga memainkan peran, di mana ada semacam pandangan bahwa misionaris dari Barat ikut menyupport gerakan Papua merdeka, di Pattani Thailand Selatan Muslim termarginalisasi, sehingga identitas Islam acap dijadikan basis perlawanan terhadap negara Thailand dan di Myanmar agama juga dijadikan pembeda untuk mempersekusi komunitas Muslim Rohingya.

Terkait dengan pelaksanaan Forum IICD, sangat diperlukan melibatkan semua pihak (*stakeholders*), sehingga tidak terkesan kegiatan ini bersikap parsial dan hanya mengulangi forum-forum serupa yang sporadik dan tidak berkelanjutan. Juga, mungkin perlunya pelibatan pimpinan-pimpinan agama di Kawasan ASEAN yang benar-benar memiliki pengikut atau umat yang besar sehingga sosialisasi hasil Forum IICD bisa mengena di kalangan akar rumput.

Selain itu, Forum IICD perlu suatu kerangka konseptual untuk aksi yang bisa membingkai pelaksanaan Forum IICD. Satu pendekatan Dialog Antar Agama dan Budaya yang bisa menjadi pilihan adalah apa yang disebut sebagai dialog agama bertujuan transformasi konflik, dengan mana memiliki empat tujuan: mengubah sikap dan persepsi orang lain; membangun rasa hormat dan saling pengertian; memperluas partisipasi dalam kegiatan pembangunan perdamaian; dan membangun kerangka kerja bersama untuk tindakan yang membahas akar konflik. Jadi, ada perbedaan dengan forum-forum dialog antaragama yang konvensional, yaitu hanya melaporkan hal-hal yang baik-baik dari kerukunan di wilayah masing-masing, tanpa berupaya mengulik masalah yang berada di balik konflik yang terjadi. Singkatnya, hanya forum pertukaran informasi tanpa dialektika dan tidak ada kesepakatan (komunike) yang disepakati untuk bisa disebarluaskan pada pengikut masing-masing agama.

Untuk menyimpulkan, penulis dan kita semua mengharapkan Forum Dialog Antar Agama dan Budaya ASEAN 2023, yang akan diselenggarakan mestinya berdasar pada orientasi perubahan untuk transformasi konflik, untuk membedakan dengan beberapa kegiatan forum sejenis terdahulu yang terjatuh pada paradigma tradisional dialog antar agama hanya untuk “mengetahui orang lain” dan dialog antar agama berorientasi politik. Pungkasan, Forum IICD yang berorientasi pada transformasi konflik dapat memperkuat peran tokoh agama sebagai peacebuilder di wilayah ASEAN sehingga kawasan ASEAN dapat mereplikasi masa Ashoka, penuh dengan harmoni dan toleransi. Semoga Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN dapat menjadi program rutin yang memiliki dampak untuk perdamaian regional. *

RIDWAN adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Familiar dengan nama Ridwan Al Makassary. Ia menyelesaikan Program Doktor pada Jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di University of Western Australia (UWA) dengan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, dan saat ini aktif sebagai pengurus Mata Garuda 2022-2024. Dia menyelesaikan program Magister bidang “Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi” di University of Sydney dan Mahidol University. Ia adalah Peneliti pada Centre for Muslim States and Societies (UWA) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Societies (COMPOSE) UIII. Ridwan adalah seorang sarjana yang menekuni kajian perdamaian, HAM dan Politik Agama.

Tokoh Agama sebagai Pelopor Perdamaian ASEAN

Adilham

Moderasi beragama

Agama merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap satu zat yang dianggap tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri. Pengetahuan seseorang juga bisa diperoleh berdasarkan input yang datang dari luar, mungkin informasi dari orang tua, guru, atau dari tokoh ulama yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan agama (Ali Amran, 2015).

Indonesia adalah Negara kesatuan dengan ragam agama yang begitu kompleks sehingga semboyan *Bhineka Tunggal Ika* hadir sebagai konsep yang dapat menyatukan rakyat Indonesia untuk hidup rukun dan damai sebagai satu bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Moderasi beragama merupakan salah satu langkah untuk menghargai keragaman dan keberagaman tersebut dengan selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama, sehingga akan membawa keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan beragama antarumat dan bangsa.

Asisten Deputi Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar menjelaskan:

Untuk menguatkan moderasi beragama, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya meningkatkan kualitas pemahaman moderasi beragama dan menyadarkan masyarakat bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban sehingga perlu agen-agen dari masyarakat untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta keseimbangan antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. Olehnya itu, pemerintah juga terus memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sebagai agen moderasi beragama" (Dialog Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat bersama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI pada hari Senin 30 November 2020 di Sorong, Papua)

Hal tersebut menjadikan tokoh agama sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan moderasi beragama yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama atau dengan kata lain tokoh agama -harus- menjadi pelopor perdamaian di tengah umat dan bangsa.

Hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah cita- cita kita sebagai bangsa. Agama menjadi sumber nilai- nilai kehidupan dan sikap moderat adalah cara efektif untuk mewujudkan hal tersebut. Prof. Quraish Shihab -Ulama Tafsir terkemuka asal Sulawesi Selatan- dalam salah satu tausiyahnya memaparkan bahwa syarat tercapainya moderasi beragama adalah pengetahuan yang luas, pengendalian emosi agar tidak melampaui batas dan sikap berhati-hati secara *kontinyu*.

Kualitas tokoh agama dan konsep *wasathiyyah*

Kualitas tokoh agama

Fenomena yang kerap kali bahkan setiap hari terjadi adalah pencaplokan kebenaran mutlak oleh salah satu aliran/ mazhab agama. Contoh nyata dalam internal kaum muslimin saja begitu banyak mazhab ajaran Islam dengan ulama ulamanya yang tidak diragukan lagi keilmuan dan kompetensinya. Keragaman dan perbedaan itu adalah sunnatullah dalam ajaran Islam, namun masalah serius akan terjadi manakala klaim kebenaran dilakukan oleh sekelompok aliran

dan menganggap yang lain sesat (*takfiri*) sehingga cita-cita bersama untuk hidup rukun dan damai hanyalah sebatas wacana dan fatamorgana. Namun, kita harus tetap optimis dan berbaik sangka bahwa masih lebih banyak penganut agama yang merawat persamaan-persamaan daripada mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang sepele karena manusia pada fitrahnya memiliki naluri untuk mencari persamaan-persamaan dengan manusia lain.

Setidaknya di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui berikut sebutan untuk para pemuka/tokoh agamanya yaitu Islam (Kyai, Ustadz, Habib), Protestan (Pendeta, Biarawan/Biarawati), Katholik (Uskup, Paus, Biarawan/Biarawati), Hindu (Pedanda, Pandita, Sulinggih), Buddha (Bhiksu/Bhiksuni, Pandita, Bante), Konghucu (Xue Shi/ Pendeta, Wen Shi/ Guru Agama, Jiao Sheng/ Penebar Agama). Mengingat begitu banyaknya agama yang ada di Indonesia sehingga upaya untuk hidup damai bersama tentu tidaklah mudah dan butuh kerjasama sesama umat beragama untuk mengarusutamakan persamaan sebagai landasan untuk hidup harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, para tokoh agama memegang peranan penting untuk mengajari, menasihati, dan membimbing umat agar menjadikan agama sebagai sumber hukum dan nilai universal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan, pun demikian hubungan horizontal terhadap sesama makhluk. Sederhananya, orang yang baik terhadap Tuhannya, secara otomatis akan baik pula hubungannya kepada sesama.

Namun seringkali segelintir orang yang mengaku beragama justru merusak perdamaian di tengah-tengah kehidupan dengan mengatasnamakan agama padahal setiap agama menjadikan perdamaian sebagai hal yang fundamental dari ajarannya. Islam misalnya, tidak hanya menjadi agama yang membawa rahmat bagi kaum muslimin (*rahmatan lil muslimin*) tetapi diperuntukkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam *semesta* (*rahmatan lil alamin*).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu, maka dibutuhkan upaya untuk memelihara agama (*hifdz al-din*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), harta benda (*hifdz al-mal*), dan kehormatan (*hifdz al-ird*). Dalam pandangan Abu Ishaq As Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahwa tujuan pokok syariat (Islam) atau biasa dikenal dengan sebutan *Maqasid al-Syari'ah* adalah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia untuk keselamatan di akhirat kelak.

Semua agama mengajarkan kebaikan sementara penganutnya belum sepenuhnya baik sehingga kehadiran tokoh agama sebagai pelopor perdamaian menjadi sangat urgen dan harus diperhatikan sebaik-baiknya. Lantas apa yang menjadi tolak ukur seorang tokoh agama layak dijadikan panutan di masa sekarang? Karena tidak dapat dipungkiri banyak juga –yang mengaku- ahli agama tapi kontribusinya hampir tidak ada bahkan malah menyesatkan umat dengan doktrin dan paham yang keliru.

Perlu dipahami bahwa kualitas dan kompetensi tokoh agama sangat mempengaruhi psikologi massa umat beragama untuk menerima dan mengamalkan ajaran agama yang dianut sehingga tidak sembarang orang yang mampu diberi gelar tokoh agama. Kemampuan mereka dalam memahami kitab suci dan penafsiran-penafsiran yang selalu didasarkan pada metodologi yang benar, tepat, dan terpercaya harus menjadi pertimbangan masing-masing umat beragama dalam memilih tokoh agama untuk dijadikan sebagai panutan.

Tokoh agama dari Islam misalnya, KH. Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur –Guru Bangsa sekaligus mantan Presiden Indonesia yang keempat- menjadi satu dari sekian banyak ulama panutan yang ada di Indonesia. Dengan konsep humanisme beliau berupaya mengajak semua orang untuk melihat segala hal yang terjadi dengan perspektif kemanusiaan, tidak selalu dengan cara pandang ideologis (Abdurrahman Wahid. 2006).

Dalam konteks kemanusiaan, beliau mampu menyelesaikan konflik separatis di Papua dengan mengakomodir aspirasi lokal rakyat Papua saat itu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dalam hal pembangunan, begitupun kekerasan dan diskriminasi yang begitu sulit untuk diurai. Gus Dur memahami bahwa munculnya gerakan separatis itu adalah penentangan terhadap kebijakan pemerintah bukan penentangan terhadap kebangsaan. Padahal kita tahu bahwa kemunculan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sebelum –pemerintahan Gus Dur- direspon secara militer yang tidak hanya menasar orang-orang yang terlibat aktif dalam organisasi tersebut tetapi juga masyarakat sipil yang tak berdosa merupakan pelanggaran HAM selama kurun orde baru. (Ahmad Suaedy, 2018)

Bahkan kualitas tokoh agama akan terlihat karena keikhlasannya dan sikap rela berkorban demi kemaslahatan orang banyak. Mahatma Gandhi misalnya, dengan konsep humanismenya dalam melawan Inggris pada abad ke 20

Gandhi –tokoh agama Hindu- adalah aktivis gerakan kemerdekaan India sekaligus penganut agama Hindu yang taat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam perlawanannya. Gandhi meyakini bahwa melakukan perlawanan yang berbau kekerasan akan sia-sia dan percuma. Selain membuang tenaga, hal demikian juga akan memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya, dalam melawan penjajahan Inggris, Gandhi mengusung ajaran yang sarat dengan kedamaian. Konsep ini juga dicetuskan Gandhi sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Perwakilan tokoh agama Budha, kita mengenal Dalai Lama. Beliau kerap kali mengutarakan filosofinya tentang kebaikan dan tentang perdamaian yang berbunyi “My philosophy is kindness. We live not to believe but to learn”, dan “The love and compassion are the foundation for world peace at all levels.” Dalai Lama sangat membenci sifat pendendam, serakah, sirik, dan iri hati. Menurut Dalai Lama, sifat utama manusia adalah kelembutan, makhluk yang peduli terhadap sesamanya.

Sebagai contoh, musibah tsunami di Aceh dapat menggerakkan hati nurani komunitas internasional untuk memberikan pertolongan tanpa memandang agamanya. Ibarat bayi sebagai perwujudan kesempurnaan manusia. Meskipun bayi dalam kehidupannya hanya memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lain, kita akan melihat kegembiraan yang diberikan si bayi kepada orang-orang disekitarnya. Bila kita memandang dunia bukan sebagai sesuatu yang agresif, dunia akan menjadi tempat yang aman dan damai bagi para penghuninya.

Masih banyak tokoh dari berbagai agama yang patut dijadikan teladan atau figur dalam menimbah ilmu dan nilai-nilai universal untuk kemudian diterapkan oleh penganut agama masing-masing.

Penerapan konsep *Wasathiyah*

Dalam literatur Islam klasik, banyak pendapat dari para ulama tentang definisi *wasathiyah* namun hampir sama, seperti Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuhaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya yang intinya menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan ekstrem (*tafrith*). Sikap *wasathiyah* telah ditegaskan dalam kitab suci Al Qur’an, Allah SWT berfirman yang artinya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” (*wasathan*) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Apabila dicermati dengan teliti, penempatan kata *wasathan* berada di tengah-tengah ayat QS. Al-Baqarah ayat ke 143 dan ayat tersebut juga terletak di tengah-tengah QS. Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat. Artinya, ditinjau dari segi penempatannya sudah mengindikasikan makna tengah-tengah.

Al-Thabary memberikan makna kata *al-wasath* yaitu *al-’adl*, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang *wasathan*”. Beliau berkata: (magnanya itu) adil.”

Keadilan wajib dirasakan setiap orang sebagaimana sila kelima dalam Pancasila. Keadilan adalah hak segala bangsa dan Negara harus menjamin hal tersebut. Implementasi keadilan itu sendiri dapat beraneka ragam sesuai level dan cakupannya sebagaimana berikut:

Pertama, Keadilan dalam bentuk perundang-undangan. Keadilan dalam konteks ini memiliki konotasi politik karena berhubungan langsung dengan kebijakan hukum oleh aparat penguasa. Pemerintah seyogyanya melibatkan peran tokoh agama dalam merancang, merumuskan dan memastikan agar perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang didasarkan atas keadilan yang merata. Dalam ajaran Islam, sangat tidak diperkenankan berbagai bentuk parsialisme dan diskriminasi karena semua manusia harus diperlakukan adil dan sama tanpa sekat ras, gender, kelas ekonomi, status social dan sejenisnya. Satu-satunya yang membedakan kualitas manusia adalah amal perbuatannya (QS Al-Hujurat: 13)

Kedua, Keadilan bermasyarakat. Sebuah hal lumrah adanya jarak antara si kaya (*the haves*) dan si miskin (*the have nots*) baik disebabkan karena faktor kultural maupun struktural. Faktor kultural seperti lemahnya etos kerja pada satu komunitas masyarakat tertentu begitupun faktor struktural yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang tidak merata oleh penyelenggara Negara sehingga terjadi kesenjangan yang sangat kontras. Olehnya itu, pemerintah harus menegakkan sendi-sendi keadilan –melibatkan tokoh agama tentunya- dengan wujud bahu membahu antara si kaya

dan si miskin. Bagaimana si kaya mampu “berkolaborasi” dengan si miskin dalam hidup bermasyarakat, minimal agar si kaya tidak “melahap” si miskin. Bagi masyarakat yang tidak produktif kerja bisa diberi bantuan karitatif sedangkan bagi masyarakat produktif kerja bisa mendapatkan bimbingan untuk mengasah keterampilan/skill.

Ketiga, Keadilan antarbangsa. Keadilan ini cakupannya lebih luas dari sisi demografi, penduduk, kultur budaya, dan sendi-sendi lainnya. Bagaimana keadilan antara satu bangsa dengan bangsa lain dapat terwujud adalah tugas masing-masing elemen negara untuk berkolaborasi secara sehat dan saling menguntungkan. Hubungan antara komunitas muslim dengan non-Muslim misalnya, baik dalam satu Negara maupun beda negara sesungguhnya dilandaskan pada asas cinta damai sesuai fitrah/ naluri kemanusiaan. Ini sekaligus menjadi cerminan nilai universal ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Peran tokoh agama antarbangsa pun sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Bagaimana *ideal form* penegakan keadilan yang mesti dimusyawahkan untuk kemudian direkomendasikan ke penyelenggara Negara/ pemerintah agar menjadikannya sebagai regulasi hukum yang mengikat semua warga Negara. Sungguh kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain.

Tokoh Agama Pelopor Perdamaian

Kita sepakat bahwa semua agama mengajarkan kasih sayang, cinta, perdamaian, toleransi, dan keseimbangan hidup sebagai prinsip dasar dalam menjalani kehidupan. Tidak ada perdebatan dalam narasi tersebut karena memang agama hadir untuk menjaga manusia tetap pada fitrahnya, menjaga harkat dan nilai pada dirinya sebagai seorang hamba. Agama bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dan bukan juga hanya urusan yang menyangkut para pengikut agamanya masing-masing. Namun, sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa agama memiliki peranan penting yang dapat mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan baik antar sesama umat manusia

Internalisasi nilai-nilai universal yang terkandung dalam agama menjadi tugas dan tanggung jawab para tokoh agama untuk berkolaborasi dengan penyelenggara Negara/ pemerintah. Tokoh agama yang berwawasan luas, moderat, dan berbudi pekerti adalah aset bangsa dan Negara yang haru dijaga dan dilibatkan dalam dinamika pemerintahan sebuah Negara. Kehadiran mereka –para tokoh agama yang moderat- mampu menguatkan toleransi antarbangsa dengan koridor nilai-nilai agama yang sesuai, tepat, dan pas. Di saat yang bersamaan mereka juga menjadi *iron dome* yang melindungi bangsa dari radikalisme, liberalisme, fanatisme, terorisme, anarkisme, dan diskriminasi antar ras, agama, dan bangsa.

Konsep moderasi beragama/tengah-tengah/*wasathiyah*/adil/seimbang adalah doktrin yang harus ditanamkan para tokoh agama terhadap masing-masing umat beragama dalam mewujudkan hidup rukun dan damai. Sikap seimbang dalam berbagai ranah pranata kehidupan seperti, teologi, ritual keagamaan, moralitas/ budi pekerti, dan penegakan hukum di masing-masing Negara menjadi tugas kita semua sebagai bangsa yang menjunjung tinggi asas perdamaian.

Masalah akan selalu ada mulai dari ruang terkecil apalagi dalam ruang terbesar seperti antar negara. Kompleksitas kehidupan akan mengundang banyak problematika dan perselisihan, namun semuanya tergantung bagaimana kita sebagai umat beragama sekaligus sebagai bangsa bersikap secara adil dan moderat untuk membangun istana kehidupan yang damai antarbangsa.*

Referensi

- Al-Syatibi, Abu Ishak (1979). *Al Muwafaqat fi ushul al Syariat*. Beirut: Dar al Ma'rifah
- Amran, Ali (2015). *Peran Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Hikmah
- Baidlowi, Masduki (2019). MUI dan visi *Islam Wasathiyah*. “Mimbar Ulama” https://www.google.co.id/books/edition/Mimbar_Ulama/_wz1DQAAQBAJ?hl=en&gbp=1&dq=islam+wasathiyah&pg=PA15&printsec=frontcover. (diunduh 1 Desember 2022)

Fasawwa, Syaima Sabine (2022). 4 Prinsip Perjuangan Mahatma Gandhi: Satyagraha hingga Swadeshi. "Tirto.id" 24 Januari 2022. <https://tirto.id/4-prinsip-perjuangan-mahatma-gandhi-satyagraha-hingga-swadeshi-gn4d> (diunduh 30 November 2022)

Nasurung, Fadlan L (2021). *Agama Untuk Kemanusiaan*. Makassar: Alauddin University Press

Novrizaldi (2020). Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat sebagai Agen Moderasi Beragama. Kemenko PMK, . 1 desember 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakatadat-sebagai-agen-moderasi-beragama>. Diunduh, 30 November 2022]

Suaedy, Ahmad (2018) *Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka: Penyelesaian Konflik Aceh & Papua 1999-2001*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wahid, Abdurrahman (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute

Yasid, Abu (2014). *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga

ADILHAM lahir di Maros, Sulawesi Selatan pada tahun 1991. Menyelesaikan program S-1 (S.Pd.I) Jurusan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Maros pada tahun 2013 dan Magister Pendidikan Islam S2 (M.Pd) Program Studi Magister Pendidikan Islam di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 2016. Ia merupakan dosen Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep) sejak tahun 2018. Sebelum bekerja di Politani Pangkep, pernah mengajar mata kuliah Studi Islam di STAI DDI Maros dan STAI DDI Pangkep dari tahun 2017-2018. Ia dapat dihubungi di email: adilhamek@gmail.com

Peran Dakwah Wasathiyah (Moderat) Habib Umar bin Hafidz di Asia Tenggara

Sayyid Muhammad Yusuf Aidid

*Sifat alamiah manusia dalam hidup berdampingan
yaitu rasa kasih sayang satu sama lain.
Konflik bukanlah sifat alamiah manusia,
jika terjadi konflik maka kita perlu solusi.
--Habib Umar bin Hafidz*

Pendahuluan

Penyebaran Islam di Asia Tenggara mirip dengan penetrasi Islam ke Nusantara. Masuknya tanpa pergolakan politik atau tidak melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan regulasi-regulasi masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk ke wilayah tersebut melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran dengan masyarakat pribumi. Hal ini disebutkan oleh Thomas W. Arnold. Dalam buku klasiknya, *The Preaching of Islam*, Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai (Thomas W. Arnold: 1950:42).

Salah satu metode penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dilakukan dengan cara dakwah. Dakwah tersebut dilakukan oleh para guru dan juru dakwah profesional dengan kompetensi keilmuan Islam yang diakui. Azyumardi Azra mengatakan bahwa mereka secara khusus memiliki misi khusus yaitu menyebarkan agama Islam. Kemungkinan hal ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya *Hikayat Raja-raja Pasai* (ditulis setelah 1350 M), *Sejarah Melayu* (ditulis setelah 1500 M) dan *Hikayat Merong Mahawangsa* (ditulis setelah 1630) (Azyumardi Azra: 2009:29).

Keberhasilan dakwah Islam yang masuk ke Asia Tenggara yaitu saluran dakwah wasathiyah. Sebab dakwah tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Asia Tenggara yang damai, ramah, dan toleran. Maka dakwah wasathiyah inilah yang memunculkan paradigma Asia Tenggara adalah "Islam yang lebih lunak", "Islam yang lebih moderat", "Islam yang lebih toleran", dan "Islam yang lebih akomodatif". Sikap akomodatif tersebut dengan pendekatan *tasamuh*, *tawazun*, dan *tawasuth* yang telah memberikan "ruang dialog" bagi semua komunitas yang ada saat itu untuk mencerna agama baru di Nusantara.

Perkembangan *dakwah wasathiyah* ini berimplikasi kepada ketiga negara dengan mayoritas umat muslim diantaranya, Indonesia, Brunai Darussalam, dan Malaysia. Menurut data statistik, perkiraan populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 87% dari total populasi. Sementara itu, International Religious Freedom Report for 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan, berdasarkan sensus terbaru, tahun 2011, sebanyak 78,8% penduduk Brunei Darussalam adalah Muslim, 8,7% Kristen, dan 7,8% Buddha, sedangkan sisanya 4,7% terdiri dari agama lain dan kepercayaan. Negara kawasan Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas beragama Islam selanjutnya adalah Malaysia. Pada tahun 2020, Statista memperkirakan pemeluk Islam di Malaysia mencapai 66% dari populasi yang ada (Detik.com, diunduh pada Ahad, 27 November 2022 pukul 16:32).

Habib Umar bin Hafidz, seorang tokoh ulama asal Hadramaut, Yaman, salah satu ikon juru *dakwah wasathiyah* di dunia. Ia telah mencetak para *da'i* moderat yang tersebar di beberapa negara termasuk di wilayah Asia Tenggara. Sampai-sampai ia mendirikan *Majelis Muwasolah Bainal Ulamai' al-Muslimin*, sebagai wadah yang mengumpulkan para

murid dan pencintanya dengan tujuan *dakwah wasathiyah* tersebut. Ia berkata, "Tujuan utama dalam mendirikan Majelis seperti ini bukanlah untuk membuat suatu gerakan baru, organisasi baru, partai baru, atau hal-hal serupa itu. . . Tetapi maksud dan tujuan dibentuknya Majelis ini adalah untuk MELAKSANAKAN KERJA AKTIF DALAM DAKWAH YANG MURNI DAN SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI UMMAT." ([HTTPS://MAJELISALMUWASHOLAH.COM/](https://majelisalmuwasholah.com/) diunduh pada Ahad, 27 November 2022 pukul 21:36).

Dakwah Wasathiyah Habib Umar bin Hafidz di Asia Tenggara

Kata *dakwah* berasal dari bahasa Arab yaitu *da'aa-yad'u-da'watan*. *Da'watan* secara etimologi yaitu Panggilan atau ajakan (Alwisral Imam Zaidallah, 2022:1). Panggilan atau ajakan ini untuk ke jalan Allah atau *sabilillah*. Sebagaimana hal tersebut telah termaktub di dalam Al-Qur'an:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS An-Nahl/16:125)

Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Munir* menjelaskan bahwa pada QS An-Nahl/16:125 adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk *ud'u* (mengajak) kepada manusia lainnya untuk ke agama Allah. Adapun cara mengajaknya yaitu dengan dalil yang jelas dengan tujuan kebenaran serta tertata dengan permisalan. Selain itu cara mengajaknya juga dengan nasihat, penyampaian-penyampaian yang bermanfaat, dan perkataan yang ringan. Imam Nashr al-Din Al-Baidowi menyatakan dakwah pada ayat tersebut ada dua makna. Makna yang pertama dakwah khusus kepada penuntut ilmu dengan kebenaran dan ketegasan. Makna yang kedua yaitu dakwah dengan nasihat yaitu kepada orang-orang awam. Adapun jika berdebat dengan orang yang keras kepala yaitu dengan bantahan yang ringan, bantahan yang lembut, bantahan yang elegan, dan bantahan yang mudah dimengerti (Wahbah Zuhaili, 2009:591).

Dakwah menurut Muhammad Natsir ialah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi *al-amar bi al-ma'ruf an-nahyi an almunkar* dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara (Samsul Munir Amin, 2009:3).

Definisi dakwah di atas mengisyaratkan bahwa dakwah itu sebenarnya komunikasi yang islami. Maka seorang pendakwah (*da'i*) harus memperhatikan unsur-unsur komunikasi tersebut. Unsur-unsur komunikasi yaitu sumber komunikasi, komunikator, pesan komunikasi, media, komunikan, tujuan, dan akibat (Kustadi Suhandang, 2013:19)

Dakwah Islamiyah masa kini mengangkat segala persoalan hidup manusia dan peristiwa di alam semesta ini, yang dihadapkan pada tugas dakwah islamiyah pada umumnya, khususnya pada juru dakwahnya. Dalam dunia komunikasi, sumber komunikasi dimaksudkan sebagai segala macam hal yang menjadi latar belakang masalah ataupun pokok pembicaraan, baik berupa data, fakta, maupun fenomena yang terjadi di alam semesta ini (Kustadi Suhandang, 2013:19).

Ketika komunikator atau para juru dakwah berinisiatif untuk menyampaikan pesan dakwahnya, maka dari kacamata komunikasi, para *da'i* tersebut merupakan komunikator dalam kegiatan dakwahnya. Ali Hasjmy (1974: 115) mengatakan seorang *da'i* harus mempunyai beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

- la harus benar-benar beriman kepada Allah
- la harus mengerjakan amal saleh dalam arti seluas-luasnya
- Mereka harus menyembah hanya kepada Allah
- la sama sekali tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga.

Pesan komunikasi dalam kegiatan dakwah sudah jelas berisikan ajaran Islam, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam al-quran melalui rasul-Nya. Ajaran tersebut tidak terbatas pada teori saja, melainkan juga berupa perbuatan juru dakwah sendiri dalam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri sehingga dikenal pula dalam pelaksanaan dakwahnya yaitu *dakwah bi al-hal*. Oleh karena juru dakwah itu sendiri bisa dianggap sebagai pesan atau materi dakwah yang harus dikomunikasikan. Singkat kata, juru dakwah merupakan pesan dakwah (Kustadi Suhandang, 2013:22-23).

Media komunikasi baik persona atau massa bisa dipakai untuk menyampaikan dakwah atau ceramah, tulisan atau buku-buku, seni bahkan musik bisa dijadikan media untuk mengkomunikasikan pesan dakwah. Apalagi di era revolusi industri 4.0, era digitalisasi, media dakwah bisa disampaikan melalui media sosial. Sebab aktivitas manusia dimanapun dan kapanpun selalu bersama gadget. Sehingga bisa dikatakan para da'i harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pesan agama dengan baik.

Komunikasi adalah pihak yang didatangi oleh pesan komunikasi atau pihak yang menerima pesan komunikasi sebagai sasaran komunikasi untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, pihak penerima pesan komunikasi ialah semua orang yang dijadikan sasaran oleh komunikator, sasaran penyampaian pesan komunikasinya. Demikian pula halnya dengan sasaran dakwah, pada dasarnya merupakan komunikasi dari kegiatan dakwah tersebut, dan sesuai dengan bahasa orang-orang yang dijadikan sasaran dakwah itu yang lazim disebut *mad'u* (Kustadi Suhandang, 2013:22-23).

Tujuan komunikasi atau dakwah islamiah digariskan sebagai titik tuju dakwah islamiah, yaitu memberi pengertian kepada umat manusia agar mengambil segala ajaran Allah yang terkandung dalam al-quran dan mengikuti tuntunan rasulullah. Realitanya, tujuan dakwah tiada lain mengajak manusia berjalan di jalan Allah dan menginternalisasi akhlak Rasulullah bukan mengajak komunikasi untuk masuk dalam satu kelompok dan golongan tertentu. Sehingga ada upaya bagi komunikasi untuk mengubah sikap, sifat, dan perilakunya untuk menjadi lebih islami lagi.

Akibat yang diinginkan dalam dakwah islamiah yaitu umat yang berjalan di atas jalan Allah ke arah yang lebih islami, seperti yang telah diungkap pada paragraf sebelumnya. Namun atas pengaruh waktu dan tempat, serta strategi yang digunakan para da'i, belum tentu tujuan tadi dapat tercapai. Maka seorang da'i harus memperhatikan isi dan konten dakwah tersebut. Konten tersebut lebih ditekankan kepada sifat Allah yang maha Rahman dan Rahim, dan sifat rasulullah yang penyabar, penyayang, dan pemerhati kepada umatnya (Abdillah Toha, 2020:279).

Habib Umar bin Hafidz sebagai *founding Darul Mustofa Institute*, sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia telah mencetak *da'i-da'i* yang wasath (moderat). Prinsip tarbiah dan pendidikannya yang telah dipatrikan dan ditanamkan kepada murid-muridnya yaitu ilmu, suluk, dan dakwah. Dakwahnya yang moderat diterima oleh semua kalangan baik orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Terbukti Habib Umar tergabung dalam penandatanganan dokumen *'A Common Word Between Us and You'*, yang membangun jembatan antara umat Islam dan Kristen. Ia juga sempat menjadi narasumber di Universitas Cambridge berkaitan dengan topik tersebut (CNNIndonesia.com, diakses pada 28 November 2022 pukul 09:30).

Dakwah wasathiyah mengacu kepada firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS Al-Baqarah:143).

Penyematan wasathiyah pada dakwah tersebut menunjukkan dakwah tersebut harus bersifat humanis dan sesuai pada lingkungan sosial. Sebagaimana Islam adalah agama yang *wasath* (moderat), agama yang berasaskan sebuah keadilan, membenci *tatharruf* (penyimpangan dalam beragama) dan *ghuluw* (terlalu mengada-ada di dalam masalah

agama). Selain itu pada prinsip *wasathiyyah* itu selalu mengajak manusia untuk mempermudah masalah dan memiliki kasih sayang sesama manusia (Mahmud Hamdi Zaquq, 2003:42).

Azyumardi Azra menganjurkan agar para ustadz bisa menerapkan Islam *wasathiyyah* dalam melakukan dakwah, dalam arti harus cocok dengan lingkungan tempat tinggal mereka, baik internal muslim maupun non-Muslim baik materinya maupun cara menyampaikan dakwah (<http://ppim.uinjkt.ac.id>. Diakses pada 28 November 2022). Sedangkan Ma'ruf Amin berpendapat bahwa dakwah Islam *wasathiyyah* itu tidak bersifat tekstual tidak pula liberal, kembali ke jati diri bangsa, yakni dakwah Islam yang rahmatan li al-a'lamin (<http://republika.co.id>. Diakses pada 28 November 2022). Karena *wasathiyyah* menurut Habib Umar bin Hafidz merupakan sebuah pemahaman yang luas terhadap syariat Allah yang sangat luas dan datang dari Allah Yang Maha Luas, dalam hal yang dikehendaki Allah agar kita menegakkannya. Baik itu berupa norma-norma hubungan sesama manusia, atau bahkan juga cara pandang dan gambaran mereka terhadap berbagai hal. Hal itu agar landasan pola pandang kita memiliki dari akal pikiran dan syariat. Sebab akal pikiran merupakan sarana untuk memahami, mengaplikasikan dan mengejawantahkan syariat.

Senada dengan hal di atas, M. Quraish Syihab menyatakan bahwa *dakwah wasathiyyah* adalah mengajak manusia ke jalan Allah atau kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan dengan cara yang adil dan terbaik yang ditandai dengan iman, ilmu/pengetahuan, kebaikan dan keseimbangan, menjauhi ekstrimisme terhadap diri dan pihak lain, juga menghindari sikap penggampangan dalam segala bidang kehidupan (M. Quraish Shihab, 2019:187-188).

Dengan kata lain *dakwah wasathiyyah* merupakan dakwah yang cocok dan tepat dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut disebabkan heterogenitas masyarakat Asia Tenggara seperti kebinekaan suku, budaya, ras, dan agama. Selain itu, dakwah tersebut tidak memaksa dan tidak juga berlebih-lebihan di dalam penyampaiannya, namun termin tersebut juga melarang sikap semena-mena (Ali Mustafa Yaqub:1997:73). Sehingga dakwah tersebut punya daya tarik terhadap orang-orang awam dan orang non-muslim, sebagai komunikasi, untuk terus mengikuti dakwah islamiyah bahkan mengimplementasikan dakwah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dakwah moderat Habib Umar bin Hafidz tertuang dalam bentuk dakwah lisan, dakwah tulisan, dan dakwah melalui sikap keteladannya. Di salah satu forum dialog antara ia dengan para dosen Pendidikan Agama Islam Se-Indonesia menyatakan bahwa rasulullah Saw adalah sosok yang paling mematuhi perintah Allah dan yang paling paham atas wahyu-Nya serta mengimplementasikannya di dalam kehidupannya. Lantas, tugas para guru dan pendidik agama Islam untuk menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam al-quran dengan baik dan benar. Bukan hanya sampai disitu saja bahkan para pendidik tersebut harus menelisik sejarah turunnya dan penerapannya serta bagaimana interaksi antara beliau (rasulullah) dengan berbagai orang-orang kafir.

Lalu belum lagi ditambah cara ia menghadapi orang-orang munafik yang ada di sekitarnya. Apakah rasulullah keras kepada mereka? Padahal ia yang paling mengetahui substansi ayat-ayat al-quran. Kemudian ketika ada QS At-Taubah/9:123 yang berbunyi, "*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.*" Beliau paling memahami cara menerapkan ayat yang tersebut sesuai dengan kehendak sang Ilahi. (Youtube.com, diakses pada 28 November 2022 pukul 22:08)

Dakwah moderat Habib Umar bin Hafidz di Thailand, "*Sifat alamiyah manusia dalam hidup berdampingan yaitu perlu rasa kasih sayang satu sama lain. Konflik bukanlah sifat alamiyah manusia, jika terjadi konflik maka kita perlu solusi. Dosa-dosa besar pada diri manusia setelah kufur dan syirik yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh.*" Kemudian ia mengutip hadis Nabi Muhammad, "*Seorang mu'min senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram.*" (Youtube.com, diakses pada 28 November 2022 pukul 22:22)

Kedua *tausyiah* Habib Umar bin Hafidz di atas mengisyaratkan bahwa *dakwah wasathiyyah* membangun dan mewujudkan kedamaian dan persaudaraan, baik persaudaraan sesama muslim maupun persaudaraan antar umat beragama. Konsep tersebut sesuai yang telah termaktub di dalam al-quran. Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*" (QS al-Hujurat/49:10). Di sisi lain persaudaraan atas nama kemanusiaan didasari oleh asas seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan. Sehingga satu sama lain menghargai dan menghormati hak-haknya selama toleransi berjalan baik dan lancar (Mahmud Hamdi Zaquq, 2003:112). Sebagaimana Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”

Selain itu, ada sisi menarik ketika Habib Umar berdakwah di Malaysia. Ketika itu beliau ditanya oleh seseorang yang terjangkit LGBT (*lesbian, gay, biseksual, dan transgender*), “Kami kaum LGBT masih dideskriditkan oleh masyarakat, bahwa kami dihukumkan masuk neraka, bagaimana pandangan Habib? Kami kaum LGBT masih mencari jalan ke Allah, dan kami mendengar bahwa Habib Umar datang ke Malaysia, kami senang diundang oleh panitia untuk menghadiri acara ini. Habib juga bersedia men-share ilmu kepada kami semua di tengah keramaian.”

Habib Umar menjawab, “Kita semua sadar bahwa ada dosa yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Akan tetapi dosa-dosa besar tidak bisa diampuni Allah kecuali dengan taubat kepada-Nya. Dikisahkan dahulu ada rombongan perompak yang merampas harta satu khafilah. Akan tetapi satu orang dari khafilah menyediakan secangkir kopi dan menawarkan kepada kepala perompak tersebut. Lalu perompak tersebut berkata, maaf aku ini sedang puasa. Kemudian seseorang yang menyediakan kopi itu bingung dan bertanya, Kenapa kamu berpuasa sedangkan kamu merompak harta kami?”

Perompak itu menjawab, “Ya saya melakukan banyak dosa akan tetapi saya tidak mau memutuskan satu ibadah pun kepada Allah Swt. Berlalulah beberapa tahun, perompak itu menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan orang-orang yang berhasil dirampas harta olehnya. Kata orang yang pernah dirompak, wah kamu sudah berubah dari sebelumnya? Ya, ini adalah buah dari ibadah yang aku tidak putus dengan Allah terdahulu.”

Habib Umar bin Hafidz berpesan, “Jangan memutuskan ibadah kepada Allah, jangan tinggalkan shalat lima waktu, kalau bisa berjamaah, keluarkanlah zakat, jangan tinggalkan puasa Ramadhan. Selain itu perbaikilah hubungan orang-orang lain di antaranya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan berprasangka baik dengan mereka. Jika kita berbuat amal-amal shalih demikian maka Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kami. Perlu diketahui manusia tidak berhak menentukan atau menghukum seseorang masuk neraka atau surga? Akan tetapi Allah akan memberikan yang terbaik pada penghujung umurnya.” (Youtube.com, diakses pada 12 Oktober 2023 pukul 08:52)

Dakwah Habib Umar di Malaysia bisa diambil satu prespektif bahwa dakwah moderat adalah dakwah yang bisa diterima oleh semua golongan, walaupun golongan itu menyimpang. Sebab dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu menyerukan kebaikan bukan menyerukan keburukan, dan dakwah itu menggugah orang itu melakukan amal shalih bukan menghasut. Maka bisa dikatakan dakwah moderat adalah dakwah yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, memanusaiakan manusia. Sehingga dengan dakwah tersebut seseorang yang salah yaitu sadar dengan kesalahannya dan melalui dakwah tersebut seseorang akan berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Kesimpulan

Penyebaran agama Islam di Asia Tenggara mirip dengan masuknya Islam di Indonesia. Proses penyebarannya tanpa pergolakan politik atau tidak melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Salah satu metode diseminasinya yaitu melalui saluran dakwah. Dakwah yang cocok di wilayah strategis tersebut yaitu *dakwah wasathiyah* (dakwah moderat). Sebab dakwah tersebut tidak memaksa dan tidak juga berlebih-lebihan di dalam penyampaian, namun termin tersebut juga melarang sikap semena-mena.

Habib Umar bin Hafidz, salah satu juru dakwah asal Hadramaut, Yaman, pernah singgah di beberapa negara di ASEAN. Dakwahnya yang moderat, sehingga ia diterima di semua negara bahkan Asia Tenggara. Bukan hanya itu ia telah mencetak *da'i-da'i* yang moderat di wilayah tersebut sebagai pembawa misi nabi Muhammad yaitu menyebarkan *Islam Rahmatan lil a'lam*. Islam yang membawa pesan-pesan kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam, melalui pondasi *hablun min al-Allah, hablun min al-nas, hablun min al-a'lam*.

Pesan *dakwah wasathiyah* Habib Umar bin Hafidz di Indonesia, Thailand, dan Malaysia yaitu mempererat tali ukhuwah dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Oleh karena dakwah tersebut mendatangkan perdamaian dan mencegah konflik. Sehingga wilayah Asia Tenggara menjadi wilayah yang aman, damai, dan tenteram.*

Referensi

- Azra, Azyumardi (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta:Kencana
- Azra, Azyumardi (1999). *Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Rosdakarya
- Azyumardi Azra-PPIM UIN Jakarta. Dalam <http://ppim.uinjkt.ac.id>. Diakses pada 28 November 2022
- Bin Hafidz, Habib Umar (2003). *al-Wasathiyah fi al-Islam*. Jakarta: Nurani Publishing
- Imam Zaidallah, Alwisral (2002). *Strategi Dakwah Dalam Membentuk Da'i dan Khotib Professional*. Jakarta: Kalam Mulia
- Munir Amin, Samsul (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: AMZAH
- Shihab, M. Quraish (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati
- Toha, Abdillah (2020). *Buat Apa Beragama? Renungan Memaknai Religiusitas di Tengah Kemoderenan*. Jakarta: Mizan
- W. Arnold, Thomas (1950). *The Preaching of Islam*: London
- Yaqub, Ali Mustafa (1997). *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zaqzuq, Muhammad Hamdi (1998). *al-Haiah al-Mushriyyah al-Ammah Li al-Kitab*. Egypt: Shouruk
- Zuhaili, Syekh Wahbah (2009). *Tafsir Munir Jilid VII*. Cairo: al-Quds,
- <https://www.youtube.com/watch?v=0eZ2fjGjLA&t=1001> diakses pada 28 November 2022 pukul 22:08 Wib
- <https://www.youtube.com/watch?v=8j6yw2Mai6M> diakses pada 28 November 2022 pukul 22:22 Wib
- <https://www.youtube.com/watch?v=NQ5wgm1WdKY> diakses pada 12 Oktober 2023 pukul 08:52 Wib

SAYYID MUHAMMADYUSUF lahir di Jakarta, 24 Desember 1987. Ia meraih Diploma III dari Jurusan Bahasa Arab Universitas Indonesia (2008), S1 dari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta, S2 dari Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, dan proses Doktorat di Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Pendidikan non-formalnya di bidang bahasa Arab juga pernah ditempuh di Majelis Al-Afaf pimpinan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Selain itu Sayyid Yusuf juga mengajar mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Pengalamannya di organisasi tercatat sebagai Ketua di Al-Ghanna Intitute, Wakil Ketua di Persatuan Dosen Agama Islam Nahdatul Ulama (PERSADA NU), dan Wakil Ketua IV di Assosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia (ADPISI) DPW JABODETABEK. Tulisan-tulisannya bergenre tasawuf dimuat di Risalah NU, iqra.id, islamina.id, islami.co, dan hikmahalawiyah.org, laduni.id. Bila dilihat tulisan-tulisannya menyasar kalangan generasi milenial, bahasanya mudah, jelas, dan menarik.

Indonesia dan ASEAN dalam Relasi Ulama

Iwan Kuswandi

Pendahuluan

Indonesia tentu bangga, dengan lahirnya sosok tokoh besar, Buya Hamka. Dalam karir hidupnya setidaknya telah menulis sebanyak 94 karya, baik di bidang sastra, budaya dan terlebih bidang agama. Torehan pemikiran Buya Hamka kemudian mendapat tempat terhormat dalam kedinamikaan akademis, bukan hanya di Indonesia, namun juga di mancanegara, terutama di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, bahkan karyanya diminati sampai ke Arab Saudi (El-fikri, 2016). Namun membaca relasi Islam Indonesia dengan Asia Tenggara, dalam hal ini ASEAN, tidak cukup hanya melihat pengaruh pemikiran Hamka di Asia Tenggara. Namun kita juga perlu membaca bagaimana sejarah kebesaran kerajaan Champa yang berada di Vietnam dan Kamboja, yang kemudian melakukan penyebaran Islam ke wilayah dan negara sekitarnya termasuk ke Indonesia dan Malaysia.

Dengan demikian, tulisan ini ingin mendeskripsikan dan mengkaji secara historis, bagaimana relasi ulama Indonesia dan ASEAN, bukan saja bagaimana ulama Indonesia mempengaruhi keislaman di Asia Tenggara, namun bagaimana tokoh-tokoh Islam Indonesia mendapatkan pengaruh dari beberapa tokoh Islam di negara lain di kawasan ASEAN. Bagaimana keislaman kerajaan Champa di Vietnam dan Kamboja bagi sejarah Islam Indonesia, bagaimana pengaruh Islam Indonesia bagi masyarakat muslim di Thailand dan Timor Leste. Serta bagaimana keprihatinan dan perhatian tokoh Islam Indonesia terhadap kasus kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

Indonesia dan ASEAN dalam Relasi Ulama

Indonesia dan Kamboja

Salah satu dari Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Ia lahir di Kamboja tepatnya di Champa. Terlahir dari seorang ulama dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara, bernama Syekh Barakat Zainul Alam. Wajar kalau kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim seringkali disebut sebagai Syekh Maghribi. Ada juga yang menyebut dengan sebutan Syekh Makhdum Ibrahim Al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Ulama dari Hadramaut, Sayyid Ibrahim Zainuddin as-Syamarqandy menikah dengan putri Champa, Dewi Condro Wulan. Begitu juga dengan putri Champa lainnya, Dewi Dwarawati menikah dengan Prabu Brawijaya V. Kedua putri Champa tersebut adalah anak dari Champa terakhir dari Dinasti Ming. Dari pasangan Prabu Brawijaya dengan Dewi Dwarawati memiliki putra Raden Fatah, pendiri Kerajaan Demak. Sedangkan Sayyid Ibrahim Zainuddin as-Syamarqandy dengan Dewi Condro Wulan, melahirkan Sayyid Ali Rahmatullah (1401-1481). Saat Sayyid Ali Rahmatullah berkunjung ke bibinya, Dewi Dwarawati di Majapahit, kemudian Prabu Brawijaya V menganugerahkan nama Raden Rahmat kepadanya dan melarangnya kembali ke Champa. Raden Rahmat memutuskan berdakwah di wilayah Ampel sehingga dikenal sebagai Sunan Ampel. Di daerah lain, etnis Champa dipercaya pertama kali melakukan islamisasi di tanah Betawi. Sebagian mereka bahkan menetap di Betawi dan keturunannya masih dapat ditemui di Jakarta. Adapun Champa merupakan etnis yang tersebar di beberapa negara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok (Tomaros, 2022; Zainuddin, 2013).

Indonesia dan Vietnam

Masih dalam pembahasan kerajaan Champa. Sampai saat ini yang masih eksis menggunakan Bahasa Cham dan sebuah masyarakat yang berasal dari Melayu Polynesia dan India. Daerah ini berada di Vietnam Selatan dan hampir berbatasan dengan Kamboja. Mereka di daerah sungai Mekong Propinsi An Giang tepatnya daerah Chau Dog. Antara abad ke 10 dan 11 masehi, kerajaan ini mulai terpengaruh dengan Islam. Bermula dari dakwah yang dilakukan Sayyid

Hussein yang berhasil mengislamkan Raja Che Bong Nga. Setelah memeluk Islam raja tersebut berubah nama menjadi Raja Zainal Abidin. Beliau berkuasa 1360 dan wafat pada 1390. Di sisi lain, Kerajaan Malaysia Sultan Maulana Syarif bin Abdullah dengan nama asal Wan Bo Tri Tri menikah dengan Nyi Mas Rara Santang keturunan Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Djati dan keluarga Champa dari Vietnam melahirkan Sunan Giri Gresik. Putri Candra Wulan ada versi lain bernama Darawati dari Champa menikah dengan Brawijaya V atau Ibrahim Zainuddin al-Akbar Asmarakandi. Atas dasar itulah tahun 1427 sampai 1428 imigran asal Vietnam Muslim sudah menuju daerah Majapahit. Di antara mereka adalah Sunan Ampel dan puteranya. Termasuk juga memberikan pengaruh besar bagi kerajaan Champa ini juga sampai di Indonesia, yaitu di Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan tersebut dipimpin Raja Mulawarman yang merupakan cucu dari Kerajaan Champa yaitu Kudungga (Suryadilaga, 2019).

Indonesia dan Brunei Darussalam

Selain relasi Islam antara Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam pada masa kerajaan dulu. Ternyata Kerajaan Sambas memiliki relasi baik dengan Brunei Darussalam. Paling jelas berkaitan dengan keterhubungan keluarga antara Sultan Sambas dengan Sultan Brunei melalui Raja Tengah. Hal tersebut terdapat di dalam naskah Salsilah. Di dalamnya diuraikan bahwa Sultan Sambas pertama yaitu Raden Sulaiman, merupakan anak dari Raja Tengah dengan Ratu Surya, adik perempuan dari Panembahan Sukadana. Selain itu, antara Sambas dan Brunei memiliki sejarah dakwah yang sama, terutama yang dilakukan oleh Maharaja Imam Sambas dan Naib Kadi Brunei. Kuatnya kerjasama ini kemudian diabadikan oleh daerah masing-masing. Di Brunei, nama Awang diabadikan menjadi salah satu nama jalan penting di Brunei yaitu jalan Inche' Awang Abdullah. Sementara di Sambas nama besar Basiuni disematkan menjadi sebuah nama lembaga pendidikan Islam yaitu Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran (PPMBI) Sambas (Mahrus & Sukino, 2019).

Indonesia dan Thailand

Rabithah Alam Islami (RAI) adalah organisasi Islam internasional yang bermarkaz di Makkah Arab Saudi, yang didirikan pada bulan Mei tahun 1962 bertepatan bulan Dzulhijjah tahun 1381 H. Organisasi ini hampir menyerupai dengan organisasi Islam lainnya, semisal Organisasi Kerja sama Islam (OKI). RAI ini dikenal juga dengan nama Liga Dunia Islam. Kala itu, yang menginisiasi pendirian RAI adalah Raja Arab Saudi Raja Faisal bin Abdulaziz. Salah seorang pejabat Rabithah Alam Islami asal Indonesia, tepatnya dari Desa Prenduan di Madura Jawa Timur, ia adalah Kiai Tidjani Djauhari. Ia bergabung dengan Rabithah Alam Islami pada tahun 1974, banyak tugas dakwah saat berkarir di lembaga tersebut, salah satunya beberapa kali utusan keislaman dan kemanusiaan ke Pattani Thailand (Djauhari, 2008b, 2008a, 2008c; Kuswandi, 2011, 2015; Kuswandi et al., 2020, 2021b; Kuswandi & Hasyim, 2007; Kuswandi & Rifa'ie, 2018; Muftisany, 2014).

Relasi Islam yang dilakukan oleh Kiai Tidjani di Thailand, kemudian dilanjutkan oleh putranya, Kiai Ahmad Fauzi Tidjani. Contohnya, Kiai Ahmad Fauzi seringkali mengunjungi beberapa tempat di Thailand untuk melakukan dakwah Islam. Salah satunya Kiai Ahmad Fauzi Tidjani berkunjung ke Jamiah Islam Syekh Daud al-Fathani (JISDA) di Yalan Thailand, pada tanggal 17 September 2018, yang ditemui langsung oleh Rektornya, Dr. Abdulrashid Abdullah Ha'miyae, MA. Di tahun yang sama, juga pernah melakukan perjalanan ke Fatoni University di Khao Tum Yarang District Pattani, Thailand, diterima oleh Rektor, Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya (Kuswandi et al., 2021b, 2021a). Selain Kiai Tidjani dan putranya, ulama lain yang mendapatkan kehormatan di kampus Islam Thailand, adalah Kiai Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Ia mendapatkan anugerah Doktor Honoris Causa dari Univeristy of Fatoni, Thailand. Prosesi penyerahan anugerah tersebut diberikan dikarenakan Kiai Din Syamsuddin dianggap berkontribusi penting dalam pengembangan Pemikiran Keislaman dan Peradaban Islam Dunia (Harsono, 2017).

Indonesia dan Malaysia

Tidak sedikit tokoh Islam asal Indonesia, yang pemikirannya banyak memberikan pengaruh di Malaysia, terutama pemikiran Buya Hamka dan Hamzah Fansuri (Abdullah, 2013; El-fikri, 2016). Tidak hanya pemikiran ulama Indonesia saja yang memberikan dampak dan jejak kesejarahan Islam di Malaysia, namun ada beberapa tokoh Islam di Malaysia yang berasal dari Indonesia, diantaranya Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad al-Attas, lahir pada tanggal 5 September 1931 di kota Hujan Bogor, Indonesia. Tidak hanya Naquib al-Attas,

namun ada tokoh ulama asal kelahiran Indonesia yang kemudian tinggal di Malaysia, yaitu Habib Ali Zaenal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid merupakan ulama asal Jawa Timur yang menetap di Malaysia (Agustina, 2021; Samudra, 2021).

Begitu sebaliknya, pendidikan keislaman Malaysia juga memberikan pengaruh bagi kelahiran ulama-ulama besar Indonesia. Diantaranya Habib Rizieq merupakan master lulusan Universitas Malaya dan doktor lulusan Universiti Sains Islam Malaysia. Selain itu, Prof Akhsanul In'am, Ph.D merupakan lulusan Doctor of Philosophy of Educational Management, Planning and Policy at Faculty of Education University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia. Saat ini, Prof In'am di samping aktif sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dia juga dipercaya sebagai *President Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA)*. Di dunia pesantren, dikenal ulama kekiniaan pesantren, Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, salah seorang putra dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor ini adalah lulusan program doktoral di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Malaysia (Maman, 2022; Seto, 2022; Tim Redaksi, 2018)

Indonesia dan Singapura

Pada tahun 1824, orang Arab pertama yang masuk ke Singapura adalah Sayyid Abdul Rahman Al-Sagoff, beserta puteranya yang bernama Ahmed. Pada tahun 1848 ia mendirikan firma Al-Sagoff and Company. Puteranya, Sayyid Ahmed menikah dengan Raja Siti, saudara dari Hj. Fatimah, Sultanah Gowa di Sulawesi. Dari keluarga inilah, kemudian peran besar diperankan terutama dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan Madrasah Al-Junied al-Islamiya, Madrasah Wak Tanjong, Madrasah Al-Sagoff dan madrasah Al-Ma'arif al-Islamiah. Di sisi lain, sejarah keislaman di Singapura dikenal dengan istilah muslim migran yang diantara asal muasal mereka dari para migran Bugis, Jawa, Sumatera, Riau, dan beberapa asal daerah lainnya. Sebaliknya, kontribusi besar Singapura bagi jamaah haji asal Indonesai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Singapura menjadi alternatif mereka sebagai tempat pemberangkatan (Sudrajat, 2015).

Indonesia dan Filipina

Raja Baguinda merupakan seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Raja Baguinda inilah yang memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam di Filipina Selatan, terutama kepulauan Sulu dan Mindanao tahun 1380 M. Tentu Raja Baguinda tidak sendiri, ia bersama ulama Raba, Karimul Makhdum. Sebelumnya, Raja Baguinda berdakwah di kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabungsuwan Manguindanao, raja terkenal dari Manguindanao memeluk Islam. Muballigh lainnya yang patut disebutkan kerana jasanya dalam penyebaran Islam di Filipina yakni Abu Bakar, ia juga seorang Arab yang memulai tugas dakwahnya di Malaka, Palembang, Brunei dan akhirnya sampai di Sulu sekitar tahun 1450. Selanjutnya pada abad ke-16, datang Syarif Muhammad Kabungsuwan yang konon adalah seorang pangeran dari Johor bersama pengikutnya, seperti halnya Abu Bakar, Kabungsuwan tidak hanya melanjutkan proses Islamisasi, tetapi lebih penting adalah meletakkan dasar kesultanan Maguindanao. Ia sering disebut dalam silsilah raja-raja sebagai orang satu-satunya yang bertanggungjawab dalam Islamisasi Mindanao (Hasaruddin, 2019).

Indonesia dan Laos

Pondok Pesantren Said bin Zaid, yang berlokasi di Batam, Indonesia merupakan lembaga pondok pesantren yang dikelola oleh Asian Muslim Charity Foundation (AMCF). Pesantren ini menjadi salah satu pendidikan Islam bagi masyarakat muslim Laos. Seperti yang dialami oleh masyarakat Muslim dari Desa Ban Ngiu Muang Houn Provinsi Oudomxai, 600 kilometer dari Vientiane (ibukota Laos). Diantaranya yang telah memilih mondok di pesantren tersebut adalah IPhone Savanh, yang kini akrab dipanggil Ismail, Bounpheng yang kini memilih dipanggil dengan nama Musa dan Hasan yang sebelumnya bernama Yeam (Tim Redaksi, 2020). Tentu banyak juga pesantren lain di Indonesia yang menampung juga masyarakat Muslim Laos yang ingin memperdalam Islam.

Indonesia dan Myanmar

Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar, mengundang keprihatinan beberapa tokoh Islam Indonesia, diantaranya dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) mendorong pemerintah Indonesia agar mendesak lembaga internasional, dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), termasuk OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Di samping itu, sikap prihatin juga datang dari Ketua Umum Muslimat NU, Khoffah Indar Parawansa, ia mendesak Pemerintah Junta Militer Myanmar agar segera menghentikan segala bentuk pembantaian dan perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Pihaknya juga meminta agar PBB turun tangan untuk mengatasi masalah ini (Putri, 2017; Wulandari, 2012).

Indonesia dan Timor Leste

Islam di Timor Leste tidak bisa lepas dari peran ulama dari kerajaan Islam yang ada di Indonesia, terutama Kerajaan Gowa-Tallo, Ternate, Samudera Pasai, serta Kesultanan Malaka. Model kuburan Islam Bugis-Makasar di Kampung Fatuhada, tepatnya di perbukitan Taibesi, Dili merupakan bukti kuat bahwa Islam di Timor Leste tidak bisa lepas dari peran Islam Indonesia. Pada saat masih menjadi bagian dari Bangsa Indonesia, Timor Leste kerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan mendapat kiriman tujuh orang da'i pada tahun 1981 sehingga terdapat perubahan signifikan terjadi dalam kurun waktu 1975-1999, masjid menjadi 46 buah dengan madrasah-madrasah tersebar di berbagai distrik di Timor Leste, dan umat Islam meningkat sekitar 40% (Winaningsih et al., 2022).

Serumpun Muslim Indonesia-ASEAN

Apabila ditelusuri riwayat Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik adalah kelahiran dari Kamboja. Demikian juga raja pertama Kerajaan Demak, Raden Fatah dan Sunan Ampel, Raden Rahmat, keduanya adalah keturunan dari Kamboja. Islam Kamboja tidak bisa lepas dari Kerajaan Champa, yang juga berada di kawasan Vietnam Selatan. Dari wilayah inilah yang kemudian keturunannya melahirkan Sunan Gunung Jati Cirebon. Apabila dengan Kerajaan Brunei Darussalam terekam dalam sejarah akan hubungan baik dengan Kerajaan Sambas. Peran Islam Minangkabau bagi sejarah Islam Filipina. Kesultanan Gowa juga berperan bagi sejarah Islam Singapura. Pemikiran tokoh Islam Indonesia banyak memberikan kontribusi besar bagi muslim Malaysia, diantaranya pemikiran Buya Hamka dan Hamzah Fansuri. Ulama Islam Indonesia banyak memberikan perhatian pada Islam Pattani Thailand, muslim Rohingya Myanmar, dan Islamisasi Timor Leste dan Laos.*

Referensi

- Abdullah, M. A. (2013, October 2). Hamzah Fansuri, Pemantik Peradaban Aceh. <https://Acehprov.Go.Id/>. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/hamzah-fansuri-pemantik-peradaban-aceh>
- Agustina, T. (2021, September 16). Mengenal Habib Ali Zaenal Abidin, Ulama Asal Jawa Timur Menetap di Malaysia, Belajar di Hadramaut Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Mengenal Habib Ali Zaenal Abidin, Ulama Asal Jawa Timur Menetap di Malaysia, Belajar di Hadramaut, <https://Palembang.Tribunnews.Com/>. <https://palembang.tribunnews.com/2021/09/16/mengenal-habib-ali-zaenal-abidin-ulama-asal-jawa-timur-menetap-di-malaysia-belajar-di-hadramaut>
- Djauhari, M. T. (2008a). *Masa depan pesantren agenda yang belum terselesaikan*. Taj Publishing.
- Djauhari, M. T. (2008b). *Membangun Madura*. Taj Publishing.
- Djauhari, M. T. (2008c). *Pendidikan untuk kebangkitan Islam*. Taj Publishing.
- El-fikri, S. (2016, August 22). Penerbit Malaysia Terbitkan Karya Buya Hamka. www.Republika.Co.Id. [https://www.republika.co.id/berita/ocavo2318/penerbit-malaysia-terbitkan-karya-buya-hamka#:~:text=Baru-baru ini%20empat buku,diterbitkan oleh PTS Publishing House](https://www.republika.co.id/berita/ocavo2318/penerbit-malaysia-terbitkan-karya-buya-hamka#:~:text=Baru-baru%20empat%20buku,diterbitkan%20oleh%20PTS%20Publishing%20House).
- Harsono, H. (2017, March 27). Din Syamsuddin Terima Doktor Kehormatan Fatoni University Thailand. www.Lintasparlemen.Com. <https://www.lintasparlemen.com/din-syamsuddin-terima-doktor-kehormatan-fatoni-university-thailand/>
- Hasaruddin. (2019). Perkembangan Sosial Islam di Filipina. *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(1), 32–43.
- Kuswandi, I. (2011). *Ulama negosiator pesantren: teladan dan pengalaman hidup KH. Moh Tidjani Djauhari, MA*. Pondok Mas.
- Kuswandi, I. (2015). *Kera pun bisa mengaji: rekam jejak sejarah Islam di Madura*. Ladang Kata.

- Kuswandi, I., & Hasyim, A. W. (2007). *Mengenal KH. Moh Tidjani Djauhari, MA*. MQA.
- Kuswandi, I., & Rifā'ie, M. (2018). *Bersama membangun pesantren*. Ladang Kata.
- Kuswandi, I., Tobroni, In'am, A., & Khozin. (2021a). *Aktualisasi Tasawuf-Tarbawi Ulama Pesantren*. Mata Kata Inspirasi.
- Kuswandi, I., Tobroni, In'am, A., & Khozin. (2021b). *Konstruksi pesantren tranformatif: sebuah ijhtihad kiai pesantren*. Mata Kata Inspirasi.
- Kuswandi, I., Wahyudi, A., Haris, M., Syamsudin, M., Tijani, A., Bari, A., Encung, Rusydi, Halil, H., Sadat, D. M., Anam, H., Yosi, Rahman, S., Ilyas, H., Syukri, A. H., Tsanie, A., Bukhary, U., Muzakki, Z., Mustakim, S., ... Zainullah. (2020). *Jejak keteladanan Kiai Moh Tidjani Djauhari* (I. Kuswandi (ed.)). Ladang Kata.
- Mahrus, E., & Sukino. (2019). Jejaring Keilmuan Ulama Borneo; Kajian Atas Naskah Korespondensi Antara Naib Kadi Tutong-Brunei dan Maharaja Imam Sambas. *At-Turats*, 13(2), 61–78.
- Maman. (2022). KUI Gelar Workshop Visiting Professor & Lecturer Mobility Hadirkan Presiden AMCA Indonesia. <https://hulondalo.id/>. <https://hulondalo.id/kui-gelar-workshop-visiting-professor-lecturer-mobility/>
- Muftisany, H. (2014). Mengenal Rabithah Alam Islami. *Www.Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/nc7cmr/mengenal-rabithah-alam-islami-1>
- Putri, B. U. (2017, September 2). Din Syamsuddin Dorong RI Inisiasi Intervensi Krisis Rohingya. *Nasional.Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/905387/din-syamsuddin-dorong-ri-inisiasi-intervensi-krisis-rohingya>
- Samudra, B. A. (2021). Mengenal Lebih Dekat Sosok al-Attas Guru Ustadz Hamid #1. <https://pai.unida.gontor.ac.id/>. <https://pai.unida.gontor.ac.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-al-attas-guru-ustadz-hamid-1/>
- Seto, W. A. W. (2022, July 20). Profil Habib Rizieq Shihab, Silsilah Keluarga, Pendidikan hingga Terjerat Kasus dan Hari Ini Bebas. <https://jateng.tribunnews.com/>. <https://jateng.tribunnews.com/2022/07/20/profil-habib-rizieq-shihab-silsilah-keluarga-pendidikan-hingga-terjerat-kasus-dan-hari-ini-bebas>
- Sudrajat, A. (2015). *Perkembangan Islam di Singapura*. academia.edu.
- Suryadilaga, A. (2019). Islam Indonesia dan Vietnam Bermula dari Kerajaan Champa. *Artikula.Id*. <https://artikula.id/alfatih/islam-indonesia-dan-vietnam-bermula-dari-kerajaan-champa/>
- Tim Redaksi. (2018, February 7). Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil. <http://Pps.Unida.Gontor.Ac.Id/>. <http://pps.unida.gontor.ac.id/dr-hamid-fahmy-zarkasyi-m-a-m-phil/>
- Tim Redaksi. (2020, March 31). Keterbatasan Tak Gentarkan Muallaf Laos Belajar Islam. *Suara Muhammadiyah*. <https://suaramuhammadiyah.id/2020/03/31/keterbatasan-tak-gentarkan-muallaf-laos-belajar-islam/>
- Tomaros, A. (2022, October 28). Vietnam-Kamboja: Mengenang Champa dan Jakarta Informal Meeting. *Kompasiana.Com*. <https://www.kompasiana.com/agustomaros/635b2472f2e5bd358404dd82/vietnam-kamboja-mengenang-champa-dan-jakarta-informal-meeting>
- Winaningsih, E. T., Hosen, N. F., & Rena, S. (2022). Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Timor Leste. *Repository.Iiq.Ac.Id*. [http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1838/1/Nadjematul-elis-Perkembangan PAI di Timor Leste](http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1838/1/Nadjematul-elis-Perkembangan%20PAI%20di%20Timor%20Leste)
- Wulandari, I. (2012, July 20). Soal Rohingya, Muslimat NU Desak PBB Turun Tangan. *Www.Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/m7ys95/soal-rohingya-muslimat-nu-desak-pbb-turun-tangan>
- Zainuddin, M. (2013). Lebih dekat dengan Maulana Malik Ibrahim. *Uin-Malang.Ac.Id*. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/lebih-dekat-dengan-maulana-malik-ibrahim.html>

IWAN KUSWANDI adalah dosen STKIP PGRI Sumenep. Alumni Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep Madura. Ia merupakan Wisudawan Terbaik Program Doktorat PAI Universitas Muhammadiyah Malang, Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI. Ia dapat dihubungi di email: kuswandisumenep87@gmail.com.

BAB 16

ASEAN sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global

ASEAN Halal Food: Penjamin Produk Halal Indonesia

Subandriyah

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

--QS. Al-Baqarah: 168

Pendahuluan

ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia yang merupakan salah satu pasar terintegrasi paling maju di dunia. Dengan populasi mencapai 660 juta jiwa dan lebih dari 50% populasi berusia di bawah 30 tahun merupakan angkatan kerja produktif dan pangsa konsumen terbesar ke-3 setelah Cina dan India. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN sebanyak 140 kali lipat sejak didirikan pada 1967, dari US\$ 23 miliar menjadi US\$ 3,2 triliun. PDB per kapita meningkat 40 kali lipat dari US\$ 122 menjadi US\$4.827 pada tahun 2021. Nilai perdagangan ASEAN naik 282 kali lipat dari US\$ 10 miliar menjadi US\$ 2,8 triliun. (Siaran Pers Kemenko Perekonomian, HM.4.6/96/SET.M.EKON.3/05/2021, 2021).

Berdasarkan laporan BPS pada Maret 2022, Indonesia mencatat rekor surplus dagang (*trade surplus*) terbesar sepanjang sejarah (Laporan BPS April 2022), nilai surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 4,53 miliar USD. Surplus dagang ini terjadi secara beruntun dalam 23 bulan terakhir. Kenaikan surplus dagang bisa menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional ke depan.

Sebagai gambaran saat ini produk unggulan di pasar ASEAN adalah produk halal. Di Indonesia, negara telah hadir memberikan sentuhan untuk produk halal melalui sertifikasi halal oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat BPJPH, dengan mandatory: Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal. (UU No.33 Tahun 2014, pasal 3 dan pasal 4).

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri/Internasional. Kerja sama dalam negeri yaitu Kementerian /Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, dan MUI Bidang Fatwa. Kerja sama Internasional yang dilakukan oleh BPJPH dapat berbentuk: pengembangan Jaminan Produk Halal, Penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal. Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia. Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal Produk dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No.39 Tahun 2021, pasal 119 ayat 2, pasal 127 ayat 1 dan 2, 2021).

ASEAN Halal Food

ASEAN Halal Food menjadi pembahasan secara intens dalam acara tahunan pada kegiatan: (1) Sub Regional IMT-GT WG HAPAS/Indonesia Malaysia Thailand - Growth Triangle Working Group Halal Product Assurance (2) AWGHF/ASEAN Working Group on Halal Food (3) MABIMS/Malaysia Brunei Indonesia Singapore (4) BIMP-EAGA/Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asia Growth Area. Halal Indonesia telah berpartisipasi aktif sejak 2017 IMT GT WG HAPAS di Jakarta Indonesia, 2018 BIMP-EAGA di NTB Indonesia, 2019 MABIMS di Singapore 2019, 2020 AWGHF secara Virtual, 2021-2022 semua secara virtual.

Isu produk halal bukan lagi menjadi isu Nasional akan tetapi sudah menjadi isu Global. Standar produk halal sudah bukan lagi menjadi Standar Nasional Standar produk halal sudah menjadi standar global, disampaikan KH Ma'ruf Amin: "Isu produk halal bukan lagi isu nasional akan tetapi isu global," ujarnya saat *launching* Pusat Kajian Halal ITS di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). China dan Korea sedang melakukan pensertifikasian produk halal di negaranya. Korea didukung oleh pemerintahannya dalam melakukan sertifikasi halal. Indonesia akan menghadapi banjirnya produk halal bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ada standarisasi yang ditetapkan dalam sertifikasi produk halal. Pemberdayaan masyarakat melalui proses halal ini terlindungi supaya produk-produk halal masyarakat kita tidak kalah saing dengan produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Salah satu bentuk pemberdayaannya adalah UMKM yang mendapatkan fasilitasi biaya dalam pensertifikasian produk halalnya (Khaswar, 2021).

Halal Food bisa menjadi sektor unggulan, Indonesia menjadi pusat produsen pangan halal Dunia. Bicara Halal Food, Produk Halal fokus pada makanan, minuman, fashion, kosmetika, dan pariwisata halal. Kodifikasi data produk halal diperlukan untuk mendapatkan statistik industri produk halal yang valid dan akurat sebagai landasan kebijakan ke depannya. Tujuan Indonesia adalah untuk meningkatkan ekspor produk halal ke pasar internasional, oleh karena itu produk produk UMK dan UMKM di dorong untuk sertifikasi halal guna menembus pasar National, Regional dan Internasional.

Untuk kelancaran perdagangan internasional produk halal, harus ada kerja sama saling kesesuaian dan saling keberterimaan sertifikat halal, sehingga memudahkan masuknya produk halal Indonesia ke negara tujuan. Kerja sama ASEAN bisa dimulai antara Indonesia dan Malaysia melakukan informal meeting untuk membuat kesepakatan tentang standar halal. Standar Halal yang disepakati kedua negara lebih berpeluang besar untuk bisa menjadi rujukan di Kawasan ASEAN dan Internasional. Pertanyaannya adalah Siapa yang akan menjadi leading sektor dari Kementerian/Lembaga mana yang bertugas menjadi negosiator. Prioritas di lingkup ASEAN terlebih dulu atau paralel sekaligus dengan SMIC dalam pembahasan terkait standard dan seputar halal. Untuk agendanya seperti apa dan konsentrasinya apakah khusus Halal Food atau ada yang lainnya representative Kementerian/Lembaga terkait. Langkah-langkah strateginya apa saja dan bagaimana caranya. Forum-forum apa saja yang bisa dimanfaatkan. Negara maju umumnya menggunakan instrumen standarisasi produk untuk perlindungan pasar dalam negeri. Sebagaimana data WTO, banyak produk akan masuk Uni Eropa, Amerika Serikat dan China dikenakan Non-Tariff Measures (NTMs), dalam bentuk Technical Barrier to Trade (TBT). Yang umumnya berupa standar atas suatu produk. Sedangkan Indonesia jumlah NTM dalam TBT relatif masih terbatas.

Inkubasi ekspor produk halal dilakukan melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk halal Indonesia. Industri Halal terdiri dari banyak sektor, halal food dapat menjadi concern utama dalam mendorong ekspor produk halal. Satu sisi bahwa perdagangan internasional juga berpeluang membuka jalan masuknya produk impor ke Indonesia untuk itu UKM dalam negeri harus didampingi agar dapat bersaing menembus pasar luar negeri. Pemerintah perlu memaksimalkan ketentuan standarisasi produk sebagai instrumen pengamanan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Salah satu bentuknya adalah Standar Halal. Kedekatan Indonesia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk tampil sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar dunia. Sistem INSW berperan dalam pencatatan dokumen elektronik dan memudahkan pertukaran data elektronik sertifikat halal dan dokumen PEB juga meminimalisir risiko Fraudulence. Kodifikasi data produk halal diperlukan untuk mendapatkan statistik industri produk halal Indonesia yang valid dan akurat sebagai landasan kebijakan ke depannya. Saat ini sudah regulasi terkait produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan KMA 748 Tahun 2021 dan KMA 1360 Tahun 2021. Oleh karena itu dalam rangka pencatatan komoditas halal ekspor impor (kode 952), perlu dilakukan pemetaan antara daftar klasifikasi komoditas wajib dan dikecualikan sertifikasi halal dengan kode HS. Negara

maju umumnya menggunakan instrumen standarisasi produk untuk perlindungan pasar dalam negeri. Sebagaimana data WTO, banyak produk akan masuk Uni Eropa, Amerika Serikat dan China dikenakan Non-Tariff Measures (NTMs), dalam bentuk *Technical Barrier to Trade* (TBT). Yang umumnya berupa standaratas suatu produk. Sedangkan Indonesia jumlah NTMs dalam TBT relatif masih terbatas.

Percepatan Kerja sama saling keberterimaan sertifikat halal antara Indonesia (BPJPH) dengan negara-negara di ASEAN diperlukan, agar ekspor produk halal yang existing tetap dapat berjalan lancar. Kerja sama Internasional terkait Halal bisa dimulai antara Indonesia dan Malaysia. Bilateral Indonesia-Malaysia, ada empat isu salah satunya adalah isu Produk Halal. Indonesia -Malaysia sepakat untuk mendorong penyelesaian nota kesepahaman antara badan otoritas halal kedua negara. Kedua Kepala Negara memberikan mandate agar nota kesepahaman dapat segera diselesaikan. Indonesia akan mengawal agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku otoritas penyelenggara jaminan produk halal dapat melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga produk dan logo halal kedua negara dapat saling diterima di pasar masing-masing. Kerja sama dalam hal produk halal dan logo halal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri produk halal di Indonesia, mengingat prospek perdagangannya yang sangat besar saat ini (Febrianto, 2017).

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan Sertifikasi Halal Internasional. MUI telah mengakui 45 lembaga sertifikasi dari berbagai negara (Tami, 2021). Di pasar halal global, Indonesia menempati posisi teratas dalam sektor pariwisata halal. Pengembangan wisata halal baru dilakukan setelah World Halal Tourism Summit tahun 2015. Indonesia melihat bahwa potensi pariwisata halal dunia akan terus meningkat karena pertumbuhan populasi muslim di dunia. Maka Indonesia membentuk 10 tujuan wisata baru selain Bali agar Indonesia menjadi negara tujuan wisatawan muslim global sesuai GMTI 2019 (Setyaningsih, 2021). Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam acara 2nd Indonesia International Halal Dialogue pada Kamis (29/10/2020), bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2014: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Standardisasi Mendukung Indonesia Menjadi Pusat Halal Dunia. Infrastruktur Mutu Nasional: tiga pilar yaitu standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrology; saling melengkapi dalam memenuhi berbagai persyaratan untuk meningkatkan daya saing di tingkat global termasuk untuk produk-produk Halal (Humas BSN 2020). Berikut ISO/IEC 17065:2012. Conformity assessment, Requirements for bodies certifying products, processes and services. *This Standard Was Last Reviewed And Confirmed In 2018. Therefore This Version Remains Current*. SNI ISO/IEC 17065: 2012 LPPOM MUI, 31 Januari 2018 (Anonim, 2012).

The AEC Blueprint 2025: tujuan bersama mencapai komunitas ekonomi terintegrasi dengan karakteristik, diantaranya: *A Highly Integrated and Cohesive Economy; Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation Highly Integrated and Cohesive Economy*; dan Menciptakan Kawasan menjadi single market, basis produksi yang kompetitif, aliran barang yang bebas (*free flow of goods*) sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar internasional/global. Meningkatkan perdagangan, investasi, efisiensi ekonomi, dan kapasitas ASEAN dalam rantai suplai global.

Strategi Halal Collaboration Task Force

Pada Maret 2022, Indonesia mencatat rekor surplus dagang (trade surplus) terbesar sepanjang sejarah (Laporan BPS April 2022), nilai surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 4,53 miliar USD. Surplus dagang ini terjadi secara beruntun dalam 23 bulan terakhir. Kenaikan surplus dagang bisa menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional ke depan (CIMT, 2022).

Hubungan bilateral : Indonesia – Malaysia pada Isu Halal di Pertemuan Joint Trade and Investment Committee (JTIT) Indonesia Malaysia pada tahun 2017 (Febrianto, 2017) memberikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) menerusi Bahagian Hab Halalnya sudah mengeluarkan lebih 100 penjelasan berhubung isu status produk halal di pasaran tempatan. Setakat hari ini, Jakim mengeluarkan 107 koleksi jawapan dan penjelasan isu status halal bermula sejak tahun 2016 (Husni, 2021)., *Next schedules: target countries Target/Goal: Global Halal Hub 2024, Agenda-PoA, Strategic Thrust 3: Ensure of Security, Food Safety, Better Nutrition and Equitable Distribution, Strategic Thrust 6: Strengthen ASEAN Joint Approaches on International and Regional Issues* (Anonim, 2020).

Di dalam negeri/domestik telah terjalin Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dgn Kementerian No.11/ MoU/HK.220/M/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 ditandatangani 16 Oktober 2019, (bersama dengan 9 K-L lainnya). Ruang Lingkup: a. produk (makanan, minuman,

dll); b. pelaksanaan layanan sertifikasi halal; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian (syarat RPH, pedoman pemotongan hewan, penanganan produk hewan & hasil olahan, fasilitasi halal RPH, sertifikasi NKV, pengawasan-pemeriksaan-pengujian-standar produk hewan) berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama International Jaminan Produk Halal (Peraturan Menteri Agama No. 2, 2022).

ASEAN Halal Food sebagai Penjamin Produk Halal Indonesia

Sampai saat ini belum ada standar halal yang diakui dunia, belum ada standar metode pengujian yang menjadi acuan Lembaga Pemeriksa Halal secara Nasional, serta belum ada kerja sama saling kesesuaian dan keberterimaan Sertifikat Halal Indonesia dengan negara lain.

Sebagai catatan, selalu terdapat perbedaan standar halal di tiap negara dan perlunya penetapan standard / metode pengujian pangan halal apa yang disepakati untuk digunakan di Indonesia. Sehingga bila suatu saat terdapat temuan saat pengawasan post market, sudah ada rujukan yang jelas.

Menutup tulisan ini, memang sangat diperlukan kerja sama bilateral antara Indonesia (BPJPH) dengan Negara negara di ASEAN, diawali dengan penandatanganan MoU antar pemerintah (*G to G*) kemudian ditindaklanjuti dengan Mutual Recognition Agreement (MRA). MoU yang sudah ditandatangani adalah Chile (2020), Argentina (2021), Hungaria (2022), Belarus (2022), Dinar Standard UAE (2022), HAK Turkey (2022).*

Referensi

- Anonim (2020). ASEAN Food, Agriculture and Forestry, asean.org, <https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/> (diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Anonim (2022). Jadi Bagian SMIIC, Indonesia Ikut Susun Standar Halal Global, mediaindonesia.com, 27 Nopember 2022, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/540430/jadi-bagian-smiic-indonesia-ikut-susun-standar-halal-global> (diunduh pada 29 Nopember 2022)
- CIMT, Admin (2022). 15th IMT GT Strategic Planning Meeting (SPM) Breakout Session Of Working Group On Trade And Investment Facilitation (WGTF), imtgt.org, 25 Mei 2022, <https://imtgt.org/15th-imt-gt-strategic-planning-meeting-spm-breakout-session-of-working-group-on-trade-and-investment-facilitation-wgtf/> (diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Febrianto, Vicki (2017). Indonesia-Malaysia bahas empat isu utama perdagangan, antaranews.com, 24 Nopember 2017, <https://www.antaranews.com/berita/666975/indonesia-malaysia-bahas-empat-isu-utama-perdagangan>, (Diunduh pada 25 Nopember 2022)
- Humas BSN (2020). Standardisasi Mendukung Indonesia Menjadi Pusat Halal Dunia. Bsn.go.id, 30 Oktober 2020, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11534/standardisasi-mendukung-indonesia-menjadi-pusat-halal-dunia> (Diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Husni, Mohd (2021). 107 koleksi isu status halal di bawah satu pautan Facebook, utusan.com.my, 25 September 2021, <https://www.utusan.com.my/berita/2021/09/107-koleksi-isu-status-halal-di-bawah-satu-pautan-facebook/> (diunduh pada 23 Nopember 2022)
- IMT GT (2017). Implementation Blueprint IMT-GT 2017–2021, <https://www.adb.org/sites/default/files/related/41543/imt-gt-implementation-blueprint-2017-2021.pdf> (Diunduh pada 23 Nopember 2022).
- Indah (2022). Indonesia Tuan Rumah Pertemuan The 18th ASEAN Working Group in Halal Food, kemenag.go.id, 19 Juli 2022, <https://kemenag.go.id/read/indonesia-tuan-rumah-pertemuan-the-18th-asean-working-group-in-halal-food-jp5jp> (Diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Kementerian Agama RI (2014). UU No.33 Tahun 2014, pasal 3 dan pasal 4. <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu%20BPJPH.pdf> (Diunduh pada 23 Nopember 2022).
- Kementerian Agama RI (2021). PP No.39 Tahun 2021, pasal 119 ayat 2: pasal 127 ayat 1 dan 2. https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf (Diunduh pada 23 Nopember 2022).

- Kementerian Agama RI (2022). Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2022. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=4051&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+2+Tahun+2022+tentang> (Diunduh pada 23 Nopember 2022).
- Michella, Widya (2022). Ingin Beri Sumbangsih, Indonesia Siapkan Standarisasi Halal Global, IDXChannel.com, 27 Nopember 2022, <https://www.idxchannel.com/syariah/ingin-beri-sumbangsih-indonesia-siapkan-standarisasi-halal-global> (diunduh pada 29 Nopember 2022)
- Oktaviani, Zahrotul (2022). Jadi Bagian SMIIC, Indonesia Ikut Susun Standar Halal Global, Republika.co.id, 27 Nopember 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rlzmi1485/jadi-bagian-smiic-indonesia-ikut-susun-standar-halal-global> (diunduh pada 29 Nopember 2022)
- Samsu, Khaswar (2021). Produk Halal Indonesia: Mampukah Kekuatan Domestik Memenangkan Persaingan Global?, halal.ipb.ac.id, 21 April 2021, <https://halal.ipb.ac.id/produk-halal-indonesia-mampukah-kekuatan-domestik-memenangkan-persaingan-global> (Diunduh pada 25 Nopember 2022)
- Setyaningsih, R.P. (2021). Tinjauan Buku : Isu Halal Internasional Dan Regional : Perspektif Hubungan Internasional, researchgate.net, 03 Mei 2021, https://www.researchgate.net/publication/362105011_Isu_Halal_Internasional_dan_Regional (Diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Siaran Pers Kemenko Perekonomian, HM.4.6/96/SET.M.EKON.3/05/2021, 1 Mei 2021* (2021). [Ekon.go.id](http://ekon.go.id), 1 Mei 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/4/grafikonomi?page=8> (Diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Surya, Gempita (2022). BPJPH Kemenag: Indonesia akan berkontribusi dalam penyusunan standar halal global, Moslem Choice, 27 Nopember 2022, <https://www.alinea.id/bisnis/bpjph-kemenag-indonesia-akan-berkontribusi-dalam-penyusunan-standar-halal-global-b2ft9l4k> (diunduh pada 29 Nopember 2022)
- Tami (2021). Keren Nih! Pemerintah Indonesia Siapkan Sertifikasi Halal Internasional, mutuinstitute.com, 6 Juli 2021, <https://mutuinstitute.com/post/sertifikasi-halal-internasional/> (diunduh pada 23 Nopember 2022)
- Yuliasuti, Desy (2022). Jadi Bagian SMIIC, Indonesia Ikut Susun Standar Halal Global, Pentingnya jaminan kehalalan produk untuk konsumen global, Fortuneidn.com, 28 Nopember 2022, <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/jadi-bagian-smiic-indonesia-ikut-susun-standar-halal-global> (diunduh pada 29 Nopember 2022)

SUBANDRIYAH adalah Analis Kebijakan Ahli Madya, ASN Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama RI. Juga Anggota MUI DKI Jakarta Bidang Pendidikan Periode 2018-2023. Berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah populer pada G20 Writer Tahun 2022, yang berjudul "Halal Global Ecosystem: Membangun Posisi Indonesia sebagai Produsen Pangan Terbesar di Tingkat Dunia", 2021 diterbitkan oleh Perpusnas RI, terbit dalam momen G20. Ia dapat dihubungi di email: andri_mora@yahoo.co.id.

ASEAN dan Sistem Keuangan Islam

Harun Faizal

Pada era perang dingin, di Asia Tenggara telah menjadi ajang persaingan ideologi antarkepentingan kekuatan adidaya dunia. Hal ini disebabkan nilai strategis yang ada dimiliki Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi. Konflik antara Vietnam Utara (yang didukung Blok Komunis pimpinan Uni Soviet) dari Vietnam Selatan (yang didukung Blok Barat Amerika Serikat) menjadi salah satu bukti persaingan diantara dua kekuatan tersebut. Adanya persaingan dua blok ideologi dengan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok komunis menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat dibawah pimpinan Amerika Serikat mendudukkan pangkalan militernya di Filipina.

Gejolak yang terjadi di Asia Tenggara tidak persaingan di bidang ideologi semata akan tetapi adanya konflik militer yang melibatkan tiga negara yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam dan konflik bilateral (Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam) serta konflik internal (Kamboja, Thailand, dan Indonesia). Telah memperkeruh suasana di kawasan tersebut. Situasi persaingan, pengaruh ideologi dan kekuatan militer sehingga konflik bersenjata mengganggu stabilitas kawasan mendorong para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara menumbuhkan suasana aman dan damai. Dengan kondisi aman dan damai dapat memungkinkan terbentuknya suatu jalinan kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga diantara negara serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan.

Sebelum terbentuknya ASEAN, setidaknya ada beberapa organisasi antarnegara di wilayah seperti South East Asia Treaty Organization (SEATO, dibentuk Tahun 1954), Association of Southeast Asia (ASA, dibentuk Tahun 1961), dan Malaysia Filipina dan Indonesai (Maphilindo, dibentuk Tahun 1963). Organisasi-organisasi tersebut tidak bertahan lama karena berbagai sebab antara lain pertentangan ideology dan sengketa territorial antara negara anggota tersebut. Dengan adanya kegagalan-kegagalan tersebut mendorong para pemimpin negara di kawasan itu membentuk suatu kerja sama yang lebih baik.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melakukan pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama (Joint Declaration) yang berisi antara lain; kesadaran perlu adanya saling meningkatkan pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerja sama di antara negara-negara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya. Pada Tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, bersama lima wakil negara/ pemerintahan negara Asia yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), wakil perdana Menteri merangkap Mentri Pertahanan dan Mentri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S.Rajaratnam) dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok.

Transformasi ASEAN

ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri Asean untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Cita-cita itu diwujudkan dengan menyepakati Bali Concord 1 (1976); para pemimpin ASEAN membuat Program Aksi yang mencakup kerja sama dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penerangan, keamanan dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerja sama ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dengan payung Bali Concord 1 telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kesejahteraan di kawasan.

Perkembangan ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis ditahun 2020. Harapan ini dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala

Negara/pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur (15 Desember 1997) dengan mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke 9 ASEAN di Bali (2003) menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community).

Harapannya adalah komunitas ASEAN harus selangkah maju dengan tiga pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/APSC), Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Economic-Community/AEC), dan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Ketiga pilar tersebut terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama yang abadi. Indonesia menjadi pengagas pembentukan komunitas Politik Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.

AEC dan RCEP

Sekarang, ekonomi dunia mengalami kondisi yang sangat sulit, dengan kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan International melalui tarif bea masuk impor (*tariff protection*), pembatasan kuota, pemberian subsidi (*non tariff protection*) atau sejumlah hukum sebagai instrumen untuk menekan impor bahkan aturan fundamental dengan melarang arus ekspor dan impor barang dan jasa juga adanya friksi perdangan yang berkembang didunia. Bertambahnya negara yang menerapkan kebijakan proteksionism seperti di Amerika dan Cina serta beberapa negara lainnya. Penyebaran kebijakan proteksionesme dan friksi perdagangan telah berpengaruh besar di dunia ekonomi.

Berkembangnya ekonomi Asia Timur yang cukup pesat beberapa decade, meskipun disertai datangnya adanya COVID 19 telah merubah keadaan ekonomi dunia dan Asia Timur. Pada November 2020, disepakati Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditandatangani oleh 15 negara Asia Timur. Kondisi ini bisa menjadi turning point untuk waktu akan datang. Isu tentang AEC (ASEAN Economic Community) dan Asia Timur telah merubah ekonomi dunia. Dimana AEC lebih menekan kepada pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan Asia Timur. Isu ini menguji AEC dari berbagai macam aspek, termasuk di dalamnya AEC's back'ground.

Quo Vadis ASEAN

Dengan setengah abad lebih usianya, ASEAN jauh lebih dari patut untuk dinilai kembali eksistensinya, dan pantas untuk dievaluasi sejauh mana relevansinya dalam merespon tuntutan kebutuhan para anggotanya dalam stabilitas keamanan agar terwujud dan terpeliharanya perdamaian di kawasan Asia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan di pertengahan dasawarsa stabilitas keamanan dan terciptanya sebuah kedamaian bagi bangsa-bangsa di kawasan masih sama dalam dewasa ini.

Kebutuhan pembangunan dapat diwujudkan dan menghasilkan pertumbuhan tinggi yang memuaskan, negara-negara anggota ASEAN berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak jauh berbeda, yaitu terpeliharanya, stabilitas keamanan maupun perdamaian, sebagai bagian dari periode yang panjang di masa depan, untuk memakmurkan sebagai sebuah institusi yang tidak pernah terciptanya di kawasan seperti di Timur Tengah.

Urgensi ini membuat negara-negara dan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan untuk menilai kembali eksistensi ASEAN, jika mengalami STAGNASI, harus disadari The ASEAN Way untuk alasan untuk berbagai macam alasan pun harus dikoreksi keberadaannya. Dengan langkah seperti ini, eksistensi ASEAN dari kelemahan yang ada tidak dapat dijustifikasi dalam sejarah dan akan menjadi hiasan perjalan dari masa lalu sejak didirikannya. Pembeneran dan pembelaan untuk kehebatan The ASEAN way akan memberikan kotribusi signifikan yang dibutuhkan negara-negara pendiri ASEAN.

Kekuatan besar yang muncul kemudian berusaha mengambil alih dan mendikete kemana arah perkembangan kawasan sebagai konsekwensi dari telah berlangsungnya perubahan lingkungan strategis. Mereka mencoba mengambil manfaat dan keuntungan besar dari situasi yang tidak bisa dikendalikan ASEAN, dikarenakan para anggotanya tidak pernah melakukan instropeksi kedalam dalam melihat kinerja ASEAN agar dapat terus relavean semua programnya dan masih sesuai dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi ASEAN di abad ke 21.

Menuju Sistem keuangan Islam

Asia Tenggara merupakan kawasan yang menjadi pusat dari perkembangan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memimpin pembangunan industri di kawasan Asia Tenggara. Adanya perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di seluruh dunia telah mendorong negara-negara di kawasan

untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Perkembangan sistem perbankan di negara-negara ASEAN sangat bervariasi. Malaysia adalah negara yang paling cepat dalam pengembangan perbankan syariah. Malaysia mengembangkan konsep keuangan syariah sejak tahun 1963 melalui Tabung Haji Malaysia.

Undang-undang Bank Syariah (IBA 1983) dimana sistem perbankan Syariah berkembang dengan cepat melalui kebijakan liberasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia, dilanjutkan dengan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Indonesia gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan *state drive* sementara di Indonesia yang menggerakkan masyarakat (*market driven*). Pangsa pasar di Indonesia mengalami momentum sejak disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Brunei Darussalam dalam pengembangan industri keuangan syariah, ditambah Singapura sebagai minoritas Muslim yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk mengembangkan industri keuangan syariah, dan memproklamkan diri untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia, bahkan di dunia. Selain itu Filipina dan Thailand juga menjadi negara ASEAN yang mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah.

Event internasional 10th 2022 ASEAN International Conference on Islamic Finance di Kuala Lumpur 6-8 Desember 2022, sebagai contoh adalah even tahunan dalam menyiapkan platform untuk semua *stakeholder* yang relevan di dalam diskusi keuangan Islam dan melakukan evaluasi keuangan Islam sebagaimana halnya isu dan tantangan industri keuangan Islam saat ini. Kehadiran 200 peserta sebanyak 60 persen-nya dalam International Conference tersebut berasal dari peserta internasional yang berasal dari beberapa universitas dari negara-negara ASEAN. Perkembangan ekonomi Islam pada beberapa negara menghasilkan beberapa poin untuk mengembangkan sistem perekonomian yang basis syariah tidaklah mudah, dikarenakan ideologi pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, lebih-lebih di negara yang minoritas Muslim.*

Referensi

- Nainggolan, P. P. (2021). *ASEAN Quo Vadis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Febreani, 2022; Hakim, 2021; Shimizu, 2021)Febreani, Y. K. (2022). Penguatan Kerjasama ASEAN Plus Three (APT) untuk Penanganan dan Mitigasi Dampak Negatif Ekonomi dari Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.31254>
- Hakim, A. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 217–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>
- Shimizu, K. (2021). The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world economy. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>

HARUN FAIZAL adalah dosen FEB di Prodi Akuntansi UIKA Bogor, sekarang menjabat sebagai sekretaris Prodi Akuntansi FEB UIKA Bogor dan Asesor RPL Prodi Akuntansi FEB UIKA Bogor, serta *editor in chief* EBICS Jurnal Internasional FEB UIKA Bogor. Mulai mengajar di beberapa kampus dari tahun 2006 di Universitas Mercu Buana, SEBI Institute Ciputat (sekarang di Parung), Stie Thamrin (Universitas Thamrin), PTDI Jakarta, dan UIA Pondok Gede. Selain mengajar pernah menjadi Auditor Junior di KAP Syarief Basier PP Plaza Jakarta (2003). Menjadi Nazir Wakaf kompeten dari LSP BWI (2022), senang menulis dari Pondok Pesantren Darunnajah di bagian Pres Jurnalistik (1992), dan membuat beberapa konsep seperti konsep semester pendek universitas (1996), bergabung di kelompok penulis uktubuku (2019) dan pernah menulis buku chapter kuliah (2021), *Kiyai Entrepreneur* (2021), buku esai sebagai pengurus PCIM Malaysia (2022), serta buku *Ibuku* dalam menyambut hari ibu (2022). Ia sedang mempersiapkan buku *Tata Kelola Perusahaan Bahan Bangunan*. Ia senang belajar dan mengajar, penelitian, pengabdian dan menulis. Harun Faizal dapat dihubungi melalui email harunfaizal@uika-bogor.ac.id

ASEAN sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global: Analisa SWOT

Nur Hidayah

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN merupakan salah satu perwujudan amanah UUD 1945 untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia. Salah satu agenda pentingnya adalah mempromosikan ekonomi ASEAN menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Berbasis pada proporsi populasi ASEAN yang didominasi oleh Muslim, ASEAN memiliki potensi dan kesempatan untuk menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Dengan analisa SWOT, paper ini akan menganalisa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang ASEAN menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

ASEAN sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global: Analisa SWOT

Ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang pesat sejak 1960an ketika kawasan Timur Tengah mengalami oil boom. Kehadirannya disambut baik oleh negara-negara Muslim sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis yang semakin menghegemoni pasca runtuhnya sistem ekonomi sosialis-komunis pasca perang dingin USA-USSR Uni Soviet. Salah satu Negara di ASEAN yang mempelopori ekonomi keuangan syariah adalah Malaysia yang diawali dengan mendirikan lembaga tabung haji, yang bebas bunga, pada 1963. Indonesia sendiri pada saat itu masih di awal rezim Soeharto di paruh awal kekuasaannya yang masih bersifat antagonistik terhadap Islam dan Muslim.

Pada paruh kedua kekuasaannya, rezim Orde Baru mulai mengubah kebijakan antagonistik menjadi lebih akomodatif terhadap aspirasi Muslim, hal itu pun dilakukan sebagai strategi untuk mencari support bagi kelanggan kekuasaan rezim Orde Baru yang mulai kehilangan support dari militer. Terlepas dari hal itu, pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992 menjadi momentum awal perkembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia yang selanjutnya semakin berkembang pesat pasca Reformasi 1998 yang menandai dimulainya era demokratisasi di Indonesia.

Pasca reformasi, aspirasi umat Islam untuk pelaksanaan syariat Islam mulai bermunculan yang spektrumnya luas dari aspirasi dimasukkannya kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”, hingga munculnya Perda-Perda Syariat di provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Di bidang muamalah, aspirasi syariat Islam diperjuangkan secara lebih moderat, dengan upaya mengakomodir ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi dan keuangan syariah, seperti disahkannya UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU JPH (Jaminan Produk Halal), dll.

Demikian pula berbagai lembaga Negara didirikan untuk mengurus isu-isu ekonomi umat seperti DEKS BI, Divisi Keuangan Syariah OJK, BAZNAS, BWI, BPKH, BPJPH, dll. Secara general bisa dikatakan beberapa rezim setelah Reformasi, sejak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi, khususnya era Jokowi-Ma`ruf, terus menunjukkan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang semakin menguatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang relatif pesat. Ekonomi dan keuangan komersial syariah Indonesia berkembang pesat seiring berbagai kebijakan yang mendorong pertumbuhannya. Demikian pula dengan keuangan sosial Islam (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf/ZISWAF) yang terus mengalami peningkatan baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian dan pergeseran dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif. Bahkan berbagai prestasi dan penghargaan internasional diraih Indonesia. Sejak 2018, Charity Aid Foundation yang berbasis di Inggris, menempatkan Indonesia sebagai Negara paling terdermawan di dunia. Penghargaan ini tentu tidak bisa

dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang menyerukan umatnya untuk berderma dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf.

Dua emerging raksasa ekonomi di ASEAN, Indonesia dan Malaysia, dapat menjadi leading sector untuk pengembangan ASEAN sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan ASEAN. Malaysia telah melangkah jauh dalam membangun sistem ekonomi dan keuangan syariah yang cukup komprehensif, tidak saja pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi, namun juga pembangunan SDM melalui berbagai program studi ekonomi dan keuangan syariah namun juga pusat-pusat penelitian ekonomi syariah. Indonesia juga terus berupaya membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Pendirian KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang semula KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), merupakan salah satu upaya koordinasi dan sinergi serta kolaborasi tidak hanya di antara lembaga-lembaga negara, tetapi juga dengan seluruh stake-holders (pemangku kepentingan) untuk 'menyatukan langkah memajukan negeri' melalui pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Seiring dengan semangat desentralisasi, saat ini KNEKS berupaya mengembangkan perannya di daerah dengan pendirian KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah). Demikian pula dari pembangunan sumber daya insani, program-program studi ekonomi dan keuangan syariah terus bertumbuh di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang diharapkan pertumbuhan dari segi kuantitas ini diimbangi pula dengan pertumbuhan dari segi kualitas.

Tren ini juga diikuti oleh beberapa negara lain, seperti Singapura, yang juga mulai serius mengembangkan ekonomi syariah. Demikian pula dengan Thailand, yang sudah mengembangkan bisnis halal. Negara-negara besar ini tentu saja bisa menjadi lokomotif untuk mendorong Negara-negara lain di ASEAN seperti Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Meskipun dari 10 negara anggota ASEAN, hanya 3 negara yang mayoritas Muslim, namun proporsi penduduknya relatif dominan dibandingkan populasi 7 negara lainnya. Selain itu, berkaca dari pengalaman Inggris, sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia, negara non-Muslim seperti Inggris, tetap bisa mengembangkan negaranya sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Untuk mencapai hal ini tentu saja diperlukan kerja keras membangun system investasi yang menarik bagi investor luar negeri. Malaysia dan Singapura, sebagai bekas koloni Inggris, telah memiliki legacy system common wealth yang bisa terus dikembangkan. Indonesia tentu saja perlu juga mengambil leadership dalam membangun ASEAN sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah. IFSB (Islamic Financial Standar Board), lembaga yang mengeluarkan standar-standar internasional untuk lembaga-lembaga keuangan syariah telah didirikan dan berkembang di Malaysia. Indonesia bisa mengambil peran lain dengan mendirikan ISFSB (Islamic Social Financial Standard Board), lembaga yang akan mengeluarkan standar-standar internasional untuk keuangan social Islam (ZISWAF), sebagaimana amanah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Upaya ini telah dirintis oleh Indonesia dengan memformulasi Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles yang kini sudah mulai diimplementasikan di beberapa Negara Muslim.

Disamping berbagai kekuatan di atas, ada beberapa kelemahan yang mungkin perlu diatasi dan diantisipasi. Salah satunya adalah kecenderungan eksklusifitas ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah system yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yakni Islam, padahal negara-negara ASEAN bersifat multi-religious. Untuk mengatasi hal ini, tentu saja, varian sistem ekonomi dan keuangan syariah yang akan ditawarkan oleh ASEAN harus mengambil varian sistem ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat inklusif, mampu merangkul semua kalangan, tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Ekonomi dan keuangan syariah yang akan ditawarkan ASEAN perlu membranding sebagai system yang inklusif yang mampu menawarkan value proposition sebagai system ekonomi dan keuangan yang beretika, berkelanjutan, dan kompetitif dengan sistem konvensional.

Dari segi peluang, di tengah ancaman krisis keuangan global 2023, dan pengalaman beberapa krisis keuangan global sebelum di tahun 2018, 2008, dan 1998, akibat hegemoni ekonomi kapitalis, yang berbasis bunga yang cenderung melahirkan bubble economy, sistem ekonomi dan keuangan syariah bisa memberikan alternative system ekonomi dan keuangan yang relatif lebih stabil. Hal ini didasari oleh sistem ekonomi dan keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai etika moral Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan melalui partnership, distribusi pendapatan, dan kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan ini berbasiskan Maqasid Syariah (Tujuan tertinggi disyariatkannya Syariat Islam) yang berlandaskan kulliyatul khomsah (lima prinsip utama) yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

menjaga keturunan, dan menjaga harta. Prinsip-prinsip ini sesungguhnya bersifat universal yang secara substantive diajarkan pula oleh ajaran-ajaran agama lainnya.

Dari segi ancaman, ASEAN sebagai emerging pusat ekonomi dan keuangan syariah, akan mendapat tantangan dari pesaing pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan lainnya seperti kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah telah dikenal sebagai kawah candra di muka dan awal mula kelahiran ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa pusat ekonomi dan keuangan syariah global telah berdiri dan berkembang di kawasan ini seperti ISDB (Islamic Development Bank), IRTI (Islamic Research and Training Institute), AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), Majma` Fiqh Islamy of OIC (Organization of Islamic Conference).

Namun demikian, ancaman ini tentu saja bisa diantisipasi dengan membuat distingsi dari ASEAN sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat unik dengan menawarkan value proposition yang tidak dimiliki oleh pusat-pusat ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Salah satu potensi distingsi yang bisa ditawarkan adalah system ekonomi dan keuangan syariah di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia, yang lebih mengakar di tingkat 'grasroots' dengan kekuatan ekonomi ritel yang ditunjang oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro di akar rumput seperti BPRS dan BMT.

Ekonomi UMKM dan keuangan mikro ini telah membuktikan dirinya, melalui beberapa krisis ekonomi, sebagai system yang tangguh dalam menghadapi krisis. Sifatnya yang mikro membuat UMKM dan keuangan mikro memiliki daya lenting yang relative tinggi terhadap gempuran krisis. Bahkan di krisis ekonomi 1998, UMKM telah berjasa menjadi bantalan ekonomi Indonesia, pada saat para konglomerat yang dibesarkan oleh hutang luar negeri, justru mengalami krisis dan beberapa di antara mereka cenderung melakukan 'capital flight'. Kekuatan ekonomi dan keuangan syariah mikro ini bisa menjadi distingsi yang bisa ditawarkan oleh ASEAN sebagai emerging pusat ekonomi dan keuangan syariah.

Kesimpulan

ASEAN, di bawah kepemimpinan Indonesia, dapat membangun dirinya menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan global. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, yang dikontribusikan oleh Indonesia, sebagai negara Muslim dengan populasi terbesar. Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, telah menunjukkan potensi dan kemampuan perkembangan yang pesat.

Ekonomi dan keuangan syariah yang ditawarkan ASEAN perlu meredesign sebagai sistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, beretika, berkelanjutan, dan kompetitif dengan sistem ekonomi konvensional. Hegemoni ekonomi kapitalis di dunia saat ini yang telah melahirkan beberapa siklus krisis ekonomi perlu diberikan alternatif yang lebih berbasiskan sistem yang berkeadilan, dan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh ekonomi dan keuangan syariah. ASEAN sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang dicita-citakan dapat mengambil distingsi dengan keunikan ekonomi UMKM dan keuangan mikro yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis. Semoga kepemimpinan Indonesia di ASEAN dapat mewujudkan cita-cita ini.*

Referensi

- Aliasar, Afdhal (2020). *Membangun Ketahanan Ekonomi Umat Melalui Industri Halal*, Jakarta: KNEKS.
- Beik, Irfan Syauqi (2020). *Peran Zakat dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Jakarta: BAZNAS.
- Global Islamic Economy Report 2020/2021. (2020). Diakses dari <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE20-21>
- Global Muslim Travel Index 2021. (2021). Diakses dari <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>
- Hidayat, Sutan Emir (2020). *Pengenalan Produk Keuangan Syariah Terkini di Indonesia*, Jakarta: KNEKS.
- Islamic Finance Country Index-IFCI 2020. (2020).

OJK. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>

PUSKAS BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Diakses dari <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>

Utomo, Setiawan Budi, 2020, *Memenangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melewati Badai Krisis Pandemi*, Jakarta: OJK.

World Giving Index 2021 | CAF. (2021). Diakses November 19, 2021, dari <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>

NUR HIDAYAH adalah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan S1 di UIN Jakarta dan S1 FE UT, lalu melanjutkan S2 di SPS UIN Jakarta dan MA in Islamic Political Economy di University of Durham, UK, serta S3 dari University of Melbourne, Australia. Selain aktif meneliti dan publikasi, saat ini ia juga menjadi Editor in-Chief Jurnal *Al-Iqtishad* sekaligus research fellow di INDEF, selain menjadi pengurus IAEI dan Komisi HLN-KI MUI Pusat.

Sertifikasi Halal Pro Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kerja sama Industri Halal di ASEAN

Nurjannah S.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum dan Agama. Hal tersebut dapat kita temukan di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* (bkn.go.id, 1945). Selanjutnya di pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa: *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”* dan ayat (2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia dan umat Islam mencapai jumlah 85% dari seluruh populasi rakyat Indonesia. Melihat konteksnya, Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan diakui secara hukum nasional keberadaannya. Islam dalam arah dan perkembangannya di Indonesia memiliki korelasi dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagaimana pada sila pertama *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pancasila adalah ground norm yang harus menjadi dasar lahirnya keterikatan Islam dengan lahirnya konsep pancasila, khususnya sila pertama. *“Esa”* atau satu, memberikan bentuk ketauhidan yang paripurna dari umat Islam, dan terejawantahkan di dalam bentuk dasar Negara yaitu Pancasila (Septyanun et al., 2020).

Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, komprehensif dan mudah syariatnya. Di antara bukti kebaikan dan kemudahan syari'at Islam, Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi badan, ruh maupun akhlak manusia. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudharat atau yang mengandung mudharat lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia (Fawas, 2011).

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia, bahwa dimulai dari labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976. Labelisasi semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus dilakukan dalam rangka memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Setelahnya pada tahun 1989, sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), mengatur pembagian label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label *“MENGANDUNG BABI”* akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan *“HALAL”* (Faridah, 2019).

Dengan tujuan penguatan regulasi dan publikasi, maka saat itu pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label dibolehkan untuk dicantumkan apabila produsen telah melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap

produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994. SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, merubah alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama (Afroniyati 2014). Selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal.

Kondisi UMKM dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Pelaku Usaha mikro kecil dan menengah yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercatat berjumlah 59,2 juta pelaku (CNN Indonesia, 2017). Adapun kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melansir sebanyak 59,2 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Ayu Yuliani, 2017). Pada tataran implementatif karakteristik pelaku usaha UMKM, ketika pendampingan proses produk halal dilakukan, banyak persoalan yang ditemukan berupa: 1) masih belum diketahuinya mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis program SEHATI22; 2) proses sertifikasi halal dianggap mahal dan rumit; 3) pelaku usaha masih tertutup terhadap informasi produk menganggap hal tersebut sebagai rahasia dagang; 4) ketakutan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan ketika telah melakukan sertifikasi halal produk, 5) adanya bahan baku yang bersertifikasi halal luar negeri, dan tidak terdaftar di BPJPH atau MUI, 6) pelaku usaha UMKM dengan produk bahan baku hewani, masih kesulitan mendapatkan Juru sembelih halal (JULEHA) di beberapa wilayah di Indonesia, dan lain sebagainya (Nurjannah S, 2022).

Menjadi bagian dari proses penting pendaftaran produk pelaku usaha yang akan memperoleh sertifikasi halal produknya, adalah sebuah perjalanan pengabdian yang tak kenal lelah dan tak kunjung usai. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaku usaha mikro kecil dan semua pihak terkait, memiliki peran central dalam memaksimalkan target pada 17 Nopember 2024 kewajiban mandatori Sertifikasi Halal dan semua produk barang/jasa yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Per 20 Oktober 2022, Jumlah kuota fasilitasi sertifikat halal adalah sebanyak 349.834, selanjutnya jumlah pelaku usaha terdaftar adalah sebanyak 60.797, sedangkan jumlah kuota tersisa adalah 289.037, dan Jumlah sertifikat halal yang terbit baru 14.290 (BPJPH Kementerian Agama RI, 2022). Target pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil melalui mekanisme pernyataan mandiri pelaku usaha (*self declare*), dengan syarat dan ketentuannya berdasarkan keputusan kepala BPJPH nomor 33 tahun 2020, serta gratis, karena anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program SEHATI22 gratis. Selain mekanisme *self declare*, pengajuan sertifikasi halal produk juga bisa dilakukan melalui mekanisme reguler dan ini berbayar, mulai Rp. 600.000 hingga Rp. 2,5 Juta. Mekanisme reguler, berlaku pada jenis usaha dan produk tertentu yang memerlukan uji laboratorium dan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal melalui auditor halal.

Upaya pemerintah memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi UMKM adalah bagian dari percepatan target di tahun 2024, bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikasi halal. Apabila tidak, maka konsekuensi hukumnya adalah tidak boleh beredar. Oleh karena itu BPJPH bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, lembaga keagamaan dan lainnya melakukan pelatihan dan perekrutan pendamping dan trainer pendamping proses produk halal.

Saat ini BPJPH telah menggandeng 151 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang terdiri dari organisasi masyarakat dan universitas. Penyelia halal bersertifikasi berjumlah 344 orang, dan pendamping proses produk halal berjumlah 18.248 orang. Jumlah tersebut dijamin akan terus meningkat dan menjangkau hingga 37 provinsi

di Indonesia. Selain LPPPH, Lembaga pemeriksa halal (LPH) juga ditingkatkan jumlahnya dan diperkuat. Sebelumnya jumlah LPH baru 3 lembaga, maka pada Oktober 2022 jumlah LPH bertambah menjadi 28 Lembaga, dan terdapat 497 auditor halal terlatih dan bersertifikat. Target BPJPH di akhir tahun 2022, penambahan LPH didorong hingga 30 lembaga. Hal tersebut akan sangat mendukung target dan kebijakan pemerintah bidang industry halal makanan dan jasa.

Industri Halal Food dalam Regulasi dan Kerja sama ASEAN

Menguatnya peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, sehingga Pada bulan Agustus 2021 lalu, ASEAN *Food & Beverage Alliance* (AFBA) dan *Food Industry Asia* (FIA), merupakan asosiasi industri makanan-minuman di kawasan Asia Tenggara melakukan audiensi virtual dalam rangka support system halal produk di Indonesia. Audiensi yang dilakukan membahas kerja sama internasional terkait produk halal khususnya di kawasan ASEAN. Beberapa hal yang fundamental terkait perkembangan regulasi dan kerja sama internasional serta pengakuan sertifikat halal. Selama ini AFBA dan FIA secara aktif berkomunikasi dengan BPJPH untuk mengikuti perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya terkait sertifikasi halal, sehingga dampaknya dapat memperluas keran ekspor dan impor produk di Indonesia. Update regulasi juga berimplikasi pada kelancaran kerja sama produk halal di kawasan Asia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, bahwa kerja sama internasional bidang JPH yang dilakukan dua negara atau lebih dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal (Sugeng Pamuji, 2021).

Kerja sama internasional di bidang JPH, oleh BPJPH wajib berkoordinasi dan berkonsultasi bersama Menteri Agama dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Kerja sama internasional tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. Kerja sama internasional itu didasarkan atas perjanjian antar Negara.

Wujud kerja sama internasional dalam pengembangan JPH, focus pada pengembangan teknologi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana JPH. Penilaian kesesuaian yang meliputi saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian, merupakan esensi kerjasama yang dibangun. Perjanjian dan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal yang dilakukan dengan lembaga halal luar negeri (LHLN) yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal, dalam hal ini berlaku secara timbal balik yang dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN.

Pada kondisi yang lain, misalnya ketika di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal secara langsung di BPJPH atau lembaga yang berwenang untuk itu. Dan jika di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi maka lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Tim Akreditasi LP, di mana akreditasi dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi. Sehingga produk halal yang sertifikat halalnya telah diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dan telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH, maka tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal.

Sebagaimana komitmen pemerintah pusat dan daerah terkait jaminan produk halal, maka regulasi dan kerjasama internasional ini bersifat fundasional, mengingat bahwa sertifikat halal dengan kategori produk berupa bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH, maka produk wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.

Data *Global Islamic Economic Report* pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 232,5 juta jiwa atau 87,18% dari total populasi penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Halal saat ini bukan hanya penting untuk konsumen muslim namun juga penting untuk konsumen global karena kehalalan suatu produk dapat mencerminkan kualitas dari produk (Shirin Asa, 2019).

Kerjasama Negara-negara ASEAN, seperti Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) Forum merupakan momen strategis membangun aliansi antara 3 negara dalam rangka memperkuat kerjasama pembangunan layanan produk halal di wilayah ASEAN. Kawasan Industri Halal diharapkan mampu menciptakan produk-produk yang bisa bersaing dengan produk luar nantinya. bentuk kerja sama Indonesia dan Thailand dalam pemasaran produk halal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan produk halal di Indonesia dan Thailand. Adanya kepentingan nasional

memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Bentuk kerja sama ini ditandai dengan kemudahan perizinan masuknya produk ke masing-masing negara, serta sosialisasi pengenalan produk halal yang dihasilkan dengan memanfaatkan kerja sama dengan kementerian dari masing-masing negara, seperti kementerian perdagangan, maupun kementerian luar negeri. Menurut pandangan ekonomi Islam, pengembangan produk halal juga memiliki dampak yang baik tidak hanya bagi kemajuan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak baik pada kesehatan serta ketenangan hati masyarakat muslim di Indonesia. Adanya produk halal dapat menghilangkan kecemasan akan konsumsi pada suatu produk, dikarenakan setiap umat muslim diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang bersifat haram (Iskandar, 2019).

ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dengan free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN menjadi sebuah realitas yang tidak dapat ditawar lagi oleh negara ASEAN khususnya Indonesia. Bergeraknya barang di ASEAN dalam perdagangan bebas membuat komunitas muslim di Indonesia dan negara ASEAN lainnya mempertanyakan kehalalan produk yang masuk dari luar negaranya, oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk membahas tentang potensi sertifikasi halal dalam lingkup perkembangan pasar masyarakat ekonomi ASEAN (Deviana Yuanitasari, 2020) with free flow of goods, services, production factors, investment, and capital, as well as the elimination of tariffs for trade between ASEAN countries, is a reality that ASEAN countries, especially Indonesia, cannot negotiate. The movement of goods in ASEAN in free trade causes the Muslim community in Indonesia and other ASEAN countries to question the halalness of products that enter from abroad, therefore. This article aims to discuss the potential for halal certification in the scope of development of the ASEAN economic community market. This research method is normative juridical and analytical descriptive. The results show that halal certification for food products must be carried out, by taking into account the uniformity of requirements, labels, and registration in one application for registration of halal certification in ASEAN Countries ASEAN national cooperation related to halal certification such as the establishment of institutions (regional halal accreditation boards). Sertifikasi halal untuk produk makanan harus dilakukan, dengan memperhatikan keseragaman syarat, label dan pendaftaran dalam satu aplikasi untuk pendaftaran sertifikasi halal di Negara ASEAN. Kerjasama nagara ASEAN terkait sertifikasi halal seperti pembentukan lembaga (Dewan Akreditasi Halal Regional), pembentukan sistem pendaftaran satu aplikasi, keseragaman persyaratan, standar halal, sertifikasi regional, pembentukan peraturan dan persetujuan di bidang sertifikasi halal menjadi solusi yang tepat saat ini untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus menjamin keamanan akan produk halal di Indonesia dan di wilayah ASEAN.

Penguatan Kerjasama ASEAN dan Pro UMKM bersertifikasi halal

Mekanisme pendaftaran sertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self declare*) melalui program SEHATI22 gratis, adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah pro terhadap UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal produknya dengan mudah dan murah serta tidak mengabaikan kualitas bahan dasar produk. Merembaknya UMKM yang menghasilkan produk-produk makanan yang variatif dan inovatif, dan menggunakan bahan-bahan baku yang dapat dipastikan kehalalannya dengan memiliki label halal dan ber LPPOM. Beredarnya barang dan jasa di Indonesia dan Negara-negara kawasan ASEAN dengan criteria wajib bersertifikasi halal, semakin menguatkan pengakomodasian hak-hak masyarakat ASEAN akan kebutuhan produk-produk halal bagi keberlangsungan hidupnya. Trend konsumsi produk halal menjadi keniscayaan, dan sudah menjadi kebutuhan yang bersifat kolektif masyarakat.

Kerjasama Negara-negara kawasan ASEAN dalam penguatan industry dan produk halal memiliki titik temu dan saling menguntungkan. Kerjasama saling pengakuan (deklarasi bersama) merupakan komitmen dan upaya yang dilakukan dalam rangka melegitimasi Produk halal yang sertifikat halalnya telah diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dan dikuatkan dengan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal oleh BPJPH. Pada kondisi tersebut, maka tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya. Hal ini menjawab kepastian hukum terhadap legalitas produk halal lintas Negara ASEAN berbasis konvensi dan kerjasama saling pengakuan.*

Referensi

- bkn.go.id. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>
- Deviana Yuanitasari, H. N. M. (2020). *POTENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)*. 22(2), 197–219. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/8347>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fawas, M. W. A. (2011). *Kriteria Makanan Halal dan Haram*. 2, 1–31. <http://gizi.depkes.go.id/pgs-2014-2>
- Iskandar, A. (2019). *Kerjasama Ekonomi Indonesia - Thailand Dalam Perdagangan Produk Halal Di Pasar Asean Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*.
- Septyanun, N., Dimiyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. M. (2020). *Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>
- Sugeng Pamuji (2021). Kemenag Jelaskan Jaminan Produk Halal ke ASEAN Food dan Food Industry Asia, Kementerian Agama Republik Indonesia, url: <https://kemenag.go.id/read/kemenag-jelaskan-jaminan-produk-halal-ke-asean-food-dan-food-industry-asia-kdmg7>
- Nurjannah S. (2022) Pendamping Proses Produk Halal di 10 UMKM, hambatan dan tantangannya, LP3H Universitas Pramita Indonesia, BPJPH-MUI.
- Shirin Asa, R. (2019). an Overview of the Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(1), 173–200. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.7>

NURJANNAH S lahir di Kuken-Sumbawa, 04 September 1983. Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ditempuh di Kota kelahirannya. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (2006) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Program Magister Ilmu Hukum (2011) di Universitas Mataram dan Program Doktor Ilmu Hukum S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Mengabdikan diri dan menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sejak tahun 2008-sekarang, dan Dosen dan Ketua Program Studi Magister Hukum PPs UMMat. Tulisannya juga dimuat dalam buku *G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Saat ini ia adalah Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah NTB.

BAB 17

Kearifan Lokal Memajukan ASEAN

Panggilan Perdamaian dari Bali

Nyoman Astawa

Pendahuluan

Bali sebagai wilayah berpenduduk heterogen, merupakan salah satu fenomena eksotis di Indonesia yang dikenal mendunia. Masyarakat luas mengenal Bali bukan hanya terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga budayanya yang kaya dengan filosofi. Salah satu pemahaman yang membudaya, keterikatan dan keterkaitan hubungan tegak lurus (vertical) antara manusia dengan sang pencipta (Tuhan YME) dan hubungan horizontal antar manusia dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya, yang dikenal sebagai "Tri Hita Karana."

Tri Hita Karana adalah konsep mendasar budaya yang mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam tiga aspek utama kehidupan yakni hubungan "manusia – alam – Tuhan" sebagai sumber kebahagiaan. Ini adalah pandangan dunia yang mendalam yang dapat memberikan inspirasi kepada kita semua tentang pentingnya menjaga keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Berabad-abad masyarakat Bali membangun paradigma dan kerangka berpikir adaptif serta bersikap terbuka terhadap perubahan sebagai "Revolusi Mental" yang telah merangsang inovasi dan kreativitas dalam berbagai sektor utamanya bidang budaya dan system perekonomian.

Bentuk kreativitas yang melahirkan karya fenomenal yang dikenal adalah budaya seni. Seni adalah salah satu wujud paling indah dari budaya Bali. Tarian, musik, seni lukis, dan seni patung yang mengagumkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga cara untuk menyampaikan pesan perdamaian dan harmoni. Inovasi seniman diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata. Melalui seni, Bali mengajarkan bahwa ekspresi kreatif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan mengekspresikan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Puncak dari budaya seni di Bali diperagakan sebagai kontes (semacam festival) perayaan hari-hari suci keagamaan yang menumbuhkembangkan citera dan nilai luhur dalam kesetaraan. Hal yang lumrah adalah setiap perayaan Hari Raya keagamaan Hindu selalu semarak dan kemeriahannya terlihat megah dengan keanggunan dan keramahan masyarakatnya. Namun anti klimaks dari prosesi perayaan Hari Raya agama Hindu dari semarak menjadi "diam" menyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka (Hari Raya Nyepi), dimana masyarakatnya tidak boleh beraktivitas secara total selama 24 jam. Perayaan dengan melakukan kontemplasi diri melalui cara mengendalikan diri dan tidak makan/tidak minum (puasa/brata) berupa "amati geni" tidak menyalakan api; "amati karya" tidak melakukan kerja fisik; "amati lelungan" tidak melakukan bepergian; dan "amati lelangwan" tidak mengkhayal. Keempat bentuk larangan tersebut disebut "catur brata penyepian".

Momentum Konferensi Tinggi G20 di Bali

Puncak perhelatan 15-16 November 2022 Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 memiliki peran yang kuat dalam kerjasama regional di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Selain dibutuhkan kemampuan untuk mengelola keamanan selama acara-acara besar bertaraf internasional, juga komitmen yang kuat terhadap isu pelestarian lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta banyak kebijakan negara-negara maju yang bersifat berkelanjutan terkait dengan ekonomi, budaya, dan humanisme.

Dari berbagai isu yang diusung oleh negara-negara G20, Bali terpilih menjadi lokasi strategis penyelenggaraannya yang mempertemukan kepala-kepala negara besar. Mengingat Bali yang telah menjadi tujuan wisata populer dan memiliki fasilitas dan infrastruktur memadai. Infrastruktur ini termasuk hotel berbintang, fasilitas konferensi, dan aksesibilitas internasional yang baik melalui Bandara Internasional. Hal ini dapat memberikan pertukaran budaya antar bangsa serta menjadi peluang untuk memahami budaya Indonesia yang beragam.

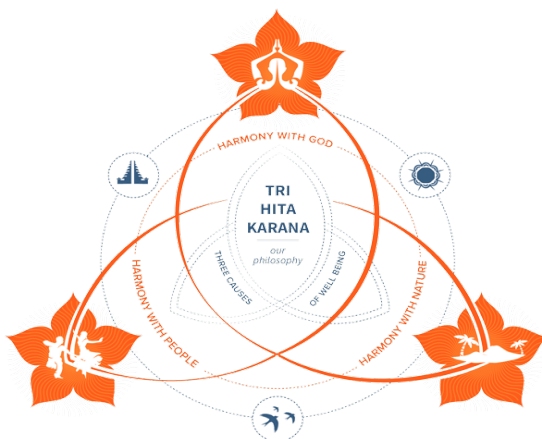
KTT G20 yang menghadirkan para pemimpin negara dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Prancis, Republik Korea, Rusia, Turki, Uni Eropa merupakan pertemuan bersejarah, karena dilakukan pasca pandemi Covid-19. KTT G20 Bali mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema itu, Indonesia sebagai tuan rumah ingin mengajak seluruh dunia pasca pandemi Covid-19 agar saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat, khususnya dalam bidang perekonomian. Indonesia memanfaatkan momentum KTT G20 ini menjadikan budaya sebagai diplomasi antarbangsa bermartabat dalam menyelesaikan seluruh persoalan strategis dan vital antarbangsa dan antar negara.

Penanaman pohon bakau di Tahura Mangrove

Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai adalah satu-satunya tahura yang ada di Provinsi Bali. Kawasan mangrove ini berada di kawasan bertipe hutan payau yang selalu tergenang air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut. Total luas Tahura Ngurah Rai 1.373,5 hektare. Kawasan ini terbentang di dua daerah tingkat dua yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai menjadi salah satu lokasi kegiatan KTT G20 di Bali, dimana perwakilan negara-negara anggota G20 secara bersama-sama menanam bakau sebagai penekanan pentingnya mangrove dalam menangani krisis iklim. Kawasan Tahura ini adalah prototype ekosistem buatan dan menjadi symbol pembangunan monumen ketahanan wilayah. Beberapa jenis hewan membangun habitatnya, mulai dari berbagai jenis burung, binatang merayap, dan hewan air hidup di lokasi ini. Keanekaragaman hayati yang hidup di Tahura menjadikannya sangat penting untuk dipertahankan secara ekologis dan dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam, rekreasi, wisata pendidikan, dan penelitian yang sangat berarti dalam pembangunan ekonomi.

Nafas Pelestarian Alam dari G20 Bali

Era global yang dimaknai sebagai modernisasi berbasis ilmu pengetahuan dengan transformasi informasi dan teknologinya cenderung mendekatkan pemahaman manusia pada penguasaan alam (eksploitasi). Di luar kemanfaatan positifnya, ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak kerusakan alam dan ekosistem jika ilmu yang dikuasai digunakan secara tidak bertanggung jawab. Penderitaan masyarakat di berbagai belahan dunia akibat kerusakan alam adalah fenomena yang harus dihentikan. “kembali ke alam” dalam pengertian bersahabat dengan alam, karena alam menjadi media bersama dalam menjaga kehidupan menjadi sangat penting. Kebaharuan pemahaman ini diinspirasi dengan mengemukanya nilai kearifan lokal yang mengusung perdamaian. Selaras dengan G20 mengusung isu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.



Konsep Tri Hita Karana yang menjelaskan harmoni dalam Hindu antara ekologi dan hubungannya serta sikap manusia yang ideal terhadap alam semesta dijelaskan dalam Rg Veda I.1.9 sebagai berikut: *Sa nah piteva sunave, 'gne supayano bhava, sucasvanah svastaye* (artinya: izinkan kami mendekatimu dengan mudah, seperti ayah kepada anaknya, semoga engkau senantiasa bersama kami). *Mata bhumiham putro'ham prtivyah* (Atharva Veda XII.1.12) artinya: Bumi adalah

ibuku dan aku adalah anaknya. Theology Hindu memandang alam semesta sebagai orang tua bagi makhluk hidup, dimana angkasa merupakan ayahnya sementara bumi dikatakan sebagai ibu; sehingga muncul istilah ibu perthivi. Sesungguhnya manusia sejak lahir memiliki 4 macam ibu yakni: ibu yang melahirkan, ibu perthivi (bumi), ibu yang melimpahkan susu baginya (sapi), dan ibu yang mengajarkan pengetahuan (guru).

Pembangunan ekosistem dengan konsep Tri Hita Karana adalah paradigma 'kebangkitan alam' awal abad 21 yang lahir dari Bali. *"We also acknowledge that ecosystems, including forests, seagrasses, coral reefs, wetland ecosystems in all their diversity, including peatlands and mangrove, support climate change mitigation and adaptation efforts."* Begitu kalimat penutup poin ke-15 Deklarasi Bali G20 dari Nusa Dua, Bali, mengakui 'kekuatan' alam hutan bakau (mangrove) guna mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di planet Bumi. Pohon dan hutan bakau dijadikan simbol dan tanda kekuatan, ketangguhan, dan stabilitas alam menghadapi kesulitan, khususnya perubahan iklim dan pemanasan global.

Sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan hadir pada KTT G20 di Nusa Dua, Bali, 15-16 November 2022, masing-masing menanam satu bibit pohon bakau di Tahura Ngurah Rai *Mangrove Forest Park*, Bali sebagai tanda nyata kebangkitan alam lahir dari Bali. Saat pohon-pohon ditanam, maka benih-benih perdamaian dan benih-benih harapan yang dikandung pepohonan tengah disemai bersamaan dengan tumbuhkembang pepohonan dan alam lingkungannya. Jika pemikiran bijak dan mulia para pemimpin dunia dalam pelestarian alam lingkungan terwakili, maka para pemimpin G20 telah mewakili menanam jejak ekologis yang sehat lestari hayat-hidup, bukan mengeruk-ngeruk fosil dan mineral dari bumi pertiwi.

Di wilayah Bali Tri Hita Karana mengejawantah, bertambah hamparan hutan bakau yang merupakan zona baru dalam program pemulihan, penyehatan, dan pelestarian hutan perairan. Sekaligus pintu gerbang rute bangsa dan bumi Indonesia menjadi negara-bangsa adidaya karbon kredit. *"Among the mangroves, the world leaders offered this symbolic, small step toward addressing climate change before departing Bali on their respective private jets. The mangrove tree represents strength, resilience and stability in the face of adversity"* (MJ Lee et al. CNN:16/11/2022). Itu artinya manusia dan tanah-air (planet bumi) mulai terlahir baru dari bumi Indonesia, yakni bumi Pancasila. Di masa depan seluruh kawasan akan meniru Bali, bahwa perlindungan berbasis ekosistem harus menjadi dasar untuk merencanakan strategi perlindungan pantai. Meningkatkan strategi ini melalui solusi buatan manusia dan rekayasa dapat membuat seluruh upaya lebih hemat biaya dan dapat melindungi keanekaragaman hayati pesisir yang berharga dan jasa ekosistem terkait menjadi lebih baik.

Kreativitas dan inovasi seni dan budaya

Konsepsi Tri Hita Karana mewujudkan dalam bentuk seni dan budaya, disini (Bali) mewedahi harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam menjadi sebuah karya seni yang hidup. Pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan tercermin dalam agama dan spiritualitas di Bali.

Manusia dengan Tuhannya

Upacara-upacara keagamaan seperti Ngaben (upacara perawatan jenazah) dan Piodalan dan perayaan hari-hari suci keagamaan (upacara persembahan kepada dewa-dewi) adalah momen di mana hubungan ini diperkuat. Mereka diiringi dengan tarian, musik, dan seni lain yang mendalam, tidak hanya memenuhi sujud bhakti kepada Tuhan dengan penghormatan, ikhlas, pengabdian, kesetiaan, kesetaraan, tetapi juga membagikan keindahan spiritual kepada manusia.

Manusia dan sesamanya

Dalam budaya Bali, gotong royong adalah prinsip yang sangat dihargai (paras paros sarpanaya). Ini tercermin dalam tari-tarian yang menampilkan banyak penari yang bergerak bersama-sama dengan harmoni yang luar biasa. Tarian dengan kisah yang menceritakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Tarian ini adalah simbol kerja sama dan persatuan dalam masyarakat. Selain itu, festival seni dan budaya seperti *Bali Arts Festival* dan *Ubud Writers and Readers Festival* adalah tempat di mana seniman dan budayawan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbagi ide, menghormati keberagaman, dan memperkaya budaya bersama.

Manusia dan alam sekitarnya

Orang Bali sangat menyadari pentingnya lingkungan dan menjaga keseimbangan dengan alam. Ini tercermin dalam seni pertanian tradisional mereka, dengan sistem subaknya yang menggambarkan hubungan yang erat dengan tanah dan tanaman. Subak adalah perkumpulan petani yang menggarap lahan pertanian secara bersama-sama dalam musim tanam dengan sistem pengairan pembagian yang merata.

Selain itu, seni patung dan seni rupa Bali sering kali mencerminkan keindahan alam dan makhluk hidup yang menghuninya. Seni adalah manifestasi nyata dari harmoni yang terjalin antara manusia, Tuhan, dan alam. Seni membantu manusia untuk menghormati nilai-nilai spiritual mereka, memupuk persatuan dalam masyarakat, dan merayakan keindahan alam. Ini adalah puncak dari implementasi Tri Hita Karana, di mana seni dan budaya menjadi sarana untuk menjalani prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Kehidupan di Bali adalah kisah tentang keseimbangan dan harmoni yang luar biasa antara manusia, Tuhan, dan alam. Seni dan budaya di Bali adalah ekspresi yang indah dari prinsip-prinsip Tri Hita Karana yang memperkaya jiwa manusia, mengingatkan kita tentang nilai-nilai yang lebih dalam kehidupan ini serta puncak seni dan budaya yang beresonansi dengan jiwa bumi yang tenang.

Momen refleksi dan perdamaian

Implementasi Tri Hita Karana sebagai konsep local wisdom dari Bali yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu, menjadi sangat fenomenal karena uniknya perayaan hari suci "NYEPI". Ketika menjalankan Catur Brata Penyepian (tidak bepergian [*amati lelungan*], tidak melakukan pekerjaan fisik [*amati karya*], tidak menyalakan api baik untuk memasak dan api amarah [*amati ghnī*], dan tidak melakukan mengkhayal [*amati lelungan*]) umat Hindu diingatkan untuk kembali memuliakan kemanusiaan yang memanggil umat Hindu untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan yang beragam, saling menolong dengan sesama dan menjaga alam adalah cara manusia Hindu menolong dirinya sendiri. Sebaliknya, menyakiti orang lain dan merusak alam adalah menyakiti dan merusak dirinya sendiri. Inilah momen umat Hindu diajak untuk memuliakan kemanusiaan sekaligus menghormati dan menjaga alam yang menjadi sumber kehidupan. Menyemaikan kembali kepedulian alam dan lingkungan dengan merawat tanah dan memuliakan air dan menjaga udara sehingga bisa tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Selain melaksanakan puasa tidak makan dan tidak minum, Hari Raya Nyepi yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam diperkuat melalui ritual keagamaan dan doa; menjaga hubungan dengan sesama yang diperkuat melalui introspeksi dan penyesalan atas konflik yang mungkin telah terjadi selama setahun yang lalu. Dan hubungan dengan alam diperkuat dengan mengurangi dampak manusia pada lingkungan, seperti dengan mematikan lampu dan mengurangi polusi suara.

Bahwa filosofi Nyepi adalah "Tat Twam Asi" sebagai ajaran tentang moral dan kesucian tanpa batas. Tat Twam Asi (Aku-Dia adalah Kamu, karenanya Kamu adalah Aku). Nilai-nilai ini sangat relevan di tengah upaya bangsa Indonesia terus meningkatkan moderasi beragama dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya bangsa. Penguatan nilai-nilai Tat Twam Asi diyakini oleh umat Hindu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Komunitas global di dunia telah mencanangkan Hari Toleransi.

Bali bukan sekadar pulau indah; itu adalah tempat di mana kreativitas dan inovasi menjelma menjadi karya seni yang menggetarkan jiwa. Ini adalah pulau di mana budaya berakar dalam tradisi, tetapi juga berkembang dan berevolusi dengan semangat yang tak terbatas. Bali adalah sumber inspirasi tak terbatas yang terus melukis dunia dengan warna-warni seni dan budayanya yang luar biasa. Di Bali, ada satu hari dalam setahun ketika pulau ini yang selalu hidup dengan kegembiraan dan warna-warni menjadi sunyi senyap. Hari itu adalah Hari Raya Nyepi, sebuah momen refleksi dan perdamaian yang begitu mendalam. Dan seluruh masyarakat Bali untuk hidup saling berdampingan, penuh toleransi sesuai slogan "sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya". Artinya bersatu padu saling menghargai pendapat orang lain dan saling mengingatkan, saling menyayangi dan hidup saling tolong-menolong.

Tidak layaknya seperti perayaan kebahagiaan dan kegembiraan, Nyepi adalah waktu untuk menjalani kesunyian dan menahan diri. Ini adalah saat ketika orang Bali memandang dalam, mengintrospeksi diri, dan merenungkan hidup mereka. Dalam kegelapan yang menakutkan, mereka mencari cahaya dalam bentuk spiritualitas. Seiring matahari

terbenam, Bali memasuki fase kedamaian yang luar biasa. Pada Hari Raya Nyepi, tidak ada suara gaduh kendaraan, tidak ada keramaian jalanan, bahkan tidak ada lampu yang menyala di rumah-rumah. Bali, yang selalu riuh dengan aktivitas, menjadi hening dalam gelap malam yang dalam. Itulah Hari Raya Nyepi yang unik di seluruh dunia.

Kesimpulan

Dalam banyak kehidupan dengan berbagai ragam corak dan karakter budaya daerah, keunikan kehidupan di Bali adalah kisah tentang keseimbangan dan harmoni yang luar biasa antara manusia, Tuhan, dan alam. Seni dan budaya di Bali adalah ekspresi yang indah dari prinsip-prinsip Tri Hita Karana, dan mereka memperkaya jiwa manusia, mengingatkan kita tentang nilai-nilai yang lebih mendalam dalam kehidupan ini. Mereka adalah puncak seni dan budaya yang beresonansi dengan jiwa penghuni pulau yang tenang. *

Referensi

Mantik, Agus S. (2007). *Bhagavad Gita*. Surabaya: Paramita

Donder, I Ketut (2007). *Kosmologi Hindu*. Surabaya: Paramita Sakala Sakha.

Veda Sruti Rg.Veda Samhita Mandala I, II dan III. Terjemahan oleh I Wayan Maswinara. 1999. Surabaya: Paramita

Titib, I Made (2004). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita

I NYOMAN ASTAWA adalah dosen tetap S2 Prodi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan; Wakil Ketua dan Peneliti *Center for Strategic Policy Studies (CSPS)* Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Kesamaan Budaya Sebagai Modal Kuat Kegemilangan ASEAN

Roy Darmawan

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatatkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang mendekati kesamaan. Hal ini antara lain dikarenakan karena kesamaan pewaris di peradaban sebelumnya antarnegara, yakni rumpun Melayu Austronesia.

ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 mengandung tujuan luhur, yaitu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera terutama dalam menjaga situasi mengingat adanya kerawanan konflik yang pernah terjadi sebelum terbentuknya ASEAN, baik perebutan pengaruh ideologi antar kekuatan militer di negara-negara besar maupun konflik di negara kawasan. Terbentuknya ASEAN juga karena persamaan kepentingan antarnegara. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki tujuan untuk bersama sama untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Kerjasama ekonomi ASEAN ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan integrasi ekonomi kawasan. Dalam deklarasi Bangkok, lima negara anggota ASEAN menuangkan berbagai tujuan yang ingin mereka capai melalui organisasi ini. ASEAN didirikan diawalnya lima negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang kemudian saat ini ASEAN beranggotakan sebelas negara, dengan tambahan tambahan Negara lainnya yang tergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste dimana yang terakhir yang paling bergabung adalah Timor Leste.

Negara-negara Asia Tenggara atau kawasan ASEAN telah lama mempunyai hubungan yang erat dan harmonis, kerja sama ini mencakup banyak bidang khususnya bidang pendidikan. Kerja sama di bidang pendidikan tidak hanya membawa manfaat bersama antar anggota ASEAN, namun juga memperkuat kohesi antar negara. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai inisiatif seperti pembentukan kelompok penelitian di negara-negara ASEAN, pertukaran pelajar dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar negara-negara anggota dapat bersaing di dunia regional dan internasional, termasuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa ASEAN.

Kerja sama di bidang pendidikan di ASEAN telah menjadi pilar penting dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan mengutamakan akses terhadap pendidikan yang komprehensif dan berkualitas di kawasan, negara-negara anggota ASEAN telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi warga negaranya.

Menghadapi tantangan ke depan ASEAN dengan berbagai kesamaan, perlu memperkuat spirit ASEAN yang laksana serumpun sere, dimana dengan spirit saling mendukung dan adanya sharing vision diantara anggota ASEAN, ASEAN akan memiliki kekuatan untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan. Dengan kekuatan bersama asean pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan capaian besar yang hendak diraih dunia akan jauh lebih mudah diwujudkan.

ASEAN telah memainkan peran penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui kerja sama regional yang kuat antar negara anggota ASEAN telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Program inovatif dan inisiatif bersama telah diluncurkan untuk mengatasi tantangan penting seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan ketahanan pangan. Selain itu, ASEAN juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, yang merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat kerja sama yang

terus menunjukkan upayanya, ASEAN terus menjadi salah satu kekuatan terdepan dalam mewujudkan visi global untuk masa depan yang berkelanjutan.

ASEAN yang kuat memainkan peran sentral dalam mencapai tujuan SDGs. Keberadaannya sebagai entitas regional yang kuat memberikan dasar yang kuat untuk memobilisasi sumber daya, berbagi pengetahuan dan mendorong kerja sama lintas batas untuk mencapai SDGs. Dengan membangun jaringan kerja sama ekonomi, politik dan sosial yang saling memperkuat, ASEAN dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selain itu, ASEAN juga berfungsi sebagai platform penting untuk pertukaran teknologi dan inovasi, yang memungkinkan anggotanya bekerja sama untuk mengatasi tantangan seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, ASEAN membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan dan meminimalkan konflik yang dapat menghambat pencapaian SDGs. Melalui kohesi dan sinergi antar anggotanya, ASEAN memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan global menuju masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.*

Referensi

Afadlal, Mariana A.F, Inayati R.S, Sungkar Y, Akbar R.T. (2011). *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*. Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar

Ditjen.kemendag.go.id

Farhana, F & Nufus, H. (2017). *Kita dan ASEAN: Ayo Berlari Bersama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<https://ASEAN.org>

<https://id.m.wikipedia.org>

Kotler, P, Kartajaya, H. Huan, H. D. (2011). *Merebut Pasar ASEAN Peluang dan Tantangan Bisnis di Asia Tenggara*. Bandung: Kaifa

Kotler, P, Kartajaya, H. Huan, H. D. (2015). *THINK NEW ASEAN!: RETHINKING MARKETING TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* . New York: McGraw Hill Education.

Mahbubani, K. Sng, J. (2017). *Keajaiban ASEAN: Penggerak Perdamaian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

ROY DARMAWAN adalah Profesor pada Guangxi University for Nationalities, China dan Ketua Dewan Pembina Pemilihan Putera Puteri Pendidikan Indonesia. Di Universitas Indonesia, ia aktif sebagai dosen dan Ketua Center for Strategic Entrepreneurial Leadership SKSG UI. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, dan pernah mengikuti ASEAN Young Leader Training Internasional.

Festival Film ASEAN dan Integrasi Budaya

Evi Andriani

Festival Film ASEAN

Kerja sama ASEAN di bidang budaya, salah satunya adalah Festival Film ASEAN atau dikenal dengan nama Film dan Penghargaan Festival Internasional ASEAN (*ASEAN International Festival Film and Award* atau AIFFA). Negara-negara yang dapat mengikuti festival film ASEAN ini adalah negara-negara yang berada di dalam ASEAN terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Filipina, dan Kamboja.

Tujuan didirikannya ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand diantaranya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan antar negara Asia Tenggara. Dari tujuan inilah lahir kerja sama Festival Film ASEAN dalam bidang budaya. Menurut Ketua Bidang Festival Internasional dan Hubungan Luar Negeri BPI (Badan Perfilman Indonesia), Dimas Jayasrana bahwa festival film ASEAN merupakan salah satu media strategis dalam diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Diharapkan film memberi pernyataan serta pengalaman estetis, dan memiliki fungsi pendidikan, hiburan, dan sosial budaya.

Selain itu, Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya (Pensosbud) KJRI Jeddah, Agus Mukhtar mengatakan film diharapkan menjadi jendela dalam memandang budaya dan tradisi masyarakat Indonesia secara santai dan kontemplatif. Sehingga masyarakat luar negeri, salah satunya Arab Saudi tempat yang akan diadakan AFF tahun 2020 dapat melihat Indonesia dapat memahami dan mengenal Indonesia secara mendalam, begitu juga dengan para komunitas diplomat, dan ekspatriat. Warga Arab Saudi dapat memperoleh tayangan film berbeda dari genre film yang telah ada di negaranya sendiri.

Film-film yang ditayangkan di AFF Arab Saudi bertemakan kuliner nusantara, sehingga membawa pesan tentang bagaimana kuliner nusantara negara Indonesia. Ada dua film yang mengangkat tema tersebut yaitu "Aruna dan Lidahnya" serta "Tabula Rasa". Semoga film Indonesia dapat dinikmati berbagai pihak.

Problematika dan Perkembangan Festival Film ASEAN

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Iwan Firman Widiyanto dengan judul "Strategi Pengembangan Festival Budaya dan Seni Tradisional Dusun Srumbung Gunung", manfaat diadakannya festival budaya, yaitu (1) Membangun komunikasi budaya. Hal ini membuat para wisatawan mancanegara jadi tahu dan kenal budaya daerah serta memahami sejarah dan filosofi dari setiap ritual adat di dalam festival film tersebut, (2) Pengenalan dan pengembangan seni dan budaya modern kepada masyarakat. Hal ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang seni budaya modern dan sekaligus bahan promosi seni budaya lokal daerah negaranya, (3) Mengangkat potensi ekonomi lokal. Pada saat festival berlangsung, masyarakat dapat menjual dan menawarkan produk lokal kepada wisatawan sehingga menambah penghasilan masyarakat sekitarnya, (4) Pemeliharaan lingkungan alam. Semakin dikenalnya lokasi tempat festival film dilaksanakan dan mendorong wisatawan mancanegara untuk datang sehingga ekonomi di sektor pariwisata meningkat.

Perkembangan Festival Film ASEAN (*ASEAN Film Festival* atau AFF) ini memiliki dampak strategis. Menurut Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Mari Elka Pangestu, AFF mampu memberikan ruang kepada film ASEAN untuk berkontribusi tidak hanya sebagai pilar penopang masyarakat sosial budaya ASEAN, tetapi juga dapat berdampak pada masyarakat ekonomi ASEAN sehingga AFF dapat memupuk dan mengembangkan jaringan industri kreatif, dalam rangka membangun kebersamaan antara negara-negara ASEAN. Hal itu dapat mengembangkan dan meningkatkan industri kreatif sesama anggota ASEAN, yang selama ini dikuasai oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan China.

Seperti pada tanggal 16-17 November 2011 di Bali, AFF mengusung tema “ASEAN: *The Global Film Connection*” dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011. Film-film yang akan diputar yaitu ETERNITY karya sutradara M.L. Pundhevanop Dhewakul (Film Terbaik Thailand National Film Awards 2011), EMIL karya sutradara Philippines (Film Terbaik Film Academy of Philippines, 2011) dan BUNOHAN karya sutradara Dain Said, (Film terbaik Malaysia yang pernah diputar di ajang Toronto International Film Festival 2011), DI BAWAH LINDUNGAN KA’BAH karya sutradara Hanny R Saputra, (Film terbaik mewakili Indonesia dalam seleksi Academy Awards 2011 kategori Film Bahasa Asing Terbaik). Para sutradara atau produser turut hadir dalam pemutaran film tersebut.

Menparekraf saat itu, Mari Elka Pangestu, menuturkan festival film ASEAN selain sebagai sara promosi kebudayaan, juga bertujuan menjual lokasi syuting film bagi anggota ASEAN dan kepentingan film internasional (*box office* dunia). Bahkan Indonesia juga sedang dilirik oleh beberapa produser asing. Indonesia memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai negara tujuan lokasi syuting film. Festival Film AIFFA 2019 mengambil tema konvergensi digital, mengenai pemasaran film secara daring, digitalisasi film, dan berusaha menciptakan platform agar film-film dari kawasan Asia Tenggara dapat lebih mudah diakses dan dinikmati oleh kita tanpa terhalang batasan jarak, sehingga para penyuka film, pegiat industri perfilman dari negara Asia Tenggara dan negara Hollywood dapat menontonnya.

Ada 16 kategori penghargaan yang akan diberikan kepada film-film terbaik dari Asia Tenggara yang ikut berkompetisi. Juri-juri yang berperan dalam festival tersebut adalah Ketua juri AIFFA 2019 yaitu U Wei Haji Saari (sutradara gaek penerima banyak penghargaan internasional asal Malaysia). Tiga juri dari Asia Tenggara yakni Amable “Tikoy” Aguiluz (sutradara, produser, penulis, sinematografer, dan pendiri *Cinemanila Internasional Film Festival* asal Filipina), Mattie Do Laos (sutradara perempuan pertama asal Laos), Daniel Rudi Haryanto (sutradara asal Indonesia, film dokumenternya yang berjudul *Prison and Paradise* memenangkan *Director Guild of Japan Award* pada Yamagata Documentary Film Festival 2011). Satu juri dari Perancis yakni Alain Jalladeau (Direktur The Festival of the Three Continents, Perancis).

Kegiatan Rutin Kerja sama dan Hasil AFF

Kegiatan Kerja sama AFF harus terus dilakukan rutin 2 tahun sekali agar meningkatkan kerja sama di bidang budaya dan menarik minat para produser atau sutradara dalam dan luar negeri agar menjadikan negara Indonesia sebagai lokasi syuting film. Harus ada usaha keras dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, namun segala aspek yang berkaitan dengan film AFF atau *ASEAN International Festival Film & Award* atau AIFFA, sehingga menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Malah kalau bisa dikembangkan lagi dan diadakan setiap satu tahun sekali. Hal ini akan memberikan peluang lebih besar bagi anggota negara-negara ASEAN dalam mempromosikan negaranya, juga mengangkat perekonomian dan industri negaranya.

Perkembangan dunia perfilman semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya laris di Indonesia tapi juga laris di mancanegara. Berikut lima film Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan internasional yaitu Yuni. Turah, Sekala Niskala, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kucumbu Tubuh Indahku.*

Referensi

- Widiyanto, Iwan Firman (2020). *Strategi Pengembangan Festival Budaya dan Seni Tradisional Dusun Srumbung Gunung*. Masters thesis, ISI Yogyakarta
- Koesrianti (2014). Association of South East Asian Nations (ASEAN): Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan. Surabaya: Airlangga University Press Indraswari, Ratih. 2015. Cultural Diplomacy in ASEAN: Collaborative Efforts. International Journal of Social Science and Humanity, 5(4), 1-4
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6383681/5-bentuk-kerja-sama-negara-negara-asean-bidang-budaya-ekonomi> (diakses 7 Desember 2022)
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/31/090000469/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan-dan-budaya?page=all> (diakses 7 Desember 2022)
- <https://www.gramedia.com/literasi/bentuk-kerja-sama-asean/> (diakses 7 Desember 2022)

<https://www.antaraneews.com/berita/1113098/indonesia-akan-selenggarakan-festival-film-asean-di-arab-saudi>
(diakses 7 Desember 2022)

<https://www.beritasatu.com/news/16882/asean-film-festival-memiliki-nilai-strategis> (diakses 7 Desember 2022)

<https://regional.kompas.com/read/2011/11/10/23234519/festival.film.asean.tumbuhkan.industri.kreatif?page=all>
(diakses 7 Desember 2022)

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/29/190000469/manfaat-kerja-sama-sosial-budaya-bagi-negara-asean?page=all> (diakses 7 Desember 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/01000021/ccontoh-kerja-sama-asean-dalam-bidang-budaya> (diakses 7 Desember 2022)

<https://www.fimela.com/entertainment/read/4727082/5-film-indonesia-yang-mendapatkan-penghargaan-internasional> (diakses 7 Desember 2022)

<https://www.fimela.com/entertainment/read/3922540/asean-international-film-festival-and-awards-2019-bakal-digelar-di-malaysia> (diakses 7 Desember 2022)

<https://kumparan.com/kabar-harian/apa-manfaat-diadakannya-acara-festival-budaya-berikut-jawaban-selengkapnya-1wTch6W0JIN/3> (diakses 7 Desember 2022)

EVI ANDRIANI adalah penyintas autoimun lupus, ITP dan Syndrom Sjogren yang senang wirausaha, menulis buku dan blog serta memelihara tanaman *aroids*. Tulisannya ada dalam 45 buku antologi dan 2 buku solo. Ia memiliki usaha dalam bidang sablon dan *fashion* yaitu RAG dan *fashion muslim* dan senang memberi motivasi dan ilmu kepada penyintas autoimun, dan orang yang ingin belajar menulis serta berbisnis. Evi juga dikenal sebagai sosok inspiratif. Evi pernah diwawancarai sebagai Wanita Inspiratif oleh Majalah Kartini (Mei 2014) dan Majalah Kampus USU (April 2015). Profilnya sebagai pejuang autoimun ITP dan lupus inspiratif diliput oleh DAAI Tv pada Program Bingkai Kehidupan. Tulisannya berjudul "Jilbab Permata Jiwaku" dimuat di Majalah Aulia (2014). Ia dapat dihubungi melalui email : evi_andriani55@yahoo.com.

Kebaya Warisan ASEAN untuk Dunia

Dwi Yuniarti

Perkembangan fashion saat ini terus berkembang dengan pesat sehingga tanpa bisa kita mengontrol maupun ikut serta dalam mengejar perkembangannya. Saat ini Fashion bukan hanya sebagai ajang kita untuk mengikuti trend pasa saat ini namun juga fashion sudah berubah menhadi suatu kebutuhan yang sangat sangat dibutuhkan bagi beberapa kalangan tertentu. Sehingga ada tercetus di beberapa negara ASEAN untuk dapat mewariskan kebaya sebagai warisan dunia, mengapa?

Di beberapa negara ASEAN kebaya merupakan baju wanita yang sangat disukai karena degan berkebaya wanita akan terlihat anggun dan berwibawa. Di Indonesia kebaya merupakan busana yang digunakan oleh para wanita bangsawan dan dipakai oleh kalangan tertentu yang berstatus sosial lebih tinggi dan pada saat-saat tertentu misalnya pada waktu pernikahan atau acara sakral lainnya lebaran contohnya, Dengan bergesernya waktu dan perkembangan fashion yang pesat penggunaan baju kebaya sudah mulai ditinggalkan.

Anak-anak remaja masa kini enggan menggunakannya dengan berbagai alasan antara lain:

“ketinggalan jaman laaah”

“ribet laaah”

“iiiih seksi banget jika berkebaya”

“gerah lagi juga gak nyaman kayak orang tua aja.”

Itu adalah sebagian pendapat kalangan muda yang ada di Indonesia terutama di pulau Jawa sehingga secara tidak sadar dan lama-lama tergeruslah penggunaan kebaya di kalangan wanita Indonesia. Saat ini mereka lebih bangga bila menggunakan busana dari belahan dunia lain yang notabene terkadang tidak sesuai dengan iklim dan budaya yang ada di kawasan ASEAN.

Bukankah daerah ASEAN merupakan daerah beriklim tropis yang cuacanya jika sedang musim hujan tidak terlalu dingin dan saat musim kemarau tak lah terlampau panas sehingga masih dapat menggunakan pakaian yang dapat menutupi aurat atau melindungi tubuhnya dari sengatan matahari atau dari tetesan air hujan. Dengan berkebaya yang berlengan panjang, maka wanita-wanita ASEAN akan semakin menonjol karakteristik orang-orang Melayu yang lemah lembut dan bertingklaku dengan santun dan *tidak beringas* (Bahasa anak zaman *now*) karena dengan berkebaya akan mencerminkan adat istiadat ketimuran yang dijunjung tinggi oleh para leluhur.

Kebaya merupakan pakaian yang mencerminkan wanita-wanita ASEAN yang gemulai dan lembut serta mampu menutupi kehormatannya bila digunakan dengan dipadupadankan kerudung. Berkebaya bila dilakukan dengan bijak maka akan terlihat begitu glamour, apalagi saat ini ada di Indonesia ada beberapa desainer yang menciptakan kebaya dalam berbagai modifikasi yang tetap tidak menghilangkan ciri khasnya yaitu betlengan panjang, dan berbentuk blus hingga menutupi pinggang atau pinggul sang pemakainya.

Kebaya modifikasi yang diciptakan oleh disainer-disainer Indonesia beraneka ragam bahan kain dan coraknya bahkan ada beberapa disainer yang membuat kebaya dengan mengaplikasikan aneka batu berharga, manik-manik yang terlihat mewah, atau dengan menggunakan material lainnya yang tak kalah berharganya sehingga kebaya masaa kini dapat digunakan dengan berbagai acara resmi yang dapat digunakan tanpa mengurangi kadar penghormatan pada acara yang dilakukan.

Menurut dosen Program Studi Pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan teknologi dan Kejuruan Universitas Indonesia (UPI) Suciati, kebaya Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, secara visual bermakna jati diri bangsa Indonesia. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Gaya busana perempuan Nusantara awalnya cukup dengan lilitan kain baik dililitkan dari pinggang maupun bawah ketiak. Pada masa abad ke-11, saat ajaran agama Islam masuk ke Nusantara atau khususnya di pulau Jawa muncul pemahaman bahwa berbusana mesti tertutup. Agar lebih tertutup maka kainpun dililitkan dari ketiak sampai ke pinggang dengan ditambahkan selendang yang disampirkan untuk menutupi dada dan pundak. Inilah awal mula terciptanya kebaya.

Seiring berjalannya waktu dan kedatangan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Cina dan Portugis maka yang semula disampirkan lalu diselubungkan dan dijahit berbentuk seperti jubah yang panjang, kemudian pada abad ke-12 hingga abad ke-14 kain selubung diti dinamakan kebaya. Kebaya pada masa lalu berasal dari keturunan bangsawan kerajaan, wanita terhormat, dan lahir dari lingkungan adiluhung dan dari budatya pemikiran Islam yang tertutup bajunya.

Demikian jelasnya Suciati pada CNNIndonesia.com.

Pada kebaya Indonesia mempunyai ciri-ciri yang utama adalah adanya belahan di depan badan dengan berbagai variasi kancing atau penutup lainnya sehingga cara memakainya dengan membuka belahan di muka, lalu berkembang menjadi *look kebaya* atau kebaya yang menggunakan dua material tekstur bahan yaitu sebagai bawahan dengan menggunakan kain batik atau kain songket sedangkan pada bagian atasnya dengan menggunakan jenis bahan dari brukat atau dari bahan yang dihiasi dengan payet-payet.

Orang Malaysia melihat kebaya dengan menggunakan material satu tekstur bahan saja artinya bawahan dan atasan sama satu bahan bentuk atasnya berupa dengan tunik seperti baju kurung yang ada di Padang Sumatra Barat yang belahannya berada di belakang badan biasanya penutupnya dengan menggunakan kancing atau dengan resleting.

Kebaya adalah warisan kita dan patut untuk kita rawat dan kembangkan.*

DWI YUNIARTI adalah seorang guru PAUD yang memulai mengajar sejak tahun 1998 di daerah Jakarta Utara, mengajar di berbagai daerah mulai dari Cirebon selama kurang lebih 5 tahun di TK Islam Nurul Amal, lalu ke Tangerang Selatan dan mengajar di TKIT AR Rahman BSD. Saat ini sedang menetap di Bekasi Utara mengabdikan di TK Rumah Putih Segara Jaya. Ia memiliki dua orang putra dan putri yang keduanya menempuh pendidikan di IAIN Cirebon dengan jalur prestasi dan nilai raport. Ia dapat dihubungi melalui email dwi.yuniarti180674@gmail.com.

Mars dan Himne dalam Budaya Indonesia

Ritmanto Saleh

Kewajiban setiap lembaga

Keberadaan lagu Mars dan Himne sudah sejak lama jadi semacam kewajiban bagi setiap lembaga di Indonesia. Sebagai contoh, meski belum berlaku secara menyeluruh, tiap sekolah dan kampus *wajib* punya Mars dan Himne. Universitas Terbuka (UT) termasuk di antara kampus-kampus yang sejak lama sudah memiliki Himne tapi bisa dibilang belum lama memiliki Mars. Untuk memilih lagu Mars yang cocok, mereka menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Mars UT pada 2020. Sementara sebuah kampus desain yang bermaksud meningkatkan statusnya menjadi Politeknik juga diwajibkan punya Mars dan Himne. Untuk itu mereka menyerahkannya kepada seorang penggubah lagu yang mereka percayai untuk menyampaikan visi-misi kampus tersebut melalui karyanya.

Pendidikan bukan satu-satunya bidang yang memerlukan Mars dan Himne. Lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan, baik yang bersifat politik maupun non-politik, juga perlu Mars dan Himne sebagai bagian dari persyaratan pendiriannya. Maraknya dinamika politik mengimbas kepada berbagai sektor. Banyak organisasi politik maupun non-politik bermunculan dalam rangka mewedahi aspirasi masyarakat yang membutuhkan saluran. Apalagi organisasi-organisasi tersebut, terutama partai politik, hampir bisa dipastikan punya organisasi-organisasi sayap, yang juga setidaknya harus punya Mars.

Prospek Penciptaan Lagu Mars dan Himne

Kebutuhan akan Mars dan Himne

Isi kepala setiap penduduk kepulauan Indonesia yang berjumlah lebih dari seperempat milyar ini tentunya sangat beragam. Setiap kelompok masyarakat butuh saluran yang dirasa paling cocok untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan keberagaman tersebut. Selain bisa dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia yang sedang mendapatkan bonus demografis, jumlah ini masih akan terus berkembang seiring dengan derap langkah pembangunan. Dengan semakin meluasnya pembangunan yang beberapa tahun belakangan ini semakin merata dengan akselerasi yang semakin tinggi, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi sosial-kemasyarakatan akan terus bertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan lahan garapan subur bagi para pencipta Mars dan Himne.

Pada kenyataannya, banyak di antara lembaga-lembaga tersebut yang ternyata tidak bersifat permanen. Sebagai gambaran, kita melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Selesai pemilihan umum, lembaga-lembaga tersebut bisa berlanjut dan berumur panjang tapi bisa juga langsung bubar karena iklim politik yang tak lagi mendukung atau eksistensi mereka mungkin memang tidak dirancang untuk jangka panjang. Namun tingginya dinamika sosial-politik sangat mungkin menyebabkan munculnya kebutuhan akan pembentukan wadah-wadah aspirasi dalam bentuk organisasi atau lembaga dengan nama dan visi-misi yang berbeda pada momentum politik berikutnya. Di saat itulah akan muncul kebutuhan Mars dan Hymne yang berbeda juga.

Melihat adanya niscayaan akan kebutuhan lagu Mars dan Hymne, dan bahwa ide dan kreativitas adalah kekayaan intelektual yang semakin digali bukannya berkurang tapi justru semakin banyak, maka bisa diasumsikan bahwa profesi penggubah lagu Mars dan Hymne, meski tak segempita lagu pop, bagaimanapun juga tetap bisa dibilang punya prospek yang menjanjikan.

Tanggung jawab penggubah Mars dan Himne

Mars dan Himne di masa perjuangan dulu tercipta oleh para penggubah yang kemudian dikategorikan sebagai pahlawan. Mereka mengalami sendiri perihnya perjuangan merebut kemerdekaan dan oleh karenanya karya-karya besar mereka pun secara jujur mencerminkan segala sesuatu yang mereka alami dalam keseharian. Karya-karya mereka satu-persatu meluncur tak terbendung meski dengan segala keterbatasan, dan kelak terbukti bersifat abadi. Selain itu keterbatasan tersebut justru menjadi kekuatan dari karya-karya mereka karena dengan teknologi yang masih seadanya, yang tercipta ketika itu memang hanya yang paling esensial. Semuanya serba dalam kekangan, segala sesuatunya serba tak cukup untuk apa pun yang bersifat perifer.

Kesamaan persepsi tentang *perjuangan* yang sudah dicapai sejak Sumpah Pemuda 1928 telah mengkrystal dalam jiwa para pendiri bangsa menjadi sebuah tuntutan yaitu *merebut kemerdekaan*. Para penggubah lagu dari berbagai generasi dan daerah merasa dituntut tanggung jawab untuk - dengan cara mereka - menyampaikan pesan ini ke seluruh rakyat. Oleh karenanya, terciptalah banyak lagu berirama Mars dan Himne pada periode itu, karena kedua irama inilah yang dirasa paling cocok untuk menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai patriotisme, semangat perjuangan, juga propaganda anti penjajahan yang ketika itu sangat menjadi tren.

Sekarang ini, setidaknya sekitar 80 tahun kemudian, kemerdekaan sudah lama kita dapatkan dan tuntutan bangsa ini juga sudah mengalami banyak pergeseran. Selama kurun waktu tersebut sudah banyak yang terjadi, mulai dari berbagai gangguan terhadap stabilitas nasional, pembangunan yang senantiasa dilakukan meski belum sepenuhnya merata, aktifnya peranan negara dalam kerja sama internasional, dan sebagainya. Selama itu jugalah secara silih berganti banyak terbentuk lembaga dan organisasi seperti sekolah, kampus, perkumpulan, yayasan, partai politik, dan sebagainya. Kebutuhan akan Mars dan Himne pun meningkat sebab peruntukannya bukan lagi hanya lembaga atau organisasi saja. Sosialisasi untuk program-program dari para lembaga dan organisasi tersebut (Wajib Belajar, Transmigrasi, BUTSI, Keluarga Berencana), bahkan acara-acara besar yang berlangsung hanya selama beberapa hari seperti pesta olah raga (PON, Asian Games, Sea Games), pun setidaknya butuh Mars. Sementara di sisi lain, perjuangan Indonesia yang masih berusia remaja dalam mempertahankan Irian Barat juga berbuah karya musik berkarakter kuat Himne yaitu Pantang Mundur.

Kondisi-kondisi ini menuntut pemahaman dari para penggubah Mars dan Himne atas pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing organisasi, lembaga atau acara. Untuk itu biasanya mereka mengacu kepada visi-misi lembaga, organisasi atau acara terkait demi mendapatkan inspirasi yang akhirnya turun sebagai lirik dari lagu yang diciptakan. Di fase ini terjadilah diskusi antara pihak pemesan dengan penggubah lagu. Demi benar-benar mendapatkan kata-kata dan cara musikal yang paling tepat untuk menyampaikan esensi dari pesan yang harus diterima oleh pendengar dengan distorsi seminimal mungkin, terkadang proses ini butuh waktu panjang. Contohnya, dalam proses penciptaan *Mars Perhubungan*, Addie MS sebagai penggubah perlu waktu total sekitar 4 bulan. Ini disampaikannya di sela-sela Konser Kemerdekaan dalam rangka menyongsong Hari Perhubungan, yang digelar pada Agustus 2022 di Djakarta Theater.

Sementara itu aspek-aspek musikalnya (melodi, progresi akor, struktur lagu, aransemenn) biasanya tergantung dari kompetensi dan kreativitas si penggubah lagu. Mars dan Himne sebagai 2 irama yang sama-sama dedikatif dan didorong oleh kuatnya perasaan dari lubuk hati terdalam - karena memang dimaksudkan untuk menggugah perasaan - pada dasarnya punya perbedaan pokok. Pada dasarnya, Mars yang berasal dari kata *march* (berjalan dalam barisan) berkarakter penuh semangat dan bertempo cepat. Sementara Himne berkarakter syahdu penuh keharuan dan bertempo lambat. Dalam proses penciptaan, perlu diperhatikan bahwa Mars dan Himne, seperti halnya irama-irama musik lain, punya patokan-patokan atau pakem-pakem yang harus dipatuhi. Di antaranya untuk Mars adalah bahwa ritmik 1/16 biasanya dianggap berkarakter lebih tegas daripada 1/8 atau *triplet* dari 1/4, misalnya. Namun dalam pelaksanaannya, pakem ini tidak selamanya dipatuhi selama masih terasa *jiwa* dari Mars sebagai pengiring tentara dalam berbaris. Kepiawaian penggubah dalam mengkombinasikan ritmik-ritmik tersebut justru bisa membuat lagu yang digubah jadi lebih dramatis dan dinamis.

Beberapa kasus pergeseran persepsi

Dalam kenyataan sehari-hari, Mars mendapatkan popularitas lebih tinggi daripada Himne. Popularitas ini berdampak munculnya lagu-lagu yang judulnya Mars tapi jiwanya bukan Mars. Banyak di antaranya yang terkesan

hanya *asal terdengar seperti Mars*. Ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang lengkap tentang Mars. Akibatnya, jika ditelaah lebih mendalam, lagu yang terdengar seolah berirama lain, bukan Mars. Di beberapa acara resmi, biasanya di sekolah-sekolah, ketika ada lagu Mars (bahkan termasuk Indonesia Raya) yang diiringi organ tunggal, irama yang jadi pilihan si pemain organ adalah *Polka* alih-alih *March*. *Polka* adalah irama pengiring tari tradisional Eropa Timur. Jika ini kemudian dipergunakan untuk mengiringi baris-berbaris, maka terjadilah pemaksaan persepsi. Dalam konteks musik internasional - bukan hanya di Eropa Timur - jika orang mendengar irama *Polka*, mereka akan menari, bukan berbaris. Kira-kira apa kata mereka jika suatu saat sepasukan tentara Indonesia berkunjung ke sana dan berbaris dengan iringan irama *Polka*?

Cerita lain, sebuah lembaga minta dibuatkan Mars dan Himne sebagai syarat registrasi yang diminta oleh instansi terkait. Di awal cerita - mengacu kepada pengalaman Addie MS dalam mengubah Mars Perhubungan - penggubah sudah mengisyaratkan akan terjadi banyak diskusi bahkan perdebatan dalam proses penyusunan lirik. Namun yang terjadi selama proses justru hanya ada sedikit diskusi, tidak ada perdebatan, dan usulan lirik hanya sedikit mengalami revisi. Ketika sudah jadi, dipresentasikanlah keduanya oleh penggubah di depan pemesan. Hasilnya, Himne lolos tanpa catatan yang berarti, sementara untuk Mars, penggubah diminta untuk memodifikasinya karena terdengar terlalu mirip dengan Mars pada umumnya, menurut si pemesan. Tujuannya agar bisa juga dibawakan dengan irama-irama lain, karena lembaga yang dipimpinnya sudah terkenal sebagai *selalu berbeda dari yang lain*.

Di sini terlihat keterbatasan pemahaman pemesan tentang esensi dari Mars. Ketika ada pakem yang diubah, misalnya dibawakan dengan irama lain, maka bisa-bisa Mars itu sudah bukan lagi Mars. Sama halnya dengan irama Campursari, kalau tidak ada bahasa Jawanya, maka lagu itu sudah bukan lagi Campursari. Irama Heavy Metal akan kehilangan identitas ketika raungan distorsi gitarnya ditiadakan atau diganti dengan suara lain. Jazz bukanlah jazz jika akor-akornya polos saja, tidak *miring*. Mars lembaga memang bukan lagu kebangsaan. Jika pihak pemesan misalnya ingin mempertunjukkan kreativitas dengan membawakannya secara berbeda disesuaikan dengan keperluan, tentunya bukan masalah. Namun bagaimanapun juga Mars tetaplah Mars. Esensinya adalah sebagai pengiring pasukan untuk berjalan dalam barisan. Apalagi jika keperluannya untuk syarat registrasi, maka Mars yang terlalu banyak dimodifikasi berisiko tidak memenuhi syarat justru karena tidak seperti Mars pada umumnya.

Edukasi melalui peningkatan literasi masyarakat

Jika bangsa Indonesia ingin bisa berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka bukan cuma bahasa asing yang harus dikuasai dengan baik. Musik - setidaknya idiom-idiomnya - adalah bahasa universal yang juga harus dikuasai dengan baik oleh orang Indonesia. Bagi bangsa-bangsa maju, musik sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, bukan lagi sekadar hiburan. Penguasaan yang baik atas musik, setidaknya akan mempersempit kesenjangan antara kita dengan bangsa-bangsa lain.

Sebuah lembaga, organisasi, atau program selalu berkaitan dengan orang banyak. Produk apa pun yang dihasilkan memiliki dampak sosial yang relatif luas. Benar atau salahnya sebuah persepsi akan melekat pada siapa pun anggota masyarakat yang berafiliasi dengannya untuk jangka waktu yang tidak pernah bisa diketahui. Dampak ini terasa lebih besar pada lembaga-lembaga pendidikan sebab para peserta didik sejak usia belia berinteraksi secara intens dengan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Persepsi tentang musik yang terbentuk selama masa pendidikan akan terus dibawa sampai si peserta didik tumbuh dewasa.

Mars dan Himne seringkali termasuk di antara irama-irama musik yang paling akrab didengar oleh para peserta didik selama masa pendidikan. Sudah selayaknya persepsi mereka dibentuk dengan baik dan benar sejak awal masa pendidikan mereka. Dengan demikian maka tidak akan terjadi kesenjangan atau perbedaan persepsi ketika mereka beranjak dewasa dan berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia lain.*

RITMANTO SALEH adalah pengajar, jurubahasa, dan penerjemah berlatar belakang pendidikan bahasa Prancis *IKIP Jakarta* (sekarang UNJ). Pernah mengajar bahasa Prancis di *Universitas Binus* dan *Universitas Pradita*, dan sekarang ini aktif mengajar di *Universitas Pancasila* dan *Politeknik Sahid*. Hobi bermusik membawanya menjadi arranger dan pelatih ansambel vokal (paduan suara, vokal group, nasyid, acapella) dan penggubah lagu. Kelompok nasyid *Snada*, *Gradasi*,

Vocafarabi, GSN, dan Pizzicato, kelompok vokal *Male Voice, Bianglala Voices, SMA 70 Jakarta, dan Harmony 8*, paduan suara *Twilite Chorus, UIN, Tjikini Choir, Uhamka, dan SMA 113 Jakarta*, adalah beberapa ansambel vokal yang pernah dibuatkan aransemennya. Beberapa Mars dan Himne pernah digubahnya, di antaranya *Mars dan Himne Politeknik Kreatif Indonesia, Mars Universitas Terbuka, Mars Muslimah Bersatu, Mars PPUMI*, dan sebagainya. Saat ini ia statusnya adalah pelatih paduan suara SMA 113 Jakarta. Iapun aktif sebagai anggota tim *Mukamu*, kanal YouTube yang berfokus dalam penciptaan lagu secara instan. Sebagai jurnalis, ia pun aktif menulis berita untuk media indie seni-budaya *Semesta Seni*. Bersama penerjemah-penulis Maria Antonia Rahartati Bambang Haryo, ia berkolaborasi menulis *Langue et Chant – Partition*, buku pelajaran bahasa Prancis melalui lagu. Ia dapat dihubungi di e-mail: ritmanto@gmail.com.

Globalisasi dan Kearifan Lokal

Siti Munawarah

Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat Persatuan Negara dan Bangsa Indonesia.

--Ki Hadjar Dewantara

Pendahuluan

ASEAN merupakan suatu wilayah yang kaya akan potensi kearifan lokal masing-masing negaranya, sejak dahulu kala negara-negara ASEAN dikenal sebagai negara yang memiliki adab yang luhur, budaya yang tinggi mulai dari makanan khas, tarian, cerita atau dongeng, permainan tradisional sampai bangunan khas setiap negara yang unik. Namun seiring perkembangan zaman, kearifan lokal yang dimiliki sedikit demi sedikit mulai terkikis bahkan cenderung punah tergerus oleh arus globalisasi.

Globalisasi yang melanda membuat masyarakat dunia menjadi tiada batas atas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini dapat terjadi melalui perjalanan antar negara, kerjasama ekonomi antar negara, pertukaran budaya antar negara dan lain sebagainya. Semua itu dipermudah oleh teknologi komunikasi dan transportasi. Sungguh masyarakat di manjakan dengan kondisi saat ini.

Semua negara di dunia merasakan dampak dari arus globalisasi ini termasuk negara-negara ASEAN, banyak dampak yang ditimbulkan dari globalisasi, selain berdampak positif seperti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meningkat pesat, juga berdampak pada perkembangan ekonomi negara. Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun ada juga dampak negatif dari globalisasi ini, antara lain luntarnya eksistensi jati diri bangsa negara ASEAN, karena mulai terlupakannya kearifan lokal negara yang sebelumnya merupakan modal untuk meningkatkan eksistensi jati diri bangsa. Oleh karena itu menjaga kearifan lokal negara ASEAN sangatlah penting untuk mengembalikan lagi eksistensi jati diri bangsa dan sebagai antisipasi arus globalisasi yang tak terkendali.

Memahami Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antargenerasi. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut.

Ciri-ciri kearifan lokal adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Menurut Sirtha, dalam buku *Sosiologi* kelas XII, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna sebagai berikut (Mariane, 2014): konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, Bermakna

sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat serta upacara daur pertanian, Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur.

Kearifan lokal mempunyai fungsi yang sangat baik untuk masyarakatnya sebagai modal dasar dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia Pendidikan seorang pendidik dapat berperan aktif dalam pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang berpihak pada kearifan lokal.

Kearifan lokal suatu daerah telah eksis secara turun temurun, sehingga untuk menjaga kelestariannya diperlukan upaya untuk melestarikannya agar kearifan lokal tetap bertahan di tengah arus globalisasi. Namun pada kenyataannya gempuran arus globalisasi terkadang lebih dahsyat dari upaya untuk melestarikan kearifan lokal sehingga banyak di temui di negara-negara ASEAN yang mulai luntur jati diri bangsanya karena semakin punahnya kearifan lokal daerahnya.

Kearifan Lokal di ASEAN

Negara-negara ASEAN sejak dahulu dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal negaranya. Hal inilah yang menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan negara ASEAN, yang menjadi daya Tarik wisatawan baik dalam maupun negara ASEAN. Kearifan yang unik dan menarik ini menjadi ciri khas masing-masing negara ASEAN yang bila di padukan menjadi sebuah pelangi yang indah mewarnai langit ASEAN. Setiap negara memiliki kearifan lokal yang unik, sebagai bangsa Indonesia kita sejatinya dapat menjaga kearifan lokal masing-masing daerah, dengan demikian kita turut menjaga kearifan lokal bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN.

Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, seperti batik, anyaman, kerajinan patung dan lain sebagainya. Kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti hutan lindung, pantai yang menawan dan potensi alam lainnya yang memesona. Kearifan lokal dalam mitos masyarakat, banyak cerita mitos antara percaya dan tiada, namun hal ini menjadi kearifan lokal seperti cerita tangkuban parahu, batu belah batu menangis dan lain-lain. Kearifan lokal dalam bidang pertanian, seperti sistem pertanian subak yang ada di Bali, terasering yang masih dipertahankan dalam pertanian. Kearifan lokal lainnya dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Banyak cerita budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya seperti cerita malin kundang dari Sumatra Barat, cerita sangkuriang dari Jawa Barat dan masih banyak cerita dan sastra lainnya.

Begitu banyak kearifan lokal di setiap negara. Banyak hal yang dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal suatu bangsa. Antara lain dengan memperkenalkan dan menggiatkan kembali kearifan lokal di tengah generasi muda yang mulai melupakan kearifan lokal daerahnya. Di dunia pendidikan seorang pendidik dapat memperkenalkan kearifan lokal kepada peserta didik di sekolah melalui kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Seperti memakai pakaian batik sekolah sesuai dengan hari yang telah di tentukan, memakai pakaian daerah di hari-hari besar nasional, memberikan tugas membuat video tentang kearifan lokal, dan lain sebagainya.

Mengantisipasi Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk interaksi yang lain. Masyarakat zaman sekarang tidak bisa menghindari globalisasi, sikap terbaiknya adalah menyikapi dengan bijak arus globalisasi. Dengan globalisasi banyak hal positif yang akan kita dapatkan, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan ekonomi negara khususnya negara ASEAN. Namun selain hal positif juga ada hal negatif dari arus globalisasi, seperti peniruan gaya hidup orang barat atau westernisasi, lunturnya eksistensi jati diri bangsa, dikarenakan mulai dilupakannya kearifan lokal daerah. Hal negatif seperti ini tidaklah kita inginkan. Diharapkan hadirnya globalisasi tidak dapat menghilangkan eksistensi jati diri bangsa. Oleh karena itu menjaga kearifan lokal suatu negara diharapkan benar-benar konsisten dilakukan oleh setiap negara di ASEAN, sehingga ciri khas setiap negara masih terjaga dengan baik.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi arus globalisasi seperti melestarikan permainan tradisional, makanan tradisional, olah raga tradisional, pakaian tradisional, Bahasa daerah, rumah adat, alat-alat music dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan mulai dari keluarga, dengan membiasakan bahasa daerah, berbicara yang sopan

dan santun. Di sekolah dapat diperkenalkan alat-alat musik, rumah adat, olah raga tradisional dan sebagainya. Dengan pembiasaan tersebut maka kearifan lokal dapat dilestarikan sehingga dapat mengantisipasi arus globalisasi.

Kearifan lokal mempunyai fungsi yang sangat baik untuk masyarakatnya sebagai modal dasar dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan seorang pendidik dapat berperan aktif dalam pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang berpihak pada kearifan lokal.

VLOG dan WCC

Pemanfaatan teknologi di sekolah dapat bersinergi dengan melestarikan kearifan lokal, seperti yang dilakukan oleh murid-murid di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan. Dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh gurunya yaitu kearifan lokal, murid melakukan liputan tentang kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah, seperti makanan tradisional yang sudah mulai dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang. Banyak anak remaja yang tidak mengenal kuliner Nusantara, hal ini dikarenakan banyaknya makanan dari luar negeri yang mudah didapatkan.

Globalisasi yang terjadi sekarang ini dapat juga dimanfaatkan secara positif di lingkungan SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan dengan mengadakan WCC, apa itu WCC? WCC adalah kepanjangan dari World Class Culture merupakan salah satu program di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris warga sekolah dengan menghadirkan *native speaker* dari negara lain melalui virtual. Adapun tema yang dikemukakan adalah tentang budaya masing-masing negara. Dalam WCC, perwakilan setiap negara hadir secara virtual menceritakan atau bahkan menampilkan budaya daerahnya atau kearifan lokalnya masing-masing. Mulai dari makanan khas daerah, tarian daerah bahkan kebiasaan masyarakat yang unik. Diharapkan dengan kegiatan ini murid, guru dan warga sekolah lainnya dapat meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris-nya dan mengenal kearifan lokal negara lain, sehingga menambah khasanah budaya bangsa.

Penutup

Masyarakat dan budaya tidak dapat dipisahkan. Budaya lahir dari suatu masyarakat, sedangkan setiap masyarakat pasti akan menghasilkan budaya. Sebagai bangsa yang berbudi luhur, tentunya kita dapat menjaga melestarikan budaya bangsa sebagai warisan nenek moyang melalui menjaga dan melestarikan kearifan lokal masing-masing negara di ASEAN, akan dapat membendung arus globalisasi yang melanda dunia saat ini.

Sebagai masyarakat yang mengikuti kodrat zaman, sejatinya kearifan lokal tetaplah dilestarikan, sematkanlah budaya bangsa dalam diri sehingga kita bisa bijak dalam era globalisasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri.*

Referensi

Maryati Kun, Juju Suryawati (2016). *Sosiologi* untuk kelas XII. Jakarta: Erlangga

SITI MUNAWARAH adalah guru dan penulis yang saat ini aktif mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA N 8 Kota Tangerang Selatan, Banten. Ia adalah penulis buku *Panduan Sukses Inobel, Mewarnai Kehidupan Anak*, dan beberapa buku antologi yang ditulisnya bersama-sama dengan kelompok penulis seperti Bimbingan Menulis Online, Rumah menulis, dan 30 DWC. Ia dapat dihubungi di email wawahaja374@gmail.com.

Dewi Laut sebagai Kearifan Lokal Maritim Asia

Yanti Heriyawati dan Afri Wita

Pendahuluan

Manusia diciptakan dari tanah (bumi), hidup di bumi, dan kembali ke tanah (bumi). Siklus kehidupan manusia berada di bumi. Tanah dan lautan sebagai isi bumi menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Nenek moyang kita seorang pelaut, sesungguhnya telah mewariskan tentang ajaran bagaimana menjaga laut sebagai sumber kehidupan di bumi. Laut bukan hanya sumber penghidupan untuk mata pencaharian, tetapi laut menyimpan banyak pengetahuan, keindahan, termasuk kekuatan spiritual. Nilai-nilai kearifan lokal dari kehidupan kelautan diturunkan salah satunya melalui mitos. Salah satu mitos yang dapat ditelusuri kearifan lokalnya adalah mitos dewi laut, yang diyakini oleh masyarakat laut di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Mitos menjadi salah satu cara dalam menjaga alam, karena di dalam mitos terdapat ajaran yang diwariskan serta diyakini. Mitos dewi laut memiliki relasi dengan ibu bumi, sehingga simbol ibu mengantarkan pada bagaimana cara menghormati dalam arti bagaimana pentingnya menjaga ekosistem laut.

Wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua wilayah demografi, yaitu Maritim dan Daratan. Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura termasuk dalam Maritim Asia Tenggara, sementara wilayah Daratan terdiri dari Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Isu maritim di ASEAN menjadi salah satu perhatian utama sehingga memiliki forum tersendiri untuk membahas isu dan meningkatkan kerja sama maritim antar negara ASEAN dan beberapa negara lain. Asia Tenggara dihubungkan oleh laut-laut yang juga terhubung dengan Samudera India dan Pasifik. Dalam konteks kelokalan masing-masing, setiap laut memiliki "penjaga" atau kekuatan supernatural yang juga dipahami sebagai dewa dewi laut dan dihormati oleh para pelaut maupun masyarakat pesisir sekitar. Namun demikian, Andaya (2017) berpandangan bahwa para dewa dewi laut ini wilayahnya terbatas atau dengan kata lain tidak dapat berpindah tempat. Ia mencontohkan Ratu Kidul yang dipercayai sebagai penguasa laut selatan namun tidak memiliki kewenangan di Pantai Cina atau Teluk Benggala. Demikian pula Palace Damsel yang dikenal sebagai dewi memancing di Vietnam Selatan hanya dapat diziarahi para pemujanya di kuilnya di Long Hai.

Dewi Laut di Cina dan Taiwan dikenal sebagai Mazu yang artinya ibu, nenek, atau nenek moyang maternal. Di samping itu, Mazu juga dikenal dengan beberapa nama seperti Mazupo di Fujian, Tin Hau di Canton, A-Ma di Macau, dan dengan julukan lain seperti Shennü dan Tongxian Lingnü. Singkatnya, ia dikenal sebagai Dewa Laut Asia yang dipuja oleh umat Buddha pesisir Jepang, Okinawa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Borneo, Melbourne dan San Francisco (Roorda, 2020). Taiwan membangun lebih dari 1000 kuil pemujaan untuk Mazu dan menyelenggarakan ziarah selama 8 hari pada festival kelahirannya, Festival Mazu, yang diperingati pada 23 Maret kalender Cina atau jatuh pada pertengahan April sampai pertengahan Mei pada kalender Masehi. Kuil-kuil pemujaan untuk Mazu bertebaran di berbagai titik lokasi tidak hanya di tanah kelahirannya di Meizhou. Salah satunya adalah di tepi air Joss House Bay yaitu Fat Tong Mun Tin Hau Old Temple yang digunakan berbagai kalangan untuk pemujaan kepada sang Dewi, meminta perlindungan selama pelayaran (Roorda, 2020).

Kisah Dewi Laut: Simbol Kemakmuran, Pesona, dan Kekuatan

Dewi laut sering dikisahkan sebagai seorang perempuan yang memiliki kelebihan dibanding perempuan lain di dunia. Di Taiwan, Mazu sangat dikenal sebagai dewi laut yang dikisahkan dari sosok perempuan yang dilahirkan di pulau Meizhou bernama Lin Mo Niang. Ia memiliki kemampuan istimewa dapat membaca tanda alam dari laut, semacam alarm bahaya laut. Sejak kecil telah memiliki kekuatan magis tubuhnya sering mengalami trance untuk bisa menyelamatkan warga yang terbawa hanyut oleh ombak di laut. Mitos Maju sebagai dewi laut ditandai dengan

pemujaan pada kuil yang diikuti dengan berbagai ritual dan festival (Roorda, 2020). Di Cina, Dewi Mazu adalah karakter yang tidak nyata. Sosoknya hasil konkretisasi identitas dewi. Fakta bahwa air dianggap sebagai unsur negatif, maka Dewa Laut difemininkan.

Pada pertengahan abad ke-13, perdagangan dan transportasi laut Fujian sangat berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi perbendaharaan kerajaan. Untuk pelayaran yang nyaman dan damai, sebelum dan sesudah setiap perjalanan, para pelaut selalu berdoa kepada Mazu. Akibatnya, untuk mendorong perkembangan perdagangan laut, raja-raja Cina menobatkan Mazu. Dahulu, ritual di kuil Mazu dilakukan secara khushyuk oleh para birokrat dinasti Qing, sementara masyarakat mempersembahkan dupa, berdoa, dan memasukkan uang ke dalam kotak sumbangan. Hewan kurban terdiri dari ayam, bebek, babi, kambing, dan ikan. Pada tahun 1979 terjadi perubahan akibat perang perbatasan Vietnam-China, hampir seluruh rakyat China henggang. Ketika para imigran Cina telah hidup bersama dengan orang-orang Kinh di Pho Hien (di utara Vietnam) selama lebih dari empat abad, Dewi Mazu kemudian diberi nama Tianhou di Pho Hien itu sebabnya papan nama dua kuil bertuliskan "Kuil Tianhou" (Hoa Ly & Min Phuong: 2021).

Seperti halnya di Taiwan dan Cina, Indonesia memiliki mitos tentang dewa laut dijelmakan pada Nyi Roro Kidul di wilayah laut selatan Jawa. Kisahnya, digambarkan seorang perempuan tercantik secepat yang dikucilkan di lingkungan keluarga Raja kemudian berkelana menjelajahi pesisir Selatan, hingga dia tenggelam di laut kemudian menjelma menjadi ratu penguasa laut selatan.

Mitos kekuasaannya memberi tanda bagi masyarakat untuk waspada terhadap laut selatan yang dikenal dengan besarnya ombak Samudera Hindia, juga terdapat palung-palung laut yang dalam, yang bisa membahayakan. Cara memperingatkan manusia dengan mengikuti pikiran mitisnya, bahwa hanya Ratu Kidul yang mampu menaklukkan ganasnya laut selatan. Sosok Ratu Kidul dimaknai sebagai ratu penjaga laut agar tidak membahayakan jiwa manusia, sebaliknya memberikan kemakmuran bagi manusia. Kekuatan mitosnya diejawantahkan pada ritual tahunan di Yogyakarta pada upacara *tinggalan jumenengan* (peringatan kelahiran) raja, dan di Jawa Barat melalui ritual *larung saji* serta artefak kamar khusus Nyi Roro Kidul dengan lukisan legendaris Basuki Abdullah (Heriyawati, 2019).

Di Kamboja ditemukan suku Campa yang juga menyebar di wilayah Vietnam. Campa adalah kelompok etnis yang cukup dikenal di perniagaan maritim di Asia Tenggara dan sebagai orang bahari hidupnya berpindah-pindah. Persebaran mereka umumnya terkonsentrasi di Provinsi Kampong Cham di Kamboja. Etnis Campa memiliki ritual memanggil roh laut, kemudian pesta menari juga membacakan mantra selama tiga hari di atas panggung yang ditinggikan dan dihias (Reid, 2004: 61). Pemujaan terhadap dewi laut diwujudkan melalui artefak tempat-tempat sakral dan ritual-ritual yang melekat dalam konteks perayaan.

Di Vietnam Dewi Ibu disebut Đạo Mẫu. Ritual pemujaan terhadap Dewi Ibu (Đạo Mẫu) melalui para cenayang yang kerasukan roh selama ritual, kemudian dewi hadir sesaat yang dipersonifikasikan melalui tarian penanda turunnya roh perempuan (Senepin, 2021). Ritual mengkonstruksi rasa saling identifikasi atas dasar kebutuhan bersama. Harapan komunal diekspresikan dalam fantasi individu. Setiap individu memiliki kesempatan mengeskpresikan diri pada ruang bebas dari tuntutan keseharian, tetapi dalam ruang sacral. Ritual menjadi ruang dalam membangun kebersamaan, terikata dalam system mitos yang telah dirumuskan bersama dan menjadi kesepakatan bersama. Dewi dengan segala simbol yang melekatnya telah mempersatukan system berpikir untuk menjaga kelestarian kehidupan.

Mitos: Sistem Berpikir Masyarakat Maritim

Mitos adalah sebuah proses—bukan peristiwa—dihadapkan pada masalah kronologi dengan ukuran referensi ke peristiwa sejarah. Transformasi merupakan hasil elaborasi mitos yang menghasilkan referensi baru dalam narasi yang telah dikodekan sebelumnya. Oleh karenanya mitos bukan sebuah produk sampingan (Yves Manguin, 1991), tetapi wujud sistem berpikir masyarakatnya. Kekuatan imajinatif mitos dapat memobilisasi dan mengubah sentimen warga Tionghoa. Kemampuan mitos untuk mengkomunikasikan kepada inti dari pemikiran terdalam nenek moyang yang diperlakukan sebagai kebenaran alami. Studi tentang mitos salah satunya berguna dalam menelusuri estetika

dalam kemurnian dan kesederhanaannya (Mcneal, 2012). Arrow memandang mitos sebagai 'jenis pengalaman komunal tertentu [dan] bentuk khusus dari fantasi bersama' berdasar keinginan naluriah tertentu dan terdiri dari 'versi yang berbeda atau edisi yang berbeda sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik intra psikis atas [keinginan itu]. Ekspresi mitologi dipengaruhi oleh eksternalisasi, defensif, perubahan artistik. Arrow menunjukkan bahwa mitos adalah instrumen sosialisasi yang memperkuat dan memantapkan kelompok budaya. (Batller, 2017: 228).

Mitos dewi laut memberikan gambaran tentang bagaimana laut harus diperlakukan sebagai ibu. Laut sebagai tempat lahir dan hidup. Mitos mengajarkan bagaimana menjaga laut sama sakralnya dengan bagaimana menjaga ibu. Merusak laut sama dengan merusak kehidupan manusia. Kehilangan laut sama dengan kehilangan ibu kemudian menjadi kemusnahan bagi siklus kehidupan manusia. Dengan segala kemungkinannya, manusia sering tidak membangun relasi yang bersahabat dengan laut. Manusia dengan keserakahannya mengeksploitasi dan yang sederhana pun sering tidak menyadari menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini harus dihentikan, dengan dikembalikan pada pembacaan terhadap mitos dewi laut. Lautan sangat luas dan dalam. Untuk menemukan ibu kita lagi, kita tidak dapat menantangnya tetapi harus mendekatinya dengan cinta dan rasa hormat, melintasi planet biru dengan perahu yang sama dengan komunitas kecil yang selalu hidup di laut dan laut. Laut adalah ibu kita (Dalla Costa, 2014).

Bumi dan lautan merupakan sumber kehidupan bagi kita. Tanpa Bumi, tidak ada kehidupan; tanpa lautan dan air, tidak ada kehidupan. Namun hubungan vital antara manusia dan laut, antara manusia dan Bumi, telah dirusak oleh eksploitasi kapitalis dan patriarki. Penangkapan ikan yang berlebihan, industri akuakultur, dan peracunan, merupakan kapitalisme yang membunuh kehidupan laut. Yang menjadi korban eksploitasi terutama masyarakat pesisir. Nelayan terganggu mata pencahariannya. Mariarosa Dalla Costa dan Monica Chilese dalam *Our Mother Ocean*, menyuarakan tentang keadaan mengkhawatirkan tidak hanya perikanan di bumi ini tetapi juga kesehatan ikan dunia. Mereka menunjukkan dilema yang dihadapi pergerakan nelayan di berbagai benua, terjebak di antara kepentingan ekonomi, kebutuhan untuk menangkap ikan secara berkelanjutan, dan tekanan kapitalisme multinasional. Buku ini mengajak bertindak bijaksana dan perlu bagi lautan dan bagi kita yang hidup dari lautan.

Laut mesti dikembalikan kepada Mitosnya. Dewi laut penting kehadirannya dalam kehidupan masyarakat laut. Kearifan lokal yang mengajarkan sakralnya lautan perlu disuarakan dengan lantang, agar pemaknaan tidak hanya pada lingkungan masyarakat laut, tetapi dipahami oleh semua pihak terutama bagi mereka yang selalu mengeksploitasi laut. Bagi bangsa bahari laut diyakini memiliki kekuatan gaib, dan dewi laut adalah penghuninya sebagai penjaga laut. Cerita tentang dewi laut jelas digambarkan bagaimana sosok dan pesona dewi laut dengan segala kekuatannya. Hal ini menjadi rambu-rambu bagi manusia untuk tidak mengeksploitasi laut, sebaliknya menjaga sebaik-baiknya ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Dalam mitos digambarkan, jika manusia merusak laut, maka sang dewi laut akan murka dan bencana akan menghantui kehidupan manusia.

Penutup

Menjaga perairan, menjaga laut, menjaga bumi, lestari kehidupan. Laut simbol ibu. Dewi laut adalah mitosnya. Menjaga laut dan sumber daya laut selama manusia memiliki nafas kehidupan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Ancaman terhadap kerusakan laut dan kematian terhadap ekosistem laut sudah sangat dekat. Laut akan menjelma menjadi wadah beracun limbah dunia. Mengembalikan laut pada mitos kemakmuran sekaligus kesakralannya perlu dilakukan secara masif. Perlindungan perairan Bumi sama pentingnya dengan ekonomi, politik, dan implikasi spiritual seperti tanah dan hutannya.

Gambaran laut sebagai medan yang membahayakan dalam mitos dewi laut menginsyarkan manusia tidak hanya untuk waspada terhadap kekuatan laut, tetapi juga agar manusia tidak semena-mena terhadap laut. Misteri laut mengarahkan pula untuk dipelajari, sehingga laut sering identik dengan medan pengetahuan yang diperlukan kepekaan dalam menyelaminya. Laut memiliki pesona keindahan alamnya juga kecerdasan pengetahuannya. Laut yang

luas, disimbolkan dengan dewi laut yang memiliki keberanian dan kekuatan. Simbolnya merepresentasikan kearifan lokal untuk mengkonstruksi wawasan yang luas menerjang kedangkalan dan kekerdilan. *

Referensi

- Andaya, B. W. (2017). Seas, oceans and cosmologies in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3), pp 349–371 October 2017. The National University of Singapore, 2017 doi:10.1017/S0022463417000534
- Heriyawati, Yanti. 2019. Mitos Ratu Kidul sebagai Daya Pikat Festival Pesisir. Dalam Buku : Perempuan Indonesia Dulu dan Kini: Membangun Kecerdasan Bangsa di Bumi Nusantara. Bandung: Unpad Press dan Pustaka Pelajar.
- Leon Balter (1969) The Mother as Source of Power, *The Psychoanalytic Quarterly*, 38:2, 217-274, DOI: 10.1080/21674086.1969.11926489
- Ly, P. T. H., & Phuong, T. H. M. (2021). Mazu-The Chinese Sea Goddess Transforming into Mother Goddess in Vietnam Urban Areas-A Case Study at Mazu Temple in Pho Hien, Vietnam. *SUVANNABHUMI*, 13(2), 37-67.
- Manguin, Pierre-Yves, 1991, "The Merchant and the King: political myths of Southeast Asian coastal polities", *Indonesia*, 52, p. 41-54.
- Mcneal, Robin (2012). Constructing Myth in Modern China. *The Journal of Asian Studies*, 71, pp 679-704 doi:10.1017/S0021911812000630
- Reid, Anthonu 2004. Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Roorda, E. P. (2020). *The Ocean Reader: History, Culture, Politics*. Duke University Press.
- Senepin Camille (2021). An Imagined Worship: Localities and Creation of Representations in Contemporary Đạo Mẫu. *Russian Journal of Vietnamese Studies*, Special issue: 92–102.

YANTI HERIYAWATI (*lecturer, researcher, director*), kelahiran Majalengka, telah menyelesaikan studi S1 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung serta studi S2 dan S3 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagai dosen sekaligus Direktur Pascasarjana ISBI Bandung. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai presenter terbaik peneliti Hibah Doktor dari Dikti dan peneliti terbaik bidang seni budaya dari BP3IPTEK Jawa Barat. Karya Buku yang telah diterbitkan oleh Ombak Tahun 2016 dengan judul "Seni Pertunjukan dan Ritual". Menulis *book chapter* dan artikel telah dimuat di jurnal Panggung, Kagunan, Mudra, Kawistara, dan Katarsis. Editor in Chief Pada Jurnal Pantun dan *Reviewer* Jurnal Musik Etnik Nusantara. Topik riset terbarunya adalah terkait *Floating Heritage Festival* yang didanai Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 – 2025. Ia dapat dihubungi melalui alamat email: yheriya@gmail.com

AFRI WITA adalah staf pengajar di jurusan Teater Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung sejak tahun 2005 hingga sekarang. Bertugas sebagai kepala pusat penelitian ISBI Bandung sejak 2019 – 2023. Ia terlibat aktif dalam penelitian dan publikasi seni budaya. Ketertarikan dan fokus utama penelitiannya berada dalam ranah cultural studies, gender, literasi, dan seni budaya. Sejak 2020 – 2025 tergabung dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) Seni Budaya Maritim. Beberapa publikasinya selain dalam bentuk publikasi ilmiah juga dalam bentuk tulisan kreatif seperti naskah/skenario, puisi, buku bergambar, dan narasi karya seni maritim. Ia dapat dihubungi melalui alamat email: afriwita150@gmail.com.

Cerita Rakyat Sebagai Media Silaturahmi Kultural Negara-Negara ASEAN

Erawati Heru Wardhani

Pendahuluan

ASEAN didirikan oleh lima negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menggalang kerjasama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, ada lima negara yang kemudian ikut bergabung, yaitu Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos dan Kamboja. Awal dibentuknya ASEAN dilatarbelakangi oleh persamaan yang dimiliki beberapa negara di Asia Tenggara. Persamaan itu meliputi persamaan geografis, persamaan sejarah, persamaan budaya dan persamaan kepentingan.

Persamaan geografis karena negara-negara ASEAN sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sama-sama terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan sama-sama berada di antara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Persamaan sejarah karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah pernah dijajah Bangsa Eropa kecuali negara Thailand. Negara-negara ASEAN juga memiliki budaya, bahasa dan tata kehidupan yang hampir sama, karena sama-sama berasal dari rumpun Melayu Austronesia. Sedangkan kesamaan kepentingan karena negara-negara ASEAN memiliki tujuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.

Salah satu tujuan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah untuk meningkatkan solidaritas dan persatuan ASEAN dengan membangun sebuah identitas bersama yang dapat mendukung pemahaman dan rasa saling menghormati yang lebih tinggi di tengah Masyarakat ASEAN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kerja sama kebudayaan ASEAN sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan persatuan di tengah perbedaan (*unity in diversity*), serta memperdalam rasa saling pengertian (*mutual understanding*) di antara negara anggota ASEAN dan masyarakatnya. Lebih jauh lagi, *ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016 – 2025* memanfaatkan budaya sebagai alat pemersatu masyarakat ASEAN untuk membentuk satu identitas ASEAN, tapi di saat bersamaan tetap mempertahankan keragaman budaya masing-masing negara anggotanya.

Nilai-nilai identitas yang perlu dinarasikan terutama kepada generasi muda di semua negara ASEAN adalah kesamaan dan kemiripan yang dimiliki bersama. Negara-negara ASEAN memiliki kesamaan dalam aspek kebudayaan, seperti bahasa, agama, kesenian, nilai hidup dan makanan. Salah satu kerjasama dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN adalah dalam bidang literasi dan sastra di ASEAN. Budaya bukan hanya hal konkret seperti lagu daerah atau rumah adat, namun juga menyangkut hal yang lebih dalam berupa nilai-nilai yang kemudian tertuang dalam simbol berupa karya (Abidin, 2020:14). Salah satu karya yang bisa memunculkan identitas bersama negara ASEAN adalah cerita rakyat.

Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat dituangkan dalam bentuk karya sastra, salah satunya cerita rakyat. Cerita rakyat mengekspresikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam suatu masyarakat. Beberapa aspek dalam kehidupan tentu akan lekat dan mempengaruhi cerita rakyat pada suatu daerah atau negara. Selain aspek budaya juga aspek agama, sejarah, politik dan lainnya. Danandjaya (2007) menyatakan bahwa cerita rakyat merupakan bagian dari folklor lisan yang masih murni. Folklor sendiri merupakan kebudayaan suatu kelompok dalam bentuk apa saja. Folklor disampaikan secara tradisional dalam versi yang berbeda dalam bentuk lisan yang disertai dengan gerakan isyarat atau alat pembantu pengingat.

Cerita rakyat dibuat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur pada suatu masyarakat ke generasi penerusnya. Cerita itu dituturkan secara lisan dari mulut ke mulut dan diceritakan secara turun temurun. Seperti yang dinyatakan oleh Djamaris (1993:15) bahwa cerita rakyat merupakan golongan cerita yang hidup di kalangan rakyat dan hampir semua lapisan dan berkembang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran nilai-nilai dari generasi pendahulu bisa dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerusnya melalui cerita rakyat.

Dundes (dalam Sudikan, 2001:162) mengatakan bahwa secara umum, terdapat fungsi sosial cerita rakyat yaitu membantu pendidikan anak muda, meningkatkan perasaan solidaritas suatu kelompok, memberi sanksi sosial agar orang berperilaku baik atau memberi hukuman sebagai sarana kritik sosial, memberikan suatu pelarian yang menyenangkan dari kenyataan dan mengubah pekerjaan yang membosankan menjadi permainan.

Persamaan Cerita Rakyat Indonesia, Brunei dan Malaysia

Dalam kaitannya dengan cerita rakyat negara-negara ASEAN, kita menemukan cerita-cerita rakyat dari negara serumpun ini memiliki kesamaan motif cerita. Danandjaya (2005) mengatakan bahwa terjadinya kesamaan motif dalam cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu teori-teori monogenesis (satu asal) yang menganggap terjadinya persamaan disebabkan oleh penyebaran suatu kesatuan cerita (plot) atau motif cerita dari satu tempat ke tempat lain dan teori-teori poligenesis (banyak asal) yang menganggap terjadinya persamaan disebabkan oleh penemuan sendiri-sendiri.

Cerita rakyat Indonesia, *Malin Kundang* memiliki persamaan dengan cerita rakyat dari Brunei Darussalam yaitu *Nakhoda Manis* dan cerita rakyat dari Malaysia yaitu *Si Tanggang*. Nilai atau amanat yang ingin ditanamkan dari tiga cerita rakyat ini adalah ajaran untuk tidak durhaka kepada orang tua, terutama kepada Ibu. Durhaka kepada ibu adalah dosa besar dan bisa berakibat fatal. Dalam tiga cerita rakyat tadi digambarkan akibat durhaka kepada ibunya seorang anak kemudian dikutuk menjadi batu.

Kisah *Malin Kundang* (Indonesia) menceritakan Malin Kundang yang hidup miskin bersama ibunya. Ketika dewasa, Malin merantau karena ingin mengubah nasib. Singkat cerita, Malin sukses menjadi saudagar kaya raya. Kemudian ia menikah dengan putri dari saudagar kaya lainnya. Sayang, Malin tidak mau mengakui asal muasalnya karena ia malu berasal dari keluarga miskin. Suatu ketika, Malin ada urusan dagang ke kampung halamannya. Ibunya yang selama ini menanti kedatangan Malin, dengan suka cita datang menemui Malin dan istrinya. Tetapi Malin malu dengan keadaan ibunya yang tua dan miskin. Ia mengingkari itu ibunya dengan mengatakan pada istri dan orang-orang bahwa ibunya sudah meninggal. Ibunya yang sangat sedih berdoa agar anaknya sadar. Saat itulah, tiba-tiba petir menyambar Malin. Tubuh Malin langsung kaku berubah menjadi batu. Konon, batu menyerupai Malin Kundang masih dapat ditemui di Pantai Air Manis, sebelah selatan Kota Padang, Sumatera Barat.

Nakhoda Manis (Brunei) bercerita tentang Nakhoda Manis yang tinggal bersama ibunya yaitu Dang Ambon. Hidup mereka berkecukupan karena memiliki harta peninggalan ayah Nakhoda yang telah meninggal. Ketika dewasa, Nakhoda mengembara untuk mencari pengalaman. Selama anaknya merantau ibunya selalu mendoakan Nakhoda dan rajin menyedekahkan hartanya demi keselamatan anaknya. Setelah Nakhoda sukses dan kaya raya, ia tidak mau mengakui ibunya yang sekarang miskin. Karena durhaka kepada ibunya, atas izin Allah, kapal yang ditumpangi Nakhoda tenggelam diterjang badai. Penampakan menyerupai kapal saat ini dapat dilihat di daerah Jong Batu.

Si Tanggang (Malaysia) menceritakan sepasang suami istri bernama Si Talang dan Si Deruma yang mempunyai anak laki-laki bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sangat miskin. Sejak kecil Si Tanggang bercita-cita menjadi orang kaya. Pada suatu hari, ketika Si Tanggang sudah beranjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di sungai di kampungnya. Si Tanggang meminta kepada nakhoda untuk menjadikannya sebagai anak kapal. Karena Si Tanggang bisa bekerja, nakhoda itu mengajaknya berlayar. Singkat cerita Si Tanggang yang rajin bekerja akhirnya menggantikan nakhoda dan kemudian dipanggil Nakhoda Tanggang. Tanggang menjadi orang kaya dan terkenal. Ia kemudian menikah dengan putri Sultan. Suatu ketika, kapal Si Tanggang berlabuh di sungai kampungnya. Dengan bahagia kedua orangtua Si Tanggang menemuinya. Tetapi Si Tanggang malu memiliki bapak dan ibu yang tua dan miskin. Ia tidak mau mengakui mereka sebagai orang tuanya, bahkan mengusirnya. Deruma, ibu Si Tanggang sangat sedih. Saat ibunya berdoa agar Si

Tanggung sadar, tiba-tiba badai menghantam kapal Si Tanggang. Kapal itu pecah dan seluruh isinya termasuk Si Tanggang berubah menjadi batu. Saat ini batu yang menyerupai kapal dan Si Tanggang dapat dijumpai di Batu Caves, Selangor.

Akar Budaya Negara Indonesia, Brunei dan Malaysia

Wilayah Asia Tenggara dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Daratan berbentuk semenanjung (*Mainland Southeast Asia*) yaitu wilayah yang terletak di Benua Asia atau terletak di Jazirah Indochina. Terdiri atas Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja dan Malaysia bagian barat. 2. Daratan berupa kepulauan (*Insular Southeast Asia*) yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan maupun pulau. Terdiri atas Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Philipina dan Malaysia bagian timur.

Indonesia, Brunei dan Malaysia memiliki akar budaya yang sama yaitu Melayu. Negara-negara ini tumbuh dalam satu kultur Melayu sepanjang Selat Malaka. Etnis Melayu ini tersebar di sekitar Asia Tenggara. Secara geografis, persaudaraan rumpun Melayu ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka. Tidak heran jika negara-negara itu memiliki keterkaitan akar budaya dan persamaan agama, dalam hal ini agama Islam yang dianut mayoritas penduduk tiga negara ini.

Nilai-nilai budaya Melayu mengajarkan sopan santun, beradab dan bermartabat. Agama Islam juga sangat menjunjung adab, termasuk mengajarkan kita untuk memuliakan seorang ibu. Nilai-nilai Pendidikan agar taat pada orang tua dan tidak berlaku sombong inilah yang diangkat dalam cerita rakyat berjudul *Malin Kundang*, *Nakhoda Manis* dan *Si Tanggang*. Bisa disimpulkan bahwa persamaan motif cerita rakyat dari Indonesia, Brunei dan Malaysia bisa terjadi karena Indonesia, Brunei dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal ajaran nilai-nilai budaya Melayu dan ajaran agama Islam.

Jika ditilik secara geografis, Indonesia, Brunei dan Malaysia sama-sama termasuk dalam wilayah yang berbentuk kepulauan. Ketiga negara ini ternyata memiliki cerita rakyat dengan kesamaan motif. Tidak menutup kemungkinan di antara negara-negara yang berbentuk semenanjung seperti Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja yang termasuk Jazirah Indochina juga memiliki cerita rakyat yang mirip. Ini dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

Cerita Rakyat Media Silaturahmi Negara-Negara ASEAN

Bagaimana cerita rakyat dapat dijadikan media silaturahmi kultural antar negara-negara ASEAN. Dengan saling mengenal cerita rakyat dari masing-masing negara ASEAN akan lahir pemahaman lintas budaya. Berdasarkan pemahaman ini ditemukan kesamaan dan kemiripan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat negara Indonesia, Brunei dan Malaysia. Jati diri yang dimiliki oleh Indonesia, Brunei dan Malaysia ini tentu harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda tidak hanya di tiga negara tersebut namun juga negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Kesamaan akar budaya yang tercermin dalam cerita rakyat tadi dapat menguatkan solidaritas dan persatuan antar negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini relevan dengan salah satu fungsi cerita rakyat menurut Dundes yang disebutkan pada awal pembahasan yaitu, meningkatkan solidaritas suatu kelompok.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip ASEAN yang salah satunya adalah menghormati budaya, bahasa dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Dengan saling menghormati budaya dan mengedepankan nilai-nilai yang dianut bersama maka akan tercipta solidaritas dan rasa kebersamaan antar masyarakat negara ASEAN. Narasi identitas ini juga secara internal ASEAN akan menjembatani berbagai aspek, yaitu aspek keragaman budaya itu sendiri, aspek *awareness* serta aspek soliditas dan solidaritas. (Abidin, 2020: 17). Di antara keanekaragaman negara-negara ASEAN, persamaan nilai dalam cerita rakyat dapat dijadikan simbol universal yang menyatukan mereka.

Salah satu *event* yang pernah diadakan dalam kaitannya dengan kerjasama budaya negara ASEAN adalah *ASEAN Literary Festival* (ALF) pada 2017 silam bertempat di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta. Saat membuka acara tersebut, Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyatakan, "Sastra merupakan pintu masuk yang efektif untuk saling belajar satu sama lain, menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menjalin koneksi yang kuat sesama negara ASEAN. Sejarah telah membuktikan itu." Pernyataan ini semakin

menguatkan bahwa sastra, salah satunya cerita rakyat memang memiliki peran yang signifikan dalam mempersatukan negara-negara ASEAN.

Cerita rakyat membuktikan bahwa meski negara-negara ASEAN terpisah secara geografis, memiliki perbedaan sistem pemerintahan, perbedaan politik dan lainnya, namun mereka memiliki hal lebih besar yang bisa menyatukan yaitu nilai-nilai yang dianut. Meminjam kalimat yang diucapkan Morgan Freeman, aktor asal Amerika Serikat saat seremoni pembukaan *World Cup 2022* di Qatar baru-baru ini: "Apa yang mempersatukan kita lebih besar dari apa yang memisahkan kita. Kita adalah satu suku besar dan bumi adalah tenda kita. Bersama-sama kita dalam mengajak semua orang untuk bersatu." Ungkapan ini bisa digunakan untuk menggambarkan persatuan ASEAN: "Apa yang mempersatukan negara-negara ASEAN lebih besar dari apa yang memisahkannya. Negara-negara ASEAN adalah satu keluarga besar. Bersama-sama, negara-negara ASEAN mengajak semua orang untuk bersatu." Seperti yang disebutkan dalam QS. Al Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Cerita rakyat bisa menjadi media untuk saling mengenal antar masyarakat negara-negara ASEAN. Silaturahmi budaya ini yang kemudian dapat memunculkan kesadaran bahwa mereka berasal dari budaya yang sama, keluarga yang sama.*

Referensi

- Abidin, Yumetri (2020). *Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS.
- Danandjaya, James (2007). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Djamaris, Edward (1993). *Menggali Khasanah Sastra Melayu Klasik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farid, Hilmar (2017). *Sastra Pintu Masuk Efektif untuk Eratkan ASEAN*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/06/08/2017/hilmar-farid-sastra-pintu-masuk-efektif-untuk-eratkan-asean/>
- Indraswati, Ratih (2014). *Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/1246>
- Ningsih, Widya Lestari (2022). *Sejarah Berdirinya ASEAN*. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/10/110000679/sejarah-berdirinya-asean?page=all>
- Sudikan, Setya W. (2001). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.

ERAWATI HERU WARDHANI adalah penulis, penerjemah dan pendidik anak usia dini. Meski telah menulis berbagai genre tulisan, alumni Sastra Perancis UNPAD ini lebih banyak menulis dan menerjemahkan cerita anak. Kecintaan pada anak-anak mendorongnya untuk mendirikan Bintari Preschool. Tahun 2018 memutuskan kuliah lagi di FKIP - PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tangerang dan lulus sebagai Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini pada pertengahan 2022 dengan predikat *cum laude*. Ia telah menerjemahkan komik, majalah, novel, grafik novel dan buku anak dari Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis di Penerbit Gramedia. Prestasi yang terakhir diraih dalam dunia penerjemahan, terpilih sebagai Penerjemah Buku Cerita Anak dari Bahasa Perancis yang diselenggarakan Kemendikbud tahun 2021. Dalam dunia penulisan, telah menulis beberapa buku karya nonfiksi remaja dan buku fiksi anak. Menulis artikel dan Catatan Perjalanan untuk media cetak. Beberapa cerpennya pernah dimuat Majalah Bobo. Pernah menjadi pengisi tetap cerpen anak Majalah Mombi (Gramedia). Penghargaan dalam dunia penulisan: 1. Nominator Buku Islami Terbaik Kategori Fiksi Anak, Islamic Book Award 2014. 2. Pemenang I Lomba Penulisan Buku Bacaan Anak SD, Kemendikbud 2018. 3. Penulis Terpilih dalam Seleksi Penulis Gerakan Literasi Nasional, Kemendikbud 2019. 4. Pemenang I Lomba Penulisan Cerita Rakyat untuk Jenjang Membaca Lancar, Kantor Bahasa Banten, Kemendikbud 2019. 5. Pemenang Harapan Lomba *E-book* Konten Kanal PAUD, Kemendikbud 2019. 6. Pemenang Sayembara Menulis Bahan Bacaan Kelas 5 SD yang diselenggarakan Kantor Bahasa Lampung dan Kantor Bahasa Bangka Belitung (2021). 7. Memiliki Sertifikat Kompetensi Penulisan Buku Nonfiksi – BNSP 2021.

Ia dapat dihubungi melalui email: erawati.taufan@gmail.com.

Prospek Masa Depan Masyarakat ASEAN

Aan Rukmana

Pada tahun 2005 lalu terbit buku *Can Asians Think?* Karya Kishore Mahbubani yang sempat menghebohkan pemikiran para pakar dan akademisi di banyak universitas dunia. Dengan judul buku yang provokatif tersebut, Kishore Mahbubani seakan mempertanyakan bagaimana sebenarnya kemampuan berpikir masyarakat Asia? Meski bernada pertanyaan kritis dan terdapat unsur kemendesakan untuk menjawabnya, akan tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan suatu diskursus pemikiran yang tidak pernah kunjung selesai dan akan selalu aktual. Buku lain yang sempat menghebohkan pemikiran tentang masyarakat Asean yaitu buku yang ditulis oleh To Thi Anh yang diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia pada tahun 1984 dengan judul *Nilai Budaya Timur dan Barat, Konflik atau Harmoni?*

Buku yang ditulis oleh budayawan dan cendekiawan Vietnam ini menarik karena berusaha membangun sintesa masyarakat ASEAN dengan dengan perspektif ketajaman nalar seperti Albert Einstein di Barat dan kearifan berpikir Sang Budha di Timur sebagaimana tergambar dalam cover bukunya. Buku lainnya yang dapat dijadikan rujukan yaitu buku karya Ng Aik Kwang pada 2001 lalu yang berjudul *Why Asians Are Less Creative than Westerners* yang berisikan perbandingan etos kerja masyarakat Asia dan Barat. Dari beberapa buku tersebut setidaknya kita akan mendapatkan gambaran bahwa kajian tentang Asia, termasuk Asean di dalamnya akan senantiasa menarik dan selalu aktual apalagi jika ditinjau dari sisi prospek pengembangan budaya yang ada.

Saya teringat pada tahun 2018 lalu bertemu dengan Chrish Herve seorang CEO dari Prancis yang tinggal di Indonesia. Pada saat itu kami mendiskusikan terkait etos kerja masyarakat Asean dan perbandingannya dengan masyarakat Barat. Jadi menurut Chrish, masyarakat Asean terbiasa kreatif dalam menghadapi suatu masalah di pekerjaan. Jika ada suatu masalah, masyarakat Asean punya kecenderungan untuk mengambil jalan lain, tanpa harus menabrak masalah yang ada. Berbeda halnya dengan masyarakat Barat yang cenderung memecahkan masalah tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan langkah lainnya. Dari sisi model berpikir dapat dikatakan masyarakat Asean memiliki cara berpikir kreatif (*creative thinking*) sedangkan masyarakat Barat lebih cenderung memiliki jalan berpikir kritis (*critical thinking*).

Karakteristik Masyarakat ASEAN

Masyarakat Asean, sebagaimana sudah dibahas oleh banyak pakar di atas, memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Keunikan karakteristik masyarakat Asean berasal dari beberapa keyakinan dan budaya yang tumbuh di dalamnya.

Pertama, masyarakat Asean lebih menekankan pola hidup harmoni di atas kultus persona. Dalam hal ini, kehidupan bermasyarakat jauh di atas kehidupan individu. Gagasan yang lebih menekankan pola hidup individualis akan mendapat tantangan hebat dalam masyarakat Asean. Hidup rukun dengan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan menjadi ciri khas masyarakat Asean. Kehidupan harmoni baik dengan sesama manusia maupun dengan alam. Manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos. Relasi yang dibangun di antara sesama manusia adalah relasi subjek, pun demikian relasi yang dibangun dengan alam semesta. Bentangan alam yang luas tidak menjadi objek eksploitasi, melainkan menjadi rumah bagi manusia membangun peradabannya.

Itu juga yang melatarbelakangi seni lukis yang berkembang di wilayah ASEAN di mana manusia divisualkan dengan citra lebih kecil daripada alam. Berbeda halnya dengan budaya Barat di mana kultus persona dan individu berada di atas segala-galanya. Hubungan antar manusia adalah hubungan rasional dan logis serta sarat dengan kepentingan individu. Maka dari itu, hak-hak individu mendapatkan tempatnya yang sangat luas dalam tradisi Barat. Relasi antara manusia dan alam pun merupakan relasi antara subjek dan objek. Alam merupakan objek material dan hayati yang memang ada untuk kepentingan manusia. Posisi manusia secara ontologis berada jauh di atas eksistensi alam semesta.

Kedua, cara berpikir masyarakat Asean berbeda dengan cara berpikir masyarakat Barat pada umumnya. Jika Kishore Mahbubani mempertanyakan cara berpikir masyarakat Asia, tentu yang dimaksudkannya adalah cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir Barat. Budaya Barat yang memang dibentuk secara rasional, logis dan individual berbeda halnya dengan cara berpikir manusia Asean yang memang bercirikan sintesis, intuitif dan komunal. Ini juga yang mendorong masyarakat Asean cenderung lebih mudah adaptif dengan berbagai problem bahkan seringkali bisa berdamai dengan masalah yang jika dipandang dari kacamata Barat merupakan suatu kemunduran dan tidak *problem-solving oriented*.

Ketiga, masyarakat Asean masih mempertahankan tradisi hingga saat ini. Tradisi di sini dipahami sebagai transmisi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Coba saja kita perhatikan bagaimana masyarakat Asean tidak bisa hidup lepas dari tradisi. Misalnya ketika datang hari-hari besar keagamaan, seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina dan Thailand memiliki model ekspresi keagamaan yang berbeda dengan apa yang dikembangkan di dalam masyarakat Barat pada umumnya. Saya sendiri pernah menyaksikan perayaan Natal di dua negara sekaligus yaitu Italia dan Filipina. Persis pada perayaan kedua negara tersebut dalam menyambut perayaan Natal meski sama-sama Katolik akan tetapi berbeda dari sisi ekspresi budayanya. Perayaan Natal di Italia cenderung lebih tenang dan tidak sesemarak perayaan Natal di Filipina. Model perayaan Natal di Filipina dari sisi ekspresi budayanya lebih mirip dengan perayaan Idul Fitri di Indonesia, Malaysia maupun Brunei yang lebih ramai, banyak acara serta ada tradisi mudik mereka yang merantau di ibu kota.

Keempat, masyarakat Asean memiliki budaya entrepreneur serta model ekonomi yang khas. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat ASEAN bukan model ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan para pemodal besar akan tetapi model ekonomi yang lebih bersifat kerakyatan. Maka dari itu tidak heran jika *Small Medium Enterprise* (SME) banyak berkembang di masyarakat luas di hampir negara-negara ASEAN. Lihat saja bagaimana *street food* dapat mudah kita jumpai baik di Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi, Manila dan lain sebagainya. Coba saja kita bepergian ke negara-negara di Eropa dan Amerika, tidak mudah kita menjumpai *street food* sesemarak dan seramai di Asean. Apalagi jika datang hari raya besar keagamaan, di mana-mana sangat mudah kita jumpai masyarakat kecil menengah yang mendadak menjadi penjual barang dagangan.

Prospek Masa Depan

Anwar Ibrahim dalam buku *Renaissance Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru* pernah memimpikan terjadinya renaissance di Asia. Bagi Anwar, Renaissance Asia merupakan kebangkitan berbagai kesenian dan ilmu pengetahuan di bawah pengaruh model-model klasik yang berdasarkan landasan moral dan keagamaan. Kebangkitan ini akan mewarnai berbagai kesenian, kesusastreraan, arsitektur, musik serta berbagai lonjakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anwar menekankan bahwa renaissance di sini berbeda dengan apa yang terjadi di Barat. Renaissance yang terjadi di Barat berangkat dari penolakan terhadap dimensi ilahiah dalam kehidupan manusia dengan memperkuat posisi manusia sebagai penunjuk arah sejarah kehidupannya. Renaissance Asia berlandaskan agama dan tradisi. Agama-agama besar seperti Islam, Konfusianisme, Buddhisme, Hinduisme dan Kristen menjadi fondasi renaissance yang menjadikan masyarakat Asia sebagai pribadi yang religius (*persona religious*) serta pada saat yang bersamaan mendorong berbagai kemajuan di semua level kehidupan masyarakat.

Soedjatmoko dalam buku *Asia di Mata Soedjatmoko* menekankan pentingnya kebudayaan untuk dijadikan sebagai dinamisor dalam pembangunan seluruh sektor masyarakat Asia. Tanpa memperkuat kemampuan budaya-budaya yang unggul, negara-negara yang ada tidak akan mampu berkembang serta beradaptasi dengan berbagai perubahan masyarakat yang begitu cepat. Dalam hal ini Jepang, Taiwan dan Korea Selatan dapat dijadikan contoh bagaimana negara-negara tersebut pada satu sisi berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya mereka sendiri dan pada saat yang bersamaan mereka mampu mengembangkan berbagai terobosan ekonomi sehingga menjadikan mereka jauh lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Nurcholish Madjid menekankan bahwa etos kerja suatu masyarakat pada dasarnya sangat terkait erat dengan sistem kepercayaan yang mereka miliki. Sebagai contoh Negara-negara Industri Baru di Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura tidak terlepas dari etika konfusianisme yang mereka yakini. Sama halnya dengan Etika Protestanisme aliran Calvinis di Amerika (Max Weber), etika Tokugawa di Jepang (Robert Bellah), etika Santri di Jawa (Geertz) dan etika Hindu Brahmana di Bali (Geertz).

Dalam hal ini, Nurcholish Madjid menekankan bahwa jika Indonesia ingin juga memiliki kemajuan maka etika Islam yang inklusif dapat dijadikan rujukan kebudayaan sebagai fondasi kemajuan bangsa Indonesia.

Dari paparan di atas nampak jelas bahwa masyarakat Asean memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam memajukan peradaban manusia. Potensi terbesar masyarakat Asean berakar kuat dalam tradisi dan sistem kepercayaan masyarakatnya dan pada saat yang bersamaan dapat mengembangkan etos hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kemajuan. Asean bagaimanapun juga, sebagaimana Kishore Mahbubani sampaikan merupakan *the New Asian Hemisphere* yang telah menjadi kekuatan baru dunia di masa mendatang. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali kita semua selaku masyarakat Asean mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan dengan semaksimal mungkin. Sudah siapkah kita? *

Referensi

- Anh, To Thi. *Nilai Budaya Timur dan Barat Konflik atau Harmoni?* Jakarta: Gramedia, 1984.
- Ibrahim, Anwar. *Renaissance Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru*. Bandung: Mizan, 1998.
- Kwang, Ng Aik. *Asia vs Barat Benarkah orang Barat lebih kreatif daripada orang Asia?* Bandung: Kaifa, 2016.
- Mahbubani, Kishore. *Can Asians Think?* Singapore: Marshall Cavendish Editions, 2005.
- Mahbubani, Kishore. *Asia Hemisfer Baru Dunia Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Soedjatmoko. *Asia di Mata Soedjatmoko*. Jakarta: Kompas, 2010.

AAN RUKMANA Lahir di Kuningan, 13 Januari 1982. Alumnus Pondok Pesantren Daar El-Qolam ini menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Paramadina, program studi Filsafat Islam dan S2, pada bidang yang sama di Islamic College for Advance Studies (ICAS), Jakarta dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah *nyantri* beberapa bulan di Qom, Iran untuk mendalami filsafat Islam (2007) dan di Vatikan, Roma (2010). Ia juga aktif dalam bidang kepemimpinan Islam (*Islamic Leadership*). Ia pernah terpilih sebagai peserta *Moslem Exchange Program* (MEP) untuk mengunjungi Melbourne, Queensland dan Sydney Australia. Beberapa pelatihan kepemimpinan Islam pernah diikutinya, mulai dari Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, hingga Australia. Beberapa karya yang terbit di antaranya: *Seyyed Hossein Nasr, Penjaga Taman Spiritualitas Islam* (Jakarta: Dian Rakyat, 2013) dan *Ibn Sina: Sang Ensiklopedik Pemantik Pijar Peradaban Islam* (Jakarta: Dian Rakyat, 2013). *Peta Filsafat Islam di Indonesia: Meneropong Masa Depan Kajian Filsafat Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif: 2014). *Senarai Filsafat dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Aynat, 2016). *Catatan Kecil Kebudayaan* (Jakarta: LPPM – PIEC, 2020). *Islam dan Ilmu Pengetahuan Perspektif Nurcholish Madjid dan Seyyed Hossein Nasr* (Jakarta: LPPM – PIEC, 2021). Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi aanrukmana@gmail.com

Wayang Kulit Indonesia di Kancah ASEAN

Widwi Astuti

Kesenian tradisional wayang kulit tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Kesenian tradisional ini pernah menjadi hiburan favorit. Wayang kulit merupakan budaya tradisional yang dilestarikan keberadaannya. Kesenian ini dipentaskan di beberapa hari yang dianggap penting. Tidak hanya sekedar sebagai hiburan wayang kulit mempunyai arti perenungan kepada roh para dewa. Wayang kulit tidak hanya berkembang di Indonesia saja melainkan di negara ASEAN seperti di Malaysia, Thailand, Kamboja sejak berabad-abad lalu. Pada tahun 2016 ada 20 seniman dalang dan musisi berkumpul mempersiapkan pentas bersama dalam acara ASEAN Puppet Exchange di Malaysia.

Kesenian wayang kulit, kesenian yang ada sejak zaman Hindu dan Buddha. Purwanto (2018) mengatakan, "*Wayang kulit adalah berasal dari bahasa Jawa yang artinya bayangan bayangan yang terjadi karena adanya sorot cahaya.*" Semula wayang kulit yang dilihat adalah bayangannya. Penonton berada di balik layar berhadapan dengan sang dalang. Wayang kulit merupakan pertunjukan wayang. Wayang sendiri duplikat tokoh yang terbuat dari kulit kerbau. Wayang kulit dipahat sesuai dengan karakter tokoh diberi stik untuk pegangan. Di Malaysia wayang kulit juga berarti bayangan.

Menurut bentuknya di Indonesia sendiri ada berbagai macam bentuk wayang sesuai dengan kreasi sang dalang, wilayah asal, kreasi pembuat. Di Kamboja mengenal Sbek Thom wayang besar setinggi dua meter ini disampaikan non artikulasi. Dalang yang memainkan wayang dengan melakukan tarian. Pada wayang Sbek Thom melibatkan penari, wayang, layar dan narrator Teater bayangan yang artinya wayang kulit ini merupakan kesenian tradisional Kamboja. Sbek Thom yang menampilkan pertunjukan wayang dengan iringan musik dan tarian dari para pemainnya serta tanpa artikulasi (Administrator, 2020).

Di Malaysia mengenal Wayang Kelantan. Wayang kelantan menggunakan gambaran tokoh seperti penduduk setempat. Mulut, hidung dan lekukan yang lebih halus. Bahasa yang digunakan pada cerita di Malaysia kebanyakan menggunakan bahasa Jawa yang dipengaruhi dengan masyarakat kamboja (Ishiguro M. A., 2018). Thailand mempunyai kesenian wayang kulit yang dikenal dengan nama Nang Talung. Nang Talung berada sejak zaman kuno. Pertunjukan wayang Thailand ini dimainkan sampai ke luar negara, termasuk Malaysia, Indonesia, India, dan Cina (Tanudjaja, 2012).

Isi dari wayang kulit merupakan bentuk penghormatan manusia kepada Sang Pencipta, dimana hal tersebut tercermin dalam kisah-kisah yang dimainkan oleh seorang dalang. Cerita yang ditampilkan dalam wayang kulit mengandung pemikiran ketuhanan. Kehidupan berbudaya secara agama yang dapat digunakan sebagai bahan renungan untuk menjalani kehidupan di dunia nyata.

Lakon Wayang Kulit membuktikan bahwa wahyu mengandung konsep ketuhanan, konsep-konsep budaya spiritual yang selanjutnya dapat kiranya dipergunakan sebagai bahan renungan untuk menjalankan hidup di dunia nyata. Wayang tidak hanya melulu sebagai seni pertunjukan. Wayang juga dapat digunakan sebagai median menyebar kebaikan.

Isi wayang sebagai penghormatan kepada sang pencipta tidak hanya di Indonesia, juga di Malaysia, Thailand, dan Kamboja. "*Di Malaysia kepercayaan bahwa pemimpin merupakan Wali Tuhan di muka bumi yang berupa gendang alam,*" (Hasyim, 2023). Ini menggambarkan bahwa sebenarnya isi dari wayang kulit di Indonesia sama dengan di Malaysia. Cerita yang dibawakan di Malaysia, Thailand, Kamboja pun sama. Tentang cerita Mahabarata dan Ramayana.

"Dalam cerita Ramayana, ada dua puluh watak populer yang boleh dicamkan dengan tepat mengikut bentuk serta warnanya. Antara yang utama adalah Maharaja Rawana, Seri Rama, Siti Dewi, Tok Mah Sikor, Pak Dogol, Wak Long, dan Hanuman Kera Putih" (Bujang, 2007). Ini menunjukkan cerita wayang di Malaysia menceritakan Ramayana. "In Indonesia, Malaysia and Thailand, apart from local stories, wayang kulit presents Indian epics, such as the Ramayana and Mahabharata, as a medium for Hindu-Buddhist teachings." (Koesoemadinata, 2013).

Banyaknya kesamaan wayang kulit di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja maka pada tahun 2016 diadakan ASEAN PUPPET EXCHANGE. ASEAN memilih wayang kulit sebagai sebuah identitas ASEAN dipilihnya wayang sebagai identitas ASEAN karena wayang memiliki banyak kesamaan dan mencerminkan budaya yang dimiliki masing-masing anggota ASEAN. Melalui cerita yang disampaikan yaitu Ramayana dan Mahabharata menggambarkan sebuah sikap ramah masyarakat Asia Tenggara.

“Ms. Jodi Thiele, one of the facilitators from Singapore, said, “As part of the ASEAN Puppetry Association (APA) exchange, we hope to understand more of each culture and try to form one ASEAN with different puppets characters, music, and voices because story is the easiest way for people to know each other and feel connected” (APRN, 2015). Kurang lebihnya Ibu Jodi Thiele fasilitator dari Singapura, mengatakan, “Pertukaran ASEAN Puppetry Association (APA), berharap dapat lebih memahami setiap perbedaan budaya. Mencoba membentuk kegiatan ASEAN karena karakter boneka, musik, dan suara mempunyai kemiripan tapi berbeda. Cara agar orang untuk mengenal satu sama lain dan merasa saling berhubungan.

Kita perlu menjadikan wayang sebagai identitas ASEAN. Dalam pewayangan tersebut dapat digambarkan berbagai macam unsur kebudayaan dan kesenian yang tergabung dalam sebuah pementasan. Kehadiran wayang dapat melihat berbagai cerita kebudayaan yang ada di Asia Tenggara. Adat istiadat yang dapat diperankan oleh wayang, tarian tradisional dalam pementasan wayang, musik-musik tradisional dalam pementasan wayang. Wayang termasuk mencakup segala aspek kesenian yang dimiliki oleh masing-masing negara di Asia Tenggara, oleh sebab itu wayang dipilih sebagai identitas ASEAN.

Wayang kulit dapat dijadikan satu di negara ASEAN karena banyak mempunyai kesamaan. Masing-masing mempunyai perbedaan secara khusus. Penyatuan dilakukan agar mempunyai ikatan saling mengenal. Kebudayaan wayang kulit yang perlu dilestarikan secara bersama-sama di ASEAN. *

Referensi

- Administrator. (2020). Sbek Thom, Permainan Wayang Kulit Tradisional Kamboja. <https://fadami.indozone.id/news/441348571/sbek-thom-permainan-wayang-kulit-tradisional-kamboja->, 2.
- APRN. (2015). The ASEAN Puppets Exchange Programme: Encouraging Puppet Artists Mobility to Support the ASEAN Community Building Process. secretariat@aseanprnetwork.org.
- Darmoko. (n.d.). Wahyu Dalam Lakon Wayang Kulit Purwa Telaah Intrinsik. ib.ui.ac.id/opac/ui/, 1
- Hasyim, H. N. (2023). Hadi Nur Hakim bin HKajian Terhadap Kaidah Perdalangan Muda Persembahan Wayang Kulit Kelantan di Bachok Kelantan. discol.umk.edu.my, 9.
- Ishiguro, M. (2028). *Malay Theatre: Intangible Cultural Heritage and Islam*. Asian Theatre Journal, 218.
- Ishiguro, M. A. (2018). *Malay Theatre: Intangible Cultural Heritage and Islam*. Asian Theatre Journal, 218.
- Koesoemadinata, M. I. (2013). *Wayang Kulit Cirebon: Warisan Diplomasi Seni Budaya*. ITB J. Vis. Art & Des, 142.
- Purwanto, S. (2018). Pendidikan nilai dalam pagelaran wayang kulit. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Tanudjaja, B. B. (2012). Pertunjukan Wayang Kulit Nang Talung, Representasi Kehidupan Masyarakat Thailand Selatan. *Nirmana*, 12.

WIDWI ASTUTI lahir 51 tahun lalu di Blitar, Jawa Timur. Bekerja sebagai pengajar di SMKN 2 Tulungagung sejak tahun 2008. Mengikuti RPI sejak setahun lalu. Mengaku banyak manfaat yang didapat dari Rumah Produktif Indonesia.

BAB 18

Melahirkan Bintang Muda di ASEAN

Pemberdayaan Pemuda ASEAN: Bersinergi Menuju Masa Depan Berkilau

Arciv Arianto

Pemuda merupakan aset berharga suatu bangsa, dan di tingkat regional, ASEAN menyadari pentingnya memperhatikan dan meningkatkan kapasitas pemuda sebagai motor penggerak pembangunan masa depan. ASEAN, sebuah organisasi yang menggabungkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, telah mengambil langkah proaktif untuk memberdayakan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka.

ASEAN telah menetapkan pemuda sebagai salah satu prioritas utamanya. Negara-negara anggota menyadari bahwa investasi pada pemuda adalah investasi pada masa depan. Melalui berbagai forum diskusi, ASEAN menciptakan platform untuk para pemuda saling berbagi ide dan pengalaman. Diskusi-diskusi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan pemuda, tetapi juga memperkuat rasa persatuan di antara mereka.

Selain forum diskusi, ASEAN juga mengadakan forum kewirausahaan yang memberi kesempatan kepada para pemuda untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka. Dengan memberikan pendampingan dan bantuan teknis, ASEAN mendukung perkembangan bisnis pemuda, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda dalam mewujudkan ide-ide brilian mereka adalah akses terhadap pendanaan. ASEAN menyikapi hal ini dengan memberikan pendanaan untuk program-program yang dikembangkan oleh para pemuda. Dana ini dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan proyek, atau bahkan pendirian bisnis. Pendanaan ini bukan hanya memfasilitasi keberlangsungan program-program pemuda, tetapi juga memberikan dorongan moral, memberi keyakinan kepada para pemuda bahwa ide dan inovasi mereka dihargai dan didukung.

Pemberdayaan pemuda di tingkat ASEAN juga sangat tergantung pada sinergi antar-generasi muda. Para pemuda harus proaktif dalam berbagi pengetahuan, bekerjasama dalam proyek-proyek bersama, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini bukan hanya meningkatkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga menciptakan jaringan yang kuat di antara pemuda ASEAN.

Masa depan pemuda ASEAN tergantung sejauh mana mereka dapat bersatu dan menggandeng tangan satu sama lain. Dengan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN, termasuk melalui forum diskusi, forum kewirausahaan, dan pendanaan program, pemuda ASEAN memiliki peluang besar untuk mewujudkan potensi mereka dan menciptakan dampak positif dalam pembangunan kawasan ini.

Melalui sinergi yang kuat dan dukungan yang berkelanjutan, pemuda ASEAN akan menjadi kekuatan pendorong perubahan, membawa inovasi, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang di kawasan Asia Tenggara yang kita cintai.*

ARCIV ARIANTO adalah pengurus Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia. Aktif dalam berbagai inisiatif pembelajaran secara digital. Secara berkala, ia juga menggelar diskusi virtual dengan pembicara dari berbagai latar belakang.

Sinergitas ASEAN dan Kepanduan Asia-Pasifik

Dionisius Agus Puguh Santosa

Pengantar

Pada Minggu, 13 November 2022, Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Peristiwa bersejarah ini menjadi penanda beralihnya keketuaan ASEAN dari Kamboja kepada Indonesia, dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2023. Presiden Joko Widodo berujar, Indonesia melalui Keketuaan ASEAN pada 2023 akan menjadikan ASEAN Matters: *Epicentrum of Growth* (permasalahan yang dihadapi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan).

Seperti dirilis dalam situs resmi Kominfo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebutkan bahwa sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti 3 isu utama KTT G20 yang baru berakhir pada 16 November 2022 lalu. Adapun ketiga isu dimaksud meliputi: *transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global*. Selain ketiga isu utama tersebut, masih terdapat isu-isu lain yang kemungkinan akan diangkat, yang belum bisa diprediksi saat ini.

Sesuai dengan catatan sejarah, Indonesia terakhir kali memegang keketuaan ASEAN pada 2011 silam. Saat itu dalam kepemimpinannya, Indonesia berhasil menggulirkan sejumlah inisiatif, diantaranya adalah Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN dan mendorong terbentuknya ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.

Menurut Data Indeks Daya Saing Global Indonesia pada 2019 dikatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 141 negara. Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand; yang masing-masing berada pada peringkat ke-1, 27, dan 40. Dengan fakta ini disertai dengan bonus demografi beserta peluangnya, maka Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas pada 2045.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, negara ini diyakini akan masuk jajaran empat besar ekonomi dunia. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif. Untuk itu generasi muda Indonesia kedepannya harus disiapkan menjadi generasi digital dan melek sains. Selain itu, mereka juga diharapkan tetap membumi dan tidak tercerabut dari akar budayanya.

Dua puluh dua tahun lagi, sebagai bangsa kita akan merayakan Pesta Emas HUT ke-100 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2045. Tahun 2045 juga dikenal dengan istilah Indonesia Emas. Meskipun untuk menuju Indonesia Emas pada 2045 kita masih memerlukan 22 tahun lagi; namun bukan berarti tenggat waktu yang tersedia untuk menuju perayaan 1 abad tersebut masih lama. Sebab, anak-anak yang lahir sekarang ini nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin di tahun 2045 tersebut. Mereka-mereka inilah yang akan masuk dalam bilangan 70% usia produktif (15-64 tahun) bonus demografi. Sedangkan sisanya merupakan usia tidak produktif.

Dan salah satu wadah yang menjadi tempat pembinaan karakter bagi anak-anak dan kaum muda di Indonesia adalah Gerakan Pramuka yang sejak beberapa tahun terakhir masuk dalam Kurikulum 2013. Senada dengan hal tersebut, berbagai gerakan kepanduan yang ada di wilayah ASEAN pun juga dapat menunjukkan kiprahnya di masa kini dan nanti; dengan pengelolaan yang semakin baik dan mengedepankan sinergitas antar organisasi di tingkat ASEAN maupun Asia-Pasifik.

Sinergitas ASEAN dan Perhatiannya Terhadap Kaum Muda

Ada tiga unsur utama yang menjadi pusat perhatian ASEAN terhadap kaum muda, yaitu: Kepemimpinan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan. Secara berkala kaum muda di wilayah Asia Tenggara berkumpul dalam Jambore Pemuda ASEAN dan beragam kegiatan pertukaran pemuda. Beberapa negara ASEAN bahkan menyediakan fasilitas berupa beasiswa yang diperuntukkan bagi kaum muda di negara-negara anggota ASEAN.

Sejak 2011, saat Indonesia menerima mandat sebagai ketua ASEAN, terdapat konsep IKA (Inisiatif untuk Keterpaduan ASEAN) yang bertujuan untuk menyetarakan pembangunan antara 6 anggota lama (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan 4 anggota baru (Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam). Dan konsep IKA ini pun tentu akan diterapkan pada anggota ASEAN yang ke-11 yaitu Timor Leste yang baru bergabung dengan ASEAN pada 2022.

Pelaksanaan proyek IKA mendapatkan dana bantuan dari 6 anggota lama ASEAN, mitra wicara, atau lembaga internasional dalam rangka IKA maupun secara bilateral. Pada awalnya proyek ini hanya mencakup bidang ekonomi saja, namun di kemudian hari berkembang dan meliputi 3 pilar utama, yaitu: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Adapun ruang lingkup kerjasama di bidang sosial-budaya meliputi beragam sektor, antara lain: bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik.

Berbagai sektor yang disebutkan di atas tentu akan sangat berkaitan dengan keberadaan kaum muda atau para pemuda di negara-negara anggota ASEAN. Masing-masing negara anggota ASEAN tentu akan menyediakan berbagai wadah yang dibentuk dan dikembangkan untuk membina dan meningkatkan kualitas kaum muda setempat; demi mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh negara-negara anggota ASEAN menuju kawasan ASEAN dalam kerangka "Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas" (*One Vision, One Identity, One Community*). Untuk mewujudkannya, diperlukan kaum muda atau para pemuda yang mempunyai karakter toleran; yang mampu mengembangkan toleransi, kerukunan, dan perdamaian di kawasan ASEAN. Dengan menanamkan pondasi yang kuat di pundak kaum mudanya, ASEAN akan mampu mencapai visi yang dicita-citakan bersama.

Gerakan Kepanduan Asia-Pasifik: Selayang Pandang

Pada tataran internasional, Gerakan Kepanduan dikenal juga dengan istilah *Scouting* atau disebut juga *Scout Movement*. Di berbagai belahan dunia, Gerakan Kepanduan mempunyai nama khasnya masing-masing; tak terkecuali di negara-negara anggota ASEAN. Adapun istilah gerakan kepanduan di wilayah ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia disebut Gerakan Pramuka.
2. Di Malaysia disebut Persekutuan Pengakap Malaysia.
3. Di Singapura disebut The Singapore Scout Association.
4. Di Thailand disebut The National Scout Organization of Thailand.
5. Di Filipina disebut Boy Scouts of the Philippines.
6. Di Brunei Darussalam disebut Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam.
7. Di Vietnam disebut Vietnamese Scout Association.
8. Di Laos disebut Sri Lanka Scout Association.
9. Di Myanmar disebut Myanmar Scout.
10. Di Kamboja disebut National Association of Cambodian Scouts.
11. Di Timor Leste disebut União Nacional dos Escuteiros de Timor Leste.

Meskipun memiliki nama yang berbeda-beda, Gerakan Kepanduan ini umumnya diikuti oleh peserta didik mulai usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan untuk di Indonesia sendiri, mulai tahun 2019 lalu telah diperkenalkan pendidikan Pramuka untuk anak usia dini atau jenjang PAUD yang dikenal dengan istilah Prasiaga.

Adapun tujuan daripada pendidikan Pramuka Prasiaga adalah untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter bagi anak usia dini, sekaligus menguatkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia sejak usia dini. Melalui kegiatan ini ke depannya, anak-anak Indonesia pada masa mendatang akan menjadi warga negara yang tangguh dan berbakti pada nusa dan bangsa.

Selain itu, kegiatan ini juga mempunyai tujuan mulia yaitu melahirkan duta-duta persaudaraan yang mampu untuk saling menguatkan dan menghormati satu sama lain dalam pergaulan internasional. Adapun yang dimaksud dengan Pramuka Prasiaga adalah anak yang belum berusia 7 tahun yang diberikan pengenalan tentang nilai-nilai kepramukaan di satuan PAUD. Sedangkan selama ini, kita mengenal tingkatan dalam pendidikan Gerakan Pramuka yang terdiri dari golongan Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Usia	Prinsip Latihan	Model Kegiatan
Golongan Siaga (7-10 tahun)	Kerjasama tim	Permainan beregu
Golongan Penggalang (11-15 tahun)	Manajemen risiko	Perkemahan beregu
Golongan Penegak (16-20 tahun)	Jati diri dan hidup	Penjelajahan
Golongan Pandega (21-25 tahun)	Bakti masyarakat	Pengabdian
Golongan Dewasa (25 tahun ke atas)	Warga negara berjiwa patriotik yang suka mengabdikan pada bangsa dan negara, aktif menjadi duta persaudaraan dunia	

Karena kegiatan ini berfokus pada pendidikan karakter, maka meskipun anak-anak Pramuka Prasiaga berusia kurang dari 7 tahun, namun sama seperti kakak-kakaknya yang berada pada golongan yang lebih tinggi; maka anak-anak usia dini ini pun dibekali dengan kode kehormatan Prasiaga, yaitu Ekasatya dan Ekadarma, seperti diuraikan di bawah ini:

EKASATYA:

Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anak yang berakhlak mulia dengan taat kepada Tuhan, negara, guru dan orang tuaku.

EKADARMA:

Prasiaga itu sehat, cerdas, dan ceria.

Sedangkan kode kehormatan untuk anak-anak golongan Siaga adalah Dwidarma dan Dwisatya; untuk anak-anak golongan Penggalang ke atas mempunyai kode kehormatan yang disebut Trisatya dan Dasadarma. Kode kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral yang wajib ditaati oleh peserta didik dalam pendidikan kepramukaan sesuai jenjang yang diikutinya.

Sesuai data yang dirilis oleh situs resmi *Asia-Pacific Scout Regional* atau Gerakan Kepanduan Asia-Pasifik disebutkan bahwa jumlah anggota kepanduan di wilayah ini merupakan yang terbanyak di dunia. Secara total jumlah anggotanya dari berbagai jenjang usia mencapai 57 juta jiwa, dimana 35 juta diantaranya adalah kaum muda; yang tergabung dalam 30 organisasi kepanduan nasional di negaranya masing-masing. Sebagai catatan, dari uraian data di atas, 17 juta di antaranya merupakan jumlah anggota Gerakan Pramuka di Indonesia (sensus 2008, rilis data 2009).

Dari statistik di atas dapat kita simpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Gerakan Kepanduan di Wilayah Asia-Pasifik tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam peranannya untuk meningkatkan kualitas generasi muda di kawasan Asia-Pasifik, khususnya di wilayah negara-negara ASEAN.

Peningkatan Kualitas Generasi Muda

Untuk meningkatkan kualitas generasi muda di kawasan ASEAN tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan kita. Diperlukan beragam usaha yang saling mendukung dan berkesinambungan di dalamnya. Berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh ASEAN dengan melibatkan generasi muda di negara-negara anggotanya, telah dirancang sedemikian rupa dan menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan secara rutin. Di tahun 2022, tiga puluh empat persen penduduk ASEAN merupakan kaum muda. Dan kaum muda ini diharapkan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar untuk turut mengembangkan dan membangun kawasan ASEAN; baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) adalah salah satu kegiatan yang melibatkan kaum muda di kawasan ASEAN. Tahun 2022 lalu, kegiatan AYIC diselenggarakan secara tatap muka dan mengambil lokasi di Jakarta dan Semarang, pada tanggal 7 hingga 11 Agustus 2022. Sejumlah 30 pemuda dari 7 negara anggota ASEAN (Indonesia, Kamboja, Singapura, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Thailand) terlibat dalam kegiatan yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Adapun pelaksanaan kegiatan kali ini merupakan perhelatan AYIC keenam, sejak pertama kali digelar pada 2017 di Jombang, Jawa Timur.

Penyelenggaraan AYIC adalah penerapan nyata dari *ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society* yang diinisiasi oleh Indonesia dan menjadi agenda tahunan ASEAN. Deklarasi tersebut berpusat pada pendekatan berbasis masyarakat (*upstream approach*). Harapannya, melalui kegiatan seperti ini manfaat ASEAN dapat dirasakan hingga akar rumput, sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dan kestabilan kawasan Asia Tenggara.

Senada dengan kegiatan di atas, Gerakan Kepanduan di kawasan ASEAN pun sebenarnya dapat didorong untuk menciptakan berbagai agenda kerjasama di bawah payung ASEAN, sekaligus untuk menggaungkan semboyan “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas” (*One Vision, One Identity, One Community*) yang menjadi cita-cita bersama.

Selama ini berbagai kegiatan kepramukaan di kawasan Asia-Pasifik didukung pendanaan dari Yayasan Kepramukaan Asia-Pasifik. Yayasan ini pertama kali didirikan pada tahun 1991 dengan Asosiasi Pramuka Hongkong sebagai Sudahwali amanatnya. Adapun sekretariatnya berkantor pusat di Makati, Filipina. Sejak didirikan, Yayasan Kepramukaan Asia-Pasifik telah mendukung visi kepramukaan di kawasan Asia-Pasifik dengan jalan memberikan hibah ataupun pinjaman tanpa bunga bagi proyek pengembangan produktif dan proyek kepramukaan. Setelah Indonesia dipercaya sebagai Presidensi G20 di tahun 2022 lalu, pada kesempatan sebagai Ketua ASEAN 2023 kali ini, Indonesia dapat berperan untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya agar memberikan perhatian khusus kepada pembinaan dan pendampingan generasi muda di negaranya masing-masing; khususnya dalam kegiatan kepramukaan.

Jika melihat hasil data sensus 2008 yang menyatakan bahwa anggota Pramuka di Indonesia mencapai 17 juta; maka Gerakan Pramuka Indonesia melalui Kwartir Nasional dapat mengambil peran signifikan di dalamnya, dengan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan *stakeholder* lain yang terkait.

Adanya pola pendidikan kepramukaan yang diterapkan di Indonesia saat ini pun membuka peluang yang besar untuk diterapkan di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sebab jika dicermati, adanya pembinaan Pramuka yang dimulai dari golongan Prasiaga, Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Dewasa yang sudah berjalan sampai hari ini di Indonesia, dapat menjadi contoh sekaligus rujukan bagaimana mengembangkan gerakan kepramukaan di wilayah ASEAN. Tentunya semua itu harus tetap mempertahankan maksud dan tujuan daripada pengembangan Gerakan Kepanduan itu sendiri, yang secara umum bertujuan untuk melatih keterampilan dan ketangkasan, cara bertahan hidup, hingga pengembangan dasar-dasar moral peserta didik.

Dengan begitu, pengembangan Gerakan Kepanduan di Asia-Pasifik-*khususnya di kawasan ASEAN*, hendaknya terlepas dari kepentingan-kepentingan yang menyangkut politik. Dan jika dianggap perlu, maka Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023 ini dapat menginisiasi terbentuknya Gerakan Kepanduan di Wilayah ASEAN atau *ASEAN Scout Regional* untuk mengintensifkan pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang berciri khas Asia Tenggara.

Kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 lalu kiranya dapat dilanjutkan pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini. Eksistensi dan peran Indonesia dewasa ini cukup diperhitungkan di kancah internasional. Kenyataan ini pun tak terlepas dari harapan banyak pihak bahwa ke depannya kelompok negara-negara ASEAN ini

pun akan menjadi kelompok yang diperhitungkan oleh negara-negara lainnya di belahan dan kawasan dunia lainnya. Semoga!*

Referensi

Asia-Pacific Scout Regional di alamat: <https://www.scout.org/where-we-work/regions/asia-pacific/region> di akses pada 31 Desember 2022, pkl. 21.12 Wita.

Asia-Pacific Scout Region di alamat: [https://id.wikipedia.org/wiki/Regional_Asia-Pasifik_\(Organisasi_Kepanduan_Sedunia\)#:~:text=Asia%2DPacific%20Scout%20Regional%20atau,lain%20di%20Australia%20dan%20Jepang](https://id.wikipedia.org/wiki/Regional_Asia-Pasifik_(Organisasi_Kepanduan_Sedunia)#:~:text=Asia%2DPacific%20Scout%20Regional%20atau,lain%20di%20Australia%20dan%20Jepang) diakses pada 31 Desember 2022, pkl. 20.47 Wita.

Ayo Kita Kenali ASEAN, 2011, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Buletin Referensi*, diunduh secara daring melalui alamat <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>, diakses pada Senin, 21 November 2022, pkl. 16.05 WITA.

Indonesia Bawa Tiga Isu Prioritas G20 pada Keketuaannya di ASEAN 2023, diakses dari halaman https://www.kominfo.go.id/content/detail/45572/indonesia-bawa-tiga-isu-prioritas-g20-pada-keketuaannya-di-asean-2023/0/artikel_gpr, diakses pada Senin, 21 November 2022, pkl. 15.44 WITA.

Indonesia Terima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja, diakses dari halaman https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_terima_keketuaan_asean_2023_dari_kamboja#:~:text=Indonesia%20menerima%20estafet%20keketuaan%20ASEAN,%2C%20Minggu%2C%2013%20November%202022., diakses pada Senin, 21 November 2022, pkl. 15.35 WITA.

Kemenpora Ajak Pemuda se-ASEAN Bangun Kawasan Asia Tenggara yang Religius dan Toleran di alamat: <https://www.kemenpora.go.id/detail/2415/kemenpora-ajak-pemuda-se-asean-bangun-kawasan-asia-tenggara-yang-religius-dan-toleran>, diakses pada 31 Desember 2022, pkl.21.55 Wita.

Mengenal Yayasan Kepramukaan Asia-Pasifik di alamat: <https://pramuka.id/mengenal-yayasan-kepramukaan-asia-pasifik/> diakses pada 31 Desember 2022, pkl. 22.12 Wita.

Pedoman Prasiaga Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Wahana Penanaman Karakter Kebangsaan Tahun 2019, 2019, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Sebutan Pramuka di Berbagai Negara, di alamat: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/214809769/sebutan-pramuka-di-berbagai-negara?page=all>, diakses pada 31 Desember 2022, pkl. 11.05 WITA.

Siapkah Kamu Jadi Generasi Emas 2045? di alamat: <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045> diakses pada 31 Desember 2022, pkl. 20.35 Wita.

Songsong Indonesia Emas 2045, Anak Muda Harus Melek Sains dan Tetap Berbudaya di alamat: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya>, diakses pada pada 30 Desember 2022, pkl. 20.35 Wita.

DIONISIUS AGUS PUGUH SANTOSA lahir di Blora, 24 November 1978. Ia merupakan lulusan S1 Manajemen STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Pancasetia Banjarmasin tahun 2013 dan Program Pascasarjana Magister Manajemen pada almamater yang sama dan lulus pada 2019. Saat ini mengajar di SMP dan SMA Mitra Kasih Banjar sebagai sarana berbagi ilmu dan pengalaman hidup. Penulis menyukai bidang jurnalistik dan literasi. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai penyiar Siaran WAJAR (Wadah Belajar) kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Radio Suara Banjar sejak TA 2020/2021 hingga sekarang.

Pertukaran Pemuda ASEAN

Roswita M Aboe

Pendahuluan

Memasuki tahun milenial dewasa ini, reformasi dan globalisasi di berbagai bidang semakin menggerus nilai-nilai nasionalisme dan integrasi bangsa. Kecanggihan teknologi yang kemudian memaksa komunitas suatu daerah menjadi individualistik, mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan bahkan menjadi pecandu *gadget*. Pemuda tak jarang menjadi *gadget addictive* dan menutup ruang-ruang sosial dan pergaulan dengan sesama. Hal ini diperkuat dengan sikap *primordialisme* kedaerahan, hanya memandang eksistensi suatu suku atau ras dengan segala kelebihannya dan mengabaikan keberadaan suku-suku lainnya. Perpecahan menjadi sumber dari ciri *etnosentrisme* ini. Dan hal ini sering dijumpai di berbagai kawasan di Indonesia, ataupun di negara-negara lain sebagai akibat dari minimnya inetraksi generasi muda yang berbeda secara budaya, agama, suku maupun etnis.

Hal baik yang mulai dirasakan sekarang ini adalah, walaupun sering ditemukan adanya gesekan antar pemuda dalam satu wilayah, sudah sekian banyak masyarakat semakin terbuka cakrawala berpikir dalam berinteraksi dengan komunitas lain di negaranya. Terbukanya kesempatan bertukar informasi, bertukar budaya dalam program pemerintah dengan ragam jenisnya, telah memberikan kesempatan yang luas bagi hampir seluruh pemuda baik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengenal sesamanya yang berasal dari negara-negara lain. Di antara program pengenalan yang ditawarkan pemerintah adalah pertukaran pemuda (*Youth Exchange*) yang digalakkan pemerintah dewasa ini maupun *students exchange* (pertukaran mahasiswa),

Pertukaran Pemuda

Pada tahun 2010, walikota Ternate bekerjasama dengan The Wallace Foundation, National Youth Council, LIPI, ASEAN Foundation, KEMENPORA dan KEMENLU Republik Indonesia mendatangkan 100 pemuda yang berasal dari Negara-negara ASEAN seperti Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura, Myanmar, Burma untuk mengunjungi kawasan Wallacea yang terkenal dengan Evolusi Faunanya di Ternate, Maluku Utara. Dua tahun setelah penetapan lokasi tugu Wallacea di Ternate tepatnya pada Desember 2008 setelah Pra simposium "Letter From Ternate" digelar (Jenie, 2008).

Kunjungan pemuda-pemudi ASEAN tersebut dalam ekspedisi yang bertemakan *Asean Future Lean on Environment* tidak sekedar mengantarkan peserta untuk mengenal Maluku Utara tetapi mengenalkan tokoh dunia yang tidak banyak di ketahui perannya di masa lalu oleh generasi sekarang ini, Alfred Russel Wallace. Kegiatan ini adalah salah satu dari program kepemudaan yang telah dimulai sejak tahun 1973 dengan nama Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN). Program Pertukaran Pemuda dan Studi (YES) yang ditawarkan Amerika sejak 2002 dan jenis aktivitas lainnya.

Tujuan

Beberapa program kepemudaan memiliki tujuan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan SDG (*Sustainable Development Goals*). Program Pertukaran Negara Amerika YES yang dimulai sejak tahun 1961 bekerjasama dengan bidang pendidikan dan pertukaran budaya bertujuan membawa akademisi, pengajar dan mahasiswa dalam kegiatan pertukaran budaya. Pertukaran Pemuda dan Studi (YES) ini juga memberikan beasiswa kepada siswa sekolah menengah (15-17 tahun) dari negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, termasuk Indonesia, untuk menjalani satu tahun program pendidikan akademik di Amerika Serikat (Budaya, 2022). Sedangkan PAPAN Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang merupakan program tahunan hasil kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat bertujuan mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan.

Selain itu terdapat Pertukaran Pemuda Asia (PPA) merupakan salah satu bentuk realisasi dari tujuan Event Hunter Indonesia membentuk generasi muda yang berwawasan internasional, mampu menyampaikan gagasan, menginspirasi, dan mampu memberikan apresiasi melalui berbagai aktivitas yang bersifat edukatif, mengasah skill, dan entertaining. Tujuan lain dari kegiatan-kegiatan pelibatan pemuda antarbangsa ini sebagai platform yang berfokus pada edukasi generasi muda. PERTUKARAN PEMUDA ASIA juga dilaksanakan demi tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagaimana diketahui bersama, program PAPAN melibatkan beberapa negara antara lain India, Australia, China, Korea, Malaysia, Jepang, Singapura, dan negara asia tenggara lainnya (DISPORA, 2022). Negara Korea misalnya menawarkan *event hunter* program berisi *Edutainment* atau program kekinian dengan bentuk edukasi yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan rekreatif bagi pemuda. Menjadi pengasah dan motivasi bagi pemuda terpilih untuk berpikir kritis, dan mampu menemukan hal-hal baru. Peserta diharapkan kembali ke negaranya dengan membawa hal-hal kebaruan dan positif selama program di Korea. Dalam hal pencapaian target SDG, Korea mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam upaya membangun Quality Education berupa program yang menambah pemahaman dan pengetahuan bagi pemuda Indonesia atau Negara lain melalui studi banding dan belajar secara langsung aktivitas di universitas Korea (Guidebook, 2021).

Selain itu program pertukaran membekali peserta pemuda dengan pengetahuan untuk mempererat persahabatan dan kerja sama Pemuda Indonesia dengan Pemuda dari negara tujuan; meningkatkan rasa saling pengertian di antara masyarakat khususnya generasi muda dengan negara tujuan; menciptakan kader-kader pemimpin bangsa yang berwawasan internasional; memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mengenal adat-istiadat, kesenian, dan budaya di negara tujuan, tukar-menukar pengalaman serta melakukan kegiatan bersama di negara lain akan menimbulkan saling pengertian, penghormatan dan toleransi dikalangan generasi muda; kemampuan menciptakan jaringan informasi, komunikasi dan bisnis. PAPAN membuka kesempatan bagi para pemuda mengenal satu sama lainnya dan kelak bisa bersaing di dunia global.

Kemudahan dari mengikuti program yang ditawarkan PAPAN dengan 6 jenis, yaitu ICHYEP (Indonesia-China Youth Exchange Program), IKYEP (Indonesia-Korea Youth Exchange Program), SSYEAP (*Ship for SouthEast Asian and Japanese Youth Program*), AIYEP (Australia-Indonesia Youth Exchange Program), IMYEP (Indonesia Malaysia Youth Exchange Program) dan ASVI (*ASEAN Students Visit India*) menurut Eri Dwi Cahyono koordinator PAPAN adalah terbentuknya jejaring pemuda antarbangsa, membuka kesempatan pertukaran di bidangnya, sosial, budaya serta ekonomi melalui kawasan MEA (MEA) (Admin, 2016). Dari berbagai tawaran kegiatan, pertukaran pemuda memberi sumbangsih pada pencapaian target Sustainable Development Goals antara lain: SDGs kategori 5 (Kesetaraan Gender), pemeliharaan ekosistem laut (kategori 14) pemeliharaan ekosistem darat (kategori 15), penguasaan perubahan iklim (*climate change*: kategori 13).

Jejaring Saling Menguatkan

Program Pertukaran Pemuda model PAPAN memiliki jejaring yang saling menguatkan. Dari lulusan atau alumni program, terbentuk PCMI atau Purna Caraka Muda Indonesia. Dari beberapa jenis aktivitas yang ditawarkan di bagi dalam sektor pengenalan budaya antara lain program: ASVI (ASEAN students visit India), AIYEP (Australia - Indonesia Youth Exchange Program), ICHYEP (Indonesia China Youth Exchange Program), IKYEP (Indonesia- Korea Youth Exchange

Program), IMYEP (Indonesia-Malaysia Youth Exchange Program), SSEAYP (Ship for Southeast ASEAN and Japanese Youth Program), SIYLEP (Singapore-Indonesian Youth Leadership Exchange Program).

Sedangkan pengenalan ekonomi dan entrepreneurship adalah ASVI melalui kunjungan pusat bisnis di India dan institusi finansial, IChYEP yang mengenalkan ilmu kewirausahaan, IMYEP yang menawarkan bidang entrepreneurship, SIYLEP melalui pengenalan dan kunjungan ke kantor-kantor *start-up* bisnis. Selain dari pada itu, peserta akan mengikuti berbagai macam kegiatan dari keunikan masing-masing program yang ditawarkan (Admin, 2016). Tantangan yang di hadapi oleh peserta program adalah, seleksi, penguasaan bahasa, pemahaman sosial budaya, adaptasi serta kemampuan komunikasi atau public speaking. Bukan menjadi hal baru bagi setiap peserta dimana seleksi ketat dari usulan program menjadi syarat mutlak keikutsertaan peserta dalam program ini. Sudah barang tentu, kemampuan komunikasi publik yang tidak diikuti dengan penguasaan bahasa menjadi kendala dalam proses penentuan.

Selain itu peserta diharapkan menguasai lebih dari satu bahasa, memiliki keterampilan dan kemampuan seni (seni tari, suara, ataupun *entertainment* lain), tes penguasaan bahasa Asing (minimal bahasa Inggris) juga menjadi kendala bagi peserta tanpa pemahaman ini. Bisa jadi, seleksi perekrutan peserta dari salah satu program ini membuat sekian banyak peserta merasa minder dan rendah diri karena banyaknya persyaratan yang ditawarkan dan sebagian besar tidak memenuhinya. Selain itu pengkondisian budaya atau *cultural conditioning* juga menjadi syarat yang tidak bisa di sepelekan. Beberapa negara ASEAN yang berada dalam satu iklim, mungkin tidak memberi pengaruh besar terhadap kondisi peserta dalam hal penyesuaian namun negara-negara seperti Australia, atau Canada dalam PAPAN dan bahkan Amerika dalam program YESnya harus benar-benar dikuasai oleh calon peserta.

Kemampuan komunikasi publik serta interaksi dengan peserta asing, penampilan dalam presentasi, penguasaan ilmu pengetahuan tentang Negara Indonesia atau negara lain yang di tuju merupakan bagian dari tantangan aktualisasi diri untuk bisa tampil menjadi bagian dari pemuda terpilih. Peserta akan disajikan dengan keberagaman sosial, budaya, ekonomi, gaya hidup serta etika dari negara tujuan. Dan pada titik ini, tahapan penerimaan budaya (*cultural acceptance*) dimulai. Proses ini memberikan pandangan bahwa perbedaan sosial budaya suatu komunitas atau masyarakat bukan hal yang patut dihindari tetapi di terima dan di pahami dengan menggunakan sudut pandang lain. Tidak jarang perbedaan budaya, misalnya dalam hal berpakaian, konsumsi dari satu jenis makanan, dan tata cara berkomunikasi sebagian besar peserta menemukan tantangan dan merasa tidak nyaman.

Konklusi

Program Pertukaran pemuda merupakan suatu keniscayaan terbangunnya citra suatu Negara dalam menerima segala bentuk keberagaman dari berbagai komunitas yang berbeda, baik suku, agama, ras, pandangan politik maupun sosial, budaya dan ekonomi. Ketika jaman memasuki tahapan disrupsi global dalam penguasaan teknologi dan tergerusnya nilai-nilai nasionalisme serta disintegrasi antar kaum dan bangsa, program kepemudaan dalam berbagai bentuk pengenalan kebudayaan memberikan kesempatan pemuda dari berbagai negara di ASEAN untuk tampil dan mewujudkan cita-cita bangsa bukan untuk bersaing dan memenangkan suatu kompetisi tetapi membantu pemerintah menyatukan suku, agama, ras, etnis, dari berbagai negara.

Program kepemudaan merangkum segala perbedaan, menerima dan memahami segala kekurangan bangsa lain dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan:

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.**

Referensi

- Admin. (2016, Maret 11). PAPAN, Program Pemuda Antar Negara. Surakarta: <https://indbeasiswa.com/2021/04/pertukaran-pemuda-antar-negara.html>.
- Beccaloni, G. (2018, Maret). *The Alfred Russel Wallace Website*. Retrieved Desember 06, 2022, from <https://wallacefund.myspecies.info>: <https://wallacefund.myspecies.info/content/iconic-species-discovered-alfred-russel-wallace>

- Budaya, B. A. (2022, September 18). *Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika di Indonesia*. Retrieved Desember 06, 2022, from id.usembassy.gov: <https://id.usembassy.gov/id/education-culture-id/yes-exchange-program-id/>
- DISPORA. (2022). *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur*. Retrieved Desember 07, 2022, from dispora.jatimprov.go.id: <https://dispora.jatimprov.go.id/pertukaran-pemuda-antar-negara-ppan/>
- Guidebook. (2021). *Pertukaran Pemuda Asia South Korea*. EHI Foundation.
- Jenie, U. A. (2008, November). *Tugu Wallace di tetapkan di Ternate*. Retrieved December 2022, from Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI: <http://lipi.go.id/lipimedia/tugu-wallace-ditetapkan-di-ternate/2152>
- Sukara, E. (2008, November). *lipi.go.id*. Retrieved Desember 2022, from LIPI: <http://lipi.go.id/lipimedia/tugu-wallace-ditetapkan-di-ternate/2152>

ROSWITA M ABOE lulus dari Monash University, Australia untuk program magister Hubungan Internasional pada tahun 2008. Dan sedang menempuh studi Doktorat pada Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2020. Roswita telah menulis bukunya sendiri: *Resolusi Konflik, Pronunciation Practice, Isu Hukum Kesehatan Elektronik, dan Bagian Antologi dalam: Potret Perempuan dan Anak, Membangun Kapasitas Guru Penulis, Pappatama, Boboso, Islam Kontemporer (Di Indonesia dan Australia)*, Saloi, dan editor beberapa *Proceeding*/buku: *International Workshop on Language and Ethnicity, E-Health, the Heart of the Spice Forest*. Ia juga aktif di asosiasi Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dan AGUPENA (Asosiasi Guru Penulis Indonesia) Maluku Utara sebagai Ketua Wilayah. Roswita telah menerbitkan sejumlah publikasi penelitian di jurnal lokal, nasional dan internasional. Atas berbagai prestasinya di bidang penulisan dan publikasi, Roswita menerima penghargaan Literasi sebagai "Peneliti" Anugerah Bahasa dari Kantor Badan Bahasa Maluku Utara (2016). Setelah studinya di Australia (sejak 2008), ia mengikuti berbagai seminar di tingkat lokal, nasional dan internasional dan menjalankan kapasitasnya di bidang Pendidikan Bahasa Inggris, Pariwisata, dan Urusan Internasional. Roswita dapat dihubungi melalui: roswitaaboe24@gmail.com.

Peran Generasi Muda untuk Mendukung Literasi di ASEAN

Azzura Ainurri Sabila

Secara umum, Literasi mengacu kepada kemampuan suatu individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah pada keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Wikipedia). Di kehidupan yang serba canggih saat ini, serta teknologi yang berkembang sangat cepat setiap harinya, literasi sudah seharusnya dilirik oleh berbagai pihak, salah satunya adalah generasi muda. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari lebih lanjut. Dari sini kita bisa banyak melakukan dan menjelajahi sesuatu yang ingin kita ketahui, contohnya memaksimalkan penggunaan media sosial agar lebih bermanfaat di segala bidang.

Ternyata, literasi yang buruk juga dapat berdampak buruk bagi psikologi remaja. Hal ini dikarenakan usia remaja yang cenderung labil dan sering menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan, tanpa mencari tahu dulu kebenaran dan keakuratan dari informasi tersebut. Maka dari itu, kemampuan literasi anak harus di asah dari sejak dini. Bisa dengan cara membangun komunikasi dan bimbingan belajar oleh orang tua, memberikan buku-buku bacaan kepada anak. Seperti di beberapa negara yang ada di belahan dunia, anak-anak yang baru lahir diberikan bingkisan buku bacaan oleh pemerintahnya, serta mendapatkan formulir keanggotaan dari sebuah perpustakaan umum (*posjakut.com*). Tidak heran jika di negara-negara tersebut memiliki minat baca dan angka literasi yang tinggi.

Di ASEAN sendiri, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke empat Literasi Penduduk di Asia Tenggara, yang pertama adalah Brunei Darussalam 97,21%, di posisi kedua yaitu Singapura 97,13%, diperingkat ketiga ada Filipina 96,8%, yang keempat yaitu Indonesia 96%, di bawah Indonesia terdapat negara Vietman 95,75% (*GoodStats*). Tetapi, jika dilihat dari Peringkat Literasi dunia, Indonesia saat ini berada di peringkat 62 dari 70 negara (*Program for International Student Assessment (PISA) 2019*). Wah, sangat disayangkan, rupanya Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Problematika Literasi di Indonesia

Mengapa Literasi di Indonesia masih rendah? Apa penyebabnya? Banyak sekali permasalahan dan tantangan yang menghambat dalam proses meningkatkan kemampuan Literasi pada anak. Seperti pada lingkungan rumah saya, banyak anak-anak yang setiap harinya membaca buku di rumah saya, padahal bisa dibilang perekonomian orang tua mereka tergolong mampu untuk membelikan anak-anaknya buku bacaan. Akan tetapi, ketika anak-anak meminta dibelikan buku, respon dari beberapa orang tua sangat kurang sekali. Justru, orang tua malah membelikan barang-barang sebenarnya kurang dibutuhkan oleh anaknya.

Kasus yang sering terjadi adalah orang tua yang memberikan gawai kepada anaknya yang berusia kurang dari 5 tahun, dibandingkan membaca dan bercerita dengan anak. Orang tua memberikan gawai dengan alasan, mereka tidak memiliki waktu untuk anaknya, sementara orang tua bisa pergi dengan teman-temannya, seperti pergi ke karaoke dan berbelanja. Sedangkan, anaknya dibiarkan begitu saja, seperti bermain dan belajar sendiri. Padahal, secara psikologis gawai yang diberikan bisa menyebabkan kecanduan, kurang fokusnya belajar pada anak, berkurangnya kualitas tidur yang baik, dan bahkan anak yang diberikan gawai bisa tumbuh dengan kurang optimal (*Kompas.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia*). Belum lagi bahaya dari media sosial dan sejenisnya.

Terdapat beberapa kasus lain yang ditemukan, yaitu dimana ada Rumah Baca Evergreen di Jambi yang menggerakkan kegiatan Literasi, tetapi masyarakat sekitar kurang mendukung kegiatan tersebut. Banyak alasan orang tua yang enggan menemani dan mengantarkan anaknya ke rumah baca. Padahal disamping itu banyak anak-anak dari

kelurahan lain yang bisa dibilang jarak dari rumah ke rumah baca sekitar 8-10 kilometer, ingin belajar di rumah baca. Ternyata, setelah diamati, hanya dari anak saja, belum bisa mewujudkan keinginan dan kebutuhannya sendiri dalam berliterasi. Anak juga butuh dukungan dari orang tua, keluarga, dan tentunya lingkungan sekitarnya.

Generasi muda sudah seharusnya ikut berkontribusi dan berperan penting untuk meningkatkan Literasi di Negara ASEAN. Mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu, keluarga, masyarakat, sekolah, kampus, dan lingkungan kerja, mereka sudah seharusnya meningkatkan kemampuan berliterasi mulai dari diri sendiri. Mereka bisa berliterasi sesuai dengan bidang, bakat, dan minat yang mereka miliki. Seperti mulai dari yang *basic*, yaitu literasi numerasi, dilanjutkan dengan literasi budaya dan kewargaan, literasi digital, bahkan juga bisa belajar tentang literasi finansial, dan juga literasi sains (*Mengenal 6 Literasi diptsd.kemdikbud.go.id*).

Meningkatkan Literasi di Indonesia

Seorang penyair ternama *Hafiz Ibrahim* mengungkapkan sebagai berikut: "*Al-Ummu madrasatul ula, iza a'dadta sya'ban thayyibal a'raq*" artinya "*Ibu adalah Madrasah (Sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.*" Seperti yang sudah diterapkan di negara Australia, mereka sudah melakukan pemberian buku dalam paket bingkisan untuk keluarga yang baru memiliki bayi. Bahkan jauh sebelum itu, terdapat sebuah program tantangan membaca atau *Reading Challenge* untuk memotivasi orang tua agar bisa menanamkan budaya membaca dalam keluarga (*posjakut.com*). Negara ASEAN juga bisa meniru kegiatan dari berbagai negara yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Sudah saatnya orang tua harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan literasi di keluarganya.

Contoh di negara ASEAN adalah Singapura, Dalam sebuah riset yang berjudul "*Effort to develop the Reading Interest of the People from Children in Singapore Libraries*" terhimpun sejumlah program yang digalakkan perpustakaan, baik itu Perpustakaan negara maupun swasta, tujuannya untuk menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Beberapa adalah "*Born to Read, Read to Bond*" dan "*1000 Father Reading*". Proyek "*Born to Read, Read to Bond*" diselenggarakan dengan bekerjasama melalui Kementerian Pembangunan Komunitas dan Olah Raga (*Ministry of Cummunity Developement and Sports*), yang diharapkan mampu menciptakan orang-orang dengan kebiasaan membaca sejak masih kecil, serta menularkan kebiasaan membaca ke seluruh anggota keluarganya (*mandira.id*).

"*Iqra*" yang terdapat pada QS. *Al-Alaq 96:1* memiliki arti "*bacalah*", sangat memiliki kaitan yang erat dengan literasi. Yang diperintahkan untuk membaca, belajar, dan memahami suatu. Pada tahun 2007, *Singapore National Library* berkolaborasi dengan *Center of Father* menggelar proyek "*1000 Father Reading*" yang bertujuan agar para ayah dapat terlibat di dalam kegiatan belajar membaca dan menulis anak. Para ayah yang mengikuti program ini dibekali dengan seperangkat panduan, seperti buku. Untuk praktiknya, para ayah dan anak-anaknya akan saling bertukar buku catatan berstempel dari perpustakaan (*mandira.id*). Maka dari itu, Indonesia bisa mencontoh negara yang mempunyai program literasi untuk anak. Mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar.

Jika anak dari kecil sudah terbiasa membaca, maka dia akan tumbuh dengan kecerdasan lingual yang lebih dari anak-anak seusianya. Merekalah yang akan menjadi bibit-bibit generasi yang berkompeten dan memiliki wawasan yang luas. Sudah sepantasnya kita generasi muda ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam rangka meningkatkan minat baca anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua di ASEAN.

Sebagai generasi muda ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kontribusi literasi di negara ASEAN misalnya, menjadi motor penggerak literasi di lingkungan sekitar sesuai dengan minat dan bakat, mengikuti kegiatan literasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, menjadi relawan literasi untuk daerah di kawasan ASEAN yang masih berada di pedalaman atau daerah pinggiran.

Selain itu generasi muda yang telah aktif, juga perlu diberikan wadah untuk menampung karya-karya dan ide kreatif mereka. Misal adanya "Konferensi Penggiat Literasi ASEAN". Atau, untuk generasi muda yang telah menghasilkan karya tulis baik sastra, artikel, maupun jurnal diberi wadah dan di fasilitasi oleh pemerintah negara ASEAN dan lembaga yang berkompeten untuk melakukan "Konferensi Penulis Remaja ASEAN". Dengan demikian akan timbul semangat dari generasi muda untuk memajukan Literasi negara ASEAN.

Dari pertemuan pertemuan ini pastinya akan muncul berbagai macam ide kreatif yang dapat menjadi modul pembelajaran, rekomendasi yang akan di sampaikan kepada pemerintah di masing-masing negara ASEAN. Para peserta konferensi inilah yang nantinya akan di jadikan “Duta Literasi” di masing-masing negaranya, atau adanya “Pertukaran Penganjur Literasi antar negara ASEAN” dimana para peserta dapat bertukar pengalaman dan mendapatkan pengalaman baru di bidang Literasi.

Hal ini bisa diwujudkan jika adanya kemauan serta komitmen yang kuat dari masing-masing pemerintah negara ASEAN. Selain pemerintah, peran serta lembaga swasta, perusahaan yang ada di beberapa negara ASEAN perlu dilibatkan, sebagai upaya mendorong kegiatan literasi generasi muda ASEAN. Keterlibatan pemerintah, pihak swasta sangat dibutuhkan untuk menjadi sponsor kegiatan. Sebagaimana yang dijelaskan Kak Masyitah sebagai pengurus Taman Baca Masyarakat Indonesia, kak Ita menjelaskan bahwa beberapa point penting yang dapat dilihat dari kegiatan literasi adalah: Minimnya Sumber daya manusia; Regenerasi bidang literasi sangat sulit; Pendanaan kegiatan literasi yang minim sponsor; dan Manajemen komunitas yang minim.

Di sinilah perlunya kolaborasi yang optimal dari berbagai bidang. Literasi juga bisa ditingkatkan lebih lagi, beberapa contohnya adalah pihak Bandara menyediakan Ruang Baca yang nyaman bagi pengunjung sambari menunggu pesawat. Menyediakan ruang baca di rumah sakit juga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan Literasi di ASEAN, dengan demikian pengunjung atau keluarga pasien, bisa membaca buku yang ada di rumah sakit.

Segitiga Literasi Sama Sisi

Untuk membangun literasi yang kokoh dan berkesinambungan, dapat disimpulkan bahwa. Ada tiga sisi terpenting yang harus diperhatikan, saya menyebutnya *Segitiga Literasi Sama Sisi*. Sisi pertama adalah Pemerintah (Para Perangkat negara-negara ASEAN), dalam hal ini pemerintah wajib mendukung dan mengapresiasi generasi muda yang menjadi motor penggerak literasi di ASEAN, dengan menyiapkan sarana prasarana serta pendanaan yang mencukupi.

Yang kedua adalah orang tua. Orang tua juga berperan aktif untuk menumbuhkan minat baca anak dari usia dini. Tidak memberikan gawai kepada anak-anak, tetapi menggantikannya dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan usianya. Dengan demikian anak-anak terbiasa berliterasi dari usia dini, sehingga kecerdasan lingual mereka akan lebih terasah yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap kecerdasan sosial, menumbuhkan nilai-nilai positif pada anak dari buku-buku yang dibacakan orang tuanya.

Yang terakhir adalah peran generasi muda. Generasi Muda harus mau dan memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari zona nyaman mereka, melepaskan segala hal yang tidak penting, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta fokus dengan kegiatannya agar bisa lebih produktif dan bermanfaat bagi kemajuan literasi ASEAN.

Anak nelayan mendayung sampan

Mendayung sampan sampai ke tepi

Ayo dukung Generasi Muda ASEAN

Bergandeng tangan membangun literasi

Referensi

Wikipedia Literasi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Literasi> (diunduh pada 2 Desember 2022).

Mengenal 6 Literasi Dasar Yang Harus Kita Ketahui Dan Miliki, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-mengenal-6-literasi-dasar-yang-harus-kita-ketahui-dan-miliki> (diunduh pada 03 Desember 2022).

Finlandia Memiliki Tingkat Literasi Nomor 1 Di Dunia, https://jakartautara-pikiran--rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/jakartautara.pikiran-rakyat.com/jakut/amp/pr-1764955620/finlandia-memiliki-tingkat-literasi-nomor-1-di-dunia-berikut-5-negara-dengan-minat-membaca-tertinggi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAQArABIIACAw%3D%3D#amp_ct=1670075596312&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16700742280470&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fjakartautara.pikiran-rakyat.com%2Fjakut%2Fpr-1764955620%2Ffinlandia-memiliki-tingkat-literasi-nomor-1-di-dunia-berikut-5-negara-dengan-minat-membaca-tertinggi (diunduh pada 02 Desember 2022).

Tingkat Literasi Penduduk Negara Asia Tenggara, <https://goodstats.id/article/tingkat-literasi-negara-asia-tenggara-gSjhj> (diunduh pada 04 Desember 2022)

Tips Anak Suka Baca: Di Singapura, Program Membaca Dilakukan Pada Ibu Melahirkan Dan Bayinya, https://mandira.id/news/detail/tips-anak-suka-baca-di-singapura-program-membaca-dilakukan-pada-ibu-melahirkan-dan-bayinya_237 (diunduh pada 05 Desember 2022).

AZZURA AINURRI SABILA adalah pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 8 yang ada di Kota Jambi, saat ini ia duduk di bangku kelas 10. Ia pernah mengikuti tiga kali Konferensi Penulis Cilik Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bekerja sama dengan penerbit DAR! Mizan (2015-2017). Selain itu, dia juga mempunyai buku antologi cerita pendek bersama yang berkolaborasi dengan penulis-penulis cilik Indonesia yang berjudul *"Cican Kota Impian"* (2016). Tak hanya itu, pada tahun 2017 Azzura juga memenangkan *Juara 2 Lomba Menulis Kreatif Anak yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi*. Di tahun 2018, ia berhasil memenangkan *Juara 2 Lomba Cipta Pantun Festival Lomba Literasi Nasional*. Bahkan, ia juga sering menjadi bintang tamu untuk mengisi acara di salah satu program stasiun televisi yang ada di Indonesia, yaitu TVRI. Di samping itu, Azzura juga merupakan salah satu anggota dari Rumah Baca Evergreen yang berkecimpung di bidang Literasi. Ia dapat dihubungi melalui email: azzuraainurrisabila@gmail.com.

Menyiapkan Generasi ASEAN Berkarakter Mulia

Dhiah Ashri

Dalam era globalisasi ini, di mana dunia semakin terhubung dan dinamis, keberadaan generasi berkarakter mulia menjadi suatu kebutuhan mendesak. Di tengah arus informasi yang begitu deras dan perubahan sosial yang pesat, memiliki karakter yang kuat dan mulia adalah fondasi yang diperlukan untuk membimbing generasi penerus menuju masa depan yang lebih baik.

Di tengah arus modernisasi, karakter mulia menjadi pondasi yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Keberadaannya membangun individu yang memiliki integritas, empati, dan rasa tanggung jawab, hal-hal yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Karakter mulia juga menjadi penangkal terhadap berbagai masalah sosial seperti kekerasan, narkoba, dan lain sebagainya.

Karakter Mulia

Karakter mulia terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk integritas, disiplin, kejujuran, kerja keras, rasa tanggung jawab, dan empati. Integrasi dari komponen-komponen ini membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat.

Karakter mulia adalah suatu konsep yang mengacu pada kumpulan sifat-sifat dan nilai-nilai moral yang dianggap baik, yang membentuk dasar perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakter mulia seperti integritas, disiplin, kejujuran, kerja keras, rasa tanggung jawab, dan empati memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Karakter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Integritas adalah kualitas moral yang mencerminkan keberanian untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan moralitas tanpa memperhitungkan konsekuensinya.

Individu yang memiliki integritas tinggi akan tetap konsisten dalam tindakan dan perkataannya, bahkan jika tidak ada yang melihat atau memeriksa. Disiplin mencakup kemampuan untuk mengontrol diri sendiri, memiliki aturan dan mengikuti rutinitas dengan tekun. Orang yang disiplin cenderung memiliki fokus yang kuat pada tujuan mereka, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi godaan dan distraksi yang bisa menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan kejujuran adalah sifat tulus dalam segala tindakan dan perkataan. Orang yang jujur akan berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa menyembunyikan fakta atau menyajikan informasi yang menyesatkan. Orang jujur adalah pilar moralitas yang teguh, menciptakan fondasi yang kokoh bagi hubungan dan kepercayaan dalam masyarakat. Mereka tidak hanya memancarkan keberanian untuk berbicara kebenaran, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dalam segala situasi.

Kerja keras mencerminkan dedikasi dan usaha maksimal dalam setiap tindakan yang diambil. Orang yang bekerja keras menunjukkan kegigihan dan ketekunan dalam mencapai tujuan mereka, bahkan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. Bekerja keras membentuk karakter yang tangguh, mengajarkan nilai-nilai seperti ketabahan, disiplin, dan ketelitian. Individu yang gigih dalam usahanya cenderung membangun kepercayaan diri yang kuat, meningkatkan keterampilan, dan mencapai potensi penuhnya.

Lebih dari sekadar pencapaian materi, bekerja keras mengajarkan arti sebenarnya dari kerja tim, ketulusan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan upaya yang konsisten dan tanpa henti, seseorang dapat mengubah impian menjadi kenyataan, menciptakan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan kontribusi positif pada masyarakat serta dunia di sekitarnya.

Rasa tanggung jawab adalah kemampuan untuk mengenali dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Individu yang bertanggung jawab akan mengambil keputusan dan bertindak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Orang yang bertanggung jawab tidak hanya mengambil keputusan bijaksana dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Mereka memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, dan mereka siap menghadapi konsekuensi tersebut dengan penuh integritas.

Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Orang yang memiliki empati dapat memahami sudut pandang orang lain, merasakan emosi mereka, dan merespons dengan belas kasihan dan pengertian. Empati mengajarkan kita untuk melihat dunia melalui mata orang lain, membantu meredakan konflik, membangun kerjasama yang erat, dan menciptakan lingkungan yang penuh pengertian. Dengan memahami perspektif orang lain, empati memotivasi tindakan baik, belas kasihan, dan ketulusan, menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai.

Ketika semua komponen ini terintegrasi dalam diri seseorang, individu tersebut menjadi contoh moralitas yang tinggi. Mereka cenderung membuat keputusan yang bijaksana, memperjuangkan kebenaran, menghormati orang lain, dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Individu dengan karakter mulia mampu membentuk lingkungan sosial yang lebih baik melalui tindakan dan sikap positif mereka.

Dampak Positif

Generasi berkarakter mulia memiliki dampak positif yang besar pada masyarakat dan bangsa. Mereka mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, inovator yang kreatif, dan warga negara yang patuh pada hukum. Mereka juga mampu membina hubungan sosial yang sehat dan harmonis, memperkuat fondasi keluarga, serta memajukan bidang pendidikan dan ekonomi.

Kerjasama antar-negara ASEAN dalam membangun generasi berkarakter mulia sangat penting. Dengan bertukar pengalaman dan pengetahuan, negara-negara ASEAN dapat menciptakan kurikulum pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai karakter mulia secara konsisten. Selain itu, program pertukaran pelajar dan tenaga pendidik antar-negara ASEAN dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar-budaya, menghasilkan generasi yang lebih terbuka dan inklusif.

Dengan memahami urgensi karakter mulia di zaman sekarang, mengidentifikasi komponen-komponen karakter tersebut, serta mengakui manfaat generasi berkarakter mulia, kita dapat melihat pentingnya investasi pada pembentukan karakter anak-anak dan generasi penerus. Dengan sinergi antar-negara ASEAN, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter mulia ini. Melalui upaya bersama, kita dapat membawa masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, sebuah masa depan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan, integritas, dan rasa tanggung jawab.

Sinergi ASEAN yang dijalankan oleh generasi berkarakter membawa berbagai keuntungan yang mendalam bagi kawasan Asia Tenggara.

Pertama, dengan karakter mulia seperti integritas, kejujuran, dan empati, generasi ini membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara negara-negara ASEAN. Mereka memperkuat kolaborasi ekonomi, budaya, dan pendidikan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Karakter-karakter ini juga membantu dalam penyelesaian konflik, karena generasi berkarakter memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, menciptakan kesepakatan yang lebih mendalam di tengah perbedaan.

Kedua, dengan rasa tanggung jawab dan kerja keras, generasi ini memajukan inisiatif-inisiatif penting di ASEAN, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Mereka membangun masyarakat yang inklusif, memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok yang rentan, dan menciptakan peluang bagi semua warga ASEAN untuk berkembang. Melalui karakter yang kuat ini, generasi ASEAN yang terbaik itu akan membawa kawasan ini menuju masa depan yang lebih terang dan berkelanjutan untuk semuanya.*

DHIAH ASHRI adalah nama pena dari Mutawadhiah, putri dari orang tua M. Ashri HAR dan Nur Khaerati Abdullah. Menamatkan pendidikannya di Pesantren Darul Istiqamah Pusat, Maccopa Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (2015),

sebuah pesantren yang didirikan oleh KH. Ahmad Marzuki Hasan dan dipimpin oleh KH. M. Arif Marzuki Al Hafidz. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di STAI DDI Maros, tak jauh dari Darul Istiqamah, dan Universitas Halmahera, di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Ia juga melanjutkan studi di Universitas Terbuka. Sejak lama Dhiah Ashri tertarik pada isu parenting, dan aktif pada berbagai kegiatan di berbagai organisasi dan menjadi salah satu co-founder Rumah Produktif Indonesia. Saat ini, ibu lima anak ini juga aktif berbisnis dari rumahnya. Tulisannya dimuat di buku *G20 Pulih Bersama, Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022). Ia dapat dihubungi di email: dhiah.ashri@gmail.com.

Mempersiapkan Generasi Terbaik Pewaris ASEAN

Adnan Arafani

Kerja sama yang telah dirawat sejak 1967 dan telah dijajaki sejak beberapa kurun waktu sebelumnya masih bisa berlangsung dengan baik hingga hari ini. Meskipun berbagai persoalan muncul dalam menjalankan komitmen untuk berkomunitas dalam wadah yang dinamakan ASEAN ini, setiap negara berusaha tetap menjaga agar komunitas ini menjadi wadah kerjasama yang menguntungkan semua anggotanya.

Dalam usaha merawat agar komunitas ini semakin kuat, berbagai kebijakan teknis maupun kesepakatan yang sifatnya strategis perlu dibuat. Namun pada masanya, ASEAN sebagai komunitas akan diisi oleh orang-orang berbeda dan akan dikelola oleh generasi berbeda. Oleh sebab itu, adalah hal yang tidak bisa ditunda untuk melakukan segenap usaha mempersiapkan generasi terbaik untuk meneruskan dan mengembangkan cita-cita mulia ASEAN dari sekarang.

Seiring dengan implementasi dan pengembangan masyarakat ekonomi ASEAN di Negara-negara anggota, keterlibatan perempuan dalam usaha bisnis dan ekonomi juga semakin meningkat. Namun keterlibatan ibu dalam aktifitas ekonomi tanpa batasan berisiko menjadikan anak-anak melewati masa emasnya secara tidak maksimal (Fuller et al., 2002). Disisi lain, pasca Covid-19 ada masalah yang memiliki efek domino di kalangan pelajar. Ketertinggalan pembelajaran dan kecerdasan sosial dan emosional menyisakan ketimpangan generasi. Peran penting ibu di rumah yang ditinggalkan oleh kesibukan dalam dunia kerja berdampak pada perkembangan kognitif anak (Felfe & Hsin, 2012). Tumpukan potensi masalah ini akan berakumulasi menjadi ketidaksiapan anak sebagai anggota komunitas untuk menerima estafet kepemimpinan selanjutnya. Karakter yang negatif generasi penerus seperti kecurangan dalam ujian muncul sejak dini (Daniels et al., 2021) sehingga berpotensi tumbuh menjadi karakter pemimpin yang kontraproduktif terhadap cita-cita ASEAN.

Pentingnya Pengasuhan

Orang tua memainkan peran penting dalam mempersiapkan pemimpin masa depan dengan menumbuhkan potensi kepemimpinan pada anak-anak mereka melalui praktik pengasuhan tertentu (Kudo et al., 2012). Generasi penerus asean yang dipersiapkan oleh orang tua terdidik akan menjadi perwajahan ASEAN yang memiliki potensi sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini akan mendorong perkembangan pada bidang lain yang tentu saja tergantung pada sumberdaya manusianya seperti sector ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan dan lainnya.

Pengasuhan yang tidak sesuai dapat menyebabkan krisis kepemimpinan, jadi penting bagi orang tua untuk mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, memfasilitasi, dan menyalurkan energi kolektif anak-anak mereka. Review dari Bhandarker dan tim yang meneliti biografi dan autobiografi beberapa tokoh besar memberikan kesimpulan bahwa ada kesamaan di antara tokoh tersebut dalam hal pengalaman dalam pengasuhan yang mereka terima dari orang tua (Bhandarker & Singh, 1999).

Pengembangan diri anak yang diserahkan kepada sekolah sepenuhnya juga sangat merugikan anak. ASEAN yang kuat dimasa depan perlu bantuan para orang tua untuk sejak awal mengidentifikasi dan mengembangkan bakat pada anak-anak mereka (Mun et al., 2021).

Orang tua yang melakukan pengasuhan yang efektif dan melibatkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dalam diri anak-anaknya, memiliki dampak langsung pada akademik dan pengembangan kepribadian anak-anaknya (Kearns, 2016). Dengan demikian, generasi ASEAN yang diasuh oleh orangtua yang punya kompetensi dalam pengasuhan akan menjadi pilar ASEAN yang lebih tangguh di mata dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa nilai-nilai ASEAN yang dapat diimplementasikan dalam pengasuhan anak sejak awal.

Penanaman nilai solidaritas kewilayahan atau regional dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antar negara-negara pada generasi penerus ASEAN. Mereka dapat tumbuh dalam iklim masyarakat ASEAN sebagai sebuah komunitas besar. Di antara cara yang dapat dilakukan adalah melalui pengenalan budaya antarkomunitas di ASEAN kepada anak-anak sejak dini. Hal ini menjadikan rasa kebersamaan dan rasa memiliki diantara mereka (Chema, 2013).

Selain itu, sikap toleransi dengan keanekaragaman perlu dipupuk dengan rutin. Dengan kata lain, strategi agar sikap toleransi antar komunitas perlu dilaksanakan dalam setiap jenjang perkembangan anak. Mulai dari pra sekolah hingga perkembangan di pengasuhan oleh orang tua. Kecenderungan untuk saling menghargai di antara generasi muda ASEAN sudah mulai subur seiring perkembangan internet semakin merata (Marwan & Ya'akub, 2016). Program pertukaran pemuda dan kunjungan antar anak-anak usia sekolah dasar bisa dilakukan dengan massif dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi informasi saat ini.

Sebagai kesimpulan, perkembangan dan perbedaan karakteristik generasi ke generasi perlu dijadikan faktor yang diperhitungkan dalam merawat komunitas ASEAN di masa depan. Kegagalan generasi saat ini mempersiapkan penerus yang siap secara kepemimpinan dan secara sikap dan karakter akan mempersulit tercapainya cita-cita ASEAN bahkan bisa membuat bangunan kerja sama yang selama ini sudah dibangun menjadi lapuk, hancur hingga sirna sama sekali.*

Referensi

- Bhandarker, A., & Singh, P. (1999). Parenting Transformational Leaders. *Vision*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/097226299900300102>
- Chema, A. (2013). *ASEAN 4 KIDS: AN INTERACTIVE APPLICATION FOR LEARNING ASEAN CULTURE*.
- Daniels, L. M., Goegan, L. D., & Parker, P. C. (2021). The impact of COVID-19 triggered changes to instruction and assessment on university students' self-reported motivation, engagement and perceptions. *Social Psychology of Education*, 24(1), 299–318.
- Felfe, C., & Hsin, A. (2012). Maternal work conditions and child development. *Economics of Education Review*, 31(6), 1037–1057.
- Fuller, B., Caspary, G., Kagan, S. L., Gauthier, C., Huang, D. S.-C., Carroll, J., & McCarthy, J. (2002). Does maternal employment influence poor children's social development? *Early Childhood Research Quarterly*, 17(4), 470–497.
- Kearns, K. (2016). *Authoritative parenting and transformational leadership: an example of family-to-work enrichment*.
- Kudo, F. T., Longhofer, J. L., & Floersch, J. E. (2012). On the origins of early leadership: The role of authoritative parenting practices and mastery orientation. *Leadership*, 8(4), 345–375.
- Marwan, N. H., & Ya'akub, A. N. (2016). EMBRACING ASEAN COMMUNITY: MALAYSIA, INDONESIA AND BRUNEI YOUTH PERSPECTIVE. *Journal of Borneo-Kalimantan*, 2(2).
- Mun, R. U., Ezzani, M. D., & Yeung, G. (2021). Parent Engagement in Identifying and Serving Diverse Gifted Students: What Is the Role of Leadership? *Journal of Advanced Academics*, 32(4), 533–566.

ADNAN ARAFANI adalah seorang pendidik dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang menempuh pendidikan di Perguruan Islam Ar Risalah (Sumatra Barat), lalu melanjutkan S1 di Universitas Negeri Padang pada jurusan Bimbingan dan Konseling kemudian melanjutkan jenjang magister di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia pada bidang Konseling juga. Penulis juga telah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Konselor di UNP. Pernah mengajar di SD, SMP dan SMA sebagai guru BK dan saat ini lebih banyak mengajar di Universitas Adzkiia untuk program studi PGSD dalam mata kuliah psikologi dan bimbingan konseling. Penulis juga aktif memberikan pelatihan pada orang tua, guru dan masyarakat dalam topik Parenting dan juga Teknologi melalui lembaga ANATA coaching and consulting. Selain itu, penulis juga ikut aktif berkontribusi dalam dakwah untuk pemuda melalui Dewan Dakwah Indonesia.

Peran Pesantren Menyiapkan Calon Pemimpin Global

Anisah Syahidah dan Afifah Azizah

Santri bukan hanya masa depan bagi bangsa Indonesia tapi juga masa depan bagi ASEAN. Santri adalah pribadi-pribadi yang telah dibina dan ditanamkan berbagai nilai positif yang kelak berguna untuk kehidupan mereka di masyarakat. Sejak dini mereka telah ditanamkan pelajaran mahfuzhat sebagai berikut:

الْجِدُّ بِالْجِدِّ وَالْحِرْمَانُ بِالْكَسَلِ # فَانْصَبْ تُصَبَّ عَنْ قَرِيبٍ غَايَةَ الْأَمَلِ

Artinya: Rezeki itu datang dengan kerja keras dan tertahan dengan kemalasan. Maka bekerja keraslah niscaya kau dapatkan dengan segera apa yang kau cita-citakan.

Tulisan ini akan membahas nilai-nilai yang ada di pesantren, khususnya Pesantren Darunnajah Jakarta dan bagaimana relevansinya dengan penyiapan santri sebagai pemimpin global.

Empat Pilar Kepesantrenan

Ada empat pilar penting di Darunnajah. Pertama adalah panca jiwa. Ini merupakan fondasi karakter yang menekankan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kesanggupan mandiri, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Jiwa keikhlasan mengajarkan santri untuk bertindak dengan niat yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Jiwa kesederhanaan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan hidup, sementara jiwa kesanggupan mandiri mengembangkan kemandirian dan keberanian santri dalam menghadapi tantangan hidup. Ukhuwah Islamiyah membentuk hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat Islam, sementara jiwa bebas mengajarkan santri untuk berpikir kreatif dan bersikap progresif dalam menghadapi perubahan.

Kedua adalah pancabina. Pancabina merupakan pilar kedua yang menekankan pentingnya keberagaman aspek kehidupan. Bertakwa kepada Allah SWT menjadi dasar spiritualitas yang kuat, membimbing santri dalam menjalani kehidupan beragama yang benar. Berakhlak mulia mengajarkan kesadaran akan etika dan moralitas dalam setiap tindakan dan perilaku. Kesehatan fisik ditekankan melalui konsep berbadan sehat, *men sana in corpore sano* (jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang sehat), yang mencakup pola makan seimbang, olahraga teratur, dan kebersihan diri. Berpengetahuan luas menggali minat dan bakat santri dalam berbagai bidang pengetahuan, sementara kreatif dan terampil mendorong pengembangan keterampilan dan kreativitas yang dibutuhkan di masa depan.

Ketiga adalah panca dharma. Panca Dharma menekankan pentingnya kontribusi positif santri dalam masyarakat. Ibadah adalah landasan spiritualitas, mengajarkan santri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ritual ibadah. Ilmu yang berguna di masyarakat mempersiapkan santri dengan pengetahuan yang praktis dan relevan, memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan masyarakat. Kader umat melibatkan santri dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan, memupuk jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Da'wah Islamiyah mengajarkan santri untuk menyebarkan ajaran Islam *bilhikmah wal mau'izah*, membangun hubungan yang harmonis antara umat beragama. Cinta tanah air dan berwawasan Nusantara memperkuat identitas nasional dan kecintaan terhadap Indonesia, sementara berwawasan global mengajarkan santri untuk memahami kompleksitas budaya dan keberagaman yang ada di dunia.

Yang terakhir adalah panca jangka. Panca jangka menekankan pentingnya perencanaan dan pengembangan jangka panjang. Peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan tuntutan zaman. Pembangunan fisik mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan santri. Kegiatan seperti *fundraising* mengajarkan prinsip keuangan yang sehat untuk mendukung keberlanjutan pesantren. Pengkaderan melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan kepemimpinan dan potensi santri, sementara pengabdian masyarakat mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat sekitar, tidak meremehkan hal-hal kecil, dan memperkuat hubungan antara pesantren dan komunitas sekitarnya.

Melalui empat pilar ini, Pesantren Darunnajah menciptakan lingkungan pembelajaran yang membimbing santri untuk menjadi individu yang beriman, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan fondasi yang kokoh ini, santri diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berbudaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Makna Aktivitas Santri

Santri memiliki berbagai aktivitas yang mendukung kesadaran global dan kepemimpinan mereka. Beberapa kegiatannya adalah belajar Bahasa Arab dan Inggris. Belajar bahasa Arab dan Inggris membuka pintu akses santri ke informasi, budaya, dan perspektif internasional. Dengan menguasai bahasa-bahasa ini, santri dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara, memahami literatur dan kebudayaan global, serta mengakses sumber daya pendidikan dan informasi internasional.

Kemudian, kehadiran tamu asing, baik dari negara-negara Arab maupun Barat, yang memberikan kesempatan kepada santri untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Dialog dengan tamu-tamu asing ini memperluas wawasan santri tentang perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia, membantu mereka memahami perspektif global, serta membangun keberanian untuk tampil dan berdialog.

Selain itu juga ada kunjungan pimpinan dan guru ke sekolah di luar negeri. Kunjungan pimpinan dan guru pesantren ke sekolah di luar negeri membawa ide-ide baru dan praktik terbaik dalam pendidikan global ke pesantren. Mereka dapat membawa kembali pengetahuan tentang sistem pendidikan luar negeri, kurikulum inovatif, dan metodologi pengajaran yang efektif, memperkaya pengalaman belajar santri.

Santri juga terlibat dalam sebagai panitia berbagai kegiatan. Menjadi panitia dalam berbagai kegiatan seperti pentas seni, pramuka, bela diri Tapak Suci, marching band, dan lainnya mengajarkan santri tentang kepemimpinan, kerja sama tim, dan pengorganisasian acara. Mereka belajar memimpin, berkomunikasi efektif, dan mengelola waktu dengan baik, keterampilan kepemimpinan yang sangat penting di dunia global.

Santri juga mengikuti berbagai kompetisi. Mengikuti kompetisi di dalam dan luar negeri, baik akademik maupun non-akademik, mengasah keterampilan kompetitif santri. Mereka belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan kerjasama tim. Pengalaman ini tidak hanya membangun rasa percaya diri, tetapi juga mengajarkan arti kegigihan dan kerjasama internasional. Tapak Suci misalnya, berguna untuk kesehatan dan kedisiplinan. Pramuka berguna untuk menumbuhkan kemandirian dan belajar hidup di alam.

Selain itu, santri juga dilatih untuk memiliki orientasi belajar, membuat *planning*, memiliki lingkup pertemanan yang baik, tidak meremehkan hal-hal kecil, menghargai orang lain, optimis dan percaya diri serta *friendly*, yakni ramah terhadap orang lain. Tidak hanya itu, santri juga diajarkan untuk memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan bermanfaat, mampu mengontrol emosi, tidak mudah baper, bertani bertanya, dan beradab. Terkait adab, ada satu kalimat bagus, yakni *al adabu fauqal 'ilmu* yang artinya "adab itu di atas ilmu."

Dengan menggabungkan berbagai kegiatan dan karakter ini, santri tidak hanya memperluas pengetahuan mereka tentang dunia, tetapi juga membangun jiwa kepemimpinan yang beradab. Kesadaran global yang mereka kembangkan membantu membentuk pemimpin masa depan yang berorientasi pada bagaimana menjadi solusi bagi berbagai masalah kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya."

Santri dan ASEAN

Santri pondok pesantren memiliki peran yang penting dalam mempelajari dan menyukseskan berbagai aktivitas di ASEAN melalui pendekatan pendidikan di pesantren. Dalam mempelajari keberagaman budaya, agama, dan bahasa di ASEAN, santri diajarkan untuk memiliki sikap toleransi, penghargaan, dan pemahaman yang mendalam terhadap keragaman tersebut. Dengan pemahaman yang kuat tentang keberagaman, santri dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dari berbagai negara di ASEAN.

Santri dapat menyukseskan berbagai aktivitas di ASEAN melalui partisipasi aktif dalam kegiatan budaya, seni, olahraga, dan keagamaan di tingkat regional. Dengan mendukung dan berpartisipasi dalam festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan olahraga bersama, santri dapat memperkuat persahabatan dan kerja sama antarbangsa.

Santri dapat berperan sebagai duta kebaikan dan budaya di ASEAN melalui partisipasi dalam program pertukaran pelajar, kegiatan sosial, dan proyek kemanusiaan di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka pelajari di pondok pesantren, santri dapat membangun jaringan kerjasama dan solidaritas yang kuat di antara pemuda ASEAN. Dengan demikian, santri pondok pesantren memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik di wilayah ASEAN.*

ANISAH SYAHIDAH adalah santri kelas V Pondok Pesantren Darunnajah. Sebelumnya, ia bersekolah di SDN Mononutu, Ternate Maluku Utara, kemudian ke Pesantren Darul Istiqamah Maros, MIM 02 Kukusan Beji Depok. Aktif berkegiatan di Tapak Suci Darunnajah. Ia juga pernah mengikuti Program Tahfizh di Darunnajah 13, dan mendapatkan medali emas pada lomba pencak silat Tapak Suci Uhamka Cup serta juara 3 Tapak Suci *Darunnajah Open*.

AFIFAH AZIZAH adalah santri kelas IV Pondok Pesantren Darunnajah. Sebelumnya, ia bersekolah di SDN Mononutu, Ternate Maluku Utara, kemudian ke Pesantren Darul Istiqamah Maros, MIM 02 Kukusan Beji Depok. Ia aktif dalam berbagai aktivitas kepesantren, terakhir menjadi ketua pentas seni Bhinneka Tunggal Ika. Afifah pernah menjadi juara pada lomba majalah dinding dengan tema hari santri serta menjadi juara 1 lomba Tapak Suci.

Menjadi Santri Go International

Fikri Ihsani

Seiring dengan perkembangan zaman, para santri dituntut untuk menjadi individu yang berskala internasional. Menjadi santri yang *go international* bukan hanya mencari pengetahuan, tetapi juga mengasah karakter dan membentuk kepribadian yang tangguh. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa meniti jalan dalam menuntut ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga.”

Ada beberapa hal yang perlu diperjuangkan santri agar dapat menjadi *go international*.

1. Membaca. Membaca adalah jendela dunia. Santri yang rajin membaca akan memiliki wawasan yang lebih luas, baik tentang agama maupun ilmu pengetahuan umum. Dengan membaca, santri dapat menggali ilmu dari berbagai referensi, bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga buku-buku pengetahuan modern yang dapat membentuk pemikiran seperti *Buku Pintar, Why?*, dan lain sebagainya.
2. Mempelajari sesuatu lebih dalam. Mempelajari sesuatu lebih dalam, termasuk materi pelajaran dan disiplin ilmu tertentu, memungkinkan santri untuk menguasai satu ilmu dengan baik. Dengan pemahaman yang mendalam, santri dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional.
3. Memperbanyak pertemanan. Memperbanyak pertemanan, mulai dari lingkungan sekolah yang santrinya berasal dari berbagai tempat, memungkinkan santri untuk memahami dan menghargai perbedaan.
4. Aktif dalam organisasi. Aktif dalam organisasi, baik di tingkat lokal maupun internasional, memberi kesempatan kepada santri untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, dan keterampilan komunikasi. Organisasi di pesantren juga bisa menjadi wadah untuk menggali potensi diri dan berkontribusi pada masyarakat.
5. Beribadah dan berdoa. Beribadah dan berdoa adalah pijakan utama dalam kehidupan seorang santri. Konsistensi dalam menjalankan ibadah dan berdoa memperkuat spiritualitas, memberi ketenangan batin, dan mengajarkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Doa juga merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan yang memberi kekuatan dalam meraih kesuksesan.
6. Rajin bertanya. Santri yang rajin bertanya menunjukkan keingintahuan dan hasrat untuk belajar. Bertanya adalah awal dari penemuan ilmu baru. Dalam pesantren, budaya bertanya juga mendorong santri untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan sesama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.
7. Rajin memberi. Santri yang rajin memberi, baik dalam bentuk ilmu, waktu, atau bantuan kepada sesama, menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Kegiatan sosial seperti memberi bantuan kepada yang membutuhkan atau berpartisipasi dalam kegiatan amal membentuk karakter rajin memberi yang sangat dihargai di tingkat internasional.
8. Tidak berkecil hati. Kegagalan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Santri yang tidak berkecil hati dalam menghadapi tantangan akan memiliki kekuatan mental dan emosional yang kuat. Ketekunan dan keyakinan diri adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan meraih kesuksesan.
9. Tidak pendendam. Santri yang tidak pendendam mempraktikkan nilai-nilai toleransi, pengampunan, dan kedamaian. Menghargai perbedaan pendapat dan bersikap lapang dada dalam menghadapi konflik adalah sikap yang sangat dihargai dalam lingkungan internasional.

Untuk menjadi santri yang sukses di tingkat internasional harus menghadirkan komitmen untuk terus belajar, mengasah karakter, dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Sejak muda, santri harus belajar dan tidak

panjang angan-angan, apalagi mudah mengeluh. Bersabar dan menerima apa yang ada adalah penting, sebagaimana peribahasa mengatakan “telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari” (*baidhatul yaumi khairun min dajajatil ghad*).

Melalui pendidikan pesantren yang kokoh nilai-nilainya, santri dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan dunia. Dengan menggali ilmu dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dengan bijak, santri dapat membawa cahaya dan inspirasi kepada dunia internasional.*

FIKRI IHSANI adalah siswa kelas I Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Menamatkan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 2 Kukusan Beji Depok. Saat itu ia menjadi ketua kelas 6. Fikri senang membaca berbagai buku dan jalan-jalan. Saat menjadi ketua kelas, ia menginisiasi dan menyusun buku angkatan yang berisi profil siswa dan guru.

Bagian Kelima
Menuju ASEAN Sehat & Literat:
Potret Perempuan, Kesehatan,
dan Literasi

BAB 19

Sehat dan Berdaya Perempuan ASEAN

Partisipasi Politik Perempuan dan Komitmen Kesetaraan Gender Negara-Negara ASEAN

Audra Jovani

Pendahuluan

Pada 29 September 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga memimpin Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika Serikat tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara virtual. Dialog ini merupakan dialog pertama yang dilakukan dalam rangka memajukan agenda ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perempuan. Dalam dialog yang dihadiri oleh para menteri yang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan negara-negara anggota ASEAN, delegasi Amerika Serikat dan pimpinan ASEAN *Committee on Women* (ACW), menteri PPPA menyatakan:

Menjadi kewajiban kita untuk menggali dimensi gender dan membongkar dampak dari tantangan yang muncul pada perempuan dan anak perempuan selain itu juga untuk mengarahkan dan memberikan arahan strategis pada agenda pembangunan ASEAN di seluruh pilar Komunitas ASEAN. Hal ini akan merintis arah masa depan ASEAN yang mengutamakan tujuan dan tindakan transformatif gender dalam agenda pembangunan sepuluh tahun mendatang di kawasan, khususnya pada isu pemberdayaan ekonomi perempuan, pengarusutamaan gender, perdamaian dan keamanan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. (Kemenpppa, 2022)

Berkaitan dengan agenda pembangunan ASEAN di seluruh pilar Komunitas ASEAN (Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosio Kultural ASEAN) (Isabela, 2022), hal ini sejalan dengan tujuan dan tindakan transformatif gender terutama pada isu pemberdayaan ekonomi perempuan, pengarusutamaan gender, perdamaian dan keamanan serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Masih dalam dialog ini, Amerika Serikat yang merupakan mitra strategis ASEAN mendorong penerapan hak-hak dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-AS tahun 2021-2025 yang terintegrasikan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan pendekatan pengarusutamaan gender. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat, untuk mencapai kualitas gender, mereka memerlukan waktu ratusan tahun, di mana harus ada komitmen dan keyakinan yang kuat serta kesempatan yang sama terhadap perempuan (Kemenpppa, 2022).

Sebelumnya pada 18 Maret 2022, juga dilakukan Dialog Pemimpin Perempuan Asia Tenggara yang pertama yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia, yang dihadiri oleh para pemimpin perempuan di bidang politik, bisnis serta masyarakat sipil. Dalam dialog tersebut membahas tantangan bersama, pendekatan kebijakan dan bidang kerja sama dalam kesetaraan gender, serta dampak Covid-19 terhadap perempuan dan anak (Australia, 2022).

Dari dua dialog di atas, jelas bahwa terdapat komitmen yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender antara Indonesia, ASEAN dan negara mitra strategis seperti Amerika Serikat dan Australia. Dan untuk mencapai kesetaraan gender tersebut, diperlukan partisipasi perempuan di segala bidang, termasuk keterwakilan perempuan dalam politik sebagai pembuat kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak.

Posisi Perempuan dalam Politik

Bicara mengenai kesetaraan gender, salah satu indikator penting adalah partisipasi politik perempuan melalui kepemimpinan politik perempuan. Di Asia terdapat pemimpin perempuan seperti Perdana Menteri Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike yang merupakan kepala pemerintahan pertama di dunia; Benazir Bhutto di Pakistan; Park Geun-hye di Korea Selatan, Tanaka Makiko di Jepang, Begum Khaleda Zia dan Sheikh Hasina Wajed di Bangladesh. Di Asia Tenggara ada Aung San Suu Kyi di Myanmar; Megawati Soekarnoputri; Wan Azizah Wan Ismail di Malaysia; Yingluck Shinawatra di Thailand; Corazon Aquino di Filipina; dan Halimah Jacob di Singapura.

Sedangkan di parlemen walaupun belum memenuhi kuota 30 persen, namun telah banyak perempuan yang masuk dalam politik. Timor Leste merupakan negara dengan perempuan anggota parlemen terbanyak yaitu 38,5 persen. Filipina dengan 28 persen, Laos dengan 27,5 persen, Vietnam dengan 26,7 persen, Singapura dengan 23 persen, Kamboja dengan 20 persen, Indonesia 17,4 dengan persen, Thailand dengan 16,2 persen, Malaysia dengan 14,4 persen, Myanmar dengan 11,3 persen, dan Brunei Darussalam dengan 9,1 persen (Lidwina, 2020).

Mengapa kehadiran perempuan dalam parlemen ini penting? Karena selain menjamin keterwakilan perempuan, juga berkorelasi dengan kebijakan yang menjamin kesetaraan, termasuk anggaran dan program sosial yang memberikan manfaat bagi perempuan dan anak.

Hambatan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan

Faktor utama penghambat perempuan di berbagai bidang termasuk politik adalah patriarki. Menurut Kamla Bhasin patriarki adalah aturan yang dikendalikan oleh "bapak" atau disebut patriarkh. Istilah patriarkh digunakan untuk mendeskripsikan karakter dominan laki-laki dalam rumah tangga, di mana perempuan, anak, budak dan pekerja rumah tangga berada di bawah aturan laki-laki. Oleh karenanya istilah patriarki dipergunakan secara umum untuk menggambarkan dominasi laki-laki dan relasi kuasa antara laki-laki terhadap perempuan (Bhasin, 1993). Selanjutnya ada Sylvia Walby yang membedakan dua bentuk patriarki pada ranah privat dan publik, di mana di ranah publik patriarki mengucilkan perempuan, patriarkh melakukan kontrol langsung terhadap perempuan dalam proses reproduksi (biologis dan sosial) dan lingkungan domestik rumah tangga. Sedangkan di ranah publik, patriarki berbasis pada struktur tanpa meninggalkan kontrol patriarkh di dalam rumah tangga (Walby, 1990).

Terkait dengan ranah privat dan publik ini, di beberapa negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Kamboja, kedatangan kolonialisme pada abad ke-16 telah menembus batas ranah privat dan publik bagi perempuan, tetapi kontrol patriarki tetap bekerja di kedua ranah tersebut. Kisah perempuan di ranah publik tidak selalu berarti terjadinya pembebasan dari tugas-tugas di ranah privat, dan juga belum sepenuhnya membebaskan individu perempuan dari subordinasi patriarki. Demikian juga dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa telah mengubah relasi antar keluarga besar (*kinship relation*) dengan pemerintah lokal menjadi relasi antar keluarga besar dengan pemerintah kolonial, dan pemerintah lokal dibuat tidak berdaya. Akibatnya, perempuan tersubordinasi di bawah patriarkh keluarga sekaligus tersubordinasi di bawah pemerintah kolonial (Rahayu, 2014).

Pemikiran Walby dan hasil penelitian dari Rahayu ini mengkonfirmasi bahwa hambatan dan tantangan perempuan dalam politik terletak pada budaya patriarki. Saat ini pun budaya patriarki di mana terjadi ketimpangan relasi kuasa yang merupakan efek dari ranah privat yang berdampak pada ranah publik, di mana pengambilan keputusan perempuan dipengaruhi oleh peran atau relasi kuasa suami atau ayah. Adanya hubungan kekerabatan dalam rekrutmen politik, di mana perempuan yang terpilih adalah anak/istri/saudara dari pejabat sebelumnya. Walaupun kasus ini banyak terjadi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, namun demikian di salah satu provinsi di Indonesia tidak terjadi, malah budaya patriarki ini dimanfaatkan oleh perempuan caleg untuk mendapatkan suara dari nama besar suami dan ayah (Jovani, 2021). Selain memanfaatkan nama besar laki-laki tadi, terdapat sejumlah peluang yang dapat juga dimanfaatkan oleh perempuan yaitu: modal sosial melalui kepercayaan, norma sosial dalam masyarakat dan jaringan dari keluarga dan komunitas.

Peluang berikutnya adalah *moral capital*, yang terlihat melalui sifat dan karakter perempuan yang peduli, merawat dan melayani (Derichs, Fleschenberg, & Hustebeck, 2006). Kemudian, ada profesi "baik" dan "panutan" yang dimiliki perempuan seperti profesi guru, advokat, anggota PKK, pendeta, pengusaha, aktivis, dokter, di mana profesi ini sangat

dekat dengan masyarakat dan ini yang membuat perempuan diterima dan dipercaya. Bagi masyarakat global termasuk Asia profesi ini membuat perempuan menjadi *role model* bagi perempuan lainnya di berbagai bidang termasuk dalam politik. Oleh karenanya partisipasi politik perempuan ini baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan inspirasi bagi banyak perempuan di seluruh dunia yang berjuang untuk akses kekuasaan politik dan mencapai kesetaraan gender.

Komitmen Kesetaraan Gender negara-negara ASEAN

Sejak tahun 1975, negara-negara ASEAN telah fokus pada isu perempuan dan gender melalui *ASEAN Women Leaders' Conference* yang bertransformasi dan pada tahun 2001 menjadi *ASEAN Committee on Women*. Selain itu, ASEAN juga telah melahirkan sejumlah dokumen seperti *Declaration on the Advancement of Women in ASEAN* (1988), *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women* (2015), *ASEAN Guideline on Gender Mainstreaming into Labour and Employment Policies Towards Decent Work for All* (2020). Sebelumnya pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995 dalam komitmen bersama melalui *Beijing Platform for Action* (BPfA) yang mencakup 12 bidang kritis perempuan yakni (1) perempuan dan kemiskinan; (2) pendidikan untuk perempuan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) konflik militer dan perempuan, (6) perempuan dan ekonomi, (7) perempuan dan pengambilan keputusan politik, (8) mekanisme institusional untuk peningkatan perempuan, (9) hak asasi perempuan, (10) perempuan dan media, (11) perempuan dan lingkungan, (12) anak perempuan.

ASEAN juga secara konsisten memprioritaskan kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dengan mengadopsi kerangka kerja regional ASEAN seperti: Deklarasi tentang Implementasi Responsif Gender dari Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017); Agenda Aksi Pengarusutamaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (2017); Pernyataan Bersama tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2017); Kerangka Strategi Pengarusutamaan Gender ASEAN (2022); dan Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (2020). Selanjutnya ASEAN mengadopsi pendekatan keseluruhan ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti: di sektor manajemen bencana, harus mengarusutamakan perspektif gender mulai dari perlindungan, manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana; di sektor UMKM, memperkuat usaha perempuan dengan memperkuat akses dan literasi digital; dan di sektor tenaga kerja, mengarusutamakan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Sekjen ASEAN, Datu Lim Jock Hoi juga menyampaikan komitmennya agar negara-negara ASEAN fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kapasitas analisa gender.

Seperti yang telah disampaikan di awal bahwa komitmen untuk mencapai kesetaraan gender ini adalah dengan partisipasi aktif perempuan di segala bidang, termasuk keterwakilan perempuan dalam politik sebagai pembuat kebijakan publik yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 harus konsisten dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kawasan. Kita bisa belajar dari Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Kita saat ini sedang berproses ke sana, dan yang diperlukan adalah konsistensi dan komitmen yang kuat agar kesetaraan gender dapat tercapai.*

Referensi

- Australia, K. B. (2022, Maret 18). *Dialog Perdana Pemimpin Perempuan Asia Tenggara 2022*. Retrieved from Kedutaan Besar Australia Indonesia: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM22_008.html
- Bhasin, K. (1993). *What is Patriarchy*. New Delhi: Kali for Women.
- Derichs, C., Fleschenberg, A., & Hustebeck, M. (2006). Gendering Moral Capital: Morality as a Political Asset and Strategy of Top Female Politician in Asia. *Critical Asian Studies*, 38 (3), 245-362.
- Isabela, M. (2022, Maret 12). *3 Pilar ASEAN*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/04000041/3-pilar-asean>

- Jovani, A. (2021). *Representasi Substantif Perempuan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 (Studi Kasus Lahirnya Peraturan Daerah Responsif Gender Tahun 2016) (Disertasi)*. Depok: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia.
- Kemenpppa. (2022, Agustus 25). *Menteri PPPA Pimpin Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4149/menteri-pppa-pimpin-dialog-tingkat-menteri-asean-dan-amerika-tentang-kesetaraan-gender-dan-pemberdayaan-perempuan>
- Lidwina, A. (2020, Maret 9). *Bagaimana Representasi Perempuan dalam Parlemen di Asia Tenggara?* Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/bagaimana-representasi-perempuan-dalam-parlemen-di-asia-tenggara>
- Rahayu, R. I. (2014). *Keberhasilan dan Hambatan Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara: Antara Kebijakan Negara, Partai Politik dan Gerakan Perempuan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharu Tata Pemerintahan.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Cambridge: Basil Blackwell.

AUDRA JOVANI adalah Dosen Tetap Ilmu Politik, Fisipol, Universitas Kristen Indonesia. Ketua Pusat Studi Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI. Ketua Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) UKI. Fokus riset: gender, perempuan dan politik, politik lokal, demokrasi, *social movement* dan *civil society*. Doktor Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia (2016-2021). Master Ilmu Politik dari Peoples' Friendship University of Russia (2006-2009) dan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia (2001-2005). Adapun publikasi ilmiahnya diantaranya: *Membongkar Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022) *The Use of Social Capital and the Victory of Female Representative Candidates in East Nusa Tenggara's Regional Representative Body during the 2019 Elections* (Journal of Social and Political Sciences, 2022), *Perempuan dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jurnal Inada, 2021), *Women in the Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara* (Journal of Social and Political Sciences, 2020), *Nokas: Mahalnya Cinta dalam Balutan Budaya Belis di Tanah Timor, Nusa Tenggara Timur* (Jurnal Inada, 2020), *Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur* (Jurnal Inada, 2019), *Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014* (Jurnal Inada, 2018), *Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan* (Jurnal ARISTO, 2016). Ia dapat dihubungi di email audra.jovani@yahoo.com.

Komitmen ASEAN Dalam Pemberdayaan Perempuan Digitalisasi Ekonomi Inklusif Pasca Covid-19

Okta Meryana Dewi

"It is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals."

--Emma Watson

Pendahuluan

Selama pandemi Covid-19, perempuan secara tidak proporsional terpengaruh oleh ganasnya virus tersebut seluruh dunia dan lebih berisiko kehilangan pekerjaan daripada pria. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan pasalnya perempuan cenderung terlalu terwakili di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi (seperti pariwisata dan perhotelan). Tercatat bahwa para pengusaha perempuan ASEAN sebagian besar menjalankan atau mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM, 2020), yang secara signifikan lebih berisiko bangkrut pada saat kemerosotan ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar yang akses ke modalnya tidak terlalu menjadi kendala (Sey, 2021). Ketika melihat kewirausahaan dan inovasi, sementara banyak perempuan ASEAN adalah pengusaha, penting untuk diingat bahwa mayoritas dari mereka memiliki dan mengelola usaha mikro atau kecil, yang biasanya menggunakan perangkat digital canggih secara terbatas, jika ada. Artinya, pengusaha perempuan di seluruh ASEAN berisiko tertinggal saat bersaing di pasar digital.

Namun, ada alasan kritis dan sering diabaikan mengapa perempuan lebih menderita, tidak hanya saat ini, tetapi juga selama fase pemulihan ekonomi pasca pandemi: kurangnya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital. Dengan meningkatnya proporsi aktivitas sehari-hari kita yang bergerak secara online, akses yang setara ke teknologi digital dan partisipasi dalam aktivitas profesional online adalah kunci pemulihan pasca pandemi yang inklusif. Dan akses yang setara berarti peluang yang sama untuk bersaing, berkembang, dan mengakses posisi kepemimpinan (Marsan, 2021). Mempersempit kesenjangan gender digital sekarang adalah kunci untuk membangun ekonomi digital yang inklusif di seluruh kawasan (Sey, 2021).

Digitalisasi ekonomi pemberdayaan perempuan

Keadaan darurat Covid-19 mengkatalisasi pergeseran menuju ekonomi digital. Hal ini dapat dilihat sebagai tawaran hikmah: e-commerce praktis dan ideal di saat jarak sosial, layanan online baru yang nyaman sedang dikembangkan, pengajaran dan pembelajaran online dapat membantu regenerasi keterampilan pekerja di ekonomi ASEAN.

Ekonomi digital ASEAN berkembang pesat; Faktanya, pandemi Covid-19 telah mempercepat pertumbuhan ini. Ekonomi digital akan memainkan peran yang sangat penting dalam pemulihan pasca pandemi. Namun ada risiko yang cukup besar juga: transisi menuju ekonomi digital harus inklusif. Transformasi pasca-Covid-19 kemungkinan besar akan menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk pekerjaan dan keterampilan yang lebih terkait secara digital. Artinya, "kesenjangan digital" berpotensi menjadi sumber ketimpangan yang lebih besar lagi. Sebagai sebuah kelompok, perempuan termasuk dalam kategori kedua ini – mereka yang tidak memiliki akses dan keterampilan digital. Rata-rata perempuan lebih jarang menggunakan dan mengakses teknologi digital dibandingkan laki-laki: misalnya, proporsi perempuan yang menggunakan internet adalah 48 persen pada 2019 dibandingkan 58 persen laki-laki secara global (menurut data dari International Telecommunication Union, sebuah badan PBB) (Ruddy, 2020).

Meskipun demikian, dibandingkan dengan kawasan lain di Asia, ASEAN telah menunjukkan kemajuan dalam memajukan inklusivitas digital yang dapat dikatakan menjadi salah satu yang terbaik di Asia, ketidaksetaraan di

seluruh akses yang berarti ke internet tetap ada. Beberapa negara anggota ASEAN) seperti Singapura dan Brunei sudah menunjukkan paritas gender yang mendekati dalam hal inklusivitas digital gender. Pada saat yang sama, sekitar 20 persen perempuan berpenghasilan rendah di kota-kota di Indonesia dan Filipina tahu bagaimana menggunakan internet untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi mereka secara bermakna. Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, termasuk Indonesia dengan jumlah pengguna platform digital yang sangat besar.

Tantangan yang dihadapi gadis dan wanita muda di bidang ini dan khususnya tantangan yang diperburuk oleh pandemi, hanya mengingatkan kita bahwa investasi untuk menutup kesenjangan digital gender harus menjadi prioritas (Putri, 2022).

Komitmen ASEAN

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, ekonomi digital perlu menjadi lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ke-10 negara ASEAN telah mengembangkan strategi kebijakan dan inisiatif untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, namun inisiatif yang secara eksplisit menargetkan kesenjangan gender digital masih menjadi pengecualian daripada aturan.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan telah memainkan peran sentral dalam menetapkan prioritas ASEAN karena masyarakat bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Deklarasi ASEAN tentang Implementasi Responsif Gender Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017) memperkuat komitmen kuat para pemimpin ASEAN untuk “memastikan terwujudnya ASEAN yang berorientasi pada orang dan berpusat pada orang di mana semua perempuan dan anak perempuan dapat untuk mencapai potensi penuh mereka.”

Deklarasi tersebut memperkuat komitmen sebelumnya untuk melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan serta memajukan kesetaraan gender di kawasan, termasuk: Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2015), Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Perdagangan Orang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2013), Deklarasi Hanoi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Perempuan dan Anak ASEAN (2010), dan Deklarasi Kemajuan Perempuan di kawasan ASEAN (1998) antara lain (ASEAN Committee on Women, 2021).

ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) merupakan Pertemuan Menteri se-ASEAN yang bertanggung jawab atas ragam kepentingan perempuan di ASEAN untuk lebih memperkuat kerjasama ASEAN pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan (KEMENPPPA, 2016). Demi mewujudkan pemberdayaan ekonomi digital perempuan di ASEAN. Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4. Pada sidang utama AMMW ke-4, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga yang bertindak sebagai Ketua AMMW periode 2021-2024 memimpin jalannya sidang utama, dengan tema utama *Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women's Competitiveness*. menegaskan pentingnya meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pasca pandemi Covid-19.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh *Women's Affairs Minister* Ing Kantha Phavi bahwa pemerintah selalu menganggap perempuan sebagai tulang punggung masyarakat dan ekonomi nasional dan oleh karena itu, telah menetapkan prioritas strategis untuk menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pusat dari semua tindakan dan kebijakan tanggapan pandemi sosial nasional (David, 2021)

Untuk menangani berbagai persoalan ini, Menteri Bintang menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan pengusaha, khususnya selama masa pandemi, di antaranya melalui pelaksanaan rangkaian webinar bagi UMKM perempuan, baik terkait akses teknologi informasi (TI), bisnis online termasuk platform e-market, ekonomi digital, maupun pemasaran online.

Dengan demikian, akses dan keterampilan ke digital adalah bentuk pemberdayaan ekonomi karena memungkinkan anak perempuan dan perempuan muda di wilayah tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital pasca pandemi dan melindungi mereka dari keterpinggiran dari kesempatan kerja. Menutup kesenjangan digital gender juga

akan menciptakan pemulihan pascapandemi yang lebih inklusif gender di kawasan, yang diklaim dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Terakhir, menutup kesenjangan digital gender di kawasan akan mewujudkan tujuan ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender sebagai bagian dari tujuan Visi Komunitas ASEAN 2025.

Di antara banyak solusi lainnya, keterampilan dan literasi digital dasar perempuan muda harus diperkuat. Fokus khusus harus diarahkan pada penyediaan sumber daya yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses internet secara bermakna.

Persyaratan mendasar untuk memperluas peran perempuan sebagai pengusaha dalam ekonomi digital adalah mereka harus melek digital. Di antaranya, literasi digital semakin dibutuhkan untuk mengakses layanan keuangan. Oleh karena itu, promosi literasi digital untuk semua warga ASEAN perlu menjadi prioritas utama MEA untuk memastikan pembangunan yang merata dan inklusif (USAID, 2018).

Wakil Ketua *ASEAN Committee on Women* (ACW) sekaligus Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengungkapkan partisipasi perempuan dalam meraih akses yang lebih tinggi semakin dibutuhkan di kawasan ASEAN, seperti akses keterampilan dan karir berbasis digital; akses kewirausahaan berbasis digital; dan akses kepemimpinan dalam ekonomi digital baik di sektor swasta maupun public. Lenny menambahkan bahwa strategi dan praktik terbaik yang ditunjukkan negara-negara ASEAN untuk mengatasi tantangan ekonomi digital dan inklusi keuangan antara lain adalah dengan membangun kolaborasi antara multi-stakeholder termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha atau sektor swasta, komunitas, dan media massa.

Kesimpulan

Perempuan perlu memiliki akses ke kesempatan yang sama yang ditawarkan oleh inovasi dan teknologi baru bukan untuk berada dalam 'mode bertahan hidup' tetapi untuk dapat bersaing dan berkembang di dunia pasca-pandemi yang sangat digital. Pernyataan ini hanya menjadi isapan jempol belaka apabila tidak dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan dari petinggi Negara. Nyatanya, negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui dukungan digitalisasi dan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Komitmen ini terus menjadi perhatian ASEAN untuk segera bertindak dengan harus mengumpulkan data yang lebih beragam dan terpilah gender tentang tingkat literasi digital dan teknologi anak perempuan dan perempuan muda dan secara eksplisit memasukkan penutupan kesenjangan digital gender dalam tujuan visi masa depan kawasan ini. Dengan tindakan cepat, kita semua dapat menciptakan visi ASEAN untuk menjadi *"a region with one vision to be leading political entity in the global digital economy, where everyone, regardless of their gender, is empowered with the skills and opportunity to fully participate in the digital economy".**

Referensi

- ASEAN Committee on Women. (2021). *ASEAN Committee on Women (ACW) Work Plan 2021 – 2025*. ASEAN Committee on Women.
- David, S. (2021, October 21). *Impacts of digital revolution on women discussed at Asean meeting*. Retrieved December 03, 2022, from <https://www.khmertimeskh.com/50953093/impacts-of-digital-revolution-on-women-discussed-at-asean-meeting/>
- KEMENPPPA. (2016, February 26). *PRESS RELEASE: FIRST ASEAN MINISTERIAL MEETING ON WOMEN DI LAOS*. Retrieved December 02, 2022, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/230/press-release-first-asean-ministerial-meeting-on-women-di-laos>
- Marsan, A. S. (2021, March 05). *Real Access For Women To Join The Digital Economy*. Retrieved December 02, 2022, from <https://theaseanpost.com/article/real-access-women-join-digital-economy>
- Putri, M. A. (2022, May 02). *Bridging the gender digital divide towards a powerful, inclusive post-pandemic digital economy in ASEAN*. Retrieved December 02, 2022, from <https://aasyp.org/2022/05/02/bridging-the-gender-digital-divide/>
- Ruddy, G. A. (2020, May 15). *Post-pandemic ASEAN must bridge digital gender divide*. Retrieved December 1, 2022, from <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/15/post-pandemic-asean-must-bridge-digital-gender-divide.html>
- Sey, G. A. (2021). *Women's Participation in the Digital Economy: Improving Access to Skills, Entrepreneurship, and Leadership Across ASEAN*. Australia: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- USAID. (2018). *Women Economic Empowerment in the Digital Economy*. America: Nathan Associates Inc.
- OKTA MERYANA DEWI lahir di Lubuklinggau, 25 Oktober 1995, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Alumni Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada tahun 2021 ini, kini tengah menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Lubuklinggau.

Pekka Tangguh Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Bagi ASEAN

Hesty Sari Wijati

Menjadi ibu tunggal, baik akibat konflik, bencana, ataupun perceraian, menuntut seorang perempuan harus mampu berperan ganda dalam menjalankan fungsi keluarga. Ditambah stigma negatif masyarakat terhadap status 'janda', kerap membawa beban psikis bagi banyak ibu tunggal. dan anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Perlu kesiapan mental dan support sistem yang baik bagi keberlangsungan hidup mereka. Dan ini adalah bagian dari tugas kita semua, sebagai anak-anak dari keluarga bangsa.

BALADA SEORANG PEREMPUAN

Riri Satria

Suaramu tertahan
Matamu menerawang
Lalu perlahan airmata meleleh
"Jam 4 pagi aku sudah jalan ke pasar
Menjajakan makanan kepada orang-orang
Kalau tidak, anakku tak ada jajan ke sekolah"
Aku menangkap nada getir dari ceritamu
Kisah yang sudah lama dipendam di masa lalu
Hidup hanya jangkauan hari ke hari
Kau bahkan tak sempat memikirkan cita-cita
Kau katakan sudah lupa makna bahagia
Aku kembali menutup wajahmu
Sejenak kau terdiam, membisu
Bagai menatap potongan film di depan matamu
Saat itu jalan terasa begitu kelim
Tetapi api semangat hidup tetap menyala
'Aku harus kuat! Aku harus berjuang!
Walau kehidupan terus menekanku!
Walau tak ada puisi indah dalam hari-hariku!
"Demikian katamu lirik kepadaku
Sungguh kau perempuan tangguh
Aku menatapmu penuh kekaguman
Walau kau tetap tak menoleh kepadaku
Kau yakin jalanmu Menuju cahaya bahagia

Pemikiran pahlawan nasional Indonesia Raden Ajeng Kartini dalam tulisan yang dibukukan menjadi sebuah buku berjudul *Habis Gelap, Terbitlah Terang*. Tulisan beliau mengingatkan para perempuan untuk siap dengan berbagai kondisi dan situasi. Dan untuk itulah mengapa perempuan perlu mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang cukup.

Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. (Surat R.A Kartini kepada Nyonya Van Kool, Agustus 1901)

Ibu kita, Raden Ajeng Kartini sejak 1901 telah menyerukan betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pemikiran yang lahir dari kondisi negeri yang masih dijajah Belanda. Saat sekolah masih hanya diperuntukkan bagi kalangan dan strata tertentu. R.A Kartini adalah sosok pendidik sejati yang menginginkan kaumnya menjadi perempuan yang terdidik. Beliau sadar, pembelajaran dan pendidikan bagi perempuan akan membawa kebahagiaan bagi perempuan itu sendiri di kehidupannya.

Kutipan pemikiran R.A Kartini juga dapat menjadi penyemangat bagi ibu tunggal yang saat ini dijuluki juga sebagai Perempuan Tangguh:

Tahukah engkau semboyanku? Aku mau! Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata Aku tiada dapat! Melenyapkan rasa berani. Kalimat 'Aku mau!' membuat kita mudah mendaki puncak gunung.

Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah puluhan tahun berjalan, sudah tercapaiah harapan R.A kartini atas keinginannya bagi perempuan di Indonesia? Bahagiakah para perempuan-perempuan Indonesia yang telah mengenyam pendidikan di era ini ?

Problematika dan Mental Health

Secara peringkat pendidikan perempuan di Indonesia meningkat tajam. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam mengatakan jika tingkat pendidikan perempuan di Indonesia jauh di atas rata-rata Asia dan dunia. Nizam menjelaskan jika data tersebut diperoleh dari jumlah mahasiswa di Indonesia yang lebih banyak ketimbang mahasiswa.

Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi memang lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan dan berkariyer. Namun perempuan juga dihadapkan pada stigma atas kodratnya sebagai istri sekaligus ibu. Pada beberapa situasi, hal ini menjadi pemicu percekocokkan dalam rumah tangga dan dilema bagi perempuan. Perselingkuhan, KDRT, stress dan ketidakcocokkan adalah beberapa hal yang membuat istri memilih atau dipaksa menjadi janda atau ibu tunggal bagi keluarganya. Pendidikan tinggi bila tidak dibarengi dengan pemahaman tentang pola asuh, saat menjadi ibu tunggal akan berdampak dan menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Beberapa stigma perempuan dalam menjalankan peran gandanya kerap menimbulkan antara lain: Stigma muncul seringkali terkait ketidak mampuan mengurus keluarga, ketidakmampuan mengurus finansial keluarga, perempuan yang tidak 'betah' di rumah. Perempuan cenderung memilih bungkam dengan peran dia sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Agama atau sistem kepercayaan yang dianut sering kali dijadikan alasan sekitar untuk menunjukkan posisi perempuan seharusnya. Kelelahan secara fisik dan mental karena harus mengurus keluarga, anak, dan bekerja di saat yang bersamaan, terutama dengan adanya pandemi. Stigma negatif lebih banyak muncul dari perempuan terhadap perempuan itu sendiri. Pengungkapan terkait situasi yang sebenarnya dianggap tidak memberikan dampak positif malah menyebabkan stigma negatif lainnya.

Menurut Tiara (penggerak Instagram "Save Janda") yang juga penyintas kekerasan dalam rumah tangga, stigma terhadap janda di Indonesia "berakar dari budaya patriarki dan bisa jadi menakutkan", termasuk mengarah pada objektifikasi seksual." Bahwa perempuan janda itu ... bekas pakai. Barang bekas, murahan, mudah diajak kencan," kata Tiara yang berpisah dengan mantan suaminya 15 tahun lalu. "Selain [itu] ... perempuan janda yang bercerai itu [dianggap] gagal membina rumah tangga, aib keluarga, dan dibilang perempuan pembawa sial." stigma terhadap

janda telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi secara nyata dalam kehidupan para perempuan. “Ada satu perempuan janda kehilangan pekerjaannya, karena istri dari bos-nya dia tidak mau mempekerjakan karyawan janda. Takut *digodain*,” katanya.

Hal ini juga dibenarkan Nani Zulminarni, Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dalam penelusurannya menemukan hubungan yang kuat antara stigma dan kemiskinan. “Perempuan yang bercerai ini selalu dianggap salah, perempuan nggak bener, sehingga orang membatasi untuk berinteraksi dengan dia,” tuturnya.

Dari studi yang dilakukan PEKKA di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang merupakan 40 persen dari wilayah termiskin, stigma janda masih sangat kuat dan bahkan tidak berubah setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Stigma yang terberat yang ditemukan PEKKA di masyarakat menurut Nani adalah stigma janda perempuan bercerai dan disebabkan budaya yang mengukur nilai keberhasilan perkawinan dari seberapa harmonis sebuah keluarga. Dia berkata:

Ada konstruksi tuntutan di kultur Indonesia untuk memenuhi standar yang ideal. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang bertahan di perkawinannya sampai maut memisahkan. Tapi ketika dia gagal dan kemudian mengambil keputusan yang berani, misalnya karena menolak dipukuli terus-menerus dan memutuskan bercerai, perempuan-perempuan ini dianggap melawan sistem nilai.

Mental Heath

Kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan berbagai emosi negatif lainnya yang dialami pasca perceraian atau ditinggal pasangan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan, baik secara fisik, psikis maupun finansial. Support system sekeliling yang kurang mendukung juga dapat memperburuk kesehatan mental ibu tunggal. Ketidakmampuan ibu tunggal dalam mengenali emosi dirinya akibat dari kesendirian dan beban yang dipikulnya dapat menular berdampak negatif terhadap anak-anaknya. Peran ganda yang harus dipikulnya akan semakin membebani dirinya. Untuk itu seorang ibu tunggal perlu menjaga kesehatan mentalnya. Bisa dengan cara menerapi dan di realeskan kondisi mentalnya melalui profesional atau bisa dengan cara melakukan hal-hal berikut sebagai upaya mengembalikan kesehatan mental guna kesiapan ibu tunggal dalam menjalankan kesehariannya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Pada akhir 2000 digagas pendirian Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai “Proyek Janda”. Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik.

Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani Zulminarni kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi menjadi **Program** Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut **PEKKA** agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang di dalam masyarakat memiliki stigma negatif.

PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka. Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom. Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk organis tingkat nasional sebagai payung organisasi gerakan Pekka yang disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) Federasi adalah organisasi tingkat nasional atau sebagai payung organisasi gerakan Pekka di tingkat nasional. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018.

Dalam webinar bertajuk “Perempuan Menggerakkan Ekonomi Keluarga” yang digelar oleh Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Kompas TV, Sabtu (19/12/2020), Nani Zulminarni menyampaikan, “Saat ini, perempuan tidak lagi sekadar membantu menambah penghasilan keluarga lewat berbagai usaha. Semakin banyak perempuan menjalani peran sebagai kepala keluarga. Perempuan menjadi tulang punggung, yaitu pencari nafkah utama untuk menopang kebutuhan primer anggota keluarganya.

Jumlah perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan, 15,46 persen atau 19 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Sebanyak 80 persen perempuan kepala keluarga berada pada strata ekonomi rendah. Perempuan kepala keluarga di satu sisi menjadi penggerak ekonomi, baik bagi keluarga maupun komunitas. Sebab, mereka memiliki peranan dalam rantai ekonomi sebagai produsen, artisan, sekaligus konsumen. Sayangnya, di sisi lain mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan mengatasi persoalan ekonomi mereka Produsen segala macam (produk) untuk kebutuhan pangan dan artisan kebutuhan sandang, juga konsumen. Jadi, peran (perempuan) sangat penting sebagai katup pengaman perekonomian Indonesia.

Namun, mereka menghadapi permasalahan dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Tiga permasalahan tersebut adalah akses permodalan, pengembangan pasar, dan efek ekonomi global. Oleh sebab itu, menurutnya, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi penting. Hal inilah yang dilakukannya bersama Yayasan PEKKA sejak 2001. Sebagai informasi, Yayasan PEKKA menggandeng kaum ibu yang sebagian besar berstatus janda akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan korban konflik untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi. Yayasan PEKKA juga membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang kerap mendapat stigma negatif.

Satu pernyataan terakhir yang ditanyakan terkait harapan perempuan—perempuan ini ternyata sederhana; cukuplah memberikan sekadar penyemangat karena telah berusaha untuk mempertahankan keluarga, berempatilah. Berhenti menjadi musuh perempuan, sedikit bersimpati akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perempuan karena mereka juga adalah kawan dari seseorang, anak dari ibunya, saudara bagi saudaranya, dan ibu bagi anak-anaknya.*

Referensi

Lukisan Hati, Buku Antologi *Perempuan dan covid*/ <https://eprints.untirta.ac.id>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind.html>

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5867305/kemendikbudristek-pendidikan-perempuan-ri-di-atas-rata-rata-asia--dunia>

Buku THE MIRACLE IS YOU karya Hesty W

<https://pekka.or.id/2022/07/29/dana-desa-bisa-menjadi-instrumen-memuliakan-perempuan-jika/>

HESTY SARI WIJATI adalah Founder dari Hesta Property, penulis buku *The Miracle is You* (2020) dan beberapa buku antologi (2021–2022). Kepala TPQ Syuhada Depok (2022), Pendiri Sekolah Sebentar (2019), Trainer Bale Training (2018–2022), Coach IMBAS (2022), Trainer Udemi channel (2020). Ketua PEKKA (2022) wilayah Tanah Baru, Depok. Ia dapat dihubungi di email: hesty.gallery@gmail.com.

Women Empowerment dalam Membangun Ekonomi Digital

Anifatul Kiftiyah

Pendahuluan

Suatu negara tidak akan dapat berjalan secara mandiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Sehingga, dibutuhkan kerja sama untuk dapat mempermudah terwujudnya kepentingan-kepentingan tertentu untuk kesejahteraan bangsanya, termasuk dalam konteks Kesehatan, keamanan, perekonomian dan bahkan untuk mencapai perdamaian dunia. Kerja sama yang terjalin antar negara ini termasuk dalam organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat. Adapun salah satu contoh dari organisasi tersebut adalah ASEAN. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam organisasi ASEAN adalah sector ekonomi. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa sektor ekonomi merupakan salah satu sector yang paling penting untuk mengukur kesejahteraan suatu negara.

Perkembangan sektor ekonomi yang terjadi saat ini memicu kesadaran pemerintah dan pelaku bisnis untuk melakukan inovasi secara terus menerus dalam meningkatkan mutu dan kualitas yang akan dipasarkan. Poin yang paling berpengaruh adalah adanya revolusi industri 4.0. revolusi industri ini ditandai dengan bergesernya teknologi informasi menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet. Era ini disebut juga dengan era digital, di mana banyak hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat digital. Di era serba digital saat ini terjadi perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Ritme hidup yang dituntut untuk lebih cepat, dinamis, dan fleksibel agar manusia tidak terjebak dalam ketertinggalan dengan manusia lainnya.

Di masa lalu untuk dapat menempuh perjalanan dari kota satu ke kota lainnya kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk dapat berkomunikasi dengan saudara atau teman juga membutuhkan sarana untuk mengirim surat yang memerlukan banyak waktu. Saat ini internet dan gadget sudah banyak dimanfaatkan oleh semua orang, waktu dan jarak dapat dijangkau dengan sangat mudah dalam waktu singkat. Bahkan dengan adanya internet saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi, namun banyak orang juga memanfaatkan untuk memajukan perekonomian mereka tak terkecuali para perempuan.

Perempuan yang hidup pada masa 80-an jelas sangat berbeda dengan perempuan yang hidup pada masa ini. Dari segi berpakaian, pola pikir, dan sosialisasi, pasti mengalami perubahan yang sangat besar. Perempuan pada zaman dulu saat akses teknologi dan informasi masih sangat terbatas, peluang dan kesempatan merekapun juga ikut terbatas. Stigma dan *stereotype* yang berkembang saat itu adalah bahwa perempuan tidak boleh lebih pintar dan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Sudah seharusnya perempuan hanya mengurus urusan domestic. Akses para perempuan untuk *upgrade skill* dan kratifitas masih sangat terbatas. Hal yang paling jelas terlihat perbedaan antara perempuan zaman dahulu dan perempuan zaman sekarang adalah dalam hal keterbatasan, waktu, *mindset* dan ruang gerak.

Di era digital saat ini, dimana perempuan sudah lebih maju dibandingkan pada era sebelumnya. Perempuan mempunyai andil besar dalam kemajuan ekonomi baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup besar. Banyak perempuan yang sudah berani untuk berkarir, membuka usaha demi kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Dan tentunya hal tersebut sangat membantu dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas tentang peran perempuan dalam membangun ekonomi digital saat ini.

Women Empowerment Dalam Membangun Ekonomi Digital

Negara Indonesia sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Keberadaan wirausaha perempuan mempunyai potensi yang sangat besar sebagai penopang pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial yang

berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya terwujud di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Di negara berkembang seperti di Asia, rendahnya pertumbuhan wirausaha perempuan dipengaruhi oleh beberapa factor secara langsung dan tidak langsung. Factor langsung adalah hal-hal yang mencakup tekanan ekonomi dan latar belakang dari perempuan. Sedangkan factor tidak langsung berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan stabilitas ekonomi sosial. Kedua factor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi keputusan para perempuan untuk dapat berwirausaha dengan membuka bisnis sendiri.

Pada dua dekade saat ini banyak organisasi internasional dan para pemimpin dunia mengakui bahwa pemberdayaan ekonomi mempunyai peran penting untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Berdasarkan pada analisis dari PBB, IMF, EOCED, bank dunia serta lembaga internasional lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya literasi ekonomi bagi kaum perempuan.

Sebagaimana yang disebutkan oleh BPS bahwa terjadi peningkatan perempuan sebagai pekerja. Pada tahun 2020 sebanyak 34,65% kemudian meningkat menjadi 36,20% pada tahun 2021. Melihat dari data tersebut membuktikan bahwa para perempuan Indonesia telah mengalami peningkatan. Akan tetapi hal ini tidak cukup karena banyak perempuan Indonesia yang masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang pekerjaan. Oleh karena itu hingga saat ini masih banyak organisasi-organisasi yang berusaha untuk memperjuangkan para perempuan agar dapat mempunyai penghasilan sendiri dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Negara Indonesia telah melakukan kerjasama dalam perdagangan bebas diberbagai sector. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 serta ASEAN- China (ACFTA). Hal tersebut bertujuan untuk mematangkan Indonesia dalam persaingan global sebagai dampak adanya revolusi industry 4.0.

Pada era ini kaum perempuan juga tidak luput dari proses transformasi digital. Hadirnya digitalisasi telah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi semua orang untuk dapat berkreasi. Tidak hanya itu, ruang digital juga dijadikan sebagai sarana untuk berekspresi bagi penggunaannya. Luasnya ruang digital sanggup membangun *networking* tanpa mengenal usia dan gender. Para perempuan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memberdayakan diri khususnya dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak perempuan mempunyai bisnis yang dijalankan di rumah dengan memanfaatkan platform digital sebagai media promosi dan jual beli.

Bukti secara empiris menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran besar untuk dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi yaitu: pertumbuhan ekonomi, ekonomi yang lebih tinggi, diversifikasi ekonomi yang lebih besar, hasil pembangunan yang menguntungkan, dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Keterampilan yang diperoleh perempuan dalam pelatihan kerja dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan para perempuan sehingga dapat memperluas peluang dan memberikan banyak pilihan dalam berpartisipasi secara setara dengan laki-laki. Pada akhirnya, semakin terbukanya pilihan dan banyaknya peluang dapat menaikkan taraf hidup para perempuan menjadi semakin sejahtera.

Tantangan terbesar para perempuan di era digital saat ini adalah terletak pada kemauan para perempuan untuk membangun koneksi dengan pihak lain. Tidak hanya dengan sesama perempuan yang hidup di kota-kota besar, namun juga dengan para perempuan yang hidup di desa dan pelosok wilayah. Karena bagaimanapun saat ini peran perempuan masih minim, padahal kita tahu bahwa perempuan dapat mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun ekonomi digital saat ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) dan Action Council Manager B20 Indonesia, Maya Juwita menjelaskan bahwa sektor swasta dapat membantu untuk menutup kesenjangan gender dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi digital dan dapat memberikan peluang bagi para perempuan. Sehingga mereka dapat membangun karirnya. Lima hal yang dapat dilakukan yaitu, meningkatkan kesadaran perempuan dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), adanya perwakilan perempuan, kolaborasi antar sektor swasta dan penyedia Pendidikan, merancang kebijakan yang ramah keluarga, melakukan program-program yang mendukung para perempuan.

Peningkatan ekonomi perempuan masih memiliki keterbatasan khususnya di daerah pedesaan. Keterbatasan tersebut karena beberapa factor seperti, rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, sedikitnya peluang kerja, dan adanya paradigma tentang perempuan terkait rumah tangga. Selain keterbatasan di atas, perempuan juga dihadapkan pada kendala yang dikenal dengan "triple burden of women", maksudnya adalah perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. peran-peran tersebut menyebabkan kesempatan para perempuan terbatas dalam memanfaatkan dengan baik peluang ekonomi yang ada. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan untuk dapat membangun ekonomi digital. Pemerintah harus mempunyai inisiatif untuk dapat meningkatkan peran perempuan dalam menghadapi era digital saat ini. Program yang diberikan kepada perempuan guna mendukung pemberdayaan perempuan dapat berupa kegiatan yang berbasis IT, termasuk juga pendidikan vokasi agar lebih mendapatkan peluang lebih besar di dunia kerja.

Saat ini banyak para perempuan yang telah mandiri dalam menjalani kehidupannya. Artinya bahwa perempuan tidak sangat bergantung kepada laki-laki. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dan mempunyai peran yang saling mengisi satu sama lain. Kesetaraan ini mempunyai dampak yang sangat positif bagi para perempuan. Para perempuan dapat mengembangkan dirinya sehingga mereka menjadi perempuan yang maju dan berdaya. Banyak para perempuan yang mempunyai penghasilan bahkan mereka membuat bisnis dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kewirausahaan perempuan dan usaha kecil yang dijalani oleh para perempuan adalah salah satu hal yang membantu majunya perekonomian suatu negara.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perempuan yang akhirnya memutuskan untuk menggeluti usaha-usaha kecil rumahan untuk menunjang perekonomian keluarga. Perempuan harus dapat bangkit secara mandiri agar dapat bertahan dalam kondisi apapun. Jika perempuan memiliki *skill* dan pengetahuan yang mumpuni, perempuan tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri namun mereka juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas di era digitalisasi.

Kaum perempuan harus melibatkan diri dalam pembangunan, perempuan harus berperan aktif tidak sekedar menjadi objek pembangunan. Meningkatkan kaum perempuan dalam mengelola usaha rumah tangga serta industry dalam segala kecil maupun besar guna menunjang peningkatan serta peluang kerja yang produktif dan mandiri.

Kesimpulan

Pada era digital saat ini perempuan perlu untuk berperan aktif serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi digital. Peningkatan ekonomi perempuan masih memiliki keterbatasan khususnya di daerah pedesaan. Keterbatasan tersebut karena beberapa faktor seperti, rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, sedikitnya peluang kerja, dan adanya paradigma tentang perempuan terkait rumah tangga. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan untuk dapat membangun ekonomi digital. Program-program yang diberikan kepada perempuan guna mendukung pemberdayaan perempuan dapat berupa kegiatan-kegiatan yang berbasis IT, termasuk juga Pendidikan vokasi agar lebih mendapatkan peluang lebih besar di dunia kerja.*

Referensi

- Amalia, Dini, 2018, Dinamika Konvergensi Peran Perempuan di Era Ekonomi Digital, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Volume 1 Nomor 2
- Purwati, A. A., Budiyanto, B., & Suhermin, S. (2021). The Role of Intellectual Capital in Improving Micro, Small, And Medium-Scale Business Performance in The Hostel and Culinary Sector in Pekanbaru, Indonesia. International Journal of Economics Development Research (IJEDR), 2(2), 378-393.
- Gayle Tzemach Lemmon et.al, Building Inclusive Economies How Women's Economic Advancement Promotes Sustainable Growth, the Council on Foreign Relations.U.S (www.cfr.org).
- Wina Diana Sari, Ratna Nurani, Positioning Women Entrepreneurs in Small and Medium Enterprises In Indonesia – Food & Beverage Sector, Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol. 3 (2) 2022: 388-406, hlm. 393- 394
- Hartati, Sri, 2017, Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, Jakarta. Gramedia
- Renie, Elsy, 2019, Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif, Jurnal Agenda, Vol. 2, Nomor 1

<https://www.ibcwe.id/event/dets/279> diakses pada 24 November 2022

<https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 30 November 2020.

ANIFATUL KIFTIYAH lahir di Madiun pada 3 Agustus 1989 dan sekarang menetap di Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan dasar di MI. Darussalam, dan melanjutkan pendidikan MTs dan MA Unggulan Surabaya. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di IAIN Walisongo Program Studi Ilmu Falak dan S2 di UIN Sunan Ampel Prodi Hukum Tata Negara. Ada beberapa tulisan jurnal yang telah diterbitkan oleh penulis antara lain "Perempuan dalam Partisipasi Politik Di Indonesia tahun" (2019), "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia" (2019), "Disaster Mitigation: Optimizing the Function of Executive and Legislative Institutions in Handling Covid-19" (2020), dan "Generasi Muda, Pancasila dan Pluralisme" (2021). Ia dapat melalui surel anifkiftiyahjob.03@gmail.com.

Penguatan Resiliensi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Aksesibilitas Layanan Kesehatan Mental Ibu

Retno Endrastuti

Masa pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik, namun juga pada kesehatan mental masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan RI, drg.Vensya Sitohang pada acara *15th ASEAN Health Ministers Meeting* bahwa pandemi juga berdampak pada kesehatan mental dan penting untuk mendapatkan perhatian dari negara-negara di ASEAN. Kepedulian masyarakat ASEAN terhadap kesehatan jiwa harus ditingkatkan, karena angka prevalensi orang mengalami masalah gangguan mental neurologis dan juga penggunaan zat meningkat 1 sampai 2 kali lipat dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

ASEAN plus *Three Leader* (Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea) telah membuat komitmen global untuk mengatasi masalah kesehatan mental serta mengakui bahwa promosi kesehatan mental diidentifikasi sebagai salah satu prioritas kesehatan di bawah agenda pembangunan kesehatan ASEAN pasca 2015. Promosi itu dilakukan antara lain dengan mempromosikan berbagai model dan praktek efektif tentang program dan intervensi kesehatan mental di antara negara anggota ASEAN, dan peningkatan integrasi program kesehatan mental di tingkat perawatan primer dan sekunder.

Adanya kebijakan untuk melakukan karantina dan melakukan aktivitas di rumah, seperti bekerja (*work from home*), beribadah, dan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang cepat telah berpengaruh pada kesehatan mental baik dalam situasi individu maupun kondisi di dalam keluarga. Berdasarkan studi literatur Herfinanda, dkk (2021), beberapa hasil penelitian menunjukkan lamanya waktu karantina di rumah dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental (Wang, dkk), lamanya waktu untuk tinggal di rumah selama pandemi Covid-19 dikaitkan dengan tingginya skor kecemasan dan depresi, ketakutan dan kekhawatiran (Tee, dkk), serta fungsi psikologis selama karantina menunjukkan adanya peningkatan suasana hati yang tertekan dan rendahnya kesejahteraan secara umum (Brooks, dkk).

Selama masa karantina, keluarga kesulitan untuk mempertahankan batasan antara pekerjaan dengan peran dalam keluarga karena adanya keharusan untuk menjalani transisi peran (Ashforth, Kreiner, dan Fugate dalam Cusinato dkk). Perubahan pada keluarga selama pandemi Covid-19 yang terjadi secara cepat memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan, kelelahan, *distress*, bahkan depresi. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk melaksanakan berbagai peran. Orang tua harus mengatur pekerjaan dan pada saat yang sama orang tua juga harus membantu anak-anak sekolah yang harus dilaksanakan secara daring. Selain itu, menurut Cusinato, dkk intensitas pertemuan antar anggota keluarga yang meningkat dapat berpotensi memunculkan kejenuhan sehingga menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga.

Orang tua terutama ibu menjadi kelompok rentan yang paling berdampak. Kesehatan mental ibu dinilai sangat krusial pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan ibu pada umumnya memiliki tugas dalam pengasuhan, tumbuh kembang anak, dan perannya dalam menjalankan tugas rumah tangga sehari-hari. Namun, kesehatan mental ini terkadang menjadi hal yang masih sering diabaikan, baik oleh pasangan, keluarga, lingkungan, dan bahkan oleh ibu itu sendiri. Peranan seorang ibu pada masa kondisi pandemi Covid-19 penuh dengan tantangan. Sebab selain mengurus pekerjaan rumah tangga, mereka juga harus mengasuh dan mendampingi anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Apalagi bagi kondisi ibu bekerja yang memiliki peran ganda sebagai ibu bekerja dan ibu rumah tangga akan lebih rentan menghadapi tekanan atau dapat dikatakan mengalami *parental burnout*. *Parental burnout* dapat menyebabkan

menurunnya kondisi kesehatan mental ibu dan mempengaruhi dalam pengasuhan anak, tumbuh kembang dan masa depan anak. *Parental burnout* merupakan kondisi orang tua yang mengalami peningkatan kelelahan fisik dan mental dalam pengasuhan anak, sehingga menimbulkan emosi negatif berlebihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Daks dkk menyatakan bahwa keluarga akan banyak menemukan hal-hal yang tidak terduga di tengah pandemi seperti tekanan keuangan, beban pengasuhan tambahan, dan perawatan anak. Hal-hal tak terduga tersebut dapat menjadi pemicu munculnya beberapa masalah kesehatan mental seperti *distress* dan *burnout*. Menurut Griffith kelelahan atau *burnout* yang dialami oleh orang tua selama pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor risiko diantaranya orang tua yang tidak bekerja, ketidakamanan finansial, rendahnya dukungan sosial yang diterima dari teman maupun keluarga, dan kurangnya waktu luang. Apabila orang tua tidak dapat mengelola emosi negatif seperti stres dan kelelahan dengan baik, maka akan mempengaruhi kondisi psikologis serta kesejahteraan pada anak-anaknya.

Dengan munculnya dampak *parental burnout*, dibutuhkan keterampilan pada keluarga untuk menghadapi tantangan selama pandemi. Keterampilan yang dibahas pada penelitian Daks dkk yakni fleksibilitas psikologis yang dapat menjadi sumber resiliensi (ketahanan) pada keluarga. Bonanno dan Burton menjelaskan bahwa fleksibilitas berarti memperhatikan tuntutan situasi yang berubah, memutuskan strategi yang mungkin untuk memenuhi tuntutan, memantau keberhasilan strategi yang dipilih, mengevaluasi kembali situasi yang telah berubah, dan melakukan modifikasi pada strategi yang disesuaikan kepada kebutuhan. Konsep fleksibilitas psikologis dalam keluarga ini terbilang cukup baru terutama pada kajian psikologi keluarga di masa pandemi. Dengan adanya keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi strategi dalam menghadapi tantangan dan kesulitan; dapat mengembangkan toleransi; serta dapat mengembangkan penerimaan keluarga akan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini. Pada akhirnya, resiliensi (ketahanan) pada keluarga akan terbentuk dan berkembang dalam keluarga, sehingga dapat meminimalisir tingkat stres keluarga yang diakibatkan dari tekanan selama keluarga melakukan segala kegiatan di rumah.

Dari berbagai dampak kesehatan mental pada masa pandemi yang dialami oleh orang tua, terutama kaum ibu, diperlukan peningkatan resiliensi keluarga yang didukung oleh kemudahan akses layanan terhadap kesehatan mental ibu. Black dan Lobo menjelaskan bahwa keluarga yang kuat ialah keluarga yang berbagi proses ketangguhan dalam menanggapi stres atau perubahan. Prime dkk menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua proses umum pada resiliensi keluarga yang akan mendukung fenomena mengenai kecenderungan keluarga untuk melakukan adaptasi dalam menghadapi tantangan, yakni : (a) pembangunan dan pemeliharaan hubungan keluarga yang mengimbangi dampak dari situasi yang menyulitkan; dan (b) mengoptimalkan sistem kepercayaan keluarga dalam menyediakan kerangka pemahaman yang berhubungan dengan Covid-19. Terkait dengan sistem kepercayaan keluarga dalam upaya meningkatkan resiliensi pada keluarga, Walsh mengungkapkan terdapat tiga hal, yakni : (a) membuat kesengsaraan yang berarti; (b) membina pandangan yang positif; serta (c) transedensi dan spiritualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa resiliensi keluarga merupakan ketahanan psikis dan ketrampilan mental untuk dapat kembali ke kondisi normal dengan cepat setelah mengalami krisis (dalam hal ini pandemi Covid-19).

Adapun faktor-faktor resiliensi keluarga menurut Black dan Lobo, yakni : pandangan positif, spiritualitas, kesepakatan anggota keluarga, fleksibilitas, komunikasi, manajemen keuangan, waktu bersama, minat dalam melakukan rekreasi bersama, rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial. Black dan Lobo mengungkapkan bahwa ketangguhan keluarga membutuhkan lebih dari sekadar bertahan dari situasi krisis, namun juga menawarkan potensi untuk berkembang dari situasi sulit yang dihadapi. Lietz mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga yang tangguh secara unik diposisikan untuk memahami sudut pandang keluarga-keluarga lain yang menghadapi permasalahan yang serupa, mendukung kesediaan dan kemampuan keluarga untuk membantu dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan.

Setiap keluarga memiliki masalah dan tantangan masing-masing terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Pandemi secara global yang terjadi saat ini menimpa sebagian besar keluarga baik itu kalangan bawah, menengah, dan atas. Untuk itu keluarga dituntut untuk dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Keluarga yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan bangkit dari hal-hal yang membuat terpuruk disebut keluarga yang resilien

(Walsh, 2016). Walsh (2003,2016) menjelaskan bahwa resiliensi keluarga merupakan kemampuan keluarga dan proses dalam kehidupan keluarga untuk bertahan atau bangkit dari hal yang membuat terpuruk atau situasi sulit.

Resiliensi keluarga dipandang sebagai sebuah proses yang dijalani di sepanjang kehidupan keluarga sehingga anggota di dalam keluarga perlu bersinergi dalam menjalani kehidupan. Kemampuan ini perlu dimiliki oleh setiap keluarga di manapun berada terutama dalam menghadapi situasi Covid-19. Resiliensi keluarga penting untuk dimiliki oleh setiap keluarga khususnya dalam situasi pandemi Covid-19, namun kemampuan untuk dapat bertahan atau bangkit dari situasi tidak terjadi secara langsung karena hal ini merupakan sebuah proses yang artinya perlu adanya latihan untuk dapat menjadikan keluarga yang resilien. Keluarga yang di dalamnya terdapat individu atau anggota perlu belajar untuk menghadapi tantangan secara bersama-sama dan mampu memaksimalkan potensi di dalam keluarga yang dimilikinya. Untuk dapat memaksimalkan potensi di dalam keluarga agar dapat mengatasi tantangan yang ada saat ini maka dibutuhkan adanya pengetahuan untuk membangun resiliensi dalam keluarga.

Prime, Wade, dan Browne (2020) menemukan dari hasil kajian literturnya bahwa pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh kesejahteraan anak-anak dan resiliensi di dalam keluarga. Hasil literatur tersebut juga akan menyediakan dan menyarankan adanya promosi dan penyuluhan tentang risiko yang dihadapi keluarga dalam konteks Covid-19 dan resiliensi di dalam keluarga melalui kepercayaan di dalam keluarga. Dengan demikian, pengetahuan terhadap keluarga-keluarga sangat penting untuk dilakukan agar keluarga-keluarga dapat meningkatkan penyesuaian diri, mampu bertahan dalam kondisi seperti ini, dan memberdayakan dirinya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Peningkatan resiliensi keluarga dapat tercapai dengan didukung peningkatan peran pusat layanan kesehatan mental, terutama untuk memberikan kemudahan akses untuk ibu mendapatkan layanan kesehatan mental. Upaya jemput bola pun perlu dilakukan, tidak hanya melalui layanan konsultasi atau konseling psikologi pada pusat-pusat kesehatan masyarakat, tetapi dapat pula dengan pelatihan-pelatihan peningkatan ketrampilan resiliensi bagi para ibu, atau penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya kesehatan mental bagi ibu. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas menangani masalah perempuan dan anak pun dapat lebih meningkatkan fungsinya dalam melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Beberapa ASEAN *Member State* (AMS) telah maju dalam penanganan masalah kesehatan jiwa, namun beberapa negara masih dalam tahap mengembangkan kebijakan dan programnya. Oleh karena itu, kolaborasi ASEAN harus terus ditingkatkan, memastikan finalisasi Pedoman, dan mengoptimalkan serta memperkuat kapasitas dan manajemen sistem pelayanan kesehatan jiwa di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk memperkuat layanan kesehatan mental. Penguatan ini merupakan hasil kesepakatan yang diadopsi dari *Paro Declaration* dalam pertemuan *'75th Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia'* pada Selasa, 6 September 2022.

Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan upaya mempromosikan layanan kesehatan mental, memberdayakan dan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor guna meningkatkan program kesehatan mental kepada masyarakat. *Paro Declaration* berisi kesepakatan terhadap Akses Universal Perawatan dan Layanan Kesehatan Mental yang Berpusat pada Orang (*Universal Access to People-centered Mental Health Care and Services*). "*There is no health without mental health* (tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental).

Kita harus meningkatkan investasi dalam kesehatan mental juga pencegahan dan layanan promotif di perawatan primer, mengurangi biaya pengobatan, dan meningkatkan produktivitas, lapangan kerja dan kualitas hidup," terang Regional Director, WHO South-East Asia, Poonam Khetrapal Singh. "Deklarasi juga mendesak negara-negara Anggota untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan multisektoral untuk mengatasi risiko kesehatan mental dan mengurangi kesenjangan pengobatan yang diperburuk akibat pandemi COVID-19. Tujuannya, memastikan layanan kesehatan mental menjangkau semua orang yang membutuhkan, dekat dengan tempat tinggal mereka, tanpa kesulitan keuangan."¹⁰

Referensi

- Herfinanda, Retno, dkk. (2021). *Family Resilience during The Covid-19 Pandemic : A Systematic Literature Study (Resiliensi Keluarga Selama Pandemi Covid-19 : Studi Literatur Sistematis)*. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology* Vol 1 No 1 (2021): *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology Articles*. Diakses dari <https://press.umsida.ac.id/index.php/iiucp/article/view/625>
- Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. *The American Psychologist*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/amp0000660>
- Walsh, F. (2016). *Strengthening Family Resilience* (3th edition). New York : Guilford.
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/22051400004/pandemi-covid-19-memperparah-kondisi-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/19100700003/indonesia-pimpin-penyusunan-panduan-integrasi-pelayanan-kesehatan-jiwa-pada-kerja-sama-kesehatan-ase.html>
- <https://m.liputan6.com/health/read/5062453/termasuk-ri-negara-asia-tenggara-bakal-perkuat-layanan-kesehatan-mental>

RETNO ENDRASTUTI adalah ibu bekerja yang saat ini aktif mengabdikan sebagai ASN Badan Kepegawaian Daerah Pemda DIY. Pernah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan S2 Double Degree di Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada dan Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University. Ini merupakan pengalaman sekaligus karya pertama dalam menulis berbentuk *book chapter*. Sebelumnya ia pernah membantu sebagai tim penerjemah dalam proyek dosen penerbitan buku terjemahan *Psikoanalisis dan Sufisme* (2004), saat ini menjadi web kontributor menulis lepas artikel-artikel di website tempat bekerja dan blogger kompasiana. Mempunyai minat yang luas, senang belajar hal baru, menulis dan berkreasi. Retno Endrastuti dapat dihubungi melalui email retno.endrastuti@jogjaprovo.go.id.

Pentingnya Kesehatan Psikologis Ibu Hamil Menghadapi Persalinan

Ernita Prima Noviyani

Risiko, Dampak, Intervensi Menghadapi Persalinan

Pada tahun 2017, sekitar 810 wanita meninggal saat kehamilan dan persalinan. Wilayah Afrika (Sahara) dan Asia Selatan menyumbang sekitar 86% (254.000) dari perkiraan kematian ibu global pada tahun 2017. Afrika menyumbang sekitar dua pertiga (196.000) kematian ibu, sementara Asia Selatan menyumbang hampir seperlima (58.000) (World Health Organization., 2019). Menurut WHO kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/ cedera (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia menempati posisi 305 per 100 ribu kelahiran hidup (Archadi, 2019). Menilik capaian ini, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang sudah menempati posisi 40-60 per 100 ribu kelahiran hidup (Agung, 2020). Pada tahun 2017 angka kematian setelah melahirkan (neonatal) di Indonesia sebanyak 15 per seribu kelahiran hidup, dengan jumlah tersebut Indonesia menempati urutan ke sepuluh sebagai negara dengan angka kematian neona (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). tal tertinggi di dunia (Untari & Rohmah, 2016). (dalam Isnaini et al., 2020)

Selama kehamilan terjadi perubahan fisiologi pada fisik dan psikologi ibu akibat adanya tumbuh kembang janin dan persiapan persalinan (Soma-Pillay et al., 2016). Perubahan tersebut membuat ibu hamil rentan pada kondisi stres, kecemasan dan keluhan lain terkait dengan kesehatan psikologi. Kekhawatiran dan kecemasan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun janin. Wanita yang menderita stres dan cemas saat kehamilan usia trimester ketiga, akan mengalami peningkatan risiko kelainan bawaan berupa kegagalan penutupan celah palatum, risiko operasi *sectio caesarea*, persalinan dengan alat, kelahiran prematur, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan dalam jangka panjang berkaitan dengan gangguan perilaku dan emosi anak

Ibu hamil dengan gangguan kesehatan psikologi misal stres dan kecemasan berisiko mengalami kelahiran prematur, lahir dengan berat yang rendah, perpanjangan durasi persalinan, gangguan kekebalan tubuh, gangguan metabolik dan obesitas, serta terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan depresi postpartum (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Risiko kelahiran prematur meningkat sebesar 1,55 kali dibandingkan dengan kehamilan sehat. (Santos et al., 2021).

Tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang di dalam kandungan. Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat memperberat komplikasi yang terjadi dan meningkatkan AKI dan AKB, dimana dalam penelitian diambil sampel 45 responden ibu hamil yang mengalami tingkat kecemasan sedang mengalami hipertensi sebesar 52,7% sedangkan yang mengalami tingkat kecemasan tinggi mengalami preeklampsia sebesar 57,8% (Trisiani et al., 2016).

Salah satu upaya untuk menurunkan gangguan kesehatan psikologi yang dihadapi ibu hamil adalah dengan program kelas ibu hamil. Kelas Ibu Hamil merupakan program pelatihan untuk menghadapi kelahiran di bawah pengawasan dan bimbingan dokter kandungan atau bidan yang sudah berpengalaman. Tujuan mengikuti kelas ini adalah mempersiapkan diri ibu hamil secara fisik dan mental. Selain itu, ibu hamil juga dapat bertemu dengan ibu hamil yang lain dengan kondisi yang sama sehingga bisa saling bertukar informasi dan memberi dukungan (Fadillah et al., 2018).

Pengetahuan dan Dukungan Keluarga

Aktif Kelas Ibu Hamil, Siap Menghadapi Persalinan

Di Indonesia pendidikan ibu hamil/kelas ibu hamil disebut kelas ibu hamil. Beberapa Artikel penelitian dalam *systematic review* berfokus pada dampak kelas pada ibu hamil dimana kesehatan psikologis ibu hamil adalah tingkat ketakutan, kecemasan dan stres kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan (Rahardjo Putri et al., 2022). Stres kehamilan merangsang gangguan pada kesejahteraan ibu, janin selama kehamilan hingga pascapersalinan, seperti kehamilan dan depresi pascapersalinan lahir prematur. Stres meningkatkan hormon adrenalin dan menurunkannya oksitosin. Selain itu, stres dapat menyebabkan kekakuan otot pada ibu hamil mengganggu aktivitas otot rahim dan memperpanjang persalinan (Ghooshchian S, 2011).

Kelas ibu hamil dirancang untuk membantu para ibu mendapatkan informasi terkait kehamilan dan persalinan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang mereka butuhkan. Kelas ibu hamil mulai berkembang dari segi kebutuhan materi, metode yang dipakai, dan peserta untuk meningkatkan efektifitas kelas ibu hamil sebagai sarana edukasi ibu hamil dan lingkungannya, khususnya suami (Fernández Fernández-Arroyo, n.d.,2020). Kelas ibu hamil juga memberikan intervensi pada aspek emosional dan motivasi, sehingga memungkinkan ibu hamil untuk memberdayakan dirinya sendiri (Rezapour et al., 2021).

Dalam *systematic review* didapatkan salah satu kesimpulan bahwa partisipasi pada kelas ibu hamil dapat menurunkan tingkat stres ibu hamil apabila dibandingkan dengan ibu yang tidak mengikuti kelas ibu hamil (Çankaya & Şimşek, 2021). Dibandingkan dengan kelompok kontrol, ibu yang mengikuti pendidikan antenatal lebih banyak *self-efficacy* persalinan, dukungan dan kontrol yang dirasakan lebih besar dalam kelahiran, dan lebih sedikit rasa takut akan kelahiran dan gejala Gangguan Stres Pascatrauma setelah melahirkan (semua perbandingan, $p < 0,05$) (Gökçe İsbir et al., 2016).

Menurut analisa peneliti, pemberian intervensi kelas ibu hamil dapat menurunkan tingkat stres karena materi dan metode yang diberikan dapat memberikan stimulasi berupa informasi sehingga menjadikan ibu sampai dengan tahapan *application* terhadap informasi tersebut. Dalam studi kualitatif, mayoritas wanita yang berpartisipasi dalam program persiapan persalinan melaporkan bahwa informasi yang mereka terima membantu mereka mengurangi kecemasan selama kehamilan dan persalinan (Miquelutti et al., 2013). Pengetahuan tentang persalinan dan informasi yang salah tentang persalinan akan menyebabkan ketakutan. pendidikan antenatal efektif dalam mengurangi ketakutan karena memberikan informasi tentang kelahiran dan secara positif mengubah informasi yang salah tentang kelahiran (Rahardjo Putri et al., 2022).

Selain menurunkan nyeri, kecemasan dan ketakutan, kelas ibu hamil dapat meningkatkan efikasi diri persalinan/persiapan persalinan, menurunkan trauma dan stres pasca persalinan. Informasi yang diberikan secara terprogram dalam kelas ibu hamil memungkinkan seorang ibu dan keluarga untuk memberdayakan diri menghadapi proses persalinan yang akan dihadapi. Peningkatan pemahaman terkait tanda bahaya, proses persalinan, pendampingan dan pengurangan nyeri dengan teknik relaksasi menjadi salah satu upaya persiapan persalinan normal pada ibu hamil trimester III (Kalayil Madhavanprabhakaran et al., 2016)

Dengan memberikan materi dan fasilitator yang disesuaikan dengan usia kehamilan pada pelaksanaan kelas ibu hamil, dapat meningkatkan pengetahuan yang benar dan informasi yang salah dapat dikurangi. Selain itu, interaksi dan berbagi pengalaman yang nyata di antara peserta kelas ibu hamil dapat menjadi cara untuk meningkatkan pengetahuan pengalaman dan mengubah sikap dan perilaku untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil (Andriani et al., n.d, 2016). Ada 6 prinsip yang ada pada kelas ibu hamil dan telah ada sejak 60 tahun yang lalu, antara lain: mengutamakan persalinan alami, bebas bergerak/memilih posisi saat persalinan, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, menghindari intervensi rutin yang tidak perlu, menghindari posisi terlentang terlalu lama dan rawat gabung antara ibu dan bayi (Lothian, 2016).

Bebas Cemas Hadapi Persalinan dengan Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga sangat diharapkan oleh seorang ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan, dengan dukungan keluarga yang baik akan mengurangi stressor pada ibu sehingga proses persalinan lebih lancar dan cepat

tanpa menimbulkan komplikasi. Para ibu yang didampingi oleh seorang sahabat atau keluarga dekat (khususnya suami selama proses persalinan berlangsung memiliki risiko lebih kecil mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan medis dari pada mereka yang tanpa pendampingan (dalam Arifin et al., 2015). Dukungan keluarga adalah sikap tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kecemasan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat kinerja fungsi-fungsi kognitif seseorang seperti berkonsentrasi, mengingat, dan pemecahan masalah. Faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu potensi stressor, malnutrisi, keadaan fisik, selisih usia, jenis kelamin pengetahuan, dan sosial ekonomi (dalam Arifin et al., 2015).

Wanita hamil dengan dukungan keluarga yang tinggi akan mengubah respon terhadap sumber kecemasan dan pergi kepada keluarganya untuk mencurahkan isi hatinya. kecemasan menghadapi ke lahiran bayi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang kehamilan. Hal ini dikarenakan banyak dari para keluarga dan suami yang tidak mampu melihat kondisi isterinya saat melahirkan sehingga mengakibatkan dukungan untuk ibu dalam proses persalinan agak berkurang. Kebanyakan suami atau keluarga hanya menunggu persalinan diruang tunggu yang telah disediakan oleh bidan tanpa ada yang langsung ikut dalam proses persalinan. Kurangnya dukungan moral dari keluarga dan suami menyebabkan banyak ibu-ibu yang bersalin merasa khawatir dan takut menghadapi persalinan sehingga menyebabkan perasaan cemas saat berlangsung persalinan smakin bertambah. Hasil wawancara juga didapatkan 1 orang ibu yang mengatakan bahwaia selalu ditunggui keluarganya saat melakukan pemeriksaan kehamilannya. Dukungan penuh yang diberikan keluarganya saat persalinan tersebut menjadikan ibu menjadi lebih tenang sehingga hal tersebut mengurangi kecemasan ibu saat menghadapi persalinan (dalam Arifin et al., 2015)

Dukungan keluarga dalam persalinan merupakan sumber kekuatan bagi ibu yang tidak dapat diberikan oleh tenaga kesehatan. dorongan, motivasi terhadap ibu hamil baik secara moral maupun material serta dukungan fisik, psikologis, emosi, informasi, penilaian dan *financial*. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien berasal dari sebagai orang terdekat, dalam hal ini orang terdekat ibu khususnya adalah suami. Dalam semua tahap, dukungan sosial keluarga menjadikan keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, sehingga akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan (Janiwarty & Zan Pieter, 2013).

Ibu hamil khususnya ibu dalam menjelang proses persalinan perlu mengendalikan rasa cemas yang mungkin dihadapinya untuk mencegah dampak negatif bagi ibu dan bayi. Dukungan keluarga sangatlah penting, karena dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik antara keluarga dengan ibu, sehingga diharapkan dapat membantu ibu dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang ibu hadapi khususnya ibu yang sedang hamil dan menjelang proses persalinan. Dukungan keluarga juga berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang dimana peran keluarga adalah sesuatu yang diharapkan secara normative dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan–harapan. Keberadaan dukungan keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Disamping itu, pengaruh positif dari dukungan sosial keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress (Wulandari & Parwati, 2022).

Konklusi: Pengetahuan dan Dukungan, Berdayakan Ibu

Pada masa kehamilan ibu umumnya mengalami perubahan fisik maupun psikologis. Perubahan fisik yang umumnya bisa terlihat seperti ibu mengalami keluhan mual muntah sampai terjadi malnutrisi, sakit kepala, lesu, nyeri perut bagian bawah dan lain sebagainya yang dirasakan ibu secara fisik. Selain perubahan fisik, masa kehamilan juga bisa terjadi perubahan psikologis seperti ibu merasa ketakutan jika merasakan sakit menjelang persalinan, sering merasa sedih karena tidak ada yang mendampingi saat hamil. Jika perasaan takut, sedih, kecewa ibu tidak diatasi bisa menyebabkan kecemasan, stress depresi, hingga berdampak pada kelahiran seperti bayi lahir rendah, kelahiran premature, kecacatan dan lain sebagainya. Adapun meminimalisir kecemasan ibu hamil yaitu dengan memberdayakan ibu untuk meningkatkan pengetahuan seputar kehamilan, persalinan, pasca persalinan hingga perawatan bayi melalui kelas ibu hamil, serta penting juga mendapat dukungan keluarga selama masa Kehamilan, persalinan, kelahiran hingga perawatan bayi.

Kelas ibu hamil dapat menurunkan depresi, kecemasan, gejala stres dan keluhan serta meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup ibu hamil selama kehamilan. Pada fase persiapan persalinan, kelas ibu hamil dapat meningkatkan

efikasi diri persalinan dan menurunkan rasa takut akan kelahiran. Kelas ibu hamil merupakan sarana edukasi untuk ibu hamil dan lingkungan sekitar. Edukasi yang diberikan dapat berupa pemberian informasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan intervensi aspek emosional dan motivasi agar ibu hamil dapat memberdayakan diri.

Dukungan keluarga khususnya suami yang baik terbukti dapat membantu ibu mengurangi tingkat kecemasannya dalam menghadapi persalinan dikarenakan dengan didampingi suami ibu pada saat mempersiapkan persalinan selama kehamilannya bisa menekan intensitas nyeri yang berdampak pada tingkat kecemasan yang rendah pada saat menghadapi persalinan.*

Referensi

- Agung. (2020, November 15). *AKI di Indonesia Masih Tinggi*. <https://Ugm.Ac.Id/Berita/17548-Aki-DiIndonesia-Masih-Tinggi>.
- Andriani, Y., Hari Respati, S., & Parama Astirin, O. (n.d.). Effectiveness of Pregnant Woman Class in The Prevention of Pregnancy Anemia in Banyuwangi, East Java. *Journal of Maternal and Child Health*, 2016(4), 230–241. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2016.01.04.04>
- Archadi, E. L. (2019). *Kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia*.
- Arifin, A., Kundre, R., Rompas, S., Studi, P., Keperawatan, I., Kedokteran, F., Sam, U., & Manado, R. (2015). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Puskesmas Budilatama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah* (Vol. 3).
- Çankaya, S., & Şimşek, B. (2021). Effects of Antenatal Education on Fear of Birth, Depression, Anxiety, Childbirth Self-Efficacy, and Mode of Delivery in Primiparous Pregnant Women: A Prospective Randomized Controlled Study. *Clinical Nursing Research*, 30(6), 818–829. <https://doi.org/10.1177/1054773820916984>
- Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. In *Current Opinion in Psychiatry* (Vol. 25, Issue 2, pp. 141–148). <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503680>
- Fadillah, G., Si, S., Reni, M. S., Istiningrum, B., Sc, M., Letak, T., Cover, /, Arrosyid, R., Ruwindya, Y., Diterbitkan, A. M., Diii, :, Kimia, A., Matematika, F., Ilmu, D., & Alam, P. (2018). *SEMINAR NASIONAL VOKASI INDONESIA. 1*.
- Fernández Fernández-Arroyo, M. (n.d.). *Childbirth Education: Comparative Analysis*. www.intechopen.com
- Ghooshchian S. (2011). The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor. In *Original Article) AMUJ (Arak Medical University Journal* (Vol. 14, Issue 56).
- Gökçe İsbir, G., İnci, F., Önal, H., & Yıldız, P. D. (2016). The effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms following childbirth: an experimental study. *Applied Nursing Research*, 32, 227–232. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2016.07.013>
- Ibu Hamil Terhadap Kesehatan Psikologis Ibu Hamil dan Persiapan Persalinan, K., Rahardjo Putri, N., Amalia, R., & Indri Kusmawati, I. (2022). Kelas Ibu Hamil Terhadap Kesehatan Psikologis Ibu Hamil dan Persiapan Persalinan: Systematic Review. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 5(1). <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijmAvailableat:http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/ijm/issue/view/125>
- Isnaini, I., Hayati, E. N., & Bashori, K. (2020). Identifikasi Faktor Risiko, Dampak dan Intervensi Kecemasan Menghadapi Persalinan pada Ibu Hamil Trimester Ketiga. *Analitika*, 12(2), 112–122. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3382>
- Janiwarty, B., & Zan Pieter, H. (2013). *Pendidikan Psikologi untuk Bidan: Suatu teori dan terapannya* (D. Hardjono, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Rapha Publishing, 2013.
- Kalayil Madhavanprabhakaran, G., Sheila D'Souza, M., & Nairy, K. (2016). Effectiveness of Childbirth Education on Nulliparous Women's Knowledge of Childbirth Preparation, Pregnancy Anxiety and Pregnancy Outcomes. *Nursing and Midwifery Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.5812/nmsjournal.32526>
- Kementerian Kesehatan RI. (2014, September). *Situasi Kesehatan Ibu*. [www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id) .

- Lothian, J. (2016). Does Childbirth Education Make a Difference? *The Journal of Perinatal Education*, 25(3), 139–141. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.25.3.139>
- Miquelutti, M. A., Cecatti, J. G., & Makuch, M. Y. (2013). *Antenatal education and the birthing experience of Brazilian women: a qualitative study*. <http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/171>
- Rezapour, T., Barzegari, M., Sharifi, E., Malmir, N., Ghiasvand, H., Salehi, M., Noroozi, A., & Ekhtiari, H. (2021). Neuroscience-Informed Psychoeducation for Recovery: A Program to Promote Metacognition in People With Substance Use Disorders. *Basic and Clinical Neuroscience*, 12(5), 597–606. <https://doi.org/10.32598/bcn.2021.809.3>
- Santos, J. L., Moreira, F., Ribeiro, P. F., Canadas, M. J., Novais, A., & Lomba, A. (2021). A farming systems approach to linking agricultural policies with biodiversity and ecosystem services. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 19(3), 168–175. <https://doi.org/10.1002/fee.2292>
- Soma-Pillay, P., Nelson-Piercy, C., Tolppanen, H., & Mebazaa, A. (2016). Physiological changes in pregnancy. *Cardiovascular Journal of Africa*, 27(2), 89–94. <https://doi.org/10.5830/CVJA-2016-021>
- Trisiani, D., Hikmawati, R., Bhakti, S., & Bandung, K. (2016). *Hubungan Kecemasan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Preeklampsia Di Rsud Majalaya Kabupaten Bandung: Vol. 1* (Issue 3).
- Untari, M. M., & Rohmah, F. A. (2016). Kecemasan Ibu Hamil Ditinjau Dari Intensitas Membaca Al-Qur'an Dan Kelompok Usia. *Indonesian Psychological Jurnal*, 13.
- World Health Organization. (2019, September). *Maternal Mortality*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality>.
- Wulandari, I. A., & Parwati, N. W. M. (2022). Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Persalinan Pada Pandemi Covid 19 Di Provinsi Bali. *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 20–25. <https://doi.org/10.51544/jmkm.v7i1.2993>

ERNITA PRIMA NOVIYANI adalah dosen Fakultas Ilmu Vokasi di Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Indonesia Maju (UIMA) Lenteng Agung, Jakarta Selatan, telah menjadi dosen sejak tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) Fakultas Vokasi. Selama bergabung di dunia pendidikan telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi dengan biaya mandiri, hibah eksternal dikti, maupun dari internal intitusi pendidikan. Melakukan publikasi jurnal nasional maupun internasional. Pada tahun 2023 telah menulis buku ajar antara lain Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir S1 Kebidanan, serta Buku Ajar Fisiologi dan Psikologi Persalinan. Dalam menunjang keilmuan sebagai dosen kebidanan, juga memiliki Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) sejak tahun 2021 dimana hal itu dapat mempermudah memahami kajian teori dan praktik yang ada di lapangan. Beberapa pelatihan juga sudah diikuti untuk menunjang kompetensi kebidanan baik dalam pendidikan maupun praktiknya, dan sampai saat ini juga menjadi Fasilitator Prenatal Gentle Yoga, Terapis Mom & Baby SPA, AMANI Birth Child Birth Educator & Doula Certification, Instruktur Senam Maryam Berlisensi. Senang belajar dan mengajar, penelitian, pengabdian dan menulis. Ernita Prima Noviyani dapat dihubungi melalui E-mail: ernitaprima.stikim@gmail.com.

Peran Bidan dalam Transformasi Kesehatan Ibu dan Anak Pasca Pandemi Covid 19 di Negara ASEAN

Irma Jayatmi

Pendahuluan

Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak masih menjadi tantangan di sebagian besar negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Dari enam negara Asia Tenggara (ASEAN) yang bergabung dengan Countdown hingga 2015, hanya Kamboja dan Indonesia yang dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDG) 4 yaitu penurunan angka kematian anak, sementara itu hanya Kamboja dan Laos yang dapat mencapai penurunan angka kematian ibu (Sebayang et al., 2019).

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada 2017. Rasio itu sudah lebih baik dari belasan tahun sebelumnya yang lebih dari 200 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kendati, AKI Indonesia masih ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Negara yang punya AKI lebih besar dari Indonesia adalah Myanmar (250 kematian per 100 ribu kelahiran hidup) dan Laos (185 kematian per 100 ribu kelahiran hidup). AKI di Kamboja, Timor Leste, dan Filipina juga masih di atas 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, lima negara lainnya di Asia Tenggara memiliki AKI yang lebih baik karena sudah di bawah 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kelima negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian bisa disebabkan oleh kehamilan atau pengelolannya. Beberapa faktor risiko yang paling sering menyebabkan kematian ibu, antara lain hipertensi dan pendarahan. Selain itu, kasus infeksi, abortus, atau proses persalinan yang lama turut menjadi faktor risiko kematian ibu (Adrea Lidwina, 2021).

Pemeriksaan kehamilan yang tidak adekuat dapat berpotensi membahayakan nyawa bayi baru lahir (Doku & Neupane, 2017). Di Kamboja, perempuan yang tidak memeriksakan kehamilan memiliki tingkat kematian neonatal enam kali lebih besar daripada perempuan yang memeriksakan kehamilan empat kali atau lebih. Namun, jumlah perempuan yang memeriksakan kehamilan empat atau lebih di negara-negara ASEAN bervariasi, yaitu berkisar antara 55% hingga 87,8% dan proporsi perempuan yang memeriksakan kehamilannya sejak trimester pertama berkisar 40% hingga 80,4% (Sebayang et al., 2019).

Pemberdayaan perempuan harus lebih ditekankan untuk mencapai jumlah minimum pemeriksaan kehamilan, karena hal ini telah terbukti memiliki hubungan secara positif dengan indikator kesehatan ibu dan layanan kesehatan (Pratley, 2016). Namun, saat ini masih terlalu sedikit perhatian yang dilakukan di negara ASEAN untuk menemukan bukti terhadap hubungan pemberdayaan perempuan dengan kesehatan ibu dan anak. Ibu yang usianya masih remaja memiliki akses yang lebih buruk untuk pemeriksaan kehamilan daripada ibu golongan usia dewasa, terutama ibu yang masih remaja dengan tingkat pendidikan sedang memiliki peluang yang lebih kecil untuk memeriksakan kehamilannya 4 kali atau lebih di Kamboja, sementara ibu usia remaja pada kelompok yang partisipasi kerjanya rendah di Myanmar memiliki peluang lebih rendah untuk memeriksakan kehamilannya pertama kali pada trimester pertama. Kurangnya akses perempuan terhadap informasi kesehatan juga harus diwadahi dalam bentuk media yang informatif, terutama di negara Kamboja, Myanmar, dan juga Indonesia (Sebayang et al., 2019).

Kesehatan ibu dan anak adalah kesehatan yang mencakup segala aspek untuk mempertahankan derajat kesehatan yang optimal secara komprehensif di setiap daur kehidupannya mulai dari pra konsepsi, konsepsi, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, pra sekolah, sekolah, remaja, dewasa hingga menopause (Rohani et al., 2020). Bidan adalah

seorang perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan baik di dalam maupun di luar Negeri yang diakui secara legal (Say et al., 2014).

Peran bidan dalam masyarakat adalah memberikan pelayanan prima dan komprehensif utamanya bagi kesehatan ibu dan anak. Bidan disebut juga sebagai penggerak pelayanan kesehatan dimasyarakat, hal ini sejalan dengan hasil survey kesehatan di Indonesia yang menunjukkan bahwa hampir (88%) pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh bidan. Upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak telah banyak dilakukan, salah satunya dengan pencapaian program Sustainability Development Goals (SDGs), dimana bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya mewujudkan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas bersama dengan petugas kesehatan lainnya. Disisi lain tingginya AKI dan AKA juga masih menjadi PR yang tak kunjung terselesaikan, oleh karenanya dibutuhkan strategi baru untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan salah satunya dengan penguatan peran dan fungsinya melalui pendidikan formal standar pendidikan bidan (Rohani et al., 2020)

Penguatan pendidikan formal juga untuk mendukung terciptanya Cita-cita Indonesia dalam meningkatkan derajat kesehatan, dengan mencetak tenaga kesehatan yang profesional, akuntabel, menjadi mitra perempuan (*Women Center Care*), memberikan asuhan mulai dari masa kehamilan dengan mempertahankan kehamilan normal, menolong persalinan dengan konsep normal atas tanggung jawabnya sendiri, memberikan asuhan nifas normal, neonatus, bayi dan balita dengan pendekatan manajemen kebidanan (*Midwifery*) yang mencakup upaya pencegahan, memberikan pelayanan dengan konsep normal, deteksi dini komplikasi dan melaksanakan tindakan awal kegawatdaruratan (Rohani et al., 2020).

Strategi peningkatan mutu pelayanan kebidanan

Di Indonesia pendidikan profesi bidan merupakan upaya penguatan pendidikan bidan secara formal yang disusun berdasarkan kurikulum perguruan tinggi dengan mengacu pada profil lulusan profesi bidan, standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran) KKN level 7 (Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012) dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), Permenristekdikti no 50 th 2018. Pendidikan profesi diselenggarakan selain untuk meningkatkan mutu pelayanan bidan secara profesional tetapi juga menghasilkan profil lulusan bidan yang berdayaguna memiliki kemampuan sebagai pemberi layanan kesehatan (*Care Provider*), memiliki kemampuan komunikasi yang baik (*Communicator*), penggerak dalam masyarakat (*Comunity Leader*), pengambil kebijakan (*Decission maker*), dan pengelola (*Manager*).

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita dan keluarga berencana. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit pada ibu dan anak melalui peningkatan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan prenatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan primer (Ikhwah Mu'minah, 2021). Peran aktif bidan sangat penting mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana. Pada situasi pandemi Covid-19 bidan harus tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 baik kepada ibu maupun bayi. Dalam situasi normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi pada saat situasi bencana. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi bencana nasional non alam Covid-19 sehingga pelayanan kesehatan maternal dan neonatal menjadi salah satu layanan yang terkena dampak baik secara akses maupun kualitas (Ikhwah Mu'minah, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian Ikhwah dkk (2021) peran bidan dalam memberikan pelayanan KIA dan KB di masa pandemic Covid-19 di lakukan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pada masa pandemi. Penggunaan APD level 2 ketika melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan dan melakukan skrining Covid-19 kepada pasien terlebih dahulu sebelum pasien mendapatkan pelayanan kebidanan., dilanjutkan untuk pembuatan jadwal periksa yang meliputi hari dan jam pasien harus datang sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan di Puskesmas sehingga bisa menekan penularan Covid-19. Penelitian ini sejalan dengan UU Kebidanan No.4 Th 2019 bahwa Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Selama pandemi

Covid-19 dan menghadapi era New Normal, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal, aman bagi pasien dan bidan dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan penanganan covid atau protokol kesehatan.

Dalam penanganan Covid-19 ada peran penting seorang bidan terutama dalam penegakkan prokes pada masyarakat. Bidan khususnya yang bertugas di desa, sebagai salah satu komponen masyarakat yang mengerti seluk beluk desa tersebut, berperan strategis dalam peningkatan dan pemeliharaan status kesehatan masyarakat terutama pada masa pandemi ini. Bidan juga berperan dalam mensosialisasikan mengenai upaya mencegah COVID-19 dan pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat kepada penduduk desa.

Dengan bekal ilmu yang dimiliki dan pemahaman mengenai kondisi desa maka bidan berperan strategis dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat setempat dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya setempat. Bidan mempunyai kontribusi besar dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dengan bekal keilmuan dan kompetensinya, bidan dapat mempunyai kontribusi spesifik dalam penanganan Covid-19 berbasis komunitas dengan cara mendorong warga desa untuk berperan aktif memutus mata rantai penularan virus. Upaya tersebut dapat dilakukan dan kerja sama dengan satgas desa, satgas kecamatan dalam menjalankan program penanganan Covid-19. (Ummie Qommar, 2021)

Bidan juga dapat mendorong agar masyarakat tangguh dan siap dalam penanggulangan bencana dan melawan COVID-19 melalui berbagai upaya berbasis komunitas. Kolaborasi antara tenaga kesehatan seperti dokter di desa dan bidan desa bersama masyarakat menjadi sebuah tantangan dan keharusan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pada pandemi Covid –19.

Tenaga kesehatan terutama bidan sebagai garda terdepan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Pasca Pandemi Covid-19 tentu diharapkan tetap semangat tanpa pamrih memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas, namun harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap high risk terpaparnya penularan Covid –19 yang tentunya belum sepenuhnya hilang dan masih tetap ada, karena di era new normal bukan berarti bebas risiko penularan Covid -19. Bidan memiliki berbagai tantangan dan hambatan dalam memberikan pelayanan KIA dan KBKR dari dampak adanya Covid-19. Pelayanan tetap terlaksana sebagai upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) selama wabah pandemi Covid-19. Pelayanan ini mengacu pada protokol penyebaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi. Peman komunikasi dan konseling terutama layanan telemedik atau telemedicine (Aprilina et al., n.d.)

Peningkatan Kapasitas Bidan

Sebagai provider pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang berada di garis depan menghadapi Covid-19. Seorang bidan dapat bekerja di rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri dan fasilitas kesehatan lainnya. Setiap hari bidan harus bekerja dan melayani pasien yang mungkin atau telah terinfeksi Covid-19 dan situasi ini sangat memungkinkan bidan tertular dengan virus corona. Hal inilah yang menempatkan bidan pada kelompok risiko tinggi terkena penyakit menular seperti Covid-19.

Bidan harus tetap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu dan anak pada masa pandemi. *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan bahwa semua ibu hamil termasuk yang terkonfirmasi atau diduga terinfeksi Covid-19 mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi sebelum, selama dan setelah melahirkan. Ini termasuk pelayanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan pascapersalinan. Jika seorang ibu telah didiagnosis Covid-19, ibu berhak mendapatkan persalinan dengan aman. Sectio caesarea hanya boleh dilakukan jika secara medis dapat dibenarkan, dukungan untuk tetap menyusui dan memberikan ASI eksklusif dengan aman harus diberikan oleh bidan.

Bidan perlu mengasah keterampilan dan pengetahuannya untuk dapat bekerja secara profesional pada masa pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas diri bidan yang dimaksud meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Peningkatan kapasitas seorang bidan saat masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, pelatihan, dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19. Beberapa hal yang harus dilakukan bidan dalam hal peningkatan kapasitas diri selama pandemi Covid-19 adalah:

1. Diseminasi informasi asuhan kebidanan berdasarkan Evidence Based Medicine (EBM) melalui seminar dan skill training secara virtual

Pada masa pandemi Covid-19, banyak negara mengembangkan sumber daya pembelajaran secara virtual untuk mendukung para profesional kesehatan merespons Covid-19. Negara Inggris menciptakan program e-learning gratis yang dirancang untuk melatih tenaga kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, penggunaan APD, ventilasi invasif dan pelayanan pengobatan intensif. Kanada melalui pelatihan medis Oxford menawarkan pelatihan realitas virtual gratis untuk memperbaharui keterampilan para perawat dan dokter di Kanada, Amerika Serikat dan Inggris (OECD, 2020)

2. Kepatuhan Terhadap Pedoman Dan Rekomendasi Klinis Resmi

Kepatuhan terhadap semua pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) terkait pengendalian Covid-19 pada saat memberikan pelayanan kesehatan sangatlah penting bagi bidan

3. Pemanfaatan Informasi Dan Teknologi (IT) Untuk Pelayanan Kesehatan

Bidan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi/aplikasi untuk dapat terus melaksanakan pelayanan kebidanan. Beberapa pelayanan seperti antenatal care, pascapersalinan dan layanan kebidanan lainnya yang tidak urgent dapat dilaksanakan dalam bentuk konsultasi jarak jauh (telemedicine) secara online.

Menutup tulisan ini, Pandemi Covid-19 jelas merupakan tantangan bagi semua orang, namun pasti ada hal baik meskipun dari situasi terburuk sekalipun. Kita memiliki kekuatan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berarti untuk peningkatan kapasitas peran bidan khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dengan mengikuti pendidikan formal ataupun mengikuti pelatihan baik secara offline atau online untuk mengasah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan diharapkan mampu menguasai dan menerapkan kemampuan komunikasi digital untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelamatkan ibu dan anak. Dengan kata lain, pada pasca pandemi Covid-19, kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill dan peningkatan kapasitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi.*

Referensi

- Adrea Lidwina. (2021). *Angka Kematian Ibu Indonesia Ketiga Tertinggi di Asia Tenggara*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/angka-kematian-ibu-indonesia-ketiga-tertinggi-di-asia-tenggara>
- Aprilina, S., Keb, M., Rahayu, D. T., ST, S., Yulawati, D., ST, S., Raidanti, D., SiT, S., Purwandari, E. S., & Maringga, E. G. (n.d.). *Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Era Pandemi Covid-19*.
- Doku, D. T., & Neupane, S. (2017). Survival analysis of the association between antenatal care attendance and neonatal mortality in 57 low- And middle-income countries. *International Journal of Epidemiology*, 46(5). <https://doi.org/10.1093/ije/dyx125>
- Ikhwah Mu'minah, R. I. dan D. S. (2021). Peran Aktif Bidan dalam Pelayanan KIA dan KB pada Masa Pandemi COVID-19 di Puskesmas Kemrajen II. *Midwife and Reproduction*, 5(1).
- OECD. (2020). *Skill measures to mobilise the workforce during the COVID-19 crisis; Tackling Coronavirus (COVID-19)*. OECD (2020) 'Skill Measures to Mobilise the Workforce during the COVID-19 crisis; Tackling Coronavirus (COVID-19), (July), Pp.Www.Oecd.Org/Coronavirus/ Policy-Responses/Skill-Measures-to- Mobilise-the-Workforceduring-the-Covid-19-Crisis-Afd33a65.
- Pratley, P. (2016). Associations between quantitative measures of women's empowerment and access to care and health status for mothers and their children: A systematic review of evidence from the developing world. In *Social Science and Medicine* (Vol. 169). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.001>
- Rohani, S., Ana, E. F., Qurniasih, N., Wulandari, E. T., Sulistiawati, Y., Kumalasari, D., Mayasari, A. T., & Utami, I. T. (2020). Perkembangan Penelitian Kesehatan Ibu Dan Anak Dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*, 2(2).

- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A.-B., Daniels, J., Gülmezoglu, A. M., Temmerman, M., & Alkema, L. (2014). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 2(6), e323–e333.
- Sebayang, S. K., Efendi, F., & Astutik, E. (2019). Women's empowerment and the use of antenatal care services: analysis of demographic health surveys in five Southeast Asian countries. *Women and Health*, 59(10). <https://doi.org/10.1080/03630242.2019.1593282>
- Ummie Qommar. (2021, May 31). *Peran Bidan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*. IBI Kebumen.

IRMA JAYATMI lahir di Depok, 14 Mei 1988. Saat ini bekerja sebagai Dosen Kebidanan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di Universitas Indonesia Maju (UIMA), Founder Zara Spa, Editor in Chief Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia (JIKI) Terakreditasi Sinta 4, Kabid Pendidikan PC Ikatan Bidan Indonesia Jakarta Sekatan, Ibu 2 anak (1 putra-1 putri) yang hobi nonton, membaca, diskusi dan menulis. Sampai dengan saat ini sudah menghasilkan penulisan 22 Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional, 2 Prosiding Internasional dan 4 H-KI. Tulisannya juga dimuat dalam buku *Sehimpun Mutiara Literasi Indonesia 3* (Perpusnas, 2022) dan *Pulih Bersama Bangkit Perkasa 2* (Perpusnas, 2022). Ia dapat dikontak di email: irmajayatmi@gmail.com. Contact person: 087889990741 FB: Irma Jayatmi Iq : [irma_jayatmi](https://www.instagram.com/irma_jayatmi).

Ketahanan Keluarga membangun Ketahanan Kesehatan Global

Astrid Novita Haryanto

Kondisi Masalah Kesehatan di Asia Tenggara

Asia adalah benua terpadat di dunia dengan lebih dari 4,4 miliar orang. Populasi diproyeksikan meningkat menjadi 4,9 miliar pada tahun 2030. Berdasarkan laporan dalam Dana Moneter Internasional tahun 2018, Asia juga merupakan ekonomi kontinental terbesar dan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, dengan proyeksi tingkat pertumbuhan PDB tertinggi. Asia juga mengalami transisi epidemiologis, demografis, ekonomi, ekologis, perkotaan, dan nutrisi yang besar. Transisi yang berbeda, bersama dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi, akan memengaruhi cara berbagai negara merancang dan mereformasi sistem kesehatan mereka dengan pandangan ke masa depan.

Terlepas dari keragaman negara-negara Asia dan sistem kesehatannya, seluruh negara di Asia memiliki peluang dan ancaman di masa depan yang sama-sama dimiliki. Kemudian selain itu, jika ditinjau dari segi geografis wilayah Asia juga rentan terhadap bencana alam dan antropogenik, khususnya di kawasan Tenggara, seperti itu seperti gempa bumi, topan, banjir, serta masalah lain yang mempengaruhi kesehatan seperti pencemaran lingkungan. Permasalahan lainnya adalah bahwa Asia berisiko terhadap penyakit infeksi baru seperti flu burung, MERS-CoV, dan yang terbaru adalah wabah Covid-19 (Legido-Quigley & Asgari-Jirhandeh, 2018).

Asia Tenggara merupakan bagian dari Asia yang merupakan rumah bagi hampir 2 miliar orang (hampir 26% dari populasi global). Wilayah Asia Tenggara memiliki berbagai permasalahan Kesehatan. Mulai dari masih tingginya angka kematian ibu, dimana 3 negara terbesar untuk kasus AKI (Angka Kematian Ibu) di Asia Tenggara adalah Myanmar, Laos dan Indonesia. Selain AKI, beberapa penelitian mengungkapkan jika ada tiga masalah utama Kesehatan anak dan remaja di Asia Tenggara yakni masalah kekurangan gizi, anemia dan kelebihan berat badan atau obesitas (Dinisari, 2022). Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan prevalensi anak/balita yang menderita stunting di Asia Tenggara masih tinggi, dengan urutan tertinggi pertama yaitu Timor Leste (48,8%), Indonesia (31,8%), dan Laos di posisi ketiga dengan persentase 30,2%.

Data lain menunjukkan bahwa 40% dari penduduk di Asia Tenggara merupakan penduduk miskin dan 30% dari beban penyakit global, dengan kasus tuberkulosis yang tidak proporsional (35%), cedera karena kecelakaan (30%), kematian ibu (33%) dan kematian anak <5 tahun (30%) (Dhillon et al., 2012) 40% of the global poor and 30% of the global disease burden, with a disproportionately large share of tuberculosis (35%). Selain itu, berdasarkan survei tahun 2022 diketahui bahwa konsumsi rokok per kapita secara tahunan di Asia Tenggara masih tinggi, dimana Vietnam merupakan negara dengan puncak konsumsi per kapita paling tinggi (1.445 batang), disusul oleh Indonesia (1.276 batang) dan ketiga adalah Filipina (874 batang) (M. I. Mahdi, 2022). Selain itu, penyakit tidak menular (NONCOMMUNICABLE DISEASES/NCD) turut menyumbang hampir dua pertiga dari semua kematian di negara-negara WHO Wilayah Asia Tenggara (Harsono, 2022).

Untuk menilai bagaimana suatu tingkat kesehatan pada suatu wilayah dibutuhkan angka yang dapat menjadi patokan dalam penilaian. Sebagai informasi, penilaian GHSI dilakukan terhadap 195 negara di dunia. Penilaian tersebut meliputi enam kategori, yakni sistem kesehatan, pencegahan, deteksi dan pelaporan, kecepatan merespons, risiko lingkungan, dan pemenuhan terhadap standar internasional. Skor Indeks Ketahanan Kesehatan Global (*Global Health Security Index/GHSI*) sebesar 50,4 dari skala 0-100 pada 2021. Skor tersebut membuat ketahanan kesehatan Indonesia menjadi yang terbesar keempat di Asia Tenggara. Thailand berada di urutan pertama dengan skor GHSI sebesar 68,2 poin. Setelahnya ada Singapura dan Malaysia dengan skor GHSI masing-masing sebesar 57,4 poin dan 56,4 poin. Filipina

berada di bawah Indonesia dengan skor GHSI sebesar 45,7 poin. Ada pula Brunei Darussalam dengan skor GHSI senilai 43,5 poin. Skor GHSI Vietnam tercatat sebesar 42,9 poin. Myanmar berada di urutan kedelapan dalam daftar ini dengan skor GHSI sebesar 38,3 poin (I. Mahdi, 2022).

Pada beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, masih mengalami fenomena *triple burden of disease* alias beban tiga penyakit yang muncul secara bersamaan masih umum terjadi. Tiga penyakit yang dimaksud, pertama adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular yang sangat cepat. Penyakit tidak menular ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurang berolahraga, dan merokok. Kedua, angka penyakit menular yang seharusnya teratasi juga masih relatif tinggi. Penyakit menular yang muncul menjadi perhatian utama dimana beberapa penyebabnya karena pergerakan populasi, baik intra dan lintas batas, urbanisasi dengan kepadatan tinggi dan perubahan iklim, serta ketidaksetaraan hasil kesehatan yang terus berlanjut. Ketiga, munculnya fenomena ragam penyakit infeksi baru yang berevolusi dari penyakit-penyakit lama seperti Covid-19 saat ini. Selain *triple burden*, masalah Kesehatan global juga mengalam transisi epidemiologis. Dimana dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, telah terjadi transisi epidemiologis di mana penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal meningkat hingga lebih dari 57% (Asmara, 2021).

Melihat gambaran kompleksnya masalah kesehatan di Asia Tenggara, maka sangat diperlukan sebuah mekanisme pencegahan yang merunut dari penyebab hulu, melalui perubahan perilaku untuk hidup sehat. Hidup sehat merupakan harapan setiap orang. Menjadi tujuan, hidup sehat juga berarti sebuah “perjalanan” di mana dalam mencapainya diperlukan upaya tak kenal lelah dalam menerapkan dan menjaga pola hidup sehat. Untuk mencegah kemungkinan terburuk mengidap penyakit tertentu, penerapan pola hidup sehat haruslah ditumbuhkan pada setiap individu. Dalam hal ini, keluarga punya peran penting dalam memupuk kebiasaan penerapan pola hidup sehat. Keluarga harus memperkenalkan sedini mungkin tentang **pola hidup sehat (Kemenkes RI, 2017)**.

Arti Penting Ketahanan Keluarga Terkait Ketahanan Kesehatan

Kesehatan merupakan pilar penting dalam pengembangan ketahanan nasional suatu bangsa. Kemampuan suatu negara di bidang kesehatan pada dasarnya adalah keuletan dan ketahanan negara di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kapasitas bidang kesehatan nasional merupakan salah satu unsur dasar ketahanan nasional, dan kekuatan bidang kesehatan nasional merupakan salah satu daya dukung sistem pertahanan negara (Suryana et al., 2022). Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan tantangan (Widiuseno, 2013). Ketahanan Nasional harus didukung dengan kesiapan pada lima pilar ketahanan, yaitu ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mental spiritual (Siregar, 2022).

Membangun sistem kesehatan yang tangguh sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku, institusi, dan populasi kesehatan cukup siap dan mampu merespons guncangan yang tidak terduga. Ketahanan adalah konsep yang muncul di bidang sistem kesehatan, yang didefinisikan terutama sebagai kapasitas sistem kesehatan untuk pulih dan menyerap kejutan dan mempertahankan hasil, sering kali diukur melalui hasil kesehatan. Sebagian besar ahli dalam ketahanan sistem kesehatan menekankan bahwa fokusnya tidak hanya pada menyerap guncangan tak terduga yang dipicu oleh kebutuhan kesehatan yang muncul, tetapi juga memastikan kesinambungan dalam peningkatan kesehatan serta mendorong penguatan sistem kesehatan. Memiliki sistem informasi kesehatan yang tepat, mekanisme pembiayaan yang memadai, manusia yang tepat sumber daya, dan “tata kelola” dan “nilai” yang tepat adalah kunci agar sistem kesehatan menjadi “tangguh” (resilient) (Legido-Quigley & Asgari-Jirhandeh, 2018).

Definisi ketahanan sistem kesehatan sendiri berfokus pada kesiapsiagaan dan respons sistem kesehatan terhadap guncangan yang parah dan akut, dan bagaimana sistem dapat menyerap, beradaptasi, dan bertransformasi untuk mengatasi perubahan tersebut. Namun, dengan semakin banyaknya literatur seputar ketahanan sistem kesehatan, fokus definisi telah meluas. Saat ini, literatur tentang ketahanan juga meluas untuk melihat meminimalkan paparan (risiko dan kerentanan) terhadap guncangan, yang biasanya disebut sebagai kerentanan, dan untuk melihat pengelolaan tekanan atau tekanan sistem yang dapat diprediksi dan bertahan lama, seperti penuaan populasi atau peningkatan kejadian multimorbiditas, dan bahkan apa yang dapat disebut ketahanan sehari-hari, yaitu ketahanan terhadap tekanan

yang biasa dan kronis (Thomas et al., 2020) such as the financial crisis or the Ebola outbreak. Some of these systems appeared to have been better prepared for and/or better able to cope with these events than others. In other words, some were more resilient to shocks and/or in their responses to shocks. Most recently, the emergence and rapid spread of the novel coronavirus disease (COVID-19).

Terwujudnya ketahanan nasional tidak terlepas dari peran keluarga, karena keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan unit terkecil yang menentukan bangsa. Keluarga memiliki peran langsung untuk bisa mewujudkan sikap atau fungsi asah, asih, dan asuh serta merupakan tumpuan untuk menumbuhkembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga (LEMHANAS RI, 2020). Keluarga sebagai suatu sistem dapat menimbulkan masalah sekaligus efektif dalam mengatasi masalah. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tingkat kesehatan individu. Resiliensi keluarga adalah proses adaptasi dan coping dalam keluarga sebagai unit fungsional. Ketahanan melibatkan proses dinamis yang membantu mereka beradaptasi dengan masalah yang signifikan. Kekuatan dan sumber daya yang tersedia inilah yang memungkinkan individu dan keluarga berhasil menghadapi krisis dan masalah (Rachmawati et al., 2020).

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketahanan keluarga akan mampu bertahan dari perubahan struktur, fungsi dan peran keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat (Wibowo, D. E., Madusari, B. D., & Ardianingsih, 2021). Perbedaan mendasar antara resiliensi individu dan resiliensi keluarga terletak pada akar dan sumber konsep resiliensi. Resiliensi individu berakar pada perspektif perkembangan kehidupan manusia dan berfokus pada bagaimana individu menjadi resilien dalam menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup. Resiliensi keluarga berakar pada perspektif positif dan melihat keluarga sebagai unit kolektif dari sejumlah individu yang berinteraksi dan memiliki kekuatan tersendiri. Resiliensi keluarga berkembang dengan menempatkan keluarga sebagai unit fungsional yang menjadi sumber bagi anggota keluarga untuk menjadi resilien (Mawarpury & Mirza, 2017).

Resiliensi keluarga adalah konstruksi tingkat keluarga yang mengkaji keluarga sebagai unit analisis untuk mengidentifikasi faktor risiko dan faktor pelindung yang mempromosikan adaptasi yang sehat dan fungsional untuk keluarga. Kemiskinan, kekerasan keluarga, perceraian, rumah tangga orang tua tunggal, atau kematian merupakan faktor risiko, sedangkan kekompakan keluarga, keyakinan spiritual, dan nilai-nilai budaya merupakan faktor pelindung.

Ketahanan keluarga dibangun di atas keberhasilan keluarga dalam mengatasi stresor dalam hidup mereka selama transisi kehidupan, stres, atau kesulitan. Ketahanan keluarga dibentuk oleh sistem kepercayaan, komunikasi keluarga, keluarga struktur, dan dukungan sosial. Ranah dan karakteristik anggota keluarga yang berperan dalam ketahanan keluarga meliputi proses komunikasi keluarga (komunikasi kolaboratif dan pemecahan masalah), sistem kepercayaan keluarga (seperti spiritualitas, bersikap optimis, dan sebagainya), dan proses organisasi keluarga (hubungan interpersonal, jaringan sosial yang efektif, dan sumber daya ekonomi) (Pakpahan et al., 2022).

Ketahanan Keluarga Berpotensi Membangun Ketahanan Kesehatan Global

Keluarga sebagai wahana pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Pembentukan perilaku sehat merupakan sebuah proses yang dimulai dari pengenalan konsep hidup sehat, pengembangan kebiasaan positif dalam memahami dan menumbuhkan kesadaran akan manfaat menjalankan pola hidup sehat, serta penguatan adaptasi dari implementasi perilaku hidup sehat yang ditetapkan dalam kehidupan berkeluarga. Menjadi keluarga yang *resilience*, dimaknai dengan terbentuknya kapasitas individu yang terintegrasi secara komprehensif serta dapat memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mampu melakukan pencegahan, mengurai setiap permasalahan yang dihadapi dengan hasil akhir berupa solusi.

Ketahanan keluarga berada pada ketahanan sosial budaya. Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan nasional karena keluarga sebagai sistem mikro, hal tersebut mempengaruhi sistem yang lebih besar yang ada dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah penentu kualitas hidup. Kualitas hidup keluarga mencerminkan kualitas hidup bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan ketahanan di keluarga mencerminkan ketahanan nasional.

Secara umum, di seluruh Asia Tenggara, pemerintah adalah aktor utama yang mempromosikan strategi kualitas peningkatan kesehatan untuk pencapaian ketahanan kesehatan di suatu negara. Namun, sektor swasta dan lembaga profesional juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan makro berwawasan ketahanan keluarga yang mengatur setiap permasalahan kesehatan di Asia Tenggara. Sehingga diharapkan terbentuk pola pikir bahwa penyelesaian setiap masalah kesehatan, harus diidentifikasi penyebabnya dimulai dari ranah keluarga. Jika keluarga sudah memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam promotive dan preventif terhadap masalah kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat dapat terkendali, dan dampak positifnya adalah terciptanya ketahanan kesehatan di suatu bangsa. Hal ini tentunya harus dilengkapi pula dengan system kesehatan yang komprehensif, mulai dari pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan yang adil dan merata, sumber daya kesehatan yang kompeten dan memiliki kualifikasi terstandar serta system informasi yang baik.*

Referensi

- Asmara, C. G. (2021). Wapres Wanti-Wanti RI Sedang Hadapi Triple Burden of Disease. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210324132832-4-232505/wapres-wanti-wanti-ri-sedang-hadapi-triple-burden-of-disease>
- Dhillon, P. K., Jeemon, P., Arora, N. K., Mathur, P., Maskey, M., Sukirna, R. D., & Prabhakaran, D. (2012). Status of epidemiology in the who South-East Asia region: Burden of disease, determinants of health and epidemiological research, workforce and training capacity. *International Journal of Epidemiology*, 41(3), 847–860. <https://doi.org/10.1093/ije/dys046>
- Dinisari, M. C. (2022). 3 Masalah Utama Kesehatan Anak di Asia Tenggara. *Lifestyle.Bisnis.Com*.
- Harsono, F. H. (2022). Penyakit Jantung dan Kanker Mulut Sumbang Kematian Tertinggi di Asia Tenggara - Health Liputan6. *Liputan6.Com*.
- Kemenkes RI. (2017). *Keluarga, Sumber Kesehatan Terbesar*.
- Legido-Quigley, H., & Asgari-Jirhandeh, N. (2018). Resilient and people-centred health systems: Progress, challenges and future directions in Asia. [https://doi.org/ISBN 978-92-9022-693-2](https://doi.org/ISBN%20978-92-9022-693-2)
- LEMHANNAS RI. (2020). Agus Widjojo: Ketahanan Keluarga Merupakan Fondasi Ketahanan Nasional. *Www.Lemhanas.Go.Id/*. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/908-agus-widjojo-ketahanan-keluarga-merupakan-fondasi-ketahanan-nasional>
- Mahdi, I. (2022). Ketahanan Kesehatan Indonesia Peringkat 4 di Asean pada 2021. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ketahanan-kesehatan-indonesia-peringkat-4-di-asean-pada-2021>.
- Mahdi, M. I. (2022). Konsumsi Rokok Indonesia Terbesar Kedua di Asia Tenggara. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/konsumsi-rokok-indonesia-terbesar-kedua-di-asia-tenggara>
- Mawarpury, M., & Mirza, M. (2017). Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, 2(1), 96. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1829>
- Pakpahan, M., Kartika, L., & Sampepadang, M. (2022). Factors related to family resilience during the COVID-19 pandemic. *Bali Medical Journal*, 11(3), 1603–1607. <https://doi.org/10.15562/bmj.v11i3.3703>
- Rachmawati, D. S., Nursalam, N., Amin, M., & Hargono, R. (2020). Developing Family Resilience Models: Indicators and Dimensions in the Families of Pulmonary TB Patients in Surabaya. *Jurnal Ners*, 14(2), 165–171. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i2.16549>
- Siregar, A. (2022). Ketahanan Nasional dalam Ancaman Kesehatan kampus. <https://kampus.republika.co.id/posts/54527/ketahanan-nasional-dalam-ancaman-kesehatan>
- Suryana, O., Briando, B., & Embi, M. A. (2022). SOCIAL NETWORK ANALYSIS TERKAIT IMPLEMENTASI SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSEPEKTIF PENANGANAN COVID-19. *JAID: Journal of Administration and International Development*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.V11I1.231>

Thomas, S., Sagan, A., Larkin, J., Cylus, J., Figueras, J., & Karanikolos, M. (2020). Strengthening health systems resilience, Key concepts and strategies. European Observatory of Health Systems and Policies. In Who. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332441><https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332441/Policy-brief-36-1997-8073-eng.pdf>

Wibowo, D. E., Madusari, B. D., & Ardianingsih, A. (2021). Strategies to improve family resilience in the pandemic time COVID-19. *International Conference Universitas Pekalongan 2021*, 1(1), 341–346.

Widuseno, I. (2013). Ketahanan Nasional Dalam Pendekatan Multikulturalisme. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*, 18(2), 8.

ASTRID NOVITA HARYANTO adalah pengajar di Universitas Indonesia Maju (sejak 2004-sekarang). Bidang keilmuan yang ditekuni adalah kesehatan masyarakat dengan lingkup: Perilaku Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Rokok, Remaja dan Parenting. Ia dapat dihubungi di email: astridghaida@gmail.com.

Membendung LGBT di ASEAN melalui ASEAN Family Network

Bahtiar H. Suhesta

Being LGBT in ASEAN

Sebelum diberitakan penolakan berbagai ormas di Indonesia atas rencana kunjungan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) LGBTQI+, Jessica Stern, ke Indonesia khususnya dan beberapa negara ASEAN lainnya di penghujung tahun 2022 ini. PP Muhammadiyah melalui keterangan tertulis 2 Desember 2022 menyatakan menolak kehadiran utusan AS itu dengan alasan kunjungan itu hanya akan menimbulkan masalah sosial, keagamaan, dan politik di Indonesia (news.detik.com, 2/12/2022). Dalam situasi seperti sekarang ini, hal itu sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan dan potensi perpecahan kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) yang menolak dengan tegas kedatangan Jessica Stern ke Indonesia (www.tvonenews.com, 1/12/2022). Dalam keterangan kepada wartawan pada 1 Desember 2022, perwakilan MUI menyatakan bahwa kedatangan Stern merupakan bagian dari usaha merusak nilai luhur budaya dan agama bangsa Indonesia. Sementara PBNU menyatakan sebenarnya tidak masalah Jessica Stern datang ke Indonesia, asal bukan dalam rangka melakukan kampanye LGBTQI+. Sebab, LGBTQI+ merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai bagi warga Indonesia. Akhirnya Jessica Stern dikabarkan batal mengunjungi Indonesia dalam lawatannya kali ini karena berbagai penolakan tersebut (www.liputan6.com, 3/12/2022).

Jauh sebelum itu, Laporan LGBT Nasional Indonesia (Dede Oetomo et.al, 2013) yang merupakan hasil dokumentasi berbagai presentasi dan diskusi dalam Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia pada 13-14 Juni 2013 di Bali menyebutkan adanya dukungan dari UNDP (United Nations Development Programme) dan USAID (United States Agency for International Development) melalui prakarsa regional yang disebut 'Being LGBT in Asia' (Hidup sebagai LGBT di Asia). Prakarsa pembelajaran LGBT bersama ini fokus dilaksanakan di 8 negara, yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand, dan Vietnam. Program ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai tantangan baik hukum, politik, maupun sosial yang dihadapi kelompok LGBT, aspek hukum dan kebijakan yang terkait, serta peluang akses mereka akan layanan peradilan dan kesehatan. Prakarsa ini juga akan membahas kebutuhan berbagai organisasi LGBT, ruang gerak mereka, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk melibatkan diri pada dialog kebijakan dan hak asasi manusia, serta peran teknologi baru dalam mendukung advokasi LGBT.

Being LGBT in Asia berusaha meningkatkan jejaring antar organisasi LGBT di Asia Selatan, Timur, dan Tenggara serta menginformasikan kebijakan dan penyusunan program dalam konteks pembangunan melalui proses partisipatif yang menekankan pendekatan inovatif, termasuk penggunaan video, internet, dan media sosial. Being LGBT in Asia ini tentu mencakup 'Being LGBT in ASEAN', dalam hal ini berfokus di wilayah Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Jika kegiatan yang mendukung dan mendorong peningkatan peran serta dan eksistensi LGBT di wilayah ASEAN semakin meningkat dewasa ini, termasuk kunjungan Jessica Stern ke negara-negara ASEAN, tentu hal itu tak lepas dari prakarsa-prakarsa semacam ini yang kemudian dibantu dan dibackup berbagai pihak yang berkepentingan.

LGBT Gerakan Global

Kampanye LGBT sudah menjadi gerakan global. Salah satu buktinya adalah adanya Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia (*International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia*, disingkat IDAHO) yang diperingati setiap tanggal 17 Mei (id.wikipedia.org). IDAHO digunakan sebagai sarana untuk mengkoordinasikan

acara-acara internasional yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak LGBT dan mendorong ketertarikan terhadap perwujudan hak-hak LGBT di seluruh dunia. Tanggal 17 Mei dipilih untuk merayakan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan sejak tahun 1990. IDAHO dicanangkan pertama kali pada 2005. Pada perayaannya yang ke-9 tanggal 17 Mei 2013, IDAHO sudah diselenggarakan di hampir 120 negara di berbagai belahan dunia.

“Perjuangan” untuk melegalisasi dan mendapatkan pengakuan hak yang sama kepada kaum Sodom (gay) itu sudah berlangsung lama di level Perhimpunan Bangsa-bangsa Sedunia (PBB). Puncaknya pada 17 Juni 2011, untuk pertama kali PBB melalui salah satu lembaganya, yakni Dewan HAM Sedunia (*United Nation Human Right Council / UNHRC*) akhirnya berhasil meloloskan “2011 UN Gay Rights Resolution” (en.wikipedia.org). Resolusi ini menandai kemenangan para pembela HAM dan mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh dunia bahwa “pelecehan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender (baca: LGBT) harus diakhiri.” (edition.cnn.com, 17 Juni 2011).

Setidaknya sejak itulah, *Gay Diplomacy* menjadi penanda penting kebijakan luar negeri AS dan sejumlah negara Eropa lainnya (penyokong terbesar Gay Right Resolution di PBB). Oleh karena itu, kunjungan Jessica Stern ke Asia di atas tak luput sebagai bentuk mutakhir dari gay diplomacy ini yang dibangun di atas pondasi menjadikan isu LGBTQI+ sebagai bagian dari isu HAM (hidayatullah.com, 2 Desember 2022). Hillary Clinton, Sekretaris Negara AS saat itu, bahkan menyatakan “gay rights are human rights, human rights are gay rights.” (edition.cnn.com, 17 Juni 2011).

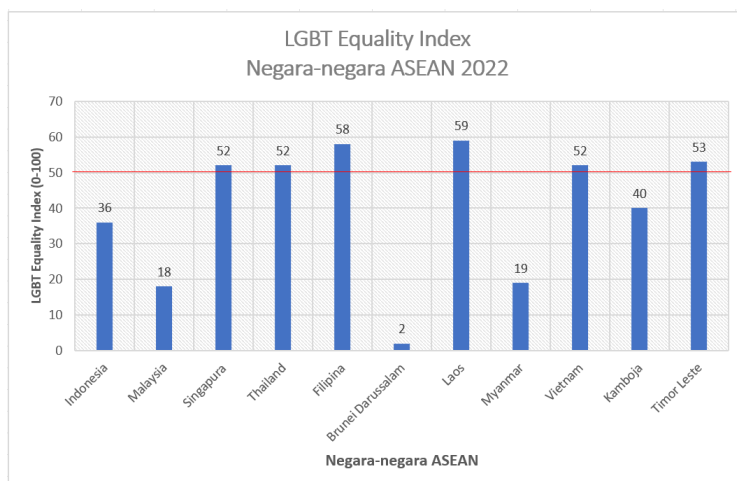
Meskipun lolos di Dewan HAM Sedunia, tetapi sebenarnya negara yang menolak resolusi gay itu tidak sedikit. Oleh karena itu, sejumlah akademisi menengarai, gay diplomacy itu sebagai penjajahan baru dalam bentuk “cultural imperialism” ke semua negara di seluruh dunia, termasuk yang menolaknya. Gay diplomacy juga merupakan bentuk “pink washing”, yakni upaya menutupi berbagai isu defisit HAM di berbagai bidang dengan mencitrakan negara itu sebagai pembela HAM bagi kalangan LGBTQI+.

Banyak organisasi internasional yang didirikan untuk mendukung gerakan global LGBT ini. Salah satu di antaranya adalah Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans, dan Interseks Internasional (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* atau ILGA). ILGA bahkan didirikan pada 8 Agustus 1978, jauh sebelum perjuangan hak LGBT di PBB mendapatkan tempat. Kini ia memiliki anggota lebih dari 1000 organisasi di lebih dari 110 negara di dunia (id.wikipedia.org). Bagaimana kondisi ASEAN terkini terhadap perkembangan LGBT tersebut? Apa saja kendala yang dihadapi ASEAN untuk membendung hal tersebut? Dan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi gelombang LGBT hari ini dan di masa-masa mendatang?

LGBT di Lingkup ASEAN

Untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut, ada baiknya kita berangkat lebih dahulu dari kondisi negara-negara di kawasan ASEAN sendiri dikaitkan dengan fenomena LGBT ini. Negara-negara yang masuk dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang turut bergabung ke dalam 54 negara anggota PBB yang menolak LGBT hingga 2011 hanyalah Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara yang mendukung adalah Thailand, Filipina, Vietnam, dan Timor Leste. Sisanya abstain, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura. Namun mengutip Republika (22/08/2022), Nurjanah Triani menyatakan bahwa sebagian negara yang masuk dalam ASEAN bersiap melegalkan hubungan sesama jenis. Singapura, misalnya. Jika terwujud, maka ia bakal menyusul Thailand dan Vietnam yang sudah resmi melegalkan pernikahan sesama jenis (Narasipost.com, 18/09/2022).

Merujuk pada data LGBT Equality Index dari Equalex, sebuah lembaga riset khusus isu-isu LGBT, bisa disajikan data terkini untuk negara-negara di kawasan ASEAN sebagai berikut:



Grafik 1. LGBT Equality Index Negara-negara ASEAN
 ~diolah dari Equaldex.com (diakses 7 Desember 2022)

LGBT Equality Index atau Indeks Kesetaraan LGBT merupakan ukuran terhadap status HAM, hukum, dan kebebasan LGBT saat ini serta sikap publik terhadap orang-orang LGBT di suatu kawasan. Nilainya antara 0-100 dimana 0 menyatakan *less equal* (kurang setara) dan 100 *more equal* (lebih setara). Terlihat dari grafik di atas, ke-11 negara di ASEAN memiliki LGBT Equality Index yang beragam. Paling ekstrem adalah Brunei Darussalam dengan angka 2. Artinya, sangat kurang setara, dengan kata lain sangat tidak *friendly* terhadap LGBT. Brunei adalah negara dengan angka LGBT Equality Index paling rendah kedua di dunia setelah Afghanistan dengan angka index 1. Kita tahu, Brunei adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku LGBT, tanpa pandang bulu.

Sementara jika angka 50 kita nyatakan sebagai garis pembeda yang mendukung atau menolak LGBT, maka ada 6 negara yang angka indexnya di atas 50, yakni: Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, dan Timor Leste. Sementara yang berada di bawah angka 50 adalah Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, dan Kamboja. Bila selama ini kita kenal negara ASEAN yang paling *friendly* dengan LGBT adalah Thailand, Vietnam, dan mungkin Filipina, tetapi dengan data hasil riset ini, kini Singapura, Laos, dan Timor Leste telah memiliki angka Equality Index yang cukup tinggi. Indonesia dan Kamboja meskipun keduanya angka indexnya di bawah 50, tetapi sudah cukup tinggi di angka 36 dan 40. Dan jika dihitung secara rata-rata, maka LGBT Equality Index ASEAN adalah 40. Sebuah angka yang “cukup friendly” terhadap LGBT.

Jika dilihat dari pandangan terhadap homoseksualitas di negara-negara ASEAN bisa dikelompokkan sebagai berikut:

LEGAL (8)	ILLEGAL (1) (Bagi Laki, Pr tdk jelas)	ILLEGAL (1) (Hukuman mati)	ILLEGAL (1) (Hukuman Penjara)
Kamboja, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Laos	Malaysia	Brunei	Myanmar
Legal Index (terhadap Aktivitas Homoseksual) di ASEAN: 8 dari 11 atau 72,7%			

Table 1. Legal Index terhadap Aktivitas Homoseksual di ASEAN
 ~diolah dari Equaldex.com (diakses 7 Desember 2022)

Terlihat angka Legal Index terhadap aktivitas homoseksual di ASEAN cukup tinggi: 72,7%. Angka ini jauh di atas Legal Index rata-rata di Afrika (41%), Asia (50%) dan Oceania (67%). Secara kemajuan dari waktu ke waktu tercatat pada tahun 1962 jumlah negara yang melegalkan homoseksualitas ada 63 negara. Pada 2022, angka itu sudah melonjak hingga 158 negara, naik 2,4 kali lipat dalam kurun 60 tahun. Dilihat dari kedua aspek ini (LGBT Equality Index dan Legal Index), Kawasan ASEAN terlihat bergerak ke arah semakin mendukung LGBT dari masa ke masa. Di Indonesia sendiri, salah satu survei dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 dan dirilis Januari 2018 mengungkap bahwa 46% responden menerima LGBT dan 57,7% berpendapat bahwa LGBT berhak hidup di Indonesia, serta 50% meyakini bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT seperti halnya warga lainnya (antaranews.com, 10/06/2022). Hal ini tentu mengkhawatirkan. Apalagi diberitakan bahwa 5 dari 9 fraksi di DPR mendukung legalisasi LGBT dan pernikahan sesama jenis (narasipost.com, 12/03/2022).

Serangan LGBT via Budaya dan Sosial Media

Dekade terakhir, apalagi sejak pandemi melanda dunia di akhir 2019, dunia, khususnya kalangan mudanya yang *gadget friendly*, terkena demam BL. *Boy's Love*. Sebuah genre film yang berkuat ceritanya soal hubungan sesama jenis (gay). Sebut saja *Make It Right* (2016), *Waterboy: the Series* (2017), *TharnType* (2019), dan yang terkenal selama pandemi: *2Gether: the Series* (2020). Film-film BL ini seringkali lebih fokus memprioritaskan emosi para karakter (tokoh), dibandingkan menyelipkan narasi untuk melawan norma atau mengadopsi hak-hak LGBTQ (sebagaimana dilakukan film-film gay khas Hollywood). Kebanyak BL, khususnya dari Thailand dan China, bahkan cenderung mengabaikan stigma dan stereotip yang umum lengket pada laki-laki homoseksual (magdalene.co, 08/03/2022) Namun, di dalam film sering digambarkan mereka yang terlibat hubungan selibat seperti itu, yang dilakukan secara terang-terangan, tidak pernah sekalipun mendapat teriakan, cacian, makian homofobik dari orang-orang sekitarnya. Bahkan mereka mendapat dukungan kawan-kawan terdekat mereka – yang itu tak mungkin dirasakan pasangan homoseksual di dunia nyata.

Tetapi justru dari situlah, film yang bisa ditonton siapa saja melalui gawai atau media sosial –khususnya anak-anak dan generasi muda—memendam bahaya perubahan budaya dan sikap permisif terhadap LGBT yang dampaknya luar biasa. Inilah bentuk “cultural imperialism” itu! Betapa masif “serangan” dari sisi budaya ini jika kita tahu bahwa pada tahun 2020 saja, film *2Gether* hanyalah satu dari sekitar 270-an judul BL yang tayang pada tahun itu! Apalagi BL sendiri juga makin tenar di negara serumpun Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara (ASEAN)!

Ini semua menunjukkan bahwa bahaya LGBT itu sudah masuk ke rumah-rumah kita. Ke kamar-kamar rumah kita, di mana anak-anak memegang gawai dan menonton dengan bebas apa-apa yang tidak selayaknya mereka tonton. Suguhan tontonan itu pasti memengaruhi sikap mental mereka terhadap sesuatu, termasuk LGBT. Fenomena yang sama kita yakini juga melanda di setiap rumah di seluruh negara ASEAN. Oleh karena itu, membendung LGBT tentu menjadi pekerjaan yang sama bagi seluruh masyarakat ASEAN.

Membendung LGBT di ASEAN melalui ASEAN Family Network

Terlalu banyak kendala yang dihadapi untuk bagaimana semua negara ASEAN bersatu padu melawan LGBT. Hal ini karena masing-masing memiliki sikap dan pandangan yang berbeda terhadap LGBT. Ada yang pro, ada yang kontra. Menyatukan pendirian dalam level antar negara tentu menjadi pekerjaan yang tidak ringan. Lagi pula “serangan” LGBT itu sudah merasuk hingga level rumah, bahkan kamar kita. Serangan itu tidak lagi fisik dan terlihat. Kini media sosial dan film digunakan mereka untuk mendesak dan mengkampanyekan LGBT itu dan menjadi konsumsi harian generasi muda kita. Maka, upaya membendung LGBT juga perlu bisa membuat benteng yang kukuh dan kokoh hingga di rumah dan kamar kita.

Bagi masyarakat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negeri-negeri muslim lainnya, membiarkan LGBT sama artinya mendekati munculnya murka Allah SWT atas bangsa ini. Karena bagi umat Islam jelas hukum dari LGBT adalah haram. Sungguh benar jika Allah menyebut perbuatan kaum Nabi Luth a.s. ini sebagai “melampaui batas” dan belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Henri Shalahuddin menyebutnya sebagai “bid’ah ma’shiyat” (Majalah Alharomain, edisi 2022). Saking besarnya kemaksiatan dan bahaya LGBT ini hingga Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya.” (H.R. at-Tirmidzi)

Kiranya benteng terakhir yang mesti diselamatkan adalah keluarga. Keluarga menjadi pintu terdepan mendeteksi adanya penyimpangan seksual ini, sekaligus menjadi pintu untuk merehabilitasi perilaku menyimpang anggota keluarga. Cara yang paling penting dan fundamental adalah bagaimana membentengi keluarga dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di samping itu, perlu membangun komunitas antarkeluarga dalam rangka membentengi LGBT ini di lingkup nasional maupun regional ASEAN. Sebuah aplikasi jejaring keluarga ASEAN (ASEAN Family network) perlu dibangun berbasis aplikasi digital semacam Aplikasi Keluarga Sehat milik Kemenkes RI (tirto.id, 22/03/2022). Melalui aplikasi tersebut bisa diselenggarakan edukasi terhadap keluarga terkait dengan bahaya LGBT, bagaimana bentuk kampanye LGBT yang perlu diwaspadai, dan bagaimana penanganan rehabilitasi bagi yang terkena pengaruh. Melalui aplikasi tersebut juga lebih memudahkan dalam monitoring isu dan perkembangan LGBT di kawasan ASEAN, serta *sharing knowledge* dan pengalaman di level antarkeluarga seluruh ASEAN.

ASEAN Family Network bisa dilengkapi dengan fitur untuk filter konten LGBT di gawai dan laptop anggota keluarga. Sebagaimana filter untuk konten dewasa atau pornografi, filter berbasis aplikasi digital ini harus mampu mengenyahkan konten yang menjurus kepada LGBT sehingga tidak bisa masuk ke gawai atau laptop masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, anggota keluarga bisa lebih sterial mendapatkan konten-konten terkait LGBT yang akan membahayakan dirinya. Bila jejaring keluarga ASEAN tersebut bisa dibentuk, maka banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama, sehingga diharapkan pengaruh LGBT di lingkup ASEAN dapat dibendung melalui kebersamaan dan kerja sama antarkeluarga di seluruh ASEAN melalui inisiasi ini. *

Referensi

- Rizko, Kanavino Ahmad (2022). “Muhammadiyah: Kunjungan Utusan AS untuk LGBTQI+ ke RI Hanya Buat Gaduh”, *detikNews*, 2 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6439531/muhammadiyah-kunjungan-utusan-as-untuk-lgbtqi-ke-ri-hanya-buat-gaduh> (diakses 6/12/2022)
- TVOne, Tim (2022). “PBNU dan MUI Tolak Keras Kedatangan Utusan Khusus AS ke Indonesia untuk Memajukan Hak LGBT”, *TVOne News*, 2 Desember 2022, <https://www.tvonenews.com/berita/85649-pbnu-dan-mui-tolak-keras-kedatangan-utusan-khusus-as-ke-indonesia-untuk-memajukan-hak-lgbt> (diakses 6/12/2022)
- Rembulan, Tim (2022). “Ditolak Ormas Islam, Utusan Khusus LGBT AS Jessica Stern Batal ke Indonesia”, *Liputan6.com*, 3 Desember 2022, <https://www.liputan6.com/islami/read/5143120/ditolak-ormas-islam-utusan-khusus-lgbt-as-jessica-stern-batal-ke-indonesia> (diakses 6/12/2022)
- Dougherty, Jill (2011). “U.N. council passes gay rights resolution”, *CNN*, 17 Juni 2011, <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/06/17/un.lgbt.rights/index.html> (diakses 6/12/2022)
- _____. “Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobi, dan Bifobia”, *Wikipedia berbahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Internasional_Melawan_Homofobia,_Transfobia_dan_Bifobia (diakses 6/12/2022)
- _____. “LGBT rights at the United Nations”, *Wikipedia berbahasa Inggris*, https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations (diakses 6/12/2022)
- Ahmad (2022). “Soal Utusan Khusus Amerika terkait LGBT, AILA: ‘Pemerintah Indonesia Harus Punya Taji Menolak Simbol Kerusakan Moral’”, *Hidayatullah.com*, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/12/02/241225/soal-utusan-khusus-amerika-terkait-lgbt-aila-pemerintah-indonesia-harus-punya-taji-menolak-simbol-kerusakan-moral.html> (diakses 6/12/2022)
- Triani, Nurjanah (2022). “LGBT Legal di ASEAN, Indonesia Jangan Ikut-ikutan”, *Narasipost.com*, <https://narasipost.com/2022/09/18/lgbt-legal-di-asean-indonesia-jangan-ikut-ikutan/> (diakses 6/12/2022)
- Oetomo, Dede, et.all. (2013). “HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: LAPORAN NASIONAL INDONESIA: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay,

Biseksual, dan Transgender (LGBT)", *USAID.gov*, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf (diunduh 7/12/2022)

Meirina, Zita (2022). "Bersama Membendung LGBT di Indonesia", *Antara News*, <https://www.antaranews.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia> (diakses 7/12/2022)

Ausie, Andrea (2022). "Kaum Pelangi Merusak Generasi: Potret Buruk Demokrasi", *Narasipost.com*, <https://narasipost.com/2022/03/12/kaum-pelangi-merusak-generasi-potret-buruk-demokrasi/> (diakses 7/12/2022)

Adam, Aulia (2022). "Mari Ngobrol Serius tentang BL Asia: Sebuah 'Queer Gaze'", *Magdalene.co*, <https://magdalene.co/story/mari-ngobrol-serius-tentang-bl-asia-sebuah-queer-gaze> (diakses 7/12/2022)

Dewi, Dinda Silviana (2022). "Mengenal Fitur Aplikasi Keluarga Sehat Versi 2.0 Milik Kemenkes", *Tirto.id*, <https://tirto.id/mengenal-fitur-aplikasi-keluarga-sehat-versi-20-milik-kemenkes-eGF8> (diakses 7/12/2022)

BAHTIAR H. SUHESTA adalah salah seorang pengurus Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia. Ia pernah menjadi Pimpinan Redaksi Majalah Al-Haromain (2004-2021), yang lalu ditunjuk menjadi Pemimpin Umum majalah Persyarikatan Dakwah Al-Haromain sejak 2021 hingga kini. Ia penulis beberapa buah buku, di antaranya: *Cahaya di Lorong Purnama* (Kumcer, 2002), *Jejak-jejak Surga Sang Nabi* (Tarikh, 2008), *20 Tahun Mencari Keadilan* (Kumpulan esai, 2010), *Perseteraan Dua Bintang* (novelet anak, 2011), *Pendekar Belitung* (novel, 2014). Ia juga editor beberapa buku, di antaranya: *Kaifa Tushalli: Tuntunan Shalat Lengkap menurut Riwayat Hadits* (2015), *Trilogi Kumpulan Tulisan Dr. Harry Azhar Azis, M.A.* (2017), *Bersama Sang Murobbi 1 & 2* (2019, 2020). Dan pada November 2022 yang lalu, ia mendapat Apresiasi Terbaik 3 Kategori Non Fiksi pada perhelatan Writingthon Festival 2022 yang diselenggarakan oleh Perpunas RI dan Storial.co untuk karyanya "Meniti Jalan-jalan kebaikan Menuju Sebaik-baik Insan". Ia bisa dihubungi melalui email: bahtiarhs@gmail.com

Menumbuhkan Sikap Toleransi di Kawasan ASEAN melalui Pendidikan Keluarga

Pricillia Winata

Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Meskipun terkecil, namun keluarga adalah tempat pertama kali mengenal dunia; mengenal ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Semuanya diawali dari keluarga. Belajar berjalan, cara makan, memakai baju, berbicara, menulis, berinteraksi dengan orang lain, cara menyelesaikan konflik; semua hal itu bersumber awal dari rumah (keluarga). Maka dapat dikatakan bahwa seorang anak pada mulanya bertumbuh dengan siraman prinsip nilai yang diperoleh dari orang tuanya. Prinsip nilai dan kenyakinan itu akan dibawa oleh anak sampai dewasa dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Najeela Shihab menegaskan (2020:26), "kita membawa pengalaman sebagai anak saat menjadi orangtua. Kita jauh lebih lama merasakan jadi anak, bahkan sampai mungkin hari ini, sehingga wajar bahwa dalam hal ini dan apa yang dilakukan orangtua kita akan menjadi bagian besar perilaku keluarga kita."

Ketika keluarga menjadi sumber belajar awal bagi anak, maka dapat dikatakan dari keluargalah pembentukan karakter anak dibentuk pertama kali; layaknya fondasi bangunan haruslah kuat agar tidak mudah goyah diterpa. Namun, kenyataan yang terjadi ketika berbicara tentang pendidikan anak, yang difokuskan hanyalah soal anak dan sekolah. Kita seolah-olah mengabaikan peran dan tanggung jawab orangtua sebagai pendidik pertama dan utama. Anak adalah cerminan orangtua. Seperti kata pepatah, "Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya", anak akan selalu mengikuti sikap dan tutur ucapan orangtua.

Hal ini diperkuat oleh sebuah puisi dibuat seorang pendidik dan konseling keluarga bernama Dorothy Law Nolte, Ph.D asal Amerika Serikat berjudul "Children What They Live" (Anak-anak Belajar dari Kehidupannya). Puisi kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Anak-anak Belajar dari Kehidupannya

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki.

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi.

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri.

Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri.

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri.

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri.

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai.

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan.

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan.

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan dirinya.

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan." (Jalaluddin Rakhmat, 1998: 187)

Menjadi orangtua adalah pekerjaan yang harus dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Semua orangtua berharap mengasuh anak dengan penuh cinta, namun kenyataan di lapangan tidaklah mudah. Berbagai macam latar belakang dan pengalaman yang dialami para orang tua akan memberikan dampak yang bervariasi dalam

pola pengasuhan. Dibutuhkan pengembangan pengetahuan, dukungan dan dorongan lingkungan untuk menjalankan peran keluarga secara maksimal.

Masyarakat ASEAN dan Toleransi

Masyarakat ASEAN adalah masyarakat yang majemuk karena memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Keberagaman ini dapat dilihat sebagai ciri khas dan warisan di kawasan ASEAN yang patut kita syukuri dan lestarikan. Namun, tak bisa dipungkiri keberagaman ini pula yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik antar negara atau dalam negara. Antara Bali melaporkan pertemuan Konsultasi AICHR tentang implementasi pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Nusa Dua, Bali pada hari Jumat, 13 Desember 2019, dilaporkan bahwa intoleransi dan kekerasan berbasis agama di kawasan ASEAN meningkat dalam beberapa dekade terakhir khususnya terhadap minoritas agama, sekte, atau agama lokal, kepercayaan, dan gerakan keagamaan baru (Azis Kurmala: 2019).

Sedangkan dalam program Editorial MI Metro TV, berdasarkan hasil survei Wahid Institute, adanya peningkatan trend sikap intoleransi di Indonesia dari 46 persen menjadi 54 persen. Menurut Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid (Mentari Puspadini: 2021), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fenomena sikap intoleransi semakin meningkat seperti danya paham yang keliru ketika semakin alim beragama semakin jauh dari Pancasila. Kemudian, adanya akibat dari desentralisasi. Pemerintahan kepala daerah secara langsung membuat pemerintahan daerah dan warganya hanya melihat dari sudut pandang mayoritas yang sempit. Alissa menambahkan, "Ada yang menarik, ketika ada satu daerah yang mayoritas muslim, lalu menolak pendirian gereja. Sebaliknya ada juga yang daerah mayoritas kristen menolak pendirian masjid. Nah, kalau kita lihat disini, Pemda hanya melihat dari kacamata daerahnya saja."

Selain itu juga adanya kepentingan politik yang dibalut berbau agama. Paham yang keliru, pandangan yang sempit serta adanya kepentingan tertentu menyebabkan gesekan antar masyarakat semakin keras yang berujung pada sikap intoleransi. Jika ini dibiarkan berlanjut akan memicu konflik pertumpahan darah seperti yang sudah pernah terjadi. Terdapat berbagai cara yang telah dilakukan agar trend sikap toleransi semakin tinggi di kawasan ASEAN. Salah satunya dengan diadakan program ASEAN Youth Fellowship 2022. Dalam program ini semua perwakilan dari berbagai negara ASEAN berkolaborasi memecahkan berbagai masalah yang terjadi di negara-negara ASEAN, salah satunya yaitu masalah intoleransi. Namun, apakah langkah ini saja cukup?

Peran Keluarga dan Toleransi

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal bahwa keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Hal ini menunjukkan bahwa sikap toleransi bisa ditanamkan pada diri manusia sejak kecil dan dimulai dari keluarga. "Keluarga merupakan kunci penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ia bisa berperan menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini bahwa perbedaan jangan sampai menjadi akar permusuhan, namun sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan," pesan Pastor Gereja Santa Theresia Menteng, Jakarta, Romo Dido da Gomez saat memimpin malam misa natal. (Abdul Aziz: 2016).

Dari keluarga, anak bisa diajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Setiap anggota keluarga pasti memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Dari sinilah anak belajar untuk menerima perbedaan tersebut. Ketika anak beranjak keluar dari rumah tentu ia akan menemukan keberagaman manusia. Anak perlu dididik sejak dini agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi tersebut mengingat bangsa kita ini adalah bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan demikian, anak siap dan mampu memberikan dampak yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Orangtua dapat mengajarkan kepada anak-anak sikap toleransi dengan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka sangat suka mengikuti perilaku orang-orang disekitar mereka. Cara terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi adalah dengan mempraktikannya. Jika ajaran toleransi sekedar di mulut saja maka akan menjadi sia-sia. Toleransi menjadi bermakna ketika orang lain bisa merasakan dampak dari sikap dan tutur kata kita.

Saya sering menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang menyepelekan pengasuhan keluarga. "Nanti kalau besar dia bisa paham sendiri dan tahu mana yang benar." Apakah benar demikian? Jika memang benar terjadi maka sudah seharusnya semua orang mampu menghargai satu sama lain. Hadirnya sikap intolerans menunjukkan ketidakmatangan mental masyarakat dalam menghadapi keberagaman di kawasan ASEAN.

Kembali lagi dalam tugas dan peran orangtua dalam keluarga untuk mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. Kunci yang paling utama yaitu para orangtua perlu konsisten dalam mempraktikkan sikap toleransi di rumah agar anak terbiasa. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Butuh kerja sama, kesepakatan, dan rasa tanggung jawab pada setiap keluarga. Dukungan dari lingkungan sekitar juga penting agar praktik sikap toleransi ini dapat berjalan optimal.

Salah satu cara dalam mempraktikkan sikap toleransi di rumah adalah dengan membangun hubungan yang reflektif. Meningkatkan kualitas percakapan atau dialog dalam keluarga dengan menerapkan komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif rasa empati dibangun dengan cara mau mendengar dan memahami pendapat anak akan keberagaman dan mencari tahu penyebab jika terjadi masalah serta berdiskusi mencari penyelesaian terbaik. Dengan demikian anak akan merasa nyaman, dihargai, dan terbuka untuk bercerita.

Hindari melakukan komunikasi satu arah karena hal ini menunjukkan ketidakpercayaan dalam hubungan dan meregangkan hubungan antara anak dan orangtua. Beri banyak kesempatan kepada anak untuk bercerita pengalaman dan pendapat akan sikap toleransi dalam kehidupannya, baik itu dengan teman, guru, atau masyarakat sekitar. Mendengar dan memahami anak merupakan dasar empati. Jika terjadi konflik atau beda pendapat, beri waktu sejenak dalam percakapan sampai situasi mereda kembali. Semoga di masa mendatang, sikap toleransi semakin banyak diterapkan dan mendukung kehidupan masyarakat ASEAN yang rukun dan saling menghargai diantara keberagaman.*

Referensi

- Aziz, Abdul (2016). "Toleransi Bermula dari keluarga," *Berita Tirta*, 25 Desember 2016, <https://tirta.id/toleransi-bermula-dari-keluarga-cbBx>
- Jalaluddin Rakhmat (1998). *Islam Aktual; refleksi-sosial seorang cendekiawan Muslim* Bandung: Mizan
- Kurmala, Azis (2019). "Konsultasi AICHR di Bali: intoleransi dan kekerasan berbasis agama di ASEAN meningkat," *Berita Antara Bali*, 13 Desember 2019, <https://www.antaranews.com/berita/1207687/aichr-sebut-intoleransi-kekerasan-berbasis-agama-di-asean-meningkat>
- M, Hari (2012). "Puisi Pendidikan Anak: "Children Learn What They Live" dan Terjemahan Indonesianya," 28 November 2012, Indonesian-english.com/blog/puisi-pendidikan-anak
- Puspadini, mentari (2021). Intoleransi di Indonesia Capai 54 Persen, Ini Penyebabnya," *Editorial MI Metro TV*, 21 Oktober 2021, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/eN43rx1K-intoleransi-di-indonesia-capai-54-persen-ini-penyebabnya#:~:text=Intoleransi%20di%20Indonesia%20Capai%2054%20Persen%2C%20Ini%20Penyebabnya,mengatakan%20ada%20beberapa%20faktor%20yang%20menyebabkan%20fenomena%20tersebut.>
- Shihab, Najeela (2020). *Keluarga Kita: Mencintai Dengan Lebih Baik*. Tangerang Selatan: Buah Hati

PRICILLIA WINATA lahir di Ambon, 4 April 1991, anak pertama dari 3 bersaudara. Semenjak kecil terbiasa mengasuh dan mendidik adik-adik karena mama dan papa bekerja. Hal ini yang memicu keinginan saya menjadi seorang guru yang mampu membimbing anak-anak agar siap menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Pertama kali saya menulis di buku antologi "Kisah Inspirasi WIT 2021". Menulis merupakan sarana untuk menuangkan pikiran dan perasaan saya sebagai seorang guru terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Dengan menulis saya menjadi tahu apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan ekosistem belajar lebih baik untuk anak-anak. Saat ini saya bergabung dalam sebuah organisasi non-profit bernama Keluarga Kita. Saya bertugas sebagai Rangkul (Relawan Keluarga Kita). Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan keluarga. Tujuan organisasi ini meningkatkan pengetahuan masyarakat secara umum dan para orang tua secara khusus pola pengasuhan yang tepat sesuai kebutuhan anak.

ASEAN dan Tugas Perlindungan Hak Politik Perempuan

Amalia Irfani

Tidak lama lagi Indonesia yang dikenal sebagai negara penganut demokrasi Pancasila memasuki satu fase kehidupan bernegara yang akan berdampak terhadap stamina sosial, ekonomi, kesehatan, hukum, bahkan pendidikan lima tahun kedepan. Pesta demokrasi (pemilu) yang nantinya tidak saja akan membawa perbaikan di Indonesia tetapi juga negara terdekat, yakni negara karena hubungan kerjasama untuk saling meningkatkan rasa aman dan perdamaian dalam organisasi seperti ASEAN di Asia Tenggara.

Memiliki historis panjang dan persamaan budaya, negara-negara ASEAN akan saling memberikan kontribusi di tiap langkah dan kebijakan yang dibuat, salah satunya tentang peran perempuan dalam politik. Peran yang masih sangat minim dan belum dapat diwujudkan karena kurangnya dukungan pihak terkait. Tentu saja jika partisipasi perempuan sesuai undang-undang sebanyak 30% tercapai, maka iklim dan cuaca kehidupan berpolitik di Indonesia lebih baik dan seimbang. Saturasi kebijakan lebih sehat sebab terdapat ide-ide cerdas berkemajuan perempuan tangguh yang peduli dengan kemaslahatan bangsa. Namun faktanya di periode 2019-2024 dari total 560 kursi hanya 120 orang perempuan yang mampu menduduki kursi DPR RI. Jumlah tersebut menggambarkan perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dari kata cukup untuk memperjuangkan dan mengangkat isu perempuan pada ranah parlemen. Stigma budaya masih erat melekat, diperparah lagi para perempuan yang terjun ke panggung politik tidak mendapat dukungan kaumnya sendiri.

Keadaan tersebut ternyata dialami oleh negara-negara ASEAN, dimana perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang publik dalam politik. Mengutip hasil penelitian studi kasus Aim Sinpeng, Amanda Savirani dkk tahun 2022 dengan tema Kepemimpinan Politik Perempuan di tiga negara Indonesia, Malaysia, Thailand diperoleh beberapa fakta menarik berhubungan dengan peran perempuan ASEAN di ranah politik.

Aim Sinpeng dkk menjelaskan dinamika politik yang keras, identik dengan politik uang, patronase, dan klientelisme tersebar luas dan mengakar kuat di Asia Tenggara. Politik masih erat teridentik dengan uang (kekayaan materi) dan koneksi. Budaya yang sulit hilang, maka ungkapan Michael Genovese tentang peran perempuan dalam politik setidaknya karena tiga hal. Pertama, sebab dilahirkan di lingkungan politik (orang tua atau suami merupakan pelaku politik aktif). Kedua, kader partai, dan dikader langsung. Ketiga, perempuan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk tampil di ruang publik.

Dari ketiga sebab tersebut jika kita cermati fenomena sosial yang ada di belahan dunia manapun, alasan keturunan, lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga politikus menjadi faktor utama sebab mengapa seorang perempuan aktif dan berani tampil ke publik. Kebiasaan melihat dan bertemu dengan banyak individu dari golongan tidak sama tetapi bisa memiliki tujuan (goals) serupa, akhirnya membangun kepercayaan diri seorang perempuan juga berani tampil di masyarakat.

Perempuan kader biologis tersebut tanpa harus bersusah payah telah memiliki "payung" saat non kader biologis harus lebih bersusah payah mencari massa agar bisa menempati ruang publik. Memunculkan empati masyarakat tanpa image pendukung bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika ia bergender perempuan. Stigma tidak baik kadang begitu mudah melekat pada perempuan hanya karena keberaniannya memasuki ruang publik, apalagi tanpa dukungan partai atau golongan tertentu. Jika faktor keturunan menjadi penyebab perempuan mendapat kemudahan fasilitas bergerak di ranah politik, maka sedikit perempuan hebat yang mampu berdikari bagi masyarakat karena kemampuan diri tanpa kepentingan dan embel-embel tertentu. Perempuan tersebut biasanya memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat marginal. Penulis mengamati banyak perempuan cerdas yang memiliki

kualitas mumpuni. Mereka pun bagian dari perubahan baik di masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai pendidik, pedagang, dan banyak pula hanya sebagai ibu rumah tangga. Meski demikian, status yang tidak tampak secara sosial tidak membuat mereka surut berbuat baik. Tanpa diekspose, tidak ada liputan media tetapi dikomunitas, perempuan-perempuan tersebut dianggap pahlawan.

Peran yang tidak biasa, eksistensi tidak mudah, membuat seorang perempuan dipercaya masyarakat untuk tampil memberi perubahan hidup lebih baik, namun hanya dapat bermanfaat pada komunitas terbatas. Realitas yang, tidak boleh dipandang sebelah mata, ASEAN sebagai perkumpulan negara-negara berkembang harus mampu mewujudkan kesetaraan partisipasi politik masyarakatnya. Bersama berkomitmen, bergerak untuk maju yang dapat dimulai melalui kesepahaman dilanjutkan gerakan hak politik perempuan. *

AMALIA IRFANI lahir di Pontianak Kalimantan Barat. Dosen IAIN Pontianak yang kesehariannya senang menulis ringan di beberapa media cetak dan online. Mantan *announcer* dan wartawan kampus saat studi strata satu, baginya menulis adalah dakwah kebaikan yang terbatas waktu namun memiliki efek tidak terbatas.

BAB 20

Tantangan Kesehatan ASEAN Pasca-Pandemi

Stunting Pada Anak dan Tinggi Badan Rata-Rata Orang Dewasa: Mengapa Orang Indonesia Paling Pendek?

Veni Hadju

Dalam satu dekade terakhir ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) banyak membicarakan masalah kejadian stunting pada anak-anak di dunia. Anak stunting adalah anak dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh WHO berdasarkan umur dan jenis kelamin. Telah dibuat target bahwa jumlah anak stunting di dunia diharapkan pada tahun 2025 menurun sebanyak 40% (WHO, 2014). Jumlah anak stunting di dunia pada tahun 2016 sebesar 154,8 juta (22,9%) diharapkan menurun menjadi sekitar 100 juta di tahun 2025. Angka kejadian stunting memang masih terlihat agak tinggi di negara-negara Sub-Saharan Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara walaupun telah terlihat penurunan yang signifikan di beberapa wilayah dalam beberapa dekade terakhir ini (Vaivada et al. 2020).

Penurunan stunting menjadi target dan komitmen seluruh dunia yang dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030 (WHO, 2018). Stunting dihubungkan dengan ketidaksetaraan (inequality) dari aspek kesehatan dan gizi dalam suatu negara. Upaya penurunan stunting diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara melalui perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan seterusnya pencapaian kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Di samping itu, penurunan stunting pada anak berhubungan dengan tinggi badan rata-rata orang dewasa di suatu negara. Pengalaman di beberapa negara memperlihatkan tinggi badan rata-rata orang dewasa meningkat seiring dengan penurunan stunting khususnya seperti yang terlihat di Jepang dan Korea Selatan.

Berdasarkan survey pada tahun 2016 tentang tinggi badan rata-rata pria dewasa memperlihatkan perbedaan yang bermakna antar negara. Survey ini dilaksanakan di 101 negara dan meliputi seluruh benua. Studi ini memperlihatkan negara-negara di daratan Eropah memiliki tinggi badan yang relatif tinggi dan berada di sepuluh urutan pertama. Beberapa negara dengan tinggi badan tertinggi berturut-turut Bosnia dan Herzegovina (183.9cm), Belanda (183,8cm), Denmark (182.6cm), Jerman (181.0cm), Austria (179.2cm), dan Spanyol (178.0cm). Di tingkat ASEAN, urutan negara-negara ini dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah Singapura (peringkat ke-64, 170.6cm), Thailand (peringkat ke-67, 170.3cm), Malaysia (peringkat ke-85, 166.3cm), Kamboja (peringkat ke-97, 162.5cm), Vietnam (peringkat ke-98, 162.1cm), Filipina (peringkat ke-99, 161.9cm), dan Indonesia (peringkat ke-101, 158,0cm).

Hampir semua negara-negara di wilayah ASEAN masuk dalam 10 negara dengan tinggi badan yang paling rendah, kecuali Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya, tinggi badan pria dewasa di Singapura hampir sama dengan Jepang (peringkat ke-63, 170.7cm). Namun, tinggi badan untuk wilayah Timur Asia lainnya berada pada tinggi badan yang hampir menyerupai negara maju seperti Amerika Serikat (176.3cm) dan Australia (175.6cm) yaitu Hongkong (peringkat ke-47, 173.4cm), dan Korea Selatan (peringkat ke-45, 173.5cm). Indonesia mempunyai peringkat yang paling rendah dan berbeda sekita 12 cm dengan rata-rata pria dewasa di Singapura dan Thailand.

Mengapa terendah?

Konsumsi Protein Hewani. Tinggi badan rata-rata di suatu negara banyak dihubungkan dengan konsumsi protein hewani di negara tersebut. Salah satu analisis terbaru memperlihatkan bahwa rasio konsumsi protein hewani dengan total protein yang dikonsumsi berbanding lurus dengan tinggi badan rata-rata. Apabila dilihat dari survei yang dilaksanakan di atas, terlihat bahwa negara-negara yang mengkonsumsi beras merupakan negara yang menduduki peringkat dengan tinggi badan yang rendah. Indonesia merupakan negara yang mengkonsumsi beras tertinggi berdasarkan konsumsi per kapita per tahun. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan konsumsi protein hewani yang rendah termasuk konsumsi telur, daging, dan susu. Wilayah timur Indonesia umumnya mengkonsumsi ikan sebagai lauk-pauk dan menjadi

sumber protein hewani terbesar. Namun demikian, banyak wilayah di Indonesia yang menjadikan tempe dan tahu sebagai lauk pauk yang utama.

Prevalensi stunting Balita. Indonesia merupakan negara dengan tingkat prevalensi stunting yang masih cukup tinggi (Kemenkes, 2023). Hasil survey dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2022) memperlihatkan prevalensi stunting pada anak Balita menurun dari angka 37,2% (2013) menjadi 21,6% (2022). Namun angka ini masih berada di atas angka yang diharapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. Penurunan ini terlihat bermakna setelah Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan khususnya dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2013 dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2021. Dibandingkan dengan prevalensi stunting di negara ASEAN seperti Thailand (13%, 2018) dan Singapura (4%, 2000), maka prevalensi stunting di Indonesia yang ada saat ini merupakan penyebab rendahnya tinggi badan rata-rata orang dewasa.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia merupakan negara dengan IPM di tingkat menengah antar negara-negara ASEAN lainnya. Setelah dilakukan pengontrolan terhadap ketidaksetaraan (*inequality*), nilai IPM pada tahun 2022 memperlihatkan hanya satu negara yang masuk pada tingkat IPM yang sangat tinggi, yaitu Singapura (0,823), sedangkan Indonesia (0,590) berada di tingkat menengah (medium) dan berada pada urutan di bawah Thailand (0,646) dan Malaysia (0,603). Indonesia lebih tinggi dari negara Asean lainnya seperti Filipina (0,587) dan Kamboja (0,475). Berdasarkan kondisi ini maka tinggi badan rata-rata orang dewasa Indonesia akan lebih baik ke depan mengingat Upaya perbaikan terus dilakukan.

Upaya Perbaikan

Upaya Indonesia dalam mempercepat penurunan stunting pada anak Balita telah dilakukan dalam lima tahun terakhir ini. Dengan target 14% pada tahun 2024 tampaknya sangat ambisius namun Upaya menuju ke target ini terus terlihat. Penurunan stunting ini akan berpengaruh terhadap rata-rata tinggi badan pada orang dewasa. Survey pada tahun 2016 yang terlihat di atas akan berbeda apabila survey yang sama dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun ke depan. Upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk terpenuhinya akses pelayanan Kesehatan dan pemenuhan gizi bagi seluruh anggota masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia terus dilakukan secara intensif.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara Asean memiliki tantangan yang cukup besar. Berbagai program intervensi yang merata ke seluruh wilayah dan ke semua kelompok Masyarakat terus ditingkatkan. Upaya perbaikan yang terlihat memang belum maksimal namun banyak hal yang telah dilakukan dan terus dikembangkan. Kondisi keamanan yang tetap terjaga dan pemenuhan kebutuhan dasar serta implementasi program yang terus membaik akan menjadi dasar atas peningkatan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. *Wallahu'alam bishshawwab*.*

Referensi

- Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, et al. A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 2018;14:e12617. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.
- Kementerian Kesehatan RI. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Buku Saku: Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023.
- Vaivada T, Akseer N, Akseer S, et al. Stunting in childhood: an overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline. *Am J Clin Nutr* 2020;112(Suppl):777S–791S.
- World Health Organization. Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- World Health Organization. Global nutrition targets 2025: stunting policy brief (WHO/NMH/NHD/14.3). Geneva: World Health Organization; 2014

VENI HADJU adalah Guru Besar Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Menulis berbagai artikel dan buku. Salah satu artikelnya dimuat dalam buku *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (Perpusnas Press, 2022).

Penyebaran COVID-19 Variant Omicron sebagai The 5th Variant of Concerns (VOC) di ASEAN dan Prospek ke depannya

Fery Setiawan

31 Desember 2019

Peringatan malam tahun baru (*New Year's Eve*), yang biasa dirayakan pada tanggal 31 Desember 2019, mungkin menjadi peringatan malam tahun baru yang tidak dapat dilupakan oleh dunia, khususnya di kota Wuhan, Hubei, Republik Rakyat China (RRC). Wuhan adalah sebuah daerah di RRC yang menjual berbagai macam hewan liar sebagai makanan, seperti: hewan ular, kelelawar, trenggiling, dan lainnya. Pada saat itu, di Wuhan terjadi penyebaran wabah penyakit paru yang disebut pneumonia yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Wabah tersebut pertama kali disebut dengan *novel Corona Virus-19* (nCoV-19) yang kemudian digantikan nama menjadi *Corona Virus Disease* (COVID)-19. Penyebab utama Covid-19 adalah *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV 2).

Corona virus (CoV) yang merupakan agen penyebab Covid-19 dapat menyerang manusia (disebut *human coronavirus/HCoVs*) yang berdampak pada respiratory, gastrointestinal, liver, dan sistem persarafan. HCoVs termasuk ke dalam family *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Terdapat beberapa jenis CoV, yaitu: kelompok alfa (α), beta (β), gamma (γ), dan delta (δ). Diketahui bahwa terdapat tujuh tipe CoVs yang menyerang manusia, yaitu: 2 jenis tipe α -CoVs (HCoV-229E dan HCoV-NL63) dan lima β -CoVs (HCoV-HKU1, HCoV-OC43, *severe acute respiratory syndrome coronavirus/SARS-CoV*, *middle east respiratory syndrome coronavirus/MERS-CoV*, dan *severe acute respiratory coronavirus/SARS-CoV 2*).

Anatomi bentuk virus *corona* merupakan *single-stranded positive-sense RNA viruses* dengan diameter 60-140 nm dan terdiri dari empat protein structural utama, yaitu: *spike* (S) yang dapat menempel pada reseptor seluler angiotensin 2 (ACE2) pada permukaan sel manusia, *small protein* (E), *matrix* (M), dan *nucleocapsid* (N) yang mengelilingi genom RNA virus. Virus *corona* memiliki kemampuan mutasi yang tinggi karena pada *RNA dependent RNA polymerase* (RdRp) yang rawan kesalahan dan yang bertanggung jawab atas duplikasi materi genetic. Kemampuan mutasi yang tinggi juga menyebabkan virus untuk beradaptasi terhadap *host* yang berbeda dan menyebar di antara spesies. Kemampuan mutasi SARS-CoV 2 lebih tinggi bila dibandingkan dengan virus influenza: $(1.12-6.25) \times 10^{-3}$ dibandingkan dengan $(0.60-2.00) \times 10^{-6}$. Diversitas *sequence* SARS-CoV 2 dan laju evolusinya tampak rendah. SARS-CoV 2 mengkode *exonuclease* (ExoN) yang berkontribusi terhadap proses perbaikan genom.

Tabel 1. *Variant of Concerns (VOCs)* dan *Variant of Interests (VOIs)* COVID-19

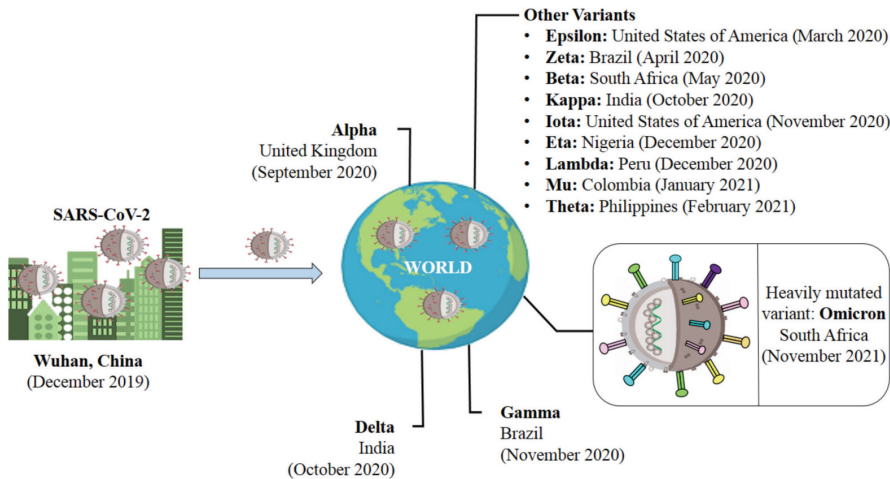
Type of Variants	A variant of Concerns (VOCs)		
	Variant Alpha	B.1.1.7 lineage status VOC-20DEC-01	Mutation occurs in Protein Spike (S) so that character is resistant to neutralizing antibodies (NABs) obtained from convalescent plasma and individuals who have been vaccinated.
	Beta Variant	B.1.351 lineage status VOC-20DEC-02	
	Gamma Variant	P.1 lineage status VOC-21JAN-02	
	Variant Delta	B.1.617.2/AY.1/AY.2 lineage status VOC-21APR-02	
	A variant of Interests (VOIs)		
	Variant Eta	B.1.525 lineage (VUI-21FEB-03) and B.1.1318 lineage (VUI-21FEB-04)	Mutation occurs in Protein Spike (S) so that character is resistant to neutralizing antibodies (NABs) obtained from convalescent plasma and individuals who have been vaccinated
	Lota Variant	B.1.526 lineage	
	Kappa Variant	B.1.617.1 lineage	
	Variant Lambda	C.37 lineage	
	Variant of high consequence (VOHC)		
	-		
	Variants being monitored (VBM)		
	Variant Alpha	Q lineages and B.1.1.7	Mayoritas mutasi ditemukan lebih prevalen di daerah Brazil, Afrika Selatan, India, dan USA dengan ciri khas sifat varian yang transmissible dan menurunkan potensi antibody.
	Variant Beta	B.1.351	
	Variant Gamma	P.1	
	Variant Epsilon	B.1.427 dan B.1429	
	Variant Eta	B.1.525	
	Variant Iota	B.1.526	
Variant Kappa	B.1.617		
Variant Zeta	P.2		
Variant Mu	B.1.621.1 dan B.1.621		

Tabel 1 menunjukkan Covid-19 memiliki beberapa jenis varian, yaitu: *variant of concerns (VOCs)*, *variant of interests (VOIs)*, *variant of high consequence (VOHC)*, dan *variants being monitored (VBM)*. Kedua jenis klasifikasi tersebut berdasarkan klasifikasi mutasi COVID-19 oleh *world health of organization (WHO)*.

SARS-CoV-2 Variants of Concern		Alpha	Beta	Gamma	Delta	BA.1	BA.2	BA.4 BA.5
First Detection		United Kingdom September 2020	South Africa October 2020	Brazil November 2020	India December 2020	South Africa November 2021	South Africa November 2021	South Africa January 2022
Attributes	Spread (compared to Wu-Hu-1)	Spreads fast (0% increase)	Spreads faster (~50% increase)	Spreads faster (0-40% increase)	Spreads faster (0-90% increase)	Spreads faster (spread faster than D-614G)	Spreads faster than BA.1	Spreads faster than BA.2
	Severity	Can cause severe illness	Can cause severe illness	Causes severe illness	Causes severe illness	Less severe illness	Less severe illness	No evidence of enhanced severity
	Vaccine effectiveness	Minimal reduction	Moderate reduction	Reduced	Minimal to moderate reduction	Significant reduction	Significant reduction	Significant reduction 3.2-fold in reinfection among BA.1/BA.2 infections compared to BA.1
Spike Mutations	Spike mutations	10	10	12	9	36	31	34
	Mutations in RBD	1	3	3	2	15	16	17
	Mutations in RBM	-	1	1	2	5	5	5
	Shared S mutations	6	6	7	6	28	24	33
	Unique S mutations	4	5	5	3	8	7	1
ACE2 binding		T10-6M	T2-6M	T5-6M	T2-6M	T5-6M	T5-6M	Reduced compared to BA.1
			K417N ↓		L452R ↑	K417N ↓	K417N ↓	K417N ↓
					T478K ↑	T478K ↑	T478K ↑	T478K ↑
			E484K -	E484K -				
						Q493R ↑	Q493R ↑	R493Q ↓
						Q496R ↑	Q496R ↑	
Immune-escape mutations (vaccine and convalescent sera)		N501Y ↑↑↑	N501Y ↑↑↑	N501Y ↑↑↑		N501Y ↑↑↑	N501Y ↑↑↑	N501Y ↑↑↑
			D80A					
			D215G					
			K417N		L452R	K417N	K417N	K417N
			E484K	E484K	S477N	S477N	S477N	
			A701V		E484A	E484A	E484A	

Gambar 1. Representasi beberapa VOCs COVID-19 berdasarkan asal dan karakteristik (Hoteit & Yassine, 2022)

VOCs berarti varian tersebut masuk ke dalam daftar perhatian WHO sedangkan VOI berarti varian tersebut memiliki kemampuan genetic yang dapat mempengaruhi karakteristik virus. VOC memiliki karakteristik tingkat penularan yang tinggi, virulensi yang tinggi, dan dapat menurunkan efektivitas vaksin sehingga VOC lebih berbahaya bila dibandingkan dengan VOI karena VOC menunjukkan resistensi terhadap terapi antiviral dan menurunkan efikasi antibody pada proses vaksinasi atau infeksi sebelumnya. Tabel 1 dan gambar 1 menunjukkan bahwa telah ada empat jenis VOC, yaitu: varian alfa (α), varian beta (β), varian gamma (γ), dan varian delta (δ). Saat ini, terdapat VOC kelima yaitu varian Omicron dengan lineage B.1.1.529 dimana varian ini terdeteksi pertama kali pada pertengahan bulan November 2021 di Botswana, Afrika Selatan dan traveler yang dikarantina di Hongkong.



Gambar 2. Overview perjalanan SARS-CoV 2 dari Wuhan sampai menjadi VOC Omicron di Afrika Selatan (Balkhrisna et al., 2022)

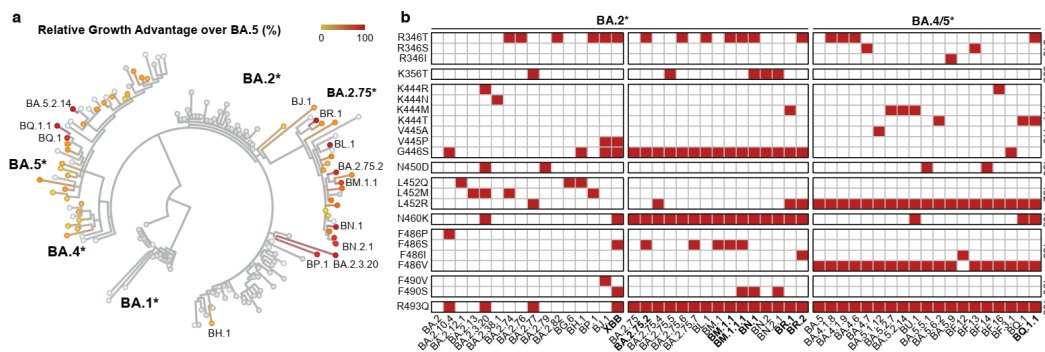
Gambar 2 menunjukkan perjalanan SARS-CoV 2 dari Wuhan dan mengalami mutasi sampai menjadi beberapa jenis varian yang didefinisikan oleh *center for disease control and prevention* (CDC) sebagai perubahan dalam kode materi genetik yang terjadi secara alamiah beberapa kali ketika virus telah menginfeksi binatang atau manusia. Covid-19 merupakan *emerging virus* yang secara konsisten mengalami perubahan pada materi genetik akibat mutasi yang terjadi pada saat replikasi genom. Perubahan-perubahan dikategorikan sebagai *lineage* dan varian. *Lineage* adalah sebuah kelompok variasi viral yang terjadi pada *ancestor* (pendahulu) yang sama dan secara genetik terhubung. Variasi dibedakan dari satu jenis varian SARS-CoV 2 oleh adanya satu atau lebih mutasi.

Pasca munculnya Covid-19 telah dilakukan proses vaksinasi untuk melawan Covid-19. Vaksin Covid-19 didasarkan secara utama pada vaksin yang dapat menginduksi sistem imunitas tubuh terhadap protein *spike* Covid-19, bahkan menjadi dasar landasan utama respon *public health* terhadap Covid-19. Namun, beberapa varian VOC yang muncul (seperti ditunjukkan oleh gambar 1) menyebabkan efektivitas vaksin Covid-19 dipertanyakan karena VOC Covid-19 berhubungan dengan peningkatan transmisi dan evasi Covid-19 dari imunitas. Data saat ini menunjukkan bahwa Covid-19 varian Omicron memiliki kemampuan untuk menetralkan *antibody induced* vaksin yang didapatkan dari orang yang telah divaksinasi baik dengan vaksin dosis kesatu, kedua, ataupun ketiga dengan jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin BNT162b2 (Pfizer), ChadOx 1 (Astra Zeneca), dan mRNA-1273 (Moderna). Kemampuan menetralkan *antibody induced* vaksin ditunjukkan bahwa terdapat laju transmisi yang tinggi pada beberapa negara yang dicerminkan dengan *reproductive number* (Ro) dimana pada daerah *United Kingdom* nilai Ro = 3-5 (Willet et al., 2022).

Problematika yang dihubungkan dengan Laju Mutasi SARS-CoV-2

Problematika Laju Mutasi SARS-CoV-2

Omicron Covid-19, sebagai salah satu VOC yang pertama kali ditemukan di daerah Afrika Selatan, memiliki tiga puluh (30) mutasi pada protein *spike*, dengan lima belas (15) dari 30 mutasi terletak pada *receptor binding domain* (RBD) yang meredam potensi terapeutik *antibody induced vaccine* dan meningkatkan pengikatan *spike* Covid-19 ke ACE2. 15 mutasi pada RBD disebutkan penting terhadap reseptor dan proses *antibody neutralizing viral*. Selain itu, daerah protein non structural yang dikode oleh *open reading frame* (ORF)-1ab mengandung mutasi: nsp3 (K38R, V106I, Δ1265, L1266I, A1892T), nsp4 (T492I), nsp5 (P132H), nsp6 (Δ105-107, A189V), nsp12 (P323L), dan nsp 14 (I42V). Nsp3 (P1pro) dan nsp5 (3Clpro, main protease) merupakan protease yang memecah polipeptida yang dikode oleh ORF1a dan ORF1ab. 3Clpro dan nsp12 (*RNA-dependent RNA-polymerase*) atau RdRp merupakan target utama obat yang memblokir polipeptida berhubungan dengan pemecahan dan sintesis protein virus. Mutasi pada daerah nsp5 dan nsp12 terletak tidak dekat dengan daerah aktif, namun protein nsp5 dan nsp12 berperan penting terhadap respon imunitas alamiah (induksi interferon).



Gambar 3. Evolusi konvergen pada bagian *receptor binding domain* (RBD) Omicron. a). menunjukkan analisis filogenetik pada subvariant Omicron, dan b). mutasi kunci pada RBD omicron subvariant BA.5 dan BA.2.75 (Cao et al., 2022).

Omicron SARS-CoV-2 memiliki beberapa jenis *lineage* sebagai hasil dari proses evolusi yang berkelanjutan, sehingga menjadi *lineage*: BA.1, BA.2, dan BA.5 yang kemudian berevolusi lagi menjadi *lineage* BA.2.75, BA.4.6, BA.2.3.20, BA.2.75.2, CA.1, BR.2, BN.1, BM.1.1.1, BU.1, BQ.1.1, dan XBB (ditunjukkan oleh gambar 3a dan tabel 2). Mutasi pada bagian RBD terjadi pada daerah yang sama, termasuk: R346, K444, V445, G446, N450, L452, N460, F486, F490, dan R493. Mutasi pada daerah residu ini diketahui bersifat *antibody-evasive*.

Tabel 2. Jenis mutasi pada *spike* VOC Omicron pada varian BA.1, BA.2, BA.2.10.4, BA.2.12.1, BA.275, dan BA.4/5 (Focosi *et al.*, 2022)

Jenis mutasi spike	BA.1	BA.2	BA.2.10.4	BA.2.12.1	BA.275	BA.4/5
T19I	-	+	-	+	-	-
L24S/Δ25-27	-	+	-	+	-	-
W64R	-	-	+	-	-	-
A67V	+	-	-	-	-	-
Δ69-70	+	-	-	-	-	+
T95I	+	-	-	-	-	-
Δ141-144	-	-	+	-	-	-
G142D/Δ143-145	+	+	-	+	-	-
K147E	-	-	-	-	+	-
W152R	-	-	-	-	+	-
F157L	-	-	-	-	+	-
I1210V	-	-	-	-	+	-
Δ211/L212I	+	-	-	-	-	-
V213G	-	+	-	+	-	-
Ins213EPE	+	-	-	-	-	-
G257S	-	-	-	-	+	-
S373P	+	+	-	+	-	-
S275F	+	+	-	+	-	-
T367A	-	+	-	+	-	-
D405N	-	+	-	+	-	-
R408S	-	+	-	+	-	-
K417N	+	+	-	+	-	-
N440K	+	+	-	+	-	-
G446S	+	-	+	-	+	-
S477N	+	+	-	+	-	-
T478K	+	+	-	+	-	-
E484A	+	+	-	+	-	-
S494P	-	+	-	+	-	-
G496S	+	-	-	-	-	-

Jenis mutasi spike	BA.1	BA.2	BA.2.10.4	BA.2.12.1	BA.275	BA.4/5
Q498R	+	+	-	+	-	-
N501Y	+	+	-	+	-	-
Y505H	+	+	-	+	-	-
T547K	+	-	-	-	-	-
D614G	+	+	+	+	+	+
H655Y	+	+	-	+	-	-
N679K	+	+	-	+	-	+
P681H	+	+	-	+	-	-
N764K	+	+	-	+	-	-
D796Y	+	+	-	+	-	-
N856K	+	-	-	-	-	-
Q495H	+	+	-	+	-	-
N969K	+	+	-	+	-	-
L981F	+	-	-	-	-	-

Afinitas pengikatan ACE2 yang memadai sangat penting untuk varian SARS-CoV-2 untuk mendapatkan keuntungan dalam transmisi. Penetrasi yang lebih tinggi terhadap hACE2 terlarut menunjukkan afinitas pengikatan ACE2 yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, varian konvergen semua menunjukkan afinitas pengikatan ACE2 yang cukup, setidaknya lebih tinggi dari D614G, memungkinkan prevalensinya, termasuk XBB yang paling mengelak, BM.1.1.1, BR.2, CA.1, 95 dan BQ.1.1. Secara khusus, pengembalian R493Q meningkatkan mengikat afinitas untuk hACE2, yang konsisten dengan laporan sebelumnya. K417T menunjukkan peningkatan moderat dalam afinitas pengikatan ke hACE2. Sebaliknya, F486S, K444M, dan K444N memiliki dampak negatif yang jelas pada afinitas pengikatan, sementara K444T tidak menyebabkan penurunan yang signifikan pengikatan ACE2. Penelitian juga menunjukkan bahwa varian omicron melarikan diri dari proses netralisasi plasma sampel dengan cara pengumpulan sampel plasma konvalesen pada waktu empat minggu setelah masuk rumah sakit (MRS) atau dua minggu setelah dilakukan vaksinasi dosis ketiga.

BJ.1, BA.2.10.4, dan BA.2.3.20 bersifat *immune escape*. Plasma vaksin dan pemulihan BA.1/BA.2/BA.5 menetralkan tiga subvarian dengan NT50 serupa. BA.2.75 dan BA.5 yang baru muncul subvarian juga menunjukkan kemampuan penghindaran antibodi yang kuat. Subvarian BA.5 dengan R346T, K444T/R, dan V445A menunjukkan pengurangan NT50 yang serupa dibandingkan N450D. Subvarian BA.2.75 dengan L452R, R346T, K356T, K444M, dan F490S juga menunjukkan penghindaran kekebalan lebih lanjut. Yang penting, BA.2.75.2 (BA.2.75+R346T+F486S), BM.1.1 (BA.2.75+R346T+F486S), BM.1.1.1 (BM.1.1+F490S), 115 CA.1 (BA.2.75.2+L452R+T604I) di BA.2.75 sublineage, dan BU.1 (BA.5+Y144del+K444M+N460K), BQ.1.1 (BA.5+R346T+K444T+N460K) di BA.5 sublineage, adalah salah satu strain penghindar imun humoral yang diuji. CA.1 menyebabkan pengurangan NT50 plasma dari vaksin 3-dosis, infeksi terobosan BA.1, BA.2 infeksi terobosan, dan infeksi terobosan BA.5 sebesar lebih tinggi dibandingkan dengan BA.2.75, masing-masing. BQ.1.1 mengurangi NT50 plasma lebih tinggi dibandingkan dengan BA.5, masing-masing. NT50 dari BA.5 pemulihan terhadap BQ.1.1 lebih tinggi dari pada CA.1, yang mungkin berkontribusi oleh kemampuan kuat subvarian BA.2.75 untuk menghindari antibodi penargetan NTD. Yang mengejutkan, strain rekombinan XBB BJ.1/BM.1.1.1 menunjukkan kekebalan yang paling ekstrem kemampuan penghindaran, menampilkan NT50 yang sebanding dengan SARS-CoV-1. Pengamatan ini menunjukkan bahwa evolusi RBD konvergen dapat menyebabkan pelepasan kekebalan yang signifikan pada skala yang belum pernah terlihat sebelum. Munculnya varian antibodi yang lolos dengan cepat dan konvergen, terutama kemampuan untuk menghindari plasma pemulihan dari infeksi terobosan

BA.5, menunjukkan bahwa vaksin booster yang dirancang berdasarkan BA.5 mungkin tidak mencapai perlindungan spektrum luas terhadap infeksi.

Problematika keparahan SARS-CoV-2 terkait laju mutasi dan efektivitas vaksin di lingkungan negara ASEAN

Mutasi D614G meningkatkan *viral entry* ke *host* sehingga meningkatkan pola transmisi dan *immunoescape*. Mutasi lain pada *Receptor Binding Domain*: L452R, E484Q dan P681R. Mutasi pada asam amino yang dikode oleh L452R yang menyebabkan peningkatan afinitas *Spike* terhadap reseptor dan menyebabkan penurunan pengenalan oleh antibodi (termasuk pengenalan oleh antibodi plasma konvalesen). L452R asam amino Arginine (R) menggantikan Leusin (L) pada posisi 452 di dalam protein *Spike*. Arginine memiliki grup fungsional guanidine sehingga memiliki sifat polaritas dan meningkatkan hidrofilik yang tidak dimiliki oleh asam amino Leusin. Terdapat kesamaan antara L452R dengan Y453F dimana mutasi Y453F terletak berdekatan dengan daerah RBD yang berkontak dengan ACE-2. Y453F dihubungkan dengan predicted escape dari proses netralisasi oleh monoclonal antibodi.

Mutasi asam amino *Spike*-RBD 484: terjadi substitusi asam *glutamic* oleh *lysine* (E484K) dengan sifat *glutamic acid* adalah *negatively charged* menjadi *lysine* yang bersifat *positively charged*. Konsekuensi dari penggantian tersebut adalah: 1. Menurunkan netralisasi oleh konvalesen antisera dan ikatan dengan antibodi monoclonal, 2. Meningkatkan afinitas dengan ACE-2. Kombinasi mutasi pada L452R dan E484K pada protein *Spike*-RBD disebut dengan varian mutasi double. Bentuk mutasi pada E484Q dan L452R menurunkan ikatan dengan antibodi monoclonal (monoclonal antibodi/mAb) dan berpengaruh terhadap proses netralisasi virus.

Mutasi P681R terjadi pada tempat pemecahan furin sehingga terjadi peningkatan cleavage S1-S2 sehingga meningkatkan transmisibilitas karena P681R terletak pada area "cleavage site" antara protein *Spike* 1 dan *Spike* 2. Mutasi P681R terjadi akibat substitusi Proline (P) menjadi Arginine (A). Mutasi ini menyebabkan peningkatan infektivitas virus melalui *facilitating cleavage* Protein S terhadap konfigurasi aktif dari protein *Spike* 1 dan *Spike* 2.

Covid-19, laju mutasi, dan efektivitas vaksin

Penyebaran Covid-19, mulai dari kota Wuhan pada tahun 2019 sampai varian saat ini, Omicron, yang merupakan VOCs kelima. Penyebaran Covid-19 sudah berusaha dikendalikan melalui proses vaksinasi, namun *continuous evolve* dan sifat alami virus corona yang *highly mutated* merupakan tantangan bagi efektivitas dan efikasi vaksin Covid-19. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tantangan di negara-negara di daerah ASEAN karena adanya penyebaran yang terus-menerus menyebabkan kegiatan yang dilakukan di kawasan ASEAN kurang maksimal.*

Referensi

- Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, Toffa S, Rickeard T, Gallagher E, Gower C, Kall M, et al (2022). "Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. *The New England Journal of Medicine*. 386:1532-1546;DOI:10.1056/NEJMoa2119341
- Anwari F, Setiawan F, Nurdianto AR, Budhy TI, Tena HAB, Puspitasari H (2022). "An Analysis of Genetic Risk Factors (Chromosomes 3 and 9) and Mutation of *Spike* COVID-19 in the Severity and Transmission Factor. *Journal of International Dental and Medical Research*. 15(2):885-890
- Balkrishna A, Rohela A, Kumar A, Vedpriya A, dan Khan N (2022). "Variations from SARS-CoV-2 to Omicron: A new threat knocking at world's door". *Journal of Applied Pharmaceutical Science*. 12(4):037-043; DOI: 10.7324/JAPS.2022.120404
- Bumiller, Elisabeth dan Sanger, David E (2001). "A DAY OF TERROR: THE PRESIDENT; A Somber Bush Says Terrorism Cannot Prevail," *New York Times*, 12 September 2001, <https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-the-president-a-somber-bush-says-terrorism-cannot-prevail.html> (diunduh pada 10 Oktober 2021)
- Cao Y, Jian F, Wang J, Yu Y, Song W, Yisimayi A, Wang J, et al (2022). "Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution". <https://doi.org/10.1101/2022.09.15.507787>

- Focosi D, McConnell S, Casadevall A (2022). "The Omicron variant of concern: Diversification and convergent evolution in spike protein, and escape from anti-Spike monoclonal antibodies". *Drug Resistance Updates*. 65(2022):100882; <https://doi.org/10.1016/j.drug.2022.100882>
- Hoteit R, Yassine HM (2022). "Biological Properties of SARS-CoV-2 Variants: Epidemiological Impact and Clinical Consequences". *Vaccines*. 10, 919; <https://doi.org/10.3390/vaccines10060919>
- Hotez PJ (2022). "SARS-CoV-2 variants offer a second chance to fix vaccine inequities. <https://doi.org/10.1038/s41579-022-00824-8>
- Konyak BM, Sharma M, Kharia S, Pandey RP, Chang CM (2022). "A Systematic Review on the Emergence of Omicron Variant and Recent Advancement in Therapies". *Vaccines*. 10,1468; <https://doi.org/10.3390/vaccines10091468>
- Kurhade C, Zou J, Xia H, Liu M, Chang HC, Ren P, Xie X, Shi PY (2022). "Low Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron BA.2.7.5.2, BQ.1.1 and XBB.1 by 4 doses of parental mRNA Vaccine or a BA.5-bivalent booster". <https://doi.org/10.1101/2022.10.31.514580>
- Setiawan F, Puspitasari H, Sunariani J, Yudianto A (2020). "Molecular Review COVID19 From The Pathogenesis and Transmission Aspect. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 12(1) Special Issue: 93-103; DOI: 10.20473/jkl.v12i1si.2020.93-193
- Setiawan F, Yudianto A, Sunariani J, Mooduto L (2021). "New Normal to Achieve High Threshold Herd Immunity by (Ro and Pc) Post Pandemic COVID-19. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*. 17(2):141-145
- Shah M, Woo HG (2022). "Omicron: A Heavily Mutated SARSCoV-2 Variant Exhibits Stronger Binding to ACE2 and Potently Escapes Approved COVID-19 Therapeutic Antibodies". *Frontiers in Immunology*. 12:830527; doi:10.3389/fimmu.2021.830527
- Willet B, Grove J, MacLean OA, Wilkie C, Logan N, Lorenzo GD, Furnon W, et al (2022). "SARS-CoV-2 Omicron is an escape variant with an altered cell entry pathway". *Nature microbiology*. 7:1161-1179; <https://doi.org/10.1038/s41564-022-01143-7>

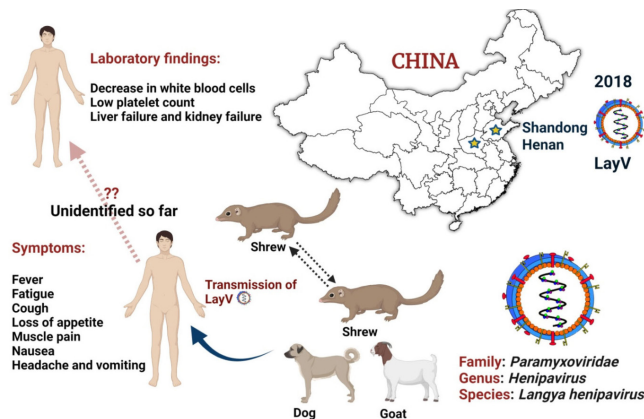
FERY SETIAWAN adalah mahasiswa program Doktorat Ilmu Kedokteran Dasar, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga dan juga merupakan anggota dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Surabaya sejak tahun 2011 serta anggota muda Ikatan Spesialisasi Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia (ISPaMMI). Ia merupakan pengajar (asisten dosen) di Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan menulis 6 judul buku, diantaranya: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis (tahun 2020); Pedoman Singkat Praktek Kedokteran Gigi (tahun 2021), Mengenal Malaria Asimtomatik di Indonesia (tahun 2021), Imunologi Forensik dan Imunohematologi (tahun 2021), Metode Pemeriksaan dalam Identifikasi Forensik (Bagian 1) (tahun 2021), dan Metode Pemeriksaan Identifikasi Forensik (Bagian 2) (tahun 2021). Ia juga menulis sebanyak empat puluh (40) jurnal ilmiah yang terindeks SCOPUS dan jurnal nasional terakreditasi dengan link google scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=-pm4rYsAAAAJ&hl=id&oi=ao>. Ia dapat dihubungi di email: fery.setiawan-2020@fk.unair.ac.id/fery.setiawan-2020@rpi.or.id.

Tantangan Dunia dalam Menghadapi Langya Virus Pemicu *Outbreak* Baru dan *Current Health Concerns*

Arif Rahman Nurdianto

Saat ini, dunia masih menghadapi pandemi Covid-19 yang terus berlanjut, diikuti dengan merebaknya penyakit cacar monyet (*monkey pox*) yang menyebabkan ke daruratan *public health secara* global sehingga terjadi *emergency international concern*, diikuti dengan *re-emergence* virus Marburg (penyakit zoonosis yang menyebabkan *febrile illness* pada manusia) yang terjadi di Ghana dan di China pada minggu pertama di bulan Agustus tahun 2022. Virus Marburg yang merebak di China menyebabkan *global attention* dan diduga dihubungkan dengan agen kausatif virus langya (LayV) yang merupakan sebuah Henipavirus baru.

Daerah di China, terutama masyarakat di daerah Provinsi Shandong dan Henan di daerah China bagian selatan. Dilaporkan bahwa di kedua Provinsi tersebut Langya Virus telah menginfeksi 35 pasien dengan sejarah paparan terhadap binatang yang sudah diinvestigasi pada tahun 2018 sampai 2022. Identifikasi virus dilakukan melalui sampel swab dari sampel tenggorokan pasien yang kemudian dilakukan analisis metagenomic. Hasilnya adalah isolate virus tersebut secara filogenetik berbeda dengan Henipavirus. Genus *Henipavirus* yang merupakan keluarga *Paramyxoviridae* mengandung lima jenis virus: *Hendra virus* (HeV), *Nipah virus* (NiV), *Cedar virus*, *Ghanaian virus*, dan *Mojiang virus*. Dari kelima jenis, HeV dan NiV yang merupakan representatif utama dari genus viral karena merupakan virus zoonosis yang virulent sehingga dapat menyebabkan penyakit neurologi dan pernafasan. Kedua jenis virus telah menyebabkan *outbreak* di Australia dan Malaysia masing-masing pada tahun 1995 dan 1998. Transmisi zoonosis HeV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh hewan kuda yang terinfeksi yang berperan sebagai *amplifying host*. Transmisi NiV secara utama berkaitan dengan kontak daripada saliva atau urin dari kelelawar yang terinfeksi, mengkonsumsi daging dari hewan yang terinfeksi, dan juga dari orang satu ke orang lain melalui *respiratory route* selama terjadi *outbreak*.



Gambar 1. *Emergence* dan potensi zoonosis Langya henipavirus.

Gambar 1 menunjukkan *emergence* dan zoonosis Langya henipavirus (LayV) dimana LayV sudah menginfeksi 35 orang sampai saat ini pada Provinsi China bagian Selatan yaitu Provinsi Shandong dan Henan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan Agustus tahun 2021. LayV sebagian besar menginfeksi petani dengan gejala pneumonia berat sampai batuk dan tidak ada kasus yang dapat dihubungkan-hubungkan.

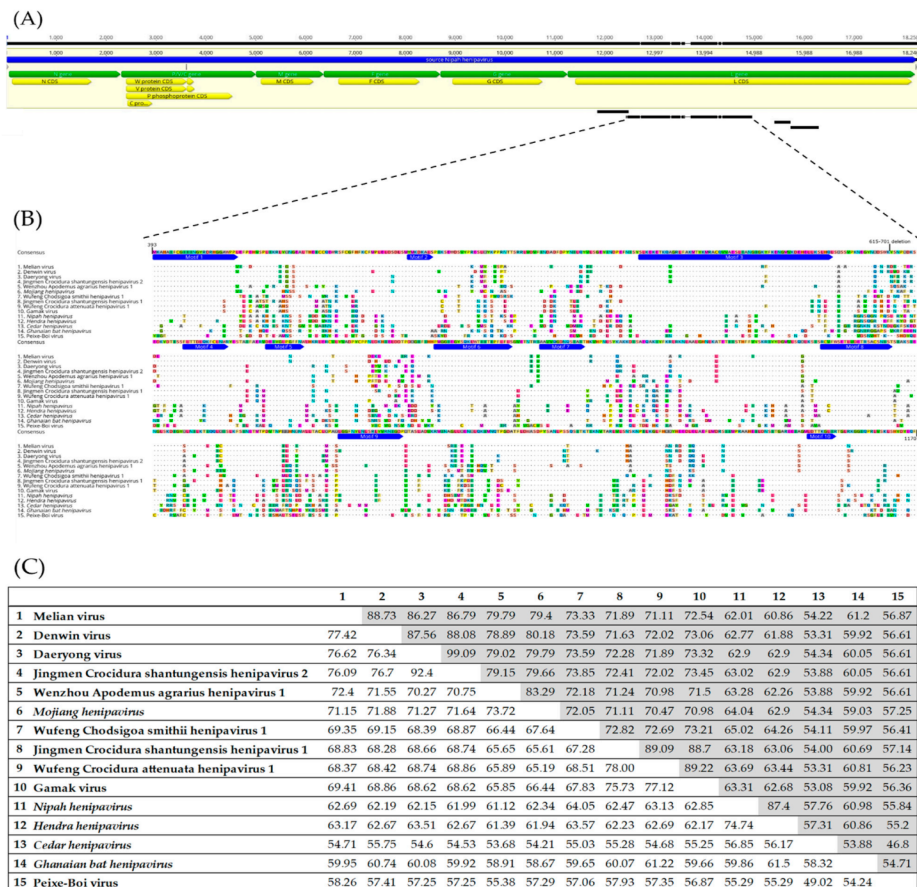
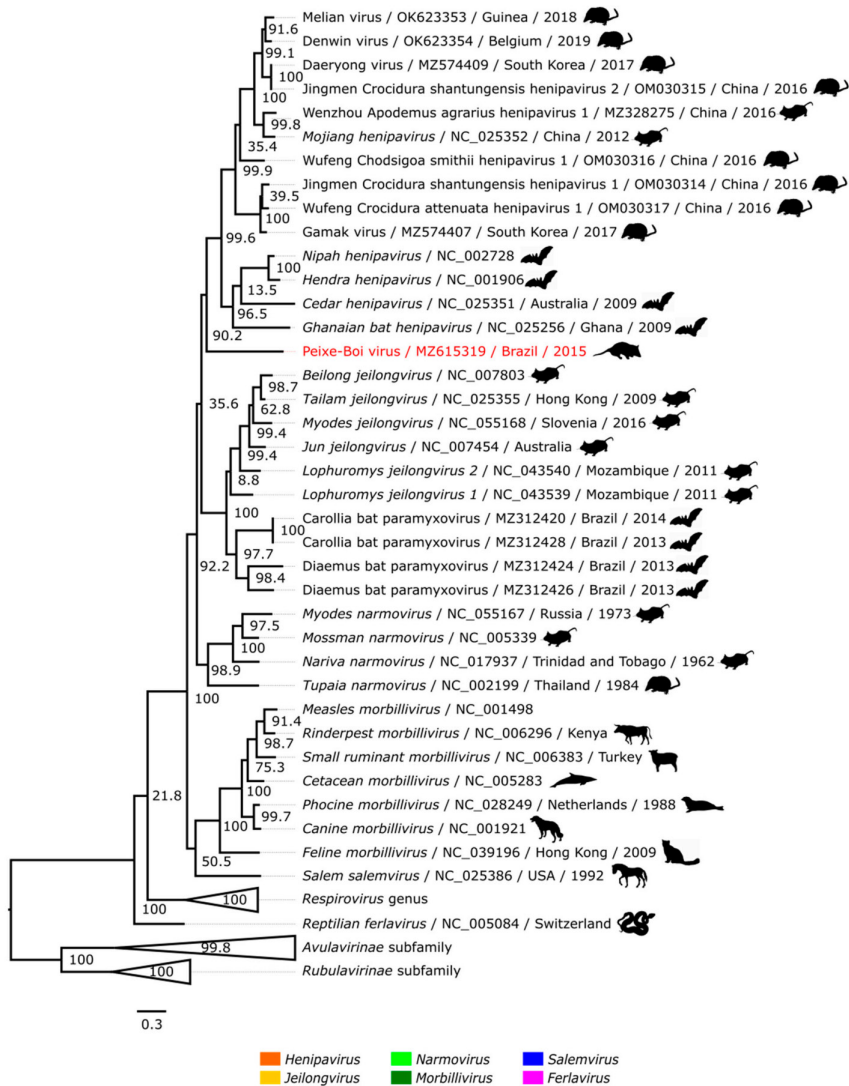


Figure 2. (A) Nucleotide alignment of four assembled contigs of PBV with NiV reference genome (NC_002728), and location of each contig within the L gene. (B) Amino acid alignment across henipaviruses and PBV sequence based on PBV partial L protein position between sites 393 and 1170 (2244 aa of NiV RefSeq). A major hypervariable region between sites 615 and 701 was deleted and ten conserved motifs are highlighted by blue annotations. (C) Nucleotide (white) and amino acid (gray) identities among henipaviruses and PBV.

Gambar 2. (A) menunjukkan susunan nukleotida dari PBV NiV dan lokasinya pada gen L, (B) menunjukkan susunan asam amino yang melintasi *henipavirus* dan sekuen PBV pada posisi PBV protein L di tempat 393 dan 1170 (2244aa pada NiV RefSeq). Terdapat daerah hypervariable major pada daerah 615 dan 701. (C) warna putih menunjukkan nukleotida dan abu-abu menunjukkan susunan asam amino yang diidentifikasi pada HeV dan PBV.

LayV merupakan keluarga virus family *Paramyxoviridae* di bawah genus *Henipavirus* dimana genus tersebut mengandung virus Hendra dan Nipah yang bertanggung jawab terhadap kefatalan pada manusia. Kedua jenis virus Hendra dan Nipah termasuk ke dalam golongan virus zoonosis di alam dan dapat menjadi ancaman terhadap hewan dan manusia. Virus Hendra, Nipah, dan LayV termasuk ke dalam patogen *biosafety* level 4. Gambar 2 menunjukan genom virus LayV terdiri dari 18.402 nukleotida (14.296 sampai dengan 20.148 nukleotida) dan organisasi genom menunjukkan kesamaan terhadap *Henipavirus*. Genom terdiri dari enam jenis protein: sebuah protein *nucleocapside* (N), protein *matrix* (M), protein *fusion* (F), *receptor binding protein* (RBD), dan *phosphoprotein* (P) yang berasosiasi dengan *polymerase protein* (L) untuk menyusun *RNA-dependent RNA polymerase complex*.



Gambar 3. Pohon filogenetik hubungan antara HeV dengan hewan perantara infeksi.

LayV secara filogenetik berhubungan dengan Mojiang Henipavirus yang merupakan virus *rat-borne* yang diidentifikasi pertama kali di China Utara pada tahun 2012 dan *potential cross-infection*. Peneliti dari Australia, Korea Utara, dan China juga menemukan bahwa Henipavirus dapat ditemukan di kelelawar dan tikus, Jenis virus Hendra, Nipah, dan LayV diketahui dapat menginfeksi manusia (ditunjukkan oleh gambar 3).

Gejala terinfeksi LayV: temperature suhu tubuh yang tinggi, batuk, *fatigue*, *poor appetite*, rasa nyeri pada otot, yang dapat disertai dengan *myalgia*, *nausea*, dan *vomiting*. Gejala lainnya dapat berupa terjadi leukopenia dan trombositopenia. Gejala *fever* merupakan gejala yang paling umum dari semua kejadian. Komplikasi pneumonia, kegagalan ginjal dan fungsi hati dapat terjadi pada sebagian kecil individu walaupun beberapa laporan mengatakan bahwa komplikasi-komplikasi tersebut tidak berhubungan dengan masuk rumah sakit. Tidak ada laporan kematian

yang diakibatkan oleh infeksi LayV. Autoritas pelayanan kesehatan merupakan jawaban terhadap infeksi virus yang terjadi dan tidak perlu terjadi kepanikan akibat munculnya virus LayV.

Pada *outbreak* saat ini di China, mayoritas kasus sebanyak 35 kasus dilaporkan pada petani dan pekerja di pabrik. LayV merupakan pathogen potensial pada 26 pasien (74% kasus). Sampel serum yang dikoleksi dari 14 pasien selama fase akut dan fase konvalesen infeksi menunjukkan bahwa titer immunoglobulin G (IgG) 86% yang dikumpulkan selama fase konvalesen 4 kali lebih tinggi dibandingkan titer IgG pada keadaan akut. Viremia yang diamati dihubungkan dengan infeksi virus akut. *Load viral* ditemukan lebih tinggi pada pasien dengan pneumonia dibandingkan dengan pasien yang tanpa mengalami gejala pneumonia.

Transmisi virus terjadi dari hewan ke manusia dimana kecepatan transmisi virus dari hewan ke manusia sedang diidentifikasi oleh *health authority* Taiwan dan negara lainnya. Testing pada 25 hewan liar dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keberadaan virus. RNA virus ditemukan pada tikus sehingga menyebabkan diusulkan bahwa *natural reservoir* virus adalah hewan tikus. Tikus ditemukan di masa lampau untuk menyebarkan virus seperti hantavirus dan mammarenavirus walaupun penentuan kontak virus dan transmisi lainnya ke manusia tidak diidentifikasi oleh *centre for disease control and prevention* (CDC), China sudah memberikan peringatan untuk berhati-hati dan berkontak dengan virus ini.

Survey serum pada hewan domestic mendeteksi seropositivity pada kambing (2% dari sera yang dites) dan anjing (5% dari sera yang dites). Pemeriksaan sampel tikus terhadap infeksi LayV ditemukan bahwa viral RNA LayV ditemukan pada sampel spesies tikus. Tidak terdapat pola epidemiologi di antara pasien dengan demikian memberikan kepercayaan kepada teori transmisi zoonosis sporadis, terutama ketika banyak dari individu yang terkena dampak adalah petani.

Tidak adanya kontak dekat yang terinfeksi, tidak ditemukan kasus klaster dalam keluarga yang sama, dan tidak ada riwayat pajanan sama sekali menyarankan sifat sporadis infeksi LayV pada populasi manusia. Namun sulit untuk menetapkan bagaimana sebenarnya individu itu terkena LayV. Pelacakan kontak dilakukan terhadap sembilan pasien yang melakukan kontak dekat dengan 15 anggota keluarga, mengungkapkan tidak ada transmisi kontak dekat dari LayV. Penularan dari manusia ke manusia belum terjadi terbukti. Namun, peneliti berpendapat bahwa ukuran sampel tidak cukup besar untuk menentukan kemungkinan penularan dari manusia ke manusia.

Perawatan standar dan vaksin masih belum tersedia untuk henipavirus. Dalam studi hewan peneliti telah mencoba berbagai antivirus, dan ribavirin mungkin merupakan pilihan terapi yang baik. Obat ini telah ditemukan berguna dalam infeksi yang disebabkan oleh virus RNA, terutama pada infeksi virus yang melibatkan masalah pernapasan. Ribavirin bila dikombinasikan dengan obat antimalaria chloroquine ternyata berkhasiat mengobati Infeksi virus Henra dan Nipah, menunjukkan kombinasi obat ini bisa digunakan untuk mengontrol infeksi LayV, jika diperlukan.

Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan (CDC) telah mengumumkan implementasi pengurutan genom bersama dengan rencana pengawasan untuk LayV. Penelitian yang sedang berlangsung telah dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang rute transmisi virus dan upaya kolaboratif telah dipastikan oleh CDC Taiwan bekerja sama dengan Dewan Pertanian untuk melakukan investigasi pada jenis penyakit serupa pada spesies yang berasal dari Taiwan. Data yang tersedia baru-baru ini tetapi terbatas masih gagal untuk menimbulkan kekhawatiran yang mengkhawatirkan tentang kepanikan kesehatan global atau penyebaran tingkat pandemi LayV. Namun pengujian rutin terhadap hewan dan manusia oleh para peneliti dan diagnostik sangat penting untuk mengidentifikasi virus secara tepat waktu untuk menjaga infeksi virus terkendali. Harus ada laboratorium standar dengan fasilitas pengujian asam nukleat untuk mengidentifikasi LayV untuk infeksi virus pelacakan pada manusia. Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan tingkat keparahan infeksi LayV, cara penularan dan untuk mengevaluasi tingkat penyebaran infeksi virus di Cina dan wilayah secara keseluruhan. Peringatan telah diberikan oleh para ahli penyakit menular sejak lama tentang kemungkinan limpahan virus zoonosis karena krisis iklim dan penghancuran sumber daya alam secara sembarangan.

Dalam hal ini, wabah LayV adalah contoh klasik. Harus ada upaya untuk melestarikannya alam dan juga pendekatan satu kesehatan sangat diperlukan untuk melawan infeksi zoonosis. Sangat penting untuk melakukan surveilans aktif transparan dan kolaboratif secara internasional untuk mengurangikemungkinan munculnya virus menjadi masalah kesehatan global. Sebagai temuan infeksi LayV didasarkan pada jumlah yang relatif kecil insiden, apakah penularan

infeksi LayV dari manusia ke manusia dapat terjadi terjadi masih belum jelas. Penelitian lebih lanjut dan studi investigasi adalah diperlukan untuk memahami fitur mikrobiologi dan epidemiologi infeksi virus Langya.

Infeksi manusia oleh LayV menunjukkan betapa mudahnya virus zoonosis ditularkan tanpa diketahui dari hewan ke manusia, dan menunjukkan bahwa virus hewan sering menyebar secara tersembunyi ke orang-orang di sekitarnya dunia sebagai 'puncak gunung es' untuk patogen yang belum ditemukan. LayV tampaknya tidak menyebar dengan mudah di antara orang-orang, dan tidak berakibat fatal. Namun, para peneliti berpendapat bahwa tikus berfungsi sebagai reservoir, mereka dapat mentransfer virus di antara mereka sendiri dan dapat menginfeksi orang secara kebetulan atau melalui perantara kebanyakan. Investigasi lebih lanjut disarankan untuk mempelajari bagaimana virus ini dapat masuk ke tikus dan oleh apa artinya manusia dapat tertular infeksi LayV melalui peristiwa limpahan. Penelitian tentang LayV diperlukan untuk memperkuat kegiatan pengawasan dan pemantauan, untuk mengidentifikasi inang dan spesies hewannya reservoir, dan mengadopsi konsep one health untuk membatasi hewan-manusia antarmuka. Menjadi virus RNA yang dapat bermutasi, penyakitnya relatif rendah keparahan seperti yang terungkap dengan kasus terbatas/penyelidikan ukuran sampel rendah, studi mendalam lebih lanjut dan penyelidikan epidemiologi rinci masih perlu dilakukan untuk menentukan kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada manusia. Namun, kita harus siap terlebih dahulu untuk menerapkan tindakan pencegahan yang tepat dan menerapkan strategi pengendalian proaktif untuk membatasi kemungkinan penyebarannya ke wilayah dan negara lain untuk mengurangi kemungkinan seperti yang terjadi baru-baru ini dengan wabah cacar monyet yang tiba-tiba meningkat dengan cepat ke tingkat masalah kesehatan global.*

ARIF RAHMAN NURDIANTO merupakan Dokter PNS yang bekerja sebagai PNS (Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan) di RSUD Sidoarjo Barat dan pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, yang juga merupakan dosen di Universitas Anwar Medika. Penulis aktif menulis dalam jurnal kesehatan nasional dan internasional, buku ajar, buku referensi, membuat inovasi dalam bidang kesehatan, inovasi berbasis kemandirian masyarakat serta aktif dalam beberapa organisasi. Dokter yang pernah mendapat penghargaan dokter Teladan 2018, Top 10 The Future Leader 2020 Kemenpan RB dan 10 Peneliti terbaik Pada Anugerah Karya Cipta Dokter Indonesia tahun 2019 dan 2020 ini juga merupakan ASN termuda yang meraih S3 di usia 32 tahun pada saat menduduki pangkat IVa (Pembina) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini ia sedang menyelesaikan tesisnya di bidang hukum kesehatan pada Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah, Surabaya dan sedang menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Jawa Timur.

Menggagas Interoperabilitas dan Interkonektivitas Rekam Medis Elektronik di ASEAN

Rano I Sudra

*“But when people are given the opportunity to be active participants
in their own care, instead of passive recipients,
their human rights respected, the outcomes are better
and health systems become more efficient.”*

--Dr. Tedros A Ghebreyesus

Rekam Medis Elektronik dan Society 5.0

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) wajib membuat rekam medis elektronik, hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (Kemkes, 2022).

Arah implementasi rekam medis elektronik (rme) terintegrasi di Indonesia mulai tampak jelas sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (tanggal 10 Agustus 2020). Dalam PMK 21/2020 dan perubahannya, PMK nomor 13 tahun 2022, disebutkan bahwa: “Pengembangan juga dilakukan juga terhadap sistem rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit (*smart care*).”

Konsep rekam medis elektronik terintegrasi yang mendukung pertukaran data ini merupakan langkah perubahan besar dalam pengelolaan rekam medis di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis / Medical Records belum menyebutkan penggunaan media elektronik dalam mengelola rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 2 ayat (1) telah menyebutkan bahwa rekam medis dapat dibuat secara elektronik dan ayat (2) menyebutkan akan adanya peraturan tersendiri yang mengatur lebih lanjut penggunaan teknologi informasi elektronik untuk mengelola rekam medis. Sayangnya, hingga 14 tahun kemudian “peraturan tersendiri” yang dinanti-nanti ini tidak kunjung terbit juga. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak dapat dibendung lagi dan merambah juga ke wilayah pelayanan kesehatan. Proses administrasi pasien sejak dari registrasi, pelayanan, pembiayaan, hingga pengolahan statistik dan pelaporan juga tidak lepas dari campur tangan teknologi elektronik ini. Bahkan layanan medis juga berkembang dengan alternatif telemedisin.

Kondisi ini sejalan dengan berkembangnya konsep Society 5.0 yang dimulai gagasannya dari Jepang. Hitachi-UTokyo Laboratory dalam bukunya “Society 5.0 – A People-centric Super-smart Society” merumuskan bahwa Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Konsep Society 5.0 ini diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5 oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tahun 2019. Society 5.0 sendiri lebih berfokus pada upaya manusia untuk hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi sehingga semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri (Y. Harayama, 2017).

Mempertimbangkan berbagai perkembangan dan dorongan kebutuhan pengembangan pengelolaan rekam medis yang sudah tidak cukup lagi dinaungi oleh regulasi yang ada, akhir Agustus 2022 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan 24 tahun 2022 ini sepenuhnya mengakomodir migrasi dan transformasi digital kesehatan melalui kewajiban seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mengaplikasikan rekam medis elektronik terintegrasi mulai batas waktu 31 Desember 2023.

Hak Setiap Manusia Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan

Health 5.0 dalam Society 5.0

Dengan berkembangnya Society 5.0, berkembang pula pola Health 5.0. Jika Production, Industrialising, Automation, dan Digitalisation masing-masing merupakan inti dari Health 1.0 sampai Health 4.0, maka Health 5.0 berintikan Personalisation. Health 5.0 berfokus pada Customer model dengan mengusung *Lifelong partnership* untuk menghasilkan *customer wellbeing* dan peningkatan *quality of life* sebagai *strategic differentiator*. *The right to health care*, bersamaan dengan *the right to self-determination* dan *the right to information* menjadi bagian dari *fundamental human right* sebagaimana yang disebutkan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, dalam tulisannya “Health is a fundamental human right” di laman resmi WHO saat memperingati Human Rights Day 2017:

“But when people are given the opportunity to be active participants in their own care, instead of passive recipients, their human rights respected, the outcomes are better and health systems become more efficient. We have a long way to go until everyone – no matter who they are, where they live, or how much money they have – has access to these basic human rights.” World Medical Association (WMA) juga berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak atas kesehatan secara inklusif (WMA, 2022).

Dalam masyarakat Society 5.0 sekarang ini, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan disertai dengan hak untuk memilih dan menentukan sendiri tempat layanan tersebut menjadi suatu keniscayaan. Keterbukaan informasi dan keleluasaan bergerak yang juga ditunjang dengan kemampuan finansial menjadikan seseorang memiliki kemungkinan memilih tempat layanan kesehatan yang dirasanya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, dia bisa jadi memilih layanan yang bahkan jauh dari lokasinya, misalnya di negara lain. Pada kondisi lain, seseorang bisa saja “terpaksa” mencari layanan kesehatan terdekat di lokasinya saat itu karena membutuhkan pertolongan segera, misalnya saat sedang bepergian atau bahkan mungkin sedang berwisata keluar negeri.

Interoperabilitas Dalam Rekam Medis Elektronik (RME)

Dalam artikelnya di laman resmi Demigos, Ivan Dunskiy menyebutkan bahwa interoperabilitas rekam medis elektronik (rme) adalah arsitektur sistem yang memungkinkan fasilitas kesehatan untuk mengakses, menganalisis, dan berbagi data kesehatan antara sistem, perangkat medis, dan aplikasi di tingkat lokal atau lintas organisasi (Dunskiy, 2021). Health Information and Management Systems Society (HIMSS) mendefinisikan interoperabilitas sebagai kemampuan berbagai sistem informasi, perangkat, atau aplikasi untuk terhubung, secara terkoordinasi, di dalam dan melintasi batas-batas organisasi untuk mengakses, bertukar, dan menggunakan data secara kooperatif di antara para pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan kesehatan individu dan populasi (HIMSS, 2022)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun dan menerbitkan buku “Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024” yang di dalamnya menyebutkan standardisasi dalam rekam medis elektronik terintegrasi di Indonesia (Kemkes, 2021). Salah satu standar yang ditetapkan untuk digunakan adalah standar interoperabilitas.

Indonesia memutuskan untuk menggunakan HL7 FHIR (Health Level Seven, Fast Healthcare Interoperability Resources) sebagai standar interoperabilitas dalam rme. Standar ini merupakan yang paling banyak digunakan di berbagai negara dan yang direkomendasikan oleh WHO. Beberapa keuntungan menggunakan standar ini yaitu: otomatisasi proses yang berupang (redundan), kemudahan komunikasi lintas organisasi, lebih berfokus pada pasien, infrastruktur TI yang dapat dikembangkan bertahap (diskalakan), diagnostik yang lebih akurat, dan pengurangan biaya pengembangan.

Negara ASEAN selain Indonesia yang juga memilih menggunakan standar HL7 FHIR dalam pengembangan rekam medis elektroniknya misalnya Singapura, Philipina, dan Thailand. Arah menuju konektivitas data antar negara anggota ASEAN sebenarnya telah termuat dalam dokumen “Master Plan On ASEAN Connectivity 2025”. Dalam dokumen ini, bagian *Initiative 6 – Establish an ASEAN Open Data Network* – pada item nomor 32 telah dicantumkan pemikiran dan arah menuju pengembangan *open data* dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan standarisasi terkait *open data* ini. Pemanfaatan *open data* ini disebutkan tidak hanya akan terbatas pada sektor telekomunikasi saja tetapi juga pada sektor kesehatan dan edukasi. Konsep dasar ini tetap mempertimbangkan berbagai faktor lainnya misalnya sensitifitas data, privasi, dan perlindungan data pribadi (ASEAN Secretariat, 2016).

One ASEAN – One Health Data Standard

Ting, *founder* dari Snapfeed, Brunei Darussalam (2021) menyatakan bahwa “Jika [data konsumen yang kita kumpulkan] akan dibagikan di kawasan ASEAN dengan kebijakan tata kelola yang tepat, hal itu berpotensi mengubah lanskap bisnis ASEAN”. Pernyataan tersebut sejalan dengan antusiasme Master Plan On ASEAN Connectivity 2025. Tingkat pergerakan individu antar negara anggota ASEAN – baik untuk kebutuhan bisnis, wisata, edukasi, maupun layanan kesehatan – akan sangat membutuhkan interkoneksi antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberlanjutan dan kesinambungan layanan kesehatan di ASEAN akan sangat membantu meningkatkan kenyamanan, kecepatan, efisiensi, dan efektifitas layanan kesehatan. Misalnya, warga negara Indonesia yang sedang berada di Thailand dan membutuhkan layanan lanjutan untuk kesehatannya maka pihak rumah sakit di Thailand akan dapat mengakses data-data rekam medisnya (dalam bentuk resume medis) dengan persetujuan pasien yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan jika antar rumah sakit tersebut telah mengembangkan sistem rekam medis elektronik dengan standar interoperabilitas dan interkoneksi yang disepakati di wilayah ASEAN. Demikian pula sebaliknya, rumah sakit di Indonesia dimungkinkan untuk dapat mengakses data resume medis pasien – wisatawan atau warga negara ASEAN yang sedang berada di Indonesia – dari rumah sakit di negara asalnya dengan persetujuan pasien tersebut.

Kondisi interoperabilitas dan interkoneksi ini membutuhkan kesepakatan penggunaan standar-standar penunjang diantaranya standar kode diagnosis, standar kode tindakan medis, standar penamaan dan kode pemeriksaan laboratorium, serta standar peristilahan klinis. Indonesia saat ini memutuskan untuk menggunakan ICD-10, ICD-9-CM, LOINC, dan SNOMED-CT untuk standar-standar tersebut. Standar variabel dan metadata dalam rekam medis elektronik juga menjadi salah satu kunci penting dalam interoperabilitas dan interkoneksi rekam medis elektronik.

Infrastructure – Management – Human

Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 akan menjadi dasar dan semangat interkoneksi antar negara ASEAN dalam berbagai hal, termasuk layanan kesehatan. Pembahasan lebih lanjut terkait pemilihan berbagai standar untuk membangun interoperabilitas dan interkoneksi antar rekam medis elektronik di negara-negara anggota ASEAN bisa menjadi perjalanan panjang.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan empat pilar utama dalam peta jalan transformasi digital 2021-2024 yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital. Direktur Ekonomi Digital Kemkominfo, I Nyoman Adhiarna, dalam Seminar dan Workshop “Adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit di Era Layanan Kesehatan Digital” di Sidoarjo, 22 November 2022, menyebutkan “Untuk itu pada tahun 2023 nanti akan diluncurkan satelit multifungsi Satelit Indonesia Raya (SATRIA) 1 yang ditargetkan bisa menjangkau 150.000 titik layanan publik. Semoga dengan adanya satelit tersebut daerah-daerah terpencil di Jawa Timur ini seperti Pulau Kangean, Pulau Masalemba bisa dijangkau lebih baik.” (Arum, 2022).

Keengganan berubah dari kondisi dan struktur yang sudah ada baik pada pemerintah masing-masing negara maupun masyarakatnya juga sering menjadi kendala besar yang tidak mudah, namun juga tidak mustahil untuk diatasi. Berbagai regulasi terkait pengembangan rekam medis elektronik terintegrasi – apalagi antar negara – pasti akan dibutuhkan sebagai landasan hukum di masing-masing negara, selain juga kesepakatan bersama.

Transformasi digital kesehatan sudah selayaknya diimbangi dengan tingkat literasi digital yang sepadan. Pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait, termasuk pasien, perlu diperkuat.

Manajemen perubahan yang kuat, yang meliputi unsur manusia, organisasi, dan teknologi perlu disiapkan sejak awal perjalanan panjang menuju terbentuknya interoperabilitas dan interkoneksi rekam medis elektronik di ASEAN.*

Referensi

- Arum, Titah (2022). Kominfo Sosialisasi Adopsi Rekam Medis Elektronik. 29 November 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-sosialisasi-adopsi-rekam-medis-elektronik/> (diakses 5 Desember 2022).
- ASEAN Secretariat (2016). Master Plan On ASEAN Connectivity 2025. Jakarta.
- Cabinet Office, Government of Japan. New value in the fields of healthcare and caregiving, https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/medical_e.html#container (diakses 1 Desember 2022)
- Cabinet Office, Government of Japan. What is Society 5.0?, https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html (diakses 1 Desember 2022).
- Deguchi A, Hirai C, Matsuoka H, et al (2020). What is Society 5.0, in: Society 5.0 - A People-centric Super-smart Society. Tokyo, Japan:SpringerOpen.
- Dunskiy, Ivan (2021). EHR/EMR Interoperability: Benefits, Challenges, and Use Case. June 15, 2021, <https://demigos.com/blog-post/ehr-emr-interoperability/> (diakses 2 Desember 2022).
- Ghebreyesus, Tedros A (2017). Health is a fundamental human right. Human Rights Day 2017. December 10, 2017, <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right> (diakses 1 Desember 2022).
- HIMSS (2022). Interoperability in Healthcare. <https://www.himss.org/resources/interoperability-healthcare#top> (diakses 2 Desember 2022).
- Hospital & Healthcare Management. Singapore's Journey to Build a National Electronic Health Record System, <https://www.hhmglobal.com/knowledge-bank/articles/singapores-journey-to-build-a-national-electronic-health-record-system> (diakses 2 Desember 2022).
- Kamath, Ganesh (2018). State of healthcare and need for EMR in ASEAN countries. September 21, 2018, <http://blog.incarnus.com/state-of-healthcare-and-need-for-emr-in-asean-countries/> (diakses 2 Desember 2022).
- Kemkes RI (2008). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Kemkes RI (2020). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan no.21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- Kemkes RI (2020). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- Kemkes RI (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (2022). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Salgues, Bruno (2018). Society 5.0 - Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools. Volume 1. USA:Wiley.
- Sullivan, Tom (2019). HIMSS writes new definition of interoperability. March 22, 2019, <https://www.healthcareitnews.com/news/himss-writes-new-definition-interoperability> (diakses 3 Desember 2022).
- Ting, See Chung (2021). Digital Innovation. September 24, 2021, <https://connectivity.asean.org/strategic-area/digital-innovation/> (diakses 2 Desember 2022).
- World Medical Association (2022). Right to Health: An Inclusive Right for All. <https://www.wma.net/what-we-do/human-rights/right-to-health/> (diakses 1 Desember 2022).
- Y. Harayama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society" (2017). In: Japan Business Federation (Keidanren). "Japan's initiatives — Society 5.0". Hitachi Review, vol. 66, no. 6, 2017, pp. 556–557.

RANO I. SUDRA alumni FK UNDIP tahun 1992 dan Program Magister Kesehatan bidang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) 2003 di UNDIP. Saat ini sebagai Candidate Doctor Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan di UNTAG Semarang. Sejak Februari 2021 hingga saat sebagai Wakil Direktur di Politeknik Rukun Abdi Luhur (POLTEKUN) Kudus. Saat ini juga sebagai pengurus DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) bidang kajian Hukum Teknologi dan Informasi Kesehatan dan DPW MHKI Jateng. Beberapa buku yang telah ditulis diantaranya: *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan* (UI Press, 2010), *Statistik Rumah Sakit* (Graha Ilmu, 2010), *Rekam Medis, edisi 3* (UT Press, 2020), *Manajemen Informasi Kesehatan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), dan *Transformasi Digital Layanan Kesehatan: Pelindungan Terhadap Kepemilikan dan Keamanan Data Rekam Medis, dalam "Pulih Bersama Bangkit Perkasa-buku 1"* (Perpusnas, 2022) terbit dalam momen presidensi Indonesia G20. Ia dapat dihubungi di email: rano.indradi@gmail.com.

Menurunkan Stunting di ASEAN

Beryana Evridawati

Stunting dan Dampaknya

Pandemi Covid-19 telah menghantam berbagai sisi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Pandemi tidak hanya menyebabkan *learning loss*, tetapi juga menyebabkan anak-anak kehilangan pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan setempat lebih sedikit karena ada ketakutan akan infeksi Covid-19 (UNICEF, 2020). Berbagai dampak pandemi masih dirasakan sampai saat ini, diantaranya memburuknya kecukupan nutrisi untuk anak usia dini sebagai akibat dari menurunnya daya beli masyarakat, maupun terbatasnya keterjangkauan dan penyediaan berbagai pangan bergizi. Hal ini kemungkinan dapat berdampak pada meningkatnya angka prevalensi *stunting* yang terjadi selama pandemi. Untuk itu *stunting* akan dipengaruhi oleh berapa lama dampak pandemi ini terhadap ekonomi, ketersediaan pangan bergizi, dan sistem kesehatan. Malnutrisi ibu hamil yang dialami selama pandemi juga dapat mempengaruhi *stunting* sejalan dengan meningkatnya risiko berat badan lahir rendah dan gangguan pertumbuhan (UNICEF, 2021).

Prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat penurunan prevalensi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 27,7%, 2021 sebanyak 24,4% dan tahun 2022 sebanyak 21,6%. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024 (penurunan *stunting* menjadi program prioritas nasional) dengan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga di Indonesia. Kondisi *stunting* ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Padahal upaya penyiapan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang, menjadi sangat penting ketika anak berada di masa *golden age*.

Prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat penurunan prevalensi sebanyak 6,4% poin dalam 3 (tiga) tahun. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024 (penurunan *stunting* menjadi program prioritas nasional) dengan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga di Indonesia. Kondisi *stunting* ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Padahal upaya penyiapan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang, menjadi sangat penting ketika anak berada di masa *golden age*.

Upaya Menurunkan Angka Stunting

Return of Investment PAUD

Ditinjau dari *Return of Investment*, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi yang paling menguntungkan untuk dilakukan. *National Forum on Early Childhood Policy and Programs* telah menemukan bahwa program anak usia dini yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan pengembalian \$4 - \$9 dolar per \$1 yang diinvestasikan di PAUD. Sebuah studi tahun 2009 tentang Perry Preschool (sebuah program berkualitas tinggi untuk anak berusia 3-5 tahun yang dikembangkan di Michigan pada 1960-an) memperkirakan pengembalian investasi masyarakat antara sekitar \$7 dan \$12 untuk setiap \$1 yang diinvestasikan (The Center for High Impact Philanthropy, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Garcia, dkk (2016) juga menyampaikan yaitu diperkirakan manfaat/biaya agregat yang signifikan secara statistik sebesar 7,3 dan tingkat pengembalian sebesar 13,7% per tahun. Pendapat dari Profesor Heckman dan rekannya menemukan 13% *return of investment* (ROI) untuk PAUD yang komprehensif, berkualitas tinggi, sejak lahir hingga usia lima tahun (<https://heckmanequation.org/resource/13-roi-toolbox/> diunduh 27 November 2022).

Dari riset tersebut secara ekonomis maka investasi di PAUD menjadi hal yang paling menguntungkan di masa depan. Di sisi lain, dalam penyiapan generasi emas tahun 2045 ini, dapat terancam dengan *stunting* pada anak usia dini. Kondisi *stunting* dapat dicegah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan makanan yang bernutrisi sampai usia anak berusia sebelum mencapai 2 tahun (sebagai upaya preventif). Pertanyaan yang muncup di kalangan orang tua adalah bagaimana ketika anak berumur 2 tahun atau lebih dan berada dalam keadaan *stunting*? Usaha yang dilakukan adalah untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi *stunting* terhadap tumbuh kembangnya melalui pendekatan psikososial (sebagai upaya mitigatif) agar anak tersebut dapat tetap siap bersekolah.

Strategi Penurunan Angka Stunting

Upaya pemerintah dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu melalui program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Simultan adalah pemenuhan kebutuhan esensial anak yang beragam sering dilakukan secara bersama-sama atau serentak. Sistematis dimaksudkan agar terarah, pemenuhan kebutuhan esensial anak dilakukan dengan cara atau metode yang teratur melalui peraturan-peraturan atau dokumen formal yang ditetapkan baik di lingkungan satuan PAUD, lembaga di lingkungan pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya. Terintegrasi merupakan upaya untuk hasil yang efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak, sejumlah program yang melibatkan beberapa pihak perlu dilakukan secara terpadu (Iskandar, H., dkk, 2021)

Kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif). Secara operasional kebutuhan esensial meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud disini adalah pemerintah (Pusat dan Daerah sebagai pemangku kebijakan), akademisi, para penyandang dana, komunitas/masyarakat/satuan PAUD, dan media.

PAUD HI merupakan upaya lintas kementerian dan lembaga yang sangat penting dengan pemahaman yang sama, bahwa untuk mendukung perkembangan anak usia dini diperlukan layanan yang holistik terhadap pemenuhan kebutuhan esensial anak secara terintegrasi. Dengan pemahaman tersebut, maka terbangun kerjasama lintas sektor. Peran lintas kementerian/lembaga dalam PAUD HI terwadahi dalam Gugus Tugas PAUD HI. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengkoordinir keterlibatan kementerian/lembaga lain yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sekretariat Kabinet, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Gugus Tugas bertugas diantaranya mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI, sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI, dan mengadvokasi pelaksanaan PAUD HI. Secara berjenjang Gugus Tugas PAUD HI juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota.

Upaya pemerintah selanjutnya adalah membentuk Fasilitator PAUD HI. Tugas Fasilitator PAUD HI secara umum adalah memfasilitasi pendampingan penyelenggaraan PAUD HI secara berkualitas di setiap kabupaten/kota tempat mengabdinya. Fasilitator PAUD HI adalah pegiat yang bekerja membantu mempermudah satuan PAUD, masyarakat, dinas terkait, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan terselenggaranya layanan PAUD HI. Unsur yang terlibat sebagai Fasilitator PAUD HI adalah dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi mitra, pusat kegiatan gugus, unit pelayanan teknis (UPT), pegiat, akademisi, komunitas pendidikan keluarga dan/atau PAUD (Nurfadillah, dkk, 2021)

Upaya menurunkan prevalensi *stunting* melalui intervensi gizi sensitif dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan di Satuan PAUD, penyelenggaraan kelas orang tua dengan tema kesehatan dan gizi, maupun kerjasama satuan PAUD dengan Puskesmas/Posyandu terkait pemeriksaan kesehatan anak termasuk mengidentifikasi anak yang diduga mengalami *stunting*. Pelaksanaan kelas orang tua dapat dapat mengambil tema pendidikan, kesehatan dan

gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Contoh materi yang diberikan di kelas orang tua antara lain: a) gizi dan kesehatan, b) 1.000 hari pertama kehidupan, c) stimulasi psikososial untuk anak usia 3-6 tahun, d) pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, e) pentingnya imunisasi untuk anak usia dini, f) pola pengasuhan, g) pentingnya kartu identitas anak, dll.

Sejumlah 203.071 satuan PAUD di Indonesia (<https://dapo.kemdikbud.go.id/>, dikutip pada tanggal 16 November 2023) dapat menjadi 'hub' untuk mewadahi berbagai stimulasi pemenuhan kebutuhan esensial untuk anak usia dini. Pemenuhan kebutuhan esensial tersebut dapat diberikan oleh berbagai lintas organisasi perangkat daerah/OPD diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Satuan PAUD juga dapat mewadahi berbagai peran dari mitra pembangunan, pemerhati pendidikan, ataupun praktisi yang berupaya meningkatkan kualitas layanan PAUD HI di satuan tersebut. Salah satu yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah bagaimana layanan PAUD HI di satuan PAUD dapat lanjut dihadirkan di rumah peserta didik.

Pemantauan pemenuhan kebutuhan esensial di satuan PAUD dapat menggunakan indikator kinerja layanan holistik integratif. Terdapat 8 (delapan) indikator PAUD HI yang diselenggarakan di Satuan PAUD sebagai berikut:

1. Kelas orang tua, wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak (intervensi gizi-sensitif).
2. Pemantauan Pertumbuhan Anak (tinggi/ berat badan dan lingkar kepala)
3. Pemantauan Perkembangan Anak (DDTK/KPSP/KMS/KIA/ KKA)
4. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan
5. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pembiasaan.
6. Memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan/atau makanan bergizi secara berkala (minimal 3 bulan sekali)
7. Memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik.
8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih (minimal, menggunakan material sederhana dan ada air mengalir)

Ada berbagai miskonsepsi yang terjadi di lapangan dengan munculnya ekspektasi bahwa Satuan PAUD dapat menyediakan beragam layanan tersebut (pemenuhan 8 indikator PAUDHI) secara mandiri, padahal ada keterbatasan anggaran pendidikan di satuan maupun kapasitas satuan PAUD yang masih perlu penguatan. Miskonsepsi lain adalah PAUDHI dianggap sebagai penambahan tugas bagi satuan PAUD dan pendidik PAUD sebagai penyedia berbagai layanan esensial. Hal yang perlu digarisbawahi terkait pemenuhan kebutuhan esensial ini adalah Satuan PAUD tidak melaksanakan sendirian. Layanan PAUDHI hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan dan dukungan dari berbagai pihak. Kemitraan dan dukungan tersebut secara kongkrit diwujudkan ketika berbagai lintas sektor menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan esensial anak sesuai dengan tugas dan fungsi tiap OPD. Peran pemerintah dalam hal penyediaan regulasi yang memayungi program penurunan stunting melalui program PAUD HI, mengadvokasi dan mendampingi masyarakat dan satuan PAUD dalam pelaksanaan 8 (delapan) indikator PAUD HI, menyediakan berbagai sumber belajar tentang PAUD HI yang dapat diakses dan digunakan oleh orang tua, guru, dan masyarakat.

Satuan PAUD dapat berkontribusi melalui pendidikan dengan memberikan stimulasi pada seluruh aspek tumbuh kembang anak. Pada intervensi gizi sensitif, sebagai upaya preventif adalah pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, dan upaya mitigatif adalah mengurangi dampak *stunting* agar anak tetap siap bersekolah. Orang tua/wali anak usia dini mengikuti kelas orang tua sehingga memahami kebutuhan esensial anak dan menyediakannya ketika anak mereka berada di rumah masing-masing. Anak usia dini juga diberikan pemahaman tentang hidup bersih dan sehat dalam kegiatan pembelajaran.

Konklusi

Upaya menurunkan angka *stunting* dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan baik oleh pemerintah, masyarakat, orang tua, maupun satuan pendidikan. Pemerintah menyediakan berbagai regulasi yang mendukung penurunan angka *stunting* melalui PAUDHI, menyediakan berbagai sumber belajar, mengadvokasi dan pendampingan pelaksanaan PAUDHI. Satuan PAUD mendukung pemenuhan layanan esensial yang holistik melalui penyelenggaraan

layanan yang terintegrasi antar unit. Secara kongkrit, satuan PAUD melaksanakan pemenuhan 8 (delapan) indikator PAUD HI di lembaganya. Para orang tua/wali murid diharapkan ikut serta menyediakan pemenuhan kebutuhan esensial tersebut di rumah, termasuk para ibu hamil dapat memastikan bahwa janin yang dikandungnya terpenuhi kebutuhan gizinya. Secepatnya dapat mengambil peran untuk bergerak bersama menjalankan program penurunan *stunting*, sehingga target prevalensi *stunting* sebanyak 14% di tahun 2024 dapat dicapai, dan upaya meraih generasi emas tahun 2045 dapat diwujudkan secara optimal. *

Referensi

- Garcia, J.L., Heckman, J.J., Leaf, D.E., Prados, M.J. 2016. The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program. <https://heckmanequation.org/resource/13-roi-toolbox/>. (diunduh tgl 27 November 2022)
- Harris, I, Hasbi, M., Maryana, Mangunwibawa, A.A., Suwaryani, N., Fardana, N.N., Arifin, M., Yuliantina, I., Anggraini, F.P., Roesli, R. 2021. Panduan Praktis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di Satuan PAUD. Jakarta. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi <https://dapo.kemdikbud.go.id/> (diunduh 25 November 2022)
- <https://heckmanequation.org/resource/13-roi-toolbox/> (diunduh tanggal 27 November 2022)
- Kementerian Kesehatan. 2023. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota Tahun 2022. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Nurfadillah, Lestari, G.D., Mangunwibawa, A.A., Jakino. 2021. Teknik Fasilitasi Bimbingan dan Pendampingan. Jakarta. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Presiden No.60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- The Center for High Impact Philanthropy, 2015. Invest in a Strong Start for Children. Philadelphia. The University of Pennsylvania
- UNICEF, W. T. (2021). Levels and Trends in child malnutrition - UNICEF WHO The World Bank Join Child Malnutrition Estimates.
- UNICEF. 2020. Briefing Note, Safe Return to Learning. The Impact of Covid-19 and Recovery Strategies. Jakarta. UNICEF

BERYANA EVRIDAWATI bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ia menulis berbagai artikel di jurnal, laman Paudpedia dan bulletin, diantaranya mengenai *Cognitive Style and Attachment on Early Childhood Speech Skills*, "Dukungan Program PAUDHI dalam G20", "Kontribusi Kemdikbudristek dalam Penurunan Angka *Stunting* melalui Program UKS PAUD", "Kolaborasi Satuan PAUD dan Orang Tua dalam Penurunan Angka *Stunting*", dan "Upaya Orang tua Memberikan Layanan PAUD berkualitas, dan lain sebagainya.

Tinggi Badan Orang Asia Tenggara dan Isu Stunting di Indonesia

M. Sadli Umasangaji

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari $-2SD$ (standar deviasi) (*stunted*) dan kurang dari $-3SD$ (*severely stunted*) (TNP2K, 2017).

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua (Sekretariat Wakil Presiden, 2018).

Berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018 (Development Initiatives Poverty Research, 2018) menunjukkan data stunting sebesar 22.2%. Data Hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2017 menunjukkan data balita pendek sebesar 9.8% dan balita sangat pendek sebesar 19.8% atau data gabungan pendek dengan sangat pendek (*stunting*) sebesar 29.6%. Sedangkan Komposit Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U dan BB/TB dalam 6 Kategori di Indonesia menunjukkan Pendek Kurus sebesar 1.5%, Pendek Normal 25.8% dan Pendek Gemuk sebesar 1.5% (Kemenkes, 2018). Hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan data stunting mengalami penurunan yakni 24.4%, tahun 2019 data stunting juga mengalami penurunan yakni 27.7% (Kemenkes, 2021).

Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik memiliki hampir setengah dari populasi di seluruh dunia, yang menderita Beban Ganda Masalah Gizi. Tidak ada wilayah lain yang memiliki prevalensi berat badan lebih (gemuk) yang meningkat secepat di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik ini dan Indonesia adalah salah satu contoh utama. Beban Ganda Masalah Gizi di Indonesia terjadi di sepanjang siklus kehidupan, dimulai lebih awal dengan 12% anak di bawah lima tahun menderita kurus (*wasting*), sementara 12% lainnya mengalami kegemukan (*overweight*). Sekitar 11% dari remaja perempuan dan laki-laki berusia 13-15 tahun mengalami kurus, yang diukur melalui indeks massa tubuh (IMT) yang rendah, sementara 11% dari remaja pada usia yang sama lainnya mengalami kegemukan. Antara tahun 2010-2013, prevalensi berat badan lebih (gemuk) dan obesitas meningkat dua kali lipat pada wanita dewasa (dari 15% menjadi 33%), sedangkan seperempat wanita hamil mengalami kurus (Kementerian Kesehatan, 2013 dalam Bappenas, 2019). Keberadaan kekurangan gizi, obesitas, dan kekurangan gizi mikro di dalam rumah tangga dan individu yang sama juga telah dipublikasikan secara ilmiah. Beban ganda ibu dan anak, di mana ibu yang mengalami berat badan lebih tinggal di rumah yang sama dengan anak yang pendek (*stunted*) atau gizi kurang (*underweight*), telah diamati pada 11% rumah tangga pedesaan di Indonesia (Bappenas, 2019).

Tinggi Badan Balita dan Tinggi Badan Remaja

Pendek diidentifikasi dengan membandingkan tinggi seorang anak dengan standar tinggi anak pada populasi yang normal sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Anak dikatakan pendek (*stunting*) jika tingginya berada dibawah $-2 SD$ dari standar WHO atau berdasarkan Standar Antropometri Kemenkes. Riskesdas 2013 menunjukkan

bahwa prevalensi BBLR (<2500 gr) adalah 10.2% dan prevalensi pendek pada bayi baru lahir (<48 cm) adalah 20.2%. Untuk tingkat nasional terjadi penurunan prevalensi pendek pada balita pada tahun 2001 yaitu dari 29.5% menjadi 28.5% pada tahun 2004, selanjutnya menjadi 36.8% tahun 2007, lalu menurun menjadi 35.6% pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 37.2% (Balitbangkes, 2015).

Untuk anak usia sekolah, terjadi fluktuasi prevalensi pendek, 32% tahun 2001, menjadi 30% tahun 2004, meningkat menjadi 33.4% pada tahun 2007, menurun kembali pada tahun 2010 menjadi 28.3%, namun kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 31.7%. Besarnya beban masalah pendek pada 23.8 juta balita pada tahun 2013, dijumpai sejumlah 4,8 juta lahir pendek, dan selanjutnya 8.9 juta balita pendek, serta berlanjut pada anak usia sekolah (5-18 tahun) sejumlah 20.8 juta. Studi kohor tumbuh kembang anak menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan standar WHO rerata pertambahan tinggi badan anak dari studi kohor tersebut berada di bawah standar WHO.

Secara postur tubuh atau perawakan tubuh yang dikhawatirkan adalah tidak terputusnya perubahan tinggi badan pada usia balita yang pendek dan cenderung memberikan dampak menjadi remaja serta dewasa dengan tinggi badan yang tidak maksimal. Isu stunting selain mencegah perawakan pendek pada balita juga merupakan langkah untuk memberikan perubahan tinggi badan pada usia remaja dan dewasa. Dengan maksud misalkan bahwa bisa jadi ada balita dengan perawakan pendek tapi kemudian dapat memaksimalkan perubahan tinggi badan pada usia remaja hingga batas usia tinggi badan stagnan. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa aktivitas fisik berkorelasi dengan optimalisasi pertumbuhan massa mineral tulang yang dicapai pada awal usia 20 tahun, selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan (Savitri, A, Zulhamidah, Y, Widayanti, E, 2020).

Pertumbuhan ukuran tinggi badan, berat badan dan dimensi tubuh lainnya telah banyak digunakan sebagai indikator kesejahteraan lingkungan dalam penelitian epidemiologi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perbedaan sosial, ekonomi dan politik antara kelompok manusia sering dikaitkan dengan perbedaan rata-rata ukuran tinggi badan dalam suatu kelompok. Pada usia remaja lanjut (usia 18-20 tahun) pertumbuhan tulang-tulang extremitas dapat berhenti memanjang namun, ruas-ruas tulang belakang dapat berlanjut tumbuh kembangnya hingga usia 30 tahun. Puncak pertumbuhan massa tulang yang optimal dicapai pada awal usia 20 tahun. Dimana kurangnya pengaruh faktor risiko seperti latihan aktivitas fisik, hormone, asupan kalsium, vitamin D, genetik, dan sebagainya dapat menyebabkan pertumbuhan massa (densitas) mineral tulang yang kurang optimal. Faktor lain yang penting sebagai penentu pertumbuhan tinggi badan dan kepadatan tulang adalah gen orang tua dan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti asuhan sejak awal kehidupan dalam kandungan, nutrisi, sosio-ekonomi, dan pengaruh luar melalui aktivitas fisik yang juga dapat mempengaruhi tinggi badan (Savitri, A, Zulhamidah, Y, Widayanti, E, 2020). Dalam hal ini mencegah bahkan proses intervensi dan edukasi dimulai pada remaja hingga memberikan efek pada kehidupan berikut juga saat usia remaja. Anak remaja putri akan bertumbuh dan tentu memungkinkan untuk menjadi ibu hamil, ibu menyusui, memiliki balita dan kemudian bertumbuh hingga remaja.

Tinggi Badan Saat Dewasa

Tinggi badan orang Indonesia terendah ketiga di Asia Tenggara. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 1914 hingga 2014 oleh Imperial College London menyebutkan rata-rata tinggi badan penduduk Indonesia 152.9 cm. Orang Indonesia hanya lebih tinggi dari penduduk Laos dan Filipina yang memiliki tinggi masing-masing 152.8 cm dan 151.2 cm. Penduduk dengan rata-rata badan tertinggi di Asia Tenggara adalah warga Singapura dengan 162.3 cm. Kemudian diikuti Thailand dengan 159 cm dan Malaysia 157 cm. Penelitian ini menemukan orang-orang bertambah tinggi seiring dengan pertumbuhan tingkat ekonomi negaranya (Databoks, 2016).

Indonesia mengkategorikan pendek pada dewasa untuk perempuan adalah <150 cm dan laki-laki adalah <160 cm. Faktor determinan pendek pada bayi antara lain adalah tinggi badan ibu <150 cm, IMT ibu hamil <18.5 kg/m², pertambahan berat badan selama hamil yang di bawah standar dan asupan zat gizi yang di bawah angka kecukupan gizi. Selain itu faktor pendidikan dan status ekonomi jelas berpengaruh pada status gizi pendek.

Kelompok anak-anak yang berat badan waktu lahir <2500 gram, cenderung prevalensi pendeknya lebih tinggi dari pada kelompok anak yang lahir normal. Riskesdas 2010 menunjukkan kelompok anak pendek pada umumnya lahir dari ibu yang rerata tinggi badannya lebih pendek (150.7 cm) dibandingkan rerata tinggi badan ibu kelompok yang

normal (152.4 cm). Sebaliknya kelompok ibu yang pendek (tinggi <150 cm) cenderung melahirkan bayi pendek yang lebih banyak (47.2%) dibandingkan kelompok ibu dengan tinggi normal (36%) (Balitbangkes, 2015).

Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang juga pendek. Orang dewasa yang pendek akan cenderung lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang (Balitbangkes, 2015). Pendek pada usia dewasa akan memberikan dampak pada balita yang pendek dan sebaliknya balita yang pendek akan memberikan kemungkinan pendek di usia dewasa.

Analisis Faktor

Stunting dapat terjadi atau diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat (*weight faltering*). *Weight faltering* yang tidak ditatalaksana secara optimal akan memperlambat laju pertumbuhan linier karena tubuh berusaha untuk mempertahankan status gizi. Perlambatan pertumbuhan linier ini akan berlanjut menjadi stunting (*malnutrisi kronik*). Kondisi *weight faltering* pada bayi dan balita memiliki faktor-faktor potensial sebagai penyebab yaitu adanya asupan kalori yang tidak adekuat, gangguan absorpsi atau meningkatnya metabolisme tubuh akibat penyakit tertentu. Terdapat empat faktor langsung yang memengaruhi terjadinya stunting yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, ASI, makanan pendamping ASI (MPASI) dan infeksi (Kemenkes, 2022).

Selain faktor itu, telaah sistematis oleh Beal dkk, menunjukkan beberapa faktor penyebab stunting di Indonesia sesuai dengan faktor-faktor pada kerangka konsep WHO. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor keluarga dan rumah tangga yaitu ibu pendek, kelahiran prematur, panjang badan lahir bayi yang pendek, tingkat pendidikan ibu rendah, dan status sosioekonomi yang rendah. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian stunting di Indonesia, namun tidak terdapat dalam kerangka konsep WHO, yaitu ayah yang pendek, riwayat merokok pada orang tua, kepadatan hunian, adanya demam dan cakupan imunisasi yang rendah.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Nasional Tata Laksana Stunting mengkategorikan stunting berdasarkan penyebab potensial dan kondisi patologis. Stunting ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometrik. Harus dicari adanya faktor-faktor risiko dan *red flags* pada stunting. Kategori stunting menjadi Stunting Varian Normal dan Stunting Kondisi Patologis. Pendek yang bersifat patologis dikategorikan menjadi proporsional akibat faktor pranatal atau pascanatal, dan disproporsional akibat kelainan genetik. Stunting dalam Varian Normal adalah kondisi perawakan pendek berdasarkan analisis status gizi Tinggi Badan Menurut Umur. Sedangkan Stunting Kondisi Patologis adalah kelanjutan analisis terhadap faktor-faktor penyebab potensial dari Stunting Varian Normal. Hal-hal yang harus ditanyakan pada anamnesis meliputi faktor ibu, faktor anak dan lingkungan. Faktor-faktor ibu yaitu riwayat prakonsepsi, kehamilan dan laktasi, riwayat Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) dan kelahiran prematur. Faktor anak berupa evaluasi praktik pemberian ASI dan MPASI, imunisasi, perkembangan dan riwayat penyakit infeksi berulang. Anamnesis juga ditujukan untuk mengeksplorasi ada tidaknya faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan *weight faltering* dan stunting. Selain itu perlu ditanyakan kondisi lingkungan rumah dan kondisi sosioekonomi keluarga. Dan juga evaluasi terhadap potensi tinggi genetik berdasarkan tinggi badan kedua orang tua, riwayat pranatal dan pascanatal, perlambatan pertumbuhan (*weight faltering*) dan malnutrisi sebelumnya.

Memaksimalkan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Pelayanan Gizi

Program-program pencegahan dan intervensi Stunting merupakan program dalam Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Berbagai program terkait pencegahan stunting telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun (*baduta*) tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 HPK. Hanya 28.7% *baduta* yang memiliki empat akses layanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (Sekretariat Wakil Presiden, 2018).

Disatu sisi yang lain, hasil SSGI tahun 2021 misalkan tersirat logika data yang berbanding terbalik, program-program pencegahan pada beberapa provinsi memiliki nilai yang tinggi akan tetapi data stunting juga tinggi. Walaupun perbandingannya tentu harus beririsan pada data beberapa tahun yang lalu untuk program indikator kinerja dan hasil data stunting saat ini. Sebagai gambaran bahwa program-program indikator kinerja gizi yang maksimal memberikan efek terhadap penurunan angka stunting. Secara nasional misalkan data-data determinan pada hasil SSGI 2021 sebagai Indikator Kinerja Program Gizi cenderung stagnan dan belum sesuai dengan target capaian. Misalkan IMD tahun 2018 58.2% dan tahun 2021 48.6%, ASI Eksklusif 2018 64.5% dan 2021 52.5%, Ibu Hamil dapat TTD 2021 90.4% sedangkan data stunting secara nasional mengalami penurunan dari 27.7% pada tahun 2019 menjadi 24.4% pada tahun 2021.

Kemudian dielaborasi dalam setiap provinsi misalkan ada beberapa yang logika data yang berbanding terbalik seperti Proporsi ASI Eksklusif misalkan pada NTT dan NTB misalkan mencapai angka tertinggi 72.4% dan 75.9% sedangkan angka stunting tertinggi juga terjadi pada NTT, begitu juga pada beberapa program pencegahan lainnya. Walaupun ini tidak serta merta dapat disandingkan tapi ini untuk menggambarkan logika yang rasional. Apa yang menjadi pencegahan dan faktor determinan pada penurunan angka stunting? Sedangkan program-program penanggulangan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi program intervensi spesifik semisal itu (Umasangaji, MS, 2022).

Harapannya ke depan tentunya adalah bahwa program-program intervensi spesifik berperan mendalam untuk menangani masalah stunting. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan antara ukuran tinggi badan pendek dengan tingkat pendidikan dan produktivitas manusia di masa depan (Savitri, A, Zulhamidah, Y, Widayanti, E, 2020).

Konklusi

Kendala dalam Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan Stunting antara lain belum efektifnya program-program pencegahan stunting, belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi, belum efektif dan efisienya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program, masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini merupakan dampak sekaligus bila tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan (TNP2K, 2017).

Sebagaimana penjelasan Stranas Stunting mengadopsi kerangka penyebab masalah gizi, yaitu "The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition", "The Underlying Drivers of Malnutrition", dan "Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia". Pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi (Hamid, FA, Nofiandri, Umasangaji, MS, 2021). Memaksimalkan pelayanan intervensi gizi spesifik adalah harapan dalam penanganan stunting. Sehingga orang-orang Indonesia dalam waktu-waktu mendatang memiliki postur tubuh yang ideal dan memiliki produktivitas yang baik.*

Referensi

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2015. *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya*.
- Bappenas, 2019. *Pembangunan Gizi di Indonesia*.
- Databoks, 2016. *Penduduk Indonesia Terpendek Ketiga di Asia Tenggara*. (Online) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/13/penduduk-indonesia-terpendek-ketiga-di-asia-tenggara>
- Development Initiatives Poverty Research, 2018. *Global Nutrition Report*.
- Hamid, FA, Nofiandri, Umasangaji, MS, 2021. *Paradigma Gizi dalam Kesehatan*. Penerbit Yayasan Barcode.
- Kemenkes, 2018. *Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*.
- Kemenkes, 2022. *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting*.
- Nefy, N, Lipoeto, NI, Edison, 2019. *Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Pasaman 2017*. Media Gizi Indonesia. 2019.14(2): 186–196.
- Savitri, A, Zulhamidah, Y, Widayanti, E, 2020. *Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Tinggi Badan pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Universitas YARSI yang Berumur Kurang dari atau Sama dengan 20 Tahun*. Majalah Kesehatan PharmaMedika Vol.12 No.1, Juni 2020, p-ISSN 2085-5648, e-ISSN 2655-2396.
- Sekretariat Wakil Presiden, 2018. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024*.
- TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), 2017. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*.
- Umasangaji, MS, 2022. *Euforia Isu Stunting dan Kemas Daur Ulang: Efektifkah?*. Malut Post Edisi 9 November 2022.

M. SADLI UMASANGAJI lahir di Ternate, 9 Mei 1991. Ia menempuh pendidikan Sarjana Terapan Gizi di Poltekkes Kemenkes Makassar dan Pendidikan Profesi Dietisien di Poltekkes Kemenkes Malang. Ia pernah bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur untuk Program Gizi Seksi Kesehatan Keluarga kemudian mutasi tugas ke Puskesmas Boboneigo Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Program Gizi. Ia juga merupakan Founder dari Ruang Gizi – Gizisme (Konten Kreator dan Blog) dan juga mengelola website celotehide.com. Ia menulis beberapa karya dan novel antara lain *Dalam Sebuah Pencarian* (Merah Saga, 2016) (Novel Memoar), *Ideasi Gerakan KAMMI* (Gaza Library, 2021) dan *Serpihan Identitas* (Gaza Library, 2022). Beberapa karyanya juga tergabung dalam kumpulan opini bersama kawan-kawan KAMMI Maluku Utara dengan judul *Perspektif Kaum Muda* (Pustaka Saga, 2018), serta *Paradigma Gizi dalam Kesehatan* (2021). Tulisannya juga tergabung dalam buku *Sehimpun Mutiara Literasi Indonesia* (Perpusnas Press, 2022).

Transformasi Layanan Kesehatan Digital Kawasan ASEAN

Jesy Fatimah

Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi, saat ini internet menjadi kebutuhan manusia. Internet digunakan untuk mengakses beragam informasi dengan cepat dari segala belahan dunia. Tercatat bahwa data pengguna internet di dunia menurut *Hootsuite* dan *We Are Social 2022*, pengguna internet di seluruh dunia sudah mencapai 4,95 miliar pada tahun 2021, naik 4% dari tahun sebelumnya. Adapun, total populasi penduduk dunia mencapai 7,91 miliar jiwa di tahun 2021. Maka, jumlah penduduk yang terhubung dengan internet di dunia angkanya sudah mencapai 63%.

Kawasan Asia Tenggara adalah wilayah dengan pengguna internet yang cukup besar. Laporan publikasi Google yang bertajuk "*e-Conomy SEA2022 Through the Waves. Towards of sea of opportunity*" menyebutkan, jumlah pengguna internet di 6 negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN-6/SEA-6) bertambah sekitar 100 juta dalam tiga tahun terakhir menjadi 460 juta pengguna pada 2022. Negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Sebelumnya, pengguna internet di 6 negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN-6/SEA-6) hanya sebanyak 360 juta pengguna pada 2019. Angka tersebut bertambah 40 juta (11%) menjadi 400 juta pada 2020. Pengguna internet di SEA-6 kembali meningkat 40 juta (10%) menjadi 440 juta pada 2021 dan bertambah 20 juta (5%) pada 2022.

Perkembangan teknologi internet telah banyak membantu masyarakat mengakses informasi di semua sektor seperti: bisnis, pendidikan, hiburan termasuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan digital dapat membantu negara ASEAN mengurangi hambatan dalam sistem pelayanan kesehatan dan memenuhi permintaan layanan kesehatan yang semakin meningkat serta memungkinkan pasien mengutamakan kondisi kesehatan mereka agar para praktisi dapat memastikan kesejahteraan pasien, kapan saja dan dari mana saja. Dengan adanya layanan kesehatan digital dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dimanapun berada – sehingga tidak mewajibkan pasien untuk datang ke rumah sakit serta dapat membantu memperluas layanan kesehatan promotive dan preventif.

Tercatat bahwa waktu tunggu layanan kesehatan di telemedicine hanya 35 menit sedangkan di rumah sakit 4 jam, peningkatan jumlah pengguna layanan kesehatan digital diberbagai platform seperti halodoc 20juta, alodokter 33juta ini meningkat tajam dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini diperkuat oleh hasil survey inventure yang menyatakan rumah sakit harus menyediakan layanan telemedicine 95,3 %.

Kelebihan yang ditawarkan layanan telemedicine seperti perawatan kesehatan yang nyaman dan mudah diakses melalui ponsel. Layanan ini memberikan perawatan sederhana sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien sehingga tidak perlu lagi membuang waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan ketika konsultasi tatap muka. Layanan telemedicine sangat mudah diakses bagi yang sedang berada pada lokasi terpencil, ingin berada di rumah atau sedang *work from home*, dapat mengakses layanan telemedicine dengan mudah. Kelebihan kedua adalah mengurangi biaya yang dikeluarkan ketika ingin konsultasi tatap muka. Telemedicine juga mengurangi kunjungan UGD yang tidak mendesak dan menghemat biaya transportasi untuk pemeriksaan rutin. Kunjungan rutin dengan praktisi perawatan primer seperti dokter keluarga, spesialis penyakit dalam, dan pediatri, sangat penting untuk kesehatan keluarga.

Telemedicine masih punya beberapa keterbatasan atau kekurangan. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal *ABC Cardiol*, seperti dilansir laman National Institute of Health, menyimpulkan kelemahan utama telemedicine adalah dokter tidak dapat memeriksa pasien secara langsung. Keterbatasan tersebut tentu berpengaruh pada kualitas diagnosa. Tidak adanya pemeriksaan fisik langsung yang dilakukan dokter ke pasien membuat para tenaga kesehatan belum bisa memberikan diagnosa secara pasti melalui telemedicine.

Paling jauh, dokter hanya akan memberikan kemungkinan diagnosis disertai dengan pembandingan lainnya. Hal ini bisa dipahami, mengingat proses untuk menegakkan diagnosa merupakan langkah berlapis yang terkadang juga perlu disertai dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Selain itu beberapa orang menganggap bahwa biaya telemedicine terlalu mahal apabila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lebih kecil. Jenis penyakit dan masalah tertentu memerlukan pemeriksaan fisik yang hanya bisa dilakukan saat konsultasi tatap muka dengan dokter di klinik atau rumah sakit

Peluang: Permintaan Akses Pelayanan Kesehatan Digital Meningkat

Perkembangan teknologi digital ditambah dengan pandemi Covid-19 telah memberi dampak pada perubahan akses terhadap pelayanan kesehatan secara global. Berdasarkan data yang dirilis oleh DMN3 (Persi, 2020) menyebutkan bahwa dalam era digital, sebanyak 47% konsumen mencari informasi tentang dokter. Terdapat 38% konsumen mencari informasi mengenai rumah sakit dan fasilitas kesehatan serta 77% memesan jadwal pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan data tersebut, diperlukan suatu sistem digitalisasi yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan baik primer maupun sekunder (budget issue brief politik & keamanan, Vol.2, 2022).

Tantangan Layanan Kesehatan Digital

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwa pengguna internet diseluruh dunia mengalami kenaikan khususnya ASEAN. Namun, perbandingan pengguna internet wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat jauh. Hal ini tentu akan menghambat akses layanan kesehatan digital khususnya di pedesaan ASEAN. Menurut laporan GLOBAL CONNECTIVITY REPORT 2022, kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan di skala global masih cukup besar.

Laporan tersebut mencatat sebanyak 75% penduduk global yang tinggal di perkotaan telah terhubung ke internet pada 2021. Sedangkan penduduk pedesaan yang terhubung ke internet hanya 39%. Dengan adanya kesenjangan akses internet antara perkotaan dan pedesaan sudah tentu akan menghambat akses layanan kesehatan digital dan tidak meratanya layanan kesehatan digital. Hal ini terjadi mungkin saja karena ketidaksiapan infrastruktur digital dipedesaan dan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi.

Dalam pertemuan *ASEAN Business and Investment Summit 2020 (ABIS 2020)* bertema "*Digital ASEAN: Sustainable and Inclusive*" yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam. Presiden menyampaikan 3 hal utama yang penting untuk didorong dalam percepatan transformasi digital di ASEAN. Pertama, revolusi digital yang inklusif. "Revolusi digital yang inklusif membutuhkan 3A (*Access, Affordability, dan Ability*). Tiga hal ini harus terus kita upayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan.

Akses, *affordability* dan *ability* dapat tercapai dengan cara pemerataan infrastruktur digital dan pemerataan sumberdaya manusia yang melek teknologi khususnya bidang kesehatan. Selanjutnya masyarakat akan dapat menikmati manfaat dari layanan kesehatan digital. Kesehatan digital memungkinkan sistem untuk memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada, menyediakan lebih banyak layanan langsung di masyarakat melalui pendekatan *TELEMEDICINE* dan strategi penugasan petugas pelayanan kesehatan.

Teknologi digital juga cocok untuk pendekatan pencegahan, termasuk penyaringan skala besar atau kampanye pendidikan. India, sebagai contoh, melakukan screening kepada setiap warga negara di bawah 30 tahun menggunakan perangkat *mHealth* (kesehatan seluler) untuk berbagai faktor risiko terkait dengan NCD. Selain itu, dengan mengintegrasikan solusi kesehatan digital, pemerintah dan sektor swasta telah meningkatkan akses ke data yang kaya dan berkualitas untuk secara akurat menginformasikan alokasi sumber daya yang langka dan melompati tantangan dari banyak sistem kesehatan yang dikembangkan.

Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital pada layanan kesehatan, dibutuhkan infrastruktur digital yang mendukung dan integrasi data yang rutin serta berkualitas. Namun, hingga saat ini masih terdapat lebih dari 80% fasilitas layanan kesehatan yang belum terintegrasi dengan teknologi digital. Selain itu, terdapat jutaan data yang masih terfragmentasi dan tersebar pada 400 aplikasi. Terakhir masih terbatasnya regulasi berkaitan dengan standarisasi dan

pertukaran data. Berdasarkan dokumen Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan transformasi digital pada layanan kesehatan di Indonesia diantaranya (Kemkes, 2021):

Pertama, masalah pada layanan kesehatan primer dan sekunder berupa data kesehatan yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan secara mudah, berkesinambungan dan real time. Kemudian, kelengkapan, konsistensi dan akurasi data kesehatan belum memenuhi standar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Selanjutnya, masih sulit dalam merealisasikan interoperabilitas data kesehatan dalam implementasi prinsip *continuum of care* karena belum standar dan terintegrasinya data. Terakhir adalah masih terdapat data yang tumpang tindih karena jumlah aplikasi yang terlalu banyak sehingga pencatatan data kesehatan inefisien dan inefektif.

Kedua, permasalahan pada layanan farmasi dan alat kesehatan belum adanya *single key data feature* yang digunakan untuk agregasi dan pengolahan data sehingga tidak ada standarisasi kode perusahaan, produk dan material bahan baku. Kemudian, ketiadaan format sistem data yang baku menyebabkan data stok obat, alat kesehatan disimpan terpisah di masing-masing instansi (produsen, distributor dan fasilitas pelayanan kesehatan). Selanjutnya tingginya *opportunity cost* dari *stock out* serta beredarnya obat dan vaksin ilegal akibat rendahnya akurasi pemetaan *supply* dan *demand*.

Ketiga, permasalahan pada layanan ketahanan kesehatan berupa belum terpetakan risiko penyakit di tiap daerah dengan baik karena sistem informasi surveilans (deteksi) yang belum *real time*. Kemudian, kemampuan deteksi dan respon kegawatdaruratan yang belum responsif. Selanjutnya dalam menghadapi krisis kesehatan, belum ada sistem pemantauan kesiapan fasilitas kesehatan, jejaring laboratorium, SDM kesehatan, alat kesehatan dan obat. Serta belum banyaknya akses terhadap sumber edukasi kesehatan terpercaya. Keempat, permasalahan pada layanan SDM kesehatan berupa jumlah SDM kesehatan rumah sakit yang masih kurang sebesar 56,6% dan puskesmas 82,5%. Sehingga berdampak pada akurasi analisis data yang tidak maksimal.

Konklusi

Pemanfaatan teknologi digital didorong desakan dari WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) terhadap Kementerian Kesehatan di seluruh dunia untuk memanfaatkan teknologi informasi membuat negara ASEAN berinovasi dengan layanan kesehatan digital. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Harapan ke depannya semua pihak dapat memaksimalkan penggunaan internet khususnya dalam inovasi layanan kesehatan digital yang berfokus pada penurunan biaya dan peningkatan akses, kualitas serta efisiensi terhadap layanan kesehatan di seluruh dunia khususnya ASEAN demi tercapainya kesehatan masyarakat ASEAN yang lebih baik.

Dengan adanya layanan kesehatan digital diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di ASEAN dan memberikan akses pelayanan kesehatan berkualitas pada semua lapisan masyarakat serta integrasi data kesehatan yang terkordinir sehingga memudahkan dan mempercepat pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan.*

Referensi

- <https://www.beritasatu.com/news/838587/bidang-baru-dalam-healthtech-di-asia-tenggara> diakses Sabtu, 9 Oktober 2021 | 02:03 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/28/pengguna-internet-6-negara-asean-meningkat-100-juta-dalam-3-tahun-terakhir> diakses tanggal 19 november 2022.
- <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-internet-paling-kencang-di-dunia-2022> diakses tg 20/11/22).
- <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Indonesia-Digital-Medic-Summit-2021-5.jpg>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30778/presiden-ungkap-3-kunci-percepatan-transformasi-digital-asean/0/berita> diakses 6 November 2022).

JESY FATIMAH merupakan pengajar pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan di Universitas Indonesia Maju, Jakarta. Ia dapat dihubungi melalui email jesyqiana@gmail.com.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Industri Rokok di Negara ASEAN

Rindu

“Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak.”

– Mahatma Gandhi

Pendahuluan

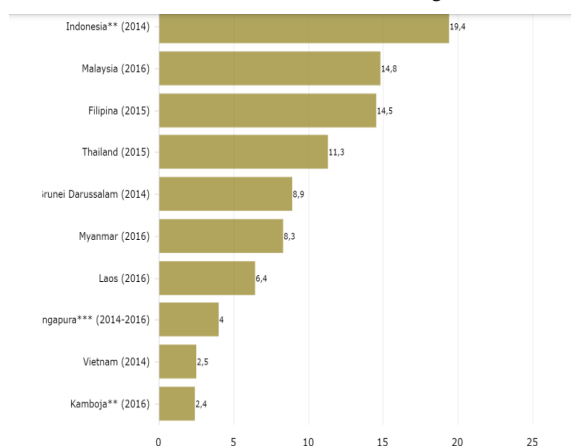
Kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) terdiri dari 10 negara dengan kedekatan budaya, ekonomi dan geopolitik, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Data dari *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) yang berjudul *The Tobacco Control Atlas ASEAN Region*, menunjukkan persentase remaja Indonesia berusia 13-15 tahun yang merokok sebesar 19,4%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Adapun negara dengan persentase remaja yang merokok terbanyak selanjutnya terdapat di Malaysia sebesar 14,8% dan Filipina sebesar 14,5% (Hayani, 2019).

Thailand menduduki posisi keempat dengan persentase remaja yang merokok sebesar 11,3%, kemudian diikuti oleh Brunei Darussalam sebesar 8,9%. Selisih tipis dengan Brunei, Myanmar menempati posisi keenam dengan persentase sebesar 8,3%. Sementara itu, persentase terkecil remaja yang merokok terdapat di Kamboja sebesar 2,4% (Hayani, 2019).

Di ASEAN, prevalensi merokok laki-laki adalah tertinggi di Indonesia (66%) dan terendah di Singapura (21,1%). Tingkat merokok wanita sangat tinggi (antara 5,8% dan 8,4%) di Indonesia, Laos, Myanmar dan Filipina (Lian & Dorotheo, 2018).

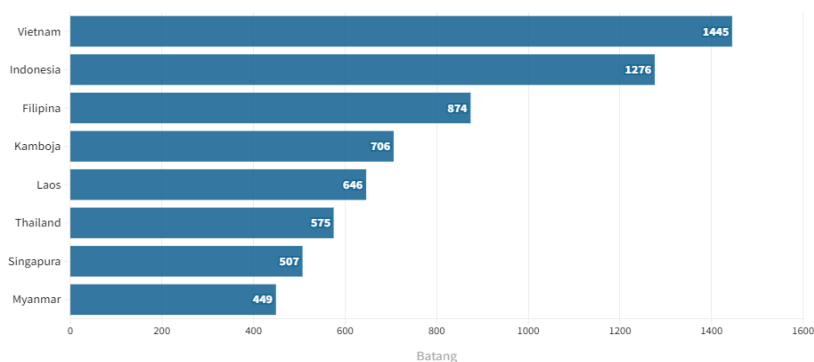
Laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) menunjukkan, konsumsi rokok per kapita secara tahunan di Indonesia mencapai 1.276 batang pada 2020. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam (Mahdi, 2022) dan WHO mencatat sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok atau penyakit yang berhubungan dengan zat-zat yang terkandung dalam rokok (Cameng & Arfin, 2020).

Gambar. 1 The Tobacco Control Atlas ASEAN Region, 2014-2016



Sumber: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

Konsumsi Rokok per Kapita Secara Tahunan di Asia Tenggara
(2020)



Sumber: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

Melihat dari data tersebut menunjukkan bahwa belum tuntasnya permasalahan perilaku merokok di negara ASEAN, hal ini tentu dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakatnya yang diakibatkan oleh rokok, tentunya perlu tindakan dalam skala luas untuk masyarakat dari bahaya pengguna rokok khususnya pada remaja sebagai generasi penerus bangsa dan ini dapat menjadi beban negara.

Dengan masih belum tuntasnya permasalahan rokok di negara ASEAN khususnya di Indonesia, diharapkan perusahaan rokok dapat berkontribusi dalam bertanggungjawab atas seluruh dampak negatif yang timbul akibat bisnis yang mereka lakukan, terutama dibidang kesehatan. Ketika kawasan ASEAN menjadi lebih sadar akan efek mematikan tembakau dan pemerintah meningkatkan regulasi industri, perusahaan tembakau menggunakan strategi untuk mempromosikan nama perusahaan dan produknya dengan melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan citra dan mempertahankan legitimasi baik di ranah publik maupun korporasi. Definisi CSR itu sendiri adalah strategi yang digunakan perusahaan, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya (Qothrunnada, 2022).

Dampak Kesehatan dan Ekonomi di Negara ASEAN

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan 2018 menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 Tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Pada saat sekarang ini, kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah pada orang dewasa, namun juga semakin marak pada kalangan anak dan remaja dan bukan hanya perokok aktif juga perokok pasif, ditambah lagi dengan adanya varian rokok elektronik yang dapat menarik keinginan anak-anak dan remaja, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 Tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%) (Kementrian Kesehatan RI, n.d.).

Di permasalahan rokok bukan hanya masalah kesehatan tapi juga ekonomi, di Indonesia kerugian yang harus ditanggung negara akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok mencapai sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) atau hampir Rp4.200 triliun yaitu karena kematian dini dan tahun produktif yang hilang karena sakit dan juga kerugian ekonomi seperlima dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau Rp375 triliun. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain penyakit jantung, stroke, kanker paru, termasuk penyakit menular TBC dan ini membebani lebih dari 20%-25% seluruh pembiayaan BPJS Kesehatan. Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit jantung tahun 2018 sebesar Rp10,5 triliun, diikuti penyakit kanker Rp3,4 triliun, dan penyakit stroke Rp2,5 triliun (Herlinda, 2019).

Segala kebijakan yang telah dilakukan terkait rokok khususnya di Indonesia masih belum menurunkan secara signifikan angka prevalensi merokok dan penyakit terkait rokok, hal ini diperlukan komitmen peranan dari perusahaan

rokok, untuk membantu penyelesaian masalah ini. *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan rokok.

CSR yang sudah dilakukan di Indonesia belum cukup dalam membantu permasalahan kesehatan akibat rokok, karena bentuk CSR yang telah dilakukan belum ada yang berkaitan dengan kesehatan, adapun bentuk CSR yang sudah dilakukan adalah (1) di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa umum hingga universitas, menyediakan fasilitas olahraga di sekolah/kampus, memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik, dosen terbaik, dan inovator muda terbaik, dsb; (2) di bidang kepedulian masyarakat, dengan menyediakan pusat kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, pasar, dan pameran untuk usaha kecil bagi masyarakat sekitar, dsb; (3) di bidang lingkungan, dengan melaksanakan penghijauan lahan marginal, penghijauan jalan raya, pemugaran taman kota, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah, kampanye pencegahan demam berdarah, dsb; (4) di bidang pelestarian budaya, seperti memberikan bantuan untuk festival seni, festival musik, festival tari, opera, kabaret, Wayang pertunjukan, pertunjukan tari Reog Ponorogo, festival batik, festival teater, bahasa Indonesia petualangan budaya, renovasi tempat ibadah, dan paket sembako keagamaan liburan untuk tingkat lokal dan nasional, dsb (Tandilittin & Luetge, 2015).

Negara Brunei, Laos, Myanmar, dan Thailand yang melarang CSR oleh industri tembakau. Menurut Pasal 13 FCTC, para pihak harus melarang kontribusi dari perusahaan tembakau ke entitas lain mana pun untuk “penyebab tanggung jawab sosial”, karena ini adalah bentuk sponsor. Publisitas yang diberikan kepada praktik bisnis industri tembakau yang “bertanggung jawab secara sosial” harus dilarang, karena merupakan iklan dan promosi. Perusahaan tembakau semakin banyak melakukan kegiatan CSR untuk mendapatkan citra baik dan kredibilitas untuk mendapatkan jarak tempuh politik. Empat perusahaan tembakau transnasional teratas, Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) dan Imperial Brands (Tobacco) Group melakukan kegiatan CSR di kawasan ASEAN. Publisitas yang diberikan untuk kegiatan ini di media merupakan iklan dan promosi. Vietnam membatasi jenis kegiatan CSR yang dapat dilakukan industri untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Meskipun kegiatan industri terbatas di Vietnam, mereka aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi sosial politik dalam melakukan kegiatan tersebut (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, n.d.).

Konklusi

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, Indonesia menghadapi tingkat prevalensi merokok yang mengkhawatirkan. Situasi semakin memburuk selama wabah COVID-19 karena perilaku merokok tembakau yang berlebihan meningkatkan kerentanan kesehatan masyarakat. Urgensi Indonesia untuk menandatangani FCTC sangat penting untuk menyelamatkan warga dari bencana demografi yang akan datang.

Sebagai salahsatu negara ASEAN, Indonesia juga perlu melakukan kebijakan terkait dengan menambahkan bentuk CSR perusahaan rokok di bidang kesehatan, yaitu dengan melakukan layanan iklan kesehatan terkait rokok, merayakan hari tanpa tembakau sedunia, membantu pemerintah mesosialisasikan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mengcover biaya pengobatan rumah sakit dan kematian akibat sakit karena rokok.

Publisitas yang diberikan kepada praktik bisnis industri tembakau yang “bertanggung jawab secara sosial” harus dilarang, karena merupakan iklan dan promosi, seperti yang sudah dilakukan Singapura, kontribusi industri tembakau berupa dukungan keuangan untuk acara dan kegiatan tidak dilarang tetapi pengakuan atas kontribusi tersebut (yaitu logo atau pengakuan dalam bentuk lain) dilarang (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, n.d.).*

Referensi

- Cameng, D. K. J., & Arfin. (2020). Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Taxd dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau bagi Kesehatan Masyarakat. Retrieved November 15, 2022, from Jurnal BPK website: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/561>
- Hayani, D. H. (2019). Angka Remaja Indonesia yang Merokok Tertinggi di ASEAN. Retrieved November 20, 2022, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/angka-remaja-indonesia-yang-merokok-tertinggi-di-asean>

- Herlinda. (2019). Kerugian Negara karena Penyakit Akibat Rokok Tembus Seperlima APBN. Retrieved November 18, 2022, from Bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/12/1123000/kerugian-negara-karena-penyakit-akibat-rokok-tembus-seperlima-apbn>
- Kementrian Kesehatan RI. (n.d.). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Retrieved from Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan website: <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/laporan-hasil-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>
- Lian, T. Y., & Dorotheo, U. (2018). *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region*. Retrieved from [https://seatca.org/dmdocuments/SEATCA Tobacco Control Atlas ASEAN Region 4th Ed Sept 2018.pdf](https://seatca.org/dmdocuments/SEATCA_Tobacco_Control_Atlas_ASEAN_Region_4th_Ed_Sept_2018.pdf)
- Mahdi, M. I. (2022). Konsumsi Rokok Indonesia Terbesar Kedua di Asia Tenggara. Retrieved November 10, 2022, from dataindonesia.id website: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/konsumsi-rokok-indonesia-terbesar-kedua-di-asia-tenggara>
- Qothrunnada, K. (2022). Apa Itu CSR? Ini Fungsi, Jenis, Tujuan, Contoh, dan Manfaatnya. Retrieved from detikFinance website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6016983/apa-itu-csr-ini-fungsi-jenis-tujuan-contoh-dan-manfaatnya>
- Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (n.d.). Tobacco related CSR activities in ASEAN region. Retrieved November 5, 2022, from Tobacco Industry Monitor website: <https://timonitor.seatca.org/tobacco-related-csr-activities-in-asean-region/>
- Tandilittin, H., & Luetge, C. (2015). CSR activity of tobacco companies in Indonesia: Is it a genuine social responsibility? *Online Journal of Health Ethics*, 11(1). <https://doi.org/https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=ojhe>

RINDU lahir di Bogor, 20 Juni 1981, merupakan Dosen Tetap di Universitas Indonesia Maju (UIMA), Jakarta sejak tahun 2006. Matakuliah yang diajarnya yaitu Mata Kuliah Komunikasi Kesehatan, Promosi Kesehatan, Manajemen SDM Kesehatan, Teknik Penulisan Ilmiah, SIM Kesehatan dan Rumah Sakit. Beliau lulus Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia lulus 2005, S2 Kesehatan Masyarakat-Jurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan, STIKIM tahun 2011, dan Program Doktor, S3 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universtas Andalas, Sumatera Barat tahun 2020. Profesi nya sebagai dosen kesehatan masyarakat sudah tersertifikasi sejak 2015, dan tersertifikasi sebagai asesor BKD sejak 2021, selain dosen juga sebagai peneliti, penulis artikel ilmiah di jurnal ilmiah nasional juga internasional juga reviewer di jurnal nasional terakreditasi milik UIMA sejak tahun 2020. Memiliki pengalaman sebagai pengawas pusat dan *reviewer* regional untuk soal Ujian Kompetensi Nasional Ahli Kesehatan Masyarakat sejak 2018, juga berpengalaman sebagai narasumber di berbagai seminar kesehatan nasional sejak 2015.

Stop Stigma Kesehatan Mental!

Dandi Birdy dan Diah Mahmudah

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.”

(QS. Al-Hujurat: 11)

Pendahuluan

“Ngapain ke psikolog, memangnya gila?” tutur seorang ibu ke anak remajanya. Kalimat senada diungkap juga oleh seorang ayah, “Tidak ada riwayat dalam keluarga kita mesti ke psikiater. Aib banget!”. Bahkan banyak yang menambahkan dengan kalimat lainnya, “Kaya orang kurang iman aja!”. Kalimat-kalimat inilah yang sering ditujukan oleh orang sekitar kepada mereka yang sedang mengalami sakit mental, apakah sedang demotivasi, *burnout*, kecemasan, atau depresi. Kalimat-kalimat yang jarang sekali, bahkan tidak pernah ditujukan kepada mereka yang sedang sakit fisik. Sungguh miris, sama-sama di kondisi sakit, tetapi tanggapan masyarakat kita sangat jauh berbeda.

Lalu apa itu stigma? Menurut definisi dari kamus *American Psychological Association* (APA), stigma adalah sikap sosial negatif yang melekat kepada karakteristik seorang individu yang dinilai mempunyai masalah mental, fisik, atau sosial. Stigma juga merupakan bentuk dari penolakan sosial yang bisa berujung pada diskriminasi dan pengucilan. Stigma ini memiliki dua bagian yaitu *self stigma* dan *public stigma*. *Self stigma* adalah stigma yang dilakukan oleh diri sendiri ketika sedang mengalami masalah mental. *Public stigma* adalah stigma yang dilakukan oleh lingkungan sosial ke seseorang yang memiliki masalah mental.

Dalam buku *Anger Management* karya kami, stigma masalah mental ini dipaparkan sebagai salah satu paradigma keliru dalam emosi. Mereka yang memiliki gangguan emosi dan mental seringkali terlambat meminta pertolongan karena mereka dibesarkan dalam stigma bahwa memiliki sakit mental adalah aib. Mereka memilih diam memendam dan tiba-tiba di kemudian hari dampak sakit mentalnya meledak begitu fatal, baik merusak diri maupun orang lain.

Apakah dampak buruk dari stigma masalah mental? Nurul Kusuma Hidayati M. Psi., psikolog CPMH UGM menyatakan stigma-stigma tersebut berpotensi menjauhkan pasien dari penanganan terbaik yang sebenarnya bisa didapatkan. Ia juga mengungkapkan bahwa kesadaran kesehatan jiwa di Indonesia memiliki tren meningkat, tetapi masih terkekang oleh tebalnya stigma buruk di masyarakat. Sering kali, akibat stigma ini orang dengan gangguan mental tertunda dalam mencari pertolongan bahkan hingga tidak ingin mencari pertolongan. Dengan kata lain, stigma ini menghalangi proses penerimaan seseorang yang memiliki gangguan mental. Padahal dalam proses pemulihan, penerimaan merupakan langkah awal yang besar (Satria, 2022). Penerimaan ini bukan hanya dari yang sakit, tetapi yang lebih utama adalah penerimaan dan dukungan dari lingkungan terdekat. Prihatinnya, justru lingkungan terdekatlah yang paling besar memberikan penolakan.

Kondisi inilah yang dialami oleh salah satu klien kami, sebut saja Nona Mentari (bukan nama sebenarnya). Dari diagnosa psikiater, ia mengalami *bipolar personality disorder*, sekitar dua tahun ia bukan hanya berjuang menghadapi sakit mentalnya, tetapi yang paling berat justru bergulat menghadapi stigma dari keluarga terdekat. Keluarganya melakukan stigma, dengan mengolok-olok dan merendahkan mentalnya dengan mengatakan: lemah, manja, kurang waras, kurang beriman, dan sederetan kalimat kurang empati lainnya. Ia menjadi enggan melanjutkan pengobatannya ke psikiater dan akhirnya memilih mengurung diri di kamar. Seiring itu, sakitnya bertambah parah dan dorongan menyakiti diri juga bunuh diri makin besar. Di tengah rasa ketidakberdayaan diri dan putus asa yang memuncak, akhirnya suatu

hari, ia memutuskan pergi ke sebuah gedung tinggi di kotanya untuk mengakhiri hidupnya. *Biidznillah*, atas seizin Allah, Nona Mentari bisa diselamatkan oleh kami bersama teman Nona Mentari lainnya. Hanya bagaimana dengan nasib Nona Mentari lainnya? Berapa banyak mereka yang memiliki sakit mental yang akhirnya memutuskan mengakhiri hidup dan terlambat mendapatkan pertolongan karena teresbab adanya stigma tiada henti dari keluarga terdekat. Dampak dari stigma ini sangat rentan pula menimbulkan trauma. Menurut Dr. Gabor Mate, seorang ahli tentang trauma, kecanduan, stres, dan perkembangan masa kanak-kanak: “Anak-anak bukan trauma karena mereka terluka, tapi trauma karena mereka merasa sendirian dengan luka itu.” Tentu pernyataan ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi bisa juga ditujukan kepada remaja bahkan orang dewasa.

Mental Illness dan Stigma di Era Pandemi

Di era pandemi COVID-19 ini jumlah penduduk yang mengalami sakit mental meningkat pesat. Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan drg. Vensya Sitohang menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 terpantau memperparah kesehatan jiwa di Indonesia. Angka prevalensinya meningkat satu hingga dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Hal senada disampaikan oleh dr. Hervita, pada lima bulan awal masa pandemi COVID-19 survei mengatakan bahwa 1 dari 5 orang di Indonesia usia 15 sampai 29 tahun terpikir untuk mengakhiri hidup. Selanjutnya satu tahun pasca pandemi oleh survei yang berbeda didapatkan data 2 dari 5 orang memikirkan untuk bunuh diri. Kemudian di awal tahun 2022 ada sekitar 1 dari 2 orang yang memikirkan untuk mengakhiri hidup. (Kemenkes RI, 2022). Bayangkan betapa besar mereka yang mengalami nasib seperti Nona Mentari. Jangan sampai stigma memperparah mereka untuk mendapatkan pertolongan kesehatan mental dengan cepat dan tepat.

Banyak aspek kesehatan mental telah ditantang. Sebelum pandemi pada tahun 2019, diperkirakan satu dari delapan orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa. Pada saat yang sama, layanan, keterampilan, dan pendanaan yang tersedia untuk kesehatan mental masih terbatas, dan jauh di bawah yang dibutuhkan, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2022). Berikut adalah pemetaan masalah mental di dunia, dengan berbagai bentuk yang beragam, dari level yang ringan hingga berat.

Survey Institute for Health Metrics and Evaluation di flagship Global Burden of Disease study (Dattani, 2021)

No.	Disorder	Share of global population with disorder (2017) [difference across countries]	Number of people with the disorder (2017)	Share of males:females with disorder (2017)
1	Any mental health disorder	10.7%	792 million	9.3% males 11.9% females
2	Depression	3.4% [2-6%]	264 million	2.7% males 4.1% females
3	Anxiety disorders	3.8% [2.5-7%]	284 million	2.8% males 4.7% females
4	Bipolar disorder	0.6% [0.3-1.2%]	46 million	0.55% males 0.65% females
5	Eating disorders (clinical anorexia & bulimia)	0.2% [0.1-1%]	16 million	0.13% males 0.29% females

No.	Disorder	Share of global population with disorder (2017) [difference across countries]	Number of people with the disorder (2017)	Share of males:females with disorder (2017)
6	Schizophrenia	0.3% [0.2-0.4%]	20 million	0.26% males 0.25% females
7	Any mental or substance use disorder	13% [11-18%]	970 million	12.6% males 13.3% females
8	Alcohol use disorder	1.4% [0.5-5%]	107 million	2% males 0.8% females
9	Drug use disorder (excluding alcohol)	0.9% [0.4-3.5%]	71 million	1.3% males 0.6% females

Pandemi Covid-19 telah menciptakan krisis kesehatan mental global, memicu stres jangka pendek dan jangka panjang, serta merusak kesehatan mental jutaan orang. Perkiraan menyebutkan peningkatan gangguan kecemasan dan depresi lebih dari 25% selama tahun pertama pandemi. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental sangat terganggu dan kesenjangan perawatan untuk kondisi kesehatan mental makin melebar (WHO, 2022).

Meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik yang berlarut-larut, kekerasan dan keadaan darurat kesehatan masyarakat mempengaruhi seluruh populasi, mengancam kemajuan menuju peningkatan kesejahteraan; 84 juta orang yang mengejutkan di seluruh dunia terpaksa mengungsi selama tahun 2021. Kita harus memperdalam nilai dan komitmen yang kita berikan pada kesehatan mental sebagai individu, komunitas, dan pemerintah, dan menyesuaikan nilai tersebut dengan lebih banyak komitmen, keterlibatan, dan investasi oleh semua pemangku kepentingan, di semua sektor. Kita harus memperkuat perawatan kesehatan mental sehingga seluruh spektrum kebutuhan kesehatan mental terpenuhi melalui jaringan layanan dan dukungan berbasis komunitas yang dapat diakses, terjangkau, dan berkualitas (WHO, 2022).

Stigma dan diskriminasi terus menjadi penghalang untuk inklusi sosial dan akses ke perawatan yang tepat; yang terpenting, kita semua dapat memainkan peran kita dalam meningkatkan kesadaran tentang intervensi kesehatan mental preventif mana yang berhasil dan Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah kesempatan untuk melakukannya secara kolektif. Kami membayangkan dunia kesehatan mental dihargai, dipromosikan, dan dilindungi; setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kesehatan mental dan menggunakan hak asasinya; dan di mana setiap orang dapat mengakses perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan (WHO, 2022).

WHO akan bekerja dengan mitra untuk meluncurkan kampanye seputar tema Menjadikan Kesehatan Mental & Kesejahteraan untuk semua sebagai Prioritas Global. Ini akan menjadi kesempatan bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan mental, advokat, pemerintah, pemberi kerja, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengakui kemajuan di bidang ini dan bersuara tentang apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan Kesehatan & Kesejahteraan Mental menjadi Prioritas Global untuk semua (WHO, 2022). Kami sangat optimis ASEAN mampu hadir menjadi garda terdepan untuk mendukung misi dari WHO terkait dengan psikoedukasi kesehatan mental, khususnya dalam tema mengikis stigma di masyarakat.

Atasi Stigma, Atasi Mental Illness

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa stigma masalah mental adalah salah satu dari sekian penyebab yang mendorong perburukan dari masalah *mental illness* di masyarakat. Stigma negatif

dapat berdampak buruk bagi pasien dengan sakit mental. Stigma ini harus dihilangkan agar penyembuhan terhadap seseorang yang sakit mental dapat dilakukan secara lebih optimal.

Program LOVE kami usulkan menjadi salah satu pilihan solusi mengatasi stigma ini:

1. L: Libatkan semua elemen masyarakat.

Program ini untuk mengatasi *public stigma*, diharapkan ada kolaborasi dari para profesional (psikolog dan psikiater) dengan *non professional* (kepala keluarga, ketua RT/RW, ketua karang taruna, pemuka agama, pendidik di sekolah, pengelola yayasan dan komunitas). Kolaborasi ini bisa difasilitasi oleh lembaga pemerintah maupun mandiri. Saat ini, kami telah melakukannya secara mandiri dalam program *Training for Trainer (ToT)*. Para *trainer* ini disebut sebagai Duta Kesehatan Mental (DKM) Dandiah, yang terbagi menjadi DKM dewasa juga muda. DKM adalah agen perubahan untuk mengatasi stigma di masyarakat. Saat ini jumlahnya telah mencapai 200 orang tersebar di berbagai kota di Nusantara.

2. O: Optimalkan akses dan pelayanan kesehatan mental bagi masyarakat.

Program ini untuk mengatasi *public stigma*. Dengan ragam fasilitas yang mudah diakses, diharapkan masyarakat makin akrab dan bersahabat dengan tema kesehatan mental. Tentu didukung oleh program yang dipaparkan di poin sebelumnya. Dari pengamatan kami di lapangan, bagi masyarakat yang telah memiliki kemauan besar berobat ke profesional, tetapi seringkali mengurungkan niatnya karena terkendala dengan keterbatasan finansial. Sementara dari sisi profesional, meski sudah dilakukan program subsidi silang, penggalangan donatur, bahkan melakukan beberapa program dilakukan tidak berbayar, tetap terkendala juga melakukan perawatan kesehatan mental ini tanpa adanya biaya operasional yang memadai, terutama dalam skala perawatan pasien berjangka panjang.

3. V: Vaksin mental.

Program ini untuk mengatasi *self stigma*. Program tidak hanya diarahkan melakukan perubahan dari lingkungan eksternal, tetapi yang lebih utama justru melakukan perubahan dari sisi internal, yaitu sisi personal. Saat ini diharapkan kita tidak hanya fokus memberikan masyarakat vaksin pada sakit fisik, khususnya semua varian vaksin COVID-19, tetapi fokus juga memberikan vaksin mental untuk meningkatkan kekebalan mental seseorang, termasuk ketika untuk menghadapi stigma. Di Dandiah Care sudah berjalan program Vaksin Mental Dandiah (VMD01) yang berisi empat puluh ilmu praktis kesehatan mental, yang diikuti oleh 70 orang dan akan dilanjutkan ke gelombang berikutnya. Program vaksin mental ini berbasis pada pendekatan biopsikososial dan spiritual yang dilakukan selama sepuluh bulan, didampingi oleh empat puluh DKM Dandiah dewasa, yang berprofesi psikolog, dokter, pemuka agama, pendidik, konselor, hingga pengusaha. Seseorang yang telah memiliki kekebalan mental yang memadai akan lebih kuat menghadapi stigma dari lingkungan terdekat. Ia tetap bisa berperilaku netral bahkan responsif meski minim atau tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat. Terlebih jika ia melakukan program yang akan dipaparkan di poin terakhir.

4. E: Eratkan diri dengan komunitas kesehatan mental.

Program ini untuk mengatasi *self stigma* sekaligus *public stigma*. Kebutuhan bersosialisasi dengan *circle* pertemanan positif adalah fitrah setiap manusia, terlebih bagi mereka yang merasa sedang di titik terendah dalam hidupnya. Oleh karenanya, hadirnya komunitas kesehatan mental bagai oase sejuk bagi mereka yang sedang sakit mental. Penerimaan dan dukungan dari komunitas pada diri mereka akan dihayati positif dan meningkatkan rasa berharga dirinya. Hal ini investasi yang sangat berharga bagi pemulihan kesehatan mentalnya, termasuk mengokohkan keimanannya. Kami meyakini kehadiran ilmu dan teman akan mengokohkan keimanan seseorang. Dandiah Care hadir sebagai rumah kedua bagi mereka yang membutuhkan pendampingan kesehatan mental, terutama di tema *anger management*, membahas luka pengasuhan, literasi emosi, dan pengembangan bakat (potensi).

Program LOVE ini diharapkan berjalan berkesinambungan untuk bisa mengikis stigma masalah mental di Indonesia, negara ASEAN, juga dunia. Atasi stigma, atasi *mental illness*. Stop menghakimi, mari berempati. *Bye stigma, welcome* jiwa yang sehat dan siap berdaya!*

Referensi

- Barman, Daina. (2022). *21 Men's Mental Health Quotes to Mark Men's Mental Health Month*. Diakses dari: <https://www.vantagefit.io/blog/mens-mental-health-quotes/> (6 Desember 2022)
- Dattani, S., Hannah R., Max R. (2021). *Mental Health*. Diakses dari: <https://ourworldindata.org/mental-health> (6 Desember 2022)
- Humas.rsugm. (2022). *Stigma selama Pandemi COVID-19*. Diakses dari: <https://rsa.ugm.ac.id/id/2022/03/stigma-selama-pandemi-covid-19/> (9 Desember 2022)
- Kemendes RI. (2022). *Pandemi COVID-19 Memperparah Kondisi Kesehatan Jiwa Masyarakat*. Diakses dari: <https://www.kemkes.go.id/article/view/22051400004/pandemi-covid-19-memperparah-kondisi-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>
- Mahmudah, Diah., Birdy, D. (2019). *Anger Management*. Bogor: Zenawa Media Giditama.
- Mahmudah, Diah., Birdy, D. (2019). *Membasuh Luka Pengasuhan*. Bogor: Zenawa Media Giditama.
- Satria. (2022). *Stigma Buruk Gangguan Kesehatan Mental Hambat Pemulihan Pasien*. Diakses dari: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22185-stigma-buruk-gangguan-kesehatan-mental-hambat-pemulihan-pasien> (6 Desember 2022)
- WHO. (2022). *World Mental Health Day 2022: Make mental health & well-being for all a global priority*. Diakses dari: <https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022> (6 Desember 2022)

DANDI BIRDY & DIAH MAHMUDAH berdomisili di Bandung Jawa Barat. Lulusan Psikologi Universitas Padjadjaran angkatan 1996. pernikahannya dikaruniai tiga buah hati: Keisha, Faith, dan Arfi. Keduanya mengelola Biro Psikologi Dandiah Selektia Persona dari tahun 2007 hingga sekarang. Berkhidmat sebagai psikolog, praktisi kesehatan mental keluarga, pegiat parenting, konselor pernikahan dan praktik di Klinik Bocah Indonesia (RS Primaya Tangerang), juga sebagai praktisi Talents Mapping. Menulis buku *Anger Management The Series*, *Trilogy Positive Parenting*, *Literasi Emosi*, *Trip to Forgive*, dan melakukan workshop/training di tema serupa. Menginisiasi Duta Kesehatan Mental juga *Group Support Therapy* di tema *Membasuh Luka Pengasuhan*, *Membayar Utang Pengasuhan dan Ayah Tangguh*. Salah satu program kami adalah *Writing is Healing* yang bermisi ingin menyebarkan syiar psikologi Islam dan kesehatan mental melalui tulisan kepada keluarga di Indonesia & dunia. Hubungi kami di 08121075079. FB: Dandi Birdy & Diah Mahmudah. IG: diahmahmoed77 dan manukaing. Email: dandibirdy@dandiah.com.

Layanan Kesehatan Mental Berbasis Internet untuk Generasi Muda di Negara Berkembang

Ratih Arruum Listiyandini

Menjelang dan sesaat setelah hari kesehatan mental dunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober 2023, terdapat beberapa berita yang memprihatinkan mengenai kondisi kesehatan mental generasi muda di Indonesia. Terdapat serangkaian berita yang mengabarkan bahwa terdapat mahasiswa yang diduga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan berbagai penyebab (Tempo.co, 12 Oktober 2023). Kondisi ini tentu bukanlah hal yang membahagiakan. Terlebih lagi hal ini terjadi pada generasi muda yang merupakan tonggak penerus bagi bangsa kita.

Kondisi yang terjadi pada generasi muda kita melalui pemberitaan media massa tersebut sebenarnya hanyalah fenomena gunung es mengenai masalah kesehatan mental yang terjadi di era saat ini. Hasil penelitian dari para peneliti kesehatan mental global sebenarnya menunjukkan bahwa prevalensi masalah kesehatan jiwa, khususnya terkait dengan kondisi stress, depresi, dan kecemasan pada mahasiswa di seluruh dunia memang dikatakan tinggi. Sebagai contoh, hasil survey World Mental Health International College Student (WMH-ICS) kepada kurang lebih 13.000 mahasiswa di 8 negara berbeda (Australia, Belgia, Jerman, Mexico, Irlandia Utara, Afrika Selatan, Spanyol, Amerika Serikat) yang dipublikasikan pada tahun 2019 di jurnal *Psychological Medicine* menemukan bahwa 30% dari responden penelitian terdeteksi positif memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Terdapat pula penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Fauziyah & Ampuni pada mahasiswa di Yogyakarta dan dipublikasikan tahun 2018 di *Jurnal Psikologi UGM*, yang menemukan bahwa 51% dari partisipan penelitian memiliki gejala depresi ringan hingga berat.

Tingginya tingkat kemunculan masalah kesehatan mental menunjukkan pentingnya intervensi yang efektif dan tepat waktu untuk membangkitkan resiliensi (ketahanan/daya lenting) dalam menghadapi tantangan hidup di kalangan generasi muda. Sayangnya, sebagian besar anak muda yang memiliki masalah kesehatan mental tidak mencari atau menerima perawatan, termasuk di Indonesia. Kendala seperti stigma, meremehkan tingkat keparahan gejala, waktu, dan biaya konsultasi yang tidak terjangkau semuanya telah ditemukan sebagai hambatan untuk mencari bantuan formal di kalangan mahasiswa. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan adanya inovasi dalam menjangkau lebih luas mahasiswa untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan mental yang dapat mengurangi stigma, dapat dijangkau kapan pun dan dimana pun, dan tidak memerlukan biaya mahal. Dalam hal ini, layanan kesehatan mental yang berbasis internet dapat menjadi salah satu solusinya.

Menurut banyak ahli yang dikutip oleh tulisan dari penulis sendiri di *Jurnal Psikologi Ulayat*, menggunakan internet sebagai sarana memberikan layanan kesehatan mental memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan ketersediaan akses dan jangkauan yang lebih luas, mengurangi stigma karena tidak mengharuskan seseorang datang ke klinik/rumah sakit, dan juga memerlukan biaya yang lebih murah, karena dapat menghemat pengeluaran terkait transportasi ataupun sarana untuk kehadiran terapis secara tatap muka. Penggunaan internet untuk layanan kesehatan mental juga dianggap dapat menjadi alternatif di Indonesia, dikarenakan berdasarkan data tahun 2023 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet semakin meningkat hingga mencapai sekitar 200 juta orang, yang sebagian besarnya adalah kalangan muda.

Bentuk layanan kesehatan mental digital sendiri dapat berupa 1) telepsikologi, yaitu bantuan psikologis/psikiatri jarak jauh viamedia komunikasi digital; 2) aplikasi seluler, yang dapat memberikan berbagai bentuk jasa, seperti pemeriksaan awal kesehatan mental, latihan meditasi dan relaksasi, pengisian jurnal harian, maupun konseling daring melalui aplikasi; hingga 3) modul daring terstruktur untuk psikoterapi; hingga chatbot (program komputer berbasis kecerdasan buatan). Layanan ini dapat berdiri sendiri atau bersifat tambahan atas psikoterapi tradisional (tatap muka).

Kemajuan akan akses layanan kesehatan mental digital di Indonesia bisa dikatakan cukup progresif dibandingkan di negara ASEAN lainnya dan semakin berkembang di masa pandemic Covid-19 hingga saat ini. Mulai menjamurnya berbagai platform aplikasi kesehatan mental digital, seperti Riliv, yang sudah diunduh lebih dari 500.000 kali di Google Playstore, menunjukkan adanya kebutuhan dan popularitas yang tinggi dari bentuk layanan kesehatan digital ini di Indonesia. Sebagian besar lembaga layanan konsultasi psikologi saat ini juga sudah menyajikan layanan konseling online, melalui Zoom, Google Meet, atau aplikasi yang mereka kembangkan sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan layanan digital untuk kesehatan mental sebenarnya menjanjikan untuk diterapkan di negara berkembang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara ASEAN lainnya. Namun demikian, kita juga perlu sadar bahwa berbagai bentuk layanan kesehatan mental digital ini belum semuanya teruji secara ilmiah. Di antara negara berkembang di ASEAN, penelitian mengenai efektivitas layanan berbasis internet masih sangat langka. Hanya ada satu penelitian yaitu yang dilakukan di Indonesia, yaitu oleh Retha Arjadi dan dipublikasikan di *Lancet Psychiatry* tahun 2019, yang menemukan bahwa terapi aktivasi perilaku melalui internet disertai dukungan dari konselor dapat dikatakan efektif untuk menangani depresi pada individu di Indonesia yang berusia lebih dari 16 tahun.

Melihat potensi ini, maka dibutuhkan lebih banyak penelitian mengenai hal ini di Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Semoga ke depannya, layanan Kesehatan mental digital yang diberikan kepada Masyarakat adalah intervensi yang sudah terjamin aman dan efektif untuk kemudian bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Bukan hanya untuk meningkatkan Kesehatan mental generasi muda saja, tapi juga bisa menjangkau berbagai populasi lainnya.*

RATIH ARRUUM LISTIYANDINI adalah psikolog, dosen, dan peneliti kesehatan mental. Ia mengajar di Fakultas Psikologi Universitas YARSI Jakarta. Menamatkan PhD dari School of Psychology, UNSW Sydney.

Misi U.S. – ASEAN dan ASEAN Health Cluster 3 Penguatan Sistem Kesehatan dan Akses Terhadap Perawatan

Anshar Saud

A **ANNUAL 10th U.S.- ASEAN Summit**, 12 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja menjadi momentum bagi Presiden Biden dan para pemimpin ASEAN meluncurkan *The U.S. – ASEAN Comprehensive Strategic Partnership* (CSP). Tanda perluasan hubungan Amerika Serikat (AS)-ASEAN pada lima proses dialog tingkat tinggi terkait kesehatan, transportasi, pemberdayaan perempuan, lingkungan serta iklim dan energi. Sebelumnya dalam sambutannya di *U.S.-ASEAN Special Summit*-perayaan 45 tahun kemitraan dan persahabatan ASEAN dan AS di Washington, D.C, 12 Mei 2022, Presiden Biden menyebut sebuah era baru hubungan U.S. – ASEAN sejak dialog pertama di Manila, 1977. Era baru dengan komitmen untuk melawan pandemi Covid-19, membangun keamanan kesehatan yang lebih baik, dan pulih bersama; memperkuat ikatan ekonomi dan konektivitas; mempromosikan kerjasama maritim; meningkatkan konektivitas *people-to-people*; mendukung pembangunan daerah; memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inovasi; mengatasi perubahan iklim; menjaga perdamaian, dan membangun kepercayaan (U.S. Department State, 2022: White House, May 13, 2022; White House, November 12, 2022)

Misi AS – ASEAN di bidang Kesehatan

AS mendukung upaya pemulihan pandemi dan keamanan kesehatan ASEAN dengan memperkuat sistem dan kemampuan kesehatan regional dan nasional, seperti melalui *ASEAN-U.S. Initiative Health Futures*, dan berkomitmen untuk pembiayaan global yang memadai, lebih kuat, dan berkelanjutan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, termasuk mendukung upaya berkelanjutan dengan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam menyambut dukungan yang diberikan oleh *ASEAN Dialogue Partners* melalui berbagai inisiatif, termasuk *Quad Vaccine Partnership*, AS tetap berkomitmen untuk memfasilitasi akses yang setara terhadap obat dan layanan kesehatan yang aman, terjangkau dan berkualitas. AS juga berkomitmen untuk memperluas kapasitas produksi berkelanjutan lokal dan regional untuk produk medis penting, termasuk melalui transfer pengetahuan tentang ketentuan sukarela dan kesepakatan bersama serta penyediaan bantuan teknis. AS berkomitmen untuk berinvestasi dan memperkuat sistem kesehatan melalui *Universal Health Coverage*, khususnya perawatan kesehatan primer dan akses ke layanan kesehatan esensial, serta memperluas dan melatih tenaga kesehatan sebagai dasar yang kuat untuk kesehatan dan keamanan kesehatan regional dan global (U.S. Mission to ASEAN, 2022)

AS telah memberikan lebih dari 32 juta dosis vaksin kepada anggota ASEAN, berkomitmen lebih dari \$200 juta untuk upaya bantuan COVID-19 di Asia Tenggara, dan menyumbangkan \$500.000 untuk *COVID-19 ASEAN Response Fund*. Pada KTT COVID-19 pada 22 September 2022, Presiden Biden berkomitmen untuk memasok 500 juta dosis vaksin tambahan secara global, sehingga total komitmen AS menjadi lebih dari 1,1 miliar. *U.S.-ASEAN Health Futures* mengembangkan kemitraan jangka panjang untuk memajukan tujuan bersama untuk masa depan yang sehat, dengan membangun bantuan kesehatan masyarakat AS sebesar \$3,5 miliar untuk ASEAN selama dua dekade terakhir. Presiden Biden mengumumkan \$102 juta untuk memperluas Kemitraan Strategis AS-ASEAN selama KTT AS-ASEAN 26 Oktober 2022. Ini termasuk \$40 juta untuk *Health Futures*, \$20,5 juta untuk *Climate Futures*, \$20 juta untuk *Economic Futures*, dan \$21,5 juta untuk *Billion Futures*. Selain itu, AS telah memberikan lebih dari \$200 juta kepada negara-negara ASEAN untuk memerangi krisis Covid-19 (U.S. Mission to ASEAN, 2022).

Platform *U.S.-ASEAN Health Futures* mendukung bantuan AS yang ada dan diperluas untuk kesehatan masyarakat dan memerangi penyakit menular di negara-negara ASEAN, dengan fokus pada penelitian, kapasitas sistem kesehatan, dan mengembangkan generasi profesional kesehatan berikutnya. USAID telah memperluas akses ke teknologi terancang

untuk menguji tuberkulosis di seluruh provinsi di Indonesia. Sejak 2016, USAID telah menyediakan 82 mesin laboratorium GeneXpert yang membantu mempercepat diagnosis TB yang resisten terhadap obat dari dua bulan menjadi dua jam. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia, dengan bantuan dari *Global Fund*, membeli lebih dari 900 mesin GeneXpert untuk semakin meningkatkan jangkauan nasional (U.S. Mission to ASEAN, 2022).

Investasi lima tahun USAID (2011-2017) meningkatkan layanan medis dan sistem rujukan darurat di 150 rumah sakit dan 300 puskesmas di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Peningkatan tersebut berkontribusi pada penurunan 50% angka kematian ibu dan 21% penurunan angka kematian bayi di fasilitas tersebut. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia berkomitmen sebesar \$7 juta untuk meningkatkan upaya USAID dalam mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir (U.S. Mission to ASEAN, 2022).

Pemerintah A.S. memberikan lebih dari \$6 juta bantuan kesehatan untuk membantu Pemerintah Kamboja mempersiapkan sistem laboratorium, meningkatkan tindakan pengendalian infeksi, mengaktifkan penemuan kasus dan pengawasan berbasis kejadian, mengkomunikasikan risiko, dan mendukung pakar teknis untuk tanggapan dan kesiapsiagaan. Wakil Presiden Kamala Harris meluncurkan Kantor Regional Asia Tenggara *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) AS di Hanoi bersama Wakil Perdana Menteri Vietnam dan Menteri Kesehatan dari ASEAN dan Papua Nugini. Kantor CDC akan memajukan keamanan kesehatan global dengan mempertahankan keberadaan yang berkelanjutan di wilayah tersebut, memungkinkan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap ancaman kesehatan dan memperkuat misi inti CDC untuk melindungi orang Amerika. Diharapkan kerjasama ini akan meningkatkan akses, keterjangkauan, kesadaran, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk pasien berpenghasilan rendah-menengah di negara-negara regional tersebut. AS juga akan mendukung *ASEAN Center for Pandemic Health Emergencies and Emerging Diseases* (ACPHEED) termasuk melalui bantuan USAID dan *U.S. Center for Disease Control* yang akan menugaskan penasihat teknis regional untuk mensupport ACPHEED dalam area pengembangan tenaga kerja, pencegahan dan pengawasan infeksi, resistensi antimikroba, surveilans penyakit pernapasan dan penyakit hewan (U.S. Mission to ASEAN, 2022).

AS juga mengembangkan sumber daya manusia dalam kesehatan: Membina generasi profesional perawatan kesehatan berikutnya adalah bagian penting dari tujuan bersama untuk masa depan yang sehat. Upaya meliputi: melalui jaringan alumni *US-ASEAN Health Futures* yang baru diluncurkan, AS menghubungkan 2.400 sarjana tamu medis dan kesehatan masyarakat ASEAN dan alumni program untuk berbagi praktik terbaik dan terlibat langsung dengan pakar AS; mendukung dokter ASEAN, peserta pelatihan kesehatan masyarakat, dan mahasiswa sains untuk belajar dari ahli AS melalui pertukaran pendidikan Fulbright, *International Visitor Leadership Program*, dan pertukaran warga lainnya (U.S. Mission to ASEAN, Apr 23, 2022)

ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (APHDA) 2021-2025

Dipandu oleh Visi ASEAN 2025 dan Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 2025, dan diselaraskan dengan arah dan tren kesehatan global, sektor kesehatan ASEAN mengadopsi *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (APHDA) yang merangkum tujuan, strategi, prioritas bersama dan program bidang kesehatan antara tahun 2016-2020. Agenda ini kemudian disempurnakan dalam *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (APHDA) 2021-2025 dengan visi: "Komunitas ASEAN yang Sehat, Peduli dan Berkelanjutan". Dan misi: "Untuk memastikan Komunitas ASEAN yang sehat, peduli dan berkelanjutan dengan mempromosikan gaya hidup sehat, menanggapi semua bahaya dan ancaman yang muncul, memperkuat sistem kesehatan dan akses ke perawatan, dan memastikan keamanan pangan". (ASEAN Sekretariat, 2016; ASEAN, 2022).

Empat klaster dari APHDA 2021-2025 ini adalah: *Klaster 1* tentang Mempromosikan Gaya Hidup Sehat; *Klaster 2* tentang Menanggapi Semua Bahaya dan Ancaman yang Muncul; *Klaster 3* tentang Penguatan Sistem Kesehatan dan Akses terhadap Perawatan; dan *Klaster 4* tentang Memastikan Keamanan Pangan. Artikel ini berfokus pada klaster 3 yang populer disebut dengan *ASEAN Health Cluster 3* yang sedikit banyak terkait dengan konsen penulis yaitu aspek obat dan pelayanan kefarmasian.

APHDA 2021-2025 memiliki tiga sasaran utama, yaitu: *Pertama*, Untuk memberikan Komunitas ASEAN akses universal terhadap perawatan kesehatan holistik yang aman, terjangkau, berkualitas, dan pasokan medis esensial, termasuk obat-obatan tradisional dan komplementer. *Kedua*, Untuk memajukan pemberian layanan kesehatan dengan beradaptasi terhadap inovasi dan teknologi kesehatan digital. *Ketiga*, Untuk mempromosikan pemberian layanan kesehatan kepada populasi rentan, antara lain, perempuan, anak-anak dan pekerja migran. (ASEAN, 2022)

ASEAN Health Cluster 3: Penguatan Sistem Kesehatan dan Akses terhadap Perawatan

Klaster 3 memiliki prioritas kesehatan dengan penekanan pada: obat tradisional dan komplementer; kesehatan reproduksi, ibu, neonatal, dan anak; cakupan kesehatan universal, termasuk pembiayaan kesehatan dan pemberian layanan kesehatan; kesehatan migran; pengembangan farmasi; sumber daya manusia kesehatan; sistem informasi kesehatan dan kesehatan digital.

Berbagai strategi telah ditempuh: *Pertama*, Penguatan kinerja pembangunan sistem kesehatan yang tangguh. *Kedua*, Advokasi peningkatan akses perawatan kesehatan dan obat-obatan esensial dan vaksin yang aman, terjangkau, berkualitas pengobatan tradisional dan komplementer bagi masyarakat ASEAN, khususnya penduduk khusus. *Ketiga*, Mempromosikan pencapaian keamanan dan kemandirian vaksin dengan mempercepat operasionalisasi strategi *ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR)*. *Keempat*, Mengembangkan dan menerapkan strategi kolaboratif regional untuk *ASEAN Drug Security and Self-Reliance (ADSSR)*. *Kelima*, Mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan sistem manajemen pengetahuan yang dapat dioperasikan dan aman untuk sektor kesehatan ASEAN untuk mengakses pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan. *Keenam*, Mempromosikan pemanfaatan teknologi kesehatan digital, R&D dan inovasi, dalam memajukan sistem dan akses kesehatan peduli. *Ketujuh*, Advokasi untuk tingkat sumber daya kesehatan yang memadai, yang meliputi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM) dan pembiayaan kesehatan.

Tema dan Prioritas ASEAN Health Cluster 3

Beberapa prioritas kesehatan (*Health Priority/HP*) yang termaktub dalam *ASEAN Health Cluster 3* sangat erat kaitannya dengan obat, sistem kesehatan, perawatan kesehatan dan farmasi. Kesemuanya terikat dalam tema sesuai pengelompokan masing-masing-masing.

Tema 1: HAK/AKSES TERHADAP KEMASAN BARANG DAN JASA YANG TERJANGKAU (perspektif pengguna akhir) terdiri dari: HP 14 : Pengobatan Tradisional & Komplementer; HP 16: Cakupan Kesehatan Universal, termasuk pembiayaan kesehatan dan pemberian layanan kesehatan; HP 20: Sistem informasi kesehatan dan kesehatan digital.

Tema 2: KETERSEDIAAN DAN KUALITAS PELAYANAN (perspektif penyedia) yang terdiri dari: HP 16: Cakupan kesehatan universal termasuk pembiayaan kesehatan dan pemberian layanan kesehatan; HP 18: Pengembangan farmasi; HP 19: Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan; HP 20: Sistem informasi kesehatan dan kesehatan digital.

Tema 3: LAYANAN UNTUK PENDUDUK KHUSUS, terdiri dari HP 15: Kesehatan Reproduksi, Ibu, Neonatal, dan Anak; HP 16: Cakupan kesehatan universal termasuk pembiayaan kesehatan dan pemberian layanan kesehatan; dan HP 17: Kesehatan migran (The ASEAN Secretariat, 2022).

Khusus di bidang farmasi di kawasan ASEAN terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian: Pertama, Akses terhadap obat esensial. Kedua, Keamanan dan kemandirian obat. Ketiga, Memerangi obat substandar dan palsu (ASEAN, 2022). Jika melihat komitmen dan upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam mengatasinya, kita dapat katakan bahwa *we are on the right track*.

Terima kasih Amerika, Terima kasih Pemimpin ASEAN

Telah banyak komitmen dan rencana kerja yang dibuat, baik oleh *U.S. Mission to ASEAN* dan juga ASEAN sendiri. Mulai dari pernyataan rilis hingga ke tahap rencana aksi. Begitu pula dengan upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Banyak program yang berhasil dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi komunitas ASEAN, namun masih ada yang belum menampakkan hasil optimal.

Seperti yang disampaikan oleh Koh (2019) bahwa negara Anggota ASEAN telah membuat langkah besar dalam dekade terakhir untuk mencapai tujuan bersama. ASEAN telah meningkatkan komitmen politiknya terhadap cakupan kesehatan universal (UHC), yang telah menghasilkan kemajuan nyata seperti yang ditunjukkan oleh semakin tersedianya layanan kesehatan preventif dan kuratif di seluruh kawasan. Lanjutnya, ke depan kita akan menghadapi tantangan perawatan kesehatan yang baru dan muncul kembali seperti meningkatnya biaya perawatan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak memadai, populasi yang menua, transisi epidemiologis yang sedang berlangsung yang ditandai dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular, dan ancaman penyakit menular yang terus-menerus. Masyarakat ASEAN telah memanfaatkan berbagai metode inovatif untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Penting bagi kita

untuk terus mempelajari praktik terbaik satu sama lain sehingga kawasan ini dapat mengatasi tantangan ini bersama (The ASEAN Secretariat, 2019).

Kita mesti berterima kasih kepada Presiden Obama dan Presiden Biden, komitmen dua pemimpin ini dalam dua dekade terakhir telah menjadi cermin bagaimana rakyat Amerika secara tulus ingin berkontribusi untuk dunia (termasuk ASEAN) yang lebih baik, lebih sehat dan damai. Kita juga sepatutnya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang memimpin dengan baik tim kabinetnya di Indonesia, ASEAN juga G20 Forum secara gemilang walaupun tantangannya tidak mudah. Misi A.S. – ASEAN sangat boleh dikatakan berhasil. Kiprah Duta Besar *U.S to ASEAN* dan para pemimpin ASEAN, khususnya Indonesia sebagai salah satu *regional leader* sangat patut diacungi dua jempol.*

Referensi

- ASEAN. (2022). *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (APHDA) 2021-2025* https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/1.-Summary_ASEAN-Post-2015-Health-Development-Agenda-2021-2025_16th-SOMHD-endorsed-1.pdf , diakses 31 Desember 2022.
- ASEAN. (2022). Desember 2022. *Priority Areas of Cooperation*. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/health/priority-areas-of-cooperation/> , diakses 31 Desember 2022
- The ASEAN Secretariat. (2019). *Strengthening Health Systems And Access To Care Best Practices In Asean*. Jakarta, Author
- The ASEAN Secretariat. (2020). Desember 12, 2020. *Regional Collaborative Strategy for ASEAN Drug Security and Self-Reliance* <https://theaseanmagazine.asean.org/article/regional-collaborative-strategy-for-asean-drug-security-and-self-reliance/> ,diakses 31 Desember 2022
- The ASEAN Secretariat. (2021). *Health Cluster 3: Strengthening Health System And Access To Care* https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Agd-8.3_3.-ASEAN-Health-Cluster-3-Work-Programme_Endorsed-SOMHD.pdf , diakses 31 Desember 2022
- The ASEAN Secretariat. (2022). https://asean.org/wp-content/uploads/2022/07/Summary_ASEAN-Post-2015-Health-Development-Agenda-2021-2025_FINAL_adopted-15th-AHMM_May-202239.pdf
- The ASEAN Secretariat. (2016). *Asean Socio-Cultural Community Blueprint 2025*. Jakarta, Author.
- The White House. (2022). May 13, 2022. *ASEAN-U.S. Special Summit 2022, Joint Vision Statement*.<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/13/asean-u-s-special-summit-2022-joint-vision-statement/> diakses 31 Desember 2022
- The White House. (2022). Nov 12, 2022. *ASEAN-U.S. Leaders' Statement on the Establishment of the ASEAN-U.S. Comprehensive Strategic Partnership*, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/12/asean-u-s-leaders-statement-on-the-establishment-of-the-asean-u-s-comprehensive-strategic-partnership/> , diakses 31 Desember 2022
- U.S. Department of State. (2022). Agustus 3, 2022. *The United States-ASEAN Relationship*. <https://www.state.gov/the-united-states-asean-relationship/> , diakses 31 Desember 2022
- U.S. Mission to ASEAN. (2022). *Enhancing Health System*. April 1, 2022 <https://asean.usmission.gov/enhancing-health-systems/> diakses 31 Desember 2022
- U.S. Mission to ASEAN. (2022). April 23 2020. *U.S. – ASEAN Health Futures*. <https://asean.usmission.gov/u-s-asean-health-futures/> , diakses 31 Desember 2022

ANSHAR SAUD adalah dosen pengajar Farmasi Sosial Behavioral dan Administratif pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Pendidikan Sarjana Farmasi dan Apoteker ia peroleh di Universitas Hasanuddin. Gelar Magister Farmasi diperolehnya dari Universitas Indonesia. Ia adalah alumni *FIP-Pharmabridge* (Mar-Apr 2018) dari Pacific University Oregon, AS, dan juga *Visiting Scientist* (Dec 2021-Mar 2022) pada *Department of Social Behavioral and Administrative Pharmacy*, Nova Southeastern University Florida, Amerika Serikat.

Kebangkitan Sosioekonomi Negara ASEAN Pasca Pandemi

Reno Yonora

Pandemi membuat negara-negara ASEAN terpuruk. Ya, dan bukan hanya negara ASEAN, pandemi bergulir secara global berimbas termasuk ke negara-negara adi kuasa. Pandemi global berkepanjangan tidak hanya merenggut sekian banyak manusia secara fisik, tapi juga menggerus berbagai sisi peradaban dunia. Membuat kita kehilangan, runtuh, mematahkan dan merapuhkan berbagai pondasi yang selama ini menjadi tempat kita berpijak, bahkan sampai membungkam kita secara psikis dan verbal.

Kita yang tertinggal adalah sebagian yang beruntung karena masih diberi kesempatan kedua untuk masih berada di sini, walau dalam kerapuhan dan ketimpangan situasi dan kondisi, mau tidak mau kita tetap harus segera menata ke depan. Salah satu yang paling mungkin kita lakukan adalah mulai menggali berbagai aspek positif dan secara aktif menggalang optimisme untuk bisa keluar dari situasi keterpurukan global yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Kita masih bisa mengumpulkan berbagai kekuatan lain yang tersisa, dan menjaring semangat untuk membangun kembali pondasi-pondasi yang kuat.

Hadirnya pandemi secara tiba-tiba, seperti serangan yang secara cepat membuat kondisi sumbu dunia seperti terhenti, percikannya mampu membuat lapisan demi lapisan struktur penghuni terbanyak di muka bumi terkikis akhirnya tumbang hampir bersamaan tanpa bisa kita sempat memproteksi lebih awal, memberi dampak besar bagi kemunduran kualitas kehidupan secara umum hampir merata di semua negara. Tidak hanya menurunkan, pandemi juga berhasil merubah tatanan kehidupan dari mulai kesehatan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan aneka ranah kehidupan lainnya, yang tentu saja berimbas pada perubahan kesejahteraan masyarakat dalam skala besar.

Buruk dan sebagian besar terpuruk, itulah yang dialami di berbagai negara di berbagai benua, tidak hanya ASIA tapi juga sampai ke Benua Eropa dan Amerika. Bangkit? Tentu saja ini bisa lebih mudah dilakukan oleh negara-negara maju. Tapi untuk benua Asia yang relatif dipenuhi oleh negara-negara berkembang, bangkit dari pandemi bukan hal yang mudah. Selain pandemi masih belum benar-benar berakhir, pandemi Covid-19 tidak hanya merenggut nyawa dan memperberat pelayanan kesehatan, tapi juga merenggut dan meluluhlantakkan perekonomian dan psikososial, karena banyak masyarakat yang dimiskinkan dan mendapat dampak traumatik yang berat.

Adalah menjadi kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari negara ASEAN, walau keanggotaannya didominasi negara-negara berkembang, ASEAN memiliki kenyamanan geografis, perguliran ekonomi yang cukup dan kekayaan alam yang berbeda dengan negara super power. Bisa dibilang secara umum nyaman. Kenyamanan ini sempat tergerus oleh pahitnya pandemi dan meninggalkan aneka masalah baru. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah: apakah kita bisa benar benar bangkit dari pandemi? Bagaimana strategi menuju ke sana?

Paling tidak kita masih punya banyak pemikir brilian, yang bisa memberikan ide cemerlang, membuat rencana ke depan untuk segera bangkit dan berangkat dari keterpurukan, mulai terbiasa hidup seperti biasa tanpa merasa terkurung walau masih terselubung selimut Pandemi Global.

Tentu saja ini tidak mudah, berbagai pertanyaan yang dulu mungkin lebih mudah dijawab tapi kini terasa lebih sulit, karena situasi yang ditawarkan oleh pandemi global membuat kita tidak mudah untuk kembali ke situasi awal perlu penyesuaian berbagai sisi. Berbagai pemikiran dan keinginan mencari solusi untuk bisa keluar dari lingkaran kepelikan ini.

Bagaimana kita memulainya? Mari coba kita konsepkan bersama.

SENDIRI ATAU BERSAMA SAMA.

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Tetap prinsip ini akan menjadi patokan yang paling masuk akal. Sebagai kumpulan dari mayoritas negara-negara berkembang, kita ASEAN harus saling menguatkan, bentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral akan menjadi pilihan memulai yang tepat. Masing-masing negara anggota ASEAN dengan kelebihan dan kekurangannya bisa menjadi aset kerja sama yang mutualisme. Tak masalah dari sisi mana yang mau dibangun bersama lebih dulu, tergantung dari kebutuhan masing-masing negara anggota dan titik temu mana yang berhasil digali. Pengerucutan masalah dan skala prioritas tentu menjadi patokan yang harus dipastikan mana yang akan dilakukan lebih dulu, karena begitu banyaknya sisi yang harus diperbaiki akibat dampak pandemi.

Dampak pengeroposan ekonomi pasca pandemi di berbagai negara pasti membutuhkan dukungan modal yang cukup dari negara lain yang masih mampu secara finansial. Kerjasama dan kembalinya saling *trust* antarnegara diharapkan bisa memberi angin segar bagi pemulihan masa sulit ini agar bisa bangkit kembali. Sendiri atau bersama-sama.

KESEHATAN MENJADI SOROTAN PONDASI

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menempatkan kesehatan menjadi prioritas perhatian dalam memulai pemulihan dan menjadi tolak ukur *possibility* dari *plan project* untuk bisa membawa negara-negara ASEAN bangkit dari pandemi. Pandemi yang menyerang sisi kesehatan berhasil melumpuhkan, meskipun dan mem 'pause' rutinitas kita secara hampir serentak dan secara global. Mengunci ruang gerak dan interaksi bahkan seperti terkurung dalam sel tal berjeruji di dalam rumah sendiri. Mengapa? Karena ternyata semodern atau secanggih apapun pelayanan kesehatan kita harus jujur kita akui ternyata kita tidak siap saat pandemi hadir.

Maka salah satu yang harus menjadi sorotan dalam memulai bangkit adalah, prioritaskan porsi bidang kesehatan agar pandemi tidak terulang lagi dan ke depan kita harus lebih siap dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat kesehatan lainnya. Mari kita siapkan strategi bidang kesehatan agar tidak membuat kita tergelincir lagi dan mencegah terjadinya kerusakan skala besar dan kelumpuhan sosioekonomi secara global.

STRATEGI MEMBANGKITKAN SOSIOEKONOMI

Bukan hal yang mudah untuk merapikan kembali situasi sosioekonomi yang porakporanda pasca pandemi. Dampak psikis karena permasalahan ekonomi serta kondisi beratnya untuk memulai suatu usaha baru dalam ekonomi yang terpuruk menjadi kendala utama. Belum banyaknya status baru dalam keluarga. Dulu kita membahas bagaimana strategi peningkatan perekonomian ke depan, itu karena secara mental, fisik dan kondisi kita sudah dalam posisi siap untuk menerima strategi itu. Tapi dengan situasi pandemi global berkepanjangan ini, kita belum tentu dalam kondisi yang sama. Secara mental, fisik dan kondisi kita sedang dalam posisi mundur ke belakang. Kalaupun berjalan ke depan, kita dalam posisi tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak hanya pada lapisan individual tapi juga di lapisan pengusaha berskala besar. Tapi pandemi global berkepanjangan ini seolah membentuk komunitas dadakan yang membutuhkan perhatian kita untuk memastikan mereka tetap bisa menjalani kehidupan mereka dengan kualitas dan rasa optimis yang positif. Siapa saja mereka? Komunitas baru itu: anak-anak yang tiba-tiba harus menjadi mandiri dan tulang punggung keluarga karena kehilangan orang tua mereka, komunitas pengangguran yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan karena PHK massal atau kehilangan mata pencaharian rutin karena turunnya daya beli. Miris, tapi itu realita yang menjadi PR kita bersama.

Strategi yang bisa kita awali adalah dengan membaginya dalam beberapa poin penting:

1. Skala perbaikan dari paling kecil sampai paling besar
 - a. Individual
 - b. Kelompok
 - c. Perusahaan kecil
 - d. Perusahaan menengah
 - e. Perusahaan besar

2. Bidang sorotan pemulihan :
 - a. Kesehatan Fisik
 - b. Kesehatan mental dan psikis
 - c. Sosial interaksi
 - d. Ekonomi secara menyeluruh
3. Jenis upaya pemulihan
 - a. Membantu lapangan usaha
 - b. Membantu permodalan
 - c. Membantu terwujudnya kerjasama antar bidang kebutuhan
 - d. Membantu terwujudnya kerjasama antar negara
4. Menentukan skala prioritas yang akan dikerjakan, mungkin bisa kita dimulai dari
 - a. Paling dibutuhkan
 - b. Paling mungkin di kerjakan
 - c. Paling besar efek manfaatnya
 - d. Paling kecil risikonya

Ini hanya sebagian kecil strategi awal yang bisa kita mulai. Saya berharap ini bisa sedikit memberi masukan positif dan memancing strategi lanjutan yang lebih *real* dalam pelaksanaan di lapangan. Mari bangkit. Salam pemulihan bersama. Anggaplah pandemi global berkepanjangan ini sebagai teguran bagi kita, selama ini kita membuat strategi dengan memikirkan variabel pengganggunya adalah bencana, konflik antar negara, krisis inflasi dan sebagainya. Tapi serangan virus Covid-19 yang tidak diprediksikan kehadirannya ini ternyata berhasil menggerus tatanan kehidupan kita sampai ke tahap yang paling mendasar. Saat itulah kita diingatkan untuk memiliki kembali rasa itu dengan membuka nurani kita untuk memasukkan kemampuan variabel perekonomian individual sebagai variabel yang harus masuk dalam strategi kita menuju tahap stabilisasi perekonomian skala besar.

Saatnya Negara-negara ASEAN saling peduli. Mari kita mulai memaknai arti kata HUMANITY sebagai *Human with community* - bahwa setiap manusia tidak bisa hidup sendiri maka dia harus bisa berinteraksi dengan komunitas di lingkungannya, dan sebagai komunitas yang bernurani amatlah bijaksana jika anda ingin melangkah maka melangkahlah bersama setiap individu yang ada di dalamnya.*

RENO YONORA adalah dokter spesialis anastesiologi di RS. Siloam Bekasi Timur. Ia juga aktif pada Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia (Gekrafs).

Budidaya Tanaman Lokal sebagai Upaya Menekan Laju Penyakit Diabetes Mellitus di ASEAN

Anita Restu Puji Raharjeng

Menurut laporan International Diabetes Federation (IDF), saat ini 60 persen populasi DIABETES DUNIA ada di ASIA. POSISI penderita diabetes di Indonesia mencapai 41,8 ribu orang pada 2022 (Ahdia, 2023). Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita diabetes tipe 1 terbanyak di ASEAN, serta peringkat ke-34 dari 204 negara di skala global. Mayoritas penderita diabetes tipe 1 di Indonesia berusia antara 20-59 tahun.

Dioscorea alata diketahui telah banyak digunakan dalam terapi diabetes mellitus, namun masih sedikit bukti spesifik mengenai mekanisme aksi untuk penyembuhan diabetes dengan umbi *D. alata* ini, tetapi kandungan flavonoid, alkaloid dan glikosida pada suatu tanaman diketahui dapat menjadi buffer untuk penanganan penyakit diabetes (Mukesh and Namita, 2013). *Dioscorea* telah lama digunakan dalam terapi diabetes dalam pengobatan tradisional karena kemampuannya untuk menurunkan kadar gula darah (Iwu *et al.* 1990), karena kandungan alkaloid (dioscoretin) yang dimilikinya mampu mengontrol kondisi hiperkolesterol, hiperlipidemia dan hiperketonemia (Malviya *et al.* 2010).

Dioscorea alata L. adalah salah satu umbi yang menempati peringkat ketiga jenis umbi yang dibudidayakan di daerah tropis di dunia (Dufie *et al.* 2013). Umbi *D. alata* diketahui memiliki nilai gizi yang tinggi dan berpotensi sebagai anti diabetes. China, Afrika Barat, Asia Selatan dan Kepulauan Karibia adalah wilayah yang banyak memanfaatkan *D. alata* ini sebagai makanan pokok dan obat herbal (Shih *et al.* 2015). Penelitian mengenai berbagai produk alami bioaktif dari *D. alata* sebagai sumber potensial agen antidiabetik yang efektif, telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. *D. alata* dapat menunda perkembangan penyakit diabetes dan mengubah kelainan metabolisme melalui berbagai mekanisme aksi. *D. alata* digunakan untuk mencegah dan mengelola diabetes karena memiliki senyawa bioaktif seperti dioscorin, amilopektin, flavonoid, inulin, fenol, allantoin, sapogenin, pro-sapogenin, gracilin, kolin, L-arginin, pollysaccharida dan protein. Berbagai kandungan senyawa bioaktif tersebut, terutama dioscorin meningkatkan potensi umbi tanaman ini untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan diabetes (Hou *et al.* 2001; Zhang *et al.* 2004; McAnuff 2005; Liu *et al.* 2007; Son *et al.* 2007; Liu *et al.* 2008; Niu *et al.* 2010, Winarti dkk. 2011).

Umbi *D. alata* memiliki potensi dalam terapi diabetes mellitus diketahui memiliki kandungan bahan aktif yang mampu menghambat aktivitas enzim yang berhubungan dengan diabetes, seperti alfa-amilase dan alfa-glukosidase, serta glikasi non enzimatis yang dimungkinkan dapat mengakibatkan terjadinya patogenesis pada komplikasi diabetes (Guo *et al.* 2015). Kandungan lain dari ekstrak umbi *D. alata* yang penting bagi terapi diabetes adalah adanya kemampuan untuk mengurangi stress oksidatif yang diinduksi oleh asam lemak bebas dan kemampuan untuk mengurangi kondisi resisten insulin pada sel HepG2, selain itu juga disebutkan memiliki kemampuan untuk memodulasi aktivitas antioksidan dengan melepaskan Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) sehingga dapat meningkatkan fungsi sel beta pankreas (Guo *et al.* 2015).

Meskipun memiliki banyak keunggulan, namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui jenis umbi ini, karena di wilayah ASEAN sendiri keberadaannya mungkin tidak seumum beberapa jenis umbi lain seperti ubi jalar (*Dioscorea esculenta*) atau ubi kayu (*Manihot utilisima*). Beberapa faktor yang mempengaruhi sejauh mana suatu jenis umbi seperti ubi ditemukan atau digunakan di suatu daerah termasuk faktor iklim, budaya, dan preferensi lokal.

Di negara-negara ASEAN, tanaman *D. alata* memiliki banyak nama lokal, yaitu sebagai berikut:

- Indonesia: Uwi beras, Uwi elus, Uwi butun, Uwi alas, Uwi Kuning, Uwi legi, Uwi manis, Uwi kelapa, Uwi putih, Uwi ungu, Uwi ulo), Obi (Obi acan, Obi elos), Ubi kelapa, Huwi, lame, Ubi, Lutu, Same, Palulu, Luwangu, dll
- Malaysia: Ubi Keledak Ungu

- Filipina: Ube
- Thailand: Man Kaew
- Vietnam: Khoai Lang Tim
- Laos: Man Ma
- Myanmar: Taung Kwel Kyin.

Tingginya kasus diabetes di ASEAN, membuat kita sebagai warga ASEAN perlu melakukan tindakan nyata, dengan cara menggalakkan konsumsi tanaman lokal seperti *D. alata*, dan melakukan budidaya *D. alata* agar dapat memberikan beberapa manfaat yang tidak hanya tentang tindakan pencegahan dan penanganan awal indikasi diabetes, namun juga hal lain sebagai berikut:

- Nilai Gizi: *D. alata* adalah sumber karbohidrat kompleks, serat makanan, vitamin, dan mineral yang baik. Ini mengandung nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin A, dan serat makanan, yang dapat berkontribusi pada pola makan seimbang.
- Keberlanjutan: Menanam tanaman lokal dapat mendorong keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan transportasi jarak jauh.
- Makna Budaya: *D. alata* sering menjadi bagian integral dari pola makan tradisional di banyak negara ASEAN. Ini memiliki makna budaya dan kuliner dan digunakan dalam berbagai hidangan lokal dan makanan penutup.
- Manfaat Ekonomi: Budidaya *D. alata* dan tanaman lokal lainnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Tanaman ini dapat menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja.
- Keanekaragaman hayati: Mempromosikan tanaman lokal seperti *D. alata* dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati dengan mempertahankan budidaya varietas tanaman tradisional dan asli.

Untuk mendorong budidaya *D. alata* dan tanaman bergizi lokal lainnya, maka penting bagi kita untuk melakukan hal hal sebagai berikut:

- Memberikan Edukasi: Petani harus diberikan edukasi tentang manfaat budidaya tanaman ini, termasuk nilai gizi dan potensi pasarnya.
- Mendukung Penelitian: Upaya penelitian dan pengembangan dapat membantu meningkatkan hasil panen, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas tanaman secara keseluruhan.
- Mempromosikan Inovasi Kuliner: Mendorong penggunaan *D. alata* dalam berbagai hidangan untuk meningkatkan profilnya dan membuatnya lebih menarik bagi konsumen.
- Akses Pasar: Memastikan petani memiliki akses terhadap pasar lokal dan regional, yang memungkinkan mereka menjual hasil panen dan mempertahankan penghidupan mereka.
- Dukungan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang mendukung dan mendorong budidaya tanaman lokal yang bergizi dapat berperan penting dalam keberhasilannya.*

Referensi

- Ahdiat, Adi. 2023. Indonesia Punya Penderita Diabetes Tipe 1 Terbanyak di ASEAN. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/10/indonesia-punya-penderita-diabetes-tipe-1-terbanyak-di-asean>. Diakses 16/10/2023
- Dufie, W.M.F., Odoro, I., Ellis, W.O., Asiedu, R. And Dixon, B.M. 2013. Potential Health Benefit of Water Yam (*Dioscorea alata*). *Food Funct.*, 2013,4, 1496-1501.
- Guo, X., Sha, X., Liu, J., Cai, S., Wang, Y., & Ji, B. (2015). Chinese Purple Yam (*Dioscorea alata* L.) Extracts Inhibit Diabetes-Related Enzymes and Protect HepG2 Cells Against Oxidative Stress and Insulin Resistance Induced by FFA. *FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH*, 21, 677-683.

- Hou, W.C., Lee, M.H., Chen, H.J., Liang, W.L., Han, C.H., Liu, Y.W., Lin, Y.H. 2001. Antioxidant activities of dioscorin, the storage protein of yam (*Dioscorea batatas* Decne) tuber. *J Agric Food Chem.* 2001 Oct;49(10):4956-60. doi: 10.1021/jf010606m. PMID: 11600050.
- Iwu, M.M.; Okunji, C.O.; Ohiaeri, G.O.; Akah, P.; Corley, D.; Tempesta, M.S. Hypoglycaemic activity of dioscoretine from tubers of *Dioscorea dumetorum* in normal and alloxan diabetic rabbits. *Planta Med.* 1990, 56,264–267. [CrossRef]
- Liu, J.Y., Yang, F.L., Lu, C.P., Yang, Y.L., Wen, C.L., Hua, K.F., and Wu, S.H. 2008. Polysaccharides from *Dioscorea batatas* induce tumor necrosis factor- α secretion via toll-like receptor 4-mediated protein kinase signaling pathways. *Journal Agriculture Food Chemical.* 2008, 56, 9892–9898.
- Liu, Y.W., Shang, H.F., Wang, C.K., Hsu, F.L., and Hou, W.C. Immunomodulatory activity of dioscorin, the storage protein of yam (*Dioscorea alata* cv. Tainong No. 1) tuber. *Food Chem Toxicol.* 2007 Nov;45(11):2312-8. doi: 10.1016/j.fct.2007.06.009. Epub 2007 Jun 14. PMID: 17637490.
- Malviya, N.; Jain, S.; Malviya, S. Antidiabetic potential of medicinal plants. *Acta Pol. Pharm. Drug Res.* 2010, 67, 113–118.
- McAnuff, M.A.; Harding, W.W.; Omoruyi, F.O.; Jacobs, H.; Morrison, E.Y.; Asemota, H.N. 2005. Hypoglycemic effects of steroidal saponins isolated from jamaican bitter yam, *dioscorea polygonoides*. *Food Chemical Toxicology.* 2005, 43, 1667–1672.
- Mukesh, R.; Namita, P. Medicinal Plants with Antidiabetic Potential-A Review. *Am. J. Agric. Environ. Sci.* 2013, 13, 81–94. [CrossRef]
- Niu, C.S., Chen, W., Wu, H.T., Cheng, K.C., Wen, Y.J., Lin, K.C., and Cheng, J.T. 2010. Decrease of plasma glucose by allantoin, an active principle of yam (*Dioscorea* spp.), in streptozotocin-induced diabetic rats. *Journal Agriculture Food Chemistry.* 2010, 58, 12031–12035.
- Shih, S. L., Lin, Y. S., Lin, S. Y., & Hou, W. C. (2015). Effects of yam dioscorin interventions on improvements of the metabolic syndrome in high-fat diet-induced obese rats. *Botanical studies*, 56(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s40529-015-0084-8>
- Son, I.S., Kim, J.H., Sohn, H.Y., Son, K.H., Kim, J.S., and Kwon, C.S. 2007. Antioxidative and hypolipidemic effects of diosgenin, a steroidal saponin of yam (*Dioscorea* spp.), on high-cholesterol fed rats. *Bioscience Biotechnology Biochemical.* 2007, 71, 3063–3071.
- Winarti, S., Harmayani, E. and Nurismanto, R. 2011. Karakteristik dan Profil Inulin Beberapa Jenis Uwi (*Dioscorea Spp.*). *AGRITech: JURNAL FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM*, vol. 31, no. 4, doi:10.22146/agritech.9647.
- Zhang, L., Liu, Y., and Chen, G. 2004. Simultaneous determination of allantoin, choline, and L-arginine in Rhizoma *Dioscoreae* by capillary electrophoresis. *J. Chromatogr. A* 2004, 1043, 317–321.

ANITA RESTU PUJI RAHARJENG adalah dosen di Program Studi Biologi, Fakultas Saintek UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini ia sedang menempuh Pendidikan Doktor di Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada dengan topik penelitian tentang Diabetes mellitus dengan menggunakan hewan model Zebrafish (*Danio rerio*). Ia bersyukur mendapatkan beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama.

BAB 21

Menumbuhkan Literasi di ASEAN

Membangkitkan Literasi di Negara ASEAN

Ernawati Lilys

Negara yang maju dapat diukur dengan tingkat literasi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat, maka semakin menyerap dengan mudah segala ilmu dan kemajuan teknologi dan dapat bersaing secara global. Namun, jika indeks literasi rendah, maka akan berpengaruh pada kemajuan suatu negara. Dari masyarakat yang rendah literasi akan timbul berbagai masalah, salah satu di antaranya yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas.

"Selain itu, agenda literasi yang berkelanjutan akan meningkatkan indeks literasi Indonesia yang masih tertinggal di bawah negara ASEAN. Sofyan mengungkapkan, indeks kita masih 1 banding 1000 penduduk. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya budaya membaca di masyarakat." (kpi.go.id, 07/12/2022).

Pengertian Literasi menurut KBBI Kemendikbud yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Maka dari itu, setiap individu memerlukan kecakapan literasi agar mampu berbaur dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, manusia juga disebut makhluk sosial, di mana memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu bersosial salah satunya yaitu dengan berkomunikasi antarsesama. Baik itu komunikasi dengan bahasa daerah, bahasa nasional, juga bahasa internasional. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan komunikasi baik itu secara verbal atau ucapan dan juga dengan tulisan, juga bahasa isyarat.

Sedangkan pengertian komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. Jadi, komunikasi yang efektif apabila pesan yang dikirimkan pengirim pesan dapat diterima dengan baik oleh pihak penerima pesan. Sehingga komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan dalam komunikasi dengan tidak tersampainya pesan. Dalam mempengaruhi kesuksesan sebuah komunikasi maka perlu meningkatkan kecakapan literasi baca-tulis pada setiap individu. Di sinilah pentingnya peranan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Kedua yaitu peran serta sekolah dalam menguatkan kecakapan literasi. Selanjutnya adalah peran masyarakat yang menjadikan lingkungan literasi yang nyaman, juga pemerintah yang mendukung penguatan literasi pada semua masyarakat. Hal ini akan berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan zaman pada era digital dengan segala arus komunikasi dan juga kecanggihan teknologi. Di mana, literasi hadir sebagai jembatan untuk menghubungkan setiap aktivitas baik itu antarkolega, teman, masyarakat, antar daerah, dan juga antarnegara.

Literasi yang rendah akan membawa dampak yang negatif. Dari penyalahgunaan media sosial, penipuan, penyebaran hoax, dan lainnya. Contoh rendahnya literasi di keluarga yaitu komunikasi antar anggota keluarga yang buruk, tidak adanya pojok perpustakaan di rumah sehingga minat baca anggota keluarga rendah, tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, selalu mengedepankan emosi untuk mendapatkan sesuatu, jarang bertukar pikiran antar anggota keluarga. Sedangkan rendahnya literasi di masyarakat akan menciptakan kumpulan orang yang mudah menyerap informasi yang salah, tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan hoax, tontonan tidak baik yang menjadi tuntunan hidup yang salah karena tidak bisa memilah mana yang harus dilihat dan mana yang harus difilter. Selanjutnya bagi negara, akan kesulitan dalam menjaring sumber daya manusia yang berkualitas, berprestasi dan juga dapat membawa tongkat estafet kerja pemerintah sampai ke luar negeri terutama negara ASEAN.

Dari rendahnya literasi ini akan membuat kumpulan masyarakat yang tertinggal dan menjadi alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini perlu penanggulangan serius baik dari pemerintah, perhatian khusus dari masyarakat dan juga penjagaan dari keluarga bahwa kecakapan literasi dalam sebuah kehidupan individu sangatlah penting. Kecakapan literasi bukan hanya untuk pribadi, juga untuk kehidupan yang lebih luas.

Derasnya arus informasi lewat media sosial membuat individu mudah sekali menerima berita hoax, tulisan-tulisan tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Informasi salah yang diserap akan membuat gaduh di masyarakat sehingga mudah terprovokasi, mengadu domba. Di keluarga mudahnya percikan keributan masalah-masalah kecil yang dibesarkan

karena kurangnya komunikasi antar keluarga. Di sekolah antar pelajar saling serang, tawuran, karena rendahnya literasi antar pelajar, di masyarakat cepat terjadi gesekan dan menimbulkan keributan antar tetangga, antardaerah, sehingga saling serang dan membuat keonaran. Di negara pun bisa terjadi dengan hadirnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi pada ibu pertiwi sehingga mengecewakan rakyat.

Maka dari itu, perlu adanya upaya pemajuan literasi terutama dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat dan juga pemerintah terutama di ASEAN agar mengenalkan literasi sejak dini kepada individu sehingga mereka menjadi generasi yang melek literasi. Selain itu keluarga pun berperan mengenalkan literasi sejak dini di rumah. Dari pengaruh literasi keluarga, literasi masyarakat, literasi sekolah dan juga negara maka akan menciptakan kecakapan literasi. Dikutip dari AntaraneWS.com mengenai cara peningkatan literasi ada 4. Dalam kesepakatan Muscat (Muscat Agreement) 2014 yang ditandatangani oleh seluruh peserta dalam Global Education for All yang diselenggarakan oleh UNESCO (12-14 Mei 2014) di Muscat, Oman, untuk meningkatkan literasi dapat dilakukan dalam 4 hal berikut:

Pertama, semua negara memastikan bahwa pada tahun 2030, seluruh pelajar dididik oleh tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Saat ini Kemendikbud mengusung Merdeka Belajar, juga adanya gerakan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Ibu Penggerak, menjadi langkah mengenalkan literasi lebih dekat dan untuk kemajuan dunia pendidikan. *Kedua*, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Gizi yang baik akan berdampak pada peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar. Saat ini pemerintah Indonesia menggalakkan cegah stunting dengan pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting, rumah desa sehat, konselling gizi, peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. *Ketiga*, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, laboratorium komputer dan akses terhadap internet serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. *Keempat*, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin kesediaan buku bacaan bermutu, maka pemerintah dan swasta harus bahu-membahu dalam menerbitkan buku-buku yang sangat bermutu.

Rendahnya minat baca akan menurunkan kualitas SDM. Sedangkan tingginya minat baca akan menjadikan seseorang mempunyai kecakapan literasi baca-tulis. Kemampuan membaca pada individu harus selaras pada pemahaman kata dan maknanya, sehingga pemahaman isi bacaan dapat terserap dengan baik. Hal ini akan menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Kecakapan literasi yang tumbuh dengan baik akan membentuk pribadi yang baik, menjadikan manusia berkualitas dan mampu bersaing secara nasional dan internasional terutama di negara ASEAN. Kecakapan membaca buku harus diimbangi dengan kecakapan menulis. Dua hal ini jika salah satunya tidak dijalankan, maka tidak dapat saling menguatkan.

Menulis adalah keterampilan merangkai aksara dalam sebuah tulisan-tulisan baik itu sebuah kisah maupun ilmu pengetahuan. Minat menulis harus dipupuk sejak dini. Di mana, dapat menuangkan ide besar dalam pikiran menjadi sebuah tulisan. Termasuk salah satu komunikasi dalam hal tertulis. Menulis juga menjadi bagian aktivitas menyampaikan informasi kepada pembaca. Pada Abad ke-21 ini memang diperlukan kecakapan literasi baca-tulis. Hal ini sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kegiatan menulis menjadi kegiatan mengikat ilmu dan juga informasi. Sehingga kecakapan literasi baca-tulis akan membuat individu memiliki kualitas yang baik dan bisa dimanfaatkan untuk memasuki semua bidang kehidupan. Dengan literasi baca-tulis yang baik bisa menyerap informasi yang benar, mengolahnya menjadi buku atau juga postingan media sosial, juga pekerjaan yang berhubungan dengan informasi terkait. Selain itu, bisa mengikuti kecanggihan teknologi dengan bijak, dapat berinteraksi secara global terutama di negara-negara ASEAN.

Di kutip dari mikromediateknologi.com tentang literasi yang memajukan desanya diantaranya Buku Membangun Boalemo Lebih Maju, Kambo (Titik Paling Indah Memandang Kota Palopo), menjadi literasi masyarakat yang mengangkat wisata desa dan menjadikan Kambo mendapat Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 (ADWI), kecakapan literasi masyarakat dan menuangkannya dalam tulisan menjadi sebuah buku selain merangkum semua hal tentang tempat tinggal, kebiasaan masyarakat, alam, budaya, ekonomi, wisata, dan juga lainnya.

Selain itu ada juga buku literasi Sekolah dari berbagai sekolah yang menggerakkan orang tua menulis, murid menulis buku, guru menulis, Kepala Sekolah menulis, semua berpadu dalam literasi sekolah. Juga saat ini beberapa sekolah sudah ada ekstrakurikuler menulis. Sedangkan dalam keluarga pun sudah ada gerakan keluarga penulis, di mana orang tua dan anak-anak sama-sama menulis sebuah buku sesuai dengan minatnya. Dikutip dari laman instagram pusatcoding, M. Al Fatih, siswa SDIT Dewan Dakwah yang menuliskan pengalamannya berkunjung ke museum. Tentu saja, menjadi hal yang menarik selain berbagi cerita, pengalaman dan juga informasi. Dari masa ke masa Indonesia selalu melahirkan penulis-penulis nasional dengan karya-karyanya yang dikenang.

Para penulis Indonesia dari Zaman ke Zaman, seperti Buya Hamka, NH.Dini, Pramoeuya Ananta Toer, Marah Rusli, Taufiq Ismail, Mochtar Lubis, Suwarsih Djojopuspito, Ahmad Tohari, Sutan Takdir Alisjahbana, AA.Navis, dan masih banyak lagi. Saat ini juga Indonesia memiliki penulis dengan karyanya yang digandrungi yaitu Tere Liye, Asma Nadia, Helvy Tiana Rosa, Ifa Avianty, Pipiet Senja, Dewi Lestari atau Dee Lestari, Andrea Hirata, Eka Kurniawan, Ahmad Fuadi, Habiburrahman El Shirazy, Ayu Utami dan Yanuardi Syukur, salah satu pioner Rumah Produktif Indonesia yang menginisiasi gerakan menulis buku ASEAN. Dengan membangkitkan gerakan literasi menulis buku ini membangunkan masyarakat untuk membaca buku dan mencari informasi kemudian menuliskan kembali dalam bentuk artikel. Sehingga memperpanjang jembatan ilmu dan juga meluaskan arus informasi kepada pembaca internasional. Apalagi buku disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menjadi catatan dalam sejarah perbukuan ASEAN yang sangat berguna untuk masyarakat ASEAN.

Dalam ajaran Islam kegiatan membaca dan menulis adalah ibadah. Di mana kegiatan tersebut sebagai salah satu cara mendekatkan diri pada pengetahuan dan kemudian mendekatkan pada Tuhan dan menuju pada ketaatan. Kedua, membaca dan menulis sebagai bentuk mengikat ilmu, di mana ilmu adalah kunci kebahagiaan. *"Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta benda, kerajaan dan ilmu. Maka dia memilih ilmu, akhirnya dia diberi pula kerajaan dan harta benda.* (HR. Ad-Dailami).

Dikisahkan dari Nabi Sulaiman yang mencintai ilmu daripada harta dan jabatan. Namun, akhirnya dengan ilmu pulalah Nabi Sulaiman mendapatkan harta dan kerajaan. Dari ilmu akan mendapatkan jalan yang diinginkan, dengan ilmu memiliki lentera hidup. Sehingga ilmu menjadi perisai yang akan selalu menjadi setiap makhluknya yang terus belajar dan mengamalkan ilmunya. Akan tetapi, jika sedang belajar niatkan dengan niat yang baik, niat pada ketaatan, bukan semata-mata pada harta dunia. Agar ketika belajar datanglah ilmu yang berkah dan limpahan pahala kebaikan. Masyarakat Islam tumbuh dan menggerakkan peradaban dengan terus mengikat ilmu salah satunya dengan membaca dan menulis yang baik dan bermanfaat.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menggerakkan literasi baik, juga melestarikan budaya bangsa. Untuk semua hal tersebut semuanya berhubungan erat dengan kecakapan literasi baca-tulis. Gerakan keluarga dalam hal mengenalkan literasi sedini mungkin pada anggota keluarga dan membangun literasi sehat akan berdampak sekali pada saat berinteraksi dan berkomunikasi. Juga lingkungan tempat tinggal yang membangun literasi santun akan membawa masyarakat bijak dan saling toleransi antar sesama. Begitu juga pada negara dengan membangun literasi yang kuat akan menggerakkan semua komponen bangsa untuk siap bersaing secara global dan juga mengikuti perkembangan zaman dengan cepat. Salam literasi.*

Referensi

Chaniago, Buya H. Muhammad Alfis. 2008. Indeks Hadits dan Syarah, 1.646 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Sahih. Penerbit : CV. Alfonso Pratama : Bekasi.

RD (2020). "Indeks Literasi Indonesia Paling Rendah di ASEAN, Gerakan Literasi KPI Jadi Keniscayaan," KPI, 18 Juni 2020, <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35773-indeks-literasi-indonesia-paling-rendah-di-asean-gerakan-literasi-kpi-jadi-keniscayaan> (diunduh pada tanggal 7 Desember 2020)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi> (diunduh pada tanggal 7 Desember 2020)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunikasi> (diunduh pada tanggal 7 Desember 2020)

Sumanang, Nanang (2021). "Literasi dan Kemajuan Bangsa", Antaraneews 29 Januari 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1974318/literasi-dan-kemajuan-bangsa> (diunduh pada tanggal 7 Desember 2020)

ERNAWATI LILYS adalah guru menulis di SDN Bintara VI, penulis buku anak, nonfiksi, dan fiksi, blogger, founder Moms Institute. Prestasi yang diraihinya juara 1 dalam lomba menulis Cerita Mini FLP Saudi Arabia. Penulis buku *Seni Berkarya untuk Perempuan, Step by Step Belajar Coding dengan Scratch, Komik Hari Besar Islam, Jurnal Penulis*, dan buku lainnya. Menulis resensi dan artikel di majalah dan koran. Ia dapat disapa di email : ernawatililys@gmail.com dan IG dan Twitter @ernawatililys.

Negeri Literat Impian

Sari Wulandari

"A child who reads will be an adult who thinks" – NN

Seorang anak yang membaca akan menjadi orang dewasa yang berpikir.

Read Me a Story

Pernahkah Anda membayangkan membaca buku dengan hamparan indah bunga sakura yang bermekaran di depan kalian? atau mungkin dengan hamparan laut biru membentang? Saya ingin mengajak anak-anak Indonesia untuk menyukai dunia membaca sekaligus mengenal sisi lain dunia melalui sebuah program virtual bertajuk *Read Me a Story*. Pada hari Minggu, 26 Maret 2022, Kakak Gita, seorang diaspora yang tinggal di Kyushu, Jepang, membacakan sebuah buku cerita berjudul *Bento yang Tersembunyi* melalui media Zoom. Unikny Kak Gita membacakan buku ini di sebuah taman sehingga kita bisa melihat bunga sakura yang bermekaran. Kakak Gita membacakan cerita dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia.



Read Me a Story edisi sebelumnya dilaksanakan pada bulan November 2021 dengan mengundang Leila Gould, gadis berusia 8 tahun yang tinggal di Melbourne. Dengan didampingi sang ayah, Rowan Gould, Leila membacakan buku berjudul *Handa's Surprise* dan *The Sleepy Sloth*. Leila juga mengajak anak-anak untuk ikut membaca beberapa halaman dari buku yang dibacakan sehingga suasana menjadi sangat seru!

Read Me a Story adalah salah satu misi yang saya lakukan dalam rangka menjadi bagian dari program literasi untuk negeri ini. Sebagai seorang guru saya sangat prihatin, tingkat baca negara Indonesia sungguh menyedihkan. Seringkali Pendidikan di Indonesia menggaungkan berpikir kritis dari menteri ke menteri, namun pada kenyataannya semua itu masih pada tataran *lips service* belaka.

Belum lama ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN), yang salah satu komponennya kita kenal dengan istilah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Untuk pembaca ketahui bahwa soal AKM ini menuntut siswa agar membaca teks-teks panjang dan memahami teks tersebut dengan komprehensif dengan harapan itu dapat meningkatkan literasi bangsa ini, sekaligus melatih berpikir kritis. Menurut saya itu adalah mimpi di siang bolong. Saya punya prediksi setelah AKM dijalankan sekian tahun, siswa-siswa

di Indonesia dijamin akan pandai mengerjakan soal dengan teks panjang, bukan menjadikan anak suka membaca buku. Melalui tulisan ini saya ingin berbagi gagasan sekaligus membuka jaringan untuk membangun kolaborasi dengan sesama negara ASEAN lainnya.

Rendahnya Tingkat Membaca Masyarakat ASEAN

Angka buta huruf di Indonesia telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk buta huruf di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari 4,63 persen penduduk pada tahun 2011 menjadi 1,78 persen pada tahun 2019. (Jakarta Post, 2020). Ironisnya, tingkat minat baca di Indonesia terkenal sebagai salah satu yang terendah di dunia. Menurut *World's Most Literate Nations Ranked* yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat baca. Fakta ini bertolak belakang dengan fakta bahwa masyarakat Indonesia dapat menghabiskan waktu lebih dari 9 jam untuk aktif di media sosial (Kominfo, 2017).

Namun, di kalangan negara ASEAN, Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Negara-negara ASEAN lainnya tidak diragukan lagi memiliki tantangan pengalaman di bidang promosi kebiasaan membaca. Sangkaeo (1999) menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kebiasaan membaca di beberapa negara ASEAN, antara lain: warga ASEAN bukanlah masyarakat membaca, tapi masyarakat mengobrol; pengelolaan 3M (*Man, Money, Management strategies*) masih menjadi kendala krusial dari kisah lama ini, dan factor ketiga adalah godaan dari media elektronik.

Read Me a Story: Program Membaca Nyaring untuk mengenalkan interkultural dan meningkatkan minat baca

Jika kita menginginkan seseorang itu menjadi seorang yang kritis dalam berpikir, maka salah satu jalan utamanya adalah dengan membaca buku. Melalui kebiasaan membaca, seorang individu terlatih berpikir kritis analitis. Dalam sebuah artikel berjudul "*Reading habit promotion in ASEAN libraries*", Somsong Sangkaeo merekomendasikan beberapa strategi untuk mempromosikan kebiasaan membaca yang bisa dilakukan oleh perpustakaan, salah satunya adalah yaitu *Reading Aloud for Children* atau Membaca Nyaring untuk Anak-anak. Artikel tersebut juga menyarankan keterlibatan orang tua dan masyarakat juga. Bersama dengan anggota komunitas lainnya, saya mengadakan sebuah kegiatan yang berjudul *Read Me a Story*, sebuah program membaca nyaring secara daring, sebagaimana diceritakan di awal tulisan ini. Dalam program *Read Me a Story* anak-anak dikenalkan pada kebiasaan membaca yang menyenangkan sekaligus mengenal sisi lain dunia.

Selama ini kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang saya miliki. Melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN, teretus gagasan untuk membangun kolaborasi dengan sesama negara ASEAN sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana kampanye meningkatkan minat membaca di negara ASEAN. Program *Read Me a Story* ini diharapkan dapat menjalin ikatan yang kuat antar aktivis penggiat literasi karena memiliki kesamaan situasi dalam hal ini.

Dengan skema program virtual 3 bulanan, para relawan dapat membacakan kisah dari sebuah buku sembari mengenalkan kekhasan dari negaranya masing-masing melalui *virtual tour* singkat. Relawan dapat diambil dari anggota negara-negara ASEAN secara bergantian. Terkait 3M (*Man – Money – Management strategies*) diperlukan dukungan dari pemerintah maupun swasta yang dapat menjadi penggerak dari gagasan ini. Sementara godaan terhadap media dapat disiasati dengan cara menyediakan kegiatan *follow up* yang menarik dan menantang. Bahkan skema kerjasama ini dapat menjadikan social media sebagai salah satu piranti untuk mengampanyekan kegiatan literasi dan budaya membaca. Untuk jangka panjangnya, kegiatan ini dapat menjadi sebuah tradisi dalam komunitas-komunitas literasi yang ada di berbagai negara ASEAN.

Konklusi

Saya punya cita-cita anak-anak Indonesia menjadi generasi yang suka membaca, tidak hanya membaca status atau *thread* komen di dunia maya, tetapi juga membaca buku. Pun demikian dengan orang dewasa, saya bermimpi, bukan hanya buku yasin yang menjadi buku paling banyak dibaca oleh orang di Indonesia, tetapi juga buku sastra atau

buku genre lainnya. Dalam skala lebih besar, saya berharap dengan melibatkan negara-negara jiran di wilayah ASEAN, kegiatan ini bisa memberikan dampak lebih besar baik dalam hal peningkatan literasi maupun dalam hal *soft diplomacy*.

Membangun generasi literat memang bukan pekerjaan mudah yang bisa dilakukan sendirian, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Oleh karena itu saya mengundang siapapun pembaca tulisan ini untuk memberikan kontribusi dengan membangun kolaborasi antar komunitas literasi di negara ASEAN atau dengan menjadi relawan *Reading Aloud* atau membantu mensyiarkan program yang sama untuk menuju sebuah negari yang literat. *

Referensi

<https://www.thejakartapost.com/adv/2020/09/07/hai-2020-indonesias-literacy-programs-show-great-success.html>.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos>

Somsong Sangkaeo (1999), "Reading Habit Promotion in ASEAN Libraries", 65th IFLA Council and General Conference Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, 1999 <https://origin-archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/091-114e.htm> (diunduh pada 6 November 2022)

SARI WULANDARI lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 12 April. Lulus dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang, Sari berhijrah ke kota Gudeg dan menjadi guru Bahasa Inggris di SD Budi Mulia Dua Yogyakarta. Tahun 2014, Sari terpilih menjadi salah satu peserta Muslim Exchange Program dan di tahun yang sama mengikuti Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) Short Course, "Teaching with Technology, Learning by Design" di Malaysia. Tahun 2015 – 2017, Sari mengikuti program Teacher Training di kota Sapporo, Hokkaido, Jepang. Sepulang dari Jepang, Sari kembali ke kota kelahirannya di Nganjuk dan mengabdikan sebagai guru di SMP Islam Baitul Izzah sampai sekarang. Tahun 2022, Sari menjadi Pengajar Praktik untuk Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dan juga menjadi Praktisi Mengajar di STKIP PGRI Nganjuk. Beberapa program yang digagasnya adalah: *The Travelling Books*, *Read Me a Story*, *Saturday Online Sharing (SOS)*, *Ngobras Dah*, dan *See The World Series*. Ia dapat dihubungi di email: wulanendadari@gmail.com.

Melek Literasi Di Tataran Negara ASEAN

Anda Juanda

Peringkat Literasi Negara-negara ASEAN

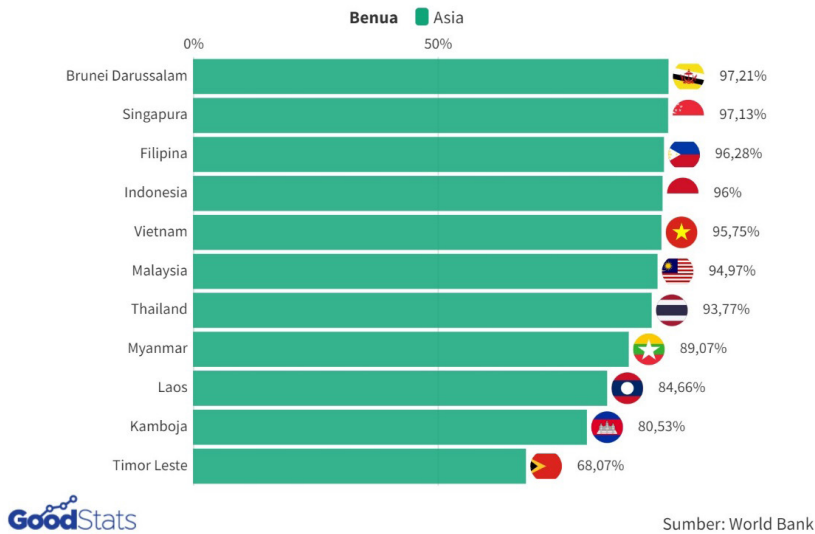
Literasi pada awalnya mengandung makna kemampuan membaca. Namun seiring dengan waktu ada perubahan makna menjadi lebih luas yang mencakup kemampuan-kemampuan lain yang disebut dengan enam literasi dasar. Enam literasi dasar tersebut, yaitu (1) literasi bahasa, (2) literasi numerasi, (3) literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan (Kemendikbud 2017: 2). Tulisan kali ini mengangkat tentang literasi dalam pengertian awal. World Bank mendefinisikan tingkat literasi sebagai proporsi dari populasi berusia 15 tahun ke atas yang melek literasi. Seseorang dikatakan melek literasi jika dapat membaca dan menulis pernyataan singkat sederhana mengenai kehidupan sehari-hari dengan pemahaman.

Melek literasi ini diharapkan akan menjadi sebuah budaya yaitu budaya literasi. Budaya literasi sendiri mengandung makna suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Komponen utama dalam pembentukan budaya literasi adalah kegiatan membaca, menulis dan berpikir kritis. Tujuan budaya literasi adalah menciptakan tradisi berpikir yang diikuti oleh proses membaca dan menulis sehingga dapat menciptakan karya tulis ilmiah yang berdaya guna.

Tentu saja budaya literasi ini bukanlah suatu hal yang alamiah, tetapi lahir dari proses belajar, proses pembiasaan, pengalaman serta dukungan dari lingkungan sekitar. Kebiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali, namun menjadi kegiatan yang terstruktur, konsisten serta adanya target yang jelas.

Begitupun di tataran Asia Tenggara khususnya di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Berbagai hal dilakukan oleh negara-negara tersebut terutama terkait dengan budaya literasi. Namun sebelum membahas negara pernegara dengan program apa yang mereka laksanakan, kita lihat dulu peringkat dari negara-negara tersebut. Berbicara tentang tingkat literasi negara-negara di Asia Tenggara, Brunei Darussalam menempati posisi pertama negara dengan tingkat literasi penduduk tertinggi yaitu sebesar 97,21 persen. Singapura menempati posisi ke-2 dengan raihan tingkat literasi penduduk sebesar 97,13 persen. Filipina menyusul di posisi ke-3 dengan torehan sebesar 96,28 persen. Indonesia sendiri berada di posisi ke-4 dengan angka 96 persen. Vietnam berada di posisi ke-5 dengan raihan sebesar 95,75 persen. Kemudian secara berurutan di posisi ke-6 hingga ke-11 diraih oleh Malaysia (94,97 persen), Thailand (93,77 persen), Myanmar (89,07 persen), Laos (84,66 persen), Kamboja (80,53 persen), dan Timor Leste (68,07 persen).

Tingkat Literasi Penduduk di Asia Tenggara (Persen)



Gambar 1. Peringkat Literasi Penduduk di Asia Tenggara

Sumber Gambar: GoodStats

Adapun pengukuran tingkat literasi tersebut dilakukan dengan mengompilasi data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS). UIS mengumpulkan data dari tiap negara terkait bidang pendidikan, sains, budaya, serta komunikasi secara resmi. UIS melakukan kerja sama dengan berbagai kantor statistik nasional, kementerian, serta organisasi statistik di tiap negara. Data-data tersebut kemudian dibandingkan secara internasional. Untuk angka literasi itu sendiri dihasilkan UIS melalui sensus penduduk atau survei rumah tangga, di mana kepala rumah tangga yang menjadi responden pada survei akan ditanyakan seputar kemampuan membaca dan menulis keluarga.

Program Literasi di Negara-negara ASEAN

Literasi di Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meluncurkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) pada tahun 2016 sebagai induk gerakan literasi secara nasional untuk menyinergikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor. Fokus utama GLN adalah 6 aspek literasi dasar: baca-tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan budaya & kewargaan. Pelaksanaannya berlangsung secara simultan pada tiga ranah pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) melalui program yang dikenal sebagai Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. GLN merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yaitu mewajibkan para siswa untuk membaca buku minimal 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar di sekolah setiap hari. Permendikbud ini juga menyebutkan bahwa buku yang dibaca adalah buku nonteks pelajaran.

Pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) ditunjuk sebagai koordinator GLN. Selain itu Badan Bahasa ini pun melaksanakan program penyediaan bahan bacaan literasi untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) tersebut. Konsentrasi penyediaan bahan bacaan literasi berfokus pada pemilihan sejumlah penulis yang akan menghasilkan puluhan naskah untuk jenjang PAUD (prabaca 2), SD Kelas 1 (pembaca dini), SD Kelas 2 dan 3 (pembaca awal).

Literasi di Singapura

Setidaknya ada empat program literasi di Singapura yang menarik untuk disimak. Yang pertama *Born to Read, Read to Bond*; Proyek ini diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan Komunitas dan Olah Raga (*Ministry of Community Development and Sports*). Program ini mengorganisasi pendistribusian paket baca (buku dan perangkat edukasi) lengkap dengan panduannya kepada ibu yang baru melahirkan. Yang kedua *KidsREAD*; program ini diluncurkan pada tahun 2004 oleh Singapore National Library. Program ini bertujuan untuk membangun kolaborasi membaca anak usia 4 sampai 8 tahun, serta mempromosikan hobi membaca dan membangun kebiasaan membaca. *KidsREAD* telah memberdayakan 2000 anak usia 4 sampai 8 tahun serta membentuk lebih dari 45 klub membaca.

Yang ketiga *1000 Fathers Reading*; tahun 2007, Singapore National Library berkolaborasi dengan *Centre for Father* menggelar proyek ini agar para ayah lebih terlibat di dalam kegiatan belajar membaca dan menulis anak. Dan yang keempat; *Read It! Singapore*; Proyek ini bertujuan untuk merekomendasikan buku-buku pada anak sekaligus mendorong mereka untuk membaca. Pada proyek ini banyak diselenggarakan workshop besar, pertemuan antara penulis dan pembaca.

Literasi di Myanmar

Budaya literasi di Myanmar dapat dikatakan terhambat hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan pemerintah terhadap budaya literasi di negara ini. Myanmar yang berada di bawah rezim militer menjadikan negara mampu mengontrol kritik yang ditujukan pada pemerintah. Hal itu diperparah dengan tekanan pemerintah terhadap koran dan penerbitan buku. Kontrol pemerintah terhadap buku sangat ketat. Beberapa buku dilarang terbit karena berbicara tentang politik. Walaupun upaya meningkatkan literasi memang ada namun menjadi tidak maksimal karena adanya kontrol berlebih dari pemerintah.

Literasi di Vietnam

Pada 2012, Vietnam secara mengejutkan berhasil menduduki peringkat ke-12 dalam *the Programme for International Student Assessment (PISA)* bidang matematika, sains, dan membaca untuk usia 15 tahun. Meski partisipasi Vietnam tersebut merupakan yang pertama kalinya, ternyata negara ini telah berhasil menyamai Malaysia dan Thailand sebagai negara sesama anggota ASEAN yang masuk dalam peringkat tersebut. Ada tiga faktor yang telah berkontribusi terhadap upaya melejitkan posisi hasil penilaian PISA negara Vietnam, yakni faktor komitmen pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, kurikulum yang terfokus, dan kualitas gurunya.

Gerakan bersama Negara-negara ASEAN dalam literasi

Merujuk pada keberagaman literasi di atas serta adanya dorongan globalisasi, *SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language (SEAQIL)* yang merupakan salah satu pusat regional dari *The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* atau Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Se-Asia Tenggara mengusulkan program berbasis pengembangan literasi di sekolah, yakni Klub Literasi Sekolah (KLS) Asia Tenggara. KLS dirancang sebagai sebuah program untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa melalui literasi membaca serta meningkatkan keterampilan atau kompetensi bahasa asing. KLS mengintegrasikan beberapa target, yaitu meningkatkan literasi membaca-menulis siswa, kompetensi 4C (berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi), serta kelancaran berbahasa. *

Referensi

Kemendikbud (2017). Panduan Gerakan Literasi Nasional. Jakarta.

Admin (2017). *Tips anak suka baca di Singapura*. 1 Oktober 2018.

https://mandira.id/news/detail/tips-anak-suka-baca-di-singapura-program-membaca-dilakukan-pada-ibu-melahirkan-dan-bayinya_237 (diunduh pada 1 Desember 2022)

- Angelia, Diva (2022). *Tingkat Literasi Penduduk Negara Asia Tenggara*. 10 Oktober 2022. [https://goodstats.id/article/tingkat-literasi-negara-asia-tenggara-gSjhj#:~:text=Adapun%20Vietnam%20berada%20di%20posisi,\(68%2C07%20persen\)](https://goodstats.id/article/tingkat-literasi-negara-asia-tenggara-gSjhj#:~:text=Adapun%20Vietnam%20berada%20di%20posisi,(68%2C07%20persen).). (diunduh pada 3 Desember 2022)
- Hajiansyah, Oki (2022) *Perpustakaan Nasional Filipina Kembangkan Program Ramah Disabilitas*. 27 Oktober 2022. <https://metro.suara.com/read/2022/10/27/155533/perpustakaan-nasional-filipina-kembangkan-program-ramah-disabilitas> (diunduh pada 3 Desember 2022)
- Kemendikbud (2019). *Mendikbud: Literasi Lebih Dari Sekadar Membaca Buku*. 22 Agustus 2019 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/mendikbud-literasi-lebih-dari-sekadar-membaca-buku> (diunduh pada 4 desember 2022)
- Koes, Arif (2021). *Bujet Pendidikan Sama, tapi RI Tertinggal Jauh dari Vietnam*. 24 Juni 2021. <https://www.gatra.com/news-515407-milenial-bujet-pendidikan-sama-tapi-ri-tertinggal-jauh-dari-vietnam.html> (diunduh pada 3 Desember 2022)
- Sunda, Ujang(2021). *Negara-negara Asia Tenggara Sepakat Majukan Literasi Dan Promosi Bahasa*. 26 September 2021. <https://rm.id/baca-berita/government-action/92707/negaranegara-asia-tenggara-sepakat-majukan-literasi-dan-promosi-bahasa> (diunduh pada 4 Desember 2022)

ANDA JUANDA lahir di Kuningan 16 Februari 1979. Bersama istri Nia Winianingsih, M.Pd telah dikaruniai tiga buah hati Iffat Ansani Fathurrahman dan Aqilla Ansani Azkadina dan Atqiya Ansani Farzana. Untuk pendidikan yang ditempuh; SD Negeri Sukamulya I, SMP Yos Sudarso Cigugur, SMA Negeri 1 Cigugur dan menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Kuningan. Aktivitas kesehariannya adalah menjadi guru IPA di SMP Negeri 2 Japara. Sebagai guru, untuk prestasi tingkat nasional menjadi Finalis Simposium Guru (2015), finalis Inovasi Pembelajaran Kemendikbud (2016), finalis Diseminasi Literasi Nasional 2017, peserta terbaik Bimtek Karya Tulis Ilmiah P4TK IPA (2017), juara Simposium Nasional GTK P4TK IPA (2017), Finalis Simposium Nasional GTK P4TK IPA (2018), Finalis Bimtek Karya Tulis Ilmiah P4TK IPA (2019), Finalis Simposium Nasional GTK P4TK IPA (2019), Finalis Simposium Nasional Dikdas (2019), Juara I Keluarga Literasi Kabupaten Kuningan (2019), Tim Pengembang Pembelajaran Berbasis Aktivitas Kemendikbud (2020), fasilitator STEM P4TK IPA (2021), dan finalis Gebyar Karya Filtrasi BBGP Jawa Barat (2022).

Pantun Membawa Sejuta Rasa ASEAN

Mas Ayu Sri Wachju Embun Waty

Pantun adalah salah satu puisi lama yang sangat indah dan penuh makna. Puisi lama lainnya adalah gurindam, mantra, syair, karmina, seloka, dan talibu. Puisi lama umumnya diciptakan oleh nenek moyang untuk tujuan hiburan dan pasti mengandung nasihat bagi pembaca sekaligus pendengarnya. Puisi lama atau dapat juga disebut sebagai puisi rakyat tentu saja memiliki perbedaan dengan puisi baru. Puisi lama adalah jenis dari karya sastra puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Dalam puisi lama biasanya terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruh oleh budaya asing.

Maka dari itu, penciptaan puisi lama akan terikat oleh berbagai aturan. Aturan-aturan tersebut antara lain: Ada persajakan atau rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang terdapat dalam larik sajak; Jumlah kata dalam tiap baris; Jumlah baris dalam tiap bait. Bait adalah satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris; Banyak suku kata dalam setiap barisnya; Terdapat irama (pergantian kesatuan bunyi).

Penciptaan atau penulisan puisi lama biasanya dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan kebudayaan tertentu. Sama halnya dengan karya sastra lain, puisi lama juga memuat pesan-pesan kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya. Ciri-ciri Puisi Lama adalah anonim (tidak diketahui siapa pengarangnya), disampaikan dari mulut ke mulut (sastra lisan), terikat adanya aturan, mulai dari jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata, hingga rima. Gaya bahasanya tetap (statis) dan klise, isinya fantastis dan bertema istana sentris. Pantun adalah puisi lama yang mempunyai sajak a-b-a-b pada baitnya. Setiap bait terdiri atas 4 baris dengan setiap barisnya terdiri dari 8-12 suku kata. Pada 2 baris awal disebut dengan sampiran, sementara pada 2 baris akhir adalah isi.

Puisi lama tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Jawa, masyarakat menyebutnya Parikan, di Sunda disebut Susualan, sedangkan di Aceh, namanya Rejong. Pantun dikategorikan berdasarkan isinya adalah pantun anak-anak, pantun agama atau pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun mudah.

Berawal dari keaktifan di Ikatan Guru Indonesia, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus, penulis berkesempatan memeriahkan acara Anugerah Literasi di Jakarta. Saat itu belum mempunyai buku solo, tetapi hanya sebagai salah satu editor buku yang diluncurkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Kota Surabaya, BLOSSOM, buku ajar sekaligus buku kerja mata pelajaran Bahasa Inggris SMA. Jadi penulis memberanikan diri ikut memeriahkan acara anugerah literasi yang diselenggarakan oleh IGI Pusat yang dihelat di gedung Perpustakaan Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh hampir 1000 orang guru dan siswa dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Rasa nasionalisme sangat menggebu saat itu, apalagi dihadiri oleh seorang seniman dan penyair terkenal Taufik Ismail. Acara dimeriahkan dengan pemasangan selempang Anugerah Literasi pada masing-masing peserta dan penyerahan buku untuk diserahkan ke Perpustakaan. Ada juga peragaan batik dan tenun dari masing-masing daerah. Acara sangat meriah dan sukses. Hikmah dari kegiatan itu adalah terbentuknya motivasi menulis lebih banyak lagi, dan yang tidak kalah penting adalah rasa nasionalisme yang membakar para peserta.

Sejak pertemuan pada acara yang sangat indah itu, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pertemanan. Group WA yang terbentuk sangat memotivasi untuk berkarya tulis lebih bervariasi lagi, bahkan motivasi untuk mengadakan acara yang menebar kerinduan pada persatuan dan kesatuan semakin menggebu. Kami saling menyemangati untuk berkarya lebih banyak lagi. Ada undangan menulis buku antologi puisi, cerpen, cerita anak, quotes, pantun, artikel dan lainnya. Kegiatan Nulis Bareng (Nubar) semakin banyak, dan saya hampir selalu mengikuti undangan yang sangat memotivasi untuk lebih banyak menulis. Salah satu undangan tersebut adalah menulis pantun yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Rumah Seni Asnur (Perruas) yang dikomandani oleh penyair terkenal di Asean, yaitu bang Asrizal

Nur atau dikenal dengan nama Asnur. Perruas adalah sebuah organisasi pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh Perruas, antar lain Gerakan 1000 Guru Asean, Menulis Puisi tahun 2018 mencatat Rekor MURI sebagai buku puisi dengan penulis terbanyak di dunia; Pementasan Drama Musikal 4 Negara : Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam tahun 2019; Festival Literasi Perruas 2019; Gerakan Menulis Pantun Budaya tahun 2020; Gerakan 1000 Guru Asean Menulis Pantun 2021 kembali mencatat rekor MURI sebagai buku pantun dengan penulis terbanyak di dunia. Yang terbaru adalah Akademi Puisi Multimedia, Penerbitan dan peluncuran buku Doa untuk Bangsa dalam rangkaian acara Festival Literasi Perruas 2021.

Kegiatan itu didahului dengan Akademi Puisi Multimedia, pelatihan menulis puisi, membaca puisi dan membuat Video puisi sejak bulan Mei hingga November 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih kurang 500 penulis puisi dan 400 membuat video puisi dengan tema Doa untuk Bangsa ditayangkan di Youtube Rumah Seni Asnur dengan 52.000 Subscriber. Video tersebut dilombakan, dengan pelatih Asrizal Nur, Rini Intama, Dr Rusmana Dewi, dan pelatih tamu Ahmadun Yosi Herfanda.

Festival Literasi Perruas pusat dan Perruas se-Indonesia diselenggarakan dengan berbagai kegiatan antara lain: Parade Puisi Perruas se Indonesia dari Aceh hingga Papua diikuti 300 peserta, Konser Puisi 12 Negara, diskusi buku-buku puisi tunggal dan baca puisi, diskusi buku-buku puisi daerah dan baca puisi, diskusi buku DI BAWAH PAYUNG KREATIF PERRUAS dan buku ARISAN PUISI; Kisah di Balik Aksara dan baca cerpen, esai; diskusi buku PUISI JALAN BERSAMA, diskusi buku PANTUN PERSAHABATAN dan baca pantun. Acara diikuti sekitar 200 peserta baik secara luring maupun daring. Luring dilaksanakan di Studio Teater Rumah Seni Asnur, Depok. Intinya adalah meningkatkan literasi terutama di bidang seni sastra. Dari kegiatan yang mendunia, diperoleh sejuta rasa yang menghambur dan menyatukan rasa cinta tanah air bahkan merawat budaya negeri serumpun ASEAN.

Puncak acara dirangkai dengan Malam Anugerah Perruas 2021 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki pasda 18 Desember 2021. Ada Pameran Foto dan Buku; Parade Puisi Asean Doa untuk Bangsa menampilkan Penulis dari Aceh: Sabariah hingga Papua oleh Margarita Abraham dan penulis dari Malaysia antara lain: Raja Ahmad Aminullah, Dato' Radzuan Ibrahim, Mohd.Rosli Bakir, Dato A Aziz Deraman, Ahmad Zauawi Checob, Haryatie Ab Rahman, dari Brunei Darussalam Hajah Dayang Zainon dalam bentuk penayangan video; Paduan Suara Doa untuk Bangsa ciptaan Asrizal Nur dan Tuti Tarwiyah Adi.

Selain itu, paduan suara menampilkan 30 penulis pantun budaya anggota Perruas perwakilan dari Aceh hingga Papua; Dramatisasi Puisi Doa untuk Bangsa naskah dan Sutradara Asrizal Nur menampilkan 45 anggota Perruas perwakilan Aceh; Pembacaan Puisi oleh Tokoh dan Pejabat antara lain Budi Setyawan dari Jawa Timur dan Sylviana Murni, anggota DPD RI dari Jakarta; Pembacaan Puisi oleh penyair terkemuka Indonesia menampilkan Sutardji Calzoum Bachri, Ahmadun Yosi Herfanda dan Jose Rizal Manua; dan penyerahan Anugerah Perruas 2021. Acara dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui daring, sekaligus meluncurkan BUKU PUISI ASEAN, DOA UNTUK BANGSA dan 100 Buku terbitan Perruas 2021.

Walaupun bukan salah satu pemenang dalam nominasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perruas, penulis begitu senang dan bangga karena dapat bergabung dengan teman-teman penulis se-ASEAN. Yang penulis garis bawah tebal di antara kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perruas adalah menggairahkan penulisan puisi lama seperti pantun dan gurindam yang sementara ini tidak banyak diminati oleh generasi sekarang. Sebenarnya menulis pantun atau gurindam itu mudah, tetapi tidak semudah menulis puisi modern yang tidak rumit aturannya, bebas bebas saja. Di sini bebas bukan berarti tak bermakna, tetapi setiap bentuk puisi, baik lama maupun modern punya maknanya masing-masing. Setiap bait mempunyai karakter dan daya tarik sendiri. Pantun adalah salah satu puisi lama yang sangat menarik untuk ditekuni. Salah satu yang terkenal sampai saat ini yaitu pantun indah dan sangat bagus dalam memotivasi kehidupan seseorang.

Berakit-rakit dahulu

Berenang-renang ke tepian

Bersakit-sakit dahulu

Bersenang-senang kemudian

Puisi lama yang terdiri dari 4 baris itu sangat memukau dan bermakna dalam sekali. Hampir setiap saat digunakan oleh orang-orang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan di negara-negara ASEAN. Saya sangat merasakan kehebatan dan keindahan serta pesona pantun yang mengandung makna filosofi kehidupan yang sangat menarik dan bermanfaat sekali. Maknanya adalah dalam kehidupan bila bersusah dan bekerja keras maka hasilnya adalah bersenang atau bahagia pada akhirnya. Hampir setiap orang sangat memahami makna luhur yang terkandung dalam pantun tersebut.

Selain merawat budaya umumnya dan seni sastra khususnya, kegiatan menulis pantun melahirkan sejuta rasa. Senang, gembira, termotivasi, terinspirasi, bersemangat, menggalang rasa bersatu, mempersatukan gagasan, merancang ide cemerlang, menambah rasa nasionalisme, mencintai budaya leluhur, mengenang para pemantun pendahulu, menghormati pemantun dari Sabang sampai merauke, bahkan se-ASEAN, dan banyak perasaan yang tidak bisa dituliskan semuanya.*

MAS AYU SRI WACHYU EMBUN WATY dilahirkan di Bangkalan, Madura. Ayahnya kelahiran Sumenep dan masih keturunan Cakraningrat IV Keraton Sembilangan, Bangkalan. Menulis lebih dari 60 antologi cerpen, puisi, cerita anak, quotes, pantun, gurindam, syair, dan artikel. Memenangi beberapa even Nubar puisi, cerpen, quotes, dan cerita anak. Antologi solo puisi baru 2, *Sayap Sayap Impian Senja* dan *Menjemput Senja*. Tahun 1996 mendapat kesempatan mengajar Bahasa dan Budaya Indonesia di Victoria, Australia. Memperkenalkan Tari Padang Ulan dari Banyuwangi di forum Ladies Night di Victoria.

Mendukung ASEAN Melalui Cerita Anak

Berti Nurul Khajati

Anak-Anak di Mata ASEAN

Kedudukan anak-anak dalam sebuah komunitas sangatlah penting. Dalam *Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025* dinyatakan dengan jelas bahwa salah satu langkah strategis menuju ASEAN yang kreatif, inovatif, dan responsif adalah “meningkatkan daya saing SDM ASEAN dengan mendorong pembelajaran seumur hidup, jenjang pendidikan, penyetaraan dan pengembangan keterampilan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh kelompok umur” (ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama, 2020). SDM ASEAN yang potensial di masa depan adalah generasi muda yang saat ini adalah anak-anak.

Mengutip *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Dasar* yang dijadikan sebagai panduan bagi seluruh guru pendidikan dasar di Indonesia untuk turut memutakhirkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai arti penting dan manfaat ASEAN bagi masyarakat Indonesia (*Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Dasar*, 2020) maka peran pendidikan menjadi sangat penting karena “*investment in education is a fundamental and cost-efficient investment towards a peaceful, prosperous ASEAN*” (*Children in ASEAN: 30 Years of the Convention on the Rights of the Child*, 2020) sehingga sangat jelas bahwa kelompok umur yang dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing dalam pendidikan, pengembangan keterampilan, serta penggunaan teknologi adalah anak-anak.

Pentingnya peran anak-anak dalam mengemban tanggung-jawab masa depan harus dibarengi dengan pendekatan yang sesuai dengan tingkat usianya. Untuk itu diperlukan cara yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan ASEAN kepada anak-anak. Penyampaian pesan melalui cerita dapat menjadi alternatif. Masalahnya, sejauh mana negara-negara ASEAN memberikan fasilitas dalam bentuk cerita kepada anak-anak? Lebih mengerucut lagi, bagaimana dampak *learning loss* pasca pandemi Covid-19? Bagaimana perkembangan literasi anak di ASEAN? Bagaimana mengembangkan sastra anak? Siapa yang bertanggung-jawab atas pengaruhnya bagi anak-anak? Dan apa kontribusinya terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh ASEAN? Masalah-masalah inilah yang perlu dikaji lebih dalam agar cerita anak dapat mendukung misi Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025.

Cerita Anak dan Misi Sosial - Budaya ASEAN 2025

Learning Loss Pasca COVID-19

Jika kita melihat ke belakang, masa pandemi Covid-19 meninggalkan bermacam problem bagi anak-anak. Salah satunya adalah *learning loss* karena dilaksanakannya kebijakan belajar secara *online*. Pada fase ini anak-anak kehilangan kemampuan belajar dan berinteraksi sosial. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap masa depan ASEAN. Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet menjadi jauh tertinggal dalam segala hal. Mengutip hasil penelitian Cummiskey et.al (2020) bahwa di Filipina terdapat skenario adanya dampak kehilangan pembelajaran 30% untuk siswa kelas 3 berbahasa Maranao dan hal tersebut setara dengan penutupan sekolah sekitar 3 bulan (Widyasari & kawan-kawan, 2022). Dapat dibayangkan kondisinya apabila anak-anak tidak masuk sekolah selama tiga bulan penuh.

Dampak yang terasa dari peristiwa tersebut adalah menurunnya minat baca di kalangan anak-anak. Situasi pandemi menuntut mereka lebih banyak menghadapi *gadget* selama pembelajaran. Mereka lebih nyaman bermain *gadget* daripada membaca buku. Interaksi mereka dengan perangkat elektronik tersebut tentu akan berdampak pada kemampuan anak berimajinasi. Padahal imajinasi merupakan modal penting untuk berkreati. Masalahnya, anak-anak sekarang lebih menyukai hiburan yang bersifat *audio visual* yang tentu saja jauh mengurangi daya imajinasi mereka.

Kemampuan membayangkan peristiwa yang distimulasi oleh teks bacaan jauh berbeda dengan menonton. Faktor *visual* sangat membatasi daya imajinasi dan berpotensi menumpulkan kreativitas, terutama secara verbal.

Atas dasar kenyataan yang terjadi maka literasi menjadi salah satu cara untuk merangsang kreativitas verbal anak-anak. Mengutip Gardner & Gardner bahwa kreativitas verbal adalah “kemampuan memanipulasi kata secara lisan atau tertulis” (Aditya, 2015). Hal ini dapat ditengarai dari pola cerita anak-anak yang cenderung irit kata-kata. Mereka kehilangan kemampuan mengeksplorasi kosakata. Ketika anak-anak tidak mampu menggunakan banyak kata, maka akan semakin sulit mengembangkan kreativitas verbal mereka. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah menumbuhkan jiwa literasi dalam diri anak.

Literasi Anak di ASEAN

Mengibarkan semangat literasi pada anak-anak adalah langkah yang paling memungkinkan. Namun mengembalikan minat baca anak-anak pasca *learning loss* harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai pertimbangan dalam memilih bacaan. Memilih bacaan untuk anak harus mempertimbangkan banyak faktor. “Pertimbangan tersebut antara lain: usia, tingkat perkembangan kognitif, perkembangan moral, nilai-nilai karakter, dan sebagainya” (Krissandi & kawan-kawan, 2018). Pada usia anak-anak, sumber bacaan yang paling dikenal adalah buku. Buku menjadi pilihan karena sudah dikenal dalam pembelajaran di sekolah. Mereka menggunakan buku hampir di semua mata pelajaran. Sehingga langkah selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan anak-anak dalam memahami isi buku. “Buku sebagai salah satu sumber pengetahuan baru melalui membaca, jadi minat baca siswa perlu dikembangkan lagi supaya siswa dapat memahami arti dalam bacaan yang dibaca.” (Elendiana, 2020) sehingga level membaca yang harus diterapkan adalah membaca pemahaman.

Memahami arti bacaan dalam buku membutuhkan kemampuan kognitif yang memadai. Kemampuan kognitif dapat ditanamkan melalui pembelajaran sekolah. Sekolah harus dapat memfasilitasi guru untuk meningkatkan pengembangan materi ajar yang mendukung literasi. Salah satu materi yang diajarkan di sekolah adalah pelajaran sastra. Menurut definisi lama sastra adalah sarana penumpahan ide atau pemikiran mengenai kehidupan dan sosialnya menggunakan kata-kata yang indah. Namun pendapat yang lebih modern menyatakan bahwa keindahan sastra tidak tergantung pada keindahan kata atau kalimat melainkan pada keindahan substansi ceritanya (Ahyar, 2019). Ketika sastra diperkenalkan kepada anak-anak, maka perlu adanya kesepahaman bahwa mengenalkan sastra kepada anak-anak berbeda dengan sastra umum. Karakteristik sastra anak yang khas inilah yang membantu anak memahami bacaan dari sudut pandangnya sendiri. Menurut Lukens (1999) genre sastra anak memberikan batasan yang sangat luas terhadap semua buku anak sehingga dapat disimpulkan bahwa semua buku anak adalah sastra anak (Krissandi & kawan-kawan, 2018).

Mengembangkan Sastra Anak

Membahas tentang sastra, pemikiran sebagian besar masyarakat tertuju pada karya puisi, cerpen, novel, drama, dan karya sastra lain yang ditujukan untuk pembaca dewasa. Bagaimana dengan sastra anak? Sebagaimana umumnya sastra, sastra anak juga merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan kedalam bentuk tulisan dan dinikmati oleh anak-anak. Karya sastra ini juga dapat ditulis oleh orang dewasa dan diperuntukkan bagi anak-anak (Munaris, 2020). Dengan demikian, penulis dewasa yang bertujuan mengembangkan sastra anak harus menguasai pola pikir anak-anak yang sederhana. Sebagaimana dinyatakan oleh Lucia Binder dalam ceramahnya di Jakarta (1994) bahwa “sastra anak seyogianya tidak ‘memberi instruksi’ dan ‘semata-mata mengajar moral’, tetapi harus pula merangsang fantasi menuju refleksi opini pribadi” (Trimansyah, 2020).

Dengan menikmati karya sastra yang dibaca, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kreativitas verbalnya dengan baik. Malangnya, “sebuah riset yang dilakukan CCSU (Central of Connecticut State University) tahun menempatkan Indonesia sebagai negara paling literat nomor 60 dari 61 negara — satu tingkat di atas Botswana dan satu tingkat di bawah Thailand” (Trimansyah, 2020). Ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat untuk memacu anak-anak mengikuti pola tersebut.

Sastra anak yang paling sederhana adalah dongeng. Sebagian anak masih dibacakan dongeng oleh orang tuanya sebagai pengantar tidur. “Cerita itu sangat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak, terutama karakternya”

(Trimansyah, 2020). Hal ini dapat menjadi penghubung bagi anak untuk memahami sebuah cerita. Pola pemahaman antara mendengarkan dongeng dan membaca cerita sendiri tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya saja yaitu dari menyimak diubah menjadi membaca.

Negara anggota ASEAN memiliki banyak kesamaan latar budaya. Hal ini dapat dilihat dari cerita rakyat yang beredar. Cerita-cerita tersebut mempunyai kesamaan dalam konteks cerita dan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, cerita rakyat Indonesia “Malin Kundang” mempunyai kesamaan motif dengan cerita “Pulau Jelapi” dari Thailand, “Si Tanggung” dari Malaysia, dan “Nakhoda Manis” dari Brunai (Wahyuni, 2019). Ini menjadi modal awal bagi pengenalan cerita anak di negara anggota ASEAN.

Dari Tanpa Nama Menuju Atas Nama

Cerita-cerita rakyat yang disebutkan terdahulu tidak dikenali penulisnya. Sudah jamaknya pengarang cerita-cerita tersebut anonim karena diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan. Seiring perkembangan zaman maka cerita-cerita tersebut mulai ditulis dalam bentuk buku atau kumpulan cerita. Meskipun demikian, tidak ada yang mengakui cerita tersebut sebagai hasil karyanya. Namun menurut Marahimin (2005), terdapat bias pesan moral yang tertanam dalam cerita lisan tersebut. Sebagai contoh, cerita “Malin Kundang” lebih memprovokasi dorongan untuk merantau kepada orang Minang meskipun secara tersurat pesan yang disampaikan adalah jangan durhaka kepada orang tua. Demikian pula halnya pada cerita “Si Kancil” yang mengandung bias antara kecerdikan dan kelicikan (Trimansyah, 2020) sehingga perlu dikaji lebih jauh agar tidak menjerumuskan anak-anak pada tindakan yang negatif. Hasil penelitian McClelland dan pendapat Marahimin (Trimansyah, 2020) di atas menunjukkan betapa besarnya pengaruh cerita anak pada suatu bangsa.

Ketika sebuah cerita dapat memberikan pengaruh besar pada sebuah bangsa, tentu diperlukan pesan-pesan moral yang positif kepada anak yang diusung oleh para penulis. Pesan moral positif yang disampaikan melalui cerita harus mengarah pada keberanian, kejujuran, tanggung-jawab, kreativitas, dan pesan-pesan lain yang menguatkan semangat pantang menyerah. “Jika hendak ditambahkan lagi, adalah penambahan kecakapan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan bertindak kreatif sebagai kapasitas yang perlu juga ditanamkan pada cerita anak” (Trimansyah, 2020). Nilai-nilai kecakapan abad ke-21 menjadi penting untuk mengimbangi perubahan sosial-budaya secara global. Harus diakui bahwa anak-anak generasi *Alpha* yang sedang dipersiapkan mengelola dunia di masa depan mempunyai pola pikir yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya.

Pasca era cerita rakyat yang tanpa nama pengarang mulai muncul kesadaran bahwa penulis cerita anak merupakan agen perubahan dalam mengusung pesan moral yang lebih baik. Pada tahun 1942, muncullah penulis Inggris Enyd Blyton yang populer dengan novel berserinya “*Famous Five*”. Novel tersebut dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Agus Setiadi dengan judul “Lima Sekawan.” Pada era 1970-an hingga 1980-an, masih banyak penulis cerita anak yang berkualitas. Sebutlah nama-nama “Soekanto S.A., Toha Mohtar, C.M. Nas, Suyadi (Pak Raden), Arswendo Atmowiloto, Dwianto Setyawan, Djoko Lelono, Korrie Layun Rampan, K. Usman, Radhar Panca Dahana, dan Titie Said” (Trimansyah, 2020) merupakan penulis cerita anak yang berkompeten di bidangnya.

Sayangnya, penulis-penulis cerita anak pada era selanjutnya menunjukkan kualitas yang semakin menurun. Ini dapat dibuktikan oleh Dewan Kesenian Jakarta (2018) yang mengusung kritik pedas “sayembara Cerita Anak DKJ itu tidak menghasilkan pemenang I hingga III, yang ada adalah pemenang harapan” (Trimansyah, 2020). Dunia sastra anak mengalami masa kritis. Padahal peran penulis cerita anak berusia dewasa juga dibutuhkan untuk menumbuhkan keberanian anak-anak menulis karena “hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% siswa SD kelas VI di enam provinsi daerah binaan *Primary Education Quality Improvement Project* (PEQIP) tidak bisa mengarang” (Al Fuad, 2015). Kenyataan membuat upaya menumbuhkan minat anak untuk menulis menghadapi tantangan berat.

Keberanian anak-anak perlu diberi ruang agar dapat berkembang sesuai kodratnya sehingga sastra anak akan lebih tertuju pada karya anak untuk anak. Hal ini telah dilakukan oleh *The ASEAN Issue* dengan menampilkan cerita hasil karya anak-anak dalam majalah tersebut yang dimuat dalam kolom *Children's Literature*. Hal yang sama diupayakan di Indonesia dengan diterbitkannya buku “Kecil-Kecil Punya Karya” yang merupakan hasil tulisan anak-anak yang dianggap memenuhi kriteria penerbit. Meskipun belum banyak karya anak-anak yang diterbitkan, tetapi perkembangannya

perlahan membaik. Gerakan menulis dari komunitas-komunitas literasi turut memperluas kesempatan anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya.

Peran Cerita Anak bagi ASEAN

Bacaan untuk anak tidaklah sebanyak bacaan untuk orang dewasa. Menulis bacaan anak pun tidak semudah menulis bacaan untuk orang dewasa karena “pembaca sasaran anak-anak sangat unik karena terdapat perbedaan antarfase usia dari segi kebutuhan terhadap bahan bacaan dan kemampuan mereka membaca” (Trimansyah, 2020) sehingga peran penulis bacaan anak harus jeli dalam memutuskan pembaca sasarannya. Bacaan-bacaan untuk fase pembaca awal tentu tidak dapat disamakan dengan fase pembaca lancar. Masing-masing harus melalui pertimbangan yang matang sebelum diputuskan.

Pada akhirnya, literasi anak ASEAN berujung pada pendidikan karakter. Mengutip hasil analisis kandungan penguatan pendidikan karakter dalam cerita anak, “maka produk sastra anak dalam bentuk cerita diharapkan dapat digunakan sebagai media pendidikan karakter dengan latar dunia anak dan bahasa yang mudah dipahami namun padat berisi oleh pesan-pesan moral” (Khajati, Solihati, & Safi'i, 2021). Dengan membaca cerita, anak-anak akan lebih mudah menerima pesan moral melalui bahasa yang sederhana melalui sudut pandang mereka sebagai anak-anak. “Selanjutnya, nilai moral tersebut diharapkan dapat mengarah pada pendidikan karakter yang dapat dijadikan sebagai pondasi siswa dalam berperilaku dan bersikap” (Wahyuni, 2019). Pembiasaan sikap dan perilaku yang ditanamkan dan dikembangkan pada anak-anak akan menjadi karakter yang terus melekat hingga mereka dewasa. Dengan demikian, mereka telah mengantongi modal awal menjadi pemimpin dunia di masa depan.

Mengutip pernyataan bahwa “Children relate their experiences and feelings in the most fascinating and amusing ways. But their stories are often insightful and profound, giving us a glimpse of how they view the world.” (The ASEAN Issue 22, 2022) Anak-anak mampu menghubungkan pengalaman dan perasaan dengan cara yang istimewa sehingga cerita yang mereka kemukakan seringkali membuka wawasan kita pada bagaimana mereka memandang dunia. Mendorong anak-anak ASEAN untuk menulis sesuai dengan sudut pandang mereka akan mengembangkan kreativitas verbal. Kreativitas yang terus diasah akan menjadi kebiasaan dan akhirnya terbentuklah karakter tangguh masa depan yang mampu mengambil alih kepemimpinan dunia dalam mewujudkan cetak biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025.*

Referensi

- Aditya, R. (2015). Hubungan Antara Minat Baca dan Kreativitas Verbal pada Mahasiswa Program Studi Psikologi Angkatan 2013 Universitas Mulawarman Samarinda. *Psikoborneo*, 8-20.
- Ahyar, J. (2019). *Apa Itu Sastra Jenis-Jenis Karya Sastra dan Bagaimanakah Cara Menulis dan Mengapresiasi Sastra*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al Fuad, Z. (2015). Prosiding Seminar Nasional: Pemanfaatan Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Vol. 2. In E. Syaodih, & kawan-kawan, *Membangun Imajinasi dan Kreativitas Anak Melalui Literasi* (pp. 103-110). Bandung: Sekolah Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar UPI.
- ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*. (2020). Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Dasar*. (2020). Jakarta: Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Children in ASEAN: 30 Years of the Convention on the Rights of the Child*. (2020). Bangkok: ASEAN & UNICEF.
- Elendiana, M. (2020). Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN dan KONSELING*, 54-60.
- Khajati, B., Solihati, N., & Safi'i, I. (2021). Kumpulan Cerita Anak Semut Raksasa Karya Ani Rostiani dkk. (Telaah Penguatan Pendidikan Karakter). *Journal of Language Learning and Research*, 1-23.
- Krissandi, A. D., & kawan-kawan. (2018). *Sastra Anak dan Media Pembelajaran Bahasa Anak*. (D. Radityo, Ed.) Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia.
- Munarlis. (2020). Sastra Anak sebagai Sarana Pendidikan Karakter di Sekolah. *Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, 1-10.

- The ASEAN Issue 22. (2022). Children's Literature. *Story Books for Children by Children*, pp. 51-54.
- Trimansyah, B. (2020). *Panduan Penulisan Buku Cerita Anak*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Wahyuni, L. (2019). Motif Cerita Rakyat “Malin Kundang” sebagai Sarana Penjaga Integritas Sosial Masyarakat ASEAN. *Waskita*, 49-60.
- Widyasari, A., & kawan-kawan. (2022). Fenomena Learning Loss sebagai Dampak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *BEST Journal*, 297-302.

BERTI NURUL KHAJATI lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Desember 1972. Alumni IKIP Muhammadiyah Purworejo (1998) dan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Jakarta (2021) ini aktif menulis puisi, cerpen, cerita anak, pentigrafi, dan artikel ilmiah lainnya bersama *Asian Women Writers Association (AWWA)*, *Penyair Perempuan Indonesia (PPI)*, *Teras Puisi*, *Kampung Pentigrafi Indonesia (KPI)*, *Mom Wow* Penulis Cerita Anak, *Kelompok Peminat Seni Sastra (KOPISISA)* Purworejo, *Puandemik Menulis*, *Aksi Swadaya Menulis dari Rumah*, dan komunitas literasi lainnya. Ia telah menulis lebih dari 40 buku antologi bersama sejak 2017. Beberapa di antaranya adalah: *Selendang Mayang* (AWWA, 2017), *Mengeja Semesta* (AWWA, 2020), *Lima Sahabat Peraih Impian* (LSPI, 2018), *Antologi Cerita Anak Aku Anak Laut* (Mom Wow, 2019), *Temanten* (PPI, 2021), *Kaleidoskop Kata* (Puandemik Menulis, 2022). Bukunya *Rumus Ilahi* (AT Press Bandung, 2020) merupakan antologi puisi tunggal. Ia adalah seorang guru yang bertugas di SD Negeri Setia Asih 06 Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Ia juga menulis artikel ilmiah berjudul *Peningkatan Minat Siswa Menulis Puisi melalui Penyusunan Antologi Berbasis Elektronik* untuk *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan LPMP DKI Jakarta* (Desember 2019) dan *Kumpulan Cerita Anak ‘Semut Raksasa’ Karya Ani Rostiani dkk: Telaah Penguatan Pendidikan Karakter* untuk *Journal of Language Learning and Research* (Desember, 2021). Buku terakhirnya bersama Mom Wow merupakan *Kumpulan Cernak Mencari Harta Karun* (Rumah Imaji, 2022). Cerpen terbaru berlatar sejarah dan budaya berjudul *Rubini dan Ibu Ratu* diterbitkan dan diterjemahkan di laman *dalangpublishing.com* (Januari 2023). Ia tinggal di Perum Pesona Bumi Insani, Babelan, Bekasi – Jawa Barat dan dapat dihubungi melalui email: bertikhajati.official@gmail.com.

Menggiatkan Literasi pada Sekolah SEAMEO

Dian Novrini

Gerakan Literasi Sekolah

Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipimpin Dr. Anies Baswedan mencanangkan program literasi sekolah. Berdasarkan hasil penilaian PISA dari tahun 2000 untuk literasi menyatakan Indonesia berada di tingkat bawah yaitu peringkat 72 dari 77 negara dan sains peringkat ke 70 dari 78 negara. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia negeri yang kaya akan sumber daya, namun miskin dalam menggali ilmu pengetahuan. Contohnya hobi membaca yang bukanlah sebagai hobi harian yang banyak diminati. Sedikit menggembirakan dari tahun 2020 hingga 2022 angkat buta huruf di Indonesia menurun dari 2,9 juta orang menjadi 2,7 juta orang. Hal ini dapat membangkitkan optimisme kaum terpelajar untuk terus menggiatkan literasi dan pemberantasan buta huruf.

Adapun program literasi yang diluncurkan oleh Kemendikbud adalah turunan dari kegiatan pembudayaan karakter yang berisi sebagai berikut: "Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah (GPKDS) bertujuan untuk; menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan; menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk karakter sejak di sekolah; menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga; menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara sekolah, masyarakat dan keluarga," Demikian dikutip dari Permendikbud No. 21 Tahun 2015 Pasal 2.

Munculnya program Gerakan Literasi Sekolah menurut Bapak Anis Baswedan adalah menumbuhkan bahasa budi pekerti. Bagaimana tata bahasa yang baik dapat dibudayakan mulai dari sekolah dengan berbagai program yang berkenaan dengan literasi. Apakah itu membaca maupun menulis. Dengan berkebudayaan literasi diharapkan murid dapat beretika lebih baik dan berbudi luhur. Dalam hal ini, SMP Islam Al Azhar 9 berbagi pengalaman mengenai gerakan literasi sekolah yang sudah diadakan. Sekolah ini merupakan anggota SEAMEO sejak tahun 2015.

SEAMEO

Definisi SEAMEO

Dilansir dari halaman Wikipedia SEAMEO adalah singkatan dari *The Southeast Asian Ministers of Education Organization*. Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara, yaitu organisasi antar pemerintah regional negara ASEAN yang didirikan pada tahun 1965 dengan kantor sekretariat terletak di Bangkok, Thailand. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempromosikan kerja sama regional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Sebagai sebuah organisasi yang terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan mengeksplorasi potensi masyarakat sepenuhnya,

SEAMEO mempertahankan pekerjaan dan wadah aspirasi untuk pembangunan bersama masyarakat di wilayah ASEAN ini untuk membuat kehidupan yang lebih baik dalam kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan, pendidikan kesehatan preventif, budaya dan tradisi, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, pengentasan kemiskinan dan pertanian serta sumber daya alam.

Sub Bidang pada SEAMEO

Bidang pada SEAMEO mencakup pendidikan dan kebudayaan, namun lebih luas dan kebanyakan *school based*. Tiap program digaungkan di sekolah agar menyebar dan dapat berkolaborasi dengan sekolah anggota SEAMEO yang lain. Beberapa sub bidang dalam SEAMEO adalah:

1. SEAMEO RECFON

Excellence for Food and Nutrition for Quality and Human Resources. Program ini mengedepankan tentang makanan dan nutrisi serta terdapat kegiatan *research* tentang pangan dan sumber daya manusia. Contoh program turunan yang diterapkan di sekolah adalah tentang gizi dan kesehatan anak dan remaja, sekolah sehat, kantin sehat dan *green school*.

2. SEAMEO BIOTROP

Regional Centre for Tropical Biology. Bidang ini menekankan kepada lingkungan, penelitian keragaman hayati, *biodiversity, bioproducts*. Contoh turunan kegiatan di sekolah adalah penemuan bahan bakar dari kotoran hewan dan minyak jelantah.

3. SEAMEO QITEP (SEAQIL)

Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language. Menyediakan program inovasi pengembangan pendidikan Bahasa dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Program ini disasarkan kepada guru bahasa dengan memberikan pelatihan pengembangan profesi serta meningkatkan kapasitas dan konektivitas.

4. SEAMEO QITEP (SEAQIS)

Regional Centre for Quality Improvement for Teacher and Education Personnel in Science. Region ini fokus kepada science serta teknologi dengan melalui pendekatan STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*). Penemuan baru yang inovatif serta pembelajaran *project/problem based learning* salah satu kegiatan yang dilakukan guna mengembangkan ide dan solusi dari murid-murid. Itu di antara sub bidang SEAMEO yang sudah dilakukan di banyak sekolah anggota SEAMEO. Adapun SMP Islam Al Azhar 9 baru aktif pada region SEAQIL. Yaitu tentang pengajaran bahasa dan budaya dalam pembelajaran karakter.

Literasi yang Diterapkan di Sekolah

Setelah dimunculkan dan digiatkan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Masing-masing sekolah tingkat kota maupun provinsi turut meramaikan kegiatan ini. Tambahan lagi, poin ini masuk dalam penilaian akreditasi sekolah dan penilaian kepala sekolah. Maka, tiap sekolah mencanangkan program unggulan dari kegiatan literasi di sekolah.

SMP Islam Al Azhar 9 turut serta dalam menggiatkan gerakan ini dengan adanya kegiatan tahunan yaitu, Bulan Bahasa yang diperingati tiap pekan akhir di Bulan Oktober. Adapun bentuknya adalah; *silent reading*, lomba antar kelas, pelatihan kepenulisan cerpen atau puisi, membuat komunitas penulis dan membuat buku antologi.

Awalnya kegiatan ini hanya dilaksanakan ketika momen bulan bahasa itu saja. Namun semakin gencarnya program literasi dicanangkan di sekolah, bahkan harus *include* dalam perencanaan pembelajaran guru, maka kegiatan ini pun dilaksanakan tiga sampai empat kali dalam setahun. Tentu saja, kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan membaca dan menulisnya saja. Contohnya adalah membuat Pohon Geulis (Gerakan Literasi) di tiap kelas. Lalu membuat pojok baca di lobby sekolah dan mengisi mading sekolah.

Selain itu, penjadwalan kunjungan perpustakaan tiap kelas dan bedah buku serta pemaparan oleh guru. Semua dikaitkan dengan gerakan literasi untuk membaca dan menulis. Ternyata, tidak hanya itu, SMP Islam Al Azhar 9 juga memberikan tempat bagi murid yang berbakat di bidang musik dan tarik suara, yaitu musikalisasi puisi diambil dari teks puisi karangan murid. Maka, menjadi suatu penampilan yang menarik. Di samping itu, bagi murid yang juga mempunyai hobi menggambar dapat dituangkan dalam membuat resensi buku dengan menggambar cover buku yang dibacanya dan menuliskan isi singkat buku tersebut. Sekolah bahasa dan seni memang tak dapat dipisahkan.

Berdasarkan teori Chomsky, berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa menjadi bagian dari komponen manusia dan produk khas akal manusia. Karena unsur yang membedakan manusia dengan hewan adalah kecerdasan dan kemampuannya berfikir. Bagi Chomsky, tata bahasa merupakan sistem kaidah yang menghubungkan bunyi dan arti. Secara tidak langsung bisa kita asumsikan jika tata bahasa memiliki rasa seni tersendiri.

Lain halnya dengan sastra, selain bentuk pengekspresian pengarangnya dengan menggunakan seni kebahasaan yang indah, sastra juga sebagai alat untuk menghibur. Contoh, seorang penyair haruslah memperhatikan rima dan nada dari puisi yang diciptanya dengan memilih kosakata yang tepat. Hingga karya tersebut tetap dapat menyampaikan maksud pengarang tanpa harus mengurangi keindahan nilai bahasanya.

Merujuk program literasi sekolah, banyak kegiatan yang dapat dihubungkan dengan literasi. Tidak hanya berhubungan dengan tulisan, tetapi dapat dihubungkan dengan bidang lain yang dapat membangkitkan semangat literasi murid. Contoh, mengadakan video conference dengan sekolah lain. Dialog dengan teman sebaya namun berbeda sekolah di lokasi yang berbeda.

Literasi Global Lingkup ASEAN

Adanya ASEAN adalah sebagai wadah untuk interaksi dan kerja sama antar negara Asia Tenggara. Mengutip Kemdikbud RI, hubungan antarnegara-negara ASEAN semakin diperlukan seiring munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara-negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerja sama antarnegara atau dengan dunia internasional. Organisasi internasional dibentuk untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat timbul dari interaksi antarnegara dalam berbagai bidang.

ASEAN (Association of South East Asian Nation) adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Interaksi antarnegara-negara ASEAN berupa kerja sama. Kerja sama dalam hal ini adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan.

Terdapat dua faktor pendorong terbentuknya kerja sama antarnegara-negara ASEAN, yaitu berdasarkan kesamaan atau perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerja sama. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN menghasilkan kerja sama. Contoh, Indonesia mengeksport hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan dan perbedaan wilayah (kondisi geografis) Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerja sama melalui organisasi ASEAN. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerja sama antarnegara ASEAN. Tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara dapat mengganggu stabilitas suatu negara sehingga akan menghambat kerja sama antarnegara-negara ASEAN. Kebijakan protektif Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misal, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena memengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Dampak kebijakan protektif ini juga dapat memengaruhi hubungan antarnegara sehingga menghambat kerja sama yang harmonis. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara Kerja sama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerja sama antarnegara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi salah satu penghambat kerja sama yang harmonis.

Dalam kerjasama di bidang literasi, SEAMEO mempunyai SEAQIL yaitu pada bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Diadakannya seminar dan sekolah literasi bagi guru dan pelajar, lalu lomba bercerita atau storytelling antar negara ASEAN dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa ibu. Hal ini memupuk untuk meramaikan kegiatan literasi di sekolah lingkup ASEAN. Memberikan pengalaman menarik karena dapat berpartisipasi dalam program se-Asia Tenggara.*

Referensi

- <https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/10/09/2022/angka-buta-aksara-di-indonesia-tersisa-27-juta-orang/>
- <https://www.neliti.com/id/publications/284534/konsep-dasar-gerakan-literasi-sekolah-pada-permendikbud-nomor-23-tahun-2015-tent>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/08/mendikbud-luncurkan-gerakan-literasi-sekolah-4514-4514-4514#:~:text=Gerakan%20Literasi%20Sekolah%20dikembangkan%20berdasarkan,untuk%20menumbuhkan%20budi%20pekerti%20anak>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/SEAMEO>
- <http://www.seameo-recfon.org/about-us/>
- <https://www.biotrop.org/>
- <https://www.qitepinscience.org/>
- <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/869/membaca-dan-menilai-sastra-dalam-pandangan-a.teeuw>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/26/203000369/faktor-penghambat-dan-pendorong-kerja-sama-asean?page=all>

DIAN NOVRINI adalah ibu dari 3 orang anak yang saat ini berprofesi sebagai guru. Penulis saat ini sedang belajar menulis. Berdomisili di Bekasi, penulis tergabung dalam berbagai penulisan buku antologi bersama Tim KPLJ (Kelompok Pegiat Literasi Jawa Barat) Bekasi, Tim Omera Pustaka, Tim Nulisyuk dan KGN (Kelompok Guru Ngopi). Ia juga turut berkontribusi dalam buku *G20, Pulih Bersama Bangkit Perkasa* dan *Sehimpun Mutiara Literasi Indonesia. Writing is addicted and healing*. Ia dapat dihubungi melalui instagram: diannovrini.

Peran Pesan dalam Penerjemahan

Maria Antonia Rahartati Bambang Haryo

Pendahuluan

Sebagai suatu kegiatan, menerjemahkan itu sangat menyenangkan, meski sekaligus menuntut sejumlah persyaratan, yang harus dipenuhi bila saya ingin menerjemahkan. Pertanyaannya, mengapa menerjemahkan? Inilah yang membedakan pembaca bukan penerjemah dengan pembaca yang penerjemah. Sebagai penerjemah, saya tidak sekadar berhenti memahami pesan atau gagasan yang disampaikan lewat bacaan dalam bahasa asing bagi diri sendiri, lewat kegiatan alih gagasan yang saya lakukan, Anda berusaha membuat tulisan yang semula 'bisu' bagi orang tertentu, menjadi tulisan yang mampu 'berbicara'. Tentu saja dengan pesan yang sama, seperti yang ingin disampaikan dalam bahasa sumber. Keberhasilan dalam menyampaikan amanat atau gagasan si pengarang, akan memberikan kepuasan yang tak terlukiskan bagi seorang penerjemah.

Kepuasan seperti ini pula yang saya rasakan. Lewat kegiatan ini, saya merasa dapat berbagi kesenangan – atau pengetahuan – yang saya dapatkan dari sebuah buku atau artikel, bersama mereka yang kebetulan membaca buku atau tulisan hasil terjemahan saya. Juni 1988 saya diundang sebagai pembawa makalah *L'Enseignement de la Langue par le Chant* dalam kongres yang diselenggarakan oleh FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) ke Tesalonika. Meski diundang hadir dalam kongres sebagai pengajar bahasa, saya merasa sangat beruntung hadir dalam atelier terjemahan; kesempatan tak terduga yang nantinya semakin memantapkan profesi saya sebagai penerjemah.

Saat pembicara menuliskan sebuah kalimat *The quick brown fox jumps over the lazy dog* sambil menanyakan terjemahannya ke dalam bahasa Prancis, sebagian peserta tersenyum, barangkali diam-diam mempertanyakan bobot pertanyaan pengajar. Bukankah itu mudah? Bahkan seorang penerjemah pemula pun akan dapat melakukannya dalam sekejap, *Le renard brun rapide saute par dessus le chien paresseux*. Mudah memang. Bahkan terlalu mudah. Hampir semua orang menyerahkan hasil terjemahan yang kurang lebih serupa. Hanya terdapat perbedaan kecil di sana-sini, sekalipun tidak terlalu mencolok. Ada yang menerjemahkan *fox* dengan *mangouste*; *quick* dengan *agile*.

Pembicara menggelengkan kepala. Bukan itu 'terjemahannya'. Lalu apa?

Sambil menuliskan kalimat *Bâchez la queue du wagon taxi avec les pyjamas du fakir* di papan tulis, yang bersangkutan mengatakan, itulah terjemahan yang benar. Gelak tawa memenuhi ruangan, semua orang mengira pembicara bercanda.

Diskusi

Sesungguhnya, di sinilah letak kesulitan yang harus dihadapi seorang penerjemah. Dalam memindahkan amanat atau gagasan dari bahasa sumber (asal) ke dalam bahasa sasaran (tujuan), pertama-tama mengungkapkan maknanya, dan selanjutnya mengungkapkan gaya bahasanya. Entah siapa penciptanya, kalimat *The quick brown fox jumps over the lazy dog* lazim digunakan oleh seorang tukang reparasi mesin ketik untuk melihat apakah seluruh abjad (A-Z) dapat digunakan dengan baik. Bila diperhatikan, dalam kalimat yang terdiri dari 35 huruf itu, terkandung seluruh abjad berjumlah 26 huruf; dan sisanya – 9 huruf – terdiri dari 2 huruf e; 1 h; 3 o; 1 r; 1 t; 1 u. Demikian pula kalimat 'terjemahan' *Bâchez la queue du wagon taxi avec les pyjamas du fakir* yang terdiri dari 45 huruf, di dalamnya terkandung seluruh abjad, dan sisanya yang berjumlah 19 huruf terdiri dari 7 huruf a; 1 c; 1 d; 4 e; 1 i; ; 1 l; 1 s; 3 u.

Padahal kalau saja hadirin memahami **pesan** yang sebenarnya dari kalimat **The quick brown fox jumps over the lazy dog**; maka terjemahan paling singkat adalah **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**. Tetapi apa salahnya bermain-main?

Sepulang ke Indonesia, dalam kelas terjemahan di Pusat Kebudayaan Prancis – sekarang Institut Français Indonesia – saya menuliskan kalimat yang sama, ***The quick brown fox jumps over the lazy dog***, dan menanyakan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Tak jauh berbeda dengan jawaban di atelier terjemahan Kongres FIPF di Tesalonika, hampir seluruh peserta menyerahkan hasil terjemahan yang kurang lebih serupa: ***Rubah tangkas berwarna coklat itu meloncat di atas anjing pemalas***. Hanya terdapat perbedaan kecil di sana-sini, sekalipun tidak terlalu mencolok. Ada yang menerjemahkan **fox** dengan **cerpelai**; **quick** dengan **cekatan**, atau menambahkan kata itu di belakang kata pemalas.

Ketika kemudian saya menulis kalimat ***Bumper taxi Corry Aquino dihajar Volkswagen Fariz di papan tulis***, sambil bergumam, itulah ‘terjemahan’ yang benar, semua peserta terkekeh, mengira saya bercanda.

Kalimat ‘terjemahan’ ***Bumper taxi Corry Aquino dihajar Volkswagen Fariz*** -- susunannya boleh diubah sekehendak hati, ***Bumper Volkswagen Fariz dihajar taxi Corry Aquino***, misalnya – yang terdiri dari 42 huruf, di dalamnya terkandung seluruh abjad, dan sisanya yang berjumlah 16 huruf terdiri dari 5 huruf a; 1 e; 2 o; 3 i; 1 n; 3 r; 1 u.

Dilihat dari kenyataan di atas, kegiatan menerjemahkan – baca:mengalihkkan pesan atau gagasan --, menuntut pemahaman bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan sangat baik dari pihak penerjemah. Bila ini dipatuhi, penyesatan pesan yang seringkali dikeluhkan pembaca buku atau artikel terjemahan akan dapat dihindari.

Menurut Harimurti Kridalaksana, sejumlah persyaratan diperlukan untuk dapat menjadi seorang penerjemah yang baik: 1) penguasaan bahasa asing yang akan diterjemahkan; 2) penguasaan bahasa Indonesia secara sempurna; 3) penguasaan materi yang akan diterjemahkan, atau setidaknya pengetahuan umum yang memadai; dan 4) penguasaan metode dan teknik penerjemahan. Dengan kata lain, ia harus membekali diri dengan sejumlah kesadaran, bahwa setiap bahasa memiliki kodratnya sendiri-sendiri; bahwa setiap bahasa mempunyai kemampuan untuk membentuk kata, kalimat dsb, yang berbeda dengan kemampuan bahasa lain; bahwa setiap bahasa kaya dalam wilayah budaya yang menjadi perhatiannya. (Bahasa Indonesia misalnya, memiliki sejumlah kosakata untuk membedakan nasi dari beras, lontong, ketupat dan bubur). Ia harus juga menyadari adanya berbagai variasi bahasa yang ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosial kultural, situasi, dsb. Ia juga harus menghormati kodrat setiap bahasa, dengan kata lain tidak boleh memaksakan struktur, bentuk atau cara berpikir yang ada dalam bahasa sumber. (Harimurti Kridalaksana, Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa, Nusa Indah, cetakan IV, 1982)

Pengalaman menunjukkan, kepekaan juga ikut berperan. Sebuah teks yang ‘menggigit’ bagi pembaca buku/ teks dalam bahasa sumber harus tetap ‘menggigit’ bagi pembaca buku/teks terjemahan (dalam bahasa sasaran). Karena itulah kejelian dalam mengolah dan bermain kata sangat diperlukan.



Contoh no. 1: Jika penerjemah kurang peka, dan akan begitu saja menerjemahkan sapaan dalam balon pertama – ***Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir*** – dengan ***Sahabat yang baik, aku merasa sangat bahagia berjumpa denganmu***, sedangkan tanggapan dalam balon kedua – ***C'est un alexandrine*** – dengan ***Dia orang Alexandria***; itu berarti penerjemah tidak memahami pesan yang sesungguhnya dari penulis bahasa asal.

Jadi harus bagaimana? Kalimat dalam dua balon di atas menuntut kepekaan sangat tinggi. Dari **tanggapan** berupa kalimat **C'est un alexandrin** yang artinya **Itu sebuah alexandrin**; Panoramix mengatakan, kalimat sapaan yang digunakan oleh si pendarang adalah sebuah alexandrin, bentuk puisi yang terdiri dari dua belas suku kata :

JE SUIS, MON CHER A-MI, TRÈS HEU-REUX DE TE VOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lalu bagaimana terjemahan yang benar dari kalimat sapaan di atas ?

I-NI A-KU, SE-NANG BER-TE-MU DE-NGAN-MU.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Contoh no 2: Gambar di atas menunjukkan para legioner Romawi yang sedang mencuci sambil menyanyi. Jika penerjemah dengan gegabah panjang menerjemahkan secara harafiah lirik Charles Trénet – **Je chante, je chante tout en latin, je chante, je suis romain** – dengan – **Aku menyanyi, aku menyanyi dalam bahasa Latin. Aku menyanyi, aku orang Romawi** –; apakah pembaca Indonesia menangkap pesan yang sama dengan pesan yang diterima pembaca bahasa asal/sumber?

Agar pesan yang diterima pembaca bahasa sasaran/tujuan mirip dengan yang diterima pembaca bahasa asal/sumber, saya menggunakan lagu **Marilah Kemari** ciptaan Titik Puspa yang sangat populer itu – **Marilah kemari, hey, hey, ey, ey hei, kawan ... Akulah di sini, hey, hey, hey, hey hei, kasih** – saya ubah jadi – **Marilah mencuci, ye, ye, ye, ye Nyuci sambil nyanyi, ye, ye, ye, ye.**

Saya tidak tahu bagaimana Anthea Bell, penerjemah bahasa Inggris menerjemahkan balon nyanyian di atas ? Apakah seperti yang saya lakukan, Anthea juga akan mencari lagu yang dikenal luas pembaca bahasa asal/sumber ? Misalnya lagu **Love me tender** ... Gelak tawa dipastikan akan meledak jika dia mengubah liriknya menjadi ... Wash me tender, wash me sweet ... wash me tenderly ...



Contoh no 3: Obélix menggunakan kata yang diubah letak suku katanya; *Parfaitement*, jadi *Farpaitement*.

Saya sempat kebingungan, karena terjemahan dari kata *Parfaitement* dalam bahasa Indonesia adalah *sempurna*; dengan sinonim seperti berikut: utama, eminen, istimewa, superior, terbaik. Mengacaukan letak suku kata sempurna – purnasem –; utama – matau, tamau –; isitmewa – wameisti –; superior – riorsupe –; terbaik – ikterba –; tidak menghasilkan kesan semenohok kata *farpaitement* . . . Terlintas dalam pikiran kata hebat . . . Sempurna artinya betul-betul hebat . . . Dengan mengacaukan letak suku katanya, jadilah *tebul-tebul hebat*, sebagai terjemahan *farpaitement*. Rupanya terjemahan itu cukup disukai pembaca Indonesia, karena jawaban *tebul* lebih banyak digunakan di antara komunitas *Astérix* Indonesia dalam facebook, daripada kata aslinya.

Di samping kepekaan tersebut di atas, seorang penerjemah juga dituntut untuk peka dalam rima dan irama; bukankah bahasa akan menjadi lebih indah bila kedua hal tersebut juga diindahkannya? Dalam komik *Le Grand Fosse*, halaman 32, pembaca dapat melihat gambar spanduk bertuliskan *La Grève au Fourneau - Le Glaive au Fourreau*. Bila diterjemahkan secara harafiah, artinya *Pemogokan di dapur* (tungku) – *Pedang di dalam sarung*. Itukah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya? Sebagai penerjemah saya melihat, Goscinny dan Uderzo ingin lebih menonjolkan rima dan iramanya, bukan maknanya. Mereka ingin bermain-main dengan suku kata yang berakhir dengan ‘bunyi’ [ɛv] –ève/aive, dan [o] –eau, dan memakai dua frasa yang terdiri dari tujuh suku kata. Dengan pertimbangan inilah saya memutuskan untuk ikut bermain-main, yaitu dengan mengalihkan gagasan mereka dalam gaya ‘peribahasa’: *Di mana ada Galia - Di situ Romawi gila*. Dengan cara ini saya juga ikut bermain-main dengan rima dan irama, yaitu menggunakan kata yang ‘berakhiran’ dengan bunyi [i] dan [a], dan dua frasa yang sama-sama memiliki delapan suku kata.

Sebagai penerjemah 19 judul komik *Astérix*, saya beruntung pernah bertemu Monsieur Albert Uderzo, penulis teks merangkap ilustrator di kantornya, di Paris. Pada pertemuan pertama, 22 Juni 1995, dia menyambut kedatangan saya dengan sebuah pertanyaan, *Bagaimana cara Anda menerjemahkan Astérix?* Saya tanggapinya dengan sebuah pernyataan. *Menurut Anda, Astérix bisa diterjemahkan?* Saya lihat kening Pak Uderzo seketika berkerut. *Lalu apa yang selama ini Anda lakukan dengan komik-komik saya? Saya dengar Astérix sangat dikenal di Indonesia . . .* Dengan rasa was-was saya menjawab, *“Adaptasi. Itu yang saya lakukan dengan komik-komik Anda.”* Saya sungguh tidak menduga reaksinya. Sambil menepuk bahu saya dia berkata, *Bravo, bravo . . .* Masih terngiang kata-katanya ketika saya minta diri. *Saya tidak mau Anda pulang tangan kosong . . .* lalu berjalan ke ruangan lain, dan kembali sambil membawa segulung kertas berukuran lebar, lalu mengajak saya ke sebuah meja. Hanya dalam hitungan detik, *Astérix* tergambar di depan mata saya, kemudian Pak Uderzo membubuhkan ucapan yang membuat napas saya tercekak . . . *Pour Rahartati*

Bambang Haryo ... Avec toutes mes felicitations et amitiés Le 22/06/95 Uderzo. Untuk Rahartati Bambang Haryo ... Dengan ucapan selamat dan rasa persahabatan

Sayang sekali saya tidak suka memotret maupun dipotret, jadi meskipun pertemuan yang mengesankan itu sempat diabadikan, saya sudah tidak tahu lagi di mana menyimpannya. Pengabaian yang sangat saya sesali, apalagi setelah Pak Uderzo meninggal, pada 24 Maret 2020. Meski demikian saya tidak akan lupa pertanyaan yang dia ajukan, tentang perubahan nama yang saya lakukan dalam komik-komiknya. Dalam *Le Bouclier d'Arverne*, nama Tullius Franfellus, utusan kaisar Yulius, saya ubah jadi Tullibudeggus. Kenapa Budeggus? Karena nama depannya Tulli, dan kebetulan agak kurang pendengaran. Dalam *La Zizanie*, nama Tullius Détritrus, saya ubah jadi Akalbusyukus, si manis mulut utusan Kaisar Yulius yang memiliki bakat sebagai penghasut.

Komik yang paling menghajar saya habis-habisan adalah *Astérix chez les Belges*. Banyak sekali permainan kata, nyanyian dan umpatan yang harus saya sampaikan kepada pembaca Indonesia semirip pesan yang diterima oleh pembaca dalam bahasa aslinya. Pengalaman bekerja selama beberapa tahun di Kedutaan Besar Belgia, Jakarta, membuat telinga terbiasa mendengar perbedaan lafal bahasa Prancis dari Les Wallons; warga Belgia yang berbahasa Prancis. Perbedaan yang menimbulkan gagasan untuk menyiasatinya dengan cara membubuhkan kata 'lah' pada ucapan orang Belgia, dan mengutip gaya bahasa presiden kedua Indonesia, yang gemar menggunakan kata *daripada*. ***Itu kesalahan daripada orang Belgia***

Kesimpulan

Seorang penerjemah hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa bahasa yang diterjemahkan bukan bahasa ibu. Sebuah keharusan untuk mendalami rasa bahasa asal/sumber, pesannya, kekhasannya, dengan cara memanfaatkan kamus dan internet sebaik-baiknya. Bila kondisinya memungkinkan, penerjemah dianjurkan untuk menghubungi penulis bahasa asal/sumber agar hasil terjemahan memuaskan.

Kembali pada 'pesan' pembuat kalimat ***The quick brown fox jumps over the lazy dog*** yang terdiri dari 35 huruf. Kurang puas dengan 'padanan' yang terlalu panjang – ***Bumper taxi Cory Aquino dihajar Volkswagen Fariz*** (44 huruf), berikut padanan yang lebih singkat: ***Taxi Benz Pak Qoyum gesit, VW Fachri jadul*** (34 huruf).*

Referensi

Harimurti Kridalaksana (1982). *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.

Sumardi, Muljanto (1975.) *Pengajaran Bahasa Asing*. Jakarta: Bulan Bintang

Winneke Setiawati (1984). 'Metode Pembatasan yang Menghambat' – Kompas, 8 November, hal 5. Jakarta: Yayasan Bentara Rakyat.

MARIA ANTONIA RAHARTATI BAMBANG HARYO adalah penerjemah dari 100 buku yang sudah diterbitkan dalam bahasa Prancis dan Inggris, di antaranya 19 komik *Astérix*. Diantaranya adalah *Jeruk Kristal* (kumpulan 10 cerita pendek dan 1 cerita panjang), *Canne à Sucre* (idem), *Langue et Chant – l'Enseignement de la Langue par le Chant* – metodologi pengajaran bahasa dengan nyanyian sebagai pengganti teks, *Langue et Chant – Partitions* (berisi 31 lagu dalam bahasa Prancis; partitur digarap oleh Ritmanto Saleh), 12 buku anak-anak (dalam proses), *Le Citron Cristal* terjemahan *Jeruk Kristal* dalam bahasa Prancis, dan *The Crystal Orange* terjemahan *Jeruk Kristal* dalam bahasa Inggris.

Road Blog to E-Book Attribute, Salah Satu Upaya Literasi Ramah Lingkungan

Heddy Mochtariza

Pendahuluan

Berawal dari masa pandemi, sekolah-sekolah *lockdown*, siswa terpaksa belajar dari rumah. Terpaksa, karena Pemerintah juga harus melakukan upaya maksimal untuk menekan sebaran Covid-19, dengan cara meniadakan total pembelajaran tatap muka. Jika selama ini interaksi antara siswa dan guru berlangsung terbuka dan sangat dekat, maka semuanya berubah seiring pandemi. Lantas, bagaimana nasib siswa kita, yang selama ini sudah kita bimbing, dari tidak tahu menjadi tahu lewat proses pembelajaran?. Apakah mereka kehilangan kesempatan belajar karena musibah global ini?

Pandemi mengajarkan banyak hal-hal baru bagi kita. Dengan keyakinan bahwa pada setiap kejadian akan ada hikmah, demikian juga dengan pandemi. Kita harus mengikuti protokol kesehatan (Yang mungkin saat ini sudah kita abaikan), bahkan pakaian yang kita kenakan diluar rumah, langsung dicuci, tanpa menunggu hari esok. Demikian halnya dengan kekuatiran para pakar pendidikan, bahwa akan terjadi learning loss sebagai efek dari pandemi. Benar, terjadi learning loss, akan tetapi pandemi memunculkan kreativitas anak-anak muda. Dimana-mana bermunculan ajang lomba konten kreator mulai dari video, vlog, dan sebagainya. Bagi pendidik, muncul fenomena baru, webinar bertajuk pelatihan menulis, pembuatan media pembelajaran, dan seterusnya.

Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat

Webinar, Salah Satu Upaya Tingkatkan Literasi

Fenomena baru dengan maraknya webinar bertema literasi, merupakan peluang untuk geliatkan literasi di tanah air. Maka, saya Madame Heddy mengambil inisiatif untuk melakukan pelatihan menulis di blog. Dengan menggandeng Ikatan Guru Indonesia (IGI) serta Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan (YPTD), saya bersama Chrisma Juita Nainggolan mengadakan kegiatan bertajuk Road Blog to Book Attribute IGI-YPTD.

Blog melalui aplikasi Blogger atau WordPress, bisa didownload di Playstore, menjadi trending sebagai sarana penghubung guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kelengkapan fitur blog yang bisa memadukan antara tulisan atau teks, photo atau gambar dan video, mempermudah interaksi guru dan siswa. Selain itu, blog juga dianggap termurah untuk pemakaian kuota internet dibandingkan dengan aktivitas share video full. Sehingga, menulis di blog menjadi salah satu pilihan bagi guru di era pandemi, yang berkelanjutan. Hingga pandemi mereda, sekolah-sekolah kembali melaksanakan tatap muka secara normal, ternyata blog masih digemari guru.

Bagi guru yang ingin variatif dalam media pembelajaran, dapat menggunakan blog dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika anda seorang guru yang mengampu mata pelajaran Ekonomi, dapat membuat ulasan singkat tentang inflasi melalui tulisan di blog. Kemudian, beri instruksi agar siswa membaca serta menanggapi melalui komentar di blog tersebut. Dengan demikian, siswa akan terbiasa membaca dan menganalisa materi pelajaran dengan media blog. Harapan ke depan, tentulah agar siswa mencintai literasi serta menjadi edukasi langsung untuk menumbuhkan minat baca.

Tahun ke dua ketika pandemi masih berlanjut, berbagai masalah baru muncul seiring tuntutan pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan sebutan daring. Orang tua siswa mulai mengeluhkan biaya untuk pembelajaran daring, mulai dari pengadaan smart phone plus kuota internet. Kendala keuangan seperti ini tentulah sulit untuk

diatasi, terlebih karena pemberlakuan Work From Home, otomatis membuat penghasilan orang tua berkurang. Pada masa-masa sulit itu, serta adanya tuntutan untuk tetap belajar mengupgrade kemampuan guru dan siswa semakin tinggi. Maka, muncullah ide saya untuk membuat pelatihan Road Blog To E-Book Attribute. Khusus untuk E-book, bukan sembarang E-Book, karena kami berkolaborasi dengan YPTD untuk pengurusan ISBN nya.

Road Blog to E-Book Attribute (RBTEB), Solusi Literasi Ramah Lingkungan

Kegiatan Road Blog to E-Book Attribute (RBTEB) yang kami selenggarakan mulai bulan November 2021 hingga Mei 2022, menghidupkan kembali geliat literasi di kalangan pendidik dan siswa. Dengan jumlah 8 Whats App Grup yang kami kelola, api literasi mulai hidup. Awalnya, tulisan di blog masih seadanya, tergantung mood dan kesediaan peserta RBTEB menorehkan karyanya. Namun ternyata, setelah satu tahun, jumlah link yang tersemat di blog telah mencapai sekitar 300 link blog. Jika tulisan-tulisan tersebut dikemas menjadi buku, bisa mencapai 150 halaman.

Dari pengalaman selama mengelola kegiatan RBTEB, kendala mendasar yang dihadapi guru untuk menulis adalah minimnya pelatihan dengan biaya ringan. Beberapa lembaga maupun komunitas yang mengadakan pelatihan menulis, mengenakan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari biaya pendaftaran, biaya masuk menjadi anggota (Karena nomor anggota menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan), biaya editing, hingga biaya cetak. Salah seorang peserta menyampaikan keluhan, bahwa untuk menerbitkan sebuah buku ber-ISBN harus mengeluarkan biaya dua juta lebih. Angka yang benar-benar fantastik buat seorang guru PAUD honorer seperti saya, yang hanya bergaji 300 ribu rupiah sebulan.

Dengan semangat ingin berbagi serta menjembatani antara guru maupun profesi lainnya, maka kami memetakan kekuatan jaringan yang dimiliki saat itu. Saya segera menghubungi pemilik YPTD, ayahanda Thamrin Dahlan, seorang Purnawirawan Polisi yang aktif sebagai pegiat literasi. Secara kebetulan, beliau menangani sebuah yayasan nir laba, yang menerbitkan buku secara gratis ber-ISBN. Kemudian kesepakatan diambil, beliau memfasilitasi penerbitan buku gratis serta menyediakan zoom selama 5 bulan.

Pada kurun waktu November 2021-Mei 2021, antusiasme guru-guru untuk mengikuti pelatihan secara online sangat tinggi. Setiap hari Jum'at kami mengadakan webinar pelatihan menulis dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu. Dan ternyata, menulis bukan lagi merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang sastra. Dari berbagai nara sumber yang telah berkontribusi, ada yang berprofesi sebagai dokter, dosen, olahragawan, pengurus berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Guru Indonesia, dan sebagainya.

Di negara kita, Indonesia, ada tuntutan bagi guru untuk membuat buku ber-ISBN, yang berguna untuk angka kredit kenaikan pangkat (khusus bagi guru ASN). Buku sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat, tentulah sangat memberatkan. Sebab, guru harus rela merogoh kocek dalam-dalam, bahkan untuk biaya editing saja sekitar Rp.850.000. Jika di total, biaya untuk menerbitkan sebuah buku, bisa di atas angka satu juta lebih, karena semuanya berbayar, mulai cover, urus ISBN, hingga naik cetak. Sementara itu, bagi sekolah-sekolah swasta yang bonafid, juga memberi reward kepada guru-guru mereka yang mampu menghasilkan karya berupa buku. Dengan E-Book, dana cetak dihilangkan dan guru hanya memerlukan setidaknya Rp 300 saja, dan itu masih berkurang jika penulis merangkap sebagai editornya.

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki E-Book. Pertama, hanya dengan mendapatkan link buku, siswa bisa membaca karya guru tanpa harus membeli. Kedua, untuk guru sendiri, jika ternyata buku tersebut di baca oleh banyak siswa, maka guru bisa mendapat uang dari blognya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, E-book tersebut bisa ditawarkan ke penerbit, yang tentu saja akan menghasilkan uang. Ketiga, penggunaan E-book dapat mengurangi konsumsi kertas. Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), diperkirakan produksi kertas nasional sepanjang 2020 hanya mencapai 13,33 juta ton. Angka tersebut melorot 1,98 persen jika dibandingkan dengan realisasi produksi 2019 sebanyak 13,6 juta ton (Andi M.Arief, Bisnis.com. 2021). Secara sederhana, kita dapat menganalisis keterkaitan antara konsumsi kertas dengan trendingnya pengadaan buku-buku elektronik (E-book).

E-book, Upaya Kurangi Konsumsi Kertas

Dengan demikian, E-book merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengurangi konsumsi kertas. E-book juga bisa menyelamatkan bumi dari penebangan pohon secara besar-besaran, sebagai bahan baku kertas. Penggunaan

E Book ini juga sudah diujikan secara terbatas oleh ahli media. Penelitian pengembangan menggunakan metode Multimedia Development Life cycle (MLDC) dengan menggunakan Adobe Indesign CS6. Sehingga, sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.

Kegiatan yang kami kelola dengan tajuk RBTEA, membawa pesan geliatkan literasi serta kurangi pemakaian kertas, selamatkan bumi dari erosi. Pesan ini juga kami sampaikan kepada para pegiat literasi, agar turut serta mendukung berbagai program literasi, selamatkan bumi, dengan menghasilkan karya berupa E-book. Mari kita dukung dan sahuti program Road Blog To E-Book Attirbute, bersama kita bisa, pulih perkasa, bangkit bersama.*

Referensi

Heddy, Madame (2021). *Karena Menulis Aku Ada*. Jakarta: Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan

<https://news.unair.ac.id/2019/07/03/industri-kertas-dan-deforestasi-hutan-haruskah-beralih-pada-dunia-digital/?lang=id>

https://gmb.perpusnas.go.id/index.php?module=artikel_kepustakaan&id=42

Andi M.Arief (2021), *Bisnis.com*.

HEDDY MOCHTARIZA (Madame Heddy). Founder ROAD BLOG to BOOK Attribute, kerjasama Ikatan Guru Indonesia, YPTD dan Guru Ahli. Sebagai guru PAUD dengan gaji 300 ribu rupiah perbulan, ia berkeinginan memajukan literasi di kalangan guru dan masyarakat lainnya. Salah satu solusi cerdas yang ia lakukan adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya IGI, YPTD, dan Guru Ahli. Membangkitkan literasi, tentulah tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan dan kesabaran, agar mampu memantik semangat geliatkan literasi. Ia juga bercita-cita, ingin menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi konsumsi kertas sebagai bahan baku. Untuk itu, ia fokus pada output kegiatan RBTEB berupa E-book yang dikelola dengan tim, Semoga cita-cita mulia ini terwujud, literasi masyarakat Indonesia naik, plus menjaga kelestarian lingkungan dengan produk E-book. Heddy dapat dihubungi di heddymadame@gmail.com.

Peran Sastra di Era Globalisasi

Sri Margawati

Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dan berhasil menjadi tuan rumah presidensi G20 pada tahun 2022. Selanjutnya Indonesia kembali dipercaya menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Penerimaan chairmanship secara resmi dari Kamboja ke Indonesia diadakan di Phnom Penh. Dalam sambutannya, presiden mengharapkan ASEAN harus memperkuat diri untuk menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.

“ASEAN 2045 harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” tegasnya. Persaingan global menjadi hal penting yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai upaya di segala bidang harus terus menerus dilakukan agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain di dunia.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, mulai tahun 2022 mulai diberlakukan Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek yang targetnya terealisasi secara nasional pada tahun 2024. Salah satu faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam Kurikulum Merdeka adalah pembentukan karakter yang diharapkan akan mampu membekali generasi bangsa menjadi Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila memiliki enam elemen yakni berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Profil Pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Karya sastra memiliki peran yang strategis dalam memperkenalkan berbagai karakter yang dapat mengantarkan seseorang memiliki budi pekerti luhur sebagaimana yang diharapkan pada Profil Pelajar Pancasila. Karya sastra menjadi salah satu sarana kontrol sosial dalam mengendalikan perjalanan pembangunan bangsa, dari segi ideologi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Karya sastra lahir dari pemikiran dan analisis para penciptanya dalam menghadapi fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Pentingnya apresiasi sastra di dunia pendidikan sebagai sarana melatih pembiasaan membaca dan mengapresiasinya. Hal ini untuk melatih siswa agar memiliki daya kepekaan sosial, nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam karya sastra sebagai pesan moral, falsafah hidup, dan mampu merasakan keartistikan bahasa yang digunakan dalam karya sastra tersebut. (Puji Santoso Pusat Bahasa dalam Kiprah HPBI, 2000).

Pentingnya mempersiapkan generasi sejak dini agar mampu menghadapi era globalisasi. Pada era globalisasi, persaingan di segala bidang tidak dapat dipungkiri. Termasuk dalam bidang budaya dan sastra memiliki peran yang penting di kawasan negara-negara di ASEAN. Perkembangan adat kebudayaan suatu daerah dapat dibaca dari karya-karya yang dihasilkan. Sejak zaman dahulu, sastra merupakan alat untuk komunikasi dari masyarakat kepada bangsanya. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui karya sastra.

Jika berbicara tentang istilah globalisasi, tentu tidak terlepas dari nasionalisasi dan lokalisasi. Berdasarkan periodisasi sastra, sejak era tahun 30-an, Sutan Takdir Alisyahbana mulai menulis tentang orientasi ke dunia Barat. Penentangan tentu saja terjadi dari sastrawan lainnya. Penentangan tersebut meminta agar sastra bisa memadukan budaya timur dan barat. Khasanah kebudayaan Indonesia tetap harus dipertahankan.

Permasalahan ekonomi, perdagangan tidak lepas dari pengaruh budaya termasuk bahasa dan sastra. Sudah tidak dipungkiri lagi banyaknya seniman yang menggelar pertunjukan di luar negeri sebagai bagian dari promosi kebudayaan Indonesia. Kebudayaan tersebut membawa serta produk-produk nasional yang dapat diperdagangkan di luar negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergaulan global merupakan sarana memperkenalkan produk lokal yang dapat menghasilkan devisa negara.

Melestarikan Sastra

Salah satu bentuk kerja sama melestarikan budaya bangsa bisa dengan cara menjalin kerja sama di bidang budaya dan sastra. Dalam rangka ajang silaturahmi antarbangsa dan memperkuat akar budaya bangsa, Perkumpulan Rumah Seni Asnur (PERRUAS) membuka peluang kepada masyarakat ASEAN untuk membuat buku antologi karya bersama. Puisi, Pantun, Gurindam dan Syair adalah sastra Indonesia yang berkembang di Kawasan ASEAN. Karya-karya Puisi, Pantun dan Gurindam telah mengumpulkan lebih dari seribu peserta dan memperoleh rekor MURI penulis terbanyak tingkat ASEAN. Penulis terdiri dari kalangan pendidikan dan budayawan.

Selain membuat buku antologi puisi, pantun, gurindam dan syair, para penulis juga membacakan karyanya dan diunggah ke media sosial dan *youtube* agar dapat dikenal oleh seluruh warga dunia. Dalam karya sastra warisan budaya bangsa tersebut terdapat muatan pesan-pesan positif yang disampaikan dari setiap karya yang dihasilkan. Hal ini dapat digunakan sebagai media hiburan dan media pembelajaran di dunia pendidikan dan bagi para penikmat sastra digital.

Pentingnya menjalin kerja sama bidang literasi antar negara, sebagai upaya menjaga perdamaian antar negara. Teeuw mengungkapkan bahwa, sastra berada di antara konvensi dan inovasi. Karya sastra kapan pun ditulis tidak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya (Teeuw, 1983: 63). Menurut Djojonegoro (dalam H. Nani Tuloli, 2002:235), sastra merupakan bagian yang amat penting dari peradaban mana pun di dunia. Nilai-nilai adat istiadat dan peradaban terdapat dalam karya sastra, selain juga dapat membentuk masyarakat yang modern. H. Nani Tuloli mengatakan, peran sastra dalam era globalisasi adalah :

1. Mendorong dan menumbuhkan nilai-nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertaqwa
2. Memberi pesan kepada manusia, terutama pemimpin, agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, mncintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran
3. Mengajak orang untuk bekerja keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama
4. Merangsang munculnya watak-watak pribadi yang tangguh dan kuat, seperti kemauan untuk berkoban demi mencapai cita-cita.

Pada era globalisasi, sastra merupakan sarana penyebar ilmu pengetahuan. Karya sastra lahir dari imajinasi pengarang yang memberikan petunjuk peradaban yang ada pada masa dan suasana tertentu. Hasil karya sastra yang telah dibuat oleh para penulis di seluruh dunia menjadi gambaran peradaban dan kebudayaan masyarakatnya.

Bentuk-bentuk karya sastra seperti novel, dapat dijadikan film di layar lebar. Puisi, pantun, gurindam dan syair juga dapat dibuat menjadi sastra digital dengan menarik. Kecanggihan teknologi menghasilkan karya sastra yang menjadi pertunjukan, industrialisasi dan ilmu pengetahuan dan berkembang di masyarakat modern. Berbagai karya sastra yang dihasilkan, baik dalam karya cetak maupun digital, sastra berperan besar memberikan hiburan, pengetahuan, pembelajaran yang mengandung nilai-nilai karakter di era globalisasi ini. *

Referensi

Sugono, Dendy dan Suladi (2000). *Kiprah HPBI*.

Teeuw, A. (1983). *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.

<https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/kegiatan/a9151c70-96fe-4594-aa38-e40e5d7ad237.pdf>

<http://www.rumahliterasisumenep.org/2020/06/peran-karya-sastra-di-era-globalisasi.html>

(Unduh 6 Desember 2022, pukul 22.02)

<https://terbitkanbukugratis.id/mujiatun-wira/02/2021/menulis-pantun-1000-guru-asean/> (unduh, 15 Nov 2022, pukul 13.00)

<https://malang.times.co.id/news/berita/8s58iwyy0n/Indonesia-Tuan-Rumah-ASEAN-2023-Jokowi-Saya-Tunggu-Kehadiran-Yang-Mulia#:~:text=TIMES%20MALANG%2C%20JAKARTA%20%E2%80%93%20Indonesia%20resmi,Widodo%20di%20Phnom%20Penh%2C%20Kamboja.> (Unduh 26 Nov 2022, pukul 12.50)

SRI MARGAWATI lahir di Surakarta, 28 Februari 1967, menetap di Depok sejak tahun 1992. Menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sejak tahun 1992-2000 mengajar di SMP Pelita 1 Depok. Tahun 2000-sekarang sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Depok Jawa Barat. Melalui Facebook, mulai bergabung menulis beberapa buah buku antologi puisi bersama Sahabat Rose Book dengan judul *Mata Cinta* (2017), *Ayah Bangsa* (2017), *Kultur* (2018). Menulis buku antologi puisi bersama guru-guru SMP Negeri 5 Depok, *Sebutir Debu* (2018), Menulis beberapa buku antologi puisi, antologi pantun, antologi cerpen bersama Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat (KPLJ) dengan judul *Berpuisi Bangun Budaya Literasi* (2017), *Cita Rasa dan Kuliner* (2018), *Menguatkan Karakter Siswa Melalui Pantun* (2018), Antologi bersama haiku-senryu, *Bianglala Sakura Nusantara* (2018). Tergabung dalam kepenulisan buku antologi Inkubator Literasi Kota Depok bersama Perpunas Press, *Kearifan Lokal di Tengah Modernitas* (2021). Menulis bersama Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya dan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat (KPPJB) buku antologi puisi berjudul *Meruah Rasa Merangkai Kata* (2021). Tulisannya juga termuat dalam buku *Pulih Bersama Bangkit Perkasa*.

Sumbangsih Sastra bagi ASEAN

Lucy Yolanda

“Jangan perbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan.”

Bung Tomo

Capaian Baik Indonesia

Saat ini Indonesia berperan penting menjadi tuan rumah sebuah perhelatan besar yaitu KTT G20. Konferensi Tingkat Tinggi G20 adalah forum kerja sama multilateral terdiri atas 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan satu organisasi antarpemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa. Diselenggarakan di Bali pada 15 November 2022. Sebelumnya bapak Presiden kita, Joko Widodo, pernah memberikan dukungan kepada pemimpin Rusia dan Ukraina untuk meminimalisasi ketegangan politik di antara kedua belah pihak. Karena apabila dibiarkan berkepanjangan akan sangat berdampak kurang baik terhadap kedua negara, bahkan negara-negara lain. Langkah Indonesia dengan melakukan hal tersebut telah memberikan dukungan, bahwa eksistensi kita ada untuk mengulurkan tangan sebagai teman dalam kancah persahabatan multilateral ini. Bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama, tumbuh lebih kuat, dan berkelanjutan.

Sastra dan Literasi sebagai Media Aktualisasi

Berkaitan dengan hal ini, sastra dan literasi adalah satu kesatuan. Sebagai media penyampai pesan yang sangat penting dalam upaya merekam dan mewakilkan sekelumit keberlangsungan dan kebhinekaan kehidupan Indonesia di dunia ini.

Saat pandemi melanda dua tahun lalu, negara-negara secara global telah mengalami guncangan dalam segala aspek kehidupan. Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Ekonomi (Airlangga), Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Ekonomi Kreatif (Sandiaga Salahudin Uno) telah berhasil mengelola giat perekonomian kita dengan baik dan stabil. Angka pengangguran menurun, lapangan kerja semakin luas, dan pengusaha ekonomi mikro semakin menggeliat, dengan produk-produk yang dihasilkan semakin beragam. Apalagi tidak sedikit generasi muda milenial yang ikut terlibat. Sedangkan jika dibandingkan dengan perekonomian di beberapa negara lain ada yang mengalami inflasi, resesi, bahkan hancur (*chaos*).

Istilah Sastra berasal dari Bahasa Sanskerta (India), yang terdiri dari kata ‘sas’ yang artinya mengajarkan, memberi petunjuk, instruksi, serta mengarahkan; dan akhiran ‘tra’ artinya menunjukkan alat, atau sarana untuk mengajar, yang dapat menjadi petunjuk, bisa mewujudkan berupa buku instruksi atau buku pengajaran. Dengan kata lain sastra adalah media pembelajaran dalam bentuk tertulis. Penggolongan sastra terdiri atas tiga golongan besar yaitu puisi, prosa, drama. Artikel, esai, biografi termasuk ke dalam jenis prosa. Keadaan masyarakat, sosial, budaya, dan politik dapat digambarkan dengan menggunakan media sastra tersebut.

Beberapa contoh diantaranya, seorang guru melihat keadaan sekolah yang tidak layak atau mengungkapkan kecintaannya terhadap profesinya maka ia deskripsikan ke dalam sebuah puisi, kritik sosial, artikel, bahkan film atau drama. Seorang *foodvlogger* karena kecintaannya kepada kuliner lokal maka ia bagikan melalui vlognya sebagai penjelajah kuliner Nusantara. Begitupun seorang *traveler* yang senang menjelajah keindahan alam dan kearifan budaya Indonesia.

Bagaimana seseorang hidup di pedalaman memanfaatkan hasil alam yang ada, dikarenakan sangat jauh dari pasar dan kota. Hidup dari hasil alam, kita menjadi tahu keragaman, kekhasan, dan kebiasaan setiap suku dalam mengolah panganannya. Lalu cerita para vlogger alam yang hobi menyusuri pantai untuk mengeksplor kekayaan ekosistem laut dan keanekaragaman hayatinya. Adapun kehidupan berkebudayaan sendiri dan mengolahnya menjadi panganan untuk

dikonsumsi sehari-hari. Semua itu sangat menarik untuk dibagikan. Tentu akan menjadi referensi bagi yang menonton vlognya tersebut. Begitupun tempat-tempat wisata di Indonesia sangat beragam dan kaya. Semua sangat khas (otentik).

Lalu serba-serbi kisah gotong-royong warga saat pandemi kemarin menyediakan swasembada bahan makanan gratis, secara tidak langsung telah mengajarkan masyarakat membudayakan keshalihan sosial, empati, dan sikap kritis yang dapat memperlancar hubungan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut dapat dituliskan melalui cerpen, artikel, atau puisi. Lalu anggota masyarakat melihat pembangunan pabrik-pabrik dan daerah potensial menjadi tempat wisata. Maka sastra dan literasinya menjadi alat 'perekam' untuk mendeskripsikan lingkungannya. Masalah sampah, pelik-pelik guru honorer, isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, bencana alam, masalah ketidakadilan hukum, dan lain sebagainya. Begitu banyak sudut pandang yang terlahir. Hal itu semua menjadi 'rekaman' sebagai gambaran kondisi realitas negara tersebut secara khusus.

Maka dari itu, suatu karya sastra menjadi media yang sangat tepat. Dengan didukung era digital saat ini, Teknologi sudah menjadi dasar untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan. Media sosial menjadi media eksistensi diri yang sudah tidak asing di masyarakat. Semua hampir mengenal bahkan memiliki *Tweeter*, *Instagram*, *Facebook*, *Tik Tok* dan sebagainya. Dari kalangan anak sampai dewasa. Mereka mudah mengakses informasi melalui berbagai akun media sosial tersebut. Segala kemudahan membuat semua orang dapat melihat berita atau kondisi yang tengah terjadi. Saat ini para milenial sering menyebutnya dengan istilah *viral*, atau *update*. Mereka tidak mau ketinggalan informasi dan trend terbaru. Hanya dalam genggam *smartphone*.

Literasi Sastra memiliki makna universal. Mengutip pernyataan seorang sastrawan dan penulis aktif Indonesia (Dody Ahmad Fauzi: 2022) dalam kelas Antologi Artikel yang sedang diampunya, menyatakan bahwa makna literasi sekarang sangatlah luas. Bahkan ada istilah literasi makrifat. Literasi makrifat memiliki arti hakikat pada sastra literasi itu sendiri. Yaitu mampu membaca apa yang tersurat dan tersirat. Beberapa pengertian literasi ada istilah literasi numerasi, literasi digital, dan literasi semesta. Hal ini disebabkan karena banyaknya aksara sebagai media sastra yang diciptakan Tuhan di semesta ini yang harus dibaca, dipahami, dan ditaati oleh manusia.

Beberapa manfaat dari sastra diantaranya: Memberikan gambaran perkembangan budaya lokal yang merupakan bentuk hasil budaya bangsa; Mengetahui persolan-persolan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial politik; Sebagai media pengajaran dan hiburan; Memperkaya pengetahuan intelektual pembaca; Dapat dijadikan bahan penelitian; Membuka wawasan yang berkenaan dengan peradaban manusia.

Sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini telah lama mengenal karya sastra baik itu pantun, karmina, syair, gurindam, seloka, mantra, dan sebagainya. Semua itu merupakan salah satu genre puisi lama yang merepresentasikan masyarakat pada zamannya (masyarakat lama). Berdasarkan hal itu dibuatlah periodisasi atau penggolongan berdasarkan waktu (Periodisasi Sastra) sebagai gambaran kondisi jaman tersebut baik segi politik, sejarah, ekonomi, sosial, budaya, agama (kepercayaan), dan pendidikan. Jika kita membaca atau mempelajari sastra lama, kita laksana dibawa oleh mesin waktu untuk menyelami cerita masa lalu sebuah bangsa.

Beberapa negara ASEAN yang masih serumpun dengan Indonesia yaitu rumpun Melayu. Seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Negara-negara tersebut memiliki syair-syair yang khas sampai saat ini. Misalnya Malaysia masih kukuh dengan penggunaan lagam (lagu tema) dalam mengiringi setiap puisi/syairnya. Cenderung mempertahankan aturan rima, larik, dan persajakan. Jika di Indonesia jenis puisi tersebut termasuk pada golongan puisi lama.

Kita banyak menyerap ilmu kebijaksanaan, nasihat, dan nuansa religius. Bahkan seorang penyair Brunei ada yang menelisik serta bereksperimen. Karena kecintaannya kepada sastra khususnya puisi, beliau melakukan penelitian dan menjadikan puisi sebagai metode terapi kesehatan jiwa. Beliau mengakui, Indonesia menjadi sumber sastra terbesar dan terbanyak sebagai rujukan. Vietnam kita tahu negara tersebut kuat mempertahankan suku bangsanya, salah satunya Champa (Suku Vietnam Muslim). Pada peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana persatuan, keagamaan, dan budaya dipertahankan dengan bahasa. Karena semboyan mereka apabila bahasa hilang, negara pun hilang.

Konklusi

Indonesia, merupakan negara yang kaya akan kesusastraan. Begitu banyak sastrawan dan penulis Indonesia yang berkarya lewat buku-buku, puisi, serta berbagai karya tulisan yang sangat menginspirasi. Jika kita melihat perjuangan

para pahlawan Indonesia, mereka pun memiliki semboyan-semboyan hidup untuk menggelorakan semangat demi mewujudkan kemerdekaan bangsa.

Seperti halnya Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang sangat mencintai sastra. Sampai-sampai kumpulan puisi bertema perjuangannya dibukukan dengan judul *Puisi-Puisi Revolusi Bung Karno*. Ada banyak puisi yang beliau buat dalam buku kumpulan puisi tersebut. Semua bertema semangat, antusiasme, religiusitas, perlawanan terhadap segala jenis penjajahan (termasuk penjajahan fisik dan psikis), dan kecintaan kepada negara Indonesia, walaupun perjuangannya tak sedikit yang menentang. Seperti yang tergambar dari puisi beliau yang berjudul *Dimakan Api Unggun*. Lalu sisi religius (kecintaan kepada Tuhan YME) digambarkannya dalam puisi yang berjudul *Dikantongi Oleh Tuhan*. Berusaha mengajak kita sebagai manusia harus ingat akan Tuhan sebagai asal-muasal hakikat kehidupan. Puisi dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan beliau yang sangat epik dan bersahaja.

Tentunya masih banyak karya sastra yang digoreskan para pahlawan dan pujangga Indonesia. Dan tentu akan menjadi inspirasi kekayaan literasi sastra Indonesia. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak marilah kita rekam dan lukis peristiwa hidup, fakta yang ada di sekitar kita dengan penuh hikmah. Melalui sastra dan literasi menjadi media eksistensinya. Didukung oleh kemajuan digital yang akan 'mengemas' karya kita menjadi karya yang abadi. Tentu akan sangat berkesan sepanjang hayat. Untuk kemajuan bersama yang lebih baik. *

Referensi

[https://juridik.id/2022/11/04/arti-dan-makna-literasi/\(diunduh pada tanggal 5 November 2022\)](https://juridik.id/2022/11/04/arti-dan-makna-literasi/(diunduh pada tanggal 5 November 2022))

Waluyo, Herman J. (1987). *Teori dan Apresiasi Puisi*. Surakarta: Erlangga.

[https://www.indonesiana.id/read/154431/sejarah-dan-manfaat-sastra-indonesia#:~:text=Sastra%20memiliki%20banyak%20sekali%20manfaat,yang%20berkenaan%20dengan%20peradaban%20manusia.\(diunduh pada 13 November 2022\).](https://www.indonesiana.id/read/154431/sejarah-dan-manfaat-sastra-indonesia#:~:text=Sastra%20memiliki%20banyak%20sekali%20manfaat,yang%20berkenaan%20dengan%20peradaban%20manusia.(diunduh pada 13 November 2022).)

<https://youtu.be/sXpE2NEt8Dc> jelajah sastra ASEAN 2022 (workshop) (diunduh pada tanggal 4 November 2022)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sastra_Indonesia&ved=2ahUKEwiJoePWqJz7AhXK6XMBHVtZAukQFnoECBEQAQ&usq=A0vVaw2Ql-3alvl_eWojwpjiDFS8 (diunduh pada tanggal 5 November 2022)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.detik.com/jabar/berita/d-6235169/kumpulan-kata-bijak-dan-inspiratif-dari-para-pahlawan/amp&ved=2ahUKEwim2MORqZz7AhUi7zgGHaCJA-kQFnoECA4QAQ&usq=A0vVaw3MCbPmOGfClITEORF3jQSO> (diunduh pada tanggal 6 November 2022)

<https://www.google.com/search?q=puisi+puisi+revolusi+bung+karno&client=ms-android-transsion&sxsrfs=ALiCzsZzibbPicvXqZ91eboDZ2RdBeOKsA%3A1667832743005&ei=phtpY6btPKLe4-EPoMe0yA4>(diunduh pada tanggal 6 November 2022)

<https://www.kompasiana.com/lucyyolanda5729/63666bdb115ad028203ee52/menulis-siapa-takut#> (diunduh pada tanggal 6 November 2022)

<https://juridik.id/2022/11/05/bumiku/> (diunduh pada tanggal 6 November 2022)

[https://www.kompasiana.com/lucyyolanda5729/6358068b633ebc127d5dfc22/perempuan-tertindas-atau-menjadi-agen-perubahan.\(diunduh pada tanggal 6 November 2022\)](https://www.kompasiana.com/lucyyolanda5729/6358068b633ebc127d5dfc22/perempuan-tertindas-atau-menjadi-agen-perubahan.(diunduh pada tanggal 6 November 2022))

LUCY YOLANDA lahir di Bandung, 27 September 1989. Lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Kecintaan terhadap mengajar, menuntut ilmu, dan berbagi ilmu diwujudkan dalam profesi yang sampai saat ini ditekuninya. Menjadi guru SMP Negeri 2 Baleendah di Kabupaten Bandung, tidak menyurutkan hobinya menulis. Walaupun masih dalam tahap belajar, tekad menebarkan manfaat lewat tulisan menjadi salah satu motto hidupnya. Saat ini aktif bergabung di KPPJB (Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat), *Juridik.id* (Jurnal Pedagogik Indonesia), dan aktif menulis di *Kompasiana*. Ia dapat dihubungi melalui lucy.yolanda01@gmail.com.

Pesona Pantun di Mata Dunia

Rahmiwati Marsinun

Pantun merupakan suatu bentuk kekayaan sastra Indonesia yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak zaman dahulu, pantun digunakan sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat untuk menyampaikan maksud secara lebih halus agar tidak menyinggung perasaan pendengar (Koentjaraningrat, 2009). Seiring perkembangan zaman, tradisi berpantun di kalangan generasi muda mulai ditinggalkan. Mereka menganggap pantun hanya sebagai hiburan sehingga tidak wajib bagi mereka untuk mengembangkan seni berpantun. Berbagai upaya dilakukan agar tradisi berpantun tetap berkembang khususnya di kalangan generasi muda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2008) pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu), Pantun dikenal di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Dalam bahasa Minang pantun berasal dari kata 'patuntun', dalam bahasa Jawa pantun di kenal dengan nama *parikan*, dalam Bahasa Sunda dikenal dengan nama *paparikan*. Pada masyarakat Batak, pantun dikenal dengan sebutan *umpama* atau *ende-ende*, dan masyarakat Toraja menyebutnya dengan *londe*. Orang Aceh dan Ambon juga mengenal pantun dan menyebutnya dengan *panton*, sedangkan orang Bengkulu menyebutnya dengan *rejong*. (Maryanto, 2014).

Menurut Surana (2010), pantun bukan sekedar karya sastra asli Melayu berjumlah empat baris dengan rima a-b-a-b, tetapi merupakan cara orang-orang Melayu memahami dan mensakralkan alam membangun peradaban manusia, dan memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Haji Saleh (2007), bahwa pantun hadir sebagai sebuah taman bahasa terindah. Bunga-bunganya berwarna warni, dan wangiannya tanpa bandingan. Bunga-bunga ini disimpan di bibir, dalam ingatan, dalam tulisan dan upacara harian. Tanpa pantun manusia Nusantara ini menjadi lebih miskin, lebih kaku dan bisu. Dengannya dia meningkat menjadi ahli falsafah, perenung alam raya, penggubah hukum, ahli agama dan kekasih yang sedang asyik bercumbu, penyanyi yang menarik nasib dan anak yang sedang bermain di pekarangan.

Kegemaran orang Melayu berpantun, memberi peluang untuk memanfaatkan pantun sebagai media dakwah serta menyebarluaskan tunjuk ajar yang sarat berisi pesan-pesan moral kepada masyarakatnya. Tenas Efendi (2010) mengatakan bahwa orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa hakekatnya, di dalam tunjuk ajar itu sudah terhimpun nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma sosial yang dianut dalam masyarakatnya. Mereka menjelaskan bahwa nilai-nilai luhur budaya Melayu tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, karena Islam adalah sumber dan puncak dari keseluruhan nilai-nilai luhur dimaksud. Di dalam ungkapan dikatakan, "elok budaya karena agama, elok adat karena kiblat." Dalam ungkapan lain dikatakan:

Apa tanda budaya Melayu, kepada Islam ia mengacu
Apa tanda Melayu berbahasa, Kepada Islam ia berpunca
Tegak Melayu karena budayanya, Tegak budaya karena agamanya
Dimana tempat Melayu tegak, Pada sunnah beserta syarak
Dimana tempat Melayu diam, Pada adat bertiangkan Islam (Effendi:2005)

Sesuai dengan keterangan di atas, maka budaya Melayu juga bersandarkan kepada Islam. Nasihat-nasihat yang ada dalam pantun juga berdasarkan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu pantun merupakan salah bentuk budaya Bagi kebanyakan orang Melayu, terutama Melayu Riau, sebutan terhadap pantun- pantun itu sudah mereka ketahui, sehingga disebutkan satu nama saja, mereka sudah dapat memahami maksudnya. Karena beragamnya, sebutan bagi pantun yang berisi tunjuk ajar dan dakwah ini, maka orang tua-tua Melayu memasukkan

pantun-pantun itu ke dalam berbagai bentuk penyajiannya sehingga sebutannya mengikuti pula kepada bentuk dimaksud. Misalnya pantun yang dijadikan nyanyian atau pantun lagu, tidak lagi disebut pantun tunjuk ajar, tetapi disebut “pantun nyanyian” atau “pantun lagu”. Bila lagu dimaksud adalah lagu untuk mendurkan bayi disebut “pantun menidurkan budak” atau pantun “nyanyian menidurkan budak” atau senandung budak.”

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melestarikan pantun di tengah masyarakat, terutama kaum muda, supaya pantun tetap ada sebagai warisan leluhur dan diminati oleh semua kalangan. Di samping itu juga memperkenalkan pantun kepada dunia, karena pantun merupakan ungkapan perasaan seseorang baik dalam bentuk ujaran maupun dalam bentuk tulisan.

Macam-macam Pantun

Pantun sebagai hasil kesusastraan Melayu dapat dipilah-pilah dalam lima jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Pantun adat menurut isinya dapat dibagi dalam pantun yang berkenaan dengan tata pemerintahan, sistem kepemimpinan, dan hukum, sedangkan pantun suka berisi ejekan dan teka-teki. Dalam buku Redaksi Balai Pustaka dijelaskan bahwa pengelompokan pantun itu dapat dibagi sebagai berikut: Pantun anak-anak (Pantun bersuka cita, Pantun berduka cita); Pantun orang muda (Pantun dagang atau pantun nasib, Pantun muda, Pantun jenaka, Pantun berkenalan, Pantun berkasih-kasih, Pantun berceraian, Pantun beriba hati); Pantun orang tua, Pantun nasihat, Pantun Adat dan Pantun agama.

Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang untuk berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial, pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, dan hingga sekarang para pemuda menggunakan pantun untuk mengungkapkan isi hati mereka. Pantun menunjukan seseorang untuk berpikir dan bermain-main dengan kata (Waluyo:2005:8). Fungsi pantun juga digunakan dalam aktivitas masyarakat seperti dalam kegiatan seni, keagamaan, dan adat istiadat, memberikan nasihat, sosialisasi dan pendidikan, sindiran, melepaskan rindu dan kasih sayang, menyatakan penghargaan atau terima kasih, berteka-teki atau ketangkasan pikiran, dan sebagai hiburan atau jenaka.

Contoh pantun adat adalah:

Adat menyuluh sarang lebah
Kalau berisi tidak bersambang
Adat penuh tidak melimpah
Kalau berisi tidaklah kurang

Contoh pantun adat yang berkenaan dengan tata pemerintahan misalnya:

Anak gadis memepat kuku
Dipepat dengan pisau seraut
Terpepat pada betung tua
Betung tua dibuat lantai
Negeri dihuni berbagai suku
Ada seinduk ada seperut
Kampung diberi bertua
Rumah diberi bertungganai

Contoh pantun adat yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan adalah:

Dahan kemuning biarlah patah
Asal mengkudu lebat berbuah
Di lahir raja disembah
Di batin rakyat memerintah

Contoh pantun adat yang berkenaan dengan hukum:

Orang Pahang membawa kapas
Orang Palembang membawa air
Yang mencencang yang memapas
Yang berhutang yang membayar

Contoh pantun tua yang berisi nasihat;

Patah lancang kita sadaikan
Supaya sampan tidak melintang
Petuah orang kita sampaikan
Supaya badan tidak berhutang

Contoh pantun anak muda :

Hilang kemana bintang kartika?
Tidak nampak di awan lagi
Hilang kemana adik seketika
Tidak nampak berjalan lagi

Contoh pantun suka (teka-teki) :

Pulang mengail membawa sepat
Sepat dijual orang Melaka
Makan di laut muntah di darat
Kalau tahu cobalah terka

Contoh pantun duka :

Sayang Serawak sungailah sempit
Buah rengas lambung-lambungan
Hendak dibawa perahuku sempit
Tinggal emas tinggallah junjungan

Contoh pantun anak-anak :

Burung elang burung merpati
Terbang ke kubur mencari makan
Bukan kepalang senangnya hati
Melihat ibu pulang dari pekan

Dari beberapa pantun di atas dapat disimpulkan bahwa lambang-lambang yang digunakan di dalamnya, baik sebagai sampiran maupun isi, adalah nama-nama benda atau makhluk yang ada di sekitar masyarakat Melayu. Benda-benda yang digunakan adalah tumbuh-tumbuhan, satwa, alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan perkakas lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Pantun-pantun Melayu sarat dengan lambang-lambang. Kekurangtahuan makna lambang-lambang antropologis yang tersurat dalam pantun akan menyesatkan penarikan hakekat yang dikandungnya, karena lambang-lambang yang

tersurat selalu mengandung makna tersirat, bahkan ada kalanya tersembunyi. Orang awam, orang yang ahli, dan orang yang arif bijaksana akan memaknai kiasan sebuah pantun secara berlainan.

Pesona Pantun di Mata Dunia

Pantun ialah strategi retorika masyarakat Melayu. Dalam menyampaikan maksud, masyarakat Melayu lebih suka tersembunyi dan memperhatikan kesopanan dan kelembutan. Teguran dan kritikan dilontarkan melalui pantun, sehingga lawan tutur tidak tersinggung. Retorika ialah strategi komunikasi yang di dalamnya tersirat kecerdasan pikiran dengan penyampaian yang baik, biasanya identik dengan aspek kelisanan. Taum (2011:203) menjelaskan, bahwa dalam sastra lisan, mungkin saja wadah (bahasa) yang diciptakan oleh tukang cerita lisan itu memberikan efek estetis, tetapi fungsi utamanya adalah mengamankan sistem nilai (nomoi and athea) dalam masyarakat tersebut secara turun-temurun. Nilai-nilai lokal genius disimpan dalam formula dan ungkapan formulaik yang siap pakai dan berfungsi sebagai alat mnemonik dan penanda dalam tradisi-tradisi lisan.

Dalam pantun, formula dan ungkapan formulaik disusun begitu ketat, sehingga bentuknya menjadi sangat khas. Keindahan struktur bersarikan alam dan kehidupan, serta retorika yang mencerminkan harmoni dalam bahasa yang indah dan pesan mendalam, begitu menarik perhatian peneliti-peneliti dunia. Bangsa Barat menemukan nilai yang tinggi akan pantun. Karakteristik pantun yang unik mengilhami mereka untuk mempelajari, meneliti, bahkan membawa sastra pantun melintasi batasan-batasan lokalitas nasional (timur). Pantun layaknya "Gold" yang mereka kumpulkan disela aktivitas pemerintahan dan ekonomi mereka di Nusantara. Tercatat beberapa peneliti yang secara eksplisit menunjukkan kekaguman dan ketertarikannya terhadap pantun melayu. Di antaranya William Marsden, Victor Hugo, François-René Daillie, Sir R.O. Winstead dan J. R. Wilkinson.

Pantun sudah masuk ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity UNESCO atau Daftar Representatif Warisan Budaya tentang Kemanusiaan atas usulan Indonesia dan Malaysia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menghadiri penyerahan Sertifikat UNESCO untuk Pantun kepada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Asosiasi Tradisi Lisan dan Komunitas Pantun di Jakarta.

Mendikbud Nadiem Makarim pada Jumat (12/08/22) juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Asosiasi Tradisi Lisan, Lembaga Adat Melayu, Jabatan Warisan Negara Malaysia dan segenap masyarakat yang telah mendukung pengusulan pantun dalam Daftar Warisan Budaya Indonesia dalam Intangible Cultural Heritage UNESCO. "Mari kita sama-sama menjaga kelestarian pantun demi nilai-nilai pendidikan dan kebudayaan yang luhur.*"

Referensi

- Koentjaraningrat (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta Indonesia: Rineka Cipta.
- Maryanto, dkk (2014). *Bahasa Indonesia Ekpresi diri dan Akademik*. Jakarta. Milik Kementrian pendidikan dan kebudayaan.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. 2020. <https://kbbi.web.id/didik>
- Saleh, Muhammad Haji (2007). "Ghairah Dunia dalam Empat Baris: Pantun Sebagai Bentuk Bersama", dalam Surana. 2000. *Pengantar Sastra Indonesia*. Solo. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. <http://www.usm.my/pantun/makalah3-1.asp>.
- Taum, Yoseph Yapi (2011). *Studi Sastra Lisan: Sejarah, Teori, Metode, dan Pendekatan Disertai Contoh Penerapannya*. Yogyakarta: Lamalera.
- Tenas, Effendy (2005). *Pantun Nasehat*. Penerbit: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu Bekerjasama dengan Penerbit Adicita Karya Nusa. Yogyakarta. H. 1-2. Effendy,
- Tenas, Effendy (2010). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu dan Adicita.
- Waluyo, J Herman (2005). *Apresiasi Puisi (Puisi lama dan Pantun)*. Jakarta: Bumi Aksara.

RAHMIWATI MARSINUN adalah dosen konseling Universitas Prof. Dr. Hamka dan Universitas Paramadina, Jakarta. Sejak muda ia aktif berorganisasi. Kini berprofesi sebagai konselor.

Literasi Mengetahui Negara ASEAN untuk Sekolah Dasar

Rohimah

Pada awal tahun 1960 kawasan Asia adalah negara-negara yang baru merdeka, hal tersebut menempatkan wilayah tersebut bisa saja berada pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antarkekuatan militer negara-negara besar dan konflik antarnegara di kawasan karena masing-masing negara masih mengutamakan pemulihan wilayah masing-masing. Dampak dari konflik tersebut yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan.

Salah satu alasan didirikannya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam pertemuan lima kepala negara di Bangkok Thailand adalah kesamaan. Kesamaan dalam banyak hal seperti letak geografis, kesamaan budaya dan juga banyak kesamaan lainnya. Disamping kelima negara sebagai pendirinya keanggotaan ASEAN bertambah lagi dengan bergabungnya beberapa negara lagi yang juga letak geografisnya berada di Kawasan Asia Tenggara.

Memperhatikan pernyataan dalam deklarasi ASEAN akan maksud dan tujuan asosiasi antara lain pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN dan yang kedua untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB.

Hal yang menjadi pertanyaan bagi saya. Sebagai seorang pendidik peran apa yang dapat saya berikan dalam upaya mengajarkan tentang ASEAN kepada peserta didik saya di luar jam pelajaran agar mereka lebih memahami dan dapat mengetahui ASEAN secara luas? Sementara tahapan usia peserta didik di sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan kognitif konkret yang secara umum dilalui dalam rentang usia 6 – 12 tahun walaupun terkadang ada anak istimewa yang bisa menempuhnya di rentang waktu yang lebih cepat/singkat.

Memperkenalkan ASEAN kepada peserta didik terutama yang masih di tahap Pendidikan dasar dimana masih dalam tahap perkembangan kognitif konkret. Dalam tahap perkembangan ini sangat diperlukan peran aktif guru dan orang tua sebagai orang dewasa dalam pembimbingan perkembangannya. Peran serta orang dewasa sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan anak mampu merangsang anak untuk memaksimalkan semua kemampuan sensoriknya seperti melihat, mendengar, merasa dan lain-lainnya agar peka terhadap dunia mereka dengan melihat lingkungan, mereka berpikir bagaimana melihat dan memperlajarinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah seperti dari kondisi kemampuan intelegensi siswa, kualitas dan profesionalisme guru, bahan ajar yang digunakan, hingga media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran juga memegang peranan penting, oleh karena itu seorang guru dituntut agar kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelasnya.

Terkadang kesan jika mata pelajaran IPS misalnya ASEAN sangat luas dan terkesan hanya hafalan membuat muatan pelajaran IPS sangat membosankan. Pembelajaran IPS akan semakin membosankan, manakala pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode dan media yang kurang menarik. Dengan demikian perlu kreativitas dari guru agar belajar IPS menjadi lebih menyenangkan.

Tak semua peserta didik dapat memperoleh pembelajaran dari pengalaman langsung disekitar lingkungannya akan tetapi bisa saja melalui media lain. Salah satu media yang sangat penting dalam upaya pengenalan lingkungan ASEAN kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung adalah melalui literasi. Baik itu literasi baca tulis, sains, numerasi, digital, finansial maupun literasi budaya dan kewarganegaraan.

Seiring perkembangan zaman pembelajaran tentang lingkungan juga tidak harus dengan mendatangi lingkungan tersebut secara langsung, akan tetapi bisa melalui media yang ada seperti buku, video, film maupun media digital lainnya. Jika pada beberapa tahun sebelumnya sumber materi yang pakai oleh guru terutama di daerah yang masih sulit dijangkau masih sebagian besar hanya memiliki buku sebagai satu satunya sumber belajar. Akan tetapi karena kesadaran literasi di beberapa tempat masih rendah maka buku tersebut hanya teronggok berdebu di perpustakaan. Peserta didik hanya mendapatkan materi pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru.

Terlebih lagi jika melihat data PISA tahun 2018 kemampuan literasi anak anak di ASEAN masih ada beragam, untuk itu melalui peningkatan literasi di sekolah diharapkan mampu menambah wawasan peserta didik tentang hal hal yang masih asing jika dilihat dari lingkungan mereka. Melalui program literasi di sekolah guru dapat mengubah *mindset* tentang guru sebagai sumber utama pengetahuan. Mereka lupa ada buku yang merupakan jendela dunia di mana melalui buku mereka akan mengetahui banyak hal.

Kondisi yang beragam menjadi salah satu tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan baik dalam ilmu pengetahuan maupun wawasannya. Kondisi wilayah dan sarana prasarana yang tidak sama juga menjadi salah satu hambatan dalam mengajarkan tentang ASEAN yang beragam. Melalui kegiatan literasi di sekolah banyak hal yang dapat diperoleh.

Literasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan kemampuan seseorang dalam hal membaca, menulis dan berbicara. Melalui kegiatan literasi banyak hal yang dapat diperoleh, Adapun hal hal tersebut antara lain:

- Menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab serta.
- Menambah pengetahuan peserta didik tentang materi pelajaran.
- Membuka wawasan peserta didik bahwa banyak sekali sumber ilmu yang belum dimanfaatkan.
- Menjangkau banyak tempat melalui membaca.

Kegiatan literasi dapat dikemas dalam bentuk yang disesuaikan dengan kegiatan dan karakteristik dan lingkungan sekolah masing-masing. Dari kegiatan literasi ini banyak hal yang didapatkan oleh sekolah maupun peserta didik. Dalam pembelajaran kegiatan literasi memberikan banyak manfaat dalam penyampaian dan pengembangan materi pelajaran.

Dalam mengajarkan materi tentang ASEAN yang materinya begitu luas sehingga memerlukan waktu dan sumber yang banyak untuk kelengkapan dalam penyampaiannya. Hal tersebut kadang membuat peserta didik bosan serta bagi sekolah yang memiliki sarana yang kurang. Mengatasi hal ini salah satu cara dengan meningkatkan kegiatan literasi peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Dalam pengajaran materi tentang ASEAN yang didukung oleh kegiatan literasi di sekolah maka peserta didik akan dapatkan sebagai berikut:

- Mengetahui dan memahami tentang negara negara ASEAN tidak hanya pada saat pembelajaran akan tetapi dapat juga pada saat mereka membaca buku di perpustakaan maupun sumber lainnya.
- Dapat menjelaskan tentang ASEAN sesuai dengan pemahaman yang mereka peroleh baik melalui pembelajaran di kelas maupun tambahan pengetahuan melalui kegiatan literasi di sekolahnya
- Menumbuhkan rasa persaudaraan antar anak di negara negara ASEAN.
- Menumbuhkan kreatifitas dan semangat bagi peserta didik untuk menuangkan pengetahuannya dalam bentuk tulisan tentang ASEAN sesuai dengan kemampuan mereka di usianya.
- Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menuangkan pengetahuannya sesuai dengan gaya belajar mereka (pembelajaran berdiferensiasi).

Melalui kegiatan literasi batasan tentang sumber belajar dan gaya belajar dapat dihilangkan. Peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi dirinya. Menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik tentang hal hal yang terkait dengan ASEAN. Kegiatan literasi membuat peserta didik senang dan guru pun ikut senang.*

Referensi

Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud. *Buku Bahan Pengajaran ASEAN Bagi Pendidikan Dasar*.pdf

Faizah, Dewi Utami dkk (2016) *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Sekolah Dasar*” Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rohimah, -. (2017). *The use of backpacker learning technique to improve the memorize and students learning outcome on materials of comparing natural and social condition of neighboring countries*. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research, 3(2), 104-113. <https://sloap.org/journals/index.php/irjeis/article/view/537>

ROHIMAH adalah seorang guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah di SDN 2 Pancor sejak tahun 2016 dengan kondisi yang masih banyak kekurangan. Masalah rendahnya minat baca pada sebagian peserta didik dan kurangnya saran berupa buku di perpustakaan membuatnya harus berpikir keras bagaimana menanamkan kebiasaan dan kecintaan terhadap buku kepada peserta didik. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memasukkan pendidikan lingkungan hidup dalam materi pelajaran. Memberikan contoh dan pembiasaan yang berkaitan dengan kegiatan literasi kepada semua warga sekolah serta bekerjasama dengan semua pihak terkait dengan kegiatan literasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menanamkan kepada anak anak akan membaca saat ini serta menanamkan kecintaan pada buku di usia mereka yang masih belia. Artikel ini berisi beberapa manfaat yang telah didapatkan di SDN 2 Pancor dalam kegiatan dan upaya menumbuhkan cinta itu.

Literasi Lintas Budaya ASEAN yang Tak Bertepi

Mukhzamilah

Sebuah program bertajuk *Cultural Camp* yang merupakan kolaborasi pengelola unit Kerjasama Internasional beberapa perguruan tinggi baru saja berlangsung pada kalender Oktober 2023. Ada sepuluh mahasiswa asing yang sedang mengikuti program kursus Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, studi S1, S2 dan S3 di Surabaya, Jawa Timur yang sementara 'berkamping' selama 5 hari di Sidoarjo, sebuah kota yang berdekatan dengan Surabaya.

Mereka berasal dari India, Korea Selatan, Gambia, Tanzania, Kamboja dan Solomon Islands. Beberapa diantaranya masih memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang terbatas, namun ada pula yang sudah menguasai bahasa budaya Indonesia dengan baik karena telah menempuh studi S2 sebelumnya di sebuah kampus di Jawa Tengah.

Sidoarjo merupakan satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nilai keagamaan yang cukup tinggi. Maka cukup tepat jika kegiatan ini mengambil tema *Islamic Knowledge and Tradition*.

Sebagai upaya internalisasi nilai budaya keislaman, mereka tinggal di sebuah pondok pesantren yang kental dengan sistem pendidikan Islami selama 24 jam. Mereka menyaksikan pembiasaan santri solat berjamaah, mendapatkan sajian nilai-nilai Islam yang ramah, membaur bersama siswa sekolah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, serta belajar tentang seni Hadrah Banjari dan pencak silat. Tak lupa juga belajar mereka belajar tentang kearifan lokal dengan praktek membuat *udeng* khas Sidoarjo.

Program ini menyambungkan benang merah dua hal penting yang selama ini menjadi *konsern* saya sebagai Kepala Internasional Office pada 2018 dan Komisi Kerjasama dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Jawa Timur saat ini, yakni terkait perbatasan antar negara di kancah internasional dan pendidikan transnasional.

Pengalaman bertahun-tahun tinggal di Australia dan menghadiri undangan narasumber di China, New Zealand dan beberapa negara membuat saya memahami bahwa perbatasan negara disepakati bersama untuk pembagian wilayah dan memiliki aturan yang ketat terkait aturan keimigrasian.

Pada situasi tertentu ketika mengawal beberapa kerja sama luar negeri, seolah perlu "mengabaikan" perbatasan negara. Perbatasan internasional memiliki arti penting dalam pendidikan transnasional, namun tidak ditujukan untuk menjauhkan hubungan kerjasama bilateral ataupun multilateral.

Hal penting dalam sebuah relasi kerja sama pendidikan internasional adalah kolaborasi kedua belah pihak atau lebih untuk saling menguatkan dan menguntungkan. Dalam konteks ini, salah satu mahasiswa asing yang juga dosen dari Solomon Islands, Cyryl, merasa sangat kagum dengan pola pendidikan sekolah vokasi dengan kurikulum yang linier dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dia berkeinginan untuk membuka peluang kerjasama dengan mengirimkan beberapa siswa dari negerinya untuk belajar di Sekolah Menengah Kejuruan yang dikunjunginya di Sidoarjo.

Lain halnya dengan Musa Ndow, mahasiswa dari Gambia ini memberikan apresiasi yang tinggi dengan kreativitas siswa sekolah dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 5 dengan membuat kreasi daur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Pada saat yang sama ketika berdiskusi, siswa SMK menanyakan tentang kewajiban militer bagi pemuda di Korea Selatan atau perasaan keterkejutan budaya yang mahasiswa asing alami saat pertama kali tiba di Indonesia.

Pertukaran budaya juga merupakan indikator kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial yang diwarnai dengan adanya interaksi pertukaran yang mengandung prinsip "*du ut des*", mutualisme kedua belah pihak.

Jika mengacu pada konseptualisasi antropolog Simon C Woodward dan Louise Cooke, untuk bisa bertahan dengan perkembangan zaman, maka masyarakat harus memiliki konsepsi atau strategi rencana untuk bertahan dengan

berinteraksi terutama dengan peradaban negara di sekitarnya. Hal ini mendasari hubungan kerjasama antarnegara, terutama ASEAN.

Perbatasan antar negara ASEAN memang ada, namun itu bukanlah sebuah dinding kokoh yang tak bisa ditembus. Perbatasan negara merupakan dinding yang memberikan kesempatan bagi kita untuk saling melihat, mengamati dan mengambil hal positif untuk dipelajari dari pihak lain. Perbatasan antar negara juga menyediakan pintu dan ruang bagi kita untuk saling bertukar budaya dengan tetap saling memahami hak dan kewajibannya, terutama di bidang pendidikan. *

MUKHZAMILAH adalah dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ia merupakan Kepala Internasional Office Unesa (2018) yang pernah menyabet penghargaan bergengsi New England Award di Australia. Pemegang lisensi hypnoterapi ini merupakan Alumnus Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono Malang yang juga anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Jawa Timur. Semasa aktif di Pusat Pembinaan Ideologi Unesa, ia meneliti testimoni mantan narapidana terorisme yang dituangkan dalam buku *Menjerat Terorisme* (2021).

BAB 22
Kolaborasi Pegiat Literasi
Menguatkan Identitas ASEAN

Optimalisasi Peran CONSAL dalam Penguatan Pustakawan ASEAN

Edi Wiyono

Indonesia memegang Keketuaan ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dari 1 Januari – 31 Desember 2023. Untuk Tahun 2024 tongkat Keketuaan diserahkan ke Laos. Sebagai bagian dari posisi Keketuaan 2023, Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di dua kota, KTT ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9–11 Mei 2023 serta KTT ke-43 di Jakarta Convention Center, DKI Jakarta pada 5–7 September 2023.

Dengan mengusung tema “ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH” membawa makna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Sebagai Ketua, Indonesia juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Indonesia bertekad mengawal menuju ASEAN 2045, yang perlu senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara “ASEAN WAY” yang sejalan dengan semangat kerja sama dan implementasi prinsip Piagam ASEAN.

Salah satu peran, kontribusi dan manfaat yang dapat dihadirkan dari Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 adalah meningkatkan kerja sama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi, antara lain, perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Langkah konkrit yang dapat diimplementasikan adalah dengan memajukan dunia perpustakaan dan kepastakawan di wilayah Asia Tenggara. Diantaranya dengan optimalisasi peran CONSAL (*Congress of Southeast Asian Librarians*).

CONSAL merupakan kongres pustakawan se-Asia Tenggara yang diadakan setiap tiga tahun sekali dan diselenggarakan secara bergilir di masing-masing negara anggota. Indonesia tercatat pernah menjadi tuan rumah CONSAL pada tahun 1975 (CONSAL III), 1990 (CONSAL VIII), 2012 (CONSAL XV). Sedangkan penyelenggaraan CONSAL terakhir tahun 2022 sebagai CONSAL XVIII dengan Kamboja sebagai penyelenggaranya.

Sebagai organisasi yang mewadahi para pustakawan ASEAN, keberadaan CONSAL sangat strategis dalam upaya untuk mendorong penguatan kolaborasi untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Optimalisasi peran CONSAL ini cukup penting mengingat ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara anggota (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar dan Brunei Darussalam) memiliki perbedaan yang signifikan. Timor Leste disepakati secara prinsip menjadi anggota ASEAN kesebelas.

Kesenjangan ini bisa diukur dari tingkat pembangunan sosial ekonomi, tingkat melek huruf, kepadatan penduduk, produk domestik bruto (PDB) per kapita, informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi (TIK), lingkungan budaya dan sosial, geografi, agama, bahasa, dan kebijakan, sistem, dan struktur pendidikan. Tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kesamaan dalam hal prospek dan potensi yang tak terbatas serta kekayaan sumber daya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ASEAN, salah satu tujuan ASEAN adalah “untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui kolaborasi yang lebih erat dalam pendidikan dan pembelajaran seumur hidup untuk pemberdayaan masyarakat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN” (ASEAN, 2008). Oleh karena itu, ASEAN memberi nilai tambah pada pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama regional dengan memperkuat kerja sama yang lebih dalam dan luas untuk mewujudkan ASEAN yang lebih terintegrasi dan terhubung, melalui visi, kebijakan, rencana induk, strategi, dan pedoman ASEAN.

Jaringan kolaboratif menantang peran CONSAL dalam menghadapi segala perubahan, terutama yang berhubungan dengan dunia kepastakawanan dan perpustakaan, baik skala regional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN 2025 “Mengintegrasikan Negara, Mengintegrasikan Pembangunan” (ASEAN, 2021).

ASEAN didirikan atas semangat kolaborasi dan kerja sama. Upaya besar telah dilakukan untuk mengembangkan jaringan regional, khususnya di bidang kepastakawanan. CONSAL menjadi satu-satunya asosiasi profesional regional yang diakui bagi pustakawan dari negara-negara Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1970. Hal ini diatur oleh konstitusi CONSAL, yang bertujuan untuk mendorong ASEAN- membangun koneksi yang luas, berbagi, kerja sama, dan kolaborasi. Dewan eksekutif CONSAL, yang terdiri dari tiga anggota nasional dari perpustakaan nasional dan asosiasi perpustakaan nasional masing-masing negara anggota, bertugas mencapai tujuan CONSAL. Kolaborasi telah menjadi isu yang menjadi kepentingan berkelanjutan ASEAN. Sebagaimana juga yang dirumuskan dalam KTT ASEAN 2023.

Optimalisasi peran CONSAL sebagai rumahnya para pustakawan ASEAN sudah selayaknya menjadi semangat bersama untuk mewujudkan pustakawan dan perpustakaan yang lebih kuat dan berdaya. Baik untuk kawasan regional ASEAN maupun untuk pustakawan dari masing-masing negara. Hal ini dapat mendorong penciptaan pustakawan yang lebih profesional dan responsive dalam merespon berbagai tantangan ke depan sebagai dinamika dari perubahan global dan fenomena disrupsi teknologi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan, dan tentunya juga sangat terkait dengan hasil dari KTT ASEAN 2023 dimana perlunya tindakan-tindakan yang berkelanjutan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan (baca: perpustakaan), CONSAL harus diperkuat dan diberdayakan lebih dari sekedar sebagai kongresnya para pustakawan Asia Tenggara. CONSAL harus mengakomodir lebih banyak pustakawan dari penjurur ASEAN. Tidak hanya untuk level pimpinan organisasi profesi pustakawan di masing-masing negara, tetapi juga untuk para anggota-anggotanya.

Lahirnya *sharing session* sebagai bagian dari kolaborasi antarpustakawan Asia Tenggara. Mereka dapat saling menginspirasi, memotivasi dan mengembangkan kerja. Membangun jejaring ilmu pengetahuan antarpustakawan yang difasilitasi oleh masing-masing perpustakaan. Jejaring dapat dimaknai sebagai integrasi dan interoperabilitas koleksi maupun media berbagi informasi lainnya. Baik dalam tataran organisasi perpustakaan maupun pengelola perpustakaan (pustakawan). Kemajuan TIK telah memungkinkan kerja-kerja kepastakawanan menjadi lebih mudah dan efisien. Pembangunan pangkalan data bersama menjadi hal yang perlu dipikirkan dan diimplementasikan untuk memudahkan terjadinya proses tukar menukar informasi antara negara. Penyusunan media informasi bersama yang dikelola oleh Kesekretaritan CONSAL seperti jurnal, majalah atau bulletin menjadi hal yang relevan untuk dapat dilakukan. Hal ini sekaligus sebagai ruang dan media bagi para pustakawan untuk berbagi gagasan dan informasi.

Jika Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengembangkan dan menetapkan standarisasi perpustakaan, baik untuk perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah, maka perlu adanya komparasi antara standard yang ada di masing-masing negara. Dari standard ini diharapkan dapat menjadi ukuran dalam penyusunan program dan penetapan target. Baik dalam skala organisasi maupun sumber daya manusianya.

Terobosan lain yang dapat dilakukan adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pustakawan ASEAN anggota CONSAL untuk dapat melakukan “Magang Kerja” atau bertukar pustakawan. Pengalaman baik yang diimplementasikan masing-masing perpustakaan tentunya berbeda, dan ini menjadi sarana saling belajar dan menimba pengetahuan yang dampaknya dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas para pustakawan.

Menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan serta tetap penting dan sangat relevan bagi rakyatnya, kawasan Indo-Pasifik, dan dunia, membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan/ pendidikan yang dapat diterjemahkan dalam kerja-kerja kepastakawanan. Sebagaimana semangat yang dibawa dalam tematik “ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH.” Semoga! *

EDI WIYONO sehari-hari bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Disamping itu juga diberi tanggung jawab sebagai *editor-in-chief* Penerbit Perpusnas Pess, *publishing house* Perpustakaan Nasional. Menyukai dunia menulis sebagai ruang eksplorasi gagasan. Sebagian tulisannya dimuat di media cetak dan elektronik. Beberapa lainnya dalam bentuk buku yang dikerjakan bersama-sama dengan penulis lainnya. Sebagai bagian dari

inovasi yang telah dilakukan antara lain menginisiasi kegiatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional, Perpusnas Writers Festival. Forum Penulis Literasi Pustaka (PELITA) dan Forum Inkubator Literasi ada beberapa komunitas yang dibentuk atas idenya. Dia juga aktif di organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) PD DKI Jakarta. Jika ingin berdiskusi dan berbagi pengalaman dapat menghubungi melalui email ediwiyono@gmail.com dan IG [@edi.wiyono](https://www.instagram.com/edi.wiyono).

Pentingnya Pembentukan Forum Pegiat Literasi ASEAN

Iswadi Syahrial Nupin

"Literasi adalah jembatan dari penderitaan menuju harapan"

--Kofi Anan, Sekjen PBB 1997-2006

Literasi

Pada tanggal 30 November s.d 3 Desember 2022, telah dilaksanakan kegiatan Temu Penyair Asia Tenggara (TPAT) II. Sebelumnya TPAT I dilaksanakan pada tahun 2018 dan seyogianya diadakan TPAT II diselenggarakan tahun 2020. Namun hal itu tidak terjadi karena adanya wabah pandemi Covid 19 sehingga aktivitas keluar rumah dan berkumpul menjadi hal yang dilarang oleh pemerintah.

Kegiatan TPAT II ini sangat berbeda dengan TPAT I. TPAT I dihadiri oleh 350 penyair baik dalam maupun luar negeri. TPAT II agak sedikit berbeda dari TPAT I. Pada TPAT II ini panitia sangat membatasi peserta yang ingin tiba. Jumlah penyair yang ikut serta 100 orang. Bahkan banyak peserta yang ingin ikut tapi tidak mendapatkan kuota. Selain penyair, panitia juga memilih 15 orang peninjau. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan, pemahaman dan event ini dapat tercatat melalui teks yang berbeda (bukan puisi) tapi artikel, esai, berita dan sebagainya (Buku Acara Temu Penyair Asia Tenggara 2022).

Kegiatan TPAT II diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Ketua Pelaksana dipimpin oleh Ubai Dillah Al Anori yang juga penyair. Puisi-puisi beliau telah diterbitkan baik oleh media lokal maupun nasional. Antologi yang telah diterbitkannya secara solo adalah *Setungkul Benang* (2018) dan *Tangan-tangan Kisah* (2022). Disamping itu beliau juga aktivis Komunitas Tanah Rawa, Akar Kata dan Kata Kreatif.

Disela-sela kegiatan ini, penulis sempat bertukar pikiran dengan penyair asal Malaysia dan Vietnam. Penulis berbincang dengan Rosmiaty Shaari, penyair Malaysia yang bermastautin di Melaka. Dalam perbincangan dengan beliau disebutkan bahwa di Malaysia, aktivis literasi yang tergabung dalam Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) itu tidak ada akan tetapi ada aktivitas yang berkaitan dengan literasi di Kampung Karyawan Malim, Kampar, Perak Darul Rizuan. Lebih kurang seperti Rumah Puisi Taufiq Ismail yang terdapat di Aia Angek, Kabupaten Tanah Datar. Aktivitas di Kampung Karyawan Malim ini biasanya ada acara bedah buku, pembacaan puisi, pertunjukan musik etnik dan diskusi budaya yang dihadiri penyair dan budayawan baik dari Malaysia maupun dari luar negeri. Kampung Karyawan Malim ini juga dilengkapi oleh Perpustakaan. Koleksi umumnya dalah karya sastra dan seni baik dari dalam maupun luar negeri. Pangkin Nyai Seni yang *foundernya* Noramin pun hampir sama aktivitasnya dengan Kampung Karyawan Malim. Pangkin Nyai Seni berada di Kampung Parit Seberang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kampung Karyawan Malim tidak eksis lagi sejak Malim Ghazali PK yang juga *foundernya* meninggal dunia.

Pemerintah Malaysia sebenarnya memiliki program peningkatan literasi masyarakat. Namun program ini lebih fokus menysasar anak sekolah. Program ini dinamakan Plan (Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah). Guru diharapkan berperan aktif memberikan pencerahan kepada murid tentang literasi sehingga murid paham apa yang dimaksud dengan literasi itu dan bagaimana cara mencari informasi yang baik melalui internet.

Lain halnya dengan Vietnam. Nik Mansour Nik Halim menjelaskan bahwa di Vietnam juga terdapat komunitas literasi namun komunitas itu diatur oleh Pemerintah Vietnam. Kegiatan harus diinformasikan kepada Pemerintah Vietnam. Vietnam sendiri sebenarnya punya langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakatnya. Salah satunya dengan

program LCDP (The Literacy and Community Development Program): “*The Literacy and Community Development Programme (LCDP) was initially implemented in two districts of Vietnam in 2000. The programme targets poor and marginalised groups (such as ethnic minorities and women) in remote areas, particularly youths and adult aged 18 years and above*” (Program Literasi dan Pengembangan Masyarakat (LCDP) awalnya dilaksanakan di dua kabupaten di Vietnam pada tahun 2000. Program ini menyoar kelompok miskin dan terpinggirkan (seperti etnis minoritas dan perempuan) di daerah terpencil, khususnya kaum muda dan dewasa berusia 18 tahun ke atas. (uil.Unesco.org, 5/12/2022).

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa di Vietnam terdapat program pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat yang dikhususkan bagi warga yang berumur 18 tahun ke atas. Sejak awal, program ini telah diperluas ke 11 distrik di seluruh negeri dan hingga saat ini, lebih dari 12.000 peserta (di antaranya lebih dari 9.500 perempuan) telah mendaftar ke kelas melek huruf. Selain itu, program ini telah diadopsi oleh lembaga lain, termasuk Aus Aid, Kerjasama Pembangunan Jerman, Visi Dunia, Bank Dunia, Caritas, Malteser, dan Oxfam Hong Kong untuk program keaksaraan orang dewasa mereka.

Setiap negara mungkin berbeda dalam meningkatkan literasi masyarakatnya. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) memiliki peran vital dalam peningkatan literasi Masyarakat Indonesia. Dalam struktur organisasi PNRI terdapat Perpusnas Press, GPMB (Gerakan Pembudayaan Minat Baca) dan ALI (Akademi Literasi Indonesia). Di sektor swasta terdapat Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) yang mewadahi TBM seluruh Indonesia kecuali TBM yang dibawah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. TBM tersebut berada di bawah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). FTBM bergerak secara independen dengan cara memberikan pemahaman literasi kepada anak sekolah seperti membaca cepat, mengenalkan permainan petak umpet, dan lain sebagainya.

Problematika Literasi ASEAN

Mengurai Problematika Literasi ASEAN

Pertanyaan Penting: Apakah Pembentukan Forum Pegiat Literasi ASEAN dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat? Dari pertanyaan ini jelas bahwa Forum Pegiat Literasi ASEAN itu memang sangat perlu dibentuk. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang literasi, wadah *sharing* pengetahuan antara negara ASEAN dan ajang silaturahmi dalam dunia literasi.

Pegiat literasi adalah orang-orang yang mengabdikan pada taman bacaan (indonesiana.id, 5/12/2022). Pegiat literasi bertindak konkret dalam memberi manfaat kepada orang banyak. Pegiat literasi menyediakan akses bacaan dan membimbing karakter anak sekolah yang berkunjung ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Pegiat literasi juga dapat dikatakan sebagai penjaga kearifan lokal. Banyak anak-anak sekarang yang tidak mengerti permainan tradisional. Generasi milenial hanya memahami gadget sebagai sarana kebutuhan informasi dan hiburan. Padahal tidak semua informasi yang benar di *gadget* ada pula yang *hoax*. Hiburan yang diperoleh dari *gadget* hanyalah permainan *game* yang membuat mata menjadi lelah.

Pegiat literasi di Indonesia dilakoni oleh beragam profesi. Berkaitan dengan pekerjaan atau profesi pegiat literasi, Survei Tata Kelola Taman Bacaan tahun 2022 yang dilakukan TBM Lentera Pustaka (Juni 2022) menegaskan pekerjaan atau profesi pegiat literasi taman bacaan terdiri dari: Aparatur Sipil Negara (ASN) 13,5%, Pegawai Swasta 6,3%, Pendidik (Guru/Dosen) 20,6%, Mahasiswa 9,5%, Wiraswasta 19%, dan Lain-lain 31%. Itu berarti, 3 besar profesi pegiat literasi di taman bacaan adalah lain-lain, pendidik (guru/dosen), dan wiraswasta (indonesiana.id. 5/12/2022).

Salah satu TBM yang sukses di Sumatera Barat adalah Rumah Baca Anak Nagari (RBAN). Founder RBAN adalah Sry Eka Handayani yang berprofesi sebagai guru sekolah. RBAN berada di Jorong Aro Kandikir, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi. Sry Eka Handayani berhasil mendapatkan Nugra Jasadharma Pustakaloka Tahun 2021 untuk kategori Masyarakat (rakyatpriangan.com, 5/12/2022). TBM Rumah Baca Anak Nagari memiliki *website* <https://rban.or.id/>. Kegiatan TBM RBAN adalah meminjamkan buku kepada masyarakat, mengolah barang bekas menjadi produk yang bermanfaat, menonton film bersama, berolahraga dan mengajarkan anak-anak permainan tradisional.

Jika konsep TBM belum pernah dilakukan di negara-negara ASEAN lainnya maka Indonesia dapat menjadi pionir dalam konsep peningkatan literasi masyarakat. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tidak hanya menjadi kewajiban Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota saja akan tetapi juga menjadi kewajiban bagi pegiat literasi yang

bergerak dengan TBM untuk mengedukasi masyarakat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep TBM Indonesia dapat dipakai oleh negara ASEAN yang lain yang indeks literasinya masih belum memadai dan perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik.

Tingkat Literasi Penduduk ASEAN

Tingkat literasi Penduduk ASEAN atau Asia Tenggara secara umum meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh World Bank (goodstats.id, 5/12/2022), Brunei Darussalam menempati posisi pertama negara dengan tingkat literasi penduduk tertinggi sebesar 97,21 persen. Singapura menempati peringkat ke-2 dengan raihannya indeks literasi penduduk sebesar 97,13 persen, berselisih tipis dengan Brunei Darussalam. Adapun Filipina menyusul di posisi ke-3 dengan torehannya sebesar 96,28 persen.

Indonesia sendiri berada di posisi ke-4 negara dengan tingkat literasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Adapun tingkat literasi di Indonesia terhitung mencapai angka 96 persen dari total 273,5 juta penduduk. Adapun Vietnam berada di posisi ke-5 dengan raihannya indeks literasi penduduk sebesar 95,75 persen. Kemudian secara berurutan di posisi ke-6 hingga ke-11 diraih oleh Malaysia (94,97 persen), Thailand (93,77 persen), Myanmar (89,07 persen), Laos (84,66 persen), Kamboja (80,53 persen), dan Timor Leste (68,07 persen).

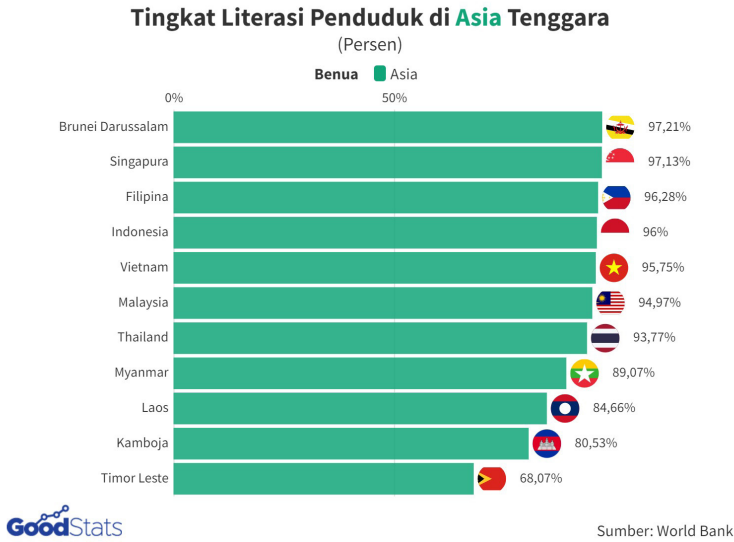
Pengukuran tingkat literasi dilakukan dengan mengompilasi data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS). Adapun UIS mengumpulkan data pada tiap negara terkait bidang pendidikan, sains, budaya, serta komunikasi secara resmi. Data-data tersebut kemudian dibandingkan secara internasional. UIS melakukan kerja sama dengan berbagai kantor statistik nasional, kementerian, serta organisasi statistik di tiap negara. Angka literasi dihasilkan UIS melalui sensus penduduk atau survei rumah tangga, di mana kepala rumah tangga yang menjadi responden pada survei akan ditanyakan seputar kemampuan membaca dan menulis keluarga (goodstats.id, 5/12/2022).

Berdasarkan kondisi ini maka masih terjadi ketimpangan indeks literasi penduduk sesama negara anggota ASEAN. Idealnya indeks literasi negara Timor Leste, Kamboja, Laos dan Myanmar di atas 90 persen. Semakin baik indeks literasi suatu negara maka semakin meningkat kualitas hidup masyarakat di negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam memiliki kemampuan baca tulis yang baik. Tak hanya itu tingkat pendidikan tak hanya sampai dasar dan menengah saja namun meningkat sampai master dan doctoral. Rendahnya indeks literasi masyarakat Timor Leste kemungkinan dipengaruhi oleh gejolak politik yang tidak stabil sehingga menyebabkan regulasi pendidikan berubah-ubah, biaya pendidikan yang mahal dan tingkat pendidikan yang rendah.

Forum Pegiat Literasi ASEAN yang dibentuk dapat dikatakan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan indeks literasi yang ada. Negara-negara ASEAN dapat saling belajar tentang konsep yang ideal dalam meningkatkan literasi masyarakat. Forum Pegiat Literasi ASEAN yang dibentuk tentu melalui proses. Ada baiknya Perpustakaan Nasional masing-masing anggota ASEAN melakukan pertemuan tentang peningkatan kualitas manusia ASEAN melalui peningkatan literasi yang digerakkan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk komunitas atau TBM. Pada pertemuan itu Ketua Forum TBM se ASEAN atau yang mewakili seyogianya hadir. Tujuannya agar dapat diketahui bersama seperti apa kegiatan literasi yang dilakukan pada masing-masing negara ASEAN. Selanjutnya disepakati pembentukan Forum Pegiat Literasi ASEAN sebagai wadah *sharing knowledge* bagi para pegiat literasi. Sebaiknya Forum Pegiat Literasi ASEAN berada di bawah Dewan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC).

Gagasan pembentukan Forum Pegiat Literasi ASEAN sebenarnya sejalan dengan *blue print* ASCC 2025. *Blue print* ini ditetapkan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-27 pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. *Blue print*nya adalah menetapkan pekerjaan ASCC yaitu : *Pertama*, Komunitas yang berkomitmen, partisipatif, dan bertanggung jawab secara sosial untuk kepentingan masyarakat ASEAN. *Kedua*, Komunitas inklusif yang mempromosikan kualitas hidup yang tinggi, akses yang adil terhadap peluang bagi semua, dan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. *Ketiga*, Sebuah komunitas yang berkelanjutan yang mempromosikan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. *Keempat*, Sebuah komunitas yang tangguh dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk beradaptasi dan menanggapi kerentanan sosial dan ekonomi, bencana, perubahan iklim, dan tantangan baru lainnya, dan *Kelima*, Komunitas yang dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga akan identitas, budaya, dan warisannya (asean.org, 5/12/2022).

Pekerjaan ACSS selanjutnya mewujudkan Forum Pegiat Literasi ASEAN yang akan bekerja dan fokus dalam mendukung masyarakat ASEAN khususnya dibidang literasi. Literasi masyarakat yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara ASEAN.



Gambar 1 : Tingkat Literasi Penduduk Asia Tenggara

Dewan ASCC (ASEAN Socio - Cultural Community) adalah salah satu dari tiga Komunitas ASEAN, dua lainnya adalah Komunitas Politik-Keamanan dan Komunitas Ekonomi. Lingkup kerja Dewan ASCC meliputi hal-hal lingkungan, pendidikan, budaya, kesehatan, pemuda, perempuan, anak-anak, pekerja, kesejahteraan sosial, dan pelatihan bagi warga sipil.

ASCC memiliki harapan masa depan dengan karakteristik pembangunan manusia, kesejahteraan sosial dan perlindungan, keadilan sosial dan hak asasi, memastikan kelestarian lingkungan hidup, membangun identitas ASEAN, dan mempersempit pengembangan gap.

Tujuan dari ASCC adalah untuk memberikan kontribusi untuk mencapai Komunitas ASEAN yang berorientasi pada orang dan bertanggung jawab secara sosial untuk memenuhi solidaritas yang tahan lama dan persatuan antara masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menciptakan identitas umum dan membangun masyarakat yang saling peduli, juga meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian. Fokus ASCC adalah pada memelihara manusia, sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan dalam harmoni dan masyarakat yang berorientasi pada ASEAN (publika.rmol.id, 5/12/2022).

Dengan demikian, setiap ada pertemuan dalam lingkup ASCC, ada baiknya acara pertemuan Forum Pegiat Literasi ASEAN diselenggarakan pada saat yang bersamaan. Forum Pegiat Literasi ASEAN merupakan keniscayaan dalam peningkatan indeks literasi masyarakat. Angka literasi yang memadai di antara sesama anggota ASEAN akan semakin memudahkan kerjasama dan peningkatan ekonomi di kawasan regional ASEAN. Semakin literat masyarakat maka semakin memudahkan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga ekonomi di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Forum Pegiat Literasi ASEAN sebagai Wadah Peningkatan Indeks Literasi

Forum Pegiat Literasi ASEAN memegang peranan penting dalam peningkatan indeks literasi masyarakat. Kegiatan yang berfokus pada literasi keuangan, budaya, dan literasi digital seyogianya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pegiat literasi. Dengan adanya kegiatan tersebut maka pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Forum Pegiat Literasi ASEAN yang berada di bawah ASCC dapat melakukan penelitian untuk negara ASEAN yang indeks literasinya relatif kurang memadai. Hasil penelitian tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi problem literasi di negara yang diteliti. Indeks Literasi Masyarakat ASEAN yang memadai akan membuat masyarakat ASEAN menjadi sejahtera. Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diatasi melalui literasi sebagaimana yang dikatakan Kofi Anan, *literasi adalah jembatan dari penderitaan menuju harapan*.*

Referensi

- Angelia, Diva (2022). *Tingkat Literasi Penduduk Negara Asia Tenggara*. 10 Oktober 2022. <https://goodstats.id/article/tingkat-literasi-negara-asia-tenggara-gSjhj> (diunduh 5 Desember 2022)
- Association of Southeast Asian Nations (2020). *ASEAN Socio Cultural Community*. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/> (diunduh 5 Desember 2022)
- Buku Temu Penair Asia Tenggara 2022
- Rakyat Merdeka Online (2016). *Tentang Pentingnya Komunitas Sosial-Budaya ASEAN*. 19 April 2016. <https://publika.rmol.id/read/2016/04/19/243805/tentang-pentingnya-komunitas-sosial-budaya-asean> (diunduh 5 Desember 2022).
- Sofiawan, Septian (2021). *Inilah Penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan RI 2021*. 14 September 2021. <https://www.rakyatpriangan.com/nasional/pr-1431166998/inilah-penerima-penghargaan-nugra-jasa-dharma-pustaloka-perpusnas-ri-2021> (diunduh 5 Desember 2022)
- Syarifudin (2019). *Pegiat Literasi di Taman Bacaan, Apa Profesi Sehari-harinya?* (Survei Tata Kelola TBM Indonesia). 1 Juli 2022. <https://www.indonesiana.id/read/155912/pegiat-literasi-di-taman-bacaan-apa-profesi-sehari-harinya-survei-tata-kelola-tbm-indonesia> (diunduh pada 5 Desember 2022)
- Unesco Institute For Lifelong Learning (2016). *Literacy and Community Development Programme (LCDP), Viet Nam*. 24 Februari 2016. <https://uil.unesco.org/case-study/effective-practices-database-litbase-0/literacy-and-community-development-programme-lcdp> (diunduh pada 5 Desember 2022)

ISWADI SYAHRIAL NUPIN adalah Ketua Kelompok Pustakawan Universitas Andalas (2022-Sekarang). Ia menjabat sebagai Pustakawan Muda di Universitas Andalas. Ia merupakan Koordinator Wilayah Padang dan Pesisir Selatan dalam struktur Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI). Ia pernah menjabat sebagai aktivis HMI Komisariat Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (1996-1999). Ia telah menulis dua judul buku yaitu Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional (2021) dan Antologi Kepustakawanan Era Disrupsi (2022). Ia memiliki beberapa prestasi yaitu Finalis Pustakawan Berprestasi Tingkat Universitas Andalas (2010, 2013 dan 2016). Ia juga menjadi Finalis Inkubator Literasi Pustaka Nasional (ILPN) Sumatra Barat tahun 2022. Ia menjadi juara satu Lomba Menulis Esai Forum Lingkar Pena Cabang Bekasi tahun 2022. Ia memiliki beberapa tulisan berupa gagasan dan pemikiran tentang perpustakaan dan kepustakawanan yang dapat diakses pada pustaka.unand.ac.id. Ia aktif menulis di beberapa surat kabar seperti Serambi Indonesia, Haluan Kepri, Singgalang dan Padang Ekspres. Ia dapat dihubungi di email: Gagakh488@gmail.com.

Menggagas Sinergi dan Kolaborasi Aktif Pustakawan dan Pegiat Literasi ASEAN

Nur Indrawati Pary

"Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities."

--R. David Lankes

Pendahuluan

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara telah menunjukkan portofolionya bahwa keberadaannya sangat membantu secara signifikan dalam hal meningkatkan kualitas kerja sama antar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kolaborasi dan sinergitas lintas negara ini menyentuh tidak hanya pada persoalan politik dan keamanan namun juga meliputi issue-isue ekonomi, sosial dan budaya. Kolaborasi aktif yang terbentuk bahkan sudah sampai melibatkan seluruh elemen bangsa yakni bukan hanya sebatas pemegang kebijakan atau pemerintah pusat bahkan pemerintahan daerah hingga masyarakat dan kalangan professional pun sudah terlibat dalam program-program kerja atau kegiatan yang digagas oleh ASEAN.

Namun demikian, menimbang bahwa di era saat ini ; era pandemi *Covid-19* hingga pasca *Covid -19* yang juga bersamaan dengan masuknya kita pada era teknologi dan informasi 4.0 bahkan sudah sampai di 5.0, rasanya masyarakat ASEAN perlu semakin meningkatkan kolaborasi aktifnya untuk menghadapi tantangan yang tentunya juga semakin meningkat. Memahami bahwa banyak aspek dalam persoalan masyarakat yang butuh solusi kongkrit bukan sekedar di tataran kebijakan politik atau pemerintahan semata, namun lebih dari itu dibutuhkan intervensi sosial yang bersifat mikro dan makro dan melibatkan ahli, professional dan masyarakat di dalamnya.

Berbicara tentang teknologi dan informasi tentunya tidak bisa dilepaskan dari Ilmu pengetahuan. Perpustakaan dan Gerakan literasi adalah dua elemen kunci yang sesungguhnya memiliki peran penting dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Orang mengenal perpustakaan sebagai tempat untuk menyimpan dan membaca buku semata. Perpustakaan hanya untuk anak sekolah atau yang membutuhkan informasi buku saat membuat laporan akhir di jenjang Pendidikan tinggi. Inilah yang menyebabkan kemuduran terjadi pada suatu bangsa, karena semangat belajar bergeser menjadi sekedar menuntaskan program formal semata.

Membangun masyarakat yang literat dan sejahtera butuh intervensi yang bukan sekedar arahan dan bantuan konsumtif semata, tetapi yang bersifat edukatif, membangun kesadaran berpikir dan mandiri. Kata kuncinya adalah pada literasi atau budaya baca. Budaya literasi adalah suatu cara penerapan kebiasaan berpikir yang diikuti dengan proses membaca dan menulis yang dilakukan dalam suatu proses kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan suatu karya. Menurut pengamatan penulis, proses membaca dan menulis sangat baik dikembangkan untuk meningkatkan pola pikir masyarakat.

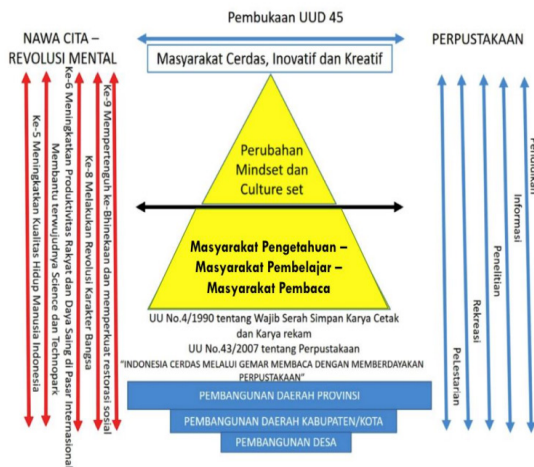
Diskusi

ASEAN sudah melakukan banyak hal yang produktif bagi kebaikan dan perbaikan negara-negara anggotanya. Berbagai hasil kesepakatan rapat negara peserta ASEAN sudah digulirkan hingga menjadi program kerja di pemerintahan. Pembahasan di meja "perundingan" dalam siding pertemuan antar negara adalah sebuah pembahasan wacana global yang kemudian diolah menjadi nota kesepahaman antar negara. Tahapan selanjutnya oleh masing-masing negara, nota kesepahaman tersebut dibahas dan menjadi agenda kerja dari tingkat pusat hingga ke daerah. Secara makro, itulah proses yang terjadi dari issue global hingga menjadi issue atau program lokal.

Namun apa yang ter
yang sering kita sebut seb
memiliki prosudur birokra
menjadi program pun me
edukasi tentang kebijakan
masyarakat. Pada tahapar
hal *transfer knowledge*, me

Seperti halnya penc
nasional, perpustakaan be
informasi buku-buku bac
literasi, budaya literasi ber

Dalam konteks Indor
amanah dalam Pemdukaai
dan menjadi spririt dalam



Gambar 1. Model Keterkaitan Pembukaan UUD 1945, Nawa Cita dan Fungsi Perpustakaan

Secara garis besar, fungsi perpustakaan memiliki peran penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dgn amanat pembukaan UUD 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan Nawa Cita di butir ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dan buah ke-7 yaitu menaikkan kualitas hidup insan Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan serta pembinaan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilaksanakan dengan percepatan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Ini sangat sesuai dengan Undang-Undang angka 43 Tahun 2007 wacana Perpustakaan pasal 48 ayat 1, tentang pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui famili, satuan pendidikan dan rakyat serta pasal 50 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan cara menyediakan bahan bacaan bermutu serta terjangkau, serta menyediakan wahana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Dalam konteks ASEAN, terdapat kongres yang menjadi wadah berkumpulnya para pustakawan di Asia tenggara. CONSAL (*Congress of Southeast Librarians*) atau Kongres Pustakawan Asia Tenggara. Kongres Pustakawan Asia Tenggara ini merupakan sebuah forum bagi pustakawan dan ahli informasi untuk memperkuat jaringan, kemitraan, dan keterkaitan satu sama lain serta mempromosikan kerjasama, kolaborasi dan menyediakan platform untuk saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai isu-isu di bidang kepustakawanan dan ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi, serta kegiatan terkait di wilayah masing-masing.

Kembali pada perhelatan regional ASEAN yang akan diadakan di tahun 2023, dimana Indonesia Kembali menjadi penanggungjawab perhelatan regional tersebut, maka Indonesia bisa Kembali memainkan peran penting dalam hal menggagas sebuah sinergitas dan kolaborasi aktif perpustakaan, pustakawan serta pegiat literasi ASEAN. Kebutuhan untuk mencerdaskan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara adalah kebutuhan semua pihak. Bahwa di dalam lingkaran ASEAN terdapat negara-negara yang sudah memiliki kualitas SDM yang ditopang oleh kualitas Pendidikan serta perpustakaan yang memberikan layanan prima kepada masyarakatnya. Gagasan kolaborasi ini adalah untuk menguatkan ekosistem literasi regional di level ASEAN yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM masyarakat di seluruh negara.

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata co dan labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010).

Kolaborasi yang dibangun tidak semata-mata atas kebutuhan formalitas profesi atau Lembaga perpustakaan semata tapi lebih pada kebutuhan yang lebih besar yakni kolaborasi yang mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas literasi, masyarakat yang memiliki budaya baca dan semangat berdaya guna dan sejahtera. Ide ini sejalan dengan tujuan dan fungsi perpustakaan yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan

kat di level "akar rumput"
merintah pada umumnya
njadi isue nasional hingga
dalam membuat formulasi
nentasikan hingga di level
t mengambil peran dalam
ang sebaiknya dilakukan.

in pendekatan kurikulum
angkan wawasan melalui
perpustakaan dan pegiat

ntunnya ini sejalan dengan
ikan Presiden Joko Widodo

bahwa Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat perpustakaan, dalam hal ini adalah pustakawan harus bias membuka diri membangun kolaborasi di level lokal, nasional, regional hingga internasional. Bahkan kolaborasi tidak hanya sekedar antar pustakawan atau antar organisasi profesi pustakawan tapi melibatkan skop yang lebih luas lagi yakni lintas komunitas yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan perpustakaan dan pustakawan yakni membangun masyarakat yang gemar membaca.

Kesimpulan

Tantangan pembangunan yang terjadi di seluruh negara adalah sama yakni persoalan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Hadirnya organisasi-organisasi dunia baik yang bersifat regional maupun internasional tentunya bertujuan untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat dunia yang berkualitas dan sejahtera melalui berbagai pola-pola kerjasama dan program-program yang dihasilkannya.

ASEAN, adalah salah satu organisasi regional yang memiliki tujuan untuk membangun kerja sama antar negara-negara di Asia Tenggara. Pola komunikasi dan kolaborasi yang sudah dibangun oleh kepala-kepala negara dan pemerintah negara ASEAN, sejatinya bisa ditiru oleh masyarakat perpustakaan; pustakawan berserta komunitas pegiat literasi. Hingga saat ini persoalan literasi digerakkan secara parsial yakni sebagai gerakan yang eksklusif semata.

Pustakawan dengan CONSAL (*Congress of Southeast Librarians*) bergerak dengan fokus hanya mengembangkan perpustakaan dan pustakawan sebagai sebuah sistem, di sisi lain masyarakat literasi dalam hal ini pegiat literasi juga bergerak sendiri-sendiri. Hingga yang tampak di masyarakat adalah betapa gerakan budaya baca dan perpustakaan masih menjadi issue yang terpisah dari issue pendidikan dan kesejahteraan. Dengan kata lain masyarakat tidak melihat benang merah dari budaya baca dan kesejahteraan ekonomi, juga issue lainnya dalam budaya, hukum dan sebagainya.

Perpustakaan, pustakawan dan pegiat literasi di masyarakat perlu untuk duduk bersama untuk merancang sebuah gerakan membaca yang bersifat massif dan terukur di seluruh wilayah. Di level ASEAN, gerakan ini bisa menjadi sebuah gagasan bersama dengan target meningkatnya kualitas SDM dan perekonomian masyarakat di negara-negara ASEAN. Perpustakaan, pustakawan, dan pegiat literasi harus menjadikan issue ini menjadi agenda bersama dalam kolaborasi program, bukan sekedar gerakan yang bersifat masing-masing dan eksklusif. Budaya membaca harus ditanamkan, dikuatkan dan ditingkatnya dengan berbagai pola pendekatan. Karena kita meyakini bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki budaya membaca yang tinggi. *Literacy is a bridge from misery to hope*, kata Kofi Annan. *

Referensi

<https://asean.org/>

https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/1._SK_92_2017_RENSTRA_2015-2019_.pdf

<https://www.consal.org/about/history.html>

NUR INDRAWATI PARY adalah pustakawan Diskarpus Kota Depok, Jawa Barat. Sejak muda aktif berorganisasi. Ia juga aktif di Rumah Produktif Indonesia.

Peran Pustakawan (Sekolah) ASEAN di Era Informasi dan Global

Nopiar Rahman

Latar Belakang

Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola sumber-sumber pengetahuan saat ini sedang bersaing dengan kemajuan teknologi. Bahan bacaan saat ini tidak hanya bisa diakses dari perpustakaan tetapi juga lebih mudah diakses dari SMART PHONE di genggamannya. Perilaku pencari informasi pun bergeser dari mencari buku di rak-rak perpustakaan menjadi berselancar melalui SEARCH ENGINE atau lebih dikenal dengan istilah GOOGLING.

Gedung-gedung perpustakaan sepi pengunjung, buku-buku tetap rapi dalam susunannya, dan geliat literasi menurun berganti dengan euforia media sosial. Akankah pergeseran fenomena ini menyingkirkan profesi pustakawan sebagaimana profesi lain yang mulai tergeser dengan kehadiran mesin, robot, dan teknologi?

Tentunya kita masih ingat beberapa tahun lalu, ketika masuk gerbang tol maka kita harus menyiapkan uang pas karena ada petugas *gate toll* yang sudah menunggu pembayaran. Sekarang hal itu tidak kita temui lagi karena gerbang tol sudah dibuat otomatis menggunakan pembayaran kartu tap *e-toll*. Petugas *teller* kini mulai berkurang semanjak adanya *mobile banking* dimana nasabah bisa langsung bertransaksi melalui *handphone*-nya. Bahkan di negara maju, profesi kasir, sopir, petugas pom bensin dan banyak lainnya sudah mulai digantikan dengan mesin dan robot. Namun pustakawan tidak seharusnya berkecil hati karena masih banyak peluang bagi profesi pustakawan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Manusia sekarang boleh mengandalkan *google* untuk berselancar mencari informasi. Tetapi apakah semua informasi yang ditawarkan *google* relevan? Di sinilah pustakawan dapat mengambil peran.

Pustakawan Sekolah Harus Mengambil Peran

Di tengah gempuran arus informasi yang deras, perubahan yang cepat, konten di berbagai media yang makin beragam, pustakawan (Sekolah) harus mampu mengambil posisi. Dunia saat ini menjejali manusia dengan banyak informasi hingga informasi yang masuk ke otak manusia adalah bukan yang mereka butuhkan. Banyak waktu yang dihabiskan untuk *scrolling* di *smartphone* mengakibatkan masyarakat banyak yang terkena serangan *infoglut* atau kekenyangan informasi.

Pustakawan (Sekolah) harus mengambil peran karena jika tidak mampu memberikan layanan, maka orang tidak melihat dan kelamaan akan dianggap tidak perlu. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang pustakawan di tempat kerjanya. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan pustakawan (Sekolah) untuk terus maju menghadapi tantangan.

Pertama, pustakawan (Sekolah) harus cerdas mengelola koleksi perpustakaan. Pustakawan di perpustakaan Sekolah misalnya dapat menunjukkan peran dalam pengelolaan konten lokal organisasi induknya. Proses akuisisi koleksi dari seluruh unit kerja hingga pengolahannya menjadi tugas pustakawan. Kemudian pustakawan juga perlu membuat *profiling* pegawai di organisasi induknya karena dari sana akan diketahui minat dan kepakaran seseorang. Pustakawan kemudian dapat membuat paket-paket informasi berisi sumber referensi tematik yang dibutuhkan SDM organisasi sesuai bidang kerjanya. Layanan ini disebut juga *Selected Dissemination of Information*, dimana informasi diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan minat dan bidang kerjanya.

Kedua, membangun jejaring dengan perpustakaan sekolah lain. Saat ini telah banyak jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Lembaga Hukum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Khusus dan sebagainya. Pustakawan (Sekolah) pun kini membuat komunitas sesuai dengan jenis perpustakaan tempatnya berkarya. Dari sini pustakawan (Sekolah) harus menemukan komunitasnya untuk berjejaring. Tidak ada satu perpustakaan pun

yang mampu memenuhi semua kebutuhan penggunanya, maka berjejaring adalah salah satu solusinya. Jika pengguna tidak menemukan referensi yang dicari di perpustakaan kita, maka bisa dibantu dengan jaringan yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Meskipun peningkatan kapasitas SDM biasanya menjadi tanggung jawab institusi tempat kita bernaung, namun perlu kesadaran dan upaya dari diri sendiri untuk secara mandiri membuat program peningkatan kompetensi diri. Pustakawan (Sekolah) dapat membuat program membaca buku misalnya sepekan satu buku untuk menambah wawasan dan keilmuan. Ikut serta dalam kelas menulis, dan mencoba membuat tulisan sesuai minat pun akan menjadi ide yang bermanfaat. Mengikuti webinar-webinar terkait isu-isu kepustakawanan juga harus dilakukan. Saat ini sangat banyak webinar bertebaran dan sangat mudah untuk diikuti.

Seorang pustakawan (Sekolah) harus memiliki kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai, prilaku serta karakteristik pustakawan (Sekolah) untuk melaksanakan pekerjaan memberikan layanan kepada pengguna. Dengan adanya kompetensi yang seharusnya dimiliki pustakawan, akan menjamin terwujudnya layanan yang bermutu. Oleh karena itu, untuk menjadi pustakawan harus ada persyaratan minimal yang dimiliki dan sesudah menjadi pustakawan harus berupaya meningkatkan kompetensi tersebut. Kompetensi harus selalu ditingkatkan secara berkelanjutan. Keterkaitan peningkatan kompetensi pustakawan (Sekolah) di ASEAN adalah bahwa SDM di bidang perpustakaan atau yang disebut pustakawan, harus memiliki daya saing yang tinggi agar dapat menghadapi tantangan dengan masuknya tenaga kerja asing dari luar negeri, salah satu caranya adalah peningkatan kompetensi. Dengan memiliki kompetensi yang tinggi diharapkan kinerja pustakawan bisa optimal sehingga lapangan pekerjaan di bidang perpustakaan tetap diisi oleh pustakawan-pustakawan dalam negeri.

Association of South East Asian Nation (ASEAN) merupakan organisasi regional di kawasan asia tenggara yang hingga saat ini terdiri dari sebelas (11) negara, yaitu; Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste. Di tahun 1997, disepakati *ASEAN Vision 2020*, yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Lalu pada di tahun 2003, disepakati tiga pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yang dipercepat di tahun 2015, yaitu *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Socio-Cultural Community*.

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk *Free Trade Area (FTA)* yaitu suatu kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi dengan harapan mampu memberikan akses yang lebih mudah pada perdagangan luar negeri. Negara-negara di *ASEAN* yang dikenal sebagai komoditi ekspor berbasis sumber daya alam terbesar di Asia juga menjadikan peluang dalam persaingan pasar produksi. Namun, jika pemerintah tidak melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, beberapa sektor industri akan mengalami titik kelemahan ketika *FTA* benar-benar diimplementasikan. Adanya pasar bebas atau *FTA* tersebut membuka kesempatan dan persaingan pada pasar barang dan jasa, pasar investasi, pasar modal dan pasar tenaga kerja.

Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara populasinya terbesar di kawasan *ASEAN*, yang mana masyarakatnya *heterogen* dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat dan dilimpahi banyak sumber daya alam yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah India. Dalam *AEC*, Sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan harus memiliki daya saing yang tinggi, tingkat daya saing pustakawan ini, dipengaruhi kompetensi dari pustakawan itu sendiri. Kompetensi pustakawan harus terus ditingkatkan dan prosesnya pun dilakukan terus menerus dan berkelanjutan.

Masalah kompetensi itu menjadi penting, karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. Salah satu tujuan diberlakukannya standar kompetensi di Indonesia adalah untuk persaingan bebas (*AFTA*, *APEC* dan sebagainya), khususnya bagi pasar tenaga kerja antar negara. Seperti kita ketahui pada era global setiap negara harus membuka kesempatan dan kerjasama seluas-luasnya antar negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tenaga kerja Indonesia harus mempunyai daya saing tinggi untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Standar kompetensi ini akan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di pasar bebas

Untuk peningkatan kompetensi itu, harus ada instansi pembina dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional RI yang membentuk dan menyusun Standar Kompetensi Pustakawan dengan melibatkan organisasi profesi, lembaga pendidikan, serta instansi terkait. Apabila Kompetensi pustakawan meningkat maka bisa dipastikan kita mampu bersaing dengan pustakawan luar negeri yang ingin bekerja di negara kita. Kegiatan melakukan Penyusunan Standar kompetensi Pustakawan ini diharapkan dapat dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Karena kompetensi seorang pustakawan harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kemajuan di bidang Iptek, dengan begitu akan meningkatkan profesionalisme pustakawan, profesi pustakawan di Indonesia dapat memenangkan persaingan dengan Negara luar lainnya yang ingin mencari lapangan pekerjaan yang ada di perpustakaan. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri pustakawan karena dengan adanya standar Kompetensi Pustakawan, kita memiliki nilai lebih yang bisa kita tonjolkan.

Pustakawan adalah sebuah profesi bukan sekedar pekerjaan. Pustakawan harus mampu mengenali diri sendiri dan mampu membangun imej positif atau melakukan *'branding'* terhadap profesinya. Pustakawan (Sekolah) perlu selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidangnya sehingga mempunyai daya saing serta mampu mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah. Pustakawan (Sekolah) harus mampu berperan dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan pustakawan lain baik di tingkat lokal maupun nasional terlebih regional. Sehingga dengan kata lain, pustakawan (Sekolah) di Asia Tenggara yang mampu menghadapi era informasi dan global dan pasar bebas adalah pustakawan yang memahami konsep jati diri sebagai pustakawan, mempunyai kompetensi, memahami profesionalisme dan mampu terus menjalin hubungan kerjasama dan membangun jaringan dengan pustakawan atau pekerja lain di bidang informasi.

Pustakawan (Sekolah) yang mampu memahami pekerjaan/tugas, memiliki motivasi, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan pekerjaan/tugas dan mampu bersikap atas dasar pekerjaan yang diberikan merupakan satu ciri pustakawan yang mempunyai kompetensi dan daya saing yang kuat. Mudah-mudahan di era informasi dan global ini Pustakawan (Sekolah) ASEAN siap dengan segala tantangan yang ada dan tentunya bisa menjadi pustakawan yang berkompeten serta profesional di bidangnya, dan ditambah adanya ajang kompetisi seperti halnya CONSAL (Congress of Southeast Librarians) tetapi ini untuk Pustakawan (Sekolah) boleh jadi seperti Asean School Librarian (ASOL).*

Referensi

- Perpustakaan Nasional RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007.
- Basuki, Sulisty (2009). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Warsito, Gunawan. 22 Juni 2013. ASEAN Community 2015 (Online), (Gunklaten.com, Diakses 19 Juni 2014).
- Mone, Justry (2013). *Indonesia Menuju ASEAN Economic Community*. (Online), (Kompasiana.com, diakses 19 Juni 2014)
- Surachman, Arif (2011). *Pustakawan Asia Tenggara Menghadapi Globalisasi dan Pasar Bebas*. Makalah yang disajikan dalam Seleksi Utusan Indonesia untuk Consal Outstanding Librarian Award, di Hotel Peninsula, Jakarta, 21-23 November.

NOPIAR RAHMAN adalah Pustakawan di sebuah sekolah di PKS Agro Indomas, salah satu dari beberapa sekolah Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Saat ini fokus mengelola perpustakaan sekolah. Tertarik sekali di bidang kepustakawanan, dan aktif mengikuti bimtek, workshop dan diklat kepustakawanan baik yang onsite ataupun online oleh Perpustakaan RI maupun Perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi. Ikut aktif berpartisipasi di dalam gerakan literasi melalui TBM Grup Literasi Gawi Hatantiring selaku *owner*, tujuan gerakan literasi yaitu untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah/TBM yang diwujudkan dalam gerakan literasi agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jejaknya dapat diikuti *fb* Nopiar Rahman dan *ig* librarian_nopiar.

Sastrawan ASEAN *Goes to School*: Model Penguatan Narasi Identitas

Muhardis

Pendahuluan

Kegiatan Sastrawan ASEAN *Goes to School* sepertinya dapat dijadikan model penguatan narasi identitas ASEAN. Model ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari salah satu upaya yang telah digagas Dirjen Kerja sama ASEAN Kemlu sebelumnya, yakni ASEAN *Goes to School*. Selama ini, Dirjen sudah melakukan diseminasi informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerja sama ASEAN melalui seminar, sarasehan, maupun festival.

Berkaitan dengan Sastrawan *Goes to School*, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyelenggarakan Temu Penyair Asia Tenggara (TPAT) II-2022 yang resmi dibuka pada Rabu (30/11/2022) malam di Auditorium Mifan Water Park. Kegiatan *Sastrawan Goes to School* atau sastrawan berkunjung ke sekolah-sekolah merupakan satu dari beberapa rangkaian acara Temu Penyair Asia Tenggara (TPAT) II-2022 di Kota Padang Panjang.

Ajang tersebut merupakan ajang kedua setelah terselenggaranya ajang pertama pada tahun 2018 lalu. Ajang pertama tersebut juga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan tersebut menghasilkan antologi puisi *Epitaf Kota Hujan*. Antologi tersebut memuat puisi karya penyair Indonesia dan 50 puisi dari penyair Asia Tenggara dengan tebal buku 495 halaman (Febrianti, 2018). Ada 600 lebih puisi yang masuk dan diseleksi. Hal ini menunjukkan penyair dari luar Indonesia tidak kesulitan memperoleh informasi seputar Padang Panjang untuk dijadikan karya puisi.

Tamu yang kurang lebih 100 penyair dari berbagai negara tinggal di rumah-rumah masyarakat. Tambahan untuk tahun 2022 ini, mereka diajak untuk berkunjung ke SMP se-Padang Panjang. Makan minumannya pun bekerja sama dengan UMKM yang ada di Padangpanjang ((Antoni (Ed.), 2022). Hal itu merupakan langkah untuk *me-recovery* ekonomi pascapandemi Covid-19, baik dalam hal pariwisata maupun kebangkitan UMKM.

Dengan ditambahkannya kegiatan Sastrawan berkunjung ke sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Padang Panjang diharapkan dapat lebih mengenalkan keragaman budaya negara anggota sehingga dapat saling mengenal dan menghargai identitas nasional masing-masing serta mewariskan kawasan Asia Tenggara kepada generasi penerus.

Tambahan, kegiatan sastrawan berkunjung ke sekolah-sekolah dapat dikatakan sebagai perwujudan badan sektoral ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) yang dibentuk tahun 2003 lalu. Sektor ini biasanya menyelenggarakan ASEAN culture week dan kunjungan antarseniman ASEAN. Bahkan, telah disusun Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity pada KTT ke-19 ASEAN.

Deklarasi ini diharapkan mampu mencerminkan keinginan dan komitmen ASEAN untuk mengejawantahkan integritas ASEAN di tengah keberagaman yang ada. Kegiatan Sastrawan berkunjung ke sekolah merupakan elemen prioritas kerja sama budaya, yakni *Enhancement of Cultural Creativity and Industry, Culture as a Means Towards an ASEAN Caring and Sharing Society*. Ke depannya, kegiatan sastrawan berkunjung ke sekolah ini dapat mendukung terjalinnnya narasi identitas komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat karena dilakukan melalui pendekatan kerja sama kebudayaan.

Jika Indonesia memiliki Temu Penyair se-Asia Tenggara, Malaysia pun sudah menggagas *Pemuisi di DBP* (Dewan Bahasa Pustaka). Baru-baru ini program bulanan malam baca puisi tersebut menampilkan 6 pemuisi dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, dan Cina (Nasir, 2022). Puisi yang dibacakan bertema "cinta itu indah".

Selain program Pemuisi di DBP, Malaysia juga telah menggaungkan program Pertemuan Penyair Nusantara (PPN). PPN ini diadakan dua tahun sekali.

Bentuk ikut sertanya pemerintah, misalnya Pemerintah Kota Padang Panjang dan DBP dapat dikatakan sebagai wujud nyata pemerintah/otoritas daerah dalam upaya membangun identitas ASEAN, sesuai dengan langkah strategis A2 poin iii Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025.

Diskusi

Pertemuan semacam TPAT, *Pemuisi di DBP*, dan PPN ini dapat menjadi *platform* kawasan untuk berdialog seputar kesastran kawasan ASEAN. Pertemuan sastrawan se-ASEAN dapat dijadikan model penguatan narasi identitas negara-negara ASEAN. Tema-tema berikut, misalnya, dapat dijadikan pemantik diskusi kawasan. Dari diskusi tersebut diharapkan para sastrawan dapat merancang bentuk-bentuk sastra dengan tema yang berbeda di setiap edisinya untuk menghasilkan produk sastra yang akan dikenalkan ke siswa-siswa saat kunjungan.

Pertama, mayoritas negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi. Sayangnya, sumber tersebut, hutan misalnya, mengalami degradasi akibat pemenuhan ekonomi masyarakat. Ketamakan akan penguasaan penuh terhadap hutan dan isinya sudah menjadi kasus yang berulang di negara-negara ASEAN.

Adanya ratifikasi AATHP (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) yang digagas Indonesia tahun 2003—2014 (Admin, 2022) merupakan upaya Indonesia dalam pengendalian kebakaran lahan dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Selain itu, peran masyarakat lokal tidak kalah penting dalam penegakan hukum kehutanan di samping peran pemerintah (Brunner et al., 2014).

Para sastrawan dapat menghasilkan antologi puisi maupun kumpulan cerpen terkait tema kebakaran lahan serta peran masyarakat lokal. Puisi berjudul “Darah dari Hutan” karya Nik Mansour Nik Halim, Vietnam, ini contohnya. Ia mengangkat tema ketamakan manusia terhadap alam dalam pembalakan hutan.

Kedua, berkaitan dengan profesi, upaya *Mutual Recognition Agreement (MRA)* yang sudah disepakati warga ASEAN setidaknya membuka kran seluas-luasnya bagi setiap warga untuk bekerja lintas negara (Apresian, 2016). Tentunya hal ini menimbulkan banyak apresiasi yang beraneka. Melalui tema ini, para sastrawan dapat menuliskan sastra dengan topik MRA dan seperti apa realitasnya di masing-masing negara. Tentunya akan ditemukan beberapa hambatan sebagai bentuk penyesuaian awal kebijakan tersebut.

Karya-karya penyair Than Youjin, penyair Singapura bisa dijadikan contoh. Ia sudah menulis 127 judul buku. Antologinya yang berjudul *Air Ajaib yang Merana*, misalnya, memuat 100 esai yang menyerupai potret berbagai kehidupan keseharian manusia. Tulisan ini merepresentasikan sikap hidup dan ekspresi cintanya pada bahasa dan kultur leluhur, pada kehidupan yang selalu tak terduga, dan pada kemanusiaan yang tak tersekat oleh kebudayaan, suku bangsa, dan agama. Ia berbicara tentang penjual air di Maroko, perempuan penari di Meksiko, pemburu harimau di Nepal, dan berbagai profesi lain yang dijalani seseorang di mancanegara. Bahkan juga tentang beragam makanan dan masakan sampai ke persoalan petai dengan ulatnya yang jelek dan jahat bergerak merayap atau tahi kelelawar yang neplik di tengah bubur (Mahayana, 2009).

Berikutnya karya-karya Nguyen Huy Thiep, sastrawan Vietnam. Nguyen Huy Thiep memberi jejak yang mendalam tentang tema pedesaan dan para pekerja. Dia dengan rajin pergi ke berbagai daerah untuk mencerminkan kehidupan para petani, khususnya daerah pegunungan Tay Bac Barat Laut (Anh, 2021).

Ketiga, selain kesamaan profesi, kebebasan dan hak asasi manusia juga menarik untuk dijadikan tema. Hal ini sesuai dengan cetak biru B3 poin vii tentang pemajuan dan perlindungan HAM, yakni meningkatkan inisiatif kawasan dan partisipasi pemangku kepentingan untuk memajukan penghapusan semua bentuk diskriminasi yang terlembaga seperti eksploitasi, perdagangan, praktik-praktik berbahaya, kekerasan, penganiayaan terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pekerja migran, lanjut usia, dan korban perdagangan manusia, kelompok etnis minoritas, serta kelompok terpinggirkan.

Tema-tema HAM tersebut bukanlah hal baru di berbagai negara, terlebih yang berhubungan dengan perempuan dan disabilitas. Puisi Sastrawan Bounthanong Xomxayphil, Laos, contohnya. Ia dengan cerita pendeknya “Tulang Belulang orang Amerika (*American Bones*)”, merupakan bagian antologi cerita pendek berjudul *Melepaskan Burung* yang terdiri

atas tujuh cerita berbahasa Laos dan bahasa Inggris. Ceritanya memuat pesan terkait kebebasan dan hak asasi manusia (Huyen, 2012).

Berkaitan dengan penjajahan sebagai aspek kesejarahan juga dapat dijadikan tema penulisan sastra ASEAN. Kesamaan nilai (Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri), di antaranya, bahwa hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali Thailand, pernah dijajah oleh bangsa Barat. Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara juga mendapat pengaruh dari peradaban India dan China (Arif, 2019).

Masyarakat di Asia Tenggara yang semula tidak mengenali batasan, pada akhirnya mulai dikotak-kotakkan sesuai dengan perjanjian masing-masing pemerintah kolonial—mulai dari penggunaan bahasa, pembagian geopolitik, hingga jaringan infrastruktur yang hanya terhubung di antara sesama koloni negara tertentu (Jie, 2019).

Aturan pemerintah kolonial tersebut berhasil mengkonstruksi bayangan identitas masyarakat Asia Tenggara sebagai ‘sesama wilayah koloni’ negara tertentu (Aurantia, 2020). Aturan-aturan tersebut juga memutuskan sebagian besar relasi sosial dan budaya adat pra-kolonial yang telah ada sebelumnya (Emerson, 1971). Misalnya, alih-alih mengidentifikasi diri sebagai ‘orang Asia Tenggara’—Malaysia dan Burma lebih memandang diri mereka sebagai bagian dari Inggris, Indocina sebagai bagian dari Prancis, dan Indonesia sebagai bagian dari Belanda.

Sajak-sajak dari negeri gajah putih, Thailand ini contohnya. Mahroso Doloh menulis sajak-sajak dalam kumpulan sajak *Pelabuhan Malam*. Sajak ini memuat isu-isu yang terkait sejarah Patani atau Pantai Ini. Sajak-sajak ditulis dalam bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia (Doloh, 2015).

Selain itu, perkawinan budaya juga dapat dijadikan tema selanjutnya. Perkawinan antarpenduduk di kawasan ASEAN secara tidak langsung menyebabkan perkawinan kebudayaan. Tentunya pilihan menjatuhkan pasangan hidup dengan sesama orang ASEAN merupakan pilihan yang tepat mengingat banyaknya kesamaan dibandingkan perbedaan jika menikah dengan “orang asing” yang dibutuhkan pembelajaran untuk mencari kesamaan.

Contohnya penduduk wilayah Pulau Miangas yang awalnya adalah campuran antara orang-orang Talaud (Indonesia) dan Mindanao (Filipina) yang tinggal bersama dan membentuk kultur serta tradisi—yang sayangnya sudah terhapuskan (LANG, 1986). Tradisi yang terhapuskan ini menjadi peluang bagi para sastrawan untuk menggantinya dan mereservasikan dalam bentuk produk sastra.

Beberapa karya pengarang di ASEAN tersebut semakin memperkuat temu sastrawan sebagai model penguat narasi ASEAN. Mereka dipertemukan dalam satu wadah bernama temu sastrawan, menuliskan tema yang sama, dengan pola pandang masing-masing negara. Menyatu dalam keragaman. Beragam dalam kesatuan, ASEAN.

Ibarat kata, mereka, para penyair ASEAN tersebut menuliskan kisah hidup seseorang yang terinternalisasi dan berkembang, mengintegrasikan masa lalu yang direkonstruksi dan masa depan yang dibayangkan untuk memberikan kehidupan dengan tingkat kesatuan dan tujuan tertentu (Mcadams & McLean, 2013).

Narasi identitas yang dijalin dalam wadah temu sastrawan dapat berupa narasi kisah hidup seseorang (di negara-negara anggota ASEAN) dengan latar beragam dari sisi agama, sejarah, dan letak geografis. Hal ini juga mendukung program pemerintah dalam upaya menyampaikan nilai-nilai komunitas masyarakat kawasan. Selama ini upaya tersebut dilakukan melalui laman informasi digital dan juga secara fisik, seperti pertukaran pelatihan vokasi, beasiswa pendidikan, maupun kerja sama antarkota (Cyndiara, 2020).

Agar berkelanjutan, ASEAN perlu menjaga relevansinya, baik di dalam ASEAN sendiri maupun di antara Komunitas Global Bangsa-Bangsa. Orang perlu melihat dan merasakan manfaat dari ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat identitasnya dengan meningkatkan kesadaran ASEAN dan solidaritas di antara masyarakatnya termasuk melalui penggunaan informasi digital sambil fokus apresiasi terhadap kesamaan dan kesamaan, seperti sejarah, cerita rakyat, budaya, tradisi, makanan, dan lain-lain (Adopted by the 37th ASEAN Summit, 2020).

Konklusi

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dan diskusi tulisan ini dapat disarikan bahwa kerjasama masyarakat sosial-budaya di ASEAN dapat diwujudkan dalam bentuk pertemuan sastrawan se-ASEAN. Hal ini didasarkan pada kesamaan banyak faktor yang telah dialami masing-masing warga negara di kawasan tersebut.

Sama-sama negara jajahan, kesamaan sejarah, kemiripan wilayah geografis, dan kesamaan profesi, seyogyanya bukanlah menjadi faktor perenggang, melainkan dapat dijalin menjadi narasi identitas dalam bentuk produk kesastraan melalui kegiatan temu sastrawan. Sekali lagi dapat ditegaskan bahwa temu sastrawan dalam wujud sastrawan ASEAN *goes to school* bisa dijadikan model penguatan narasi identitas tersebut. *

Referensi

- Admin. (2022). *Peran ASEAN Dalam Menghadapi Pembalakan Liar dan Deforestasi*. Eco Care. <https://www.ecocare.id/post/peran-asean-dalam-menghadapi-pembalakan-liar-dan-deforestasi>
- Adopted by the 37th ASEAN Summit. (2020). *THE NARRATIVE OF ASEAN IDENTITY* (12 November 2020). https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/The-Narrative-of-ASEAN-Identity_Adopted-37th-ASEAN-Summit_12Nov2020.pdf
- Anh, N. (2021). *Sastrawan Nguyen Huy Thiep – Fenomena Sastra Vietnam Kontemporer*. <https://vovworld.vn/id-ID/vietnam-negeri-dan-rakyat-nya/sastrawan-nguyen-huy-thiep-fenomena-sastra-vietnam-kontemporer-969522.vov>
- Antoni (Ed.), S. (2022, June 28). *Wako: acara temu penyair Asia Tenggara II harus berdampak positif bagi masyarakat*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/514149/wako-acara-temu-penyair-asia-tenggara-ii-harus-berdampak-positif-bagi-masyarakat>
- Apresian, S. R. (2016). Arus Bebas Tenaga Kerja dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia? *Indonesian Perspective*, 1(2), 15–29. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Arif, A. (Ed). (2019). *Indonesia Ajak Negara ASEAN Memasyarakatkan Identitas Bersama*. <https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77776166/Indonesia-Ajak-Negara-ASEAN-Memasyarakatkan-Identitas-Bersama>
- Aurantia, F. (2020). *Kolonialisme, Identitas ASEAN, dan Kegagalan Representasi Nilai-Nilai Warisan*. <https://kontekstual.com/kolonialisme-identitas-asean-dan-kegagalan-representasi-nilai-nilai-warisan/>
- Brunner, J., Seymour, F., Badenoch, N., & Ratner, B. (2014). *FOREST PROBLEMS AND LAW ENFORCEMENT IN SOUTHEAST ASIA: THE ROLE OF LOCAL COMMUNITIES*. https://wri-indonesia.org/sites/default/files/forest_problems_and_law_enforcement_in_southeast_asia.pdf
- Cyndiara, A. (2020). *Dubes Jerman Paparkan Pengalaman Uni Eropa Bentuk Identitas Masyarakat*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/1258663/dubes-jerman-paparkan-pengalaman-uni-eropa-bentuk-identitas-masyarakat>
- Doloh, M. (2015). *Pelabuhan Malam karya Mahroso Doloh*. <https://www.kawaca.com/2017/10/buku-pelabuhan-malam-karya-mahroso-doloh.html>
- Emerson, R. (1971). Post-Independence Nationalism in South and Southeast Asia: A Reconsideration. *Pacific Affairs*, 44(2), 173–192. <https://doi.org/10.2307/2755376>
- Febrianti, I. (2018, April 13). *Temu penyair Asia Tenggara, Padang Panjang luncurkan antologi “Epitaf Kota Hujan.”* <https://sumbar.antaranews.com/berita/224071/temu-penyair-asia-tenggara-padang-panjang-luncurkan-antologi-epitaf-kota-hujan>
- Huyen, T. (2012). *Pertemuan dengan para sastrawan yang mendapat Penghargaan Sastra Asia Tenggara 2011*. <https://vovworld.vn/id-ID/rumah-asean/pertemuan-dengan-para-sastrawan-yang-mendapat-penghargaan-sastra-asia-tenggara-2011-75100.vov>
- Jie, L. J. (2019). *Colonialism and ASEAN Identity: Inherited ‘Mental Barriers’ Hindering the Formation of a Collective ASEAN Identity: Kyoto Review of Southeast Asia*. *Kyoto Review of Southeast Asia*. <https://kyotoreview.org/trendsetters/colonialism-asean-identity/>
- LANG, L. Y. (1986). The Colonial Legacy in Southeast Asia: Maritime Boundary Problems. *Contemporary Southeast Asia*, 8(2), 119–130. <http://www.jstor.org/stable/25797892>
- Mahayana, M. S. (2009). *SIHIR YOUJIN: MENULIS DENGAN HATI*. <https://www.yinhuazuoxie.com/aneka/sihiryoujin.html>

McAdams, D., & McLean, K. (2013). Narrative Identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22, 233–238. <https://doi.org/10.1177/0963721413475622>

Nasir, N. A. (2022). *Pemuisi 6 Negara Mengisi Program Pemuisi di DBP*. <https://dewansastera.jendeladbp.my/2022/02/28/3001/>

MUHARDIS saat ini berstatus sebagai fungsional periset di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak Maret 2022. Sebelumnya, penulis berkiprah sebagai fungsional peneliti di Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemdikbudristek 2015-2022. Selain aktif melakukan kegiatan penelitian di bidang bahasa, sastra, literasi, dan evaluasi, penulis juga disibukkan kegiatan menulis opini di Kompas.com. Ia dapat dihubungi melalui email: adi_perdana2000@yahoo.com.

APEL 8, Wujud Aksi Nyata Gerakan Literasi Sekolah

Noralia Purwa Yunita

Pendahuluan

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Dalam PIRLS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 45 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012 dalam Wiedarti dkk, 2018). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 402, Sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 (OECD, 2013 dalam Wiedarti dkk, 2018). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012.

Posisi Indonesia tetap pada urutan ke-64 pada PISA 2015, dengan peserta terdiri atas 72 negara. Ini berarti ada kenaikan hanya satu angka, dari 396 pada PISA 2012 menjadi 397 pada PISA 2015. Kenaikan ini tidak cukup signifikan ketika penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis teks sudah diberlakukan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan (Wiedarti dkk, 2018).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kebijakan ini berisi tentang kewajiban bagi siswa SD SMP dan SMA untuk membaca dan dituangkan dalam Gerakan Literasi Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca siswa di Indonesia (Hastuti dan Lestari, 2018).

Pada dasarnya, menurut Kemdikbud, kegiatan literasi di sekolah harus didasarkan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah. Agenda pengembangan literasi disekolah harus diarahkan dalam meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan serta menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca agar prestasi belajar peserta didik meningkat (Sabarudin, 2018).

Saat ini sosialisasi gerakan literasi sekolah sudah dilaksanakan namun kegiatan ini belum begitu membuahkan hasil yang maksima. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi di kalangan siswa dan guru. Masih banyak guru yang beranggapan bahwa literasi menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, bahan bacaan dan teks yang tersedia di sekolah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Hasilnya gerakan literasi yang dicanangkan di sekolah tidak dapat terlaksana dengan baik (Joyo, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah solusi nyata sebagai upaya mewujudkan gerakan literasi sekolah agar didapatkan hasil yang maksimal pada peningkatan kemampuan literasi peserta didik.

Tujuan penulisan karya ini adalah untuk memberikan solusi peningkatan literasi sekolah melalui APEL 8 sebagai wujud aksi nyata gerakan literasi di sekolah. Penulisan karya ini didasarkan pada kajian kepustakaan dari buku-buku dan artikel ilmiah dengan tahapan yaitu menentukan dan merumuskan masalah, mencari dan mengumpulkan sumber pustaka, menyeleksi sumber pustaka, menganalisis sumber pustaka serta menyusun karya.

Strategi Pelaksanaan Budaya Literasi Sekolah

Beers, dkk. (2009) dalam *A Principal's Guide to Literacy Instruction*, menyatakan bahwa strategi sangat diperlukan guna terciptanya budaya literasi sekolah yang positif. Tiga strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi
2. Mengupayakan lingkungan sosial sebagai model interaksi dan komunikasi yang literat dimana sekolah perlu menciptakan suatu jalinan komunikasi yang harmonis di antara semua warga sekolah, baik guru, peserta didik dan tenaga kependidikan.
3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan belajar yang literat dengan penyediaan bahan bacaan yang bermanfaat dan menarik minat warga sekolah untuk membacanya.

APEL 8 (Aktualisasi 8 program literasi) pada Gerakan Literasi Sekolah

Pada tahap ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah yang terwujud dalam APEL 8 (Aktualisasi 8 Program Literasi). Gerakan Literasi Sekolah tersebut didasarkan pada Panduan Gerakan Literasi Sekolah SMP dimana tahapan gerakan literasi sekolah tingkat SMP meliputi tiga tahapan yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran (Kemdikbud, 2016). Ketiga tahapan tersebut tercermin dalam 8 program literasi yaitu:

1. *Graphic Organizers* Literasi

Pada kegiatan ini, peserta didik diberikan waktu selama 15 menit untuk membaca bahan bacaan non pelajaran. Sekolah dapat memilih menjadwalkan waktu membaca di awal, tengah, atau akhir pelajaran, bergantung pada jadwal dan kondisi sekolah masing-masing. Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun sering dan berkala lebih efektif daripada satu waktu yang panjang namun jarang (misalnya 1 jam/minggu pada hari tertentu). Peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari rumah atau membaca bahan bacaan dari perpustakaan ataupun pojok baca kelas. Bahan bacaan yang dibaca merupakan pilihan peserta didik sesuai minat dan kesenangannya.

Setelah kegiatan membaca selesai, peserta didik diminta untuk menuliskan tanggapan terhadap bahan bacaan yang telah dibacanya. Melalui kesempatan menuliskan tanggapan, peserta didik dapat memperoleh kepuasan atas keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan membaca. Salah satu cara yang efektif untuk membantu peserta didik merekam pikiran dan perasaannya tentang buku yang dibaca adalah dengan menggunakan *graphic organizers* (peta konsep).

Nama <input type="text"/>		
Peta Cerita		
Petunjuk: Isi kotak-kotak di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana cerita berkembang.		
Judul buku:	Tokoh cerita:	Latar cerita:
Pengarang:		
Awal	<input type="text"/>	
Tengah	<input type="text"/>	
Akhir	<input type="text"/>	

Gambar 1. Peta Konsep Tanggapan Peserta Didik

2. Pojok literasi kelas

Pojok literasi adalah sebuah sudut baca di kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa (Kurniawan dkk, 2019). Sudut baca ini sebagai perpanjangan dari fungsi perpustakaan yaitu untuk mendekatkan buku kepada peserta didik. Buku yang tersedia pada sudut baca bukan hanya buku pelajaran tetapi terdapat juga buku non pelajaran. Melalui sudut baca ini, peserta didik dilatih untuk membiasakan membaca buku sehingga menjadikan peserta didik gemar membaca.



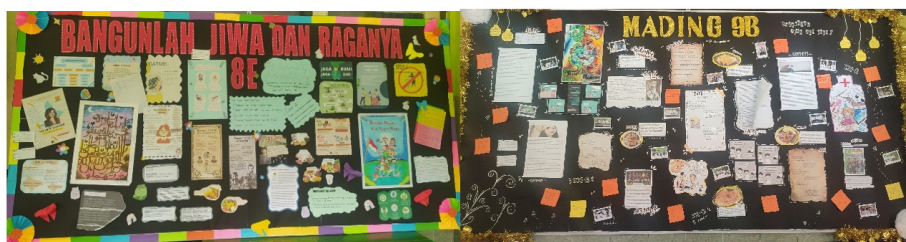
Gambar 3. Pojok literasi Kelas

3. Lomba literasi antar kelas

Kegiatan ini dapat diagendakan pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat jeda tengah semester, jeda semester, peringatan hari besar nasional, dan perayaan hari ulang tahun sekolah. Lomba literasi dilaksanakan dengan mengambil tema tertentu. Adapun jenis lomba yang diadakan dapat berupa pembuatan naskah puisi, cerpen, majalah dinding kelas, poster literasi, *storytelling*, baca puisi dan beberapa lomba literasi lainnya.

4. Majalah dinding kelas

Pembuatan majalah dinding kelas merupakan hasil dari kegiatan perlombaan literasi antar kelas yang diadakan pada waktu tertentu oleh sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik dalam menghasilkan karya literasi, sebagai sarana informasi, dan meningkatkan minat baca peserta didik dalam kelas. Dengan adanya majalah dinding ini, bahan bacaan peserta didik akan lebih bervariasi sehingga informasi yang didapatkan peserta didik menjadi lebih beragam.



Gambar 2. Majalah dinding kelas

5. Posterisasi

Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan poster-poster kampanye membaca untuk memperluas pemahaman dan tekad warga sekolah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui kegiatan literasi.

6. Pembuatan buku antologi siswa

Sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil unjuk karya (hasil dari kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi secara kreatif secara verbal, tulisan, visual, atau digital) yang dilaksanakan dalam perayaan hari-hari tertentu yang bertemakan literasi, sekolah menghimpun karya peserta didik dalam bentuk buku antologi karya

peserta didik. Buku antologi yang diterbitkan ini sebagai wujud apresiasi terhadap peserta didik atas keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan menghasilkan karya literasi. Dengan demikian, peserta didik akan lebih termotivasi dalam melaksanakan kegiatan literasi sekolah.

7. Bedah buku antologi siswa

Kegiatan bedah buku merupakan kelanjutan dari tahapan pembuatan buku antologi siswa. Dengan adanya kegiatan bedah buku ini, maka hasil karya peserta didik tidak hanya dapat dinikmati oleh intern warga sekolah namun oleh masyarakat umum.

8. Pemilihan duta literasi sekolah

Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam kegiatan berliterasi (berdasarkan tagihan non akademik, keaktifan peserta didik dalam mengikuti lomba literasi dan kegiatan literasi sekolah lainnya).

Tantangan Budaya Literasi Sekolah

Gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah tentu saja tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab gerakan literasi sekolah belum terlaksana dengan baik. Tantangan tersebut berasal dari beberapa faktor, yakni faktor peserta didik, guru, dan sekolah. Kebanyakan peserta didik belum memiliki sebuah kesadaran bahwa membaca memiliki peran penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Teknologi yang semakin maju membuat peserta didik lebih asyik dengan dunia maya. Game online dan media sosial menjadi pilihan utama peserta didik daripada meluangkan waktunya untuk membaca. Dampaknya, peserta didik belum memiliki keterampilan menulis yang signifikan karena keterbatasan kosa kata yang dimiliki oleh peserta didik imbas dari kurangnya kegiatan membaca.

Sikap guru juga memberikan tantangan tersendiri dalam peningkatan literasi sekolah. Guru harus menjadi model dalam kegiatan membaca buku nonpelajaran dengan ikut membaca buku-buku pilihan (nonpelajaran) yang dibaca oleh siswa. Namun pada praktiknya, sikap guru masih terkesan acuh terhadap kegiatan literasi di sekolah. Sangat sedikit guru yang berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Selain itu, minimnya karya tulis para guru adalah hal yang nyata.

Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menggerakkan literasi sekolah. Minimnya jumlah buku bacaan yang menarik dan sesuai dengan minat siswa di perpustakaan sekolah adalah salah satu permasalahan yang perlu segera diatasi oleh sekolah. Selain itu, keterbatasan tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk berliterasi juga menjadi faktor lain dalam menghambat kemajuan literasi sekolah.

Berbagai laporan dari lembaga kompeten menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berkaitan dengan hal tersebut, kepala sekolah memiliki peranan penting tidak hanya dalam peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga memajukan literasi peserta didik. Untuk tujuan tersebut, perlu adanya inovasi dan program literasi yang jelas di sekolah. Kerja sama dari berbagai pihak perlu dilakukan untuk mengatasi setiap hambatan pada gerakan literasi yang dibangun oleh sekolah.*

Referensi

- Beers, dkk (2009). *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. Diakses dari www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.Pdf
- Hastuti dan Lestari (2018). *Gerakan Literasi Sekolah: Implementasi Tahap Pembiasaan Dan Pengembangan Literasi Di SD Sukorejo Kediri*. *Basa Taka* Vol. 1, No. 2, Desember 2018
- Joyo, Aceng (2018). *Gerakan Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Menuju Siswa Berkarakter*. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)* Volume 1, No 2, Juni 2018
- Kemdikbud (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud

- Kurniawan, Agung dkk. (2019). Peranan Pojok Baca dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar* P-ISSN. 2622-5069, E-ISSN. 2579-3403 Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
- Sabarudin (2018). Mewujudkan Sekolah Literasi yang Berprestasi. *Society*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2018 P-ISSN: 2338-6932 E-ISSN : 2597-4874
- Wiedarti, Pangesti dkk. (2018). *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud

NORALIA PURWA YUNITA aktif pada kegiatan Gerakan Literasi Sekolah.

Kolaborasi Literasi Tingkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat ASEAN

Billy Antoro

Terbitnya dokumen Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) berjudul “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology” (2015) menegaskan sejumlah keterampilan penting yang harus dikuasai peserta didik tingkat dasar dan menengah agar bisa bertahan hidup di abad XXI. Menurut dokumen itu, ada 16 keterampilan penting yang wajib dikuasai peserta didik, yang dibagi dalam tiga kategori besar yaitu Literasi Dasar (*foundational literacies*), kompetensi (*competencies*), dan kualitas karakter (*character quality*). Penguasaan atas ke-16 keterampilan ini dipandang sebagai modal bagi peserta didik untuk beradaptasi dan bersaing dalam dinamika perubahan global masyarakat dunia.

Literasi Dasar terdiri dari literasi baca-tulis, numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Kompetensi mencakup berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sedangkan Kualitas Karakter terdiri dari kegigihan, adaptasi, kepenasaran, inisiatif, kepemimpinan, dan kepedulian sosial-budaya. Negara-negara di dunia didorong oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk menciptakan tatanan global yang berpihak kepada peserta didik dengan menumbuhkembangkan ekosistem yang peduli pada pemenuhan ke-16 keterampilan hidup tersebut.

Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyambut imbauan itu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Regulasi ini menjelaskan urgensi penumbuhan nilai karakter dan pembiasaan kegiatan literasi agar peserta didik memiliki karakter dan kepribadian unggul.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 juga menjadi pijakan bagi munculnya program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Melalui GLS, pemerintah hendak meningkatkan kompetensi literasi siswa Indonesia yang rendah baik yang diukur melalui survei berskala internasional maupun nasional. Survei skala internasional seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA), *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS). Sementara survei skala nasional yaitu *Indonesia National Assessment Program* (INAP)/Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Pemerintah Indonesia terus mengupayakan, melalui berbagai program dan kegiatan, agar kompetensi literasi siswa Indonesia meningkat dan tercipta budaya literasi di lingkungan satuan pendidikan.

Beragam upaya tersebut ternyata masih tak mampu mengangkat kompetensi literasi siswa. Program (GLS) yang menjadi fenomena di berbagai satuan pendidikan tanah air tak memberi dampak signifikan bagi penguatan literasi di kalangan peserta didik. Kegiatan literasi yang dijalankan oleh satuan pendidikan tak berpengaruh pada prestasi belajar siswa (Antoro, 2021).

Skor PISA pada 2018 menunjukkan Indonesia mengalami stagnasi dalam pembelajaran di bidang-bidang yang diukur, yaitu membaca, sains, dan matematika. Survei tiga tahunan itu secara telak menunjukkan skor PISA 2018 menurun dibandingkan PISA 2015. Bahkan, skor literasi membaca siswa Indonesia pada PISA 2018 sama dengan PISA 2000, yaitu 371. Fakta ini menunjukkan bahwa selama 18 tahun tak ada perkembangan berarti pada peningkatan kompetensi literasi membaca siswa Indonesia.

Di era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil sikap tegas terhadap upaya penguatan literasi peserta didik. Pengukuran PISA yang lebih menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dijadikan model pendekatan asesmen. Ujian Nasional (UN) yang selama sekitar 15 tahun menguji kemampuan siswa dalam penguasaan konten belajar, diganti dengan Asesmen Nasional yang mengukur kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa. Titik tekan penguasaan pengetahuan dasar

bergeser dari menghafal materi menjadi memahami materi dengan paradigma baru. Dengan skema keikutsertaan AN yang diwakili oleh 50% peserta didik di satu sekolah, skor AN menjadi representasi kinerja guru dan kepala sekolah dalam membelajarkan literasi dan numerasi.

Belum selesai permasalahan rendahnya literasi siswa-siswi Indonesia, pandemi Covid-19 mengancam dunia di awal 2020. Dunia pendidikan tanah air terkena imbas, memaksa pemerintah menutup sekolah-sekolah. Guru dan siswa belajar di rumah masing-masing. Dampak terparah dari wabah ini adalah terjadinya *learning loss* di kalangan siswa. Minat dan kemampuan belajar mereka menurun. Hal ini disebabkan sudah terlalu lama siswa dan guru tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Di banyak daerah, kemampuan literasi siswa anjlok. Banyak di antara mereka yang lupa dan tidak lancar membaca. Tak sedikit pula anak-anak keluar sekolah (*drop out*) dengan alasan ekonomi keluarga.

Gagasan Konstruktif

Selama pandemi, Kemendikbudristek melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang sudah ada, yaitu Kurikulum 2013. Konten kurikulum tersebut ditinjau ulang dan disederhanakan. Diprioritaskan konten bermuatan kecakapan hidup dan sesuai kebutuhan siswa. Hingga munculah nama Kurikulum Darurat dan terakhir Kurikulum Merdeka.

Dalam momen ini pula, kemendikbudristek menjalankan Asesmen Nasional (AN). Asesmen ini terdiri dari tiga hal yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Ketiga asesmen itu melibatkan siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sebagai responden.

Asesmen Kompetensi Minimum mengukur daya nalar siswa di bidang literasi dan numerasi. Asesmen ini diikuti oleh 50% siswa di satu sekolah kelas V, VII, dan XI. Dengan skema tersebut, dipadukan dengan hasil Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar, secara keseluruhan hasil AN mencerminkan kinerja satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan AKM pertama kali digelar pada 2021. Hasilnya, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Sementara, 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Hasil AKM tahun berikutnya (2022) mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia (RI) masih mengalami tantangan berat dalam peningkatan kapasitas literasi peserta didik. Jika hal ini terus dibiarkan, Sumber Daya Manusia Indonesia terancam rendah. Sebab, penguasaan literasi berdampak besar dalam pembangunan nasional suatu negara. Hal ini juga sudah disinggung oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) pada 2015.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah RI tak bisa lagi terus mengandalkan kerja-kerja individual. Pemerintah perlu melibatkan komunitas regional dalam peningkatan SDM. Komunitas regional yang dimaksud adalah himpunan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Organisasi berusia 56 tahun ini dideklarasikan di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967. Berikut ini sejumlah gagasan yang dapat disampaikan untuk mengatasi problematika pemerintah RI terkait peningkatan kapasitas literasi peserta didik.

Pertama, program kerja Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (*Southeast Asian Ministers of Education Organization/SEAMEO*) diarahkan pada peningkatan kompetensi peserta didik negara-negara ASEAN. SEAMEO dapat menginisiasi negara-negara dengan kompetensi literasi tinggi berbagi praktik baik tentang pembelajaran di satuan pendidikan, penataan birokrasi pendidikan di daerah, dan penyusunan regulasi yang mentransformasi paradigma pendidikan modern.

KEDUA, Singapura perlu menjadi "mentor" bagi negara-negara sekitarnya dalam peningkatan literasi. Singapura dipilih karena secara konsisten negara ini selalu berada di peringkat teratas dalam survei PISA. Singapura juga merupakan negara terproduktif di ASEAN dalam literasi informasi melalui penulisan artikel jurnal berskala internasional (Sacchanand, 2022). Program mentoring ini di antaranya audiensi antarbirokrat pendidikan, residensi guru dan tenaga kependidikan, dan pertukaran pelajar.

Ketiga, perlu diselenggarakan kerja sama budaya yang melibatkan praktisi, ahli, dan pegiat literasi dalam kerangka penciptaan ekosistem literasi berbasis kearifan lokal. Transformasi budaya yang tidak ramah pendidikan menuju budaya yang ramah pendidikan. Yang dimaksud dengan budaya tak ramah pendidikan yaitu perilaku destruktif masyarakat di

suatu daerah yang menganggap pendidikan bukan perkara penting. Situasi ini banyak terjadi di masyarakat dengan ekonomi sangat miskin. Mereka hidup di kawasan pesisir dan pertanian. Orang tua di kawasan ini umumnya menjadikan anak-anak mereka sebagai buruh kerja. Mata rantai ini harus diputus melalui regulasi dan kebijakan yang pro terhadap kehidupan mereka.

Keempat, pengembangan model kerja sama kolaboratif berbasis keberagaman budaya. Keberagaman identitas menjadi wadah terkuat terjalannya solidaritas di kawasan ASEAN. Keberagaman budaya ini di antaranya melalui bahasa yang secara keilmuan sangat dekat dengan literasi. Pendidikan yang merespon keberagaman bahasa dapat mendukung kualitas pendidikan dan pembelajaran seumur hidup yang inklusif dan adil.

Keempat gagasan di atas berangkat dari paradigma kolaboratif yang kini menjadi kunci bagi peningkatan kapasitas SDM. Pemerintah RI dan negara-negara anggota ASEAN perlu menginisiasi program dan kegiatan tersebut agar tercipta komunitas literasi yang hebat dan tangguh. Dengan hadirnya SDM anggota ASEAN yang kuat dan tangguh, yang dimulai dari peningkatan kompetensi literasi peserta didik, kontribusi negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat dunia.*

Referensi

- Antoro, B. (2021). Hubungan Antara Kegiatan Literasi dengan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 107 Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 6, No. 2, Desember 2021. Retrieved from: <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/2394/560/>
- Bao, X., Qu, H., Zhang, R., Hogan, T.P. 2020. *Literacy Loss in Kindegarten during COVID-19 School Closures*. DOI: 10.31235/osf.io/nbv79
- Hashim, A. 2023. *Literacy and Lifelong Learning in the Twenty-First Century: Development of Multilingualism and Multiliteracies in ASEAN*. DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-16-2327-1_36-1
- Sacchanand, C. 2022. *Development of ASEAN Network Model on Information Literacy*. DOI: <https://doi.org/10.1633/JISaP.2022.10.1.2>

BILLY ANTORO lahir di Jakarta, 10 April 1980. Ia senang membaca, menulis, dan membuat konten. Ia pernah mengawal Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Kemendikbudristek (2016—2022). Ia kini bekerja sebagai konsultan literasi di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Meningkatkan Literasi Pendidikan Melalui Taman Bacaan Masyarakat di Asia Tenggara

Sry Eka Handayani

Memahami pentingnya literasi dalam pendidikan merupakan sebuah hal krusial, terutama di kawasan Asia Tenggara, dan lebih spesifik lagi di Indonesia. Literasi, yang pada awalnya diartikan sebagai kemampuan dasar membaca dan menulis, kini telah berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang lebih kompleks. Di tengah era globalisasi dan perkembangan pesat teknologi informasi, literasi telah bertransformasi menjadi kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi berbagai informasi yang diakses.

Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tantangan terkait akses pendidikan dan informasi masih sangat nyata. Banyak area, khususnya di daerah-daerah terpencil, yang masih terkendala dalam hal sumber daya dan infrastruktur pendidikan. Hal ini tentunya berdampak pada tingkat literasi penduduknya. Penting untuk disadari bahwa literasi memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan sosial-ekonomi sebuah negara. Individu yang literat cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat mengakses informasi dengan lebih baik, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Melalui peningkatan literasi, seseorang dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan literasi di Asia Tenggara, dan Indonesia khususnya, harus terus digalakkan dan diberi perhatian serius. Ini adalah langkah fundamental dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, berpengetahuan, dan mampu bersaing di kancah global.

Literasi pendidikan memiliki peran sangat penting, yang terlihat jelas dari dampaknya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Negara dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta stabilitas sosial yang terjaga. Sebaliknya, tingkat literasi yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, peningkatan tingkat literasi masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan, masih ada kesenjangan literasi yang mencolok, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar memberikan tantangan tambahan dalam menyediakan akses pendidikan dan literasi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kita tidak bisa mengabaikan pentingnya peran taman bacaan masyarakat dalam konteks ini. Sebagai sarana pembelajaran alternatif yang berkontribusi pada peningkatan literasi, taman bacaan masyarakat memegang peranan strategis dalam memberikan akses terhadap buku dan beragam bahan bacaan lainnya. Hal ini sangat penting, terutama di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan dalam mengakses perpustakaan umum atau fasilitas sekolah. Oleh karena itu, taman bacaan masyarakat menjadi komponen esensial dalam upaya peningkatan literasi pendidikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

Variasi kondisi sosial ekonomi yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, menempatkan literasi pendidikan sebagai kunci penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, memahami secara mendalam tentang pentingnya literasi pendidikan dan fungsi strategis dari taman bacaan masyarakat menjadi hal yang krusial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kemampuan

literasi yang cukup. Dengan begitu, mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan bernegara, mengambil peran aktif dalam berbagai aspek Pembangunan dan menjadi manusia literat.

Literasi pendidikan adalah konsep yang melibatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, serta menilai informasi dalam konteks pendidikan. Konsep ini melampaui kemampuan dasar membaca dan menulis, mencakup keterampilan berpikir kritis, analisis, dan interpretasi informasi. Aspek penting dari literasi pendidikan seperti kemampuan untuk menemukan dan mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, dan media lainnya yang sering disebut akses informasi. Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diakses, yang melibatkan pemahaman bahasa, konteks, dan makna dari teks atau media. Perlunya analisis, kemampuan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi argumen, bukti, dan titik pandang yang berbeda, serta memahami hubungan antar informasi. Kemampuan untuk menilai kredibilitas dan relevansi informasi, serta menilai kualitas argumen dan bukti yang disajikan.

Kita juga perlu penerapan, kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah diakses, dipahami, dianalisis, dan dinilai untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan pengetahuan baru. Komunikasi sangat diperlukan, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Etika dan tanggung jawab, kesadaran akan tanggung jawab etis dalam menggunakan dan berbagi informasi, serta memahami dampak informasi terhadap masyarakat dan individu.

Pentingnya literasi pendidikan terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan individu menghadapi tantangan dunia modern yang kompleks dan berbasis informasi. Dengan memiliki literasi pendidikan yang baik, siswa, mahasiswa, praktisi pendidikan, semua warga negara dapat menjadi pembelajar seumur hidup, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan membuat keputusan yang berinformasi serta bertanggung jawab. Peningkatan literasi pendidikan di Asia Tenggara dan Indonesia merupakan langkah vital untuk memastikan bahwa individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan dapat berkembang dan bersaing di panggung global. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan literasi merupakan investasi dalam masa depan negara dan generasi mendatang.

Taman bacaan masyarakat merupakan sebuah oasis ilmu yang terbuka untuk umum, menawarkan ragam sumber bacaan mulai dari buku, majalah, hingga bahan pustaka lainnya. Ruang ini dirancang khusus untuk memicu minat baca dan menyebarkan informasi luas kepada masyarakat, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mungkin tidak memiliki akses mudah terhadap berbagai bahan bacaan. Taman bacaan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari perpustakaan umum yang besar, rumah baca, teras baca, kantong baca, pojok baca yang akrab, hingga ruang baca yang dikelola oleh komunitas, pemerintah, atau bahkan lembaga-lembaga non-pemerintah. Suasannya yang nyaman dan kondusif menjadikannya tempat yang sempurna untuk belajar, mengeksplorasi, dan tentu saja, membaca.

Dengan demikian, taman bacaan masyarakat berdiri sebagai pilar penting dalam upaya meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat secara luas. Taman bacaan masyarakat merupakan wadah yang menawarkan aneka sumber bacaan, mulai dari buku, majalah, hingga berbagai bahan pustaka lain, program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pengunjung yang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Dengan adanya taman bacaan, harapannya masyarakat, khususnya yang kurang mendapatkan akses ke bahan bacaan, dapat meningkatkan minat bacanya dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengetahuan dapat tersebar lebih luas dan merata.

Peranan Taman Bacaan Masyarakat dalam meningkatkan literasi pendidikan adalah sangat signifikan. Tempat ini tak hanya memberikan akses terhadap berbagai sumber bacaan, termasuk buku dan materi lainnya, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang inklusif. Semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, dapat menikmati suasana kondusif untuk belajar yang disediakan taman bacaan.

Selain itu, taman bacaan berperan penting dalam membangun dan memperkuat budaya membaca, yang merupakan fondasi dari literasi pendidikan. Ini mendukung baik pendidikan formal maupun non-formal, dengan menyediakan sumber daya yang melengkapi proses pembelajaran di sekolah dan memberikan peluang belajar sepanjang hayat melalui berbagai program pendidikan non-formal. Lebih dari itu, taman bacaan membantu pengembangan keterampilan literasi dasar, termasuk baca tulis, berhitung (numerasi), literasi sains, literasi digital, literasi finansial dan literasi budaya dan kewargaan yang semua sangat penting untuk keberhasilan di bidang pendidikan. Selain itu

taman bacaan berperan membentuk karakter dan keterampilan 4 C abad 21 (berpikir kreatif, kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi).

Tempat ini juga memberikan akses ke berbagai jenis informasi dan pengetahuan, memastikan masyarakat tetap terinformasi dan berpendidikan. Material yang disediakan di taman bacaan dirancang untuk merangsang pertumbuhan intelektual, meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan analisis. Selain itu, tempat ini berperan dalam memperkuat komunitas dan mempromosikan keberagaman budaya, dengan menyediakan ruang untuk bertukar pikiran dan memperkuat ikatan sosial. Taman bacaan juga menawarkan sumber belajar alternatif bagi mereka yang mungkin tidak dapat mengakses sistem pendidikan formal dan berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu sosial dan budaya.

Dengan demikian, taman bacaan masyarakat menempatkan dirinya sebagai entitas vital yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, kritis, dan berdaya. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat adalah langkah krusial dalam usaha mempromosikan literasi dan pendidikan di seluruh masyarakat. Ini merupakan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk masa depan yang lebih cerah.

Dengan memberikan dukungan penuh pada pendidikan dan literasi, taman bacaan masyarakat memiliki peran kunci dalam memajukan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Hal ini penting dalam mempersiapkan generasi masa depan agar menjadi pribadi yang berpengetahuan luas dan kompeten, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Taman bacaan masyarakat telah terbukti memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih terdidik, terinformasi, dan memiliki daya tahan.

Langkah ini tidak hanya membantu dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber belajar. Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan nasional, memastikan bahwa kita menuju ke arah yang benar dalam merayakan 1 abad kemerdekaan Indonesia. Melalui usaha ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan berkembang.

Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia menunjukkan keragaman kondisi yang dapat dipandang dari berbagai aspek, antara lain infrastruktur, fasilitas, dan kualitas layanan. Kualitas taman bacaan masyarakat bervariasi tergantung lokasi dan dukungan yang diterima; beberapa di antaranya memiliki fasilitas modern dan koleksi buku yang lengkap, sementara yang lain mungkin sangat terbatas. Taman bacaan masyarakat di daerah terpencil atau kurang mampu seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk ketersediaan buku, fasilitas, dan tenaga profesional. Kendati ada upaya untuk meningkatkan jangkauan, akses ke taman bacaan masyarakat masih terbatas di daerah terpencil, sehingga diperlukan peningkatan jumlah taman bacaan dan perluasan jangkauan mereka. Banyak taman bacaan masyarakat menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan operasional, termasuk pengelolaan koleksi buku dan penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan dan pengembangan staf agar mereka dapat lebih efektif dalam mengelola taman bacaan dan melayani komunitas.

Keberhasilan taman bacaan masyarakat sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan komunitas. Ada peluang emas untuk kolaborasi antara taman bacaan masyarakat, sekolah, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan dampak mereka. Untuk menarik berbagai kelompok usia dan minat, perlu ada diversifikasi konten dan program yang ditawarkan oleh taman bacaan masyarakat. Ada juga ruang untuk inovasi dalam program dan layanan, termasuk penggunaan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan pengalaman belajar.

Dukungan pemerintah dan pendanaan yang berkelanjutan sangat penting untuk keberlanjutan taman bacaan masyarakat. Advokasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya taman bacaan masyarakat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Mengukur dampak taman bacaan masyarakat terhadap literasi dan pendidikan di komunitas sangat penting, dan evaluasi teratur dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memastikan bahwa taman bacaan masyarakat memberikan layanan yang efektif dan relevan.

Secara keseluruhan, taman bacaan masyarakat di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan dan literasi di negara tersebut. Meskipun ada tantangan, ada juga banyak peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Dengan dukungan yang tepat, taman bacaan masyarakat dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan komunitas, berkontribusi pada peningkatan literasi dan pendidikan di Indonesia.

Kolaborasi antar taman bacaan di Indonesia dengan sesama taman bacaan di negara-negara anggota ASEAN memegang peran penting dalam membuka peluang pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik-praktik unggulan. Strategi yang dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi efektif agar terwujud seperti pembentukan jaringan ASEAN. Menciptakan jaringan taman bacaan ASEAN yang kuat akan memudahkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman antar anggota.

Adanya platform kolaborasi misalnya platform online atau forum kolaborasi memungkinkan taman bacaan dari berbagai negara untuk berbagi materi, ide, dan program secara mudah dan efisien. Inisiatif program pertukaran budaya dan literasi akan mempromosikan keberagaman budaya dan peningkatan literasi melalui kegiatan pertukaran buku dan materi bacaan antar taman bacaan di negara-negara ASEAN. Banyak hal yang bisa dilakukan tentu saja.

Melalui penerapan strategi-strategi ini, taman bacaan di Indonesia dapat membangun kerja sama yang kokoh dengan taman bacaan di negara-negara ASEAN, menciptakan manfaat bersama dan berkontribusi pada kemajuan literasi serta pendidikan di kawasan ini. Pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya dan praktik-praktik terbaik di bidang literasi akan memperkaya pengalaman belajar dan membuka peluang baru untuk pengembangan bersama.*

SRY EKA HANDAYANI adalah Kepala Sekolah Dasar di Bukittinggi. Founder Rumah Baca Anak Nagari (RBAN) Aro Kandikir, Gadut, Kab. Agam, Sumatra Barat. Ia adalah Perempuan Inspiratif dan Penerima Anugerah literasi kategori Pegiat Literasi Provinsi Sumatra Barat (2019), Penerima Penghargaan Tertinggi Perpustakaan Nasional RI Nugra Jasadharma Pustaloka (2021), dan Pemenang Cerdas Berkarakter, Sahabat Karakter Kemdikbudristek. Ia dapat dihubungi di email: sryekahandayani@gmail.com; Facebook Sry Eka Handayani Part II atau Instagram Sry Eka Handayani.

BAB 23
Membangun Karakter Kompetitif
Manusia ASEAN

Reformasi Birokrasi, Daya Saing dan Kompetisi Antarnegara ASEAN

Adrinal Tanjung

Reformasi birokrasi saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan merupakan prasyarat dalam pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi. Saat ini adalah tahap akhir pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai visi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima sasaran prioritas dalam visi dan misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Hal ini bertujuan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan. Selain itu dengan melaksanakan reformasi birokrasi diharapkan Pemerintah menunjukkan keberlanjutan dengan komitmen yang tinggi untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi faktor pengungkit peningkatan investasi dan daya saing.

Langkah strategis dalam memacu Reformasi Birokrasi dipastikan akan terus dikawal secara langsung oleh Presiden RI, khususnya terkait reformasi struktural, untuk memastikan birokrasi dibuat lebih sederhana, lincah, dan bergerak cepat. Tak hanya secara struktural, Presiden juga menyampaikan perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) birokrasi yang adaptif, agile, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diantaranya dengan melakukan deregulasi, memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, meningkatkan kemudahan berinvestasi (*ease of doing business*) di Indonesia, serta membangun birokrasi yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sehingga daya saing bisa meningkat.

Komitmen Pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi bisa dilihat dari dukungan program dan anggaran dan juga tercermin dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berbagai program dan kegiatan selama 14 tahun terakhir sejalan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi secara formal yaitu dengan ditambahkannya tugas dan fungsi reformasi birokrasi agar makin terarah.

Terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan semakin terpercaya. Indonesia sebagai bagian dari lingkungan global tentunya tak dapat lepas dari segala perubahan dan perkembangan yang terus terjadi setiap saat. Arus deras globalisasi akan terus mewarnai dinamika relasi antarbangsa, yang tentunya akan membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara pada bangsa-bangsa di dunia, baik pada tatanan ekonomi politik dan sosial dan budaya.

Lingkungan geostrategis global yang bergerak begitu dinamis, menuntut Indonesia untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, kompleksitas, dan penuh kejutan. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi, melalui transformasi *mindset* dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya *dynamic governance* dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat, dan persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan. Apakah yang disebut tadi sudah terlaksana, mari kita lihat dan saksikan kondisi saat ini kemajuan kemajuan yang sudah diperoleh setelah adanya reformasi birokrasi setelah berjalan satu dekade di tengah tantangan dan perubahan dunia makin cepat.

Arus deras globalisasi telah mengubah lanskap dunia menjadi kampung global (*global village*), perubahan strategi yang diambil suatu negara dalam memenangkan persaingan global akan memberikan “resonansi” ke bagian dunia lainnya, terjadi aliansi-aliansi strategis antar negara. Terkait hal ini menjadikan peran birokrasi dalam mendukung peningkatan daya saing menjadi penting.

Mencermati perkembangan pada dekade terakhir ini, sejatinya Indonesia sebagai negara dan bangsa, telah jauh masuk ke dalam *global village*, ditandai dengan telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas baik untuk APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai kesepakatan pasar tunggal Asia Tenggara serta dampak perang dagang Cina dan Amerika terhadap ekonomi Indonesia dan kawasan regional.

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita konsisten dan fokus pada penyederhanaan birokrasi, termasuk sistem dan tata kerja birokrasi yang *agile* dalam manajemen pemerintahan. Selain itu diperlukan juga rekayasa, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM, serta budaya produktif yang tak bisa dielakkan lagi. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Daya Saing

Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi terus tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Dari data yang ada diketahui indeks peringkat daya saing Indonesia berdasarkan pemeringkatan bertajuk IMD World Competitiveness Ranking 2019, tercatat naik 11 poin ke peringkat 32 dunia pada tahun 2019. Peringkat tersebut masih di bawah Singapura dan Hong Kong pada puncak peringkat global. Dibanding negara ASEAN lainnya daya saing Indonesia masih kalah dari Malaysia, yang bertahan di posisi 22 dunia dan Thailand yang berada pada posisi 25.

Indeks daya saing memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan upaya mempersiapkan birokrasi adaptif dan responsif terhadap perkembangan global. Melihat kemajuan negara tetangga kita yaitu Singapura, dan negara di belahan dunia lain seperti Swiss, Norwegia, Kanada, dan Finlandia adalah contoh negara maju yang mengandalkan birokrasinya sebagai katalis pembangunan, ujung tombak layanan publik, dan penunjang daya saing negaranya. Negara-negara tersebut adalah negara berperingkat tertinggi dalam Government Effectiveness Index (GEI).

Reformasi Birokrasi untuk Indonesia Maju

Reformasi birokrasi di Indonesia dan kompetisi antar negara ASEAN tak bisa dihindari. Kompetisi sesuatu yang jamak terjadi termasuk antar negara di kawasan Asia Tenggara. Mampukah Indonesia sebagai negara paling besar dan luas di Asia Tenggara keluar sebagai pemenang di antara kesepuluh anggota ASEAN lainnya atukah justru Indonesia hanya akan menjadi pasar? Untuk menjadi negara yang tangguh di antara negara lain di Kawasan Asean tentu saja cara bekerja birokrasi harus berubah. Birokrasi yang selama ini diidentikkan dengan birokrasi yang lambat, tambun, koruptif, tidak efisien dan cap negatif lainnya harus segera diakhiri.

Terkait penegasan Presiden dalam KTT ASEAN di Jakarta bulan September lalu yaitu “Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran,” maka peran Indonesia menjadi kian penting dan signifikan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka birokrasi pemerintahan di Indonesia harus semakin baik dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa disegani di Kawasan ASEAN dari segi tata kelola pemerintahan.

Birokrasi publik di era baru termasuk pasca pandemi Covid-19 telah dipahami dan dihadapkan pada situasi yang bersifat VOCA: *Volatility* (bergejolak), *Uncertainty* (memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi), *Complexity* (saling berhubungan, saling tergantung dan rumit) dan *Ambiguity* (menimbulkan keragu-raguan). Dengan demikian capaian kinerja birokrasi tidak lagi harus bersifat *rule based* namun harus bergerak maju ke arah yang lebih dinamis berbasis *outcome*.

Situasi dalam VOCA membutuhkan setidaknya pendekatan berpikir ke depan (*thinking ahead*) yakni kapabilitas untuk mengidentifikasi perkembangan, memahami implikasi perubahan sosial ekonomi dan menentukan investasi kebijakan strategis maupun menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang dan meminimalisasi ancaman (Neo & Chen, 2007). Secara fundamental, arah pengembangan birokrasi perlu untuk memahami dinamika relasi antara birokrasi dan pasar misalnya. Paradigma lama yang menekankan pada minimalisasi peran birokrasi untuk merespon globalisasi telah usang.

Dimensi pertama terfokus pada pilar investasi. Kemudahan teknologi dan integrasi perbankan membuat modal dengan cepat berpindah. Sementara itu, pada dimensi kedua, kualitas *non-mobile factors* seperti respon sektor publik terhadap tantangan perbaikan pelayanan, percepatan infrastruktur dan harmonisasi regulasi menjadi hal krusial yang menentukan kemana *mobile factors* tadi berpindah. Dalam kasus ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan proses pengurusan investasi yang buruk di kawasan ASEAN. Indonesia juga tercatat sangat restriktif dalam memfasilitasi mobilitas investor dalam wilayah domestiknya (Soesastro & Atje dalam Basu Das, 2012). Kondisi ini, disadari atau tidak dapat menurunkan daya tarik Indonesia dalam sektor investasi.

Pembenahan dan Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi selama ini cenderung hanya dipahami dalam tataran teknis berbasis evidence (bukti) dan masih jauh dari hakikat yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu menjadi pemerintahan kelas dunia. Kita patut mempersoalkan bagaimana arah dan cara kerja birokrasi yang berjalan selama ini terkait dengan tantangan eksternal yang muncul. Dalam menghadapi tantangan masa depan perlu adanya pembenahan paradigma aparatur birokrasi agar mampu bersiap menghadapi perubahan yang kian cepat di tingkat global maupun di antara negara negara ASEAN.

Pembenahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan memperkenalkan cara pandang baru dan mengaitkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan konteks yang terjadi saat ini di tengah berbagai ketidakpastian global. Hal ini terlihat dari kejadian kejadian kritis seperti wabah penyakit (pandemic), bencana alam, perang, dan disrupsi yang melanda dunia.

Tantangan bagi birokrasi Indonesia seperti yang diuraikan di atas, dalam konteks ini, tidak hanya bekerja untuk merespon tuntutan regionalisasi ekonomi ASEAN. Namun diharapkan bisa menjangkau spektrum yang lebih luas lagi untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia dikaitkan dengan isu isu yang berkembang saat ini. Berkaca pada pendekatan yang dianut pemerintah maka perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecenderungan pendekatan mekanis yang berujung pada birokratisasi reformasi birokrasi tampaknya perlu disesuaikan lagi. Reformasi birokrasi harus mampu lepas dari berbagai tumpukan dokumen bukti kinerja yang selama ini sering dikeluhkan banyak pihak. Diharapkan di masa depan birokrasi di Indonesia harus berani keluar dari pakemnya. Inovasi menjadi sangat penting. Sudah saatnya standar pelayanan birokrasi yang mengakomodasi input dan belajar dari sektor privat yang selama ini disinyalir jauh lebih maju dan lebih efisien dibanding sektor publik.*

ADRINAL TANJUNG adalah ASN pada Puslitbangwas BPKP. Ia aktif menulis berbagai buku dan mendirikan Komunitas Sabi-Sabu, sebuah komunitas yang memotivasi dan mendorong agar birokrat menulis artikel atau buku. Kiprahnya teruji sebagai inspirator dalam menulis buku yang tak kenal lelah. Adrinal juga mendirikan Yayasan Pusako Adrinal Tanjung dan Satu Birokrat Satu Buku (Sabi Sabu). Sudah menulis lebih 40 buku. Saat ini Komunitas Sabi Sabu mulai melebarkan sayap ke beberapa Provinsi di Indonesia.

Budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bagus Aulia Iskandar

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah suatu prinsip yang berangkat dari pemikiran untuk mengedepankan aspek terhindar dari bahaya, risiko atau apapun yang memiliki potensi membahayakan di lingkungan kerja. Program dan manajemen K3 di buat agar kita memiliki *awareness* yang tinggi terhadap sesuatu hal yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kita, sehingga dampak dari kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Kelihatannya memang sangat sepele dan bukan dianggap sebagai suatu masalah yang krusial, akan tetapi justru hal kecil seperti inilah yang bisa memberikan dampak yang besar terhadap hasil kerja yang kita capai nanti.

Kita sering berargumen, kalau penerapan K3 akan memakan biaya serta anggaran yang lebih dari pengeluaran rutin setiap bulannya. Akan tetapi, kita tidak pernah membayangkan manfaat besar yang di dapat dari penerapannya. Sekarang kita bayangkan, terjadi kebakaran di tempat kerja kita karena kelalaian dan pengabaian dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Berapa banyak aset yang hilang dari musibah tersebut, gedung beserta isinya atau bahkan mungkin nyawa seseorang menjadi taruhannya.

Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan K3 di negara berkembang adalah (Rosenstock, 2004): Akses terhadap informasi K3 yang sangat terbatas; Tingkat pengetahuan K3 para manajer dan pekerja rendah; Alat-alat safety yang tersedia di pasaran sangat terbatas dan berkualitas rendah; Konflik regional, tekanan ekonomi, faktor klimatologi dan pertukaran tenaga asing yang sedikit sehingga mempersulit pelaksanaan K3; Jumlah tenaga kerja tinggi sementara lapangan kerja sedikit.

Kecelakaan akibat kerja (KAK) ataupun Penyakit akibat kerja (PAK), kedua-duanya disebabkan oleh adanya potensi bahaya yang mengintai di tempat kerja. Kita tidak bisa memperkirakan kapan dan bagaimana terjadinya, atau siapa dan berapa jumlah korban yang akan jatuh. Semuanya bisa terjadi secara acak (*random*), yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi bahaya tersebut agar tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses serta lingkungan disekitarnya.

Bahaya atau yang lebih dikenal dengan istilah *Hazard* adalah suatu bahan yang kemungkinan dalam keadaan tertentu dapat mengakibatkan kerugian pada makhluk hidup. (Bird, Jr. germain, 1990). Sebenarnya tindakan pengendalian potensi bahaya ini dengan pengaturan secara administratif, melindungi manusianya dengan pakaian pelindung sampai dengan merekayasa mesin atau alat sudah dilakukan. Akan tetapi, kita masih sering mendengar terjadinya kecelakaan dan penyakit yang terjadi di lingkungan kerja. Bukan hanya berasal dari aktivitas besar saja, justru yang paling sering terjadi berasal dari aktivitas kecil yang luput dari pengamatan tapi bisa menimbulkan potensi bahaya yang sama dengan aktivitas besar.

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati”, slogan seperti itu tentu sudah sering kita dengar. Tindakan *preventif* akan jauh lebih baik secara ekonomis dan materiil, karena bisa menjauhkan dari potensi bahaya yang mengancam. Kalau pun terjadi, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan program pencegahan. Sesuai dengan prinsip K3, bahwa setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya. Apabila sudah diketahui penyebabnya, diharapkan kita bisa menyiapkan tindakan antisipasi dan pencegahan terhindar dari bahaya yang sama.

Konsep 3S adalah salah satu bentuk prinsip yang bisa di terapkan dalam upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, konsep ini berangkat dari pemahaman mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bahaya yang paling sering terjadi di tempat kerja. Sehingga, bisa dikatakan konsep ini adalah salah satu strategi dalam upaya pencegahan dan kecelakaan akibat kerja.

Konsep 3S bukan hanya sekedar slogan, tapi bertujuan untuk memunculkan sikap tanggap bahaya oleh masing-masing individu, serta dapat dijadikan standar pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Konsep ini sekaligus menunjang budaya K3 dengan cakupan yang lebih luas, bisa diterapkan oleh individu maupun oleh industri ataupun perusahaan. Adapun point-point yang ada dalam konsep 3S meliputi: *Sanity* (Kebersihan), *Secure* (Keamanan) dan *Surveillance* (Pengawasan). Keunggulan dari konsep ini adalah mudah dipahami, meskipun dalam penerapannya memerlukan kesungguhan demi terwujudnya ketiga point tersebut. Memang terlihat sederhana, tapi jika dijalankan akan memberikan manfaat yang besar khususnya dalam menunjang budaya K3.

Penjabaran dari point 3S akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, *Sanity* (Kebersihan). Kebersihan tempat dan lingkungan kerja adalah syarat mutlak untuk terciptanya kondisi kerja yang nyaman, selain itu kebersihan di tempat kerja juga akan menjamin kesehatan serta menghindarkan pekerja dari penyakit akibat kerja yang bisa membahayakan dan mengganggu produktifitas. Contohnya saja jika ada tumpahan minyak yang ada di lantai kalau kita biarkan saja, mungkin nanti akan ada orang yang jatuh akibat tergelincir dan bahkan bisa menimbulkan potensi bahaya kebakaran. Selain itu, faktor kebersihan juga berpengaruh terhadap kesehatan, jika lingkungan kita kotor maka bibit-bibit penyakit dan zat racun tentu akan lebih mudah masuk dan bersarang di dalam tubuh, menyebabkan kita sakit dan mungkin bisa saja berujung pada kematian jika sudah terlalu parah.

Mungkin beberapa dari kita beranggapan bahwa faktor kebersihan di tempat kerja, hanya akan menghindarkan kita dari kecelakaan dan penyakit kerja. Senada dengan konsep 3S, program 5S dari Jepang salah satu pointnya juga menitikberatkan pada *Seiso* (Pembersihan), sebagai langkah untuk membudayakan sikap dan prilaku yang membentuk budaya disiplin di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebersihan memang sangat penting dan harus diperhatikan, guna mewujudkan situasi kondisi yang aman dan nyaman dalam bekerja.

Kedua, *Secure* (Keamanan). Faktor keamanan adalah salah satu faktor yang sering sekali di abaikan oleh para pekerja dan pihak manajemen, padahal kecelakaan disebabkan oleh dua hal yaitu tindakan yang tidak aman (*Unsafe act*), kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*) dan faktor alam. menurut H.W. Heinrich, persentase penyebab kecelakaan kerja adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, Kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10% dan penyebab lain seperti faktor alam 2%. Penelitian Dupont Group selama sepuluh tahun juga menunjukkan, bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak aman sebesar 96%, dan pada kasus lain sebesar 4%. Walaupun berbeda dalam hal persentase, tapi tetap menunjukkan bahwa point utama dalam penyebab kecelakaan kerja tertinggi adalah perilaku atau tindakan yang tidak aman.

No	Perbuatan tidak aman	Persentase
1	Alat Pelindung diri	12%
2	Posisi Orang Dalam Bekerja	30%
3	Reaksi Orang	14%
4	Perkakas dan Peralatan Kerja	28%
5	Prosedur dan Kerapihan Kerja	12%
Jumlah kecelakaan disebabkan tindakan tidak aman		96%
Jumlah kecelakaan disebabkan hal-hal lain		4%
Jumlah total		100%

(Sumber : Hasil Penelitian Dupont Group, 1990)

Tenaga kerja yang mau membiasakan dirinya dalam posisi aman dan menggunakan peralatan yang telah dicek keamanannya serta melakukan pekerjaannya dengan aman maka akan sangat membantu dalam memperkecil angka kecelakaan kerja (Suma'mur, 1996). Pimpinan perusahaan juga seharusnya berpegang kepada pada Sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja (SMK3), yang merupakan patokan dalam menyusun suatu sistem manajemen untuk berfokus mengurangi dan menekan kerugian dalam kesehatan, keselamatan dan bahkan properti. Sistem ini diadopsi dari

standar Australia AS4801 yang serupa dengan *Occupational Health and safety Assesment Series (OHSAS) 18001*, sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang berlaku sehubungan dengan jaminan dan kesehatan kerja. SMK3 merupakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dinilai sehingga kesesuaian terhadapnya menjadi objektif, seperti halnya pada ISO 9000 dan 14000, SMK3 menekankan pada pencegahan dan perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan.

Dalam sistem SMK3 dijelaskan hal yang pertama kali dilakukan adalah membangun sebuah komitmen serta tanggung jawab bersama terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, terutama bagi para pimpinan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk karakter sikap serta tindakan tegas pemimpin perusahaan, penekanan dari pemimpin ketika melihat dan mendengar suatu laporan pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja oleh para bawahannya, dia bisa menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap perbuatannya yang dapat membahayakan dirinya, dari pekerja lain atau bahkan perusahaan itu sendiri.

Hubungan antara point "*Surveillance*" dengan "*Sanity*" adalah: *Sanity* (Kebersihan), point ini menitikberatkan kepada terciptanya lingkungan kerja yang bersih serta pekerja yang sehat, dan *Surveillance* adalah untuk mengawasi fungsi dari point tersebut agar tidak berubah serta melakukan pengendalian dan upaya koreksi terhadap permasalahan yang mengganggu melebihi nilai dan ambang batas yang telah ditetapkan. Fungsi *surveillance* pada kondisi lingkungan kerja bisa dilakukan lewat memantau dan mengontrol sanitasi atau housekeeping lingkungan kerja. Selain itu bisa juga dilakukan survey atau kuisioner untuk mengetahui kondisi kesehatan pekerja, kondisi sosial ekonomi dan perilaku hidup pekerja untuk mendapatkan riwayat kesehatan, demi menghindari pekerja tersebut ditempatkan pada kondisi lingkungan kerja yang memungkinkan timbul penyakit akibat kerja (PAK) baginya.

Hubungan antara point "*Surveillance*" dengan "*Secure*": Hubungan antara kedua point ini lebih diutamakan kepada hal yang menjadi penyebab kecelakaan kerja paling banyak, yaitu perilaku tidak aman. Hal ini berhubungan dengan pengabaian terhadap pemakaian alat-alat perlindungan diri dan perkakas kerja yang salah dan tidak sesuai dengan daya guna. Pengawasan terhadap pemakaian alat-alat perlindungan diri harus diperhatikan, seperti kelengkapan dan pemasangan yang benar. Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka apabila sampai terjadi kecelakaan kerja sekalipun dampak yang ditimbulkannya tidak sedemikian parah atau bisa diminimalisir. Sedangkan pengawasan yang dilakukan dalam penggunaan perkakas kerja ini, hal-hal yang harus dicermati adalah terkait penggunaan perkakas atau peralatan yang salah untuk pekerjaan yang tidak sesuai, penggunaan perkakas atau peralatan dengan cara yang salah untuk pekerjaan, dan penggunaan perkakas atau peralatan dalam kondisi yang tidak aman.

Untuk membantu pengawasan baik terhadap pemasangan alat-alat perlindungan diri maupun penggunaan perkakas kerja, dapat dibantu dengan menggunakan metode check list (daftar centang), apabila masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka petugas yang menjalankan fungsi pengawasan ini wajib melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan diri pekerja dan pihak perusahaan atau manajemen, inilah salah satu bentuk koreksi dan tindak lanjut sebagai hubungan antara point *Surveillance* pada point *Secure*. Selain itu, diperlukan adanya pelatihan dari atasan dan pimpinan untuk meningkatkan keterampilan pengawasan dalam hal keselamatan kerja khususnya mengamati perbuatan dan kondisi tidak aman yang ada dalam ruang lingkup lingkungan kerja.

Cara Selamat

Banyak cara yang bisa diterapkan agar dapat terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, namun ada faktor X yang berada diluar kendali manusia yang memungkinkan dan berpotensi menjadi bahaya, menurut H.W. Heinrich, persentase penyebab kecelakaan kerja selain perilaku yang tidak aman, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10% dan faktor alam sebesar 2%. Meskipun kecil, tapi tetap tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa menjadi bahaya yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jika sudah terlanjur terjadi dan menimpa para pekerja maka upaya penanganan yang cepat dan tepat disertai dengan upaya perbaikan adalah solusi dari permasalahan tersebut.

Sistem penanganan yang cepat dan tepat dimaksudkan untuk mengurangi efek dari bahaya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang terjadi, sedangkan upaya perbaikan dan koreksi adalah tindakan untuk menyusun strategi

pengecahan guna menghindari terulangnya bahaya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang sama, setelah dilakukan analisis mengenai penyebab terjadinya hal tersebut.*

Referensi

Bird, E. Frank, Jr and Germain, L.G., 1990. *Practical Loss Control and Leadership*. Georgia: Loganville.

HSP Academy. (2011, August 23). Diambil kembali dari Regulation: <https://healthsafetyprotection.com/efektifitas-kebijakan-dewan-k3-nasional-2007-2010-dan-revitalisasi-pengawasan-k3/>

Heinrich, Hebert William (1980. *Industrial Accident Prevention*. New York : McGraw-Hill

ProxisisEast. (2015, May 25). Diambil kembali dari Artikel Safety: <https://surabaya.proxisisgroup.com/infografik-apakah-benar-manusia-faktor-utama-penyebab-kecelakaan/>

Rozzak, dkk. (2020). *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Suma'mur P. K. 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

BAGUS AULIA ISKANDAR adalah sivitas akademik yang aktif di STKIP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, selain aktif di dunia akademik penulis juga aktif dalam kegiatan karate dan tergabung dalam Institut Karate-Do Indonesia. Kecintaannya dalam kegiatan menulis dimulai sejak menjadi mahasiswa pernah mewakili regional Kalimantan Selatan di Sayembara Menulis Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (2013). Beberapa karya tulis berupa buku yang pernah ditulis diantaranya *Rangkaian CERITA DARI RUANG-RUANG KELAS di Tanah Borneo* (2019), *Pengalaman Mengajar di Masa Pandemi* (2021), dan *Pengembangan Kurikulum* (2022)

Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Era Informasi Bebas

Muhammad Lukman Ashari

Pendahuluan

Dalam keseharian kita dewasa ini hampir tidak bisa lepas dari media sosial khususnya melalui smartphone yang sudah begitu merakyat. Dalam data statistik yang diterbitkan oleh BPS tahun 2019 bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan handphone sudah hampir 170 juta orang atau terdapat 64.69% penduduk Indonesia menggunakan handphone. Selain itu terdapat data penggunaan computer 15.43 % serta internet 53.06% dari penduduk Indonesia. Data BPS 2022, pemakai smartphone diperkirakan mencapai 68% atau 189 juta orang atau bahkan lebih. Sementara itu Simon Kemp (2022) dari Data reportal yang dipublikasikan oleh suara.com pada tahun jumlah handphone yang terdapat pada penduduk Indonesia adalah 370 an juta yang berarti melebihi jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta berarti ada 128 % handphone dari penduduk Indonesia.

Tidak heran bahwa pemakai handphone di Indonesia menempati urutan ketiga di Asia Pasifik. Dari sejumlah data yang fantastis itu sayangnya belum ada data berapa persen penduduk pemakai *handphone* yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, meskipun diperkirakan prosentase itu kecil. Sebagian besar waktu pemakaian handphone dihabiskan untuk kepentingan-kepentingan lain. Databoks.katadata.co.id mencatat bahwa penduduk Indonesia pengguna smartphone menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk ber-WA, 5-8 jam sehari untuk melihat Tiktok.

Kondisi karakter anak-anak

Dewasa ini banyak beredar informasi miris yang viral tentang kondisi karakter anak-anak di Indonesia. Bahkan kondisi anak-anak di sekolah pun yang seharusnya menjadi laboratorium pendidikan karakter yang baik ternyata masih ada noda-noda pelanggaran etika yang notabene merupakan pembuktian karakter buruk mereka. Ada siswa yang melecehkan gurunya, ada siswa yang membully temannya, ada siswa yang tawuran dengan siswa lain, ada siswi yang membully temannya, ada siswi yang terlalu berani berbuat intim di sekolah, dan banyak lagi catatan-catatan yang menunjukkan rendahnya karakter siswa di sekolah.

Di jalan raya, banyak siswa mengendarai motor tidak menaati peraturan lalulintas seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, tidak menaati rambu lalu lintas, mengendarai motor dengan ngebut, tidak membawa SIM dan bentuk-bentuk pelanggaran lalulintas lainnya. Kondisi karakter yang parah seperti ini tentu menimbulkan tandatanya bagi pemerhati pendidikan, orangtua, guru, dan masyarakat. Apa penyebabnya, mengapa itu bisa terjadi, dan mengapa hal tersebut nyaris terjadi setiap tahun tentu akan menjadi kajian yang penting bagi kita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter atau tabiat yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Samani dan Hariyanto (2013:43) menyatakan bahwa "Karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari."

Pendapat lain tentang definisi karakter yaitu Muslich (2013:84), bahwa "Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat." Pada setiap individu melekat karakter baik yang baik maupun yang buruk tergantung dari kendali individu tadi. Kendali tersebut adalah Pendidikan utamanya dari orangtua, guru dan masyarakat.

Pendidikan karakter

Pengertian Pendidikan Karakter Menurut Kesuma, dkk. (2012:5) "Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang mengarah pada pengembangan dan penguatan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah." Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Pendidikan karakter berpandangan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Nilai-nilai yang dirujuk oleh sekolah merupakan alat untuk menguatkan dan mengembangkan perilaku peserta didik.

Penguatan Pendidikan karakter (PPK)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandarin, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas kerakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak dini serta berkelanjutan. Amanah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bukan hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkarakter dan berkepribadiannya, dengan tujuan untuk membentuk generasi yang tumbuh berkembang dengan karakter yang sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya adalah melahirkan insan yang cerdas dan berkarakter.

Kesuma, dkk. (2012:9) menyatakan bahwa "Tujuan pertama penanaman nilai karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses pembelajaran di sekolah maupun setelah proses di sekolah." Penguatan pendidikan karakter juga dapat dilakukan selain oleh sekolah, juga utamanya oleh orangtua di rumah dan masyarakat di lingkungan anak-anak tersebut.

Di sekolah, guru-guru berusaha mentransfer ilmu kepada siswa-siswanya melalui berbagai Teknik mengajar. Teknik mengajar tentunya diharapkan mulai dari level proses pembelajaran yang dikenal dengan cognitive yang meliputi recall, comprehension, dan application paling sedikit. Pada prakteknya level recall masih banyak digunakan oleh para guru dalam mengajar. Metode ceramah adalah metode yang terkenal pada level ini. Kondisi ini hanya menguatkan atau mengisi otak kiri yaitu lebih banyak menyimpan informasi daripada menggunakannya.

Kelemahan teknik mengajar ini adalah siswa tidak akan mampu menjawab atau bereaksi terhadap persoalan yang muncul, tidak terlatih problem solving skill. Pola pikir seperti itulah yang membuat ketrampilan yang berasal dari otak kanan kurang berkembang. Peserta didik hanya diarahkan untuk menjadi manusia jenius secara kognitif saja dan hanya berfokus pada perkembangan otak kiri. Inti dari sebuah sistem pendidikan seharusnya membentuk peserta didik menjadi manusia yang bijak.

Manusia bijak akan mampu menggunakan ilmunya untuk hal-hal kebaikan. Maka, berawal dari hal tersebut Indonesia akan dipenuhi dengan manusia yang berkarakter, memiliki kesadaran tinggi dalam kehidupan sosial, bijak dalam bertindak, dan mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil.

PPK di sekolah seyogyanya sudah pada tahap penguatan artinya Pendidikan karakter itu sudah ada dan sudah dapat dirasakan hasilnya dan dijaga kelangsungannya. Namun kenyataannya Pendidikan karakter masih nyaris jalan ditempat berdasarkan temuan-temuan pelanggaran moral atau penyimpangan karakter siswa di sekolah. Indikator lainnya adalah dalam hal literasi dalam proses belajar siswa yaitu adanya data dari hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Tingkat literasi yang rendah akan berakibat pada sulitnya pengembangan pemahaman siswa terhadap materi-materi belajar dan terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi. Contoh, guru meminta siswa tidak membuang sampah sembarangan. Bagi siswa yang literasinya bagus dari pesan gurunya tersebut, dia akan pegang terus itu sampah sampai

ada tempat sampah yang disediakan. Ini yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan siswa-siswa di luar negeri seperti Jepang. Mereka bahkan mau mengantongi sampah sampai dengan ada tong sampah yang tersedia.

Di Indonesia hal ini sudah mulai terlihat namun masih banyak yang belum melakukannya. Untuk di lingkungan sekolah memang sudah mulai bagus, namun di luar sekolah siswa mulai sembarangan membuang sampah. Yang menyedihkan lagi adalah kadang masih ada penumpang mobil yang membuang sampah sembarangan di jalan. Ini tentu tidak memberikan contoh yang baik dan sekaligus tidak memberikan pendidikan karakter yang baik.

Pendidikan karakter dalam contoh cara membuang sampah tersebut adalah agar ada satu kedisiplinan siswa untuk menaruh sesuatu pada tempatnya. Sampah harus ditaruh di tong sampah.

Yang kedua adalah bahwa dengan membiarkan sampah berserakan artinya membiarkan bau busuk muncul dan menyebar dan dihirup oleh banyak orang yang mungkin dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan hewan. Ini melatih sifat peduli dan perhatian kepada diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Satu Pendidikan karakter seperti ini perlu diperkuat setiap hari dengan bimbingan guru dan orangtua. Kebiasaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik.

Begitu pun akan kebiasaan-kebiasaan lain yang baik seperti tertib mengendarai motor, sikap kepada orangtua atau orang yang dituakan, dan sikap kepada sesama siswa atau sesama manusia. Pendidikan karakter siswa dalam berkendara motor adalah menciptakan pengendara yang disiplin; mempunyai SIM, memakai helm, tidak membongkok lebih dari satu orang, kelengkapan motor seperti lampu-lampau, dan tidak ugal-ugalan di jalan, dan secara umum adalah menciptakan orang yang disiplin. Contoh lain adalah sikap anak atau siswa kepada orangtua atau yang dituakan yang harus hormat, sopan dan santun, ramah, serta adanya kasih sayang. Pendidikan karakter dalam hal menghormati orangtua atau yang dituakan ini universal artinya hampir semua bangsa di dunia sepakat, dan juga semua agama mengajarkan untuk menghormati orangtua atau yang dituakan.

Dalam ajaran Islam terdapat pesan bahwa anak harus berbuat baik kepada orangtua yang bisa dimaksudkan juga kepada orang lain seperti dinyatakan di Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 23, Allah menerangkan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap Muslim setelah bertauhid dengan baik.

Berbuat baik kepada orangtua disini merupakan pokok ajaran yang maskudnya dapat dikembangkan menjadi berbuat baik kepada sesama manusia. Contoh implementasi ayat ini misalnya di Indonesia, anak-anak atau siswa akan berjalan sedikit merunduk bila berpapasan dengan orang tua atau yang dituakan dan mencium tangan orangtua tersebut. Ini menyimbolkan penghormatan anak kepada orangtua. Guru di sekolah juga mengajarkan siswa nya untuk berbaris sebelum masuk kelas, dan satu-satu masuk dengan menyalami gurunya di pintu masuk kelas. Ini menyimbolkan siswa yang hormat kepada guru dan guru yang menunjukkan kasih sayang kepada siswa-siswanya.

Dari ketiga contoh pendidikan karakter tersebut harus dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak tersebut. Kalau sudah terbiasa dengan Pendidikan karakter atau karakter baik pada jiwa anak-anak, mereka akan merasakan nikmatnya disiplin, nyamannya saling kasih sayang, dan perlunya saling memperhatikan atau 'care'. Kelak di kemudian hari ketika anak itu dewasa dia akan ingat terus pendidikan karakter yang diterimanya di sekolah dan mereka akan tidak setuju dan merasa tidak nyaman dengan orang lain yang masih melakukan pelanggaran disiplin dalam berbagai macam aktivitas.

Meskipun anak-anak telah dibekali pendidikan karakter, di lapangan masih saja terdapat banyak pelanggaran sikap, kelakuan yang berlawanan dengan karakter baik. Menurut Hurlock (2006:166) pelanggaran yang umum terjadi pada usia sekolah dasar yang dilakukan di rumah yaitu berkelahi, mencuri, dan merusak barang milik saudara, bersikap kasar, lalai terhadap tanggung jawabnya, berbohong, dan sengaja menumpahkan sesuatu. Kemudian, pelanggaran yang terjadi di sekolah, diantaranya yaitu berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, mencuri, merusak barang milik sekolah, tidak jujur, membolos, mengejek, berbuat gaduh, tidak tertib saat pelajaran, dan berkelahi.

Di dunia media sosial (medsos) banyak viral tentang pelanggaran-pelanggaran itu seperti tawuran pelajar, pembuluan antar siswa, kebut-kebutan motor, iring-iringan motor dengan membawa senjata tajam atau yang dikenal dengan geng motor, serta kehidupan bebas antara lawan jenis di sekolah atau ditempat lainnya. Abidin (2013:43-44) menerangkan "pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan kepada situasi yang kurang menguntungkan. Budaya korupsi, nepotisme, kolusi, hilangnya budaya malu, ketidakjujuran, dan pelemahan potensi anak semakin kerap kita

dengar dan jumpai". Dahsyatnya informasi yang bertentangan dengan karakter Indonesia juga mengalir deras melalui *smartphone*. Kondisi ini semakin memperberat guru dan orangtua dalam menanamkan karakter yang baik pada anak.

Bagaimana melakukan PPK?

Menghadapi kenyataan melalui contoh-contoh di atas ada beberapa usaha yaitu dari guru, orangtua, masyarakat, dan kini adalah teknologi informasi khususnya *smartphone*. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percepatan pembangunan yang salah satunya dapat dilakukan melalui kewajiban bangsa untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan karakter perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal untuk menumbuhkan karakter yang mampu mempertahankan budaya bangsa.

Selain itu, peserta didik juga mampu melaksanakan kerja sama, gotong royong, dan musyawarah mufakat sebagai upaya mempertahankan warisan budaya lokal. Peserta didik sedini mungkin harus dibekali dengan penanaman nilai-nilai karakter sehingga tidak mudah terjerat dalam berbagai masalah sosial. Cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter berbasis multikultural ke dalam isi atau materi pembelajaran bahasa Indonesia.

Bagaimana caranya?

Prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) harus diterapkan dalam pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran apa saja di sekolah, seperti bahasa Indonesia. Abidin (2013) menyatakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanamkan karakter melalui pembelajaran sejarah Indonesia dapat melalui, yang pertama adalah dalam bentuk bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan harus bermuatan karakter. Bahan ajar yang cocok dan biasanya dikembangkan adalah biografi tokoh yang berunsur keteladanan dan kepahlawanan.

Bacaan motivasional dapat dijadikan extra sumber bagi siswa. Kedua, melalui teknik pembelajaran berbasis karakter. Penerapan model pembelajaran berbasis karakter tidak hanya melalui penciptaan model baru tetapi bisa melalui pemanfaatan model yang sudah ada. Guru harus mengembangkan Teknik pembelajaran seperti yang dipesankan dalam Teknik PAIKEM tersebut. Teknik ceramah tidak akan mampu memenuhi keseluruhan konsep PAIKEM tersebut.

Model pembelajaran harus membuat siswa aktif, bergerak, bertanya, dan mendapatkan sesuatu dalam proses pembelajaran tersebut. Nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan pada teknik-teknik pembelajaran. Peserta didik secara tidak sadar akan menunjukkan nilai karakternya, karena melalui berbagai kegiatan dalam model tersebut, nilai-nilai karakter akan tercermin. Ketiga, melalui penilaian otentik. Pengembangan pendidikan karakter harus dilakukan oleh guru melalui pengamatan secara berkesinambungan. Pembentukan dan pengembangan karakter diintegrasikan melalui aktivitas peserta didik. Keempat, pendampingan orangtua adalah penting dengan memberi contoh, membantu menyelesaikan masalah dengan baik, dan meluruskan informasi yang tidak benar dari *smartphone*.

Maraknya *smartphone* dapat menjadi sebuah bantuan yang luar biasa untuk lancarnya proses pembelajaran dan Pendidikan karakter secara khusus. *Smartphone* sebetulnya termasuk dari *educational technology* yang berfungsi untuk mempermudah, memperjelas, membuat lebih menyenangkan bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. *Smartphone* dengan segala kecanggihannya mampu menampilkan text, audio dan video serta dapat dipakai berkomunikasi secara virtual baik yang *synchronous* maupun *assynchronous*.

Smartphone memiliki kelengkapan berkomunikasi yang luar biasa canggih. Karena canggihnya, *smartphone* mampu menyajikan konten-konten menarik mulai dari berita, email, musik, tiktok, youtube, podcast, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang menarik. Anak-anak pun dapat memproduksi video pendek dengan berbagai macam topik. Teori Cone of Learning Experience oleh Edgar Dale (1970) menunjukkan bahwa belajar melalui audio, video, *interactive text* akan meningkatkan daya serap si anak. Aktivitas belajar melalui *smartphone* sudah memenuhi konsep Dale tersebut.

Begitu canggihnya *smartphone*, sehingga anak-anak dapat mengakses berbagai informasi mulai dari yang positif sampai dengan yang negatif. Di sinilah anak-anak akan mendapatkan berita atau video atau teks yang sebenarnya tidak atau belum sesuai untuk usianya atau bahkan dapat merusak karakter baik mereka. Mereka akan melihat misalnya tawuran antar siswa, gaya hidup merokok, *game* yang menghabiskan waktu, sampai dengan kehidupan bebas pria

dan wanita. Inilah yang merusak karakter baik siswa yang sudah dimiliki menjadi menurun dan bisa jadi menghilang. Pada tahapan ini tentu smartphone menjadi sebuah ancaman bagi PPK. Ini tentu sangat tidak diinginkan oleh semua pemerhati pendidikan karakter.

Walaupun demikian, smartphone akan bermanfaat sekali bagi anak atau siswa atau pengguna yang mempunyai karakter yang baik. Dia akan terlatih untuk disiplin waktu dalam penggunaan HP, dia akan tidak tertarik dengan konten-konten yang di luar keperluannya, dia akan merasa tidak nyaman melihat tontonan yang tidak cocok buat dia, singkatnya dia sudah bijak menggunakan HP. Dia pun suka kalau hp nya dipakai untuk membantu proses pembelajarannya, misal mengirim tugas dari gurunya, mengerjakan tugas, dan mengembangkan materi yang didapat dari gurunya.

Pada kondisi ini anak sudah mempunyai karakter baik dalam memanfaatkan HP. Namun bila melihat berita di media tentang pemanfaatan HP untuk belajar ini masih lebih banyak pemanfaatan yang tidak efektif, atau penyalahgunaan pemanfaatan HP. Sebuah sumber mengatakan bahwa masih lebih banyak anak-anak yang menonton video, tiktok atau youtube ketimbang membaca berita, atau info pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka.

Mengatasi penyalahgunaan *smartphone*

Hp memang mutlak rasanya diperlukan di era IT sekarang ini meski masih lebih banyak yang belum dewasa dalam memanfaatkannya. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pemanfaatan HP antara lain menimbulkan karakter yang tidak baik dan secara psikis akan melelahkan mekanisme saraf dan tubuh anak-anak. Terdapat beberapa kasus yang membahayakan bagi pengguna HP yang terlalu lama, seperti mata mulai sakit, mudah kaget, mudah marah, dan karakter buruk lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu usaha pencegahannya antara lain: (1) Bagi anak yang masih balita yang terpaksa perlu HP dapat berikan *handphone* yang hanya memuat video anak-anak saja (2) Perlu pendampingan orangtua (3) Bila anak-anak bertanya atau mengemukakan hal-hal yang belum pantas, orangtua dapat mengalihkannya dengan memberikan penjelasan yang menarik (4) Orangtua perlu mengingatkan disiplin waktu dalam pemanfaatan *handphone* misal dengan mengingatkannya mandi, makan, sholat dan lainnya (5) Untuk PPK, guru dan orangtua dapat sama-sama menerapkan teori 5S yang dikenalkan di Sekolah Dasar yaitu senyum, salam, sopan, santun, dan sapa. Teori 5 S ini dapat menjadi dasar pendidikan karakter dan dapat mengurangi banyaknya karakter-karakter yang tidak baik yang diakibatkan adanya teknologi komunikasi yang canggih seperti adanya *smartphone*.

Pendidikan karakter yang efektif adalah modal dasar yang sangat penting sebagai antisipasi adanya dekadensi moral yang diakibatkan antara lain oleh maraknya penggunaan *smartphone* di kalangan siswa di Pendidikan dasar dan menengah. *

Referensi

- Abidin, Y. (2013). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama
- Al_Qur'an, surat Al Isra, ayat 23.
- Dale, E. (1970). *Cone of Learning Experience*.
- Data BPS tahun 2019 dan 2022
- Databoks.katadata.co.id, Durasi Penggunaan Smartphone pada Anak-anak.
- Hurlock, E.B. (2006). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Inpres (2010) tentang Percepatan Pembangunan
- Kemp. S. (2022). Jumlah *handphone* pada masyarakat Indonesia.
- Kesuma, D., Triatna, C., dan Permana, J. (2012). *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muslich, M. (2013). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD (2019). Laporan Tingkat Literasi Siswa Indonesia.

MUHAMMAD LUKMAN ASHARI adalah dosen yang lahir di Tegal, 22 Februari 1954. Pendidikan terakhirnya adalah S3 bidang ilmu pendidikan dari Uninus Bandung. Ia pernah menjadi guru Bahasa Inggris di SMP 83 Jakarta (1977-1989), SMA 23 Jakarta (1989-1997) kemudian pindah ke kantor Depdikbud (1997-2010) dan diperbantukan di Seameo Seamolec (1999-2011). Ia mengajar di UHAMKA Jakarta (1991-sekarang), IITL Trisakti (2010- sekarang), dan STAN (2023). Ia biasa menjadi pembicara terkait ToT, Bahasa Inggris, management, pembelajaran terbuka/jarak jauh. Saat ini ia menetap di Tangerang dan dapat dihubungi di email kangmaman180615@gmail.com.

Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkup ASEAN Melalui Program Magang

Rahman Tanjung

Pentingnya Kompetensi

Semua jenis pekerjaan di dunia ini tentunya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang maksimal. Agar hal tersebut diperoleh, maka setiap orang yang mengerjakannya harus orang yang tepat di bidangnya, baik dalam hal pendidikan, keterampilan (*skills*), pengalaman maupun perilaku. Hal itu dapat disebut dengan kompetensi. Kompetensi dalam sebuah pekerjaan atau tugas sangat penting dimiliki oleh orang yang diberikan pekerjaan atau tugas tersebut, karena apabila yang mengerjakan atau melakukannya kompeten di bidangnya, maka pekerjaan atau tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, *"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."* (HR. Bukhari No. 6015) (Al-Bukhari, 2004).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang, mereka harus memiliki keahlian di bidangnya, karena jika tidak, maka hasil kegiatan tersebut tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum kompetensi tidak hanya terkait dengan keahlian atau keterampilan semata dari seseorang yang melakukan tugas, tetapi juga termasuk perilaku di dalamnya. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003), bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di era persaingan global dan segala sesuatu berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi, kompetensi sangatlah dibutuhkan, karena dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat mendukung ketercapaian visi-misi organisasi, menjalankan strategi dan budaya organisasi dengan optimal. Kompetensi tidak hanya harus dimiliki oleh para pekerja di sektor swasta, tetapi juga di semua sektor pekerjaan, termasuk salah satunya bagi para penyelenggara pelayanan publik atau lebih tepatnya adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 bahwa akar dari kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS / ASN sesuai dengan visi reformasi birokrasi yaitu: "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" yaitu tata kelola pemerintah yang memiliki integritas tinggi dan jiwa profesionalisme yang dapat melaksanakan pelayanan publik yang prima (Putra, 2017). Oleh karena itu, dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN, maka apa yang menjadi visi reformasi birokrasi Republik Indonesia dapat diwujudkan.

Pengembangan Kompetensi ASN melalui Program Magang

Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi ASN

Bagi ASN Kompetensi merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki, karena sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014), menyebutkan bahwa pengembangan karir dan promosi ASN didasarkan pada kompetensi. Bagi seorang ASN, terdapat 4 (empat) jenis kompetensi yang harus dimiliki, dimana 3 (tiga) kompetensi diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014), yaitu: 1) kompetensi manajerial, 2) kompetensi teknis, dan 3) kompetensi sosio-kultural. Selain ketiga kompetensi tersebut, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) tepatnya pada pasal 233 ayat (2) dinyatakan bahwa PNS juga harus memenuhi Kompetensi Pemerintahan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan”

Melalui keempat kompetensi tersebut, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya baik sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik maupun perekat dan pemersatu bangsa dengan optimal.

Masyarakat pada umumnya tentu menginginkan pelayanan yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Dalam hal ini, kompetensi juga memiliki peranan agar pelayanan yang berkualitas dapat diberikan kepada masyarakat. Caranya adalah melalui pengembangan kompetensi yang tepat bagi ASN. Pengembangan kompetensi ASN yang menjadi fokus dalam Percepatan reformasi birokrasi sangatlah penting, karena dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, “Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan Makmur”, salah satunya melalui Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal itu dapat terwujud bila kompetensi ASN Indonesia juga cukup memadai (Tanjung, 2022).

Kompetensi bagi ASN tidak hanya harus dimiliki, namun juga harus dikembangkan, karena seiring dengan cepatnya perubahan, faktor teknologi serta faktor-faktor lainnya, mewajibkan ASN harus konsisten dalam pengembangan kompetensi. Bentuk pengembangan kompetensi ASN sendiri, diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (2018), yang menyebutkan tentang bentuk pengembangan kompetensi terdiri dari dua jalur, yaitu pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Pelatihan klasikal adalah jalur pelatihan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, seperti pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Adapun jalur pelatihan non klasikal contohnya seperti: *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dan pegawai swasta

Dalam memenangkan tantangan dalam persaingan global, ASN dituntut untuk tidak hanya sekedar bekerja dalam melaksanakan tugas rutinnnya saja, tetapi ASN harus dapat bertransformasi menjadi ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif melalui sistem manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sistem Merit merupakan sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Ningsih, 2021).

Tujuan dari pengembangan kompetensi ASN pada dasarnya adalah untuk mewujudkan profesionalitas ASN melalui pertimbangan kebutuhan umum organisasi dan kebutuhan individu pegawai serta melalui sistem perencanaan yang rasional, efektif dan efisien menyeluruh (terintegrasi) dan terarah. Maka sangatlah penting jika dalam mengembangkan kompetensi ASN dibentuk dalam perencanaan dan penyusunan suatu program pengembangan kompetensi ASN.

Magang sebagai Salah Satu Bentuk Pengembangan Kompetensi ASN

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bentuk pengembangan kompetensi ASN tidak selalu monoton harus melalui diklat, kursus, seminar dan sejenisnya, atau yang disebut dengan jalur klasikal. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lainnya dalam jalur non klasikal tampaknya dapat dicoba sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan ASN yang kompeten dan profesional.

Salah satu jenis pengembangan kompetensi ASN yang saat ini diterapkan adalah dalam bentuk program Magang. Magang (*internship*) atau disebut juga dengan praktik kerja adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi dalam jalur non klasikal yang telah diterapkan di Indonesia baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Mungkin sebagian dari kita mengenal magang merupakan salah satu bentuk tugas bagi siswa SMK atau mahasiswa perguruan tinggi pada suatu organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah, dalam rangka mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka peroleh di sekolah/perguruan tinggi sehingga memperoleh pengalaman kerja yang sebenarnya. Menurut Febrianty (2020) definisi magang adalah sebuah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan (Tanjung, 2022). Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (2018), Magang adalah proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (*learning by doing*)

Program magang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya percepatan dalam pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, yang pada akhirnya bisa mewujudkan tercapainya visi-misi Indonesia emas 2045. Melalui program magang ini diharapkan adanya *transfer* pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat terjadi secara cepat dan merata, sehingga mampu mempersempit kesenjangan kapasitas antar ASN Kementerian/Lembaga/Dinas, yang artinya kombinasi program pengembangan kompetensi non-klasikal berdasar *experiential learning* dapat diharapkan sebagai salah satu cara terbaik untuk mempercepat kompetensi ASN dalam rangka menciptakan *world class beauracracy* (Santosa, 2020).

Dalam pelaksanaannya, program magang ini tidak hanya dilaksanakan dengan menugaskan seorang ASN di dinas/instansi/Lembaga lain di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bekerja, tetapi program magang ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Di tingkat Pemerintah Pusat, program Magang di antaranya dilakukan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2022 yang telah menyusun sebuah rancangan besar pelatihan untuk semua pegawai Kementerian ESDM, diawali dengan Magang Antar Eselon II, Magang Antar Eselon I, Magang Industri Sektor ESDM, Magang Internasional sampai dengan Magang Kepemimpinan (BPSDM Kementerian ESDM, 2022). Selain itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 13 Oktober 2022 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 20/2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui Program Magang. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kompetensi ASN, termasuk SDM ASN di Papua (Humas Menpan-RB, 2022).

Di tingkat Pemerintah Daerah, salah satu contoh penerapan program magang bagi ASN adalah di Kabupaten Karawang melalui BKPSDM Kabupaten Karawang yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, dari tanggal 5 – 7 April 2021 bertempat di Kantor Bank BJB Cabang Karawang, dengan materi magang adalah seputar pelayanan (Tanjung, 2022).

Program Magang bagi ASN di Lingkup ASEAN

Saat ini Indonesia telah ditunjuk sebagai Ketua ASEAN 2023, hal ini sebagaimana ditandai dengan diserahkannya keketuaan (*Chairman*) pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan ke-41 di Hotel Sokha Phnom Penh yang dilaksanakan pada 13 November 2022, dimana pada acara tersebut, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen secara simbolis memberikan palu sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN 2023. Salah satu tugas Ketua ASEAN adalah mempromosikan dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN dengan aktif, termasuk usaha dalam membangun Komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerja sama (Hardiantoro, 2022).

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN yang tentunya bukan hanya ASN di Indonesia tetapi juga di lingkup wilayah ASEAN, tampaknya Program Magang dapat dijadikan salah satu inisiatif kebijakan dalam rangka mempererat koordinasi dan kerja sama antar negara ASEAN, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah sehingga mendorong tewujudnya pelayanan publik yang prima di wilayah ASEAN.

Hal-hal yang menjadi titik berat dalam materi pemagangan dapat diambil dari hal-hal yang sekiranya diperlukan oleh pegawai pemerintah di salah satu negara ASEAN dan hal tersebut dimiliki oleh negara ASEAN lainnya. Misalnya saja jika mengacu pada Indeks Daya Saing Global atau *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2018, Indonesia berada di ranking keempat di bawah Singapura, Malaysia dan Brunei. Sehingga dalam hal mengembangkan kompetensi pegawai pemerintah Indonesia dapat menempatkan ASN nya magang di ketiga negara tersebut, dan memungkinkan juga bila negara-negara ASEAN yang urutannya berada di bawah Indonesia, dapat menugaskan pemagangan di Indonesia dan tiga negara lain di atasnya.

Dalam hal lainnya, Indonesia saat ini berdasarkan hasil *E-Government Survey* tahun 2022 terkait pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada di ranking 77 dari 193 negara dengan skor di atas rata-rata regional Asia Tenggara. Hal ini selain menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, juga dapat dijadikan salah satu materi pemagangan bagi pegawai pemerintah di negara-negara ASEAN lainnya.

Materi lain yang dapat dijadikan tema pemagangan adalah mengacu pada data *World Governance Indicator* (WGI) Bank Dunia (The World Bank, 2020), yang menjelaskan terkait enam indikator *good governance* yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu: Kebebasan berpendapat (X1), Stabilitas politik dan kecilnya

intensitas tindak kekerasan/terror (X2), Efektivitas pemerintahan (X3), Kualitas peraturan perundang-undangan (X4), Supremasi hukum (X5), dan Kontrol korupsi (X6). Meskipun secara rata-rata enam indeks *good governance* Indonesia masih di bawah indeks *good governance* Singapura dan Malaysia, tetapi dalam indikator Kebebasan berpendapat (X1) nilai indeks Indonesia yang paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya (Widjanarko, 2021).

Pemerintah Indonesia mungkin dapat mengirim para ASN nya untuk magang di Singapura dan Malaysia tentang kelima indikator *good governance* selain indikator Kebebasan berpendapat. Sebaliknya, negara-negara ASEAN lainnya dapat menunggangkan pemagangan para pegawai pemerintahannya di Indonesia terkait materi kebebasan berpendapat.

Program Magang Meningkatkan Kinerja Birokrasi

Magang atau praktik kerja yang oleh Pemerintah Indonesia dijadikan salah satu program Pengembangan Kompetensi bagi para ASN merupakan suatu program yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi, karena tidak hanya mengajarkan teori dan pengetahuan tentang hal-hal terkait manajemen kinerja dan pelayanan publik, tetapi juga melatih praktik dalam pengelolaan manajemen kinerja serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan dibimbing oleh tenaga profesional dan pengalaman di bidangnya (Tanjung, 2022).

Meskipun program magang bukanlah hal baru, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya, namun apabila program ini dapat diinisiasi sebagai *pilot project* untuk dilakukan di lingkup negara-negara ASEAN, bukan tidak mungkin kompetensi para aparatur pemerintah akan makin berkembang, sehingga bisa meningkatkan kinerja birokrasi di ASEAN dan pada akhirnya negara-negara ASEAN akan semakin solid, kuat dan memiliki keunggulan yang merata, terutama dalam pengelolaan pemerintahan dan pemberian layanan publik yang optimal.

Melalui program magang di lingkup ASEAN ini, diharapkan seluruh anggotanya dapat saling memberikan manfaat dan bekerjasama dalam kebaikan demi mewujudkan ASEAN yang sinergis, tangguh dan sejahtera. Dalam Islam hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya: "*Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. . . .*" (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2005).*

Referensi

- Al-Bukhari, A. 'Abdillah M. I. I. I. (2004). *Shahih Bukhari* (Cetakan ke). Dar Ibn al-Haitsam.
- BPSDM Kementerian ESDM. (2022). *Dukung ASN berkualitas, Menteri ESDM buka Program Magang Antar Eselon I PNS KESDM*. Bpsdm.Esdm.Go.Id. <https://bpsdm.esdm.go.id/posts/2022/09/13/dukung-asn-berkualitas-menteri-esdm-buka-program-magang-antar-eselon-i-pns-kesdm/2017>
- Hardiantoro, A. (2022). *Indonesia Resmi Jadi Ketua ASEAN 2023, Apa Tugasnya?* Www.Kompas.Com. [https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/13/203100665/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-tugasnya?page=all#:~:text=KOMPAS.com - Indonesia resmi menjadi,13%2F11%2F2022\)](https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/13/203100665/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-tugasnya?page=all#:~:text=KOMPAS.com - Indonesia resmi menjadi,13%2F11%2F2022)).
- Humas Menpan-RB. (2022). *Melalui Program Magang, Wapres Minta ASN Papua Turut Bangun Wilayahnya*. Www.Menpan.Go.Id. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/melalui-program-magang-wapres-minta-asn-papua-turut-bangun-wilayahnya>
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 tentang *Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil*, (2018).
- Ningsih, Y. R. (2021). *Kebutuhan Pengembangan ASN*. Www.Bkd.Riau.Go.D. <https://bkd.riau.go.id/berita/artikel-kebutuhan-pengembangan-asn>
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, (2003).
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, (2014).
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*, (2014).
- Putra, A. E. (2017). *Melacak Asal Usul Maksud Kompetensi PNS pada UU 5/2014 jo UU 23/2014*. Http://Www.Bkpsdm.Tanahlautkab.Go.Id/. <http://www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id/berita/detail/melacak-asal-usul-maksud-kompetensi-pns-pada-uu-52014-jo-uu-232014>

- Santosa, I. (2020). *Model Magang & Pertukaran Pegawai*. Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara.
- Tanjung, R. (2022). *Pengembangan Kompetensi Pelayanan Publik ASN melalui Jalur Magang di Kabupaten Karawang*. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 793–799. <https://doi.org/10.54371/jip.v5i3.489>
- Widjanarko, W. (2021). *Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019*. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 155–168. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.340>
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (2005). *al-Quran dan terjemahannya*. In Bandung: CV Diponegoro. CV. Diponegoro.

RAHMAN TANJUNG lahir di Karawang 12 Januari 1981. Menikah dengan Neng Sri Ekawati dan saat ini dikaruniai 2 anak, Azka dan Azkia. Penulis saat ini bertugas sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Karawang serta sebagai Dosen dan Ketua LPPM STIT Rakeyan Santang Karawang. Ia telah menamatkan Pendidikan S3 di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung program studi Ilmu Pendidikan (2022). Selain itu, ia juga aktif menulis artikel populer, jurnal maupun buku. Diantara buku yang pernah ditulis olehnya antara lain *Manajemen Strategik, Teori dan Implementasi* (2020), *Manajemen Mitigasi Bencana* (2020), *Pengantar Ilmu Komunikasi* (2021), dan *Pulih Bersama Bangkit Perkasa* (2022), dan *Sistem Informasi Pelayanan Akademik* (2022). Rahman dapat dihubungi di email: rahmantanjung1981@gmail.com.

Urgensi Pendidikan Karakter di ASEAN

Kamarudin

ASEAN memerlukan sumber daya manusia yang bermutu dan memadai sebagai pendukung utama untuk memajukan paradigma pendidikan, sebagai pondasi sosial di kawasan ASEAN. Memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan digital dan teknologi informasi di era 4.0 menuju era society 5.0. Hal ini memiliki kekuatan dominan yang mempengaruhi setiap dimensi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan media di era maya (*cyber*) seakan muncul kembali ke dalam sistem komunikasi purbakala dan memosisikan penerima (komunikasi) sebagai pihak aktif. (Yulianti, 2021).

Fenomena yang terjadi di era digital tidak bisa dibendung, bahkan banyak manfaat dan peluang yang tersedia di era modern saat ini. Secara verbal, akustik, dan visual, informasi diterima dan dikomunikasikan secara lebih luas dan cepat. Dalam situasi seperti ini, potensi masalah menjadi lebih beragam. Karena keanekaragaman yang tidak terhalang dalam cita-cita sosiokultural yang ada di ASEAN. Selain itu, varian mental, budaya, dan fisik yang berbeda menjadi lebih jelas dan menjadi penting dalam menumbuhkan pendidikan karakter. Kesenjangan yang ada dapat mempromosikan persatuan manusia atau mungkin penyebab perpecahan.

Pendidikan Karakter

Sejak lahir, manusia telah memiliki potensi karakter yang ditunjukkan sebagai kemampuan kognitif dan ini menjadi sifat bawaannya. Karakter ialah membentuk pribadi manusia berbudi pekerti yang luhur dapat mengendalikan diri di tengah-tengah arus modernisasi ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat (Sutarwan, 2018). Karakter menjadi hal penting untuk dikembangkan dalam dua pendidikan sebagai upaya bersama di ASEAN untuk mendukung prinsip-prinsip moral dan etika, yang diinginkan generasi global. Sehingga mereka bertindak berdasarkan apa yang menurut mereka yang benar dalam menghadapi tekanan dan godaan yang muncul di society 5.0.

Pendidikan karakter menjadi pondasi utama dalam menghadapi arus perubahan eras society, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, sosial maupun negara. Penanaman karakter dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan lingkungan belajar pertama anak dan akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembentukan karakter menuju kedewasaan. Era digital yang menuju era society 5.0, sangat penting manusia dalam menghasilkan orang-orang yang berkualitas tinggi, guna meningkatkan standar sumber daya manusia yang berkarakter. Generasi bangsa akan memiliki moral dan keterampilan yang baik, juga dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Menurut Thomas Lickona, ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan?. Ketujuh alasan tersebutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Cara terbaik untuk menjamin anak-anak atau peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Cara meningkatkan prestasi akademik. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya sendiri. Persiapan peserta didik untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti ketidak sopanan, ketidak jujur, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah. Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban (Sudrajat, 2011)

Pendidikan karakter dapat difahami sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk pribadi manusia kearah yang lebih baik. Pendidikan karakter ialah suatu bentuk kegiatan manusia yang dimana terdapat di dalam nya

suatu tindakan yang mendidik bagi peserta didik sehingga dapat diperuntukan bagi generasi selanjutnya (Rony & Jariyah, 2021).

Bertolak dari definisi tersebut, jelas bahwa ketika kita mempertimbangkan jenis karakter yang ingin untuk dikembangkan pada peserta didik, kita membutuhkan mereka untuk dapat memahami nilai-nilai karakter tersebut. Agar bisa memperhatikan lebih dekat terkait dengan kebenaran nilai-nilai moral, dan kemudian bertindak berdasarkan apa yang dia lakukan. Percaya meskipun harus menghadapi tantangan dan tekanan dari dunia luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, Peserta didik akan sadar, bagaimana mendorong diri mereka sendiri untuk menegakkan prinsip-prinsip moral.

Tantangan era revolusi industri era society 5.0 perlu dikemas dan dipersiapkan secara matang, sehingga akan selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi proyeksi kurikulum pendidikan dalam menghadapi tantangan global, maka menjadi pondasi utama ialah: 1) pendidikan karakter; 2) kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif; 3) kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi pada era tersebut (Kusmiani & Rahayu, 2021). Slameto (2019) mengatakan bahwa society 5.0 adalah masyarakat di mana berbagai kebutuhan yang dibedakan dan dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dalam jumlah yang memadai kepada orang-orang yang membutuhkannya pada saat dan di mana semua orang dapat menerima layanan berkualitas tinggi dan kehidupannya yang nyaman serta penuh semangat (Lisnawati, 2021).

Fakta ini dimulai dari Revolusi Industri 4.0 yang dasari era digital, dimana manusia akan mengirim dan menerima pesan melalui informasi digital bahwa setiap individu yang ingin bersaing dalam skala global. Hal ini harus mengembangkan kekuatan mental yang berbakat kompetitif. Sehingga memiliki perilaku yang baik yang akan meningkatkan kompetensi diri, dan memiliki jiwa literasi. Cara utama adalah mempersiapkan keterampilan yang paling mudah digunakan. Serta persiapan diri melalui pendidikan jangka panjang dan konsep diri melalui keterlibatan dalam kolaborasi lintas generasi di ASEAN.

Lingkungan pendidikan harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga memberikan kondisi fisik dan sosiokultural yang diperlukan bagi generasi bangsa untuk memperoleh informasi dan keterampilan. Aktivitas pendidikan yang mewakili perwujudan karakter dimaksud untuk dikembangkan oleh tenaga pendidikan. Pada periode masyarakat 5.0 peran pendidik sebagai panutan bagi masyarakat kawasan ASEAN untuk menganut pola pendidikan karakter yang bermutu sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya.

Generasi bangsa kawasan Asean dapat memosisikan negara-negaranya untuk menghadapi perubahan yang lebih cepat dan lebih banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan yang serba canggih dalam filosofi Era Society 5.0. sebenarnya hal ini bisa menginspirasi para pendidik untuk menghasilkan inovasi dalam perkembangan teknologi lebih canggih. Sebagai Generasi ASEAN memiliki kewajiban moral untuk membantu peserta didik untuk berkembang menjadi manusia yang bermoral lurus, sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya yang baik.

Gagasan pendidikan karakter ini sangat penting untuk diri sendiri dan orang lain yang perlu kemandirian dan kapasitas untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan yang memiliki nilai positif. Karakter manusia memang tepat untuk menghadapi era saat ini, karena manusia adalah aktor utama dalam masyarakat 5.0. Dapat diperkirakan bahwa manusia mampu menciptakan nilai-nilai baru yang hilang di masa lalu untuk menutup celah di antara manusia. Pendidikan karakter sangat penting di era masyarakat 5.0 karena begitu banyak manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Era Society 5.0

Society 5.0 ialah gagasan untuk masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia (Bahri, 2022). Siring dengan pendidikan karakter yang mengajarkan manusia, bagaimana menjalani kehidupan yang layak, termasuk bagaimana saling peduli antar sesama. Manusia akan lebih mampu melakukan semua tupoksinya jika mengadopsi pola pikir yang saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam era teknologi saat ini. Melalui pendidik karakter harus mampu menghadapi tantangan yang signifikan akibat Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Karena kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat harus memerlukan kemahiran dalam dunia digital, baik berpikir kreatif, dan memiliki imajinasi yang lebih besar untuk menjadi dinamis perubahan dalam tatanan global digital.

Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggungjawab, jujur, peduli, dan adil dalam membantu peserta didik untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri (Sudrajat, 2011). Pendidikan memiliki keutamaan dalam merubah pola pikir manusia kearah yang lebih baik, melalui peran pendidikan dalam penanaman nilai moral dan nilai industri sebagai perkembangan teknologi. Hal ini tidak terlepas dari semua jenjang pendidikan, dan tidak terbatas pada pemenuhan otak anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan pendidikan selayaknya mengajarkan secara menyeluruh yang memasukkan beberapa aspek akidah dan tata moral (Rosita, 2018).

Dunia pendidikan menjadi perhatian utama dalam mewujudkan generasi muda di kawasan Asean yang berkualitas dan bermartabat, karena pendidikan menjadi barometer kemajuan suatu peradaban bangsa. Dunia pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu menggerakkan semua aspek kehidupan (Fadilla, 2019).

Kemajuan suatu peradaban dunia ditandai dengan kemajuan pendidikan sebagaimana kemajuan peradaban Islam yang pernah mengalami kemajuan dan menguasai dunia pada saat itu, karena memiliki salah satu konsep karakter yang religious. Karena Islam adalah agama peradaban yang mengajarkan ketaqwaan, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah yang pada hakekatnya merupakan prinsip keyakinan yang sacral dan menjadi dasar peradaban negara. Diakui pula bahwa Islam yang merupakan puncak peradaban manusia selalu mengutamakan kesejahteraan seluruh umat manusia setiap saat.

Urgensi Karakter di Era Society 5.0

Terkait era *Society 5.0* yang saat ini sedang berkembang di kawasan ASEAN memiliki potensi manfaat yang luar biasa, namun juga menimbulkan ancaman yang besar, kalau tidak dilandasi dengan karakter yang baik. Revolusi industri 4.0 dan menuju *society 5.0* menjadi kekhawatiran utama, jika generasi penerus bangsa tidak menanganinya dengan hati-hati, karena dapat membahayakan nyawa manusia. Akibat dimanjakan oleh teknologi dan pemikiran manusia hal ini serba instan dan sangat canggih, juga cepat merambah dalam kehidupan sosial, dan karakter manusia bisa akan terkikis oleh zaman. Karena teknologi informasi dan layanan internet begitu mudah dan tersedia bagi kebutuhan manusia.

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dihargai oleh generasi bangsa, karena manusia adalah sebagai pemain dan pengguna utama dalam masyarakat 5.0, yang ideal di era modern. Untuk mempersempit kesenjangan antar manusia dalam hal perilaku karakter, maka harus diantisipasi mampu untuk membangun nilai-nilai baru yang hilang di zaman sebelumnya. Era masyarakat 5.0.

Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena banyak manusia sekarang ini memiliki kepribadian yang unik. Pendidikan karakter mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupan yang layak, termasuk bagaimana saling peduli. Sehingga ketika menghadapi tekanan dan godaan dari luar, seseorang dapat berperilaku atas dasar pemahaman yang baik. Karakter adalah perkembangan pribadi yang baik yang berakhlak mulia yang dapat mempertahankan dan mengendalikan diri dalam menghadapi modernisasi serta memperbaiki masyarakat dan negara secara menyeluruh.*

Referensi

- Bahri, S. (2022). Konsep Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Society 5.0. *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v6i2.1592>
- Fadilla, P. F. (2019). Peran Pendidikan Karakter Terhadap Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Karier Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional "Strategi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Pada Era Revolusi Industri 4.0"* ISSN:
- Kusmiani, A., & Rahayu, K. (2021). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Menghadapi Era Masyarakat 5.0 Di SDN Palimanan Barat. *Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society 5.0*.
- Lisawati, L. (2021). Urgensi pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Al Muta'aliyah: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*. <https://doi.org/10.51700/almutaliyah.v1i1.152>
- Rony, R., & Jariyah, S. A. (2021). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Akhlak Peserta Didik. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*. <https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.18>

- Rosita, L. (2018). Peran Pendidikan Berbasis Karakter Dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Di Sekolah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.879>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? | Sudrajat | Jurnal Pendidikan Karakter. *Journal Pendidikan Karakter*.
- Sutarwan, I. W. (2018). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Generasi Bangsa di Era Perkembangan Teknologi. *Dharma Duta*. <https://doi.org/10.33363/dd.v16i1.148>
- Yulianti, Y. (2021). Pentingnya pendidikan karakter untuk membangun generasi emas indonesia. *Cermin: Jurnal Penelitian*. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.969

KAMARUDIN merupakan anak petani yang tinggal Desa Waliko. Memiliki kehidupan yang paspasan pada saat itu, serta sering berbaur dengan lingkungan berpendidik. Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SD, SMP & SMA di satuan pendidikan. Kuliah di Universitas Negeri Gorontalo (2008) dengan konsentrasi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saat aktif sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara.

Meningkatkan Pengetahuan, Jaringan, dan Keterlibatan Global

Muta'addibah Ashri

Saat ini kita perlu mengadopsi sikap pikiran bertumbuh atau *growth mindset* yang mengajarkan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha keras dan ketekunan. Dengan memperkuat keyakinan ini, individu akan lebih berani mengambil risiko dalam belajar dan mencoba hal baru. Selain itu, orientasi pada proses pembelajaran juga penting. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir, memungkinkan penghargaan terhadap setiap langkah dalam perjalanan belajar. Kita menyadari bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses tersebut memungkinkan kita untuk mengatasi kegagalan dengan lebih baik dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

Membangun jaringan yang luas memerlukan keterbukaan untuk mencoba hal-hal baru dan menggali peluang baru dalam berinteraksi sosial. Dengan mencoba hal baru, individu dapat memperluas cakupan lingkaran sosial mereka, terlibat dengan berbagai orang, dan membangun hubungan yang beragam. Selain itu, memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai topik memungkinkan individu untuk berbicara dengan kepercayaan dan membina hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, mendengarkan dengan empati, dan memahami perspektif orang lain, juga berperan penting dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna.

Keterlibatan sosial yang bermakna dapat dicapai melalui partisipasi dalam kegiatan sukarela. Melalui *volunteering*, individu tidak hanya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tetapi juga mengalami kebahagiaan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Kalimat bijak mengatakan, “volunteering makes you happier” (sukarela membuatmu lebih bahagia). Ini berarti bahwa mengabdikan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan emosional seseorang. Melakukan kegiatan sukarela dapat memberikan perasaan pencapaian, meningkatkan rasa harga diri, dan menciptakan hubungan sosial yang positif, yang semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan individu.

Dalam hubungan sosial, penting untuk memahami bahwa masalah dan konflik adalah hal yang wajar. Namun, dengan fokus pada tujuan yang sama, konflik dapat diselesaikan melalui diskusi dan kompromi. Selain itu, menghargai proses dalam pembangunan hubungan sosial adalah esensial. Setiap tahap membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan tersebut. Kerja sama tim yang solid juga merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan sosial bersama. Ketika individu bekerja sama dalam tim, mereka dapat membagi ide, memecahkan masalah, dan mencapai hasil yang lebih baik melalui kolaborasi.

Dalam era globalisasi, keterbukaan terhadap budaya dan keberagaman sangat penting. Kemampuan berbahasa Arab dan keterampilan adaptasi terhadap perbedaan budaya adalah modal utama dalam membangun kemitraan dengan negara-negara Arab, misalnya. Pun demikian dengan mitra negara lainnya. Pemahaman mendalam tentang budaya mitra internasional dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial mereka memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Komunikasi terbuka tentang perbedaan budaya dan penghargaan terhadap nilai-nilai masing-masing pihak juga merupakan langkah penting dalam membangun kemitraan global yang sukses.

Melalui penerapan *growth mindset*, keterbukaan terhadap pengalaman sosial, dan keterampilan beradaptasi dengan budaya yang berbeda, generasi saat ini memiliki potensi besar untuk memperluas pengetahuan mereka, membangun jaringan yang kuat, dan membentuk kemitraan global yang saling menguntungkan. Dengan sikap

yang positif dan keterbukaan terhadap belajar dari orang lain, generasi ini dapat memainkan peran kunci dalam membangun dunia yang lebih terhubung dan harmonis.*

MUTA'ADDIBAH ASHRI adalah dosen di LIPIA Jakarta. Ia adalah alumni Pesantren Darul Istiqamah, Maccopa, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, yang menyelesaikan S1 di LIPIA dan S2 di UIN Jakarta. Ia aktif sebagai pengajar di beberapa institusi serta terlibat dalam berbagai kegiatan *volunteering* yang berbasis di Jakarta.

PROFIL ASEAN WRITERS NETWORK

ASEAN Writers Network adalah sebuah platform Rumah Produktif Indonesia (RPI) sebagai wadah pertemuan, sinergi dan kolaborasi antarpemulis se-Asia Tenggara. Dibentuk secara online melalui Whatsapp Group pada akhir 2022 saat RPI menggelar project menulis untuk menyukseskan Presidensi Indonesia pada ASEAN 2023. Selanjutnya, ASEAN Writers Network diharapkan dapat menjadi sarana konstruktif untuk studi dan kontribusi masyarakat ASEAN bagi perdamaian, stabilitas, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama di kawasan ASEAN.

Sedangkan Rumah Produktif Indonesia adalah perkumpulan sosial berazaskan Pancasila dan UUD 1945 yang didirikan sebagai wadah belajar dan kolaborasi produkti berbasis peminatan dan keunggulan kompetitif untuk melahirkan Manusia Indonesia Produktif dan berjuang untuk kejayaan bangsa Indonesia di awal abad ke-21. RPI berdiri pada 18 Maret 2020 sebagai salah satu solusi menghadapi pandemi Covid-19, atau tepatnya hari ke-16 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus pertama Covid-19 yang disusul dengan kebijakan untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah.

RPI telah berbadan hukum dan berkedudukan di Kota Depok sesuai Salinan Akta Nomor 01 Tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Ny. Trusti Hendrawati, SH dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0007832.AH.01.07.TAHUN 2020. Pendirian RPI juga telah diterbitkan dalam bentuk Berita Negara No. 077 Tambahan Berita Negara RI No. 000385 Tanggal Terbit 25 September 2020.

Dengan motto “Belajar, Berkawan, dan Bergembira”, RPI mengadakan berbagai inisiatif seperti konferensi, seminar, diskusi, pelatihan, solidaritas sosial, dan penerbitan buku baik yang diadakan sendiri atau berkolaborasi dengan institusi di dalam dan luar negeri menggunakan teknologi digital. RPI juga memiliki perwakilan di berbagai provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Dalam penulisan buku, RPI telah menerbitkan berbagai buku, diantaranya adalah *Produktif di Masa Pandemi* (Literasiologi, 2020), *Tabula Rasa* (Shofia, 2021), *Sehimpun Mutiara Literasi Indonesia: Kisah Perjuangan dan Inspirasi Menulis bagi Generasi Indonesia* 3 jilid (Perpusnas Press, 2021), *Covid Mengancam! Belajar di Rumah Saja, ya!* (Haura, 2021), *Prosiding Seminar Nasional Praktik Baik Pendidik Pahlawan PJJ Covid-19* (RPI, 2021), *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global* (Perpusnas Press, 2022), dan *Health Story: Kajian Kesehatan dari Multi Sudut Pandang* (Buku Langka, 2022).

Pada momentum G20 tahun 2022, RPI-Perpusnas Press menerbitkan buku *Pulih Bersama Bangkit Perkasa: Gagasan Optimis dari Indonesia untuk Kebangkitan Dunia Pasca Pandemi Covid-19* 4 jilid (Perpusnas Press, 2022) dan *Recover Together Recover Stronger: Optimistic Ideas from Indonesia for the Resurrection of the World After the Covid-19 Pandemic* 4 volume (Perpusnas Press, 2022). Sedangkan pada *chairmanship* Indonesia pada ASEAN 2023, RPI menerbitkan *ASEAN Episentrum Pertumbuhan: Gagasan Konstruktif Masyarakat Indonesia* (Mata Kata, 2023).

PROFIL EDITOR

YANUARDI SYUKUR adalah anak kedua dari orang tua Rasyidin Syukur dan Haryanti Sjam dan ayah dari lima anak. Leluhurnya merantau dari Panyinggahan (Maninjau, Sumatra Barat) ke Ternate, Galela, dan Tobelo (Maluku Utara). Sejak kecil ia dibesarkan di lingkungan laut dan pelabuhan. Setelah menamatkan SDN 1 Tobelo, ia melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta (1993-1999), kemudian Departemen Antropologi FISIP Unhas (1999-2006), Kajian Timur Tengah dan Islam UI (2008-2010), dan saat ini di Departemen Antropologi FISIP UI (2006-sekarang). Saat ini, ia aktif sebagai dosen (assistant professor) antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Ternate (2011-sekarang), peneliti senior pada *Center for Strategic Policy Studies* (CSPS) SKSG UI dan editor jurnal *Akrab Kemendikbud*. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai guru kemuhammadiyah di Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo & dosen ilmu pemerintahan dan administrasi negara di Universitas Halmahera (2010), dan dosen tidak tetap di antropologi FISIP UI (2017). Ia juga pernah bekerja sebagai Sekretaris Eksekutif Jimly School of Law & Government (2011), Sekretaris Rektor Unkhair (2011-2014), dan pakar antropologi pada program keaksaraan Kemendikbud (2018-2021).

Yanuardi pernah menjadi Ketua Ikatan Santri Konsulat Indonesia Timur OSDN (1996-1997), Ketua Forum Studi Pengembangan Antropologi (2000-sekarang), Ketua Forum Kajian Insani BEM FISIP Unhas (2001-2002), Ketua Keluarga Penerima Beastudi Etos Makassar (2002), Ketua KAMMI Komisariat Unhas (2003-2004), Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Sulsel (2004-2006) & Maluku Utara (2007-2013), Koordinator Divisi Litbang FLP Pusat (2017-2021), Koordinator Alumni MASTERA Esai (2008), Sekjen ISMES (2016-2017), Waketum ILUNI PSKTTI UI (2018-2021), Sekjen Forum Dosen Indonesia (2018-2022), Sekjen *Indonesian Center for Countering Violent Extremism* (2019), Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (2020-2022), Dewan Pakar Gekrafs (2020-sekarang), Dewan Pakar ICMI Muda Malut (2020-sekarang), Ketua Asosiasi Penulis Darunnajah (2022-sekarang), dan Founder & Presiden Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia (2020-sekarang). Ia juga menjadi anggota Dewan Riset Daerah Maluku Utara (2013), Ketua Divisi Publikasi Himpunan Ilmuwan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial Malut (2014), Sekretaris Perhimpunan Profesional Indonesia (2008), anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (sejak 2022), pengurus Policy Center ILUNI UI.

Pada 2019, ia mengikuti U.S Professional Fellow on Religious Freedom & Interfaith Dialogue di Washington, D.C, Pittsburgh dan New York (2019) dan menulis buku *Ada Surga di Maryland: Perjalanan Santri Indonesia di Amerika* (2020). Sebelumnya, ia mengikuti *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* (AIMEP), sebuah program *flagship* Pemerintah Australia di Sydney, Melbourne, dan Canberra (2015), menginisiasi terbitnya buku *Hidup Damai di Negeri Multikultur* (Gramedia, 2017) serta memimpin Forum Alumni Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP). Ia juga pernah menjadi pembicara pada Departemen Asia Tenggara University of Malaya (Kuala Lumpur, 2013), *Asia-Pacific Think Tank Forum* (Bangkok, 2017), dan George Washington University (Washington, D.C, 2019). Ia juga menjadi pembicara pada konferensi internasional Bandung Spirit Network ("Stop the Wars!"; Bandung-Belgrade-Havana Commemorative, 2022; 60 tahun Konferensi Asia-Afrika 2015), MGIMO University ("Russia and ASEAN in the Asia-Pacific Region, 2023), UI (*Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities*, APRiSH; *International Conference on Strategic and Global Studies*, ICSGS, 2018). Pada akhir 2023, ia terpilih sebagai awardee Australia Awards terkait *Foreign Policy: Strategic Equilibrium in the Indo-Pacific* untuk program di Brisbane dan Canberra.

Yanuardi meraih berbagai penghargaan seperti Artikel Berkualitas Tinggi Nomor 1 (UCWe-Media, 2017), Anugerah Bahasa kategori dosen (Kantor Bahasa Maluku Utara, 2017), Pena Award FLP (2013), Nominator Penulis Terpuji FLP (2013), Penulis Produktif (Lepkhair Universitas Khairun, 2013), dan Nominator Buku Nonfiksi FLP (2020). Ia merupakan penerima Alumni Grant Scheme (AGS, 2016) dan Small Grants (2017) dari Pemerintah Australia.

Sejak 2000-sekarang, ia aktif menulis, mengkader penulis, dan membentuk jejaring kolaborasi berbasis tulisan. Beberapa buku yang ia inisiasi, tulis dan edit adalah *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global* (Perpusnas RI, 2022), *Recover Together Recover Stronger* (Perpusnas RI, 2022), *ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia: Gagasan Masyarakat*

Indonesia (Mata Kata, 2023), *Muslim Milenial* (Mizan, 2018), *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia* (Australia Awards, 2018), serta *Faith & Pandemic* (2022). Ia telah menulis lebih 100 buku, diantaranya *Menelusuri Jejak Al Qaeda di Indonesia* (2012), *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Seorang Ulama* (2018), *Literasi Budaya dan Kewargaan* (2019), *Panduan Diplomasi Budaya Indonesia* (2020), dan *Timur Tengah Pasca-Arab Spring* (2021).

Tulisannya juga diterbitkan di jurnal, prosiding, dan majalah seperti *Prosiding Konferensi Sosiologi UGM* (2013), *Prosiding 60 tahun Kontribusi Antropologi Indonesia UI* (2017), *Review of Islam in Southeast Asia/RISEA* (2018), *Journal Misykat Al-Anwar* (2019), *Proceedings of the 2nd International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS)* (2018), *Journal of Study Social Politics of UIN Raden Fatah* (2019) dan *Anthropology Online Journal* (2023). Tulisannya "Family Terrorism - From Family Solidarity and Love to Violence and Hatred" (2022) diterbitkan tiga bahasa (Inggris, Arab, Prancis) oleh *Islamic Military Counter Terrorism Coalition*, koalisi militer anti-terorisme negara-negara Muslim berbasis di Jeddah, Saudi Arabia. Ia adalah ketua tim penulis buku *Kisah Negeri-negeri di Bawah Angin* (2018). Versi Bahasa Inggris, *Tales of the Lands Beneath the Winds-Tracing the Indonesia Archipelago's Maritime Role in the History of the Spice Trade* (2020) menjangkau Spanyol, Swedia, China, India, Thailand, dan Selandia Baru, serta berkontribusi memperkuat pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia.

Dalam riset, Yanuardi pernah terlibat riset terkait analisis sosial perusahaan tambang dan pupuk (Halmahera Timur, 2013; Luwuk Banggai, 2019), radikalisme di perguruan tinggi (Depok & Bandung, 2018), kesiapan masyarakat pesisir menyambut IKN (Penajam Paser Utara, 2020), transformasi BUMN (Jakarta, 2020), etc. Ia aktif di Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfokus pada analisis, kajian, dan respon isu-isu internasional dalam dunia Islam. Bersama tim MUI, ia menulis buku *Diplomasi Wasathiyatul Islam MUI* (Indonesia-Inggris). Secara berkala ia menjadi narasumber di beberapa media seperti TVOne, CNN Indonesia, Trans7, I-News, serta beberapa media seperti *China Daily*, *Anadolu*, *Times Indonesia*, *Benar News*, etc. Ia dapat dihubungi di email: yanuardisyukur@gmail.com.